

Enhancing Governance for Energy Security and Sustainable Future

2024

Laporan Tahunan
Annual Report



Tema dan Kesenambungan Tema

Theme and Theme Continuity

Enhancing Governance for Energy Security and Sustainable Future

Tata Kelola Unggul untuk
Kemandirian Energi dan
Masa Depan Berkelanjutan





Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi PT PLN Indonesia Power yang selanjutnya disebut PLN Indonesia Power atau Perusahaan. Melalui tema “Tata Kelola Unggul untuk Kemandirian Energi dan Masa Depan Berkelanjutan”, Perusahaan menegaskan bahwa tata kelola yang kuat, adaptif, dan berintegritas adalah fondasi utama dalam menciptakan ketahanan energi dan menavigasi transisi menuju sistem energi rendah karbon. Komitmen ini sejalan dengan visi Asta Cita Pemerintah Indonesia yang menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu program prioritas nasional.

Sebagai *subholding* pembangkitan di bawah PLN Group, PLN Indonesia Power memegang peranan strategis dalam mendukung pencapaian target *Net Zero Emissions* (NZE) pada 2060. Perusahaan merespons dengan berbagai inisiatif, mulai dari pengembangan *geothermal*, *cofiring* biomassa di PLTU, pemanfaatan *ammonia* sebagai bahan bakar alternatif, perluasan *solar PV*, hingga pengembangan hidrogen hijau. Untuk mempercepat eksplorasi panas bumi, PLN Indonesia Power menjalin kerja sama dengan *geothermal global player*, sebuah langkah nyata dalam memperkuat sinergi internasional demi mendukung agenda dekarbonisasi dan kedaulatan energi nasional.

Melalui penerapan GCG yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan, PLN Indonesia Power berkomitmen untuk menghadirkan operasional yang efisien, inovasi yang berkelanjutan, dan pelayanan yang andal bagi seluruh pemangku kepentingan. Penerapan tata kelola unggul bukan hanya mencerminkan kepatuhan, tetapi juga menjadi strategi utama dalam akselerasi transformasi bisnis, memperkuat daya saing, dan menciptakan nilai jangka panjang. Guna memastikan implementasi GCG berjalan secara terukur dan objektif, PLN Indonesia Power telah melakukan evaluasi secara berkala menggunakan alat uji *best practice* yang diakui secara nasional maupun internasional.

Atas berbagai inisiatif strategis yang dilakukan, PLN Indonesia Power mendapatkan pengakuan secara nyata dengan meraih sejumlah penghargaan nasional dan internasional atas kinerja inovatif serta dedikasinya dalam transisi energi dan penguatan tata kelola. Ke depan, PLN Indonesia Power akan terus memperkuat kolaborasi, inovasi, dan tata kelola yang berorientasi masa depan sebagai landasan untuk menghadirkan sistem energi nasional yang mandiri, bersih, dan berkelanjutan.

2024 marks an important milestone in the transformation journey of PT PLN Indonesia Power, hereinafter referred to as PLN Indonesia Power or the Company. Through the theme “Enhancing Governance for Energy Security and Sustainable Future,” the Company affirms that resilient, adaptive, and integrity-driven governance is the key foundation in building energy resilience and navigating the transition toward a low-carbon energy system. This commitment aligns with the Government of Indonesia’s Asta Cita vision, which positions energy independence as one of the nation’s strategic priorities.

As the power generation subholding under PLN Group, PLN Indonesia Power plays a strategic role in supporting the achievement of Net Zero Emissions (NZE) by 2060. The Company is proactively responding through various initiatives, including the development of geothermal energy, biomass cofiring at SPP, utilization of ammonia as an alternative fuel, expansion of solar PV, to green hydrogen development. To accelerate geothermal exploration, PLN Indonesia Power has established a partnership with geothermal global player, a concrete step in strengthening international synergies in support of national decarbonization and energy sovereignty agendas.

By implementing transparent, accountable, and sustainability-oriented GCG, PLN Indonesia Power remains committed to delivering efficient operations, continuous innovation, and reliable services for all stakeholders. The adoption of enhanced governance not only reflects regulatory compliance but also serves as a key strategy to accelerate business transformation, add competitiveness, and create long-term value. In order to ensure that GCG implementation is measurable and objective, PLN Indonesia Power regularly conducts evaluations using best practice assessment tools recognized at national and international levels.

As a result of these strategic initiatives, PLN Indonesia Power has received tangible recognition through various national and international awards for its innovative performance and dedication to energy transition and governance enhancement. Looking ahead, PLN Indonesia Power will continue strengthening its focus on collaboration, innovation, and future-oriented governance as the foundation for delivering an independent, clean, and sustainable national energy system.

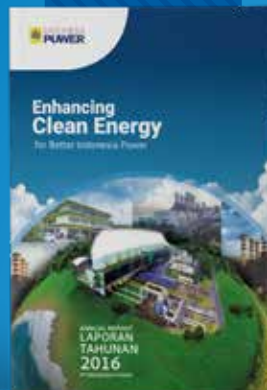
Kesinambungan Tema Theme Continuity

2015



*Excellent Resources to Meet
the Challenge of Growth*

2016



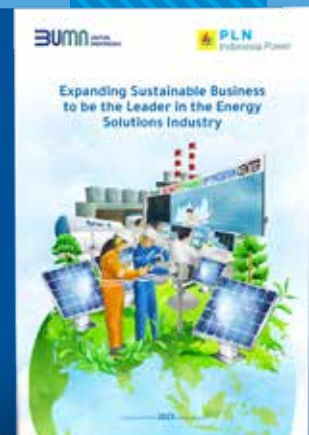
*Enhancing Clean Energy for
Better Indonesia Power*

2017



*The Next Level Through
Human Capital Excellence and
Innovation*

2023



*Expanding Sustainable Business
to be the Leader in the Energy
Solutions Industry*

2021

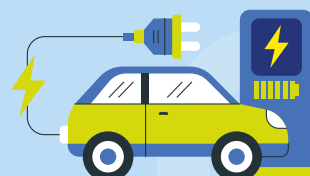


*Raising Future Energy,
Strengthening Sustainability*

2022



*Powering Sustainable and
Prosperous Future*





2018



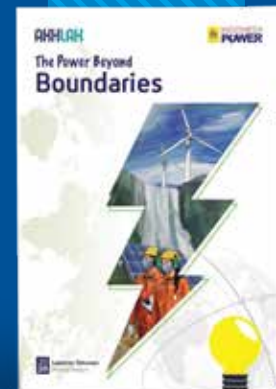
Optimization Performance and Growth Toward Sustainable Business Excellence

2019



Embracing Sustainable Growth through Renewable Energy Development And Digitalization

2020

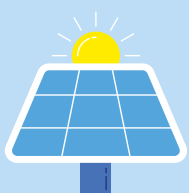
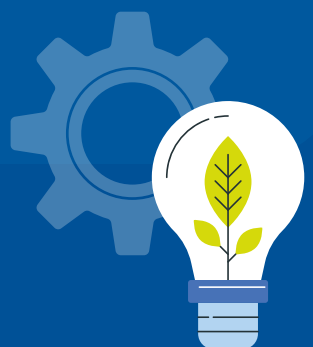
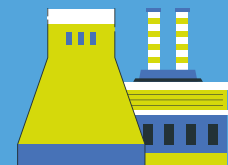


The Power Beyond Boundaries

2024



Enhancing Governance for Energy Security and Sustainable Future



Daftar Isi

Contents

Pendahuluan Introduction



2

Tema dan Kesenambungan Tema
Theme and Theme Continuity 2

Daftar Isi
Contents 6

Kilas Kinerja PLN Indonesia Power
Tahun 2024
PLN Indonesia Power's
Performance Highlights 2024 10

Langkah Menuju Kemandirian
Energi dan Masa Depan
Berkelanjutan
The Journey Toward Energy
Security and Sustainable Future 14

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data Highlights 18

Ikhtisar Saham
Share Overview 27

Ikhtisar Obligasi
Bonds Overview 27

Aksi Korporasi
Corporate Actions 27

Cerita Mereka tentang PLN
Indonesia Power
Their Perspectives on PLN
Indonesia Power 28

Laporan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Report to Shareholder and Stakeholder



31

Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of
Commissioners 32

Laporan Direksi
Report of the Board of Directors 54

Surat Pernyataan Dewan
Komisaris tentang Tanggung
Jawab atas Laporan Tahunan
2024 PT PLN Indonesia Power
Statement from Board of
Commissioners on Accountability
over Annual Report 2024 PT PLN
Indonesia Power 80

Surat Pernyataan Direksi tentang
Tanggung Jawab atas Laporan
Tahunan 2024 PT PLN Indonesia
Power
Statement from Board of Directors
on Accountability over Annual
Report 2024 PT PLN Indonesia
Power 81

Profil Perusahaan Company Profile



83

Identitas Perusahaan
Company Identity 84

Riwayat Singkat dan *Rebranding*
Perusahaan
Brief History and Company
Rebranding 86

Maksud dan Tujuan
Purpose and Objectives 90

Visi, Misi, Motto dan
Kompetensi Inti Perusahaan
Vision, Mission, Motto, and Core
Competencies 92

Tata Nilai dan Budaya
Values and Culture 95

Bidang Usaha
Line of Business 98

Produk dan Layanan
Products and Services 100

Struktur dan Komposisi
Pemegang Saham
Shareholder Structure and
Composition 106

Struktur Organisasi
Organizational Structure 109

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Profile 112

Profil Direksi
Board of Directors' Profile 122

Informasi Perubahan Komposisi
Anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Tahun Buku 2024 dan
Setelah Tahun Buku 2024
Information on Changes in the
Composition of Members of the
Board of Commissioners and
Board of Directors for the 2024
Fiscal Year and After the 2024
Fiscal Year 130

Statistik Jumlah Pegawai PLN
Indonesia Power
PLN Indonesia Power Employee
Statistics 133

Struktur Grup Perusahaan Corporate Group Structure	138
Daftar Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi List of Subsidiaries, Joint Ventures, and Associates	141
Informasi Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada Entitas Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Afiliasi Information on the Composition of Board of Directors and Board of Commissioners in Subsidiaries, Joint Ventures, Associates, and Affiliates	149
Ringkasan Informasi Kinerja Keuangan pada Entitas Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Afiliasi Financial Highlights of Subsidiaries, Joint Ventures, and Affiliates	150
Peta Wilayah Operasi Map of Operational Areas	152
Daftar Alamat Unit List of Unit Addresses	154
Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan Company-Supporting Professional Institutions	157
Informasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) Information on Public Accounting Firms (KAP) and Public Accountants (AP)	160
Kronologis Pencatatan Saham Share Listing Chronology	163
Kronologis Pencatatan Efek Lainnya Other Securities Listing Chronology	163
Keanggotaan Asosiasi Membership in Associations	164
Peristiwa Penting Tahun 2024 Significant Events in 2024	166
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	168
Informasi Situs <i>Website</i> Perusahaan Information on Company Website	180

Tinjauan Pendukung Bisnis Business Support Overview



183

Sumber Daya Manusia Human Capital	184
Teknologi Informasi (TI) Information Technology (IT)	209
Sistem Manajemen Terintegrasi PLN Indonesia Power (PLN IP-IMS) PLN Indonesia Power Integrated Management System (PLN IP-IMS)	227
Pengembangan dan Inovasi Teknologi Pembangkitan Power Generation Technology Development and Innovation	233
Aset Pembangkit Power Generation Assets	240

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis



243

Tinjauan Industri Industry Overview	244
Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar Marketing Aspect and Market Share	251
Tinjauan Kinerja Operasi Per Segmen Operational Performance Overview by Segment	253

Profitabilitas Per Segmen Profitability by Segment	268
Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Overview	269
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Statements of Consolidated Financial Position	270
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income	287
Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statements of Cash Flows	293
Kemampuan Membayar Utang, Kolektibilitas Piutang dan Rasio Keuangan Lainnya Debt Service Ability, Receivables Collectability, and Other Financial Ratios	298
Struktur Modal Capital Structure	308
Aspek Perpajakan Taxation Aspect	310
Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2024 Comparison of Target and Realization in 2024	313
Pencapaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Key Performance Indicator (KPI) Achievement	319
Proyeksi dan Target Tahun 2025 Projection and Target for 2025	322
Kebijakan Dividen Dividend Policy	327
Informasi Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Information on Material Commitments for Capital Goods Investment	329
Investasi Barang Modal Capital Goods Investment	335
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau dengan Pihak Afiliasi/Berelasi Information on Material Transactions containing Conflict- of-Interest and/or Transactions with Affiliates/Related Parties	337

Informasi Material Terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and/or Restructuring	345
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of Proceeds from Public Offering	350
Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts after the Accountant's Report Date	351
Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan Amendments to Accounting Policies and Their Impacts on the Company	351
Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Signifikan dan Dampaknya terhadap Perusahaan Significant Amendments to Laws and Regulations and Their Impacts on the Company	353
Informasi Material yang Luar Biasa dan Jarang Terjadi Material Information on Extraordinary and Rare Events	355
Dampak Perubahan Harga Terhadap Kinerja Perusahaan Impact of Price Change on the Company's Performance	356
Prospek Usaha ke Depan Business Outlook	365

Tata Kelola (Governansi) Perusahaan Corporate Governance



373

Tata Kelola (Governansi) Perusahaan Corporate Governance	374
Dasar Hukum dan Kebijakan Penerapan Governansi Perusahaan Foundation and Policy for Implementing Corporate Governance	375
Tujuan Penerapan Governansi Perusahaan Objectives of Corporate Governance Implementation	379
Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure	379
Strategi Perusahaan dalam Menjaga Konsistensi Kualitas Governansi PLN Indonesia Power PLN Indonesia Power's Strategy in Improving the Quality of Corporate Governance	380
Hasil Penilaian Implementasi Governansi Perusahaan Results of the Company's Corporate Governance Implementation Assessment	383
Roadmap Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Roadmap	383
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	387
Direksi Board of Directors	396
Dewan Komisaris Board of Commissioners	413

Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Work Relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors	439
Keberagaman Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors Compositions	439
Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Nomination and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	442
Kebijakan Penghargaan Berdasarkan Kinerja Jangka Panjang dan Program Kepemilikan Saham Perusahaan Reward Policy Based on Long-Term Performance and Company Share Ownership Program	450
Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs for the Board of Commissioners	450
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary to the Board of Commissioners	451
Komite Audit Audit Committee	453
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	468
Komite Investasi dan Manajemen Risiko Investment and Risk Management Committee	481
Komite di Bawah Direksi Committees under the Board of Directors	494
Komite Sustainability Sustainability Committee	494
Komite Invetasi Investment Committee	501
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	504
Internal Audit Internal Audit	510
Manajemen Risiko Risk Management	523
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	539

Kinerja Ekonomi	644
Economic Performance	
Kinerja aspek Lingkungan	650
Environmental Performance	
Kinerja Aspek Sosial	673
Social Performance	
Kinerja Sosial Aspek Pelanggan	673
Social Performance of Customer Aspect	
Kinerja Sosial Aspek Ketenagakerjaan	686
Social Performance of Employment Aspect	
Kinerja Sosial Aspek Masyarakat	703
Social Performance of Community Aspect	
Laporan Keberlanjutan	720
Sustainability Report	

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Environmental and Social Responsibility 	 623
Strategi Keberlanjutan Melalui Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	624
Sustainability Strategy through the Implementation of Social and Environmental Responsibility	
Tata Kelola Keberlanjutan	635
Sustainability Governance	
Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan	642
Building a Culture of Sustainability	

Kilas Kinerja PLN Indonesia Power Tahun 2024

PLN Indonesia Power's Performance Highlights 2024

Daya Terpasang
Installed Capacity



20.843,51*

MW

* Tidak termasuk jasa O&M
Exclude O&M services

↑ 4,59%

Produksi Listrik
Electricity Productions



87.210,96

GWh

↑ 3,57%

Penjualan Listrik
Electricity Sales



82.535,52

GWh

↑ 3,60%

Pendapatan Usaha
Operating Revenues



Rp110.577.056

juta million

↑ 6,86%

Produksi Energi Listrik, Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT)
Electrical Energy Production from New Renewable Energy (NRE) Generation



10.963,56

GWh

↑ 8,90%

Penjualan Energi Listrik, Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT)
Sales of Electricity from New and Renewable Energy (NRE) Generation



10.635,22

GWh

↑ 8,97%

Laba Bersih
Nett Profit



Rp13.095.866

juta million

↑ 59,91%

Aset
Assets



Rp427.337.432

juta million

↑ 10,65%

EBITDA
EBITDA

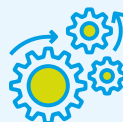


Rp29.999,56

juta million

↓ 7,28%

Commercial Operation Date (COD)



- ▶ **Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara I**
60 MW di Ambon tanggal 5 April 2024
Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara I – 60 MW in Ambon on April 5, 2024

- ▶ **PLTGU Tambak Lorok Blok 3 dengan kapasitas 779 MW tanggal 26 Juni 2024**
Tambak Lorok Gas and CCPP Block 3 – 779 MW on June 26, 2024

Hasil Survei Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Survey Results



- ▶ **Pelanggan Jual Beli Tenaga Listrik**
Electricity Sales Customers

89,72%

↑ 1,56%

- ▶ **Pelanggan Jasa O&M**
O&M Service Customers

88,73%

↑ 3,44%



Pegawai Employees



- Jumlah Pegawai
Number of Employee

5.409

- Skor *Employee Engagement Survey* (EES)
Employee Engagement Survey (EES)
Score

87

↑ 3,49%

- Jumlah Jam Pelatihan
Total Training Hours

395.554 jam hour

dengan rata-rata with an average of

73 jam/pegawai
hour/employee

- Pelatihan Anti Korupsi
Anti-Corruption Training

2.525

pegawai employee

↑ 184%

Penilaian & Evaluasi GCG GCG Assesment & Evaluation



ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ACGS)



PUG-KI 2021



POJK 21/2015

Great Place to Work



86%

karyawan PLN
Indonesia Power
PLN Indonesia Power
employees

- Perusahaan sangat kredibel
Highly credible Company
- Karyawan merasa dihargai
Employees feel appreciated
- Praktik dan kebijakan
Perusahaan adil
Fair Company's practices and policies
- Bangga dengan pekerjaan
yang diterima
Proud of the work received
- Keakraban di organisasi sangat baik
Excellent familiarity in the organization

Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) Fly Ash and Bottom Ash (FABA)

1.703.887,32

Ton

↓ 3,89%

Pemanfaatan FABA, sebagai bentuk komitmen PLN Indonesia Power menjalankan prinsip *Environmental, Social & Governance* (ESG) dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

FABA utilization, to prove PLN Indonesia Power's commitment to implementing the Environmental, Social & Governance (ESG) principles and meeting Sustainable Development Goals.



Bahan Bangunan
& Konstruksi
Building & Construction
Materials

253.325,91

Ton



Industri Semen
& Asbes
Cement & Asbestos
Industry

669.287,92

Ton



Energi Alternatif
Alternative Energy

24,40

Ton



Material Jalan &
Reklamasi Lahan
Road Materials &
Land Reclamation

789.748,94

Ton



Pemanfaatan
Lingkungan & Pertanian
Environmental &
Agricultural Utilization

1.549,61

Ton



Proper Emas
Gold Proper





Proper Hijau
Green Proper





Proper Biru
Blue Proper



1. PLTA HPP Mrica
2. PLTA HPP Saguling
3. PLTG GTPP Pemaron
4. PLTGU CCPP Semarang
5. PLTGU CCPP Cilegon
6. PLTGU CCPP Grati
7. PLTGU CCPP Indralaya
8. PLTGU CCPP Keramasan
9. PLTGU CCPP Priok
10. PLTP GPP Gunung Salak
11. PLTP GPP Lahendong Unit 1-2
12. PLTP GPP Kamojang Drajat
13. PLTU SPP Suralaya
14. PLTU SPP Banten 1 Suralaya
15. PLTU SPP Banten 2 Labua
16. PLTU SPP Banten 3 Lontar
17. PLTU SPP Palabuhan Ratu
18. PLTU SPP Adipala
19. PLTDG DGPP Pesanggaran

1. PLTG GTPP Gilimanuk
2. PLTA HPP Wonogiri
3. PLTU SPP Jeranjang
4. PLTU SPP Barru
5. PLTU SPP Pangkalan Susu 1-2
6. PLTG GTPP Borang
7. PLTA HPP IR PM Noor
8. PLTDG DGPP Tello

1. PLTD DPP Sungai Juara
2. PLTU SPP Tanjung Balai Karimun
3. PLTU SPP Teluk Sirih
4. PLTA HPP Tes
5. PLTA HPP Musi
6. PLTA HPP Maninjau
7. PLTA HPP Singkarak
8. PLTP GPP Ulubelu

9. PLTP GPP Lahendong Unit 3 & 4
10. PLTMG GEPP Bontang
11. PLTGU CCPP Tanjung Batu
12. PLTG GTPP Sambera
13. PLTD DPP Kledang
14. PLTD DPP Karang Asam
15. PLTD DPP Kuala Kapuas
16. PLTG GTPP Trisakti
17. PLTD DPP Kotabaru
18. PLTD DPP Kahayan Baru
19. PLTD DPP Kumai
20. PLTD DPP Baamang
21. PLTU SPP Bengkayang
22. PLTU SPP Asam-asam
23. PLTD DPP Selayar
24. PLTMG GEPP Sei Gelam
25. PLTU SPP Sanggau
26. PLTU SPP Sintang
27. PLTU SPP Berau

PLN Indonesia Power berhasil mendominasi di sektor *Subholding* dan Anak Perusahaan PLN Grup dalam 2 tahun berturut-turut

PLN Indonesia Power has successfully dominated the Subholding and Subsidiary sectors of PLN Group for 2 consecutive years



 **GOLD Kategori Best Performance**
Communication Subholding Anak Perusahaan
GOLD in Best Performance Communication Subholding Subsidiary Category

 **GOLD Kategori Most Popular in Mass Media Subholding Anak Perusahaan dan BRONZE Kategori Media Relation Management**
GOLD in Most Popular in Mass Media Subholding Subsidiary Category and BRONZE in Media Relation Management Category





Apresiasi dari Pemegang Saham

Appreciation from Shareholders



Juara 1 Kategori Unit/SH/AP Terbaik Penyelesaian Klaim Asuransi

1st place in the Best Unit/Subholding/Susidiaries
Category for Insurance Claim Settlement

Juara 2 Kategori *Most Consistent Contributor* untuk Optimasi Pengendalian BPP

2nd place in the Most Consistent Contributor Category
for BPP (Production Cost) Control Optimization

Juara 3 Penyampaian Laporan Keuangan Terbaik 2024

3rd Place in the Best Financial Statements Submission 2024

Kategori Unit/SH/AP Terbaik Penyelesaian Rekomendasi *Risk Survey* Asuransi

Best Best Unit/Subholding/Susidiaries Category for
Settlement of Insurance Risk Survey Recommendations



Penghargaan Sepanjang Tahun 2024*

Awards Throughout 2024*



* Tidak termasuk penghargaan PROPER 2024 yang acara penganugerahannya dilakukan pada 23 Februari 2025.
Not including PROPER 2024 awards whose award ceremony will be held in February 23, 2025.

Langkah Menuju Kemandirian Energi dan Masa Depan Berkelanjutan

The Journey Toward Energy Security and Sustainable Future

Tata Kelola Unggul sebagai Pondasi Transformasi Energi Berkelanjutan

Excellent Governance as the Foundation of Sustainable Energy Transformation



Dalam menghadapi tantangan transisi energi dan mewujudkan masa depan berkelanjutan, PLN Indonesia Power menempatkan tata kelola yang unggul sebagai fondasi utama transformasi bisnis. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya menjadi pedoman operasional, tetapi juga memperkuat sistem manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Budaya kepatuhan terus dibangun dan diinternalisasi oleh seluruh insan perusahaan. Untuk menjamin efektivitas tata kelola, perusahaan secara berkala melakukan asesmen menggunakan parameter *best practice* seperti *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS), POJK 21, dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI). Pendekatan ini memastikan bahwa proses bisnis dijalankan secara *prudent*, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap dinamika regulasi dan tantangan usaha.

In addressing the challenges of energy transition and realizing a sustainable future, PLN Indonesia Power places excellent governance as the main foundation of its business transformation. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles not only serves as an operational guideline but also strengthens the Company's risk management system and compliance with prevailing laws and regulations. A culture of compliance continues to be cultivated and internalized across all levels of the organization. In order to ensure governance effectiveness, the Company conducts regular assessments using best practice parameters such as the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), POJK 21, and General Guidelines for Corporate Governance of Indonesia (PUG-KI). This approach ensures that business processes are carried out prudently, responsibly, and adaptable in responding to regulatory dynamics and business challenges.



Komitmen kuat terhadap tata kelola dan kepatuhan dibuktikan dengan capaian dua penghargaan bergengsi dalam ajang *Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2025*. PLN Indonesia Power meraih penghargaan *Sapphire Sector Electricity*, sebagai perusahaan sektor ketenagalistrikan terbaik dalam kepatuhan regulasi, serta penghargaan *The Most Inspiring Leader in Regulatory Compliance* yang diberikan kepada Endang Astharanti, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Penghargaan *Sapphire* merupakan level tertinggi IRCA dan diberikan kepada entitas yang dinilai berhasil menunjukkan kepatuhan luar biasa terhadap regulasi serta penerapan sistem ISO 37301:2021 *Compliance Management* secara menyeluruh, sebagai bentuk komitmen pada integritas dan tata kelola perusahaan yang kuat. Sistem kepatuhan yang berkelanjutan dan adaptif menjadi bagian integral dari transformasi energi PLN Indonesia Power menuju arah yang lebih hijau, berkelanjutan, dan kompetitif secara global.

A strong commitment to governance and compliance is evidenced by the achievement of two prestigious awards in the Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2025. PLN Indonesia Power was honored with the Sapphire Sector Electricity award as the best-performing electricity sector company in regulatory compliance, along with the Most Inspiring Leader in Regulatory Compliance award granted to Endang Astharanti, Director of Finance and Risk Management. The Sapphire Award represents the highest recognition in the IRCA and is presented to entities demonstrating exceptional regulatory compliance and comprehensive implementation of the ISO 37301:2021 Compliance Management System, highlighting a steadfast commitment to integrity and solid corporate governance. The development of a sustainable and adaptive compliance system, forming an integral part of PLN Indonesia Power's green, sustainable, and globally competitive energy transition journey.

Inovasi Energi Bersih untuk Kemandirian Energi Innovation for Clean Energy for Energy Security



PLN Indonesia Power terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung transisi menuju masa depan rendah karbon dan mewujudkan kemandirian energi nasional melalui serangkaian inovasi energi bersih. Salah satu terobosan strategis adalah pembangunan *Hydrogen Refueling Station* (HRS) pertama di Indonesia yang berlokasi di Senayan, Jakarta. Fasilitas ini menjadi bagian dari pengembangan ekosistem hidrogen nasional secara *end-to-end*, mulai dari produksi hingga distribusi. Hidrogen yang digunakan di HRS pasok dari *Green Hydrogen Plant* (GHP) berbasis panas bumi di PLTP Kamojang, menjadikannya sebagai fasilitas produksi hidrogen hijau pertama di Asia Tenggara. Hingga akhir 2024, PLN Indonesia Power telah mengoperasikan 13 GHP dengan total kapasitas produksi mencapai 80 ton hidrogen hijau per tahun.

Selain inovasi di sektor hidrogen, PLN Indonesia Power juga mencatat pencapaian signifikan dalam upaya dekarbonisasi melalui implementasi teknologi *cofiring* biomassa di PLTU. Sepanjang tahun 2024, teknologi ini berhasil menghasilkan 814 GWh energi hijau dan menurunkan emisi karbon hingga 921.119 ton CO₂, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap batubara dan memperkuat pasokan energi yang lebih ramah lingkungan.

Atas berbagai inisiatif tersebut, PLN Indonesia Power meraih Penghargaan Subroto 2024, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam pengembangan energi terbarukan dan dukungannya terhadap agenda transisi energi nasional. Penghargaan ini memperkuat dorongan bagi PLN Indonesia Power untuk terus memimpin transformasi energi menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Selain itu, komitmen perusahaan dalam pelaporan keberlanjutan mendapat pengakuan melalui diraihnya *Platinum Rank Trophy* dalam ajang *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) 2024 yang mencerminkan kualitas pelaporan serta kontribusi nyata PLN Indonesia Power dalam pengurangan emisi karbon, pengembangan energi bersih, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan di tingkat Asia.



PLN Indonesia Power continues to demonstrate a strong commitment to supporting the transition toward a low-carbon future and achieving national energy security through a series of clean energy innovations. One of its key strategic breakthroughs is the development of Indonesia's first Hydrogen Refueling Station (HRS), located in Senayan, Jakarta. This facility forms part of the country's end-to-end hydrogen ecosystem, starting from production to distribution. The hydrogen used at the HRS is supplied by a geothermal-based Green Hydrogen Plant (GHP) at the GPP Kamojang, making it the first green hydrogen production facility in Southeast Asia. As of the end of 2024, PLN Indonesia Power has operated 13 GHPs with a combined production capacity of 80 tons of green hydrogen per year.

In addition to innovations in the hydrogen sector, PLN Indonesia Power has also achieved significant progress in decarbonization by implementing biomass cofiring technology at SPP. In 2024, this technology successfully generated 814 GWh of green energy and reduced carbon emissions by up to 921,119 tons of CO₂, thereby decreasing reliance on coal and strengthening the supply of environmentally friendly energy.

In recognition of these efforts, PLN Indonesia Power received 2024 Subroto Awards, acknowledging its contributions to renewable energy development and support for the national energy transition agenda. These awards strengthens the encouragement for PLN Indonesia Power to continue leading the energy transformation towards a greener and more sustainable future.

Moreover, the Company's dedication to sustainability reporting has been recognized with the Platinum Rank Trophy at the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024. This award reflects the quality of PLN Indonesia Power's reporting and tangible contributions to carbon emission reductions, clean energy development, and sustainable community empowerment at the Asian level.



Kolaborasi untuk Kemandirian Energi: Sinergi, Solusi, dan Aksi Nyata

Collaborating for Energy Security: Synergy, Solutions, and Concrete Actions



Sepanjang 2024, PT PLN Indonesia Power menegaskan komitmennya sebagai pelopor kemandirian energi melalui beragam kolaborasi strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di kancah global, kerja sama dijalin dengan Tanzania Geothermal Development Company dan INPEX Geothermal untuk mendorong pengembangan panas bumi lintas negara, sebagai bagian dari diplomasi energi dan transisi menuju energi bersih. PLN Indonesia Power juga menandatangani *Green Hydrogen Purchase Agreement* dengan PT Pupuk Indonesia dan ACWA Power guna membentuk rantai pasok hidrogen hijau sebagai solusi dekarbonisasi industri.

Di dalam negeri, Bank Indonesia memberi kepercayaan kepada PLN Indonesia Power untuk memanfaatkan limbah racik uang kertas (LRUK) sebagai bahan *co-firing* di PLTU, sebuah inovasi energi sekaligus solusi pengelolaan limbah. Berbagai aksi nyata ini mencerminkan langkah terintegrasi PLN Indonesia Power dalam membangun sistem energi nasional yang tangguh, hijau, dan mandiri melalui sinergi lintas batas dan solusi yang berdampak langsung bagi masa depan energi Indonesia.

Dengan semangat inovasi dan kolaborasi strategis, PLN Indonesia Power terus mengukuhkan perannya sebagai penggerak utama transformasi energi nasional, sejalan dengan target *Net Zero Emission* 2060.



Throughout 2024, PT PLN Indonesia Power affirmed its commitment as a pioneer in energy independence through various strategic collaborations, both at the national and international levels. On the global stage, cooperation was established with Tanzania Geothermal Development Company and INPEX Geothermal to encourage cross-country geothermal development, as part of energy diplomacy and the transition to clean energy. PLN Indonesia Power also signed a *Green Hydrogen Purchase Agreement* with PT Pupuk Indonesia and ACWA Power to form a green hydrogen supply chain as a solution for industrial decarbonization.

Domestically, Bank Indonesia has entrusted PLN Indonesia Power to utilize banknote recycling waste (LRUK) as a co-firing material in SPP, an energy innovation as well as a waste management solution. These various real actions reflect PLN Indonesia Power's integrated steps in building a resilient, green, and independent national energy system through cross-border synergy and solutions with direct impact on Indonesia's energy future.

With a spirit of innovation and strategic collaboration, PLN Indonesia Power continues solidifying its role as a key driver of the national energy transformation, aligned with the *Net Zero Emission* 2060 target.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Data Highlights

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Posisi Keuangan Financial Position	2020	2021	2022*	2023	2024
Jumlah Aset Total Assets	200.011.263	193.713.794	374.409.423	386.200.863	427.337.432
Aset Lancar Current Assets	37.189.744	34.232.232	38.748.404	62.191.430	81.056.348
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	162.821.519	159.481.562	335.661.019	324.009.433	346.281.084
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	16.067.595	15.312.157	31.387.319	40.745.537	53.946.034
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	7.314.262	5.894.646	8.155.329	12.620.923	17.311.892
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	8.753.333	9.417.511	23.231.990	28.124.614	36.634.142
Jumlah Ekuitas Total Equity	183.943.668	178.401.637	343.022.104	345.455.326	373.391.398
Modal Kerja Working Capital	29.875.482	28.337.592	30.593.075	49.570.507	63.744.456

* Disajikan kembali As restated

Laba Rugi Profit Loss	2020	2021	2022*	2023	2024
Pendapatan Usaha Revenue	38.740.449	38.519.859	81.090.566	103.480.111	110.577.056
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	21.011.210	19.907.755	64.371.392	101.934.634	108.706.764
Pendapatan dari Konsesi Jasa Revenue from Service Concession	14.259.159	14.656.755	15.541.932	268.658	256.344
Pendapatan Jasa Service Revenue	3.470.080	3.955.349	1.177.242	1.276.819	1.613.948
Beban Usaha Operating Expenses	26.884.270	32.429.534	73.052.127	83.553.102	93.695.863
Laba Usaha Operating Income	11.856.179	6.090.325	8.038.439	19.927.009	16.881.193
Laba Sebelum Pajak Profit before Tax	12.773.358	5.909.311	7.812.498	10.680.986	16.763.426
(Manfaat) Beban Pajak Tax (Benefit)/Expenses	(2.549.287)	(1.878.157)	(3.128.838)	(2.491.672)	(3.667.560)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	10.224.071	4.031.154	4.683.660	8.189.314	13.095.866
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk attributable to Owners of the Parent	10.218.256	4.027.169	4.678.605	8.176.665	13.090.663
diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali attributable to Non-Controlling Interest	5.815	3.985	5.055	12.649	5.203
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income for the Year	(858.375)	646.237	1.226.472	9.055	22.779.456
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	9.365.696	4.677.391	5.910.132	8.198.369	35.875.322
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk attributable to Owners of the Parent	9.359.881	4.673.406	5.905.077	8.185.720	35.870.070
diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali attributable to Non-Controlling Interest	5.815	3.985	5.055	12.649	5.252
Laba per Saham (Rp penuh) Basic Earnings per Share (in Rp full amount)	1.959	773	13	23	37

* Disajikan kembali As restated



Rasio Keuangan Financial Ratios	2020	2021	2022*	2023	2024
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio					
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	37,53	46,93	45,15	28,02	26,40
Rasio Cepat (%) Quick Ratio (%)	505,91	557,23	414,12	450,90	438,46
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	526,60	580,73	475,13	492,76	468,21
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio					
Margin Operasi (%) Operating Profit Margin (%)	30,60	15,81	9,91	19,26	15,27
Margin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	26,39	10,47	5,78	7,91	11,84
Tingkat Pengembalian Ekuitas (%) Return on Equity (%)	5,89	2,31	1,38	2,43	3,51
Tingkat Pengembalian Investasi (%) Return on Investment (%)	7,55	4,80	4,74	8,12	7,07
Tingkat Pengembalian Aset (%) Return on Assets (%)	5,11	2,08	1,25	2,12	3,06
Rasio Solvabilitas Solvency Ratios					
Rasio Utang terhadap Aset (%) Debt to Total Assets Ratio (%)	8,03	7,90	8,38	10,55	12,62
Rasio Utang Terhadap Modal (%) Debt to Total Equity Ratio (%)	8,74	8,58	9,15	11,79	14,45
Rasio Aktivitas Activity Ratios					
Perputaran Persediaan (hari) Inventory Turnover (day)	13,37	12,36	22,39	18,64	17,00
Periode Penagihan (hari) Collection Period (day)	262,16	275,34	130,49	141,25	200,70
Perputaran Aset (%) Asset Turnover (%)	19,87	20,51	22,17	27,43	26,05

* Disajikan kembali As restated

Ikhtisar Operasi Operational Highlights

Kinerja Pembangkit Power Plant Performance	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Tenaga Listrik (GWh)* Electricity Production (GWh)*	34.771,54	39.230,81	37.510,12	84.205,29	87.210,96
Penjualan Tenaga Listrik (GWh)* Sale of Electricity (GWh)*	33.264,98	37.590,11	35.935,34	79.670,26	82.535,52
Daya Terpasang Pembangkit (MW)** Power Plant Installed Capacity (MW)**	9.093,13	9.124,72	9.031,41	19.927,90	20.843,51
CF Pembangkit (%) Power Plant CF (%)	45,80	51,82	51,05	51,21	51,39
CF Pembangkit PLTU Batubara (%) Coal SPP CF (%)	75,87	80,87	78,44	69,06	69,08
CF Pembangkit Non PLTU Batubara (%) Non-Coal SPP CF (%)	26,68	33,40	32,81	35,63	36,37
EAF Pembangkit Power Plant EAF					
EAF Pembangkit PLTU Batubara (%) Coal SPP EAF (%)	86,22	86,16	86,82	84,08	85,21
EAF Pembangkit Non PLTU Batubara (%) Non-Coal SPP EAF (%)	96,57	95,62	95,28	94,52	93,82
EFOR Pembangkit Power Plant EFOR					
EFOR Pembangkit PLTU Batubara (%) Coal SPP EFOR (%)	2,26	3,51	2,85	5,31	4,67
EFOR Pembangkit Non PLTU Batubara (%) Non-Coal SPP EFOR (%)	0,41	0,58	0,37	1,50	1,03
SFC Pembangkit*** Power Plant SFC***					
SFC Pembangkit - Batubara (kg/kWh) Coal Power Plant SFC (kg/kWh)				0,6282	0,6555
SFC Pembangkit - Gas (MMBTU/kWh) Gas Power Plant SFC (MMBTU/kWh)				0,0083	0,0082
SFC Pembangkit - BBM (liter/kWh) Oil Power Plant SFC (liter/kWh)				0,2960	0,3045

* tahun 2023 disajikan kembali karena pengoperasian PLHS Nusa Penida dan PLTS Muara Nusa Dua in 2023 restated due to the operation of SHPP Nusa Penida and SoPP Muara Nusa Dua

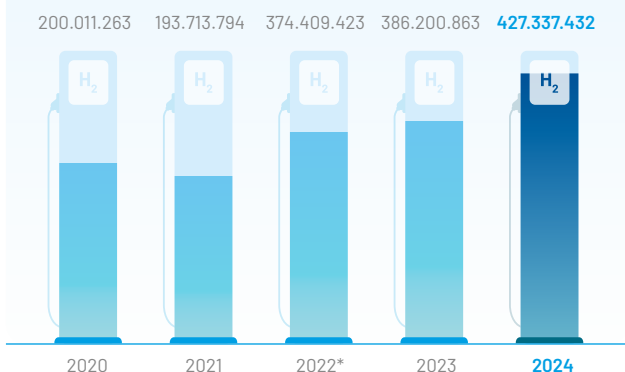
** tidak termasuk jasa O&M Exclude O&M services

*** tahun 2020 - 2022 belum menjadi KPI in 2022 - 2022 it has not yet become a KPI

Kinerja Perusahaan Lainnya Other Performances	2020	2021	2022	2023	2024
Pencapaian KPI (skor) Key Performance Indicator (score)	98,17	98,44	101,24	103,4	105,56
Jumlah Pegawai (pegawai) Number of Employees (employee)	4.216	4.221	4.189	5.452	5.409

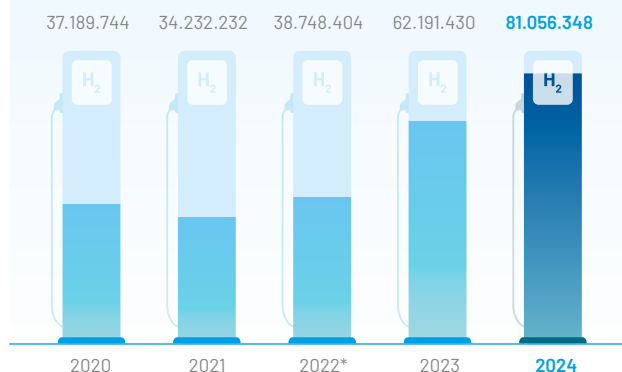
Grafik Jumlah Aset (Rp juta)

Chart of Total Assets (Rp million)



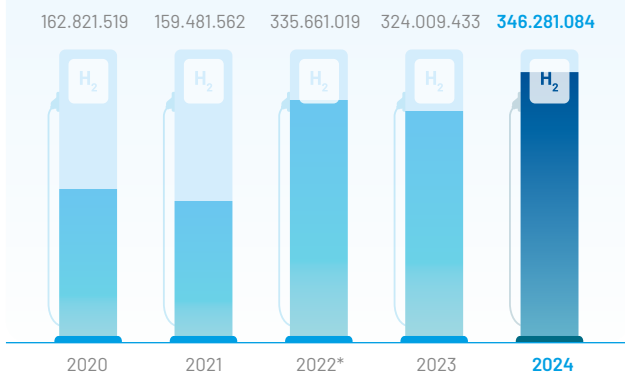
Grafik Aset Lancar (Rp juta)

Chart of Current Assets (Rp million)



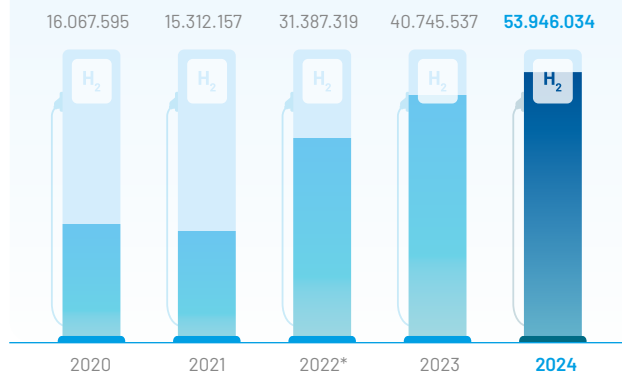
Grafik Aset Tidak Lancar (Rp juta)

Chart of Non-Current Assets (Rp million)



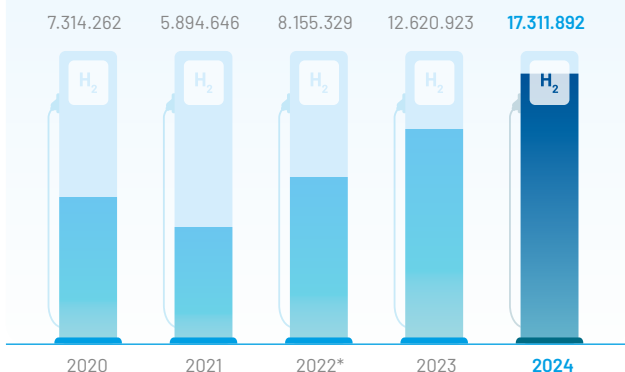
Grafik Jumlah Liabilitas (Rp juta)

Chart of Total Liabilities (Rp million)



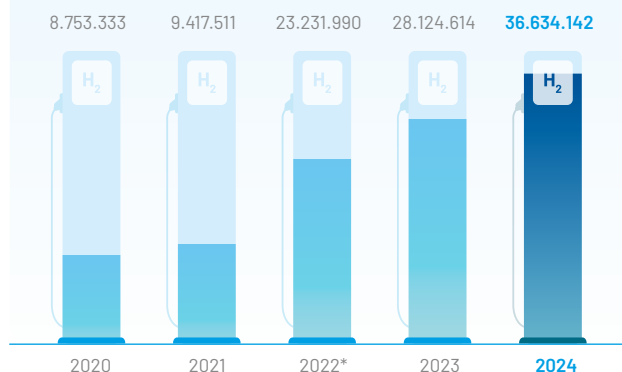
Grafik Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)

Chart of Current Liabilities (Rp million)



Grafik Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)

Chart of Non-Current Liabilities (Rp million)



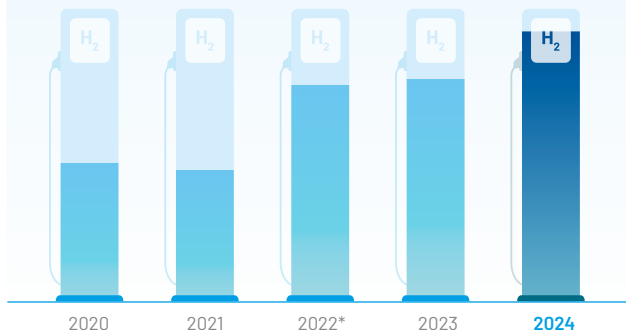
* Disajikan kembali As restated



Grafik Jumlah Ekuitas (Rp juta)

Chart of Total Equity (Rp million)

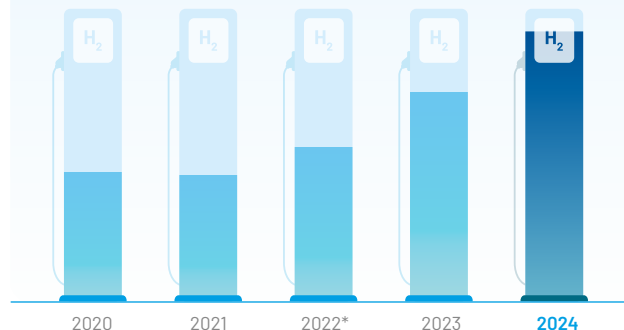
183.943.668 178.401.637 343.022.104 345.455.326 **373.391.398**



Grafik Modal Kerja (Rp juta)

Chart of Working Capital (Rp million)

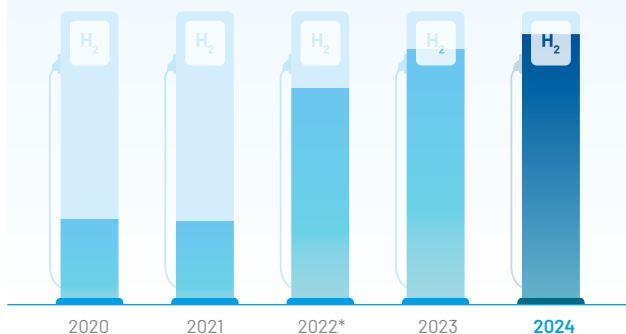
29.875.482 28.337.592 30.593.075 49.570.507 **63.744.456**



Grafik Pendapatan Usaha (Rp juta)

Chart of Revenue (Rp million)

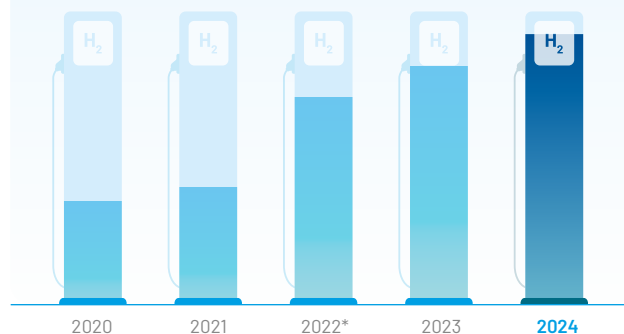
38.740.449 38.519.859 81.090.566 103.480.111 **110.577.056**



Grafik Beban Usaha (Rp juta)

Chart of Operating Expenses (Rp million)

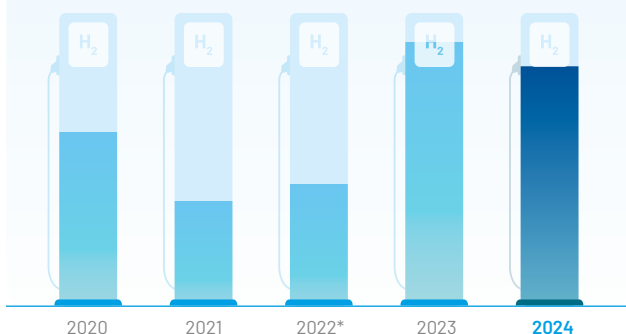
26.884.270 32.429.534 73.052.127 83.553.102 **93.695.863**



Grafik Laba Usaha (Rp juta)

Chart of Operating Income (Rp million)

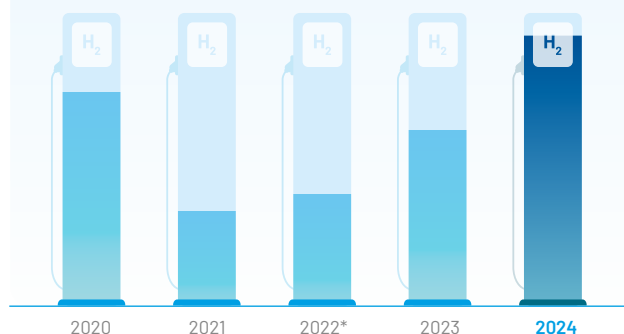
11.856.179 6.090.325 8.038.439 19.927.009 **16.881.193**



Grafik Laba Sebelum Pajak (Rp juta)

Chart of Income before Tax (Rp million)

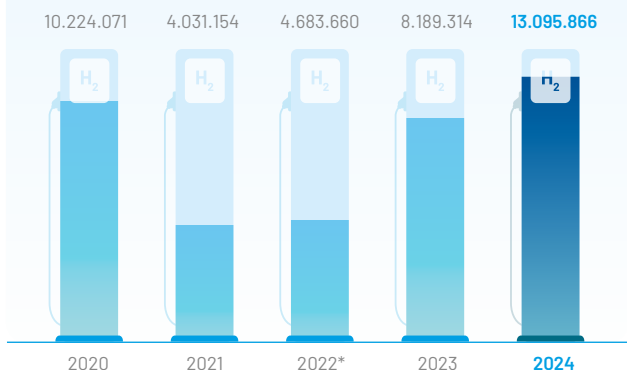
12.773.358 5.909.311 7.812.498 10.680.986 **16.763.426**



* Disajikan kembali As restated

Grafik Laba Tahun Berjalan (Rp juta)

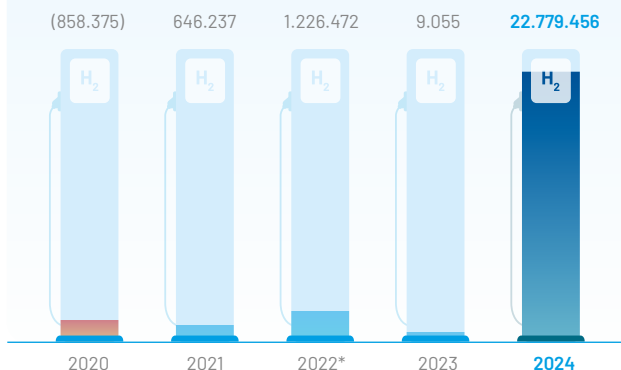
Chart of Profit for the Year (Rp million)



Grafik Penghasilan Komprehensif Lain

Tahun Berjalan (Rp juta)

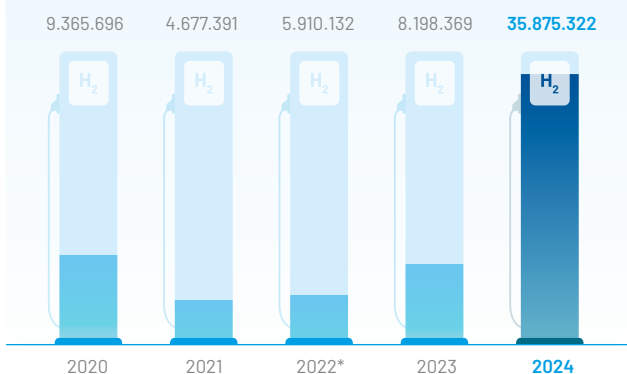
Chart of Other Comprehensive Income for the Year (Rp million)



Grafik Jumlah Penghasilan Komprehensif

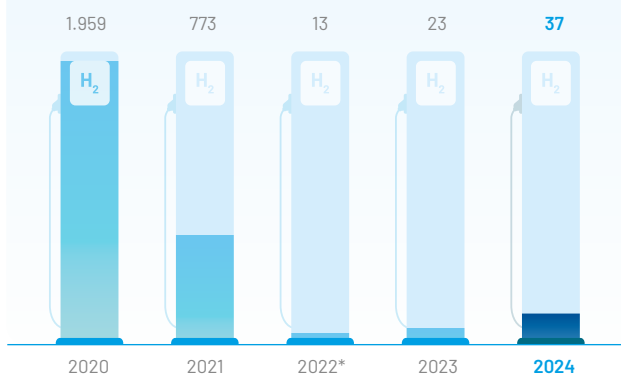
Tahun Berjalan (Rp juta)

Chart of Total Comprehensive Income for the Year (Rp million)



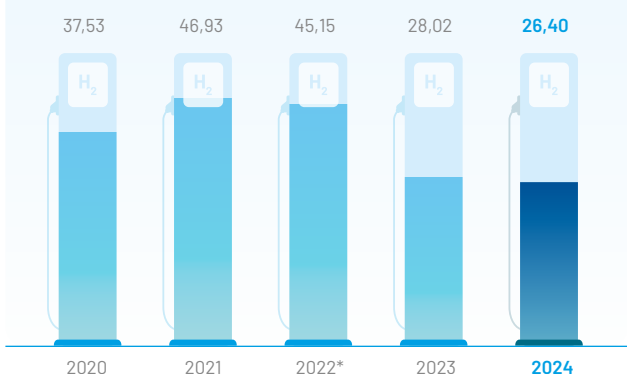
Grafik Laba per Saham (Rp)

Chart of Basic Earnings per Share (Rp)



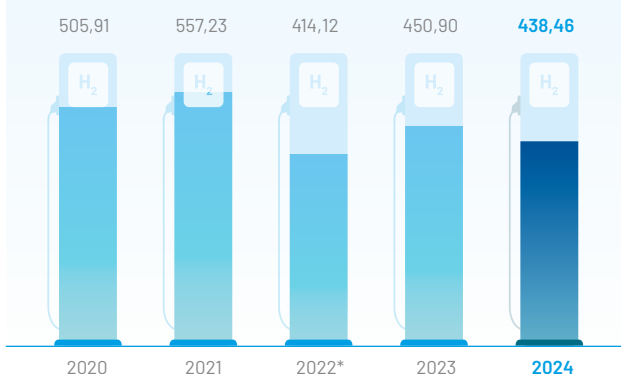
Grafik Rasio Kas (%)

Chart of Cash Ratio (%)



Grafik Rasio Cepat (%)

Chart of Quick Ratio (%)

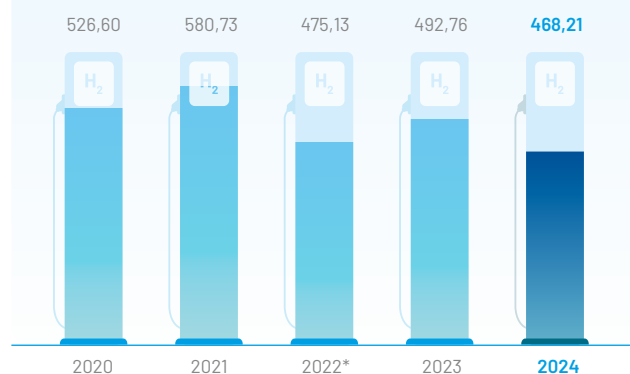


* Disajikan kembali As restated



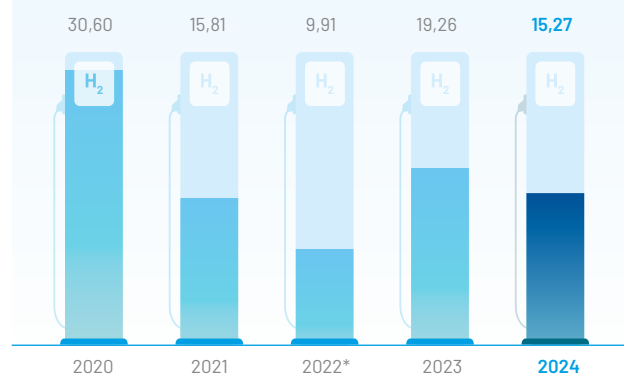
Grafik Rasio Lancar (%)

Chart of Current Ratio (%)



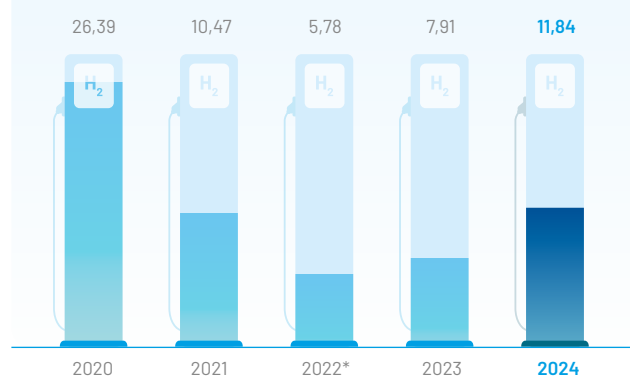
Grafik Margin Operasi (%)

Chart of Net Profit Margin (%)



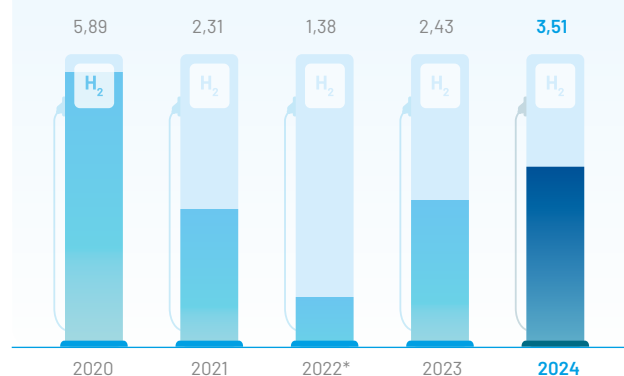
Grafik Margin Laba Bersih (%)

Chart of Net Profit Margin (%)



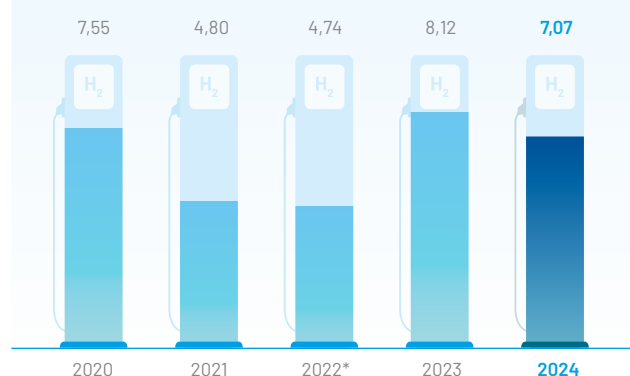
Grafik Tingkat Pengembalian Ekuitas (%)

Chart of Return on Equity (%)



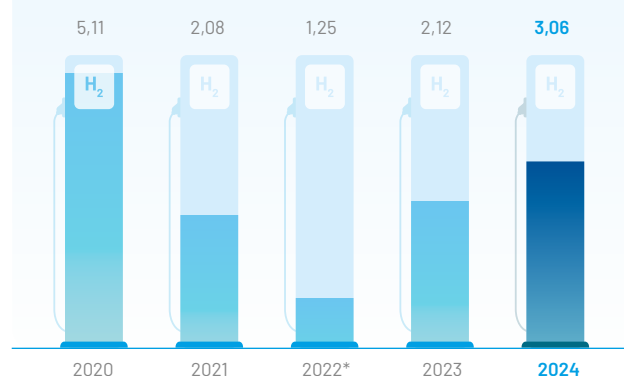
Grafik Tingkat Pengembalian Investasi (%)

Chart of Return on Investment (%)



Grafik Tingkat Pengembalian Aset (%)

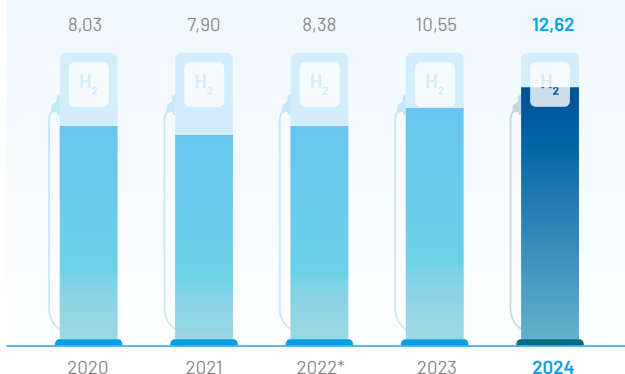
Chart of Return on Assets (%)



* Disajikan kembali As restated

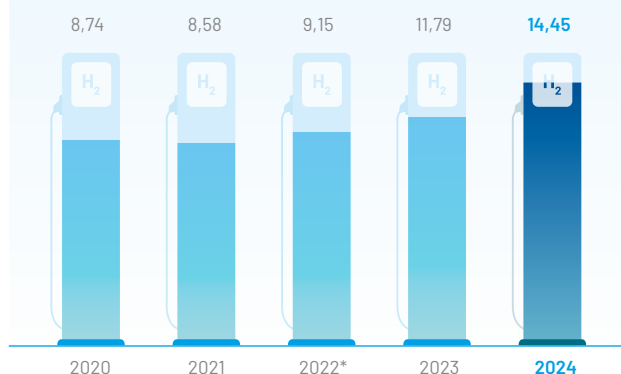
Grafik Rasio Utang terhadap Aset (%)

Chart of Debt to Total Assets Ratio (%)



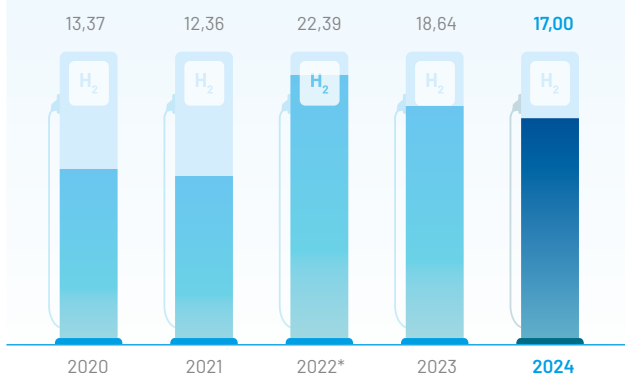
Grafik Rasio Utang Terhadap Modal (%)

Chart of Debt to Total Equity Ratio (%)



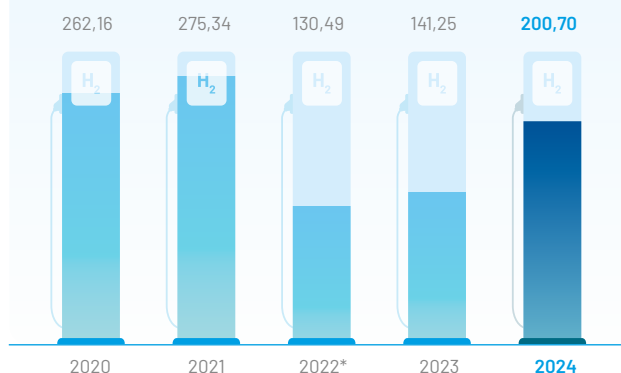
Grafik Perputaran Persediaan (hari)

Chart of Inventory Turnover (day)



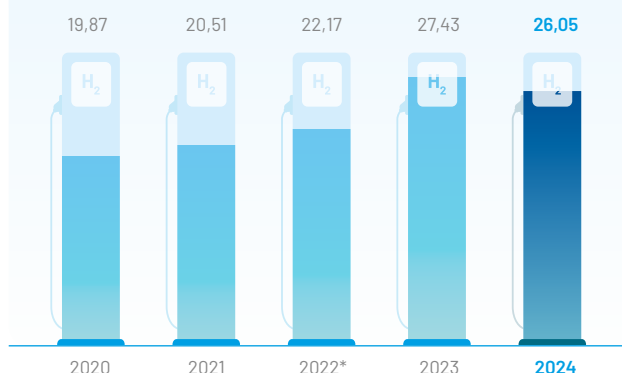
Grafik Periode Penagihan (hari)

Chart of Collection Period (day)



Grafik Perputaran Aset (%)

Chart of Asset Turnover (%)

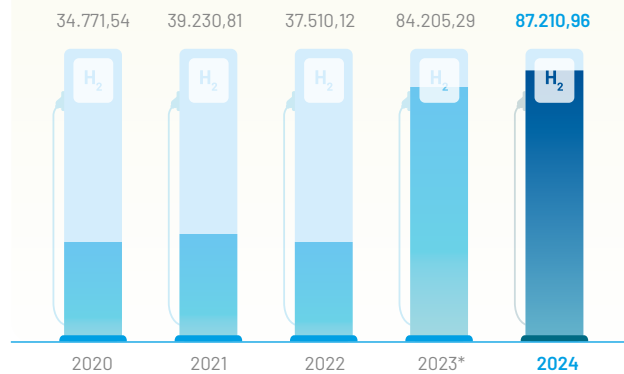


* Disajikan kembali As restated



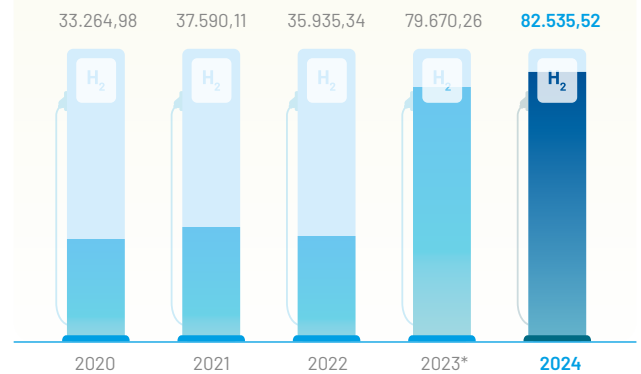
Grafik Produksi Tenaga Listrik (GWh)

Chart of Sales of Production (GWh)



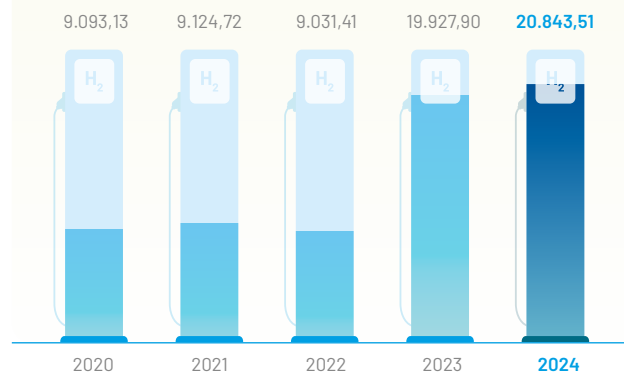
Grafik Penjualan Tenaga Listrik (GWh)

Chart of Sales of Electricity (GWh)



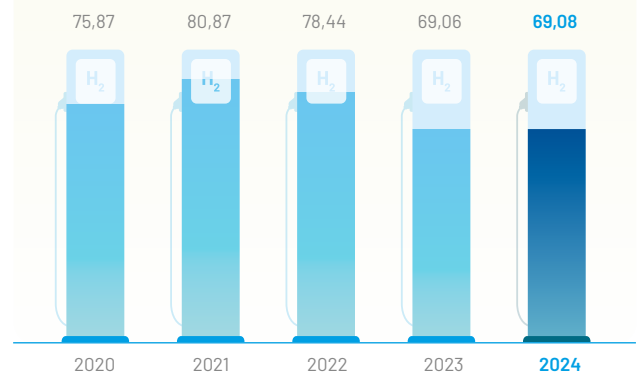
Grafik Daya Terpasang Pembangkit (MW)**

Chart of Power Plant Installed Capacity (MW)**



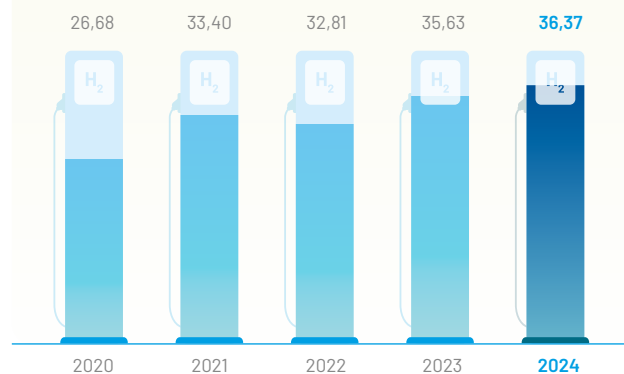
Grafik CF Pembangkit PLTU Batubara (%)

Chart of Coal SPP CF (%)



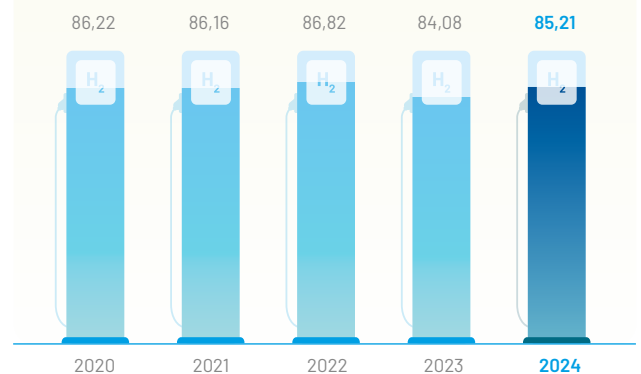
Grafik CF Pembangkit Non PLTU Batubara (%)

Chart of Non-Coal SPP CF (%)



Grafik EAF Pembangkit PLTU Batubara (%)

Chart of Coal SPP EAF (%)

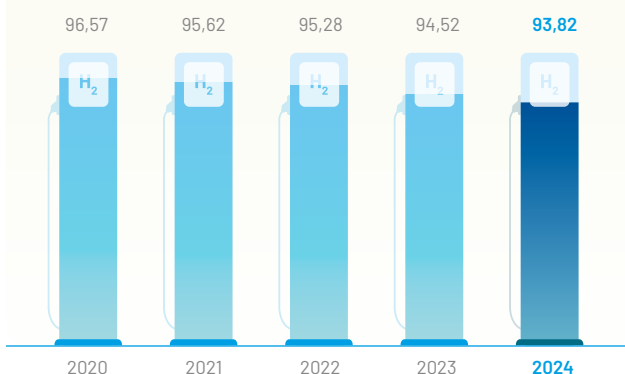


* disajikan kembali karena pengoperasian PLHS Nusa Penida dan PLTS Muara Nusa Dua restated due to the operation of SHPP Nusa Penida and SoPP Muara Nusa Dua

** tidak termasuk jasa O&M Exclude O&M services

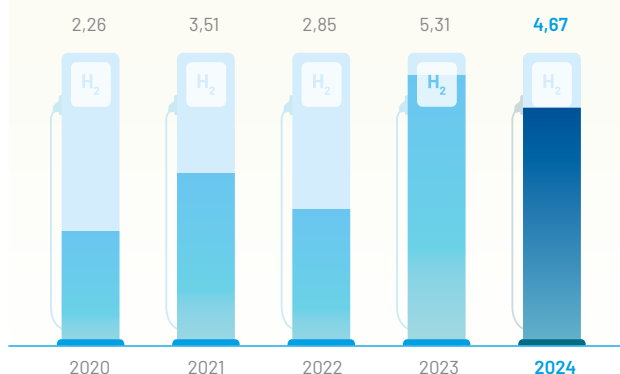
Grafik EAF Pembangkit Non PLTU Batubara (%)

Chart of Non-Coal SPP EAF (%)



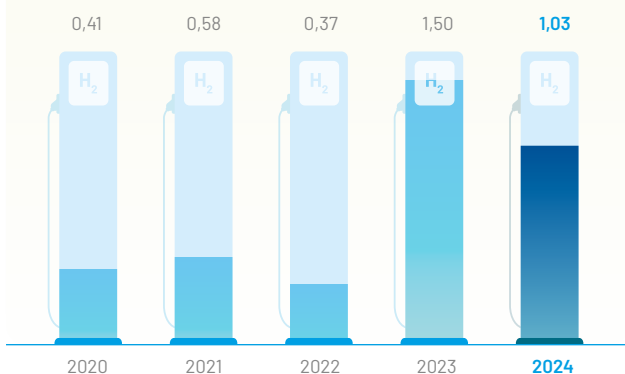
Grafik EFOR Pembangkit PLTU Batubara (%)

Chart of Coal SPP EFOR (%)



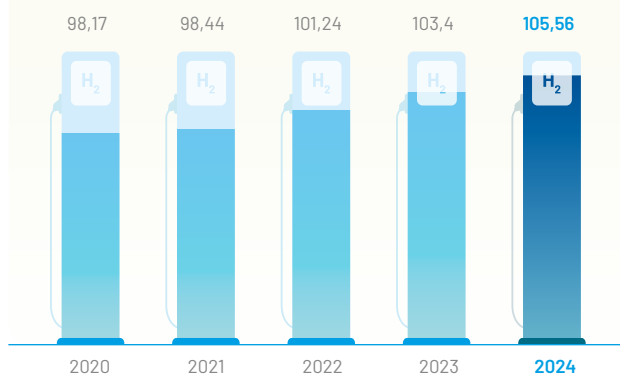
Grafik EFOR Pembangkit Non PLTU Batubara (%)

Chart of Non-Coal SPP EFOR (%)



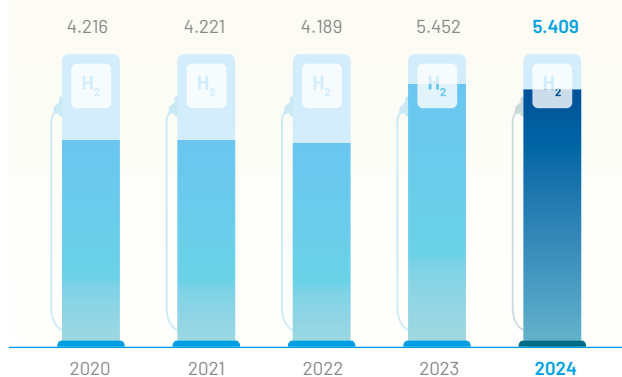
Grafik Pencapaian KPI (skor)

Key Performance Indicator (score)



Grafik Jumlah Pegawai (pegawai)

Chart of Number of Employees (employee)





Ikhtisar Saham

Share Overview

Sampai dengan akhir tahun 2024, PLN Indonesia Power tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

Jumlah saham beredar PLN Indonesia Power adalah sebanyak 357.165.633.600 lembar saham yang terdiri dari 1 lembar saham Seri 1 dan 357.165.633.599 saham Seri 2.

Until the end of 2024, PLN Indonesia Power had not had its shares listed and traded and therefore no information is available regarding the number of shares, market capitalization, highest share prices, lowest share prices, closing share prices, and volume of shares traded.

There is a total of 357,165,633,600 PLN Indonesia Power's outstanding shares, consisting of 1 Series 1 share and 357,165,633,599 Series 2 shares.

Ikhtisar Obligasi

Bonds Overview

Sampai dengan akhir tahun 2024, PLN Indonesia Power tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

Until the end of 2024, PLN Indonesia Power had not issued any bonds, sukuk, and convertible bonds and therefore no information is available pertaining to the total bonds/sukuks/convertible bonds issued, interest rate/yield, maturity date, and ratings of the bonds/sukuks.

Aksi Korporasi

Corporate Action

Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power telah melakukan aksi korporasi sebagai tindak lanjut *Holding Subholding* PLN Group mendukung keselarasan strategi pengembangan bisnis PT PLN (Persero). PLN Indonesia Power melakukan jual beli saham (pengalihan saham) PT Perta Daya Gas pada tanggal 29 Oktober 2024 kepada PT PLN Energi Primer Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Saham No. 83 oleh Notaris Syahreza Annaz, S.H., M.Kn.

In 2024, PLN Indonesia Power executed a corporate action as a follow-up to the Holding Sub Holding PLN Group to support the alignment of PT PLN (Persero)'s business development strategy. PLN Indonesia Power executed a sale and purchase of shares (transfer of shares) of PT Perta Daya Gas on October 29, 2024 to PT PLN Energi Primer Indonesia as stated in the Deed of Sale and Purchase of Shares No. 83, made before Notary Syahreza Annaz, S.H., M.Kn.

Cerita Mereka tentang PLN Indonesia Power

Their Perspectives on PLN Indonesia Power



Wawan Wardiana

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK
Deputy for Education and Community Participation, KPK

KPK sangat mengapresiasi dengan apa yang telah dilakukan PLN Indonesia Power sudah berjalan dengan KPK dengan melengkapi elemen pencegahan melalui perangkat yang dimiliki, karena saya percaya keinginan untuk berbuat curang akan selalu ada dan dengan kelengkapan pencegahan yang baik tindakan korupsi bisa dicegah.

The Corruption Eradication Commission (KPK) highly appreciates the efforts made by PLN Indonesia Power, which align well with KPK's focus on strengthening preventive measures through the use of available tools and systems, I firmly believe that the temptation to commit fraud will always exist, but with robust preventive mechanisms, acts of corruption can be effectively deterred.

Sumber IPWN Edisi 49 Source IPWN 49th Edition



Darmawan Prasodjo

Direktur Utama PT PLN (Persero)
President Director, PT PLN (Persero)

Saya merasa bangga dengan capaian luar biasa dari PLN Grup yang mendapatkan penghargaan yang banyak sekali, termasuk 7 penghargaan PLN Indonesia Power yang artinya pengelolaan pembangkit kita adalah sesuai dengan prosedur, dimana kualitas dari operasional pembangkit ini selalu memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh KLH.

I feel proud of the extraordinary achievements of the PLN Group which received many awards, including 7 PLN Indonesia Power awards, which means that the management of our plants is in accordance with procedures, where the quality of the plant's operations always meets the quality standards set by KLH.

<https://www.plnindonesiapower.co.id>



Edi Nugroho Santoso

Direktur Pemulihan Kerusakan Lahan Kementerian LHK
Direktur Pemulihan Kerusakan Lahan Kementerian LHK

Saya apresiasi segala upaya yang dilakukan oleh PLN Indonesia Power untuk menekan polusi. Saya juga berharap Upaya kita ini bisa dicontoh dan diikuti dengan kegiatan nyata lainnya pada setiap kegiatan proses bisnis di PLN Indonesia Power.

Saya apresiasi segala upaya yang dilakukan oleh PLN Indonesia Power untuk menekan polusi. Saya juga berharap Upaya kita ini bisa dicontoh dan diikuti dengan kegiatan nyata lainnya pada setiap kegiatan proses bisnis di PLN Indonesia Power.

<https://www.plnindonesiapower.co.id>



Takefumi Sakuraba

Chief Representative INPEX Geothermal
Chief Representative INPEX Geothermal

Kolaborasi ini menggabungkan pengalaman INPEX di sektor Hulu dan teknologi *geothermal* terkini dengan kekuatan PLN Indonesia Power di sisi operasional.

This collaboration brings together INPEX's expertise in upstream sector and the latest geothermal technology with PLN Indonesia Power's strong operational capabilities.

@PLN Indonesia Power



Budi Wibowo

Direktur Utama PLN Indonesia Geothermal
President Director, PLN Indonesia Geothermal

PLN Indonesia Geothermal hadir sebagai ujung tombak PLN Group di sektor *geothermal*. Kami percaya kolaborasi ini akan membuka peluang besar untuk menghadirkan energi bersih yang berkelanjutan bagi Indonesia.

PLN Indonesia Geothermal stands at the forefront of the PLN Group in the geothermal sector. We believe this collaboration will unlock significant opportunities to deliver clean and sustainable energy for Indonesia.

@PLN Indonesia Power



Ganis Nugraheni Purnamawati

Manajer Manajemen Pemangku Kepentingan dan Hubungan Investor
Manager of Stakeholder Management and Investor Relations

Saya merasa senang dan bangga bekerja di PLN Indonesia Power, karena merupakan perusahaan terdepan yang menghasilkan listrik yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta sangat peduli terhadap lingkungan. Budaya kerjanya juga sangat hangat, saya merasa memiliki keluarga di tempat kerja, tim yang sangat kompak dan suportif, atasan yang terbuka dengan ide-ide baru, serta memfasilitasi kesejahteraan karyawan dengan menjaga kesehatan fisik dan mental karyawan melalui beberapa kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, dan kesehatan.

I am honored and proud to work at PLN Indonesia Power, a leading company that produces electricity for the benefit of society, the nation, and the state, while demonstrating a strong commitment to environmental sustainability. The workplace culture is also exceptionally warm—I feel like I have a family at work, with a highly cohesive and supportive team, leaders who are open to new ideas, and a company that supports employee well-being by promoting physical and mental health through various community, religious, and wellness activities.

<https://greatplacetowork.co.id/companies/pt-pln-indonesia-power>



PLTGU Tambak Lorok Blok 3, UBP Semarang, Jawa Tengah
Tambak Lorok Block 3 CCPP, Semarang GBU, Central Java



Laporan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Report to Shareholder and Stakeholder



Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners



Iskandar Simorangkir

Pelaksana Tugas Komisaris
Utama merangkap
Komisaris Independen
Acting President Commissioner
concurrently Independent
Commissioner



Dewan Komisaris menilai bahwa langkah Direksi dalam melanjutkan program Transformasi 2.0 PLN Indonesia Power, sebagai amanat dari pemegang saham, sudah sangat tepat. Keberhasilan program ini memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak, baik di dalam organisasi PLN Indonesia Power maupun dengan mitra eksternal.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors' initiative to continue the Transformation 2.0 program of PLN Indonesia Power, as mandated by the shareholders, is a highly appropriate step. The success of this program requires synergy and collaboration from all parties, both within the PLN Indonesia Power organization and with external partners.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Perkenankan Kami mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang atas berkat rahmat dan karunia-Nya, PLN Indonesia Power atau Perusahaan berhasil melalui tahun 2024 di tengah berbagai tantangan dengan kinerja yang positif dan membanggakan. Bersyukur atas berbagai pencapaian penting yang diraih PLN Indonesia Power selama tahun 2024. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini memuat aspek pengawasan, arahan dan penasehatan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), penilaian atas kinerja Direksi dan dasar penilaiannya serta maupun aspek penting lainnya yang sedang dihadapi PLN Indonesia Power. Selain itu, Dewan Komisaris juga menyampaikan penilaian terhadap pencapaian kinerja Direksi termasuk upaya dalam merespon tantangan agar dapat terus tumbuh berkelanjutan. Kami juga menyampaikan pandangan terhadap penerapan governansi perusahaan dan integrasinya dengan prinsip ESG, termasuk namun tidak terbatas pada implementasi *Whistle Blowing System* (WBS), dan informasi perubahan komposisi Dewan Komisaris selama tahun 2024 serta prospek usaha PLN Indonesia Power ke depan.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Allow us to express our praise and gratitude to Allah SWT, for it is by His grace and blessings that PLN Indonesia Power, hereinafter referred to as the Company, successfully navigated the year 2024 amidst various challenges, achieving positive and commendable performance. We are grateful for the significant accomplishments attained by PLN Indonesia Power throughout 2024. The Board of Commissioners' Supervisory Report in this Annual Report outlines the supervisory aspects, guidance, and advisory functions carried out concerning the implementation of the 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), the Company's Long-Term Plan (RJPP), the assessment of the Board of Directors' performance along with the basis for such assessment, as well as other key aspects currently faced by PLN Indonesia Power. In addition, the Board of Commissioners also presents an evaluation of the Board of Directors' performance achievements, including their efforts in responding to challenges to ensure sustainable growth. We also convey our views on the implementation of corporate governance and its integration with ESG principles, including but not limited to the implementation of the Whistleblowing System (WBS), and provide information on changes in the composition of the Board of Commissioners during 2024, along with the future business outlook of PLN Indonesia Power.

Tinjauan Makroekonomi 2024 dan Industri Listrik

Macroeconomic Overview 2024 and Electricity Industry

Kondisi ekonomi global tahun 2024 masih mengalami perlambatan dan berada di level 3,2% atau naik dibanding tahun lalu sebesar 3,1%. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik di sejumlah kawasan, perlambatan ekonomi di negara-negara maju, fragmentasi perdagangan dunia dan fluktuasi harga komoditas.

Menurut International Energy Agency (IEA), permintaan listrik global diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam tiga tahun ke depan, dengan proyeksi pertumbuhan rata-rata sebesar 3,4% per tahun hingga tahun 2026. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya prospek ekonomi global, yang turut mendorong pertumbuhan permintaan listrik, baik di negara-negara maju maupun berkembang. Adapun kenaikan konsumsi listrik global terutama disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain meningkatnya kebutuhan pendingin akibat fenomena suhu ekstrem, peningkatan aktivitas sektor industri, percepatan elektrifikasi di sektor transportasi, serta pertumbuhan pesat pusat data dan penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Tren ini menjadi indikasi bahwa ketahanan energi dan transformasi sistem kelistrikan global akan semakin krusial di masa mendatang.

Adapun kondisi ekonomi domestik tercatat tetap tangguh, sebesar 5,03%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,05%. Angka pertumbuhan ini tergolong baik, di tengah penerapan kebijakan moneter ketat oleh Bank Indonesia dan mayoritas bank sentral lainnya di seluruh dunia. Pertumbuhan investasi menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2024, didorong oleh penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) serta insentif pemerintah bagi investasi swasta. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) hingga akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp16.095, melemah sebesar 4,34% (*year-on-year/yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi inflasi, tingkat inflasi per Desember 2024 tercatat sebesar 1,57% (*yoy*), yang merupakan angka terendah dalam sejarah. Penurunan inflasi ini terutama disebabkan oleh normalisasi harga pangan serta penyesuaian harga yang dilakukan pemerintah secara terukur.

Dewan Komisaris menilai bahwa pemulihan ekonomi nasional diperkirakan akan terus berlanjut ke depan, dan kondisi ini akan menjadi faktor pendukung bagi pencapaian kinerja PLN Indonesia Power yang berkelanjutan. Dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang positif, PLN Indonesia Power memiliki peluang untuk terus memperkuat perannya dalam sektor ketenagalistrikan nasional dan mendorong transformasi menuju bisnis energi yang lebih andal dan berkelanjutan.

The global economic condition in 2024 continued to experience a slowdown, remaining at the level of 3.2%, a slight increase compared to 3.1% in the previous year. This was mainly influenced by geopolitical uncertainties in several regions, economic deceleration in developed countries, global trade fragmentation, and commodity price fluctuations.

According to the International Energy Agency (IEA), global electricity demand is projected to increase significantly over the next three years, with an average annual growth forecast of 3.4% through 2026. This growth is driven by improved global economic prospects, which in turn boost electricity demand in both developed and developing countries. The increase in global electricity consumption is primarily attributed to several main factors, including rising cooling needs due to extreme temperature phenomena, increased industrial sector activity, accelerated electrification in the transportation sector, and the rapid growth of data centers and the use of Artificial Intelligence (AI). This trend indicates that energy resilience and the transformation of the global electricity system will become increasingly critical in the future.

The domestic economic condition remained resilient in 2024, recording a growth rate of 5.03%, slightly lower than the previous year's 5.05%. This level of growth is considered solid, especially amid the implementation of tight monetary policies by Bank Indonesia and most other central banks around the world. Investment growth showed a positive trend throughout 2024, driven by the completion of National Strategic Projects (PSN) and government incentives for private investment. Meanwhile, the Rupiah exchange rate against the US Dollar (USD) stood at Rp16,095 by the end of 2024, weakening by 4.34% *year-on-year (yoy)* compared to the previous year. In terms of inflation, the rate as of December 2024 was recorded at 1.57% (*yoy*), marking the lowest figure in history. This decline in inflation was mainly due to the normalization of food prices and the government's measured approach to price adjustments.

The Board of Commissioners believes that the national economic recovery is expected to continue in the future, and this condition will serve as a supporting factor for PLN Indonesia Power's sustainable performance. With positive economic growth momentum, PLN Indonesia Power has the opportunity to further strengthen its role in the national electricity sector and drive transformation toward a more reliable and sustainable energy business.

Penilaian Atas Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya

Assessment of the Board of Directors' Performance and the Basis for the Assessment

Pengelolaan Perusahaan tahun 2024 oleh Direksi menurut Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik, positif dan membanggakan. Hal ini tercermin antara lain dari pencapaian tingkat kesehatan Perusahaan serta realisasi KPI Perusahaan yang menjadi sasaran dan target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024. Realisasi KPI Perusahaan tahun 2024 mendapatkan skor 105,56 atau meningkat dibanding skor KPI Perusahaan tahun sebelumnya sebesar 103,40. *"Enhancing Governance for Energy Security and Sustainable Future"* sebagai tema Laporan Tahunan ini telah merefleksikan pencapaian-pencapaian kami terkait dengan tata kelola di segala bidang selama tahun 2024 untuk menuju kemandirian energi dan masa depan keberlanjutan.

Dewan Komisaris menilai bahwa langkah Direksi dalam melanjutkan program Transformasi 2.0 PLN Indonesia Power, sebagai amanat dari pemegang saham, sudah sangat tepat. Keberhasilan program ini memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak, baik di dalam organisasi PLN Indonesia Power maupun dengan mitra eksternal.

Pencapaian Perusahaan tahun 2024 menjadi dasar penilaian kinerja Direksi sebagaimana target dalam Kontrak Manajemen dan RKAP tahun 2024 yang selaras dengan Sasaran Utama RJP PLN Indonesia Power 2024-2028.

Indikator kinerja Perusahaan, termasuk sasaran utama tahun 2024 ditetapkan oleh Pemegang Saham. KPI Perusahaan 2024 terbagi menjadi 6 (enam) perspektif, yakni Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia; Inovasi Model Bisnis; Kepemimpinan Teknologi; Peningkatan Investasi; Pengembangan Talenta; dan Aspek Kepatuhan. Penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Direksi Perusahaan meliputi penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi KPI Perusahaan 2024 dan RKAP tahun 2024.

Dari total 35 indikator KPI Perusahaan 2024 sebagai sasaran kinerja utama Perusahaan di tahun 2024, 31 indikator kinerja sudah mencapai target, 3 indikator hampir tercapai dan 1 indikator belum mencapai target. Untuk indikator KPI Perusahaan 2024 yang penting dan telah mencapai target, Dewan Komisaris menilai Direksi telah berhasil menjalankan strategi dan kebijakan dalam RKAP 2024 antara lain melalui realisasi EBITDA, BPP pembangkit, ROIC, EFOR PLTU, EFOR non

The Board of Commissioners considers the Company's management in 2024 by the Board of Directors as having been carried out effectively, positively, and commendably. This is reflected, among other things, in the achievement of the Company's soundness level and the realization of the Company's Key Performance Indicators (KPI), which were set as objectives and targets in the 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP). The realization of the Company's KPI in 2024 achieved a score of 105.56, representing an increase compared to the previous year's KPI score of 103.40. The theme of this Annual Report, *"Enhancing Governance for Energy Security and Sustainable Future"*, reflects our achievements in governance across all areas throughout 2024, aimed at achieving energy independence and a sustainable future.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors' initiative to continue the Transformation 2.0 program of PLN Indonesia Power, as mandated by the shareholders, is a highly appropriate step. The success of this program requires synergy and collaboration from all parties, both within the PLN Indonesia Power organization and with external partners.

The Company's achievements in 2024 were the basis for assessing the Board of Directors' performance as targeted in the Management Contract and RKAP for 2024, in line with the Main Targets of PLN Indonesia Power's 2024-2028 RJP.

The Company's performance indicators, including the 2024 main objectives, were determined by the Shareholders. The 2024 Company KPI is divided into 6 (six) perspectives: Economic and Social Value for Indonesia; Business Model Innovation; Technological Leadership; Investment Enhancement; Talent Development; and Compliance Aspects. The Board of Commissioners' assessment of the Company's Board of Directors includes both quantitative and qualitative evaluations of the 2024 KPI realization and the 2024 RKAP.

Out of a total of 35 KPI indicators set as the Company's main performance targets for 2024, 31 indicators had met their targets, 3 indicators are close to being achieved, and 1 indicators have not yet reached their targets. Important 2024 Corporate KPI indicators that had achieved the target include EBITDA; electricity generation cost (BPP); ROIC; EFOR of SPP, EFOR of non-SPP; EAF of SPP, EAF of non-SPP; and SFC of coal, gas, and oil. KPI indicators that had nearly met

PLTU; EAF PLTU, EAF non PLTU; SFC batubara, SFC gas, dan SFC BBM. Untuk indikator KPI yang hampir memenuhi target (95%-100%) adalah *Carbon Emission Reduction*; Pendapatan dari luar PLN Group; dan *EPC and Project Completion*. Dewan Komisaris menilai bahwa program strategi dan langkah Direksi PLN Indonesia Power dalam mengelola kinerja-kinerja di atas telah berada pada jalur yang tepat, sehingga perlu terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Adapun KPI yang belum mencapai target (<95%) adalah Pengendalian Penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2024. Dewan Komisaris meminta kepada Direksi ke depannya dapat mengembangkan kebijakan maupun strategi yang lebih mendukung tercapainya seluruh target KPI Perusahaan yang ditetapkan.

Realisasi produksi tenaga listrik tahun 2024 mencapai 113,56% dari target RKAP sebesar 76.797,05 GWh, menjadi 87.210,96 GWh, meningkat 3,57% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 84.205,29 GWh. Peningkatan produksi listrik berdampak terhadap penjualan tenaga listrik mencapai 113,51% dari target RKAP 2024 sebesar 72.714,48 GWh menjadi sebesar 82.535,52 GWh, meningkat 3,60% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 79.670,26 GWh. Meningkatnya produksi dan penjualan tenaga listrik terutama disebabkan oleh peningkatan produksi UBP Bali dikarenakan peningkatan beban di sub sistem Bali, pengoptimalan operasi PLTA Saguling, dan pengoperasian PLTGU Tambak Lorok Blok 3 yang telah COD.

PLN Indonesia Power terus menjaga nilai Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkit sesuai dengan target RKAP 2024, yakni sebesar Rp1.128,89 per kWh, atau 109,57% dari target awal sebesar Rp1.248,41 per kWh. Dewan Komisaris memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah Direksi dalam menjaga sekaligus meningkatkan kinerja BPP pembangkit. Hal ini dilakukan melalui upaya mitigasi risiko atas berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian target produksi, penjualan tenaga listrik, maupun efisiensi biaya pembangkitan. Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk melanjutkan kegiatan operasional pembangkitan dengan fokus pada pencapaian kinerja ekselen (*Performance Excellence*), melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai penggerak utama (*Digital Driven O&M Excellence*), serta penerapan standarisasi tata kelola secara komprehensif di seluruh pembangkit yang dikelola perusahaan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kontinuitas produksi tenaga listrik, sehingga kebutuhan sistem kelistrikan di wilayah operasional masing-masing pembangkit tetap terpenuhi dan tidak terjadi kekurangan pasokan tenaga listrik.

the target (95%-100%) included Carbon Emission Reduction; Revenue from outside PLN Group; as well as EPC and Project Completion. The Board of Commissioners believes that the strategic programs and actions undertaken by the Board of Directors of PLN Indonesia Power in managing these performance areas are on the right track, and thus should be maintained and even further enhanced.

The KPI that had not met the target (<95%) was the Control of Investment Budget Utilization in accordance with the 2024 RKAP. The Board of Commissioners requests that the Board of Directors, in the future, develop policies and strategies that more effectively support the achievement of all established Company KPI targets.

The realization of electricity production in 2024 reached 113.56% of the RKAP target of 76,797.05 GWh, amounting to 87,210.96 GWh, an increase of 3.57% compared to the 2023 realization of 84,205.29 GWh. The increase in electricity production also impacted electricity sales, which reached 113.51% of the 2024 RKAP target of 72,714.48 GWh, totaling 82,535.52 GWh, an increase of 3.60% compared to the previous year's 79,670.26 GWh. The rise in electricity production and sales was mainly driven by increased production at Bali GBU due to higher load in the Bali sub-system, optimized operations of the Saguling hydropower plant (PLTA), and the operation of Tambak Lorok Block 3 CCPP following its COD.

PLN Indonesia Power consistently maintained the electricity generation cost (BPP) in line with the 2024 RKAP target, which is set at Rp1,128.89 per kWh, or 109.57% from target of Rp1,248.41 per kWh. The Board of Commissioners fully supports the Board of Directors' efforts in maintaining and improving the generation BPP performance. This have been achieved through risk mitigation measures addressing various factors that influence the achievement of electricity production targets, sales, and generation cost efficiency. The Board of Commissioners also encourages the Board of Directors to continue generation operations with a focus on achieving performance excellence, by leveraging digital technology as the main driver (*Digital Driven O&M Excellence*) and implementing comprehensive standardized governance across all power plants managed by the Company. This initiative aims to ensure the continuity of electricity production so that the power system needs in each plant's operational area remain fulfilled without experiencing electricity supply shortages.

Pendapatan usaha tahun 2024 mencapai 103,96% dari target RKAP, tercatat meningkat 6,86% menjadi sebesar Rp110,58 triliun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp103,48 triliun. Perolehan pendapatan usaha ini terutama berasal dari pendapatan penjualan tenaga listrik sebesar 98,31%; pendapatan jasa sebesar 1,46%, dan pendapatan dari konsesi jasa sebesar 0,23%. Adapun beban usaha tahun 2024 adalah 101,26% dari target RKAP sebesar Rp92,53 triliun, mengalami kenaikan sebesar 12,14% menjadi Rp93,70 triliun dibanding tahun lalu sebesar Rp83,55 triliun terutama disebabkan oleh kenaikan rata-rata pemakaian energi primer batubara maupun gas. Selain itu, terdapat penurunan beban lain-lain dari Rp9,25 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp117,77 miliar pada tahun 2024. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap capaian laba tahun berjalan mencapai 138,07% dari target RKAP, meningkat 59,91% menjadi sebesar Rp13,10 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp8,19 triliun.

Adapun kinerja operasi pembangkit antara lain tercermin dari indikator efisiensi pembangkit yang tercermin dari nilai Pemakaian Sendiri (PS), tingkat kesiapan pembangkit yang tercermin dari nilai *Equivalent Availability Factor* (EAF) dan tingkat gangguan pembangkit yang tercermin dari nilai *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR).

Pemakaian sendiri pada tahun 2024 mencapai 4.675,43 GWh, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4.535,03 GWh atau 99,17% dari target RKAP. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan produksi tenaga listrik sebesar 3,57%. Meskipun terjadi peningkatan volume, persentase pemakaian sendiri terhadap total produksi listrik turun menjadi 5,36%, lebih baik dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 5,39%. Perbaikan ini terutama didorong oleh pemasangan PV *rooftop* serta optimalisasi pengoperasian PLTGU Tambak Lorok Blok 3, yang berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan energi internal.

Nilai EAF menunjukkan kinerja yang beragam antara pembangkit PLTU batubara dan non-PLTU batubara sepanjang tahun 2024. Untuk PLTU batubara, nilai EAF tahun 2024 tercatat sebesar 85,21%, meningkat 1,34% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 84,08%, atau mencapai 103,37% dari target RKAP. Peningkatan ini mencerminkan performa pembangkit yang semakin andal dan efisien. Sementara itu, untuk non-PLTU batubara, nilai EAF tahun 2024 menurun sebesar 0,74%, menjadi 93,82%, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 94,53%, atau mencapai 103,08% dari target RKAP. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelaksanaan *Outage* Unit PLTU yang tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

The Company's revenue in 2024 reached 103.96% of the RKAP target, recording an increase of 6.86% to Rp110.58 trillion compared to the previous year's Rp103.48 trillion. This revenue was primarily derived from electricity sales, which accounted for 98.31%; service revenue at 1.46%; and revenue from service concessions at 0.23%. Meanwhile, operating expenses in 2024 amounted to 101.26% of the RKAP target of Rp92.53 trillion, increasing by 12.14% to Rp93.69 trillion compared to Rp83.55 trillion in the previous year. This rise was mainly driven by an increase in the average consumption of primary energy sources such as coal and gas. In addition, there was a decrease in other expenses from Rp9.25 trillion in 2023 to Rp117.77 billion in 2024. These factors positively contributed to the net profit for the year, which reached 138.07% of the RKAP target, rising by 59.91% to Rp13.10 trillion compared to Rp8.19 trillion in 2023.

The Company's power generation performance is reflected in several indicators, including plant efficiency as measured by Self-Consumption (PS), plant readiness as measured by the Equivalent Availability Factor (EAF), and plant disturbance as measured by the Equivalent Forced Outage Rate (EFOR).

Self-Consumption in 2024 reached 4,675.43 GWh, an increase from the previous year's 4,535.03 GWh. This growth aligns with the 3.57% rise in electricity production. Despite the increase in volume, the percentage of self-consumption against total electricity production decreased to 5.36%, an improvement from 5.39% in 2023. This enhancement was primarily driven by the installation of rooftop PV systems and the optimized operation of Tambak Lorok Block 3 CCPP, both of which contributed to more efficient internal energy use.

The EAF values showed varied performance between SPP and non-SPP throughout 2024. For SPP, the EAF in 2024 was recorded at 85.21%, an increase of 1.34% compared to the previous year's 84.08%, or reaching 84.08% of the RKAP target. This increase reflects the improved reliability and efficiency of the power plants. Meanwhile, for non-SPP, the EAF in 2024 decreased by 0.74% to 93.83%, compared to 94.53% in the previous year, or reaching 103.08% of the RKAP target. This decline was mainly due to a higher number of SPP units undergoing scheduled overhauls compared to the previous year.

Nilai EFOR pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan signifikan, baik untuk pembangkit PLTU batubara maupun non-PLTU batubara. Untuk PLTU batubara, EFOR tahun 2024 tercatat sebesar 4,67%, turun 16,92% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,46%, atau mencapai 111,89% dari target RKAP. Penurunan ini mencerminkan peningkatan keandalan dan performa pembangkit. Sementara itu, EFOR untuk non-PLTU batubara juga menunjukkan penurunan sebesar 54,37%, menjadi 1,03%, dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,59%, atau 134,39% dari target RKAP. Penurunan ini terutama disebabkan adanya perencanaan *Preventive Maintenance* (PM) PLTU yang memadai dan eksekusi penanganan kerusakan yang terjadi. Dengan demikian, penerapan sistem manajemen aset pembangkit yang efektif perlu terus diperkuat guna menjawab tantangan ke depan.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa eksekusi program strategis tahun 2024 yang dijalankan oleh Direksi berhasil membawa PLN Indonesia Power memberikan dampak yang semakin luas, khususnya dalam mendorong pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional dan memperkuat keandalan sistem kelistrikan di wilayah Jawa-Bali. Keberhasilan ini antara lain ditunjukkan melalui beroperasinya secara komersial (*Commercial Operation Date/COD*) dua pembangkit strategis, yaitu:

- *Barge Mounted Power Plant* (BMPP) Nusantara I di Ambon dengan kapasitas 60 MW, dan
- PLTGU Tambak Lorok Blok 3 di Semarang dengan kapasitas 779 MW.

Kedua proyek ini menjadi bagian penting dalam upaya memenuhi kebutuhan listrik nasional serta mendukung pemerataan dan keberlanjutan pasokan energi.

Ke depannya, Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi untuk terus memperkuat kinerja operasional dan strategi jangka panjang Perusahaan. Beberapa hal yang menjadi fokus utama meliputi:

- Peningkatan keandalan pembangkit, baik di Sistem Jawa-Bali maupun di wilayah luar Jawa-Bali,
- Produksi listrik dengan biaya yang kompetitif melalui efisiensi operasional dan optimalisasi sumber daya,
- Peningkatan bauran energi berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT),
- Konsistensi dalam implementasi *Digital Power Plant* dan penerapan inovasi berkelanjutan,

The EFOR values in 2024 showed significant improvement for both SPP and non-SPP. For SPP, the 2024 EFOR was recorded at 4.67%, down by 16.92% from the previous year's 5.46%, or reaching 111.89% of the RKAP target. This decrease reflects enhanced reliability and performance of the plants. Meanwhile, the EFOR for non-SPP also dropped by 54.37% to 1.03%, compared to 1.59% in 2023, or 134.39% of the RKAP target. This decline was primarily due to a longer duration of scheduled overhauls compared to the previous year, though it remained within operational planning and control. Accordingly, the implementation of an effective power plant asset management system must continue to be strengthened to address future challenges.

The Board of Commissioners considers that the execution of strategic programs in 2024 carried out by the Board of Directors had successfully enabled PLN Indonesia Power to deliver a broader impact, particularly in supporting the development of national electricity infrastructure and strengthening the reliability of the power system in the Java-Bali region. This success is evidenced, among other things, by the commercial operation (*Commercial Operation Date/COD*) of two strategic power plants:

- Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara I in Ambon with a capacity of 60 MW, and
- Tambak Lorok Block 3 CCPP in Semarang with a capacity of 779 MW.

These two projects play an important role in meeting national electricity demand while supporting the equitable and sustainable supply of energy.

In the future, the Board of Commissioners has directed the Board of Directors to continue strengthening the Company's operational performance and long-term strategies. Some of key focus areas include:

- Improving power plant reliability in both the Java-Bali system and regions outside Java-Bali,
- Producing electricity at competitive costs through operational efficiency and resource optimization,
- Increasing energy mix based on New Renewable Energy (NRE),
- Maintaining consistency in implementing Digital Power Plants and sustainable innovation,

- Pengembangan bisnis *Beyond kWh* sebagai sumber pertumbuhan baru, serta
- Penguatan kapasitas organisasi dan peningkatan kapabilitas SDM agar selaras dengan kebutuhan bisnis masa depan.

Seluruh upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya aspirasi Visi Perusahaan, yaitu: "Menjadi Perusahaan Listrik Global Berkinerja Terbaik dan Berkelanjutan."

- Developing *Beyond kWh* businesses as new sources of growth, and
- Strengthening organizational capacity and enhancing human capital capabilities in alignment with future business needs.

All these efforts are expected to support the realization of the Company's Vision: "To Become the Best Performing and Sustainable Global Power Company."

Pengawasan dan Pemberian Nasehat Dalam Perumusan dan Implementasi Strategi oleh Direksi

Supervision and Advisory in the Formulation and Implementation of Strategy by the Board of Directors

Direksi beserta segenap jajaran manajemen PLN Indonesia Power telah merespon tantangan yang dihadapi selama tahun 2024 dengan baik. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi berhasil menerjemahkan tantangan dan kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2024 dengan strategi, kebijakan, maupun program inisiatif yang tepat. Dewan Komisaris juga terlibat secara aktif dalam pengawasan pelaksanaan target RKAP 2024 dan RJPP yang berlaku, mulai dari awal perumusan hingga implementasi strategi dan kebijakan Perusahaan.

Dalam proses perumusan strategi dan kebijakan Perusahaan dalam RKAP 2024, Direksi telah menyampaikan dan meminta masukan serta arahan dari Dewan Komisaris sebagai pihak yang mengawasi jalannya strategi dan kebijakan Perusahaan tersebut. Proses komunikasi dan koordinasi dilaksanakan secara berkala, paling sedikit sebulan sekali baik melalui proses pelaporan, diskusi, maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris mengapresiasi kebijakan dan strategi yang dijalankan Direksi, untuk terus memperkuat segmen EBT sebagai *second curve of business* Perusahaan, meningkatkan *co-firing* PLTU batubara, program pengendalian dan reduksi emisi, implementasi *carbon cap* dan *carbon trade* antar pembangkit sebagai proses transisi energi secara berkelanjutan.

The Board of Directors, along with the entire management team of PLN Indonesia Power, responded well to the challenges faced throughout 2024. The Board of Commissioners believes that the Board of Directors successfully translated the challenges and obstacles encountered during the year into appropriate strategies, policies, and initiative programs. The Board of Commissioners was also actively involved in overseeing the implementation of the 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and the applicable Company's Long-Term Plan (RJPP), from the initial formulation to the implementation of the Company's strategies and policies.

In the process of formulating the Company's strategies and policies in the 2024 RKAP, the Board of Directors presented and requested input and guidance from the Board of Commissioners, who serve as the supervisory party overseeing the execution of these strategies and policies. Communication and coordination processes were conducted regularly, at least once a month, through reporting, discussions, or joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The Board of Commissioners appreciates the policies and strategies implemented by the Board of Directors to continuously strengthen the NRE segment as the Company's second curve of business, enhance *co-firing* in SPP, implement emission control and reduction programs, and carry out carbon cap and carbon trade between power plants as part of a sustainable energy transition process.

Dalam hal pengembangan produk, terutama pada segmen *Beyond kWh*, Dewan Komisaris mendukung upaya Direksi dalam mengembangkan produk tersebut sebagai hasil inovasi secara berkelanjutan, yang kelak akan menjadi sumber pendapatan di luar penjualan tenaga listrik. Dewan Komisaris juga merekomendasikan kepada Direksi untuk menyusun berbagai inovasi bisnis guna memperkuat peran PLN Indonesia Power di pasar global, sejalan dengan pilar *Global Innovative Growth*. Inovasi tersebut diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam program-program pengembangan yang mencakup:

- Pengembangan pembangkit tenaga listrik hijau melalui inisiatif *Expand The Core with Green Energy*, serta
- Pengembangan bisnis *Beyond kWh* melalui program *Ignite Growth*.

Kedua, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan Perusahaan secara berkelanjutan saat ini dan juga di masa depan.

Sebagai tindak lanjut setelah menjadi Subholding Pembangkitan PLN, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi perlu secara konsisten melaksanakan *alignment policy* terkait kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kebijakan SDM *Holding* di PLN. Hal ini penting untuk memastikan harmonisasi kebijakan kepegawaian yang mendukung pencapaian target-target PLN Indonesia Power serta tujuan transformasi yang telah ditetapkan oleh PLN secara grup.

In terms of product development, particularly in the *Beyond kWh* segment, the Board of Commissioners supports the Board of Directors' efforts to develop these products as the result of continuous innovation, which will eventually become a source of revenue beyond electricity sales. The Board of Commissioners also recommends that the Board of Directors formulate various business innovations to strengthen PLN Indonesia Power's role in the global market, in line with the pillar of *Global Innovative Growth*. These innovations are expected to be translated into development programs that include:

- Development of green power plants through the *Expand the Core with Green Energy* initiative, and
- Development of *Beyond kWh* businesses through the *Ignite Growth* program.

This dual approach is expected to make a tangible contribution to the Company's sustainable revenue growth, both now and in the future.

As a follow-up to becoming PLN's Generation Subholding, the Board of Commissioners believes that the Board of Directors must consistently implement *alignment policies* related to human resources (HR) with those of PLN Holding. This is crucial to ensure the harmonization of HR policies that support the achievement of PLN Indonesia Power's targets and the transformation goals established by the PLN Group.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Views on the Business Outlook Prepared by the Board of Directors

Situasi perekonomian dunia tahun 2025 masih sangat dinami dengan risiko dan ketidakpastian yang perlu diantisipasi. Proyeksi ekonomi dunia masih relatif stagnan, dalam *World Economic Forum* (WEO) *update* rilis bulan April 2025 menurut International Monetary Fund (IMF) sebesar 2,8% pada 2025 dan 3,0% pada 2026. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang masih tinggi, eskalasi konflik geopolitik, peningkatan tensi perang dagang akibat isu overproduksi di Tiongkok, serta risiko-risiko yang berdampak struktural, terutama yang bersumber dari perubahan iklim, digitalisasi, serta penuaan demografi (*ageing population*).

The global economic situation in 2025 remains highly dynamic, with risks and uncertainties that must be anticipated. Global economic projections remain relatively stagnant. According to the April 2025 update of the World Economic Outlook (WEO) released by the International Monetary Fund (IMF), global economic growth is projected at 2.8% in 2025 and 3.0% in 2026. This outlook is mainly influenced by persistently high interest rates, escalating geopolitical conflicts, rising trade tensions due to overproduction issues in China, as well as structural risks, particularly those arising from climate change, digitalization, and an aging population.

Adapun pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 menunjukkan kinerja yang resilien di kisaran 5,1% menurut IMF, sedikit lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,05% di tengah perlambatan ekonomi global namun di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh permintaan domestik yang cukup kuat dan penyelenggaraan Pemilu 2024 memberikan dorongan yang kuat terhadap Konsumsi Pemerintah (19,9%). Dari sisi sektoral, hampir semua sektor tumbuh positif, kecuali Sektor Pertanian akibat *El Nino* yang menyebabkan pergeseran musim tanam. Pemerintah diharapkan dapat melakukan berbagai intervensi dalam mengelola faktor eksternal dan menyiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian global, kenaikan suku bunga dalam negeri, ketahanan pangan nasional, maupun pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 penjualan listrik nasional diproyeksikan meningkat dari 323.044 GWh pada tahun 2025 menjadi 510.575 GWh pada tahun 2034. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan listrik sektor industri dan rumah tangga. Pada periode 2025-2034, RUPTL juga menargetkan penambahan sekitar 12,1 juta pelanggan baru. Dalam upaya mendukung akses listrik yang merata, RUPTL menetapkan target rasio elektrifikasi nasional sebesar 100% pada tahun 2025. Hingga triwulan I tahun 2025, rasio elektrifikasi telah mencapai 98,51%, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pemerataan akses listrik. Sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional, RUPTL juga memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Di sisi infrastruktur, RUPTL memproyeksikan penambahan kapasitas gardu induk dan jaringan transmisi guna memperkuat kapasitas dan efisiensi sistem kelistrikan nasional secara menyeluruh. Selain itu, pemerintah menargetkan peningkatan konsumsi listrik per kapita menjadi 1.495 kWh/kapita pada tahun 2025, naik dari 1.408 kWh/kapita pada tahun 2024, seiring dengan pertumbuhan permintaan listrik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, Dewan Komisaris berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang resilien akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan konsumsi listrik, termasuk memperluas peluang pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Prospek usaha yang difokuskan pada pengembangan bisnis energi terbarukan serta inovasi produk *beyond kWh* guna mencapai *Strategic Goal 2028* telah dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan dinilai memadai serta

Meanwhile, Indonesia's national economic growth in 2025 shows resilient performance, projected at around 5.1% by the IMF, slightly higher than the previous year's growth of 5.05%, despite the global economic slowdown, and remains above the global average growth rate. This growth is primarily supported by strong domestic demand, and the 2024 General Elections also provided a significant boost to Government Consumption (19.9%). From a sectoral perspective, nearly all sectors experienced positive growth, with the exception of the Agriculture Sector, which was affected by *El Niño* and the resulting shift in planting seasons. The government is expected to implement various interventions to manage external factors and prepare anticipatory measures to address global risks and uncertainties, domestic interest rate increases, national food security, and the weakening of the Rupiah exchange rate against the US Dollar.

The 2025-2034 Electricity Supply Business Plan (RUPTL) projects an increase in national electricity demand based on the Government's targeted economic growth of 8%, as well as projections of electricity needs across all sectors. This growth is also driven by the Economic growth and electricity demand in the industrial and household sector. For the 2025-2034 period, RUPTL also targets the addition of approximately 12.1 million new customers. In an effort to support equitable electricity access, RUPTL has set a national electrification ratio target of 100% by 2025. As of the first quarter of 2025, the electrification ratio had already reached 98.51%, demonstrating significant progress in expanding access to electricity. As part of the national energy transition strategy, RUPTL also places greater emphasis on the development of New Renewable Energy (NRE). On the infrastructure side, RUPTL projects the addition of substation and transmission network capacity to strengthen the overall capacity and efficiency of the national electricity system. In addition, the government aims to increase per capita electricity consumption to 1,495 kWh/person in 2025, up from 1,408 kWh/person in 2024, in line with growing electricity demand and improving public welfare.

Based on these assumptions, the Board of Commissioners believes that resilient national economic growth will have a positive impact on increasing electricity consumption, including expanding opportunities for the development of New Renewable Energy (NRE). The business outlook, which focuses on the development of renewable energy businesses and product innovations beyond kWh to achieve the *Strategic Goal 2028*, has been outlined in the Company's Long-Term Plan (RJPP) and is considered adequate and aligned with the

sejalan dengan Visi Misi Perusahaan Tahun 2024 - 2028. *Strategic Goal* 2028 diturunkan ke dalam 4 (empat) program strategis utama yang memiliki indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) yang dievaluasi setiap tahun, terdiri dari:

- *Expand the Core Moonshot*,
- *Ignite Growth Moonshot*,
- *Digital Driven O&M Excellence*, dan
- *Sustainability Moonshot*.

Dalam rangka mendukung pengembangan bisnis energi terbarukan (*renewable energy*) dan strategi inovasi produk *beyond kWh*, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk secara bertahap dan berkelanjutan mempersiapkan program pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini terutama ditujukan untuk mendukung pengembangan bisnis *beyond kWh* yang merupakan area usaha baru bagi PLN Indonesia Power, sehingga memerlukan kompetensi dan kesiapan organisasi yang memadai guna memastikan keberhasilan implementasinya.

Company's Vision and Mission for 2024-2028. The Strategic Goal 2028 is translated into four main strategic programs, each with specific Key Performance Indicators (KPIs) that are evaluated annually. These programs include:

- Expand the Core Moonshot,
- Ignite Growth Moonshot,
- Digital Driven O&M Excellence, and
- Sustainability Moonshot.

To support the development of renewable energy businesses and product innovation strategies beyond kWh, the Board of Commissioners asks that the Board of Directors gradually and continuously prepare human resource (HR) development programs. This is particularly aimed at supporting the *beyond kWh* business segment, which is a new business area for PLN Indonesia Power, and therefore requires adequate competencies and organizational readiness to ensure successful implementation.

Pandangan Terhadap Integrasi ESG Guna Memperkuat Governansi Perusahaan

Views on the ESG Integration to Strengthen Corporate Governance

Implementasi tata kelola atau "Governansi Perusahaan" di PLN Indonesia Power menjadi salah satu fokus pengawasan Dewan Komisaris karena Kami menyadari bahwa hal tersebut mendukung tercapainya pertumbuhan kinerja secara bertahap dan berkelanjutan. Kami terus mendorong agar implementasi governansi Perusahaan ditingkatkan untuk mencapai standar praktik terbaik sejalan dengan kebutuhan bisnis PLN Indonesia Power. Sejalan dengan langkah Direksi untuk meningkatkan kualitas governansi Perusahaan yang tertuang dalam *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan 2019-2023 yang fokus membangun *Governance Mindset*, Dewan Komisaris meminta agar Perusahaan mengadopsi standar penerapan governansi yang berlaku, termasuk memastikan integrasi prinsip *Environmental, Social and Governance* (ESG) ke dalam proses bisnis Perusahaan.

Untuk memastikan konsisten dalam governansi Perusahaan, setiap tahun, PLN Indonesia Power melakukan penilaian governansi menggunakan 4 standar penilaian GCG, yaitu berdasarkan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012; ASEAN *Corporate Governance Scorecard*; standar Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka POJK 21/POJK.04/2015 dan Pedoman Umum

The implementation of corporate governance at PLN Indonesia Power has become one of the key areas of oversight by the Board of Commissioners, as we recognize that it supports the achievement of gradual and sustainable performance growth. We continue to encourage the enhancement of the Company's governance practices to align with the best practice standards in accordance with PLN Indonesia Power's business needs. In line with the Board of Directors' initiative to improve the quality of corporate governance, as outlined in the 2019-2023 Corporate Governance Roadmap which focuses on building a *Governance Mindset*, the Board of Commissioners asks the Company to adopt applicable governance standards, including ensuring the integration of Environmental, Social and Governance (ESG) principles into the Company's business processes.

In order to ensure consistency in corporate governance, PLN Indonesia Power conducts an annual governance assessment using four GCG assessment standards: the Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012; the ASEAN Corporate Governance Scorecard; POJK 21/POJK.04/2015 on the Governance Guidelines for Public Companies; and the 2021

Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021. Keseluruhan penilaian tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik, yang mencerminkan potret tata kelola yang dijalankan PLN Indonesia Power saat ini sekaligus menjadi *feedback* implementasi GCG guna perbaikan dan penyempurnaan di masa depan. Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya upaya Direksi dalam meningkatkan implementasi governansi perusahaan, baik dengan menyempurnakan kebijakan dan memastikan penerapan GCG sejalan dengan dinamika bisnis Perusahaan, termasuk apabila diperlukan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk memperoleh masukan dalam peningkatan kualitas governansi perusahaan secara berkelanjutan.

Dewan Komisaris, dengan dukungan Komite Audit, telah melakukan pengawasan terhadap implementasi governansi perusahaan di PLN Indonesia Power, dan menilai bahwa pelaksanaannya telah berjalan dengan baik. Tanggung jawab atas implementasi governansi merupakan kewajiban seluruh organ Perusahaan, sesuai tingkatan dalam organisasi maupun kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, Dewan Komisaris mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk terus meningkatkan komitmen terhadap tata kelola perusahaan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan prinsip keberlanjutan.

Untuk memperkuat integritas bisnis, implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun cakupannya. Salah satu langkah penting adalah dengan menyusun *Fraud Risk Assessment* (FRA) terhadap proses bisnis korporat, guna mencegah potensi kecurangan (*fraud*). Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya kebijakan Direksi dalam perluasan sertifikasi SMAP ke seluruh Unit Bisnis dan Anak Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memastikan seluruh proses bisnis, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan PLN Indonesia Power terbebas dari potensi fraud, pelanggaran terhadap ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk terbebas dari segala tindakan yang dapat dikategorikan memenuhi unsur tindak pidana korupsi maupun merugikan kepentingan Perusahaan serta tindakan yang menyebabkan potensi kerugian negara.

Manajemen risiko dan sistem pengendalian internal merupakan bagian dari aspek process system untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Pengelolaan risiko mencakup risiko

Indonesian GCG General Guidelines (PUGKI). The results of these assessments consistently show excellent outcomes, reflecting the strong governance practices currently implemented at PLN Indonesia Power, and also serving as valuable feedback for future GCG improvements and enhancements. The Board of Commissioners fully supports the efforts of the Board of Directors in strengthening the Company's corporate governance implementation, including refining policies and ensuring that GCG practices remain aligned with the Company's evolving business dynamics, as well as collaborating with relevant institutions when necessary to gain insights that will further improve the quality of the Company's governance on a continuous basis.

The Board of Commissioners, with the support of the Audit Committee, has conducted oversight of the implementation of corporate governance at PLN Indonesia Power and assessed that it has been carried out properly. The responsibility for governance implementation lies with all of the Company's organs, in accordance with their respective levels within the organization and authority. Therefore, the Board of Commissioners calls on all involved parties to continue strengthening their commitment to corporate governance as part of the efforts to uphold the principles of sustainability.

To reinforce business integrity, the implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS) ISO 37001:2016 must continue to be enhanced in terms of both quality and coverage. One crucial step is the development of a Fraud Risk Assessment (FRA) for corporate business processes to prevent potential fraud. The Board of Commissioners fully supports the Board of Directors' policy to expand ABMS certification across all Business Units and Subsidiaries. Furthermore, the Board of Commissioners urges the Board of Directors to ensure that all business processes, both directly and indirectly related to PLN Indonesia Power, are free from potential fraud, violations of applicable laws and regulations, as well as any actions that could be categorized as criminal acts of corruption, detrimental to the Company's interests, or potentially causing losses to the state.

Risk management and internal control systems are integral components of process systems that support more informed and effective decision-making. Risk management encompasses operational and non-operational

operasional dan non operasional, risiko bisnis, dan risiko yang akan datang. Dewan Komisaris berpendapat bahwa penguatan tata kelola dan fungsi manajemen risiko perlu terus dilakukan serta melakukan *monitoring* secara berkala terhadap peta risiko dalam RKAP dan risiko hasil dari progress mitigasi risiko yang dilakukan agar terukur dalam upaya pencapaian target kinerja yang lebih baik. Selain itu, Direksi dan jajaran manajemen PLN Indonesia Power perlu mempersiapkan secara komprehensif dokumen *Benefit Cost Analysis* dari suatu proyek investasi serta implementasi programnya untuk menjamin bahwa program pengembangan usaha dapat memberikan manfaat bagi Perusahaan secara berkesinambungan. Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya langkah Direksi dalam penilaian risiko keberlanjutan sebagai upaya adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan iklim.

risks, business risks, and emerging risks. The Board of Commissioners believes that strengthening governance and the risk management function must be continuously pursued, along with regular monitoring of the risk map in the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and the risks identified from the progress of mitigation efforts, to ensure measurable outcomes in achieving better performance targets. In addition, the Board of Directors and the management team of PLN Indonesia Power need to comprehensively prepare Benefit-Cost Analysis documents for investment projects and their program implementation, to ensure that business development initiatives generate sustainable benefits for the Company. The Board of Commissioners fully supports the initiatives of the Board of Directors in conducting sustainability risk assessments as part of efforts to improve adaptation to climate change.

Frekuensi dan Tata Cara Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Frequency and Procedures for Providing Advice to the Board of Directors

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memberikan berbagai tanggapan, saran atau rekomendasi dan nasihat kepada Direksi termasuk arahan dalam upaya pencapaian target PLN Indonesia Power setiap tahun, yang disampaikan melalui mekanisme rapat, baik rapat internal maupun rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi (rapat gabungan dengan Direksi). Selain itu, Dewan Komisaris juga dapat melakukan kunjungan lapangan ke unit bisnis bersama dengan Komite di bawah Dewan Komisaris untuk mendapatkan perspektif langsung dari lokasi kerja sehingga dapat memberikan masukan dan arahan yang sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 25 (dua puluh lima) kali rapat, yang terdiri dari rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 13 (tiga belas) kali rapat dan rapat gabungan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam kedua rapat tersebut adalah 96% dan 95%. Agenda rapat internal Dewan Komisaris tahun 2024 diantaranya membahas terkait dengan isu-isu strategis Perusahaan, tindak lanjut atas keputusan atau rekomendasi dalam rapat Dewan Komisaris sebelumnya, dan pergantian anggota komite sebagai organ pendukung Dewan Komisaris. Adapun agenda rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi membahas diantaranya terkait persiapan RUPS RKAP Tahun 2024, laporan kinerja Perusahaan bulanan, laporan perkembangan proyek EBT dan proyek strategis lainnya, monitoring dan evaluasi kinerja K3 dan Lingkungan serta isu-isu strategis Perusahaan lainnya.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners provides various responses, suggestions or recommendations, and advice to the Board of Directors, including guidance to support the achievement of PLN Indonesia Power's annual targets. These are conveyed through meeting mechanisms, including internal meetings and joint meetings with the Board of Directors. Besides, the Board of Commissioners may conduct site visits to business units together with the Committees under the Board of Commissioners to gain firsthand insights from the field, thereby enabling the provision of input and guidance tailored to actual needs. Throughout 2024, the Board of Commissioners held a total of 25 (twenty five) meetings, consisting of 13 (thirteen) internal meetings and 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors. The attendance rate of each member of the Board of Commissioners at these meetings was 96% for internal meetings and 95% for joint meetings. The agendas of the 2024 internal meetings of the Board of Commissioners included discussions on the Company's strategic issues, follow-ups on decisions or recommendations from previous meetings, and changes in committee members under the Board of Commissioners. Meanwhile, the joint meetings with the Board of Directors covered matters such as preparations for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the Corporate Work Plan and Budget (RKAP), monthly Company performance reports, updates on NRE projects and other strategic projects, monitoring, and evaluation of OHS performance, as well as other strategic issues of the Company.

Di samping melalui rapat, tata cara pemberian saran dan nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi juga dilakukan dengan sarana komunikasi tertulis melalui Surat Rekomendasi Dewan Komisaris maupun komunikasi informal secara langsung maupun dengan media elektronik tertentu, termasuk melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite di bawah Dewan Komisaris. Dalam memberikan saran dan nasihat tersebut, Dewan Komisaris mempertimbangkan masukan dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang secara aktif melakukan pengawasan terhadap area yang menjadi bidang tugas setiap komite.

In addition to meetings, the procedures for providing suggestions and advice from the Board of Commissioners to the Board of Directors are also carried out through written communication, such as Recommendation Letters from the Board of Commissioners, or through direct informal communication and selected electronic media. These recommendations and advice take into consideration the input from the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Investment and Risk Management Committee, which actively supervise their respective areas of responsibility.

Mendukung Tercapainya Masa Depan Rendah Karbon Supporting the Achievement of Low Carbon Future

Terkait pengawasan atas implementasi prinsip *Environmental* (E) dan *Social* (S) dalam kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG), Dewan Komisaris memberikan dukungan penuh terhadap strategi dan kebijakan yang disusun oleh Direksi. Dukungan ini terutama difokuskan pada peningkatan kinerja di bidang lingkungan, guna mewujudkan *Sustainable Power Generation* dan memberikan kontribusi nyata dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, PLN Indonesia Power memegang peran strategis dalam mendukung terciptanya masa depan rendah karbon, melalui pengoperasian pembangkit listrik yang semakin ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Regarding the oversight of the implementation of Environmental (E) and Social (S) principles within the Environmental, Social, and Governance (ESG) framework, the Board of Commissioners fully supports the strategies and policies formulated by the Board of Directors. This support is primarily focused on improving environmental performance to realize Sustainable Power Generation and to make a tangible contribution in addressing the challenges of climate change. As part of this commitment, PLN Indonesia Power plays a strategic role in supporting the creation of a low-carbon future through the operation of increasingly environmentally friendly and sustainable power plants.

Selain itu, Dewan Komisaris juga memastikan bahwa PLN Indonesia Power terus meningkatkan komitmen dalam menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif, termasuk upaya pengurangan emisi karbon, peningkatan efisiensi penggunaan energi, serta penyampaian informasi terkait emisi karbon secara transparan kepada pemangku kepentingan. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 14 (empat belas) unit PLTU berhasil melaksanakan perdagangan karbon melalui mekanisme Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE). Selain itu, terdapat 3 (tiga) pembangkit yang telah memperoleh Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE), yaitu PLTM Gunung Wugul, PLTGU Priok, dan PLTGU Grati. Ke depannya, Dewan Komisaris berharap akan semakin banyak lagi PLTU yang melakukan perdagangan karbon melalui PTBAE dan pembangkit yang memperoleh SPE.

Furthermore, the Board of Commissioners ensures that PLN Indonesia Power continues to strengthen its commitment to conducting sustainable and environmentally responsible business practices. This is reflected through various initiatives, including efforts to reduce carbon emissions, improve energy use efficiency, and communicate carbon emission information transparently to stakeholders. In 2024, a total of 14 (fourteen) SPP units successfully participated in carbon trading through the Technical Approval of Emission Cap (PTBAE) mechanism. Furthermore, 3 (three) power plants obtained Emission Reduction Certificates (SPE), namely Gunung Wugul MHP, Priok CCPP, and Grati CCPP. In the future, the Board of Commissioners hopes that more SPPs will engage in carbon trading through the PTBAE mechanism and that more power plants will obtain Emission Reduction Certificates (SPE).

Dewan Komisaris senantiasa mendorong PLN Indonesia Power untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang dapat mendukung transisi energi menuju ekonomi rendah karbon dan tercapainya target emisi nol karbon pada tahun 2060, antara lain dengan mendorong investasi pada energi terbarukan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Pengembangan pembangkit ramah lingkungan terus ditingkatkan, antara lain melalui program bauran energi dengan *co-firing* 100% *biomass*, pendirian tempat produksi biomassa di kota Medan serta selesainya pembangunan PLTS Hybrid Nusa Penida, pembangunan *Green Hydrogen Plant* (GHP) di UBP Kamojang sebagai penghasil hidrogen hijau (*green hydrogen*) berbasis panas bumi pertama di Asia Tenggara dan memasok hidrogen hijau untuk *Hydrogen Refueling Station* (HRS) di Senayan Jakarta yang sudah mulai dioperasikan. Tentunya, hasil kinerja ini menjadi tonggak penting dan perlu terus ditingkatkan pencapaiannya di masa mendatang. Disamping itu, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk terus mengupayakan peningkatan budaya risiko dan budaya keselamatan ketenagalistrikan atau keselamatan kerja melalui penerapan *contractor safety management* dalam menjaga target pencapaian *zero accident* di PLN Indonesia Power.

Dewan Komisaris senantiasa mendorong PLN Indonesia Power untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang mendukung transisi energi menuju ekonomi rendah karbon serta pencapaian target *net zero emission* pada tahun 2060. Upaya ini antara lain diwujudkan melalui dorongan investasi pada energi terbarukan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Pengembangan pembangkit berbasis energi bersih terus ditingkatkan, termasuk melalui:

- Program bauran energi dengan *co-firing* 100% biomassa,
- Pendirian fasilitas produksi biomassa di Kota Medan,
- Penyelesaian pembangunan PLTS Hybrid Nusa Penida, serta
- Pembangunan *Green Hydrogen Plant* (GHP) di UBP Kamojang sebagai penghasil hidrogen hijau berbasis panas bumi pertama di Asia Tenggara. Hidrogen hijau dari fasilitas ini telah digunakan untuk memasok *Hydrogen Refueling Station* (HRS) di Senayan, Jakarta, yang saat ini sudah mulai beroperasi.

Pencapaian-pencapaian tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan transisi energi dan perlu terus ditingkatkan di masa mendatang.

The Board of Commissioners consistently encourages PLN Indonesia Power to develop and implement strategies that support the energy transition toward a low-carbon economy and the achievement of net-zero carbon emissions by 2060. This includes promoting investment in renewable energy and the use of environmentally friendly technologies. The development of environmentally friendly power plants continues to be enhanced through various initiatives, including the energy mix program with 100% biomass co-firing, the establishment of a biomass production facility in Medan, and the completion of the Nusa Penida Hybrid SoPP, as well as the construction of a Green Hydrogen Plant (GHP) at GBU Kamojang, the first geothermal-based green hydrogen producer in Southeast Asia, which supplies green hydrogen to the Hydrogen Refueling Station (HRS) in Senayan, Jakarta, which is now operational. These achievements mark significant milestones and must continue to be improved upon in the future. In addition, the Board of Commissioners requests the Board of Directors to continuously strive to enhance the risk culture and electrical safety or occupational safety culture through the implementation of contractor safety management to maintain the achievement of the zero-accident target at PLN Indonesia Power.

The Board of Commissioners consistently encourages PLN Indonesia Power to develop and implement strategies that support the energy transition toward a low-carbon economy and the achievement of net zero emissions by 2060. These efforts are reflected, among others, in promoting investment in renewable energy and the use of environmentally friendly technologies. The development of clean energy-based power plants continues to be advanced through initiatives such as:

- Energy mix programs with 100% biomass co-firing,
- Establishment of a biomass production facility in Medan,
- Completion of the Nusa Penida Hybrid SoPP, and
- Construction of a Green Hydrogen Plant (GHP) at GBU Kamojang, the first geothermal-based green hydrogen producer in Southeast Asia. The green hydrogen produced at this facility has been used to supply the Hydrogen Refueling Station (HRS) in Senayan, Jakarta, which is now operational.

These achievements mark important milestones in the energy transition journey and must continue to be improved in the future.

Selain itu, Dewan Komisaris juga meminta Direksi untuk terus memperkuat budaya risiko dan budaya keselamatan ketenagalistrikan (keselamatan kerja), melalui penerapan *Contractor Safety Management* guna menjaga pencapaian target *zero accident* di seluruh lingkungan PLN Indonesia Power.

Terkait pengawasan dalam penerapan regulasi, Dewan komisaris memastikan PLN Indonesia Power mematuhi regulasi terkait pengelolaan lingkungan maupun mitigasi perubahan iklim, termasuk regulasi tentang emisi karbon dan pajak karbon. Untuk itu, diperlukan dukungan SDM untuk senantiasa *up to date* dengan standar kompetensi atau kualifikasi profesional bidang tertentu guna memenuhi kebutuhan perkembangan bisnis Perusahaan saat ini dan juga masa depan.

Moreover, the Board of Commissioners requests the Board of Directors to continue strengthening the risk culture and electrical safety (occupational safety) culture through the implementation of Contractor Safety Management, in order to maintain the achievement of a zero-accident target throughout PLN Indonesia Power.

Regarding regulatory compliance oversight, the Board of Commissioners ensures that PLN Indonesia Power adheres to regulations related to environmental management and climate change mitigation, including those governing carbon emissions and carbon taxes. To support this, competent human resources are required, professionals who are consistently up to date with current competency standards or qualifications in specific fields, to meet the needs of the Company's current and future business developments.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Board of Commissioners' Committees

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasihat dibantu oleh 3 (tiga) Komite Dewan Komisaris, yang terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Lainnya yaitu Komite Investasi dan Manajemen Risiko. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/3/2023 tentang Organ Sumber Daya Manusia BUMN tanggal 23 Maret 2023.

In carrying out its supervisory and advisory functions, the Board of Commissioners is supported by 3 (three) Board of Commissioners Committees, consisting of: the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Other Committee, namely the Investment and Risk Management Committee. This structure aligns with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Number: PER-3/MBU/3/2023 on Human Resource Organs of SOEs dated March 23, 2023.

Komite Audit Audit Committee

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal, melakukan telaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan PLN Indonesia Power, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya serta menelaah pelaksanaan tugas audit internal maupun eksternal. Selain itu, Komite Audit juga bertugas mengawasi implementasi GCG, termasuk melakukan telaah atas Laporan Audit Investigasi terhadap indikasi kecurangan apabila terjadi. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit berjalan efektif, pada Desember 2024 dilakukan pemutakhiran Piagam Komite Audit, yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No.017.SK/DK-PLNIP/2024 sebagai pembaharuan Piagam Komite Audit tanggal 23 Desember 2022.

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in assessing the internal control system, reviewing financial information to be released by PLN Indonesia Power, such as financial statements, projections, and other financial data, as well as reviewing the execution of internal and external audit duties. The Audit Committee is also responsible for overseeing the implementation of Good Corporate Governance (GCG), including reviewing investigative audit reports in the event of fraud indications. To ensure the effectiveness of the Audit Committee's duties and responsibilities, in December 2024 the Audit Committee Charter was updated, as stipulated in the Board of Commissioners' Decision No. 017.SK/DK-PLNIP/2024, replacing the previous Audit Committee Charter dated December 23, 2022.

Selama tahun 2024 Komite Audit telah melaksanakan rapat internal komite sebanyak 40 (empat puluh) kali rapat yang terdiri dari rapat internal Komite Audit, rapat berkala dengan Dewan Komisaris, rapat Komite Audit dengan Direksi dan rapat Komite Audit dengan Departemen Internal Audit sesuai dengan program kerja Komite Audit. Agenda rapat Komite Audit antara lain membahas telaah atas informasi keuangan Perusahaan setiap bulan, menelaah program kerja audit tahunan, mengevaluasi kebijakan dan penerapan sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta *monitoring* terhadap penerapan GCG.

Throughout 2024, the Audit Committee held a total of 40 (forty) internal meetings, consisting of internal Audit Committee meetings, regular meetings with the Board of Commissioners, meetings with the Board of Directors, and meetings with the Internal Audit Department in accordance with the Audit Committee's work program. The agenda of the Audit Committee meetings included monthly reviews of the Company's financial information, evaluations of the annual audit work program, assessments of internal control policy and implementation, the effectiveness of both internal and external audit execution, and monitoring the implementation of GCG.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) membantu Dewan Komisaris dalam mengembangkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasinya, termasuk melakukan review secara berkala atas implementasi sistem manajemen talenta (*talent management system*) Perusahaan sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No 008.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 27 September 2023 sebagai pembaharuan atas Piagam KNR tanggal 17 Oktober 2023.

The Nomination and Remuneration Committee (KNR) assists the Board of Commissioners in developing criteria for the selection of prospective members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as designing the remuneration system. This includes conducting periodic reviews of the implementation of the Company's talent management system, in accordance with the Nomination and Remuneration Committee Charter as stipulated in the Board of Commissioners' Decision No. 008.SK/DK-PLNIP/2023 dated September 27, 2023, which updates the previous KNR Charter dated October 17, 2023.

Selama tahun 2024 Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali rapat, terdiri dari rapat internal sebanyak 3 (tiga) kali, rapat berkala dengan Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali dan rapat dengan Direktur MHC yang membidangi SDM sebanyak 12 (dua belas) kali. Agenda rapat KNR antara lain membahas terkait dengan laporan kinerja dan manajemen Perusahaan, evaluasi dokumen nominasi dan remunerasi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, dan kinerja korporat dalam KPI Perusahaan bidang SDM, yaitu mengenai *Human Capital Readiness* (HCR), *Organization Capital Readiness* (OCR) dan *Information Capital Readiness* (ICR).

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee held a total of 27 (twenty-seven) meetings, consisting of 3 (three) internal meetings, 12 (twelve) regular meetings with the Board of Commissioners, and 12 (twelve) meetings with the Director of MHC in charge of Human Resources. The NRC meeting agendas included discussions on Company performance and management reports, evaluations of nomination and remuneration documents requiring Board of Commissioners' approval, and corporate performance in the Company's HR-related KPIs, namely Human Capital Readiness (HCR), Organization Capital Readiness (OCR), and Information Capital Readiness (ICR).

Komite Investasi dan Manajemen Risiko Investment and Risk Management Committee

Komite Investasi dan Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris terkait dengan perencanaan, investasi dan operasi Perusahaan serta penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001.SK/DK-PLNIP/2025 tanggal 6 Januari 2025 sebagai pembaharuan atas Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko tanggal 10 Desember 2019.

Selama tahun 2024, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melaksanakan 17 (tujuh belas) kali rapat yang terdiri dari 12 (dua belas) kali rapat internal Komite, 16 (enam belas) kali rapat berkala dengan Dewan Komisaris, 15 (lima belas) kali rapat dengan Divisi terkait Risiko dan 3 (tiga) kali Rapat dengan Satuan Legal, Risk and Compliance. Agenda rapat antara lain membahas terkait dengan monitoring risiko korporat dan profil risiko korporat, mengkaji usulan RKAP dan investasi, mengevaluasi dokumen manajemen risiko (DMR) yang disampaikan oleh Direksi dalam pengajuan suatu program Perusahaan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko selama tahun 2024, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah melakukan penilaian kinerja terhadap ketiga Komite di atas mengacu pada Piagam masing-masing Komite yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja Komite Dewan Komisaris dievaluasi setiap triwulan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite. Kriteria penilaian kinerja ketiga Komite mencakup aspek, yaitu kontribusi terhadap pencapaian target Komite; jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi Komite; tingkat keaktifan dalam kegiatan Komite; kerjasama dalam Komite serta mutu dan kualitas konsep yang dihasilkan. Hasil penilaian komite tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

The Investment and Risk Management Committee assists the Board of Commissioners in matters related to corporate planning, investment, operations, and the implementation of risk management, as outlined in the Investment and Risk Management Committee Charter set forth in the Board of Commissioners' Decision No. 001.SK/DK-PLNIP/2025 dated January 6, 2025, which updates the previous Charter dated December 10, 2019.

In 2024, the Investment and Risk Management Committee held 17 (seventeen) meetings, comprising 12 (twelve) internal committee meetings, 16 (sixteen) regular meetings with the Board of Commissioners, 15 (fifteen) meetings with the Risk-related Division, and 3 (three) meetings with the Legal, Risk, and Compliance Unit. The agenda of these meetings included discussions on corporate risk monitoring and corporate risk profiles, reviewing the proposed Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and investment initiatives, evaluating risk management documents (DMR) submitted by the Board of Directors in support of corporate programs requiring Board of Commissioners' approval, assessing the implementation of risk management throughout 2024, and addressing other strategic issues of concern to the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners has conducted performance evaluations of all three committees in accordance with each committee's Charter, which outlines their respective duties and responsibilities. The performance of the committees is evaluated quarterly based on the realization and completion of the work programs outlined in the Committees' Work Plan and Budget. The performance evaluation criteria include contributions to the achievement of committee targets; the number of studies, analyses, and recommendations produced; level of active participation in committee activities; collaboration within the committee; and the quality of the outputs and recommendations delivered. The results of these evaluations serve as a basis for the Board of Commissioners in considering the reappointment and/or dismissal of members of the Audit Committee for the next term of office.

Pandangan atas *Whistleblowing System* (WBS)

Views on the Whistleblowing System (WBS)

Dewan Komisaris meyakini bahwa implementasi WBS menjadi upaya PLN Indonesia Power dalam membangun budaya yang semakin transparan, lebih akuntabel, serta mendorong terwujudnya perilaku etis di lingkungan organisasi Perusahaan. Dalam rangka memperkuat sistem WBS, di tahun 2024 PLN Indonesia Power melakukan evaluasi dengan memperbarui kebijakan WBS dengan terbitnya Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 0020.P/DIR/2024 dan 011.SK/DK-PLNIP/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PLN Indonesia Power.

Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS terdiri dari penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta kejadian benturan kepentingan, perbuatan korupsi, gratifikasi dan suap, praktik bisnis yang melanggar hukum dan peraturan Perusahaan, maupun pelanggaran etika Pegawai. WBS menjadi sarana bagi pegawai, pelanggan, mitra dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan adanya indikasi pelanggaran. Seluruh pegawai dan pemangku kepentingan diharapkan dapat aktif untuk melaporkan adanya indikasi pelanggaran WBS sehingga WBS dapat berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini (*early warning system*) yang memungkinkan penyampaian laporan secara rahasia (*anonym*) mengenai dugaan pelanggaran atau penyimpangan. Hal ini memberikan kesempatan bagi PLN Indonesia Power untuk menangani masalah pelanggaran secara internal sebelum meluas dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Dengan terbitnya Kebijakan WBS 2024, pihak yang pengelola pengaduan WBS juga mengalami perubahan dan ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor: 1004.K/020/IP/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS). Keputusan tersebut memberikan kewenangan yang lebih jelas dan terukur dalam menangani pelaporan pelanggaran, termasuk pihak yang berwenang untuk menerima, menelaah, melakukan investigasi, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut atas pengaduan WBS. Tim Pengelola WBS ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan oknum pelaku pelanggaran yang dilaporkan.

The Board of Commissioners believes that the implementation of the Whistleblowing System (WBS) serves as PLN Indonesia Power's effort to cultivate a more transparent and accountable culture while promoting ethical behavior throughout the Company's organizational environment. To strengthen the WBS system, in 2024 PLN Indonesia Power conducted an evaluation and updated its WBS policy through the issuance of the Joint Decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 0020.P/DIR/2024 and 011.SK/DK-PLNIP/2024 dated May 20, 2024, on the Policy on the Management of Violation Complaints (Whistleblowing System) of PLN Indonesia Power.

Types of violations that can be reported through the WBS include abuse of authority and position, conflicts of interest, acts of corruption, gratification and bribery, unlawful business practices that breach Company regulations, and violations of employee ethics. The WBS serves as a reporting channel for employees, customers, partners, and other stakeholders to report suspected violations. All employees and stakeholders are encouraged to proactively report any indications of violations through the WBS so that it can function as an early warning system, enabling confidential (anonymous) reporting of suspected misconduct or irregularities. This provides PLN Indonesia Power with the opportunity to address violations internally before they escalate and potentially cause greater harm.

With the issuance of the 2024 WBS Policy, the parties responsible for managing WBS complaints have also undergone changes, as stipulated in the Board of Directors' Decision No. 1004.K/020/IP/2024 dated November 4, 2024, on the Establishment of the Whistleblowing System (WBS) Management Team. This decision provides clearer and more measurable authority in handling violation reports, including the parties authorized to receive, review, investigate, and provide follow-up recommendations on WBS complaints. The WBS Management Team is assigned hierarchically based on the reported perpetrator of the violation.

Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan pembahasan atas efektivitas dan tindak lanjut laporan WBS yang masuk, baik secara internal maupun rapat bersama dengan Satuan Internal Audit. Berdasarkan Kebijakan WBS 2024, Dewan Komisaris akan menjadi Tim Pengelola WBS apabila yang dilaporkan melibatkan oknum anggota Direksi, dan anggota komite Dewan Komisaris. Apabila oknum yang dilaporkan melibatkan anggota Dewan Komisaris maka Tim Pengelola WBS yang berwenang adalah Pemegang Saham. Selain itu, Dewan Komisaris memberikan masukan/arahan terkait laporan WBS yang masuk, termasuk tindak lanjut yang diperlukan. Selama tahun 2024 terdapat 23 (dua puluh tiga) pengaduan WBS yang masuk, meningkat dibandingkan jumlah pengaduan tahun sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) pengaduan, dan 19 telah selesai ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan, tingkat kepercayaan *stakeholders* yang semakin baik terhadap WBS. Dari seluruh laporan WBS yang diterima, tidak terdapat laporan yang dikategorikan sebagai praktik korupsi dan juga tidak terdapat kasus yang berakhir pada pemberian sanksi kepada pegawai akibat pelaporan WBS tersebut.

The Board of Commissioners, through the Audit Committee, discusses the effectiveness and follow-up of incoming WBS reports, both internally and in joint meetings with the Internal Audit Unit. According to the 2024 WBS Policy, the Board of Commissioners will act as the WBS Management Team if the reported individual is a member of the Board of Directors or a member of a Board of Commissioners' committee. If the reported party is a member of the Board of Commissioners, then the authorized WBS Management Team is the Shareholders. Additionally, the Board of Commissioners provides input and direction related to incoming WBS reports, including the necessary follow-up actions. In 2024, there were 23 (twenty-three) WBS complaints submitted, an increase from 10 (ten) complaints in the previous year, with 19 of them having been resolved. This indicates growing stakeholder trust in the WBS mechanism. Of all WBS reports received, none were categorized as corruption practices, and no cases resulted in sanctions being imposed on employees due to WBS reporting.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Changes in the Board of Commissioners' Composition

Selama tahun 2024 tidak terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris PLN Indonesia Power, hanya terdapat pengalihan nomenklatur Komisaris Utama menjadi Komisaris dan sebaliknya, serta tetap berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:

Iskandar Simorangkir* : Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen

Wiluyo Kusdiharto** : Komisaris

Djoko Siswanto : Komisaris

M.P Dwinugroho : Komisaris

Haryanto W.S. : Komisaris

Arief Budiman : Komisaris

Lukmanul Hakim : Komisaris Independen

Throughout 2024, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners of PLN Indonesia Power, there was only a change in nomenclature from President Commissioner to Commissioner and vice versa and remained at 7 (seven) members with the following structure:

Iskandar Simorangkir* : President Commissioner
concurrently Independent
Commissioner

Wiluyo Kusdiharto** : Commissioner

Djoko Siswanto : Commissioner

M.P Dwinugroho : Commissioner

Haryanto W.S. : Commissioner

Arief Budiman : Komisaris

Lukmanul Hakim : Independent Commissioner

* Pengalihan nomenklatur Sdr. Iskandar Simorangkir yang diangkat melalui RUPS Perusahaan tanggal 29 Februari 2024, semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan.

** Pengalihan nomenklatur Sdr. Wiluyo Kusdiharto yang diangkat melalui RUPS Perusahaan tanggal 29 Februari 2024, semula sebagai Komisaris Utama menjadi Komisaris Perusahaan.

* Adjustment in nomenclature for Mr. Iskandar Simorangkir, who was appointed through the Company's GMS dated February 29, 2024, initially as Commissioner, was reassigned as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner of the Company.

** Adjustment in nomenclature for Mr. Wiluyo Kusdiharto, who was appointed through the Company's GMS dated February 29, 2024, initially as President Commissioner, was reassigned as Commissioner of the Company.

Komposisi Dewan Komisaris PLN Indonesia Power telah mencerminkan keberagaman yang memenuhi standar, dengan aspek latar belakang, keahlian, dan pengalaman yang saling melengkapi untuk memperkuat kapasitas internal dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penasihat guna mencapai tujuan jangka panjang Perusahaan.

The composition of the Board of Commissioners of PLN Indonesia Power reflects a well-balanced diversity that meets established standards, with complementary backgrounds, expertise, and experience that enhance internal capacity in carrying out supervisory and advisory duties to achieve the Company's long-term objectives.

Komposisi Dewan Komisaris Setelah Tahun Buku 2024

Composition of the Board of Commissioners After the 2024 Fiscal Year

Setelah tahun buku 2024 berakhir sampai dengan waktu penyampaian Laporan Tahunan ini, terjadi 2 (dua) kali perubahan komposisi Dewan Komisaris PLN Indonesia Power, menjadi sebagai berikut:

After the end of the 2024 fiscal year and up to the submission of this Annual Report, there have been two changes in the Board of Commissioners' composition of PLN Indonesia Power, as follows:

Iskandar Simorangkir	: Pelaksana Tugas Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Djoko Siswanto	: Komisaris
M.P Dwinugroho	: Komisaris
Arief Budiman	: Komisaris
Haryanto W.S.	: Komisaris Independen
Lukmanul Hakim	: Komisaris Independen

Iskandar Simorangkir	: Acting President Commissioner concurrently Independent Commissioner
Djoko Siswanto	: Commissioner
M.P Dwinugroho	: Commissioner
Arief Budiman	: Commissioner
Haryanto W.S.	: Independent Commissioner
Lukmanul Hakim	: Independent Commissioner

Apresiasi Appreciation

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan para pemegang saham serta apresiasi kepada Direksi dan seluruh jajaran Manajemen PLN Indonesia Power yang berhasil menghadapi tantangan tahun 2024 dengan pencapaian positif. Kami juga berterima kasih kepada seluruh Insan PLN Indonesia Power, pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan atas dukungan dan kerja samanya. Dewan Komisaris optimis bahwa PLN Indonesia Power dapat terus meningkatkan kinerja operasional dan keuangannya secara berkelanjutan. Ke depan, Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara optimal demi kemajuan PLN Indonesia Power. Mari bersama menciptakan dampak positif bagi pelanggan, lingkungan, dan masyarakat menuju masa depan yang berkelanjutan. Demikian Laporan Tugas Pengawasan ini kami sampaikan.

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to express our gratitude for the trust placed in us by the shareholders, as well as our appreciation to the Board of Directors and the entire management of PLN Indonesia Power for successfully overcoming the challenges of 2024 with positive achievements. We also extend our thanks to all PLN Indonesia Power personnel, customers, business partners, and stakeholders for their continued support and cooperation. The Board of Commissioners is optimistic that PLN Indonesia Power will continue to enhance its operational and financial performance in a sustainable manner. In the future, we will continue to carry out our supervisory and advisory functions optimally for the advancement of PLN Indonesia Power. Let us work together to create a positive impact for customers, the environment, and society toward a sustainable future. This concludes our Supervisory Report.

Jakarta, 31 Mei 2025

Jakarta, May 31, 2025

Atas Nama Dewan Komisaris On behalf of the Board of Commissioners

PT PLN Indonesia Power

Iskandar Simorangkir

Pelaksana Tugas Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Acting President Commissioner concurrently Independent Commissioner

Laporan Direksi

Report of the Board of Directors



**Edwin
Nugraha Putra**

Direktur Utama
President Director



Perubahan lanskap bisnis pasca HSH telah membentuk Kami menjadi organisasi yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Pada tahun 2024 PLN Indonesia Power berhasil menjaga eksistensi dan mencatatkan kinerja yang solid dan membanggakan. Hal ini sejalan dengan tema tahun 2024, yaitu “Enhancing Governance for Energy Security and Sustainable Future”. Kami terus memperkuat tata kelola, baik dalam operasional pembangkit, aspek governansi perusahaan, maupun fungsi pendukung lainnya. Semua itu Kami lakukan dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, sebagai wujud komitmen dalam mendukung kemandirian energi menuju masa depan yang berkelanjutan.

The changing business landscape following the HSH has shaped us into a resilient organization capable of facing various challenges. In 2024, PLN Indonesia Power successfully maintained its existence and recorded a solid and commendable performance. This aligns with the 2024 theme, “Enhancing Governance for Energy Security and Sustainable Future.” We continue to strengthen governance, both in power plant operations, corporate governance aspects, and other supporting functions. All these are carried out with a strong adherence to the principle of integrity, as a form of our commitment to supporting energy independence toward a sustainable future.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga PLN Indonesia Power dapat melalui tahun 2024 dengan pencapaian kinerja solid dan membanggakan. PLN Indonesia Power berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan. Merupakan suatu kehormatan bagi Kami, jajaran Direksi untuk menyampaikan Laporan Tahunan 2024 ini, yang memuat uraian pelaksanaan strategi yang dijalankan Direksi dalam merespon berbagai tantangan, analisis atas pencapaian kinerja Perusahaan dibandingkan dengan target, prospek usaha, perkembangan penerapan governansi Perusahaan, serta perubahan komposisi Direksi beserta alasannya, jika terdapat perubahan selama tahun berjalan.

Dear Shareholders and Stakeholders,

We offer our heartfelt gratitude to God Almighty for His abundant blessings and grace, which have enabled PLN Indonesia Power to navigate the year 2024 with solid and commendable performance achievements. PLN Indonesia Power has successfully maintained its momentum of sustainable growth. It is an honor for us, the Board of Directors, to present this 2024 Annual Report, which outlines the strategies implemented by the Board of Directors in responding to various challenges, an analysis of the Company's performance achievements compared to the targets, business prospects, developments in the implementation of corporate governance, as well as changes in the composition of the Board of Directors along with the reasons, if any changes occurred during the year.

Tinjauan Ekonomi 2024 dan Kondisi Industri Listrik Nasional **2024 Economic Overview and the National Electricity Industry Condition**

Kondisi ekonomi global pada tahun 2024 menghadapi tantangan yang cukup kompleks dengan risiko perlambatan yang signifikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain berlanjutnya ketidakpastian geopolitik di sejumlah kawasan, perlambatan ekonomi di negara-negara maju, fragmentasi perdagangan dunia dan fluktuasi harga komoditas. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan mencapai 3,2%, sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,1%.

The Global Economic Conditions in 2024 faced considerable challenges, with significant risks of slowdown. Several contributing factors included ongoing geopolitical uncertainties in various regions, economic deceleration in developed countries, global trade fragmentation, and commodity price fluctuations. According to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), global economic growth in 2024 was projected to reach 3.2%, slightly improving from the previous year's 3.1%.

Menurut International Agency Energy, permintaan listrik global diperkirakan akan meningkat pesat dalam tiga tahun ke depan, dengan proyeksi pertumbuhan rata-rata sebesar 3,4% per tahun hingga 2026. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya prospek ekonomi global, yang mendorong permintaan listrik, baik di negara maju maupun negara berkembang. Kenaikan konsumsi listrik terutama dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain meningkatnya kebutuhan pendingin karena suhu ekstrim, peningkatan aktivitas industri, elektrifikasi transportasi, serta meluasnya pusat data dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara masif.

Adapun perekonomian nasional tetap tangguh di tahun 2024, mencapai 5,03% di tengah perlambatan ekonomi global terutama ditopang oleh permintaan domestik atau melambat dari tahun sebelumnya sebesar 5,05%. Investasi tumbuh positif didorong oleh penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan insentif bagi investasi swasta. Nilai tukar Rupiah terhadap USD hingga akhir tahun 2024 adalah Rp16.095, melemah 4,34% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi per posisi Desember 2024 tercatat 1,57% (yoy), terendah sepanjang sejarah, dipicu normalisasi harga pangan dan penyesuaian harga pemerintah.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 memproyeksikan pertumbuhan penjualan listrik nasional sebesar 5,2% pada tahun 2025, atau mencapai 430 TWh, dengan penambahan sekitar 12,1 juta pelanggan baru pada periode 2021-2025. RUPTL juga menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 100% pada tahun 2025. Hingga triwulan I tahun 2025, rasio elektrifikasi tercatat telah mencapai 98,51%. Di samping itu, RUPTL memberikan porsi yang lebih besar terhadap pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), serta memproyeksikan penambahan kapasitas gardu induk dan jaringan transmisi guna meningkatkan kapasitas dan efisiensi sistem kelistrikan nasional.

Analisis Kinerja Tahun 2024

2024 Performance Analysis

Dengan status sebagai *fully asset owner*, PLN Indonesia Power kini telah menjadi perusahaan pembangkitan terbesar di Asia Tenggara dengan total kapasitas 21,08 Giga Watt (GW). Tantangan untuk melanjutkan program Transformasi 2.0 PLN Indonesia Power merupakan amanat pemegang saham, menjadi tanggung jawab besar yang memerlukan kolaborasi seluruh unsur dalam organisasi.

According to the International Energy Agency, global electricity demand is expected to grow rapidly over the next three years, with an average projected growth rate of 3.4% per year until 2026. This increase is driven by improved global economic prospects, which fuel electricity demand in both developed and developing countries. The rise in electricity consumption is primarily influenced by several factors, including higher cooling needs due to extreme temperatures, increased industrial activity, transportation electrification, and the rapid expansion of data centers and widespread adoption of artificial intelligence (AI).

Meanwhile, Indonesia's national economy remained resilient in 2024, recording a growth rate of 5.03% amid the global economic slowdown, slightly lower than the 5.05% growth recorded in the previous year. Investment showed positive growth, supported by the completion of National Strategic Projects and incentives for private investment. The Rupiah exchange rate against the US Dollar stood at Rp16,095 at the end of 2024, a depreciation of 4.34% year-on-year. Inflation as of December 2024 was recorded at 1.57% year-on-year, the lowest in history, driven by normalized food prices and government price adjustments.

The Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2021-2030 projects national electricity sales growth at 5.2% in 2025, reaching 430 TWh, with an additional 12.1 million new customers during the 2021-2025 period. The RUPTL also targets a national electrification ratio of 100% by 2025. As of the first quarter of 2025, the electrification ratio reached 98.51%. In addition, the RUPTL allocates a greater share for the development of New Renewable Energy (NRE) and projects the addition of substation capacity and transmission networks to enhance the capacity and efficiency of the national electricity system.

With its status as a fully asset-owning entity, PLN Indonesia Power has now become the largest power generation company in Southeast Asia, with a total capacity of 21.08 Gigawatts (GW). The challenge of continuing PLN Indonesia Power Transformation 2.0 program, as mandated by the shareholders, is a major responsibility that requires collaboration across all elements of the organization.

Perubahan lanskap bisnis pasca HSH masih memerlukan tindak lanjut melalui penyesuaian di berbagai aspek, termasuk aspek komersial, operasional pembangkit, tata kelola, proses bisnis, SDM dan struktur organisasi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan sepanjang tahun 2024, PLN Indonesia Power berhasil menjaga eksistensi dan mencatatkan kinerja yang membanggakan. Capaian ini sejalan dengan tema Laporan Tahunan 2024, yaitu *"Enhancing Governance for Energy Security and Sustainable Future"*. Kami hadir dengan tata kelola yang kuat, baik di bidang operasional pembangkit, governansi perusahaan, maupun fungsi pendukung lainnya, serta menjunjung tinggi integritas dalam mendukung kemandirian energi menuju masa depan yang berkelanjutan.

Strategi dan Kebijakan Strategis 2024

Strategies and Strategic Policies in 2024

PLN Indonesia Power melanjutkan perjalanan Transformasi PLN IP 2.0 untuk memperkuat peran sebagai *Subholding* dalam mendukung sistem ketenagalistrikan nasional. Transformasi ini dijalankan melalui serangkaian inisiatif strategis yang berfokus pada transisi energi, digitalisasi, peningkatan pendapatan melalui inovasi, penciptaan nilai (*value creation*), serta pengembangan bisnis *beyond kWh*. Menghadapi dinamika tahun 2024, Direksi telah merumuskan strategi dan kebijakan yang selaras dengan aspirasi Pemegang Saham dan arah strategi jangka panjang Perusahaan. Hal ini dituangkan secara konsisten dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024, serta *roll over* Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang telah disetujui oleh Pemegang Saham.

Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power merumuskan *Strategic Goal 2028* sebagai arah transformasi tahunan yang dituangkan ke dalam 3 (tiga) *Transformation Goals* yang menjadi Sasaran Utama Perusahaan, yakni *Global Innovative Growth*, *Performance Excellence*, dan *Sustainable Power Generation*. Ketiganya menjadi dasar dalam mengukur pencapaian aspirasi Visi Perusahaan, "Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka dan Berkelanjutan di Kawasan Asia Tenggara Maupun Kawasan Lainnya." Sasaran Utama tahun 2024 diuraikan ke dalam Program Strategis dan *Key Parameters* yang menjadi target kinerja Perusahaan setiap tahun. Target-target ini diimplementasikan melalui 4 (empat) Program Utama Perusahaan, yaitu:

1. *Expand the Core Moonshot*
2. *Ignite Growth Moonshot*
3. *Digital Driven O&M Excellence*
4. *Sustainability Moonshot*

The shift in the business landscape following the Holding Subholding (HSH) restructuring still requires further follow-up through adjustments in various aspects, including commercial matters, power plant operations, governance, business processes, human resources, and organizational structure. Despite facing numerous challenges throughout 2024, PLN Indonesia Power managed to maintain its existence and record commendable performance. These achievements align with the theme of the 2024 Annual Report: *"Enhancing Governance for Energy Security and Sustainable Future."* We are committed to strong governance, not only in power plant operations and corporate governance but also across all supporting functions, while upholding integrity in supporting energy independence toward a sustainable future.

PLN Indonesia Power continues its PLN IP Transformation 2.0 journey to strengthen its role as a Subholding in supporting the national electricity system. This transformation is carried out through a series of strategic initiatives focused on energy transition, digitalization, revenue enhancement through innovation, value creation, and the development of businesses beyond kWh. In response to the dynamics of 2024, the Board of Directors formulated strategies and policies aligned with the aspirations of the Shareholders and the Company's long-term strategic direction. These strategies were consistently reflected in the 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and the rollover of the Company's Long-Term Plan (RJPP), as approved by the Shareholders.

In 2024, PLN Indonesia Power formulated the Strategic Goal 2028 as the guiding direction for its annual transformation, which is articulated into three Transformation Goals serving as the Company's Main Objectives: *Global Innovative Growth*, *Performance Excellence*, and *Sustainable Power Generation*. These three pillars form the foundation for measuring progress toward the Company's vision: "To become a leading and sustainable power Company in Southeast Asia and beyond". The 2024 Main Objectives are further elaborated into Strategic Programs and Key Parameters, which define the Company's annual performance targets. These targets are implemented through four Main Corporate Programs:

1. *Expand the Core Moonshot*
2. *Ignite Growth Moonshot*
3. *Digital Driven O&M Excellence*
4. *Sustainability Moonshot*

Sasaran Utama Main Target	Key Parameters	Target 2024
Global Innovative Growth	EBITDA (Tn IDR)	26,7
	Beyond kWh Revenue (Bn IDR)	517
	New Project Beyond Indonesia	2
Performance Excellence	EAf	≈89%
	EFor	≈3,2%
	BPP (Rp/kWh)	1249,78
Sustainable Power Generation	Emission Reduction (MtCO ₂ per years)	18,4
	Emission Intensity (MtCO ₂ /TWh)	0,76
	RE Energy Mix (%)	13%
	ESG Risk Rating	High

Seluruh Sasaran dan Program Utama dalam RKAP 2024 dirancang selaras dengan kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG), dan fokus pada peningkatan keandalan pembangkit, penguatan tata kelola pembangkit, serta penciptaan nilai (*value creation*) di lingkungan *Subholding* PLN Indonesia Power. Pelaksanaan Program Utama 2024 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian *cost leadership*, dengan hasil akhir berupa efisiensi biaya operasional (*operation cost saving*), penghematan Biaya Pokok Produksi (BPP) tenaga listrik, serta peningkatan realisasi EBITDA.

Dalam rangka mendukung *Strategic Goal* pertama, *Global Innovative Growth*, yang berfokus pada peningkatan kinerja keuangan melalui pencapaian EBITDA, pendapatan beyond kWh, serta kontrak beyond kWh, PLN Indonesia Power menetapkan 2 (dua) strategi *moonshot*, yaitu:

1. *Expand the Core Moonshot*

Strategi ini difokuskan pada pengembangan bisnis Energi Baru dan Terbarukan (EBT), khususnya panas bumi (*geothermal*), melalui akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Selain itu, fokus juga diberikan pada percepatan penyelesaian proyek EPC agar segera menghasilkan pendapatan.

2. *Ignite Growth Moonshot*

Strategi ini diarahkan pada ekspansi bisnis ke luar negeri untuk meningkatkan kontribusi pendapatan *beyond kWh* dan memperluas portofolio kontrak di luar Indonesia. Di samping itu, *Ignite Growth* juga bertujuan meningkatkan kapabilitas anak perusahaan dalam layanan O&M agar lebih kompetitif dan berdaya saing di pasar global.

Untuk mendukung *Strategic Goal* kedua, *Performance Excellence*, yang menargetkan peningkatan kinerja operasional sebesar 10% berdasarkan standar NERC serta penurunan Biaya Pokok Produksi (BPP) hingga di bawah Rp1.200/kWh pada tahun 2028, PLN Indonesia Power

All Objectives and Main Programs in the 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) were designed in alignment with the Environmental, Social, and Governance (ESG) framework, with a focus on enhancing power plant reliability, strengthening governance practices, and driving value creation within PLN Indonesia Power Subholding. The implementation of the 2024 Main Programs was also aimed at supporting the achievement of cost leadership, with end goals including operation cost savings, reductions in the Electricity Generation Cost (BPP), and increased realization of EBITDA.

In order to support the first Strategic Goal, Global Innovative Growth, which focuses on improving financial performance through EBITDA achievement, revenue beyond kWh, and contracts beyond kWh, PLN Indonesia Power has established two moonshot strategies:

1. *Expand the Core Moonshot*

This strategy focuses on the development of New and Renewable Energy (NRE), particularly geothermal energy, through the acquisition of companies operating in this sector. In addition, focus is placed on accelerating the completion of EPC projects to start generating revenue promptly.

2. *Ignite Growth Moonshot*

This strategy is directed toward expanding business overseas to increase revenue contributions from beyond kWh sources and to broaden the contract portfolio outside Indonesia. Furthermore, Ignite Growth also aims to enhance the capabilities of subsidiaries in O&M services, making them more competitive in the global market.

To support the second Strategic Goal, Performance Excellence, which targets a 10% improvement in operational performance based on NERC standards and aims to reduce the Electricity Generation Cost (BPP) to below Rp1,200/kWh by 2028, PLN Indonesia Power launched the Digital

meluncurkan inisiatif strategis *Digital Driven O&M Excellence Moonshot*. Program ini berfokus pada upaya menjaga keandalan operasional pembangkit melalui optimalisasi operasi dan pemeliharaan (*Operation & Maintenance/O&M*) berbasis digital, dengan mengedepankan prinsip *cost leadership* dan *value creation*. Strategi ini bertujuan untuk mencapai efisiensi berkelanjutan sekaligus memastikan kontribusi terhadap kinerja keuangan dan operasional perusahaan secara menyeluruh.

Sebagai dukungan terhadap *Strategic Goal* ketiga, *Sustainable Power Generation*, yang berfokus pada penurunan emisi, peningkatan bauran energi EBT, dan perbaikan peringkat ESG, PLN Indonesia Power meluncurkan inisiatif *Sustainability Moonshot*. Inisiatif ini difokuskan untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan pasokan biomassa untuk program *co-firing*, melalui sinergi dengan PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dan Anak Perusahaan, PT Artha Daya Coalindo, guna mencapai target bauran energi EBT. Selain itu, Perusahaan juga mendorong peningkatan produksi EBT dari Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) EBT serta melakukan *self-assessment* terhadap peringkat ESG sebagai *baseline* pengukuran aspek keberlanjutan.

Ketiga *Strategic Goals* tersebut didukung oleh *Launchpad* sebagai strategi *enabler* yang berperan penting dalam memperkuat pondasi transformasi PLN Indonesia Power. *Strategic enabler Launchpad* bertujuan untuk meningkatkan portofolio dan kompetensi sumber daya manusia Perusahaan, menyiapkan *talent pool* yang siap mendukung pengembangan bisnis *green* dan *beyond kWh*, serta memperkuat proses bisnis dan struktur organisasi guna menunjang pertumbuhan bisnis baru secara berkelanjutan.

Driven O&M Excellence Moonshot strategic initiative. This program focuses on maintaining power plant operational reliability through the digital optimization of Operations and Maintenance (O&M), emphasizing cost leadership and value creation. The strategy is designed to achieve sustainable efficiency while ensuring contributions to the Company's overall financial and operational performance.

In support of the third Strategic Goal, Sustainable Power Generation, which focuses on emission reduction, increasing the renewable energy (NRE) mix, and improving ESG ratings, PLN Indonesia Power launched the Sustainability Moonshot initiative. This initiative is centered on ensuring the availability and sustainability of biomass supply for the co-firing program, through synergy with PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) and its subsidiary, PT Artha Daya Coalindo, to achieve NRE mix targets. Additionally, the Company is promoting increased NRE generation from NRE power plants and conducting ESG self-assessments as a baseline for measuring sustainability aspects.

These three Strategic Goals are supported by Launchpad as a strategic enabler, playing a vital role in strengthening the foundation of PLN Indonesia Power's transformation. The Launchpad enabler aims to enhance the Company's human capital portfolio and competencies, prepare a talent pool ready to support green and beyond-kWh business development, and reinforce business processes and organizational structure to sustainably support new business growth.

Peran Direksi Dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis Board of Directors' Role in Formulating Strategies and Strategic Policies

Dalam merumuskan strategi dan kebijakan Perusahaan, baik untuk RKAP 2024 maupun RJPP lima tahunan, Direksi PLN Indonesia Power secara proaktif memetakan tantangan dan risiko yang dihadapi. Strategi Perusahaan disusun selaras dengan prinsip ESG dan aspek keberlanjutan. Penyusunan RKAP 2024 dan RJPP dilakukan oleh Direksi dengan arahan Dewan Komisaris dan disahkan oleh Pemegang Saham. Untuk memastikan implementasinya berjalan efektif, Direksi memastikan seluruh fungsi dalam organisasi PLN Indonesia Power memahami dan menjalankannya. Komunikasi dilakukan melalui rapat bersama *Senior Leader*, Rapat Tinjauan Manajemen, serta melakukan evaluasi rutin berbasis laporan audit internal maupun eksternal. Direksi juga secara berkala mengevaluasi strategi agar tetap relevan dan sesuai dengan dinamika bisnis serta target Perusahaan.

In formulating the Company's strategies and policies, both for the 2024 RKAP and RJPP, the Board of Directors of PLN Indonesia Power proactively maps out the challenges and risks faced. The Company's strategies are developed in alignment with ESG principles and sustainability aspects. The preparation of the 2024 RKAP and RJPP was carried out by the Board of Directors under the guidance of the Board of Commissioners and approved by the Shareholders. To ensure effective implementation, the Board of Directors ensures that all functions within PLN Indonesia Power organization understand and carry out the strategy. Communication is conducted through meetings with Senior Leaders, Management Review Meetings, and routine evaluations based on internal and external audit reports. The Board of Directors also regularly evaluates the strategy to ensure it remains relevant and aligned with business dynamics and the Company's targets.

Proses Direksi Memastikan Penerapan Strategi dan Kebijakan

Board of Directors' Process in Ensuring the Implementation of Strategy and Policy

Untuk memastikan strategi dan kebijakan berjalan optimal, Direksi memberikan pengarahannya lanjutan guna mendukung pencapaian target RKAP 2024 dan memastikan seluruh unit kerja memahami serta menerapkannya secara konsisten. Direksi juga memantau pencapaian target kinerja sebagai bagian dari evaluasi penerapan strategi yang dijalankan, melalui rapat koordinasi dengan pimpinan unit, Rapat Direksi, dan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris. Hasil *monitoring* digunakan untuk menetapkan langkah tindak lanjut atas isu yang dihadapi. Selain itu, Direksi secara berkala melaporkan kinerja kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, serta melakukan penyesuaian strategi bila diperlukan. Direksi juga aktif mengawasi implementasi strategi dan memastikan seluruh insan PLN Indonesia Power memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan ide dan inovasi demi mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.

To ensure that strategies and policies are implemented optimally, the Board of Directors provides further guidance to support the achievement of the 2024 RKAP targets and to ensure that all work units understand and apply them consistently. The Board of Directors also monitors the achievement of performance targets as part of evaluating the effectiveness of the implemented strategies, through coordination meetings with unit leaders, Board of Directors meetings, and regular meetings with the Board of Commissioners. Monitoring results are used to determine follow-up actions for addressing identified issues. In addition, the Board of Directors regularly reports performance to the Board of Commissioners and Shareholders and adjusts strategies when necessary. The Board of Directors also actively oversees strategy implementation and ensures that all PLN Indonesia Power personnel have equal opportunities to contribute ideas and innovations in support of the Company's goals.

Pencapaian Kinerja 2024 dan Perbandingan Dengan Target

2024 Performance Achievement and Comparison with Target

Pencapaian kinerja PLN Indonesia Power tahun 2024 membukukan hasil yang positif dan membanggakan, baik di bidang keuangan maupun operasional. Kami berhasil mencatat peningkatan kinerja di tengah kondisi yang menantang. Penilaian atas kinerja Direksi didasarkan pada pencapaian KPI Perusahaan 2024 yang menjadi target dalam Kontrak Manajemen dan Sasaran Utama yang menjadi *Strategic Goal* dalam RKAP 2024.

PLN Indonesia Power recorded positive and commendable performance results in 2024, both financially and operationally. We succeeded in improving our performance despite facing challenging conditions. The Board of Directors' performance evaluation was based on the achievement of the Company's 2024 Key Performance Indicators (KPIs), which served as targets in the Management Contract and the Main Objectives outlined as Strategic Goals in the 2024 RKAP.

Dari 10 (sepuluh) Sasaran Utama Perusahaan 2024, 7 *Key Parameters* mencapai target dan 3 *Key Parameters* belum/ hampir mencapai target. Adapun realisasi KPI Perusahaan tahun 2024 mendapatkan skor 105,56 atau meningkat dibanding skor KPI Perusahaan sebelumnya sebesar 103,40. KPI Perusahaan 2024 menjadi target indikator kinerja utama PLN Indonesia Power di tahun 2024 dengan total 35 indikator, dan 31 indikator kinerja telah mencapai target, 3 indikator hampir tercapai dengan pencapaian lebih dari 95% dari target serta 1 indikator belum mencapai target.

Out of the 10 (ten) Main Company Targets for 2024, 7 Key Parameters had met the target, while 3 Key Parameters had not yet or had nearly met the target. The realization of the 2024 Company KPIs earned a score of 105.56 marking an improvement compared to the previous score of 103.40. The 2024 Company KPIs served as the key performance indicators for PLN Indonesia Power that year, with a total of 35 indicators. Of these, 31 performance indicators met their targets, 3 indicators were close to being achieved with more than 95% realization, and 1 indicators did not reach their targets.

Untuk memastikan ketercapaian target RKAP 2024, Direksi melakukan eksekusi *Strategic Goals* dan Program Utama dalam RKAP 2024 yang menekankan untuk menjaga keandalan pembangkit, terus melakukan transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan dan juga inovasi, serta meningkatkan kapabilitas organisasi dan kompetensi SDM dalam pengembangan bisnis baru.

To ensure the achievement of the 2024 RKAP targets, the Board of Directors executed the Strategic Goals and Main Programs outlined in the 2024 RKAP, with a focus on maintaining power plant reliability, continuing digital transformation to drive growth and innovation, as well as enhancing organizational capability and human capital competency in the development of new businesses.

Indikator KPI Perusahaan 2024 yang penting dan telah mencapai target adalah EBITDA; BPP pembangkit; ROIC; EFOR PLTU, EFOR non PLTU; EAF PLTU, EAF non PLTU; SFC batubara, SFC gas, dan SFC BBM. Untuk indikator KPI yang hampir memenuhi target (95%-100%) adalah *Carbon Emission Reduction*; Pendapatan dari luar PLN Group; dan EPC and *Project Completion*. Sedangkan KPI yang belum mencapai target (<95%) adalah Pengendalian Penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2024.

Terkait KPI yang belum mencapai target, Direksi secara konsisten perlu meninjau strategi penggunaan anggaran investasi secara efektif, melalui alokasi sumber daya yang memadai, perencanaan yang akurat, serta koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, termasuk regulator dan pemegang saham, guna memberikan manfaat jangka panjang, mendorong pertumbuhan, dan memperkuat daya saing untuk mencapai tujuan strategis Perusahaan.

Kinerja Operasional 2024

2024 Operational Performance

Terkait dengan pencapaian kinerja operasional Perusahaan tahun 2024 mencatat hasil yang baik, pada terutama pada aspek efisiensi pembangkit, tingkat kesiapan pembangkit dan tingkat gangguan pembangkit dibandingkan dengan target RKAP, yakni sebagian besar mencapai dan bahkan melebihi target. Tingkat efisiensi pembangkit, salah satu indikatornya adalah pemakaian sendiri. Pemakaian sendiri tahun 2024 mencapai 4.675,43 GWh, meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 4.535,03 GWh seiring dengan meningkatnya produksi sebesar 3,57%. Secara persentase pemakaian sendiri tahun 2024 sebesar 5,36% adalah lebih baik dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,39%, terutama didorong oleh pemasangan PV *rooftop* dan optimalisasi pengoperasian PLTGU Tambak Lorok Blok 3.

Faktor ketersediaan mesin pembangkit tercermin dari nilai EAF, baik untuk PLTU batubara maupun non PLTU batubara. Nilai EAF PLTU batubara tahun 2024 lebih tinggi 1,34% menjadi 85,21% dibanding tahun lalu sebesar 84,08% atau 103,37% dari target RKAP, yang menunjukkan peningkatan performa pembangkit. Sedangkan nilai EAF non PLTU batubara lebih rendah 0,74% menjadi 93,82% dari tahun lalu sebesar 94,53%, atau 103,08% dari target RKAP, terutama disebabkan oleh pelaksanaan *Outage* Unit PLTU yang tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk kinerja gangguan mesin pembangkit, dilihat dari nilai EFOR, baik untuk PLTU batubara dan Non PLTU batubara. Nilai EFOR PLTU batubara tahun 2024 lebih rendah 12,05% menjadi 4,67% dibanding tahun lalu sebesar

Important 2024 Corporate KPI indicators that had achieved the target include EBITDA; electricity generation cost (BPP); ROIC; EFOR of SPP, EFOR of non-SPP; EAF of SPP, EAF of non-SPP; and SFC of coal, gas, and oil. KPI indicators that had nearly met the target (95%-100%) included Carbon Emission Reduction; Revenue from outside PLN Group; as well as EPC and Project Completion. Meanwhile, the KPI that had not met the target (<95%) was the Control of Investment Budget Utilization in accordance with the 2024 RKAP.

Regarding KPIs that had not reached the target, the Board of Directors needs to consistently review the strategy for effective investment budget utilization through adequate resource allocation, accurate planning, and intensive coordination with relevant stakeholders, including regulators and shareholders, in order to deliver long-term benefits, drive growth, and enhance competitiveness in achieving the Company's strategic objectives.

In terms of the Company's operational performance achievement in 2024, positive results were recorded, particularly in the areas of power plant efficiency, power plant readiness, and power plant disturbances when compared to RKAP targets, with most indicators achieving or even exceeding the targets. One indicator of power plant efficiency is self-consumption. In 2024, self-consumption reached 4,675.43 GWh, an increase from 4,535.03 GWh in the previous year, in line with a 3.57% increase in production. In percentage terms, self-consumption in 2024 stood at 5.36%, an improvement compared to 5.39% in 2023, mainly driven by the installation of rooftop PV systems and optimization of the operation of Tambak Lorok Block 3 CCPP.

The availability factor of power plant units is reflected in the EAF value, both for SPP and non-SPP. The 2024 EAF for SPP increased by 1.34% to 85.21%, compared to 84.08% last year, or 103.37% of the RKAP target, indicating improved power plant performance. Meanwhile, the EAF for non-SPP declined by 0.74% to 93.83%, compared to 94.53% last year, or 103.08% of the RKAP target, mainly due to a higher number of units undergoing scheduled overhauls compared to the previous year. For power plant disturbance performance, as seen in the EFOR values, both SPP and non-SPP saw improvements. The 2024 EFOR for SPP dropped by 12.05% to 4.67%, compared to 5.31% last year, or 111.89% of the RKAP target, indicating improved power plant performance. The EFOR value for non-SPP decreased by 31.33% to 1.03%,

5,31% atau 111,89% dari target RKAP, yang menunjukkan performa pembangkit meningkat. Sedangkan nilai EFOR non PLTU batubara lebih rendah 31,33% menjadi 1,03% dari tahun lalu sebesar 1,50%, atau 134,39% dari target RKAP, terutama disebabkan oleh durasi pelaksanaan overhaul yang lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Tentunya, penerapan sistem manajemen aset pembangkit yang efektif perlu terus dilakukan seiring meningkatnya tantangan yang dihadapi PLN Indonesia Power sebagai *fully asset owner*.

Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power berhasil melakukan *Commercial Operation Date* (COD) pada pembangkit listrik terapung di atas kapal, *Barge Mounted Power Plant* (BMPP) Nusantara I, di Ambon dengan kapasitas 60 MW pada tanggal 5 April 2024 dan PLTGU Tambak Lorok Blok 3, Semarang dengan kapasitas 779 MW tanggal 26 Juni 2024. BMPP Nusantara I, Ambon dibangun dengan nilai investasi sebesar Rp1.088,37 miliar untuk memberikan dampak dalam mendorong pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur dan menjadi tumpuan utama dalam pasokan listrik di Ambon hingga 50% kebutuhan listrik di wilayah tersebut. Sedangkan PLTGU Jawa Bali 1 Tambaklorok Blok 3, Semarang, dengan investasi mencapai Rp5.921,53 miliar untuk memberikan dampak dalam mendorong pembangunan infrastruktur nasional dan memperkuat sistem kelistrikan Jawa – Bali.

Kinerja Keuangan 2024

2024 Financial Performance

Realisasi produksi tenaga listrik tahun 2024 menjadi 87.210,96 GWh, meningkat 3,57% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 84.205,29 GWh, atau 113,56% dari target RKAP 2024 sebesar 76.797,05 GWh. Hal tersebut berdampak pada peningkatan penjualan tenaga listrik menjadi sebesar 82.535,52 GWh, meningkat 3,60% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 79.670,26 GWh atau mencapai 113,51% dari target RKAP 2024 sebesar 72.714,48 GWh. Meningkatnya produksi dan penjualan tenaga listrik terutama disebabkan oleh peningkatan produksi listrik dari UBP Bali dikarenakan peningkatan beban di sub sistem Bali, pengoptimalan operasi PLTA Saguling, dan pengoperasian PLTGU Tambak Lorok Blok 3 yang telah COD. Realisasi ini menjadi bukti bahwa efektivitas strategi optimalisasi aset pembangkit yang diterapkan secara konsisten membuahkan hasil optimal. Adapun realisasi produksi energi listrik dari pembangkit EBT di tahun 2024 mencapai sebesar 10.963,56 GWh atau 102,24% dari target RKAP, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 10.066,48 GWh dengan realisasi penjualan energi listrik dari pembangkit EBT mencapai 10.635,22 GWh, atau sebesar 100,99% dari target RKAP, meningkat dari 9.759,69 GWh di tahun sebelumnya. Hal ini kontribusi nyata Kami untuk terus memperluas pemanfaatan energi bersih.

from 1.50% last year, or 134.39% of the RKAP target, mainly due to longer overhaul durations than in the previous year. Certainly, the implementation of an effective power plant asset management system must continue in line with the increasing challenges faced by PLN Indonesia Power as a fully asset-owning entity.

In 2024, PLN Indonesia Power successfully achieved the *Commercial Operation Date* (COD) for floating power plants, namely the *Barge Mounted Power Plant* (BMPP) Nusantara I in Ambon, with a capacity of 60 MW on April 5, 2024, and the Tambak Lorok Block 3 CCPP in Semarang, with a capacity of 779 MW on June 26, 2024. BMPP Nusantara I in Ambon was constructed with an investment value of Rp1,088.37 billion to contribute to infrastructure development in Eastern Indonesia and now serves as a key source of electricity supply in Ambon, meeting up to 50% of the region's electricity demand. Meanwhile, the Java-Bali 1 Tambak Lorok Block 3 CCPP in Semarang, with an investment of Rp5,921.53 billion, aims to support national infrastructure development and strengthen the Java-Bali power system.

Electricity production realization in 2024 reached 87,210.96 GWh, an increase of 3.57% compared to the previous year's realization of 84,205.29 GWh, or 113.56% of the 2024 RKAP target of 76,797.05 GWh. This contributed to an increase in electricity sales, which reached 82,535.52 GWh, an increase of 3.60% compared to 79,670.26 GWh in the previous year, or 113.51% of the 2024 RKAP target of 72,714.48 GWh. The rise in electricity production and sales was mainly driven by increased production at Bali GBU due to higher load in the Bali sub-system, optimized operations of the Saguling HPP, and the operation of Tambak Lorok Block 3 CCPP following its COD. This realization demonstrates that the consistent application of power plant asset optimization strategies has delivered optimal results. The realized electricity production from NRE power plants in 2024 reached 10,963.56 GWh, or 102.24% of the RKAP target, an increase from 10,066.48 GWh in the previous year. The realized electricity sales from RE power plants reached 10,635.22 GWh, or 100.99% of the RKAP target, up from 9,759.69 GWh in the previous year. This reflects Our concrete contribution to continuously expanding the use of clean energy.

Selain itu, PLN Indonesia Power konsisten menjaga nilai BPP pembangkit sesuai target RKAP 2024 pada level Rp1.128,89 atau 109,57% dari target sebesar Rp1.248,41. Direksi berkomitmen dapat menjaga BPP pembangkit untuk memastikan tercapainya efisiensi penyediaan energi listrik di sisi internal PLN Indonesia Power, sehingga tarif listrik tetap terjangkau bagi konsumen. BPP yang efisien juga berperan penting dalam upaya mencapai ketahanan energi nasional.

Hasil dari kinerja operasional yang positif, PLN Indonesia Power berhasil memperoleh pendapatan usaha tahun 2024 sebesar Rp110,58 triliun, yang melampaui target RKAP 2024 dengan tingkat pencapaian sebesar 103,96% atau meningkat 6,86% dari tahun lalu sebesar Rp103,48 triliun. Hal tersebut terutama didorong oleh meningkatnya kWh penjualan dan efisiensi beban usaha pada komponen *fixed cost* - penyusutan aset hak guna. Perolehan pendapatan usaha ini dikontribusi dari pendapatan penjualan tenaga listrik sebesar 98,31%; pendapatan jasa sebesar 1,46%, dan pendapatan dari konsesi jasa sebesar 0,23%.

Realisasi beban usaha tahun 2024 mengalami kenaikan 12,14% menjadi sebesar Rp93,70 triliun dibanding tahun lalu sebesar Rp83,55 triliun, atau 101,26% dari target RKAP sebesar Rp92,53 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan harga rata-rata energi primer batubara maupun gas. Namun demikian, pengelolaan beban usaha tahun 2024 ini lebih baik karena laju peningkatannya masih di bawah kenaikan tahun sebelumnya. Pada akun beban lain-lain tahun 2024 yang menjadi beban luar operasi tercatat lebih rendah dari tahun sebelumnya Rp9,25 triliun menjadi sebesar Rp117,77 miliar. Keseluruhan faktor tersebut berkontribusi terhadap capaian laba tahun berjalan meningkat signifikan sebesar 59,91% menjadi Rp13,10 triliun dari tahun lalu sebesar Rp8,19 triliun, atau 138,07% dari target RKAP 2024.

Kami senantiasa fokus menjaga kesiapan dan keandalan pembangkit, serta mendorong pengembangan pembangkit baru dan bisnis *beyond kWh*, baik di luar Grup PLN maupun di luar Indonesia, guna mendukung pertumbuhan usaha di masa depan. Sinergi dan kolaborasi, disertai pengelolaan perubahan pola pikir seluruh Insan PLN Indonesia Power, terus dikawal untuk membangun bisnis yang inovatif dan mencapai hasil yang optimal.

Furthermore, PLN Indonesia Power consistently maintained the electricity generation cost (BPP) in line with the 2024 RKAP target at Rp1,128.89 or 109.57% of the target of Rp1,248.41. The Board of Directors remains committed to maintaining generation BPP to ensure efficient internal electricity supply within PLN Indonesia Power, thus keeping electricity tariffs affordable for consumers. Efficient BPP also plays a critical role in efforts to achieve national energy security.

As a result of this positive operational performance, PLN Indonesia Power recorded an operating revenue of Rp110,577,056 million in 2024, exceeding the 2024 RKAP target by achieving 104.07%, or a 6.86% increase from the previous year's Rp103,480,111 million. This growth was primarily driven by an increase in kWh sales and cost efficiency in fixed cost components, particularly the depreciation of right-of-use assets. Operating revenue was composed of 98.31% from electricity sales, 1.46% from service revenue, and 0.23% from service concession income.

Operating expenses in 2024 increased by 12.14% to Rp93.69 trillion, compared to Rp83.55 trillion in the previous year, or 101.26% of the RKAP target of Rp92.53 trillion. This increase was mainly due to higher average prices of primary energy, including coal and gas. However, expense management in 2024 was more effective, as the rate of increase remained below that of the previous year. In the 2024 other expense account, the non-operating expense was recorded lower than the previous year's amount by Rp9.25 trillion to Rp117.77 billion. These factors contributed to a significant increase in profit for the year, which rose by 59.91% to Rp13.10 trillion from Rp8.19 trillion in the previous year, or 138.07% of the 2024 RKAP target.

We remain focused on maintaining the readiness and reliability of our power plants while driving the development of new power generation and beyond kWh businesses, both outside PLN Group and internationally, to support future business growth. Synergy and collaboration, along with managing mindset transformation across all PLN Indonesia Power personnel, continue to be fostered to build an innovative business and achieve optimal results.

Tantangan yang Dihadapi dan Mitigasinya

Challenges Faced and Their Mitigation

Sepanjang tahun 2024, PLN Indonesia Power menghadapi sejumlah tantangan signifikan, meliputi: 1) transisi energi berkelanjutan yang semakin intensif di negara-negara maju; 2) kinerja pembangkit dan inovasi teknologi; 3) keterbatasan investasi infrastruktur; 4) perkembangan kebijakan dan regulasi Pemerintah; 5) keamanan energi dan diversifikasi sumber; serta 6) pembiayaan dan manajemen keuangan dalam pendanaan proyek pembangkit baru.

Untuk mengatasi tantangan transisi energi berkelanjutan, terkait dengan kendala pengembangan pembangkit EBT yang cukup besar dari sisi perizinan, TKDN, teknologi dan tarif. Pengembangan energi hijau belum berjalan optimal maka PLN Indonesia Power terus mengoptimalkan program *Research and Development* dalam pengembangan potensi dan teknologi EBT serta melakukan akselerasi *green business development* melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Hybrid, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBio). Tantangan permasalahan perizinan, ketersediaan lahan, *feed-in tariff*, dan ketersediaan energi primer, PLN Indonesia Power melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti Pemerintah Daerah setempat, Kementerian Lingkungan Hidup, PLN dan pemangku kepentingan lainnya serta menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan lindung kepada pihak yang berwenang.

Selain itu, upaya mitigasi yang dilakukan dalam mempercepat transisi energi, PLN Indonesia Power juga melakukan perdagangan karbon untuk mengurangi emisi melalui penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia (SPEI) dan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) untuk sektor ketenagalistrikan. Hal ini sejalan dengan *Roadmap Transisi Energi PLN Indonesia Power 2023-2060*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pembangkit PLN Indonesia Power masih menggunakan bahan bakar fosil sehingga emisi pembangkit cukup tinggi. Sebagai langkah mitigasinya, PLN Indonesia Power terus meningkatkan penerapan *co-firing* dan *coal switching* di PLTU, implementasi program efisiensi energi, program *advance analytic* operasi pembangkit, dan peningkatan bauran pembangkit ramah lingkungan. Pada tahun 2024 PLN Indonesia Power berhasil meningkatkan produksi EBT pada bauran energi Perusahaan menjadi sebesar 10.963,56 GWh, 13% dari bauran energi Perusahaan. Selain itu, tantangan lainnya adalah mengelola

Throughout 2024, PLN Indonesia Power faced several significant challenges, including: 1) the increasingly intense energy transition in developed countries; 2) power plant performance and technological innovation; 3) limitations in infrastructure investment; 4) developments in government policies and regulations; 5) energy security and source diversification; and 6) financing and financial management for funding new power plant projects.

To address the challenges of sustainable energy transition, particularly the substantial obstacles in NRE power plant development related to permitting, local content requirements (TKDN), technology, and tariffs. Hindered optimal green energy progress, PLN Indonesia Power continues to optimize its Research and Development programs in NRE potential and technology development, as well as to accelerate green business development through the expansion of Hydro Power Plants (HPP), Geothermal Power Plants (GPP), Solar Power Plants (SoPP), Hybrid Power Plants, Mini-Hydro Power Plants (MHPP), Wind Power Plants (WPP), and Biomass Power Plants (BioPP). To overcome challenges related to permitting, land availability, feed-in tariffs, and the availability of primary energy, PLN Indonesia Power coordinates with relevant stakeholders such as local governments, the Ministry of Environment, PLN, and other stakeholders, and submits requests for the use of protected forest areas to the appropriate institutions.

Furthermore, as part of its mitigation efforts to accelerate the energy transition, PLN Indonesia Power is also participating in carbon trading through the issuance of Indonesian Emission Reduction Certificates (SPEI) and the Technical Approval for Emission Cap (PTBAE) for the electricity sector. These actions are aligned with PLN Indonesia Power Energy Transition Roadmap 2023-2060.

It is undeniable that the majority of PLN Indonesia Power's generation fleet still relies on fossil fuels, resulting in relatively high emissions. As a mitigation step, PLN Indonesia Power continues to scale up co-firing and coal switching in its SPPs, implement energy efficiency programs, apply advanced analytics in power plant operations, and increase the share of environmentally friendly generation in the energy mix. In 2024, PLN Indonesia Power successfully increased its NRE production to 10,963.56 GWh 13% of total electricity production. Another ongoing challenge is managing several aging power plants, which requires special strategies based

beberapa pembangkit Perusahaan yang sudah berumur yang memerlukan strategi khusus berdasarkan sistem manajemen aset pembangkit dalam peremajaan dan pengelolaannya.

Terkait isu keamanan pasokan energi primer, Direksi mengembangkan strategi dan kebijakan untuk memitigasi risiko dalam menjaga keandalan pasokan dan menjamin kontinuitas produksi tenaga listrik. Direksi bersinergi dengan PT PLN Energi Primer Indonesia yang merupakan *Subholding* energi primer di PLN Grup, sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan keseimbangan *supply and demand* energi primer, sekaligus membangun rantai pasok yang tangguh guna mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional.

PLN Indonesia Power terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi operasional pembangkit. Upaya ini diarahkan untuk menghasilkan energi listrik (kWh) dalam jumlah lebih besar dengan biaya pokok produksi (BPP) yang lebih rendah. Untuk itu, Direksi mengembangkan kebijakan dan strategi yang menekankan pentingnya perencanaan pemeliharaan pembangkit secara lebih teliti dan komprehensif, serta berkoordinasi dengan Pusat Pengatur Beban (P2B) untuk memastikan pemeliharaan berjalan secara tepat waktu.

Tantangan lain yang dihadapi adalah pengelolaan aspek keberlanjutan. Dalam merespons hal ini, PLN Indonesia Power menjalankan strategi penyelarasan menyeluruh terhadap proses rantai nilai secara *end-to-end*. Penyelarasan tersebut tidak hanya mencakup aspek pembiayaan, tetapi juga proses pengembangan usaha yang adaptif terhadap dinamika transisi energi. Perusahaan berkomitmen untuk membangun *core competencies, technical skills* yang relevan dan penyesuaian proses bisnis yang berorientasi masa depan guna menghadapi tantangan pengembangan usaha jangka panjang.

Pengembangan kompetensi internal bagi seluruh pegawai ditujukan tidak hanya untuk merespons tantangan eksternal, namun juga sebagai bentuk kesiapan organisasi PLN Indonesia Power dalam mengelola disrupsi teknologi, perubahan kebijakan lingkungan, serta pergeseran preferensi konsumen energi.

Menanggapi berbagai tantangan, kendala, dan risiko di atas, PLN Indonesia Power terus mengembangkan kebijakan dan strategi yang adaptif untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan organisasi di masa depan. Kami meyakini bahwa perubahan yang berlangsung dengan cepat tidak semata membawa dampak negatif, namun juga membuka peluang positif bagi pertumbuhan dan inovasi.

on power plant asset management systems for their renewal and operational optimization.

In response to the issue of primary energy supply security, the Board of Directors has developed strategies and policies to mitigate risks in maintaining supply reliability and ensuring the continuity of electricity production. The Board of Directors works in synergy with PT PLN Energi Primer Indonesia, the primary energy subholding within PLN Group, as a strategic move to address the challenges of balancing primary energy supply and demand, while also building a resilient supply chain to support the realization of national energy security.

PLN Indonesia Power continues to implement various innovations to improve the reliability and operational efficiency of power plants. These efforts are aimed at generating greater electricity output (kWh) at a lower electricity generation cost (BPP). Therefore, the Board of Directors has developed policies and strategies emphasizing the importance of more meticulous and comprehensive power plant maintenance planning and coordination with the Load Dispatch Center (P2B) to ensure timely maintenance execution.

Another challenge faced is the management of sustainability aspects. In addressing this, PLN Indonesia Power is implementing a comprehensive alignment strategy across the entire value chain. This alignment covers not only financing aspects but also the development processes that are adaptive to the dynamics of the energy transition. The Company is committed to building core competencies, relevant technical skills, and future-oriented business process adjustments to face the challenges of long-term business development.

Internal competency development for all employees is aimed not only at responding to external challenges but also at preparing PLN Indonesia Power as an organization to effectively manage technological disruptions, shifts in environmental policies, and changes in consumer energy preferences.

In addressing the various challenges, constraints, and risks mentioned above, PLN Indonesia Power continues to develop adaptive policies and strategies to ensure long-term business and organizational sustainability. We believe that rapid changes do not solely bring negative impacts but also present positive opportunities for growth and innovation.

Prospek Usaha 2025

2025 Business Prospects

Target pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,2% hingga 5,6% di tahun 2025, dengan tingkat inflasi cukup terkendali pada level 2,5%, atau lebih baik dibanding inflasi tahun 2024 di level 2,8%. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan Rp16.000, dengan proyeksi rata-rata harga minyak mentah mencapai USD64 per barel atau turun dibandingkan rata-rata harga tahun 2024, dan lifting minyak diproyeksikan sekitar 580.000 hingga 605.000 barel per hari (bph) berdasarkan target APBN 2025.

RUPTL Tahun 2025-2034 memproyeksikan peningkatan permintaan listrik nasional yang didasarkan pada target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% oleh Pemerintah serta proyeksi kebutuhan listrik di seluruh sektor. Kenaikan ini juga dipicu oleh pengembangan berbagai Kawasan, seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dan penggunaan Kendaraan Listrik. Permintaan listrik selama periode 2025-2034 diperkirakan akan meningkat hingga 205 TWh atau rata-rata 21 TWh/tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, RUPTL 2025-2034 menetapkan adanya penambahan kapasitas pembangkit mencapai 69,5 GW dengan komposisi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 42,6 GW atau 61%, lalu *energy storage* sebesar 10,3 GW atau 15% dan fosil sebesar 16,6 GW atau 24%.

Lebih lanjut, Kementerian ESDM memproyeksikan pertumbuhan kebutuhan listrik nasional pada tahun 2025 akan meningkat antara 3,6% hingga 4,2% dibandingkan konsumsi tahun 2024 yang diperkirakan mencapai 294,87 TWh, naik dari 283,12 TWh pada tahun 2023. Pemerintah juga menargetkan konsumsi listrik per kapita pada tahun 2025 mencapai 1.495 kWh/kapita, meningkat dari 1.408 kWh/kapita pada tahun 2024

Selain kondisi yang telah disebutkan di atas, perilaku konsumen dalam menggunakan energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari juga mengalami perubahan signifikan. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, kemajuan teknologi, serta pergeseran dinamika sosial. Konsumen kini semakin memilih produk yang hemat energi, ramah lingkungan, dan menawarkan pengalaman digital yang lebih baik. Tren ini menciptakan tantangan sekaligus peluang untuk membangun sistem energi yang lebih efisien, cerdas, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

The economic growth target is projected at 5.2% to 5.6% in 2025, with inflation remaining well-controlled at 2.5%, or an improvement compared to the 2024 inflation rate of 2.8%. The Rupiah exchange rate against the US Dollar is estimated at Rp16,000, with the average crude oil price projected at USD64 per barrel, lower than the average price in 2024. Oil lifting is projected at around 580,000 to 605,000 barrels per day (bpd), in line with the 2025 State Budget (APBN) targets.

The 2025-2034 Electricity Supply Business Plan (RUPTL) projects an increase in national electricity demand based on the Government's targeted economic growth of 8%, as well as projections of electricity needs across all sectors. This growth is also driven by the development of various areas such as Industrial Zones, Special Economic Zones, Super-Priority Tourism Destinations, Integrated Marine and Fisheries Centers, and the adoption of Electric Vehicles. Electricity demand during the 2025-2034 period is expected to increase by up to 205 TWh, or an average of 21 TWh per year. To meet this demand, the 2025-2034 RUPTL outlines an additional power generation capacity of 69.5 GW, consisting of 42.6 GW (61%) from New Renewable Energy (NRE) sources, 10.3 GW (15%) from energy storage, and 16.6 GW (24%) from fossil-based sources. This capacity expansion is planned in two phases.

Furthermore, the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) projects that national electricity demand in 2025 will increase by approximately 3.6% to 4.2% compared to the estimated consumption of 294.87 TWh in 2024, which had risen from 283.12 TWh in 2023. The government also targets electricity consumption per capita to reach 1,495 kWh/person in 2025, up from 1,408 kWh/person in 2024.

In addition to the above conditions, consumer behavior in using electricity for daily needs has also undergone significant changes. This shift is influenced by various factors, such as growing awareness of sustainability, technological advancements, and evolving social dynamics. Consumers are increasingly choosing energy-efficient, environmentally friendly products that offer enhanced digital experiences. This trend presents both challenges and opportunities to develop a more efficient, intelligent, and sustainable energy system for all stakeholders.

Dengan dukungan SDM yang kompeten di semua jenis pembangkit listrik, PLN Indonesia Power memiliki prospek yang kuat untuk mengembangkan bisnis *beyond kWh* dan menangkap peluang inisiatif BUMN *Go Global* melalui kerja sama dengan *global player*. Dengan demikian, kami optimis PLN Indonesia Power dapat terus mengoptimalkan berbagai peluang bisnis di sektor ketenagalistrikan, termasuk layanan pendukung lainnya.

With the support of competent human resources across all types of power plants, PLN Indonesia Power has strong prospects for developing businesses *beyond kWh* and seizing opportunities from the SOEs *Go Global* initiative through collaborations with global players. Therefore, we are optimistic that PLN Indonesia Power can continue to optimize various business opportunities in the electricity sector, including other supporting services.

Memperkuat *Human Experience Management System* (HXMS) Strengthening Human Experience Management System (HXMS)

Human Experience Management System (HXMS), yang diinisiasi pada 2022, fokus pada 4 (empat) sasaran utama, yakni tepat ukuran (*right size*), tepat kompetensi (*right skill*), tepat pembiayaan (*right spend*), dan tepat sistem informasi (*right system*). PLN Indonesia Power telah menyusun *Roadmap HXMS 2023-2027* sebagai peta jalan untuk menyiapkan tenaga kerja profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi, berlandaskan tata nilai perusahaan guna mencapai visi Perusahaan.

The Human Experience Management System (HXMS), initiated in 2022, focuses on four main objectives: right size, right skill, right spend, and right system. PLN Indonesia Power has developed the HXMS Roadmap 2023-2027 as a strategic guide to prepare a professional, competent, and highly ethical workforce, grounded in the company's core values to achieve its vision.

PLN Indonesia Power menyadari pegawai sebagai aset utama yang dikelola secara profesional, adil, dan transparan, mulai dari rekrutmen selektif berbasis talenta dan karakter, program pengembangan diri, hingga penciptaan lingkungan kerja harmonis. *Human Capital* yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman menjadi fondasi karakter PLN Indonesia Power untuk keunggulan bersaing. PLN Indonesia Power yakin hal ini akan meningkatkan produktivitas, daya saing, dan loyalitas pegawai, serta memberikan dampak positif bagi kelangsungan jangka panjang Perusahaan.

PLN Indonesia Power recognizes employees as its most valuable asset, managed in a professional, fair, and transparent manner, from selective talent- and character-based recruitment to personal development programs and the creation of a harmonious work environment. Human Capital, comprising knowledge, skills, and experience, serves as the foundation of PLN Indonesia Power's character and competitive edge. The Company believes this approach will enhance employee productivity, competitiveness, and loyalty, while also delivering long-term benefits for the Company's sustainability.

Hingga akhir 2024, total pegawai PLN Indonesia Power berjumlah 5.409 orang. Kami berkomitmen menjalankan kebijakan dan program unggulan untuk mendukung *people system* yang efektif, antara lain melalui pengembangan sistem ekspertise bagi *Business Development*, pengelolaan talenta perempuan dan talenta milenial, pengelolaan *Employee Engagement Index* (EEI) dan *Culture Health Index* (CHI), serta penguatan budaya kerja lewat *Corporate Culture Purpose Program* (CCPP) dan pengembangan kompetensi untuk mendukung 3 Tema Strategis Perusahaan (*Growth Moonshot*, *Digital Moonshot* dan *NZE Moonshot*).

Until the of 2024, PLN Indonesia Power employed a total of 5,409 personnel. We are committed to implementing flagship policies and programs to support an effective people system, including the development of an expertise system for Business Development, management of female and millennial talent, monitoring of the Employee Engagement Index (EEI) and Culture Health Index (CHI), and the strengthening of workplace culture through the Corporate Culture Purpose Program (CCPP) and competency development in support of the Company's three strategic themes: Growth Moonshot, Digital Moonshot, and NZE Moonshot.

Kepakaran (*Expert*) dipersiapkan dengan program khusus sesuai jenjang untuk memberikan solusi teknis yang mendukung operasi dan pengembangan bisnis jangka panjang. Untuk meningkatkan efektivitas pelatihan, PLN Indonesia Power secara berkala melaksanakan *Human Capital Readiness* (HCR) *assessment*, yang pada 2024 meningkat 2,01% menjadi skor 4,57 dari skala 5, menunjukkan kematangan proses pembelajaran yang semakin baik.

Expertise is developed through specialized programs tailored to each level in order to provide technical solutions that support long-term operations and business development. To improve training effectiveness, PLN Indonesia Power regularly conducts Human Capital Readiness (HCR) assessments, which in 2024 increased by 2.01% to a score of 4.57 out of 5, indicating a growing maturity in the learning process.

Untuk memastikan keberlangsungan organisasi dan mencapai target talenta perempuan serta talenta milenial, pada tahun 2024 PLN Indonesia Power melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan rekrutmen, pengembangan, dan retensi talenta di kedua kelompok tersebut. Kami terus berupaya memperkuat keterikatan pegawai dan kesehatan budaya perusahaan. Pada 2024, dilakukan *Employee Engagement Survey* (EES) dengan skor mencapai 87% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 84% menunjukkan tingkat keterikatan pegawai Perusahaan yang semakin baik. Sedangkan *Culture Health Index* (CHI) mencapai 11%, lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 19,2% (polarisasi negatif) menunjukkan peningkatan produktivitas organisasi. PLN Indonesia Power kembali mendapatkan sertifikasi *Great Place to Work* pada 2024, dengan 86% karyawan menyatakan perusahaan adalah tempat kerja yang baik, jauh di atas rata-rata perusahaan global pada umumnya sebesar 59%.

To ensure organizational sustainability and meet targets for female and millennial talent, PLN Indonesia Power undertook various efforts in 2024 to enhance recruitment, development, and retention of talent in these two groups. We continue to strengthen employee engagement and organizational culture health. In 2024, the *Employee Engagement Survey* (EES) was conducted with a score of 87%, an increase from the previous year of 84%, indicating a better level of employee engagement. While the *Culture Health Index* (CHI) reached 11%, better than the previous year's 19.2% (negative polarization) indicating an increase in organizational productivity. PLN Indonesia Power once again earned the *Great Place to Work* certification in 2024, with 86% of employees stating that the Company is a great place to work significantly higher than the global average of 59%.

Integrasi Pilar ESG untuk Memperkuat Governansi Berkelanjutan

Integrating ESG Pillars to Strengthen Sustainable Governance

Kami meyakini bahwa keberhasilan Perusahaan dalam meraih pencapaian kinerja tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya tidak lepas dari komitmen untuk terus meningkatkan praktik tata kelola atau "Governansi Perusahaan" secara berkelanjutan. Tahun 2024, PLN Indonesia Power telah memiliki *Roadmap Tata Kelola Perusahaan 2024-2028*. Tahun ini Kami fokus pada *Governance Mindset* untuk memperkuat *mindset* terhadap standar GCG terbaru yang diikuti dengan penataan organisasi dan pemutakhiran kebijakan tata kelola secara berkala agar relevan dengan kebutuhan Perusahaan maupun perkembangan regulasi yang berlaku. Selain itu, Kami terus menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan pilar ESG ke dalam kegiatan usaha dan operasional PLN Indonesia Power guna memastikan terciptanya nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Implementasinya melibatkan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham termasuk seluruh Insan PLN Indonesia Power sejalan dengan peran dan kewenangan masing-masing berdasarkan kebijakan Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

We believe that the Company's success in achieving its performance this year and in previous years is closely linked to its strong and ongoing commitment to enhancing corporate governance practices. In 2024, PLN Indonesia Power has established the 2024-2028 Corporate Governance Roadmap. This year, we focus on fostering a *Governance Mindset* to strengthen awareness of the latest GCG standards, accompanied by organizational restructuring and regular updates to governance policies to ensure their relevance to the Company's needs and current regulatory developments. In addition, we continue to demonstrate our commitment to integrating ESG pillars into the business activities and operations of PLN Indonesia Power to ensure long-term value creation for all stakeholders. The implementation involves the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders, as well as all personnel of PLN Indonesia Power, in accordance with their respective roles and authorities based on Company policies and applicable laws and regulations.

Terbukti, konsistensi dalam penerapan governansi Perusahaan berdampak pada pencapaian kinerja yang terus tumbuh positif. Untuk mendapatkan *feedback* guna meningkatkan kualitas penerapan praktik tata kelola secara berkesinambungan, PLN Indonesia Power secara berkala melakukan penilaian atas kualitas tata kelola (*assessment* GCG). Penilaian GCG di tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) parameter pengujian yaitu SK-16, *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS), Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka POJK 21/POJK.04/2015 dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021. Keempat hasil penilaian tersebut mendapatkan hasil yang sangat baik, yang mencerminkan potret tata kelola yang dijalankan PLN Indonesia Power saat ini.

Our consistent application of corporate governance has clearly contributed to sustained positive performance. To continuously improve the quality of our governance practices, PLN Indonesia Power regularly conducts corporate governance assessments (GCG assessments). In 2024, the GCG assessment utilized four evaluation parameters: SK-16, the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), POJK 21/POJK.04/2015 on the Guidelines for Corporate Governance of Public Companies, and the Indonesian GCG General Guidelines (PUGKI) 2021. All four assessments produced excellent results, reflecting the current strength of PLN Indonesia Power's governance framework while providing valuable feedback for further refinement.

Whistle Blowing System (WBS) dan Sistem Pengendalian Internal

Whistleblowing System (WBS) and Internal Control System

Implementasi *Whistle Blowing System* (WBS) diyakini dapat mengungkapkan potensi risiko dan pelanggaran secara dini yang akan mendukung terciptanya budaya Perusahaan yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Kebijakan WBS 2019 telah dikaji ulang dan disempurnakan ke dalam kebijakan WBS 2024. Pedoman WBS dapat diakses oleh publik pada *website* PLN Indonesia Power <https://www.plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Form-Aduan-WBS.aspx>.

Selama tahun 2024, terdapat 23 (dua puluh tiga) pengaduan WBS yang masuk dan 19 (sembilan belas) pengaduan telah selesai ditindaklanjuti. Dari seluruh laporan yang diterima, tidak terdapat kasus yang dikategorikan sebagai praktik korupsi dan tidak ada laporan yang berujung pada pemberian sanksi terhadap pegawai sebagai akibat dari pengaduan yang dilaporkan tersebut.

Di tahun 2024, PLN Indonesia Power fokus pada perluasan implementasi dan Sertifikasi SMAP berdasarkan ISO 37001:2016 ke seluruh Unit Bisnis dan Anak Perusahaan melalui penerapan Manajemen kepatuhan pada setiap proses bisnis. Selain itu, PLN Indonesia Power juga melakukan *Fraud Risk Assessment* (FRA) pada proses bisnis korporat sebagai upaya pencegahan potensi *fraud* dan bentuk pengendalian terhadap risiko kecurangan, sekaligus untuk pemenuhan persyaratan *Maturity Level* Kepatuhan di lingkungan PLN Group. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan (LHKPN) secara berkala dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku sebagai wujud komitmen berintegritas.

Kerangka kerja pengendalian internal Kami dilakukan berdasarkan COSO *Framework*, melalui pendekatan *top-down* dan berbasis risiko mengacu pada Kebijakan Implementasi Internal Control over Financial Reporting (ICoFR). Implementasi ICoFR mencakup aspek pengendalian tingkat transaksional, meliputi segmen pendapatan penjualan listrik, biaya operasi, aset tetap, persediaan, pengembangan proyek, perbendaharaan, perpajakan dan pelaporan keuangan. Untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan penilaian bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah dijalankan secara memadai. Selain itu, kecukupan sistem pengendalian internal juga dilakukan dengan pelaporan *Control Self-Assessment* (CSA) secara berkala melalui aplikasi *online*.

The implementation of the Whistleblowing System (WBS) is believed to enable the early detection of potential risks and violations, thereby fostering a corporate culture that is transparent, accountable, and grounded in integrity. The 2019 WBS policy was reviewed and enhanced into the 2024 WBS policy. The WBS guidelines are accessible to the public via PLN Indonesia Power website: <https://www.plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Form-Aduan-WBS.aspx>.

In 2024, a total of 23 (twenty-three) complaints were received via the WBS channel, and 19 (nineteen) reports were resolved. Of all reports received, none were classified as corruption cases, and no employee sanctions were imposed as a result of the complaints.

In 2024, PLN Indonesia Power focused on expanding Anti-Bribery Management System (ABMS) based on ISO 37001:2016 implementation and certification across all Business Units and Subsidiaries by applying compliance management to every business process. Additionally, PLN Indonesia Power actively conducted Fraud Risk Assessments (FRA) on corporate business processes to design fraud prevention and to reinforce fraud risk controls, as part of fulfilling the Compliance Maturity Level requirements within PLN Group. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners submitted the State Officials' Wealth Report (LHKPN) regularly and on time in accordance with applicable regulations as a form of integrity commitment.

Our internal control framework is based on the COSO Framework, using a top-down and risk-based approach in reference to the Policy on the Implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR). ICoFR implementation includes control over transactional-level aspects such as electricity sales revenue, operating costs, fixed assets, inventory, project development, treasury, taxation, and financial reporting. To ensure the effectiveness of the internal control system, the Board of Directors and the Board of Commissioners, through the Audit Committee, have conducted assessments confirming that the internal control system has been adequately implemented. In addition, the adequacy of the internal control system is also monitored through periodic Control Self-Assessment (CSA) reporting via an online application.

Membangun Budaya Risiko yang Kuat

Building a Strong Risk Culture

Terdapat 10 (sepuluh) risiko utama Perusahaan dalam RKAP 2024 yang meliputi risiko operasional dan non-operasional, risiko strategis, risiko bisnis, serta risiko yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi. Risiko-risiko utama tersebut telah dikelola dengan tindakan mitigasi yang tepat untuk meminimalisir dampak kerugian sehingga diperoleh risiko residu (*Residu Risk Mapping*) sebagai risiko yang dapat diterima. Hasil pemantauan atas penerapan manajemen risiko yang terintegrasi, didukung oleh penguatan peran *risk owner*, koordinasi lintas fungsi, serta pemanfaatan sistem informasi risiko berbasis teknologi dalam setiap langkah mitigasi. *Progress* mitigasi risiko dipantau melalui *dashboard* risiko secara berkala dan dilaporkan kepada Direksi PLN Indonesia Power sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan yang berbasis risiko.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya Kami melakukan *assessment maturity level* manajemen risiko secara mandiri, untuk tahun 2024 berdasarkan arahan PLN selaku Pemegang Saham Kami mulai melakukan pengukuran *Risk Maturity Index* (RMI) oleh pihak independen mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023. Hasilnya diperoleh skor RMI sebesar 2,8 yang menunjukkan bahwa tingkat kematangan manajemen risiko Perusahaan berada pada fase Berkembang, yaitu tahap transisi menuju fase Praktik Baik, dimana penerapan manajemen risiko telah melampaui level dasar dan mulai menunjukkan praktik yang lebih sistematis. Direksi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko, baik terkait dengan aspek *leadership*, *people*, *process* maupun *result* serta penerapan *Business Continuity Management System* (BCMS) sebagai bagian dari strategi manajemen krisis dalam penyediaan energi listrik.

Selain itu, PLN Indonesia Power secara aktif juga melakukan penilaian risiko terkait aspek keberlanjutan yang meliputi dampak perubahan iklim, ketidakpastian pasokan energi dan bahan baku, serta perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah terkait sektor ketenagalistrikan. Pemetaan risiko keberlanjutan mengacu pada kerangka kerja *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), yang meliputi proses identifikasi dan penilaian risiko terkait iklim, yang dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis Perusahaan.

Sistem manajemen risiko PLN Indonesia Power mendapatkan pengakuan dalam membangun budaya risiko yang kuat dan menyeluruh untuk keberlanjutan bisnis Perusahaan, yaitu berhasil meraih *Gold Medal Category - Best Risk Improvement* dengan tema "*Developing Risk Culture for PLN Indonesia Power Sustainability*" pada ajang *PLN Risk Award*.

There are 10 (ten) main corporate risks identified in the 2024 RKAP, covering operational and non-operational risks, strategic risks, business risks, and risks with a high level of uncertainty. These main risks have been managed through appropriate mitigation actions to minimize potential losses, resulting in residual risks (*Residual Risk Mapping*) that are within acceptable levels. The implementation of integrated risk management is supported by the strengthened role of risk owners, cross-functional coordination, and the use of technology-based risk information systems in each mitigation step. Risk mitigation progress is monitored regularly through a risk dashboard and reported to the Board of Directors of PLN Indonesia Power as part of a risk-based decision-making process.

If in previous years we conducted self-assessments of risk management maturity levels, in 2024, based on directives from PLN as our Shareholder, we began measuring the Risk Maturity Index (RMI) through an independent party, referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023. The result was an RMI score of 2.8, indicating that the Company's risk management maturity was at the Developing stage, a transitional phase toward the Good Practice stage, where risk management implementation had gone beyond the basic level and started to show more systematic practices. The Board of Directors remains committed to continuously improving the quality of risk management implementation across leadership, people, processes, and results, as well as applying the Business Continuity Management System (BCMS) as part of the Company's crisis management strategy in electricity supply.

Furthermore, PLN Indonesia Power actively conducts risk assessments related to sustainability aspects, including the impacts of climate change, uncertainty in energy and raw material supply, as well as changes in government policies and regulations related to the electricity sector. Sustainability risk mapping refers to the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) framework, which includes the process of identifying and assessing climate-related risks that may affect the Company's business continuity.

PLN Indonesia Power's risk management system has received recognition for building a strong and comprehensive risk culture for the Company's business sustainability, by successfully winning the Gold Medal Category - Best Risk Improvement with the theme "*Developing Risk Culture for PLN Indonesia Power Sustainability*" at the *PLN Risk Award*.

Sustainable Power Generation

Sustainable Power Generation

Untuk mendukung tercapainya tujuan PLN Indonesia Power menjadi *Sustainable Power Generation*, Kami berkomitmen melakukan pengembangan pembangkit EBT seperti *geothermal*, nuklir, dan EBT lainnya, pemanfaatan sumber energi bersih seperti biomassa, *ammonia* dan *hydrogen* sebagai pengganti bahan bakar pada pembangkit fosil melalui program *co-firing*, *de-dieselization* dan penurunan emisi karbon melalui penggunaan teknologi penangkapan karbon (*Carbon Capture and Storage/CCS*) dan penyimpanan energi (*Carbon Capture, Utilization, and Storage/CCUS*).

Pengembangan pembangkit ramah lingkungan pun terus dilakukan, di tahun 2024 program bauran energi dengan uji coba *co-firing* 100% *biomass* berhasil dilakukan di UBP Barru melanjutkan kesuksesan tahun sebelumnya di PLTU Sintang, *co-firing* limbah uang kertas di UBP Adipala, UBP Asam-asam dan UBP Singkawang; program akselerasi transisi energi melalui pendirian tempat produksi biomassa di kota Medan melalui UBP Pangkalan Susu serta selesainya pembangunan PLTS *Hybrid* Nusa Penida berkapasitas 3,5 MWac.

PLN Indonesia Power telah menyelesaikan pembangunan *Green Hydrogen Plant* (GHP) di UBP Kamojang sebagai penghasil hidrogen hijau (*green hydrogen*) berbasis panas bumi pertama di Asia Tenggara. GHP merupakan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang memasok hidrogen hijau untuk *Hydrogen Refueling Station* (HRS) di Senayan Jakarta yang diresmi diluncurkan pada Februari 2024. Hal ini menjadi wujud komitmen PLN Indonesia Power dalam mengakselerasi pengembangan EBT sekaligus mencapai transisi energi ditargetkan Pemerintah.

Aksi nyata ini Kami wujudkan dengan pengajuan Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) bagi unit pembangkit *renewable energy* PLTM Gunung Wugul di tahun lalu dan tahun 2024 ini Kami berhasil memperoleh SPE tersebut ditambah SPE untuk 2 (dua) pembangkit lainnya, yakni PLTGU Priok dan PLTGU Grati. Selain itu, dalam 2 tahun terakhir, PLN Indonesia Power aktif dalam menginisiasi perdagangan karbon melalui Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) PLTU, sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik, dan berhasil melakukan perdagangan emisi PTBAE bagi 14 unit pembangkit PLTU yang dimiliki.

To support PLN Indonesia Power's goal of becoming a Sustainable Power Generation company, we are committed to developing NRE power plants such as geothermal, nuclear, and other renewable energy sources; utilizing clean energy sources such as biomass, ammonia, and hydrogen as fuel substitutes in fossil fuel power plants through co-firing programs, de-dieselization, and reducing carbon emissions through the use of Carbon Capture and Storage (CCS) and Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) technologies.

The development of environmentally friendly power plants continues. In 2024, the energy mix program achieved a significant milestone with a successful 100% biomass co-firing trial at GBU Barru, following the previous year's success at Sintang SPP, co-firing with paper waste at GBU Adipala and GBU Singkawang, an accelerated energy transition program through the establishment of a biomass production facility in Medan by GBU Pangkalan Susu, and the completion of the 3.5 MWac Nusa Penida Hybrid SoPP.

PLN Indonesia Power had completed the construction of a Green Hydrogen Plant (GHP) at GBU Kamojang, the first geothermal-based green hydrogen producer in Southeast Asia. The GHP is a new renewable energy (NRE) facility that supplies green hydrogen to the Hydrogen Refueling Station (HRS) in Senayan, Jakarta, which was officially launched in February 2024. This initiative reflects PLN Indonesia Power's strong commitment to accelerating renewable energy development and achieving the Government's targeted energy transition.

We had taken concrete action by applying for Emission Reduction Certificates (SPE) for Gunung Wugul MHPP last year, and in 2024, we successfully obtained the SPE, along with additional certificates for two other power plants, namely Priok CCPP and Grati CCPP. Furthermore, over the past two years, PLN Indonesia Power had actively initiated carbon trading through the Technical Approval for Emission Upper Limit (PTBAE) for SPP, in line with Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 16 of 2022 on the Implementation of Carbon Economic Value in the Power Generation Subsector. As a result, we successfully carried out emission trading for 14 SPP units under our ownership.

Membangun Masa Depan Rendah Karbon

Building Low Carbon Future

Masa depan rendah karbon lebih dari sekedar pengurangan emisi gas rumah kaca, namun juga mencakup perubahan fundamental dalam berbagai sistem, baik ekonomi, sosial, maupun budaya dengan tujuan akhir untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua. Untuk itu, masa depan rendah karbon menjadi tantangan yang memerlukan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Terdapat beberapa aspek penting dari masa depan rendah karbon yang relevan dengan PLN Indonesia Power meliputi: transisi energi, dekarbonisasi industri, transportasi berkelanjutan, inovasi teknologi dan perubahan pola konsumsi.

Transisi Energi

Energy Transition

Terkait Transisi Energi, PLN Indonesia Power terus berkomitmen meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti pemanfaatan panas bumi, energi surya, angin, maupun hidro, serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil secara signifikan peningkatan kapasitas pengembangan pembangkit EBT. Sepanjang tahun 2024, PLN Indonesia Power berhasil meningkatkan produksi EBT pada bauran energi Perusahaan sebesar 9,78% dari tahun lalu menjadi sebesar 11.171,27 GWh yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Selain itu, Kami berupaya menekan penggunaan energi melalui Program Peningkatan dan Pembudayaan Manajemen Efisiensi Energi (PPME) dan terus berinovasi dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan. Langkah ini sebagai bentuk dukungan PLN Indonesia Power untuk membantu pencapaian target emisi nol karbon pada tahun 2060.

A low-carbon future is more than just about reducing greenhouse gas emissions, it also entails fundamental changes across various systems, including economic, social, and cultural systems, with the ultimate goal of achieving sustainable and equitable development for all. Therefore, realizing a low-carbon future is a challenge that requires collaboration and cooperation among multiple stakeholders, including the government, businesses, and the public. Several main aspects of a low-carbon future that are relevant to PLN Indonesia Power include: energy transition, industrial decarbonization, sustainable transportation, technological innovation, and changes in consumption patterns.

In regard to energy transition, PLN Indonesia Power remains committed to increasing the use of renewable energy sources such as geothermal, solar, wind, and hydropower, while significantly reducing fossil fuel use by expanding the capacity of renewable energy power plants. Throughout 2024, PLN Indonesia Power successfully increased renewable energy production in the Company's energy mix by 9.78% from the previous year, reaching 11,171.27 GWh, derived from Hydroelectric Power Plants (HPP), Mini Hydro Power Plants (MHPP), Geothermal Power Plants (GPP), and Solar Power Plants (SoPP). In addition, we continue to reduce energy consumption through the Energy Efficiency Management Enhancement and Cultivation Program (PPME), while also driving innovation in the development of New Renewable Energy (NRE). These efforts reflect PLN Indonesia Power's support for achieving the national target of net-zero carbon emissions by 2060.

Dekarbonisasi Industri

Industrial Decarbonization

Dekarbonisasi industri di sektor energi listrik memegang peran penting dalam mengurangi emisi karbon dioksida yang menjadi penyebab perubahan iklim. Tujuan dekarbonisasi adalah untuk mengurangi dampak perubahan iklim, memperkuat keamanan energi, mencapai target NZE pada tahun 2060 dan meningkatkan daya saing industri karena terbukti lebih efisien dan ramah lingkungan. Tahun 2024 PLN Indonesia Power fokus pada tercapainya dekarbonisasi operasional sampai dengan mengadopsi teknologi inovatif untuk mendukung ketercapaian komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia untuk mengurangi emisi GRK pada tahun 2030 dan NZE 2060. PLN Indonesia Power berhasil melakukan reduksi emisi, meningkat 33,43% menjadi 12.733.438,49 Ton CO₂ dari tahun sebelumnya sebanyak 9,543.482,66 Ton CO₂.

PLN Indonesia Power telah melakukan inventarisasi emisi GRK *scope* 1, 2, dan 3 di unit pembangkit, yaitu lingkup 1 (emisi langsung), lingkup 2 (emisi tidak langsung dari energi yang dibeli), dan lingkup 3 (emisi tidak langsung dari rantai nilai). Setiap pegawai sesuai peran dan tanggung jawabnya melakukan pengendalian emisi, berupa pengendalian operasi pembangkit dalam memenuhi baku mutu emisi, melakukan Monev pengelolaan emisi, menciptakan inovasi program inisiatif reduksi emisi dan melaporkan emisi pembangkit di tempat kerjanya. Di luar aspek operasional Perusahaan, Kami berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 2.711,83 ton CO_{2e} melalui program *upgrading Ecopark* Suralaya dengan penanaman 2.631 pohon di lahan seluas 7,4 Hektare.

Transportasi Berkelanjutan

Sustainable Transportation

Pengembangan transportasi berkelanjutan telah dimulai dengan hadirnya kendaraan listrik sebagai transportasi rendah emisi, meningkatnya penggunaan transportasi publik, serta peningkatan efisiensi energi dalam sektor transportasi. PLN Indonesia Power memberikan dukungan positif terhadap ekosistem kendaraan listrik atau *electric vehicle* (EV), baik dari sisi suplai maupun keterjangkauan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang mudah diakses. Tahun 2024 terdapat 3.233 unit SPKLU yang telah beroperasi, baik milik PLN maupun mitra dan swasta. Selain itu, 151 kendaraan listrik telah digunakan untuk kebutuhan operasional Perusahaan dan akan terus ditingkatkan jumlahnya.

Industrial decarbonization in the electricity sector plays a crucial role in reducing carbon dioxide emissions which are the primary cause for climate change. The aim of decarbonization is to mitigate the impact of climate change, strengthen energy security, achieve the NZE target by 2060, and enhance industrial competitiveness by adopting more efficient and environmentally friendly practices. In 2024, PLN Indonesia Power focused on achieving operational decarbonization, including the adoption of innovative technologies to support Indonesia's commitment to its Nationally Determined Contribution (NDC) to reduce GHG emissions by 2030 and achieve NZE by 2060. PLN Indonesia Power successfully reduced emissions by 33.43%, reaching 12,733,438.49 tons CO₂ from 9,543,482.66 tons CO₂ in the previous year.

PLN Indonesia Power has conducted a greenhouse gas (GHG) emission inventory for scopes 1, 2, and 3 at its power generation units, namely Scope 1 (direct emissions), Scope 2 (indirect emissions from purchased energy), and Scope 3 (indirect emissions from the value chain). Every employee, according to the roles and responsibilities, participates in emission control efforts, such as ensuring plant operations comply with emission quality standards, conducting monitoring and evaluation (Monev) of emission management, and creating program innovations and reporting plant emissions at their respective work locations. Beyond the Company's operational aspects, we managed to reduce carbon emissions by 2,711.83 tons CO_{2e} through the Ecopark Suralaya upgrading program, which included planting 2,631 trees across 7.4 hectares of land.

The development of sustainable transportation has begun with the emergence of electric vehicles (EVs) as low-emission transport options, increased use of public transportation, and improved energy efficiency in the transportation sector. PLN Indonesia Power provides strong support for the electric vehicle (EV) ecosystem, both in terms of electricity supply and accessibility to Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU). In 2024, a total of 3,233 SPKLU units had been in operation, owned by PLN as well as its partners and private entities. In addition, 151 electric vehicles have been used for the Company's operational needs, and this number will continue to increase.

Inovasi Teknologi

Technological Innovation

Pengembangan dan penerapan teknologi baru yang dapat membantu mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi energi, seperti teknologi CCS dan CCUS. CCS menangkap CO₂ dari sumber emisi (misalnya pembangkit listrik) dan menyimpannya, sementara CCUS juga memanfaatkannya untuk membuat produk bernilai seperti bahan bakar atau bahan kimia. Inovasi berbagai bidang lainnya juga telah dan terus dilakukan, antara lain inovasi efisiensi energi, inovasi program konservasi air, inovasi program pengurangan limbah B3 dan limbah Non B3 serta inovasi reduksi emisi lainnya seperti perdagangan emisi atau karbon melalui Sertifikasi Penurunan Emisi Indonesia (SPEI) dan PTBAE.

The development and application of new technologies that help reduce emissions and improve energy efficiency are ongoing, including technologies such as CCS and CCUS. CCS captures CO₂ from emission sources (e.g., power plants) and stores it, while CCUS utilizes it to create value-added products such as fuels or chemicals. Innovation in other areas is also continuously being pursued, such as energy efficiency innovation, water conservation programs, hazardous (B3) and non-hazardous (Non-B3) waste reduction programs, and other emission reduction innovations such as emissions or carbon trading through the issuance of Indonesia Emission Reduction Certificates (SPEI) and Technical Approval for Emission Cap (PTBAE).

Membangun Budaya dan Memperkuat Strategi Keberlanjutan

Building Culture and Strengthening Sustainability Strategy

Kami memandang keberlanjutan usaha, lingkungan, dan masyarakat sebagai ekosistem yang saling terkait dan menentukan kelangsungan bisnis. Melalui pendekatan yang memperhatikan kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati, adaptasi perubahan iklim, serta prinsip kesetaraan dan tata kelola inklusif, PLN Indonesia Power yakin dapat mendukung kinerja keuangan jangka panjang dan keberlanjutan usaha. Sebagai bagian dari kontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), prinsip ESG diintegrasikan dalam seluruh operasional bisnis melalui strategi keberlanjutan yang komprehensif.

We view business sustainability, the environment, and society as an interconnected ecosystem that determines business continuity. Through an approach that emphasizes environmental conservation, biodiversity, climate change adaptation, as well as principles of equity and inclusive governance, PLN Indonesia Power is confident in its ability to support long-term financial performance and business sustainability. As part of our contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs), ESG principles are integrated into all business operations through a comprehensive sustainability strategy.

PLN Indonesia Power secara konsisten melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian dari tata kelola keberlanjutan serta bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar pembangkit atas dukungan dan kerjasamanya. Kebijakan TJSL mengadopsi pendekatan 5P *Sustainability Framework* yang meliputi: *people* (kehidupan sosial), *planet* (kelestarian lingkungan), *prosperity* (kemakmuran ekonomi), *peace* (kerukunan), dan *partnership* (kemitraan). Strategi TJSL difokuskan pada penciptaan *shared value* yang memberikan manfaat bagi Perusahaan, pemangku kepentingan, dan pembangunan berkelanjutan. Seluruh program TJSL dituangkan dalam *Sustainability Commitment* yang selaras dengan *Sustainability Roadmap* dan menjadi komitmen Perusahaan dalam menjalankan agenda keberlanjutan.

PLN Indonesia Power consistently implements Social and Environmental Responsibility (TJSL) as part of its sustainability governance and as a form of care for the communities surrounding power plants in recognition of their support and cooperation. The TJSL policy adopts the 5P Sustainability Framework approach, which includes: people (social well-being), planet (environmental preservation), prosperity (economic growth), peace (harmony), and partnership (collaboration). The TJSL strategy is focused on creating shared value that benefits the Company, stakeholders, and sustainable development. All TJSL programs are outlined in a Sustainability Commitment aligned with the Sustainability Roadmap and serve as the Company's pledge in carrying out its sustainability agenda.

Pada tahun 2024, program InPower CARE PLN Indonesia Power yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dengan mengangkat kearifan lokal di wilayah operasional pembangkit berhasil meraih prestasi membanggakan. PLN Indonesia Power memperoleh 19 PROPER Emas, 8 PROPER Hijau, dan 27 PROPER Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut adalah narasi singkat mengenai program yang meraih penghargaan PROPER Emas:

Program HARVEST MOON "*Harnessing Agriculture Resources via Versatile and Efficient Sustainable Technologies*" di UBP Banten 3 Lontar merupakan program pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian dengan memanfaatkan FABA yang berfokus pada teknologi pertanian berkelanjutan, bertujuan meminimalisir dampak anomali perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir, dengan alokasi anggaran sebesar Rp670,89 juta.

Program KELASI EMAS "Keberlanjutan Program Ketapang Kuning Melalui Stimulasi Menuju Generasi Emas" di PLTGU Priok merupakan program pemberdayaan masyarakat di sektor Kesehatan melalui kegiatan pemenuhan gizi dan stimulasi balita *stunting* dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,234 miliar.

Program PALEMBANG CINDO NIAN "*Clean Batik Initiative for Indonesia, New Inspirative, Art and Nice*" yang diusung oleh PLTGU Keramasan adalah sebuah inovasi sosial yang memanfaatkan limbah hortikultura sebagai pewarna dalam pembuatan batik khas Palembang dengan alokasi anggaran sebesar Rp258,22 juta.

Program BUMI PASUNDAN "Bangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Sumber Daya Terbarukan" di PLTA Saguling bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar waduk melalui pengelolaan sampah plastik, eceng gondok, dan *styrofoam*, serta memanfaatkan sumber daya terbarukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,75 miliar.

Program JULANG EMAS "Jaga Gunung Ungaran Lestarkan Lingkungan Bersama Masyarakat" di PLTGU Tambak Lorok Semarang merupakan program unggulan yang berfokus pada konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di daerah Gunung Ungaran berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya antara lain dengan penanaman pohon, pengolahan sampah, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekonomi lokal dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,38 miliar.

In 2024, the InPower CARE program, focused on community empowerment through the promotion of local wisdom in power plant operational areas, achieved notable recognition. PLN Indonesia Power was awarded 19 Gold PROPER, 8 Green PROPER, and 27 Blue PROPER ratings by the Ministry of Environment and Forestry. Below is a brief narrative of the program that received the Gold PROPER award:

The HARVEST MOON program ("*Harnessing Agriculture Resources via Versatile and Efficient Sustainable Technologies*") at GBU Banten 3 Lontar is a community empowerment program in the agricultural sector that leverages FABA focusing on sustainable farming technologies and aiming to minimize the impacts of climate change anomalies such as droughts and floods, with a budget allocation of Rp670.89 million.

The KELASI EMAS program (Sustainability of the Ketapang Kuning Program through Stimulation Towards a Golden Generation) at Priok CCPP is a community empowerment initiative in the health sector, focusing on nutritional support and stimulation activities for stunted toddlers with a budget allocation of Rp1.234 billion.

The PALEMBANG CINDO NIAN program (Clean Batik Initiative for Indonesia, New Inspirative, Art and Nice) (Rp258.215 million), initiated by Keramasan CCPP, is a social innovation that utilizes horticulture waste as dye in the production of traditional Palembang batik with a budget allocation of Rp258.22 million.

The BUMI PASUNDAN program (Bangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Sumber Daya Terbarukan/Developing the Local Economy through Renewable Resource Management) (Rp1.75 billion) at Saguling HPP aims to empower communities around the reservoir through the management of plastic waste, water hyacinth, and styrofoam, as well as by utilizing renewable resources to improve the local economy with a budget allocation of Rp1.75 billion.

The JULANG EMAS program (Preserve Mount Ungaran and the Environment Together with the Community) (Rp1.38 billion) at Tambak Lorok CCPP in Semarang is a flagship initiative focused on environmental conservation and community empowerment in the Mount Ungaran area. This initiative is based on local wisdom to improve the well-being of surrounding communities through activities such as tree planting, waste management, skills training, and local economic development with a budget allocation of Rp1.38 billion.

Hal di atas menjadi kontribusi nyata PLN Indonesia Power menjalankan peran strategis dalam pembangunan sosial ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab keberlanjutan Perusahaan. Kami terus berupaya menciptakan dampak ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat sekitar wilayah operasi. Langkah yang diambil mencakup pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penguatan kapasitas masyarakat lokal, penciptaan peluang bagi UMKM, peningkatan peran penyedia lokal, serta prioritas penggunaan tenaga kerja setempat. Seluruh program ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi, berdaya saing, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan terus memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan aspek-aspek lingkungan dalam operasional, PLN Indonesia Power berupaya meminimalkan risiko ekologis dan mendukung terwujudnya praktik bisnis yang ramah lingkungan. Pengelolaan ini mencerminkan kesungguhan Perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kebijakan *Integrated Management System* (IMS) PLN Indonesia Power dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan (K3L), PLN Indonesia Power terus berupaya meminimalkan dampak negatif operasi dengan target nihil kecelakaan (*zero accident*) dan tanpa fatalitas (*zero fatality*). Pada tahun 2024, Perusahaan mencatat nol kecelakaan kerja pada pegawai. Guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, PLN Indonesia Power juga telah menanam 2.631 pohon di lahan seluas 7,4 hektare, serta mengurangi emisi karbon sebesar 2.711,83 ton CO₂e melalui program *upgrade Ecopark* Suralaya. Selain itu, pada tahun ini, PLN Indonesia Power menginisiasi pengajuan dan penerbitan *Eco-Label Tipe 3, Environmental Product Declaration* (EPD) untuk PLTGU Grati, PLTGU Priok, PLTGU Semarang, dan PLTGU Cilegon. EPD merupakan dokumen transparan yang menginformasikan dampak lingkungan produk berdasarkan penilaian siklus hidup (*Life Cycle Assessment*), mulai dari ekstraksi bahan baku hingga pembuangan akhir. Dokumen ini membantu produsen dan konsumen memilih produk yang lebih berkelanjutan dengan membandingkan dampak lingkungan atas produk sejenis.

Tahun 2024 menjadi tahun penuh prestasi yang membanggakan dalam implementasi strategi keberlanjutan di berbagai bidang. PLN Indonesia Power berhasil memperoleh predikat sebagai Perusahaan dengan CSR terbaik, baik di tingkat Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) maupun korporasi, antara lain meliputi 12 (dua belas) penghargaan dalam Ajang CSR & PDB (Pengembangan Desa Berkelanjutan) Awards 2024 yang diselenggarakan oleh ISSF (*Indonesia Social*

Those initiatives represent PLN Indonesia Power's tangible contribution in fulfilling its strategic role in socio-economic development as part of the Company's sustainability responsibilities. We continue to strive to generate economic impact, both directly and indirectly, for communities surrounding our operational areas. Measures taken include the development of sustainable infrastructure, strengthening local community capacity, creating opportunities for MSMEs, increasing the involvement of local suppliers, and prioritizing the use of local labor. All of these programs aim to promote economic independence, competitiveness, and sustainable community welfare.

By continuously monitoring, evaluating, and enhancing environmental aspects within its operations, PLN Indonesia Power is committed to minimizing ecological risks and supporting the implementation of environmentally responsible business practices. This environmental management reflects the Company's dedication to preserving the environment and enhancing the welfare of surrounding communities, aligned with PLN Indonesia Power's *Integrated Management System* (IMS) policies.

In the Occupational Health, Safety, Security, and Environment (OHSE) aspect, PLN Indonesia Power continues to strive to minimize the negative impacts of operations, with the goal of achieving zero accidents and zero fatalities. In 2024, the Company recorded zero work-related accidents among its employees. To create a healthy and safe work environment, PLN Indonesia Power has also planted 2,631 trees on 7.4 hectares of land and reduced carbon emissions by 2,711.83 tons CO₂e through the *Ecopark Suralaya* upgrade program. Additionally, this year PLN Indonesia Power has initiated the application and issuance of Type III Eco-Labels, namely the *Environmental Product Declaration* (EPD), for the Grati CCPP, Priok CCPP, Semarang CCPP, and Cilegon CCPP. An EPD is a transparent document that provides information on a product's environmental impact based on Life Cycle Assessment (LCA), from raw material extraction to final disposal. This document helps producers and consumers choose more sustainable products by comparing the environmental impacts of similar products.

The year 2024 marked a proud and rewarding period for the implementation of sustainability strategies across various areas. PLN Indonesia Power earned recognition as a top-performing company in Corporate Social Responsibility (CSR), both at the Generation Business Unit (GBU) level and at the corporate level. Notably, the company received: 12 (twelve) awards at the CSR & PDB (Sustainable Village Development) Awards 2024, organized by the Indonesia

Sustainability Forum), 7 (tujuh) penghargaan pada ajang *TOP CSR Award 2024*, 3 (tiga) penghargaan dalam ajang *Indonesia CSR-SDG-ESG Award VII 2024* sebagai Juara Umum, Juara Umum 1 dan *Category The Best Commitment CEO* dan 34 (tiga puluh empat) penghargaan pada delapan kategori dalam ajang *Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) 2024* serta 19 penghargaan PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Di tingkat global, PLN Indonesia Power meraih penghargaan *Winner of the Grid Local Grid of The ASEAN Renewable Energy Project Awards* kepada UBP Bali serta penghargaan *2nd Runner Up of The Energy Management in Buildings and Industry* kepada UBP Priok. Ini menjadi pengakuan atas konsistensi PLN Indonesia Power dalam memperkuat budaya keberlanjutan dalam mendukung percepatan transformasi menuju ekonomi rendah karbon, pengurangan emisi GRK, serta penciptaan inovasi berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Social Sustainability Forum (ISSF); 7 (seven) awards at the *TOP CSR Award 2024*; 3 (three) awards at the *Indonesia CSR-SDG-ESG Award VII 2024*, including Overall Champion, First Overall Champion, and The Best Commitment CEO; 34 (thirty-four) awards in eight categories at the *Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) 2024*; and 19 PROPER Gold awards from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). At the international level, PLN Indonesia Power was honored as the Winner of the Grid-Local Grid category at the ASEAN Renewable Energy Project Awards for GBU Bali, and as 2nd Runner-Up in Energy Management in Buildings and Industry for GBU Priok. These achievements serve as a testament to PLN Indonesia Power's continued commitment to strengthening a sustainability-driven culture, supporting the acceleration of the transition toward a low-carbon economy, reducing greenhouse gas emissions, and fostering sustainable innovation to ensure long-term environmental stewardship.

Perubahan Komposisi Direksi

Changes in the Board of Directors' Composition

Tahun 2024 tidak terjadi perubahan komposisi Direksi PLN Indonesia Power. Namun terjadi perubahan nomenklatur anggota Direksi, dalam rangka penguatan organ manajemen risiko Perusahaan sebagai tindak lanjut amanat dari pemegang saham berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler tanggal 1 Juli 2024 yang menyetujui dan memutuskan pengalihan nomenklatur Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

In 2024, there were no changes in the Board of Directors' composition of PLN Indonesia Power. However, there was an adjustment of the nomenclature of one of the Board of Directors' members, aimed at strengthening the Company's risk management function, as a follow-up to the mandate from the Shareholders through Shareholders' Circular Resolutions dated July 1, 2024, which approved and decided on the adjustment of nomenclature from Director of Finance to Director of Finance and Risk Management.

Dengan demikian maka susunan komposisi Direksi adalah sebagai berikut:

Accordingly, the Board of Directors' composition is as follows:

Edwin Nugraha Putra	: Direktur Utama
M. Hanafi Nur Rifai	: Direktur Operasi Pembangkit Batubara
Djoko Mulyono	: Direktur Operasi Pembangkit Gas
Bernadus Sudarmanta	: Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Endang Astharanti	: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Wisnoe Satrijono	: Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi

Edwin Nugraha Putra	: President Director
M. Hanafi Nur Rifai	: Director of Coal Power Plant Operations
Djoko Mulyono	: Director of Gas Power Plant Operations
Bernadus Sudarmanta	: Director of Business Development and Commerce
Endang Astharanti	: Director of Finance and Risk Management
Wisnoe Satrijono	: Director of Human Capital Management and Administration

Dengan komposisi Direksi saat ini tentu kami berupaya untuk terus meningkatkan soliditas guna meningkatkan kontribusi positif yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan kinerja PLN Indonesia Power yang berkelanjutan.

With the current composition, we continue to strengthen our solidarity to deliver greater positive contributions in driving the sustainable performance growth of PLN Indonesia Power.

Komposisi Direksi Setelah Tahun Buku 2024

Composition of the Board of Directors After the 2024 Fiscal Year

Setelah tahun buku 2024 berakhir sampai dengan waktu penyampaian Laporan Tahunan ini, tidak ada perubahan komposisi Direksi PLN Indonesia Power.

From the end of the 2024 fiscal year until the submission of this Annual Report, there had been no changes in the composition of the Board of Directors of PLN Indonesia Power.

Apresiasi dan Penutup

Acknowledgment and Conclusion

Sebagai penutup, mewakili Direksi PLN Indonesia Power, kami menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan dan pengawasan dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Pemegang Saham, atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan, kepada pelanggan mitra bisnis dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini. Kepada seluruh pegawai, Direksi memberikan penghargaan atas dedikasi dan kinerja yang konsisten sepanjang tahun 2024 hingga mendorong PLN Indonesia Power mencatatkan capaian yang positif dan membanggakan.

In conclusion, on behalf of the Board of Directors of PLN Indonesia Power, we extend our gratitude to the Board of Commissioners for their guidance and oversight in carrying out the Company's business activities. We also express our appreciation to the Shareholders for their continued support and trust, as well as to our customers, business partners, and all stakeholders for the strong collaboration and support throughout the years. To all employees, the Board of Directors conveys its sincere appreciation for your dedication and consistent performance throughout 2024, which has enabled PLN Indonesia Power to achieve commendable and proud results.

Dengan semangat kepemimpinan melanjutkan Transformasi PLN 2.0 - *The Next Chapter of Transformation* dalam mendukung ekosistem korporat PLN grup yang kokoh dan dinamis, Kami terus membangun landasan yang kuat untuk terus berkembang dengan sinergi dan dukungan seluruh pihak.

With a spirit of leadership in continuing PLN 2.0 Transformation - *The Next Chapter of Transformation*, and in support of a solid and dynamic PLN Group corporate ecosystem, we are committed to building a strong foundation for continued growth through synergy and the support of all stakeholders.

Berbekal kekuatan wilayah operasi yang luas, semangat berinovasi, kolaborasi dengan pemimpin industri di bidangnya, dan mengedepankan pengelolaan prinsip keberlanjutan, PLN Indonesia Power siap menjadi perusahaan listrik global dengan kinerja terbaik dalam menyediakan solusi energi bagi pelanggan. PLN Indonesia Power siap menyongsong masa depan berkelanjutan yang dipenuhi kolaborasi yang memposisikan Kami sebagai produsen listrik utama dengan tata Kelola unggul.

Armed with a wide operational reach, an innovative mindset, collaboration with leading industry players, and a commitment to sustainability principles, PLN Indonesia Power is ready to become a global electricity company with top-tier performance in delivering energy solutions to customers. We are fully prepared to embrace a sustainable future built on collaboration, positioning us as a leading power producer with excellent governance.

Jakarta, 31 Mei 2025
Jakarta, May 31, 2025

Atas Nama Direksi On behalf of the Board of Directors

PT PLN Indonesia Power



Edwin Nugraha Putra

Direktur Utama
President Director



SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2024 PT PLN INDONESIA POWER

Statement From Board of Commissioners
on Accountability Over Annual Report 2024
PT PLN Indonesia Power

Laporan Tahunan 2024 PT Indonesia Power menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

PT Indonesia Power Annual Report 2024 presents information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ended on December 31, 2024, and other information relevant and significant for the stakeholders.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Komisaris PT Indonesia Power menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2024 PT Indonesia Power.

We, the undersigned, the entire Board of Commissioners of PT Indonesia Power, declare full accountability for the accuracy of the content of PT Indonesia Power Annual Report 2024.

Jakarta, 31 Mei 2025
Jakarta, May 31, 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Iskandar Simorangkir
Pelaksana Tugas Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Acting President Commissioner concurrently Independent Commissioner



Djoko Siswanto
Komisaris
Commissioner



M. P. Dwinugroho
Komisaris
Commissioner



Arief Budiman
Komisaris
Commissioner



Haryanto W.S.
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Lukmanul Hakim
Komisaris Independen
Independent Commissioner

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2024 PT PLN INDONESIA POWER

Statement From Board of Directors
on Accountability Over Annual Report 2024
PT PLN Indonesia Power

Laporan Tahunan 2024 PT PLN Indonesia Power menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

PT PLN Indonesia Power Annual Report 2024 presents information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ended on December 31, 2024, and other information relevant and significant for the stakeholders.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Direksi PT PLN Indonesia Power menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2024 PT PLN Indonesia Power.

We, the undersigned, the entire Board of Directors of PT PLN Indonesia Power, declare full accountability for the accuracy of the content of PT PLN Indonesia Power Annual Report 2024.

Jakarta, 31 Mei 2025
Jakarta, May 31, 2025

Direksi
Board of Directors



Edwin Nugraha Putra
Direktur Utama
President Director



M. Hanafi Nur Rifai
Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara
Director of Coal Power Plant Operations



Djoko Mulyono
Direktur Operasi Pembangkit Gas
Director of Gas Power Plant Operations



Bernadus Sudarmanta
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Director of Business Development and Commerce



Endang Astharanti
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management



Wisnoe Satrijono
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administration

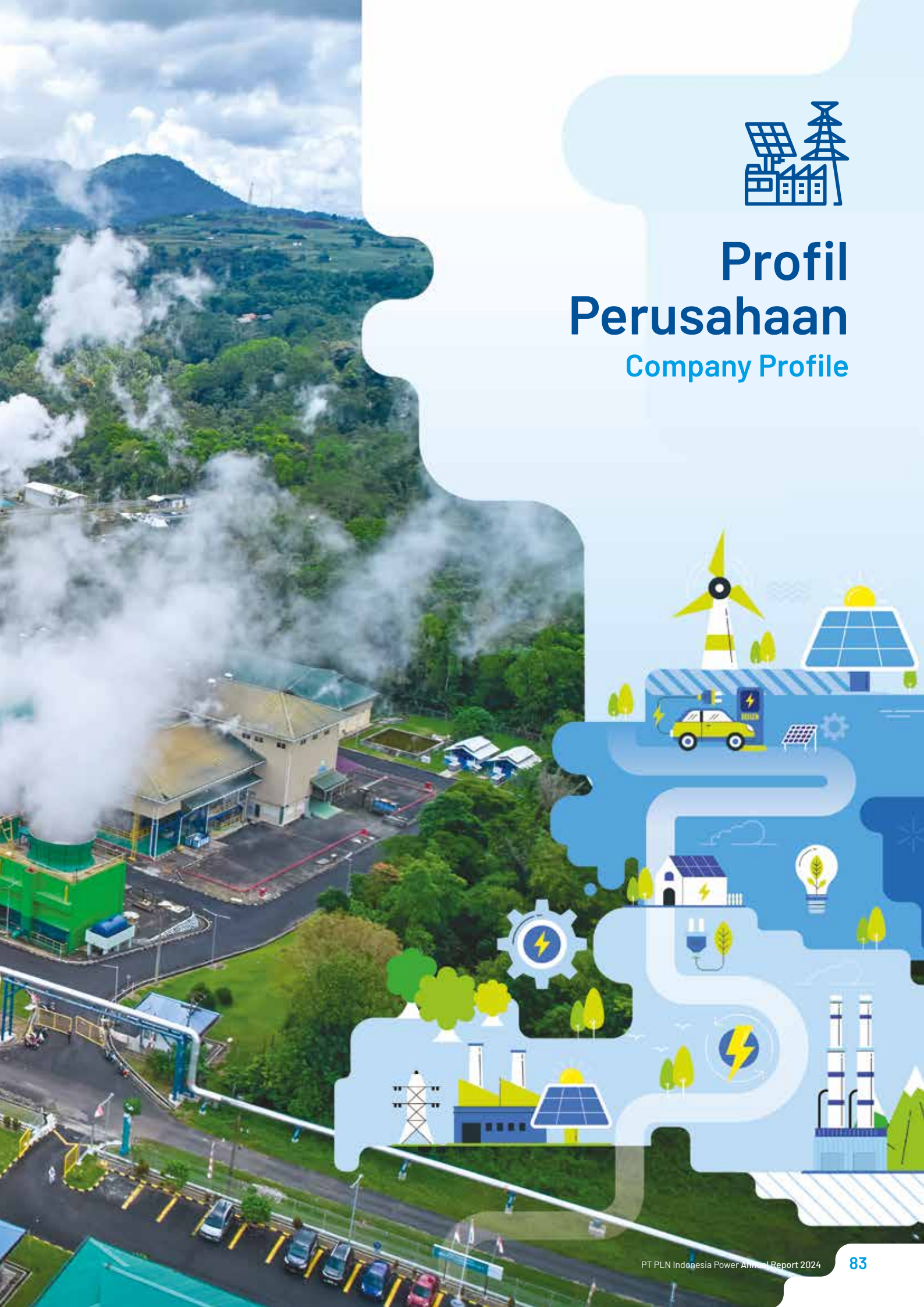


PLTP Lahendong Unit 3 & 4, Minahasa, Sulawesi Utara
Lahendong GPP Unit 3 & 4, Minahasa, North Sulawesi



Profil Perusahaan

Company Profile



Identitas Perusahaan

Company Identity



Nama

Company Name



PT PLN Indonesia Power

Nama Singkatan

Abbreviation



PT PLN IP

Tanggal Pendirian

Date of Establishment



3 Oktober 1995 October 3, 1995

Bidang Usaha

Line of Business



1. Pembangkitan Tenaga Listrik;
2. Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik, antara lain jasa investigasi, desain, operasi dan pemeliharaan serta persewaan peralatan pembangkitan; konstruksi bangunan elektrik dan lain-lain.
3. Melakukan perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, termasuk memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan.

1. Electricity Generation;
2. Electricity supply-related businesses, including power plant investigation, design, operation & maintenance, and equipment rental; electrical building construction, etc.
3. Conducting trades and/or supporting business activities for optimizing resources at hand, including through assignments to Subsidiaries.

Status Perusahaan

Company Status



Subholding PT PLN (Persero)
 Subholding of PT PLN (Persero)

Kepemilikan Saham

Shareholding



- PT PLN (Persero) 99,99%
- Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) 0,01%
- PT PLN (Persero) 99,99%
- Foundation for Education and Welfare (YPK) PT PLN (Persero) 0.01%

Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis for Establishment



1. Akta Pendirian PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I (PT PLN PJB I) tanggal 3 Oktober 1995.
2. Akta Perubahan Nama Perusahaan menjadi PT Indonesia Power tanggal 3 Agustus 2000, dibuat dihadapan Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH dengan Akta Nomor 8 tanggal 3 Agustus 2000.
3. Berdasarkan Permohonan Notaris SHAHREZA ANNAZ S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 16 Tanggal 13 April 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PLN INDONESIA POWER tanggal 17 April 2023

1. Deed of Establishment of PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I (PT PLN PJB I) dated October 03, 1995.
2. Deed of Change of Name to PT Indonesia Power dated August 03, 2000, made before Notary Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., under Deed No. 8 dated August 03, 2000.
3. Application of Notary Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., based on a copy of Deed No. 16 dated April 13, 2023, on Amendments to the Articles of Association of PT PLN Indonesia Power dated April 17, 2023.

Modal Dasar

Authorized Capital



Rp714.331.267.200.000

Modal Disetor Penuh dan Ditempatkan

Issued and Fully Paid Capital



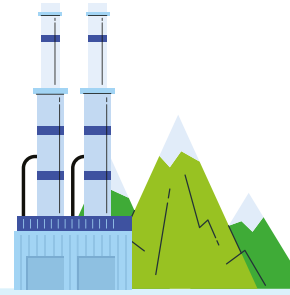
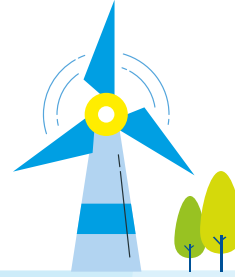
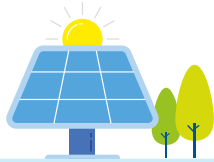
Rp178.582.816.800.000

Jumlah Pegawai

Employee Base



5.409 Pegawai Employee



Wilayah Kerja Operasional Operational Work Areas



1. UBP GBU Suralaya	20. UBP GBU Jatigede
2. UBP GBU Banten 1 Suralaya	21. UBP GBU Kamojang
3. UBP GBU Banten 2 Labuan	22. UBP GBU Semarang
4. UBP GBU Banten 3 Lontar	23. UBP GBU Mrica
5. UBP GBU Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	24. UBP GBU Grati
6. UBP GBU Jawa Tengah 2 Adipala	25. UBP GBU Bali
7. UBP GBU Pangkalan Susu	26. UBP GBU Cilegon
8. UBP GBU Labuhan Angin	27. UBP GBU Mahakam
9. UBP GBU Ombilin	28. UBP GBU Keramasan
10. UBP GBU Teluk Sirih	29. UBP GBU Barito
11. UBP GBU Kepulauan Riau	30. UBP GBU Tello
12. UBP GBU Asam Asam	31. UBP GBU Bengkulu
13. UBP GBU Singkawang	32. UBP GBU Jambi
14. UBP GBU Sanggau	33. UBP GBU Bukittinggi
15. UBP GBU Sintang	34. UBP GBU Papua Maluku
16. UBP GBU Berau	35. UBP GBU Holtekamp
17. UBP GBU Barro	36. UBP GBU Jeranjang
18. UBP GBU Priok	
19. UBP GBU Saguling	

Kantor Pusat Head Office



PT PLN Indonesia Power
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18
Jakarta Selatan, Kode Pos 12950
☎ (62-21) 526 7666 (Hunting)
📠 (62-21) 525 1923, 525 2623

Website Website



www.plnindonesiapower.co.id

Email Email



kontak-ip@indonesiapower.co.id

Anak Perusahaan Subsidiaries



1. PT PLN Indonesia Power Services (99,9%), bergerak di bidang: energi ketenagalistrikan, operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik serta <i>co-generation</i> .	1. PT PLN Indonesia Power Services (99.9%), engaging in: electricity energy, power plant operations & maintenance, and co-generation.
2. PT Artha Daya Coalindo (80%), bergerak di bidang: perdagangan, pengangkutan, bongkar muat, pemasaran dan keagenan batubara.	2. PT Artha Daya Coalindo (80%), engaging in: coal trade, transport, loading/unloading, marketing, and agency.
3. PT Indo Ridlatama Power (90%), bergerak di bidang: pembangkit tenaga listrik.	3. PT Indo Ridlatama Power (90%), engaging in: power generation.
4. PLN IP Renewables (PLN IPRen) 99,9%), bergerak di bidang ketenagalistrikan dan energi, dan <i>participating interest</i> .	4. PLN IP Renewables (PLN IPRen) (99.9%), engaging in: electricity & energy, and participating interest.

Sosial Media Social Media



📘 PLN Indonesia Power
📷 @plnindonesiapower
📺 PLN Indonesia Power
📺 @pt.plnindonesiapower
✉ @pln_ip



Riwayat Singkat dan *Rebranding* Perusahaan

Brief History and Company Rebranding

Jejak Langkah Milestones

1995

Pendirian PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB I)
 Establishment of PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB I)

2015

- Pengoperasian PLTDG Pesanggaran 200 MW, Bali.
- Peletakan batu pertama pembangunan PLTM Lumbur.
- Sertifikasi ISO 55001 dan implementasi ISO 26000.
- Operation of PLTDG Pesanggaran, Bali 200 MW.
- Groundbreaking for MHPP Lumbur construction.
- ISO 55001 certification and ISO 26000 implementation.

2021

- Sukses mendukung PON XX PAPUA 2021 dengan *Mobile Power Plant* (MPP) Papua 120 MW dan PLTU Holtekamp 24 MW
- COD PLTU Kalbar 12x100 MW
- COD PLTM Gunung Wugul 3 MW di Jawa Tengah
- Successfully supporting PON XX PAPUA 2021 with *Mobile Power Plant* (MPP) Papua 120 MW and Holtekamp SPP 24 MW
- COD of Kalbar SPP 12x100 MW
- COD of MHPP Gunung Wugul 3 MW in Central Java

1996-2000

- Perubahan Nama PT PJB I menjadi Indonesia Power (3 Agustus 2000);
- Pendirian Anak Perusahaan:
 - PT Artha Daya Coalindo (ADC) (1997)
 - PT Cogindo Dayabersama (CDB) (1998)
 - PT Rekadaya ElektriKA (RE) (2000).
- Change of name from PT PJB I to Indonesia Power (August 3, 2000);
- Establishment of Subsidiaries:
 - PT Artha Daya Coalindo (ADC) (1997)
 - PT Cogindo Dayabersama (CDB) (1998)
 - PT Rekadaya ElektriKA (RE) (2000).

2016

- Pendirian Afiliasi dari Anak Perusahaan PT GCL Indo Tenaga;
- Penambahan UJP PLTGU Cilegon ke Indonesia Power;
- Sertifikasi ISO 50001.
- Establishment of Affiliate of Subsidiary PT GCL Indo Tenaga;
- Addition of UJP CCPP Cilegon to Indonesia Power;
- ISO 50001 certification.

2022

- Menjadi Perusahaan pembangkitan terbesar se-Asia Tenggara dengan Total Kapasitas 22,9 GW
- Pengendalian operasional pembangkit listrik termal, fokus pada keunggulan operasional dan optimalisasi portofolio untuk penyediaan listrik yang resilien dan terjangkau
- Becoming Southeast Asia's largest power company at a total capacity of 22.9 GW
- Controlling thermal power plant operations, focusing on operational excellence and portfolio optimization for providing resilient and affordable electricity

2001-2005

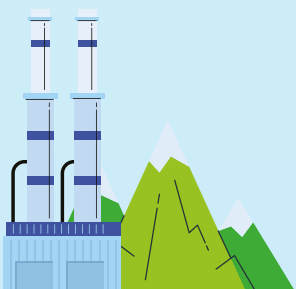
Pendirian Anak Perusahaan PT Indo Pusaka Berau (IPB) (2005)
 Establishment of a Subsidiary, PT Indo Pusaka Berau (IPB) (2005)

2017

- Pendirian Afiliasi dari Anak Perusahaan yaitu PT Indo Raya Tenaga dan PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC);
- Sertifikasi ISO 27001 dan ISO 22301;
- Pencatatan Perdana sekuritisasi Efek Beragun Aset (EBA) Danareksa Indonesia Power PLN1;
- *Groundbreaking* PLTU IPP Jawa 9-10 2.000 MW.
- Establishment of Affiliates of Subsidiaries, i.e. PT Indo Raya Tenaga (IRT) and PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC);
- ISO 27001 and ISO 22301 certifications;
- First listing of Asset-Backed Security of Indonesia Power Mutual Funds PLN1 (EBA) Danareksa Indonesia Power PLN1;
- Groundbreaking of SPP IPP Jawa 9-10 2,000 MW.

2023

- *Peresmian Legal End State Holding Subholding* PT PLN (Persero), perubahan identitas PT Indonesia Power menjadi PT PLN Indonesia Power pada 1 Januari 2023
- *Groundbreaking* pabrik Sel Surya dan Panel Surya berkapasitas 1GWp
- *Peresmian 21 Green Hydrogen Plant* (GHP) di pembangkit Listrik tersebar di seluruh Indonesia
- Inauguration of the Official Legal End State of Holding-Subholding PT PLN (Persero), with the identity change of PT Indonesia Power to PT PLN Indonesia Power on January 1, 2023
- Groundbreaking of a 1GWp Solar Cell and Solar Panel Factory
- Inauguration of 21 Green Hydrogen Plants (GHP) at power plants distributed throughout Indonesia





2006-2010

- Pendirian Anak Perusahaan PT Indo Ridlatama Power (IRP) (2007);
- Pengembangan usaha di bidang penyediaan Jasa *Operation & Maintenance* (O&M) (2009);
- Pembentukan UJP (Unit Jasa Pembangkitan) Banten 2 Labuan (2010).
- Establishment of a Subsidiary, PT Indo Ridlatama Power (IRP) (2007);
- Business development in Operation & Maintenance (O&M) services (2009);
- Establishment of Power Generation Service Unit (UJP) Banten 2 Labuan (2010).

2011-2013

- Transformasi menuju *Operation and Maintenance (O&M) Excellence*;
- Pendirian Anak Perusahaan PT Putra Indotenaga (2013);
- Penerapan *Indonesia Power-Integrated Management System* (InPower IMS), sinergi standar: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 28001, SMP, SMK3, PAS 55 dan Kriteria *Baldrige* (2013).
- Transformation towards Operations and Maintenance (O&M) Excellence;
- Establishment of Subsidiary PT Putra Indotenaga (2013);
- Implementation of Indonesia Power-Integrated Management System (InPower IMS), standards for synergy: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 28001, SMP, SMK3, PAS 55, and Baldrige criteria (2013).

2014

- Pembentukan UJP Pangkalan Susu;
- Pembentukan UPJP (Unit Pembangkitan dan Jasa Pemeliharaan):
 - UPJP Priok;
 - UPJP Kamojang;
 - UPJP Bali.
- Establishment of UJP Pangkalan Susu
- Establishment of UPJP (Power Generation and O&M Service Units):
 - UPJP Priok;
 - UPJP Kamojang;
 - UPJP Bali.

2018

- *Launching* IP Academy sebagai pusat pembelajaran Kompetensi Inti Perusahaan;
- Beroperasinya jasa O&M PLTGU Priok Blok 3 dan 4;
- COD PLTU Muara Jawa 2x27,5 MW Unit 1 dan 2.
- Launching of IP Academy as a learning center for the Company's Core Competencies.
- Operation of O&M Services for CCPP Priok Block 3 and 4
- COD of SPP Muara Jawa 2 x 27.5 MW, Unit 1 and 2.

2019

- 2 Proyek COD (*Commercial Operation Date*) yaitu PLTA Rajamandala 47 MW dan PLTD Senayan 101 MW;
- Beroperasinya proyek MPP Biak 2 10 MW, MPP Merauke 2 20 MW, MPP Sorong 30 MW & MPP Sorong 20 MW
- Two COD (Commercial Operation Date) projects, namely PLTA Rajamandala 47 MW and PLTD Senayan 101 MW;
- Operation of MPP Biak 2 (10 MW), MPP Merauke 2 (20 MW), MPP Sorong (30 MW) & MPP Sorong (20 MW) projects.

2020

- Beroperasinya proyek MPP Nabire 2 10 MW dan MPP Manokwari 2 20 MW
- COD PLTGU Add On Grati 183 MW
- Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- Operation of MPP Nabire 2 10 MW and MPP Manokwari 2 20 MW
- COD of PLTGU Grati Add-on 183 MW
- ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certification

2024

- Perubahan Visi Perusahaan
- Perubahan nama PT Cogindo DayaBersama menjadi PT PLN Indonesia Power Services tanggal 19 April 2024
- COD Proyek Tambak Lorok III tanggal 26 Juni 2024
- Change of the Company's Vision
- Name change of PT Cogindo DayaBersama to PT PLN Indonesia Power Services on April 19, 2024
- COD of Tambak Lorok III Project on June 26, 2024

Informasi Perubahan Nama Perusahaan

Information on the Change of Company Name

PT PLN Indonesia Power merupakan salah satu Anak Perusahaan PT PLN (Persero) yang sebelumnya bernama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali I (PLN PJB I) dan didirikan pada tanggal 03 Oktober 1995 sebagai langkah untuk memulai kemandirian bisnis sektor pembangkitan tenaga listrik di Indonesia. Pada tanggal 03 Oktober 2000, nama PLN PJB I secara resmi berubah menjadi PT Indonesia Power sebagai penegasan atas tujuan Perusahaan yang menjadi Perusahaan pembangkit tenaga listrik independen yang berorientasi bisnis murni. Pada tahun 2012 Indonesia Power melebarkan sayap ke seluruh Indonesia dengan mengembangkan portofolio melalui pengembangan Usaha Jasa *Operation & Maintenance* (O&M) di luar sistem Jawa dan Bali serta pembangkit energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Tahun 2022 merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan PT Indonesia Power, yaitu dilaksanakannya pembentukan *Holding Subholding* di lingkungan PLN Group, dimana PT PLN (Persero) menjadi *Holding* dan PT Indonesia Power menjadi *Subholding* Pembangkitan. Seiring dengan hal tersebut, sesuai dengan keputusan Pemegang Saham, PT Indonesia Power bertransformasi menjadi PT PLN Indonesia Power sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Pemegang Saham pada tanggal 21 September 2022. Melalui brand baru sebagai salah satu *Subholding* PT PLN (Persero), PT PLN Indonesia Power yang selanjutnya disebut PLN Indonesia Power bersiap menjadi perusahaan energi ramah lingkungan yang berkelanjutan.

PT PLN Indonesia Power is a Subsidiary of PT PLN (Persero), which was previously named PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali I (PLN PJB I) and established on October 03, 1995, as an endeavor to seek business independence in the power generation sector in Indonesia. On October 03, 2000, PLN PJB I officially changed into PT Indonesia Power to affirm its goal to become an independent power company with pure business orientation. In 2012, Indonesia Power expanded its influence throughout Indonesia by growing its portfolio, developing the Operations and Maintenance (O&M) Service business outside Java-Bali system as well as constructing environmentally friendly new and renewable energy power plants.

2022 marked a significant milestone in the journey of PT Indonesia Power, with the establishment of a Holding Subholding structure within PLN Group, in which PT PLN (Persero) became the Holding company and PT Indonesia Power became the Power Generation Subholding. In line with the event, according to the Shareholder Resolutions, PT Indonesia Power changed into PT PLN Indonesia Power as contained in the Shareholder Resolutions dated September 21, 2022. The rebranding as a Subholding of PT PLN (Persero) has prepared PT PLN Indonesia Power, hereinafter referred to as PLN Indonesia Power, to become a sustainable and green power company.



PLN
Indonesia Power



Selain perubahan nama, langkah *rebranding* PLN Indonesia Power juga diikuti dengan perubahan logo, yang menegaskan logo PLN sebagai *Holding Company*. Setelah ditetapkan menjadi *Subholding* Pembangkitan, PLN Indonesia Power mengelola aset pembangkit listrik setelah alih aset sebesar 21,07 GW pada tahun 2023, selanjutnya akan bertambah menjadi 22,6 GW pada tahun 2025, dan direncanakan sebesar 22,9 GW pada tahun 2030, serta bersiap menjadi perusahaan pembangkit terbesar se-Asia Tenggara.

Pada tahun 2024, total daya terpasang pembangkit yang dimiliki oleh PLN Indonesia Power meningkat dari 19.927,90 MW menjadi 20.843,51 MW. Peningkatan ini merupakan hasil dari restrukturisasi perusahaan, di mana PLN Indonesia Power ditetapkan sebagai *Subholding* PLN. Dalam perannya tersebut, PLN Indonesia Power juga diperkuat oleh struktur entitas anak yang saling bersinergi. Hingga akhir tahun 2024, perusahaan memiliki 4 (empat) Anak Perusahaan, 1 (satu) Perusahaan Patungan, 2 (dua) Perusahaan Asosiasi, serta 9 (sembilan) Perusahaan Afiliasi dari anak perusahaan yang keberadaannya untuk mendukung strategi dan proses bisnis PLN Indonesia Power.

Aside from the name change, PLN Indonesia Power's rebranding also includes the change of logo, which affirms PLN's status as the Holding Company. After being designated as the Power Generation Subholding, PLN Indonesia Power managed power plant assets amounting to 21.07 GW following the asset transfer in 2023, which will further increase to 22.6 GW by 2025, and is projected to reach 22.9 GW by 2030, positioning itself to become the largest power generation company in Southeast Asia.

In 2024, the total installed capacity of power plants owned and managed by PLN Indonesia Power increased by from 19.927,90 MW to 20.843,51 MW. This increase is the result of a corporate restructuring in which PLN Indonesia Power was designated as a subholding of PLN. In this role, PLN Indonesia Power is also strengthened by a synergistic structure of subsidiary entities. As of the end of 2024, the Company has 4 (four) Subsidiaries, 1 (one) Joint Venture, 2 (two) Associates, and 9 (nine) Affiliate Companies of its subsidiaries, all of which support the strategy and business processes of PLN Indonesia Power.

Maksud dan Tujuan

Purposes and Objectives

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud, tujuan serta kegiatan usaha PLN Indonesia Power adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam ruang lingkup bisnis Perusahaan. Selain itu, PLN Indonesia Power dalam melakukan kegiatan tersebut di atas juga selalu berusaha untuk memenuhi harapan *stakeholder*.

According to the Company's Articles of Association, the purpose, objectives, and business activities of PLN Indonesia Power are to perform electricity business based on sound industrial and commercial principles while implementing limited liability company principles. To meet the purpose and objectives, the Company may perform the business activities within its line of business. Furthermore, PLN Indonesia Power always seeks to meet stakeholders' expectations when performing its activities.

Stakeholder PLN Indonesia Power dan harapan untuk masing-masing *stakeholder* tercantum sebagaimana tabel berikut:

The Stakeholders of PLN Indonesia Power and their expectations are elaborated in the following table:

Kelompok <i>Stakeholders</i> Lainnya Other Stakeholder Groups	Persyaratan dan Harapan atas Produk Utama, Dukungan Layanan dan Operasi Requirements and Expectations of Main Products, Service Supports, and Operations	
Pemegang Saham (<i>Stakeholders</i> 1/S1) Shareholders (<i>Stakeholders</i> 1/S1)	• Pemenuhan Kontrak Manajemen • Ketepatan penyelesaian proyek • Kesehatan Perusahaan	• Management Contract Compliance • Project Completion Timeliness • Company Soundness
Pelanggan Customer	Grid • Keandalan • Kesiapan pembangkit • Ketepatan jadwal pemeliharaan • Harga yang ekonomis Embedded • Harga yang ekonomis • Kontinuitas pasokan Jasa O&M • Tahapan <i>Supporting</i>: Pemenuhan <i>deployment</i> sebagai persyaratan dalam menjalankan O&M pembangkit • Tahapan <i>Performance</i>: Pemenuhan kinerja pembangkit sesuai kontrak (keandalan dan ketepatan waktu) *) Untuk PLN Wilayah saat ini dalam tahapan <i>supporting</i>	Grid • Reliability • Power Plant Readiness • Maintenance Schedule Timeliness • Economical Price Embedded • Economical Price • Supply Continuity Jasa O&M • Supporting Phase: Fulfilling deployment as a condition for conducting power plant O&M • Performance Phase: Fulfilling contractual requirements regarding generator performance (reliability and timeliness) *) PLN Wilayah is currently in the Supporting phase
Pegawai (<i>Stakeholders</i> 2/S2) Employee (<i>Stakeholders</i> 2/S2)	Peningkatan kepuasan dan <i>engagement</i> pegawai	Increased employee satisfaction and engagement
Pemasok (<i>Stakeholders</i> 3/S3) Supplier (<i>Stakeholders</i> 3/S3)	Transparansi dan <i>fairness</i> , kelangsungan bisnis jangka panjang	Transparency and fairness, long-term business continuity
Pemda (<i>Stakeholders</i> 4/S4) Regional Government (<i>Stakeholders</i> 4/S4)	Ketaatan atau kepatuhan pada peraturan dan perundangan Pemerintah	Adherence or compliance with the Government's regulations and laws
Komunitas Penduduk Sekitar Pembangkit (<i>Stakeholders</i> 5/S5): • Masyarakat di Wilayah Binaan, • LSM Lokal & Internasional, • Tokoh Masyarakat, • Institusi/Lembaga Profesi, • Media Local Community surrounding the Power Plants (<i>Stakeholders</i> 5/S5): • Community in the Foster Areas, • Local and International NGOs, • Public Figures, • Professional Association/Agency, • Media	• Dukungan perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat (ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan) • Bebas dari pencemaran lingkungan • Informasi mengenai proses pembangkitan listrik serta dampaknya terhadap lingkungan • Informasi mengenai tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial perusahaan • Kebijakan peraturan dan prosedur yang berlaku • Kerjasama antar institusi • <i>Knowledge sharing</i> antar institusi	• Company's support for community empowerment (economy, education, health, and security) • Free from environmental pollution • Information on the power generation process and its impact on the environment • Information on good corporate governance and corporate social responsibility • Applicable policies and procedures • Cooperation among agencies • Knowledge-sharing among agencies

Skema Proses Bisnis Kantor Pusat Business Process Scheme for the Head Office

Untuk memastikan bahwa maksud dan tujuan dapat dijalankan secara efektif dan terukur, PLN Indonesia Power membangun skema proses bisnis Kantor Pusat yang terstruktur, terintegrasi, dan berorientasi pada pencapaian nilai strategis perusahaan. Skema ini dirancang untuk memperjelas alur kerja, tanggung jawab, serta hubungan antar unit fungsional dalam mendukung operasional unit pembangkit dan pencapaian target Perusahaan.

To ensure that the Company's purposes and objectives are implemented effectively and in a measurable manner, PLN Indonesia Power established a structured, integrated, and strategically value-driven business process scheme for the Head Office. This scheme is designed to clarify workflows, define responsibilities, and articulate the interrelations among functional units in supporting power generation operations and achieving the Company's targets.

Skema Proses Bisnis Kantor Pusat PLN Indonesia Power Business Process Scheme of PLN Indonesia Power Head Office

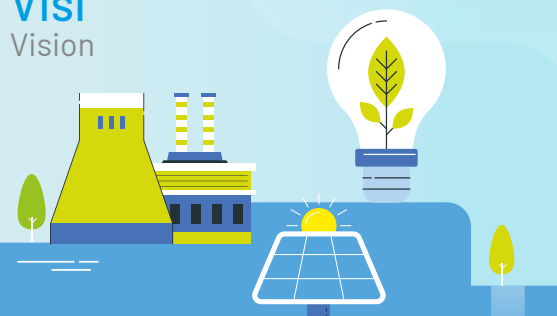


Visi, Misi, Motto dan Kompetensi Inti Perusahaan

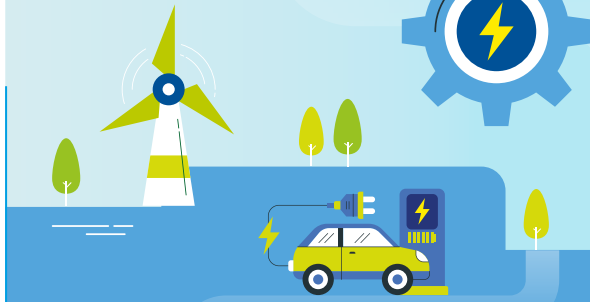
Vision, Mission, Motto, and Core Competencies

Sejalan dengan transformasi organisasi yang dilakukan di PLN Group, PLN Indonesia Power sebagai *subholding* pembangkitan juga turut mendukung dan adaptif dengan perubahan tersebut. Salah satu hal yang paling mendasar adalah perubahan Visi, Misi dan Kompetensi Inti Perusahaan. Pada tahun 2024 PLN Indonesia Power melakukan peninjauan ulang terhadap penjelasan dan ukuran pencapaian Visi Perusahaan agar selaras dengan visi PLN Holding, yang kemudian disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2025 dalam bentuk Peraturan Direksi Nomor 0002.P/DIR/2025 tentang Visi, Misi, Motto dan Kompetensi Inti PT PLN Indonesia Power.

In line with the transformation within PLN Group, PLN Indonesia Power, as the Power Generation Subholding also supports and adapts to the changes. The changes in the Company's Vision, Mission, and Core Competencies are particularly fundamental. In 2024, PLN Indonesia Power conducted a review of the Company's Vision and its performance indicators to ensure alignment with the vision of PLN Holding, which was subsequently approved by the Board of Directors and Board of Commissioners in 2025 through Board of Directors' Regulation No. 0002.P/DIR/2025 on the Vision, Mission, Motto, and Core Competencies of PT PLN Indonesia Power.

Visi Vision  Menjadi Perusahaan Listrik Global Berkinerja Terbaik dan Berkelanjutan To be a Global Top Performance and Sustainable Power Company		
Kata Kunci <i>Keyword</i>	Penjelasan Visi <i>Description</i>	Ukuran <i>Magnitude</i>
<i>Global Power Company</i>	Merupakan perusahaan global penyedia solusi energi, baik di bidang ketenagalistrikan, maupun bisnis turunan dari ketenagalistrikan. A Company providing energy solutions, both in the electricity sector and in derivative electricity business.	Tidak diperlukan penjelasan No explanation required
<i>Top Performance</i>	Diakui sebagai perusahaan yang unggul dalam bisnis ketenagalistrikan dengan kinerja operasional terbaik. Acknowledged as a Company with leading power generation operation performance in Southeast Asia and other regions.	<i>Performance Excellence & Cost Leadership:</i> 1. Top 10% NERC operation performance (EAF >90%, EFOR <3%) 2. BPP <Rp1.500/ kWh
<i>Sustainable</i>	Menjalankan bisnis sesuai kerangka ESG guna mendukung transisi energi, serta memiliki portfolio bisnis yang bertumbuh, baik secara nasional maupun global. Maintaining the business in accordance with the ESG framework to support the energy transition, while maintaining a growing business portfolio both nationally and globally.	<i>Global Innovative Growth:</i> 1. ~Rp34 triliun trillion EBITDA 2. 2990 MW additional RE capacity 3. 13,7% RE energy mix 4. ~Rp0,4 triliun trillion beyond kWh revenue 5. Total 10 projects beyond Indonesia <i>Sustainable Power Generation:</i> 1. ~43,58 MtCO ₂ emissions reduction 2. 0.82 MtCO ₂ /TWh emission intensity 3. Medium ESG risk ratings

Misi Mission



Menyediakan Solusi Energi Hijau, Inovatif dan Terjangkau yang Melampaui Harapan Pelanggan

Delivering green, innovative and affordable energy solutions, that goes beyond customer expectation

Kata Kunci Keyword	Penjelasan Misi Description
Green Energy Solutions	Perusahaan menyediakan listrik yang ramah lingkungan, serta fokus pada optimalisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan, sebagai bagian dari SDGs dalam penurunan emisi GRK yang selaras dengan program transisi energi menuju NZE tahun 2060. The Company provides environmentally friendly electricity and focuses on optimizing the use of new and renewable energy, as part of the SDGs in reducing GHG emissions, which is in line with the energy transition program towards NZE by 2060.
Innovative Energy Solutions	Perusahaan menyediakan produk solusi energi yang inovatif, dengan memanfaatkan peluang-peluang baru, serta mengikuti tren kebutuhan dan perilaku pelanggan. The Company provides innovative energy solutions by taking advantage of new opportunities and following trends in customer needs and behavior.
Affordable Energy Solutions	Perusahaan menyediakan produk solusi energi yang terjangkau oleh pelanggan. The Company provides affordable energy solutions for the customers.
Beyond Customer Expectation	Perusahaan menyediakan produk solusi energi dengan kualitas produk dan layanan yang melampaui harapan pelanggan. The Company provides energy solutions with quality and services that exceed customer expectations.

Motto

Motto

#EnergyofThings



Definisi untuk eksternal Perusahaan Definition for external parties

Membangun kesadaran kepada Pelanggan dan *Stakeholder* bahwa setiap aktivitas membutuhkan energi dan PLN Indonesia Power memiliki keunggulan dalam penyediaan solusi energi, baik di bidang penyediaan tenaga listrik (kWh) maupun *beyond kWh*.

Building Customers and Stakeholders' awareness that every activity in human lives requires energy and that PLN Indonesia Power is excellent in providing energy solutions, both in kWh and beyond kWh businesses.

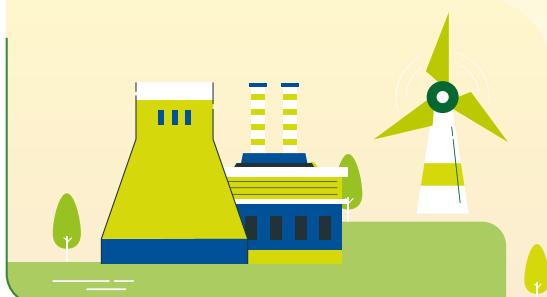
Definisi untuk internal Perusahaan Definition for internal parties

Membangun rasa optimisme di dalam setiap Insan PLN Indonesia Power untuk dapat selalu menyediakan solusi energi terbaik bagi pelanggan, baik di bidang penyediaan tenaga listrik (kWh) maupun *Beyond kWh*.

Building optimism in every member of PLN Indonesia Power personnel to always provide the best energy solutions for the customers, both in kWh and beyond kWh businesses.

Kompetensi Inti

Core Competence



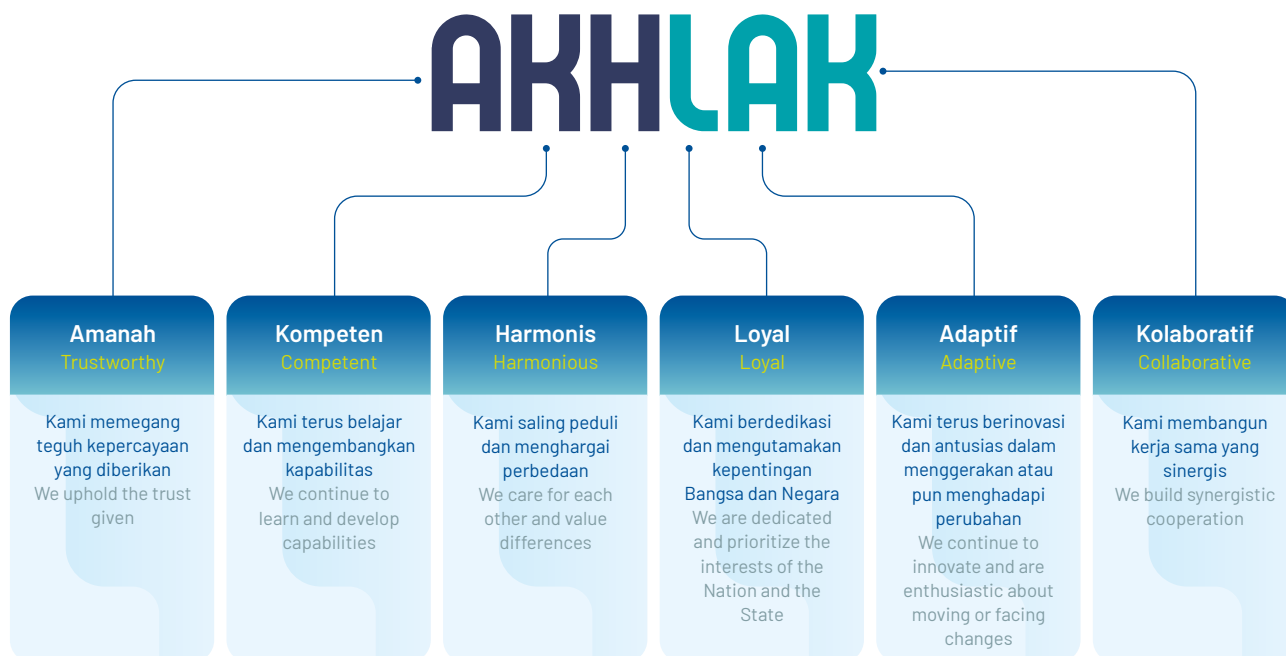
- ➔ **Pengembangan Bisnis Solusi Energi yang *End-To-End***
End-to-End Energy Solutions Business Development
- ➔ **Enjiniring dan Pengembangan Proyek**
Engineering & Project Development
- ➔ ***Operation and Maintenance Excellence Berbasis Digital***
Digital Enabled Operations and Maintenance Excellence
- ➔ **Solusi Transisi Energi dan Operasi Rendah Karbon**
Energy Transition and Low Carbon Operations Solution

Tata Nilai dan Budaya

Values and Culture

Sejalan dengan salah satu prioritas Presiden RI tahun 2019-2021 yaitu Pengembangan SDM menuju era teknologi & informasi, BUMN telah mencanangkan *Human Capital Transformation* yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global. Dalam *Human Capital Transformation* terjadi perubahan peran BUMN yang sebelumnya *active shareholder* menjadi *strategic architect*. Salah satu *architecture Human Capital* adalah penetapan AKHLAK sebagai *Core Value* BUMN pada 1 Juli 2020, bersamaan dengan acara peluncuran logo BUMN. BUMN perlu sebuah fondasi yang kuat, sebuah nilai untuk menjadi panduan BUMN untuk bergerak, termasuk PLN.

Aligned with one of the priorities of the President of the Republic of Indonesia for 2019-2021, namely Human Capital Development towards the technology and information era, State-Owned Enterprises (SOEs) have launched a Human Capital Transformation aimed at enhancing their competitiveness to become global players. In Human Capital Transformation, there is a shift in SOE roles from being merely active shareholders to becoming strategic architects. One of the key elements of the Human Capital architecture is the establishment of AKHLAK as the Core Values of SOEs on July 1, 2020, coinciding with the launch of the new SOE logo. SOEs, including PLN, need a strong foundation to move forward.



AKHLAK sebagai *Core Values* PLN Group telah dicanangkan pada tanggal 28 September 2020, bersamaan dengan *Performance Business Review*. Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN No 7/MBU/07/2020 tentang Nilai – nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, setiap BUMN wajib menerapkan *Core Values* menjadi Budaya Perusahaan dan menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di Lingkungan BUMN, Anak Perusahaan, serta Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi. Penerapan *Core Values* diimplementasikan secara utuh tanpa pengurangan atau penambahan *Core Values* lainnya pada seluruh group BUMN.

AKHLAK, as PLN Group's Core Values, was established on September 28, 2020, adjacent to the Performance Business Review. As stipulated in Circular of the Minister of SOEs No. 7/MBU/07/2020 on State-Owned Enterprise Human Resource Core Values, every SOE has a mandatory duty to adopt the Core Values into Corporate Culture and use them as the foundation to build human capital character within SOEs, their Subsidiaries, and Consolidated Affiliates. These Core Values must be fully adopted without any addition or omission in every SOE group.

Tata nilai merupakan salah satu bagian dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan salah satu dari *blue print* Perusahaan, RJPP dan *blue print* Perusahaan sebagaimana diatur dalam SKB Direksi No. 43.K/020/IP/2018 dan Dewan Komisaris No. 003.SK/DEKOM-IP/2018 tentang Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT PLN Indonesia Power.

Values are an integral part of the Company's Long-Term Plan (RJPP) as well as the Company's blueprint. The Company's RJPP and blueprint are governed by the Joint Decision of the Board of Directors No. 43.K/020/IP/2018 and the Decision of the Board of Commissioners No. 003.SK/DEKOM-IP/2018 on the Board Manual of PT PLN Indonesia Power.

Penguatan tata nilai AKHLAK di PLN Indonesia Power berdasarkan Perdir PT PLN (Persero) No. 0073.P/DIR/2020 tentang Budaya Perusahaan dan SK Tata Nilai PT Indonesia Power No 22.K/010/IP/2021.

AKHLAK Values in PLN Indonesia Power are established under the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0073.P/DIR/2020 on Corporate Culture and Decree of PT Indonesia Power No. 22.K/010/IP/2021 on Values.

Nilai Values	Arti Meaning	Perilaku Behaviors
Amanah Trustworthiness	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan Upholding the trust given	- Memenuhi janji dan komitmen - Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan - Keeping promises and commitments - Being responsible for the tasks, decisions, and actions carried out
Kompeten Competent	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Continuously learning and developing capabilities	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik - Enhancing personal competence to respond to ever-changing challenges - Helping others learn - Completing tasks with the highest quality
Harmonis Harmonious	Saling peduli dan menghargai perbedaan Caring for each other and respecting differences	- Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif - Respecting everyone regardless of their backgrounds - Being helpful to others - Building a conducive work environment
Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Dedicating and prioritizing the interests of the nation and the state	- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara - Rela berkorban untuk tujuan yang lebih besar - Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika - Maintaining the good name of fellow employees, leaders, SOE, and the State - Willing to sacrifice to achieve a greater goal - Obeying leaders as long as it is not against the law and ethics
Adaptif Adaptive	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau pun menghadapi perubahan Making continuous innovations and remaining enthusiastic in moving or facing changes	- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik - Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi - Bertindak positif - Quickly adapting to be better - Continuously improving to keep up with technological developments - Acting positively
Kolaboratif Collaborative	Membangun kerja sama yang sinergis Building synergistic cooperation Behaviors	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama - Providing opportunities for various parties to contribute - Being open to collaboration to generate added value - Mobilizing the utilization of various resources for common goals

Program Budaya

Cultural Program

Sepanjang tahun 2024, PLN Indonesia Power secara konsisten melanjutkan implementasi Program Budaya, yang mengacu pada nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai fondasi perilaku

Throughout 2024, PLN Indonesia Power consistently continued the implementation of the Culture Program, which is based on the AKHLAK values (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) as the

seluruh Insan Perusahaan. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman dalam bekerja, tetapi juga diintegrasikan ke dalam proses bisnis, pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan pelayanan kepada pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya.

Implementasi program budaya dilakukan melalui berbagai inisiatif strategis, antara lain:

foundational behavioral principles for all Company personnel. These values serve not only as guidelines for daily work but are also integrated into business processes, decision-making, leadership, and services provided to customers and other stakeholders.

The Culture Program is carried out through various strategic initiatives, including:

Program Budaya Tahun 2024 Culture Program in 2024	Penjelasan Description	
CCPP	5 program <i>Corporate Culture Purpose Program</i> (CCPP) yang dilatarbelakangi untuk pencapaian tujuan/strategi PLN Grup dan diimplementasikan di seluruh unit PLN Indonesia Power, dengan program: - Budaya <i>safety</i>, dengan pelaksanaan program manajemen K3 yakni <i>Safety Contact</i>, <i>Safety/Manajemen Walkdown</i>, <i>Safety Observation</i> dan <i>Self Learning Basic Safety Awareness</i>, diimplementasikan di seluruh unit PLN Indonesia Power. Nol Kecelakaan Kerja untuk Mendorong Pencapaian <i>Zero Accident</i> dengan membudayakan pelaporan temuan K3 menggunakan aplikasi <i>Nearmiss</i> oleh seluruh insan di Perusahaan, diimplementasikan di seluruh unit PLN Indonesia Power. - <i>Emission reduction</i> dengan fokus pada efisiensi pembangkit dan penggunaan biomassa. - Penghapusan Kemubadziran dengan fokus pada pengendalian biaya BPP (Biaya Pokok Produksi) Efisiensi Pemakaian Batubara. - <i>Beyond KWh</i> dengan fokus pada pengembangan bisnis <i>Beyond KWh</i> perusahaan. - Wellbeing dengan fokus untuk <i>wellness</i> dan <i>worklife</i> integration pegawai untuk mendorong pencapaian produktivitas perusahaan, dengan program-program yang dilaksanakan adalah : Seminar <i>Worklife Integration</i> (tema Kesehatan Fisik, Kesehatan Mental dan Finansial), <i>Medical Check Up</i>, program <i>Wellbeing Day</i> adalah program pengembangan komunitas olahraga, hobi dan minat melalui pengelolaan latihan-latihan olahraga yang dikelola bersama Persatuan Pegawai, sehingga pegawai dapat menyalurkan potensi dan hobi dalam berolahraga ataupun kegiatan seni dan juga senam rutin Senam Sinergi setiap minggu.	5 Corporate Culture Purpose Programs (CCPPs) based on the objectives/strategies of PLN Group and implemented in all PLN Indonesia Power units are as follows: - Safety Culture, the implementation of Occupational Health and Safety (OHS) management programs such as Safety Contact, Safety/Management Walkdown, Safety Observation, and Self-Learning Basic Safety Awareness across all PLN Indonesia Power units. The "Zero Workplace Accident" initiative aims to achieve zero accidents by fostering a safety reporting culture using the Nearmiss application by all personnel, implemented across all PLN Indonesia Power units. - Emission Reduction focuses on generation efficiency and the utilization of biomass. - Elimination of Redundancy focuses on controlling the Basic Production Cost (BPP) and improving coal usage efficiency. - Beyond kWh focuses on developing the Company's business initiatives beyond electricity sales (kWh). - Wellbeing focuses on employees' wellness and work-life integration to improve Company productivity. This includes programs such as the Work-Life Integration Seminar (covering Physical, Mental, and Financial Health), Medical Checkup, and Wellbeing Day, which promotes the development of sports, hobbies, and interest-based communities. These activities are jointly managed with the Employee Union to enable employees to channel their talents and interests through sports, arts, and regular weekly "Senam Sinergi" exercises.
Ranger	Pembekalan dan pendampingan <i>Ranger</i> (<i>Ranger Master</i> , <i>Ranger Leader</i> dan <i>Ranger</i>) sebagai Agen transformasi Perusahaan.	Briefing and Assistance for Rangers (Ranger Masters, Ranger Leaders, and Rangers) as the Company's Change Agents.
Culture Fest	Kompetisi Implementasi Budaya Perusahaan diseluruh Unit dan SH/AP PLN Group.	Competition of Corporate Culture implementation across all Units in Subholdings/Subsidiaries of PLN Group.
Semesta Budaya	Kompetisi Implementasi Budaya Perusahaan diseluruh Unit PLN Indonesia Power.	Competition of Corporate Culture implementation across all Units in PLN IP.
Survey EES, CHI	Pengukuran implementasi budaya melalui Survei budaya berdasarkan <i>Guidance</i> PLN.	Measuring corporate culture implementation through the Culture Survey under PLN's guidance.
Internalisasi Program Perusahaan Internalization of Company Programs	Internalisasi Tema Bulanan AKHLAK, internalisasi dilakukan menggunakan metode <i>sunray</i> diagram, dimana internalisasi dilakukan juga melalui artefak-artefak dan simbol-simbol yang dipasang diseluruh Unit. Artefak berupa <i>flyer</i> , <i>visual management</i> , dan lain sebagainya.	Internalizing monthly AKHLAK themes using sun ray diagrams as well as artifacts and symbols displayed at all units. The artifacts include pamphlets, visual management tools, and other media.
CoC, Learning Day	Pelaksanaan CoC berdasarkan Tema PLN 1x dalam 1 minggu dan <i>sharing knowledge</i> dengan bentuk <i>story telling</i> .	Code of Conduct (CoC) sessions are held once a week using the theme provided by PLN, while knowledge is shared through storytelling.

Bidang Usaha

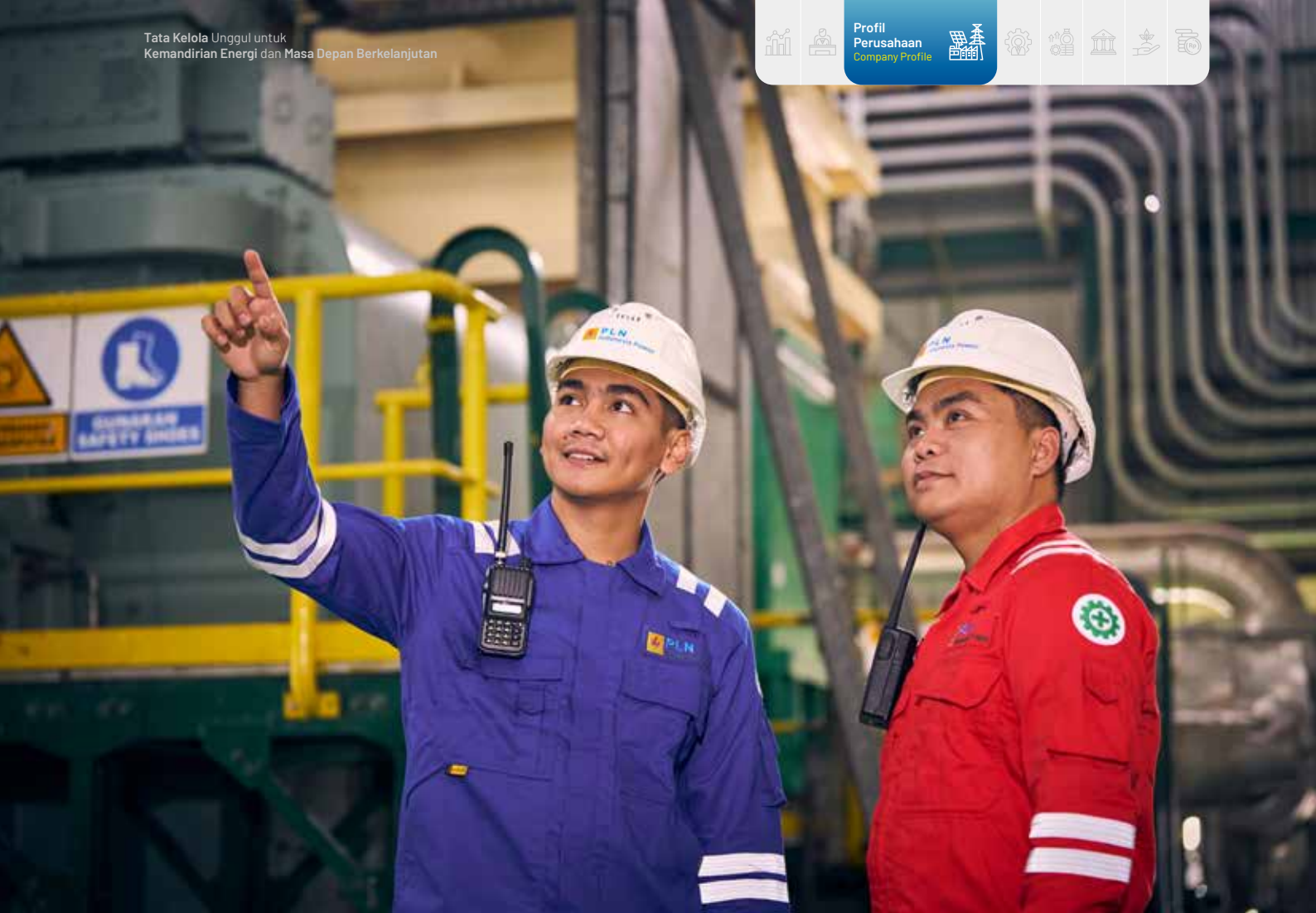
Line of Business

Mengacu pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha PLN Indonesia Power adalah menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas serta melaksanakan penugasan dari Pemegang Saham Mayoritas dalam rangka menunjang/mendukung kegiatan usaha Pemegang Saham dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Kepatutan serta Etika Bisnis pada Perseroan Terbatas, yang meliputi produk dan layanan sebagai berikut:

1. Pembangkitan Tenaga Listrik;
2. Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik yang meliputi:
 - a. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI;
 - b. Jasa investigasi, desain, operasi dan pemeliharaan serta persewaan peralatan pembangkitan;
 - c. Konstruksi Bangunan Elektrikal;
 - d. Instalasi/Pemasangan mesin dan Peralatan Industri;
 - e. Pendidikan Teknik Swasta;
 - f. Produksi, perbaikan dan perdagangan dan peralatan tenaga listrik;
 - g. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI;
 - h. Pertambangan Batubara;
 - i. Industri Produk dari Batubara;
 - j. Produksi pengolahan, pengangkutan dan perdagangan gambut, biomass dan gas alam;
 - k. Pengusahaan tenaga panas bumi;
 - l. *Cogeneration*;
 - m. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air.
3. Selain usaha yang disebutkan pada angka 2, PLN Indonesia Power dapat melakukan perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya, termasuk memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan.

Referring to Article 3 of the Company's Articles of Association, line of business of PLN Indonesia Power is to conduct electricity-related business based on sound industrial and commercial principles by applying Limited Liability Company principles and performing assignments mandated by the Majority Shareholder, in order to assist/support the Shareholders' business activities with the implementation of Good Corporate Governance principles as well as Business Propriety and Ethics of Limited Liability Companies, which include the following products and services:

1. Electricity Generation;
2. Electricity-supply related businesses, including:
 - a. Engineering activities and relevant technical consultancies;
 - b. Power plant investigation, design, operations & maintenance, and equipment rental services;
 - c. Electrical building construction;
 - d. Industrial machinery and equipment installation;
 - e. Private engineering education;
 - f. Production, repair, and trade of electricity equipment;
 - g. Wholesale of solid, liquid, and gas fuel and relevant products;
 - h. Coal mining;
 - i. Coal products business;
 - j. Production, processing, transportation, and trade of peat, biomass, and natural gas;
 - k. Geothermal energy business;
 - l. Co-generation;
 - m. Construction of water resource infrastructure building.
3. In addition to carrying out the businesses mentioned in point 2, PLN Indonesia Power can conduct trades and/or supporting business activities for optimizing resources at hand, including through assignments to Subsidiaries.



Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Current Business Activities

Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini oleh PLN Indonesia Power adalah:

PLN Indonesia Power currently executes the following business activities:

**Pembangkitan
Tenaga Listrik**
Electricity power
generation



**Usaha yang berkaitan dengan penyediaan
tenaga listrik, *Beyond kWh*, antara lain jasa
operasi dan pemeliharaan**
*Beyond kWh businesses, including Operations and
Maintenance (O&M) Services*



Terkait kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, PLN Indonesia Power dapat memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan maupun dilakukan oleh Perusahaan Patungan.

In relation to supporting business activities that optimize the utilization of existing resources, PLN Indonesia Power may assign to Subsidiaries or Joint Ventures.

Produk dan Layanan

Products and Services

Produk

Product

Dalam melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik serta penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit, PLN Indonesia Power mengelola 36 (tiga puluh enam) Unit Bisnis Pembangkit (UBP) dan 1 Unit Bisnis Pemeliharaan (UBH).

In carrying out the business activities of providing electricity and providing plant operation and maintenance services, PLN Indonesia Power manages 36 (thirty-six) Generating Business Units (GBU) and 1 Maintenance and Service Unit (MSU).

Unit Bisnis Pembangkit PLN Indonesia Power

PLN Indonesia Power Generating Business Unit

No	Unit	Jumlah Unit Total Unit	Jenis Pembangkit Type of Power Plant	Lokasi Location	Daya Terpasang Installed Capacity (MW)
Unit Bisnis Pembangkit yang dimiliki oleh PLN Indonesia Power Generation Business Unit owned by PLN Indonesia Power					
1.	UBP GBU Suralaya	7	PLTU SPP	Cilegon (Banten)	3.400,00
2.	UBP GBU Banten 1 Suralaya	1	PLTU SPP	Cilegon (Banten)	625,00
3.	UBP GBU Banten 2 Labuan	2	PLTU SPP	Pandeglang (Banten)	600,00
4.	UBP GBU Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	3	PLTU SPP	Sukabumi (Jawa Barat) Sukabumi (West Java)	1.050,00
5.	UBP GBU Jawa Tengah 2 Adipala	1	PLTU SPP	Cilacap (Jawa Tengah) Cilacap (Central Java)	660,00
6.	UBP GBU Pangkalan Susu	4	PLTU SPP	Langkat (Sumatera Utara) Langkat (North Sumatera)	880,00
7.	UBP GBU Labuhan Angin	2	PLTU SPP	Tapanuli Tengah (Sumatera Utara) Tapanuli Tengah (North Sumatera)	230,00
8.	UBP GBU Ombilin	3	PLTU, PLTG SPP, CCPP	Sawahlunto (Sumatera Barat) Sawahlunto (West Sumatera)	221,00
9.	UBP GBU Teluk Sirih	3	PLTU, PLTG SPP, CCPP	Padang (Sumatera Barat) Padang (North Sumatera)	245,00
10.	UBP GBU Kepulauan Riau	7	PLTU, PLTD SPP, DGPP	Pulau Karimun (Kepulauan Riau) Karimun Island (Riau Islands)	36,38
11.	UBP GBU Singkawang	2	PLTU SPP	Singkawang (Kalimantan Barat) Singkawang (West Kalimantan)	100,00
12.	UBP GBU Sanggau	2	PLTU SPP	Sanggau (Kalimantan Barat) Sanggau (West Kalimantan)	14,00
13.	UBP GBU Sintang	3	PLTU SPP	Sintang (Kalimantan Barat) Sintang (West Kalimantan)	21,00
14.	UBP GBU Berau	2	PLTU SPP	Berau (Kalimantan Timur) Berau (East Kalimantan)	19,00
15.	UBP GBU Priok	20	PLTGU, PLTD CCPP, DGPP	Tanjung Priok (Jakarta)	2.947,00
16.	UBP GBU Saguling	31	PLTA HPP	Bandung (Jawa Barat) Bandung (West Java)	798,36
17.	UBP GBU Semarang	12	PLTGU, PLTD CCPP, DGPP	Semarang (Jawa Tengah) Semarang (Central Java)	2.084,05
18.	UBP GBU Mrica	34	PLTA HPP	Banjarnegara (Jawa Tengah) Banjarnegara (Central Java)	333,79



No	Unit	Jumlah Unit Total Unit	Jenis Pembangkit Type of Power Plant	Lokasi Location	Daya Terpasang Installed Capacity (MW)
19.	UBP GBU Grati	9	PLTGU CCPP	Pasuruan (Jawa Timur) Pasuruan (East Java)	1.258,58
20.	UBP GBU Bali	48	PLTG, PLTDG, PLTD, PLHS/PLTS GTPP, DGPP, DPP, SHPP/SoPP	Denpasar (Bali)	854,10
21.	UBP GBU Cilegon	3	PLTGU CCPP	Serang (Banten)	740,00
22.	UBP GBU Keramasan	13	PLTG, PLTGU, PLTD GTPP, DGPP, DPP	Palembang (Sumatera Selatan) Palembang (South Sumatera)	332,01
23.	UBP GBU Tello	18	PLTG, PLTD, PLTS GTPP, DPP, SoPP	Makasar (Sulawesi Selatan) Makasar (South Sulawesi)	130,57
24.	UBP GBU Bengkulu	10	PLTA HPP	Kepahiang (Bengkulu)	236,32
25.	UBP GBU Jambi	12	PLTMG, PLTG GEPP, GTPP	Jambi Timur (Jambi) East Jambi (Jambi)	157,03
26.	UBP GBU Bukittinggi	11	PLTA HPP	Bukittinggi (Sumatera Barat) Bukittinggi (West Sumatera)	253,50
Unit Bisnis Pembangkit yang memiliki Sub Unit Jasa O&M Generation Business Unit that has O&M Services Sub Units					
27.	UBP GBU Kamojang	17	PLTP GPP	Garut (Jawa Barat) Garut (West Java)	577,00
28.	UBP GBU Banten 3 Lontar	4	PLTU SPP	Tangerang (Banten)	1.260,00
29.	UBP GBU Barru	3	PLTU SPP	Barru (Sulawesi Selatan) Barru (South Sulawesi)	223,00
30.	UBP GBU Asam Asam	6	PLTU SPP	Tanah Laut (Kalimantan Selatan) Tanah Laut (South Kalimantan)	506,00
31.	UBP GBU Mahakam	110	PLTD, PLTG, PLTGU, PLTMG DPP, GTPP, CCPP, GEPP	Samarinda (Kalimantan Timur) Samarinda (East Kalimantan)	470,62
32.	UBP GBU Barito	37	PLTD, PLTA, PLTG DPP, HPP, GTPP	Banjarmasin (Kalimantan Selatan) Banjarmasin (South Kalimantan)	153,02
33.	UBP GBU Papua Maluku	27	PLTMG, PLTU GEPP, SPP	Papua dan Maluku (Biak, Manokwari, Merauke, Nabire, Sorong, Timika dan Ambon) Papua and Maluku (Biak, Manokwari, Merauke, Nabire, Sorong, Timika and Ambon)	259,59
Unit Bisnis Pembangkit Jasa O&M O&M Services Generation Business Unit					
34.	UBP GBU Jatigede	2	PLTA HPP	Sumedang (Jawa Barat) Sumedang (West Java)	112,00
35.	UBP GBU Holtekamp	2	PLTU SPP	Jayapura (Papua)	24,00
36.	UBP GBU Jeranjang	3	PLTU SPP	Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat) West Lombok (West Nusa Tenggara)	90,00
Total Daya Terpasang Pembangkit Total Installed Power of the Plant					21.901,90

Layanan Services



Operation & Maintenance Service (O&M)

Menyediakan layanan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik secara komperhensif meliputi layanan: *Main Plant, Balance of Plant, Coal Handling, Ash Handling, Laboratories, Engineering Support, Asset Management Setup, Power Plant Digitalization.*

It provides comprehensive power plant operation and maintenance services, including services for: Main Plant, Balance of Plant, Coal Handling, Ash Handling, Laboratories, Engineering Support, Asset Management Setup, and Power Plant Digitalization.



Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)

Merupakan jasa solusi *Maintenance, Repair, & Overhaul* terbaik melalui *Maintenance Service Unit (MSU)* dan anak usahanya PT PLN Indonesia Power Services. Keberhasilan layanan MRO telah teruji dan terpercaya di Indonesia hingga negara Timur Tengah.

It is a premier solution for Maintenance, Repair, & Overhaul services delivered through the Maintenance Service Unit (MSU) and its subsidiary, PT PLN Indonesia Power Services. The MRO service excellence has been proven and trusted across Indonesia to the Middle East.



Primary Energy & Port Management

PLN Indonesia Power melalui anak usahanya, Artha Daya Coalindo menyediakan bisnis pengadaan, transportasi dan pembongkaran baik batu bara maupun biomas serta pengelolaan Pelabuhan. Melalui anak usaha lainnya, Perta Daya Gas menawarkan bisnis gas alam melalui transportasi Gas/LNG, terminal, regasifikasi dan distribusi.

PLN Indonesia Power, through its subsidiary, Artha Daya Coalindo, carries out procurement, transportation, and loading/unloading of both coal and biomass, as well as port management. Through another subsidiary, Perta Daya Gas, the Company carries out natural gas business LNG transportation, terminals, regasification, and distribution.



Solar PV Solution

Layanan PLN Indonesia Power untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan melalui anak usahanya PT PT PLN Indonesia Power Renewables yang menyediakan jasa antara lain:

1. **Engineering Consultation**
Meliputi konsultasi perencanaan mulai dari tahapan survei sampai dengan pembuatan desain gambar detail proyek.
2. **Engineering, Procurement & Construction**
Meliputi tahap desain perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta tahap pelaksanaan konstruksi.
3. **Operation & Maintenance**
Meliputi pengelolaan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik energi baru terbarukan.

A service by PLN Indonesia Power that supports the development of new and renewable energy through its subsidiary PT PLN Indonesia Power Renewables, which provides the following services:

1. **Engineering Consultation**
includes planning consultation, from surveying to designing detailed project drawings.
2. **Engineering, Procurement & Construction**
includes the phases of planning design, goods and services procurement, and construction execution.
3. **Operation & Maintenance**
includes the management of operations and maintenance services for new and renewable energy-based power plants.



Enterprise Asset Management & Digitalization Setup

Merupakan layanan transformasi digital pada proses bisnis pembangkitan agar dapat dipantau secara real time untuk menjaga keandalan dan meningkatkan efisiensi, melalui layanan:

- **Reliability Efficiency Optimization Center (REOC):** merupakan aplikasi digital terintegrasi yang memiliki fungsi utama memantau lebih dari 13 GWh berbagai teknologi pembangkit listrik di 20 lokasi unit dan lebih dari 50.000 parameter. *Big Data* dan *Artificial Intelligent* dimanfaatkan untuk merancang fitur *Automatic Failure Detection* yang berperan menjaga keandalan dan efisiensi pembangkit listrik.
- **IP-DigimonX:** *Mobile application add-on* dari CMMS Maximo (ProHAR) untuk mendukung pilar *Work, Planning, and Control (WPC)* pada *Asset Management* khususnya pada saat *Work Order Execution* dimulai dari penunjukan *lead*, teknisi, permintaan *work permit*, pengisian *actual WO*, hingga perubahan status *WO* menjadi *WDONE*.
- **IP-ProlInventory:** merupakan Aplikasi berbasis sistem Android dan IOS yang terintegrasi dengan ERP dan Maximo menggunakan *QR Code* sebagai pengenalan, berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat aktivitas *inventory* dimanapun dan kapan pun.

A digital transformation service for generation business processes that allows real-time monitoring to maintain reliability and increase efficiency through the following services:

- **Reliability Efficiency Optimization Center (REOC):** An integrated digital application whose main function is to monitor more than 13 GWh of various power plant technology across 20 units and over 50,000 parameters. *Big Data* and *Artificial Intelligence* are used to design the *Automatic Failure Detection* feature that serves to maintain the reliability and efficiency of power plants.
- **IP-DigimonX:** A mobile application add-on from CMMS Maximo (ProHAR) that supports the pillar of *Work, Planning, and Control (WPC)* of *Asset Management*, especially during *Work Order Execution*, from appointing leads and technicians, applying work permits, filling out actual *Work Orders (WO)*, to changing *WO* status to *WDONE*.
- **IP-ProlInventory:** An application on Android and iOS platforms that integrates with ERP and Maximo using a *QR Code* as an identifier. This app allows easier and faster inventory activities anytime and anywhere.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik serta layanan operasi dan pemeliharaan pembangkit, PLN Indonesia Power mengelola sejumlah Unit Bisnis Pembangkitan dan Unit Bisnis Pemeliharaan yang tersebar di berbagai wilayah strategis di Indonesia, meliputi Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Unit-unit ini memainkan peran vital dalam memastikan keandalan pasokan listrik nasional serta mendukung kinerja operasional pembangkit yang optimal. Unit Bisnis Pembangkitan berperan sebagai tulang punggung operasional penyediaan energi listrik, sementara Unit Bisnis Pemeliharaan mendukung keberlangsungan dan efisiensi operasional melalui perawatan serta peningkatan performa fasilitas pembangkit. Uraian lebih lanjut mengenai struktur, cakupan wilayah, serta kontribusi masing-masing unit terhadap kapasitas daya terpasang dan kinerja operasional perusahaan disajikan secara lengkap pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen, khususnya pada Sub bab Tinjauan Kinerja Operasi Per Segmen.

In operating its electricity supply business as well as power plant operation and maintenance services, PLN Indonesia Power manages a number of Generation Business Units, and Maintenance Business Units spread across various strategic regions in Indonesia, including the islands of Java, Bali, Kalimantan, Sulawesi, and Papua. These units play a vital role in ensuring the reliability of the national electricity supply and supporting the optimal operational performance of power plants. The Generation Business Units serve as the operational backbone of electricity supply, while the Maintenance Business Units support sustainability and operational efficiency through maintenance and performance enhancement of power generation facilities. Further details regarding the structure, regional coverage, and contribution of each unit to installed capacity and the company's operational performance are thoroughly presented in the Management Discussion and Analysis chapter, particularly in the Operational Performance Review by Segment Sub-chapter.

Uraian Segmentasi Pasar

Market Segmentation

Segmen pasar PLN Indonesia Power secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

Memproduksi tenaga listrik dari aset pembangkit yang dimiliki oleh PLN Indonesia Power, baik pembangkit yang telah dimiliki PLN Indonesia Power sebelum *legal end state* maupun aset yang menjadi milik PLN IP setelah menerima aset-aset pembangkit dari PLN pasca *legal end state*, yang kepemilikannya beralih demi hukum kepada PLN Indonesia Power sebagai akibat dari pemisahan tidak murni/*spin off* sebagian kegiatan usaha PLN. Selanjutnya, energi yang diproduksi akan diperjualbelikan kepada pelanggan *single buyer*, PT PLN (Persero) melalui mekanisme penjualan energi listrik dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT).

Sedangkan usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik yaitu jasa operasi dan pemeliharaan (O&M) dilakukan kepada pembangkit milik PT PLN (Persero) yang semula melalui Kontrak *Asset Manager Contract* (AMC) telah dilakukan pengakhiran perjanjian AMC. Adapun kegiatan pengoperasian aset pembangkit PLN berdasarkan Kontrak Jasa OM tetap dilaksanakan, di mana PLN Indonesia Power melaksanakan jasa OM terhadap pembangkit-pembangkit milik PLN yang belum dan/atau tidak dialihkan kepada *Subholding* Pembangkitan. Dalam pelaksanaannya dilakukan perjanjian pinjam pakai lahan antara PLN dengan PLN Indonesia Power yang mengatur bahwa PLN Indonesia Power

PLN Indonesia Power's market is generally divided into two (2) key segments, namely:

This segment involves the production of electricity from power generation assets owned by PLN Indonesia Power, including power generation assets owned prior to the legal end state as well as PLN IP's assets owned by transferred from PT PLN (Persero) after the legal end-state, where the ownership to PLN Indonesia Power occurred by operation of law as a result of the partial spin-off of PLN's business activities. The electricity produced is subsequently sold to a single-buyer customer, PT PLN (Persero), through a Power Purchase Agreement (PPA).

Meanwhile, business activities related to electricity supply, namely operations and maintenance (O&M) services, are provided to power plants owned by PT PLN (Persero), which were previously governed under the Asset Manager Contract (AMC), the AMC agreement has been terminated. The operation of PLN's power generation assets under the OM Service Contract continues to be carried out, whereby PLN Indonesia Power provides OM services for PLN-owned power plants that have not been and/or are not transferred to the Generation Subholding. In practice, a land use loan agreement has been executed between PLN and PLN Indonesia Power, granting PLN Indonesia Power the right to utilize PLN-



diberikan hak untuk menggunakan tanah milik PLN yang di atasnya terdapat aset-aset pembangkitan yang dialihkan dari PLN kepada PLN Indonesia Power. Hal ini disebabkan PLN hanya mengalihkan aset pembangkit, namun tidak mengalihkan kepemilikan atas lahan.

Sistem kelistrikan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dipasok oleh berbagai entitas pembangkitan yang saling terintegrasi. Pasokan energi listrik di wilayah-wilayah tersebut berasal dari sejumlah perusahaan strategis dalam ekosistem kelistrikan nasional, antara lain PLN Indonesia Power, PLN Nusantara Power, dan PLN Tanjung Jati B (PLN TJB). Selain itu, kontribusi juga datang dari pembangkit listrik swasta (*Independent Power Producer/IPP*) serta pembangkit milik PLN yang dikelola oleh berbagai unit, seperti Unit Induk Distribusi (UID), Unit Induk Wilayah (UIW), dan Unit Induk Pembangkitan (UIK) di masing-masing regional maupun unit proyek.

Sepanjang tahun 2024, PLN Indonesia Power mencatatkan kinerja positif dalam produksi dan penjualan tenaga listrik. Realisasi produksi listrik mencapai 87.210,96 GWh, meningkat 3,57% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 84.205,29 GWh. Selain itu, PLN Indonesia Power melalui Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan juga menjalankan diversifikasi bidang usaha energi lainnya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi PLN Indonesia Power.

owned land where the generation assets transferred from PLN to PLN Indonesia Power are located. This arrangement is necessary as PLN only transferred the generation assets without transferring ownership of the land.

The electricity systems across various regions in Indonesia, particularly Java-Bali, Sumatera, Kalimantan, and Sulawesi, are supplied by multiple integrated power generation entities. The electricity supply in these regions comes from several strategic companies within the national electricity ecosystem, including PLN Indonesia Power, PLN Nusantara Power, and PLN Tanjung Jati B (PLN TJB). In addition, contributions also come from private power plants (*Independent Power Producers/IPP*) as well as PLN-owned power plants managed by different units, such as the Distribution Main Unit (UID), Regional Main Unit (UIW), and Generation Main Unit (UIK) in each region or project unit.

Throughout 2024, PLN Indonesia Power recorded a positive performance in electricity generation and sales. The realization of electricity production reached 87,210.96 GWh, an increase of 3.57% compared to 2023, which stood at 84,205.29 GWh. Besides, PLN Indonesia Power, through its Subsidiaries and Joint Ventures, also undertook business diversification in other energy sectors in order to realize PLN Indonesia Power's Vision and Mission.



Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Structure and Composition

PLN Indonesia Power merupakan *Subholding* PT PLN (Persero) dengan kepemilikan dan komposisi pemegang saham sebagai berikut:

1. PT PLN (Persero) sebanyak 1 lembar Saham Seri 1 dan 357.165.633.598 lembar Saham Seri 2, dan
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 lembar Saham Seri 2.

Adapun skema struktur dan komposisi pemegang saham Perusahaan sampai dengan pemegang saham pengendali akhir (*ultimate shareholder*) dapat dilihat pada skema berikut:

PLN Indonesia Power is a subholding of PT PLN (Persero), with the following ownership and shareholder composition:

1. PT PLN(Persero) holds 1 Series 1 Share and 357,165,633,598 Series 2 Shares, and
2. Foundation for Education and Welfare PT PLN (Persero) holds 1 Series 2 Share.

The structural scheme and composition of the Company's shareholders up to the ultimate controlling shareholder can be seen in the following diagram:



Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Shareholding by the Board of Commissioners and Board of Directors

Komposisi Saham PLN Indonesia Power tidak ada yang dimiliki oleh Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan.

None of the shares of PLN Indonesia Power are owned by the Company's Board of Commissioners or Board of Directors.

Pemegang Saham Dengan Kepemilikan 5% atau Lebih 5%

Shareholders with Ownership of 5% or More

Sampai dengan 31 Desember 2024, pemegang saham mayoritas PLN Indonesia Power adalah PT PLN (Persero). Dengan demikian maka presentase kepemilikan saham 5% atau lebih adalah oleh PT PLN (Persero).

As of December 31, 2024, the majority shareholder of PLN Indonesia Power is PT PLN (Persero). Therefore, the percentage of share ownership of 5% or more is held by PT PLN (Persero).

Kelompok Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan Kurang dari 5%

Public Shareholder Group with Less than 5% Ownership

Sampai dengan 31 Desember 2024, PLN Indonesia Power belum mendaftarkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia dan seluruh saham PLN Indonesia Power dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi kepemilikan saham PLN oleh masyarakat dengan persentase kurang dari 5%.

As of December 31, 2024, PLN Indonesia Power has not listed its shares on the Indonesia Stock Exchange, and all shares of PLN Indonesia Power are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Thus, there is no information regarding public ownership of PLN shares with a percentage of less than 5%.

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan, Berdasarkan Klasifikasi

Number of Shareholders and Ownership Percentage, by Classification

Sampai dengan 31 Desember 2024, kepemilikan saham PLN Indonesia Power seluruhnya dimiliki oleh institusi lokal yaitu Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

As of December 31, 2024, all shares of PLN Indonesia Power are owned by a local institution, namely the Government of the Republic of Indonesia, domiciled in Indonesia, as described in the following table:

Kepemilikan saham Shareholding	Jumlah dan Persentase Kepemilikan Saham Number and Percentage of Shareholding
Kepemilikan institusi lokal Ownership by local agency	Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia
Kepemilikan institusi asing Ownership by foreign agency	Tidak ada None
Kepemilikan individu lokal Ownership by local individual	Tidak ada None
Kepemilikan individu asing Ownership by foreign individual	Tidak ada None

Hak Pemegang Saham

Shareholders' Rights

PLN Indonesia Power senantiasa menjaga agar setiap hak Pemegang Saham terlindungi sehingga dapat mendorong partisipasi Pemegang Saham atau investor dalam pengambilan keputusan perusahaan. PLN berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang setara bagi semua pemegang saham guna memastikan kepentingan mereka terjaga dengan baik.

PLN Indonesia Power consistently ensures that all Shareholders' rights are protected, thereby encouraging Shareholder or investor participation in the company's decision-making process. PLN is committed to providing equal protection for all shareholders to safeguard their interests.

Hak Pemegang Saham PLN Indonesia Power antara lain:

1. Hak untuk Menghadiri dan Memberikan Suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Pemegang saham berhak untuk berpartisipasi dalam RUPS dan memberikan suara atas setiap keputusan penting yang akan diambil oleh perusahaan.
2. Hak untuk Mendapatkan Pembagian Dividen: Pemegang saham berhak mendapatkan pembagian keuntungan atau dividen perusahaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam RUPS.
3. Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Transparan dan Akurat: Pemegang saham berhak mendapatkan informasi yang relevan mengenai kondisi keuangan perusahaan, laporan tahunan, dan perkembangan penting yang mempengaruhi perusahaan.

The rights of PLN Indonesia Power Shareholders include:

1. Rights to be Present and to Cast a Vote in the General Meeting of Shareholders (GMS): Shareholders have the rights to participate in the GMS and vote on every important decision to be made by the Company.
2. Rights to Receive Dividend Distribution: Shareholders are entitled to receive a portion of the company's profits or dividends in accordance with the policies determined at the GMS.
3. Rights to Access Transparent and Accurate Information: Shareholders are entitled to receive relevant information regarding the company's financial condition, annual reports, and significant developments that affect the company.

Kebijakan Hubungan PLN Indonesia Power dengan Pemegang Saham

PLN Indonesia Power's Shareholder Relationship Policy

Dalam rangka memperkuat hubungan dengan pemegang saham, PLN Indonesia Power memiliki kebijakan internal yang mengatur tata kelola hubungan dengan pemegang saham, termasuk prosedur komunikasi, transparansi informasi, dan perlindungan hak-hak pemegang saham sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar PLN Indonesia Power serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, meningkatkan kepercayaan, dan memberikan informasi yang akurat serta tepat waktu kepada pemegang saham.

In order to strengthen its relationship with shareholders, PLN Indonesia Power has established internal policies governing the management of shareholder relations, including communication procedures, information transparency, and the protection of shareholder rights as stipulated in the Articles of Association of PLN Indonesia Power, as well as applicable laws and regulations. These policies aim to foster mutually beneficial relationships, enhance trust, and provide accurate and timely information to shareholders.

Akses Informasi Kepada Pemegang Saham

Information Access for Shareholders

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan keterbukaan, PLN Indonesia Power menyediakan akses informasi yang bertujuan untuk memudahkan pemegang saham memperoleh informasi penting tentang Perseroan. Akses informasi kepada Pemegang Saham yang disediakan oleh PLN Indonesia Power meliputi:

In order to improve transparency and disclosure, PLN Indonesia Power provides access to information to facilitate shareholders in obtaining important information about the Company. Access to information to Shareholders provided by PLN Indonesia Power includes:

Laporan Keuangan Tahunan: PLN Indonesia Power menyediakan laporan keuangan yang diaudit secara berkala, yang dapat diakses oleh pemegang saham untuk memahami kondisi keuangan perusahaan.

Annual Financial Statements: PLN Indonesia Power provides audited financial statements periodically, which shareholders can access to understand the company's financial condition.

Laporan Tahunan: Laporan tahunan yang mencakup pencapaian kinerja dan kebijakan perusahaan selama tahun berjalan serta rencana strategis di masa depan.

Annual Reports: These include performance achievements and corporate policies throughout the year, as well as future strategic plans.

Pengumuman dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Pengumuman terkait jadwal dan agenda RUPS, serta keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat tersebut.

Announcements and General Meeting of Shareholders (GMS): Announcements related to the schedule and agenda of the GMS, as well as decisions made during the meetings.

Website Perusahaan: Pemegang saham dapat mengakses informasi melalui *website* resmi PLN Indonesia Power, yang menyediakan berita, laporan, dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan kebijakan perusahaan.

Company Website: Shareholders can access information through the official website of PLN Indonesia Power, which provides news, reports, and documents related to the company's operations and policies.

Media Sosial dan Saluran Komunikasi Lain: PLN Indonesia Power juga menggunakan media sosial dan *platform* digital lainnya untuk memberikan informasi terkini kepada pemegang saham dan publik secara luas.

Social Media and Other Communication Channels: PLN Indonesia Power also uses social media and other digital platforms to provide up-to-date information to shareholders and the wider public.



Struktur Organisasi

Organizational Structure

Dalam rangka mendukung pelaksanaan *Holding – Subholding* di Lingkungan PLN *Group*, pada tahun 2022 PLN Indonesia Power melakukan perubahan struktur organisasi sesuai Keputusan Direksi Nomor 139.K/010/IP/2022 tentang Organisasi PT PLN Indonesia Power. Hal ini berdampak adanya perubahan pada beberapa Sebutan Jabatan dan *Position Grade* di lingkungan PT PLN Indonesia Power. Oleh karena itu, pada tanggal 24 Juli 2023 melalui Peraturan Direksi Nomor: 0077.P/DIR/2023, dilakukan penyesuaian pada lampiran 2 Keputusan Direksi PT Indonesia Power tentang Organisasi PT PLN Indonesia Power yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Direksi Nomor 0097.P/DIR/2023 tentang Sistem Jabatan dan Nomenklatur Organisasi.

Selanjutnya dalam mendukung program PT PLN Indonesia Power *Transformation 2.0 (Moonshot)* yang mencakup inisiatif strategis *Expand Core*, *Ignite Growth (Go Global + Beyond kWh)*, *Digital Driven Operations and Maintenance Excellence*, *Sustainability* dan *Launchpad*, perlunya dilakukan perubahan *mindset* seluruh Pegawai tentang transisi energi yang terjadi pada bisnis pembangkitan, kesadaran untuk mencapai peningkatan bisnis yang signifikan dengan kapabilitas finansial yang lebih baik dan kesadaran optimalisasi dalam menjalankan bisnis Perusahaan, serta mendukung program bisnis *beyond kWh*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada tanggal 19 Januari 2024 telah dilakukan perubahan sebutan Unit di lingkungan PT PLN Indonesia Power menjadi Unit Bisnis sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Direksi Nomor: 0001.P/DIR/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi PT PLN Indonesia Power Nomor 139.K/010/IP/2022 tentang Organisasi PT PLN Indonesia Power dengan skema struktur organisasi sebagai berikut:

In order to support the implementation of the *Holding–Subholding* structure within the PLN Group, in 2022, PLN Indonesia Power enacted amendments to its organizational structure pursuant to the Board of Directors' Decision No. 139.K/010/IP/2022 on the Organization of PT PLN Indonesia Power. This resulted in several changes to the Nomenclature of Position and Grade within PT PLN Indonesia Power. Therefore, on July 24, 2023, under the Board of Directors' Decision Number: 0077.P/DIR/2023, an adjustment was made to Appendix 2 of the Board of Directors' Decision of PT PLN Indonesia Power on the Organization of PT PLN Indonesia Power, which subsequently stipulated by the Board of Directors' Decision No. 0097.P/DIR/2023 on Position Grade System and Organization Nomenclature.

Furthermore, to support the *Transformation 2.0 (Moonshot)* program that covers the strategic initiatives of *Expand Core*, *Ignite Growth (GoGlobal + Beyond kWh)*, *Digital Driven Operations and Maintenance Excellence*, *Sustainability* and *Launchpad*, it was considered necessary to change the *mindset* of all employees concerning energy transition in generation business, to build awareness to improve business with better financial capability significantly, and to build awareness to perform optimization of business, as well as to support *beyond kWh* businesses. With such consideration, on January 19, 2024, a change in the designation of Units within PT PLN Indonesia Power to Business Units was enacted, as stipulated in the Board of Directors' Regulation No.0001.P/DIR/2024 on the Second Amendment to the Board of Directors' Decision of PT PLN Indonesia Power No. 139.K/010/IP/2022 on the Organization of PT PLN Indonesia Power, rendering the organizational structure as follows:



Keterangan: Nama Pejabat sesuai posisi hingga 31 Desember 2024.
Description: Names of Officials according to position as of December 31, 2024.



Direksi Board of Director

**Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko**
Director of Finance and
Risk Management

Endang Astharanti

**Direktur Manajemen Human
Capital dan Administrasi**
Director of Human Capital Management
and Administrative

Wisnoe Satrijono

Bidang Corporate Finance
Corporate Finance Division

Andri Febriyanto

**Bidang Accounting
and Insurance**
Accounting and Insurance
Division

Jefri Ade Saputra

Bidang Treasury and Tax
Treasury and Tax Division

Tuti Purwaningsih

**Bidang Information
Technology and Digital**
Information Technology and
Digital Division

Didik Harjanto

Bidang Human Capital Strategy
Human Capital Strategy
Division

Giovany

**Bidang Human Capital
Development**
Human Capital Development
Division

Syahrini Rakhmawati

**Bidang Human Capital
Services**
Human Capital Services
Division

Asep Yanyan H

**Bidang Health, Safety,
and Environment**
Health, Safety, Environment
Division

Nugraha Septa Utama

Bidang General Affairs
General Affairs Division

Sabtanto Nugroho

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Iskandar Simorangkir : Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently
as Independent Commissioner

Wiluyo Kusdiharto : Komisaris Commissioner

Djoko Siswanto : Komisaris Commissioner

M.P. Dwinugroho : Komisaris Commissioner

Arief Budiman : Komisaris Commissioner

Haryanto W.S. : Komisaris Independen Independent Commissioner

Lukmanul Hakim : Komisaris Independen Independent Commissioner

Satuan Internal Audit
Internal Audit Unit

Suparlan

**Satuan, Legal, Risk,
and Compliance**
Legal, Risk, and Compliance
Unit

Robiatna Agus Fanhar

**Satuan Supply Chain
Management and
Procurement**
Supply Chain Management
and Procurement Unit

Aliansyah Abdullah

**Satuan Project
Management**
Project Management Unit

Ade Hendratno

**Satuan Technology
Development and
Asset Management**
Technology Development
and Asset Management Unit

Budhi Setiawan

Sekretariat Perusahaan
Corporate Secretary

Agung Siswanto

Komite Audit Audit Committee

Ketua Head of Committee
Iskandar Simorangkir
Wakil Ketua I Deputy Head I
Wiluyo Kusdiharto
Wakil Ketua II Deputy Head II
Lukmanul Hakim
Sekretaris merangkap Anggota
Secretary and concurrent member
Denny Triyanto
Anggota Member
Linda Agustina

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee

Ketua Head of Committee
Haryanto W. S
Wakil Ketua Deputy Head
Arief Budiman
Sekretaris merangkap Anggota
Secretary and concurrent member
Yoserianto
Anggota Member
Alvin Nur Widjajanti

Komite Investasi dan Manajemen Risiko Investment and Risk Management Committee

Ketua Head of Committee
Djoko Siswanto
Wakil Ketua Deputy Head
M.P Dwinugroho
Sekretaris merangkap Anggota
Secretary and concurrent member
Dewanto
Anggota Member
Ferry Triansyah

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Profile

Komposisi anggota Dewan Komisaris PLN Indonesia Power per 31 Desember 2024:



Lukmanul Hakim
Komisaris Independen
Independent Commissioner

M. P. Dwinugroho
Komisaris
Commissioner

Haryanto W.S.
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Wiluyo Kusdiharto
Komisaris
Commissioner

The Board of Commissioners' composition of PLN Indonesia Power as of December 31, 2024:



Djoko Siswanto
Komisaris
Commissioner

Iskandar Simorangkir
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently Independent Commissioner

Arief Budiman
Komisaris
Commissioner

Iskandar Simorangkir

Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen
President Commissioner
concurrently as Independent
Commissioner



61 tahun per 31 Desember 2024/Binjai, 4 Januari 1963
61 years old as of December 31, 2023/ Binjai, January 4, 1963



Indonesia
Indonesia



Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Sarjana jurusan Manajemen dari Universitas Udayana (1986)
- Magister Ekonomi dari Vanderbilt University, Amerika Serikat (1997)
- Doktor Ekonomi Spesialisasi Ekonomi Moneter dan Perbankan dari Universitas Indonesia (2007)

Educational Background

- Bachelor's Degree in Management from Universitas Udayana (1986)
- Master of Economics from Vanderbilt University, USA (1997)
- Doctor of Economics majoring in Monetary and Banking Economics from Universitas Indonesia (2007)

Sertifikasi

Qualified Risk Governance Profesional (CRGP)

Certification

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisaris PLN Indonesia Power, pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia (2019-Februari 2023), Komisaris PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) (2019-2021), Kepala Perwakilan Bank Indonesia (2014), Kepala Departemen Bank Indonesia (2013-2014) dan Kepala Biro/Grup Riset Ekonomi Bank Indonesia (2008-2012)

Position History/Work Experience

Prior to serving as a Member of the Board of Commissioners of PLN Indonesia Power, he also held several key positions, including Assistant Governor of Bank Indonesia (2019-February 2023), Commissioner of PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) (2019-2021), Head of Bank Indonesia Representative Office (2014), Head of Department at Bank Indonesia (2013-2014), and Head of the Economic Research Bureau/Group at Bank Indonesia (2008-2012).

Dasar Hukum Pengangkatan

- RUPS Sirkuler tanggal 9 Februari 2021
- RUPS Sirkuler tanggal 29 Februari 2024 dilakukan perubahan nomenklatur, Iskandar Simorangkir yang diangkat melalui RUPS Perseroan tanggal 9 Februari 2021 semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Legal Basis for Appointment

- Circular GMS dated February 9, 2021
- Circular GMS dated February 29, 2024, a change in nomenclature was made whereby Iskandar Simorangkir, who was appointed based on the Company's GMS dated February 9, 2021, was re-designated from Commissioner to President Commissioner and Independent Commissioner

Periode Jabatan

Periode Pertama, 2021-2025

Term of Office

First Term, 2021-2025

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Hubungan Afiliasi

Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as Major and Controlling Shareholders

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power

Ketua Komite Audit

Concurrent Position at PLN Indonesia Power

Head of the Audit Committee

Rangkap Jabatan Pada Perusahaan Lain

Wakil Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia

Concurrent Position at Other Companies

Deputy Head of the Supervisory Board of Bank Indonesia

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham

Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Statement of Independence, Training, and Share Ownership

Presented separately in GCG, under a sub-chapter of the Board of Commissioners of this Annual Report



53 tahun per 31 Desember 2024/Surabaya, 25 Juli 1971
53 years old as of December 31, 2023/ Surabaya, July 25, 1971



Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia



Indonesia
Indonesia



Wiluyo Kusdwiarto

Komisaris
Commissioner

Riwayat Pendidikan

- Magister Manajemen di Universitas Tenaga Nasional Malaysia (2005)
- Sarjana Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994)

Educational Background

- Master of Management from Universiti Tenaga Nasional, Malaysia (2005)
- Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (1994)

Sertifikasi

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Certification

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama PLN Indonesia Power, pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan di PT PLN (Persero) (2020-2021), Direktur Bisnis Regional Sumatera di PT PLN (Persero) (2017-2020), Kepala Divisi Konstruksi Regional Sumatera PT PLN (Persero) (2015-2017), General Manager Unit Induk Pembangunan VIII PT PLN (Persero) (2013-2015) dan General Manager Pembangkitan Lontar PT PLN (Persero) (2012-2013)

Position History/Work Experience

Prior to serving as President Commissioner of PLN Indonesia Power, he held several key positions at PT PLN (Persero), including Director of Regional Business for Sumatra and Kalimantan (2020-2021), Director of Regional Business for Sumatra (2017-2020), Head of Regional Construction Division for Sumatra (2015-2017), General Manager of Generation Development Unit VIII (2013-2015), and General Manager of Lontar Generation Unit (2012-2013)

Dasar Hukum Pengangkatan

- RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022
- RUPS Sirkuler tanggal 29 Februari 2024 dilakukan perubahan nomenklatur, Wiluyo Kusdwiarto yang diangkat melalui RUPS Perseroan tanggal 21 September 2022 semula sebagai Komisaris Utama menjadi Komisaris

Legal Basis for Appointment

- Circular GMS dated September 21, 2022
- Circular GMS dated February 29, 2024, a change in nomenclature was made whereby Wiluyo Kusdwiarto, who was appointed based on the Company's GMS dated September 21, 2022, was re-designated from President Commissioner to Commissioner

Periode Jabatan

Periode Pertama, 2022-2026

Term of Office

First Term, 2022-2026

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Hubungan Afiliasi

Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners and Board of Directors, but he has affiliation with Major and Controlling Shareholders

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power

Wakil Ketua I Komite Audit

Concurrent Position at PLN Indonesia Power

Deputy Head of the Audit Committee

Rangkap Jabatan Pada Perusahaan Lain

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan di PT PLN (Persero)

Concurrent Position at Other Companies

Director of Project Management and New Renewable Energy Director at PT PLN (Persero)

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham

Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Statement of Independence, Training, and Share Ownership

Presented separately in GCG, under a sub-chapter of the Board of Commissioners of this Annual Report



Djoko Siswanto

Komisaris
Commissioner



59 tahun per 31 Desember 2023/Jakarta, 23 Mei 1965

59 years old as of December 31, 2023/Jakarta, May 23, 1965



Indonesia
Indonesia



Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik Perminyakan dari ITB (1990)
- MBA Specialist Oil & Gas Management, Center of Energy Petroleum Mineral & Law (CEPMLP) dari Dundee University UK (2001)
- MBA Program, Edinburgh Business School dari Heriot Watt University, UK (2001)
- Doktor dari Teknik Perminyakan ITB (2011)

Educational Background

- Bachelor's Degree in Petroleum Engineering from ITB (1990)
- MBA in Oil & Gas Management from the Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy (CEPMLP), University of Dundee, UK (2001)
- MBA Program from Edinburgh Business School, Heriot-Watt University, UK (2001)
- Doctorate in Petroleum Engineering from ITB (2011)

Sertifikasi

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Certification

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisaris PLN Indonesia Power, pernah menjabat sebagai Plt. Dirjen Migas (2019-2020), Komisaris PT Elnusa Petrofin (2019), Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi KESDM (2018-2019), Pengawas Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (2018) dan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (2018)

Position History/Work Experience

Prior to serving as a Member of the Board of Commissioners of PLN Indonesia Power, he also held several key positions, including Acting Director General of Oil and Gas (2019-2020), Commissioner of PT Elnusa Petrofin (2019), Director General of Oil and Gas at KESDM (2018-2019), Supervisor at the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (2018), and Commissioner of PT Pertamina Hulu Energi (2018)

Dasar hukum Pengangkatan

RUPS Sirkuler tanggal 6 Juli 2021

Legal Basis for Appointment

Circular GMS dated July 6, 2021

Periode Jabatan

Periode Pertama, 2021 - 2025

Term of Office

First Term, 2021-2025

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Hubungan Afiliasi

Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as Major and Controlling Shareholders

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power

Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Concurrent Position at PLN Indonesia Power

Head of Investment and Risk Management Committee

Rangkap Jabatan Pada Perusahaan Lain

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Kepala SKK MIGAS)

Concurrent Position at Other Companies

Head of the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (Head of SKK MIGAS)

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham

Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Statement of Independence, Training, and Share Ownership

Presented separately in GCG, under a sub-chapter of the Board of Commissioners of this Annual Report



60 tahun per 31 Desember 2023/Jakarta, 15 November 1964

60 years old as of December 31, 2023/Jakarta, November 15, 1964

Jakarta, Indonesia

Jakarta, Indonesia

Indonesia

Indonesia

M.P. Dwinugroho

Komisaris
Commissioner

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik Geologi di Universitas Trisakti (1991)
- Magister Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia (2007)

Educational Background

- Bachelor of Geological Engineering, Universitas Trisakti (1991)
- Master of Economics, Universitas Indonesia (2007)

Sertifikasi

Sertifikat Kompetensi Utama Pengelolaan Lingkungan Ketenagalistrikan pada Pembangkitan Tenaga Listrik

Certification

Advanced Competency for Environmental Management in Power Generation Certificate

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisaris PLN Indonesia Power, pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (2021-2022), Komisaris Huadian Bukit Asam Power Plant (2021-2022), Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara (2018-2021), Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral (2017-2018)

Position History/Work Experience

Prior to serving as a Commissioner of PLN Indonesia Power, the individual held several positions, including Secretary of the Energy and Mineral Resources Research and Development Agency (2021-2022), Commissioner of Huadian Bukit Asam Power Plant (2021-2022), Head of the Center for Human Resources Development in Geology, Minerals, and Coal (2018-2021), and Head of the Energy and Mineral Resources Data and Information Technology Center (2017-2018)

Dasar hukum Pengangkatan

RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022

Legal Basis for Appointment

Circular GMS dated September 21, 2022

Periode Jabatan

Periode Pertama, 2022-2026

Term of Office

First Term, 2022-2026

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Hubungan Afiliasi

Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as Major and Controlling Shareholders

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power

Wakil Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Concurrent Position at PLN Indonesia Power

Deputy Head of the Investment and Risk Management Committee

Rangkap Jabatan Pada Perusahaan Lain

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Concurrent Position at Other Companies

Director of Engineering and Electricity Environment at the Ministry of Energy and Mineral Resources

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham

Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Statement of Independence, Training, and Share Ownership

Presented separately in GCG, under a sub-chapter of the Board of Commissioners of this Annual Report



Haryanto W.S.

Komisaris Independen
Independent Commissioner



65 tahun per 31 Desember 2023/Boyolali, 6 April 1959

65 years old as of December 31, 2023/Boyolali, April 6, 1959



Indonesia
Indonesia



Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Listrik Arus Kuat dari ITB (1983)
- Magister Manajemen dari STIE Ekonomi (2003)

Sertifikasi

- Sertifikasi Kompetensi Insinyur Profesional Utama 2023
- Sertifikat Kompetensi Tugas Pengelolaan dan Pengembangan dan Pemasangan pembangunan dan Pemasangan Sistem Transmisi Tenaga Listrik
- Sertifikasi ASEAN Engineer

Educational Background

- Bachelor's Degree in High-Current Electrical Engineering, ITB (1983)
- Master of Management, STIE Ekonomi (2003)

Certification

- Main Professional Engineer Competency Certification (2023).
- Competency Certificate in Management, Development, and Installation of Electric Power Transmission Systems
- ASEAN Engineer Certification

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisaris PLN Indonesia Power, juga pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali (2019-2022), Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat (2017-2019), Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua (2015-2017), GM Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2014-2015) dan GM Distribusi Jawa Timur (2011-2014)

Position History/Work Experience

Prior to serving as a Member of the Board of Commissioners of PLN Indonesia Power, he held various positions including Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali (2019-2022), Director of Regional Business for Western Java (2017-2019), Director of Regional Business for Maluku and Papua (2015-2017), General Manager of Distribution for Greater Jakarta and Tangerang (2014-2015), and General Manager of Distribution for East Java (2011-2014)

Dasar Hukum Pengangkatan

- RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022
- RUPS Sirkuler tanggal 29 Februari 2024 dilakukan perubahan nomenklatur, Haryanto W.S yang diangkat melalui RUPS Perseroan tanggal 21 September 2022 semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Independen

Legal Basis for Appointment

- Circular GMS dated September 21, 2022
- Circular GMS dated February 29, 2024, a change in nomenclature was made whereby Haryanto W.S, who was appointed through the Company's GMS dated September 21, 2022, was re-designated from Commissioner to Independent Commissioner

Periode Jabatan

Periode Pertama, 2022 - 2026

Term of Office

First Term, 2022 - 2026

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Hubungan Afiliasi

Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as Major and Controlling Shareholders

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Concurrent Position at PLN Indonesia Power

Head of the Nomination and Remuneration Committee

Rangkap Jabatan Pada Perusahaan Lain

Staf Ahli Direktur Utama PT PLN (Persero)

Concurrent Position at Other Companies

Expert Staff to the President Director of PT PLN (Persero)

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham

Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Statement of Independence, Training, and Share Ownership

Presented separately in GCG, under a sub-chapter of the Board of Commissioners of this Annual Report



50 tahun per 31 Desember 2023/Surabaya, 2 Maret 1974

50 years old as of December 31, 2023/Surabaya, March 02, 1974



Arief Budiman

Komisaris
Commissioner

Jakarta, Indonesia

Jakarta, Indonesia



Indonesia

Indonesia



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Sastra Inggris Universitas 17 Agustus 1945 (2000)
- Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga (2002)
- Magister Ekonomi dan Bisnis Universitas dari Gadjah Mada (2010)

Educational Background

- Bachelor of Arts in English Literature from Universitas 17 Agustus 1945 (2000)
- Bachelor of International Relations from Universitas Airlangga (2002)
- Master of Economics and Business from Universitas Gadjah Mada (2010)

Sertifikasi

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Certification

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisaris PLN Indonesia Power, pernah menjabat sebagai Ketua Anggota KPU RI (2017-2022), Anggota KPU RI (2012-2017), Anggota KPU Provinsi Jawa Timur (2004-2012) dan Peneliti Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (2002-2005)

Position History/Work Experience

Prior to serving as a Member of the Board of Commissioners of PLN Indonesia Power, also held the following positions: Chairperson and Member of the General Elections Commission of the Republic of Indonesia (KPU RI) (2017-2022), Member of KPU RI (2012-2017), Member of East Java Provincial KPU (2004-2012), and Researcher at Jawa Pos Institute of Pro-Autonomy (2002-2005)

Dasar Hukum Pengangkatan

RUPS Sirkuler tanggal 18 November 2022

Legal Basis for Appointment

Circular GMS dated November 18, 2022

Periode Jabatan

Periode Pertama, 2022-2026

Term of Office

First Term, 2022 - 2026

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Hubungan Afiliasi

Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as Major and Controlling Shareholders

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power

Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Concurrent Position at PLN Indonesia Power

Deputy Head of the Nomination and Remuneration Committee

Rangkap Jabatan Pada Perusahaan Lain

Tidak ada

Concurrent Position at Other Companies

None

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham

Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Statement of Independence, Training, and Share Ownership

Presented separately in GCG, under a sub-chapter of the Board of Commissioners of this Annual Report



Lukmanul Hakim

Komisaris Independen
Independent Commissioner



55 tahun per 31 Desember 2023/Tasikmalaya, 31 Juli 1969
55 years old as of December 31, 2023/Tasikmalaya, July 31, 1969



Indonesia
Indonesia



Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Bidang Kimia dari IPB (1993)
- Magister Bidang Teknologi Industri dari IPB (2005)

Educational Background

- Bachelor's Degree in Chemistry from IPB (1993)
- Master's Degree in Industrial Technology from IPB (2005)

Sertifikasi

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Certification

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisaris PLN Indonesia Power, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Halal Nasional MUI (2020-2025), Ketua Umum Arus Baru Indonesia (ARBI) (2018-sekarang), Ketua Umum Al Ittihadiyah (2016-2022), Ketua Bidang Ekonomi Umat MUI (2015-2025) dan Ketua Lembaga Wakaf MUI (2020-2025)

Position History/Work Experience

Prior to serving as a member of Independent Commissioner of Indonesia Power, he also served as Vice Chairman of National Halal Council of MUI (2020-2025), Chairman of Arus Baru Indonesia (ARBI) (2018-present), Chairman of Al Ittihadiyah (2016-2022), Head of Economic Affairs of Indonesian Council of Ulama (2015-2025) and Chairman of Indonesian Council of Ulama's Waqf Board (2020-2025)

Dasar Hukum Pengangkatan

RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022

Legal Basis for Appointment

Circular GMS dated September 21, 2022

Periode Jabatan

Periode Pertama, 2022-2026

Term of Office

First Term, 2022 - 2026

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Hubungan Afiliasi

Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as Major and Controlling Shareholders

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power

Wakil Ketua II Komite Audit

Concurrent Position at PLN Indonesia Power

Deputy Head II of the Audit Committee

Rangkap Jabatan Pada Perusahaan Lain

- Dewan Pengawas LPPOMMUI
- President World Halal Food Council (WHFC)
- Dewan Pakar Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
- Ketua Lembaga Wakaf MUI & Ketua Bidang Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia
- Ketua Umum Arus Baru Indonesia (ARBI)
- Wakil Ketua Dewan Halal Nasional MUI

Concurrent Position at Other Companies

- Supervisory Board of LPPOM MUI
- President of World Halal Food Council (WHFC)
- Expert Board of the Central Management of the Islamic Economic Society (MES)
- Chairman of the MUI Waqf Institution & Head of the People's Economic Affairs Division of MUI
- Chairman of Arus Baru Indonesia (ARBI)
- Vice Chairman of the National Halal Council of MUI

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham

Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Statement of Independence, Training, and Share Ownership

Presented separately in GCG, under a sub-chapter of the Board of Commissioners of this Annual Report



Profil Direksi

Board of Directors Profile



M. Hanafi Nur Rifai

Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara
Director of Coal Power Plant Operations

Edwin Nugraha Putra

Direktur Utama
President Director

Wisnoe Satrijono

Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administration

Direksi menggunakan *blazer* berbahan kain daur ulang (bahan limbah tekstil yang diolah kembali menjadi serat baru untuk menenun kain baru) sebagai wujud aksi keberlanjutan Perusahaan.
The Board of Directors wears blazers made from recycled fabric (textile waste material reprocessed into new fibers to weave new fabric) as a form of the Company's sustainability action.



Bernadus Sudarmanta

Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Director of Business Development and Commerce

Endang Astharanti

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

Djoko Mulyono

Direktur Operasi Pembangkit Gas
Director Gas Power Plant Operations

Komposisi anggota Direksi PLN Indonesia Power per 31 Desember 2024:

Edwin Nugraha Putra

Direktur Utama
President Director



55 tahun per 31 Desember 2024/Pematang Siantar, 23 Juli 1969
55 years old as of December 31, 2024/Pematang Siantar, July 23, 1969



Indonesia
Indonesia



Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia



Riwayat Pendidikan

- Magister Information Technology dari University of Abertay Dundee Scotland (2007)
- Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Sumatera Utara (1994)

Educational Background

- Master of Information Technology from the University of Abertay Dundee, Scotland (2007)
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering from Universitas Sumatera Utara (1994)

Sertifikasi

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Certifications

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PLN Indonesia Power, pernah menjabat sebagai Executive Vice President Perencanaan Sistem Planning PT PLN (Persero) (2020-September 2022), Senior Specialist I Pengembangan Regional PT PLN (Persero) (2019 - 2020), General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura dan Bali (2019), General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah (2017-2019)

Position History/Work Experience

Prior to serving as President Director of PLN Indonesia Power, he held several key positions at PT PLN (Persero), including Executive Vice President of System Planning (2020-September 2022), Senior Specialist I for Regional Development (2019-2020), General Manager of the Java, Madura, and Bali Load Dispatching Unit (2019), General Manager of the Central Java Transmission Unit (2017-2019)

Dasar Hukum Pengangkatan

RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022

Legal Basis of Appointment

Circular GMS dated September 21, 2022

Periode Jabatan

Periode Pertama, 2022-2026

Term of Office

First Period, 2022-2026

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan sesama anggota Direksi lainnya dan dengan anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Affiliation

Has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Majority and Controlling Shareholders

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power

- Pengarah Komite Sustainability
- Anggota Komite Investasi

Concurrent Position at PLN Indonesia Power

- Steering Committee of Sustainability Committee
- Member of Investment Committee

Rangkap Jabatan Pada Perusahaan Lain

Tidak ada

Concurrent Position at Other Companies

None

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham

Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Governansi sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini

Statement of Independence, Training, and Share Ownership

Presented separately in Corporate Governance, under a sub-chapter of the Board of Directors of this Annual Report

Composition of the Board of Directors of PLN Indonesia Power as of December 31, 2024:

54 tahun per 31 Desember 2024/Sidoarjo, 21 Maret 1970

54 years old as of December 31, 2024/Sidoarjo, March 21, 1970

Jakarta, Indonesia

Jakarta, Indonesia



Indonesia

Indonesia



M. Hanafi Nur Rifai

Direktur Operasi
Pembangkit Batu Bara
Director of Coal Power Plant
Operations

Riwayat Pendidikan

- Magister Teknik dari Institut Teknologi Bandung (2012)
- Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1993)

Educational Background

- Master of Engineering from Institut Teknologi Bandung (2012)
- Bachelor of Mechanical Engineering from Institut Teknologi 10 November Surabaya (1993)

Sertifikasi

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Certifications

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Direktur Operasi Pembangkit Batubara PLN Indonesia Power, pernah menjabat sebagai Senior Spesialis Manajemen Pembangkitan Direktorat Manajemen Pembangkitan di PT PLN (Persero) (2022-2023), Direktur Operasi I Indonesia Power (2018-2022), dan General Manager UP Suralaya Indonesia Power (2015-2018)

Position History/Work Experience

Prior to serving as Director of Coal-Fired Power Plant Operations at Indonesia Power, he held various positions including Senior Generation Management Specialist at the Directorate of Generation Management of PT PLN (Persero) (2022-2023), Director of Operations I at Indonesia Power (2018-2022), and General Manager of Suralaya Power Generation Unit at Indonesia Power (2015-2018)

Dasar Hukum Pengangkatan

RUPS Sirkuler tanggal 19 September 2023

Legal Basis of Appointment

Circular GMS dated September 19, 2023

Periode Jabatan

Periode Pertama, 2023-2027

Term of Office

First Period, 2023-2027

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan sesama anggota Direksi lainnya dan dengan anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Affiliation

Has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Majority and Controlling Shareholders

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power

- Pengarah Komite Sustainability
- Anggota Komite Investasi

Concurrent Position at PLN Indonesia Power

- Steering Committee of Sustainability Committee
- Member of Investment Committee

Rangkap Jabatan Pada Perusahaan Lain

Tidak ada

Concurrent Position at Other Companies

None

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham

Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Governansi sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini

Statement of Independence, Training, and Share Ownership

Presented separately in Corporate Governance, under a sub-chapter of the Board of Directors of this Annual Report



Djoko Mulyono

Direktur Operasi
Pembangkit Gas
Director of Gas Power
Plant Operations



56 tahun per 31 Desember 2024/Balikpapan, 23 November 1968
56 years old as of December 31, 2024/ Balikpapan, November 23, 1968



Indonesia
Indonesia



Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Magister Sumber Daya Manusia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2018).
- Sarjana Ekonomi Akuntansi dari STIE Bina Bangsa (2010)

Educational Background

- Master of Human Resources from Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2018)
- Bachelor of Accounting from STIE Bina Bangsa (2010)

Sertifikasi

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Certifications

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power, pernah menjabat sebagai General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (2021–September 2022), Senior Specialist I Sistem Manajemen Terintegrasi (PLT General Manager) (2021), Senior Specialist II Quality Assurance dan Kinerja (PLT General Manager) (2020), Vice President Pelaksana Pengadaan Batubara PT PLN (Persero) (2019–2020) dan Senior Manager Produksi pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (2018–2019)

Position History/Work Experience

Prior to serving as Director of Gas-Fired Power Plant Operations at Indonesia Power, he also served as General Manager at PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (2021–September 2022), Senior Specialist I of Integrated Management System (Acting General Manager) (2021), Senior Specialist II of Quality Assurance and Performance (Acting General Manager) (2020), Executive Vice President for Coal Procurement at PT PLN (Persero) (2019–2020) and Senior Production Manager at PT PLN (Persero) Southern Sumatra Power Generation Unit (2018–2019)

Dasar Hukum Pengangkatan

RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022

Legal Basis of Appointment

Circular GMS dated September 21, 2022

Periode Jabatan

Periode Pertama, 2022–2026

Term of Office

First Period, 2022–2026

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan sesama anggota Direksi lainnya dan dengan anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Affiliation

Has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Majority and Controlling Shareholders

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power

- Pengarah Komite Sustainability
- Anggota Komite Investasi

Concurrent Position at PLN Indonesia Power

- Steering Committee of Sustainability Committee
- Member of Investment Committee

Rangkap Jabatan Pada Perusahaan Lain

Tidak ada

Concurrent Position at Other Companies

None

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham

Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Governansi sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini

Statement of Independence, Training, and Share Ownership

Presented separately in Corporate Governance, under a sub-chapter of the Board of Directors of this Annual Report





56 tahun per 31 Desember 2024/Klaten, 4 September 1968

56 years old as of December 31, 2024/ Klaten, September 4, 1968



Jakarta, Indonesia

Jakarta, Indonesia



Indonesia

Indonesia



Bernadus Sudarmanta

Direktur Pengembangan
Bisnis dan Niaga

Director of Business
Development and Commerce

Riwayat Pendidikan

- Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung (2001)
- Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1992)

Educational Background

- Master of Management from Institut Teknologi Bandung (2001)
- Bachelor of Mechanical Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1992)

Sertifikasi

- *Certified Risk Professional* dari Lembaga Sertifikasi Pasar Modal Indonesia;
- *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)

Certifications

- Certified Risk Professional from the Indonesian Capital Market Certification Institute
- Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power, pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT PLN Enjiniring (2021-September 2022), Komisaris Utama PT Rekadaya Elektriika Consult (2017-2021), Direktur Utama PT PJB Investasi (2015-2016), Corporate Secretary PT PJB (2014-2016) dan General Manager Unit Induk Pembangkitan Sumbagut PT PLN (Persero)(2013-2015)

Position History/Work Experience

Prior to serving as Director of Business Development and Commerce at Indonesia Power, he also served as Director of Marketing and Business Development at PT PLN Enjiniring (2021 - September 2022), President Commissioner at PT Rekadaya Elektriika Consult (2017-2021), President Director at PT PJB Investasi (2015-2016), Corporate Secretary at PT PJB (2014-2016), and General Manager of the Sumbagut Generation Unit at PT PLN (Persero)(2013 - 2015)

Dasar Hukum Pengangkatan

RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022

Legal Basis of Appointment

Circular GMS dated September 21, 2022

Periode Jabatan

Periode Pertama, 2022-2026

Term of Office

First Period, 2022-2026

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan sesama anggota Direksi lainnya dan dengan anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Affiliation

Has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Majority and Controlling Shareholders

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power

- Pengarah Komite *Sustainability*
- Anggota Komite Investasi

Concurrent Position at PLN Indonesia Power

- Steering Committee of Sustainability Committee
- Member of Investment Committee

Rangkap Jabatan Pada Perusahaan Lain

Tidak ada

Concurrent Position at Other Companies

None

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham

Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Governansi sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini

Statement of Independence, Training, and Share Ownership

Presented separately in Corporate Governance, under a sub-chapter of the Board of Directors of this Annual Report



Endang Astharanti

Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko
Director of Finance and
Risk Management



48 tahun per 31 Desember 2024/Yogyakarta, 9 Agustus 1976
48 years old as of December 31, 2024/ Yogyakarta, August 9, 1976



Indonesia
Indonesia



Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Master Business Administration (MBA) dari Nanyang Technology University, Singapore (2009)
- Sarjana Akuntansi dari Universitas Gajah Mada (1999)

Educational Background

- Master of Business Administration (MBA) from Nanyang Technology University, Singapore (2009)
- Bachelor of Accounting from Universitas Gajah Mada (1999)

Sertifikasi

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Certifications

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan PLN Indonesia Power, pernah menjabat sebagai Vice President Distribution Strategy Group PT Bank Mandiri (Persero) (2021), Direktur Sales and Product PT Mandiri Management Investasi (2015-2021), Senior Executive Vice President (SEVP) Head of Sales Division PT Mandiri Management Investasi (2014-2015), Department Head of Marketing, Communication and Promotion PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011-2014)

Position History/Work Experience

Prior to holding the position of Director of Finance at Indonesia Power, she also served as Vice President of Distribution Strategy Group at PT Bank Mandiri (2021), Director of Sales and Product at PT Mandiri Manajemen Investasi (2015-2021), Senior Executive Vice President (SEVP) of the Head of Sales Division at PT Mandiri Management Investasi (2014-2015), Department Head of Marketing, Communication and Promotion at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011-2014)

Dasar Hukum Pengangkatan

RUPS Sirkuler tanggal 1 Juli 2024

Legal Basis of Appointment

Circular GMS dated July 1, 2024

Periode Jabatan

Periode Pertama, 2021-2025

Term of Office

First Period, 2021-2025

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan sesama anggota Direksi lainnya dan dengan anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Affiliation

Has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Majority and Controlling Shareholders

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power

- Pengarah Komite *Sustainability*
- Anggota Komite Investasi

Concurrent Position at PLN Indonesia Power

- Steering Committee of Sustainability Committee
- Member of Investment Committee

Rangkap Jabatan Pada Perusahaan Lain

Tidak ada

Concurrent Position at Other Companies

None

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham

Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Governansi sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini

Statement of Independence, Training, and Share Ownership

Presented separately in Corporate Governance, under a sub-chapter of the Board of Directors of this Annual Report





57 tahun per 31 Desember 2024/Kediri, 21 Juni 1967

57 years old as of December 31, 2024/ Kediri, June 21, 1967



Jakarta, Indonesia

Jakarta, Indonesia



Indonesia

Indonesia



Wisnoe Satrijono

Direktur Manajemen Human
Capital dan Administrasi

Director of Human Capital
Management and Administration

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Psikologi dari Universitas Gadjah Mada (1993)
- Magister Manajemen Bidang Lainnya dari Institut Teknologi Bandung (2002)

Educational Background

- Master of Management from Institut Teknologi Bandung (2002)
- Bachelor of Psychology from Universitas Gadjah Mada (1993)

Sertifikasi

- Sertifikasi Kompetensi Keinstrukturan Basic (INS) (3) Level 3 SKKNI
- *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)

Certifications

- Basic Instructional Competency Certification (INS) (3) Level 3 SKKNI
- *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN Indonesia Power, pernah menjabat sebagai Executive Vice President Strategi Human Capital PT PLN (Persero) (2021-2022), Executive Vice President Organization Development PT PLN (Persero) (2020-2021), Executive Vice President Change Management Office PT PLN (Persero) (2019-2020), General Manager PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (2016-2018) dan Manajer Eksekutif Direksi PT PLN (Persero) (2014)

Position History/Work Experience

Prior to serving as Director of Human Capital Management and Administration at Indonesia Power, he also served as Executive Vice President of Human Capital Strategy at PT PLN (Persero) (2021-2022), Executive Vice President of Organization Development at PT PLN (Persero) (2020-2021), Executive Vice President of Change Management Office PT PLN (Persero) (2019-2020), General Manager at PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (2016-2018), and Executive Manager of the Board of Directors at PT PLN (Persero) (2014)

Dasar Hukum Pengangkatan

RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022

Legal Basis of Appointment

Circular GMS dated September 21, 2022

Periode Jabatan

Periode Pertama, 2022-2026

Term of Office

First Period, 2022-2026

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan sesama anggota Direksi lainnya dan dengan anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Affiliation

Has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Majority and Controlling Shareholders

Rangkap Jabatan di PLN Indonesia Power

- Pengarah Komite *Sustainability*
- Anggota Komite Investasi

Concurrent Position at PLN Indonesia Power

- Steering Committee of Sustainability Committee
- Member of Investment Committee

Rangkap Jabatan Pada Perusahaan Lain

Tidak ada

Concurrent Position at Other Companies

None

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham

Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Governansi sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini

Statement of Independence, Training, and Share Ownership

Presented separately in Corporate Governance, under a sub-chapter of the Board of Directors of this Annual Report



Informasi Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2024 dan Setelah Tahun Buku 2024

Information on Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2024 Fiscal Year and After the 2024 Fiscal Year

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Sepanjang tahun buku 2024 tidak terdapat pergantian anggota Dewan Komisaris di lingkungan PLN Indonesia Power. Namun telah terjadi perubahan nomenklatur Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara Sirkuler tanggal 29 Februari 2024 dan telah mendapatkan persetujuan Menteri BUMN berdasarkan Surat Nomor: SR-76/MBU/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Usulan Perubahan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai berikut:

1. Pengalihan nomenklatur Sdr. Wiluyo Kusdiharto yang diangkat melalui RUPS Perseroan tanggal 21 September 2022 semula sebagai Komisaris Utama menjadi Komisaris Perseroan.
2. Pengalihan nomenklatur Sdr. Iskandar Simorangkir yang diangkat melalui RUPS Perseroan tanggal 09 Februari 2021, semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
3. Pengalihan nomenklatur Sdr. Haryanto WS yang diangkat melalui RUPS Perseroan tanggal 21 September 2022 semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Independen Perseroan.

Setelah berakhirnya tahun 2024, hingga batas waktu penyampaian Laporan Tahunan ini terjadi perubahan di jajaran Dewan Komisaris yang ditetapkan melalui Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara Sirkuler tertanggal 23 April 2025. Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan

Throughout the 2024 fiscal year, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners of PLN Indonesia Power. However, there was a change in the nomenclature of the Board of Commissioners based on the Circular Shareholders Resolution in lieu of the General Meeting of Shareholders (GMS) dated February 29, 2024 and approved by the Minister of SOEs through Letter Number: SR-76/MBU/02/2024 dated February 12, 2024 on the Proposed Changes in Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), as follows:

1. Reassignment of nomenclature for Mr. Wiluyo Kusdiharto, who was appointed initially as President Commissioner based on the Company's GMS dated September 21, 2022, to be a Commissioner of the Company.
2. Reassignment of nomenclature for Mr. Iskandar Simorangkir, who was appointed initially as Commissioner based on the Company's GMS dated February 09, 2021, to be an Independent Commissioner of the Company.
3. Reassignment of nomenclature for Mr. Haryanto WS, who was appointed initially as Commissioner based on the Company's GMS dated September 21, 2022, to be an Independent Commissioner of the Company.

After the end of 2024, until the deadline for submitting this Annual Report, there was a change in the Board of Commissioners as stipulated under Shareholders' Circular Resolutions outside the General Meeting of Shareholders (GMS) dated April 23, 2025. This change is a follow-up to the enactment of Law No. 1 of 2025 on the Third Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, which



Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur mengenai larangan rangkap jabatan bagi anggota Direksi BUMN dalam ketentuan Pasal 15B UU BUMN. Berdasarkan ketentuan tersebut Bapak Wiluyo Kusdiharto diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris PLN Indonesia Power.

Selain itu, Pemegang Saham juga menetapkan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara Sirkuler terkait masa jabatan Sdr. Iskandar Simorangkir sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan yang dinyatakan telah berakhir. Selanjutnya menetapkan yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan, dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan ini berlaku efektif sejak 9 Februari 2025 hingga ditetapkannya Komisaris Utama definitif oleh Pemegang Saham, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehingga komposisi Dewan Komisaris sampai dengan laporan ini disahkan adalah sebagai berikut:

Iskandar Simorangkir : Pelaksana Tugas Komisaris Utama
merangkap Komisaris Independen

Djoko Siswanto : Komisaris
M.P Dwinugroho : Komisaris
Arief Budiman : Komisaris
Haryanto W. S : Komisaris Independen
Lukmanul Hakim : Komisaris Independen

regulates the prohibition of concurrent positions for Board of Directors' members of SOEs under the provisions of Article 15B of the SOE Law. Based on these provisions, Mr. Wiluyo Kusdiharto was honorably dismissed as Commissioner of PLN Indonesia Power.

Furthermore, the Shareholders also established Shareholders' Circular Resolution Outside the GMS (Circular) on the term of office of Mr. Iskandar Simorangkir as the Company's President Commissioner and Independent Commissioner, which was declared to have ended. The Resolution also established the person concerned as the Acting President Commissioner and Independent Commissioner of the Company, with the authority, duties, and responsibilities in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. This Resolution is effective from February 9, 2025 until the definitive President Commissioner is determined by the Shareholders, without prejudice to the General Meeting of Shareholders rights to dismiss at any time in accordance with applicable provisions.

Thus, the Board of Commissioners' composition until this report is ratified is as follows:

Iskandar Simorangkir : Acting President Commissioner
concurrently Independent
Commissioner

Djoko Siswanto : Commissioner
M.P Dwinugroho : Commissioner
Arief Budiman : Commissioner
Haryanto W. S : Independent Commissioner
Lukmanul Hakim : Independent Commissioner

Direksi Board of Directors

Sepanjang tahun buku 2024, tidak terdapat pergantian anggota Direksi di lingkungan PLN Indonesia Power. Namun, dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Perubahan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap ketentuan tata kelola dan pengelolaan risiko di lingkungan BUMN, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 1 Juli 2024. Penyesuaian ini juga merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 serta Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, dengan dukungan persetujuan dari Dewan Komisaris PT PLN (Persero) atas penerapan struktur pengelola risiko di *Subholding* dan Anak Perusahaan.

Dengan demikian komposisi anggota Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Edwin Nugraha Putra	: Direktur Utama
M. Hanafi Nur Rifa'i	: Direktur Operasi Pembangkit Batubara
Djoko Mulyono	: Direktur Operasi Pembangkit Gas
Bernadus Sudarmanta	: Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Wisnoe Satrijono	: Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Endang Astharanti	: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Setelah berakhirnya tahun 2024, hingga batas waktu penyampaian Laporan Tahunan ini, tidak terjadi perubahan komposisi Direksi PLN Indonesia Power. Dengan demikian jumlah Direksi PLN Indonesia Power tetap 6 (enam) orang.

Throughout the 2024 financial year, there were no changes in the Board of Directors' members in PLN Indonesia Power. However, an adjustment was made to the nomenclature of position Director of Finance to Director of Finance and Risk Management. This change is a form of adjustment to the provisions of governance and risk management within SOE, which was based on the Shareholders' Circular Resolutions Outside the GMS (Circular) dated July 1, 2024. This adjustment also refers to the Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 and the Decree of Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of SOE, with the support of approval from the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) for the implementation of risk management structure in Subholding and Subsidiaries.

Thus, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

Edwin Nugraha Putra	: President Director
M. Hanafi Nur Rifa'i	: Director of Coal Plant Operations
Djoko Mulyono	: Director of Gas Plant Operations
Bernadus Sudarmanta	: Director of Business Development and Commerce
Wisnoe Satrijono	: Director of Human Capital Management and Administration
Endang Astharanti	: Director of Finance and Risk Management

After the end of 2024, until the deadline for submitting this Annual Report, there were no changes in the composition of the Board of Directors of PLN Indonesia Power. Accordingly, the number of Board members remains at 6 (six).



Statistik Jumlah Pegawai PLN Indonesia Power

PLN Indonesia Power Employee Statistics

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan

Employee Composition By Position Level

Pada tahun 2024, komposisi pegawai PLN Indonesia Power berdasarkan jenjang jabatan didominasi oleh level Penyelia, yang mencapai sebanyak 3.985 pegawai atau sekitar 73,59% dari total seluruh pegawai. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023, yakni naik sebanyak 351 pegawai dari sebelumnya 3.634 orang. Sebagian besar pegawai pada jenjang ini berada di unit pembangkit dan *Head Office*.

In 2024, the composition of PLN Indonesia Power's employees based on position level was predominantly at the Supervisor level, totaling 3,985 employees or approximately 73.59% of the total employees. This amount reflects a significant increase compared to 2023, with an addition of 351 employees from the previous total of 3,634 employees. The majority of employees at this level are assigned to power generation units and the Head Office.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2021-2024

Employee Composition by Position Level in 2021-2024

Jenjang Jabatan Position Level	2021	2022	2023	2024	Perubahan 2023 ke 2024 Change from 2023 to 2024
Direksi Board of Directors	6	6	6	6	0
Eksekutif Utama Chief Executive	8	8	9	12	3
Eksekutif Senior Senior Executive	87	91	99	90	-9
Eksekutif Executive	283	295	310	320	10
Penyelia Supervisor	2.427	2.582	3.634	3.985	351
Pelaksana Officer	1.416	1.213	1.400	1.002	-398
Jumlah Total *	4.227	4.195	5.458	5.415	-43

* Termasuk Direksi, namun Direksi tidak termasuk ke dalam enam kategori Jenjang Jabatan yang ada di PLN Indonesia Power
Including the Board of Directors, although the Board of Directors do not belong to any of the position levels at PLN Indonesia Power

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Employee Composition By Age

Pada tahun 2024, komposisi pegawai PLN Indonesia Power berdasarkan usia didominasi oleh kelompok usia produktif yang biasa dikenal dengan generasi milenial dalam rentang usia 26-35 tahun sebanyak 58,74% dari total seluruh pegawai PLN Indonesia Power.

In 2024, the employee composition of PLN Indonesia Power by age was dominated by the productive age group commonly referred to as the millennial generation, specifically those aged 26-35 years old, accounting for 58.74% of the total employees of PLN Indonesia Power.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2021-2024

Employee Composition by Age in 2021-2024

Usia (Tahun) Age (Years Old)	2021	2022	2023	2024	Perubahan 2023 ke 2024 Change from 2023 to 2024
19-25	222	74	95	78	-17
26-30	1.542	1.462	1.695	1.304	-391
31-35	897	1.017	1.617	1.873	256
36-40	587	643	758	854	96
41-45	133	175	334	414	80
46-50	423	367	322	212	-110
51-54	366	392	521	538	17
>55	51	59	110	136	26
Jumlah Total	4.221	4.189	5.452	5.409	-43

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Composition By Education Level

Pada tahun 2024, komposisi pegawai PLN Indonesia Power berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa jenjang Sarjana (S1) mendominasi dengan total sebanyak 2.044 orang, atau sekitar 37,79% dari total pegawai. Perubahan signifikan terjadi pada tingkat pendidikan Sarjana dan Pascasarjana. Jumlah pegawai bergelar S2 meningkat sebanyak 37 orang, dan S1 bertambah 72 orang, yang mencerminkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas SDM melalui rekrutmen dan pengembangan pegawai berpendidikan tinggi. Di sisi lain, terjadi penurunan pada jenjang Diploma (-51 orang), SLTA (-98 orang), dan SLTP/SD (-2 orang), seiring dengan pergeseran kebutuhan tenaga kerja menuju orientasi yang lebih profesional dan berbasis kompetensi teknis serta manajerial.

In 2024, the employee composition of PLN Indonesia Power by education level was predominantly composed of employees holding a Bachelor's degree (S1), with a total of 2,044 individuals or approximately 37.79% of the total employees. Significant changes were observed at the Bachelor's and Master's degree levels. The number of employees with a Master's degree increased by 37 employees, and those with a Bachelor's degree increased by 72 employees, reflecting the Company's commitment to enhancing human capital quality through the recruitment and development of highly educated personnel. Conversely, a decrease was recorded in the number of employees with a Diploma (-51 employees), Senior High School (-98 employees), and Junior High School/Elementary School (-2 employees), indicating a shift in workforce needs towards more professional, technically competent, and managerially skilled talent.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021-2024

Employee Composition by Education Level in 2021-2024

Tingkat Pendidikan Education Level	2021	2022	2023	2024	Perubahan 2023 ke 2024 Change from 2023 to 2024
S3 Doctorate Degree	0	1	2	1	-1
S2 Master's Degree	162	186	231	268	37
S1 Bachelor's Degree	1.565	1.599	1.972	2.044	72
D3/D4 Diploma	1.513	1.458	1.758	1.707	-51
SLTA Senior High School	967	934	1.477	1.379	-98
SLTP/SD Junior High/Primary School	14	11	12	10	-2
Jumlah Total	4.221	4.189	5.452	5.409	-43

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Composition By Gender

Hingga akhir tahun 2024, komposisi pegawai PLN Indonesia Power masih didominasi oleh pegawai pria dengan jumlah sebanyak 4.868 orang atau setara dengan 90,00% dari total pegawai. Sementara itu, pegawai wanita berjumlah 541 orang, atau sekitar 10,00% dari keseluruhan pegawai. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan jumlah pegawai secara keseluruhan sebesar 0,79%, yaitu dari 5.452 orang pada tahun 2023 menjadi 5.409 orang di tahun 2024. Penurunan ini terdiri atas pengurangan 37 pegawai pria dan 6 pegawai Wanita, dengan rinciannya sebagai berikut:

As of the end of 2024, the employee composition of PLN Indonesia Power remained predominantly male, totaling 4,868 employees or approximately 90.00% of the total employees. Meanwhile, female employees amounting to 541 or approximately 10.00% of the total employees. Compared to the previous year, there was an overall decrease in the number of employees by 0.79%, from 5,452 employees in 2023 to 5,409 employees in 2024. This reduction consisted of a decrease of 37 male employees and 6 female employees, with details as follows:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2024

Employee Composition by Gender in 2021-2024

Jenis Kelamin Gender	2021	2022	2023	2024	Perubahan 2023 ke 2024 Change from 2023 to 2024
Pria Male	3.791	3.758	4.905	4.868	-37
Wanita Female	430	431	547	541	-6
Jumlah Total	4.221	4.189	5.452	5.409	-43

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition By Employment Status

Hingga akhir tahun 2024, jumlah pegawai tetap PLN Indonesia Power tercatat sebanyak 5.409 orang, mengalami penurunan 0,79% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 5.452 orang. Penurunan ini merupakan bagian dari proses penyesuaian organisasi dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Dari total tersebut, sebanyak 3.900 pegawai merupakan pegawai organik PLN Indonesia Power, yang berkontribusi langsung dalam operasional utama perusahaan. Sementara itu, terdapat 1.469 pegawai yang berstatus tugas karya dari PLN, dan 40 pegawai lainnya merupakan tugas karya dari Anak Perusahaan.

As of the end of 2024, the number of permanent employees at PLN Indonesia Power was recorded at 5,409, reflecting a 0.79% decrease compared to the previous year, which stood at 5,452 employees. This reduction is part of the organizational adjustment process aimed at enhancing the efficiency and effectiveness of human resource management. Of the total workforce, 3,900 employees are organic employees of PLN Indonesia Power who contribute directly to the company's core operations. Meanwhile, 1,469 employees are seconded from PLN, and 40 employees are seconded from Subsidiaries.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Pegawai Tahun 2021-2024

Employee Composition by Employment Status in 2021-2024

Status Kepegawaian Employment Status	2021	2022	2023	2024	Perubahan 2023 ke 2024 Change from 2023 to 2024
Pegawai Tetap Permanent Employee	4.221	4.189	5.452	5.409	-43
Organik PLN Indonesia Power PLN Indonesia Power Organic Employee	4.074	3.989	3.919	3.900	-19
Tugas Karya PLN PLN Seconded	107	161	1.491	1.469	-22
Tugas Karya Anak Perusahaan Subsidiary Seconded	40	39	42	40	-2
Pegawai Tidak Tetap Non-Permanent Employee	33	33	33	39	6
Outsourcing/Aliih Daya Outsourcing	8.221	8.730	11.923	12.145	222
Jumlah Total *	12.475	12.952	17.408	5.409	-142

* Pegawai Tetap ditambah dengan Pegawai tidak tetap dan Outsourcing/Aliih Daya
Permanent Employees plus Non-Permanent Employees and Outsourcing

Komposisi Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja

Employee Composition By Work Area

Jumlah pegawai aktif PLN Indonesia Power meningkat signifikan pada tahun 2023 seiring beroperasinya sejumlah unit baru, khususnya di luar Jawa. Namun, pada 2024 jumlahnya sedikit menurun menjadi 5.409 pegawai. Beberapa unit besar seperti Suralaya, Priok, dan Grati menunjukkan tren penurunan jumlah pegawai, sementara Kantor Pusat terus mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan penguatan fungsi strategis dan dukungan korporat dalam mendukung kelancaran operasi unit pembangkit. Kantor Pusat tidak lagi hanya berperan administratif, tetapi juga menjadi pusat kendali dan penggerak utama transformasi serta kinerja perusahaan.

The number of active employees at PLN Indonesia Power increased significantly in 2023 following the operation of several new units, particularly outside Java. However, in 2024, the number slightly declined to 5,409 employees. Major units such as Suralaya, Priok, and Grati showed a downward trend in employee numbers, while the Head Office continued to grow. This reflects the strengthening of strategic functions and corporate support to ensure smooth operations at power generation units. The Head Office is no longer merely administrative, but has become the control center and key driver of the company's transformation and performance.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2021-2024

Employee Composition by Work Area in 2021-2024

Wilayah Kerja Work Area	2021	2022	2023	2024	Perubahan 2023 ke 2024 Change from 2023 to 2024
Head Office	667	683	814	827	13
UBP GBU Suralaya	645	610	556	533	-23
UBP GBU Priok	315	307	299	284	-15
UBP GBU Saguling	180	178	172	165	-7
UBP GBU Kamojang	227	222	284	278	-6
UBP GBU Semarang	228	214	214	214	0
UBP GBU Mrica	152	150	137	133	-4
UBP GBU Grati	191	185	182	164	-18
UBP GBU Bali	197	200	199	189	-10
Unit Bisnis Pemeliharaan Maintenance Service Unit	335	336	376	374	-2



Wilayah Kerja Work Area	2021	2022	2023	2024	Perubahan 2023 ke 2024 Change from 2023 to 2024
UBP GBU Banten 1 Suralaya	98	95	95	90	-5
UBP GBU Banten 2 Labuan	116	114	112	113	1
UBP GBU Banten 3 Lontar	153	155	147	150	3
UBP GBU Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	140	136	127	132	5
UBP GBU Jawa Tengah 2 Adipala	104	107	104	101	-3
UBP GBU Pangkalan Susu	186	163	157	154	-3
UBP GBU Cilegon	105	101	98	98	0
UBP GBU Barro	54	51	58	58	0
UBP GBU Jeranjang	47	44	41	45	4
UBP GBU Sanggau	1	1	1	1	0
UBP GBU Sintang	1	1	1	1	0
UBP GBU Holtekamp	2	1	1	1	0
<i>Project Unit</i>	76	75	-	-	0
UBP GBU Berau	1	1	1	1	0
UBP GBU Labuhan Angin	-	-	59	60	1
UBP GBU Asam-Asam	-	-	185	184	-1
UBP GBU Teluk Sirih	-	-	92	95	3
UBP GBU Ombilin	-	-	86	93	7
UBP GBU Singkawang	-	-	104	104	0
UBP GBU Mahakam	-	-	157	150	-7
UBP GBU Keramasan	-	-	137	142	5
UBP GBU Barito	-	-	113	110	-3
UBP GBU Tello	-	-	68	68	0
UBP GBU Kepulauan Riau	-	-	46	49	3
UBP GBU Bengkulu	-	-	61	61	0
UBP GBU Jambi	-	-	77	81	4
UBP GBU Bukittinggi	-	-	77	76	-1
UBP GBU Jatigede	-	-	14	25	11
UBP GBU Papua Maluku	-	-	-	5	5
Jumlah Total	4.221	4.189	5,452	5.409	-43

Struktur Grup Perusahaan

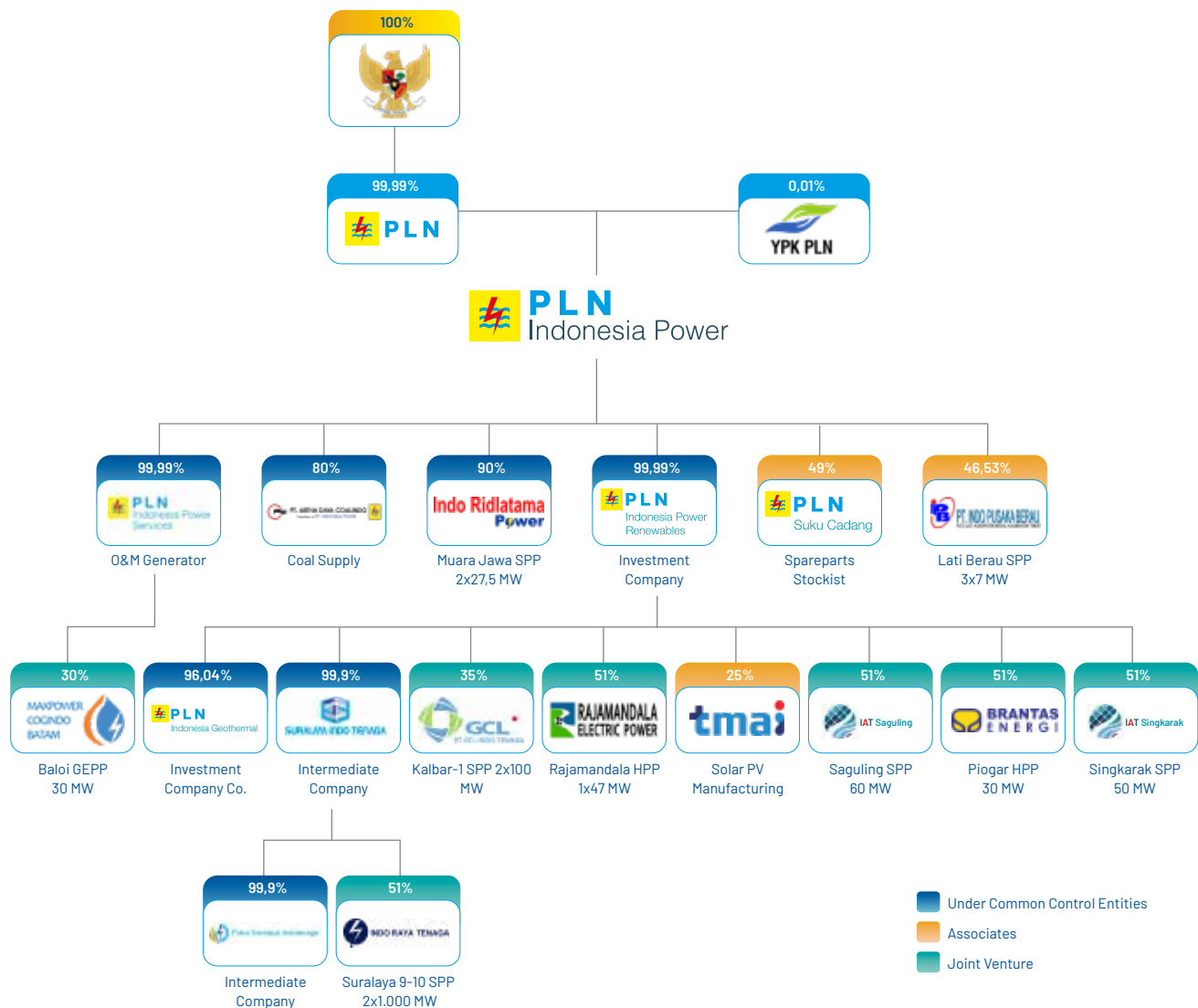
Corporate Group Structure

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan portofolio usaha secara lebih sistematis dan komprehensif, PLN Indonesia Power telah membentuk Bidang Portfolio and Subsidiaries Management di bawah Direktorat Bisnis dan Niaga yang mewadahi mekanisme hubungan *parenting* terhadap Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan maupun Perusahaan Afiliasi.

Saat ini, PLN Indonesia Power memiliki struktur grup Perusahaan yang terdiri dari 4 (empat) Anak Perusahaan, 2 (dua) Perusahaan Asosiasi, 1 (satu) Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*) di bawah PLN Indonesia Power Services serta 7 (tujuh) *Special Purpose Company* (SPC) dan 1 (satu) Anak Perusahaan di bawah PLN Indonesia Power Renewables, sebagaimana tergambar dalam struktur di bawah ini:

In order to improve the management of its business portfolio in a more systematic and comprehensive manner, PLN Indonesia Power has established the Portfolio and Subsidiaries Management Division under the Directorate of Business and Commerce, which serves as a governance platform for managing the parenting relationship with Subsidiaries, Joint Venture, and Affiliates.

Currently, PLN Indonesia Power's group structure consists of 4 (four) Subsidiaries, 2 (two) Associates, 1 (one) Joint Venture under PLN Indonesia Power Services, as well as 7 (seven) Special Purpose Companies (SPCs), and 1 (one) Subsidiary under PLN Indonesia Power Renewables, as illustrated in the following structure:





PT Perta Daya Gas telah dialihkan ke PT PLN Energi Primer Indonesia sebagai tindak lanjut HSH PLN Group mendukung keselarasan strategi pengembangan bisnis PT PLN (Persero) pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagaimana Akta Jual Beli Saham No. 83 oleh Notaris Syahreza Annaz, S.H., M.Kn

Anak Perusahaan merupakan suatu perusahaan yang dikendalikan oleh PLN Indonesia Power, memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional anak perusahaan untuk memperoleh manfaat dari aktivitas Anak Perusahaan tersebut.

Perusahaan Joint Venture (Perusahaan Patungan) merupakan perusahaan bersama dimana para pihak mempunyai bagian partisipasi, dan diatur oleh persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas. Pada perusahaan ini, keputusan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitasnya, dipersyaratkan secara konsensus dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Perusahaan Asosiasi merupakan suatu perusahaan dimana Indonesia Power mempunyai pengaruh signifikan, dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Sedangkan definisi "Pengaruh Signifikan" adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional, tetapi tidak mengendalikan maupun mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Special Purpose Company (SPC) adalah suatu perusahaan yang dibentuk untuk melakukan aktivitas khusus dengan tujuan atau fokus yang terbatas. Perusahaan ini biasanya, dimiliki hampir sepenuhnya oleh badan hukum yang menjadi sponsornya.

PLN Indonesia Power mengelompokkan portofolio Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Afiliasi sesuai dengan aktivitas, proses bisnis dan misi strategisnya agar semakin fokus dalam memberikan kinerja yang optimal. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka mendorong Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Afiliasi untuk berkontribusi pada keseluruhan rantai nilai bidang usaha ketenagalistrikan, sebagai upaya mendukung penciptaan nilai Perusahaan bagi PT PLN (Persero) dan segenap pemangku kepentingan.

PT Perta Daya Gas was transferred to PT PLN Energi Primer Indonesia as part of the follow-up to PLN Group's HSH initiative in support of the business development strategy alignment of PT PLN (Persero) dated October 29, 2024, pursuant to the Share Sale and Purchase Deed No. 83 executed before Notary Syahreza Annaz, S.H., M.Kn.

A **Subsidiary** is a company controlled by PLN Indonesia Power, which holds the authority to govern its financial and operational policies to derive benefits from the activities of the Subsidiary.

A **Joint Venture** is an entity jointly owned by two or more parties, each holding a share of participation and bound by an agreement to share control over a particular activity. In this type of company, the strategic financial and operational decisions that influence its activities must be made by all controlling parties through consensus.

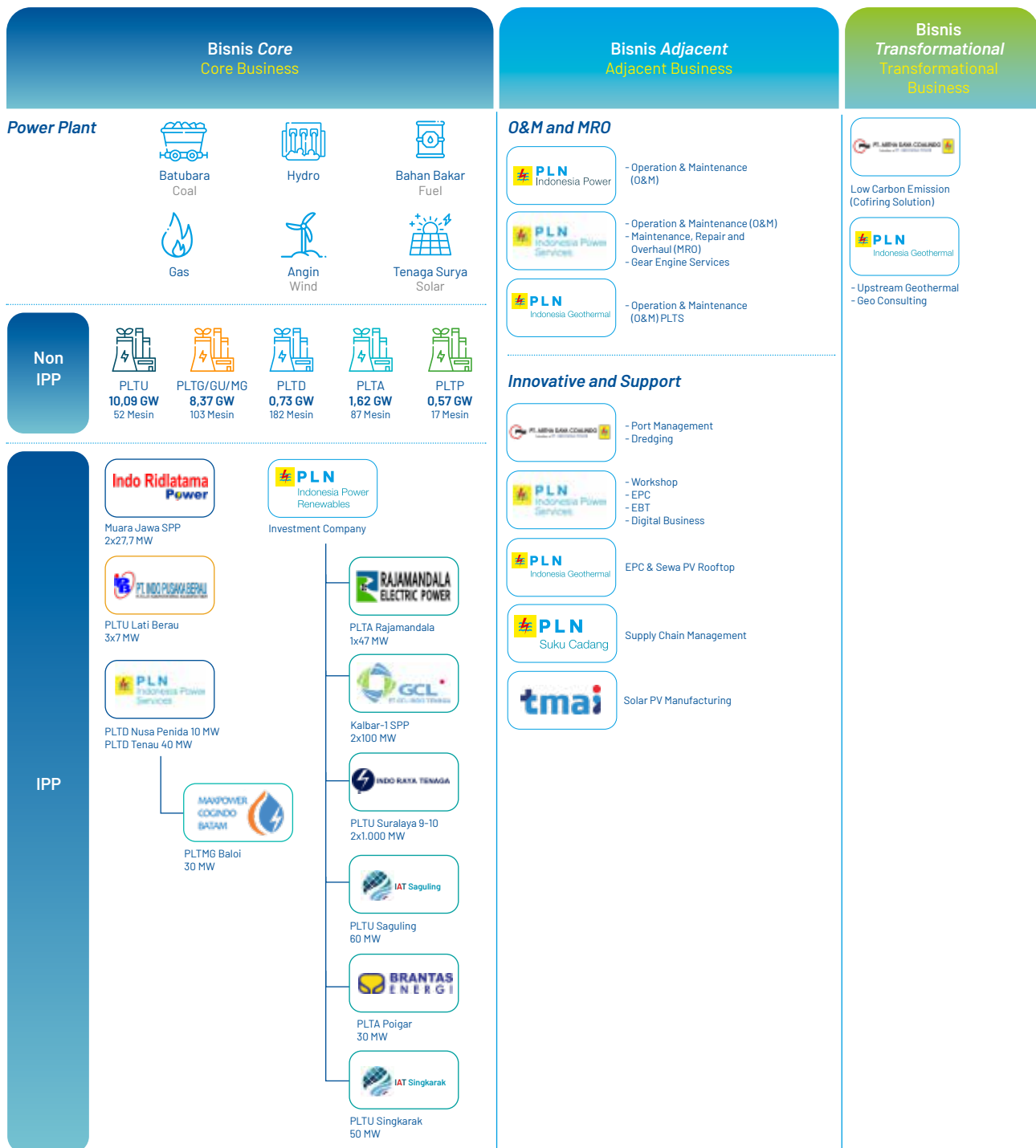
An **Associate** is an entity under PLN Indonesia Power's significant influence but is neither a subsidiary nor a joint venture interest. "Significant influence" here is defined as the authority to participate in the financial and operational policy decision-making, without any control or joint control over such policy.

A **Special Purpose Company (SPC)** is an entity established to perform certain activities with limited objective or focus. This type of company is commonly owned almost entirely by its sponsor legal entity.

PLN Indonesia Power classifies its portfolio of Subsidiaries, Joint Ventures, and Affiliates according to their activities, business processes, and strategic missions to ensure a more focused and optimized performance. This classification aims to encourage these entities to contribute across the entire value chain of the electricity sector, in support of value creation for PT PLN (Persero) and the stakeholders.

Skema Sinergi dan *Alignment* PLN Indonesia Power Group

Scheme of PLN Indonesia Power Group Synergy and Alignment



Daftar Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi

List of Subsidiaries, Joint Ventures, and Associates

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, PLN Indonesia Power melakukan konsolidasi laporan keuangan Anak Perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, yang terdiri dari:

As of December 31, 2024, PLN Indonesia Power consolidated the financial statements of its Subsidiaries, both directly and indirectly owned, which consist of the following entities:

Anak Perusahaan

Subsidiaries

No	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	% Kepemilikan Saham % Shareholding	Bidang Usaha Line of Business
1	PT PLN Indonesia Power Services*	15 April 1998 April 15, 1998	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office Gedung COGINDO Jl. Raya Pasar Minggu No.190 Jakarta 12510 ☎(62 - 21) 217 89990 ☎(62 - 21) 217 89990 ✉info@plnip-services.co.id 🌐www.plnip-services.co.id	PLN IP: 99,99% YPK IP: 0,01%	Energi ketenagalistrikan; operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik, serta co-generation dengan kegiatan usaha: a. Penjualan tenaga listrik b. Operation & Maintenance(OM) services c. Maintenance, Repair and Overhaul(MRO) Service dan Stockist d. Sewa genset Electricity power, power plant operations and maintenance, and co-generation, with the following business activities: a. Electricity sales b. Operations & Maintenance (O&M) services c. Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) services and Stockist d. Power generator rental
2	PT Artha Daya Coalindo	21 Oktober 1997 October 21, 1997	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan ☎(62-21) 520 3725 ✉support@arthadayacoalindo.co.id 🌐www.arthadayacoalindo.co.id	PLN IP: 80% PT Desira Pratama Lines: 10% PT Artindo Utama: 10%	Perdagangan, penambangan, pengangkutan, bongkar muat, pemasaran dan keagenan batubara, dengan kegiatan usaha: a. Penjualan Batubara b. Port Management c. O&M Kapal Keruk d. Penyediaan Biomass Coal trade, mining, transport, loading-unloading, marketing, and agency, with the following business activities: a. Coal sales b. Port management c.Dredger vessel O&M d. Biomass provision
3	PT Indo Ridlatama Power	28 September 2007 September 28, 2007	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18, Lt. 10 Jakarta Selatan 12760 ☎(62 21) 2503 1409 ✉- 🌐www.indoridlatamapower.com Kantor Pembangkit Power Plant Office J. Moh. Hatta RT 023 Handil II, Muara Jawa Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur	PLN IP: 90% PT Ridlatama Bangun Mandiri: 10%	Pembangkitan tenaga listrik melalui perusahaan PLTU Muara Jawa 2x27,5 MW di Muara Jawa Kalimantan Timur Power generation through management of Muara Jawa SPP 2x27.5 MW in Muara Jawa, East Kalimantan

No	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	% Kepemilikan Saham % Shareholding	Bidang Usaha Line of Business
4	PT PLN Indonesia Power Renewables**	20 Desember 2013 December 20, 2013	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18 Lt. 2 Jakarta Selatan ☎ (62 21) 526 7666 📠 (62 21) 525 2623 ✉ sek.iprenewables@plnindonesiapower.co.id 🌐 www.plnindonesiapowerrenewables.co.id	PLN IP: 99,99% YPK IP: 0,01%	<i>Participating interest</i> , yaitu sebagai Anak Perusahaan Indonesia Power yang ditetapkan <i>unrestricted</i> terhadap <i>Indenture Covenant Global Bond</i> , untuk keperluan pendanaan proyek, dengan kegiatan usaha: a. Penyertaan pada PT Rajamandala Electric Power untuk pengembangan PLTA Rajamandala 47 MW b. Penyertaan pada PT GCL Indo Tenaga untuk pengembangan PLTU Kalbar-1 2x100 MW c. Penyertaan pada PT Suralaya Indo Tenaga sebagai <i>intermediate company</i> atas PT Indo Raya Tenaga dalam rangka pengembangan PLTU Suralaya 9-10 2x1.000 MW d. Penyertaan pada PT PLN Indonesia Geothermal (ex PT Indo Tenaga Hijau) untuk pengembangan EBT dan Pengembangan PLTP PLN Grup e. Penyertaan pada PT Trina Mas Agra Indonesia untuk pengembangan <i>Solar Manufacture</i> Participating interest, i.e. as a Subsidiary of PLN Indonesia Power that is defined as <i>unrestricted</i> to Indenture Global Bond Covenant for project funding, with the following business activities: a. Equity participation in PT Rajamandala Electric Power for development of Rajamandala HPP 47 MW b. Equity participation in PT GCL Indo Tenaga for development of Kalbar-1 SPP 2x100 MW c. Equity participation in PT Suralaya Indo Tenaga as intermediate company of PT Indo Raya Tenaga for development of Suralaya SPP 9-10 2x1,000 MW d. Equity participation in PT PLN Indonesia Geothermal (formerly PT Indo Tenaga Hijau) for development of NRE-based power plants and geothermal power plants of PLN Group e. Equity participation in PT Trina Mas Agra Indonesia for solar manufacture development

* PT PLN Indonesia Power Services, sebelumnya bernama PT Cogindo DayaBersama telah berubah nama berdasarkan Akta No. 08 tanggal 19 April 2024; SK Kemenkumham No. AHU-0084932.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024

** PT PLN Indonesia Power Renewables sebelumnya bernama PT Putra Indotenaga telah berubah nama berdasarkan Akta Notaris tanggal 3 Agustus 2023

* PT PLN Indonesia Power Services, formerly known as PT Cogindo DayaBersama, changed its name pursuant to Deed No. 08 dated April 19, 2024; Ministry of Law and Human Rights Decree No. AHU-0084932.AH.01.11.Tahun2024 dated May 2, 2024.

** PT PLN Indonesia Power Renewables, formerly known as PT Putra Indotenaga, changed its name pursuant to Notarial Deed dated August 3, 2023.

Adapun Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi yang dimiliki PLN Indonesia Power sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the followings are the Joint Venture and Associates owned by PLN Indonesia Power as of the end of 2024:



Perusahaan Patungan

Joint Venture

No	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	% Kepemilikan Saham % Shareholding	Bidang Usaha Line of Business
1	PT Perta Daya Gas*	26 April 2012 April 26, 2012	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office Komplek Pelabuhan Tanjung Emas Jl. Ronggo Warsito No.1 Semarang, Jawa tengah ☎ (024) 86570237 ✉ mail@pertadayagas.co.id 🌐 www.pertadayagas.co.id Kantor Perwakilan Jakarta Jakarta Representative Office Gedung The East Lt. 11, Unit 02 & 05 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung No. 1 Jakarta Selatan 12950 ☎ (021) 295-270-78	PLN IP: 35% PT Pertamina Gas: 65%	Transportasi LNG melalui darat dan laut, penyimpanan dan regasifikasi LNG, serta usaha lain terkait industri gas bumi. Kegiatan usaha: a. CNG Plant PLTGU Tambak Lorok Semarang b. FSRU di Bali c. Gasifikasi di PLTMG Sorong Land and sea Transport of LNG, LNG storage and regasification, and other businesses related to the natural gas industry Business Activities: a. CNG Plant at CCPp Tambak Lorok Semarang b. FSRU in Bali c. Gasification in PLTMG Sorong

* PT Perta Daya Gas telah dialihkan ke PT Energi Primer Indonesia sebagai tindak lanjut HSH PLN Group mendukung keselarasan strategi pengembangan bisnis PT PLN (Persero) pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagaimana Akta Jual Beli Saham No. 83 oleh Notaris Syahreza Annaz, S.H., M.Kn

* PT Perta Daya Gas was transferred to PT Energi Primer Indonesia as a follow-up to the PLN Group's Holding-Subholding (HSH) initiative in support of the business development strategy alignment of PT PLN (Persero), as stated in Share Sale and Purchase Deed No. 83 dated October 29, 2024, executed before Notary Syahreza Annaz, S.H., M.Kn.

Perusahaan Asosiasi

Associates

No	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	% Kepemilikan Saham % Shareholding	Bidang Usaha Line of Business
1	PT Indo Pusaka Berau	12 Januari 2005 January 12, 2005	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office Jl. Pemuda No. 356 Tanjung Redeb, Berau 77311 Kalimantan Timur ☎ (62 554) 2021672 (62 554) 2021691 ☎ (62 554) 2027003 ✉ secretary@ipb.co.id 🌐 www.ipb.co.id Kantor Perwakilan Jakarta Jakarta Representative Office Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18 Lt. 2 Jakarta Selatan ☎ (62 21) 525 0912 ☎ (62 21) 525 0912	Pemkab Berau: 49,48% PLN IP: 46,53% Jasin Effrin Jaya: 3,99%	Pembangkitan tenaga listrik, melalui perusahaan PLTU Lati 3 x 7 MW di Tanjung Redeb, Berau Kalimantan Timur Power generation, through management of Lati SPP 3x7 MW in Tanjung Redeb, Berau, East Kalimantan
2	PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	16 Juni 2017 June 16, 2017	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office Recapital Building Lt. 3 Jl. Adityawarman No. 55 Jakarta Selatan 12160 ☎ (62 21) 724 6184 ☎ (62 21) 739 8581 ✉ email@pln.sc.co.id 🌐 www.plnsc.co.id	PLN IP: 49% PNP: 51%	a. Perdagangan barang dan jasa yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, penyediaan <i>spare parts</i> pembangkit b. <i>E-commerce</i> di bidang <i>supply chain</i> management c. <i>Jasa Reverse engineering</i> d. <i>Jasa Konsultan</i> a. Electricity-related goods and service trade, power plant spare parts provision b. E-commerce in supply chain management c. Reverse engineering service d. Consultant service

PT PLN Indonesia Power Renewables merupakan Anak Perusahaan PLN Indonesia Power yang ditetapkan sebagai *unrestricted subsidiary* terhadap *Indenture Covenant Global Bond* PT PLN (Persero). Dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan pembangkit baru, PLN Indonesia Power membentuk 1 (satu) Anak Perusahaan dan 7 (tujuh) *Special Purpose Company* di bawah PT PLN Indonesia Power Renewables yang fokus dalam melaksanakan penugasan dalam rangka proyek pembangkitan serta pengembangan energi baru dan/atau terbarukan (EBT) sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pembentukannya, yang terdiri dari:

PT PLN Indonesia Power Renewables, is a subsidiary of PLN Indonesia Power that has been designated as an unrestricted subsidiary under the Indenture Covenant of PT PLN (Persero)'s Global Bond. In order to support the accelerated development program for new power plants, PLN Indonesia Power established 1 (one) Subsidiary and 7 (seven) Special Purpose Companies under PT PLN Indonesia Power Renewables that focus on carrying out assignments in the context of generation projects and the development of new and/or renewable energy (NRE) as mandated in the purpose of its formation, consisting of:

Afiliasi dari Anak Perusahaan (Anak Perusahaan di bawah PT PLN Indonesia Power Renewables)

Affiliate of Subsidiary (Subsidiary under PT PLN Indonesia Power Renewables)

No	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	% Kepemilikan Saham % Shareholding	Bidang Usaha Line of Business
1	PT PLN Indonesia Geothermal *	10 Desember 2019 December 10, 2019	Beroperasi In operation	Menara Bidakara Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (62-21) 252 3005 - sekretariat@ plnindonesiageothermal.co.id www. plnindonesiageothermal.co.id	PLN IPRen: 96,04% YPK IP: 3,94%	Pengusahaan energi baru dan/ atau terbarukan, Jasa Penunjang ketenagalistrikan serta Perdagangan dan jasa terkait ketenagalistrikan berbasis energi dan/atau terbarukan New and/or renewable energy management, electricity Supporting Services, and new and/or renewable energy-based electricity- related trade and services.

* PT PLN Indonesia Geothermal sebelumnya bernama PT Indo Tenaga Hijau telah berubah nama berdasarkan Akta Notaris tanggal 18 September 2023 dan sebelumnya PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP) yang telah berubah nama lebih dulu berdasarkan Akta Notaris tanggal 7 November 2017

* PT PLN Indonesia Geothermal, formerly known as PT Indo Tenaga Hijau, changed its name pursuant to the Notarial Deed dated September 18, 2023, and was previously known as PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP), which had earlier changed its name pursuant to the Notarial Deed dated November 7, 2017.



Special Purpose Company di bawah PT PLN Indonesia Power Renewables

Special Purpose Company under PT PLN Indonesia Power Renewables

No	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	% Kepemilikan Saham Shareholding	Bidang Usaha Line of Business
1	PT Rajamandala Electric Power	14 Februari 2012 February 14, 2012	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office Wisma PMI Lt.2 Suite 202 Jalan Wijaya I No. 63 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170 ☎ (62 21) 726 5145 📠 (62 21) 727 9370 ✉ admin@rajamandala-power.com 🌐 www.rajamandala-power.com Kantor Pembangkit Power Plant Office PLTA SPP Rajamandala Jl. PLTA Rajamandala, Kp. Bantarcaringin, Desa Cihea, RT 4 RW 10, Kecamatan Haurwangi, Kab.Cianjur, Jawa Barat 43283	PLN IPRen: 51% KPIC Netherland BV (Kansai): 49%	Pembangkit tenaga listrik melalui pengoperasian PLTA Rajamandala 1x47 MW (COD sejak 12 Mei 2019) Electricity generation via operation of HPP Rajamandala 1x47 MW (COD on May 12, 2019)
2	PT GCL Indotenaga	25 Februari 2016 February 25, 2016	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office SOHO Capital Building Lt. 23, Unit 05, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat ☎ (62 21) 3003 3370 Kantor Pembangkit Power Plant Office PLTU SPP Kalbar-1 Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang Kalimantan Barat	PLN IPRen: 35% Taicang Harbour Golden Concord Limited (GCL): 65%	Didirikan khusus untuk mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara PLTU Kalbar-1 2 x 100 MW Especially established to develop, operate, and maintain SPP Kalbar-1 2x100 MW
3	PT Indo Raya Tenaga	15 Maret 2017 March 15, 2017	Belum Beroperasi Not yet in operation	Kantor Pusat Head Office Sentral Senayan II, Lt. 17 Suite 217B Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat 10270 ☎ (62 21) 5790 0202 📠 (62 21) 5790 0208 ✉ info@irt.co.id 🌐 www.irt.co.id Kantor Pembangkit Power Plant Office PLTU SPP Jawa 9-10 Jl.Yos Sudarso Kelurahan Suralaya Merak Cilegon – Banten 42439	PT Putra Suralaya Indotenaga: 51% Barito Wahana Lestari (BWL): 49%	Pembangkitan tenaga listrik melalui pengembangan PLTU Suralaya 9-10 kapasitas 2x1000 MW Power generation through the development of SPP Suralaya 9-10 2x1,000 MW
	a. PT Suralaya Indo Tenaga*	15 November 2019 November 15, 2019	Belum Beroperasi Not yet in operation	Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18, Lt. 2, Jakarta Selatan ☎ (62 21) 526 7666	PT PIT: 99,8% YPK PT Indonesia Power: 0,2%	<i>Intermediate Company</i> dalam rangka pengembangan PLTU Jawa 9-10 kapasitas 2x1000 MW Intermediate company in the development of Java 9-10 SPP 2x1,000 MW
	b. PT Putra Suralaya Indotenaga*	15 November 2019 November 15, 2019	Belum Beroperasi Not yet in operation	Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18, Lt. 2, Jakarta Selatan ☎ (62 21) 526 7666	PLN IPRen: 99,8% PT Energi Prima Nusantara: 0,2%	<i>Intermediate Company</i> dalam rangka pengembangan PLTU Jawa 9-10 kapasitas 2x1000 MW Intermediate company in the development of Java 9-10 SPP 2x1,000 MW

No	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	% Kepemilikan Saham % Shareholding	Bidang Usaha Line of Business
4	PT Trina Mas Agra Indonesia	09 Oktober 2023 October 09, 2023	Beroperasi In operation	Jl. Indraprasta No. 6 Kawasan Industri Kendal Desa Wonorejo Kab. Kendal 51372	PLN IPRen: 25% PT Trina Dian Agra Energi: 75%	Manufaktur Sel dan Modul <i>Solar PV</i> Manufacturing of solar PV cell and module
5	PT Indo ACWA Tenaga Saguling	31 Maret 2023 March 31, 2023	Belum Beroperasi Not yet in operation	Pondok Indah Office Tower 5 Lt.16 Suite 1607 - 1608, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Pinang, Kabayoran Lama, Jakarta Selatan 12310	PLN IPRen: 51% PT Acwa Power Indonesia: 49%	Pembangkit tenaga listrik melalui pengembangan PLTS Saguling 60 MW SoPP Saguling with a capacity of 60 MW
6	PT Minahasa Brantas Energi	25 November 2013 November 25, 2013	Belum Beroperasi Not yet in operation	D.I Panjaitan Kav. 14 Jakarta 13340 ☎ 021 29613918	PLN IPRen: 51% PT Brantas Energy: 49%	Pembangkit tenaga listrik melalui pengembangan PLTA Poigar 2x15 MW HPP Poigar with a capacity of 2x15 MW
7	PT Indo ACWA Tenaga Singkarak	31 Maret 2023 March 31, 2023	Belum Beroperasi Not yet in operation	Pondok Indah Office Tower 5 Lt.16 Suite 1607 - 1608, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Pinang, Kabayoran Lama, Jakarta Selatan 12310	PLN IPRen: 51% PT Acwa Power Indonesia: 49%	Pembangkit tenaga listrik melalui pengembangan PLTS Singkarak 60 MW SoPP Singkarak with a capacity of 60 MW

* **Intermediate Company**
PT Suralaya Indo Tenaga (SIT) dan PT Putra Suralaya Indotenaga (PSI) merupakan entitas yang berada di bawah naungan IP Renewables, dan dibentuk sebagai bagian dari struktur *intermediate company* dalam pengembangan Proyek PLTU Jawa 9-10 berkapasitas 2x1.000 MW yang berlokasi di Suralaya, Banten. Proyek ini termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional di sektor ketenagalistrikan dan dikembangkan melalui skema *Independent Power Producer (IPP)*.

* **Intermediate Company**
PT Suralaya Indo Tenaga (SIT) dan PT Putra Suralaya Indotenaga (PSI) are entities under IP Renewables, established as part of the intermediate company structure for the development of the Java 9-10 SPP Project with a total capacity of 2x1,000 MW, located in Suralaya, Banten. This project is listed among the National Strategic Projects in the electricity sector and is being developed under the Independent Power Producer (IPP) scheme.

Informasi Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada Entitas Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Afiliasi

Information on the Composition of Board of Directors and Board of Commissioners in Subsidiaries, Joint Ventures, Associates, and Affiliates

Berikut adalah Profil Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan pada Entitas Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Afiliasi PLN Indonesia Power per 31 Desember 2024:

The following is the Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors of Subsidiaries within the Subsidiaries, Joint Ventures, and Affiliates of PLN Indonesia Power as of December 31, 2024:

Anak Perusahaan Subsidiaries

Nama Perusahaan Company Name	Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 BOD Composition by December 31, 2024		Komposisi Direksi per 31 Desember 2024 BOD Composition by December 31, 2024	
	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name
PT PLN Indonesia Power Services*	Komisaris Utama President Commissioner	Khusnul Mubien	Direktur Utama President Director	Hari Cahyono
	Komisaris Commissioner	Masykuri Abdillah	Direktur Bisnis Director of Business	Kukuh Pambudi
	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sunandar	Direktur Operasi Director of Operation	Mulyadi Koto
	Komisaris Independen Independent Commissioner	Fredy Eko Prasetyo	Direktur Keuangan Director of Finance	Hari Muhardani Nasution
	Komisaris Commissioner	Julita Indah	Direktur SDM Director of HR	Imam Adi Prihantoro
PT Artha Daya Coalindo	Komisaris Utama President Commissioner	Lindasari Hendayani	Direktur Utama President Director	Judi Winarko
	Komisaris Commissioner	Iwan Zulkarnain	Direktur Keuangan dan Administrasi Director of Finance and Administration	Kresna Siwiyati
	Komisaris Commissioner	Marco Rosihan Yacub	Direktur Operasi Director of Operation	I GAN Wardiana Yasa
PT Indo Ridlatama Power	Komisaris Utama President Commissioner	Eri Nurcahyanto	PLT Direktur Utama (Merangkap) Acting President Director (Concurrent)	R.Triyono Budi Prayitmo
	PLT Komisaris Acting Commissioner	Doddy Sumantawan	Direktur Keuangan dan Administrasi Director of Finance and Administration	R.Triyono Budi Prayitmo
			Direktur Operasi Director of Operation	Lukman Dahri
PT PLN Indonesia Power Renewables**	Komisaris Utama President Commissioner	Maya Rani Puspita	Direktur Utama President Director	Wiryantono Setyolaksano
	Komisaris Commissioner	Stefanus Asat Gusma	Direktur Bisnis Komersial Director of Commercial Business	M. Imaduddin
			Direktur Keuangan Director of Finance	Laila Haerani

* PT PLN Indonesia Power Services, sebelumnya bernama PT Cogindo DayaBersama telah berubah nama berdasarkan Akta No. 08 tanggal 19 April 2024; SK Kemenkumham No. AHU-0084932.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024

** PT PLN Indonesia Power Renewables sebelumnya bernama PT Putra Indotenaga telah berubah nama berdasarkan Akta Notaris tanggal 3 Agustus 2023

* PT PLN Indonesia Power Services, formerly known as PT Cogindo DayaBersama, changed its name pursuant to Deed No. 08 dated April 19, 2024; Ministry of Law and Human Rights Decree No. AHU-0084932.AH.01.11.Tahun2024 dated May 2, 2024.

** PT PLN Indonesia Power Renewables, formerly known as PT Putra Indotenaga, changed its name pursuant to a Notarial Deed dated August 3, 2023.

Perusahaan Patungan

Joint Venture

Nama Perusahaan Company Name	Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 BOD Composition by December 31, 2024		Komposisi Direksi per 31 Desember 2024 BOD Composition by December 31, 2024	
	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name
PT Perta Daya Gas*	Komisaris Utama President Commissioner	Aji Sutrisno	Direktur Utama President Director	Arief Wardono
	Komisaris Commissioner	Hadameon Aritonang	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Hadi Munib

* PT Perta Daya Gas telah dialihkan ke PT Energi Primer Indonesia sebagai tindak lanjut HSH PLN Group mendukung keselarasan strategi pengembangan bisnis PT PLN (Persero) pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagaimana Akta Jual Beli Saham No. 83 oleh Notaris Syahreza Annaz, S.H., M.Kn

* PT Perta Daya Gas was transferred to PT Energi Primer Indonesia as a follow-up to the PLN Group's Holding-Subholding (HSH) initiative in support of the business development strategy alignment of PT PLN (Persero), as stated in Share Sale and Purchase Deed No. 83 dated October 29, 2024, executed before Notary Syahreza Annaz, S.H., M.Kn.

Perusahaan Asosiasi

Associates

Nama Perusahaan Company Name	Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 BOD Composition by December 31, 2024		Komposisi Direksi per 31 Desember 2024 BOD Composition by December 31, 2024	
	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name
PT Indo Pusaka Berau	Komisaris Utama President Commissioner	Derina	Direktur Utama President Director	Aan Wibowo
	Komisaris Commissioner	Kamaruddin	Direktur Operasi Director of Operation	Rahadi Santoso
	Komisaris Commissioner	Ivan Julianto	Direktur Keuangan dan Administrasi Director of Finance and Administration	Muhamad Teguh Satria
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	Komisaris Utama President Commissioner	Tri Tjahjonoputro	Direktur Utama President Director	Thommi Haposan
	Komisaris Commissioner	Najahul Imtihan	Direktur Engineering dan Layanan Director of Engineering and Services	Andy Adam
	Komisaris Commissioner	Sapto Harjono Wahjoe Sedjati	Direktur Bisnis dan Keuangan Director of Business and Finance	Bahtiar Wibisana

Perusahaan Afiliasi dan Anak Perusahaan (Anak Perusahaan di Bawah PT PLN Indonesia Power Renewables)

Affiliate of Subsidiary (Subsidiary under PT PLN Indonesia Power Renewables)

Nama Perusahaan Company Name	Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 BOD Composition by December 31, 2024		Komposisi Direksi per 31 Desember 2024 BOD Composition by December 31, 2024	
	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name
PT PLN Indonesia Geothermal*	Presiden Komisaris President Commissioner	Hening Kyat Pamungkas	Direktur Utama President Director	Budi Wibowo
	Komisaris Commissioner	M. Idris Froyoto Sihite	Direktur Keuangan dan Administrasi Director of Finance and Administration	Hastini Handayani
			Direktur Proyek Director of Project	Lambok Renaldo Siregar

* PT PLN Indonesia Geothermal (sebelumnya bernama PT Indo Tenaga Hijau telah berubah nama berdasarkan Akta Notaris tanggal 18 September 2023 dan sebelumnya PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP) yang telah berubah nama lebih dulu berdasarkan Akta Notaris tanggal 7 November 2017)

* PT PLN Indonesia Geothermal (formerly known as PT Indo Tenaga Hijau changed its name pursuant to the Notarial Deed dated September 18, 2023, and was previously known as PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP), which had earlier changed its name pursuant to the Notarial Deed dated November 7, 2017)

Special Purpose Company di Bawah PT PLN Indonesia Power Renewables

Special Purpose Companies under PT PLN Indonesia Power Renewables

Nama Perusahaan Company Name	Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 BOD Composition by December 31, 2024		Komposisi Direksi per 31 Desember 2024 BOD Composition by December 31, 2024	
	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name
PT Rajamandala Electric Power	Komisaris Utama President Commissioner	Hisatsugu Nakamura	Direktur Utama President Director	Del Eviondra
	Komisaris Commissioner	Cita Dewi	Direktur Keuangan Director of Finance	Masaki Kawarazaki
PT GCL Indotenaga	Komisaris Utama President Commissioner	IGN Agung S	Direktur Utama President Director	Zhang Jiuquan
	Komisaris Commissioner	Fei Zhi	Direktur Director	Xie Hui
	Komisaris Commissioner	Sun Haoming	Direktur Director	Metty Kronika Indirawati
PT Indo Raya Tenaga	Komisaris Utama President Commissioner	Nurlely Aman	Direktur Utama President Director	Peter Wijaya
	Komisaris Commissioner	Prajogo Pangestu	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Yosefan Johan
			Direktur Keuangan Director of Finance	Erwin Ardianto
			Direktur Konstruksi/Operasi/ Pemeliharaan Director of Construction/Operation/ Maintenance	Jae Sik Ryu
			Direktur Teknis Director of Technology	Riyanto Dharu
			Direktur Bisnis Director of Business	Jonny Karl
a. PT Suralaya Indo Tenaga*	Komisaris Commissioner	M. Imaduddin	Direktur Director	Laila Haerani
b. PT Putra Suralaya Indotenaga*	Komisaris Commissioner	Laila Haerani	Direktur Director	M. Imaduddin
PT Trina Mas Agra Indonesia	Presiden Komisaris President Commissioner	Bi Xiao Lei	Presiden Direktur President Director	Ooi Kok Tiong
	Wakil Presiden Komisaris Vice President Commissioner	Hermawan Tarjono	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	Lokita Prasetya
	Komisaris Commissioner	Xu Ming	Direktur Director	Zhang Yanfei
	Komisaris Commissioner	Yabes Paulus Kilis	Direktur Director	Lin Mingxing
	Komisaris Commissioner	Muhammad Imaduddin	Direktur Director	Zha Rui
			Direktur Director	Alex Sutanto
PT Indo ACWA Saguling	Komisaris Utama President Commissioner	Hendry Asdayoka Putra	Direktur Utama President Director	Rudolf Rinaldo Aritonang
	Komisaris Commissioner	Igan Subawa Putra	Direktur Director	Helmy Kautsar
	Komisaris Commissioner	Udyan Seth	Direktur Director	Yeni Nurita
PT Minahasa Brantas Energi	Komisaris Utama President Commissioner	Andri Febriyanto	Direktur Utama President Director	Tedi Setiabudi
	Komisaris Commissioner	Bambang Setyawan	Direktur Operasi Director of Operations	Anang wahyu Raharjo
			Direktur Keuangan Director of Finance	Ferdy Firmansyah
PT Indo ACWA Tenaga Singkarak	Komisaris Utama President Commissioner	Hendry Asdayoka Putra	Direktur Utama President Director	Helmy Kautsar
	Komisaris Commissioner	Igan Subawa Putra	Direktur Operasional Director of Operations	Hugh Raeburn
	Komisaris Commissioner	Lintang Kirana Walandaw	Direktur Keuangan dan Administrasi Director of Finance and Administration	Yeni Nurita

* PT Suralaya Indo Tenaga dan PT Putra Suralaya Indotenaga merupakan *Intermediate company* dalam rangka pengembangan PLTU Jawa 9-10 kapasitas 2x1000 MW

* PT Suralaya Indo Tenaga and PT Putra Suralaya Indotenaga serve as intermediate companies established for the development of the Java 9-10 SPP Project with a total capacity of 2x1,000 MW.

Ringkasan Informasi Kinerja Keuangan pada Entitas Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Afiliasi

Financial Highlights of Subsidiaries, Joint Ventures, and Affiliates

dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain in million Rupiah unless otherwise stated

Perusahaan Company	Total Aset Total Assets		Pendapatan Usaha Revenue		Beban Usaha Operating Expenses		Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)		Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
ANAK PERUSAHAAN SUBSIDIARIES										
PT PLN Indonesia Power Services *	1.117.351	1.428.802	1.607.653	2.300.460	1.462.795	2.138.464	144.859	161.996	91.097	80.873
PT Artha Daya Coalindo	735.598	623.756	2.304.250	2.624.205	2.228.126	2.539.934	98.543	84.271	76.663	63.386
PT Indo Ridlatama Power	1.549.080	1.341.581	314.132	286.685	257.386	318.983	65.686	(88.544)	(23.985)	(166.892)
PT PLN Indonesia Power Renewables**	8.176.387	10.223.402	73.491	89.105	81.819	112.724	(8.328)	(23.619)	1.046.357	1.307.684
PERUSAHAAN PATUNGAN JOINT VENTURE										
PT Perta Daya Gas*** (dalam in USD)	375.685	-	214.098	-	88.542	-	125.556	-	54.660	-
PERUSAHAAN ASOSIASI ASSOCIATES										
PT Indo Pusaka Berau	314.311	377.559	125.465	141.001	156.196	176.383	(30.731)	(35.382)	(25.264)	(36.106)
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	778.247	808.455	887.976	1.681.415	826.998	1.543.927	60.978	137.488	29.264	50.921
PERUSAHAAN AFILIASI AFFILIATES										
PT PLN Indonesia Geothermal****	204.335	231.265	74.955	89.105	62.877	68.312	37.842	20.793	31.787	12.237
PT Rajamandala Electric Power (Ribuan thousand USD)	160.972	157.487	13.173	12.875	233	894	12.940	11.980	(1.006)	886
PT GCL Indotenaga (dalam in USD)	423.182	412.140	109.519	111.853	66.186	71.138	46.223	43.754	22.061	24.652
PT Suralaya Indo Tenaga	6.444.991	8.029.820	940.566	1.180.527	1	0,6	940.565	1.180.526	940.565	1.180.526
PT Putra Suralaya Indotenaga	6.444.942	8.029.772	940.566	1.180.527	0,5	0,3	940.566	1.180.526	1.180.526	1.180.526
PT Indo Raya Tenaga (dalam in USD)	2.984.272	3.554.038	722.138	517.933	463.937	197.134	258.201	320.799	120.893	146.069
PT Trina Mas Agra Indonesia	121.902	963.482	-	-	2.141	82.452	(2.141)	(82.452)	(2.130)	(99.406)
PT Indo ACWA Tenaga Saguling***** (dalam in USD)	-	5.225.625	-	-	-	(2.784)	-	(86.128)	-	(86.128)
PT Minahasa Brantas Energi*****	-	62.414	-	-	-	(41)	-	6	-	6
PT Indo ACWA Tenaga Singkarak***** (dalam in USD)	-	1.348.132	-	0	-	2.784	-	(2.162)	-	(2.162)

* PT PLN PLN Indonesia Power Services, sebelumnya bernama PT Cogindo DayaBersama telah berubah nama berdasarkan Akta No. 08 tanggal 19 April 2024; SK Kemenkumham No. AHU-0084932.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024

** PT PLN Indonesia Power Renewables, sebelumnya bernama PT Putra Indotenaga telah berubah nama berdasarkan Akta Notaris tanggal 3 Agustus 2023

*** PT Perta Daya Gas telah dialihkan ke PT Energi Primer Indonesia sebagai tindak lanjut HSH PLN Group mendukung keselarasan strategi pengembangan bisnis PT PLN (Persero) pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagaimana Akta Jual Beli Saham No. 83 oleh Notaris Syahreza Annaz, S.H., M.Kn

**** PT PLN Indonesia Geothermal (sebelumnya bernama PT Indo Tenaga Hijau telah berubah nama berdasarkan Akta Notaris tanggal 18 September 2023 dan sebelumnya PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP) yang telah berubah nama lebih dulu berdasarkan Akta Notaris tanggal 7 November 2017)

***** Belum beroperasi

* PT PLN Indonesia Power Services, formerly known as PT Cogindo DayaBersama, changed its name pursuant to Deed No. 08 dated April 19, 2024; Ministry of Law and Human Rights Decree No. AHU-0084932.AH.01.11.Tahun2024 dated May 2, 2024.

** PT PLN Indonesia Power Renewables, formerly known as PT Putra Indotenaga, changed its name pursuant to a Notarial Deed dated August 3, 2023.

*** PT Perta Daya Gas was transferred to PT Energi Primer Indonesia as part of the PLN Group's strategic alignment initiative in support of PT PLN (Persero)'s business development strategy, formalized through Share Purchase Deed No. 83 dated October 29, 2024, by Notary Syahreza Annaz, S.H., M.Kn.

**** PT PLN Indonesia Geothermal, formerly known as PT Indo Tenaga Hijau, changed its name pursuant to a Notarial Deed dated September 18, 2023; and prior to that, it was known as PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP), which had changed its name earlier pursuant to a Notarial Deed dated November 7, 2017.

***** Not yet in operation.



Peta Wilayah Operasi

Map of Operational Areas

Wilayah operasional PLN Indonesia Power mencakup berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 36 Unit Bisnis Pembangkit (UBP) dan 1 Unit Bisnis Pemeliharaan (UBH).

PLN Indonesia Power's operational area covers various regions in Indonesia, including Sumatra, Kalimantan, Java, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, and Papua consisting of 1 Head Office, 36 Generating Business Units (GBU) and 1 Maintenance and Service Unit (MSU).





Unit Bisnis Pembangkitan (UBP)
Generation Business Unit (GBU)



Di bawah pengelolaan UBP Kamojang
Under Kamojang GBU Management



Di bawah pengelolaan UBP Papua Maluku
Under Papua Maluku GBU Management



Kantor Pusat
Head Office



Unit Bisnis Pemeliharaan (UBH)
Maintenance and Service Unit (MSU)

Daftar Alamat Unit

List of Unit Addresses

UBP GBU Suralaya

Jl. Raya PLTU Suralaya, PO BOX 15 Cilegon
Banten 42456
☎ (62-254) 571 230, 571 240, 571 242
📠 (62-254) 571 235

UBP GBU Banten 1 Suralaya

Jl. Yos Sudarso PLTU Suralaya 8, Kel. Suralaya
Kec. Pulomerak, Cilegon, Banten 42439
☎ (62-254) 570 402; (62-254) 7830 066
📠 (62-254) 571 869

UBP GBU Banten 2 Labuan

Jl. Laba Terusan Panimbang, Ds. Sukamaju
Kec. Labuan, Kab. Pandeglang
Banten 42246
☎ (62-253) 803 312, 805 015

UBP GBU Banten 3 Lontar

Jl. Ir Sutami, Ds. Lontar, Kec. Kemiri
Kab. Tangerang, Banten 15530
☎ (62-21) 5939 0660
📠 (62-21) 5939 0659

UBP GBU Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu

Jl. Pelita, Ds. Jayanti
Kec. Palabuhan Ratu
Kab. Sukabumi, Jawa Barat

UBP GBU Jawa Tengah 2 Adipala

Ds. Bunton, Kec. Adipala
Kab. Cilacap, Jawa Tengah 53271
☎ (62-282) 525 9647

UBP GBU Pangkalan Susu

PLN Pangkalan Susu, Dusun VI
Ds. Tanjung Pasir, Kec. Pangkalan Susu
Kab. Langkat, Sumatera Utara 20858

UBP GBU Labuhan Angin

Jl. PLTU Labuhan Angin - Desa Tapan Nauli 1
Kec. Taian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah
Sumatera Utara 22618

UBP GBU Ombilin

Jl. Prof M. Yamin, SH, Kubang Utara Sikabu
Kec. Lembah Segar, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27422
☎ (0754) 410354

UBP GBU Teluk Sirih

Jl. Raya Padang - Painan KM 25
Kel. Teluk Kabung Tengah, Kec. Bungus Teluk
Kabung Kota Padang, Sumatera Barat 25237

UBP GBU Kepulauan Riau

Jl. Bakar Batu No. 55 (Lantai 5)
Tanjung Pinang
Kepulauan Riau 29112

UBP GBU Asam Asam

Jl. Raya Banjarmasin-Kotabaru KM 122
Ds. Sei Baru, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut
Kalimantan Selatan 70881

UBP GBU Singkawang

Jl. Bambang Ismoyo Singkawang Tengah, Sei Wie
Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang
Kalimantan Barat 7911

UBP GBU Sanggau

Jl. Parit Emas, Ds. Sungai Batu Kec. Kapuas,
Kab. Sanggau, Kalimantan Barat 78516



UBP GBU Sintang

Jl. Nenak-Pelabuhan, RT 8 RW 2
Kel. Kedabang, Kec. Sintang
Kalimantan Barat 78614

UBP GBU Barru

Dsn. Bawasalo, Ds. Lampoko
Kec. Balusu, Kab. Barru
Sulawesi Selatan 90762

UBP GBU Saguling

Komplek PLN Cioray, Tromol Pos No. 7 Rajamandala,
Kab. Bandung 40554
 (62-22) 690 3497, 690 3489
 (62-22) 690 3613

UBP GBU Semarang

Jl. Ronggowarsito, Komplek Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang 50127
 (62-24) 3518371 (Hunting)
 (62-24) 3546835

UBP GBU Bali

Jl. Brigjen I.G Ngurah Rai, Pesanggaran
Denpasar, Bali 80001
 (+62-361) 720 421, 720 422
 (+62-361) 720 519

UBP GBU Keramasan

Jl. Abikusno Cokrosuyoso No. 24 Kel. Kemang Agung,
Kec. Kertapati Palembang,
Sumatera Selatan 30259

UBP GBU Tello

Jl. Urip Sumoharjo No. KM 5, Tello Baru, Kec. Panakkukang,
Kota Makassar Sulawesi Selatan 90233
 (0411) 4444 77

UBP GBU Berau

Jl. Pulau Semama No. 447
(Mess PLTU-Depan Kodim Berau) Tanjung Redeb
Berau, Kalimantan Timur 77315

UBP GBU Priok

Jl. Laks. RE Martadinata, Jakarta Utara DKI Jakarta 14310
 (62-21) 4353 9114 - 19 (Hunting)
 (62-21) 4393 646

UBP GBU Kamojang

Jl. Komplek Perumahan PLTP Kamojang Kotak Pos 125,
Garut 44102
 (+62-22) 780 5475 - 780 4478
 (62-22) 7801013 - 7805469

UBP GBU Mrica

Jl. Raya Banyumas KM. 8, Kotak Pos 38 Banjarnegara,
Jawa Tengah 53471
 (62-286) 597 081
 (62-286) 597 044, 597 100

UBP GBU Cilegon

Jl. Raya Bojonegoro Salira, Ds. Margasari, Kec. Pulo Ampel,
Kab. Serang, Banten 42454
 (+62-254) 575 1555, 575 1444
 (+62-254) 575 1501

UBP GBU Barito

Jl. P. M. Noor No. 33, Kuin Cerucuk,
Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
 (0511) 4366683

UBP GBU Grati

Jl. Raya Surabaya - Probolinggo KM. 73 PO BOX 11, Ds. Wates,
Kec. Lekok Kab. Pasuruan, Jawa Timur 67184
 (03-43) 413582, 413583
 (03-43) 413693, 413524, 425588

 UBP GBU Bengkulu

Jl. Lintas Bengkulu - Curup KM 72
Ujan MAS Atas, Kec. Ujan Mas,
Kab. Kepahiang Bengkulu 39125

 UBP GBU Jambi

Jl. Dokter Setia Budi No. RT 09, Kel. Rajawali
Kec. Jambi Timur, Jambi 36143
 (0741) 31649 ext. 31233

 UBP GBU Bukittinggi

Jl. Sentral No. KM 1, Padang Lua Kec. Banuhampu,
Kab. Agam Sumatera Barat 26181
 (0752) 33663

 UBP GBU Mahakam

Jl. Ulin No. 1, Karang Anyar, Sungai Kunjang Karang Anyar,
Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda
Kalimantan Timur 75243
 (0541) 274153

 UBP GBU Papua Maluku

Jl. Hanurata KM. 9 Holtekamp,
Kec. Muara Tami, Kota Jayapura - Papua

 UBP GBU Jatigede

Kadujaya, Kec. Jatigede,
Kabupaten Sumedang
Jawa Barat 45377

 UBP GBU Holtekamp

Jl. Hanurata KM. 9, Kampung Holtekamp,
District Muaratami, Kota Jayapura Papua 99311

 UBP GBU Jeranjang

Jl. Raya PLTU Jeranjang, Dsn. Jeranjang
Ds. Taman Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat 83363

Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan

Company-Supporting Professional Institutions

Kantor Akuntan Publik **Public Accounting Firm**

PWC Indonesia
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan*

AP PA: Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA

World Trade Center (WTC 3)
Jl. Jend. Sudirman No.Kav 29-31, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920
☎ +62 21 5212901
📠 +62 21 52905555, 52905050

Konsultan Hukum **Legal Consultants**

Nah'r Murdono Law Office

District 8 - Prosperity Tower, 20th Floor, Unit E, SCBD Lot 28
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
☎ +6221 5030 0817
📠 +62 21 522 0029

UMBRA Partnership

Telkom Landmark Tower, Tower 2, Lantai 49
Jl. Jend Gatot Subroto kav. 52, Jakarta

Azwar Hadisupani Rum & Partners

World Capital Tower 19th floor
Jl. Mega Kuningan Barat No. 3, Jakarta 12950 Indonesia
☎ +6221 50917915, +6221 50917916
✉ office@ahrplaw.com
🌐 www.ahrplaw.com

Alfonso Lawfirm

The H Tower Lt. 15 Suite G
Jl. H. R. Rasuna Said No.20, RT.1/RW.5, Karet Kuningan, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12940
☎ +6221 29555 215
📠 +6221 29555 216

PT West Solusi Utama

Gedung Gandaria 8 Office Tower Lt. 5 K Unit
Jl. Sultan Iskandar Muda No.10, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
✉ info@westcounsellorsatlaw.com

Notaris **Notary**

Lenny Janis Ishak, S.H.

Jl. Hang Lekir IX No. 1 Jakarta 12120
☎ +62 21 7221077
📠 +62 21 7233855

Muhammad Hanafi, S.H.

Komplek Rukan Tende Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No.122-124
Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170
☎: 021 72780381, 72780382
📠 72780382

Shahreza Annaz S.H., M.Kn

Jl. Hang Lekir IX No. 1 Jakarta 12120
☎ +62 21 7221077
📠 +62 21 7233855

Kantor Jasa Penilai Publik **Office of Public Appraisal Service**

Rengganis, Hamid & Rekan

Jakarta Head Office
Menara Kuningan 8th Floor
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. V Jakarta 12940
☎ +6221 3001 6002
✉ secretariat@rhr.co.id

Ikatan Akuntan Indonesia
Institute of Indonesia Chartered
Accountants

Graha Akuntan
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904232 ext. 666 / 777
☎ +62 818 717251
✉ iai-info@iaiglobal.or.id

Lembaga Pemerintah **Government Institution**

**Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara (Jamdatun)**
Deputy Attorney General

Jl. Sultan Hasanuddin No.1
Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia
☎ +62 21 722 1269
✉ humas.puspenkum@kejaksaan.go.id

**Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan -
Kementerian ESDM**
Directorate General of Electricity - Ministry
of Energy and Mineral Resources

Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X 2, Kav. 7-8, Kuningan, RT.10/RW.4,
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
(Sebagai regulator dan fungsi verifikasi perizinan)
(As regulator and permit verifier)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Capital Investment Coordinating Board
(BKPM)

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190
PO Box 3186, Indonesia
☎ +62 21 5252 008 (*hunting*)
☎ 08071002576 atau 1500765 (*Contact Center*)
☎ +62 21 520 2050
✉ info@bkpm.go.id, satgasnasional@bkpm.go.id
(Sebagai fungsi pusat perizinan terpadu satu pintu/online single submission)
(As one-stop integrated permit center/online single submission)

**Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia**
Ministry of Environment and Forestry of the
Republic of Indonesia

Gd. Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto No. 2,
RT.1/RW.3, Senayan, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
(Sebagai regulator dan fungsi verifikasi perizinan)
(As regulator and permit verifier)

**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat**
Ministry of Public Works and Public Housing

Kementerian PUPR
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
✉ informasi@pu.go.id

**Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik
Indonesia**
Ministry of State-Owned Enterprises of the
Republic of Indonesia

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Gambir, RT.11/RW.2,
Gambir, Jakarta Pusat 10110

**Kementerian Energi Dan Sumber Daya
Mineral**
Ministry of Energy and Mineral Resources

Jl. Medan Merdeka Sel. No.18, RT.11/RW.2,
Gambir, Jakarta Pusat 10110

**Direktorat Jenderal EBT dan Konservasi Energi -
Kementerian ESDM**
Directorate General of NRE and Energy
Conservation - Ministry of Energy and
Mineral Resources

Jl. Pegangsaan Timur No.1, RT.1/RW.1,
Pegangsaan, Kec. Menteng
Jakarta Pusat 10320

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia

Sentra Mulia, Jl. H. R. Rasuna Said, RT.16/RW.4, Kuningan,
Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12940



**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual -
Kementerian Hukum dan HAM**
Directorate General of Intellectual Properties -
Ministry of Law and Human Rights

Gedung Ex. Sentra Mulia
Jl H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, 12940
☎ (021) 152
✉ halodjki@dgip.go.id
(Sebagai regulator dan fungsi verifikasi perizinan atau kegiatan usaha)
(As regulator and permit verifier or business activities)

Badan Siber dan Sandi Negara
National Cyber and Crypto Agency

Jalan Raya Muchtar 70
Bojong Sari, Depok, Jawa Barat - 16518
☎ +6221 77973360
✉ humas@bssn.go.id

**Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB)**
Indonesian National Board for Disaster
Management (BNPB)

Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur
☎ +62 21 298 27793
☎ +62 21 212 81200

**Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Kantor Perwakilan DKI Jakarta**
Finance and Development Supervisory
Agency (BPKP)

Jl. Pramuka No.33, Utan Kayu Utara
Kecamatan Matraman, Jakarta Timur
☎ (021) 85910031

Kementerian Ketenagakerjaan RI
Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia
☎ 021-5255733
☎ 1500630 (Call Center)

Kementerian Perhubungan RI
Ministry of Transportation

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110
✉ info151@dephub.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika
Ministry of Communications and Information
Technology

Jl. Medan Merdeka Barat no. 9, Jakarta 10110
☎ (021) 3452841
✉ humas@mail.kominfo.go.id

**Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional**
Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/
National Land Agency

Jalan Raden Patah I No. 1
Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
✉ timdatin.djtr@atrpn.go.id, pelayananpublik.djtr@gmail.com
☎ +62 21 7264112
☎ +62 21 7264112

Informasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP)

Information on Public Accounting Firms (KAP) and Public Accountants (AP)

Dalam memastikan integritas penyajian Laporan Keuangan kepada pemegang saham, PLN Indonesia Power menggunakan jasa akuntan publik sebagai auditor eksternal yang bersifat independen. Perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) bersertifikat sebagai pihak independen yang bertugas menguji komponen dalam laporan keuangan untuk melihat kewajaran perhitungan dan pencatatan keuangan serta kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

In order to maintain the integrity of Financial Statements presentation to the shareholders, PLN Indonesia Power hires a public accountant to serve as an independent external auditor. The Company uses the services provided by a certified Public Accounting Firm (KAP) as an independent party in charge of auditing the components in the financial statements to see the fairness of financial calculations and records as well as compliance with the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia.

Kebijakan dan Mekanisme Penunjukan KAP dan AP

Policy and Procedures for Appointing Public Accounting Firms and Public Accountants

Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2024 ditetapkan melalui RUPS Tahunan. Dalam rapat tersebut, RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan. Sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan RUPS Tahunan tersebut, PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang beralamat di WTC 3, Jl Jend Sudirman Kav. 29-31, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1290 - Indonesia, Telepon (021) 5099 2901/31192901, Faksimile (021) 5290 555/5290 5050, www.pwc.com/id untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2024.

The External Auditor responsible for auditing the Company's financial statements for the 2024 fiscal year was appointed through the Annual GMS. During the meeting, the GMS authorized the Majority Shareholder to determine the appointment of a Public Accounting Firm as the Auditor to audit the Company's Financial Statements. Pursuant to the resolution of the Annual GMS, PT PLN (Persero), as the Majority Shareholder, appointed the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, whose address is at WTC 3, Jl Jend Sudirman Kav. 29-31, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1290 - Indonesia, Phone (021) 5099 2901/3119 2901, Facsimile (021) 5290 5555/5290 5050, website: www.pwc.com/id, to conduct an audit of the Financial Statements for the 2024 Fiscal Year.

Ruang lingkup Audit

Audit Scope

Sejalan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Audit Laporan Keuangan Tahun 2024 39023/KEU.02.04/F01070400/2023 ruang lingkup audit yang dilakukukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan adalah sebagai berikut:

In accordance with the Work Commencement Order (SPMK) for the 2024 Financial Statement Audit No. 39023/KEU.02.04/F01070400/2023, the scope of audit services conducted by the KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan is as follows:

Sejalan dengan Kontrak kerja No. 1718.Pj./DAN.01.02/F01070400/2024 dan No. PwC:EL202410280037/YAN/YAN tanggal 28 Oktober 2024, ruang lingkup audit yang dilakukukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan adalah sebagai berikut:

In line with Contract No. 1718.Pj./DAN.01.02/F01070400/2024 dan No. PwC:EL202410280037/YAN/YAN dated October 28, 2024, the scope of audit services conducted by the KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan includes the following:

1. Pekerjaan jasa audit umum (*general audit*) dan memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PLN Indonesia Power untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Pekerjaan jasa pengujian dan pelaporan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pengungkapan Manajemen dan pengendalian internal tertentu untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

1. General audit services and issuance of an opinion on the fairness of the presentation of PLN Indonesia Power's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2024.
2. Examination and reporting services on compliance with applicable laws and regulations, based on certain management disclosures and internal controls, for the fiscal year ended on December 31, 2024.

Besarnya Fee Audit untuk Jasa yang Diberikan oleh Kantor Akuntan Publik Pada Tahun Buku 2024

Audit Fee for the Services Provided by Public Accounting Firm in 2024 Fiscal Year

Besarnya biaya jasa audit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 atas Laporan Audit Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk PLN Indonesia Power dan Entitas Anak adalah sebesar Rp4,462 miliar. Ketentuan *fee* audit sepenuhnya ditetapkan oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas.

The audit fee for the fiscal year ended on December 31, 2024, covering the Audit for the Financial Statements, Performance Evaluation Report, as well as Compliance with Laws and Regulations and Internal Control for PLN Indonesia Power and its Subsidiaries is Rp4.462 billion. The audit fee is solely determined by PT PLN (Persero) as the Majority Shareholder.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Ruang Lingkup Audit dan Opini Audit

Public Accounting Firm, Public Accountant, Audit Scope, and Audit Opinion

No	Tahun Buku Tahun Buku	Nama KAP PAF Name	Nama AP PA Name	Periode KAP PAF Period	Periode AP PA Period	Ruang Lingkup Scope	Opini Audit Audit Opinion
1.	2024	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dengan Akuntan Publik	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA	ke-1 1 st	ke-5 5 th	Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, dan Laporan Audit Kepatuhan Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Audit Report	Wajar Dalam Semua Hal yang Material Qualified Opinion
2.	2023	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA	ke-4 4 th	ke-4 4 th		
3.	2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA	ke-3 3 rd	ke-3 3 rd		
4.	2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA	ke-2 2 nd	ke-2 2 nd		
5.	2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA	ke-1 1 st	ke-1 1 st		
6.	2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Reka)	Dedy Sukrisnadi, Izin No. AP.0645 Permit No. AP.0645	ke-4 4 th	ke-1 1 st		

Jasa dan Fee Audit Lainnya

Other Services Provided by Public Accounting Firm

Selama pelaksanaan audit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan tidak memberikan jasa lain kepada PT PLN Indonesia Power selain jasa audit, sehingga sangat independen dan tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit. Auditor melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Audit telah dilaksanakan berdasarkan rencana, dan pengujian terhadap bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan

During the audit, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan did not provide any services to PT PLN Indonesia Power other than audit services, thereby maintaining full independence and avoiding any conflicts of interest in the audit process. The Auditor conducted the audit under auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. The audit was carried out based on a predetermined plan and involved testing evidence supporting the amounts and disclosures in the Financial Statements.

Pengawasan Efektivitas Auditor Eksternal oleh Dewan Komisaris

Supervision of External Auditor's Effectiveness by the Board of Commissioners

Dalam rangka memastikan pelaksanaan audit eksternal berjalan secara efektif, Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal. Komite Audit juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Satuan Internal Audit untuk memastikan pelaksanaan audit berjalan efektif. Direksi juga secara aktif melakukan pemantauan tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan audit eksternal dalam setiap rapat koordinasi antara Direksi dengan satuan kerja terkait serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Dewan Komisaris secara berkala.

In order to ensure the effective implementation of the external audit, the Board of Commissioners, through the Audit Committee, conducts monitoring and evaluation of the audit process carried out by the External Auditor. The Audit Committee also coordinates and communicates with the Internal Audit Unit to ensure the audit process is conducted effectively. The Board of Directors actively monitors the follow-up of external audit findings during coordination meetings between the Board of Directors and relevant work units, then reports the implementation of follow-up actions to the Board of Commissioners on a regular basis.



Kronologis Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Sampai dengan tahun 2024, PLN Indonesia Power belum pernah mencatatkan saham di Bursa Saham, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi (*corporate action*), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa.

Until 2024, PLN Indonesia Power has yet to list its shares on the Stock Exchange. Consequently, there is no information regarding the listing chronology, corporate action, change in the amount of shares, or the name of the stock exchange.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing Chronology

Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power tidak melakukan pencatatan efek lainnya. Hal ini disebabkan oleh berakhirnya program sekuritisasi Efek Beragun Aset (EBA) yang sebelumnya dimiliki perusahaan. Program tersebut telah resmi berakhir pada tanggal 19 September 2022, sehingga pada periode pelaporan tahun 2024, tidak terdapat kegiatan atau instrumen sekuritisasi aktif yang tercatat dalam laporan keuangan Perusahaan.

In 2024, PLN Indonesia Power did not list any other securities. This was due to the termination of the Asset-Backed Securities (ABS) securitization program previously held by the company. The program officially ended on September 19, 2022; thus, no active securitization activities or instruments were recorded in the Company's financial statements for the 2024 reporting period.

Keanggotaan Asosiasi

Membership in Associations

PLN Indonesia Power menjalin kemitraan strategis dengan berbagai asosiasi yang bertujuan untuk mengembangkan strategi bisnis Perusahaan yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan bisnis dan memperluas relasi atau jaringan kemitraan strategis terkait bisnis pembangkitan tenaga listrik dan isu-isu keberlanjutan.

PLN Indonesia Power builds strategic partnerships with various associations, aiming at developing its business strategy alongside the development of business environment, as well as to expand its relations and strategic partnerships that are relevant to power generation business and sustainability issues.

Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Indonesian Electrical Power Society

Status : Anggota Member
Lingkup Scope : Nasional National

Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) Indonesian National Committee on Large Dams (INACOLD)

Status : Anggota Member
Lingkup Scope : Nasional National

Asosiasi Perusahaan Penyedia Listrik Nasional (APPELIN) National Association of Power Companies

Status : Anggota Member
Lingkup Scope : Nasional National

Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Komisariat Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Internal Audit Unit Communication Forum, Commissariat of Energy and Mineral Resources

Status : Anggota Member
Lingkup Scope : Nasional National

Indonesia Gas Association (IGA)

Status : Anggota Member
Lingkup Scope : Nasional National

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Institute of Indonesia Chartered Accountants

Status : Anggota Member
Lingkup Scope : Nasional National

Institute of Electrical and Electronic's Engineers (IEEE)

Status : Anggota Member
Lingkup Scope : Nasional National

Electric Power Research Insitute (EPRI)

Status : Anggota Member
Lingkup Scope : Nasional National

Majelis Pembimbing Mabisaka Kalpataru (Mabisaka) Kalpataru Advisory Council

Status : Anggota Member
Lingkup Scope : Nasional National

Mitra Pajakku

Status : Anggota Member
Lingkup Scope : Nasional National

Danareksa Sekuritas

Status : Anggota Member
Lingkup Scope : Nasional National

Justika Siar Mustika

Status : Anggota Member
Lingkup Scope : Nasional National

Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MeBi) Indonesian Biomass Energy Society

Status : Anggota Member
Lingkup Scope : Nasional National

Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Indonesian Renewable Energy Society (METI)

Status : Anggota Member
Lingkup Scope : Nasional National

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Institution of Engineers Indonesia (PII)

Status : Anggota Member
Lingkup Scope : Nasional National



Peristiwa Penting 2024

Significant Events in 2024

📅 29 Januari January



PLN Indonesia Power berhasil lakukan sinkronisasi listrik dari BMPP Nusantara 1 ke sistem kelistrikan Ambon

PLN Indonesia Power successfully synchronized electricity from BMPP Nusantara 1 to the Ambon power system

📅 21 Februari February



Peresmian *Hydrogen Refueling Station* (HRS) sebagai komitmen PLN Indonesia Power dalam menghadirkan energi bersih yang berkelanjutan serta mewujudkan dekarbonisasi nasional

The inauguration of the Hydrogen Refueling Station (HRS) as a commitment by PLN Indonesia Power to provide clean and sustainable energy, as well as to support national decarbonization

📅 29 Mei May



Pelaksanaan transformasi 2.0 melalui *rebranding* tiga anak usaha PLN Indonesia Power yaitu Cogindo Daya Bersama menjadi PLN Indonesia Power Services, Putra Indo Tenaga menjadi PLN Indonesia Power Renewables dan Indo Tenaga Hijau menjadi PLN Indonesia Geothermal untuk mendukung akselerasi menuju perusahaan berskala global

The implementation of Transformation 2.0 through the rebranding of three PLN Indonesia Power subsidiaries, namely Cogindo Daya Bersama becomes PLN Indonesia Power Services, Putra Indo Tenaga becomes PLN Indonesia Power Renewables, and Indo Tenaga Hijau becomes PLN Indonesia Geothermal to support the acceleration towards a global-scale company

📅 8 Juli July



PLN Indonesia Power telah resmi melantai dan terdaftar dalam Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon sebagai bukti komitmen perusahaan dalam mendorong transisi energi menuju NZE dan penurunan emisi karbon secara global

PLN Indonesia Power Officially Listed on the Indonesia Carbon Exchange or IDX Carbon as proof of the company's commitment to driving the energy transition toward NZE and reducing global carbon emissions

📅 30 Agustus August



Peresmian Pengoperasian PLTGU Tambak Lorok Blok 3 yang merupakan pembangkit listrik *single shaft* terbesar di Indonesia

The inauguration of the Operation of Tambak Lorok Block 3 CCPP, the largest single-shaft power plant in Indonesia

📅 3 September September



Penandatanganan Perjanjian Kerangka Studi antara PLN Indonesia Power dan Tanzania Geothermal Development Company Limited (TGDC) untuk pengembangan Pembangkit Listrik Panas Bumi di Tanzania

The signing of a Study Framework Agreement between PLN Indonesia Power and Tanzania Geothermal Development Company Limited (TGDC) for Geothermal Power Plant Development in Tanzania

📅 2 Oktober **October**



Peresmian berlayarnya *Barge Mounted Power Plant* (BMPP) 150 MW yang merupakan salah satu amanat dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

The inauguration of the Maiden Voyage of the 150 MW Barge Mounted Power Plant (BMPP), part of the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) mandate

📅 30 Oktober **October**



PLN Indonesia Power (PLN IP) melalui perusahaan patungan anak usahanya melaksanakan peluncuran pabrik *solar panel* terintegrasi pertama dan terbesar di Indonesia yang berlokasi di Kendal, Jawa Tengah

PLN Indonesia Power (PLN IP) through a joint venture of its subsidiaries, launched the first and largest integrated solar panel factory in Indonesia, located in Kendal, Central Java

📅 13 November **November**



First Synchronization Unit 9 - Jawa 9&10 Ultra Super Critical Coal Fired Steam Power Plant (2 X 1000 Mw)

First Synchronization of Unit 9 - Jawa 9&10 Ultra Super Critical Coal-Fired Steam Power Plant (2 x 1000 MW)

📅 4 Desember **December**



Kerjasama antara PLN Indonesia Power dengan Bank Indonesia dalam Pemanfaatan Limbah Racik Uang Rupiah (LRUK) untuk *cofiring* PLTU

Collaboration between PLN Indonesia Power and Bank Indonesia on the Utilization of Shredded Currency Waste (LRUK) for cofiring at SPP

📅 5 Desember **December**



Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Studi Pengembangan Panas Bumi antara PLN Indonesia Power dengan INPEX Geothermal

The signing of a Memorandum of Understanding on a Geothermal Development Study between PLN Indonesia Power and INPEX Geothermal

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Penghargaan Tahun 2024

Awards in 2024



📅 21 Februari February

Peraihan lima Penghargaan, yaitu:

1. *Gold* kategori *Best Internal Communication Implementation*
2. *Gold* kategori *Best Social Media Performance*
3. *Gold* kategori *Best Exposure in Mass Media*
4. *Gold* kategori *Best Crisis Management*
5. *Silver* kategori *Most Popular in Mass Media*

Pada acara *PLN Corporate Communication Summit 2024* oleh PT PLN (Persero)

Winning five awards, namely:

1. Gold category Best Internal Communication Implementation
2. Gold category Best Social Media Performance
3. Gold category Best Exposure in Mass Media
4. Gold category Best Crisis Management
5. Silver category Most Popular in Mass Media

At PLN Corporate Communication Summit 2024 event by PT PLN (Persero)



📅 7 Maret March

Peraihan dua penghargaan program komunikasi CSR, yaitu:

1. Sub Kategori *Sustainable Business Practice* kepada Saguling POMU
2. Sub Kategori *Community Based Development* kepada Cilegon PGU

pada ajang *Public Relation Award 2024* oleh Public Relations Indonesia

Winning two CSR communication program awards, namely:

1. Sub Category Sustainable Business Practice to Saguling POMU
2. Sub Category Community Based Development to Cilegon PGU

at the 2024 Public Relations Award event by Public Relations Indonesia



📅 8 Maret March

Penghargaan Kecelakaan Nihil (*Zero Accident*) Tahun 2024 kepada UBP Keramasan pada ajang *Zero Accident Award* oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Zero Accident Award 2024 to GBU Keramasan at the Zero Accident Award event by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia



📅 4 April April

Peraihan lima penghargaan, yaitu:

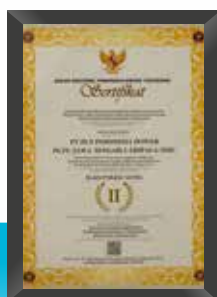
1. *The Greatest Champions of Digital Transformation & Innovation Excellence (Energy Industries)*
2. *The Best ICT Business Strategy (Energy Industries)*
3. *The Best IT Leadership (Energy Industries)*
4. *The Best CEO for Corporate Digital Transformation of The Year*
5. *The Best Women Digital Leader of The Year*

Pada ajang *Digital Technology & Innovation Awards 2024* oleh Itch Magazine

Winning five awards, namely:

1. The Greatest Champions of Digital Transformation & Innovation Excellence (Energy Industries)
2. The Best ICT Business Strategy (Energy Industries)
3. The Best IT Leadership (Energy Industries)
4. The Best CEO for Corporate Digital Transformation of The Year
5. The Best Women Digital Leader of The Year

At the Digital Technology & Innovation Awards 2024 event by Itch Magazine



30 April April

Peraihan sertifikat penerapan pedoman perlindungan sarana dan prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme kepada UBP Adipala, UBP Grati, UBP Labuan Angin oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Achievement of a certificate for the implementation of guidelines for the protection of strategic vital object facilities and infrastructure and public facilities in preventing criminal acts of terrorism to GBU Adipala, GBU Grati, and GBU Labuan Angin by the National Agency for Counter Terrorism



30 April April

Peraihan tiga penghargaan, yaitu:

1. Peringkat *Gold* (Bintang 4) WSO Indonesia Safety Culture Award WISCA
 2. WSO Pakistan Safety Culture Award WPSCA Tahun 2024
 3. PLN Indonesia Power UBP Semarang (WSO Indonesia Safety Culture Award WISCA)
- Oleh WSO Pakistan Safety Culture Award WPSCA - World Safety Organization (WSO)

Winning three awards, namely:

1. Gold Rank (4 Stars) WSO Indonesia Safety Culture Award WISCA
2. WSO Pakistan Safety Culture Award WPSCA 2024
3. PLN Indonesia Power GBU Semarang (WSO Indonesia Safety Culture Award WISCA)

By WSO Pakistan Safety Culture Award WPSCA - World Safety Organization (WSO)



1 Mei May

Penghargaan *A Leading Company in Supporting the Net Zero Emission Target* pada acara Apresiasi Listrik Indonesia oleh Majalah Listrik Indonesia

Award for A Leading Company in Supporting the Net Zero Emission Target at the Indonesian Electricity Appreciation event by Indonesian Electricity Magazine



7 Mei May

Peraihan dua belas penghargaan, yaitu:

1. Satu penghargaan kategori *premium gold* kepada UBP Priok
2. Delapan penghargaan Kategori *gold* kepada UBP Priok, UBP Bali PLTDG Pesanggaran, UBP Jabar 2 Pelabuhan Ratu, UBP Banten 3 Lontar, UBP Semarang, UBP Keramasan UP Keramasan dan UBP Jeranjang
3. Empat penghargaan kategori *silver* kepada UBP Jeranjang, UBP Kamojang UP Lahendong, UBP Banten 2 Labuan, UBP Bali dan UP Pamaron

Pada ajang CSR & PDB (Pengembangan Desa Berkelanjutan) Awards 2024 oleh ISSF (Indonesia Social Sustainability Forum)

Winning twelve awards, namely:

1. One premium gold category award to GBU Priok
2. Eight gold category awards to GBU Priok, GBU Bali, DGPP Pesanggaran, GBU Jabar 2 Pelabuhan Ratu, GBU Banten 3 Lontar, GBU Semarang, GBU Keramasan GU Keramasan, and GBU Jeranjang
3. Four silver category awards to GBU Jeranjang, GBU Kamojang, GU Lahendong, GBU Banten 2 Labuan, GBU Bali, and GU Pamaron

At the CSR & PDB (Sustainable Village Development) Awards 2024 by ISSF (Indonesia Social Sustainability Forum)



29 Mei May

Penghargaan predikat *Gold* kategori transparansi perhitungan emisi korporasi pada acara Penghargaan Transparansi Perhitungan Emisi oleh Investortrust

Gold predicate award for corporate emission calculation transparency category at the Emission Calculation Transparency Award event by Investortrust



📅 29 Mei May

Peraihan tiga penghargaan, yaitu:

1. *The Best Overseas Project*
 2. *The Best Breakthrough in Hydrogen Production*
 3. *The Best Breakthrough in Hydrogen Mobility*
- Pada ajang *Business Development and Portofolio Leadership Forum* oleh PT PLN (Persero)

Winning three awards, namely:

1. The Best Overseas Project
 2. The Best Breakthrough in Hydrogen Production
 3. The Best Breakthrough in Hydrogen Mobility
- At the Business Development and Portfolio Leadership Forum by PT PLN (Persero)



📅 29 Mei May

Peraihan tujuh penghargaan, pada kategori:

1. Dua penghargaan #Star 5 kepada UBP Grati dan UBP Saguling
 2. Satu Penghargaan #Star 4 kepada UBP Banten 1 Suralaya
 3. Tiga penghargaan kategori *Top Leader on CSR Commitment* kepada Hadi Widodo - UBP Grati, Trisno Widayato - UBP Banten 1 Suralaya dan Doni Bakar - UBP Saguling
 4. Satu penghargaan *Golden Trophy* kepada UBP Grati
- Pada ajang *TOP CSR Award 2024* oleh Majalah Top Business

Winning seven awards, in the following categories:

1. Two #Star 5 awards to GBU Grati and GBU Saguling
 2. One #Star 4 award to GBU Banten 1 Suralaya
 3. Three awards in the Top Leader on CSR Commitment category to Hadi Widodo - GBU Grati, Trisno Widayato - GBU Banten 1 Suralaya, and Doni Bakar - GBU Saguling
 4. One Golden Trophy award to GBU Grati
- At the TOP CSR Award 2024 by Top Business Magazine



📅 20 Juni June

Penghargaan *Best Sosial Reputation in Electricity Category* pada acara *6th Anniversary BUMN Brand Equity Award 2024* oleh The Economics

Best Social Reputation in Electricity Category award at the 6th Anniversary of SOE Brand Equity Award 2024 by The Economics



📅 31 Mei May

Penghargaan *Shappire Best Enterprise in Regulatory Compliance - Electricity Prosper B* pada ajang *Indonesia Regulatory Compliance Award 2024* oleh Hukum Online Indonesia

Shappire Best Enterprise in Regulatory Compliance - Electricity Prosper B Award at the Indonesia Regulatory Compliance Award 2024 by Hukum Online Indonesia



📅 27 Juni June

Penghargaan *Silver Award Gender Equality and Social Inclusion* pada ajang *Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) 2024* oleh Proper Institute

Silver Award Gender Equality and Social Inclusion at the 2024 Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) by Proper Institute



📅 29 Juni June

Peraihan tiga penghargaan yaitu:

1. *Category Over All (Juara Umum)*
 2. *Category Over All (Juara Umum I)*
 3. *Category The Best Commitment CEO*
- Pada acara *Indonesia CSR-SDG-ESG Award VII 2024* oleh Economic Review

Winning three awards, namely:

1. Category Over All (Grand Champion)
2. Category Over All (Grand Champion I)
3. Category The Best Commitment CEO

At the Indonesia CSR-SDG-ESG Award VII 2024 event by Economic Review



17 Juli July

Penghargaan kategori kehidupan sehat dan sejahtera (program kesehatan gratis dan penanganan *stunting* di Desa Taman Ayu) pada ajang Nusantara CSR Awards (NCSRA) Tahun 2024 oleh La Tofi School of Social Responsibility

Award for the healthy and prosperous life category (free health program and stunting management in Taman Ayu Village) at the 2024 Nusantara CSR Awards (NCSRA) by La Tofi School of Social Responsibility



24 Juli July

Peraihan dua penghargaan, yaitu:

1. *Very Good - HR Digitization & People Analytics*
2. *Kategori Very Good - Reward Management & Talent Retention Strategy*

Pada acara HR Excellence 2024 yang diselenggarakan oleh SWA Media Group

Winning two awards, namely:

1. *Very Good - HR Digitization & People Analytics*
2. *Category Very Good - Reward Management & Talent Retention Strategy*

At the HR Excellence 2024 event organized by SWA Media Group



25 Juli July

Penghargaan kategori sektor energi dengan Program ESG Model Ekwisata Berbasis Konservasi Penyua pada acara IDX Channel Anugerah ESG 2024 oleh IDX Channel

Award in energy sector category with ESG Program for Turtle Conservation-Based Ecotourism Model at the 2024 IDX Channel Anugerah ESG event by IDX Channel



26 Juli July

Penghargaan kategori *silver winner* atas strategi komunikasi berbasis *Diversity, Equity, Inclusion* (DEI) dan *Environment, Social, Governance* (ESG) pada acara DEI & ESG Awards (IDEAS) 2024 oleh Public Relations Indonesia

Silver winner category award for communication strategy based on Diversity, Equity, Inclusion (DEI) and Environment, Social, Governance (ESG) at the 2024 DEI & ESG Awards (IDEAS) by Public Relations Indonesia



31 Juli July

Peraihan 34 penghargaan pada tujuh kategori, yaitu

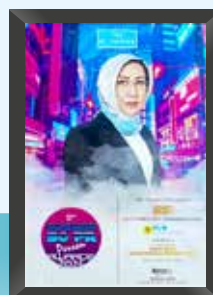
1. Kategori Inovasi Penurunan Emisi
2. Kategori Inovasi Efisiensi Air
3. Kategori Inovasi Efisiensi Energi
4. Kategori Inovasi Sosial
5. Kategori Inovasi Pengurangan Limbah B3
6. Kategori Inovasi Perlindungan Kahati
7. Kategori Inovasi 3R Limbah Padat Non B3
8. Kategori *Local Hero* Inspiratif

pada acara *Environmental and Social Innovation Awards* (ENSIA) 2024 oleh PT Sucofindo - ID Survey - KLHK RI

Winning 34 awards in seven categories, namely

1. Emission Reduction Innovation Category
2. Water Efficiency Innovation Category
3. Energy Efficiency Innovation Category
4. Social Innovation Category
5. Hazardous Waste Reduction Innovation Category
6. Kahati Protection Innovation Category
7. Hazardous Non- Hazardous Solid Waste Innovation Category
8. Inspirational Local Hero Category

at the Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) event 2024 by PT Sucofindo - ID Survey - Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia



9 Agustus August

Penghargaan 50 *Public Relation Persons Awards* 2024 pada acara *5th Indonesia PR Summit 2024* oleh The Iconomics

50 Public Relation Persons Awards 2024 at the 5th Indonesia PR Summit 2024 by The Iconomics



8 Agustus August

Peraihan tiga penghargaan, yaitu:

1. 5 Star Gold The Best Climate Transition Excellence Leadership
2. ESG Initiative of the Year
3. Best CEO of ESG Initiatives & Commitment In Green Energy Innovations

Pada acara ESG Initiative Award 2024 oleh Business Update

Winning three awards, namely:

1. 5 Star Gold The Best Climate Transition Excellence Leadership
2. ESG Initiative of the Year
3. Best CEO of ESG Initiatives & Commitment In Green Energy Innovations

At the ESG Initiative Award 2024 event by Business Update



23 Agustus August

Peraihan dua penghargaan, yaitu:

1. Penghargaan Lokasi Program Kampung Iklim (Prokklim) Kategori Utama 2024 (Kampung Binaan UBP Cilegon)
2. UBP Keramasan - Apresiasi Pendukung Priokgram Kampung Iklim (Priokklm) 2024

pada acara Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Energi (LIKE)

EBT oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Winning two awards, namely:

1. Climate Village Program Location Award (Prokklim) Main Category 2024 (GBU Cilegon Fostered Village)
2. GBU Keramasan - Appreciation of Priokgram Climate Village Supporters (Priokklm) 2024

at the Environment Climate Forestry Energy Festival (LIKE) NRE by the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia



23 Agustus August

Peraihan 58 penghargaan K3 yang terdiri dari 33 penghargaan kategori Zero Accident, 14 Penghargaan kategori P2HIV-AIDS dan 11 penghargaan kategori SMK3 pada acara Penghargaan K3 2024 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Achievement of 58 OHS awards consisting of 33 awards in Zero Accident category, 14 awards in P2HIV-AIDS category and 11 awards in SMK3 category at the 2024 OHS Awards event of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia



30 Agustus August

Peraihan tiga penghargaan kategori ESG, yaitu:

1. Kartini Generasi X
2. Kartini Generasi Milenial
3. Kartini Generasi Z

Pada acara Kartini Humas Indonesia (KaHI) 2024 oleh Humas Indonesia

Winning three ESG category awards, namely:

1. Kartini Generation X
2. Kartini Generation Millennial
3. Kartini Generation Z

At the 2024 Kartini Humas Indonesia (KaHI) event by Humas Indonesia



27 September September

Penghargaan Winner of the Grid Local Grid of The ASEAN Renewable Energy Project Awards kepada UBP Bali serta Penghargaan 2nd Runner Up of The Energy Management in Buildings and Industry kepada UBP Priok pada acara ASEAN Energy Awards 2024 oleh Asean Centre for Energy

Winner of the Grid Local Grid of The ASEAN Renewable Energy Project Awards to GBU Bali and 2nd Runner Up of The Energy Management in Buildings and Industry Award to GBU Priok at the 2024 ASEAN Energy Awards event by the Asean Center for Energy



📅 24 September September

Peraihan tiga penghargaan pada kategori:

1. *Indonesia Technology Excellence Award for AI - Energy* - UBP Suralaya
2. *Indonesia Technology Excellence Award for Digital - Energy* UBP Suralaya
3. *Technology Excellence Award for Emerging Technology* - UBP Kamojang

Pada ajang *Asian Technology Excellence Award 2024* oleh *Asian Business Review*

Winning three awards in the following categories:

1. *Indonesia Technology Excellence Award for AI - Energy* - GBU Suralaya
2. *Indonesia Technology Excellence Award for Digital - Energy* GBU Suralaya
3. *Technology Excellence Award for Emerging Technology* - GBU Kamojang

At the 2024 Asian Technology Excellence Award by Asian Business Review



📅 4 Oktober October

Peraihan lima penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Winning five Electrical Safety awards by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)



📅 7 Oktober October

Juara 2 kategori Perusahaan Non-Go Publik Non Keuangan pada acara *Annual Report Award (ARA) 2023* oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)

2nd place in Non-Go Public Company category Finance at the 2023 Annual Report Award (ARA) event by the National Committee on Governance Policy (KNKG)



📅 10 Oktober October

Peraihan delapan Penghargaan Subroto 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Winning of eight Subroto Awards 2024 organized by the Ministry of Energy and Mineral Resources



📅 10 Oktober October

Peraihan tiga Penghargaan Dharma Karya Muda kepada UBP Banten 2 Labuan, UBP Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu, UBP Banten 2 Labuan atas Inovasi yang dilakukannya pada acara Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral 2024 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Winning three Dharma Karya Muda Awards to GBU Banten 2 Labuan, GBU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu, GBU Banten 2 Labuan for their Innovations at the 2024 Dharma Karya Energy and Mineral Resources event by the Ministry of Energy and Mineral Resources



📅 10 Oktober October

Penghargaan dua *Silver Winner* Kategori Program Kehumasan Pemerintah Sub Ka tegori Korporasi Negara Pada acara Anugerah Humas Indonesia 2024 oleh Humas Indonesia

Awarding two Silver Winners in the Government Public Relations Program Category, State Corporation Sub-Category at the 2024 Indonesian Public Relations Awards by Humas Indonesia



📅 22 Oktober **October**

Penghargaan *Asian Power Energy* 2024 kepada UBP Suralaya dan UBP Kamojang oleh Charlton Media Group
Award of Asian Power Energi 2024 to GBU Suralaya and GBU Kamojang by Charlton Media Group



📅 24 Oktober **October**

Penghargaan *Indonesia Best Business Transformation* 2024 PLN Indonesia Power oleh Majalah SWA
Award for Indonesia Best Business Transformation 2024 PLN Indonesia Power by SWA Magazine



📅 29 Oktober **October**

Peraih delapan penghargaan pada Kategori Lingkungan, *Best Risk Improvement Subholding/Anak Perusahaan*, *Local Heroes*, *Biodiversity Actions*, *Be Against Sexual Harassment* pada acara *Awarding HLN 79* oleh PT PLN (Persero)

Winning eight awards in the Environmental Category, Best Risk Improvement Subholding/Subsidiary, Local Heroes, Biodiversity Actions, Be Against Sexual Harassment at the HLN 79 Awarding event by PT PLN (Persero)



📅 8 November **November**

Penghargaan *Silver Prize* kategori *Digitalization Online Tube Boiler Analysis (DOTA)* pada acara *Kepeco International Invention Fair BIXPO 2024* oleh International Federation of Inventors Associations (IFIA)
Silver Prize Award for Digitalization Online Tube Boiler Analysis (DOTA) category at Kepeco International Invention Fair BIXPO 2024 event by the International Federation of Inventors Associations (IFIA)



📅 21 November **November**

Penghargaan *Silver Achievement Operational Excellence Project Competition (OPEXCON) 2024* oleh Shift Indonesia
Silver Achievement Award Operational Excellence Project Competition (OPEXCON) 2024 by Shift Indonesia



📅 21 November **November**

Penghargaan *Platinum Rank Trophy* pada acara *Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024* oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR)
Platinum Rank Trophy Award at the 2024 Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) event by the National Center for Corporate Reporting (NCCR)



📅 21 November November

Penghargaan *Best Emerging Large Scale Renewable Energy Development* 2024 pada acara *Electricity Connect 2024* oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia
Award of Best Emerging Large Scale Renewable Energy Development 2024 at the Electricity Connect 2024 event by the Indonesian Electrical Power Society



📅 29 November November

Peraih tujuh penghargaan, yaitu
1. *The Most Committed Corporate to SDG's on Environment* untuk kantor pusat
2. Dua *platinum* untuk UBP Bali Pesanggaran dan Mrica
3. Tiga *Gold* untuk UBP Bali Pemaron, Jeranjang dan Ulubelu
4. Satu *Silver* kepada UBP Suralaya
Pada acara Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2024 oleh Corporate Forum for Community Development
Winning seven awards, namely
1. The Most Committed Corporate to SDG's on Environment for head office
2. Two platinum for GBU Bali Pesanggaran and Mrica
3. Three Gold for GBU Bali Pemaron, Jeranjang and Ulubelu
4. One Silver for GBU Suralaya
At the Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2024 event by the Corporate Forum for Community Development



📅 17 Desember December

Peraih 25 penghargaan pada lima kategori, yaitu:
1. Bioenergi
2. Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan
3. Efisiensi Energi Kategori Manajemen Energi di Industri dan Bangunan Gedung
4. Bidang Efisiensi Energi Kategori Manajemen Energi di Industri Pertambangan dan Energi
5. Efisiensi Energi Inovasi Khusus
Pada acara Penghargaan EBTKE Tahun 2024 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Winning 25 awards in five categories, namely:
1. Bioenergy
2. Various New and Renewable Energy
3. Energy Efficiency in the Energy Management Category in Industry and Building Construction
4. Energy Efficiency Field in the Energy Management Category in the Mining and Energy Industry
5. Specific Innovation Energy Efficiency
At the 2024 EBTKE Awards by the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia



📅 6 Desember December

Penghargaan *Platinum* pada ajang Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXVIII 2024 oleh PT Wahana Kendali Mutu (WKM) dan Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia (AMMPI)
Platinum Award at the 2024 National Quality and Productivity Work Meeting (TKMPN) XXVIII by PT Wahana Kendali Mutu (WKM) and the Indonesian Quality & Productivity Management Association (AMMPI)



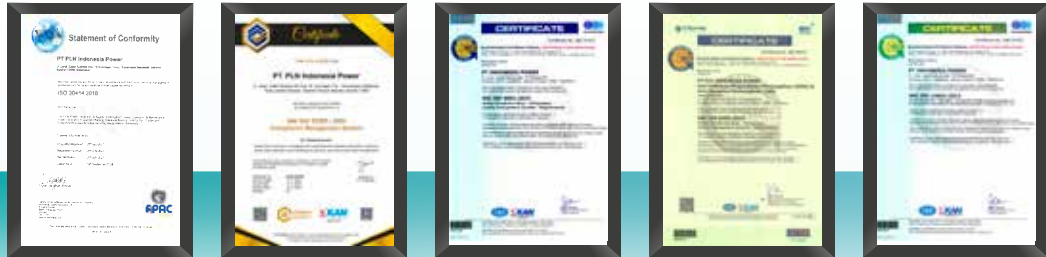
📅 20 Desember December

Penghargaan *Excellence in Green Innovation Award Special Awards* pada acara Investortrust BUMN Awards oleh Investortrust.ID
Excellence in Green Innovation Award Special Awards at the Investortrust SOE Awards event by Investortrust.ID



Sertifikasi Tahun 2024

Certifications in 2024



No	Nama Organisasi Organization	Tanggal Perolehan Date Obtained	Badan Pemberi Grantor	Masa Berlaku Period of Validity
1	ISO 30414:2018 Human Capital Reporting kepada Kantor Pusat To Head Office	18 November 2024 November 18, 2024	Worldwide Quality Assurance (WQA) Asia Pasific	26 Juli 2025 July 26, 2025
2	ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan Compliance Management System Kepada kantor Pusat To Head Office	11 November 2024 November 11, 2024	PT Chesna Certification	10 November 2027 November 10, 2027
3	ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality Management System 1. Kantor Pusat Head Office 2. Unit Bisnis Pemeliharaan Maintenance Business Unit 3. UBP GBU Suralaya 4. UBP GBU Priok 5. UBP GBU Grati 6. UBP GBU Semarang 7. UBP GBU Jawa Barat Pelabuhan Ratu 8. UBP GBU Cilegon 9. UBP GBU Jawa Tengah 2 Adipala 10. UBP GBU Banten 1 Suralaya 11. UBP GBU Banten 2 Labuan 12. UBP GBU Bali 13. UBP GBU Mrica 14. UBP GBU Banten 3 Lontar 15. UBP GBU Saguling & O&M 16. UBP GBU Kamojang & O&M	14 Februari 2023 February 14, 2023	PT Sucofindo	13 Februari 2026 February 13, 2026
4	ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality Management System 1. Kantor Pusat Head Office 2. UBP GBU Tello 3. UBP GBU Keramasan 4. UBP GBU Jambi 5. UBP GBU Mahakam 6. UBP GBU Kepulauan Riau 7. UBP GBU Bengkulu 8. UBP GBU Bukittinggi 9. UBP GBU Teluk Sirih 10. UBP GBU Ombilin 11. UBP GBU Asam-asam 12. UBP GBU Barito 13. UBP GBU Singkawang	2 April 2024 April 2, 2024	PT Sucofindo	1 April 2027 April 1, 2027
5	ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System 1. Kantor Pusat Head Office 2. Unit Bisnis Pemeliharaan Maintenance Business Unit 3. UBP GBU Suralaya 4. UBP GBU Priok 5. UBP GBU Grati 6. UBP GBU Semarang 7. UBP GBU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu 8. UBP GBU Cilegon 9. UBP GBU Jawa Tengah 2 Adipala 10. UBP GBU Banten 1 Suralaya 11. UBP GBU Banten 2 Labuan 12. UBP GBU Bali 13. UBP GBU Mrica 14. UBP GBU Banten 3 Lontar 15. UBP GBU Saguling & O&M 16. UBP GBU Kamojang & O&M	14 Februari 2023 February 14, 2023	PT Sucofindo	13 Februari 2026 February 13, 2026



No	Nama Organisasi Organization	Tanggal Perolehan Date Obtained	Badan Pemberi Grantor	Masa Berlaku Period of Validity
6	ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System 1. Kantor Pusat Head Office 2. UBP GBU Tello 3. UBP GBU Keramasan 4. UBP GBU Jambi 5. UBP GBU Mahakam 6. UBP GBU Kepulauan Riau 7. UBP GBU Bengkulu 8. UBP GBU Bukittinggi 9. UBP GBU Teluk Sirih 10. UBP GBU Ombilin 11. UBP GBU Asam-asam 12. UBP GBU Barito 13. UBP GBU Singkawang	2 April 2024 April 2, 2024	PT Sucofindo	1 April 2027 April 1, 2027
7	ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems 1. Kantor Pusat Head Office 2. Unit Bisnis Pemeliharaan Maintenance Business Unit 3. UBP GBU Suralaya 4. UBP GBU Priok 5. UBP GBU Grati 6. UBP GBU Semarang 7. UBP GBU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu 8. UBP GBU Cilegon 9. UBP GBU Jawa Tengah 2 Adipala 10. UBP GBU Banten 1 Suralaya 11. UBP GBU Banten 2 Labuan 12. UBP GBU Bali 13. UBP GBU Mrica 14. UBP GBU Banten 3 Lontar 15. UBP GBU Saguling & O&M 16. UBP GBU Kamojang & O&M	14 Februari 2024 February 14, 2024	PT Sucofindo	14 Februari 2026 February 14, 2026
8	ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems 1. Kantor Pusat Head Office 2. UBP GBU Tello 3. UBP GBU Keramasan 4. UBP GBU Jambi 5. UBP GBU Mahakam 6. UBP GBU Kepulauan Riau 7. UBP GBU Bengkulu 8. UBP GBU Bukittinggi 9. UBP GBU Teluk Sirih 10. UBP GBU Ombilin 11. UBP GBU Asam-asam 12. UBP GBU Barito 13. UBP GBU Singkawang	2 April 2024 April 2, 2024	PT Sucofindo	1 April 2027 April 1, 2027
9	ISO 28000:2007 / SNI ISO 28000:2009 Sistem Manajemen Keamanan Pada Rantai Pasokan Supply Chain Security Management System 1. Kantor Pusat Head Office 2. Unit Bisnis Pemeliharaan Maintenance Business Unit 3. UBP GBU Priok 4. UBP GBU Grati 5. UBP GBU Semarang 6. UBP GBU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu 7. UBP GBU Cilegon 8. UBP GBU Jawa Tengah 2 Adipala 9. UBP GBU Banten 1 Suralaya 10. UBP GBU Banten 2 Labuan 11. UBP GBU Bali 12. UBP GBU Mrica 13. UBP GBU Banten 3 Lontar 14. UBP GBU Saguling & O&M 15. UBP GBU Kamojang & O&M	14 Februari 2023 February 14, 2023	PT Sucofindo	13 Februari 2026 February 13, 2026



No	Nama Organisasi Organization	Tanggal Perolehan Date Obtained	Badan Pemberi Grantor	Masa Berlaku Period of Validity
10	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Safety and Health Management System (SMK3) 1. UBP GBU Jawa Tengah 2 Adipala 2. UBP GBU Asam-asam 3. UBP GBU Berau 4. UBP GBU Bengkulu 5. UBP GBU Bukittinggi 6. UBP GBU Banten 2 Labuan 7. UBP GBU Bali 8. UBP GBU Banten 3 Lontar 9. UBP GBU Barru 10. UBP GBU Banten 1 Suralaya 11. UBP GBU Barito 12. UBP GBU Cilegon 13. UBP GBU Grati 14. UBP GBU Jambi 15. UBP GBU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu 16. UBP GBU Jeranjang 17. UBP GBU Kalbar 1 18. UBP GBU Kamojang dan O&M 19. UBP GBU Kepulauan Riau 20. UBP GBU Keramasan 21. UBP GBU Labuhan Angin 22. UBP GBU Mahakam 23. UBP GBU Mrica 24. UBP GBU Ombilin 25. UBP GBU Pangkalan Susu 26. UBP GBU Priok 27. UBP GBU Saguling & O&M 28. UBP GBU Singkawang 29. UBP GBU Suralaya 30. UBP GBU Semarang 31. UBP GBU Teluk Sirih 32. UBP GBU Tello 33. Unit Bisnis Pemeliharaan Maintenance Service Unit	Berbeda-beda per unit Different for each unit	PT Sucofindo	Berbeda-beda per unit Different for each unit
11	ISO 55001:2014 Sistem Manajemen Asset Asset Management System 1. Kantor Pusat Head Office 2. UBP GBU Suralaya 3. UBP GBU Saguling 4. UBP GBU Grati 5. UBP GBU Semarang 6. UBP GBU Mrica 7. UBP GBU Priok 8. UBP GBU Kamojang 9. UBP GBU Bali 10. UBH Jakarta 11. UBP GBU Banten 1 Suralaya 12. UBP GBU Banten 2 Labuan 13. UBP GBU Banten 3 Lontar 14. UBP GBU Cilegon 15. UBP GBU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu 16. UBP GBU Jawa Tengah Adipala 17. UBP GBU Keramasan 18. UBP GBU Jambi 19. UBP GBU Asam-asam 20. UBP GBU Teluk Sirih 21. UBP GBU Bengkulu 22. UBP GBU Bukittinggi	16 Desember 2024 December 16, 2024	PT BSI Group Indonesia	26 Oktober 2027 October 26, 2027
12	ISO 50001:2018 Sistem Manajemen Energi Energy Management System 1. Kantor Pusat Head Office 2. UBP GBU Suralaya 3. UBP GBU Saguling 4. UBP GBU Semarang 5. UBP GBU Grati 6. UBP GBU Mrica 7. UBP GBU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu 8. UBP GBU Jawa Tengah 2 Adipala 9. UBP GBU Priok 10. UBP GBU Kamojang 11. UBP GBU Bali 12. UBP GBU Banten 1 Suralaya 13. UBP GBU Banten 2 Labuan 14. UBP GBU Banten 3 Lontar 15. UBP GBU Cilegon 16. UBP GBU Pangkalan Susu	16 Januari 2024 January 16, 2024	PT Sucofindo	16 Januari 2026 January 16, 2026



No	Nama Organisasi Organization	Tanggal Perolehan Date Obtained	Badan Pemberi Grantor	Masa Berlaku Period of Validity
13	ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi Information Security Management System Bidang Information Technology and Digital Information Technology and Digital Division	9 Februari 2024 February 9, 2024	PT Sucofindo	25 Oktober 2025 October 25, 2025
14	ISO 22301:2019 Sistem Manajemen Keberlanjutan Bisnis Business Continuity Management System 1. Kantor Pusat Head Office 2. UBP GBU Priok	13 Februari 2024 February 13, 2024	PT BSI Group Indonesia	4 Februari 2027 February 4, 2027
15	ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System 1. Kantor Pusat Head Office 2. Unit Bisnis Pemeliharaan Maintenance Business Unit 3. UBP GBU Priok 4. UBP GBU Suralaya 5. UBP GBU Mrica 6. UBP GBU Semarang 7. UBP GBU Grati 8. UBP GBU Bali 9. UBP GBU Saguling 10. UBP GBU Kamojang 11. UBP GBU Banten 1 Suralaya 12. UBP GBU Banten 2 Labuan 13. UBP GBU Banten 3 Lontar 14. UBP GBU Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu 15. UBP GBU Adipala 16. UBP GBU Cilegon 17. UBP GBU Keramasan 18. UBP GBU Mahakam 19. UBP GBU Barito 20. UBP GBU Pangkalan Susu 21. UBP GBU Barru 22. UBP GBU Labuhan Angin 23. UBP GBU Jeranjang	2 Juli 2024 July 2, 2024	Mutu Internasional	18 April 2026 April 18, 2026



Informasi Situs Website Perusahaan

Information on Company Website

PLN Indonesia Power senantiasa berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada seluruh *stakeholders*, melalui situs resmi PLN Indonesia Power dengan alamat <https://www.plnindonesiapower.co.id>. Situs resmi PLN Indonesia Power tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang menyajikan informasi secara komunikatif dan *update* bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum.

PLN Indonesia Power is consistently committed to providing easy access to information for all stakeholders through PLN Indonesia Power's official website at <https://www.plnindonesiapower.co.id>. The official website of PLN Indonesia Power is available in both Bahasa Indonesia and English, offering up-to-date and communicative information for stakeholders and the general public.

Informasi pada *website* PLN Indonesia Power meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Profil memuat berbagai informasi Sekilas PLN Indonesia Power, Manajemen yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, Sejarah, Penghargaan & Sertifikasi yang diperoleh dalam setahun terakhir, Kamus & Istilah, Keterbukaan Informasi Publik, Pertumbuhan Perusahaan, Kinerja Perusahaan, Testimoni *Stakeholder*.
2. Produk & Layanan memuat informasi terkait dengan Produk dan Layanan PLN Indonesia Power serta profil ringkas Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan.
3. Tata Kelola berisi informasi terkait dengan informasi Praktik Tata Kelola yang dijalankan PLN Indonesia Power, Pedoman Tata Kelola, Pedoman Perilaku, Pedoman Dewan, Mekanisme Pengaduan, Pengendalian Gratifikasi, WBS, LHKPN, GCG *Assessment*, Informasi Pemegang Saham, Informasi RUPS dan Tata Kelola Manajemen Risiko.
4. Komunitas & Lingkungan memuat informasi terkait dengan Program Ketaatan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, *Corporate Social Responsibility*, Produk CSR, dan Program Keanekaragaman Hayati.
5. Komunikasi Berkelanjutan yang memuat Beritra, Dokumentasi *Video*, *InPower Magz*, *Report*, dan *eBook*.
6. *Report* memuat informasi *Sustainability Report*, *Statistic Report* dan *Annual Report*.
7. *Whistleblowing System* memuat informasi tentang Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran.
8. Karir memuat informasi terkait dengan terdiri dari informasi Peluang Karir, Rekrutmen dan IP Academy.
9. Kontak.

Informasi tambahan dapat dilihat di bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

The information presented on the PLN Indonesia Power website includes the following:

1. Profile, covering various information on PLN Indonesia Power Overview, Management that consists of the Board of Commissioners and the Board of Directors, History, Achievements & Certifications earned within the past year, Glossary & Terms, Public Information Disclosure, Company Growth, Company Performance, and Stakeholder Testimonials.
2. Products & Services, covering information on PLN Indonesia Power's products and services and a brief profile of Subsidiaries and Joint Ventures.
3. Governance, covering information on Governance Practices carried out by PLN Indonesia Power, Code of Governance, Code of Conduct, Board Manual, Grievance/ Report Procedures, Gratuity Control, Whistleblowing System (WBS), State Official Wealth Report (LHKPN), GCG *Assessment*, Shareholders, General Meeting of Shareholders (GMS), and Risk Management.
4. Community & Environment, covering information on Environmental Compliance Programs, Occupational Health, Safety and Environment, Corporate Social Responsibility, Corporate Products, and Biodiversity Programs.
5. Sustainable Communication, covering News, Video Documentation, *InPower Magz*, Reports, and eBooks.
6. Reports, covering information on Sustainability Reports, Statistics Reports, and Annual Reports.
7. Whistleblowing System, covering information on the Management of Violation Reports.
8. Career, covering information on Career Opportunities, Recruitment, and IP Academy.
9. Contacts.

Additional information can be found in the section of Access to Company Data and Information in the chapter of Corporate Governance.



UBP Priok, Jakarta
Priok GBU, Jakarta



Tinjauan Penunjang Bisnis

Business Support
Overview



Sumber Daya Manusia

Human Capital

PLN Indonesia Power berupaya menghadapi tantangan bisnis dan menjamin keberlangsungan kegiatan usaha ketenagalistrikan melalui penyiapan tenaga kerja yang profesional, kompeten dan berintegritas tinggi yang dilandasi tata nilai untuk mencapai visi perusahaan. Selaras dengan transformasi organisasi PT PLN (Persero) melalui pembentukan *subholding* pembangkitan, PLN Indonesia Power menerapkan *Human Experience Management System* (HXMS), yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor 228.K/010/IP/2022 yang berpegang pada prinsip-prinsip:

- keselarasan dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan daya saing (*competitive advantage*) dan nilai tambah serta menjamin keberlanjutan Perusahaan;
- keselarasan dengan tata nilai Perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing insani dalam rangka penciptaan budaya unggul;
- kesetaraan dan keadilan baik internal maupun eksternal Perusahaan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis;
- mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas kerja; dan
- memberikan pengalaman positif kepada Tenaga Kerja sehingga mampu menunjukkan potensi terbaik.

Sistem penunjang HXMS ditetapkan dalam rangka pengelolaan Tenaga Kerja yang produktif dan pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan yang berlaku dengan memperhatikan 4 (empat) sasaran HXMS:

A. Tepat Ukuran (*Right Size*)

Penciptaan model operasi, desain organisasi, dan tata nilai yang selaras dengan strategi Perusahaan meliputi:

- Strategi dan Tata Kelola Tenaga Kerja
Perencanaan dan penentuan arah pengelolaan Tenaga Kerja untuk penciptaan model operasi, desain organisasi, dan formasi Tenaga Kerja yang selaras dengan strategi Perusahaan dan efektivitas tata Kelola dalam bentuk:
 - Blueprint* Tata Kelola Tenaga Kerja, yang berisi penetapan tujuan, sasaran, strategi, program kerja dan langkah-langkah implementasi yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan Tenaga Kerja guna memastikan Perusahaan tumbuh berkelanjutan; dan

PLN Indonesia Power strives to face business challenges and ensure the sustainability of electricity business activities by preparing a professional, competent, and highly integrated workforce based on values to achieve the Company's vision. In line with the organizational transformation of PT PLN (Persero) through the establishment of a generation subholding, PLN Indonesia Power implements the Human Experience Management System (HXMS), which is stated in the Board of Directors' Decision No. 228.K/010/IP/2022, which adheres to the following principles:

- alignment with the Company's vision, mission, and objectives by considering effectiveness and efficiency to enhance competitive advantage and added value as well as to ensure the Company's sustainability;
- alignment with the Company's core values to improve the quality and competitiveness of human capital in order to foster an excellent culture;
- equality and fairness both internally and externally within the Company to create harmonious industrial relations;
- prioritizing the use of integrated information technology to increase work productivity; and
- providing a positive experience to the Workforce to enable them to demonstrate their best potential.

The supporting HXMS system is established to manage a productive Workforce and ensure compliance with applicable laws and regulations as well as the Company's Collective Labor Agreement (PKB), with due consideration to the 4 (four) HXMS objectives:

A. Right Size

The development of an operating model, organizational design, and core values that align with the Company's strategy, including:

- Workforce Strategy and Governance
Planning and setting the direction for Workforce management to create an operating model, organizational design, and Workforce structure that align with the Company's strategy and governance effectiveness, in the form of:
 - Workforce Governance Blueprint, which outlines the objectives, targets, strategies, work programs, and implementation steps that must be carried out in managing the Workforce to ensure the Company's sustainable growth; and

- b) *Road Map* Tata Kelola Tenaga Kerja, merupakan rencana kerja strategis untuk periode 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Tenaga Kerja untuk mendukung implementasi *Blueprint* Tata Kelola Tenaga Kerja.
- 2) Manajemen Proses Bisnis
Penciptaan model, alur proses, dan desain organisasi yang memberi nilai tambah, selaras dengan strategi, visi dan misi Perusahaan, meliputi kerangka proses bisnis, pemetaan proses bisnis dan peran.
- 3) Manajemen Organisasi
Perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pengelompokan Tenaga Kerja untuk penciptaan model operasi dan desain organisasi yang selaras dengan strategi Perusahaan, meliputi:
 - a) Pedoman manajemen organisasi yang terdiri atas:
 - i. Pedoman pengembangan organisasi;
 - ii. Pedoman analisis jabatan; dan
 - iii. Pedoman evaluasi jabatan dan pengelompokan jabatan;
 - b) Organisasi dan tata kerja yang terdiri atas struktur organisasi, formasi jabatan, serta tugas pokok dan fungsi jabatan;
 - c) Uraian jabatan;
 - d) Bobot jabatan; dan
 - e) Kompetensi organisasi dan individu.
- 4) Manajemen Budaya dan Perubahan
Pengelolaan tata nilai Perusahaan yang dibutuhkan untuk menunjang penciptaan model operasi dan desain organisasi yang selaras dengan strategi Perusahaan, meliputi:
 - a) Tata nilai Perusahaan; dan
 - b) Program perubahan budaya.
- 5) *Employee Value Proposition*.
Sekumpulan makna intrinsik dan ekstrinsik yang diberikan Perusahaan kepada Pegawai atas keterampilan, kapabilitas dan pengalaman Pegawai yang menjadi pembeda dari Perusahaan pesaing, meliputi:
 - a) *Employer Branding*, merupakan cara Perusahaan untuk menciptakan pandangan/ persepsi positif yang meningkatkan reputasi dan citra Perusahaan sehingga kandidat Pegawai dan Pegawai melihat makna yang berbeda dibandingkan Perusahaan lainnya;
 - b) *Employee Retention*, merupakan cara dan upaya Perusahaan untuk mempertahankan sumber daya manusia yang potensial dalam Perusahaan agar dapat mencapai tujuannya; dan
- b) Workforce Governance Road Map, a five-year strategic work plan for Workforce management that supports the implementation of the Workforce Governance Blueprint.
- 2) Business Process Management
The development of models, process flows, and organizational designs that add value and align with the Company's strategy, vision, and mission, including business process frameworks, business process mapping, and role assignments.
- 3) Organization Management
Planning, directing, and controlling the grouping of Workforce to create an operating model and organizational design aligned with the Company's strategy, including:
 - a) Organizational management guidelines consisting of:
 - i. Organizational development guidelines;
 - ii. Job analysis guidelines; and
 - iii. Job evaluation and job classification guidelines;
 - b) Organization and work procedures, including the organizational structure, job formations, and the main duties and functions of each role;
 - c) Job descriptions;
 - d) Job weight/ complexity of the position; and
 - e) Organizational and individual competencies.
- 4) Culture and Change Management
Managing the Company's core values needed to support the development of an operating model and organizational design aligned with the Company's strategy, including:
 - a) The Company's core values; and
 - b) Culture change programs.
- 5) Employee Value Proposition.
A set of intrinsic and extrinsic values provided by the Company to employees in exchange for their skills, capabilities, and experiences that differentiate the Company from its competitors, including:
 - a) Employer Branding, is the Company's way of creating a positive view/perception that enhances the Company's reputation and image so that prospective Employees and current Employees see a different meaning compared to other Companies;
 - b) Employee Retention, is the Company's method and effort to retain potential human resources within the Company to achieve its goals; and

c) *Employee Engagement*, merupakan cara dan upaya Perusahaan dalam menciptakan hubungan emosional antara Pegawai dan Perusahaan dengan ditandai perasaan antusias dan terikat sehingga berpotensi memberikan dampak positif pada Perusahaan.

B. Tepat Kompetensi (*Right Skill*)

Penciptaan talenta unggul, berdaya saing, dan memiliki adaptabilitas tinggi terhadap perubahan transformatif yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kerja, meliputi:

1) Manajemen Sumber Tenaga Kerja

Pengelolaan strategi perencanaan tenaga kerja dan penetapan sumber tenaga kerja, untuk menunjang kebutuhan organisasi dan strategi Perusahaan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Strategi perencanaan tenaga kerja mempertimbangkan: strategi Perusahaan; perubahan asset perusahaan; produktivitas; kompetensi baru; perubahan demografi, ekonomi, dan ekonomi; ketentuan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Bersama yang mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja. Strategi penetapan sumber tenaga kerja dalam bentuk *build, buy, borrow, bind*, atau alih daya.

2) Manajemen Akuisisi Pegawai

Pengelolaan metode rekrutmen bersumber dari internal maupun eksternal Perusahaan. Seleksi dan penempatan jabatan berdasarkan persyaratan kebutuhan jabatan, culture fit, kompetensi dan *employee value proposition*.

3) Manajemen Talenta dan Pegawai;

Pengelolaan talenta dan Pegawai melalui: identifikasi dan penentuan posisi kunci/penting (*identify critical position*); pencarian kandidat potensial untuk masuk dalam kelompok Pegawai bertalenta/*talent pools*/*talent acquisition*); pengklasifikasian talenta berdasarkan kapasitas dan kinerja (*talent classification*); program pengembangan yang diberikan kepada talenta untuk menduduki posisi kunci/penting (*talent development*); mobilisasi talenta untuk pengembangan kapasitas (*talent mobility*); program mempertahankan talenta dengan pendekatan retensi (*talent retention*); dan pengukuran kesiapan talenta untuk ditempatkan di jabatan yang lebih tinggi/strategis.

4) Manajemen Pengembangan Pegawai.

Pengelolaan pengembangan Pegawai melalui program pembelajaran, *mentoring*, *coaching*, penugasan/*exposure*, dan keanggotaan komunitas profesi.

c) *Employee Engagement*, is the Company's method and effort in creating an emotional connection between Employees and the Company, marked by feelings of enthusiasm and attachment, thus potentially generating a positive impact on the Company.

B. Right Skill

The creation of superior, competitive talents with high adaptability to transformative changes, aimed at developing and maintaining skills that align with the Company's needs and adapt to changes in the work environment, includes:

1) Workforce Management

The management of workforce planning strategies and the determination of workforce sources to support the needs of the organization and the Company's short-, medium-, and long-term strategies. Workforce planning strategies consider: the Company's strategy; changes in company assets; productivity; new competencies; demographic, economic, and workforce changes; as well as laws and regulations and Collective Labor Agreements that promote workforce productivity. Workforce sourcing strategies include build, buy, borrow, bind, or outsourcing.

2) Employee Acquisition Management

The management of recruitment methods sourced from both internal and external candidates of the Company. Selection and job placement are based on job requirements, culture fit, competencies, and the employee value proposition.

3) Talent and Employee Management

The management of talent and employees through: identifying and determining key/critical positions (*identify critical position*); seeking potential candidates to join the talent pools (*talent acquisition*); classifying talent based on capacity and performance (*talent classification*); development programs provided to talent to occupy key/critical positions (*talent development*); mobilizing talent to build capacity (*talent mobility*); programs to retain talent through retention approaches (*talent retention*); and measuring talent readiness for placement in higher/strategic positions.

4) Employee Development Management

The management of employee development through learning programs, mentoring, coaching, assignments/exposures, and membership in professional communities.

C. Tepat Pembiayaan (*Right Spend*)

Pengelolaan Tenaga Kerja yang efisien namun tetap memperhatikan kesetaraan internal dan eksternal serta berorientasi pada kinerja yang superior yang bertujuan untuk memastikan investasi dalam SDM memberikan nilai tambah yang sesuai dengan tujuan perusahaan, meliputi:

1) Manajemen Kinerja Pegawai

Pengelolaan penilaian kinerja Pegawai meliputi tahapan perencanaan, pemantauan, dan penilaian kinerja Pegawai.

2) Manajemen Penghargaan Pegawai

Pengelolaan penghargaan ekstrinsik dan intrinsik secara efisien dengan tetap memperhatikan kesetaraan internal dan eksternal serta berorientasi pada kinerja superior.

3) Manajemen Hubungan Industrial;

Pengelolaan interaksi antara para pelaku proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan yang melibatkan Pegawai yang diwakili oleh Persatuan Pegawai, Perusahaan, dan Pemerintah sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan meningkatkan produktivitas usaha melalui proses yang memperhatikan kesetaraan internal dan eksternal serta berorientasi pada kinerja unggul.

4) Manajemen Pemutusan Hubungan Kerja

merupakan pengelolaan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan manajemen hubungan industrial yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), meliputi: pemutusan hubungan kerja karena mencapai batas usia pensiun (pensiun normal) dan pensiun dini.

D. Tepat Sistem Informasi (*Right System*)

Pengelolaan proses dan sistem berkelanjutan dengan mengupayakan penerapan teknologi terintegrasi yang mampu meningkatkan *employee experience* dalam pengembangan tenaga kerja saat ini dan masa depan, meliputi: Sistem Informasi Tenaga Kerja dengan prinsip *single source of truth*; dan manajemen administrasi pelayanan pegawai pada masa kerja aktif dan masa purna karya.

Sejalan dengan Program *Holding* dan *Sub-Holding*, per tanggal 15 Desember 2022, Perusahaan mengatur kerangka pengelolaan SDM melalui Surat Keputusan Direksi No. 228/K/010/IP/2022 tentang Human Experience Management System (HXMS).

C. Right Spend

Efficient manpower management while prioritizing both internal and external equality as well as oriented towards rewarding superior performance. Ultimately, this aims to ensure that investments in Human Capital provide tangible value aligned with the Company's objectives.

1) Employee Performance Management

The management of employee performance assessment includes the stages of planning, monitoring, and evaluating employee performance.

2) Employee Rewards Management

The efficient management of extrinsic and intrinsic rewards while maintaining internal and external equity, with a focus on superior performance.

3) Industrial Relations Management;

The management of interactions among parties involved in the production process of goods and/or services within the Company, involving employees represented by the Employee Union, the Company, and the Government, to create harmonious relations and improve business productivity through processes that consider internal and external equity and are oriented toward superior performance.

4) Termination of Employment Management

It is the management of termination of employment in accordance with the industrial relations management that has been agreed upon in the Joint Working Agreement (PKB), including termination of employment due to reaching the retirement age limit (normal retirement) and early retirement.

D. Right System

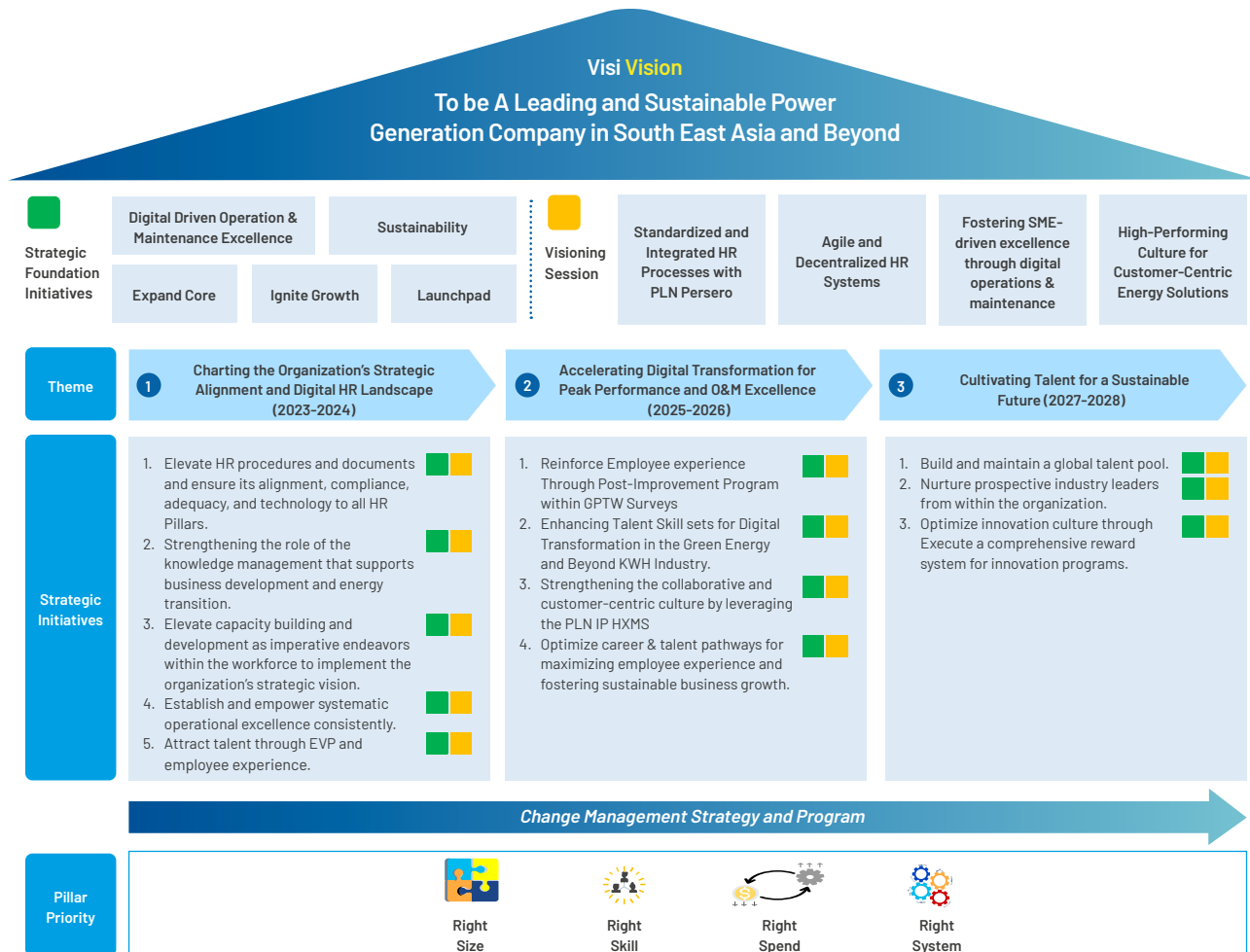
Sustainable process and system management by striving to implement integrated technology that can improve employee experience in developing the current and future workforce, including Workforce Information System with the principle of single source of truth; and administrative management of employee services during active employment and retirement.

In line with the Holding and Sub-Holding Programs, as of December 15, 2022, the Company has regulated the HC management framework through the Decision of the Board of Directors No. 228/K/010/IP/2022 on the Human Experience Management System (HXMS).

Sistem Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Tenaga Kerja Organizational Development and Manpower Planning System

Roadmap Human Experience Management System PLN Indonesia Power

Roadmap Human Experience Management System PLN Indonesia Power



Budaya Perusahaan Corporate Culture

Budaya Perusahaan yang berlaku selama tahun 2024 adalah **Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (AKHLAK)**. Penjelasan terkait Budaya Perusahaan telah disajikan pada bagian Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The Corporate Culture that applies during 2024 is **Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative (AKHLAK)**. Explanation related to Corporate Culture has been presented in the Company Profile section of this Annual Report.

AKHLAK
AMANAH KOMPETEN HARMONIS
LOYAL ADAPTIF KOLABORATIF

Analisis Kecukupan SDM

HC Adequacy Analysis

Jumlah SDM Perusahaan tahun 2024 adalah sebanyak 5.409 pegawai. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu 5.452 orang. Informasi lebih lanjut terkait Komposisi SDM telah dijelaskan pada bagian Profil Perusahaan Sub Bab Komposisi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Laporan Tahunan ini.

The number of Company HC in 2024 is 5,409 employees. This number has decreased compared to 2023, which was 5,452 people. Further information regarding HR Composition has been explained in the Company Profile section, Sub-Chapter on Employee Composition and Competency Development in this Annual Report.

Penyempurnaan Kebijakan SDM

HC Policy Improvement

Sebagai bentuk pengelolaan SDM yang berkelanjutan, PLN Indonesia Power senantiasa memperbarui dan menyusun kebijakan secara berkala melalui Surat Keputusan (SK) Direksi dan kebijakan turunan lainnya. Pada tahun 2024, telah disahkan beberapa kebijakan baru, yaitu sebagai berikut:

1. Edaran Direksi Nomor 0001.E/DIR/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan *Reward* Lomba Karya Inovasi.
2. Peraturan Direksi Nomor 0013.P/DIR/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 144.K/010/IP/2018 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai.
3. Edaran Direksi Nomor 0002.E/DIR/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pembinaan Person *Grade* dan Evaluasi Position *Grade* di Masa Transisi Tahun 2023.
4. Peraturan Direksi Nomor 0014.P/DIR/2024 tanggal 3 April 2024 tentang Tenaga Alih Daya
5. *Statement of Corporate Intent* Nomor 0018.P/DIR/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Pengarusutamaan Gender.
6. Peraturan Direksi Nomor 0025.P/DIR/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai.
7. Edaran Direksi Nomor 0004.E/DIR/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Pengelolaan Tim Strategis Perusahaan
8. Edaran Direksi Nomor 0010.E/DIR/2024 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Perubahan Edaran Direksi Nomor 0002.E/DIR/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pembinaan *Person Grade* dan Evaluasi Position *Grade* di Masa Transisi Tahun 2023.
9. Peraturan Direksi Nomor 0040.P/DIR/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Sistem Manajemen Penghargaan Pegawai

As part of sustainable human capital management, PLN Indonesia Power consistently updates and formulates policies on a regular basis through Board of Directors Decision and other derivative policies. In 2024, several new policies were enacted, as follows:

1. Board of Directors' Circular Letter No. 0001.E/DIR/2024 dated January 2, 2024, on Guidelines for the Implementation and Rewards of the Innovation Work Competition.
2. Board of Directors' Regulation No. 0013.P/DIR/2024 dated March 22, 2024, on the Second Amendment to Board of Directors' Decision No. 144.K/010/IP/2018 on the Employee Competency and Career Development System.
3. Board of Directors' Circular No. 0002.E/DIR/2024 dated March 28, 2024, on Technical Operational Guidelines for Person Grade Development and Position Grade Evaluation During the 2023 Transition Period.
4. Board of Directors Regulation No. 0014.P/DIR/2024 dated April 3, 2024, on Outsourced Personnel.
5. Statement of Corporate Intent No. 0018.P/DIR/2024 dated May 16, 2024, on Gender Mainstreaming.
6. Board of Directors Regulation No. 0025.P/DIR/2024 dated May 31, 2024, on the Employee Performance Management System.
7. Board of Directors' Circular No. 0004.E/DIR/2024 dated May 31, 2024, on the Management of the Company's Strategic Teams.
8. Board of Directors' Circular No. 0010.E/DIR/2024 dated October 23, 2024, on the Amendment to Board of Directors' Circular No. 0002.E/DIR/2024 dated March 28, 2024, on Technical Operational Guidelines for Person Grade Development and Position Grade Evaluation During the 2023 Transition Period.
9. Board of Directors Regulation No. 0040.P/DIR/2024 dated November 5, 2024, on the Employee Rewards Management System.

10. Peraturan Direksi Nomor 1190.K/DIR/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Tarif <i>Pay For Person</i> dan <i>Pay For Position</i> 11. Edaran Direksi Nomor 0014.E/DIR/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Piket Keandalan Pembangkit 12. Edaran Direksi Nomor 0015.E/DIR/2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Tukar Dinas Bagi Pegawai yang Bekerja <i>Shift</i> 13. Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (<i>Respectful Workplace Policy</i>)	10. Board of Directors Regulation No. 1190.K/DIR/2024 dated December 30, 2024, on Pay for Person and Pay for Position Rates. 11. Board of Directors' Circular No. 0014.E/DIR/2024 dated December 30, 2024, on Power Plant Reliability On-Call Duty. 12. Board of Directors' Circular No. 0015.E/DIR/2024 dated December 30, 2024, on Shift Work Duty Exchange for Employees. 13. Respectful Workplace Policy – Policy on Mutual Respectful Behavior in the Workplace.

Pengelolaan Pegawai Purna Bakti

Management of Post-Retirement Employees

Kebijakan Pengelolaan Pegawai Purna Bakti berdasarkan pada:

1. PKB Tahun 2024–2025 Bab V Pasal 31 tentang Kepesertaan Pensiun;
2. Surat Keputusan Direksi No. 205.K/010/IP/2012 tentang Pengelolaan Manfaat Pensiun Pegawai Melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
3. Surat Keputusan Direksi No. 146.K/010/IP/2020 tentang Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti;
4. Peraturan Direksi Nomor: 0040.P/DIR.2024 Tentang Sistem Manajemen Penghargaan Pegawai pasal 34 tentang Hak Pegawai MPP.

PLN Indonesia Power memiliki kebijakan memberikan hak kepada pegawai untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang terdiri dari Program MPP Tiga Bulan dan Program MPP Satu Tahun sebelum memasuki usia pensiun (56 tahun).

Dalam rangka MPP, pegawai diberikan pembekalan melalui program kewirausahaan dan sertifikasi, serta diberikan penghargaan kepada pegawai dengan mengakomodir perjalanan ibadah kerohanian. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti Kewirausahaan 2 orang dan memberikan penghargaan pegawai dengan mengakomodir 74 pegawai untuk melaksanakan perjalanan ibadah kerohanian.

The Policy of concerning Post-Retirement Employees is based on:

1. Collective Labor Agreement (CLA) for 2024–2025, Chapter V, Article 31 on Pension Participation;
2. Board of Directors' Decision Letter No. 205.K/010/IP/2012 on the Management of Employee Pension Benefits through Financial Institution Pension Funds;
3. Board of Directors' Decision Letter No. 146.K/010/IP/2020 on Pre-Retirement Briefing and Training;
4. Board of Directors' Regulation No. 0040.P/DIR.2024 on the Employee Rewards Management System, Article 34 concerning Employee Rights during MPP.

PLN Indonesia Power has a policy that grants employees the right to enter a Pre-Retirement Period (MPP), which consists of a Three-Month MPP Program and a One-Year MPP Program prior to reaching the retirement age of 56 years.

As part of the MPP, employees are provided with preparatory programs including entrepreneurship training and certification, as well as a form of appreciation through the facilitation of spiritual pilgrimage trips. In 2024, the Pre-Retirement Entrepreneurship Training Program was conducted for 2 employees, and 74 employees were granted spiritual pilgrimage trips as a form of recognition.

Sistem Rekrutmen Pegawai dan Penempatan Pegawai Employee Recruitment System and Employee Placement

Rekrutmen dilaksanakan dengan mengutamakan kompetensi sebagai dasar proses seleksi serta memberikan perlakuan yang adil atau kesempatan yang sama bagi semua pihak berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*). Proses rekrutmen ini bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja dengan kompetensi terbaik yang memberikan keunggulan bersaing (*competitive advantage*), serta menjamin kontinuitas ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung usaha pencapaian sasaran kinerja Perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 85.K/010/IP/2012 rekrutmen dapat dilakukan dari sumber internal dan eksternal. Rekrutmen dengan sumber eksternal terdiri atas pasar tenaga kerja, lembaga pendidikan, anak perusahaan, PLN Group maupun institusi lainnya. Rekrutmen dari sumber internal terdiri atas pegawai organik dan pegawai tugas karya yang dilaksanakan melalui sidang komite jabatan berdasarkan ketentuan dan mekanisme mutasi jabatan yang berlaku di Perusahaan.

Pada tahun 2024, rekrutmen dilaksanakan terpusat oleh PT PLN (Persero) melalui Program Rekrutmen Bersama BUMN yang menghasilkan 93 pegawai baru bagi PLN Indonesia Power.

Recruitment is carried out by prioritizing competency as the basis of the selection process and by providing fair treatment or equal opportunities for all parties, based on the principles of Good Corporate Governance (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*). The objective of this recruitment process is to acquire a workforce with the best competencies that provide a competitive advantage, as well as to ensure the continuity of workforce availability in support of achieving the Company's performance targets.

Based on Board of Directors' Decision No. 85.K/010/IP/2012, recruitment can be carried out from both internal and external sources. External recruitment sources include the labor market, educational institutions, subsidiaries, PLN Group, and other institutions. Internal recruitment sources consist of organic employees and assignment-based employees, conducted through position committee meetings in accordance with the Company's prevailing job transfer regulations and mechanisms.

In 2024, recruitment was carried out centrally by PT PLN (Persero) through the SOE Joint Recruitment Program which resulted in 93 new employees for PLN Indonesia Power.

Tabel Rekrutmen Pegawai Tahun 2020 - 2024 (orang)

Table of Employee Recruitment for 2020-2024 (persons)

Tahun Year	Tingkat Pendidikan Education Level			Jumlah Total
	S2 Master	S1 Bachelor	D3 Diploma	
2024	0	56	37	93
2023	4	-	-	4
2022*	-	-	-	-
2021*	-	-	-	-
2020	-	-	25	25

* tidak dilakukan rekrutmen karena arahan *freeze* rekrutmen dari Holding

* No recruitment was conducted due to a recruitment freeze directive from the Holding company.

Setelah dinyatakan lolos pada tahap seleksi rekrutmen, calon pegawai mengikuti diklat prajabatan yang merupakan tahap akhir proses rekrutmen pegawai yang dilaksanakan dalam kurun waktu minimum 7 (tujuh) bulan dan maksimum 12 (dua belas) bulan sejak awal dimulai.

Diklat prajabatan ini bertujuan untuk memenuhi kompetensi minimal yang diperlukan sebagai pegawai di PLN Indonesia Power. Apabila calon pegawai dinyatakan lulus diklat prajabatan, selanjutnya ditetapkan sebagai pegawai organik. Pada tahun 2024 terdapat penempatan pegawai yaitu 93 orang.

After being declared successful in the recruitment selection stage, prospective employees undergo pre-service training, which is the final stage of the employee recruitment process. This training is conducted over a period of no less than 7 (seven) months and no more than 12 (twelve) months from the start date.

The purpose of this pre-service training is to fulfill the minimum competency requirements needed to become an employee at PLN Indonesia Power. If the prospective employee passes the pre-service training, they are then appointed as an organic (permanent) employee. In 2024, a total of 93 employees were placed.

Sistem Pembelajaran Pegawai Employee Learning System

Pengembangan Kompetensi Pegawai Employee Competency Development

Sebagai langkah pemutakhiran dan peningkatan kemampuan serta skill pegawai, Indonesia Power secara berkala melakukan pengembangan kepada seluruh pegawainya sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Kebijakan perusahaan dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan pengembangan mengacu pada:

1. Surat Keputusan Direksi No. 228/K/010/IP/2022 tentang *Human Experience Management System* (HXMS),
2. Surat Keputusan Direksi No. 74.K/010/IP/2020 tentang Sistem Pembelajaran Pegawai dan keputusan turunannya,
3. Surat Keputusan Direksi No. 144.K/010/IP/2018 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir,
4. Surat Keputusan Direksi Nomor: 0131.K/DIR/2024 tentang Transisi Pengelolaan Pembelajaran Pegawai Tahun 2024,
5. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2024-2025 yang disepakati antara Manajemen dan Persatuan Pegawai (PP) dan Amandemennya, pendidikan dan pelatihan masuk ke BAB IV tentang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Pasal 22.

Perusahaan selalu berusaha memberikan berbagai program pendidikan dan pelatihan secara optimal dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja Pegawai. Adapun jenis pendidikan dan pelatihan yang

As part of its efforts to update and enhance employee capabilities and skills, Indonesia Power regularly conducts development programs for all employees based on needs and priority scale. The Company's policy on training and development implementation refers to:

1. Board of Directors' Decision Letter No. 228/K/010/IP/2022 on the Human Experience Management System (HXMS),
2. Board of Directors' Decision Letter No. 74.K/010/IP/2020 on the Employee Learning System and its derivative decisions.
3. Board of Directors' Decision Letter No. 144.K/010/IP/2018 on the Employee Competency and Career Development System,
4. Board of Directors' Decision Letter No. 0131.K/DIR/2024 on the Transition of Employee Learning Management in 2024,
5. Collective Labor Agreement (CLA) for 2024-2025, agreed upon by Management and the Employee Union (PP) and its amendments, in which education and training are covered under Chapter IV on Employee Development and Training, Article 22.

The Company always strives to provide various education and training programs optimally to improve employee competence and work quality. The types of education and training provided include pre-service learning programs,

diselenggarakan mencakup program pembelajaran prajabatan, program pembelajaran profesi dan sertifikasi, program pembelajaran kepemimpinan, program pembelajaran inisiatif strategik korporat, program pembelajaran penunjang, dan Diklat pembekalan masa purna bakti.

professional and certification learning programs, leadership learning programs, corporate strategic initiative learning programs, supporting learning programs, and pre-retirement briefing and training programs.

Model Pengembangan Development Model

Pembelajaran yang efektif memerlukan model yang teruji dan terbukti dapat digunakan dalam pembelajaran pegawai. Model 10-20-70 adalah kerangka kerja pembelajaran dan pengembangan yang menunjukkan bahwa pembelajaran karyawan yang efektif terjadi melalui kombinasi pengalaman formal, interaksi sosial, dan pengalaman praktis. Model pengembangan 10-20-70 mengacu pada ketentuan berikut:

1. 10 (*formal learning*) adalah pengembangan untuk peningkatan *Knowledge, Skill, Attitude* (KSA) peserta pembelajaran melalui program pembelajaran.
2. 20 (*social learning*) adalah pengembangan yang terjadi melalui interaksi dengan orang lain seperti mentor, rekan kerja, atau tim.
3. 70 (*experiential learning*) adalah pengembangan langsung melalui pekerjaan sehari-hari atau proyek tertentu yang menantang.

Effective learning requires a proven and reliable model that can be applied to employee development. The 10-20-70 model is a learning and development framework that illustrates how effective employee learning occurs through a combination of formal experiences, social interaction, and practical experience. The 10-20-70 development model is based on the following components:

1. 10 (Formal Learning): Development aimed at enhancing the participant's Knowledge, Skills, and Attitude (KSA) through structured learning programs.
2. 20 (Social Learning): Development that occurs through interaction with others such as mentors, colleagues, or team members.
3. 70 (Experiential Learning): Direct development through daily work activities or challenging projects.

Realisasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Realization of Employee Competency Development

Pengembangan kompetensi pegawai PLN Indonesia Power ditetapkan selaras untuk mendukung implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2020-2024 dan mengedepankan adanya kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai tanpa memandang gender. Ini merupakan salah satu komitmen PLN Indonesia Power untuk menghargai hak asasi manusia yang berlaku universal. Pelatihan dan Pengembangan mencakup pengenalan organisasi, visi dan misi, tata nilai dan budaya perusahaan, kompetensi teknis yang diperlukan, serta kemampuan memimpin yang diselaraskan dengan strategi *Human Capital* dengan mengedepankan adanya kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai.

The competency development of PLN Indonesia Power employees is designed to align with the implementation of the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2020-2024 and emphasizes equal opportunities for all employees regardless of gender. This reflects PLN Indonesia Power's commitment to upholding universally recognized human rights. Training and development activities cover organizational orientation, the Company's vision and mission, core values and corporate culture, required technical competencies, as well as leadership capabilities, all of which are aligned with the Human Capital strategy and underscore equal opportunities for all employees.

Kebijakan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai diatur dalam PKB Pasal 22 tentang Pendidikan dan Pelatihan dan Kebijakan Sistem Pembelajaran Pegawai. Selain itu, PLN Indonesia Power terus berupaya untuk memperkuat strategi sistem pengelolaan SDM, merekrut *talent* terbaik melalui serangkaian program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif.

Pendidikan dan Pelatihan

Education and Training

Pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pegawai dapat menjalankan pekerjaannya. Yaitu memenuhi kompetensi bidang sesuai Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) yang diembannya sehingga mendukung produktivitas di lingkungan kerja. Adapun jenis Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan mencakup:

1. Program Pembelajaran Prajabatan
Program pembelajaran prajabatan merupakan kegiatan proses seleksi untuk mengevaluasi kesesuaian karakter dan kompetensi peserta dengan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ), serta untuk memberikan pengenalan dan pemahaman kepada peserta mengenai bisnis inti Perusahaan dan kompetensi standar kelistrikan. Program pembelajaran prajabatan dapat terdiri atas Pembinaan Sikap Mental Disiplin, Orientasi Perusahaan, Pembidangan, dan *On the Job Training* (OJT).
2. Program Pembelajaran Profesi dan Sertifikasi
Program pembelajaran profesi dan sertifikasi diselenggarakan sebagai bagian dari proses pembinaan dan pengembangan kompetensi bidang untuk memenuhi KKJ Bidang yang dipersyaratkan pada jabatan dan sesuai dengan struktur profesi yang berlaku di Perusahaan. Materi program pembelajaran profesi dan sertifikasi mengacu pada standar KKJ dan/atau standar profesi yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan bisnis Perusahaan. Sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan untuk pegawai berupa sertifikasi mandatori, sertifikasi expertise dan sertifikasi keahlian.
3. Program Pembelajaran Kepemimpinan
Program pembelajaran kepemimpinan adalah diklat kepemimpinan yang diselenggarakan Perusahaan sebagai bagian dari proses pengembangan kompetensi dan pembinaan karir pegawai untuk memenuhi kompetensi utama, kompetensi peran dan kompetensi bidang yang

The policy of equal opportunity for all employees to access competency development is regulated in the Collective Labor Agreement (CLA) Article 22 on Education and Training, as well as in the Employee Learning System Policy. In addition, PLN Indonesia Power continues to strengthen its human resource management strategy by recruiting top talent through a series of comprehensive training and development programs.

Education and training for all employees is carried out to ensure that each employee can carry out their work. Namely, fulfilling the field competency according to the Job Competency Needs (KKJ) they hold to support productivity in the work environment. The types of education and training provided include:

1. Pre-Job Learning Program
The pre-job learning program is a selection process activity that evaluates the suitability of participants' character and competency concerning the Job Competency Needs (KKJ), as well as provides participants with an introduction and understanding of the Company's core business and electrical standard competencies. The pre-job learning program can consist of Mental Attitude Discipline Development, Company Orientation, Fieldwork, and On the Job Training (OJT).
2. Professional Learning and Certification Programs
Professional learning and certification programs are conducted as part of the coaching and development process to enhance field competencies, fulfilling the Field KKJ requirements for the position and in accordance with the applicable professional structure within the Company. The material of the professional learning and certification programs refers to the KKJ standards and/or professional standards applicable nationally and internationally related to the Company's business. Competency certification implemented for employees is in the form of mandatory certification, expertise certification and skills certification.
3. Leadership Learning Program
The leadership learning program is a leadership training organized by the Company as part of the competency development and career development process for employees to fulfill the main competencies, role competencies and field competencies required at

dipersyaratkan pada setiap jenjang jabatan sesuai tuntutan jalur karir yang diproyeksikan bagi pegawai. Program pembelajaran kepemimpinan terdiri atas Diklat Penjenjangan, dan Leadership Development Program (LDP) *Series*.

4. Program Pembelajaran Inisiatif Strategic Korporat
Program pembelajaran inisiatif strategik korporat merupakan program pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja Unit/Korporat dalam jangka pendek maupun jangka panjang atau berbasis Business Issue/Performance dan *Business Concern*.
5. Program Pembelajaran Penunjang
Pembelajaran penunjang adalah pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh Perusahaan di luar program pembelajaran profesi dan sertifikasi, maupun program pembelajaran kepemimpinan. Pembelajaran penunjang tidak bersifat wajib, dan dilaksanakan sesuai kebutuhan Perusahaan. Pembelajaran penunjang meliputi Pendidikan Formal, *Workshop/Lokakarya/Seminar dan Knowledge Management*.
6. Program Pembekalan Masa Purna Bakti
Diklat pembekalan masa purna bakti diselenggarakan Perusahaan untuk memberikan pembekalan dan persiapan bagi pegawai dalam menghadapi masa purna bakti yang memuat materi penyiapan sikap, mental, perilaku Pegawai dan istri/suami dalam masa pensiun. Peserta program pembekalan masa purna bakti adalah pegawai yang memiliki sisa masa kerja maksimum 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun normal atau pegawai yang berhak mendapat program pembekalan akibat terbitnya suatu kebijakan Direksi dengan ketentuan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai atau tidak sedang menjalani sanksi disiplin.

Di tahun 2024 telah terlaksana program pembelajaran sesuai dengan jenis program yang meliputi:

- a. Program Pembelajaran Prajabatan
- b. Program Pembelajaran Profesi dan Sertifikasi
- c. Program Pembelajaran Kepemimpinan
- d. Program Pembelajaran Inisiatif Stratejik Korporat meliputi: *Academy Meeting*, Pembelajaran Berbasis Kinerja (PBK), *Parenting-Sistering*, Sertifikasi *Beyond kWh*, dan Serifikasi K3L.
- e. Program Pembelajaran Penunjang meliputi Pembelajaran penunjang Inovasi dan *Knowledge Sharing*
- f. Pendidikan Pelatihan Pembekalan Masa Purna Bakti
- g. Program penugasan diluar Pendidikan Pelatihan yaitu asesmen kompetensi

each level of position according to the demands of the projected career path for employees. The leadership learning program consists of the Leveling Training and the Leadership Development Program (LDP) *Series*.

4. Corporate Strategic Initiative Learning Program
The corporate strategic initiative learning program is a learning program aimed at improving the performance of Units/Corporations in the short and long term or based on Business Issue/Performance and Business Concern.
5. Supporting Learning Program
Supporting learning is education and training needed by the Company outside of professional and certification learning programs, as well as leadership learning programs. Supporting learning is not mandatory and is implemented according to the needs of the Company. Supporting learning includes Formal Education, Workshops/ Seminars and Knowledge Management.
6. Retirement Preparation Program
Retirement preparation training is held by the Company to provide preparation and provision for employees in facing retirement, which includes material on preparing attitudes, mentality, and behavior of employees and their wives/husbands during retirement. Participants in the retirement preparation program are employees who have a maximum remaining work period of 5 (five) years before the normal retirement age or employees who are entitled to receive the preparation program due to the issuance of a Board of Directors policy with the provision that they are not in the process of being examined for employee disciplinary violations or are not undergoing disciplinary sanctions.

In 2024, learning programs were implemented according to the types of programs including:

- a. Pre-Service Learning Program
- b. Professional and Certification Learning Program
- c. Leadership Learning Program
- d. Corporate Strategic Initiative Learning Program including: *Academy Meeting*, Performance-Based Learning (PBK), *Parenting-Sistering*, Beyond kWh Certification, and K3L Certification.
- e. Supporting Learning Programs including Innovation and Knowledge Sharing Supporting Learning
- f. Education Training Provision for Retirement
- g. Assignment programs outside of Education Training, namely competency assessment

Total realisasi program pembelajaran di tahun 2024 adalah sebanyak 101 program, dengan realisasi program pendidikan pelatihan PLN Indonesia Power sebanyak 4.505 pegawai. Dengan jumlah jam pelatihan mencapai 395.554 jam sehingga rata-rata jam pelatihan mencapai 31 jam per pegawai.

The total number of learning programs implemented in 2024 was 101 programs, with a total of 4,505 PLN Indonesia Power employees participating in education and training programs. The total training hours reached 395,554 hours, resulting in an average of 31 training hours per employee.

Tabel Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024

Table of Education and Training Realization in 2024

Program Pelatihan Training Program	Durasi (Jam) Duration (Hours)			Jumlah Peserta (Orang) Number of Participants (Person)			Rata-rata Jam Pelatihan (Durasi/Orang) Average Training Hours (Duration/Person)		
	Manaje- men Manage- ment	Staf Staff	Jumlah Total	Manaje- men Manage- ment	Staf Staff	Jumlah Total	Manaje- men Manage- ment	Staf Staff	Jumlah Total
Diklat yang dikelola IP dan Pusediklat Training managed by IP and Pusediklat									
Diklat Seleksi Pegawai Baru (Diklat Prajabatan). New Employee Selection Training (Pre-Service Training).	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Pembelajaran Profesi dan Sertifikasi. Professional and Certification Learning Program	25.902	223.556	249.458	1.123	16.441	17.564	23	14	37
Program Pembelajaran Kepemimpinan. Leadership Learning Program.	6920	8.528	15.448	172	465	637	40	18	58
Program Pembelajaran Inisiatif Strategik Korporat. Corporate Strategic Initiative Learning Program.	3.816	32.740	36.556	197	2.196	2.393	19	15	34
Program Pembelajaran Penunjang. Supporting Learning Program.	12.112	78.372	90.484	1.042	8.255	9.297	12	9	21
Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti. Retirement Provision Training.	368	3240	3.608	49	419	468	7	8	15
Jumlah Total	49.118	346.436	395.554	2.583	27.776	30.359	19	12	31

Pendidikan Formal

Formal Education

PLN Indonesia Power senantiasa memfasilitasi pegawai untuk mendapatkan kualifikasi profesional yang memadai melalui jalur pendidikan formal guna terus meningkatkan kinerja organisasi. Pegawai PLN Indonesia Power yang telah dinyatakan lulus dari berbagai lembaga pendidikan baik di dalam negeri maupun luar negeri di tahun 2024 adalah sebanyak 211 pegawai, dan yang masih melaksanakan program pendidikan baik di dalam dan di luar negeri.

Adapun rincian realisasi 211 orang yang telah dan masih melaksanakan program pendidikan formal tugas belajar adalah sebagai berikut:

PLN Indonesia Power always facilitates employees to obtain adequate professional qualifications through formal education to continue to improve organizational performance. PLN Indonesia Power employees who have graduated from various educational institutions both domestically and abroad in 2024 are 211 employees, and who are still carrying out educational programs both domestically and abroad.

The details of the realization of 211 people who have and are still carrying out formal education programs for study assignments are as follows:

Realisasi Program Pendidikan Formal Pada Tahun 2024

Realization of Formal Education Programs in 2024

Strata Pendidikan Education Level	Program Pendidikan Education Program
S2 Dalam Negeri Master's degree domestic	178
S2 Luar Negeri Master's degree abroad	33
Jumlah Total	211

Jumlah Pegawai yang Telah Lulus Pendidikan Formal Hingga Tahun 2024

Number of Employees Who Have Completed Formal Education Until 2024

No	Tahun Year	Universitas University	Jenjang Level	Jumlah Total
1	2018	Universitas Indonesia Universitas Indonesia	S2 Master's Degree (S2)	1
		Universitas Teknologi Malaysia Universitas Teknologi Malaysia	S2 Master's Degree (S2)	1
2	2019	Aberdeen University	S2 Master's Degree (S2)	1
		Institut Teknologi Bandung Institut Teknologi Bandung	S2 Master's Degree (S2)	1
		Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada	S2 Master's Degree (S2)	3
		Universitas Indonesia Universitas Indonesia	S2 Master's Degree (S2)	1
3	2020	Institut Teknologi Bandung Institut Teknologi Bandung	S2 Master's Degree (S2)	4
		Institut Teknologi Sepuluh Nopember Institut Teknologi Sepuluh Nopember	S2 Master's Degree (S2)	20
		Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada	S2 Master's Degree (S2)	1

No	Tahun Year	Universitas University	Jenjang Level	Jumlah Total
4	2021	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	S2	13
		Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Master's Degree (S2)	
		Universitas Indonesia Universitas Indonesia	S2 Master's Degree (S2)	1
5	2022	Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada	S2 Master's Degree (S2)	1
6	2023	Auckland University	S2 Master's Degree (S2)	1
7	2024	Delft University	S2 Master's Degree (S2)	1
		Institut Teknologi Bandung Institut Teknologi Bandung	S2 Master's Degree (S2)	1
		Institut Teknologi Sepuluh Nopember	S2	5
		Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Master's Degree (S2)	
		Monash University	S2 Master's Degree (S2)	1
		Universitas Indonesia Universitas Indonesia	S2 Master's Degree (S2)	5
Jumlah Total				62

Sertifikasi

Certifications

PLN Indonesia Power memastikan tersedianya tenaga kerja yang terampil dalam bidang ketenagalistrikan melalui program sertifikasi bekerjasama dengan lembaga sertifikasi di bidangnya. Jenis sertifikasi pegawai yang diselenggarakan untuk tahun 2024 tergantung dari kebutuhan unit kerja berdasarkan *training need analysis* (TNA) yang fokus pada *business issue* sebagai berikut:

PLN Indonesia Power ensures the availability of skilled workers in the electricity sector through a certification program in collaboration with certification institutions in their fields. The type of employee certification held for 2024 depends on the needs of the work unit based on a training need analysis (TNA) that focuses on business issues such as:

Jenis sertifikasi Type of certification	Jumlah pegawai yang tersertifikasi Number of certified employees
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Competency Certification for Electrical Power Engineering Personnel	150
Operasi Operations	67
Pemeliharaan Maintenance	83
Sertifikasi K3 & Lingkungan OHS & Environmental Certification	237
Sertifikasi Ahli K3 Umum General OHS Expert Certification	5
Sertifikasi Auditor Energi Energy Auditor Certification	35
<i>Contractor's Safety Management System (CSMS) Certification</i>	48
Sertifikasi Damkar B Firefighter Certification B	5
Sertifikasi Damkar C Firefighter Certification C	8
Sertifikasi Damkar D Firefighter Certification D	8
Sertifikasi Manajer Energi Energy Manager Certification	16
Sertifikasi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) First Aid Certification (P3K)	45



Jenis sertifikasi Type of certification	Jumlah pegawai yang tersertifikasi Number of certified employees
Sertifikasi Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) Hazardous Waste Management Certification (PLB3)	9
Sertifikasi Pengelolaan Limbah Non B3 (PLNB3) Non-Hazardous Waste Management Certification (PLNB3)	4
Sertifikasi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) Certification for Operational Supervisor of Wastewater Treatment (POPAL)	12
Sertifikasi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POPPU) Certification for Operational Supervisor of Air Pollution Control Installation (POPPU)	11
Sertifikasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air Limbah (PPPA) Certification for Person in Charge of Wastewater Pollution Control (PPPA)	10
Sertifikasi Penanggung jawab pengendalian pencemaran udara (PPPU) Certification for Person in Charge of Air Pollution Control (PPPU)	21
Sertifikasi Keahlian Expertise Certification	44
<i>Infra Red Thermography Course & Internasional Certification Level-I</i>	2
<i>ISO Vibration & Certification Category I</i>	4
<i>ISO Vibration & Certification Category II</i>	3
Sertifikasi <i>Qualified Risk Management Professional</i> (QRMP) Qualified Risk Management Professional (QRMP) Certification	25
<i>Certified Reliability Maintenance Professional Trainer</i> (CMRP)	10

Jumlah pegawai yang telah sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di tahun 2024 adalah sebesar 150 orang.

Dari pelaksanaan sertifikasi di atas, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan diwajibkan Perusahaan untuk setiap pegawai Operasi dan Pemeliharaan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2016 pasal 25 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan bahwa setiap tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi. Untuk pelaksanaan sertifikasi lainnya bersifat *non-mandatory*.

The number of employees who have certified Electrical Engineering Personnel Competency in 2024 is 150 people.

From the implementation of the certification above, the Electrical Engineering Competency Certification is required by the Company for every Operation and Maintenance employee referring to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 10 of 2016 article 25 concerning the Procedures for Accreditation and Certification of Electrical Power that every electrical engineering worker working in the electrical power business must have a Competency Certificate. For the implementation of other certifications, it is non-mandatory.

Biaya Pengembangan Kompetensi Pegawai

Employee Competency Development Costs

Selama tahun 2024, PLN Indonesia Power telah memiliki anggaran pendidikan dan pelatihan adalah sebesar Rp11,25 miliar yaitu menurun dibandingkan tahun 2023. Adanya transformasi *Holding-Subholding* yang mengakibatkan adanya penambahan jumlah pegawai di PLN Indonesia Power semakin banyak akan kebutuhan pembelajaran di Perusahaan yang turut serta dalam meningkatkan realisasi anggaran pembelajaran.

During 2024, PLN Indonesia Power had an education and training budget of Rp11.25 billion, decreasing compared to 2023. The Holding-Subholding transformation has resulted in an increase in the number of employees at PLN Indonesia Power, which will increase the need for learning in the Company, which also helps increase the realization of the learning budget.

Tabel Realisasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan (Rp miliar)

Table of Education and Training Budget Realization (Rp billion)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Education and training cost	11,25	81,94	50,28	32,53
Biaya Sertifikasi Pegawai Biaya Sertifikasi Pegawai	-	19,89	4,23	3,03
Jumlah Total	11,25	81,94	50,28	32,53

Proyeksi Pengembangan SDM ke Depan

Future HC Development Projections

Sesuai dengan hasil *Training Need Analysis* (TNA), pengembangan kompetensi di tahun 2025 adalah sebanyak 69 kali dan dengan biaya sebesar Rp12 miliar.

According to the results of the Training Need Analysis (TNA), competency development in 2025 will be 69 times and cost Rp12 billion.

Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai

Employee Competency and Career Coaching System

Pengukuran dalam Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai

Employee Competency and Career Development Measurement

Pengukuran dalam pengembangan kompetensi dan karir pegawai dilakukan oleh Perusahaan salah satunya melalui metode asesmen. *Feedback* hasil asesmen disampaikan kepada Pegawai dan Atasan Pegawai. Asesmen Pegawai bertujuan untuk memetakan kompetensi maupun potensi pegawai agar dapat dilakukan pembinaan terhadap kompetensi dan karir pegawai.

Competency and career development measurement for employees are carried out by the Company, one of which is through the assessment method. The assessment results are provided as feedback to both the employee and the employee's supervisor. The purpose of employee assessments is to map out the competencies and potential of employees, enabling the development of their competencies and career paths.

Tabel Metode Pengukuran dalam Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai

Table of Measurement Method for Employee Competency and Career Development

Metode Pengukuran Measurement Method	Jenis Asesmen Type of Assessment	Proyeksi 2025 Projection Level
Asesmen Pegawai Employee Assessment	SKD BUMN SKD BUMN	Direksi BUMN Board of Directors of SOEs
	Soft Competency PLN DIRKOM 2021 Soft Competency of PLN's Directors and Commissioners 2021	Direksi PLN Board of Directors of PLN
	Soft Competency PLN DIRKOM 2021 Soft Competency of PLN's Directors and Commissioners 2021	Manajemen Atas Top Management
	Soft Competency PLN DIRKOM 2021 Soft Competency of PLN's Directors and Commissioners 2021	Manajemen Menengah Middle Management
	Soft Competency PLN DIRKOM 2021 Soft Competency of PLN's Directors and Commissioners 2021	Manajemen Dasar Entry-Level Management
	Soft Competency PLN DIRKOM 2021 Soft Competency of PLN's Directors and Commissioners 2021	Supervisi Atas Top Supervisor
	Soft Competency PLN DIRKOM 2021 Soft Competency of PLN's Directors and Commissioners 2021	Supervisi Dasar Entry-Level Supervisor

Perencanaan Suksesi

Succession Planning

Perencanaan suksesi pegawai merupakan lanjutan dari tahap pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan. Suksesi Jabatan merupakan rangkaian proses penelusuran, pengidentifikasian, pembinaan dan pengembangan kompetensi dan karir Pegawai dalam mengisi jabatan saat dibutuhkan Perusahaan.

Employee succession planning is the next step after the competency development phase. Position succession is a series of processes involving the tracking, identification, nurturing, and development of employee competencies and careers to fill positions when needed by the Company.

Pembinaan Karir

Career Coaching

Pembinaan karir dilaksanakan melalui kegiatan mutasi jabatan yang diatur dalam Keputusan Direksi No. 144.K/010/IP/2018 tanggal 14 September 2018 sebagaimana diubah oleh Keputusan Direksi No. 72.K/010/IP/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi No. 144.K/010/IP/2018 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai, Keputusan Direksi No. 051.K/010/IP/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Jalur Karir dan Keputusan Direksi No. 050.K/010/IP/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Asesmen Kompetensi.

Career coaching is carried out through job rotation activities, which are regulated by Board of Directors' Decision No. 144.K/010/IP/2018 dated September 14, 2018, as amended by Board of Directors' Decision No. 72.K/010/IP/2022 on Amendments to Board of Directors Decision No. 144.K/010/IP/2018 on the Employee Competency and Career Development System, Board of Directors' Decision No. 051.K/010/IP/2019 dated May 9, 2019, on Career Paths, and Board of Directors' Decision No. 050.K/010/IP/2021 dated June 7, 2021, on Competency Assessment.

Tabel Mutasi Jabatan

Table of Job Rotation

Jenis Mutasi Jabatan Type of Job Transfer	Penjelasan Explanation
Promosi Jabatan Promotion	Alih tugas dari satu jabatan ke jabatan lain pada jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. Reassignment from one position to another at one level higher.
Rotasi Jabatan Rotation	Alih tugas dari satu jabatan ke jabatan lain pada jenjang jabatan yang sama. Reassignment from one position to another at the same level.

Jenis Mutasi Jabatan Type of Job Transfer	Penjelasan Explanation
Demosi Jabatan Demotion	Alih tugas dari satu jabatan ke jabatan lain pada jenjang jabatan yang lebih rendah dan tidak menyebabkan pegawai mengalami penurunan grade. Reassignment from one position to another at a lower level, without resulting in a downgrade in the employee's grade.

Pelaksanaan mutasi jabatan mengutamakan pola pergerakan karir yang diatur dalam Kebijakan Jalur Karir. Dalam melaksanakan pergerakan karir, PLN Indonesia Power mempertimbangkan beberapa faktor meliputi kebutuhan organisasi, kemampuan, keahlian dan kompetensi pegawai, rencana pengembangan karir, dan program pelatihan serta rencana suksesi jabatan.

The implementation of job rotation prioritizes the career movement pattern as regulated in the Career Path Policy. In carrying out career movements, PLN Indonesia Power considers several factors, including organizational needs, employee capabilities, skills and competencies, career development plans, training programs, and succession planning for positions.

Tabel Pengembangan Karir Tahun 2024 (orang)

Table of Career Development in 2024 (employee)

Keterangan Description	Jumlah Pegawai Number of Employee	Rotasi Rotation	Promosi Promosi
Jenis Kelamin Gender			
Pria Male	4.868	1.093	493
Wanita Female	541	101	35
Jumlah Total	5.409	1.194	528
Jenjang Jabatan Position Level			
Manajemen Atas Top Management	12	4	5
Manajemen Menengah Middle Management	80	13	9
Senior Specialist	9	7	-
Expert	1	1	-
Manajemen Dasar Entry-Level Management	252	59	35
Specialist	68	18	2
Junior Expert	-	-	-
Generalist 3	1.078	260	87
Generalist 2	2.907	568	390
Generalist 1	1.002	264	-
Jumlah Total	5.409	1.194	528

Pendidikan dan Pelatihan Karir

Career Education and Training

Dalam rangkaian perencanaan suksesi pegawai yang memiliki kesempatan untuk pengembangan karir, diberikan diklat penjenjangan sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Diklat penjenjangan merupakan salah satu bentuk diklat kepemimpinan yang diselenggarakan

As part of the employee succession planning process, employees with career development opportunities are provided with tiered training in accordance with the positions they are projected to hold. Tiered training is a form of leadership development program organized by the

Perusahaan sebagai bagian dari proses pengembangan kompetensi dan pembinaan karir pegawai untuk memenuhi Kompetensi Utama, Kompetensi Peran dan Kompetensi Bidang yang dipersyaratkan pada setiap jenjang jabatan sesuai tuntutan jalur karir yang diproyeksikan bagi pegawai. Program diklat penjenjangan *Executive Education* (EE) yaitu pembelajaran untuk memenuhi Kompetensi Utama dan Peran, serta Kompetensi Bidang yang dipersyaratkan pada Jenjang Jabatan Struktural.

Company as part of competency development and career coaching, aimed at fulfilling the Core Competencies, Role Competencies, and Functional Competencies required at each job level, in line with the projected career path of the employees. The Executive Education (EE) tiered training program includes learning to fulfill the Main and Role Competencies, as well as the Field Competencies required at the Structural Position Level.

Realisasi diklat Penjenjangan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The realization of the tiered training program in 2024 is as follows:

Tabel Diklat Penjenjangan Tahun 2024

Table of Tier-based Training in 2024

Jenis Diklat Penjenjangan Type of Tier-based Training 2024	Jumlah Peserta tahun 2024 Number of Participants in 2024	Lulus tahun 2024 Graduating in 2024	On Progress
<i>Executive Education I</i>	0	0	0
<i>Executive Education II</i>	3	1	2
<i>Executive Education III</i>	19	1	18
<i>Executive Education IV</i>	50	45	5

Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Employee Performance Management System

PLN Indonesia Power melakukan penilaian atas pencapaian yang telah diberikan terhadap para pegawainya untuk mengevaluasi produktivitas kinerja mereka. Sebagai dasar pengukuran pencapaian kinerja pegawai dalam mencapai tujuan Perusahaan secara efektif dan efisien, Perusahaan telah menetapkan Sistem Manajemen Kinerja dengan menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP).

PLN Indonesia Power conducts assessments of the achievements made by its employees to evaluate their work productivity. As a basis for measuring employee performance achievements in attaining the company's objectives effectively and efficiently, the Company has established a Performance Management System using the Employee Performance Management System application (SIMKP).

Penilaian Kinerja Pegawai Employee Performance Assessment

Aturan Penilaian Kinerja Pegawai ditetapkan dalam Peraturan Direksi Nomor 0025.P/DIR/2024 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai. Tahapan dalam Sistem Manajemen Kinerja Pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

The Employee Performance Appraisal Rules are stipulated in Board of Directors' Regulation No. 0025.P/DIR/2024 on the Employee Performance Management System. The stages within the Employee Performance Management System can be seen in the table below:

Tabel Tahap Penilaian Kinerja Pegawai

Table of Employee Performance Assessment Stages

Tahap Stage	Deskripsi Description
Perencanaan Kinerja Pegawai Employee Performance Planning	Tahap penyusunan Sasaran Kinerja pegawai yang dilakukan 1(satu) kali pada awal tahun untuk Semester 1 dan Semester 2 yang terdiri atas: - Rencana sasaran kinerja pegawai, - Rencana Program Pengembangan Diri Pegawai. The stage of Employee Performance Target preparation is carried out 1 (once) at the beginning of the year for Semester 1 and Semester 2, consisting of: - Employee performance target plan, - Employee self-development program plan
Pemantauan Kinerja Pegawai Employee Performance Monitoring	Tahap Pemantauan merupakan periode antara Tahap Perencanaan dan Tahap Penilaian yang digunakan atasan langsung dan atasan atasan langsung pegawai untuk mengamati pencapaian target sasaran kinerja dan pengembangan diri pegawai (PDP) secara berkala dan berkelanjutan dalam 1(satu) semester. The Monitoring Stage is the period between the Planning Stage and the Assessment Stage. During this time, the employee's direct supervisor and the direct supervisor's superior regularly and continuously observe the achievement of performance targets and personal development programs (PDP) over one semester.
Penilaian Kinerja Pegawai Employee Performance Assessment	Tahap Penilaian yaitu tahap dimana atasan langsung dan atasan atasan langsung wajib memberikan pengukuran secara objektif terhadap pencapaian target sasaran kinerja dan program pengembangan diri pegawai bawahannya pada akhir semester berjalan. The Assessment Stage is when the direct supervisor and the direct supervisor's superior must objectively measure the achievement of performance targets and the personal development program of their subordinate employees at the end of the current semester.

Hasil penilaian menjadi dasar pertimbangan untuk pemberian reward dan pengembangan karir pegawai seperti promosi, rotasi, peningkatan remunerasi dan sebagainya, juga menjadi dasar pemberian *punishment* seperti surat peringatan, penundaan kenaikan pangkat, demosi, mutasi sampai pemutusan hubungan kerja.

The assessment results become the basis for considering employee rewards and career development, such as promotions, rotations, remuneration increases, and so on. They also form the basis for imposing punishments like warning letters, delaying promotions, demotions, transfers, up to termination of employment.

Pengukuran *Maturity* Kinerja

Measurement of Performance Maturity

Kinerja SDM diukur berdasarkan KPI aspek *Learning & Growth* telah ditetapkan melalui pencapaian nilai *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organizational Capital Readiness* (OCR). Formulasi yang digunakan untuk mengukur HCR dan OCR menggunakan skala Level 1-5 yang didapatkan dari hasil *assessment*, yaitu *assessment* PT PLN (Persero) terhadap Korporat dan *assessment* oleh Pembina *Head Office* kepada Unit setiap triwulan.

Human Capital performance, measured by the Learning & Growth aspect's KPIs, has been established through the achievement of Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR) scores. The formulation used to measure HCR and OCR employs a Level 1-5 scale obtained from assessment results. These assessments are conducted by PT PLN (Persero) for the corporate entity and by the Head Office supervisor for each Unit every quarter.

Skor HCS dan OCR tahun 2024 secara umum mengalami peningkatan yang disebabkan oleh adanya tantangan bisnis, maka target-target indikasi *maturity* perusahaan harus semakin menunjukkan naik ke level yang lebih tinggi, sebagaimana juga Aspirasi Pemegang Saham, maka pencapaian skor HCR dan OCR diupayakan terus naik dengan mengidentifikasi ruang yang memerlukan perbaikan dan meningkatkan pencapaian yang sudah baik di setiap aspeknya.

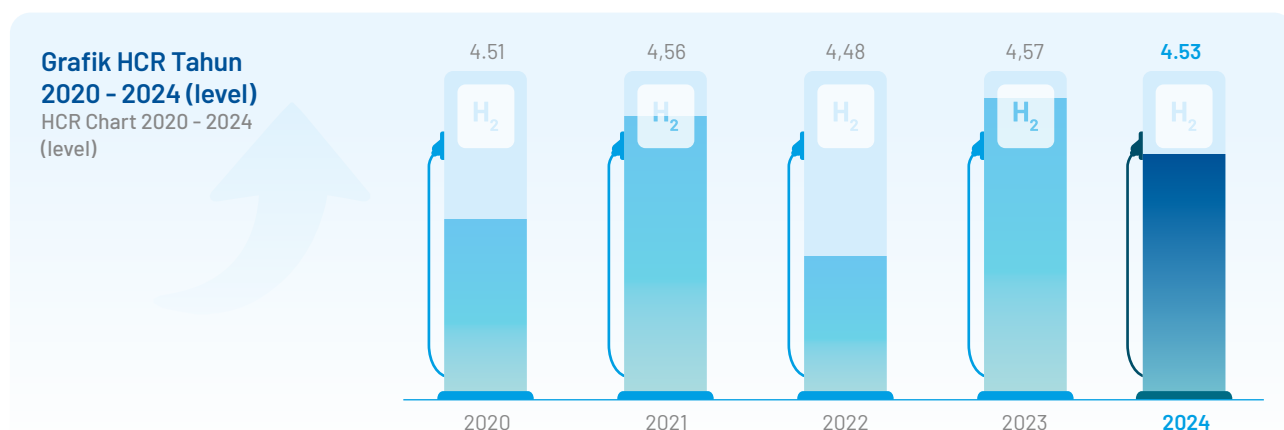
The HCR and OCR scores in 2024 generally increased, due to business challenges, which necessitate that the Company's maturity indication targets must show a continuous upward trend to a higher level, as with Shareholder Aspirations, efforts are being made to continuously increase the achievement of HCR and OCR scores by identifying areas that require improvement and improving achievements that are already good in every aspect.

Human Capital Readiness

Human Capital Readiness

HCR adalah pengukuran kesiapan kapasitas dan kapabilitas SDM, yaitu dengan peningkatan kompetensi SDM yang optimal agar dapat mendukung implementasi strategi Perusahaan. Pencapaian HCR mencapai level 4,53 di tahun 2024.

HCR is a measurement of human capital capacity and capability readiness, achieved through optimal human capital competency improvement to support the implementation of Company strategy. HCR achievement reached level 4.53 in 2024.



Organizational Capital Readiness

Organizational Capital Readiness

OCR merupakan kesiapan organisasi dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan faktor yang mendorong perbaikan dan pembelajaran berkelanjutan untuk mendukung agenda perubahan organisasi melalui implementasi strategi perusahaan.

OCR is the readiness of an organization to integrate and align factors that drive continuous improvement and learning to support the organization's change agenda through the implementation of corporate strategy.

Aspek yang diukur adalah:

1. Budaya Perusahaan: Memastikan bahwa budaya yang dibangun di dalam perusahaan mampu menjadi pendorong awareness dan meningkatkan keterlibatan pegawai PLN IP dalam mewujudkan aspirasi PLN terkait tema-tema strategis PLN tahun 2020-2024.
2. *Alignment*: Keselarasan antara Strategi Perusahaan/Korporat (Visi, Misi, Strategi) dengan *Strategic Map* yang diterjemahkan dalam KPI Individu melalui proses cascading demi tercapainya tujuan perusahaan.
3. Kepemimpinan: Kesiapan dan ketersediaan talent yang kompeten sesuai dengan tema strategis dan tujuan perusahaan dapat memberikan dampak positif dalam usaha mencapai strategi perusahaan.
4. *Business Ecosystem*: Menjawab tantangan *learning and growth* PLN terkait dengan tema strategis PLN terutama "*Customer Focused*", sehingga strategi dapat dilandasi oleh *knowledge management* yang sudah mencakup pihak internal PLN dan juga stakeholders terutama *customer* PLN.

The aspects measured are:

1. Corporate Culture: Ensuring that the culture built within the Company can drive awareness and increase the involvement of PLN IP employees in realizing PLN's aspirations related to PLN's strategic themes for 2020-2024.
2. Alignment: Alignment between the Company/Corporate Strategy (Vision, Mission, Strategy) with the Strategic Map translated into Individual KPIs through a cascading process to achieve company goals.
3. Leadership: Readiness and availability of competent talent in accordance with the Company's strategic theme and objectives can have a positive impact on efforts to achieve the Company's strategy.
4. Business Ecosystem: Responding to PLN's learning and growth challenges related to PLN's strategic theme, especially "Customer Focused", so that the strategy can be based on knowledge management that includes PLN's internal parties and stakeholders, especially PLN customers.

Capaian sasaran OCR dilakukan melalui:

Achieving OCR targets is done through:

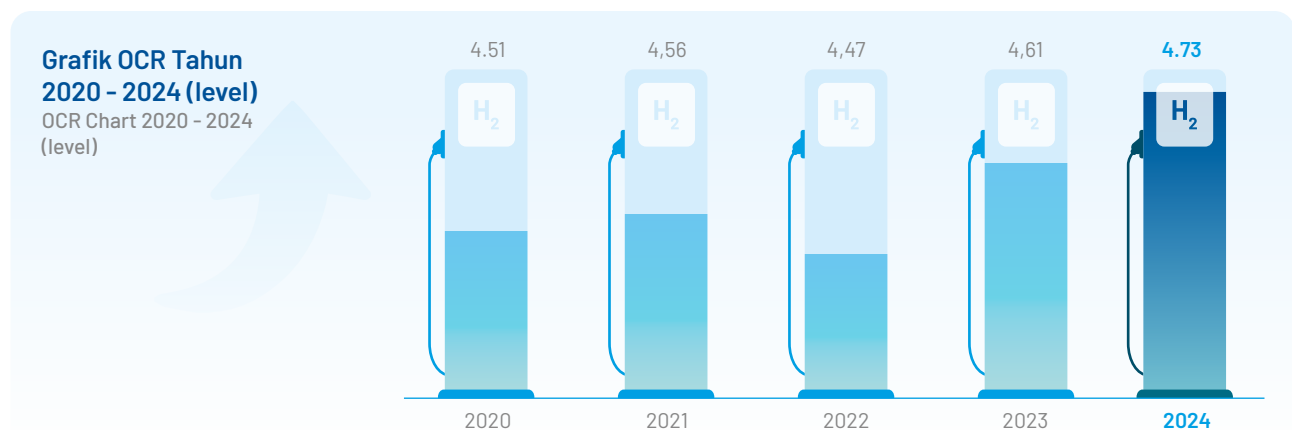
Tabel Aspek Pengukuran Kesiapan Organisasi

Table of Organizational Readiness Measurement Aspects

Aspek Aspects	Maturity
Budaya Perusahaan Corporate Culture	4,77
Alignment	4,94
Kepemimpinan Leadership	4,58
Business Ecosystem	4,64

Pencapaian OCR meningkat 0,12% dibandingkan tahun 2023 menjadi level 4,73 di tahun 2024.

OCR achievement increased by 0.12% from 2023 to 4.73% in 2024.



Sistem Penghargaan Pegawai

Employee Reward System

Employee Engagement Survey

Employee Engagement Survey

PLN Indonesia Power rutin melaksanakan *Employee Engagement Survey*. Di tahun 2024, pelaksanaan survei pada tanggal 30 September sampai 9 Oktober 2024 dan dilaksanakan secara terpusat oleh PT PLN (Persero) dengan menggunakan aplikasi *Qualtrics*. Aspek yang dinilai dalam survei adalah 25 *Employee Experience Driver* dengan total 43 sub pertanyaan.

PLN Indonesia Power regularly conducts the *Employee Engagement Survey*. In 2024, the survey was conducted from September 30 to October 9, 2024, and was centrally administered by PT PLN (Persero) using the *Qualtrics* application. The survey assessed 25 *Employee Experience Drivers* with a total of 43 sub-questions.

Selain mengukur keterikatan pegawai, Perusahaan juga mengukur enablement pegawai sebagai bagian dari *Employee Effectiveness Index*.

In addition to measuring employee engagement, the Company also measures employee enablement as part of the *Employee Effectiveness Index*.

Skor EES

EES Score

Merujuk pada Pedoman HCR OCR PLN Group, maka untuk pengukuran EES PT PLN Indonesia Power tahun 2024 menggunakan metode EES PLN.

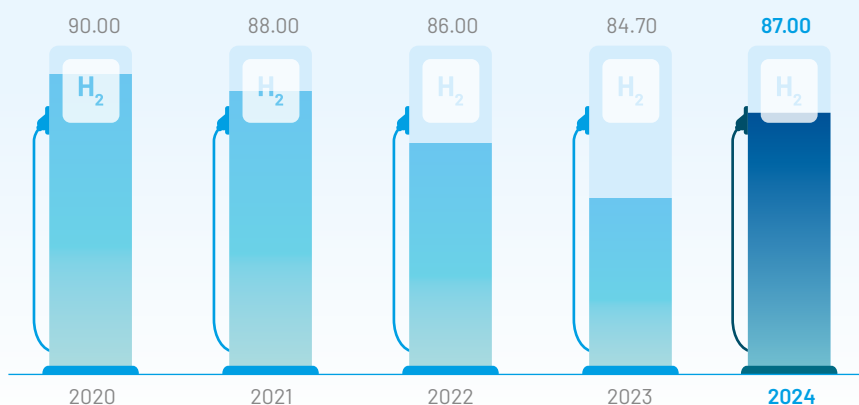
Referring to the HCR OCR PLN Group Guidelines, the measurement of the EES at PT PLN Indonesia Power in 2024 uses the EES PLN method.

Nilai EES tahun 2024 adalah sebesar 87,00%. Pencapaian pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 84,70%. Secara umum, hasil skor engagement mengalami kenaikan skor merupakan dampak dari program-program tindaklanjut hasil survey pada tahun 2023. Peningkatan peran ranger dan monitoring implementasi yang dilakukan secara digitalisasi/menggunakan aplikasi serta adanya apresiasi atas komitmen pelaksanaan implementasi yang dilaksanakan dalam Semesta Budaya.

The 2024 EES score is 87.00%. This year's achievement is higher compared to 2023, which was 84.70%. In general, the increase in engagement score is the result of follow-up programs from the 2023 survey. The increased role of rangers and the implementation monitoring conducted through digitalization/using applications, along with the appreciation for the commitment to implementation carried out within the Semesta Budaya framework.

Grafik EES Tahun 2020 - 2024 (%)

Chart of EES in 2020 - 2024 (%)



Evaluasi dan Tindak Lanjut EES

EES Evaluation and Follow-Up

Dari hasil EES yang telah dilakukan, PLN Indonesia Power menindaklanjuti hasil survei dengan program sebagai berikut:

1. Pemetaan indikator dari 3 Dimensi EES terendah,
2. *Focus Group Discussion* (FGD) konfirmatori hasil *survey* EES,
3. Penyusunan program kerja/*action plan* untuk peningkatan *engagement* pegawai dan penurunan *toxic culture*.

From the EES results that have been conducted, PLN Indonesia Power followed up the survey findings with the following programs:

1. Mapping indicators of the three lowest EES dimensions,
2. Conducting confirmatory Focus Group Discussions (FGD) on the EES survey results,
3. Preparing work programs/action plans to improve employee engagement and reduce toxic culture.

Strategi Remunerasi

Remuneration Strategy

Strategi remunerasi diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 0040.P/DIR/2024 Tentang Sistem Manajemen Penghargaan Pegawai. Dalam Peraturan Direksi tersebut diatur bahwa Perusahaan memberikan penghargaan kepada Pegawai berupa Penghargaan Ekstrinsik dan Intrinsik.

Komponen penghargaan ekstrinsik diberikan berupa kompensasi tetap, kompensasi tidak tetap dan manfaat (*benefit*). Sedangkan komponen penghargaan intrinsik diberikan berupa program pembelajaran, program keseimbangan hidup, bantuan hukum untuk pegawai, pengakuan (*recognition*) dan kesempatan khusus.

The remuneration strategy is regulated in the Board of Directors' Regulation No. 0040.P/DIR/2024 on the Employee Rewards Management System. This regulation stipulates that the Company provides rewards to employees in the form of extrinsic and intrinsic rewards.

The components of extrinsic rewards are provided in the form of fixed compensation, variable compensation, and benefits. Meanwhile, the components of intrinsic rewards are provided in the form of learning programs, work-life balance programs, legal assistance for employees, recognition, and special opportunities.

Hubungan Industrial

Industrial Relations

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Undang-undang ini mengatur hak pekerja/buruh untuk membentuk dan mengembangkan serikat pekerja. Tujuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 adalah melindungi hak berserikat pekerja, menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, serta memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. PLN Indonesia Power memberikan kebebasan kepada pegawainya untuk berpendapat dan berserikat dengan membentuk Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP-IP) sebagai sarana bagi pegawai untuk berorganisasi dan menyalurkan aspirasinya yang telah terdaftar dan tercatat di Kantor Kemenakertrans RI.

As mandated by Law No. 21 of 2000 on Trade Unions, this law regulates the rights of workers/laborers to form and develop trade unions. The purpose of Law No. 21 of 2000 is to protect the rights of workers to unionize, to create harmonious, dynamic, and equitable industrial relations, and to fight for, protect, and defend the interests and welfare of workers/laborers and their families. PLN Indonesia Power grants its employees the freedom to express their opinions and to unionize by forming the Indonesia Power Employees' Association (PP-IP) as a means for employees to organize and channel their aspirations, which has been registered and recorded with the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia.

Salah satu sarana hubungan industrial di PLN Indonesia Power untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yaitu melalui pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB adalah perjanjian tertulis yang merupakan hasil perundingan antara Pengusaha dengan Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power yang sudah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. PKB yang berlaku untuk tahun 2024 adalah PKB periode 2024-2025 beserta amendemennya yang merupakan pemutakhiran dari PKB periode sebelumnya.

One of the means of industrial relations at PLN Indonesia Power to realize harmonious, dynamic, and fair industrial relations is through the creation of a Collective Labor Agreement (PKB). The PKB is a written agreement that is the result of negotiations between the Employer and the PT PLN Indonesia Power Employees' Association, which has been registered with the agency responsible for manpower, and which contains the working conditions, rights, and obligations of both parties. The PKB applicable for 2024 is the PKB for the 2024-2025 period along with its amendments, which constitute an update of the previous PKB period.

Sepanjang tahun 2024 terdapat kegiatan dengan Persatuan Pegawai yaitu sebagai berikut:

1. Pertemuan periodik
2. Perundingan
3. LKS Bipartit
4. Perundingan Bipartit

Throughout 2024, there were activities with the Employees' Association as follows:

1. Periodic meetings
2. Negotiations
3. Bipartite Cooperation Institution (LKS Bipartit)
4. Bipartite negotiations

Teknologi Informasi

Information Technology

Dukungan Teknologi Informasi (TI) yang andal dapat mendukung optimasi kegiatan bisnis yang efektif dan efisien. TI PLN Indonesia Power memiliki perangkat kebijakan dan prosedur sistem informasi berupa Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan (ProGEN), Rencana Strategis TI, Kebijakan Keamanan Informasi dan Kebijakan Penggunaan Hak Akses Jaringan, Email, Internet dan Aplikasi Perusahaan di Lingkungan PLN Indonesia Power. Selain itu, inisiatif perbaikan senantiasa dilakukan untuk menjaga kualitas layanan dan sebagai langkah preventif dalam menghadapi risiko reputasi dan operasional terkait dengan penyusunan dokumen-dokumen kebijakan internal Perusahaan yang berhubungan dengan IT *Governance*.

Reliable Information Technology (IT) support enables the optimization of effective and efficient business operations. The IT function at PLN Indonesia Power is equipped with a set of policies and procedures, including the Corporate IT Governance (ProGEN), IT Strategic Plan, Information Security Policy, and Policy on the Use of Network Access Rights, Email, Internet, and Corporate Applications within the PLN Indonesia Power environment. In addition, continuous improvement initiatives are carried out to maintain service quality and as a preventive measure in mitigating reputational and operational risks through the development of internal policy documents related to IT Governance.

Rencana Strategis Teknologi Informasi

Information Technology Strategic Plan

Dalam menghadapi era digital yang terus berkembang pesat, PLN Indonesia Power berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) 2024-2028 disusun sebagai panduan strategis bagi perusahaan dalam mengadopsi inovasi digital, meningkatkan efisiensi operasional serta menciptakan nilai tambah perusahaan dalam 5 tahun mendatang. PLN Indonesia Power menyusun Rencana Strategis TI sebagai pedoman dalam menjalankan program Teknologi Informasi.

In response to the rapidly evolving digital era, PLN Indonesia Power is committed to accelerating digital transformation to support sustainable business growth. The 2024-2028 Information Technology Strategic Plan (ITSP) is developed as a strategic guide for the Company to adopt digital innovations, enhance operational efficiency, and create Company's added value over the next five years. This IT Strategic Plan serves as a roadmap for PLN Indonesia Power in implementing its Information Technology programs.

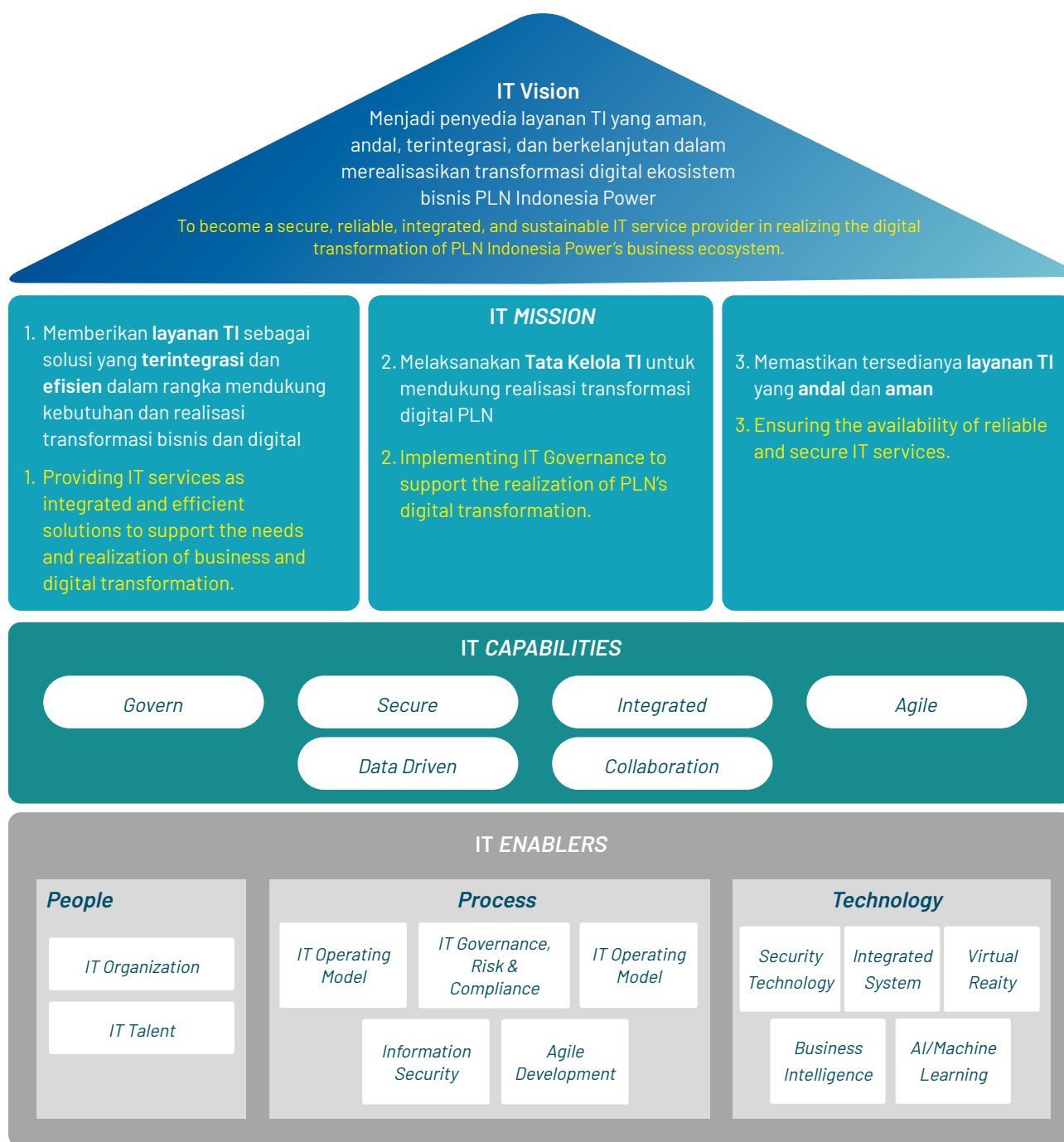


RSTI 2024-2028 telah diselaraskan dengan *strategic initiatives* yang tertuang dalam RJP 2024-2028 dan RSTI PLN 2025-2029 terkait pilar *Digital Operation Excellence* dan *alignment* dengan PT PLN (Persero) serta mendukung terlaksananya Transformasi 2.0. dalam menjalankan misi menyediakan energi hijau, inovatif dan terjangkau, dan guna mencapai visi Perusahaan, maka PLN Indonesia Power merumuskan strategic goals yang dirumuskan melalui transformasi 2.0 yang terdiri atas *Growth Moonshot*, *Digital Moonshot*, dan *NZE Moonshot*.

Pengelolaan TI di PLN IP Indonesia Power sejalan dengan RSTI agar terwujudnya visi Teknologi Informasi yaitu "Menjadi penyedia layanan TI yang aman, andal, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam merealisasikan transformasi digital ekosistem bisnis PLN Indonesia Power". Tercapainya visi pengelolaan TI PLN Indonesia Power dapat dinisiasi dengan menerapkan misi pengelolaan TI secara konsisten antara lain memberikan layanan TI sebagai solusi yang terintegrasi dan efisien dalam rangka mendukung kebutuhan dan realisasi transformasi bisnis dan digital, melaksanakan tata kelola TI untuk mendukung realisasi transformasi digital PLN, dan memastikan tersedianya layanan TI yang andal dan aman.

The 2024-2028 IT Strategic Plan (ITSP) has been aligned with the strategic initiatives outlined in the 2024-2028 Long-Term Plan (LTP) and PLN's 2025-2029 ITSP, particularly in relation to the Digital Operation Excellence pillar, as well as overall alignment with PT PLN (Persero). It also supports the implementation of Transformation 2.0. In fulfilling its mission to provide green, innovative, and affordable energy, and to realize the Company's vision, PLN Indonesia Power has formulated its strategic goals through Transformation 2.0, which consists of Growth Moonshot, Digital Moonshot, and NZE Moonshot.

IT management at PLN IP Indonesia Power is aligned with the ITSP to realize the IT vision, namely: "To become a secure, reliable, integrated, and sustainable IT service provider in realizing the digital transformation of PLN Indonesia Power's business ecosystem." The achievement of PLN Indonesia Power's IT management vision can be initiated by consistently implementing the IT management missions, including providing IT services as integrated and efficient solutions to support the needs and realization of business and digital transformation, implementing IT governance to support the realization of PLN's digital transformation, and ensuring the availability of reliable and secure IT services.



Di dalam Rencana Strategis TI 2024-2028 mencakup strategi TI dan inisiatif TI yang dapat mendukung pencapaian misi PLN Indonesia Power maupun mewujudkan arahan PLN Holding. Terdapat 10 strategi TI yang mencakup 102 inisiatif. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh kegiatan pengembangan TI di Perusahaan searah dan selaras dengan Visi, Misi dan Strategi Perusahaan serta tren TI di dunia. Inisiatif Teknologi Informasi tersebut yaitu:

In the 2024-2028 Information Technology Strategic Plan, the IT strategy and initiatives are designed to support the achievement of PLN Indonesia Power's mission as well as to realize the direction of PLN Holding. There are 10 IT strategies covering 102 initiatives. Through this document, it is expected that all IT development activities in the Company will be aligned with the Company's Vision, Mission, and Strategy, as well as global IT trends. The Information Technology initiatives include:

1. Penyempurnaan Struktur Organisasi TI (3 inisiatif) yaitu optimalisasi struktur organisasi dan pengelolaan TI serta peningkatan kompetensi SDM TI;
 2. Penguatan Tata Kelola TI (2 inisiatif) yaitu penguatan tata kelola TI dengan menyesuaikan kebijakan dan prosedur TI berdasarkan regulasi Peraturan Menteri BUMN No. 02 tahun 2023 dan *best practice* COBIT 2019;
 3. Penerapan Pelindungan Data Pribadi (1 inisiatif) yaitu analisis terhadap data pribadi yang dikelola oleh bidang TI;
 4. Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber (23 inisiatif) yaitu pendekatan komprehensif yang mencakup pelatihan, kebijakan, pemantauan *real-time*, penggunaan alat keamanan yang tepat untuk melindungi sistem dan data Perusahaan;
 5. Implementasi *Secure Software Development Life Cycle* (SDLC) (3 inisiatif) yaitu penguatan keamanan siber dalam pengembangan aplikasi dengan penerapan *secure* SDLC secara konsisten;
 6. Implementasi *Data Management* (8 inisiatif) yaitu Pengelolaan data melibatkan implementasi kebijakan dan prosedur tata kelola data, serta integrasi data dan aplikasi secara menyeluruh dan sistematis;
 7. Pengembangan *Digital Power Plant* (3 inisiatif) yaitu Untuk mendukung REOC, dilakukan penyesuaian kapasitas infrastruktur TI, peningkatan kualitas data untuk AI dan Machine Learning;
 8. Optimalisasi *Platform Digital* (50 inisiatif) yaitu Penguatan sistem TI dilakukan melalui pengembangan aplikasi, *enhancement* aplikasi, integrasi data dan aplikasi yang sistematis, serta perencanaan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang menjadi langkah penting dalam transformasi digital Perusahaan;
 9. Peningkatan Kapabilitas Implementasi EAM sesuai Strategi PLN (6 inisiatif) yaitu untuk mendukung implementasi EAM dengan peningkatan kompetensi personel TI, penyegaran infrastruktur TI, serta identifikasi langkah-langkah strategis dalam proses implementasinya;
 10. Peningkatan Kapabilitas Implementasi ERP sesuai Strategi PLN (3 inisiatif) yaitu Implementasi ERP didukung melalui peningkatan kompetensi personel TI, penyegaran infrastruktur TI, serta identifikasi langkah-langkah strategis.
1. Improvement of the IT Organizational Structure (3 initiatives), namely optimizing the IT organizational structure and management, as well as improving IT human resource competencies;
 2. Strengthening IT Governance (2 initiatives), namely enhancing IT governance by adjusting IT policies and procedures based on the Regulation of the Minister of SOEs No. 02 of 2023 and COBIT 2019 best practices;
 3. Implementation of Personal Data Protection (1 initiative), namely an analysis of personal data managed by the IT department;
 4. Strengthening Cyber Resilience and Security (23 initiatives), namely a comprehensive approach that includes training, policies, real-time monitoring, and the use of appropriate security tools to protect the Company's systems and data;
 5. Implementation of Secure Software Development Life Cycle (SDLC) (3 initiatives), namely strengthening cybersecurity in application development by consistently applying secure SDLC;
 6. Implementation of Data Management (8 initiatives), namely data management involving the implementation of data governance policies and procedures, as well as comprehensive and systematic data and application integration;
 7. Development of Digital Power Plant (3 initiatives), namely, to support REOC, adjustments to IT infrastructure capacity and data quality improvements for AI and Machine Learning are carried out;
 8. Optimization of Digital Platform (50 initiatives), namely strengthening IT systems through application development, application enhancement, systematic data, and application integration, as well as planning for infrastructure development and maintenance which are important steps in the Company's digital transformation;
 9. Enhancement of EAM Implementation Capability according to PLN Strategy (6 initiatives), namely, to support EAM implementation through improving IT personnel competencies, refreshing IT infrastructure, and identifying strategic steps in the implementation process;
 10. Enhancement of ERP Implementation Capability according to PLN Strategy (3 initiatives), namely ERP implementation is supported through improving IT personnel competencies, refreshing IT infrastructure, and identifying strategic steps.

2. Pengadaan Perangkat *Network & Security* di *Head Office* dan *Data Center*

Investasi ini merupakan proyek strategis dalam transformasi dan penguatan sistem TI PLN Indonesia Power. Fokus utamanya adalah memastikan konektivitas yang andal dan aman, baik secara internal maupun eksternal, melalui perangkat jaringan dan keamanan yang terkini dan sesuai standar perusahaan.

2. Procurement of *Network & Security* Devices at the *Head Office* and *Data Center*

This investment is a strategic project in the transformation and strengthening of PLN Indonesia Power's IT systems. Its main focus is to ensure reliable and secure connectivity, both internally and externally, through up-to-date network and security devices that meet corporate standards.

Program Strategis Teknologi Informasi

Strategic Information Technology Programs

1. Penyempurnaan Struktur Organisasi TI

Penyempurnaan Struktur Organisasi TI dilakukan dengan menyesuaikan fungsi pada organisasi TI yang diiringi dengan peningkatan kompetensi sumber daya TI.

2. Penguatan Tata Kelola TI

Penguatan Tata Kelola TI dilakukan dengan menerapkan tata kelola TI berdasarkan *best practice* yang relevan serta melakukan standarisasi prosedur kontrol IT *Head Office* dan IT Unit.

3. Penerapan Pelindungan Data Pribadi

Penerapan Pelindungan Data Pribadi dilakukan dengan menganalisis pengelolaan atas data pribadi yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis bidang IT, serta diiringi dengan pelaksanaan sosialisasi terkait Pelindungan Data Pribadi.

4. Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber

Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber dilakukan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur yang diiringi dengan pelaksanaan training, pelaksanaan asesmen, dan implementasi *tools* yang relevan.

5. Implementasi *Secure Software Development Lifecycle* (SDLC)

Implementasi *secure* SDLC dilakukan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur yang diiringi dengan pelaksanaan pelatihan dan implementasi *tools* yang relevan.

6. Implementasi *Data Management*

Implementasi *Data Management* dilakukan dengan mendefinisikan kerangka kerja pengelolaan data serta menerapkan proses, kontrol dan *tools* yang relevan.

7. Implementasi & Peningkatan Skalabilitas REOC

Implementasi & Peningkatan Skalabilitas dan keamanan pada REOC dilakukan dengan menyesuaikan kapasitas dan teknologi yang sesuai dengan masing-masing level REOC.

8. Optimalisasi *Platform Digital*

Optimalisasi *Platform Digital* dilakukan dengan menerapkan teknologi yang dapat membantu enhancement *platform digital*.

1. Refinement of the IT Organizational Structure

The refinement of the IT organizational structure is carried out by aligning the functions within the IT organization while enhancing the competencies of IT human resources.

2. Strengthening IT Governance

Strengthening IT governance is conducted by implementing governance practices based on relevant best practices and standardizing control procedures for both the IT Head Office and IT Units.

3. Implementation of Personal Data Protection

The implementation of personal data protection is carried out by analyzing the management of personal data used in IT business processes, accompanied by dissemination efforts regarding Personal Data Protection.

4. Strengthening Cyber Resilience and Security

Strengthening cyber resilience and security is done by formulating relevant policies and procedures, conducting training programs, performing assessments, and implementing appropriate tools.

5. Implementation of *Secure Software Development Lifecycle* (SDLC)

The implementation of *secure* SDLC involves the formulation of policies and procedures, along with conducting training sessions and deploying relevant tools.

6. Implementation of *Data Management*

The implementation of data management is carried out by defining a data governance framework and applying relevant processes, controls, and tools.

7. Implementation & Scalability Enhancement of REOC

The implementation and scalability and security enhancement of REOC are conducted by adjusting capacity and technologies appropriate to each REOC level.

8. Optimization of Digital Platform

The optimization of the digital platform is achieved by implementing technologies that support the enhancement of the digital platform.

9. Peningkatan Kapabilitas Implementasi EAM sesuai Strategi PLN

Implementasi EAM dilakukan dengan mengkaji terkait proses implementasi EAM dan melakukan penyegaran infrastruktur TI serta menyelaraskan dengan *roadmap* implementasi EAM PLN *Holding*.

10. Peningkatan Kapabilitas Implementasi ERP sesuai Strategi PLN

Penyusunan strategi, perencanaan, dan implementasi ERP dilakukan dengan menyelaraskan strategi dan *roadmap* implementasi ERP PLN *group*.

9. Enhancement of EAM Implementation Capability in Line with PLN Strategy

The EAM implementation is carried out by reviewing the EAM implementation process, refreshing IT infrastructure, and aligning with the EAM implementation roadmap of PLN Holding.

10. Enhancement of ERP Implementation Capability in Line with PLN Strategy

The strategy formulation, planning, and ERP implementation are conducted by aligning with the ERP implementation strategy and roadmap of the PLN Group.

Melakukan Sosialisasi

Conducting Dissemination

Secara rutin dan berkelanjutan Bidang *Information Technology and Digital* (ITD) PLN Indonesia Power melakukan sosialisasi Aplikasi Korporat maupun *software/tools* yang digunakan di perusahaan kepada seluruh pegawai PLN Indonesia Power, baik Kantor Pusat maupun Unit Pembangkit. Hal ini dilakukan dalam upaya Bidang ITD meyakinkan pemanfaatan dan keandalan sistem IT untuk mendukung kebutuhan Perusahaan. Sepanjang tahun 2024, Perusahaan telah melaksanakan sosialisasi terkait IT sebanyak 41 kali.

On a regular and continuous basis, the Information Technology and Digital (ITD) Department of PLN Indonesia Power conducts dissemination of Corporate Applications as well as software/tools used in the Company to all employees of PLN Indonesia Power, both at the Head Office and Power Plant Units. This initiative is part of the ITD Department's efforts to ensure the utilization and reliability of IT systems in supporting the Company's needs. Throughout 2024, the Company has conducted a total of 41 IT-related dissemination sessions.

Tabel Sosialisasi Sistem Teknologi Informasi

Table of Information Technology System Dissemination

No	Tema Sosialisasi Topic of Dissemination	Peserta (bidang/unit) Participants (Division/Unit)	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation
1.	<i>Closing</i> Keuangan Tahun 2023 Financial Closing for Fiscal Year 2023	Keuangan Unit Financial Unit	31 Desember 2023 – 3 Januari 2024 December 31, 2023 – January 3, 2024
2.	IHT IP-Diamond Unit JPR EP/BOP	IT Ops, Unit JPR EPA/BOP, OMP I	10 Januari – 12 Januari 2024 January 10-12, 2024
3.	<i>Workshop</i> Penyusunan <i>Data Loader Dominion</i> OMP I Dominion OMP I Data Loader Compilation Workshop	IT Dev, IT Ops, Unit BOP, OMP 1	23-25 Januari 2024 January 23-25, 2024
4.	IHT IP-Diamond Unit ADP EP/BOP	IT Ops, Unit ADP EPA/BOP, OMP I	14 Februari – 16 Februari 2024 February 14 – 16, 2024
5.	<i>Workshop</i> Penyusunan <i>Data Loader Dominion</i> OMP IV Workshop on the Preparation of Data Loader Dominion OMP IV	IT Dev, IT Ops, Unit BOP, OMP IV	5-7 Februari 2024 February 5-7, 2024
6.	<i>Workshop Check Point</i> Maximo Modul <i>Reliability</i> dan Modul LCM DITOPGAS (Entitas PLTGU) Workshop on Check Point Maximo Reliability Module and LCM Module DITOPGAS (CCPP Entity)	IT Ops, Unit BOP, PGR I	20 – 23 Februari 2024 February 20-23, 2024
7.	<i>Workshop</i> Penyusunan <i>Data Loader Dominion</i> OMP V Workshop on the Preparation of Data Loader Dominion OMP V	IT OPS, OMP V, UNIT BOP	21 – 23 Februari 2024 February 21-23, 2024

No	Tema Sosialisasi Topic of Dissemination	Peserta (bidang/unit) Participants (Division/Unit)	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation
8.	<i>Workshop Check Point Maximo Modul Reliability dan Modul LCM DITOPGAS (Entitas PLTA)</i> Workshop on Check Point Maximo Reliability Module and LCM DITOPGAS Module (HPP Entity)	IT Ops, Unit BOP, PGR I	27 Februari 2024 - 1 Maret 2024 February 27, 2024 - March 1, 2024
9.	<i>Workshop Check Point Maximo Modul Reliability dan Modul LCM DITOPGAS (Entitas PLTD)</i> Workshop on Check Point Maximo Reliability Module and LCM DITOPGAS Module (DPP Entity)	IT Ops, Unit BOP, PGR I	4 - 7 Maret 2024 March 4-7, 2024
10.	Rapat Koordinasi Persiapan <i>Roll out</i> aplikasi I-Track untuk Unit HSH Coordination Meeting on Roll-Out Preparation of I-Track Application for HSH Unit	Keuangan Unit HSH HSH Finance Unit	6-8 Maret 2024 March 6-8, 2024
11.	<i>Workshop Update Template IP-Diamond Area EP-BOP PLTU JAMALI</i> Workshop on IP-Diamond Template Update for EP-BOP Area of JAMALI SPP	IT Ops, Unit SLA-BSR-JPR-ADP-BLB-BLT, OMP I	6-8 Maret 2024 March 6-8, 2024
12.	<i>Training Implementasi IP - DOMINION Maximo UBP Suralaya unit 1-4 dan UBP PLTU Palabuhan Ratu</i> Training on the Implementation of IP - DOMINION Maximo at UBP Suralaya Unit 1-4 and GBP Palabuhan Ratu SPP	IT OPS, OMP 1, ITD MSU, MSU Area, inisiator PGT, UBP Suralaya unit 1-4 dan UBP PLTU Palabuhan Ratu. IT OPS, OMP 1, ITD MSU, MSU Area, PGT initiator, UBP Suralaya units 1-4 and UBP PLTU Palabuhan Ratu.	06-08 Maret 2024 March 6-8, 2024
13.	<i>Training Implementasi IP - DOMINION Maximo SAGULING</i> Training on the Implementation of IP - DOMINION Maximo at SAGULING	IT OPS, OMP 1, ITD MSU, inisiator PGT, UNIT SAGULING IT OPS, OMP 1, ITD MSU, PGT initiator, Saguling Unit	20-22 Maret 2024 March 20-22, 2024
14.	<i>Training Implementasi IP - DOMINION Maximo Grati</i> Training on the Implementation of IP - DOMINION Maximo at Grati	IT OPS, OMP 1, inisiator PGT, UNIT Grati IT OPS, OMP 1, PGT initiator, Grati Unit	24-26 April 2024 April 24-26, 2024
15.	<i>Workshop Penyusunan Data Loader Dominion OMP 2</i> Workshop on the Preparation of Data Loader Dominion OMP 2	IT Dev, IT Ops, Unit BOP, OMP 2	14 - 17 Mei 2024 May 14-17, 2024
16.	<i>Workshop Penyusunan Data Loader Dominion OMP 3</i> Workshop on the Preparation of Data Loader Dominion OMP 3	IT Dev, IT Ops, Unit BOP, OMP 3	14 - 17 Mei 2024 May 14-17, 2024
17.	<i>Refreshment Implementasi Aplikasi ITRACK pada Unit Sentralisasi Pembayaran</i> Refreshment Training on the Implementation of ITRACK Application at Centralized Payment Unit	User Keuangan sentralisasi (HSH) User Centralized Finance (HSH)	17 Mei 2024 May 17, 2024
18.	<i>Refreshment Implementasi Aplikasi ITRACK pada Vendor Unit Sentralisasi</i> Refreshment Training on the Implementation of ITRACK Application for Vendors of Centralized Payment Unit	Vendor dan User Keuangan Sentralisasi (HSH) Vendors and Users of Centralized Finance (HSH)	21 Mei 2024 May 21, 2024
19.	UAT IP-Diamond Unit SLA BOP, BSR BOP UAT of IP-Diamond for SLA BOP and BSR BOP Units	IT Ops, Unit SLA BOP, Unit BSR BOP, OMP I	20 - 22 Mei 2024 May 20-22, 2024
20.	Training Implementasi IP - DOMINION Maximo KAMOJANG Training on the Implementation of IP - DOMINION Maximo at KAMOJANG	IT OPS, OMP IV, ITD MSU, inisiator PGT, UNIT Kamojang IT OPS, OMP IV, ITD MSU, PGT initiator, Kamojang Unit	20 - 22 Mei 2024 May 20-22, 2024
21.	UAT IP-Diamond Unit Tello	IT Dev, IT Ops, Unit TLO, Unit PGT, OMP NOM	4 - 7 Juni 2024 June 4-7, 2024

No	Tema Sosialisasi Topic of Dissemination	Peserta (bidang/unit) Participants (Division/Unit)	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation
22.	Training Implementasi IP - DOMINION Maximo MRICA Training Implementation of IP - DOMINION Maximo MRICA	IT OPS, OMP IV, ITD MSU, inisiator PGT, UNIT MRICA IT OPS, OMP IV, ITD MSU, PGT initiator, MRICA UNIT	12-Jun-24 June 12, 2024
23.	Training Implementasi IP - DOMINION Maximo PRIOK Training Implementation of IP - DOMINION Maximo PRIOK	IT OPS, OMP IV, ITD MSU, inisiator PGT, UNIT PRIOK IT OPS, OMP IV, ITD MSU, PGT initiator, PRIOK UNIT	23-Jun-24 June 23, 2024
24.	IHT IP-Diamond Unit BLT EPBOP	IT Ops, Unit BLT EPA/BOP, OMP I	24 - 26 Juni 2024 June 24-26, 2024
25.	Rekonsiliasi data saldo mutasi batubara di BBO dan ERP (Jamali dan NON Jamali) Reconciliation of coal balance mutation data in BBO and ERP (Jamali and Non-Jamali)	IT Ops, Jamali, Non Jamali	5 dan 8 Juli 2024 July 5 and 8, 2024
26.	IHT IP-Diamond Unit BSR EPBOP	IT Ops, Unit BSR EPA/BOP, OMP I	09 - 11 July 2024 July 09-11, 2024
27.	UAT IP-Diamond Unit Bukittinggi	IT Dev, IT Ops, Unit BKT, OMP V	10 - 12 July 2024 July 10-12, 2024
28.	IHT IP-Diamond Unit Tello	IT Ops, Unit TLO, Unit PGT, OMP NOM	15 - 19 July 2024 July 15-19, 2024
29.	UAT IP-Diamond Unit SLA EPA	IT Ops, Unit SLA EPA, OMP I	17 - 19 July 2024 July 17-19, 2024
30.	IHT IP-Diamond Unit Bukittinggi	IT Ops, Unit BKT, OMP 5	22 - 26 July 2024 July 22-26, 2024
31.	IHT IP-Diamond Unit SLA EPA-BOP	IT Ops, Unit SLA, OMP I	26 - 30 Agustus 2024 August 26-30, 2024
32.	IHT IP - DOMINION Maximo UBP CILEGON	IT Ops, Unit CLG, OMP 4, IT MSU	9 - 11 September 2024 September 9-11, 2024
33.	UAT IP-Diamond Unit LBA dan PNS	IT OPS, IT DEV, RENTALOP, Operator, OMP2	25 - 26 September 2024 September 25-26, 2024
34.	Sosialisasi Promat-Prodin Dissemination of Promat-Prodin	Unit-unit	25-27 September 2024 September 25-27, 2024
35.	IHT IP - DOMINION Maximo UBP LONTAR	IT Ops, Unit BLT, OMP 1, IT MSU	30 Sept - 1 Oktober 2024 September 30 - October 1, 2024
36.	IHT IP - DOMINION Maximo UBP KEPRI	IT Ops, Unit KRI, OMP 2, IT MSU	8 - 10 Oktober 2024 October 8-10, 2024
37.	IHT IP-Diamond UBP Labuan Angin	IT Ops, Unit LBA, OMP 2	15-17 Oktober 2024 October 15-17, 2024
38.	UAT IP-Diamond Unit OMB dan TIR UAT IP-Diamond Unit OMB and TIR	IT OPS, IT DEV, RENTAL OP OMB TIR, Operator OMB TIR, OMP2	4 - 8 November 2024 November 4-8, 2024
39.	Workshop Implementasi Warehouse Return Management System Tahun 2024 2024 Warehouse Return Management System Implementation Workshop	IT OPS, IT DEV, Inventory HO, Inventory Unit, Gudang Unit IT OPS, IT DEV, Inventory HO, Inventory Unit, Gudang Unit	19-20 Desember 2024 December 19-20, 2024
40.	Closing Keuangan Tahun 2024 2024 Financial Closing	Keuangan Unit Finance Unit	31 December 2024 - 05 Januari 2025 December 31, 2024 - January 5, 2025
41.	Workshop Pelindungan Data Pribadi Personal Data Protection Workshop	Bidang RSC, ITD, HSC, HCD, LRP, LGS, HSE, COM, GCS, CMR I, CMR II Department of RSC, ITD, HSC, HCD, LRP, LGS, HSE, COM, GCS, CMR I, CMR II	2 Desember 2024 December 2, 2024
42.	Workshop Information Capital Readiness(ICR) Tahun 2024 2024 Information Capital Readiness (ICR) Workshop	Bidang ITD, unit-unit	24-25 September 2024 September 24-25, 2024
43.	Sosialisasi IK 13.03.11 Konfigurasi dan Standarisasi Spesifikasi Laptop/PC Dissemination of IK 13.03.11 Configuration and Standardization of Laptop/PC Specifications	BID ITD, unit-unit	3 Juni 2024 June 3, 2024

Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi

Information Technology Policies and Procedures

Terdapat beberapa kebijakan dan prosedur IT yang berlaku di PLN Indonesia Power antara lain:

1. Keputusan Direksi tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan;
2. Peraturan Direksi tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
3. Keputusan Direksi tentang Pengaturan Hak Akses Jaringan Email Internet dan Aplikasi;
4. Keputusan Direksi tentang Tim CSIRT PLN IP;
5. Prosedur Perencanaan dan Pengorganisasian Sistem Informasi Perusahaan;
6. Prosedur Implementasi Sistem Informasi Perusahaan;
7. Prosedur Pengelolaan Sistem Informasi Perusahaan;
8. Prosedur *Monitoring* Evaluasi dan Asesmen Sistem Informasi.

Several IT policies and procedures are in effect at PLN Indonesia Power, including:

1. Board of Directors' Decision on Corporate IT Governance;
2. Board of Directors' Regulation on Information Security Management System;
3. Board of Directors' Decision on the Regulation of Access Rights to Email, Internet Network, and Applications;
4. Board of Directors' Decision on the PLN IP CSIRT Team;
5. Procedure for Planning and Organizing Corporate Information Systems;
6. Procedure for Implementing Corporate Information Systems;
7. Procedure for Managing Corporate Information Systems;
8. Procedure for Monitoring, Evaluation, and Assessment of Information Systems.

Penyusunan Kebijakan *Personal Data Protection* (PDP)

Formulation of Personal Data Protection (PDP) Policy

Dalam implementasi UU Perlindungan Data Pribadi sudah dilakukan awareness dan sedang dilakukan penyusunan dan kebijakan PDP di lingkup PLN Indonesia Power. Selain itu, di tahun 2024 Perusahaan juga melakukan *knowledge sharing* dan pembahasan kesiapan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi bersama PLN Group dan juga dilaksanakan pemaparan *action tracker* progres risiko keamanan IT.

In the implementation of the Personal Data Protection Law, awareness initiatives have been carried out and the formulation of the PDP policy is currently underway within PLN Indonesia Power. In addition, in 2024, the Company conducted knowledge sharing and discussions on the readiness for implementing the Personal Data Protection Law together with the PLN Group, as well as presenting an action tracker on IT security risk progress.

Sosialisasi dan *Workshop Asesmen Information Capital Readiness* (ICR)

Dissemination and Workshop on Information Capital Readiness (ICR) Assessment

Bidang Information Technology and Digital (Bid ITD) PLN Indonesia Power sudah melakukan sosialisasi asesmen ICR dan *workshop* asesmen ICR. Kegiatan tersebut meliputi penjelasan umum mengenai asesmen ICR dan penjelasan pendahuluan terkait *framework* COBIT 2019.

The Information Technology and Digital Department (ITD Department) of PLN Indonesia Power has conducted ICR assessment dissemination and workshops. These activities included a general explanation of the ICR assessment and an introductory overview of the COBIT 2019 framework.

Penguatan Keamanan Dunia Maya (*Cyber Security*)

Enhancement of Cyber Security

Dengan semakin tingginya ancaman keamanan teknologi informasi/*cyber security* yang dihadapi seperti virus/*malware*, *hacker* maupun *spyware*, PT PLN Indonesia Power melakukan kegiatan pemeliharaan, *enhancement* dan sosialisasi *security IT* antara lain : Membangun pemahaman dan awareness pegawai dalam mengelola risiko terkait

With the increasing threats to information technology and cyber security, such as viruses/*malware*, *hackers*, and *spyware*, PT PLN Indonesia Power carries out IT security maintenance, enhancement, and dissemination, including: building employee understanding and awareness in managing cyber security risks that affect the Company's systems,

pengamanan siber yang berdampak pada sistem, asset, data dan bisnis perusahaan dan mengimplementasikan sistem perlindungan keamanan siber (perangkat *security*) untuk menjamin keberlangsungan proses bisnis perusahaan dengan dukungan alat strategis pengendalian keamanan informasi sebagai landasan yakni Kebijakan Keamanan Informasi yang tertuang dalam Peraturan Direksi No. 0004.P/DIR/2024.

PT PLN Indonesia Power juga telah mengimplementasikan ISO 27001:2013, Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang mendukung prinsip *Confidentiality*, *Integrity* dan *Availability* dalam usaha untuk mengevaluasi, mengimplementasikan dan memelihara keamanan informasi yang dimiliki berdasarkan "*best practice*". Dalam mendukung *framework* di atas di perlukan elemen/komponen yang saling berkaitan satu sama lain terdiri dari *Technology*, *People* (SDM) dan Proses agar dapat terhindar dan dapat melakukan pencegahan terhadap ancaman-ancaman keamanan Informasi.

Dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, PLN Indonesia Power telah membentuk *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) sebagai bagian dari strategi penguatan keamanan siber perusahaan. CSIRT bertanggung jawab untuk mendeteksi, merespons, dan mengatasi insiden keamanan yang dapat mengancam sistem dan data perusahaan.

Dalam membangun pertahanan siber yang lebih kokoh serta menjaga kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan, keamanan siber bukan hanya tanggung jawab satu entitas dalam grup, melainkan merupakan upaya kolektif yang harus dijalankan secara terpadu demi keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis yang aman di era digital. PLN Indonesia Power sebagai PLN Group rutin dalam setiap triwulan melakukan *Cadance Meeting* Keamanan Siber PLN Group dalam upaya penyelarasan keamanan siber dengan regulasi yang berlaku dan meningkatkan kesiapan PLN Group dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

assets, data, and business operations, and implementing cyber security protection systems (security devices) to ensure the continuity of business processes, supported by strategic tools for information security control. These efforts are grounded in the Information Security Policy outlined in Board of Directors' Regulation No. 0004.P/DIR/2024.

PT PLN Indonesia Power has also implemented ISO 27001:2013, an Information Security Management System that supports the principles of Confidentiality, Integrity, and Availability to evaluate, implement, and maintain information security based on "best practices". To support this framework, interrelated elements/components are required, namely Technology, People (Human Resources), and Processes to avoid and prevent information security threats.

In facing increasingly complex cyber threats, PLN Indonesia Power has established a Computer Security Incident Response Team (CSIRT) as part of the Company's cyber security strengthening strategy. The CSIRT is responsible for detecting, responding to, and handling security incidents that may threaten the Company's systems and data.

In building a stronger cyber defense and maintaining the trust of customers and stakeholders, cyber security is not solely the responsibility of a single entity within the group, but a collective effort that must be carried out in an integrated manner to ensure sustainable and secure business growth in the digital era. PLN Indonesia Power, as part of the PLN Group, regularly conducts Quarterly PLN Group Cyber Security Cadence Meetings as part of its efforts to align cyber security practices with applicable regulations and to enhance the PLN Group's readiness in facing the ever-evolving cyber threats.

Risiko Utama dan *Disruption* serta Mitigasinya Major Risks, Disruptions, and their Mitigation

Di dalam pengelolaan Teknologi Informasi, PT PLN Indonesia Power mengidentifikasi adanya risiko-risiko didalamnya. Identifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa segala risiko yang berpotensi dapat mempengaruhi kegiatan dan pencapaian kinerja IT telah diketahui dan disiapkan mitigasinya.

In the management of Information Technology, PT PLN Indonesia Power identifies the risks involved. This identification is necessary to ensure that all risks that have the potential to affect IT activities and performance achievements are recognized and have mitigation measures prepared.

Risiko yang diidentifikasi tersebut dikelompokkan menjadi kelompok risiko antara lain seperti *security* sistem informasi, infrastruktur teknologi Informasi, *obsolete* teknologi informasi.

The identified risks are categorized into several risk groups, such as information system security, information technology infrastructure, and obsolete information technology.

Perencanaan *Disaster Recovery Plan* dan *Disaster Recovery Center* Disaster Recovery Plan and Disaster Recovery Center Planning

Dalam meningkatkan layanan sistem TI, PT PLN Indonesia Power telah memiliki *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan lokasi *Disaster Recovery Centre* (DRC).

To enhance IT system services, PT PLN Indonesia Power has established a Disaster Recovery Plan (DRP) and a designated Disaster Recovery Center (DRC) location.

Disaster Recovery Plan (DRP) ini merupakan panduan pemulihan layanan Teknologi Informasi (TI) PT PLN Indonesia Power, dari suatu peristiwa yang menyebabkan terhentinya layanan TI di lingkungan PT PLN Indonesia Power, terutama layanan-layanan TI yang bersifat kritis bagi kelangsungan kegiatan PT PLN Indonesia Power secara keseluruhan. Dokumen *DRP* rutin direvisi dalam setiap tahun, dokumen terbaru yang digunakan yakni Dokumen *Disaster Recovery Plan* (DRP) PLN Indonesia Power Tahun 2024. Secara Rutin juga sudah dilakukan simulasi *DRP* dan pemeliharaan terhadap perangkat di lokasi DRC.

The Disaster Recovery Plan (DRP) serves as a recovery guideline for Information Technology (IT) services at PT PLN Indonesia Power in the event of an incident that causes disruption to IT services, especially those that are critical to the continuity of the Company's operations. The *DRP* document is reviewed annually, with the most recent version being the PLN Indonesia Power Disaster Recovery Plan (DRP) Document for 2024. Regular *DRP* simulations and maintenance of equipment at the DRC location are also conducted.

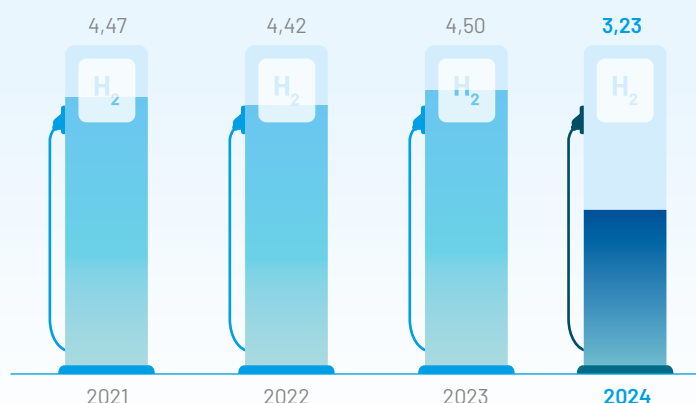
Maturity Assessment Teknologi Informasi Information Technology Maturity Assessment

Peningkatan *maturity level Information Capital Readiness* (ICR) dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun sekali dalam upaya pengukuran kematangan tata kelola TI (*IT Maturity Level*). Di tahun 2024, PLN Indonesia Power menggunakan *standard framework* COBIT 2019 dalam melakukan asesmen *maturity level* ICR tersebut untuk mengukur *capability level* organisasi terhadap penerapan tata kelola TI dengan 4 domain proses yang terdiri dari *Evaluate, Direct and Monitor, Align Plan and Organize, Build Acquire and Implement*, dan *Deliver Service Support*. Berdasarkan hasil *assessment* terhadap *capability level* pada setiap proses didapatkan nilai 3,23 yang menunjukkan bahwa seluruh proses telah dikelola dengan baik.

The improvement of the Information Capital Readiness (ICR) maturity level is carried out once a year as part of the effort to measure the maturity of IT governance (IT Maturity Level). In 2024, PLN Indonesia Power used the COBIT 2019 standard framework to assess the ICR maturity level to measure the organization's capability level in implementing IT governance across four process domains, namely Evaluate, Direct and Monitor; Align, Plan and Organize; Build, Acquire and Implement; and Deliver, Service and Support. Based on the assessment results of the capability level in each process, a score of 3.23 was achieved, indicating that all processes are well-managed.

Maturity Level/ICR Tahun 2021- 2024 (skor)

ICR Maturity Level in 2021-2024
(score)



Audit Teknologi Informasi Information Technology Audit

Dalam rangka memastikan keandalan TI, pada tahun 2024 terdapat Audit TI dengan uraian sebagai berikut:

In order to ensure IT reliability, in 2024 there will be an IT Audit with the following description:

Tabel Audit Teknologi Informasi tahun 2024

Table of Information Technology Audit in 2024

No	Kegiatan Activity	Periode Term	Pelaksana Audit Auditor
1.	Audit SPI PT PLN (Persero) Audit by PT PLN (Persero)'s Internal Audit Unit (SPI)	Oktober 2024 October 2024	SPI PT PLN (Persero)
2.	Audit IT General Control oleh PwC IT General Control Audit by PwC	September 2024 - April 2025 September 2024 - April 2025	PT PWC
3.	Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO/ IEC 27001:2013 Information Security Management System Audit based on ISO/IEC 27001:2013	Oktober 2024 October 2024	Sucofindo

Implementasi ISO 27001 ISO 27001 Implementation

PLN Indonesia Power sebagai perusahaan energi terpercaya yang tumbuh berkelanjutan senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola perusahaan. Salah satu yang menjadi perhatian utama dalam perbaikan proses bisnis adalah terkait sistem manajemen keamanan Informasi. Setelah melalui proses implementasi dan persiapan sertifikasi, pada tanggal 18 Agustus 2017 untuk pertama kalinya PLN Indonesia Power berhasil mendapatkan sertifikat

PLN Indonesia Power, as a trusted and sustainably growing energy company, consistently strives to improve its corporate governance. One of the main areas of focus in improving business processes is related to the Information Security Management System. After going through the implementation and certification preparation process, on August 18, 2017, for the first time, PLN Indonesia Power successfully obtained the International Organization for Standardization (ISO) 27001:2013 certification for the

International Organization for Standardization (ISO) 27001:2013 untuk Information Security Management System (ISMS) atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan lingkup Bidang Information Technology and Digital.

Pada tahun 2023 telah dilakukan Re-sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi diperuntukkan bagi Bidang *Information Technology and Digital*, yang efektif berlaku sampai dengan 25 Oktober 2025.

Information Security Management System (ISMS) with the scope of Information Technology and Digital Department.

In 2023, the re-certification of the Information Security Management System was carried out for the Information Technology and Digital Department, which is effectively valid until October 25, 2025.



Pencapaian ISO 27001:2013 memberi arti besar bagi PLN Indonesia Power, karena standarisasi seperti ini selain mampu meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, juga memperkuat proses bisnis dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), serta meningkatkan pengamanan teknologi informasi. Dengan demikian, citra organisasi dan daya saing juga meningkat, sehingga membuka peluang untuk pengembangan organisasi di masa mendatang.

Melindungi informasi berarti menjaga kerahasiaan, yaitu memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Juga menjaga integritas, memastikan bahwa informasi tetap akurat dan lengkap, serta informasi tersebut tidak dimodifikasi tanpa otorisasi yang jelas. Dan terakhir, memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan.

The achievement of ISO 27001:2013 holds significant meaning for PLN Indonesia Power, as such standardization not only enhances stakeholder trust, but also strengthens business processes, promotes continuous improvement, and increases information technology security. Consequently, the organization's image and competitiveness are also improved, opening greater opportunities for future organizational development.

Protecting information means safeguarding confidentiality, ensuring that information is only accessible to authorized parties. It also involves maintaining integrity, ensuring that the information remains accurate and complete, and is not modified without clear authorization. Lastly, it means ensuring availability, so that authorized parties can access the information whenever needed.

Penghargaan di Bidang Teknologi Informasi

Awards in the Field of Information Technology

Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power berhasil meraih beberapa penghargaan di bidang TI sebagai berikut:

In 2024, PLN Indonesia Power successfully received several awards in the field of Information Technology, as follows:

Digital Technology & Innovation (DIGITECH) Award 2024

Digital Technology & Innovation (DIGITECH) Award 2024



Itech Magazine bekerja sama dengan Forum Digital Indonesia (FORDIGI) BUMN serta didukung oleh Kementerian KOMINFO, menyelenggarakan ajang *Digital Technology & Innovation Awards* (DIGITECH) 2024. Dalam ajang ini, PLN Indonesia Power meraih penghargaan di sejumlah kategori. Pada penyelenggaraan tahunan tersebut, PLN Indonesia Power memperoleh lima penghargaan sekaligus, di antaranya:

1. PLN Indonesia Power: *"The Greatest Champions of Digital Transformation & Innovation Excellence (Energy Industries)."*
2. PLN Indonesia Power: *"The Best ICT Business Strategy (Energy Industries)."*
3. PLN Indonesia Power: *"The Best IT Leadership (Energy Industries)."*
4. Edwin Nugraha Putra: *"The Best CEO for Corporate Digital Transformation of The Year"*
5. Endang Astharanti: *"The Best Women Digital Leader of The Year."*

Itech Magazine in collaboration with the Forum Digital Indonesia (FORDIGI) BUMN and supported by the Ministry of KOMINFO, organized the Digital Technology & Innovation Awards (DIGITECH) 2024. In this event, PLN Indonesia Power won awards in a number of categories. At the annual event, PLN Indonesia Power received five awards at once, including:

1. PLN Indonesia Power: *"The Greatest Champions of Digital Transformation & Innovation Excellence (Energy Industries)."*
2. PLN Indonesia Power: *"The Best ICT Business Strategy (Energy Industries)."*
3. PLN Indonesia Power: *"The Best IT Leadership (Energy Industries)."*
4. Edwin Nugraha Putra: *"The Best CEO for Corporate Digital Transformation of The Year."*
5. Endang Astharanti: *"The Best Women Digital Leader of The Year."*

Indonesia IT & Digital Operational Excellence Award VI 2024

Indonesia IT & Digital Operational Excellence Award VI 2024



PLN Indonesia Power menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional dengan meraih penghargaan *The Best Indonesia IT & Digital Operational Excellence Award 2024* dalam ajang bergengsi *Indonesia IT & Digital Operational Excellence Award VI 2024* (IITA-VI-2024). Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Perusahaan dalam mendorong transformasi digital serta meningkatkan efisiensi operasional melalui pemanfaatan teknologi informasi yang inovatif dan berkelanjutan.

PLN Indonesia Power achieved a remarkable accomplishment at the national level by winning *The Best Indonesia IT & Digital Operational Excellence Award 2024* at the prestigious *Indonesia IT & Digital Operational Excellence Award VI 2024* (IITA-VI-2024). This award is a tangible proof of the Company's commitment to driving digital transformation and enhancing operational efficiency through the innovative and sustainable use of information technology.

Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXVIII 2024

The 28th National Quality and Productivity Convention (TKMPN) 2024

PLN Indonesia Power menorehkan prestasi dalam ajang bergengsi Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXVIII 2024, Tim ISCT meraih penghargaan Platinum yang diberikan oleh PT Wahana Kendali Mutu bersama Asosiasi Manajemen Kualitas dan Produktivitas Indonesia.

PLN Indonesia Power achieved a remarkable milestone at the prestigious 28th National Quality and Productivity Convention (TKMPN) 2024. The ISCT Team was awarded the Platinum Award by PT Wahana Kendali Mutu in collaboration with Indonesia Quality & Productivity Management Association.

Tim ISCT mengusung karya inovasi berjudul *Integrated Smart Coal Tracking for Security of Supply* (ISCT). Inovasi ini merupakan sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk memastikan keamanan pasokan batubara bagi PLTU melalui pemantauan terintegrasi secara *real-time*. Fitur utamanya mencakup pemantauan posisi kapal, prediksi Hari Operasi Pembangkit (HOP), aplikasi *mobile* untuk akses data, serta sistem peringatan dini untuk mencegah potensi gangguan pasokan.

The ISCT team carries an innovative work entitled *Integrated Smart Coal Tracking for Security of Supply* (ISCT). This innovation is a technology-based system designed to ensure the security of coal supply for SPP through real-time integrated monitoring. Its main features include monitoring the position of ships, prediction of Power Plant Operation Days (HOP), mobile applications for data access, and early warning systems to prevent potential supply disruptions.



Penghargaan Platinum ini menjadi bukti pengakuan terhadap inovasi insan PLN Group dalam mendorong efisiensi dan produktivitas di sektor energi.

This Platinum Award serves as recognition of the PLN Group's commitment to driving innovation, efficiency, and productivity in the energy sector.

Forum Karya Inovasi & Science Technology and Management Meetup 2024

Innovation Work Forum & Science Technology and Management Meetup 2024



Dalam ajang Forum Karya Inovasi & Science Technology and Management Meetup 2024, Bidang Information Technology and Digital meraih Juara I dengan judul "Health Empowerment AI-Driven Leverage for Fast Reimbursement in IPKU" dan Juara III dengan judul "MEDIACOM-AI - MEDIA and COMMUNICATION with Artificial Intelligence" pada kategori Manajemen dan Aplikasi.

At the Innovation Work Forum & Science Technology and Management Meetup 2024, the Information Technology and Digital Division won 1st Place with the title "Health Empowerment AI-Driven Leverage for Fast Reimbursement in IPKU" and 3rd Place with the title "MEDIACOM-AI - MEDIA and Communication with Artificial Intelligence" in the Management and Application category.

Semesta Budaya

Semesta Budaya



Dalam ajang Semesta Budaya Tahun 2024 PLN Indonesia Power, Bidang Information Technology and Digital meraih Juara I dengan judul “*Story Telling - Insiden Serangan Siber PLN Indonesia Power*” dalam kategori *Storyteller* dan Juara II dengan judul “*Idea - Aplikasi Crowdsourcing untuk Sinergi Pegawai dan Organisasi PLN IP*” pada kategori *Idea*.



At the Semesta Budaya 2024 event of PLN Indonesia Power, the Information Technology and Digital Division won 1st Place with the title “*Story Telling - Cyber Attack Incident at PLN Indonesia Power*” in the Storyteller category and 2nd Place with the title “*Idea - Crowdsourcing Application for Employee and Organization Synergy at PLN IP*” in the Idea category.

Asian Technology Excellence Awards 2024

Asian Technology Excellence Awards 2024

Ajang penghargaan ini diberikan oleh *Asian Business Review*. Di perhelatan *Asian Technology Excellence Awards* tahun 2024 PLN Indonesia Power mendapat 3 (tiga) penghargaan:

1. *Winner Kategori Indonesia Technology Excellence Award for AI - Energy* untuk *Project PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya*
2. *Winner Kategori Indonesia Technology Excellence Award for Digital - Energy* untuk *Project PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya*
3. *Winner Kategori Technology Excellence Award for Emerging Technology* untuk *Project PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang*.

This prestigious award was presented by the Asian Business Review. At the Asian Technology Excellence Awards 2024, PLN Indonesia Power received 3 (three) awards:

1. Winner in the Indonesia Technology Excellence Award for AI - Energy category for the project at PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya
2. Winner in the Indonesia Technology Excellence Award for Digital - Energy category for the project at PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya
3. Winner in the Technology Excellence Award for Emerging Technology category for the project at PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang

Sistem Manajemen Terintegrasi PLN Indonesia Power (PLN IP-IMS)

PLN Indonesia Power Integrated Management System (PLN IP-IMS)



PLN Indonesia Power - *Integrated Management System* (PLN IP-IMS) merupakan tatakelola Perusahaan dalam Sistem Manajemen secara Terintegrasi yang saling berkaitan dengan tatakelola lainnya. PLN IP-IMS mulai ditetapkan tahun 2012 dan penerapannya dimulai tahun 2013, seiring perkembangan organisasi pengembangan ruang lingkup dan jenis sistem manajemen dilakukan hingga saat ini.

Tata cara dan aturan dalam melaksanakan Sistem Manajemen Terintegrasi diatur dalam Manual PLN IP-IMS, berupa kerangka pedoman yang mencakup gabungan dari beberapa standar Sistem Manajemen/Tata Kelola Perusahaan serta pemenuhan regulasi Pemerintah.

PLN IP-IMS yang telah diterapkan di 32 unit kerja (UBP Suralaya, UBP Priok, UBP Saguling, UBP Kamojang, UBP Semarang, UBP Mrica, UBP Grati, UBP Bali, UBP Banten 1 Suralaya, UBP Banten 2 Labuan, UBP Banten 3 Lontar, UBP Jabar 2 Palabuhan Ratu, UBP Jateng 2 Adipala, UBP Cilegon,

PLN Indonesia Power - *Integrated Management System* (PLN IP-IMS) is a corporate governance in an integrated management system that is interrelated with other governance. PLN IP-IMS was established in 2012 and its implementation began in 2013, along with the development of organization, the development of scope and type of management system, which has been carried out until now.

The procedures and rules for implementing the Integrated Management System are regulated in PLN IP-IMS Manual, in the form of a guideline framework that includes a combination of several standards for the Management System/ Corporate Governance and compliance with Government regulations.

PLN IP-IMS has been implemented in 32 work units (GBU Suralaya, GBU Priok, GBU Saguling, GBU Kamojang, GBU Semarang, GBU Mrica, GBU Grati, GBU Bali, GBU Banten 1 Suralaya, GBU Banten 2 Labuan, GBU Banten 3 Lontar, GBU West Java 2 Palabuhan Ratu, GBU Central Java 2 Adipala,

Unit Bisnis Pemeliharaan (UBH), UBP Keramasan, UBP Bengkulu, UBP Jambi, UBP Bukittinggi, UBP Teluk Sirih, UBP Ombilin, UBP Kepulauan Riau, UBP Mahakam, UBP Barito, UBP Asam-asam, UBP Singkawang, UBP Tello, UBP Pangkalan Susu, UBP Barru, UBP Labuhan Angin, UBP Jeranjang dan Kantor Pusat. Khusus ISO 27001, ruang lingkup untuk Bidang Information Technology and Digital Kantor Pusat, sedangkan ruang lingkup ISO 22301 adalah untuk UBP Priok dan Kantor Pusat.

Adapun Sistem Manajemen yang diintegrasikan dalam kerangka PLN IP-IMS terdiri dari:

1. ISO 9001:2015 - Sistem Manajemen Mutu;
2. ISO 14001:2015 - Sistem Manajemen Lingkungan;
3. ISO 45001:2018 - Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
4. ISO 28000:2007 - Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok;
5. ISO 55001:2014 - Sistem Manajemen Aset;
6. ISO 50001:2018 - Sistem Manajemen Energi;
7. ISO 27001:2013 - Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
8. ISO 22301:2019 - Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis;
9. ISO 37001:2016 - Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
10. ISO 26000 - *Guidance on Social Responsibility*;
11. ISO 31000:2018 - *Risk Management-Principles and Guidelines*;
12. ISO 30414 - Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
13. Kriteria *Baldrige*;
14. Sistem Manajemen K3 (SMK3) berbasis Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012;
15. Sistem Manajemen Pengamanan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2019, menggantikan Perkap Nomor. 24 Tahun 2007 menginduk ke ISO 28000:2007;
16. Sistem Manajemen Keselamatan Kelistrikan (SMK2) Peraturan Menteri ESDM Nomor. 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.

PLN Indonesia Power dan seluruh unit bisnis senantiasa menyempurnakan proses bisnis secara terus-menerus berdasarkan standar terbaik. Sistem manajemen terbaru yang diimplementasikan di tahun 2024 adalah ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan. Implementasi PLN IP *Integrated Management System* (PLN IP-IMS), yaitu integrasi berbagai standar manajemen yang terdiri dari ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan), ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 45001:2018

GBU Cilegon, Maintenance Business Unit (MBU), GBU Keramasan, GBU Bengkulu, GBU Jambi, GBU Bukittinggi, GBU Teluk Sirih, GBU Ombilin, GBU Riau Islands, GBU Mahakam, GBU Barito, GBU Asam-asam, GBU Singkawang, GBU Tello, GBU Pangkalan Susu, GBU Barru, GBU Labuhan Angin, GBU Jeranjang and Head Office. Specifically for ISO 27001, the scope is for the Information Technology and Digital Sector of the Head Office, while the scope of ISO 22301 is For GBU Priok and head office.

The management system that is integrated in PLN IP-IMS framework consists of:

1. ISO 9001: 2015 - Quality Management System;
2. ISO 14001: 2015 - Environmental Management System;
3. ISO 45001: 2018 - Occupational Health and Safety Management System(OHS);
4. ISO 28000: 2007 - Supply Chain Security Management System;
5. ISO 55001: 2014 - Asset Management System;
6. ISO 50001: 2018 - Energy Management System;
7. ISO 27001: 2013 - Information Security Management System;
8. ISO 22301: 2019 - Business Continuity Management System;
9. ISO 37001: 2016 - Anti Bribery Management System (SMAP);
10. ISO 26000 - Guidance on Social Responsibility;
11. ISO 31000:2018 - Risk Management-Principles and Guidelines;
12. ISO 30414 - Human Resource Management System;
13. Baldrige Criteria;
14. OHS Management System (OHSMS) based on Government Regulation (PP) No. 50 of 2012;
15. Police Security Management System No. 7 of 2019, replacing Perkap No. 24 of 2007, affiliated to ISO 28000:2007;
16. Electricity Safety Management System (SMK2) Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 10 of 2021 on Electricity Safety.

PLN Indonesia Power and all business units continuously improve business processes based on the best standards. The latest management system implemented in 2024 was ISO 37301:2021 Compliance Management System. Implementation of PLN IP Integrated Management System (PLN IP-IMS) is the integration of various management standards, consisting of ISO 14001:2015 (Environmental Management System), ISO 9001:2015 (Quality Management System), ISO 45001:2018 (OHS Management System), ISO 28000:2007 (Supply Chain



(Sistem Manajemen K3), ISO 28000:2007 (Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok), SMK3 (Sistem Manajemen K3) berbasis PP Nomor 50 Tahun 2012, ISO 55001:2014 (Sistem Manajemen Aset), ISO 50001:2018 (Sistem Manajemen Energi), ISO 27001:2013 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi), ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan), ISO 37301 (Sistem Manajemen Kepatuhan), ISO 22301:2019 (Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis), serta sistem manajemen berbasis guideline yaitu ISO 26000 (*Guideline on Social Responsibility*), ISO 31000 (*Risk Management-Principles and Guidelines*), Kriteria Baldrige.

Secara lebih rinci, perjalanan implementasi PLN IP-IMS dapat digambarkan sebagai berikut:

Security Management System), OHSMS (OHS Management System) based on PP No. 50 of 2012, ISO 55001:2014 (Asset Management System), ISO 50001:2018 (Energy Management System), ISO 27001:2013 (Information Security Management System), ISO 37001 (Anti-Bribery Management System), ISO 37301 (Compliance Management System), ISO 22301:2019 (Business Continuity Management System), and a guideline-based management system, namely ISO 26000 (*Guideline on Social Responsibility*), ISO 31000 (*Risk Management-Principles and Guidelines*), and Baldrige Criteria.

In more detail, the implementation journey of PLN IP-IMS can be described as follows:

	Horizon 1 Set up Pondasi Sistem Manajemen Setting up Management System Foundation	Horizon 2 Penyelarasan Standar Sistem Manajemen Alignment of Management System Standards	Horizon 3 Internalisasi keseluruhan sistem ke dalam seluruh elemen organisasi Internalization of all systems into all organizational elements	Horizon 4 Digitalisasi sistem manajemen dan proses bisnis Digitalization of management system and business processes	Horizon 5 Ratifikasi proses bisnis holding berbasis APQC Ratification of APQC-based holding business processes
	2013	2013-2015	2015-2018	2018-2022	2022-2024
Fokus Pengembangan Development Focus	- Menyiapkan Pedoman Kebijakan dan <i>Manual</i> PLN IP-IMS - Mengimplementasikan <i>Standard</i> Sistem Manajemen; (sesuai lingkup IMS) - Melakukan audit internal PLN IP-IMS - Melakukan Audit Sertifikasi PLN IP-IMS dengan Badan Sertifikasi - Preparing PLN IP-IMS Policy Guidelines and Manual - Implementing Management System Standards; (based on IMS scope) - Conducting PLN IP-IMS internal audit - Conducting PLN IP-IMS Certification Audits with Certification Bodies	- Tahapan Penyelarasan sistem Manajemen eksisting dengan kebutuhan pengembangan Sistem Manajemen baru sesuai dengan kebutuhan organisasi - Menyelaraskan pedoman, <i>Manual</i>, Proses Bisnis In Power dengan strategi dan kebijakan Perusahaan - Membangun dokumen <i>fully integrated</i> - Membangun sistem <i>support</i> IT untuk mengendalikan, monitor dan mengevaluasi implementasi IMS - Mendorong peran Sistem Manajemen dalam meraih WCS - Membangun budaya dalam implementasi Sistem Manajemen - Persiapan implementasi di UBOH/ UJP - Alignment Phases of the existing Management system for developing new Management System in accordance with the organization's requirements - Aligning In Power guidelines, Manuals, Business Processes with the Company strategies and policies - Preparing fully integrated documents - Developing IT support system to control, monitor, and evaluate IMS implementation - Supporting Management Systems' role in achieving WCS - Developing a culture in the Management System implementation - Preparing implementation in O&M Business Unit/OMU	- Mengintegrasikan Sistem <i>Support</i> Sistem Manajemen dengan <i>Dashboard Management</i> lainnya - Melanjutkan perbaikan Sistem Manajemen secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja perusahaan - Membangun budaya dalam implementasi Sistem Manajemen - Implementasi seluruh UJP - Penambahan standar baru (ISO 26000, ISO 55001) - Kajian ISO 50001 dan ISO 45000 - Kajian Implementasi ISO 27001 - Kajian Implementasi ISO 22301 <i>Update</i> sistem standar baru - Integrating Support System for Management System with other Dashboard Management - Continuing constant improvement of the Management System for the betterment of company performance - Developing a culture in the Management System implementation - Implementation of all OMU - Addition of new standards (ISO 26000, ISO 55001) - ISO 50001 and ISO 45000 analysis. - ISO 27001 Implementation Analysis - ISO 22301 Implementation Analysis - Update of new standard system	- Digitalisasi sistem dan proses bisnis yang menunjang maturitas implementasi IP-IMS - Integrasi proses bisnis dengan elemen program, standar & regulasi, Aplikasi, Data, Risiko, KPI. - Digitalization of systems and business processes that support IP-IMS implementation maturity - Integration of business processes with program elements, standards & regulations, Applications, Data, Risk, KPI	- Mapping proses bisnis APQC - Migrasi proses bisnis eksisting ke proses bisnis APQC <i>Unit Pilot Project</i> pemetaan RACI + <i>Consume</i> - Integrasi Proses Bisnis dengan risiko - Implementasi standar ISO 9001 ke seluruh unit kapasitas <100 MW luar Jawa. - Mapping of APQC business processes - Migration of existing business processes to APQC business processes - RACI + Consume mapping Pilot Unit - Integration of Business Processes with risk - Implementation of ISO 9001 standard to all capacity units <100 MW outside Java
Key Enabler	- Memperkuat tim Implementor IMS - Membangun sistem BODSL sebagai <i>Key Sponsor</i> - Kepatuhan terhadap persyaratan sistem manajemen - Keberhasilan pengelolaan dokumen dan rekaman mutu yang standar - Strengthening the IMS Implementer team - Developing a BODSL system as a Key Sponsor - Compliance with management system requirements - Successful management of standard quality documents and records	<i>Update</i> Sistem dengan kebutuhan perusahaan dan tuntutan bisnis - Sistem monitor dan evaluasi - Standarisasi dokumentasi proses bisnis dan prosedur - Meningkatkan keahlian SDM dalam implementasi - Input KPI Kinerja IMS kedalam Pejabat Struktural - Konsolidasi agen perubahan untuk PLN IP-IMS dan membangun <i>sponsorship</i> - Updating System based on company requirements and business demands - Monitoring and evaluation systems - Standardization of business process and procedure documentation - Improving Human Capital's skills in the implementation - Inputting KPI for IMS Performance for Officials - Consolidating change agents for PLN IP-IMS and building sponsorship	- Sistem yang terintegrasi - Membangun <i>Key Sponsor</i> SMT di setiap bagian - Perbaikan proses bisnis, aplikasi, sistem kebijakan dan penyelarasan ke dalam IMS - Integrated system - Developing SMT Key Sponsor at each sections - Business process, application, policy system, and alignment into IMS	- Digitalisasi Proses Bisnis - Integrasi proses bisnis dengan key elemen standar BPMN. - Digitalization of business processes - Integration of business processes with BPMN standard key elements	- Ratifikasi proses bisnis <i>Holding</i> - Migrasi Proses Bisnis - Implementasi Sistem Manajemen unit kapasitas <100 MW luar Jawa. - Ratification of the holding business process - Migration of business processes - Implementation of Unit Management system for <100 MW capacity outside Java

Hirarki Dokumen PLN IP-IMS

Document Hierarchy of PLN IP-IMS

Hirarki Dokumen PLN IP-IMS dirancang berdasarkan *framework* dari *American Productivity and Quality Center* (APQC), yaitu *Process Classification Framework* (PCF). PCF merupakan *framework* yang digunakan untuk mengklasifikasikan proses bisnis, dimana fokusnya adalah pada proses bisnis apa yang perlu dilakukan, bukan bagaimana melaksanakannya. PCF mengelompokkan proses bisnis ke dalam lima level, yaitu:

1. Proses Bisnis Level 1 (Kategori)
2. Proses Bisnis Level 2 (Kelompok Proses)
3. Proses Bisnis Level 3 (Proses)
4. Proses Bisnis Level 4 (Aktivitas)
5. Proses Bisnis Level 5 (Tugas)

Setiap level menjelaskan detail dari level yang lebih tinggi, sehingga semakin tinggi levelnya, semakin umum atau generik proses bisnis yang dijelaskan. APQC tidak mengharuskan setiap level dijelaskan melalui alur proses atau prosedur kerja tertulis, karena PCF bertujuan sebagai alat untuk mendefinisikan kebutuhan proses bisnis. Namun, di PLN Indonesia Power, mulai dari level 4 dan 5, proses bisnis dijelaskan melalui prosedur tertulis untuk memastikan bahwa organisasi dapat menjalankan proses bisnis sesuai dengan kebutuhan operasional. Kebijakan ini diatur dalam Manual IMS, dan Hirarki Dokumen IMS berfokus pada level 4 dan 5 dari PCF APQC.

PLN Indonesia Power secara berkala mengkaji ulang isi dokumen PLN IP-IMS setahun sekali dalam rangka memastikan kesesuaian proses kerja aktual dengan dokumentasi PLN IP-IMS yang tersedia. Kaji ulang mencakup dokumen, audit sistem dan tinjauan manajemen dengan lingkup kebijakan, sasaran dan proses-proses di dalamnya untuk menjamin efektivitas dan konsistensi kebijakan dan rencana bisnis perusahaan, dan merespon terhadap perubahan harapan pelanggan, perundang-undangan persyaratan lainnya, tata kelola Perusahaan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk relevansi dan konsistensi terhadap perencanaan strategi Perusahaan.

The Document Hierarchy of PLN IP-IMS is designed based on the framework from the American Productivity and Quality Center (APQC), namely the Process Classification Framework (PCF). PCF is a framework used for classifying business processes, where the focus is on what business processes need to be done, not how to implement them. PCF groups business processes into five levels, as follows:

1. Business Process Level 1 (Category)
2. Business Process Level 2 (Process Group)
3. Business Process Level 3 (Process)
4. Business Process Level 4 (Activity)
5. Business Process Level 5 (Duty)

Each level explains the details of the higher level, so the higher the level, the more general or generic the business process described. APQC does not require each level to be explained through a written process flow or work procedure, because PCF is intended as a tool to define business process needs. However, at PLN Indonesia Power, starting from levels 4 and 5, business processes are explained through written procedures to ensure that the organization can run business processes according to operational needs. This policy is set out in the IMS Manual, and the IMS Document Hierarchy focuses on levels 4 and 5 of the APQC PCF.

PLN Indonesia Power periodically reviews the contents of PLN IP-IMS document once a year in order to ensure the conformity of the actual work process with the available PLN IP-IMS documentation. The review includes documents, system audits, and management reviews with the scope of policies, objectives, and processes therein to ensure the effectiveness and consistency of the Company's policies and business plans and respond to changes in customer expectations, other regulatory requirements, corporate governance and developments in science and technology for relevance and consistency to the Company's strategic planning.

Implementasi PLN IP-IMS

Implementation of PLN IP-IMS

Di tahun 2024 kegiatan implementasi PLN IP-IMS antara lain:

1. Pembahasan teknik setup penyelerasan sistem manajemen (SMK2-SMK3-SMP)
2. *Workshop* Integrasi Aset Manajemen ke Proses Bisnis dan Forum PLN IP-IMS
3. Pendampingan Migrasi ProBis dan *awareness* IMS ke UBP
4. Audit Internal dan Eksternal ISO 37001SMAP
5. *Awareness* Sistem Manajemen ISO 9001:2015 dan Format Dokumen IMS UBP
6. *Workshop* penyusunan ProBis level 4 dan level 5 operasi UBP
7. *Awareness* dan setup ISO 37301 Manajemen Kepatuhan PLN Indonesia Power
8. Pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen IMS dan SMAP di *Head Office* dan Unit secara bertahap 1 sampai tahap 5.

In 2024, PLN IP-IMS implementation activities included:

1. Discussion of management system alignment setup techniques (SMK2-SMK3-SMP)
2. Workshop on Integration of Management Assets into Business Processes and PLN IP-IMS Forum
3. Assistance in ProBis Migration and IMS awareness to UBP
4. Internal and External Audit of ISO 37001SMAP
5. Awareness of ISO 9001:2015 Management System and IMS Document Format UBP
6. Workshop on preparing ProBis level 4 and level 5 for UBP operations
7. Awareness and setup of ISO 37301 Compliance Management of PLN Indonesia Power
8. Implementation of Internal Audit of IMS Management System and SMAP at Head Office and Unit in stages 1 to 5.



Pengembangan dan Inovasi Teknologi Pembangkitan

Power Generation Technology Development and Innovation

Pengembangan dan inovasi pembangkitan menjadi hal yang penting mengingat bidang usaha yang dijalankan Perusahaan terutama memproduksi energi listrik. Keandalan pembangkit menjadi salah satu tujuan dalam operasional PLN Indonesia Power dalam penyediaan energi listrik. Bahkan di bidang jasa, Perusahaan juga mengoperasikan dan melakukan perawatan pembangkit. PLN Indonesia Power tidak hanya bertanggungjawab dalam menyediakan listrik, tetapi juga berperan aktif dalam menghadirkan solusi energi yang berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim. Oleh karena itu, inovasi yang dilakukan berfokus pada penyediaan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan untuk menghadapi tantangan pemanasan global.

PLN Indonesia Power ingin mengambil peran kunci dalam pengurangan emisi karbon. Salah satu langkah inovatif yang dilakukan adalah program *co-firing* di pembangkit listrik, dengan berbagai alternatif energi bersih seperti hydrogen, ammonia dan biomass. Program ini merupakan bagian dari strategi dekarbonisasi nasional dan upaya mewujudkan target NZE. Selain itu, PLN Indonesia Power juga mengembangkan proyek energi hijau melalui pembangunan *Green Hydrogen Plant* (GHP).

PLN Indonesia Power secara konsisten melakukan inovasi bisnis untuk memperkuat perannya di pasar global, salah satunya melalui inisiasi program-program pengembangan, termasuk pengembangan pembangkitan tenaga listrik hijau.

Inisiatif ini dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan dalam maupun luar negeri, lembaga riset, serta pemerintah dari negara-negara yang menjadi target pasar, dengan skema joint operation maupun *join research*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

The development and innovation of power generation are essential, considering that the Company's core business revolves around producing electrical energy. Power plant reliability is one of the key operational goals of PLN Indonesia Power in ensuring the consistent supply of electricity. Even in the service sector, the Company is actively involved in the operation and maintenance of power plants. PLN Indonesia Power is not only responsible for providing electricity but also for delivering sustainable energy solutions to address climate change. Therefore, its innovations are focused on delivering cleaner and more environmentally friendly energy to meet the challenges of global warming.

PLN Indonesia Power aims to take a key role in carbon emission reduction. One of its innovative initiatives is the *co-firing* program at power plants, utilizing various clean energy alternatives such as hydrogen, ammonia, and biomass. This program is part of the national decarbonization strategy and supports efforts to achieve the NZE target. In addition, PLN Indonesia Power is also advancing green energy projects through the development of a *Green Hydrogen Plant* (GHP).

PLN Indonesia Power consistently carries out business innovations to strengthen its role in the global market, one of which is through the initiation of development programs, including the development of green power generation.

This initiative is carried out through cooperation with domestic and foreign companies, research institutions, and governments from countries that are targeted markets, with joint operation and join research schemes, both domestically and abroad.

Program Riset/Penelitian Teknologi Pembangkit

Power Generation Technology Research Program

Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power menyusun program riset/penelitian teknologi pembangkit di beberapa unit pembangkit diantaranya:

In 2024, PLN Indonesia Power developed a research program focused on power generation technologies across several power plant units, including:

Program Pengembangan Teknologi Energi Terbarukan Renewable Energy Technology Development Program

Uji Biomass *Co-firing* Skala Besar untuk PLTU PC (100% *Biomassa* dalam 1 *Pulverizer*)

Large-Scale Biomass Co-firing Test for SPP of PC (100% Biomass in One Pulverizer)

Program Uji *Biomass Co-firing* Skala Besar untuk PLTU *Pulverized Coal* (PC) dengan 100% *Biomassa* dalam 1 *Pulverizer* merupakan uji coba skala besar untuk menggantikan batubara dengan biomassa secara penuh dalam salah satu *pulverizer* pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis *Pulverized Coal* (PC). Pelaksanaan program ini di lokasi PLTU Pelabuhan Ratu unit 3.

Dalam sistem PLTU PC, batubara digiling hingga menjadi serbuk halus sebelum dibakar di dalam *boiler*. Pada pengujian *Co-firing* Skala Besar di PLTU Pelabuhan Ratu unit 3 dilakukan pengujian satu unit *pulverizer* untuk dioperasikan menggunakan 100% biomassa, dalam hal ini *sawdust*, untuk menguji kinerja pembakaran, kestabilan operasi, dan dampaknya terhadap efisiensi serta emisi pembangkit.

Program ini menjadi bagian dari strategi transisi energi untuk mengurangi ketergantungan pada batubara dengan menggantinya secara bertahap menggunakan bahan bakar terbarukan.

The Large-Scale Biomass Co-firing Test Program for SPP *Pulverized Coal* (PC) with 100% Biomass in 1 *Pulverizer* is a large-scale trial to fully replace coal with biomass in one of the *pulverizers* at a *Pulverized Coal* (PC)-based Steam Power Plant (SPP). The implementation of this program took place at SPP Pelabuhan Ratu unit 3.

In the PC-based SPP system, coal is ground into fine powder before being burned in the boiler. In the Large-Scale Co-firing Test at SPP Pelabuhan Ratu unit 3, one *pulverizer* unit was tested to operate using 100% biomass, in this case, *sawdust*, to evaluate combustion performance, operational stability, and its impact on plant efficiency and emissions.

This program is part of the energy transition strategy to reduce dependence on coal by gradually replacing it with renewable fuels.

Uji Biomass *Co-firing* Skala Besar untuk PLTU CFB (100% *Biomassa*)

Large-Scale Biomass Co-firing Test for CFB SPP (100% Biomass)

Program Uji Biomass *Co-firing* Skala Besar untuk PLTU *Circulating Fluidized Bed* (CFB) dengan 100% Biomassa bertujuan untuk menguji kelayakan teknis dan operasional penggunaan biomassa sebagai bahan bakar utama dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis teknologi *Circulating Fluidized Bed* (CFB). Pelaksanaan program ini di lokasi PLTU Bengkayang.

Teknologi CFB memungkinkan pembakaran bahan bakar dengan efisiensi tinggi dan fleksibilitas dalam jenis bahan bakar yang digunakan, termasuk biomassa. Dalam uji skala besar ini, PLTU CFB akan beroperasi menggunakan 100% biomassa, seperti *wood pellet*, cangkang sawit, atau sumber biomassa lainnya, tanpa campuran batu bara.

Uji coba ini dilakukan untuk memastikan kinerja pembangkit dalam aspek efisiensi, stabilitas operasi, keandalan peralatan, serta dampak terhadap emisi lingkungan.

The Large-Scale Biomass Co-firing Test Program for *Circulating Fluidized Bed* (CFB) SPP with 100% Biomass aims to assess the technical and operational feasibility of using biomass as the main fuel in a Steam Power Plant (SPP) based on *Circulating Fluidized Bed* (CFB) technology. The implementation of this program took place at SPP Bengkayang.

CFB technology enables high-efficiency fuel combustion and flexibility in the types of fuel used, including biomass. In this large-scale test, the CFB SPP will operate using 100% biomass, such as *wood pellets*, palm kernel shells, or other biomass sources, without any coal mixture.

This trial is conducted to ensure the plant's performance in terms of efficiency, operational stability, equipment reliability, and its impact on environmental emissions.

Penurunan emisi CO₂ 35.000 ton/tahun melalui implementasi 100% *Continuous Biomass Firing*

Reduction of CO₂ Emissions by 35,000 Tons/Year Through the Implementation of 100% Continuous Biomass Firing

Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon sebesar 35.000 ton CO₂ per tahun dengan menerapkan sistem 100% *Continuous Biomass Firing* pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berjenis *stocker*. *Continuous biomass firing* berarti penggunaan biomassa secara penuh dan berkelanjutan sebagai bahan bakar utama dalam pembangkit listrik, menggantikan batu bara sepenuhnya. Pelaksanaan program ini di lokasi PLTU Sintang.

Dalam implementasi ini, bahan bakar yang digunakan berasal dari sumber biomassa seperti *wood pellet*, cangkang sawit, sekam padi, atau limbah pertanian lainnya. Dengan mengganti batu bara dengan biomassa, pembakaran menjadi lebih ramah lingkungan karena biomassa dianggap sebagai bahan bakar netral karbon (*carbon-neutral*), di mana CO₂ yang dilepaskan saat pembakaran akan diserap kembali oleh tanaman dalam siklus alami.

Uji Coba Ammonia Co-firing

Ammonia Co-firing Trial

Program Uji Coba Ammonia *Co-firing* pada PLTU Labuan hingga 3% *calorific value* merupakan proyek percontohan untuk menguji kelayakan teknis dan operasional penggunaan Ammonia (NH₃) sebagai bahan bakar campuran (*co-firing*) dengan batu bara dalam pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Program ini dilaksanakan di lokasi PLTU Labuan yang bekerja sama dengan Pupuk Kujang dan IHI Corporation Japan.

Ammonia dipilih sebagai bahan bakar alternatif karena tidak mengandung karbon (*C-free fuel*) sehingga tidak menghasilkan emisi CO₂ saat dibakar. Dalam uji coba ini, hingga 3% *calorific value* Ammonia akan dicampurkan dengan batu bara dalam proses pembakaran dalam *boiler* di PLTU Labuan. Program ini bertujuan untuk mengukur dampak penggunaan Ammonia terhadap efisiensi pembangkit, stabilitas pembakaran, emisi gas buang, serta kompatibilitas dengan peralatan eksisting.

Uji Coba Hydrogen Co-firing

Hydrogen Co-firing Trial

Hydrogen co-firing adalah sebuah uji coba untuk mencampurkan hidrogen dengan bahan bakar utama dalam proses pembangkitan listrik. *Hydrogen co-firing* bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dengan menggantikan sebagian bahan bakar fosil dengan

This program aims to reduce carbon emissions by 35,000 tons of CO₂ per year by implementing a 100% Continuous Biomass Firing system at a stoker-type Steam Power Plant (SPP). Continuous biomass firing refers to the full and sustained use of biomass as the primary fuel in power generation, completely replacing coal. The implementation of this program took place at SPP Sintang.

In this implementation, the fuel used comes from biomass sources such as wood pellets, palm kernel shells, rice husks, or other agricultural waste. By replacing coal with biomass, combustion becomes more environmentally friendly, as biomass is considered a carbon-neutral fuel, meaning the CO₂ released during combustion is reabsorbed by plants through the natural carbon cycle.

The Ammonia Co-firing Trial Program at the Steam Power Plant (SPP) of Labuan with up to 3% calorific value is a pilot project aimed at testing the technical and operational feasibility of using Ammonia (NH₃) as a co-firing fuel mixed with coal in a steam power plant. This program was implemented at SPP Labuan in collaboration with Pupuk Kujang and IHI Corporation Japan.

Ammonia is chosen as an alternative fuel because it contains no carbon (*C-free fuel*) and therefore does not produce CO₂ emissions when burned. In this trial, up to 3% calorific value of Ammonia will be mixed with coal during the combustion process in the boiler at SPP Labuan. The program aims to measure the impact of Ammonia use on plant efficiency, combustion stability, exhaust gas emissions, and compatibility with existing equipment.

Hydrogen co-firing is a trial that involves mixing hydrogen with the primary fuel in the electricity generation process. The purpose of hydrogen co-firing is to reduce carbon emissions by partially replacing fossil fuels with hydrogen, which is a low-emission fuel. This program is being carried



hydrogen, yang merupakan bahan bakar rendah emisi. Pelaksanaan program ini di lokasi PLTDG Pesanggaran. Uji coba ini dilakukan dengan menginjeksikan hidrogen ke dalam sistem pembakaran pada proporsi 7% dari total bahan bakar yang digunakan. Proses ini memerlukan modifikasi pada sistem pembakaran, pengaturan kontrol emisi, serta pemantauan efisiensi dan keamanan operasional.

out at the DGPP of Pesanggaran site. The trial injects hydrogen into the combustion system at a proportion of 7% of the total fuel used. This process requires modifications to the combustion system, emission control settings, as well as monitoring of operational efficiency and safety.

Pilot Geothermal Based-Green Hydrogen Production Plant

Pilot Geothermal Based-Green Hydrogen Production Plant

Program *Pilot Geothermal-Based Green Hydrogen Production Plant* di PLTP Kamojang merupakan proyek untuk memproduksi hidrogen hijau (*green hydrogen*) menggunakan energi panas bumi (*geothermal*). Hidrogen hijau diproduksi melalui proses elektrolisis air yang menggunakan listrik dari sumber energi terbarukan, dalam hal ini listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Kamojang.

The Pilot Geothermal-Based Green Hydrogen Production Plant program at GPP of Kamojang is a project aimed at producing green hydrogen using geothermal energy. Green hydrogen is produced through the electrolysis of water powered by electricity from renewable energy sources, in this case, electricity generated by the GPP of Kamojang.

Pilot Hydrogen Refueling System (H2RS)

Pilot Hydrogen Refueling System (H2RS)

Program *Pilot Hydrogen Refueling System (H2RS)* merupakan proyek percontohan pengembangan sistem pengisian bahan bakar hidrogen untuk kendaraan berbasis hidrogen *fuel cell (Fuel Cell Electric Vehicle/FCEV)* dan *EV Hydrogen-powered charging station*. Sistem ini dirancang untuk mendukung infrastruktur hidrogen di Indonesia sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih dan pengurangan emisi karbon di sektor transportasi. Pelaksanaan program ini di lokasi PLTD Senayan.

The Pilot Hydrogen Refueling System (H2RS) program is a pilot project focused on developing hydrogen fueling systems for hydrogen fuel cell vehicles (Fuel Cell Electric Vehicles/ FCEVs) and hydrogen-powered EV charging stations. This system is designed to support Indonesia's hydrogen infrastructure as part of the transition towards clean energy and carbon emission reduction in the transportation sector. The program is implemented at the DPP of Senayan site.

Program Pengembangan Teknologi Lainnya

Other Technology Development Programs

Technical Assessment Readiness Flexible Power Plant

Technical Assessment Readiness Flexible Power Plant

Program *Technical Assessment Readiness Flexible Power Plant* merupakan kajian teknis yang bertujuan untuk menilai kesiapan pembangkit listrik dalam menerapkan konsep *Flexible Power Plant* (FPP). Pembangkit listrik fleksibel adalah pembangkit yang dapat menyesuaikan operasinya dengan cepat untuk merespons perubahan beban dan integrasi energi terbarukan yang bersifat intermiten (seperti tenaga surya dan angin). Pelaksanaan program ini di lokasi PLTU Suralaya 1-4, PLTU Suralaya 5-7, PLTU Pelabuhan Ratu.

Kajian ini mencakup aspek teknis, operasional, dan ekonomis, termasuk kemampuan pembangkit dalam melakukan *start-up/shutdown* yang lebih cepat, *load-following*, kestabilan pembakaran dan efisiensi pada beban parsial. Program ini sangat penting dalam mendukung transisi energi di Indonesia, dimana integrasi energi terbarukan semakin meningkat dan membutuhkan pembangkit yang dapat beroperasi secara lebih fleksibel untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan.

The Technical Assessment Readiness Program for Flexible Power Plant (FPP) is a technical study aimed at evaluating the readiness of power plants to implement the Flexible Power Plant concept. A flexible power plant is one that can quickly adjust its operations to respond to load changes and the integration of intermittent renewable energy sources, such as solar and wind power. This program is conducted at the following locations: SPP of Suralaya units 1-4, SPP of Suralaya units 5-7, and SPP of Pelabuhan Ratu.

This study covers technical, operational, and economic aspects, including the power plant's capability to perform faster start-up and shutdown, load-following, combustion stability, and efficiency at partial loads. This program is crucial in supporting Indonesia's energy transition, where the integration of renewable energy is increasing and requires power plants that can operate more flexibly to maintain the reliability of the electrical system.

Kajian Kelayakan Carbon Capture Storage (CCS) PLTU Batubara

Feasibility Study of Carbon Capture and Storage (CCS) for Coal-SPP

Program termasuk salah satu program *Moonshoot Themes Sustainability* dengan tujuan untuk mengevaluasi kelayakan penerapan *carbon capture and storage* (CCS) di pembangkit listrik tenaga batu bara PT PLN Indonesia Power di PLTU Suralaya unit 5-7 dan PLTU Lontar unit 1-3. Kajian ini termasuk melakukan rancangan awal sistem CCS yang paling efektif (efisiensi penangkapan karbon hingga 90%) untuk fasilitas pembangkitan PLN Indonesia Power di PLTU Suralaya 5-7 dan PLTU Lontar 1-3 serta menghitung implikasi finansialnya. Teknologi Carbon capture yang dipilih adalah absorpsi menggunakan pelarut alkanolamina yang dapat memisahkan CO₂ pada aplikasi CCUS *retrofit* PLTU Batubara yang menghasilkan gas buang dengan kandungan CO₂ < 15%. Dibandingkan dengan alternatif teknologi lainnya (seperti membran dan *oxy-combustion*). Aplikasi CCUS secara *retrofit* pada PLTU tersebut dapat menangkap 90% CO₂ yang dihasilkan.

The program is part of the Moonshoot Themes Sustainability program with the aim of evaluating the feasibility of implementing carbon capture and storage (CCS) at Coal SPP of PT PLN Indonesia Power at SPP of Suralaya units 5-7 and SPP of Lontar units 1-3. This study includes conducting the initial design of the most effective CCS system (carbon capture efficiency up to 90%) for PLN Indonesia Power's generation facilities at SPP of Suralaya 5-7 and SPP of Lontar 1-3, as well as calculating its financial implications. The chosen carbon capture technology is absorption using alkanolamine solvents, which can separate CO₂ in the CCUS retrofit application of Coal SPP producing flue gas with CO₂ content less than 15%. This is compared with other alternative technologies (such as membranes and oxy-combustion). The CCUS retrofit application at these power plants can capture 90% of the CO₂ produced.

Inovasi Teknologi Pembangkitan

Power Generation Technology Innovation

Inovasi dalam kategori pembangkitan yang menjadi fokus PLN Indonesia Power salah satunya terkait pengembangan inovasi teknologi Smart Power Plant untuk mendukung pengembangan pembangkit masa depan yang lebih bersih, lebih andal, memiliki efisiensi tinggi serta ramah lingkungan. Di tahun 2024 PLN Indonesia Power bersama salah satu subholding PT PLN (Persero) sudah melakukan pembahasan terkait digital *twin asset health management* untuk Fase 1 (2024-2026) "*Laying the Foundation*" merupakan fase awal yang berfokus pada membangun dasar teknologi *Smart Power Plant* yang kuat agar dapat dipastikan teknologi ini dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Selain itu pada tanggal 30 Oktober 2024 PLN Indonesia Power telah melakukan *launching* pabrik solar panel pertama dan terbesar di Indonesia tepatnya di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah. Pabrik ini membuat produk modul panel surya yang diproduksi menggunakan teknologi mutakhir yaitu teknologi *Tunnel Oxide Passivated Contact* (TOPCon), dengan teknologi tersebut efisiensi panel surya yang dihasilkan mencapai 23,2%. *Soft Launching* pabrik solar panel ini merupakan capaian yang spektakuler, karena dilakukan dalam jangka waktu yang singkat 10 bulan. Hal ini menjadi hal yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Dengan beroperasinya pabrik panel surya berkapasitas 1 GWp ini akan menambah kapasitas nasional menjadi 4,7 GWp.

One of the key innovation focuses in the generation category by PLN Indonesia Power is the development of Smart Power Plant technology to support the advancement of future power plants that are cleaner, more reliable, highly efficient, and environmentally friendly. In 2024, PLN Indonesia Power, together with one of PT PLN (Persero)'s subholdings, initiated discussions regarding digital twin asset health management for Phase 1 (2024-2026), titled "*Laying the Foundation*." This initial phase focuses on establishing a strong technological foundation for Smart Power Plants to ensure the sustainable implementation of this technology.

Furthermore, on October 30, 2024, PLN Indonesia Power officially launched the first and largest solar panel factory in Indonesia, located in the Kendal Industrial Park, Central Java. This factory produces solar panel modules using advanced technology known as Tunnel Oxide Passivated Contact (TOPCon), which enables the solar panels to achieve an efficiency rate of 23.2%. The soft launching of this solar panel factory is a remarkable achievement, as it was completed within a short timeframe of just 10 months. This milestone is a source of national pride for Indonesia. With the operation of this solar panel factory, which has a production capacity of 1 GWp, the national solar panel production capacity has now increased to 4.7 GWp.

Kerjasama dalam Inovasi Teknologi

Collaboration in Technological Innovation

Sepanjang tahun 2024, PLN Indonesia Power telah melakukan sejumlah kerjasama dengan berbagai kemitraan, meliputi:

- Pada tanggal 19 Februari 2024 telah dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PLN Indonesia Power, Badan Riset dan Inovasi (BRIN), dan PT Teknologi Alam Semesta tentang Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Produksi *Green Hydrogen Sintetik* dalam rangka mewujudkan program *Net Zero Emission* di Tahun 2060 di ruang Paiton Kantor Pusat PT PLN (Persero).

Throughout 2024, PLN Indonesia Power has established several partnerships, including:

- On February 19, 2024, a Memorandum of Understanding (MoU) was signed between PLN Indonesia Power, the National Research and Innovation Agency (BRIN), and PT Teknologi Alam Semesta regarding Research, Study, and Development of Synthetic Green Hydrogen Production as part of the effort to realize the Net Zero Emissions (NZE) program by 2060 in the Paiton Room at the Head Office of PT PLN (Persero).

- Pada tanggal 16 April 2024 telah dilaksanakan NDA antara PLN Indonesia Power dengan Mitsubitshi Heavy Industries, Jepang terkait Feasibility Study *Air Quality Control Systems Study* untuk PLTU Suralaya Unit 1-7.
- Pada tanggal 11 Juni 2024 telah dilaksanakan NDA antara PLN Indonesia Power dengan Sumitomo Heavy Industries terkait Study of *Air Quality Control System Technology* untuk PLTU Suralaya Unit 5-7.
- Pada tanggal 20 Agustus 2024 telah dilaksanakan penandatanganan MOU antara PLN Indonesia Power dengan IHI Corporation, Jepang dan PT Pupuk Kujang Cikampek dalam kerja sama studi green ammonia dan pelaksanaan demonstrasi *ammonia co-firing*.
- Pada tanggal 21 Agustus 2024 telah dilaksanakan penandatanganan MOU antara PLN Indonesia Power dengan Electric Power Development, Jepang terkait studi kelayakan konversi PLTU menjadi *gas turbine combine cycle*.
- Pada tanggal 28 Agustus 2024 telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PLN Indonesia Power dengan PT Bagito Emas Mandiri untuk pengembangan teknologi Langenburg di Indonesia berbasis *waste to energy*.
- Pada bulan Oktober 2024 telah dilaksanakan penandatanganan NDA antara PLN Indonesia Power dengan beberapa mitra dari Tiongkok, anatar lain: Shanghai Electric, Dongfang Electric Corporation dan GreenEco Environmental Global dalam kerja sama studi *flexible generation*, perbaikan efisiensi, dan emisi pembangkit Batubara.
- Pada tanggal 4 Desember 2024 telah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Kesepahaman antara PLN Indonesia Power dengan Bank Indonesia tentang Pemanfaatan Limbah Racik Uang Kertas (LRUK) untuk bahan bakar *co-firing* pada pembangkit.
- On April 16, 2024, a Non-Disclosure Agreement (NDA) was signed between PLN Indonesia Power and Mitsubishi Heavy Industries, Japan regarding the Feasibility Study of Air Quality Control Systems for SPP of Suralaya Units 1-7.
- On June 11, 2024, a Non-Disclosure Agreement (NDA) was signed between PLN Indonesia Power and Sumitomo Heavy Industries regarding the Study of Air Quality Control System Technology for SPP of Suralaya Units 5-7.
- On August 20, 2024, a Memorandum of Understanding (MoU) was signed between PLN Indonesia Power, IHI Corporation, Japan, and PT Pupuk Kujang Cikampek for a collaborative study on green ammonia and the implementation of the ammonia co-firing demonstration.
- On August 21, 2024, a Memorandum of Understanding (MoU) was signed between PLN Indonesia Power and Electric Power Development, Japan regarding the feasibility study for converting SPP into gas turbine combined cycle.
- On August 28, 2024, a Cooperation Agreement was signed between PLN Indonesia Power and PT Bagito Emas Mandiri for the development of Langenburg technology in Indonesia based on waste-to-energy.
- In October 2024, a Non-Disclosure Agreement (NDA) was signed between PLN Indonesia Power and several partners from China, including Shanghai Electric, Dongfang Electric Corporation, and GreenEco Environmental Global, for collaboration in flexible generation studies, efficiency improvement, and emission of coal-fired power plants.
- On December 4, 2024, a Minutes of Understanding was signed between PLN Indonesia Power and Bank Indonesia regarding the utilization of Shredded Banknote Waste (LRUK) as fuel for co-firing in power plants.

Aset Pembangkitan

Power Generation Assets

PN Indonesia Power bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik, sehingga aspek tata kelola dan pemeliharaan pembangkit menjadi hal yang sangat diperhatikan demi tercapainya keandalan pembangkit untuk memenuhi target produksi tenaga listrik yang telah ditetapkan.

Tahun 2024 PLN Indonesia Power (PLN IP) melakukan transformasi 2.0 untuk mendukung akselerasi menuju perusahaan berskala global, dengan mengoptimalkan beragam asetnya dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) yaitu melakukan transformasi *rebranding* tiga anak usaha PLN Indonesia Power serta bekerjasama sehingga menghadirkan pembangkit berteknologi hijau akan sangat besar.

PLN Indonesia Power operates in the field of electricity generation, making governance and power plant maintenance crucial aspects to ensure the reliability of its plants in meeting the predetermined electricity production targets.

In 2024, PLN Indonesia Power (PLN IP) launched its Transformation 2.0 initiative to accelerate its journey toward becoming a global-scale company. This transformation involves optimizing its diverse assets to advance the development of new and renewable energy (NRE), including the rebranding of three PLN Indonesia Power subsidiaries and fostering collaborations to deliver green technology-based power plants on a large scale.

Aset Pembangkitan

Generation Assets

Aset Pembangkit yang dimiliki oleh Indonesia Power meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Sampai dengan tahun 2024, PLN Indonesia Power memiliki pembangkit yang sudah beroperasi sebanyak 36 pembangkit.

The generation assets owned by Indonesia Power include Steam Power Plants (SPP), Gas Power Plants (GPP), Combined Cycle Power Plants (CCPP), Hydroelectric Power Plants (HPP), Diesel Power Plants (DPP), Geothermal Power Plants (GPP) and Solar Power Plants (SoPP). As of 2024, PLN Indonesia Power operates a total of 36 power plants.

Proyek Pengembangan Pembangkitan

Generation Development Project

Selain berfokus pada pengelolaan pembangkit, PLN Indonesia Power sampai dengan tahun 2024 melakukan pengembangan pembangkit berikut:

In addition to focusing on the management of power plants, as of 2024, PLN Indonesia Power has been developing the following power plants:

Progress Proyek Pembangkit Thermal

Progress of Thermal Power Plant Projects

No	Nama Proyek Project Name	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity	Tahap Proyek di tahun 2024 Project Stage in 2024
1.	PLTGU Jawa Bali 1 (Tambak Lorok Blok 3) Jawa Bali 1 CCPP (Tambak Lorok Block 3)	779	COD
2.	BMPP Kolaka I / Nusantara 1	60	COD
3.	BMPP Kolaka II / Nusantara 2	60	Comissioning

Sedangkan untuk pengembangan pembangkit EBT adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the development of renewable energy (NRE) power plants includes the following stages:

Progress Proyek Pembangkit EBT
Progress of NRE Power Plant Projects

No	Pengembangan Proyek Pembangkit Power Plant Project Development	Kapasitas (MW) Capacity (MW)	Tahap Proyek di tahun 2024 Project Stage in 2024
1.	PLTS Terapung Jatigede SoPP Terapung Jatigede	100	Proposal Tariff submitted, Evaluasi dan Klarifikasi di Proses Pemilihan Mitra, Perizinan, Lahan, Pendanaan (tersedia <i>facility agreement</i> dari 4 lender terpilih). Tariff proposals submitted, evaluation and clarification during the partner selection process, licensing, land acquisition, and financing (with facility agreements available from four selected lenders).
2.	PLTS Terapung Kedungombo SoPP Terapung Kedungombo	100	
3.	PLTS Terapung Gajahmungkur SoPP Terapung Gajahmungkur	100	
4.	PLTS Banyuwangi SoPP Banyuwangi	100	
5.	PLTS Pasuruan SoPP Pasuruan	100	
6.	PLTS Banjar SoPP Banjar	100	Permohonan Penugasan, pra seleksi mitra, proses perizinan, dan lahan. Assignment request, pre-selection of partners, licensing process, and land acquisition.
7.	PLTS Guluk-Guluk SoPP Guluk-Guluk	50	
8.	PLTS Buleleng SoPP Buleleng	50	
9.	PLTS Jawa Tengah 1 SoPP Central Java 1	90	
10.	PLTS Jawa Tengah 2 SoPP Central Java 2	50	
11.	PLTS Jawa Barat SoPP West Java	80	
12.	PLTS Banten SoPP Banten	80	
13.	PLTB Aceh WPP Aceh	55	

Pengembangan pembangkitan EBT salah satunya adalah komitmen PLN Indonesia Power dalam rangka menjaga mutu lingkungan.

The development of renewable energy (NRE) power generation is part of PLN Indonesia Power's commitment to maintaining environmental quality.

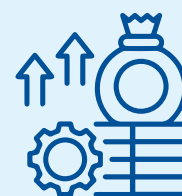
Penghargaan Bidang Keandalan Pembangkit
Awards in Power Plant Reliability

Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power memperoleh penghargaan dalam bidang keandalan pembangkit, secara rinci perolehan penghargaan telah diuraikan dalam bab Profil Perusahaan, sub bab Penghargaan dan Sertifikasi pada Laporan Tahunan ini.

In 2024, PLN Indonesia Power received several awards in the field of power plant reliability, the explanation regarding the award acquisition has been described in the Company Profile chapter, Awards and Certification sub-chapter in this Annual Report.



PLTP Lahendong Unit 1 & 2, Minahasa, Sulawesi Utara
Lahendong GPP Unit 1 & 2, Minahasa, North Sulawesi



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Tinjauan Industri

Industry Overview

Analisis Perekonomian Global

Global Economic Analysis

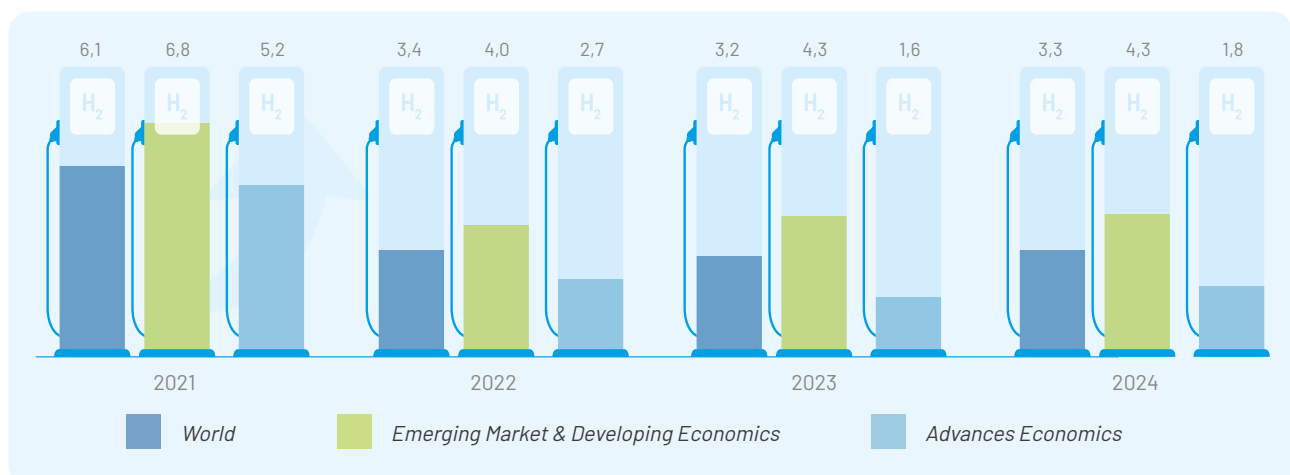
Menurut laporan *World Economic Outlook* (WEO) edisi April 2025 yang dirilis oleh *International Monetary Fund* (IMF), pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,3%, sedikit di bawah rata-rata historis sebesar 3,7% pada periode 2000 hingga 2019. Proyeksi untuk tahun 2025 bahkan lebih rendah, diperkirakan hanya akan mencapai 2,4%, mencerminkan tantangan struktural yang semakin kompleks. Beberapa faktor utama yang memengaruhi perlambatan ini termasuk kebijakan tarif yang meningkat, ketidakpastian kebijakan perdagangan, serta ketegangan geopolitik yang mendorong proteksionisme. Selain itu, risiko keuangan yang meningkat, terutama di negara berkembang, juga memperburuk prospek pertumbuhan global, dengan lembaga keuangan yang sangat berleverage semakin rentan terhadap guncangan eksternal.

Dampak dari perlambatan ekonomi global ini sangat dirasakan di negara-negara berkembang, termasuk di Asia. Negara seperti China, yang sebelumnya menjadi pendorong utama pertumbuhan, diperkirakan hanya akan tumbuh 3,2% pada tahun 2025.

According to the April 2025 edition of the *World Economic Outlook* (WEO) report released by the *International Monetary Fund* (IMF), global economic growth in 2024 was recorded at 3.3%, slightly below the 3.7% historical average for the period 2000–2019. The projection for 2025 is even lower, an estimated 2.4%, reflecting increasingly complex structural challenges. Key factors driving this slowdown include rising tariff policies, trade-policy uncertainty, and geopolitical tensions that have fueled protectionism. Moreover, elevated financial risks, especially in emerging markets, have worsened the global growth outlook, as highly leveraged financial institutions become more vulnerable to external shocks.

The effects of this global downturn are being acutely felt in developing economies, including those in Asia. Countries such as China, which had previously been a primary growth engine, are now projected to expand by only 3.2% in 2025.

Tren Pertumbuhan Ekonomi Global (%)
Trend of Global Economic Growth (%)



Sumber: *World Economic Outlook* (WEO), *International Monetary Fund* (IMF) edisi April 2025

Source: *World Economic Outlook* (WEO), *International Monetary Fund* (IMF), April 2025 Edition

* Disajikan kembali As restated

Analisis Perekonomian Indonesia Indonesia Economic Analysis

Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, meskipun mengalami sedikit pelambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kinerja ekonomi Indonesia tercatat positif, dengan pertumbuhan yang masih mencerminkan ketahanan ekonomi dalam menghadapi tantangan global. Berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku, perekonomian Indonesia pada 2024 mencapai Rp22.139,0 triliun, sementara PDB per kapita mencapai Rp78,6 juta atau sekitar USD4.960,3.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 5,03%, mengalami penurunan tipis dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar 5,05% (c-to-c). Dari sisi produksi, sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Lapangan Usaha Jasa Lainnya, dengan angka pertumbuhan mencapai 9,80%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi adalah Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), dengan angka pertumbuhan sebesar 12,48%.

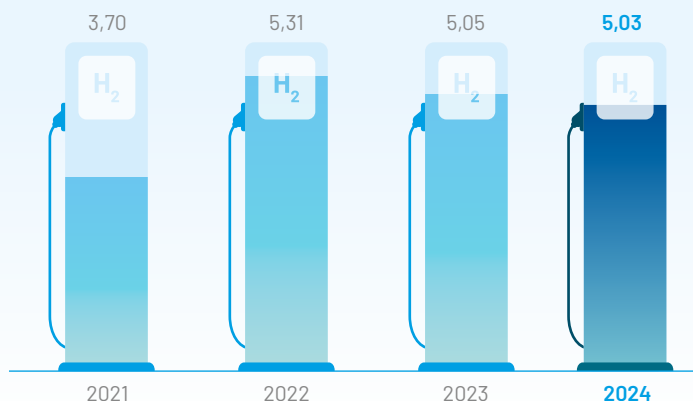
In 2024, Indonesia's economy demonstrated notable dynamics, although it experienced a slight slowdown compared to the previous year. Overall, Indonesia's economic performance remained positive, reflecting the country's resilience in the face of global challenges. Based on Gross Domestic Product (GDP) data at current prices, Indonesia's economy reached Rp22,139.0 trillion in 2024, while GDP per capita stood at Rp78.6 million, or approximately USD 4,960.3.

Indonesia's economic growth in 2024 was recorded at 5.03%, showing a slight decline compared to 5.05% in 2023 (c-to-c). On the production side, the highest growth was seen in the Other Services Activities sector, which grew by 9.80%. Meanwhile, on the expenditure side, the component with the highest growth was Consumption Expenditure of Household-Serving Non-profit Institutions (LNPRT), which grew by 12.48%.

Tren Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)

Trend of Indonesia
Economic Growth (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS),
Berita Resmi Statistik
Source: Statistics Indonesia (BPS),
Official Statistical News



Per Desember 2024 inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 1,57%. Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,36% dan inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 5,36%.

As of December 2024, year-on-year (y-on-y) inflation stood at 1.57%. The highest y-on-y provincial inflation was recorded in Papua Pegunungan Province at 5.36%, while the highest y-on-y inflation at the district/city level occurred in Jayawijaya Regency, also at 5.36%.

Perkembangan Inflasi Indonesia Tahun 2024 (dalam %)

Trend of Indonesian Inflation in 2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik

Source: Statistics Indonesia (BPS), Official Statistical News

Kondisi Industri Pembangkit Tenaga Listrik Indonesia

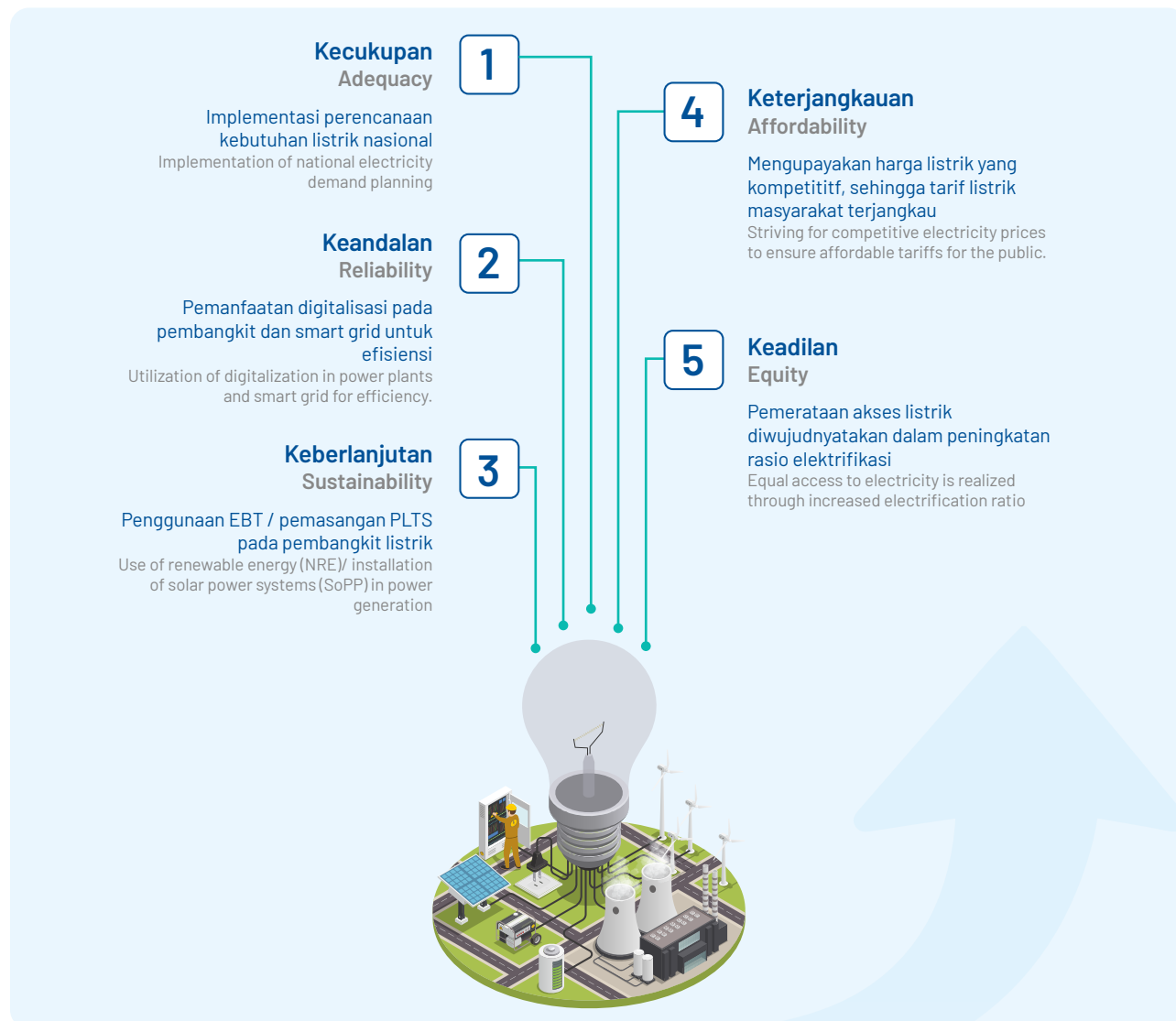
Condition of Indonesia's Electric Power Generation Industry

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, arah kebijakan pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpedoman pada paradigma bahwa sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Untuk periode 2020-2024 kebijakan sektor ESDM difokuskan pada pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri. Adapun arah kebijakan diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan.

Based on Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 9 of 2023, which amends Regulation No. 16 of 2020 on the Strategic Plan of the Ministry of Energy and Mineral Resources, the policy direction for the development of energy and mineral resources (EMR) is guided by the paradigm that energy resources should not merely be treated as export commodities, but rather as capital for national development aimed at achieving energy security and independence. For the 2020-2024 period, policies in the energy and mineral resources (EMR) sector have been focused on the development of sustainable and equitable energy to support economic growth and drive industrial development. The policy direction is prioritized toward ensuring energy availability by maximizing the use of renewable energy sources, promoting social equity in the energy sector, emphasizing the availability of affordable renewable energy, and encouraging environmentally friendly extractive activities.



5K Ketenagalistrikan 5 K of the Electricity Sector



Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024

Source: 2024 Performance Report of the Directorate General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources

Sampai dengan tahun 2024, total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional mencapai sekitar 101 GW yang terdiri atas pembangkit tenaga listrik di wilayah usaha PT PLN (Persero) sekitar 75% dari total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional, *Private Power Utility* (PPU) sekitar 4,7% dari total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional, pemegang IUPTLS sekitar 20,3% dari total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional.

As of 2024, the total installed capacity of national power plants reached approximately 101 GW, consisting of power plants in the business area of PT PLN (Persero) at around 75% of the total installed capacity of national power plants, Private Power Utility (PPU) at around 4.7% of the total installed capacity of national power plants, and IUPTLS holders at around 20.3% of the total installed capacity of national power plants.

Pembangkit tenaga listrik di wilayah usaha PT PLN (Persero) sebagian besar adalah milik PT PLN (Persero) sekitar 46% dari total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional dan milik *Independent Power Producer* (IPP) sekitar 28% dari total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional. Pembangkit tenaga listrik di wilayah usaha selain PT PLN (Persero) sebagian besar dimiliki oleh PPU sekitar 4% (empat persen) dari total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional.

Power plants in the business area of PT PLN (Persero) are mostly owned by PT PLN (Persero) at around 46% of the total installed capacity of national power plants and by Independent Power Producers (IPP) at around 28% of the total installed capacity of national power plants. Power plants in business areas other than PT PLN (Persero) are mostly owned by PPU at around 4% (four percent) of the total installed capacity of national power plants.

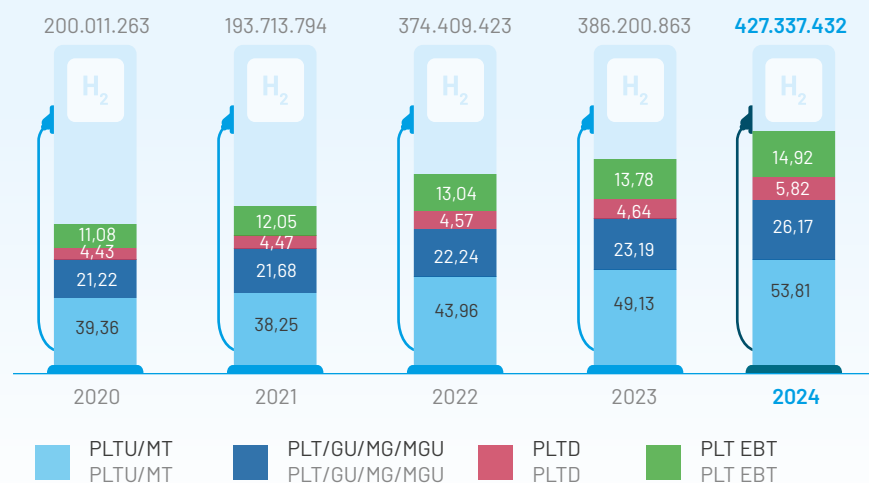
Saat ini Pemerintah memprioritaskan untuk mengembangkan pembangkit energi baru dan energi terbarukan sebagai bentuk pemenuhan komitmen Pemerintah terhadap penurunan target emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Selama 5 (lima) tahun terakhir, total kapasitas terpasang pembangkit energi baru dan energi terbarukan mengalami peningkatan rata-rata sekitar 7,1% setiap tahunnya. Pertumbuhan kapasitas terpasang pembangkit energi baru dan energi terbarukan terendah terjadi pada tahun 2020 sekitar 4,5% dan tertinggi pada tahun 2021 sekitar 8,7%. Pertumbuhan kapasitas terpasang pembangkit energi baru dan energi terbarukan pada tahun 2024 yaitu sekitar 8,3%.

Currently, the Government is prioritizing the development of new and renewable energy power plants as part of its commitment to reducing greenhouse gas (GHG) emission targets. Over the past 5 (five) years, the total installed capacity of new and renewable energy power plants has increased by an average of approximately 7.1% annually. The lowest growth in installed capacity occurred in 2020 at around 4.5%, while the highest was in 2021 at approximately 8.7%. In 2024, the growth of installed capacity for new and renewable energy power plants reached around 8.3%.

Grafik Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Nasional per Jenis (GW)

Chart of Installed Capacity Development of National Power Plants by Type (GW)

Sumber: Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025
Source: National Electricity General Plan (RUKN), Ministry of Energy and Mineral Resources, 2025





Kontribusi PLN Indonesia Power terhadap Industri Ketenagalistrikan Nasional

PLN Indonesia Power's Contribution to National Power Industry

PLN Indonesia Power memberikan kontribusi signifikan dalam industri kelistrikan nasional, khususnya dalam penyediaan tenaga listrik, layanan operasi dan pemeliharaan (*Operation & Maintenance/O&M*), serta solusi energi lainnya yang berkaitan dengan ketenagalistrikan. Sebagai salah satu perusahaan pengelola berbagai jenis pembangkit listrik di Indonesia, pengalaman yang diperoleh selama ini menjadi keunggulan utama untuk meraih berbagai peluang. Keunggulan tersebut perlu dikelola dengan baik, serta diikuti dengan pengembangan strategi yang tepat guna menghadapi dinamika industri.

PLN Indonesia Power makes a significant contribution to the national electricity industry, particularly in electricity supply, operation, and maintenance (O&M) services, as well as other energy solutions related to power generation. As one of the companies managing various types of power plants in Indonesia, the experience gained over the years has become a key advantage in seizing various opportunities. This advantage must be well-managed and supported by the development of appropriate strategies to navigate the dynamics of the industry.

Kontribusi Pasokan Tenaga Listrik

Electricity Supply Contribution

Realisasi produksi listrik mencapai 87.210,96 GWh, meningkat 3,57% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 84.205,29 GWh. Jumlah produksi tersebut memberikan kontribusi sebesar 26,27% pada wilayah Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Electricity production reached 87,210.96 GWh, an increase of 3.57% compared to 2023, which recorded 84,205.29 GWh. This production contributed 26.27% to the regions of Java-Bali, Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi.

Jumlah penjualan listrik juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,60%, dari 79.670,26 GWh pada tahun 2023 menjadi 82.535,52 GWh di tahun 2024.

Electricity sales also experienced growth of 3.60%, rising from 79,670.26 GWh in 2023 to 82,535.52 GWh in 2024.

Kontribusi Percepatan Bauran Energi Baru Terbarukan

Contribution to New and Renewable Energy Mix Acceleration

Sampai dengan akhir tahun 2024 PLN Indonesia Power telah mengembangkan berbagai jenis pembangkit EBT, meliputi PLTA, PLTM, PLTS, PLTB dan PLTP, yang secara nyata memberikan dampak positif dari sisi keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan sosial. Atasterlaksananya berbagai program pengembangan EBT, pada tahun 2024 PLN Indonesia Power berhasil meningkatkan produksi EBT dalam bauran energi Perusahaan sebesar 11.176,68 GWh, yang menunjukkan peningkatan sebesar 9,84% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 10.175,63 GWh. Dengan demikian, realisasi produksi EBT Perusahaan mencapai 12,82% dari total produksi energi, mencerminkan komitmen dan keberhasilan PLN Indonesia Power dalam mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target bauran energi nasional.

At the end of 2024, PLN Indonesia Power had developed various types of renewable energy (RE) power plants, including HPP, MHPP, SoPP, WPP, and GPP plants, which have made a tangible positive impact on economic, environmental, and social sustainability. Through the implementation of various renewable energy development programs, in 2024 PLN Indonesia Power successfully increased its renewable energy production to 11,176.68 GWh, marking a 9.84% rise compared to 10,175.63 GWh in 2023. As a result, the Company's renewable energy production accounted for 12.82% of its total energy output, reflecting PLN Indonesia Power's strong commitment and success in accelerating the transition to clean and sustainable energy, while supporting the achievement of the national energy mix target.

Kontribusi Dividen kepada Pemegang Saham

Dividend Contribution to the Shareholders

Salah satu wujud kontribusi PLN Indonesia Power kepada Pemegang Saham adalah melalui pembayaran dividen. Pada tahun 2024, Perusahaan telah membayarkan dividen sebesar Rp7,94 triliun atas laba tahun buku 2023.

One form of PLN Indonesia Power's contribution to its Shareholders is through dividend payments. In 2024, the Company paid dividends amounting to Rp7.94 trillion from the profit of the 2023 fiscal year.

Kontribusi Pajak kepada Negara

Tax Contribution to the Country

Setoran pajak PLN Indonesia Power pada tahun 2024 sebesar Rp4,92 triliun, yaitu meningkat 16,87% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4,21 triliun.

PLN Indonesia Power's tax contribution in 2024 reached Rp4.92 trillion, an increase of 16.87% compared to Rp4.21 trillion in 2023.

Kontribusi dalam Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik

Contribution in Power Plant Operation and Maintenance Services

PLN Indonesia Power juga terlibat dalam operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) yaitu memastikan bahwa sistem pembangkit listrik berjalan dengan efisien dan dapat diandalkan. Pada tahun 2024, jasa O&M diberikan pada UBP Jeranjang, UBP Holtekamp, dan UBP Jatigede.

PLN Indonesia Power is also involved in the operation and maintenance of power plants owned by PT PLN (Persero), ensuring that the power generation systems operate efficiently and reliably. In 2024, O&M services were provided at GBU Jeranjang, GBU Holtekamp, and GBU Jatigede.



Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar

Marketing Aspect and Market Share

Hasil produksi tenaga listrik Indonesia Power dijual kepada induk Perusahaan yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai *single buyer*. Mekanisme penjualan tenaga listrik melalui Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) periode 10 (sepuluh) tahunan. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Sehingga aspek pemasaran PLN Indonesia Power ditujukan untuk mengelola dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan kepuasan pelanggan.

The electricity produced by PLN Indonesia Power is sold to the holding company, PT PLN (Persero) as the single buyer. This sale of electricity practice is regulated in the 10-year period Power Purchase Agreement (PPA). Under this commitment, PLN pays for the electricity supplied by the Company in the amount determined based on the payment formula. That way, PLN Indonesia Power can focus its marketing aspect on managing and improving shareholder trust and customer satisfaction.

Pangsa Pasar

Market Share

Tenaga listrik wilayah Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dipasok oleh beberapa perusahaan yaitu PLN Indonesia Power, PLN Nusantara Power, PLN Tanjung Jati B (PLN TJB), pembangkit listrik swasta (*Independent Power Producer/IPP*) dan pembangkit milik PLN baik yang dikelola oleh Unit Induk Distribusi (UID), Unit Induk Wilayah (UIW), Unit Induk Pembangkitan (UIK) di masing-masing regional dan *project*.

Electricity supply in Java-Bali, Sumatera, Kalimantan, and Sulawesi regions is provided by several companies, namely PLN Indonesia Power, PLN Nusantara Power, PLN Tanjung Jati B (PLN TJB), independent power producers (IPPs), and power plants owned by PLN, which are managed by the Main Distribution Unit (UID), Regional Main Units (UIW), and Main Generation Units (UIK) in each respective region and project.

PLN Indonesia Power memberikan kontribusi tenaga listrik sebesar 26,27% atau 81.350,85 GWh.

PLN Indonesia Power contributes 26.27% of the electricity supply, amounting to 81,350.85 GWh.

Tabel Pangsa Pasar Tenaga Listrik

Table of Electricity Market Share

Perusahaan Company	2021		2022		2023		2024	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
PLN Indonesia Power	37,426	18,99	35,751	17,11	78.631,61	26,95	81.350,85	26,27
PLN Nusantara Power	19,779	10,04	16,256	7,78	62.139,05	21,30	62.264,76	20,10
UB Tanjung Jati B	18,884	9,58	19,268	9,22	17.975,76	6,16	18.371,51	5,93
IPP	67,568	34,39	80,781	38,66	127.630,83	43,74	140.190,73	45,26
Unit O&M dikelola PLN Indonesia Power	28,709	14,57	30,351	14,53	-	-	-	-
O&M Units managed by PLN Indonesia Power								

Perusahaan Company	2021		2022		2023		2024	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
Unit O&M dikelola PLN Nusantara Power	24,529	12,45	26,259	12,57	-	-	-	-
O&M Units managed by PLN Nusantara Power								
Proyek Projects	145	0,07	261	0,13	554,52	0,19	938,30	0,30
KIT PLN	-	-	-	-	4.839,97	1,66	6.610,14	2,13
Total	197,039	100,00	208,929	100,00	291.771,74	100,00	309.726,28	100,00

* Untuk pangsa pasar tahun 2021 dan 2022 adalah pangsa pasar di sistem Jawa - Bali. Untuk tahun 2023 dan 2024 adalah pangsa pasar di sistem Jawa - Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

* The market share for 2021 and 2022 reflects the market share within the Java-Bali system. Meanwhile, the market share for 2023 and 2024 covers the Java-Bali, Sumatera, Kalimantan, and Sulawesi systems.

Strategi Pemasaran Marketing Strategies

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar, pada tahun 2024 PLN Indonesia Power melakukan beberapa strategi berikut:

1. Seluruh pembangkit menjalankan program perang EFOR untuk meningkatkan keandalan;
2. Optimalisasi pengoperasian PLTGU dengan pola operasi yang lebih efisien;
3. Menjaga pola operasi PLTA Saguling dengan mengoptimalkan Tinggi Muka Air (TMA) dan ketersediaan air;
4. Renegosiasi harga uap PLTP untuk meningkatkan CF PLTP Kamojang;
5. Pemantauan dan pengendalian efisiensi dan *reliability* pembangkit secara *real time*;
6. Menjaga keandalan dan pasokan unit pembangkit di sistem *isolated* melalui relokasi unit pembangkit;
7. Melakukan pengujian *heat rate* ulang di beberapa pembangkit PLTU untuk meningkatkan *dispatch* dan menjaga *merit order* PLTU Batubara agar tetap kompetitif;
8. Melaksanakan program Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai upaya meningkatkan ketersediaan air di Saguling;
9. Pembangunan dan pengoperasian PLTGU Tambak Lorok Blok 3 yang memiliki efisiensi tinggi; dan
10. Percepatan durasi pemeliharaan dengan tetap menjaga kualitas.

As part of its efforts to maintain and increase market share, in 2024 PLN Indonesia Power implemented the following strategies:

1. Implementing the EFOR reduction program across all power plants to improve reliability;
2. Optimizing the operation of CCPP with more efficient operational patterns;
3. Maintaining the operation pattern of HPP Saguling by optimizing water level (TMA) and water availability;
4. Renegotiating steam prices for GPP to improve the capacity factor (CF) of Kamojang GPP;
5. Monitoring and controlling power plant efficiency and reliability in real time;
6. Ensuring reliability and supply of generation units in isolated systems through unit relocation;
7. Re-testing heat rate at several SPP to improve dispatch performance and maintain the merit order of coal fired SPP units to stay competitive;
8. Implementing Weather Modification Technology (TMC) programs to increase water availability at Saguling;
9. Constructing and operating the highly efficient Tambak Lorok Block 3 CCPP;; and
10. Accelerating maintenance duration while maintaining quality standards.

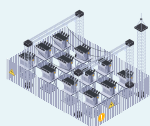


Tinjauan Kinerja Operasi Per Segmen

Operational Performance Overview by Segment

Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini oleh PLN Indonesia Power adalah:

PLN Indonesia Power currently executes the following business activities:



Pembangkitan Tenaga Listrik

Electricity Power Generation



Beyond kWh

- *Jasa Operation & Maintenance (O&M) Services*
- *Enterprise Asset Management & Digitalization Setup*
- *Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)*
- *Solar PV Solution*
- *Learning Centre*
- *Primary Energy & Port Management*
- dll
- Operations and Maintenance (O&M) Services
- Enterprise Asset Management & Digitalization Setup
- Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)
- Solar PV Solution
- Learning Centre
- Primary Energy & Port Management
- etc

Terkait kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, PLN Indonesia Power dapat memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan maupun dilakukan oleh Perusahaan Patungan.

In relation to supporting business activities that optimize the utilization of existing resources, PLN Indonesia Power may assign to Subsidiaries or Joint Ventures.

Kinerja Pembangkitan PLN Indonesia Power

Power Generation Performance of PLN Indonesia Power

Daya Terpasang Pembangkit (DTP)

Power Plant Installed Capacity

Daya Terpasang Pembangkit (DTP) merupakan kapasitas atau daya yang tertera sesuai dengan setiap jenis pembangkit. DTP pembangkit milik PLN Indonesia Power pada tahun 2024 adalah sebesar 20.843,51 MW, yaitu mengalami peningkatan 4,59% dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh adanya penambahan pada unit Semarang, Bali, Kepulauan Riau, dan Mahakam.

Power Plant Installed Capacity (DTP) refers to the rated capacity or power output of each type of power plant. The DTP of PLN Indonesia Power's generating units in 2024 reached 20,843.51 MW, reflecting an increase of 4.59% compared to 2023. This increase was mainly supported by additional capacity in the Semarang, Bali, Riau Islands, and Mahakam units.

Tabel Daya Terpasang Unit Pembangkitan

Table of Power Plant Installed Capacity

(dalam MW, kecuali dinyatakan lain)(in MW, unless otherwise stated)

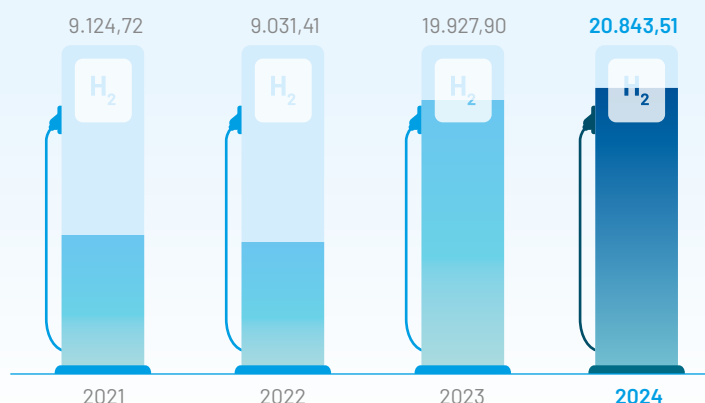
Unit Pembangkit Generation Unit	2021	2022	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024
UBP Suralaya GBU Suralaya	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	-
UBP Priok GBU Priok	1.285,30	1.285,30	2.947,00	2.947,00	-
UBP Saguling GBU Saguling	797,36	797,36	797,36	798,36	0,13%
UBP Kamojang GBU Kamojang	377,00	377,00	567,00	577,00	1,76%
UBP Mrica GBU Mrica	325,25	333,79	333,79	333,79	-
UBP Semarang GBU Semarang	1.238,30	1.238,30	1.238,30	2.084,05	68,30%
UBP Grati GBU Grati	959,08	757,58	1.258,58	1.258,58	-
UBP Bali GBU Bali	742,43	842,08	960,11	968,68	0,89%
UBP Banten 1 Suralaya GBU Banten 1 Suralaya	-	-	625,00	625,00	-
UBP Banten 2 Labuan GBU Banten 2 Labuan	-	-	600,00	600,00	-
UBP Banten 3 Lontar GBU Banten 3 Lontar	-	-	945,00	854,10	(11,04)%
UBP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu GBU Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	-	-	1.050,00	1.050,00	-
UBP Jawa Tengah 2 Adipala GBU Jawa Tengah 2 Adipala	-	-	660,00	660,00	-
UBP Pangkalan Susu GBU Pangkalan Susu	-	-	880,00	880,00	-
UBP Labuhan Angin GBU Labuhan Angin	-	-	230,00	230,00	-
UBP Ombilin GBU Ombilin	-	-	221,00	221,00	-
UBP Teluk Sirih GBU Teluk Sirih	-	-	245,00	245,00	-
UBP Kepulauan Riau GBU Kepulauan Riau	-	-	32,18	36,38	13,05%
UBP Sanggau GBU Sanggau	-	-	14,00	14,00	-
UBP Sintang GBU Sintang	-	-	21,00	21,00	-
UBP Berau GBU Berau	-	-	19,00	19,00	-
UBP Singkawang GBU Singkawang	-	-	100,00	100,00	-
UBP Asam-Asam GBU Asam-Asam	-	-	260,00	506,00	94,62%
UBP Barru GBU Barru	-	-	100,00	223,00	123,00%
UBP Cilegon GBU Cilegon	-	-	740,00	740,00	-
UBP Keramasan GBU Keramasan	-	-	332,01	332,01	-
UBP Jambi GBU Jambi	-	-	157,03	157,03	-
UBP Bukittinggi GBU Bukittinggi	-	-	253,50	253,50	-
UBP Bengkulu GBU Bengkulu	-	-	236,32	236,32	-
UBP Mahakam GBU Mahakam	-	-	407,05	470,62	15,62%
UBP Barito GBU Barito	-	-	167,10	153,02	(8,43)%
UBP Tello GBU Tello	-	-	130,57	130,57	-
Jumlah Total	9.124,72	9.031,41	19.927,90	20.843,51	4,59%

* DTP Pembangkit Pengalihan Aset mulai dicatatkan pada tahun 2023 sejak menjadi UB P PLN Indonesia Power

* The Installed Capacity of Asset Transfer Plants has been recorded starting in 2023, following their transition into PLN Indonesia Power's Generation Business Units (UBP).

Grafik Daya Terpasang Unit Pembangkit (MW)

Graph of Power Plant
Installed Capacity (MW)



Produksi Tenaga Listrik Electricity Production

Sepanjang tahun 2024, PLN Indonesia Power mencatatkan kinerja positif dalam produksi dan penjualan tenaga listrik. Realisasi produksi listrik mencapai 87.210,96 GWh, meningkat 3,57% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 84.205,29 GWh. Peningkatan ini didorong oleh sejumlah faktor utama, yaitu sebagai berikut:

- Peningkatan produksi listrik dari UBP Banten 1 Suralaya;
- Peningkatan produksi Unit Bali dikarenakan peningkatan beban puncak Sub Sistem Bali tahun 2024;
- Pengoperasian PLTGU Tambak Lorok Blok 3 yang COD bulan;
- Peningkatan pasokan gas Grati;
- Peningkatan produksi PLTA.

Throughout 2024, PLN Indonesia Power recorded positive performance in electricity generation and sales. The actual electricity production reached 87,210.96 GWh, representing an increase of 3.57% compared to 84,205.29 GWh in 2023. This growth was driven by several key factors:

- Increased power generation from GBP Banten 1 Suralaya;
- Higher production from the Bali Unit due to a rise in peak load in the Bali Sub-System in 2024;
- Operation commencement of Tambak Lorok Block 3 CCPP, which achieved COD (Commercial Operation Date);
- Improved gas supply in Grati;
- Increased production from HPP.

Tabel Produksi Tenaga Listrik Berdasarkan Jenis Pembangkit

Table of Electricity Production by Type of Power Plant

(dalam GWh, kecuali dinyatakan lain) (in GWh, unless otherwise stated)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2021	2022	2023 *)	2024	Peningkatan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024
PLTU Batubara Coal SPP	24.058,36	23.351,60	54.487,01	54.798,70	0,57%
Non PLTU Batubara Non-Coal SPP	15.172,45	14.158,54	29.718,28	32.412,26	9,07%
Jumlah Total	39.230,81	37.510,12	84.205,29	87.210,96	3,57%

* Disajikan kembali karena pengoperasian PLHS Nusa Penida dan PLTS Muara Nusa Dua

* Restated due to the operation of SHPP Nusa Penida and SoPP Muara Nusa Dua.

Tabel Produksi Tenaga Listrik Berdasarkan Unit Pembangkit

Table of Electricity Production by Generation Unit

(dalam GWh, kecuali dinyatakan lain) (in GWh, unless otherwise stated)

Unit Pembangkit Generation Unit	2021	2022	2023 *)	2024	Peningkatan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024
UBP Suralaya GBU Suralaya	24.058,36	23.351,60	21.022,36	19.421,37	(7,62)%
UBP Priok GBU Priok	3.353,18	1.774,55	9.420,97	9.619,47	2,11%
UBP Saguling GBU Saguling	2.638,78	3.361,33	2.248,57	2.641,34	17,47%
UBP Kamojang GBU Kamojang	2.888,51	2.735,63	4.252,36	4.176,18	(1,79)%
UBP Mrica GBU Mrica	1.016,17	1.203,12	829,10	1.014,32	22,34%
UBP Semarang GBU Semarang	2.240,14	2.202,68	3.248,92	3.871,82	19,17%
UBP Grati GBU Grati	2.045,07	1.685,25	1.770,33	2.251,74	27,19%
UBP Bali GBU Bali	990,60	1.195,98	2.071,97	3.236,06	56,18%
UBP Banten 1 Suralaya GBU Banten 1 Suralaya	-	-	2.458,44	3.775,16	53,56%
UBP Banten 2 Labuan GBU Banten 2 Labuan	-	-	4.010,51	4.366,84	8,88%
UBP Banten 3 Lontar GBU Banten 3 Lontar	-	-	6.426,40	6.473,41	0,73%
UBP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu GBU Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	-	-	6.987,06	6.709,47	(3,97)%
UBP Jawa Tengah 2 Adipala GBU Jawa Tengah 2 Adipala	-	-	3.073,49	3.375,97	9,84%
UBP Pangkalan Susu GBU Pangkalan Susu	-	-	4.539,71	4.141,66	(8,77)%
UBP Labuhan Angin GBU Labuhan Angin	-	-	634,26	999,20	57,54%
UBP Ombilin GBU Ombilin	-	-	568,98	1.056,52	84,85%
UBP Teluk Sirih GBU Teluk Sirih	-	-	1.233,42	1.121,56	(9,46)%
UBP Kepulauan Riau GBU Kepulauan Riau	-	-	78,65	85,14	7,58%
UBP Sanggau GBU Sanggau	-	-	97,34	96,92	(0,43)%
UBP Sintang GBU Sintang	-	-	150,87	152,21	0,89%
UBP Berau GBU Berau	-	-	73,45	85,16	15,94%
UBP Singkawang GBU Singkawang	-	-	621,14	576,86	(7,13)%
UBP Asam-Asam GBU Asam-Asam	-	-	1.859,37	1.704,11	(8,35)%
UBP Barru GBU Barru	-	-	672,40	667,22	(0,77)%
UBP Cilegon GBU Cilegon	-	-	1.173,08	930,52	(20,68)%
UBP Keramasan GBU Keramasan	-	-	1.127,10	990,37	(12,13)%
UBP Jambi GBU Jambi	-	-	531,21	328,37	(38,18)%
UBP Bukittinggi GBU Bukittinggi	-	-	1.232,11	1.360,19	10,40%
UBP Bengkulu GBU Bengkulu	-	-	875,14	832,32	(4,89)%
UBP Mahakam GBU Mahakam	-	-	555,80	857,26	54,24%
UBP Barito GBU Barito	-	-	181,92	207,51	14,07%
UBP Tello GBU Tello	-	-	178,86	84,71	(52,64)%
Jumlah Total	39.230,81	37.510,12	84.205,29	87.210,96	3,57%

* Disajikan kembali karena pengoperasian PLHS Nusa Penida dan PLTS Muara Nusa Dua

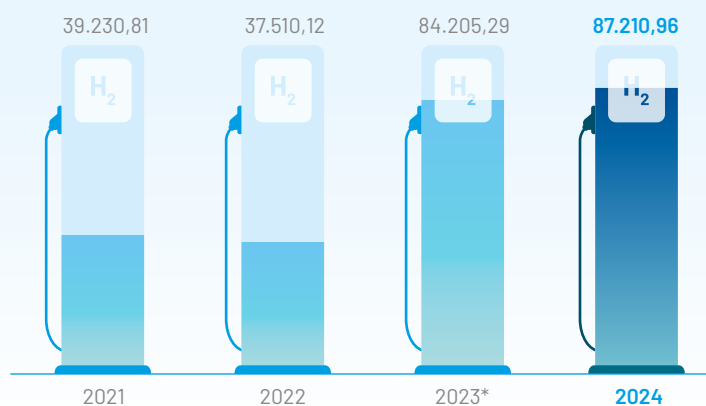
* Restated due to the operation of SHPP Nusa Penida and SoPP Muara Nusa Dua.



Grafik Produksi Tenaga Listrik (GWh)

Graph of Electric Power
Production (GWh)

* Disajikan kembali karena pengoperasian PLHS
Nusa Penida dan PLTS Muara Nusa Dua
Restated due to the operation of SHPP Nusa
Penida and SoPP Muara Nusa Dua.



Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity

Jumlah penjualan listrik juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,60%, dari 79.670,26 GWh pada tahun 2023 menjadi 82.535,52 GWh di tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh sejumlah faktor utama, yaitu sebagai berikut:

- Peningkatan produksi listrik dari UBP Banten 1 Suralaya;
- Peningkatan produksi Unit Bali dikarenakan peningkatan beban puncak Sub Sistem Bali tahun 2024;
- Pengoperasian PLTGU Tambak Lorok Blok 3 yang COD bulan;
- Peningkatan pasokan gas Grati;
- Peningkatan produksi PLTA.
- Increased electricity production from GBP Banten 1 Suralaya;
- Higher output from the Bali Unit due to increased peak load in the Bali Sub-System in 2024;
- Commercial operation (COD) of Tambak Lorok Block 3 CCPP;
- Increased gas supply at Grati;
- Increased HPP production.

Electricity sales also experienced growth of 3.60%, increasing from 79,670.26 GWh in 2023 to 82,535.52 GWh in 2024. This increase was driven by several key factors, including:

Tabel Penjualan Tenaga Listrik Berdasarkan Jenis Pembangkit

Table of Electricity Sales by Power Plant Type

(dalam GWh, kecuali dinyatakan lain) (in GWh, unless otherwise stated)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2021	2022	2023 *)	2024	Peningkatan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024
PLTU Batubara Coal SPP	22.752,99	22.067,66	50.780,10	50.932,90	0,30%
Non PLTU Batubara Non Coal SPP	14.837,11	13.867,68	28.890,16	31.602,62	9,39%
Jumlah Total	37.590,11	35.935,34	79.670,26	82.535,52	3,60%

* Disajikan kembali karena pengoperasian PLHS Nusa Penida dan PLTS Muara Nusa Dua

* Restated due to the operation of SHPP Nusa Penida and SoPP Muara Nusa Dua.

Tabel Penjualan Tenaga Listrik Berdasarkan Unit Pembangkit

Table of Electricity Sales by Power Plant Type

(dalam GWh, kecuali dinyatakan lain)(in GWh, unless otherwise stated)

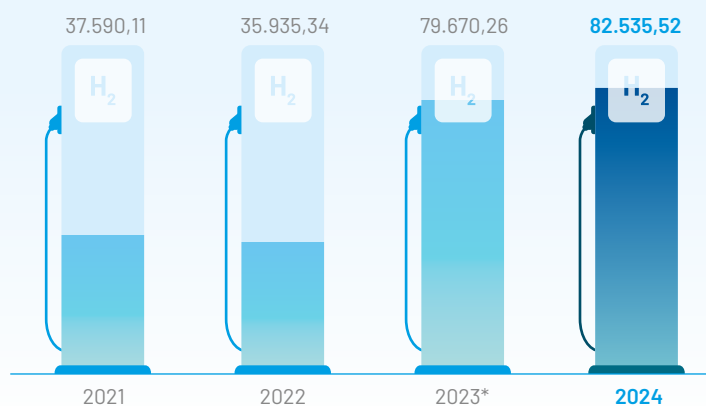
Unit Pembangkit Generation Unit	2021	2022	2023 *)	2024	Peningkatan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024
UBP Suralaya GBU Suralaya	22.752,99	22.067,66	19.827,47	18.217,54	(8,12)%
UBP Priok GBU Priok	2.633,31	3.355,20	9.098,81	9.300,47	2,22%
UBP Saguling GBU Saguling	2.743,96	2.592,15	2.243,58	2.636,17	17,50%
UBP Kamojang GBU Kamojang	1.003,49	1.188,24	4.021,39	3.950,05	(1,77)%
UBP Mrica GBU Mrica	2.176,59	2.143,89	818,35	1.000,93	22,31%
UBP Semarang GBU Semarang	2.007,00	1.670,99	3.188,45	3.833,68	20,24%
UBP Grati GBU Grati	973,12	1.176,53	1.736,32	2.208,03	27,17%
UBP Bali GBU Bali	3.299,64	1.740,68	2.041,43	3.203,67	56,93%
UBP Banten 1 Suralaya GBU Banten 1 Suralaya	-	-	2.284,26	3.539,58	54,96%
UBP Banten 2 Labuan GBU Banten 2 Labuan	-	-	3.763,64	4.103,78	9,04%
UBP Banten 3 Lontar GBU Banten 3 Lontar	-	-	6.019,82	6.074,56	0,91%
UBP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu GBU Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	-	-	6.603,83	6.304,67	(4,53)%
UBP Jawa Tengah 2 Adipala GBU Jawa Tengah 2 Adipala	-	-	2.904,72	3.192,22	9,90%
UBP Pangkalan Susu GBU Pangkalan Susu	-	-	4.111,65	3.722,71	(9,46)%
UBP Labuhan Angin GBU Labuhan Angin	-	-	535,43	857,19	60,09%
UBP Ombilin GBU Ombilin	-	-	513,53	962,35	87,40%
UBP Teluk Sirih GBU Teluk Sirih	-	-	1.078,23	975,58	(9,52)%
UBP Kepulauan Riau GBU Kepulauan Riau	-	-	68,35	74,36	8,79%
UBP Sanggau GBU Sanggau	-	-	85,28	86,08	0,94%
UBP Sintang GBU Sintang	-	-	130,92	131,81	0,68%
UBP Berau GBU Berau	-	-	59,58	70,97	19,12%
UBP Singkawang GBU Singkawang	-	-	548,42	510,70	(6,88)%
UBP Asam-Asam GBU Asam-Asam	-	-	1.674,30	1.528,90	(8,68)%
UBP Barru GBU Barru	-	-	590,25	589,43	(0,14)%
UBP Cilegon GBU Cilegon	-	-	1.127,02	888,33	(21,18)%
UBP Keramasan GBU Keramasan	-	-	1.095,80	958,89	(12,49)%
UBP Jambi GBU Jambi	-	-	520,52	321,42	(38,25)%
UBP Bukittinggi GBU Bukittinggi	-	-	1.224,58	1.350,70	10,30%
UBP Bengkulu GBU Bengkulu	-	-	861,12	818,19	(4,99)%
UBP Mahakam GBU Mahakam	-	-	544,85	839,80	54,13%
UBP Barito GBU Barito	-	-	176,36	201,66	14,35%
UBP Tello GBU Tello	-	-	172,00	81,10	(52,85)%
Jumlah Total	37.590,11	35.935,34	79.670,26	82.535,52	3,60%

*) Disajikan kembali karena pengoperasian PLHS Nusa Penida dan PLTS Muara Nusa Dua

*) Restated due to the operation of SHPP Nusa Penida and SoPP Muara Nusa Dua.

Grafik Penjualan Tenaga Listrik (GWh) Chart of Electricity Sales (GWh)

* Disajikan kembali karena pengoperasian PLHS
Nusa Penida dan PLTS Muara Nusa Dua
Restated due to the operation of SHPP Nusa
Penida and SoPP Muara Nusa Dua.



Capacity Factor

Capacity Factor

Capacity Factor (CF) adalah persentase dari besarnya jumlah penjualan selama waktu tertentu, dibagi dengan maksimum jumlah energi yang bisa dikeluarkan pada masa periode yang sama.

CF pembangkit PLN Indonesia Power adalah sebesar 51,39%, yaitu meningkat 0,35%, dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan kinerja dari beberapa unit yang di antaranya UBP Banten 1 Suralaya, UBP Labuhan Angin, UBP Ombilin (PLTU), dan telah beroperasinya PLTGU Tambak Lorok Blok 3.

Capacity Factor (CF) is the percentage of actual electricity sold over a certain period divided by the maximum possible energy output during the same period.

The CF of PLN Indonesia Power's power plants in 2024 reached 51.39%, an increase of 0.35% compared to 2023. This improvement was mainly driven by enhanced performance from several units, including GBP Banten 1 Suralaya, GBP Labuhan Angin, UBP Ombilin (SPP), and the commercial operation of Tambak Lorok Block 3 CCPP.

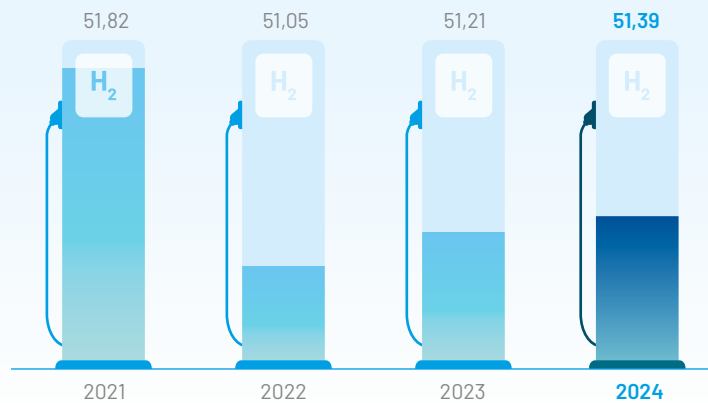
Tabel CF Berdasarkan Jenis Pembangkit

Table of Capacity Factor by Power Plant Type

(dalam GWh, kecuali dinyatakan lain) (in GWh, unless otherwise stated)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2021	2022	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease)
PLTU Batubara Coal SPP	80,87	78,44	69,06	69,08	0,03%
Non PLTU Batubara Non Coal SPP	33,40	32,81	35,63	36,37	2,08%
Jumlah Total	51,82	51,05	51,21	51,39	0,35%

**Grafik CF
Pembangkit (GWh)**
Graph of CF's Power Plants
(GWh)



Pemakaian Sendiri Self-Consumption

Selain untuk disalurkan ke pembeli, ada sebagian tenaga listrik yang dipakai oleh Perusahaan untuk fasilitas produksi. Pemakaian Sendiri (PS) merupakan jumlah tenaga listrik yang digunakan untuk aktivitas operasional pembangkit serta *losses-losses* jaringan dan trafo yang ada sebelum didistribusikan ke pembeli.

In addition to being distributed to buyers, a portion of the electricity is used by the Company for production facilities. Self-Consumption (PS) refers to the amount of electricity consumed for power plant operational activities as well as losses in the network and transformers that occur before the electricity is delivered to buyers.

Semakin rendah nilai PS menunjukkan kinerja pembangkit semakin baik.
A lower PS value indicates better performance of the power plant.

Pemakaian sendiri tahun 2024 adalah sebesar 4.675,43 GWh, yaitu mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 seiring dengan meningkatnya produksi sebesar 3,57%, namun secara persentase PS pada tahun 2024 adalah sebesar 5,36% yaitu lebih baik dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,39% yang didorong oleh pemasangan PV *rooftop* dan optimalisasi pengoperasian PLTGU Tambak Lorok Blok 3.

Self-consumption in 2024 amounted to 4,675.43 GWh, which represents an increase compared to 2023 in line with a 3.57% increase in production. However, in percentage terms, self-consumption in 2024 was 5.36%, which is better compared to 5.39% in 2023. This improvement was driven by the installation of rooftop PV and the optimization of the operation of Tambak Lorok Block 3 CCPP.

Total Pemakaian Sendiri Tenaga Listrik Berdasarkan Jenis Pembangkit

Total Self-Consumption of Electricity by Power Plant Type

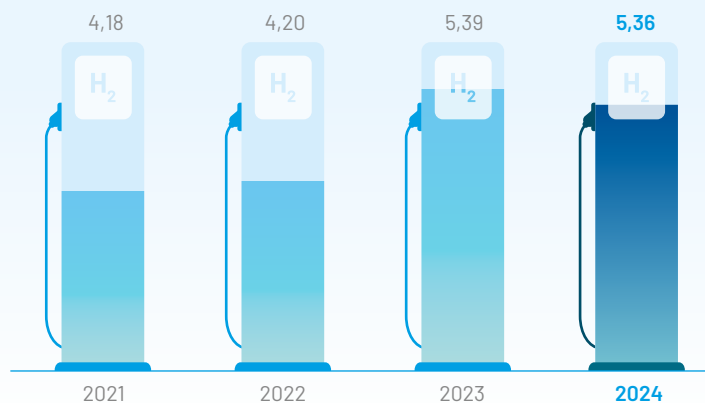
(dalam GWh, kecuali dinyatakan lain)(in GWh, unless otherwise stated)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2021		2022		2023		2024	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
PLTU Batubara Coal SPP	1.305,37	5,43%	1.283,94	5,50%	3.706,91	6,80%	3.865,80	7,05%
Non PLTU Batubara Non Coal SPP	335,34	2,21%	290,86	2,05%	828,12	2,79%	809,64	2,50%
Jumlah Total	1.640,70	4,18%	1.574,78	4,20%	4.535,03	5,39%	4.675,43	5,36%



Grafik Pemakaian Sendiri Tenaga Listrik (%)

Graph of Electricity
Self-Consumption (%)



Faktor Ketersediaan: *Equivalent Availability Factor* (EAF) Equivalent Availability Factor (EAF)

Faktor ketersediaan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator *Equivalent Availability Factor* (EAF). EAF menunjukkan tingkat kesiapan suatu pembangkit untuk beroperasi menghasilkan tenaga listrik. Nilai EAF berfungsi untuk mengetahui faktor ketersediaan pembangkit untuk beroperasi dengan Daya Mampu Netto (DMN) pada periode tertentu.

The availability factor of power plant machinery is measured using the *Equivalent Availability Factor* (EAF) indicator. EAF indicates the readiness level of a power plant to operate and generate electricity. The EAF value serves to determine the availability factor of the power plant to operate at Net Dependable Capacity (NDC) during a specific period.

Semakin tinggi nilai EAF menunjukkan tingkat kesiapan pembangkit lebih baik.
A higher EAF value indicates a better readiness level of the power plant.

Nilai EAF PLTU Batubara pada tahun 2024 adalah sebesar 85,21%, yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 84,08%. Hal ini terutama didukung oleh kesuksesan pelaksanaan *overhaul* (OH) sesuai dengan skema OH terfokus yang membuktikan peningkatan performa pembangkit.

The EAF value of coal SPP in 2024 was 85.21%, higher than the 2023 figure of 84.08%. This was mainly supported by the successful implementation of overhauls (OH) according to the focused OH scheme, which demonstrated improved plant performance.

Nilai EAF Non PLTU Batubara pada tahun 2024 adalah sebesar 93,82%, yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 94,52%. Hal ini terutama disebabkan adanya jumlah unit yang melaksanakan OH terjadwal pada tahun 2024 lebih banyak dibandingkan tahun 2023.

The EAF value of non-coal SPP in 2024 was 93.82%, lower than the 2023 figure of 94.52%. This was primarily due to a higher number of units undergoing scheduled overhauls in 2024 compared to 2023.

Tabel Nilai EAF per Jenis Pembangkitan

Table of EAF Score by Power Plant Type

(dalam %)(in %)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2021	2022	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024
PLTU Batubara Jawa Bali Coal SPP in Java-Bali	87,10	87,74	85,66	87,00	1,56
PLTU Batubara Luar Jawa Bali Coal SPP Outside Java-Bali	74,75	72,38	77,72	77,94	0,28
PLTU Batubara Coal SPP	86,16	86,82	84,08	85,21	1,34
Non PLTU Batubara Jawa Bali Non-Coal SPP in Java-Bali	95,62	95,28	95,09	94,45	(0,67)
Non PLTU Batubara Luar Jawa Bali Non-Coal SPP outside Java-Bali	-	-	91,78	90,82	(1,05)
Non PLTU Batubara Non-Coal SPP	95,62	95,28	94,52	93,82	(0,74)

Faktor Gangguan: *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR)

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)

Untuk mengetahui faktor gangguan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR). EFOR digunakan untuk mengukur tingkat mesin pembangkit keluar paksa atau ketidaksiapan unit untuk beroperasi karena gangguan.

To determine the forced outage factor of power plant machinery, the *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) indicator is used. EFOR measures the rate at which a generating unit is forced out of operation or unavailable due to unplanned outages.

Semakin rendah nilai EFOR menunjukkan keandalan unit pembangkit lebih baik dan dapat mengatasi gangguan lebih cepat

A lower EFOR value indicates better unit reliability and the ability to respond to disturbances more quickly.

Nilai EFOR PLTU Batubara pada tahun 2024 adalah sebesar 4,67%, yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,31%. Hal ini terutama didukung oleh kesuksesan pelaksanaan *overhaul* (OH) sesuai dengan skema OH terfokus yang membuktikan peningkatan performa pembangkit.

The EFOR value of coal SPP in 2024 was 4.67%, lower than the 2023 figure of 5.31%. This was primarily supported by the successful implementation of overhauls (OH) based on a focused OH scheme, demonstrating improved plant performance.

Nilai EFOR Non PLTU Batubara pada tahun 2024 adalah sebesar 1,03%, yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,50%. Hal ini terutama didukung durasi pelaksanaan OH terjadwal pada tahun 2024 lebih panjang dibandingkan tahun 2023.

The EFOR value of Non-coal SPP in 2024 was 1.03%, lower than the 2023 figure of 1.50%. This was mainly due to longer durations of scheduled overhauls in 2024 compared to 2023.

Tabel Nilai EFOR Berdasarkan Jenis Pembangkit

Table of EFOR Score by Type of Power Plant

(dalam %)(in %)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2021	2022	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024
PLTU Batubara Jawa Bali Coal SPP in Java-Bali	2,68	1,46	3,38	2,62	(22,49)
PLTU Batubara Luar Jawa Bali Coal SPP Outside Java-Bali	10,67	20,10	13,44	13,15	(2,16)
PLTU Batubara Coal SPP	3,51	2,85	5,31	4,67	(12,05)
Non PLTU Batubara Jawa Bali Non-Coal SPP in Java-Bali	0,58	0,37	0,77	0,54	(29,87)
Non PLTU Batubara Luar Jawa Bali Non-Coal SPP outside Java-Bali	-	-	5,19	3,59	(30,83)
Non PLTU Batubara Non-Coal SPP	0,58	0,37	1,50	1,03	(31,33)

Faktor Efisiensi Pembangkit: *Specific Fuel Consumption* (SFC)

Specific Fuel Consumption (SFC)

Untuk mengetahui efisiensi pembangkit diukur berdasarkan indikator *Specific Fuel Consumption* (SFC). SFC digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah pembangkit listrik dan untuk mengetahui perbandingan total konsumsi bahan bakar terhadap daya listrik yang dihasilkan (produksi bruto) dari pembangkit.

To determine the efficiency of power plants, it is measured based on the Specific Fuel Consumption (SFC) indicator. SFC is used to measure how efficient a power plant is and to determine the ratio of total fuel consumption to the electrical power generated (gross production) by the plant.

Semakin rendah nilai SFC menunjukkan semakin efisien pengoperasian pembangkit.

A lower SFC value indicates more efficient plant operation.

Nilai SFC Batubara pada tahun 2024 adalah sebesar 0,6555 kg/kWh, yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,6282 kg/kWh. Hal ini terutama didukung oleh adanya peningkatan tonase pemakaian biomassa pada tahun 2024.

The SFC value for coal in 2024 was 0.6555 kg/kWh, higher than the 2023 value of 0.6282 kg/kWh. This increase was primarily due to the higher tonnage of biomass usage in 2024.

Nilai SFC Gas pada tahun 2024 adalah sebesar 0,0082 MMBTU/kWh, yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,0083 MMBTU/kWh. Hal ini menunjukkan semakin efisien pengoperasian pembangkit, yang terutama didukung oleh produksi listrik yang dihasilkan lebih optimal.

The SFC Gas value in 2024 was 0.0082 MMBTU/kWh, which is lower than the 2023 value of 0.0083 MMBTU/kWh. This indicates a more efficient operation of the power plant, primarily supported by more optimal electricity production.

Nilai SFC BBM pada tahun 2024 adalah sebesar 0,3045 liter/kWh, yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,2960 liter/kWh. Hal ini terutama didukung oleh perubahan jenis BBM yang digunakan dari B30 ke B35.

The SFC Fuel Oil value in 2024 was 0.3045 liters/kWh, which is higher than the 2023 value of 0.2960 liters/kWh. This was primarily driven by the change in the type of fuel used from B30 to B35.

Nilai SFC Berdasarkan Jenis Bahan Bakar

Table of SFC Score by Fuel Type

Jenis Bahan Bakar Type of Fuel	Satuan Unit	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024
SFC Batubara Coal SFC	kg/kWh	0,6282	0,6555	4,35%
SFC Gas Gas SFC	MMBTU/kWh	0,0083	0,0082	(1,20)%
SFC BBM Oil Fuel SFC	liter/kWh	0,2960	0,3045	2,87%

Kinerja Pembangkit Jasa O&M

Performance of O&M Service Power Plants

Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power mengelola jasa *operation and maintenance* (O&M) pada 3 (tiga) unit pembangkitan.

In 2024, PLN Indonesia Power managed operation and maintenance (O&M) services for three power generation units.

Daya Terpasang Pembangkit Jasa O&M

O&M Services Power Plant Installed Capacity

Daya terpasang pembangkit jasa O&M pada tahun 2024 adalah sebesar 226,00 MW.

The installed capacity of O&M service power plants in 2024 was 226.00 MW.

Tabel Daya Terpasang Unit Pembangkit Jasa O&M

Table of O&M Services Power Plant Installed Capacity

Unit Pembangkit Jasa O&M O&M Services Power Plant		(dalam MW)(in MW)
		Daya Terpasang Installed Capacity
1.	UBP Jeranjang GBU Jeranjang	90,00
2.	UBP Holtekamp GBU Holtekamp	24,00
3.	UBP Jatigede GBU Jatigede	112,00
Jumlah Total		226,00

EAF Pembangkit Jasa O&M

EAF of O&M Service Power Plants

Semakin tinggi nilai EAF menunjukkan tingkat kesiapan pembangkit lebih baik.

A higher EAF value indicates better plant readiness.

Nilai EAF Pembangkit Jasa O&M Jawa Bali pada tahun 2024 adalah sebesar 100,00% merupakan kinerja dari PLTA Jatigede, sedangkan pada tahun 2023 tidak terdapat jasa O&M.

The EAF value for O&M Service Power Plants in the Java-Bali region in 2024 was 100.00%, representing the performance of the Jatigede HPP, while in 2023 there were no O&M services.

Nilai EAF Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa Bali pada tahun 2024 adalah sebesar 72,07%, yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 82,51%. Hal ini didukung oleh penurunan performa pembangkit akibat dari tidak terlaksananya *overhaul* karena kebutuhan sistem.

The EAF value for O&M Service Power Plants outside the Java-Bali region in 2024 was 72.07%, which is lower than the 2023 figure of 82.51%. This decrease was due to the decline in plant performance as a result of the absence of overhaul activities caused by system needs.

Tabel EAF Pembangkit Jasa O&M

Table of EAF of O&M Service Power Plants

(dalam MW) (in MW)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2021	2022	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024
Pembangkit Jasa O&M Jawa Bali O&M Service Power Plants in Java-Bali	89,84	91,05	-	100,00	-
Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa Bali O&M Service Power Plants Outside Java-Bali	77,80	74,35	82,51	72,07	(12,65)

EFOR Pembangkit Jasa O&M

EFOR of O&M Service Power Plants

Semakin rendah nilai EFOR menunjukkan keandalan unit pembangkit lebih baik dan dapat mengatasi gangguan lebih cepat.

The lower the EFOR value, the better the reliability of the power generation unit and the quicker it can recover from disturbances.

Nilai EFOR Pembangkit Jasa O&M Jawa Bali pada tahun 2024 adalah sebesar 0,00% yang menunjukkan pencapaian sebesar 100% (tidak ada gangguan).

The EFOR value of O&M Service Power Plants Units in Java-Bali in 2024 was 0.00%, indicating a 100% achievement (no disturbances).

Nilai EFOR Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa Bali pada tahun 2024 adalah sebesar 5,88%, yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,05%. Hal ini disebabkan oleh penurunan performa pembangkit akibat dari tidak terlaksananya *overhaul* karena kebutuhan sistem.

The EFOR value of O&M Service Power Plant Units outside Java-Bali in 2024 was 5.88%, higher than the 2023 value of 4.05%. This was due to a decline in power plant performance resulting from the inability to carry out overhaul activities due to system requirements.

Tabel EFOR Pembangkit Jasa O&M

Table of EFOR of O&M Service Power Plants

(dalam %) (in %)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2021	2022	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024
Pembangkit Jasa O&M Jawa Bali O&M Service Power Plants in Java-Bali	2,10	0,65	-	0,00	(100,00)
Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa Bali O&M Service Power Plants Outside Java-Bali	3,94	18,86	4,05	5,88	45,19

Kinerja Produk *Beyond kWh* Beyond kWh Product Performance

PLN Indonesia Power terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan melalui berbagai inovasi dan pengembangan produk serta layanan berkelanjutan. Inovasi dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional, tetapi juga sebagai strategi adaptif terhadap dinamika industri energi serta tantangan global terkait transisi energi. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui *Shifting Strategy and Innovation Focus*, yaitu dengan memperluas portofolio bisnis baru di luar penjualan tenaga listrik (*Beyond kWh Business*) sebagai bentuk diversifikasi usaha dan respon atas keunggulan dan tantangan bisnis di masa mendatang. Untuk mencapai hal tersebut, PLN Indonesia Power menyusun rencana pengembangan bisnis baru di luar penjualan tenaga listrik, dimana pengembangan bisnis dilakukan dengan berbasis kepada kompetensi inti Perusahaan dan dikembangkan melalui inovasi untuk menghasilkan.

PLN Indonesia Power continues to demonstrate its commitment to sustainability through various innovations and the development of sustainable products and services. These innovations are carried out not only to improve operational efficiency and reliability but also as an adaptive strategy in response to the dynamics of the energy industry and global challenges related to energy transition. One of the strategic steps taken is through the Shifting Strategy and Innovation Focus, which involves expanding the business portfolio beyond electricity sales (*Beyond kWh Business*) as a form of business diversification and a response to future business opportunities and challenges. To achieve this, PLN Indonesia Power has developed a new business development plan outside of electricity sales, where the business development is based on the Company's core competencies and enhanced through innovation to deliver results.

Operation & Maintenance Services (O&M)



- Main Plant
- Balance of Plant
- Coal Handling
- Ash Handling
- Laboratories
- Engineering Support
- Asset Management Setup
- Power Plant Digitalization

Pengalaman Project

Project Experience

- O&M PLTA HPP Rajamandala (1x47MW)
- O&M PLTU SPP Kalbar-1 (2X100 MW)
- O&M PLTMG GEPP Baloi 30 MW
- O&M Mobile Power Plant Bau-Bau, Ambon & Jayapura
- O&M PLTMG GEPP Nias
- O&M Substation Kuwait

Maintenance, Repair & Overhaul Services (MRO)



- All Type Boiler
- HRSG (Heat Recovery Steam Generator)
- Pump & Turbine
- Trafo & Generator
- Control & Instrument
- NDT & Material (Non-Destructive Testing)

- Vibration
- Welding
- Boiler Inspector
- Welding Inspector
- Corrosion Inspector

Pengalaman Project

- Pekerjaan PM 4000 hours pada GTG-B (420-V9200) & PM 8000 hours GTG-C (420-V9300) di Pertamina EP Cepu JTB Field
- Service Electro pneumatic Positioner PT Antam Tbk
- Pekerjaan Preventive Maintenance Panel Switchgear PLTM Logadung di PT Jasa Tirta Energi
- Jasa *simple inspection* PLTP Dieng unit 1 2024 di PT Geo Dipa Energi
- Pekerjaan On-Site Overhaul, Re-Wedges and Assessment Generator Hitachi 21,5 MVA di PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.

Project Experience

- 4,000-Hour PM Work on GTG-B (420-V9200) & 8,000-Hour PM on GTG-C (420-V9300) at Pertamina EP Cepu JTB Field
- Electro-Pneumatic Positioner Servicing for PT Antam Tbk
- Preventive Maintenance Work on Switchgear Panel of MHPP Logadung at PT Jasa Tirta Energi
- Simple Inspection Services for GPP Dieng Unit 1 (2024) at PT Geo Dipa Energi
- On-Site Overhaul, Re-Wedging, and Generator Assessment for Hitachi 21.5 MVA at PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.

Primary Energy & Port Management



- Coal Trading
- Biomass Trading
- Port Management

Pengalaman Project

- Penjualan Batu Bara ke Liannex Corporation Pte. Ltd. Singapore
- Penjualan Batu Bara ke G-Serve & Trading Pte. Ltd. Singapore
- Penjualan Batu Bara ke Golden Kingdom Holding Pte. Ltd. Singapore
- Penjualan Biomass ke PT Berkah Monara Nusantara
- Port Management ke GCL IT

Project Experience

- Coal Sales to Liannex Corporation Pte. Ltd. Singapore
- Coal Sales to G-Serve & Trading Pte. Ltd., Singapore
- Coal Sales to Golden Kingdom Holding Pte. Ltd., Singapore
- Biomass Sales to PT Berkah Monara Nusantara
- Port Management Services for GCL IT

Barge Mounted Power Plant (BMPP)



- Full Service (Pendanaan, Engineering Procurement and Construction/EPC, Operation and Maintenance/O&M)
- Partial Service (O&M, EPC)

Pengalaman Project

- Project name: BMPP Nusantara 1
- Waktu Delivery : 28 Jan 2022
- kapasitas : 60 MW
- Lokasi : Ambon
- Spesifikasi Mesin : Wartsila W20V34DF 6x 9,76 MW on barge

Project Experience

- Project: BMPP Nusantara 1
- Delivery Date: 28 January 2022
- Capacity: 60 MW
- Location: Ambon
- Engine Specification: Wartsila W20V34DF, 6 units x 9.76 MW on barge

Solar Photovoltaic Solution



- EPC - Turnkey
- Long Term Leasing / BOOT (Build-Own-Operate-Transfer)
- Operation and Maintenance
- Licensing Arrangement

Pengalaman Project

- PLTS Toyota Motor Manufacturing Indoensia (2,6 MWp)
- PLTS Advics (600 kWp)
- PLTS Yamaha Indonesia Motor Manufacture (3,5 MWp)
- PLTS Isuzu (123,2 kWp)
- PLTS Merck (473,8 kWp)

Project Experience

- SoPP Toyota Motor Manufacturing Indoensia (2,6 MWp)
- SoPP Advics (600 kWp)
- SoPP Yamaha Indonesia Motor Manufacture (3,5 MWp)
- SoPP Isuzu (123,2 kWp)
- SoPP Merck (473,8 kWp)

Operational Development Program (ODP)



- In Class Training (ICT)
- On Job Training (OT)

Pengalaman Project

- *Field Operation Development Program (FODP)* dengan Petroleum Serawak Berhad (2024-2025)
- *Pekerjaan Gas Turbine Major Overhaul Training Course MHI701D* (2024) dengan North Power Service Joint Stock Company
- *PI System and Asset Management training* (2024) dengan PT Vale Indonesia.
- *Pengoperasian Simulator PLTU Super Critical* (2024) dengan PT Makmur Segara Wasesa

Project Experience

- *Field Operation Development Program (FODP)* with Petroleum Sarawak Berhad (2024-2025)
- *Gas Turbine Major Overhaul Training Course MHI701D* (2024) with North Power Service Joint Stock Company
- *PI System and Asset Management Training* (2024) with PT Vale Indonesia
- *Operation of SPP Super Critical Simulator* (2024) with PT Makmur Segara Wasesa

Enterprise Asset Management & Digitalization Setup



Enterprise Asset Management

- Work Planning and Control (WPC)
- Operation Management
- Outage Management
- Reliability Management
- Supply Chain Management (SCM)
- Efficiency Management

Digitalization Setup

- Reliability Efficiency Optimization Center (REOC)

Pengalaman Project

- Set Up REOC di PT Geodipa Energy
- Set Up REOC di PT Tanjung Jati B
- Knowledge Sharing Operation Management di PT Palton Energy

Project Experience

- Set Up of REOC at PT Geo Dipa Energy
- Set Up of REOC at PT Tanjung Jati B
- Knowledge Sharing on Operation Management at PT Palton Energy

Carbon Trading



- Sertifikat Pengurang Emisi (SPE) - Gas Rumah Kaca (GRK)
Emission Reduction Certificate (ERC) - Greenhouse Gas (GHG)

Pengalaman Project

- Project PLTM Gunung Wugul
- Project Add On Grati Blok 2
- Pengoperasian PLTGU Priok Blok 4

Project Experience

- Gunung Wugul MHPP Project
- Add-On Project for Grati Block 2
- Operation of Priok Block 4 CCPP

Profitabilitas Per Segmen

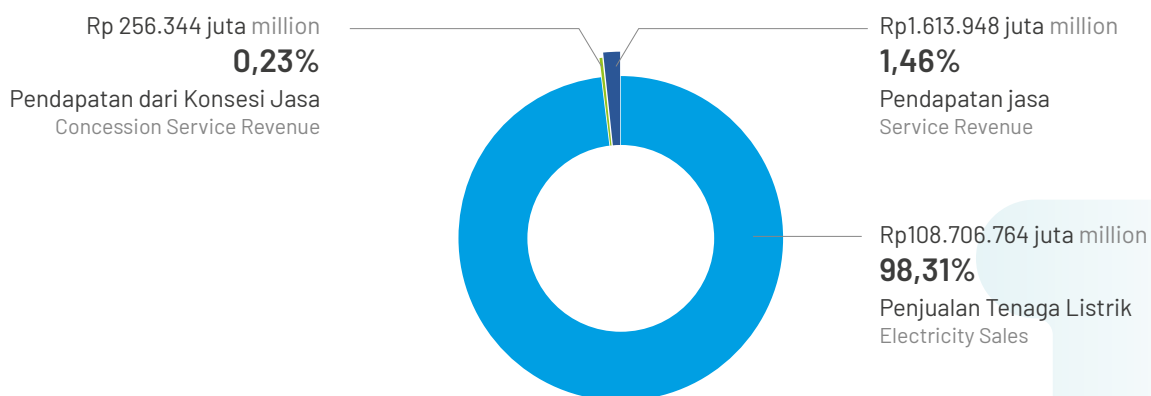
Profitability by Segment

Pendapatan Operasi Per Segmen

Revenue by Segment

Pendapatan usaha PLN Indonesia Power terdiri dari penjualan tenaga listrik, pendapatan dari konsesi jasa dan pendapatan jasa. Pendapatan Usaha PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp110,58 triliun, yaitu meningkat Rp7,07 triliun atau 6,84% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp103,50 triliun.

PLN Indonesia Power's revenue consists of electricity sales, concession service revenue, and service revenue. In 2024, PLN Indonesia Power's revenue amounted to Rp110.58 trillion, representing an increase of Rp7.07 trillion or 6.84% compared to Rp103.50 trillion in 2023.



Kontribusi Kinerja Keuangan dari Anak Perusahaan Contribution of Financial Performance from Subsidiaries

Laba komprehensif PLN Indonesia Power juga berkontribusi dari kinerja Anak Perusahaan. Berikut merupakan profitabilitas Anak Perusahaan PLN Indonesia Power tahun 2024:

PLN Indonesia Power's comprehensive income is also contributed by the performance of its Subsidiaries. The following presents the profitability of PLN Indonesia Power's Subsidiaries in 2024:

Tabel Laba Anak Perusahaan Tahun 2024

Table of Profit from Subsidiaries in 2024

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No	Nama Anak Perusahaan Name of Subsidiary	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	Kepemilikan PLN Indonesia Power Ownership of PLN Indonesia Power	Penerimaan Dividen* Dividen Receivment*
1.	PT Artha Daya Coalindo	Rp63.386	80,00%	Rp10.000
2.	PT PLN Indonesia Power Services, sebelumnya bernama PT Cogindo DayaBersama PT PLN Indonesia Power Services, formerly known as PT Cogindo DayaBersama	Rp80.873	99,99%	Rp45.544
3.	PT Indo Ridlatama Power	(Rp166.892)	90,00%	-
4.	PT PLN Indonesia Power Renewables	Rp1.307.684	99,99%	Rp124.601

* Penerimaan Dividen Anak Perusahaan untuk kinerja tahun buku 2023

* Dividends Received from Subsidiaries for the 2023 Financial Year

Uraian singkat mengenai kinerja Anak Perusahaan telah dijelaskan pada bab Profil Perusahaan bagian Sekilas tentang Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi dalam Laporan Tahunan ini.

A brief overview of the performance of the Subsidiaries has been provided in the Company Profile chapter, under the section "Overview of Subsidiaries, Joint Ventures, and Associates" in this Annual Report.

Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Overview

Uraian kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dengan Akuntan Publik (AP) Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA dengan Nomor 00888/2.1457/AU.1/02/0241-51/1/V/2025 yang diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2025 mendapatkan opini "**Wajar dalam Semua Hal yang Material**". Selanjutnya, Laporan Keuangan lengkap beserta catatannya disajikan pada bagian tersendiri dalam Laporan Tahunan ini.

This financial performance overview is prepared based on the Company's Financial Statements, which have been compiled and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK). The Financial Statements for the year ended December 31, 2024, were already audited by the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan with Public Accountant (AP) Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA under the report number 00888/2.1457/AU.1/02/0241-51/1/V/2025 issued on May 16, 2025, and received a "**Fairly, in All Material Respects**". Furthermore, the complete Financial Statements along with the accompanying notes are presented in a separate section of this Annual Report.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Statements of Consolidated Financial Position

Posisi keuangan PLN Indonesia Power tahun 2024 terdiri dari jumlah aset yang meningkat menjadi Rp427,34 triliun, liabilitas meningkat menjadi Rp53,95 triliun dan ekuitas meningkat menjadi Rp373,39 triliun.

PLN Indonesia Power's financial position in 2024 consists of total assets increasing to Rp427.34 trillion, liabilities rising to Rp53.95 trillion, and equity increasing to Rp373.39 trillion.

Tabel Posisi Keuangan

Table of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Jumlah Aset Total Assets	193.713.794	374.409.423	386.200.863	427.337.432	41.136.569	10,65%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	15.312.157	31.387.319	40.745.537	53.946.034	13.200.497	32,40%
Jumlah Ekuitas Total Equity	178.401.637	343.022.104	345.455.326	373.391.398	27.936.072	8,09%

*) Disajikan kembali As restated

Aset

Aset

Jumlah aset PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp427,34 triliun, yaitu meningkat Rp41,14 triliun atau 10,65% dari tahun 2023 sebesar Rp386,20 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan piutang usaha PJBTTL mencapai Rp17 triliun dan surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp28 triliun sesuai hasil revaluasi per 31 Desember 2024.

The total assets of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp427.34 trillion, reflecting an increase of Rp41.14 trillion or 10.65% from Rp386.20 trillion in 2023. This increase was primarily driven by a rise in PJBTTL trade receivables reaching Rp17 trillion and a revaluation surplus of fixed assets/property, plant, and equipment amounting to Rp28 trillion based on the revaluation as of December 31, 2024.

Tabel Aset

Table of Assets

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

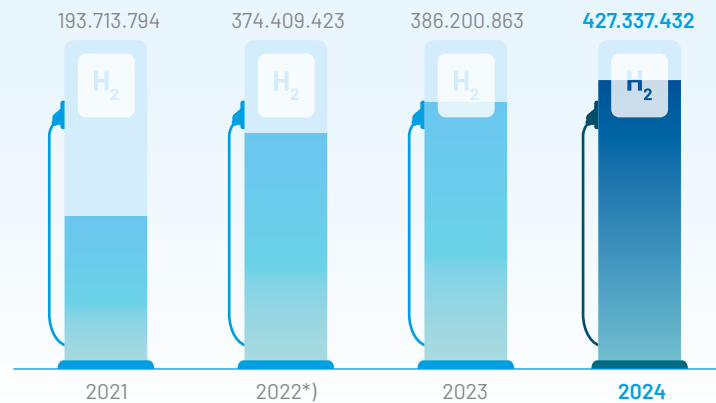
Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Aset lancar Current assets	34.232.232	38.748.404	62.191.430	81.056.348	18.864.918	30,33%
Aset tidak lancar Non-current assets	159.481.562	335.661.019	324.009.433	346.281.084	22.271.651	6,87%
Jumlah Aset Total Assets	193.713.794	374.409.423	386.200.863	427.337.432	41.136.569	10,65%

*) Disajikan kembali As restated

Grafik Aset (Rp juta)

Chart of Assets
(Rp million)

*) Disajikan kembali As restated



Aset Lancar

Current Assets

Jumlah aset lancar PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp81,06 triliun, yaitu meningkat Rp18,86 triliun atau 30,33% dari tahun 2023 sebesar Rp62,19 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan Pendapatan penjualan tenaga listrik di tahun 2024 yang tersajikan pada pos piutang usaha atas PJBTL pada PT PLN (Persero). Saldo saat ini didominasi atas komponen A dan akrual piutang sesuai periode pelaporan keuangan. Skema pelunasan Komponen A oleh PLN menggunakan skema yang telah diatur sesuai kebutuhan investasi yang telah disetujui. Hal ini berdampak pada meningkatnya aset lancar sebesar Rp17 triliun dibanding tahun 2023.

PLN Indonesia Power's current assets in 2024 amounted to Rp81.06 trillion, marking an increase of Rp18.86 trillion or 30.33% from Rp62.19 trillion in 2023. This growth was primarily driven by an increase in electricity sales revenue in 2024, reflected in the trade receivables from PJBTL at PT PLN (Persero). The current balance is mainly dominated by Component A and accrued receivables in accordance with the financial reporting period. The settlement scheme for Component A by PLN follows a scheme aligned with approved investment needs. This has contributed to an increase in current assets of Rp17 trillion compared to 2023.

Tabel Aset Lancar

Table of Current Assets

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

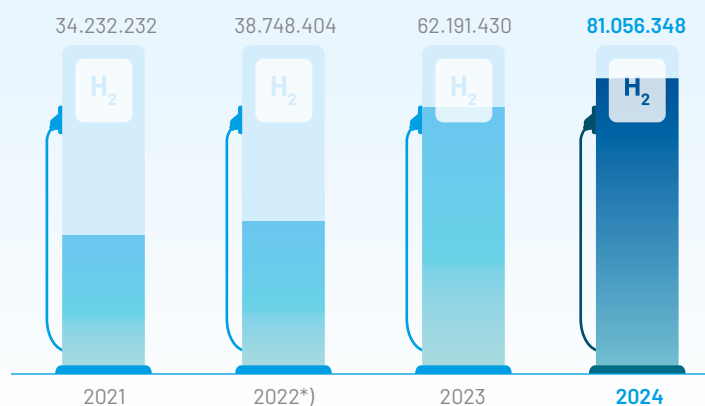
Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	2.766.128	3.682.111	3.535.896	4.569.811	1.033.915	29,24%
Piutang usaha Trade receivables	25.665.554	27.868.459	52.221.587	69.515.156	17.293.569	33,12%
Piutang lain-lain Other receivables	343.128	669.231	384.208	929.023	544.815	141,80%
Persediaan Inventories	2.663.079	4.975.336	5.283.975	5.151.067	(132.908)	(2,52)%
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	566.327	396.009	246.043	329.477	83.434	33,91%
Biaya dibayar di muka dan uang muka Prepaid expenses and advances	66.638	166.212	399.882	432.720	32.838	8,21%
Aset keuangan konsesi jasa Financial assets of service concession	2.019.485	991.046	119.839	129.094	9.255	7,72%
Aset Lancar Total Current Assets	34.232.232	38.748.404	62.191.430	81.056.348	18.864.918	30,33%

*) Disajikan kembali As restated

Grafik Aset Lancar (Rp juta)

Chart of Current Assets
(Rp million)

*) Disajikan kembali As restated



Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp4,57 triliun, yaitu meningkat Rp1,03 triliun atau 29,24% dari tahun 2023 sebesar Rp3,54 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pencairan Piutang dari PJBTL PT PLN (Persero).

Cash and Cash Equivalents

PLN Indonesia Power's cash and cash equivalents in 2024 amounted to Rp4.57 trillion, reflecting an increase of Rp1.03 trillion or 29.24% from Rp3.54 trillion in 2023. This increase was primarily driven by higher collections of receivables from PJBTL at PT PLN (Persero).

Tabel Kas dan Setara Kas

Table of Cash and Cash Equivalents

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)(in million Rupiah, unless otherwise stated)

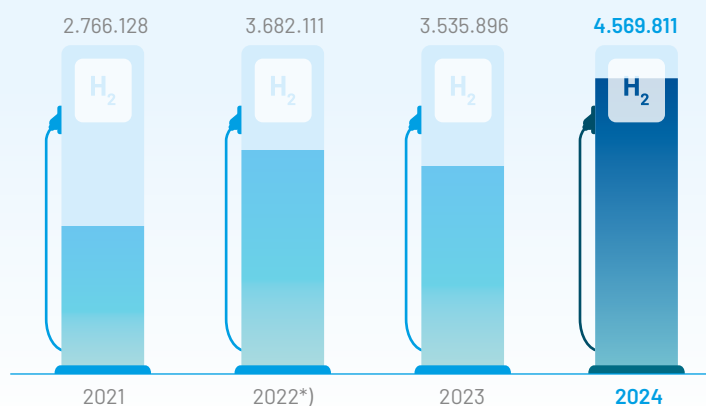
Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Kas Cash	35	67	46	45	(1)	(2,17)%
Bank:						
Pihak berelasi Related parties	2.217.210	3.588.538	3.519.715	4.544.687	1.024.972	29,12%
Pihak ketiga Third parties	1.557	54.947	10.635	21.079	10.444	98,20%
Jumlah Kas dan Bank Total Cash and Bank	2.218.802	3.643.552	3.530.396	4.565.811	1.035.415	29,33%
Setara Kas - Deposito Berjangka: Cash Equivalents - Term Deposits:						
Pihak berelasi Related parties	547.326	38.559	5.500	4.000	(1.500)	(27,27)%
Jumlah Setara Kas Total Cash Equivalent	547.326	38.559	5.500	4.000	(1.500)	(27,27)%
Jumlah Kas dan Setara Kas Total Cash and Cash Equivalent	2.766.128	3.682.111	3.535.896	4.569.811	1.033.915	29,24%

*) Disajikan kembali As restated

Grafik Kas dan Setara Kas (Rp juta)

Chart of Cash and Cash
Equivalent (Rp million)

*) Disajikan kembali As restated



Piutang Usaha

Piutang usaha PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp69,51 triliun, yaitu meningkat Rp17,29 triliun atau 33,12% dari tahun 2023 sebesar Rp52,22 triliun. Peningkatan tersebut dominan atas piutang komponen A PJBTL PLN dan akrual atas tagihan PJBTL 1 bulan.

Trade Receivables

PLN Indonesia Power's trade receivables in 2024 amounted to Rp69.51 trillion, an increase of Rp17.29 trillion or 33.12% from Rp52.22 trillion in 2023. This increase was predominantly driven by receivables from Component A of PJBTL at PLN and accrued billing for one month of PJBTL.

Tabel Piutang Usaha

Table of Trade Receivables

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

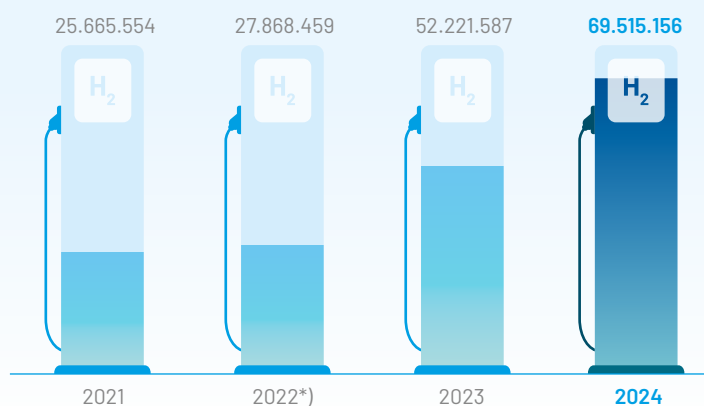
Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Pihak berelasi Related parties	27.248.591	27.789.360	52.135.921	69.362.079	17.226.158	33,04%
Pihak ketiga Third parties	136.474	121.167	118.793	195.303	76.510	64,41%
Cadangan kerugian penurunan nilai Allowance for Impairment losses	(45.051)	(39.603)	(33.127)	(42.226)	(9.099)	27,47%
Pihak ketiga - bersih Third parties - net	91.423	81.564	85.666	153.077	67.411	78,69%
Jumlah Piutang Usaha Total Trade Receivables	25.665.554	27.868.459	52.221.587	69.515.156	17.293.569	33,12%

*) Disajikan kembali As restated

Grafik Piutang Usaha (Rp juta)

Chart of Trade
Receivables (Rp million)

*) Disajikan kembali As restated



Piutang Lain-lain - Bagian Lancar

Piutang lain-lain - bagian lancar PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp929,02 miliar, yaitu meningkat Rp544,82 miliar atau 141,80% dari tahun 2023 sebesar Rp384,21 miliar. Peningkatan tersebut terutama didorong aktivitas jasa O&M dan lainnya.

Other Receivables - Current Portion

PLN Indonesia Power's other receivables - current portion in 2024 amounted to Rp929.02 billion, reflecting an increase of Rp544.82 billion or 141.80% from Rp384.21 billion in 2023. This increase was primarily driven by O&M service activities and other services.

Persediaan

Persediaan PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp5,28 triliun, yaitu lebih rendah Rp132,91 miliar atau 2,52% dari tahun 2023 sebesar Rp5,28 triliun. Penurunan tersebut dominan disebabkan karena pemakaian batubara yang lebih besar dari tahun 2023. Namun keamanan pasokan untuk menjaga sistem operasi masih tetap terjaga.

Inventories

PLN Indonesia Power's inventories in 2024 amounted to Rp5.28 trillion, a decrease of Rp132.91 billion or 2.52% from Rp5.41 trillion in 2023. The decline was mainly due to higher coal consumption compared to 2023. However, supply security to maintain system operations remains ensured.

Tabel Persediaan

Table of Inventories

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

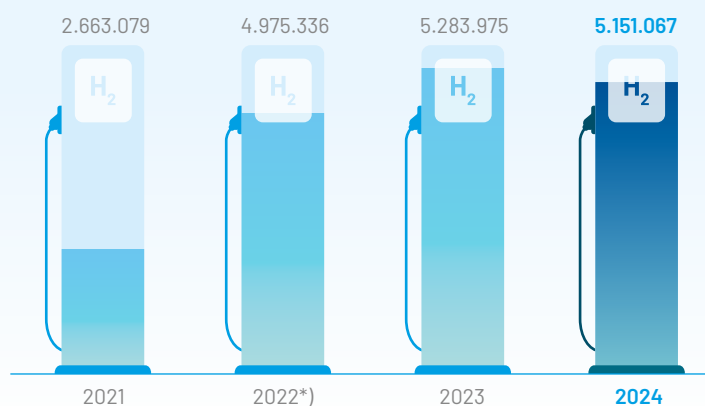
Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Bahan bakar dan pelumas Fuel and lubricants	1.348.058	4.770.409	5.269.286	5.187.306	(81.980)	(1,56)%
Suku cadang Spare parts	162.400	444.309	358.323	336.080	(22.243)	(6,21)%
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence	(124.689)	(239.382)	(343.634)	(372.319)	(28.685)	8,35%
Jumlah Persediaan Total Inventories	2.663.079	4.975.336	5.283.975	5.151.067	(132.908)	(2,52)%

*) Disajikan kembali As restated

Grafik Persediaan (Rp juta)

Chart of Inventories
(Rp million)

*) Disajikan kembali As restated



Pajak Dibayar di Muka - Bagian Lancar

Pajak dibayar di muka - bagian lancar PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp329,48 miliar, yaitu meningkat Rp83,43 miliar atau 33,91% dari tahun 2023 sebesar Rp246,04 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi peningkatan aktivitas usaha.

Prepaid Taxes - Current Portion

PLN Indonesia Power's prepaid taxes - current portion in 2024 amounted to Rp329.48 billion, an increase of Rp83.43 billion or 33.91% from Rp246.04 billion in 2023. This increase was mainly driven by higher business activity levels.

Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka - Bagian Lancar

Biaya dibayar di muka dan uang muka - bagian lancar PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp432,72 miliar, yaitu meningkat Rp32,84 miliar atau 8,21% dari tahun 2023 sebesar Rp399,88 miliar. Peningkatan premi asuransi dibayar dimuka karena kurs, nilai premi dan obyek pertanggungan.

Prepaid Expenses and Advances - Current Portion

PLN Indonesia Power's prepaid expenses and advances - current portion in 2024 amounted to Rp432.72 billion, increasing by Rp32.84 billion or 8.21% from Rp399.88 billion in 2023. The increase was primarily due to higher prepaid insurance premiums, influenced by exchange rates, premium values, and the insured assets.

Aset Keuangan dari Proyek Konsesi - Bagian Lancar

Aset keuangan dari proyek konsesi - bagian lancar PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp129,09 miliar, yaitu meningkat Rp9,25 miliar atau 7,72% dari tahun 2023 sebesar Rp119,84 miliar. Peningkatan tersebut karena perhitungan aset keuangan PT IRP dari konsesi jasa yang jatuh tempo dalam satu tahun yang merupakan perhitungan kembali minimum *lease payment* dan yang dipengaruhi indikator *rate interest*.

Financial Assets of Concession Project - Current Portion

PLN Indonesia Power's financial assets from concession projects - current portion in 2024 amounted to Rp129.09 billion, an increase of Rp9.25 billion or 7.72% from Rp119.84 billion in 2023. The increase resulted from the recalculation of financial assets related to PT IRP's service concession, which are due within one year, reflecting adjustments in minimum lease payments and the impact of interest rate indicators.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Aset tidak lancar PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp346,28 triliun, yaitu meningkat Rp22,27 triliun atau 6,87% dari tahun 2023 sebesar Rp324,01 triliun. Peningkatan tersebut terutama di dominasi karena surplus atas revaluasi aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp28 triliun.

PLN Indonesia Power's non-current assets in 2024 amounted to Rp346.28 trillion, reflecting an increase of Rp22.27 trillion or 6.87% from Rp324.01 trillion in 2023. This increase was primarily driven by a surplus from the asset revaluation as of December 31, 2024, amounting to Rp28 trillion.

Tabel Aset Tidak Lancar

Table of Non-Current Assets

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

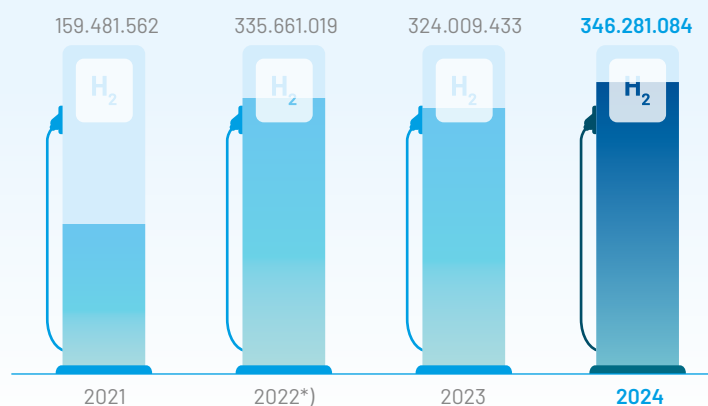
Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Aset tetap Property, plant, and equipment	107.729.655	282.537.883	307.625.776	329.952.364	22.326.588	7,26%
Aset hak guna Right-of-Use Assets	3.307.776	3.447.465	5.445.976	4.671.193	(774.783)	(14,23)%
Properti investasi Investment properties	143.969	93.814	94.405	95.583	1.178	1,25%
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama Investment in associates and joint ventures	4.321.545	6.946.638	7.835.695	9.163.403	1.327.708	16,94%
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	19.493	22.150	22.240	38.613	16.373	73,62%
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	1.242.799	907.902	720.965	368.368	(352.597)	(48,91)%
Piutang lain-lain Other receivables	516.195	531.004	915.472	661.277	(254.195)	(27,77)%
Biaya dibayar di muka Prepaid expenses	41.411	179.863	41.563	40.914	(649)	(1,56)%
Aset keuangan dari konsesi jasa - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Financial assets of service concession - less: current maturities	41.771.897	40.780.851	1.028.949	899.855	(129.094)	(12,55)%
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya Restricted cash in banks	1.117	-	-	-	-	-
Aset tidak lancar lain Other non-current assets	385.705	213.449	278.392	389.514	111.122	39,92%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total of Non-Current Assets	159.481.562	335.661.019	324.009.433	346.281.084	22.271.651	6,87%

*) Disajikan kembali As restated

Grafik Aset Tidak Lancar (Rp juta)

Chart of Non-Current Assets (Rp million)

*) Disajikan kembali As restated



Aset Tetap

Aset tetap PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp329,95 triliun, yaitu meningkat Rp22,33 triliun atau 7,26% dari tahun 2023 sebesar Rp307,63 triliun. Peningkatan tersebut dominan karena surplus hasil revaluasi aset termasuk Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP) senilai Rp28 triliun.

Property, Plant, and Equipment

PLN Indonesia Power's property, plant, and equipment in 2024 amounted to Rp329.95 trillion, an increase of Rp22.33 trillion or 7.26% from Rp307.63 trillion in 2023. This increase was mainly due to a surplus from the asset revaluation, including Work in Progress (WIP),, amounting to Rp28 trillion.

Tabel Aset Tetap

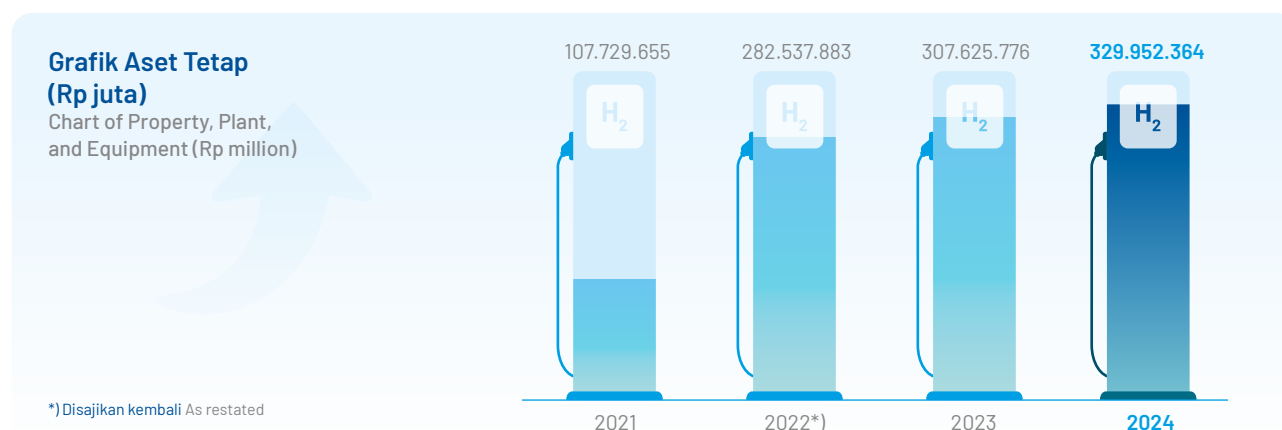
Table of Property, Plant, and Equipment

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Hak atas tanah Lands right	17.383.151	17.449.448	17.832.992	19.152.683	1.319.691	7,40%
Bangunan, waduk, dan prasarana Buildings, reservoir, and infrastructure	6.966.675	24.745.236	24.263.835	24.471.910	208.075	0,86%
Instalasi dan mesin pembangkit Installations and power plant	72.315.486	224.817.615	249.946.105	276.244.823	26.298.718	10,52%
Peralatan transmisi Transmission equipment	4.303.218	4.298.410	4.995.271	5.656.118	660.847	13,23%
Instalasi telekomunikasi Telecommunication installation	94.492	143.945	155.485	160.780	5.295	3,41%
Perlengkapan umum General equipment	343.845	716.286	708.206	602.151	(106.055)	(14,98)%
Kendaraan bermotor Motor vehicles	16.675	102.993	98.139	101.875	3.736	3,81%
Material cadang Spare parts	251.127	404.017	518.733	546.389	27.656	5,33%

Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Aset dalam pembangunan Construction in progress	5,933,624	8.762.242	9.009.609	2.833.033	(6.176.576)	(68,56)%
Aset tidak digunakan dalam operasi Assets not used in operations	132.049	1.190.511	190.221	184.180	(6.041)	(3,18)%
Penyisihan untuk penurunan nilai Provision for impairment	10.687	92.820	92.820	1.578	(91.242)	(98,30)%
Jumlah Aset Tetap Total Property, Plant, and Equipment	107.729.655	282.537.883	307.625.776	329.952.364	22.326.588	7,26%

*) Disajikan kembali As restated



Aset Hak Guna

Aset hak guna PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp4,67 triliun, yaitu lebih rendah Rp774,78 miliar atau 14,23% dari tahun 2023 sebesar Rp5,45 triliun. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kontrak sewa hak guna di tahun 2024.

Right-of-Use Assets

PLN Indonesia Power's right-of-use assets in 2024 amounted to Rp4.67 trillion, a decrease of Rp774.78 billion or 14.23% from Rp5.45 trillion in 2023. This decline was mainly due to a reduction in lease contracts for right-of-use assets in 2024.

Properti Investasi

Properti investasi PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp95,58 miliar, yaitu meningkat Rp1,18 juta atau 1,25% dari tahun 2023 sebesar Rp94,41 miliar. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan surplus revaluasi aset tanah yang mayoritas belum digunakan untuk pembangkitan.

Investment Properties

PLN Indonesia Power's investment properties in 2024 amounted to Rp95.58 billion, an increase of Rp1.18 billion or 1.25% from Rp94.41 billion in 2023. This increase was primarily driven by a revaluation surplus of land assets, most of which have not yet been used for power generation.



Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp9,16 triliun, yaitu meningkat Rp1,33 triliun atau 16,94% dari tahun 2023 sebesar Rp7,84 triliun. Peningkatan tersebut terutama dominan dipengaruhi atas pengakuan porsi laba asosiasi atau *joint venture* senilai Rp1,10 triliun.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp38,61 miliar yaitu, meningkat Rp16,37 juta atau 73,62% dari tahun 2023 sebesar Rp22,24 miliar. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh perhitungan pajak tangguhan Anak Perusahaan.

Pajak Dibayar di Muka - Bagian Tidak Lancar

Pajak dibayar di muka - bagian tidak lancar PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp368,37 miliar, yaitu lebih rendah Rp352,60 miliar atau 48,91% dari tahun 2023 sebesar Rp720,97 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh hasil keputusan pemeriksaan pajak 2023.

Piutang Lain-lain - Bagian Tidak Lancar

Piutang lain-lain - bagian tidak lancar PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp661,28 miliar, yaitu lebih rendah Rp254,19 miliar atau 27,49% dari tahun 2023 sebesar Rp915,47 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pengelompokan piutang jangka panjang ke jangka pendek.

Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp40,91 miliar, yaitu lebih rendah Rp649,00 juta atau 1,56% dari tahun 2023 sebesar Rp41,56 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan adanya *refund* uang jaminan di Anak Perusahaan.

Investment in Associates and Joint Ventures

PLN Indonesia Power's investment in associates and joint ventures in 2024 amounted to Rp9.16 trillion, increasing by Rp1.33 trillion or 16.94% from Rp7.84 trillion in 2023. This increase was predominantly driven by the recognition of the Company's share in the profit of associates or joint ventures amounting to Rp1.10 trillion.

Deferred Tax Assets

PLN Indonesia Power's deferred tax assets in 2024 amounted to Rp38.61 billion, an increase of Rp16.37 billion or 73.62% from Rp22.24 billion in 2023. This increase was primarily driven by deferred tax calculations from Subsidiaries.

Prepaid Taxes - Non-Current Portion

PLN Indonesia Power's prepaid taxes - non-current portion in 2024 amounted to Rp368.37 billion, a decrease of Rp352.60 billion or 48.91% from Rp720.97 billion in 2023. This decrease was mainly due to the outcome of the 2023 tax audit findings.

Other Receivables - Non-Current Portion

PLN Indonesia Power's other receivables - non-current portion in 2024 amounted to Rp661.28 billion, down by Rp254.19 billion or 27.49% from Rp915.47 billion in 2023. This was primarily due to the reclassification of long-term receivables to short-term receivables.

Prepaid Expenses

PLN Indonesia Power's prepaid expenses in 2024 amounted to Rp40.91 billion, a decrease of Rp649.00 million or 1.56% from Rp41.56 billion in 2023. This decline was primarily due to a refund of security deposits at a Subsidiary.

Aset Keuangan dari Proyek Konsesi – Bagian Tidak Lancar

Aset keuangan dari proyek konsesi – bagian tidak lancar PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp899,85 miliar, yaitu lebih rendah Rp129,09 miliar atau 12,55% dari tahun 2023 sebesar Rp1,03 triliun. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya reklas jangka panjang ke jangka pendek aset keuangan dari konsesi untuk anak perusahaan IRP.

Aset Tidak Lancar Lain

Aset tidak lancar lain PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp389,51 miliar, yaitu meningkat Rp111,12 miliar atau 39,92% dari tahun 2023 sebesar Rp278,39 miliar. Peningkatan tersebut dominan atas biaya ditangguhkan proyek baru.

Financial Assets of Concession Project – Non-Current Portion

PLN Indonesia Power's financial assets from concession projects – non-current portion in 2024 amounted to Rp899.85 billion, down by Rp129.09 billion or 12.55% from Rp1.03 trillion in 2023. This decrease was mainly due to the reclassification of long-term to short-term concession financial assets at Subsidiary IRP.

Other Non-Current Assets

PLN Indonesia Power's other non-current assets in 2024 amounted to Rp389.51 billion, an increase of Rp111.12 billion or 39.92% from Rp278.39 billion in 2023. The increase was predominantly due to deferred costs related to new projects.

Liabilitas

Liabilities

Jumlah liabilitas PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp53,95 triliun, yaitu meningkat Rp13,20 triliun atau 32,40% dari tahun 2023 sebesar Rp40,75 triliun. Peningkatan tersebut dominan pada peningkatan liabilitas penyediaan bahan bakar dan meningkatnya liabilitas pajak tangguhan atas perbedaan NPV *Fiscal* dan *Komersial*. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah liabilitas secara keseluruhan.

PLN Indonesia Power's total liabilities in 2024 amounted to Rp53.95 trillion, marking an increase of Rp13.20 trillion or 32.40% from Rp40.75 trillion in 2023. This increase was primarily driven by higher liabilities related to fuel supply and the rise in deferred tax liabilities due to differences between fiscal and commercial NPV calculations. These factors contributed significantly to the overall growth in liabilities.

Tabel Liabilitas

Table of Liabilities

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

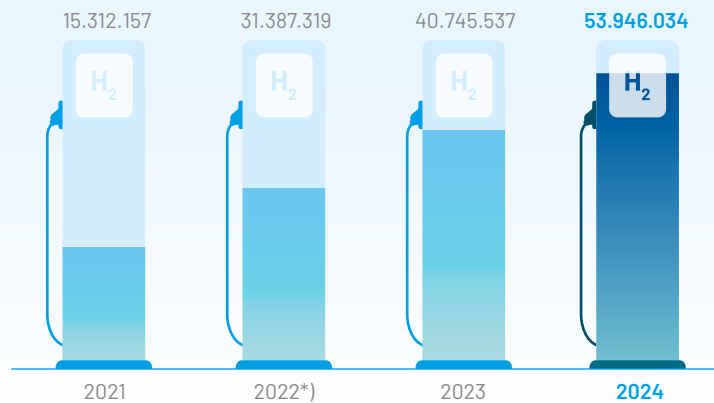
Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Liabilitas jangka pendek Current liabilities	5.894.646	8.155.329	12.620.923	17.311.892	4.690.969	37,17%
Liabilitas jangka panjang Non-current liabilities	9.417.511	23.231.990	28.124.614	36.634.142	8.509.528	30,26%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	15.312.157	31.387.319	40.745.537	53.946.034	13.200.497	32,40%

*) Disajikan kembali As restated

Grafik Liabilitas (Rp juta)

Chart of Liabilities
(Rp million)

*) Disajikan kembali As restated



Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

Liabilitas jangka pendek PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp17,31 triliun, yaitu meningkat Rp4,69 triliun atau 37,17% dari tahun 2023 sebesar Rp12,62 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan suplai bahan bakar untuk produksi listrik dan kurs. Hal ini berdampak pada meningkatnya utang usaha energi primer.

PLN Indonesia Power's current liabilities in 2024 amounted to Rp17.31 trillion, an increase of Rp4.69 trillion or 37.17% from Rp12.62 trillion in 2023. This increase was driven by fuel supply for electricity production and exchange rate fluctuations. These factors led to a rise in trade payables related to primary energy.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek

Table of Current Liabilities

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

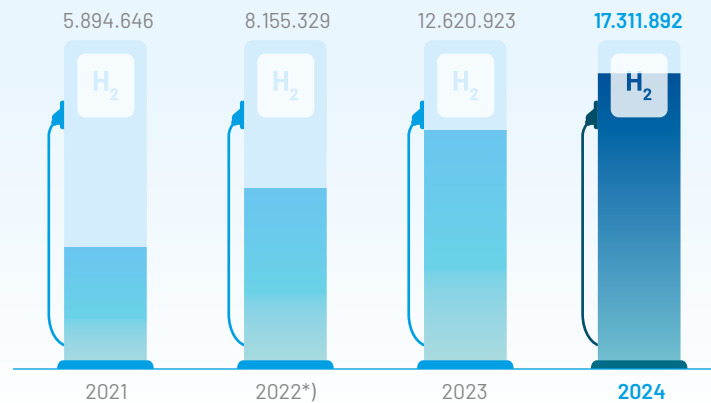
Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Utang usaha Trade payables	3.608.941	5.902.626	9.661.808	13.092.121	3.430.313	35,50%
Utang pajak Taxes payable	349.871	535.898	916.184	2.118.174	1.201.990	131,20%
Beban yang masih harus dibayar Accrued expenses	319.998	279.960	479.540	318.405	(161.135)	(33,60)%
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun Current maturities of long-term liabilities						
Liabilitas sewa Lease liabilities	670.239	453.709	654.594	664.061	9.467	1,45%
Pinjaman dari pemegang saham Loans from a shareholder	254.347	277.929	233.007	369.995	136.988	58,79%
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Short-term employee benefit liabilities	691.250	704.612	675.790	749.136	73.346	10,85%
Utang lain-lain Other Payables	-	595	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	5.894.646	8.155.329	12.620.923	17.311.892	4.690.969	37,17%

*) Disajikan kembali As restated

Grafik Liabilitas (Rp juta)

Chart of Current Liabilities
(Rp million)

*) Disajikan kembali As restated



Utang Usaha

Utang usaha PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp13,09 triliun, yaitu meningkat Rp3,43 triliun atau 35,50% dari tahun 2023 sebesar Rp9,66 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong meningkatnya suplai bahan bakar untuk produksi yang meningkat dan kurs sehingga mengakibatkan hutang energi primer meningkat.

Trade Payables

PLN Indonesia Power's trade payables in 2024 amounted to Rp13.09 trillion, an increase of Rp3.43 trillion or 35.50% from Rp9.66 trillion in 2023. This increase was mainly driven by higher fuel supply for electricity production and exchange rate fluctuations, resulting in higher payables for primary energy.

Utang Pajak

Utang pajak PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp2,12 triliun, yaitu meningkat Rp1,20 triliun atau 131,20% dari tahun 2023 sebesar Rp916,18 miliar. Peningkatan tersebut terutama dominan atas liabilitas pajak tangguhan sebagai akibat deviasi NBV atas biaya penyusutan Aset Fiskal dan komersial.

Taxes Payables

PLN Indonesia Power's tax payables in 2024 amounted to Rp2.12 trillion, an increase of Rp1.20 trillion or 131.20% from Rp916.18 billion in 2023. This increase was primarily due to deferred tax liabilities arising from deviations in NBV between fiscal and commercial asset depreciation.

Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp318,41 miliar, yaitu lebih rendah Rp161,14 miliar atau 33,60% dari tahun 2023 Rp479,54 miliar. Hal tersebut sesuai dengan akrual selesainya pekerjaan atas kegiatan *supporting* di 2024 dengan jatuh tempo pembayaran di 2025.

Accrued Expenses

PLN Indonesia Power's accrued expenses in 2024 amounted to Rp318.41 billion, a decrease of Rp161.14 billion or 33.60% from Rp479.54 billion in 2023. This decrease reflects the completion of supporting activities in 2024, with payments due in 2025.

Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun PLN Indonesia Power terdiri dari liabilitas sewa - bagian jangka pendek, pinjaman dari pemegang saham - bagian jangka pendek, dan liabilitas imbalan kerja - bagian jangka pendek.

Liabilitas sewa - bagian jangka pendek PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp664,06 miliar, yaitu meningkat Rp9,47 miliar atau 1,45% dari tahun 2023 sebesar Rp654,59 miliar. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh penambahan kontrak sewa hak guna di tahun 2024.

Pinjaman dari pemegang saham - bagian jangka pendek PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp370,00 miliar, yaitu meningkat Rp136,99 miliar atau 58,79% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp233,01 miliar. Peningkatan tersebut dipengaruhi adanya penambahan pinjaman di tahun 2024 untuk *project*.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Liabilitas imbalan kerja - bagian jangka pendek PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp749,14 miliar, yaitu meningkat Rp73,35 miliar atau 10,85% dari tahun 2023 sebesar Rp675,79 miliar. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa asumsi dalam perhitungan aktuaria oleh Aktuaris

Liabilitas Jangka Panjang

Non-Current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp36,63 triliun yaitu meningkat Rp8,51 triliun atau 30,26% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp28,12 triliun. Peningkatan tersebut dominan karena terdapat deviasi perhitungan penyusutan aset fiskal dengan aset komersial. Hal ini berdampak pada meningkatnya liabilitas pajak tangguhan.

Current Maturities of Long-term Liabilities

PLN Indonesia Power's current maturities of long-term liabilities consist of short-term portions of lease liabilities, shareholder loans, and employee benefit obligations.

Lease liabilities - current portion of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp664.06 billion, an increase of Rp9.47 billion or 1.45% from 2023 which amounted to Rp654.59 billion. The increase was mainly driven by the addition of right-of-use lease contracts in 2024.

Shareholder loans - current portion of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp370.00 billion, an increase of Rp136.99 billion or 58.79% compared to 2023 which amounted to Rp233.01 billion. The increase was influenced by the addition of loans in 2024 for project purposes.

Short-term Employee Benefit Liabilities

Short-term employee benefit liabilities of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp749.14 billion, an increase of Rp73.35 billion or 10.85% from 2023 which amounted to Rp675.79 billion. The increase was influenced by several assumptions in the actuarial calculation by the Actuary.

Long-term liabilities of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp36.63 trillion, an increase of Rp8.51 trillion or 30.26% compared to 2023 which amounted to Rp28.12 trillion. The increase was mainly due to the deviation in the depreciation calculation between fiscal assets and commercial assets. This resulted in an increase in deferred tax liabilities.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang

Table of Non-Current Liabilities

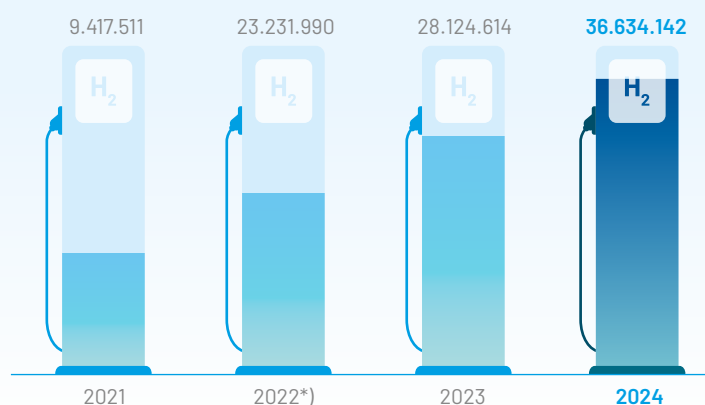
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Liabilitas pajak tangguhan Deferred Tax Liabilities	1.776.220	15.642.571	17.904.528	25.270.943	7.366.415	41,14%
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Long-term liabilities - less: current maturities						
Liabilitas sewa Lease liabilities	2.884.932	2.552.006	4.471.612	3.741.186	(730.426)	(16,33)%
Pinjaman dari pemegang saham Loans from a shareholder	1.292.375	1.134.273	1.526.492	2.816.420	1.289.928	84,50%
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Employee benefit liabilities - non current portion	3.463.984	3.903.140	4.221.982	4.805.593	583.611	13,82%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	9.417.511	23.231.990	28.124.614	36.634.142	8.509.528	30,26%

*) Disajikan kembali As restated

Grafik Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)

Chart of Non-Current Liabilities (Rp million)



*) Disajikan kembali As restated

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas Pajak Tangguhan PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp25,27 triliun, yaitu meningkat Rp7,37 miliar atau 41,14% dari tahun 2023 sebesar Rp17,90 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh deviasi NBV dalam perhitungan penyusutan aset fiskal dengan aset komersial.

Deferred Tax Liabilities

Deferred tax liabilities of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp25.27 trillion, an increase of Rp7.37 trillion or 41.14% from Rp17.90 trillion in 2023. The increase was mainly driven by the deviation in NBV in the depreciation calculation between fiscal and commercial assets.

Liabilitas Jangka Panjang – setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Liabilitas Jangka Panjang – setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun PLN Indonesia Power terdiri dari liabilitas sewa – bagian jangka panjang, pinjaman dari pemegang saham – bagian jangka panjang, dan liabilitas imbalan kerja – bagian jangka panjang.

Liabilitas sewa – bagian jangka panjang PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp3,74 triliun, yaitu lebih rendah Rp730,43 miliar atau 16,33% dari tahun 2023 sebesar Rp4,47 triliun. Hal tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya kontrak baru atas sewa aset hak guna di tahun 2024.

Pinjaman dari pemegang saham – bagian jangka panjang PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp2,82 triliun, yaitu meningkat Rp1,29 triliun atau 84,50% dari tahun 2023 sebesar Rp1,53 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh penambahan pinjaman ditahun 2024 untuk *project*.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja – bagian jangka panjang PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp4,81 triliun, yaitu meningkat Rp583,61 miliar atau 13,82% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4,22 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh beberapa asumsi perhitungan aktuarial oleh aktuaris.

Ekuitas Equity

Jumlah ekuitas PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp373,39 triliun yaitu meningkat Rp27,94 triliun atau 8,09% dari tahun 2023 sebesar Rp345,46 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan laba tahun 2024 dan surplus revaluasi aset tetap.

Long-term Liabilities – Less: Current Maturities

Long-term liabilities – less current maturities of PLN Indonesia Power consist of lease liabilities – non-current portion, shareholder loans – non-current portion, and long-term employee benefit liabilities – non-current portion.

Lease liabilities – non-current portion of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp3.74 trillion, a decrease of Rp730.43 billion or 16.33% from Rp4.47 trillion in 2023. The decrease was mainly due to new lease contracts for right-of-use assets in 2024.

Loans from a shareholder – non-current portion of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp2.82 trillion, an increase of Rp1.29 trillion or 84.50% from Rp1.53 trillion in 2023. The increase was mainly driven by additional loans in 2024 for projects.

Employee Benefit Liabilities – Non-Current Portion

Employee benefit liabilities – non-current portion of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp4.81 trillion, an increase of Rp583.61 billion or 13.82% compared to Rp4.22 trillion in 2023. The increase was primarily driven by several actuarial assumptions applied by the actuary.

Total equity of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp373.39 trillion, an increase of Rp27.94 trillion or 8.09% from Rp345.46 trillion in 2023. This increase was primarily driven by the rise in 2024 net income and the surplus from the revaluation of fixed assets.

Tabel Ekuitas

Table of Equity

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)(in million Rupiah, unless otherwise stated)

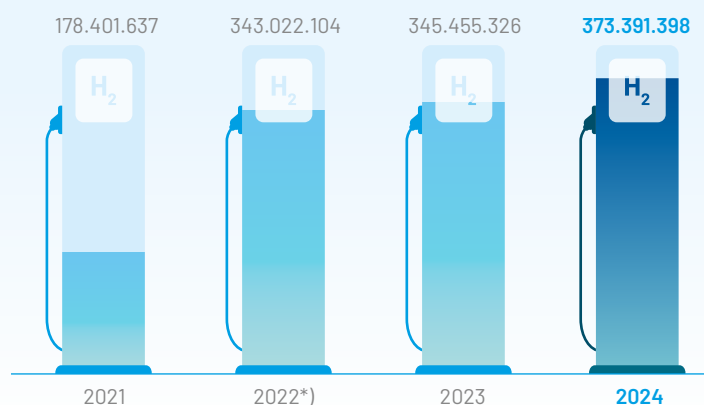
Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Modal saham Capital stock	2.607.824	2.607.824	178.582.817	178.582.817	-	-
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	5.513.843	5.513.843	(119.868.272)	(119.868.272)	-	-
Ekuitas entitas restrukturisasi Equity of restructured entities	-	2.607.824	-	-	-	-
Saldo Laba Retained earnings						
Ditentukan penggunaannya Appropriated	2.122.213	2.122.213	2.122.213	2.122.213	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya Unappropriated	28.844.407	30.576.503	33.354.404	39.055.406	5.701.002	17,09%
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income	139.227.406	251.520.430	251.168.984	273.401.052	22.232.068	8,85%
Ekuitas yang dapat diatribusikan Equity attributable to						
Kepada pemilik entitas induk Owners of the parent	178.315.693	342.933.691	345.360.146	373.293.216	27.933.070	8,09%
Kepentingan non pengendali Non-controlling interest	85.944	88.413	95.180	98.182	3.002	3,15%
Jumlah Ekuitas Total of Equity	178.401.637	343.022.104	345.455.326	373.391.398	27.936.072	8,09%

*) Disajikan kembali As restated

Grafik Ekuitas (Rp juta)

Chart of Equity (Rp million)

*) Disajikan kembali As restated



Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp373,29 triliun, yaitu meningkat Rp27,93 triliun atau 8,09% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp345,36, triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh penambahan laba sebesar 38,07% dari tahun 2023.

Equity Attributable to Owners of the Parent

Equity attributable to owners of the parent of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp373.29 trillion, an increase of Rp27.93 trillion or 8.09% compared to Rp345.36 trillion in 2023. The increase was mainly driven by a 38.07% rise in profit from 2023.



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

Laba tahun berjalan PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp13,10 triliun, yaitu meningkat Rp4,91 triliun atau 59,91% dari tahun 2023 sebesar Rp8,19 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan kWh *Sales* dan Efisiensi Biaya usaha *Fixed cost*. Hal ini berdampak pada penurunan Biaya Pokok Produksi (BPP).

Profit for the year of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp13.10 trillion, an increase of Rp4.91 trillion or 59.91% from Rp8.19 trillion in 2023. This increase was primarily driven by the rise in kWh sales and efficiency in fixed operating costs. This resulted in a reduction in Production Cost (BPP).

Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Table of Consolidated Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

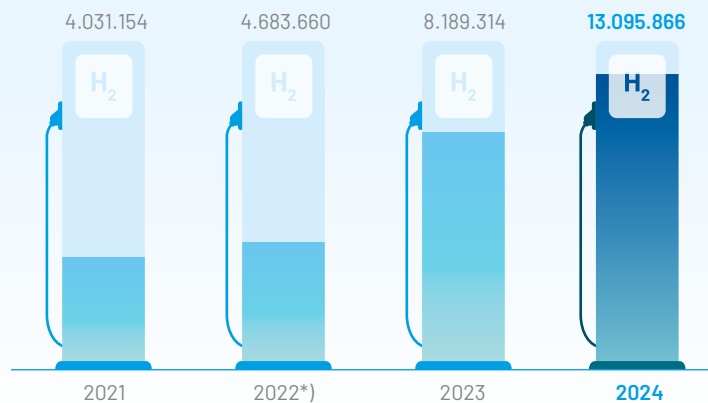
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Pendapatan usaha Revenue	38.519.859	81.090.566	103.480.111	110.577.056	7.096.945	6,86%
Beban usaha Operating expenses	32.429.534	73.052.127	83.553.102	93.695.863	10.142.761	12,14%
Laba usaha Operating income	6.090.325	8.038.439	19.927.009	16.881.193	(3.045.816)	(15,28)%
Pendapatan (beban) lain-lain Other income/(expenses)	(181.014)	(225.941)	(9.246.023)	(117.767)	9.128.256	(98,73)%
Laba sebelum pajak Profit before tax	5.909.311	7.812.498	10.680.986	16.763.426	6.082.440	56,95%
Beban pajak penghasilan Income tax expense	(1.878.157)	(3.128.838)	(2.491.672)	(3.667.560)	(1.175.888)	47,19%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	4.031.154	4.683.660	8.189.314	13.095.866	4.906.552	59,91%
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Other comprehensive income for the year	646.237	1.226.472	9.055	22.779.456	22.770.401	251.467,71%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	4.677.391	5.910.132	8.198.369	35.875.322	27.676.953	337,59%
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada: Profit for the year attributable to:						
Pemilik entitas induk Owners of the parents	4.027.169	4.678.605	8.176.665	13.090.663	4.913.998	60,10%
Kepentingan non pengendali Non-controlling interest	3.985	5.055	12.649	5.203	(7.446)	(58,87)%

Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada: Total comprehensive income for the year attributable to:						
Pemilik entitas induk Owners of the parents	4.673.406	5.905.077	8.185.720	35.870.070	27.684.350	338,20%
Kepentingan non pengendali Non-controlling interest	3.985	5.055	12.649	5.252	(7.397)	(58,48)%
Laba per lembar saham (Rp penuh) Basic Earnings per share (in Rupiah full amount)	3.985	5.055	12.649	5.252	(7.397)	(58,48)%

*) Disajikan kembali As restated

Grafik Laba Tahun Berjalan (Rp juta)
Chart of Profit for the Year
(Rp million)



*) Disajikan kembali As restated

Pendapatan Usaha Revenue

Pendapatan Usaha PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp110,58 triliun, yaitu meningkat Rp7,10 triliun atau 6,86% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp103,48 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya kWh Sales dan efisiensi biaya usaha (*fixed cost*). Hal ini berdampak pada penurunan Biaya Pokok Produksi sehingga meningkatkan Laba Usaha

Revenue of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp110.58 trillion, an increase of Rp7.10 trillion or 6.86% compared to Rp103.48 trillion in 2023. This increase was primarily driven by the growth in kWh sales and efficiency in operating costs (*fixed cost*). This resulted in a reduction in Production Cost, thereby increasing operating profit.



Tabel Pendapatan Usaha

Table of Revenue

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

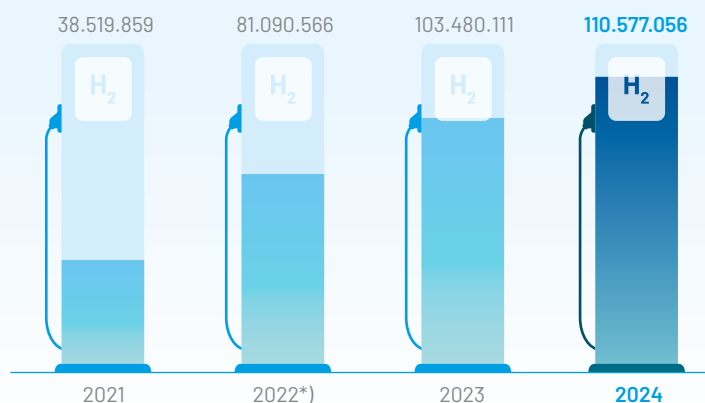
Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Penjualan tenaga listrik Sales of electricity	19.907.755	64.371.392	101.934.634	108.706.764	6.772.130	6,64%
Pendapatan dari konsesi jasa Revenue of service concession	14.656.755	15.541.932	268.658	256.344	(12.314)	(4,58)%
Pendapatan O&M lain-lain Other O&M revenue	3.955.349	1.177.242	1.276.819	1.613.948	337.129	26,40%
Jumlah Pendapatan Usaha Total of Revenue	38.519.859	81.090.566	103.480.111	110.577.056	7.096.945	6,86%

*) Disajikan kembali As restated

Grafik Pendapatan Usaha (Rp juta)

Chart of Revenue
(Rp million)

*) Disajikan kembali As restated



Beban Usaha Operating Expense

Beban Usaha PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp93,70 triliun, yaitu meningkat Rp10,14 triliun 12,14% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp83,55 triliun. Peningkatan tersebut dominan karena kenaikan harga rata-rata energi primer batubara dari Rp969/kg menjadi Rp1.017/kg dan kenaikan harga rata-rata gas dari Rp119.331/mmbtu menjadi Rp128.318/mmbtu. Hal ini berdampak pada kenaikan beban bahan bakar dan beban usaha secara keseluruhan.

Operating expenses of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp93.70 trillion, an increase of Rp10.14 trillion or 12.14% compared to Rp83.55 trillion in 2023. This increase was primarily driven by the rise in the average price of primary energy, with coal increasing from Rp969/kg to Rp1,017/kg and gas increasing from Rp119,331/mmbtu to Rp128,318/mmbtu. This resulted in higher fuel costs and an overall increase in operating expenses.

Tabel Beban Usaha

Table of Operating Expense

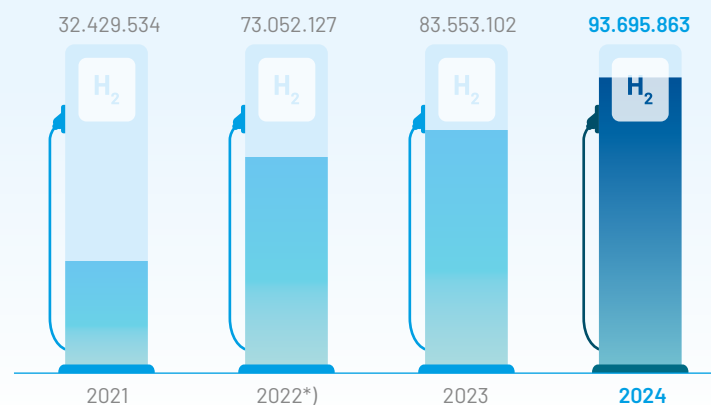
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Bahan bakar dan pelumas Fuel and lubricants	10.897.344	43.082.162	61.558.594	69.500.760	7.942.166	12,90%
Penyusutan aset tetap Property, plant, and equipment depreciation	2.919.112	9.284.941	10.719.996	11.241.448	521.452	4,86%
Perbaikan dan pemeliharaan Repairs and maintenance	3.172.566	3.654.670	4.567.747	5.157.939	590.192	12,92%
Kepegawaian Personnel	2.253.410	2.595.486	4.027.567	4.327.907	300.340	7,46%
Pembelian tenaga listrik Purchased electricity	208.311	221.103	910.320	988.634	78.314	8,60%
Penyusutan aset hak guna Right-of-use assets depreciation	725.525	773.739	775.807	758.449	(17.358)	(2,24)%
Konsesi jasa Service concession	11.784.1157	12.850.208	244.974	268.412	23.438	9,57%
Sewa Leases	58.283	94.207	87.643	121.048	33.405	38,11%
Lain-lain Others	410.826	495.611	660.454	1.331.266	670.812	101,57%
Jumlah Beban Usaha Total of Operating Expenses	32.429.534	73.052.127	83.553.102	93.695.863	10.142.761	12,14%

*) Disajikan kembali As restated

Grafik Beban Usaha (Rp juta)

Chart of Operating
Expense (Rp million)



*) Disajikan kembali As restated

Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income/(Expenses)

Beban lain-lain PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp117,77 miliar, yaitu lebih rendah Rp9,13 triliun atau 98,73% dari tahun 2023 sebesar Rp9,2 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh keuntungan kurs mata uang asing di tahun 2024 dan juga tidak ada kerugian atas konsesi jasa PLTU Suralaya 1-7 seperti di tahun 2023. Hal ini berdampak pada beban luar operasi lebih rendah.

Other expenses of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp117.77 billion, significantly lower by Rp9.13 trillion or 98.73% compared to Rp9.2 trillion in 2023. This improvement was mainly driven by foreign exchange gains in 2024 and the absence of losses from the Suralaya 1-7 SPP concession, which occurred in 2023. This resulted in significantly lower non-operating expenses.

Tabel Pendapatan (Beban) Lain-lain

Table of Other Income/(Expenses)

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Penghasilan keuangan Financial income	82.196	161.821	162.383	201.248	38.865	23,93%
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih Gains (losses) on foreign exchange	21.025	(44.064)	(19.652)	75.327	94.979	483,30%
Beban keuangan Finance costs	(467.733)	(663.924)	(494.649)	(503.855)	(9.206)	1,86%
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama Share in net income of associates and joint ventures	445.809	790.185	1.110.846	1.035.267	(75.579)	(6,80)%
Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi Gain on sales of assets not used in operations	5.444	4.519	4.228	-	(4.228)	(100,00)%
Kerugian atas penghentian aset keuangan konsesi jasa Loss on derecognition of financial assets of service concession	-	-	(9.349.721)	-	9.349.721	100,00%
Lain-lain - bersih Others - net	(267.754)	(474.478)	(659.458)	(925.754)	(266.296)	40,38%
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Total Other Income/(Expenses)	(181.014)	(225.941)	(9.246.23)	(117.767)	9.128.256	(98,73)%

*) Disajikan kembali As restated

Laba Sebelum Pajak

Profit Before Tax

Laba sebelum pajak PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp16,76 triliun, yaitu meningkat Rp6,08 triliun atau 56,95% dari tahun 2023 sebesar Rp10,68 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan kWh *Sales* dan efisiensi biaya usaha. Hal ini berdampak pada Biaya Pokok Produksi lebih rendah dari tahun 2023.

Profit before tax of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp16.76 trillion, an increase of Rp6.08 trillion or 56.95% from Rp10.68 trillion in 2023. This increase was mainly driven by higher kWh sales and operational cost efficiency. This resulted in a lower Production Cost compared to 2023.

Beban Pajak Penghasilan

Income Tax Expenses

Beban pajak penghasilan PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp3,67 triliun, yaitu meningkat Rp1,18 miliar atau 47,19% dari tahun 2023 sebesar Rp2,49 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan laba sebelum pajak tahun 2024 karena peningkatan kWh jual. Hal ini berdampak pada perhitungan pajak badan yang lebih besar dari tahun 2023.

Income tax expenses of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp3.67 trillion, an increase of Rp1.18 trillion or 47.19% from Rp2.49 trillion in 2023. This increase was primarily due to the rise in profit before tax in 2024, driven by higher kWh sales. This led to a higher corporate income tax calculation than in 2023.

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak

Other Comprehensive Income/(Expenses) for the Year after Tax

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp22,78 triliun, yaitu meningkat Rp22,77 triliun atau 251.467,71% dari tahun 2023 sebesar Rp9,06 miliar. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh revaluasi aset tetap. Hal ini berdampak pada adanya surplus atas NBV baru hasil revaluasi yang dikeluarkan oleh KJPP.

Other comprehensive income of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp22.78 trillion, an increase of Rp22.77 trillion or 251,467.71% from Rp9.06 billion in 2023. This increase was mainly driven by the revaluation of fixed assets. This resulted in a surplus from the new NBV based on the valuation issued by KJPP.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Comprehensive Income for the Year

Penghasilan komprehensif tahun berjalan PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp35,88 triliun, yaitu meningkat Rp27,68 triliun atau 337,59% dari tahun 2023 sebesar Rp8,20 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan laba tahun berjalan. Hal ini berdampak pada kenaikan laba yang didistribusikan ke entitas induk.

Comprehensive income of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp35.88 trillion, an increase of Rp27.68 trillion or 337.59% from Rp8.20 trillion in 2023. This increase was primarily due to the rise in profit for the year. This led to a higher profit distributed to the parent entity.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statements of Cash Flows

Arus kas Perusahaan terdiri dari aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Kas dan setara kas pada akhir tahun PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp4,57 triliun, yaitu meningkat Rp1,03 triliun atau 29,24% dari tahun 2023 sebesar Rp3,54 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan perolehan kas dari aktivitas operasi dan pendanaan.

Hal tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

The Company's cash flows consist of operating activities, investing activities, and financing activities. Cash and cash equivalents at the end of 2024 for PLN Indonesia Power amounted to Rp4.57 trillion, an increase of Rp1.03 trillion or 29.24% from Rp3.54 trillion in 2023. This increase was mainly driven by increase in cash inflows from operating and financing activities.

This has an impact on increasing the Company's ability to meet short-term obligations.

Tabel Arus Kas

Table of Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Net cash generated from operating activities	2.679.222	9.722.485	5.352.459	6.368.191	1.015.732	18,98%
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Net cash used in investing activities	(2.420.998)	(4.665.522)	(5.158.646)	(5.813.160)	(654.514)	12,69%
Kas bersih diperoleh/ (digunakan) untuk aktivitas pendanaan Net cash generated/ (used) in financing activities	(150.591)	(4.179.624)**)	(339.085)	469.136	808.221	238,35%
Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase/ (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	107.633	877.339	(145.272)	1.024.167	1.169.439	805,00%
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun Balance of Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	2.650.785	2.766.128	3.682.111	3.535.896	(146.215)	(3,97)%
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Balance of Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	2.166.128	3.682.111	3.535.896	4.569.811	1.033.915	29,24%

*) Disajikan kembali

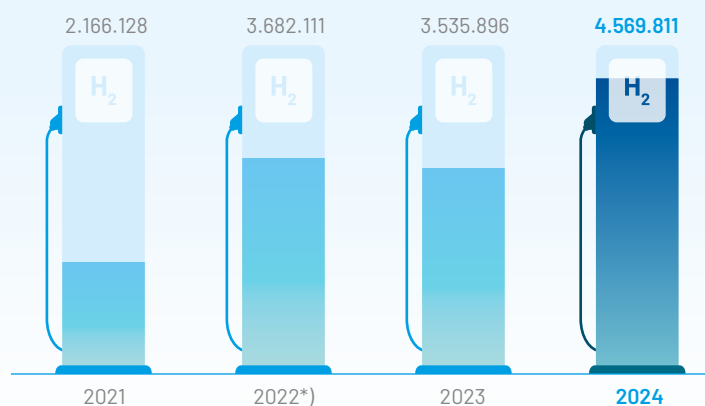
**) Kas *pooling* untuk pendanaan umum timbul sehubungan dengan seolah-olah adanya arus kas dari pengalihan kegiatan usaha pembangkitan listrik

*) As restated

**) Cash pooling for general funding activities arise in connection with as if there was cash flows from power generation business transferred

Grafik Saldo Kas dan Setara Kas (Rp juta)

Chart of Balance of Cash and Cash Equivalents (Rp million)



*) Disajikan kembali As restated

Arus Kas Aktivitas Operasi

Cash Flow from Operating Activities

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp6,37 triliun, yaitu meningkat Rp1,02 triliun atau 18,98% dari tahun 2023 sebesar Rp5,35 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Net cash generated from operating activities of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp6.37 trillion, an increase of Rp1.02 trillion or 18.98% from 2023, which amounted to Rp5.35 trillion. This increase was mainly driven by the rise in cash receipts from customers.

Tabel Kas dari Aktivitas Operasi

Table of Cash from Operating Activities

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	27.285.066	71.403.731	55.977.194	68.592.406	12.615.212	22,54%
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan Cash paid to suppliers and employees	(24.046.283)	(61.416.940)	(50.515.338)	(61.852.742)	(11.337.404)	22,44%
Penerimaan restitusi pajak Cash receipts for taxes	463.109	749.293	554.537	473.457	(81.080)	(14,62)%
Penerimaan bunga Interest received	82.196	102.257	145.593	177.667	32.074	22,03%
Pembayaran bunga Interest expense paid	(478.769)	(760.979)	(567.431)	(498.186)	69.245	(12,20)%
Pembayaran pajak penghasilan Income tax paid	(508.841)	(304.473)	(191.974)	(498.816)	(306.842)	159,84%
Pembayaran surat ketetapan pajak Payment of tax assessment letters	(117.256)	(50.404)	(50.122)	(25.595)	24.527	(48,93)%
Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi Net cash provided from operating activities	2.679.222	9.722.485	5.352.459	6.368.191	1.015.732	18,98%

*) Disajikan kembali As restated

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Net Cash Flows from Investing Activities

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar Rp5,81 triliun, yaitu meningkat Rp654,51 miliar atau 12,69% dari tahun 2023 sebesar Rp5,16 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya peningkatan perolehan aset tetap, aset tidak lancar lain, serta pada penyertaan modal pada entitas ventura bersama.

Net cash used in investing activities of PLN Indonesia Power in 2024 amounted to Rp5.81 trillion, an increase of Rp654.51 billion or 12.69% from 2023, which amounted to Rp5.16 trillion. This increase was mainly driven by the rise in the acquisition of fixed assets, other non-current assets, as well as investments in joint venture entities.

Tabel Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Table of Cash Used in Investing Activities

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Perolehan aset tetap Additions of property, plant, and equipment	(2.580.801)	(4.808.471)	(5.238.416)	(5.761.059)	(522.643)	9,98%
Penambahan piutang pihak berelasi Additions of Receivables from Related Parties	-	(35.809)	(3.836)	(7.092)	(3.256)	84,88%
Perolehan aset tidak lancar lain Additions of other non-current assets	-	(20.453)	(76.213)	(216.788)	(140.575)	184,45%
Perolehan investasi efek beragunan aset Purchase of investment in asset-backed securities	95.000	95.000	-	-	-	-
Perolehan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama Proceeds from dividends of associates and joint ventures	-	44.586	67.836	126.012	58.176	85,76%
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi Receipts of loan from related parties	97.474	53.989	118.755	94.621	(24.134)	(20,32)%
Hasil penjualan tidak digunakan dalam operasi Proceeds from sales of assets not used in operations	5.444	4.519	4.228	-	(4.228)	(100,00)%
Hasil dari penjualan kepemilikan atas entitas ventura bersama Proceeds from the sale of ownership in a joint venture entity	-	-	-	101.476	101.476	100,00%
Penarikan kas yang dibatasi penggunaannya Withdrawal of restricted cash in bank	-	1.117	-	-	-	-
Penyertaan modal pada entitas ventura bersama Capital subscription in joint ventures	(38.115)	-	(31.000)	(150.330)	(119.330)	384,94%
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(2.420.998)	(4.665.522)	(5.158.646)	(5.813.160)	(654.514)	12,69%

*) Disajikan kembali As restated

Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Cash Flows from Financing Activities

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp469,14 miliar dan sedangkan kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp339,09 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan pinjaman dari Pemegang Saham.

Net cash generated from financing activities in 2024 amounted to Rp469.14 billion, while net cash used for financing activities in 2023 was Rp339.09 billion. This was primarily due to the receipt of loans from the Shareholders.

Tabel Kas dari Aktivitas Pendanaan

Table of Cash from Financing Activities

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
Pembayaran liabilitas sewa Payments of lease liabilities	(637.138)	(721.324)	(684.427)	(885.285)	(200.858)	29,35%
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham Proceeds from loans from a shareholder	739.395	-	618.262	1.631.013	1.012.751	163,81%
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham Loan repayments from a shareholder	(252.848)	-	(272.920)	(276.592)	(3.672)	1,35%
Kas <i>pooling</i> untuk pendanaan umum Cash pooling for general funding activities	-	(3.185.415)	-	-	-	-
Kas Bersih Diperoleh/ (Digunakan) untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Generated from/ (used for) Financing Activities	(150.591)	(4.179.624)	(339.085)	469.136	808.221	238,35%

*) Disajikan kembali As restated



Kemampuan Membayar Utang, Kolektibilitas Piutang dan Rasio Keuangan Lainnya

Debt Service Ability, Receivables Collectability, and Other Financial Ratios

Kemampuan Membayar Utang Debt Service Ability

Penilaian atas kemampuan Perusahaan dalam membayar utangnya dapat ditunjukkan dengan indikator rasio solvabilitas dan likuiditas sebagaimana dijelaskan sebagai berikut

The Company's ability in paying its debts is indicated by the solvency and liquidity ratios as explained below.

Rasio Solvabilitas Solvency Ratios

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan Perusahaan membayar kewajiban jangka panjang maupun seluruh utangnya. Rasio ini terdiri dari *Debt to Total Assets Ratio* (Rasio Utang terhadap Aset) dan *Debt to Total Equity Ratio* (Rasio Utang terhadap Modal). Semakin kecil nilai rasionya menunjukkan semakin kecil kewajiban yang harus dipenuhi oleh

The solvency ratio is used to assess the Company's ability to meet its long-term obligations or total liabilities. This ratio consists of the Debt to Total Assets Ratio and the Debt to Total Equity Ratio. The smaller the ratio value indicates the smaller the obligations that must be fulfilled by ...

Tabel Solvabilitas

Table of Solvency

Uraian Description	(dalam %)(in %)				
	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024
Rasio Utang terhadap Aset (DAR) Debt to Total Assets Ratio (DAR)	7,90	8,38	10,55	12,62	19,65
Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER) Debt to Total Equity Ratio (DER)	8,58	9,15	11,79	14,45	22,49

*) Disajikan kembali As restated



Rasio Utang terhadap Aset

Debt to Total Assets Ratio

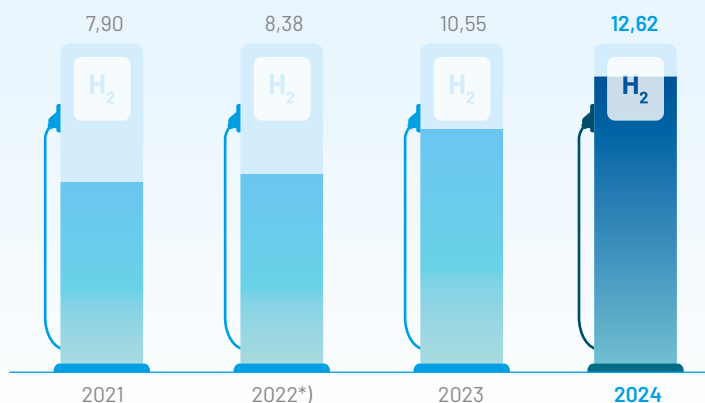
Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian aset yang digunakan dalam menjamin keseluruhan kewajiban atau utang. Nilai rasio utang terhadap aset Perusahaan PLN Indonesia Power pada tahun 2024 adalah sebesar 12,62% yaitu, meningkat 19,65% dari tahun 2023 sebesar 10,55%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan jumlah liabilitas yang diakibatkan adanya kenaikan liabilitas penyediaan bahan bakar dan liabilitas pajak tangguhan.

This ratio is used to measure the portion of assets used to guarantee overall liabilities or debt. The debt to total assets ratio of PLN Indonesia Power in 2024 was 12.62%, an increase of 19.65% from 10.55% in 2023. This increase was primarily driven by the rise in liabilities, resulting from the increase in fuel supply liabilities and deferred tax liabilities.

Grafik Rasio Utang terhadap Aset (%)

Chart of Debt to Total Assets Ratio (%)

*) Disajikan kembali As restated



Rasio Utang terhadap Ekuitas

Debt to Total Equity Ratio

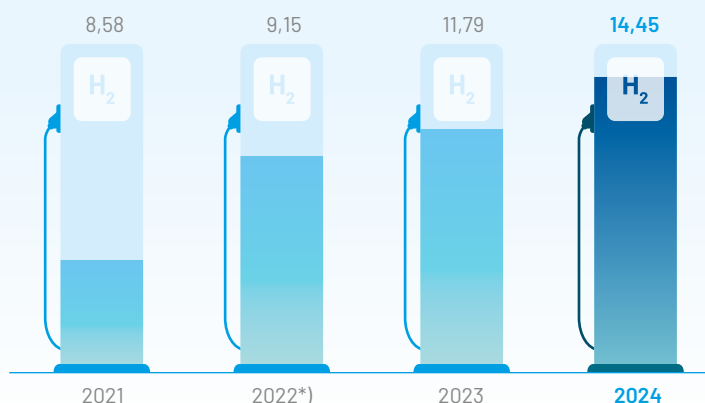
Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian ekuitas yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan kewajiban atau utang. Nilai rasio utang terhadap ekuitas PLN Indonesia Power lebih pada tahun 2024 adalah sebesar 14,45%, yaitu meningkat 22,49% dari tahun 2023 sebesar 11,79%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan jumlah liabilitas yang diakibatkan adanya kenaikan liabilitas penyediaan bahan bakar dan liabilitas pajak tangguhan.

This ratio is used to measure the portion of equity used as collateral for total liabilities or debt. The debt to equity ratio of PLN Indonesia Power in 2024 was 14.45%, an increase of 22.49% from 11.79% in 2023. This increase was primarily driven by the rise in liabilities, resulting from the increase in fuel supply liabilities and deferred tax liabilities.

Grafik Rasio Utang terhadap Ekuitas (%)

Chart of Debt to Total Equity Ratio (%)

*) Disajikan kembali As restated



Rasio Likuiditas

Liquidity Ratio

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya yang terdiri dari *Cash Ratio* (Rasio Kas), *Quick Ratio* (Rasio Cepat) dan *Current Ratio* (Rasio Lancar). Semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut, maka mengindikasikan bahwa Perusahaan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo. Rasio likuiditas Perusahaan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Liquidity ratios are used to measure the Company's ability to meet its short-term obligations. These ratios include the Cash Ratio, Quick Ratio, and Current Ratio. The higher these ratios, the more capable the Company is in meeting its maturing obligations. The Company's liquidity ratios are presented in the following table.

Tabel Likuiditas

Table of Liquidity

(dalam %)(in %)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024
Rasio Kas Cash Ratio	46,93	45,15	28,02	26,40	(5,78)
Rasio Cepat Quick Ratio	557,23	414,12	450,90	438,46	(2,76)
Rasio Lancar Current Ratio	580,73	475,13	492,76	468,21	(4,98)

*) Disajikan kembali As restated

Rasio Kas

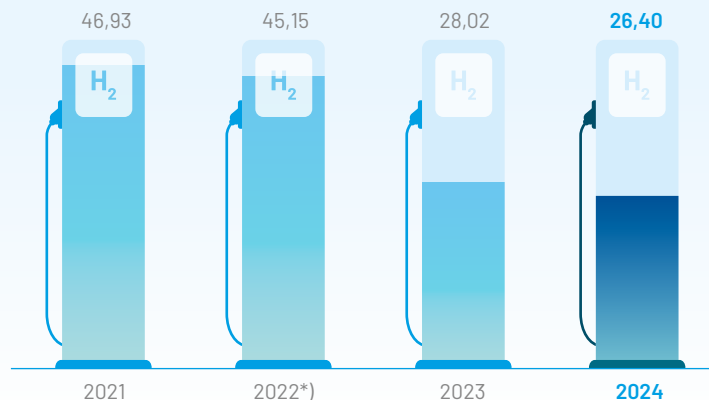
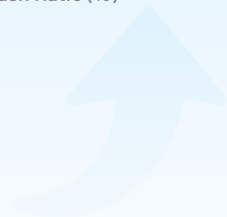
Cash Ratio

Rasio kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan kas. Nilai rasio kas PLN Indonesia Power pada tahun 2024 adalah sebesar 26,40%, yaitu lebih rendah 5,78% dari tahun 2023 sebesar 28,02%. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan liabilitas lancar pada pos utang usaha yang lebih signifikan dibandingkan dengan kenaikan kas dan setara kas.

The cash ratio is used to measure the Company's ability to meet its immediate obligations using cash. PLN Indonesia Power's cash ratio in 2024 was 26.40%, a decrease of 5.78% from 28.02% in 2023. This decline was mainly influenced by increase in current liabilities from trade payables which is more significant compared to the increase in cash and cash equivalents.

Grafik Rasio Kas (%)

Chart of Cash Ratio (%)



*) Disajikan kembali As restated



Rasio Cepat

Quick Ratio

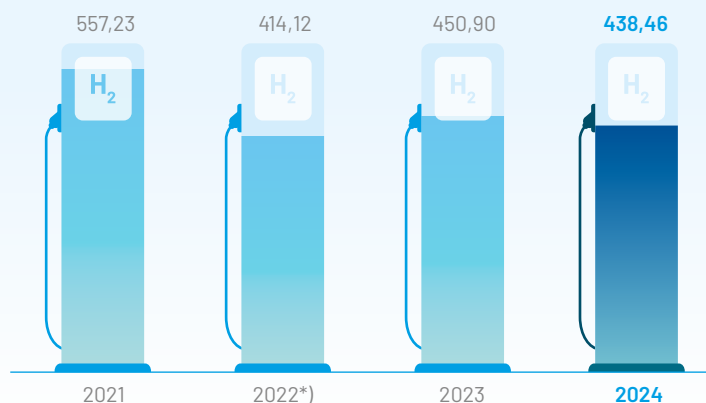
Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui aset lancar Perusahaan di luar persediaan diukur menggunakan rasio cepat. Nilai rasio cepat PLN Indonesia Power pada tahun 2024 adalah sebesar 438,46%, yaitu lebih rendah 2,76% dari tahun 2023 sebesar 450,90%. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya liabilitas jangka pendek sebesar 42% dari tahun 2023.

The Company's ability to meet its short-term obligations using current assets excluding inventories is measured by the quick ratio. PLN Indonesia Power's quick ratio in 2024 was 438.46%, a decrease of 2.76% from 450.90% in 2023. This was mainly influenced by an increase in current liabilities of 42% from that of 2023.

Grafik Rasio Cepat (%)

Chart of Quick Ratio (%)

*) Disajikan kembali As restated



Rasio Lancar

Current Ratio

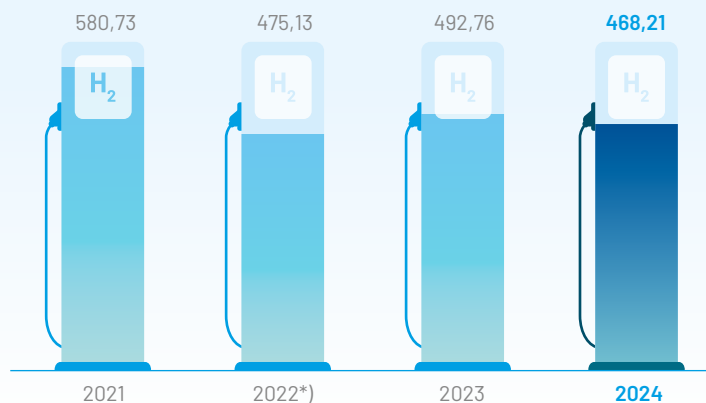
Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui seluruh aset lancar yang dimilikinya diukur menggunakan rasio lancar. Nilai rasio lancar PLN Indonesia Power pada tahun 2024 adalah sebesar 468,21%, yaitu lebih rendah 4,98% dari tahun 2023 sebesar 492,76%. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan liabilitas jangka pendek dari tahun lalu, lebih tinggi dari kenaikan aset lancarnya.

The Company's ability to meet its short-term obligations using all its current assets is measured by the current ratio. PLN Indonesia Power's current ratio in 2024 was 468.21%, a decrease of 4.98% from 492.76% in 2023. This was mainly influenced by the increase in current liabilities from that of last year, which was higher than the increase in current assets.

Grafik Rasio Lancar (%)

Chart of Current Ratio (%)

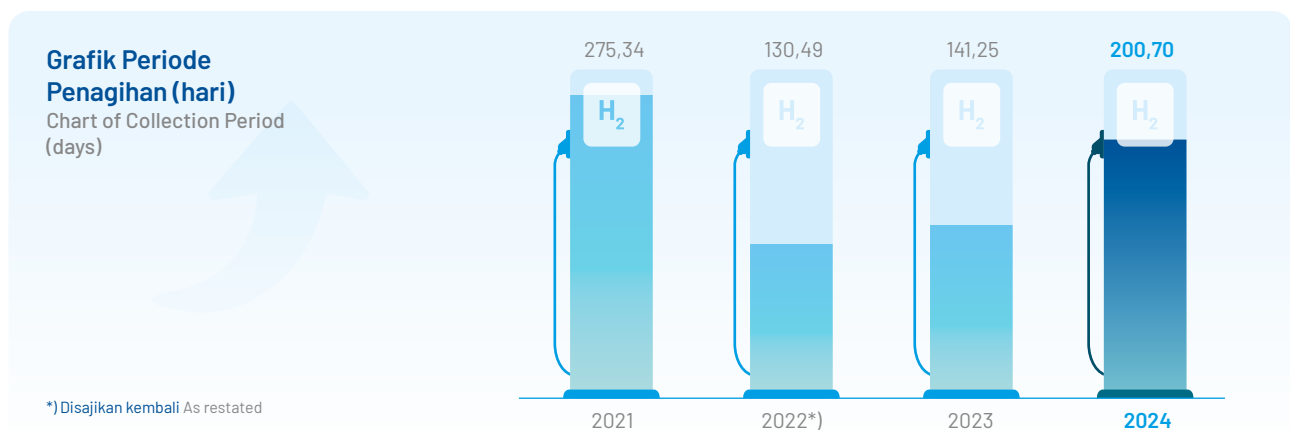
*) Disajikan kembali As restated



Kolektibilitas Piutang Receivables Collectability

Tingkat kolektibilitas piutang (periode penagihan) digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutang. Nilai periode penagihan PLN Indonesia Power tahun 2024 adalah selama 200,70 hari, yaitu lebih lama 59,45 hari dari tahun 2023 yaitu 141,25 hari. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan piutang usaha yang signifikan karena kenaikan penjualan tenaga listrik.

Receivables collectability rate (collection period) measures the Company's ability in collecting receivables. PLN Indonesia Power's collection period in 2024 was 200.70 days, which was 59.45 days slower than in 2023, which stood at 141.25 days. This was mainly influenced by a significant increase in trade receivable due to the increased sales of electricity.



Rasio Keuangan Lainnya Other Financial Ratios

Selain kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban dan kemampuan dalam periode penagihan piutang, terdapat rasio-rasio keuangan penting lainnya sebagai berikut:

In addition to the Company's ability to fulfill its obligations and the receivables collection period, there are other key financial ratios as follows:

Rasio Profitabilitas Profitability Ratios

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba diukur menggunakan rasio-rasio profitabilitas yang terdiri dari *Return on Equity* (Tingkat Pengembalian Modal), *Return on Investment* (Tingkat Pengembalian Investasi), *Return on Asset* (Tingkat Pengembalian Aset), *Operating Profit Margin* (Margin Operasi), dan *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih). Rasio profitabilitas Perusahaan ditunjukkan dalam tabel berikut.

The Company's ability to generate profits is measured using profitability ratios, which include Return on Equity (ROE), Return on Investment (ROI), Return on Assets (ROA), Operating Profit Margin, and Net Profit Margin. The Company's profitability ratios are presented in the following table.

Tabel Rasio Profitabilitas

Table of Profitability Ratios

(dalam %)(in %)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024
Margin Operasi Operating Profit Margin	15,81	9,91	19,26	15,27	(20,72)
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	10,47	5,78	7,91	11,84	49,65
Tingkat Pengembalian Ekuitas Return on Equity (ROE)	2,31	1,38	2,43	3,51	44,44
Tingkat Pengembalian Investasi Return on Investment (ROI)	4,80	4,74	8,12	7,07	12,93
Tingkat Pengembalian Aset Return on Asset (ROA)	2,08	1,25	2,12	3,06	44,52

*) Disajikan kembali As restated

Margin Operasi

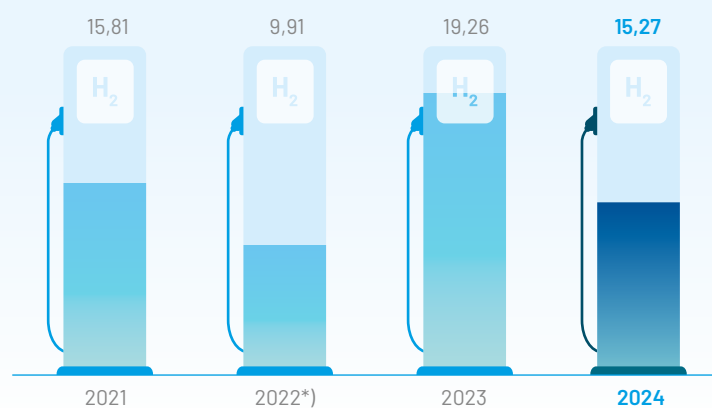
Operating Profit Margin

Merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi yang dihasilkan dari penjualannya. Margin operasi PLN Indonesia Power tahun 2024 adalah sebesar 15,27%, yaitu lebih rendah 20,72% dari tahun 2023 sebesar 19,26%. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan laba usaha yang disebabkan adanya kenaikan beban usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pendapatan usaha.

This is a measure of the Company's ability to generate operating profit from its sales. PLN Indonesia Power's operating profit margin in 2024 was 15.27%, which is 20.72% lower than in 2023 at 19.26%. This was primarily due to a decrease in operating profit, resulting from an increase in operating expenses that outpaced the rise in operating income.

Grafik Margin Operasi (%)

Chart of Operating Profit Margin (%)



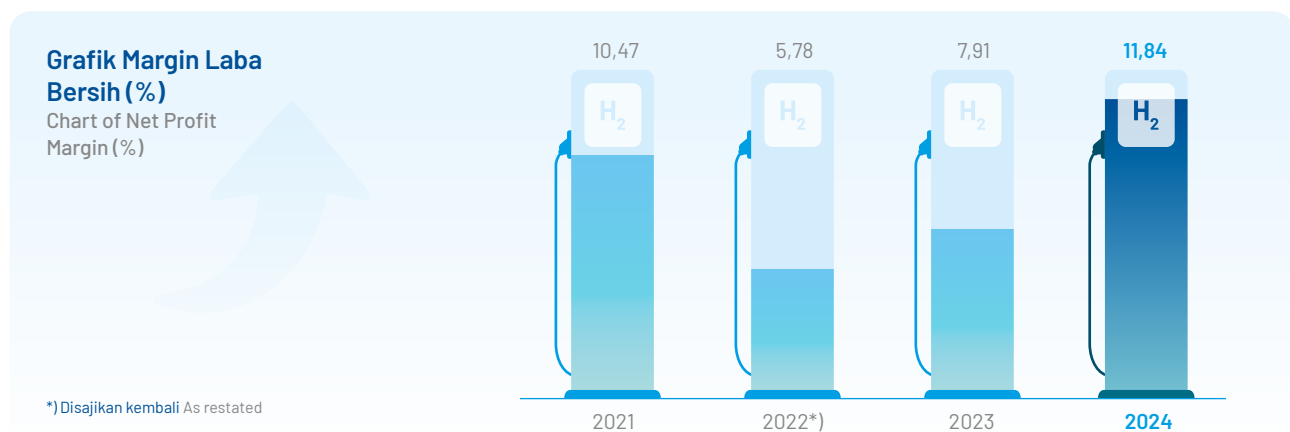
*) Disajikan kembali As restated

Margin Laba Bersih

Net Profit Margin

Merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba laba bersih yang dihasilkan dari penjualannya. Margin laba bersih PLN Indonesia Power tahun 2024 adalah sebesar 11,84%, yaitu meningkat 49,65% dari tahun 2023 sebesar 7,91%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya kenaikan pendapatan usaha dan penurunan beban lain-lain.

This is a measure of the Company's ability to generate net profit from its sales. PLN Indonesia Power's net profit margin in 2024 was 11.84%, which increased by 49.65% from 7.91% in 2023. This increase was primarily driven by the rise in operating income and a decrease in other expenses.



Tingkat Pengembalian Ekuitas

Return on Equity (ROE)

Rasio yang memperlihatkan sejauh manakah Perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau Pemegang Saham. Nilai tingkat pengembalian ekuitas PLN Indonesia Power tahun 2024 adalah sebesar 3,51%, yaitu meningkat 44,44% dari tahun 2023 sebesar 2,43%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan jumlah laba bersih Perusahaan pada tahun 2024.

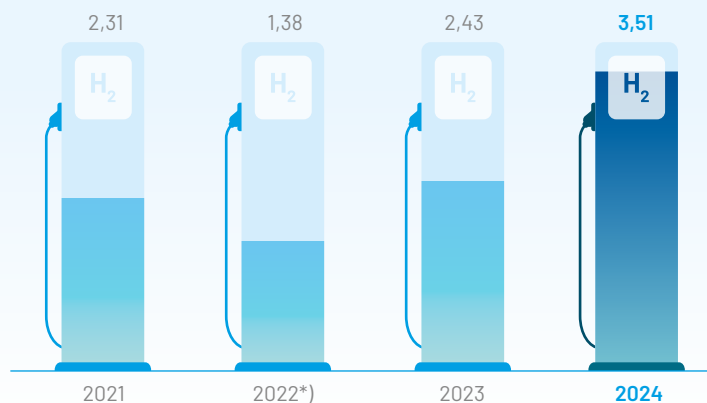
This ratio shows the extent to which the Company effectively manages its own capital by measuring the return on investment made by equity holders or shareholders. PLN Indonesia Power's return on equity in 2024 was 3.51%, an increase of 44.44% from 2.43% in 2023. This increase was primarily driven by the growth in the Company's net profit in 2024.



Grafik Tingkat Pengembalian Ekuitas (%)

Chart of Return of Equity
(ROE)(%)

*) Disajikan kembali As restated



Tingkat Pengembalian Investasi

Return on Investment (ROI)

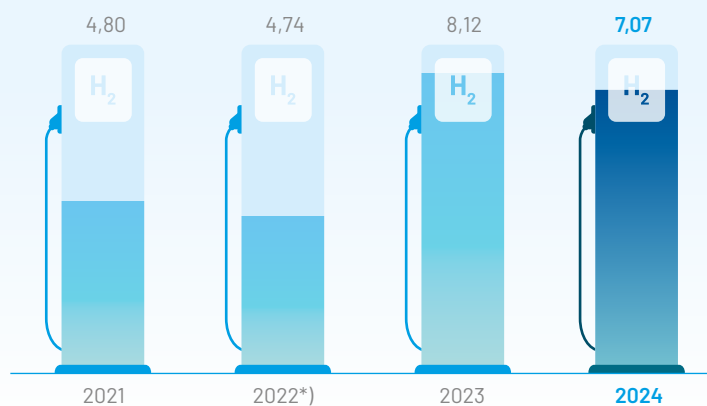
Merupakan kemampuan Perusahaan secara keseluruhan dalam memperoleh Keuntungan dengan jumlah investasi yang tersedia di dalam Perusahaan. Nilai tingkat pengembalian investasi PLN Indonesia Power tahun 2024 adalah sebesar 7,07% yaitu menurun 12,93% dari tahun 2023 sebesar 8,12%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya EBITDA dari tahun lalu.

This represents the Company's overall ability to generate profit from the total investment available within the Company. PLN Indonesia Power's return on investment in 2024 was 7.07%, a decrease of 12.93% from 8.12% in 2023. The decline was mainly due to a decrease in EBITDA from last year's figure.

Grafik Tingkat Pengembalian Investasi (%)

Chart of Return on
Investment (ROI)(%)

*) Disajikan kembali As restated

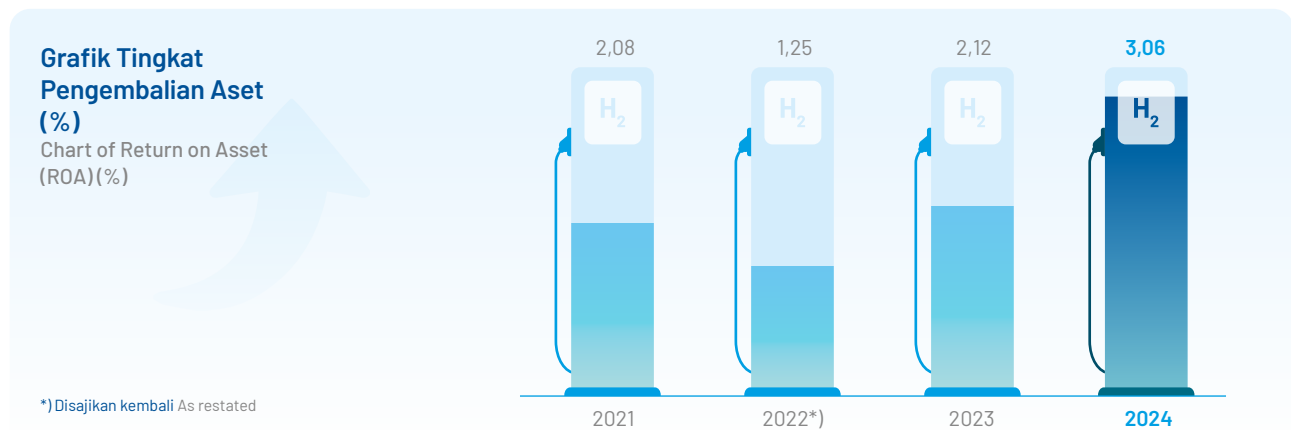


Tingkat Pengembalian Aset

Return on Assets (ROA)

Merupakan kemampuan Perusahaan secara keseluruhan dalam memperoleh Keuntungan dengan jumlah aset yang tersedia didalam Perusahaan. Nilai tingkat pengembalian aset PLN Indonesia Power tahun 2024 adalah sebesar 3,06%, yaitu meningkat 44,52% dari tahun 2023 sebesar 2,12%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan jumlah laba bersih Perusahaan pada tahun 2024.

This represents the Company's overall ability to generate profit from the total assets available within the Company. PLN Indonesia Power's return on assets in 2024 was 3.06%, an increase of 44.52% from 2.12% in 2023. This increase was primarily driven by the growth in the Company's net profit in 2024.



Rasio Aktivitas

Activity Ratios

Merupakan rasio-rasio yang menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya.

These ratios indicate the effectiveness of the Company in managing its assets.

Tabel Rasio Aktivitas

Table of Activity Ratios

Uraian Description	Satuan Unit					(dalam %)(in %)
		2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024
Perputaran Persediaan Inventory Turnover	hari day	12,36	22,39	18,64	17,00	(9,65)
Perputaran Aset Asset Turnover	%	20,51	22,17	27,43	26,05	(5,30)

*) Disajikan kembali As restated



Perputaran Persediaan

Inventories Turnover

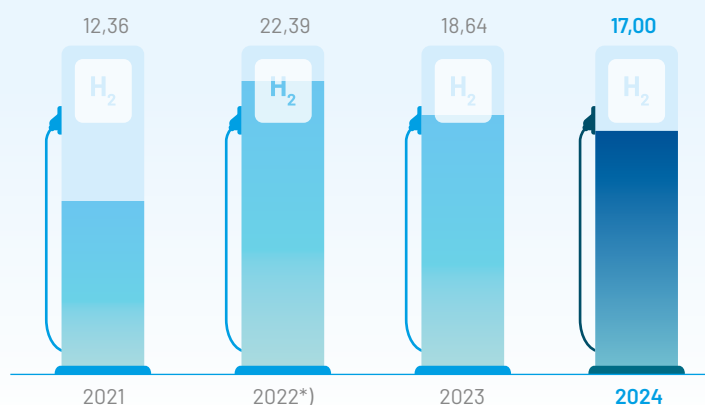
Rasio yang mengukur seberapa sering persediaan barang dagang terjual dalam waktu satu periode. Perputaran persediaan PLN Indonesia Power tahun 2024 adalah selama 17,00 hari, yaitu lebih cepat 1,64 hari dari tahun 2023 selama 18,64 hari. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh manajemen pergudangan yang lebih baik di Perusahaan.

The ratio that measures how often inventory is sold in a period. PLN Indonesia Power's inventory turnover in 2024 was 17.00 days, which is 1.64 days faster than 18.64 days in 2023. The increase was mainly due to better warehouse management in the Company.

Grafik Perputaran Persediaan (hari)

Chart of Inventories Turnover (days)

*) Disajikan kembali As restated



Perputaran Aset

Asset Turnover

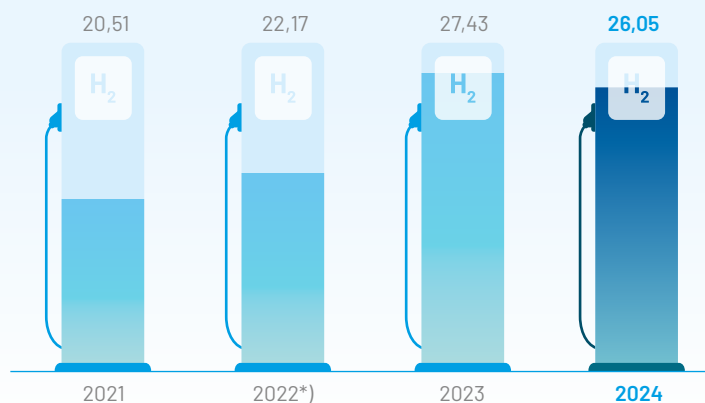
Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan aset perusahaan untuk memperoleh pendapatan, semakin cepat aset perusahaan berputar makin besar pendapatan perusahaan tersebut. Perputaran aset PLN Indonesia Power tahun 2024 adalah sebesar 26,05%, yaitu lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 27,43%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh investasi yang masih berupa PDP yang meningkat di tahun 2024.

This ratio measures the Company's ability to generate revenue from its assets, the faster the assets turn over, the greater the Company's revenue. PLN Indonesia Power's asset turnover in 2024 was 26.05%, which was lower than 27.43% in 2023. The increase was mainly due to investments that were still PDP (construction in progress), which increased in 2024.

Grafik Perputaran Aset (%)

Chart of Asset Turnover (%)

*) Disajikan kembali As restated



Struktur Modal

Capital Structure

Kebijakan Struktur Modal

Capital Structure Policy

Berdasarkan Akta Notaris No. 16 Tanggal 13 April 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PLN Indonesia Power yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00025.AH.02.02.TAHUN 2023, terdapat perubahan modal saham Perusahaan atas dampak pembentukan struktur subholding yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan belum membentuk cadangan umum sesuai dengan UUPT.

Based on Notarial Deed No. 16 dated April 13, 2023 on the Amendment to the Articles of Association of PT PLN Indonesia Power, which was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-00025.AH.02.02.YEAR 2023, there was a change in the Company's share capital due to the impact of the formation of subholding structure effective as of January 1, 2023.

In accordance with the Limited Liability Company Law (UUPT), the Company is required to set aside a mandatory reserve of at least 20% of the issued and fully paid-up capital. There is no time limit for forming this reserve. As of December 31, 2024, the Company has not established the general reserve in accordance with the UUPT.

Mekanisme Review Struktur Modal

Capital Structure Review Mechanism

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba. Direksi Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

The Company manages capital risk to ensure its ability to continue as a going concern and to ensure compliance with capital adequacy ratio requirements. The Company's capital structure consists of equity attributable to the parent company, which includes share capital, additional paid-in capital, and retained earnings. The Company's Board of Directors regularly reviews the capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and the associated risks.

The Company seeks to minimize the cost of capital to maximize its value. Therefore, the Company's policy in seeking funding will always consider potential financial risks that may arise in the future.



Struktur Modal Capital Structure

Kondisi struktur modal yang optimal dicapai dengan modal rata-rata tertimbang (*Weighted Average Cost of Capital* WACC) yang minimal. Penggunaan utang yang bertambah akan meminimalkan WACC sebab biaya utang (*cost of debt*) lebih murah dari biaya modal sendiri (*cost of equity*). Di samping itu, penggunaan utang juga akan mengurangi biaya kena pajak sehingga akan terjadi penghematan pajak. Meskipun demikian, peningkatan utang yang dilakukan Perusahaan akan meningkatkan biaya beban bunga yang selanjutnya akan mengurangi nilai Perusahaan secara keseluruhan. Untuk itu, Perusahaan mengelola penggunaan utang dan modal sehingga diperoleh kondisi yang optimum.

Struktur modal Perusahaan pada tahun 2024 terdiri dari Liabilitas sebesar Rp53,95 triliun meningkat dibandingkan tahun 2023. Adapun yang dibiayai oleh Ekuitas sebesar Rp373,39 triliun meningkat dibandingkan tahun 2023.

An optimal capital structure is achieved by minimizing the Weighted Average Cost of Capital (WACC). An increase in the use of debt will reduce the WACC, as the cost of debt is lower than the cost of equity. In addition, the use of debt provides a tax shield, thereby resulting in tax savings. However, an increase in debt will also raise interest expense, which in turn may reduce the overall value of the Company. Therefore, the Company manages the use of debt and equity to achieve an optimal capital structure.

In 2024, the Company's capital structure consisted of liabilities amounting to Rp53.95 trillion, an increase compared to 2023. Meanwhile, equity financing amounted to Rp373.39 trillion, also an increase compared to 2023.

Tabel Struktur Modal

Table of Capital Structure

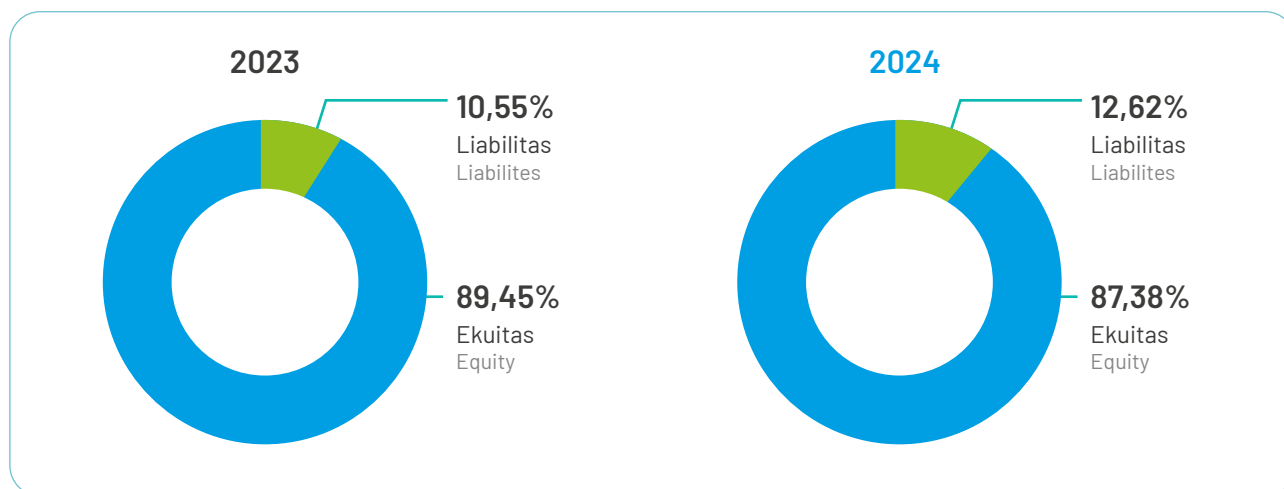
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2022*		2023		2024	
	Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
Liabilitas Liabilities	31.387.319	8,38%	40.745.537	10,55%	53.946.034	12,62%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	8.155.329	4,12%	12.620.923	3,27%	17.311.892	4,05%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	23.231.990	11,73%	28.124.614	7,28%	36.634.142	8,57%
Ekuitas Equity	343.022.104	91,62%	345.455.326	89,45%	373.391.398	87,38%
Jumlah Aset Total Assets	374.409.423	100,00%	386.200.863	100,00%	427.337.432	100,00%

*) Disajikan kembali As restated

Grafik Komposisi Struktur Modal

Chart of Capital Structure Composition



Aspek Perpajakan

Taxation Aspect

Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan

Tax Management and Control

Setoran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup PLN Indonesia Power yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

Tax payment is a manifestation of state obligations and the participation of taxpayers to directly and collectively carry out tax obligations for state financing and national development.

Based on the prevailing tax laws in Indonesia, companies within PLN Indonesia Power Group domiciled in Indonesia calculate and pay their own tax liabilities. The Directorate General of Taxes (DGT) may assess or revise taxes within five years from the time the tax becomes due.

Sebagai wujud komitmen dalam tata kelola perpajakan yang baik, PLN Indonesia Power telah menetapkan strategi perpajakan pada tahun 2024, salah satunya adalah memastikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan dilakukan maksimal pada 30 April 2024. Hal ini bertujuan agar Perusahaan dapat segera mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, 22 Impor, dan 23. Seluruh strategi perpajakan tersebut telah ditinjau dan disetujui oleh manajemen Perusahaan. Evaluasi atas strategi dilakukan secara berkala, serta ditinjau kembali apabila terdapat perubahan atau penerbitan regulasi perpajakan terbaru.

As a form of commitment to good tax governance, PLN Indonesia Power has established a tax strategy for 2024, one of which is to ensure the submission of the Corporate Income Tax Return (SPT) no later than April 30, 2024. This aims to enable the Company to promptly submit applications for Exemption Letters (SKB) for Income Tax Article 22, Article 22 on imports, and Article 23. All tax strategies have been reviewed and approved by the Company's management. The strategies are evaluated regularly and will be reviewed again in the event of any changes or the issuance of new tax regulations.

Setoran Pajak Tax Payment

Setoran pajak pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4,92 triliun, yaitu meningkat 16,87% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4,21 triliun. Peningkatan proporsi terbesar terdapat pada PPN Impor karena pada tahun 2024 Perusahaan tidak mengajukan SKB PPN Impor.

Tax payment in 2024 amounted to Rp4.92 trillion, representing a 16.87% increase compared to Rp4.21 trillion in 2023. The largest proportion of the increase was in Import VAT, as the Company did not apply for an Import VAT Exemption Letter (SKB) in 2024.

Tabel Setoran Pajak

Table of Tax Payment

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
PPN Pungut Collected VAT	1.165.010	1.609.866	3.469.580	4.086.796	617.216	17,79%
PPN Impor VAT on Import	46.770	38.412	76.739	124.355	47.616	62,05%
Bea Masuk Import Duty	14.355	11.341	46.273	41.837	(4.436)	(9,59)%
PPh 21 Income Tax 21	159.542	211.471	559.374	589.663	30.289	5,41%
PBB, Materai dan Retribusi Land and Building Tax, Stamp Duty, and Levy	85.285	-	56.175	75.277	19.102	34,01%
Jumlah Setoran Pajak Total of Tax Payment	1.470.962	1.871.090	4.208.141	4.917.928	709.787	16,87%

PLN Indonesia Power mendapatkan fasilitas pembebasan nilai pajak sesuai Kebijakan Pengajuan Pembebasan (PPH 22 Impor/PPH 22/PPH 23) untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 268/PMK.03/2015 & PER - 1/ PJ/2011 jo PER - 21/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain.

PLN Indonesia Power mendapatkan fasilitas pembebasan pajak tahun 2024 sebesar Rp1,12 triliun, yaitu meningkat 25,70% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp892,11 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya nilai fasilitas pembebasan PPh 22.

PLN Indonesia Power received a tax exemption facility in accordance with the Tax Exemption Application Policy (Income Tax Article 22 on Imports/Article 22/Article 23) to utilize the facility provided by the Directorate General of Taxes pursuant to Minister of Finance Regulation (PMK) No. 268/PMK.03/2015 and PER-1/PJ/2011 in conjunction with PER-21/PJ/2014 on Procedures for Applying for Exemption from Withholding and/or Collection of Income Tax by Other Parties.

In 2024, PLN Indonesia Power received a tax exemption facility amounting to Rp1.12 trillion, marking a 25.70% increase compared to Rp892.11 billion in 2023. This increase was driven by the higher value of the Income Tax Article 22 exemption facility.

Tabel Pembebasan Nilai Pajak

Table of Tax Exemption

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024	
					Nominal	%
PPH 22 Impor Import Income Tax 22	8.690	5.985	19.463	17.538	(1.925)	(9,89)%
PPN Impor VAT on Import	1.931	403	48.235	-	(48.235)	(100,00)%
PPH 22 Income Tax 22	302.129	193.851	812.147	1.091.494	279.347	34,4%
PPH 23 Income Tax 23	43.842	20.403	12.262	12.343	81	0,66%
Jumlah Pembebasan Nilai Pajak Total Tax Exemption	356.592	220.642	892.107	1.121.375	229.268	25,70%

Tingkat Kepatuhan Perpajakan

Tax Compliance Level

Di sepanjang tahun 2024, PLN Indonesia Power tidak terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban pajak, baik PPh Karyawan, PPh Badan, PPN Masa dan PBB. Selain itu juga tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan bulanan, serta tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga regulator.

Selama tiga tahun terakhir, PLN Indonesia Power tidak memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun.

Throughout 2024, PLN Indonesia Power did not experience any delays in fulfilling its tax obligations, including Employee Income Tax (PPh 21), Corporate Income Tax (PPh Badan), Periodic Value Added Tax (VAT), and Land and Building Tax (PBB). In addition, there were no delays in the submission of required tax documents, including both annual and monthly Tax Returns (SPT), nor were there any delays in submitting mandatory documents to regulatory institutions.

Over the past three years, PLN Indonesia Power has not received any guilty verdicts from the highest tax court regarding any tax-related matters.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2024

Comparison of Target and Realization in 2024

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit

Comparison of Target and Realization of Power Plant Performance

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit Perusahaan Tahun 2024

Comparison of Target and Realization of Power Plant Performance in 2024

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja EAF Pembangkit Tahun 2024

Table of Comparison of Target and Realization of EAF's Power Plant Performance in 2024

(dalam %)(in %)

Uraian Description	Target RKAP 2024 2024 Work Plan and Budget Target	Realisasi 2024 Realization in 2024	Pencapaian Achievement
EAF Pembangkit PLTU Batubara Coal SPP EAF	82,43	85,21	103,37
EAF Pembangkit Non PLTU Batubara Non-Coal SPP EAF	91,02	93,82	103,08

Pada tahun 2024, pencapaian EAF Pembangkit PLTU Batubara adalah sebesar 103,37% dan pencapaian EAF Pembangkit Non PLTU Batubara tahun 2024 adalah sebesar 103,08%. Pencapaian EAF tersebut ditentukan dari pelaksanaan *outage* Unit PLTU yang tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

In 2024, the EAF achievement for Coal SPP was 103.37%, and the EAF achievement for non-Coal SPP was 103.08%. These EAF achievements were determined by the timely execution of SPP unit outages in accordance with the established planning.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja EFOR Pembangkit Tahun 2024

Table of Comparison of Target and Realization of EFOR's Power Plant Performance in 2024

(dalam %)(in %)

Uraian Description	Target RKAP 2024 2024 Work Plan and Budget Target	Realisasi 2024 Realization in 2024	Pencapaian Achievement
EFOR Pembangkit PLTU Batubara Coal SPP EFOR	5,30	4,67	111,89
EFOR Pembangkit Non PLTU Batubara Non-Coal SPP EFOR	1,57	1,03	134,39

Pencapaian EFOR Pembangkit PLTU Batubara adalah sebesar 111,89% dan pencapaian EFOR Pembangkit Non PLTU Batubara adalah sebesar 134,39%. Pencapaian EFOR tersebut ditentukan oleh perencanaan *Preventive Maintenance* (PM) Unit PLTU yang memadai dan eksekusi penanganan kerusakan yang terjadi.

The EFOR achievement for Coal SPP was 111.89%, and the EFOR achievement for non-Coal SPP was 134.39%. These EFOR achievements were determined by adequate planning of Preventive Maintenance (PM) for SPP units and the execution of corrective actions for any damage that occurred.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja SFC Pembangkit Tahun 2024

Table of Comparison of Target and Realization of SFC's Power Plant Performance in 2024

Uraian Description	Satuan Unit	Target RKAP 2024 2024 Work Plan and Budget Target	Realisasi 2024 Realization in 2024	Pencapaian Achievement
SFC Batubara Coal SFC	kg/kWh	0,6577	0,6555	100,33
SFC Gas Gas SFC	MMBTU/kWh	0,0083	0,0082	101,20
SFC BBM Oil Fuel SFC	liter/kWh	0,3089	0,3045	101,42

Realisasi SFC Pembangkit Batubara tahun 2024 adalah tercapai 100,33%, SFC Pembangkit Gas tercapai 101,20%, dan SFC Pembangkit BBM tercapai 101,42% dari target 2024. Pencapaian tersebut terutama dipengaruhi oleh perencanaan dari pengadaan bahan bakar yang sesuai dengan perkiraan beban unit yang ditetapkan oleh P2B.

The realization of Coal SPP/Coal-Fired Power plants SFC in 2024 reached 100.33%, Gas-Fired Power Plants SFC reached 101.20%, and Oil-Fired Power Plants SFC reached 101.42% of the 2024 target. This achievement was primarily influenced by fuel procurement planning aligned with the unit load forecast set by P2B.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit O&M Tahun 2024

Comparison of Target and Realization of O&M Power Plant Performance in 2024

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit O&M Tahun 2024

Table of Comparison of Target and Realization of O&M Power Plant Performance in 2024

Uraian Description	Satuan Unit	Target RKAP 2024 2024 Work Plan and Budget Target	Realisasi 2024 Realization in 2024	Pencapaian Achievement
UBP Jeranjang GBU Jeranjang				
EAF	%	81.04	79.89	79.89
EFOR	%	4.31	6.32	6.32
UBP Holtekamp GBU Holtekamp				
EAF	%	65.49	45.12	68.89
EFOR	%	4.86	3.72	110
SFC Batubara Coal SFC	kg/kWh	1.3390	1.4406	92.41
UBP Jatigede GBU Jatigede				
EAF	%	80	100	110
EFOR	%	4	0	110

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Produksi, Penjualan serta Pemakaian Sendiri

Comparison of Target and Realization of Production, Sales, and Self-Consumption

Tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Produksi, Penjualan, dan Pemakaian Sendiri Tenaga Listrik Tahun 2024

Table of Comparison of Target and Realization of Electricity Production, Sales, and Self-Consumption

Uraian Description	Satuan Unit	Target RKAP 2024 2024 Work Plan and Budget Target	Realisasi 2024 Realization in 2024	Pencapaian Achievement
Produksi Tenaga Listrik Electricity Production	GWh	76.797,05	87.210,96	113,56%
Penjualan Tenaga Listrik Electricity Sales	GWh	72.714,48	82.535,52	113,51%
Pemakaian Sendiri Self-Consumption	%	5,32	5,36	99,17%

Realisasi Produksi Tenaga Listrik PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar 87.210,96 GWh dengan pencapaian 113,55% dari target RKAP 2024. Dan untuk realisasi Penjualan Tenaga Listrik PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar 82.535,52 GWh dengan pencapaian 113,50% dari target RKAP 2024. Pencapaian tersebut terutama didukung oleh peningkatan produksi di UBP Bali dikarenakan peningkatan beban di sub sistem Bali, pengoptimalan operasi PLTA Saguling, dan unit UBP Mahakam.

Realisasi PS Tenaga Listrik PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar 5,36 % dengan pencapaian 99,17% dari target RKAP 2024. Hal tersebut terutama dikarenakan oleh kebutuhan listrik yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan pendukung pembangkitan lebih tinggi.

The electricity production realization of PLN Indonesia Power in 2024 reached 87,210.96 GWh, achieving 113.55% of the 2024 WP&B target. Meanwhile, the electricity sales realization in 2024 was 82,535.52 GWh, achieving 113.50% of the 2024 WP&B target. This achievement was mainly supported by increased production at GBU Bali due to higher load in the Bali sub-system, optimized operations of the Saguling HPP, and output from GBU Mahakam units.

The electricity self-consumption (PS) realization of PLN Indonesia Power in 2024 was 5.36%, reaching 99.17% of the 2024 WP&B target. This was primarily due to higher electricity needs for operating power generation support equipment.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Keuangan

Comparison of Target and Realization of Financial Performance

Perbandingan antara Target dan Realisasi Posisi Keuangan Tahun 2024

Comparison of Target and Realization of Financial Position in 2024

Tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Posisi Keuangan Tahun 2024

Table of Comparison of Target and Realization of Financial Position in 2024

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target RKAP 2024 2024 Work Plan and Budget Target	Realisasi 2024 Realization in 2024	Pencapaian Achievement
Aset Lancar Current Asset	63.701.170	81.056.348	127,24%
Aset Tidak Lancar Non-Current Asset	339.999.606	346.281.084	101,85%
Jumlah Aset Total Asset	403.700.775	427.337.432	105,85%

Uraian Description	Target RKAP 2024 2024 Work Plan and Budget Target	Realisasi 2024 Realization in 2024	Pencapaian Achievement
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	9.823.966	17.311.892	176,22%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	33.315.234	36.634.142	109,96%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	43.139.200	53.946.034	125,05%
Jumlah Ekuitas Total Equity	360.561.575	373.391.398	103,56%

Realisasi Jumlah Aset tahun 2024 adalah sebesar Rp427,34 triliun dengan pencapaian 105,85% dari target RKAP 2024. Realisasi ini terutama didukung oleh adanya surplus revaluasi aset sebesar Rp28 triliun dan meningkatnya piutang usaha atas PJBTL sebesar Rp17 triliun.

The total asset realization in 2024 amounted to Rp427.34 trillion, achieving 105.85% of the 2024 WP&B target. This realization was mainly supported by asset revaluation of Rp28 trillion and an increase in accounts receivable for PPA of Rp17 trillion.

Realisasi Jumlah Liabilitas tahun 2024 adalah sebesar Rp53,95 triliun dengan pencapaian 125,05% dari target RKAP 2024. Realisasi ini terutama didukung oleh adanya peningkatan pada liabilitas pajak tangguhan sebesar 20% dari RKAP.

The total liabilities realization in 2024 amounted to Rp53.95 trillion, achieving 125.05% of the 2024 WP&B target. This realization was mainly supported by an increase in deferred tax liabilities of 20% of the WP&B.

Realisasi Jumlah Ekuitas tahun 2024 adalah sebesar Rp373,39 triliun dengan pencapaian 103,56% dari target RKAP 2024. Realisasi ini terutama didukung oleh adanya perbedaan nilai asumsi penambahan modal atas serah terima aset.

The total equity realization in 2024 amounted to Rp373.39 trillion, achieving 103.56% of the 2024 WP&B target. This realization was primarily supported by differences in the assumed value of capital injections related to asset handovers.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Pendapatan dan Laba Tahun 2024

Comparison of Target and Realization of Revenue and Profit in 2024

Tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Pendapatan dan Laba Tahun 2024

Table of Comparison of Target and Realization of Revenue and Profit in 2024

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)(in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target RKAP 2024 2024 Work Plan and Budget Target	Realisasi 2024 Realization in 2024	Pencapaian Achievement
Pendapatan Usaha Revenue	106.368.374	110.577.056	103,96%
Beban Usaha Operating Expenses	92.525.865	93.695.863	101,26%
Laba Usaha Operating Income	13.842.508	16.881.193	121,95%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	9.484.881	13.095.866	138,07%

Realisasi Pendapatan Usaha tahun 2024 adalah sebesar Rp110,58 triliun dengan pencapaian 103,96% dari target RKAP 2024. Realisasi ini meningkat karena adanya kenaikan penjualan kWh PJBTL.

The revenue realization in 2024 amounted to Rp110.58 trillion, achieving 103.96% of the 2024 WP&B target. This realization increased due to the increase in kWh of PPA.

Realisasi Beban Usaha tahun 2024 adalah sebesar Rp93,70 triliun dengan pencapaian 101,26% dari target RKAP 2024. Kenaikan ini terutama didukung oleh kenaikan harga bahan bakar batubara dan gas.

The operating expenses realization in 2024 amounted to Rp93.70 trillion, achieving 101.26% of the 2024 WP&B target. This increase was mainly supported by the increase in coal and gas fuel prices.

Realisasi Laba Tahun Berjalan tahun 2024 adalah sebesar Rp13,10 triliun dengan pencapaian 138,07% dari target RKAP 2024. Realisasi ini terutama didukung adanya kenaikan penjualan listrik (GWh).

The profit for the year realization in 2024 amounted to Rp13.10 trillion, achieving 138.07% of the 2024 WP&B target. This realization was mainly supported by an increase in sales of electricity (GWh).

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Struktur Modal Comparison of Target and Realization of Capital Structure

Tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Struktur Modal Tahun 2024

Table of Comparison of Target and Realization of Capital Structure in 2024

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target RKAP 2024 2024 Work Plan and Budget Target		Realisasi 2024 Realization in 2024		Pencapaian Achievement
	Rp juta Rp million	Komposisi Composition	Rp juta Rp million	Komposisi Composition	
Liabilitas Liabilities	43.139.200	10,69%	53.946.034	12,62%	125,05%
Ekuitas Equity	360.561.575	89,31%	373.391.398	87,38%	103,56%
Aset Assets	403.700.775	100,00%	427.337.432	100,00%	105,85%

Pada tahun 2024 Aset yang dibiayai oleh Liabilitas sebesar 12,62%, yaitu telah mencapai target RKAP 2024 sebesar 125,05%. Sementara itu, Aset yang dibiayai oleh Ekuitas sebesar 87,38%, yaitu mencapai target RKAP 2024 sebesar 103,56%.

In 2024, assets financed by liabilities amounted to 12.62%, achieving 125.05% of the 2024 WP&B target. Meanwhile, assets financed by equity amounted to 87.38%, achieving 103.56% of the 2024 WP&B target.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Pengembangan SDM Comparison of Target and Realization of Human Capital Development

Terkait dengan pengembangan SDM terdapat beberapa indikator yaitu jumlah pelatihan dan biaya pelatihan.

In relation to human capital development, several indicators were used, namely the number of training programs and training costs.

Tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2024

Table of Comparison of Target and Realization of Human Capital Development in 2024

Uraian Description	Target RKAP 2024 2024 Work Plan and Budget Target	Realisasi 2024 Realization in 2024	Pencapaian Achievement
Jumlah Pelatihan (kali) Total Training (time)	100	229	229%
Biaya Pelatihan (Rp miliar) Training Cost (Rp billion)	11.288.746.552	11.255.007.912	99,25%

Realisasi jumlah pelatihan tahun 2024 sebanyak 229 kali pelatihan dengan pencapaian 229% dari target RKAP 2024. Sedangkan untuk, realisasi biaya pelatihan tahun 2024 adalah Rp11,256 miliar dengan pencapaian 99,25 % dari target RKAP 2024.

The realization of the total of training programs in 2024 was 229 sessions, achieving 229% of the 2024 WP&B target. Meanwhile, the realization of training cost in 2024 amounted to Rp11.256 billion, reaching 99.25% of the 2024 WP&B target.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Aspek Pemasaran

Comparison of Target and Realization of Marketing Aspect

Terkait dengan aspek pemasaran terdapat indikator yang ditentukan yaitu pangsa pasar dan survei kepuasan pelanggan.

Regarding the marketing aspect, the determined indicators include market share and customer satisfaction surveys.

Tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Aspek Pemasaran Tahun 2024

Table of Comparison of Target and Realization of Marketing Aspect in 2024

(dalam %)(in %)

Uraian Description	Target RKAP 2024 2024 Work Plan and Budget Target	Realisasi 2024 Realization in 2024	Pencapaian Achievement
Pangsa Pasar Market Share	25,35	26,27	103,64
Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit PLTU Batubara Customer Satisfaction Survey for Coal-Fired Power Plants/Coal SPP (PLTU Batubara)	83,00	87,79	105,77
Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit Non PLTU Batubara Customer Satisfaction Survey for Non-Coal-Fired Power Plants/Non- Coal SPP (Non PLTU Batubara)	83,00	91,07	109,72
Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit Jasa O&M Customer Satisfaction Survey for O&M Services Power Plants	83,00	88,73	106,90

Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit PLTU Batubara pada tahun 2024 adalah sebesar 87,79% yaitu tercapai 105,77% dan Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit Non PLTU Batubara adalah sebesar 91,07% yaitu tercapai 109,72% dari target tahun 2024. Pencapaian ini terutama didukung oleh kinerja pembangkit yang lebih baik, jumlah gangguan pada pembangkit menurun, serta hubungan dengan pelanggan jual beli tenaga listrik dikelola dengan baik, sehingga pelanggan lebih loyal dan *engage*.

The Customer Satisfaction Survey for Coal SPP in 2024 was 87.79%, achieving 105.77% of the 2024 target, while the Customer Satisfaction Survey for Non-Coal SPP was 91.07%, achieving 109.72% of the 2024 target. This achievement was primarily supported by improved power plant performance, a decrease in the number of disturbances, and well-managed relationships with electricity sale-and-purchase customers, resulting in increased customer loyalty and engagement.

Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit Jasa O&M pada tahun 2024 adalah sebesar 88,73%, yaitu tercapai 106,90% dari target tahun 2024. Pencapaian ini terutama didukung oleh pengelolaan O&M pembangkit yang semakin baik dengan tercapainya target *Service Level Agreement*(SLA) yang ditetapkan oleh pelanggan.

The Customer Satisfaction Survey for O&M Service Power Plants in 2024 was 88.73%, achieving 106.90% of the 2024 target. This was mainly driven by improved O&M management of the plants, with the achievement of Service Level Agreement (SLA) targets set by customers.

Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI)

Key Performance Indicator (KPI) Achievement

Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan merupakan ukuran atau indikator yang fokus pada aspek-aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang. Terkait dengan hal tersebut, Perusahaan menggunakan KPI sebagai cerminan dari target, *progress* dan pencapaian tujuan. KPI yang menjadi kesepakatan antara Pemegang saham dan Dewan Komisaris dan Direksi dituangkan dalam suatu Kontrak Manajemen Tahunan yang disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

KPI tahun buku 2024 diputuskan melalui RUPS tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024. Agenda dalam pelaksanaan RUPS tersebut adalah persetujuan dan pengesahan RKAP tahun 2024, serta persetujuan dan pengesahan Kontrak Manajemen/ *Key Performance Indicator* tahun 2024.

The Company's Key Performance Indicators (KPIs) serve as measures or indicators that focus on the most dominant aspects of performance, determining the Company's current and future success. In this regard, the Company utilizes KPIs as a reflection of its targets, progress, and achievement of goals. The KPIs, agreed upon between the Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors, are outlined in an Annual Management Contract, which is approved during the General Meeting of Shareholders (GMS).

KPI for the 2024 financial year was established at the General Meeting of Shareholders (GMS) on the Ratification of the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP) on January 31, 2024. The agenda items for the GMS were the approval and ratification of the 2024 RKAP, as well as the approval and ratification of the Management Contract/Key Performance Indicator for 2024.

Tabel Pencapaian KPI Tahun 2024

Table of KPI Achievement for 2024

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian*) Achievement*)	Nilai Value	Keterangan Description
A.	Nilai Ekonomi dan Sosial Economic and Social Value		52				55,52	
1.	EBITDA	Rp miliar Rp billion	8	26.855,37	29.999,56	110,00%	8,80	Tercapai Achieved
2.	BPP Pembangkit BPP Generator	Rp/kWh	8	1.248,41	1.128,89	109,57%	8,76	Tercapai Achieved
3.	ROIC	%	5	2,74	3,67	110,00%	5,50	Tercapai Achieved
4.	EFOR		5				5,50	
a.	EFOR PLTU SPP EFOR	%		5,30	4,67	110,00%		Tercapai Achieved
b.	EFOR Non PLTU Non-SPP EFOR	%		1,57	1,03	110,00%		Tercapai Achieved
5.	EAF		6				6,19	
a.	EAF PLTU SPP EAF	%		82,43	85,21	103,37%		Tercapai Achieved
b.	EAF Non PLTU Non-SPP EAF	%		91,02	93,82	103,08%		Tercapai Achieved
6.	SFC		5				5,04	
a.	SFC Batubara SFC Coal	kg/kWh		0,6577	0,6555	100,33%		
b.	SFC Gas SFC Gas	mmbtu/kWh		0,0083	0,0082	101,20%		
c.	SFC BBM SFC Fuel Oil	liter/kWh		0,3089	0,3045	101,42%		
7.	Pengelolaan Komunikasi & TJSL Communication & TJSL Management	%	4	100,00	105,00	105,00%	4,20	Tercapai Achieved

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian*) Achievement*)	Nilai Value	Keterangan Description
	8. <i>Maturity Level Sustainability</i>	Level	4	3,00	3,35	110,00%	4,40	Tercapai Achieved
	9. <i>Carbon Emission Reduction</i>	%	3	0,505**	0,500	99,01%	2,97	Hampir tercapai Almost achieved
	10. Penyelesaian RJPP Completion of RJPP	Waktu Time	2	28 Nov 2024*** Nov 28, 2024***	28 Nov 2024 Nov 28, 2024***	100,00%	2,00	Tercapai Achieved
	11. <i>Total of units with PROPER (Beyond Compliance)</i>	Unit	2	25,00	27,00	108,00%	2,16	Tercapai Achieved
B.	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation		14				14,89	
	1. Implementasi <i>Roadmap</i> Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko SH/AP Implementation of SH/AP Risk Management Implementation Improvement Roadmap	%	4	100,00	103,94	103,94%	4,15	Tercapai Achieved
	2. Pendapatan <i>Beyond</i> kWh Beyond kWh Revenue		4				4,14	
	a. Pendapatan dari luar PLN <i>Group</i> Revenue from outside PLN Group	Rp miliar Rp billion		571,13	555,08	97,19%		Hampir tercapai Almost achieved
	b. Jumlah Kontrak Bisnis di Luar Negeri Number of Overseas Business Contracts	Kontrak Contract		3,00	6,00	110,00%		Tercapai Achieved
	3. Jumlah Project SPE GRK teregister di SRN dan siap diperdagangkan Number of SPE GRK Projects registered in SRN and ready to be traded	Project	2	2,00	3,00	110,00%	2,20	Tercapai Achieved
	4. Sinergi Antar SH, AP Lain & Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (Pusharlis) Synergy Between SH, Other AP & Electricity Maintenance Center (Pusharlis)	Rp miliar Rp billion	2	758,46	1.283,55	110,00%	2,20	Tercapai Achieved
	5. Optimalisasi <i>Holding Subholding</i> Optimization of Holding Subholding	Waktu/ milestone Time/ milestone	2	100% sesuai milestone 100% according to milestone	110	110,00%	2,20	Tercapai Achieved
C.	Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership		14				14,66	
	1. <i>Digital Power Plant Implementation</i>	Unit (kumulatif) Unit (cumulative)	3	50,00	53,00	110,00%	3,30	Tercapai Achieved
	2. <i>Maturity Level</i> EAM Pembangkitan Maturity Level of EAM Generation	Level	3	3,24	3,53	108,95%	3,26	Tercapai Achieved
	3. <i>Value Creation</i>	Rp miliar Rp billion	4	631,00	641,81	101,71%	4,06	Tercapai Achieved
	4. Umur Persediaan Batubara Coal Inventory Age	Hari Operasi Operating Days	4	15-26	25,51	101,23%	4,04	Tercapai Achieved
D.	Peningkatan Investasi Investment Increase		10				9,64	
	1. <i>EPC and Project Completion</i>	%	2	100,00	99,98	99,98%	1,99	Hampir tercapai Almost achieved

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian*) Achievement*)	Nilai Value	Keterangan Description
2.	Green Industrial Cluster	Waktu/ milestone Time/ milestone	2	MoU dengan mitra pengembangan termasuk pengelola kawasan Green Cluster potensial pada 31 Desember 2024	MoU dengan mitra pengembangan termasuk pengelola kawasan Green Cluster potensial pada 13 Desember 2024	102,57%	2,05	Tercapai Achieved
3.	Solar PV Manufacturing	Waktu/ milestone Time/ milestone	2	COD manufacture kapasitas 1 GW pada 31 Desember 2024	COD manufacture kapasitas 1 GW pada 16 Desember 2024	102,14%	3,06	Tercapai Achieved
4.	Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2024 Control of Investment Budget usage according to RKAP 2024	%	3	95% - 100%	80,67%	84,91%	2,54	Perlu peningkatan Needs improvement
E. Pengembangan Talenta Talent Development			10				10,85	
1.	Rasio Top Talent Milenial (≤42 tahun) dalam Nominated Talent Ratio of Millennial Top Talent (≤42 years) in Nominated Talent	%	2	18,00	54,39	110,00%	2,20	Tercapai Achieved
2.	Rasio Perempuan dalam Nominated Talent Ratio of Female in Nominated Talent	%	2	32,00	35,09	109,66%	2,19	Tercapai Achieved
3.	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pemenuhan Risiko SH/AP Ratio of Qualification Fulfillment of SH/AP Risk Fulfillment Organ	%	2	90,00	97,00	107,79%	2,15	Tercapai Achieved
4.	HCR & OCR dan Produktivitas Pegawai HCR & OCR and Employee Productivity	%	2	100,00	105,78	105,78%	2,11	Tercapai Achieved
5.	Nihil Kecelakaan Zero Accident	Kali Times	2	0,00	0,00	110,00%	2,20	Tercapai Achieved
F. Kepatuhan Compliance								
1.	Compliance (GCG, Zero Fatality, Kepatuhan K3L, SPI, Reporting, Busdev Alignment) Compliance (GCG, Zero Fatality, OHSE Compliance, SPI, Reporting, Busdev Alignment)		Max - 1				0,00	Tercapai Achieved
Jumlah Total			100				105,56	

Proyeksi dan Target Tahun 2025

Projection and Target for 2025

Proyeksi dan Target Kinerja Pembangkit

Power Plant Performance Projection and Target

Proyeksi dan Target Kinerja Pembangkit PLN Indonesia Power Tahun 2025

PLN Indonesia Power's Power Plant Performance Projection and Target for 2025

Tabel Proyeksi dan Target Kinerja Pembangkit Tahun 2025

Table of Power Plant Performance Projection and Target for 2025

Uraian Description	Satuan Unit	Target RKAP 2025 2025 Work Plan and Budget Target
EAF Pembangkit (%) Power Plant EAF		
EAF Pembangkit PLTU Batubara Coal SPP EAF	%	81,38
EAF Pembangkit Non PLTU Batubara Non-Coal SPP EAF	%	90,52
EFOR Pembangkit (%) Power Plant EFOR		
EFOR Pembangkit PLTU Batubara Coal SPP EFOR	%	4,70
EFOR Pembangkit Non PLTU Batubara Non-Coal SPP EFOR	%	1,47
SFC Pembangkit Power Plant SFC		
SFC Pembangkit - Batubara Coal Power Plant SFC	kg/kWh	0,6542
SFC Pembangkit - Gas Gas Power Plant SFC	MMBTU/kWh	0,008101
SFC Pembangkit - BBM Oil Power Plant SFC	liter/kWh	0,3004

Pada tahun 2025, EAF Pembangkit PLTU Batubara ditargetkan sebesar 81,38% dan EAF Pembangkit Non PLTU Batubara sebesar 90,52%. Penetapan target EAF 2025 dilandaskan oleh perencanaan *outage* yang telah terjadwal pada tahun 2025.

In 2025, the Equivalent Availability Factor (EAF) for Coal SPP targeted at 81.38%, and the EAF for Non-coal SPP is targeted at 90.52%. These EAF targets for 2025 are based on the scheduled outage planning for the year.

Pada tahun 2025, EFOR Pembangkit PLTU Batubara ditargetkan sebesar 4,70% dan EFOR Pembangkit Non PLTU Batubara sebesar 1,47%. Penetapan target EFOR tahun 2025 dilandaskan pada penguatan pelaksanaan PM *excellent* dan pengurangan kemungkinan gangguan yang akan terjadi.

In 2025, the Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) for Coal SPP is targeted at 4.70%, and the EFOR for Non-coal SPP is targeted at 1.47%. The 2025 EFOR targets are set based on the strengthening of excellent preventive maintenance implementation and the reduction of potential disturbances.

Pada tahun 2025, SFC Pembangkit - Batubara ditargetkan sebesar 0,6542 kg/kWh, SFC Pembangkit - Gas ditargetkan sebesar 0,008101MMBTU/kWh, dan SFC Pembangkit - BBM ditargetkan sebesar 0,3004 liter/kWh. Penetapan target SFC tahun 2025 dilandaskan pada target SFC yang diturunkan oleh DJK kepada PLN.

In 2025, SFC for Coal-Fired Power Plants is targeted at 0.6542 kg/kWh, SFC for Gas-Fired Power Plants is targeted at 0.008101 MMBTU/kWh, and SFC for Oil-Fired Power Plants is targeted at 0.3004 liters/kWh. The determination of the 2025 SFC targets is based on the SFC targets set by DJK to PLN.

Proyeksi dan Target Produksi, Penjualan serta Pemakaian Sendiri

Projection and Target of Production, Sales, and Self-Consumption

Tabel Proyeksi dan Target Kinerja Pembangkit Tahun 2025

Table of Projection and Target of Production, Sales, and Self-Consumption for 2025

(dalam GWh)(in GWh)

Uraian Description	Satuan Unit	Target RKAP 2025 2025 Work Plan and Budget Target
Produksi Production	GWh	79.281,59
Penjualan Sales	GWh	75.205,19
Pemakaian Sendiri Self-Consumption	%	5,14

Target produksi tenaga listrik pada tahun 2025 adalah sebesar 79.281,59 GWh dengan asumsi sesuai dengan alokasi produksi yang telah disusun bersama PT PLN (Persero) dan PLN UIP2B/ P3B.

The target for electricity production in 2025 is 79,281.59 GWh, based on the production allocation that has been prepared in coordination with PT PLN (Persero) and PLN UIP2B/P3B.

Target penjualan tenaga listrik pada tahun 2025 adalah sebesar 75.205,19 GWh dengan asumsi sesuai dengan alokasi produksi yang telah disusun bersama PT PLN (Persero) dan PLN UIP2B/ P3B.

The target for electricity sales in 2025 is 75,205.19 GWh, based on the production allocation that has been prepared in coordination with PT PLN (Persero) and PLN UIP2B/P3B.

Target pemakaian sendiri pada tahun 2025 adalah sebesar 5,14% dengan asumsi sesuai dengan produksi tahun 2025.

The target for self-consumption in 2025 is 5.14%, based on the assumed production level for 2025.

Proyeksi dan Target Kinerja Keuangan

Projection and Target of Financial Performance

Proyeksi dan Target Posisi Keuangan Tahun 2025

Projection and Target of Financial Position for 2025

Tabel Proyeksi dan Target Posisi Keuangan Tahun 2025

Table of Projection and Target of Financial Position for 2025

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)(in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target RKAP 2025 2025 Work Plan and Budget Target
Aset Lancar Current Assets	86.874.349
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	335.027.344
Jumlah Aset Total Assets	421.901.694
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	13.346.049
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	41.744.452
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	55.090.501
Jumlah Ekuitas Total Equity	366.811.193

Target Jumlah Aset tahun 2025 adalah sebesar Rp421,90 triliun. Target tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi terdapat beberapa *project* yang COD di 2024 diantaranya: Tambak Lorok Blok 3 dan BMPP Nusantara 1.

The Total Asset Target for 2025 is set at Rp421.90 trillion. This target is based on the assumption that several projects will achieve COD in 2024, including Tambak Lorok Block 3 and BMPP Nusantara 1.

Target Jumlah Liabilitas tahun 2025 adalah sebesar Rp55,09 triliun. Target tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi liabilitas jangka panjang meningkat sebesar 11% dari realisasi audited tahun 2024 yang dominan disebabkan oleh kenaikan utang sewa sebesar 31%, sedangkan liabilitas jangka pendek menurun sebesar 16% dari realisasi *audited* tahun 2024 yang dominan disebabkan oleh menurunnya utang usaha sebesar 2%.

The Total Liabilities Target for 2025 is set at Rp55.09 trillion. The target is set based on the assumption that non-current liabilities increase by 11% from the audited realization in 2024, which was predominantly caused by an increase in lease liabilities of 31%, while current liabilities decrease by 16% from the audited realization in 2024, which was predominantly caused by a decrease in trade payables of 2%.

Target Jumlah Ekuitas tahun 2025 adalah sebesar Rp366,81 triliun. Target tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi meningkatnya target laba usaha pada tahun 2025.

The Total Equity Target for 2025 is set at Rp366.81 trillion. This target is based on the assumption of an increase in the operating profit target for 2025.

Proyeksi dan Target Pendapatan dan Laba Tahun 2025

Projection and Target for Revenue and Profit in 2025

Tabel Proyeksi dan Target Pendapatan dan Laba Tahun 2025

Table of Revenue and Profit Projections and Targets for 2025

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target RKAP 2025 2025 Work Plan and Budget Target
Pendapatan Usaha Revenue	118.379.695
Beban Usaha Operating Expenses	102.353.633
Laba Usaha Operating Income	16.026.063
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	12.364.959

Target Pendapatan Usaha tahun 2025 adalah sebesar Rp118,38 triliun. Target tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi target penjualan (GWh) korporat sesuai alokasi neraca energi dari PT PLN (Persero), target pendapatan Jasa O&M yang dikelola pada tahun 2025 dan target *beyond* KWh korporat sesuai penetapan target dari PT PLN (Persero).

The Revenue Target for 2025 is Rp118.38 trillion. This target is based on the assumption of the corporate sales target (GWh) in accordance with the energy balance allocation from PT PLN (Persero), the target revenue from O&M services managed in 2025, and the corporate beyond kWh target as determined by PT PLN (Persero).

Target Beban Usaha tahun 2025 adalah sebesar Rp102,35 triliun. Target tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi kebutuhan energi primer sesuai dengan alokasi produksi dari PT PLN (Persero) dan kebutuhan untuk tetap menjaga keandalan unit pembangkit, kurs mata uang, dan harga satuan biaya bahan bakar.

The Operating Expenses Target for 2025 is Rp102.35 trillion. This target is based on assumptions related to primary energy needs in accordance with production allocations from PT PLN (Persero), the necessity to maintain power plant unit reliability, exchange rate assumptions, and unit fuel cost prices.

Target Laba Tahun Berjalan tahun 2025 adalah sebesar Rp12,36 triliun. Target tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi laba tahun 2025 disusun dengan strategi *Tax Planning* Perusahaan dan *Sustainability Principle*.

The Profit for the Year Target for 2025 is Rp12.36 trillion. This target is based on the assumption of 2025 profit, formulated with the Company's Tax Planning Strategy and Sustainability Principle.

Proyeksi dan Target Struktur Modal

Capital Structure Projection and Target

Tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Pendapatan dan Laba Tahun 2024

Table of Capital Structure Projection and Target for 2025

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target RKAP 2025 2025 Work Plan and Budget Target	
	Rp juta Rp million	%
Liabilitas Liabilities	55.090.501	13,06%
Ekuitas Equity	366.811.193	86,94%
Aset Assets	421.901.694	100,00%

Pada tahun 2025 ditargetkan, jumlah Aset yang dibiayai oleh Liabilitas sebesar 13,06% dan Aset yang dibiayai oleh Ekuitas sebesar 86,94%. Target tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi bahwa jumlah aset tahun 2025 telah mengakomodir atas project yang COD di tahun 2024 yaitu Tambak Lorok Blok 3 dan BMPP Nusantara 1. Jumlah liabilitas tahun 2025 ditetapkan berdasarkan asumsi liabilitas jangka panjang meningkat sebesar 11% dari realisasi *audited* tahun 2024 yang dominan disebabkan oleh kenaikan utang sewa sebesar 31%, sedangkan liabilitas jangka pendek menurun sebesar 16% dari realisasi *audited* tahun 2024 yang dominan disebabkan oleh menurunnya utang usaha sebesar 2%. Dan untuk jumlah ekuitas tahun 2025 yang ditetapkan berdasarkan asumsi adanya peningkatan target laba usaha pada tahun 2025.

In 2025, it is targeted that 13.06% of assets will be financed by liabilities and 86.94% of assets will be financed by equity. The target is set based on the assumption that the amount of assets in 2025 has accommodated the projects that COD in 2024, which were Tambak Lorok Block 3 and BMPP Nusantara 1. The amount of liabilities in 2025 is set based on the assumption that non-current liabilities increase by 11% from the audited realization in 2024, which was predominantly caused by an increase in lease liabilities of 31%, while current liabilities decrease by 16% from the audited realization in 2024, which was predominantly caused by a decrease in trade payables of 2%. While, the amount of equity in 2025 is set based on the assumption of an increase in the target operating income in 2025.

Proyeksi dan Target Pengembangan SDM

Human Capital Development Projection and Target

Terkait dengan pengembangan SDM terdapat beberapa indikator yaitu jumlah pelatihan dan biaya pelatihan.

In relation to human resource development, there are several indicators, namely the number of training programs and training costs.

Tabel Proyeksi dan Target Tahun 2025

Table of Projection and Target for 2025

Uraian Description	Satuan Unit	Proyeksi 2025 Projection for 2025
Jumlah Pelatihan Total training	kali Times	69
Biaya Pelatihan Training cost	Rp	12.962.443.106

Target jumlah pelatihan tahun 2025 adalah 69 kali dengan jumlah biaya pelatihan sebesar Rp12,96 miliar. Target tersebut didasarkan pada hasil *Learning Council Meeting* antara PLN Pusdiklat dan Manajemen PLN Indonesia Power serta hasil pemetaan TNA Strategik Korporat dan Unit.

The target number of training programs in 2025 is 69 sessions, with a total training cost of Rp12.96 billion. This target is based on the results of the Learning Council Meeting between PLN Pusdiklat and the management of PLN Indonesia Power, as well as the results of the Corporate and Unit Strategic TNA mapping.

Proyek dan Target Aspek Pemasaran Marketing Projection and Target

Tabel Proyek dan Target Aspek Pemasaran Tahun 2025

Table of Marketing Projection and Target for 2025

(dalam %)(in %)

Uraian Description	Pencapaian Achievement
Pangsa Pasar Market Share	23,21
Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit PLTU Batubara Customer Satisfaction Survey for Coal SPP	81,71
Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit Non PLTU Batubara Customer Satisfaction Survey for Non-Coal SPP	83,36
Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit Jasa O&M Customer Satisfaction Survey for O&M Services Power Plants	83,76

Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit PLTU Batubara pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 81,71% dan Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit Non PLTU Batubara pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 83,36%. Penetapan ini berdasarkan asumsi perhitungan prognosa dari rata-rata target capaian per unit pembangkit serta dengan proyeksi tersebut sudah masuk dalam kategori sangat memuaskan untuk industri ketenagalistrikan.

Customer Satisfaction Survey for Coal SPP in 2025 is set at 81.71%, and Customer Satisfaction Survey for Non-coal SPP in 2025 is set at 83.36%. This determination is based on forecast calculations from the average target achievement per power plant unit, and the projection falls within the very satisfactory category for the electricity industry.

Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit Jasa O&M pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 83,76% berdasarkan asumsi perhitungan prognosa dari rata-rata target capaian per unit pembangkit jasa O&M serta dengan proyeksi tersebut sudah masuk dalam kategori sangat memuaskan untuk industri ketenagalistrikan.

Customer Satisfaction Survey for O&M Services Power Plants in 2025 is set at 83.76%, based on forecast calculations from the average target achievement per O&M power plant unit, and the projection falls within the very satisfactory category for the electricity industry.

Proyeksi dan Target Kebijakan Dividen Projection and Target Dividend Policy

Kebijakan dividen pada tahun 2025 ditetapkan melalui mekanisme Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan pertumbuhan kinerja Perusahaan.

The dividend policy in 2025 is determined through the mechanism of the General Meeting of Shareholders (GMS) by considering the Company's performance growth.



Kebijakan Dividen

Dividend Policy

Kebijakan Pembagian Dividen

Dividend Sharing Policy

Kebijakan Dividen PLN Indonesia Power mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

The dividend policy of PLN Indonesia Power refers to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which stipulates that a company is required to allocate a certain portion of its net profit each fiscal year for reserves if it has a positive retained earnings balance, until the reserve reaches at least 20% of the issued and paid-up capital. The distribution of dividends is carried out in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).

Rincian Pembagian Dividen

Details of Dividend Sharing

Tahun Buku 2024

Fiscal Year 2024

Pembagian dividen untuk tahun buku 2024 akan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan RUPS Tahunan Perusahaan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025.

The dividend sharing for the 2024 fiscal year will be carried out in accordance with the resolution of the Company's Annual GMS, scheduled for June 2025.

Tahun Buku 2023

Fiscal Year 2023

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2024, Pemegang Saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2023 untuk dividen sebesar Rp7,94 triliun.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders held on June 28, 2024, the Shareholders approved the allocation of the 2023 net profit for dividend distribution in the amount of Rp7.94 trillion.

Tabel Pembayaran Dividen

Table of Dividend Payout

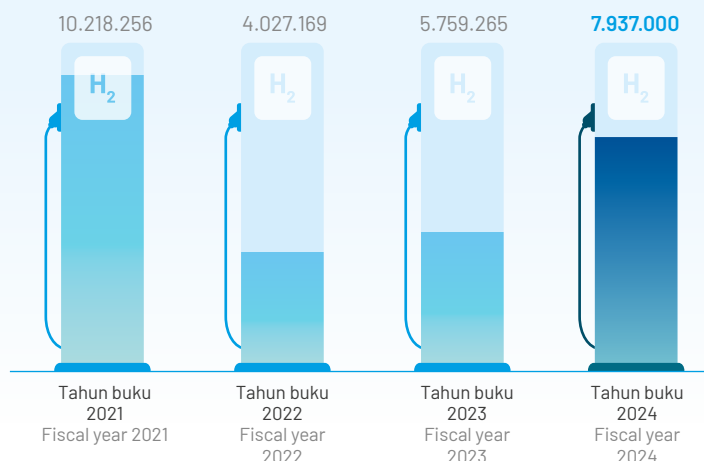
Uraian Description	Satuan Satuan	Tahun 2021 (Tahun Buku 2020) Year 2021 (Fiscal Year 2020)	Tahun 2022 (Tahun Buku 2021) Year 2022 (Fiscal Year 2021)	Tahun 2023 (Tahun Buku 2022) Year 2023 (Fiscal Year 2022)	Tahun 2024 (Tahun Buku 2023) Year 2024 (Fiscal Year 2023)	Tahun 2025 (Tahun Buku 2024) Year 2025 (Fiscal Year 2024)
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Profit Attributable to Owners of the Parent	Rp juta Rp million	10.218.256	4.027.169	4.678.605	8.176.665	13.090.663
Persentase Dividen Dividend Percentage	%	100	100	100	100	*
Dividen yang Dibagikan Appropriated Dividends	Rp juta Rp million	10.218.256	4.027.169	5.759.265	7.937.000	*
Dividen per Lembar Saham Dividend per Share	Rp	1.959	773	13	23	*
<i>Dividend Pay Out Ratio</i>		99,999999808: 0,000000000192	99,999999808: 0,000000000192	99,999999808: 0,000000000192	99,999999808: 0,000000000192	*
Pelaksanaan RUPS Tahunan Date of Annual GMS		29 Juni 2021 June 29, 2021	29 Juni 2022 June 29, 2022	13 Juni 2023 June 13, 2023	28 Juni 2024 June 28, 2024	
Tanggal Pengumuman Pembayaran Date of Payment Announcement		31 Desember 2021 December 31, 2021	8 September 2022 September 8, 2022	2 Agustus 2023 August 2, 2023	4 Oktober 2024 October 4, 2024	*
Tanggal Realisasi Pembayaran Dividen Kas Date of Cash Dividend Payment Completed		5 Januari 2022 January 5, 2022	14 Oktober 2022 October 14, 2022	29 September 2023 September 29, 2023	30 September 2024 September 30, 2024	*

* Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2024 dilaksanakan sesuai dengan hasil keputusan RUPS yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025

* Dividend payout for Fiscal Year 2024 will be paid in accordance with resolutions of GMS to be held in June 2025.

Grafik Dividen yang Dibagikan (Rp juta)

Table of Appropriated
Dividends (Rp million)



*) Disajikan kembali As restated

Informasi Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Information on Material Commitments for Capital Goods Investment

Dalam melakukan investasi barang modal, terdapat sejumlah perikatan material, baik dengan pihak berelasi maupun pihak ketiga.

In making capital goods investments, there are several material commitments, both with related parties and third parties.

Tabel Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Tahun 2024

Table of Material Commitments for Capital Goods Investment 2024

Jenis Ikatan Type of Commitment	Nama Pihak yang Melakukan Ikatan Name of the Party Making the Commitment	Tujuan dari Ikatan Purpose of the Commitment	Sumber Dana Source of Funds	Mata uang yang Menjadi Denominasi Currency Denomination
<i>Long Term Service Agreement (LTSA)</i>	Mitsubishi Heavy Industries	Memenuhi kebutuhan material <i>overhaul</i> , jasa TA, jasa repair, inspection management, training, dll Meeting the needs for overhaul materials, TA services, repair services, inspection management, training, etc.	Internal	JPY
<i>Master Service Agreement (MSA)</i>	GE Global Parts and Product GMBH	Kebutuhan <i>spare part</i> kapitalisir untuk <i>overhaul</i> Capitalized spare parts needed for overhaul	Internal	USD
Kontrak EPC EPC Contract	Konsorsium GE Global Parts & Products GmbH - Marubeni Corporation - PT Utama Karya Consortium of GE Global Parts & Products GmbH - Marubeni Corporation - PT Utama Karya	Pekerjaan EPC PLTGU Tambak Lorok Blok 3 EPC works for CCPP Tambak Lorok Block 3	Internal	USD; EUR; JPY
Kontrak EPC EPC Contract	PT Utama Karya (Persero)	Pekerjaan EPC PLTM Harjosari EPC works for PLTM Harjosari	Internal	EUR

Langkah Perlindungan Risiko terhadap Posisi Mata Uang Asing

Protection against Foreign Currency Risk

Penggunaan mata uang Rupiah untuk transaksi, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang diundangkan per tanggal 31 Maret 2015 yang mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Republik Indonesia, mengatur bahwa khusus untuk pengadaan *spare parts* impor yang telah diperjualbelikan di Indonesia, ikatan perjanjian/kontrak Perusahaan dan vendor wajib menggunakan mata uang Rupiah. Dalam ikatan ini, PLN Indonesia Power menggunakan kebijakan sistem *Floating Rate* yang dihitung dengan menggunakan formula nilai Kurs Tengah Transaksi EUR - Bank Indonesia.

The use of Rupiah currency for transactions, in line with Bank Indonesia Regulation (PBI) enacted on March 31, 2015, which mandates the use of Rupiah currency within the territory of the Republic of Indonesia, stipulates that specifically for the procurement of imported spare parts that have been traded in Indonesia, the agreement/ contract between the Company and the vendor must use Rupiah currency. In this agreement, PLN Indonesia Power applies a Floating Rate system policy calculated using the formula based on Bank Indonesia's EUR Transaction Middle Rate.

Ikatan Material Tahun 2024

Material Commitment in 2024

Berikut merupakan uraian mengenai perikatan material berupa ikatan dan kontinjensi yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2024.

The following is a description of material commitments in the form of binding agreements and contingencies entered into by the Company in 2024.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)

Power Purchase Agreement (PPA)

Perusahaan memiliki sejumlah PJBTL dengan PLN. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

The Company has several Power Purchase Agreements (PPA) with PLN. Under these agreements, PLN pays for the electricity supply provided by the Company in an amount determined based on a payment formula. The payments include components for capacity costs, energy, operations, and maintenance, which depend on the level of energy supplied as well as other variables specified in the agreements.

Berdasarkan Keputusan Direksi PLN No. 0357.K/DIR/2022 tanggal 28 November 2022 tentang tindak lanjut pembentukan *subholding* PLN Hukum Akhir Periode/Tahap, dan keputusan RUPS sirkuler Perusahaan tanggal 21 September 2022 dan 30 Desember 2022, terdapat perubahan dan pernyataan Kembali atas PJBTL antara Perusahaan dan PLN.

Based on PLN Board of Directors Decision No. 0357.K/DIR/2022 dated November 28, 2022, on the follow-up on the establishment of PLN subholding Final Legal Period/Stage, and the Company's Circular GMS resolutions dated September 21, 2022, and December 30, 2022, there have been amendments and restatements of the Power Purchase Agreements (PPAs) between the Company and PLN.

Pada tanggal 30 Desember 2022, PLN dan Perusahaan telah menandatangani 24 amendemen dan pernyataan kembali PJBTL yang terdiri dari: 8 PJBTL atas wilayah Jawa-Bali, 7 PJBTL atas wilayah Sumatera, 6 atas PJBTL atas wilayah Kalimantan, dan 3 PJBTL atas wilayah Sulawesi. Amendemen dan pernyataan kembali PJBTL tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dengan periode kontrak dari tahun 2023 sampai dengan 2032.

On December 30, 2022, PLN and the Company signed 24 amendments and restatements of PPAs consisting of: 8 PPAs for Java-Bali region, 7 PPAs for Sumatra region, 6 PPAs for Kalimantan region, and 3 PPAs for Sulawesi region. These amendments and restatements of PPAs became effective on January 1, 2023, with contract periods from 2023 to 2032.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)

Fuel Procurement Agreement

Perjanjian Pengadaan Gas

Gas Procurement Agreement

Tabel Perjanjian Pengadaan Gas

Table of Gas Procurement Agreement

Sektor Sector	Pemasok Suppliers	No. Perjanjian Agreement Number	Periode Period	Satuan Unit	Jumlah yang Disepakati (satuan angka penuh) Agreed Amount (full amount)
Priok & Cilegon	PT PLN Energi Primer Indonesia	0422.Pj/DAN.01.03/ PLNIP011002/2024	2024 - 2025	MMBTU	11.651.242
	PT PLN Energi Primer Indonesia	0063.Pj/DAN.01.03/ PLNIP011002/2025	2024 - 2027	MMBTU	282.469.200
	PT Perusahaan Gas Negara (Gas)	0556.PJ/EPI.01.02/010000/2019	2019- 2030	Standar Kargo LNG	Lampiran konfirmasi Confirmation Attachment
Cilegon	PT PLN Energi Primer Indonesia	0918.Pj/DAN.01.03/ PLNIP011002/2024	2024 - 2029	BBTUD	5
Priok, Cilegon, & Bali	BP Berau (LNG)	Perjanjian Jual dan Beli antara PT PLN (Persero) sebagai pembeli dan Tangguh PSC sebagai penjual Sale and Purchase Agreement between PT PLN (Persero) as the buyer and Tangguh PSC as the seller	2014 - 2035	Standar Kargo LNG	Program pengiriman tahunan Annual Delivery Program
	PT Pertamina (LNG)	MSPA: 1265.PJ/EPI.01.02/ DITDAN/2018 Amendemen II: 1275/Amd/ DAN.01.01/PLNEPI0100/2023	2017 - 2026	Standar Kargo LNG	Lampiran konfirmasi Confirmation Attachment
	PT Pertamina	112.PJ/061/IP/2023 2242.Amd/EPI.01.02/ PLNEPI0100/2023	2023 - 2024	Standar Kargo	Lampiran konfirmasi Confirmation Attachment
Bali	PT PLN Energi Primer Indonesia	0219.Pj/DAN.01.01/ PLNIP011002/2024 0121.Pj/DAN.01.03/ PLNIP011002/2025	2024 - 2026 MMBTU	MMBTU	7.927.551 (16 Kargo Kecil) 7.927.551 (16 Kargo Kecil)
	PT PLN Energi Primer Indonesia	0918.Pj/DAN.01.03/ PLNIP011002/2024	2024 - 2026	MMBTU	6.021.425 (12 Kargo Kecil) 6.021.425 (12 Kargo Kecil)

Sektor Sector	Pemasok Suppliers	No. Perjanjian Agreement Number	Periode Period	Satuan Unit	Jumlah yang Disepakati (satuan angka penuh) Agreed Amount (full amount)
Grati	1. Medco Energi Sampang Pty Ltd 2. Singapore Petroleum Sampang Ltd 3. Cue Sampang Pty.Ltd. (Gas Sampang)	Perjanjian penjualan gas Addendum Keenam Perjanjian Jual Beli Gas Sixth Addendum to the Gas Sales Agreement	2004 - 2027	BBTUD	Notifikasi JHK JHK Notification
	Kangean Energy Indonesia Ltd (Gas TSB)	1331-1.PJ/040/DIR/2005 462.AMD.Pj AMD II/040/DIR/2010	2012 - 2028	BBTUD	20 - 50 (TOP 90%)
	PT Inti Alasindo Energy	436.PJ/061/IP/2022 0058.Pj/DAN.01.03/ PLNIP011002/2025	2022 - 2026	BBTUD	0 - 40
Semarang	PT Sumber Petrindo Perkasa	97.PJ/061/IP/2007 Amendemen-3	2014 - 2029	BBTUD	40 - 54,5
	PT Pertamina (PGN JTB)	0670.Pj/EPI01.02/DIRUT/2017	2021 - 2035	BBTUD	90 - 100
Sorong	PT Malamoi Olom Wobok	331.PJ/061/IP/2020	2021 - 2025	BBTUD	7,2 - 8,8

Perjanjian Pengadaan Batubara

Coal Procurement Agreement

Tabel Perjanjian Pengadaan Batubara

Table of Coal Procurement Agreement

Sektor Sector	Pemasok Suppliers	No. Perjanjian Agreement Number	Jumlah dalam metrik ton Amount in Metric Ton	Periode Period
Suralaya 1-7	PT Bukit Asam	12.PJ/061/IP/2013	4.200.000	2013 - 2025
Banten 1 Suralaya Banten 2 Labuan Banten 3 Lontar Jabar 2 Pelabuhan Ratu Pangkalan Susu Labuhan Angin Teluk Sirih	PT Bukit Asam	303.PJ/041/DIR/2012	7.012.500	2012 - 2032
Suralaya 1-7	PT Oktasan Baruna Persada	406.PJ/061/IP/2018	2.100.000	2018 - 2026
Suralaya 1-7	PT Berau Coal	84.PJ/061/IP/2008	2.232.000	2009 - 2025
Suralaya 1-7	PT Artha Daya Coalindo	159.PJ/061/IP/2017	2.252.000	2017 - 2027
Suralaya 1-7	PT Multi Harapan Utama	373.PJ/061/IP/2022	1.000.000	2022 - 2026
Banten 1 Suralaya Banten 2 Labuan Banten 3 Lontar Jabar 2 Pelabuhan Ratu Pangkalan Susu Labuhan Angin Teluk Sirih	PT Titan Infra Energy	0017.PJ/EPI.02.02/DIRUT/2019	2.920.000	2019 - 2033

Sektor Sector	Pemasok Suppliers	No. Perjanjian Agreement Number	Jumlah dalam metrik ton Amount in Metric Ton	Periode Period
Banten 1 Suralaya Banten 2 Labuan Banten 3 Lontar Jateng 2 Adipala Teluk Sirih Pangkalan Susu Labuhan Angin	Konsorsium PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa Consortium of PT Arutmin Indonesia and PT Darma Henwa	0020.PJ/EPI.02.02/DIRUT/2019	5.553.000	2007 - 2027
Banten 1 Suralaya Banten 2 Labuan Banten 3 Lontar Jateng 2 Adipala Teluk Sirih Pangkalan Susu Labuhan Angin	Konsorsium PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa Consortium of PT Arutmin Indonesia and PT Darma Henwa	420.PJ/123/DIRUT/2008 421.PJ/123/DIRUT/2008	2.005.000	2008 - 2028
Banten 1 Suralaya Banten 2 Labuan Banten 3 Lontar Jateng 2 Adipala	Konsorsium PT Eksploitasi Energi Indonesia dan PT Borneo Indobara Consortium of PT Eksploitasi Energi Indonesia and PT Borneo Indobara	0200-3.Pj/EPI.01.01/ C01050000/2022	1.255.000	2022 - 2027

Harga pembelian batubara berkisar Rp995,45 juta dan Rp1,03 triliun per ton pada tahun 2024 sebelum penyesuaian spesifikasi batubara, dan untuk tahun 2023 berkisar Rp770,06 juta dan Rp1,41 triliun per ton.

The coal purchase price ranged between Rp995.45 million and Rp1.03 trillion per ton in 2024 before coal specification adjustments, and between Rp770.06 million and Rp1.41 trillion per ton in 2023.

Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Fuel Oil Procurement Agreement

Pada tahun 2024, pembelian atas volume BBM menggunakan formulasi harga dalam Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai berikut:

1. Perjanjian Jual Beli BBM No. 0007.Pj/DAN.01.01/PLNEPI0100/2024 tanggal 18 Maret 2024 untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2024;
2. Perjanjian Jual Beli BBM No. 0014.PJ/EPI.01.03/PLNEPI0304/2024 tanggal 8 Mei 2024 untuk periode 1 April sampai dengan 30 Juni 2024;
3. Perjanjian Jual Beli BBM No. 0026.Pj/EPI.01.03/PLNEPI0100/2024 tanggal 12 Agustus 2024 untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 September 2024;
4. *Heads of Agreement* No. 0054.Pj/EPI.0102/PLNEPI0100/2024 tanggal 20 Desember 2024 untuk periode 1 Oktober sampai dengan 14 Desember 2024;
5. *Heads of Agreement* No. 0011.Pj/EPI.0103/PLNEPI0100/2025 tanggal 25 Maret 2025 untuk periode 15 Desember sampai dengan 31 Maret 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, saldo utang usaha atas pembelian bahan bakar dari Pertamina adalah masing-masing sebesar Rp2,80 triliun dan Rp1,25 triliun.

In 2024, fuel oil purchases were made based on the price formula stipulated in the Fuel Oil Sales and Purchase Agreements as follows:

1. Fuel Oil Sales and Purchase Agreement No. 0007.Pj/DAN.01.01/PLNEPI0100/2024 dated March 18, 2024, for the period from January 1 to March 31, 2024;
2. Fuel Oil Sales and Purchase Agreement No. 0014.PJ/EPI.01.03/PLNEPI0304/2024 dated May 8, 2024, for the period from April 1 to June 30, 2024;
3. Fuel Oil Sales and Purchase Agreement No. 0026.Pj/EPI.01.03/PLNEPI0100/2024 dated August 12, 2024, for the period from July 1 to September 31, 2024.
4. *Heads of Agreement* No. 0054.Pj/EPI.0102/PLNEPI0100/2024 dated December 20, 2024, for the period from October 1 to December 14, 2024;
5. *Heads of Agreement* No. 0011.Pj/EPI.0103/PLNEPI0100/2025 dated March 25, 2025, for the period from December 15, 2024, to March 31, 2025.

As of December 31, 2024, and December 31, 2023, the outstanding trade payables for fuel purchases from Pertamina totaled Rp 2.80 trillion and Rp 1.25 trillion, respectively.

Perjanjian Pengadaan Uap Panas Bumi

Geothermal Steam Supply Agreement

Melalui PLN, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Pertamina untuk pengadaan uap panas bumi untuk daerah Kamojang selama 30 tahun yang berakhir tahun 2012 dan telah melalui Amendemen I Surat Perjanjian antara Pertamina dan PLN PLTP Unit 1,2,3 di Kamojang. Sampai tahun 2015, perjanjian masih menggunakan Amendemen kelima Perjanjian Interim antara PT Pertamina Geothermal Energy, PLN dan PLN Indonesia Power. Pada tanggal 11 Februari 2016, dilakukan amendemen secara keseluruhan dan pernyataan kembali atas perjanjian induk, yang berlaku mulai 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2040. Untuk PLTP Gunung Salak dan Darajat perjanjian berlaku selama 30 tahun sampai tahun 2030.

Through PLN, the Company entered into an agreement with Pertamina for the procurement of geothermal steam for the Kamojang area for a period of 30 years, which ended in 2012 and was amended through Amendment I to the Agreement Letter between Pertamina and PLN for Kamojang GPP Units 1, 2, and 3. Up until 2015, the agreement was still governed under the Fifth Amendment of the Interim Agreement between PT Pertamina Geothermal Energy, PLN, and PLN Indonesia Power. On February 11, 2016, a full amendment and restatement of the master agreement was executed, effective from August 1, 2012, to December 31, 2040. For the Gunung Salak and Darajat GPP, the agreement remains valid for a 30-year period until 2030.

Perjanjian Jual Beli Uap Panas Bumi PLTP Lahendong Unit 1 berlaku selama 30 tahun telah mengalami Amendemen I pada tahun 2016 berlaku sampai dengan 31 Desember 2031, untuk PLTP Lahendong Unit 2&3 perjanjian berlaku selama 30 tahun telah mengalami Amendemen I pada tahun 2016 berlaku sampai dengan 17 Juni 2037 untuk PLTP Lahendong Unit 2 dan pada 7 April 2039 untuk PLTP Lahendong Unit 3. Untuk PLTP Lahendong Unit 4 perjanjian berlaku selama 30 telah mengalami Amendemen I pada tahun 2016 berlaku sampai dengan 23 Desember 2041.

The Geothermal Steam Sale and Purchase Agreement for Lahendong GPP Unit 1 is valid for 30 years and underwent its First Amendment in 2016, effective until December 31, 2031. For Lahendong GPP Units 2 & 3, the agreement is valid for 30 years and also underwent its First Amendment in 2016—effective until June 17, 2037, for Unit 2, and April 7, 2039, for Unit 3. For Lahendong GPP Unit 4, the agreement is valid for 30 years and, following the First Amendment in 2016, is effective until December 23, 2041.

Perjanjian Jual Beli Uap Panas Bumi pada PLTP Ulubelu berlaku selama 30 tahun sampai dengan 16 September 2042.

The Geothermal Steam Sale and Purchase Agreement for the Ulubelu GPP is valid for 30 years, ending on September 16, 2042.

Komitmen

Commitment

Stand by Letter of Credit (SBLC)

Stand by Letter of Credit (SBLC)

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki fasilitas *non-cash loan* berupa SBLC dengan BNI yang digunakan untuk jaminan jual beli gas dengan IAE Inti Alasindo Energy dengan nominal US\$4.104.000 atau setara dengan Rp66,31 miliar dengan jangka waktu sampai dengan 14 Januari 2026 dan Perusahaan juga memiliki fasilitas *non-cash loan* berupa SBLC dengan BRI yang digunakan sebagai jaminan jual beli gas dengan Medco Energi Sampang Pty. Ltd dengan nominal US\$12.477.205 atau setara dengan Rp201,59 miliar dengan jangka waktu sampai dengan 30 Agustus 2025.

As of December 31, 2024, the Company holds a non-cash loan facility in the form of an SBLC with BNI, used as a guarantee for a gas sale and purchase agreement with IAE Inti Alasindo Energy, amounting to US\$4,104,000 or equivalent to Rp66.31 billion, with a term until January 14, 2026. The Company also holds a non-cash loan facility in the form of an SBLC with BRI, used as a guarantee for a gas sale and purchase agreement with Medco Energi Sampang Pty. Ltd, amounting to US\$12,477,205 or equivalent to Rp201.59 billion, with a term until August 30, 2025.

Investasi Barang Modal

Capital Goods Investment

Investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Perusahaan untuk memperoleh Aset Tetap atau menambah nilai Aset Tetap yang telah dimiliki dengan tujuan akan memberikan nilai manfaat di masa yang akan datang.

Investment refers to the expenditure made by the Company to acquire Fixed Assets or to increase the value of existing Fixed Assets with the aim of providing future benefits.

Nilai investasi Barang Modal Perusahaan tahun 2024 lebih tinggi dari Rp4,96 triliun pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp5,72 triliun pada tahun 2024. Rincian investasi barang modal tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

The value of the Company's Capital Goods Investment in 2024 increased from Rp4.96 trillion in 2023 to Rp5.72 trillion in 2024. The breakdown of capital goods investment in 2024 is presented in the following table:

Tabel Investasi Barang Modal Tahun 2021 - 2024 (Rp juta)

Table of Capital Goods Investment 2021 - 2024 (Rp million)

Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Goods Investment	2021	2022	2023	2024	Kebijakan Policy
Bangunan, waduk dan prasarana Buildings, reservoirs, and infrastructure	7.439	185.466	182.088	119.491	Tujuan Investasi: Keandalan dan efisiensi pembangkit Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal) Mata Uang: Rupiah Langkah Perlindungan Risiko: Asuransi untuk bangunan pembangkit dan pemeliharaan sesuai prosedur untuk waduk dan prasarana non pembangkit Investment Purpose: Reliability and efficiency of power plants Source of Funds: Investment Budget (Internal) Currency: Rupiah Risk Mitigation Measures: Insurance for power plant buildings and maintenance in accordance with procedures for reservoirs and non-power plant infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit Power plant installations and machinery	633.849	856.245	3.135.778	860.322	Tujuan Investasi: Keandalan dan efisiensi pembangkit Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal) Mata Uang: Rupiah dan Valas (JPY & EUR) Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur dan asuransi pembangkit Investment Purpose: Reliability and efficiency of power plants Source of Funds: Investment Budget (Internal) Currency: Rupiah and Foreign Currency (JPY & EUR) Risk Mitigation Measures: Maintenance following procedures and insurance for power plants
Peralatan transmisi Transmission equipment	2.163	141.722	74.751	-	Tujuan Investasi: Keandalan dan efisiensi pembangkit Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal) Mata Uang: Rupiah Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur dan asuransi pembangkit Investment Purpose: Reliability and efficiency of power plants Source of Funds: Investment Budget (Internal) Currency: Rupiah Risk Mitigation Measures: Maintenance following procedures and insurance for power plants

Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Goods Investment	2021	2022	2023	2024	Kebijakan Policy
Instalasi telekomunikasi Telecommunication installations	-	2.546	34.248	-	Tujuan Investasi: Mendukung kinerja operasional Perusahaan Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal) Mata Uang: Rupiah Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur Investment Purpose: Mendukung kinerja operasional Perusahaan Source of Funds: Investment Budget (Internal) Currency: Rupiah Risk Mitigation Measures: Maintenance in accordance with procedures
Peralatan umum General equipment	30.116	48.456	107.593	186.455	Tujuan Investasi: Mendukung kinerja operasional Perusahaan Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal) Mata Uang: Rupiah Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur Investment Purpose: Supporting the Company's operational performance Source of Funds: Investment Budget (Internal) Currency: Rupiah Risk Mitigation Measures: Maintenance in accordance with procedures
Kendaraan bermotor Motor vehicles	-	240	20.819	40.399	Tujuan Investasi: Mendukung kinerja operasional Perusahaan Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal) Mata Uang: Rupiah Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur Investment Purpose: Supporting the Company's operational performance Source of Funds: Investment Budget (Internal) Currency: Rupiah Risk Mitigation Measures: Maintenance in accordance with procedures
Material Cadang Spare materials	38.328	30.846	73.487	17.167	Tujuan Investasi: Menjamin ketersediaan material cadang Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal) Mata Uang: Rupiah Langkah Perlindungan Risiko: Pemakaian dan penyimpanan sesuai prosedur Investment Purpose: Ensuring the availability of spare materials Source of Funds: Investment Budget (Internal) Currency: Rupiah Risk Mitigation Measures: Usage and storage in accordance with procedures
Lain-lain Others	-	-	5.936	-	Tujuan Investasi: Mendukung Kinerja operasional perusahaan Sumber dana: Anggaran Investasi (Internal) Mata Uang: Rupiah Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur Investment Purpose: Supporting the Company's operational performance Source of Funds: Investment Budget (Internal) Currency: Rupiah Risk Mitigation Measures: Maintenance in accordance with procedures
Tanah Land	285	13.772	2.155	-	Tujuan Investasi: Modal utama membangun pembangkit Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal) Mata Uang: Rupiah Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur dan kepemilikan sesuai peraturan Investment Purpose: Core capital for power plant construction Source of Funds: Investment Budget (Internal) Currency: Rupiah Risk Mitigation Measures: Maintenance in accordance with procedures and ownership in compliance with regulations



Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Goods Investment	2021	2022	2023	2024	Kebijakan Policy
Pekerjaan dalam pelaksanaan Construction in Progress	2.070.219	2.402.804	1.293.723	4.320.945	Tujuan Investasi: Modal utama membangun pembangkit Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal) Mata Uang: Rupiah dan Valas (JPY, EUR & USD) Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur dan asuransi pembangkit Investment Purpose: Core capital for power plant construction Source of Funds: Investment Budget (Internal) Currency: Rupiah and Foreign Currency (JPY, EUR & USD) Risk Mitigation Measures: Maintenance in accordance with procedures and power plant insurance
Penyertaan Investment	-	-	31.000	179.661	Tujuan Investasi: Menambah kapasitas pembangkit Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal) Mata Uang: Rupiah dan Valas (USD) Langkah Perlindungan Risiko: Monitoring Progres Pembangunan secara berkala Investment Purpose: Increasing power plant capacity Source of Funds: Investment Budget (Internal) Currency: Rupiah and Foreign Currency (USD) Risk Mitigation Measures: Regular monitoring of construction progress
Jumlah Investasi Barang Modal Total Capital Investment	2.772.398	3.682.097	4.961.578	5.724.441	
Arus Kas Pembayaran untuk Investasi Barang Modal Cash Flows of Payment for Capital Investment	3.580.713	3.028.578	4.961.578	5.821.650	

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Material Information on Conflict-of-Interest Transactions and/or Transactions with Affiliates/Related Parties

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan Material Transactions Containing Conflicts of Interest

Selama tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sehingga tidak terdapat informasi yang diungkapkan.

During 2024, there were no transactions containing conflicts of interest; therefore, no information is disclosed.

Transaksi Material dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Material Transactions with Affiliates/Related Parties

Pihak-pihak Berelasi

Related Parties

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - viii. Entitas, atau setiap anggota dari kelompok yang menjadi bagiannya, memberikan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Related parties are individuals or entities that are related to the Company and its subsidiaries (reporting entity):

- a. An individual or their immediate family member is related to the reporting entity if such an individual:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting party or reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of the parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if meeting one of the following conditions:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same business group (meaning that one entity's parent, subsidiary, and sub-subsidiary are related to the other entity);
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture that is a member of a business group the other entity of which is a member);
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity, and the other entity is an associate of the same third entity;
 - v. The entity constitutes post-employment benefit plan for employee benefits from one of the reporting entities or entities that are related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity organizing the plan, the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
 - vi. Entity controlled or jointly controlled by the individual specified in letter (a);
 - vii. The individual identified in letter (a)(i) has significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or the parent of the entity),
 - viii. The entity, or any member of the group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to a parent of the reporting entity.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the government. The term government refers to government bodies, government agencies, and similar organizations at the local, national, or international level.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Entity related to the government is an entity controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or the Regional Government as the shareholders of the entity, or entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs as the shareholder's proxy.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang relevan dan saldo juga disajikan dalam CALK No. 27.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes to the Financial Statements and the balances are also presented in Note 27.

Nama Pihak yang Bertransaksi

Names of Parties under Transactions

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

The following is a list of related parties who have transactions with the Company:

Tabel Nama Pihak Berelasi Tahun 2024

Table of Related Parties' Name in 2024

Pihak-pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relation	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Pelayanan Listrik negara (Persero) (PLN)	Entitas induk pengendali Controlling parent entity	Transaksi penjualan tenaga listrik, jasa pemeliharaan dan pinjaman dari pemegang saham Sales of electricity, operation and maintenance services and loans from a shareholder
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (YPK PLN)	Pemegang saham minoritas Minority shareholder	Penyertaan modal Paid-in capital
Direktur dan Dewan Komisaris Grup Board of Directors and Board of Commissioners of the Group	Personil manajemen kunci Key management personnel	Pembayaran gaji dan tunjangan Payment of salaries and allowances
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek Placement of cash and cash equivalents and short-term investment
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek Placement of cash and cash equivalents and short-term investment
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek Placement of cash and cash equivalents and short-term investment
PT Bank Syariah Indonesia (BSI)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek Placement of cash and cash equivalents and short-term investment

Pihak-pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relation	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Pertamina (Persero)(Pertamina)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas Purchase of fuels and lubricants
PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian batubara Purchase of coal
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels
PT Nusantara Regas (NR)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TPI)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi milik Perusahaan Insurance services for Company buildings, installations and power plants, and transmission equipment
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)(Pelindo)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Sewa Lease
PT Rajamandala Electric Power (REP), PT GCL Indo Tenaga (GCL), PT Indo Acwa Tenaga Saguling (IATS), PT Minahasa Brantas Energi (MBE), PT Indo Acwa Tenaga Singkarak (IATSing), PT Indo Raya Tenaga (IRT), PT Maxpower Cogindo Batam (MCB), dan PT Perta Daya Gas (PDG)	Ventura bersama	Investasi, pemberian pinjaman, perdagangan batubara, jasa pemeliharaan dan pengelolaan, sewa Investment, issuance of loan, trade of coals, operations and maintenance services, lease
PT Indo Pusaka Berau (IPB), PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC), dan Trina Mas Agra Indonesia (TMAI)	Entitas asosiasi	Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama Investment in associates and joint ventures
PT PLN Nusantara Power (PNP)	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pendapatan jasa Other services transactions
PT Haleyora Power (Haleyora)	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi penyediaan tenaga kerja Internet service provider transaction
PT Indonesia Comnets Plus (ICON+)	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi penyedia layanan internet Internet service provider transaction
PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI)	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLNE)	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi jasa profesional Professional services transaction
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG)	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi jasa transportasi bahan bakar dan batubara Fuels and coal transportation services transaction
PT PLN Energi Gas (PLN EG)	Entitas sepengendali Entity under common control	Sewa Lease
Dana Pensiun - Perusahaan Listrik Negara (DP-PLN)	Pihak berelasi lainnya Other related parties	Pengelola dana pensiun Pension fund manager

Tujuan Transaksi Pihak Berelasi

Purpose of Transactions with Related Parties

Tujuan utama dilakukannya transaksi dengan pihak berelasi secara umum adalah salah satu bentuk dukungan kepada kelancaran dan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

The main purpose of conducting transactions with related parties is generally to support the smooth operation and sustainability of the Company's business.

Nilai Transaksi Pihak Berelasi

Value of Transactions with Related Parties

Berikut adalah nilai transaksi dengan pihak berelasi pada tahun 2023 dan 2024:

Below are the transaction values with related parties for the years 2023 and 2024:

Tabel Nilai Transaksi Pihak Berelasi

Table of Value of Transactions with Related Parties

(dalam jutaan Rupiah)(in millions of Rupiah)

	2023	2024
Kas dan setara kas Cash and Cash Equivalent		
BNI	3.216.844	3.981.952
Bank Mandiri	195.200	341.732
BRI	86.021	190.233
BSI	27.150	34.770
Jumlah Total	3.525.215	4.548.687
Piutang usaha Trade Receivables		
PLN	52.062.808	69.327.519
PNP	9.143	149
GCL	55.284	-
REP	4.049	-
IPB	2.144	-
Lain-lain Others	2.493	34.411
Jumlah Total	52.135.921	69.362.079
Aset keuangan dari konsesi jasa Financial assets of service concession		
PLN	1.148.788	1.028.949
Piutang pihak berelasi Receivables from Related Parties		
REP	437.855	485.856
PLN	240.839	469.042
SGPJB	195.167	195.167
GCL	58.923	123.836
PNP	55.566	-
PDG	36.387	-
IPB	1.411	-
Lain-lain Others	93.857	-
Jumlah Total	1.120.005	1.398.445

	2023	2024
Utang usaha Trade payables		
EPI	1.125.171	3.112.030
Pertamina	1.249.216	2.799.025
PTBA	1.307.618	1.258.061
BAG	583.636	116.199
Lain-lain Others	1.484.206	1.220.110
Jumlah Total	5.749.847	8.505.425
Beban yang masih harus dibayar Accrued expenses		
PLN	354.360	106.888
Pinjaman dari pemegang saham Loans from shareholder		
PLN	1.759.499	3.186.415
Liabilitas sewa Lease liabilities		
Pelindo	1.138.102	1.157.553
PLN	1.189.674	883.197
PDG	990.143	850.622
PLN EG	483.141	471.881
Jumlah Total	3.801.060	3.363.253
Pendapatan konsensi jasa Revenue of service concession		
PLN	268.658	256.344
Penjualan tenaga listrik Sales of electricity		
PLN	101.934.634	108.706.764
Pendapatan jasa Service revenue		
PLN	923.536	1.042.916
GCL	306.363	102.080
PNP	44.616	10.344
REP	2.304	1.655
Jumlah Total	1.276.819	1.156.995
Beban usaha Operating expenses		
Pertamina	3.004.855	17.890.518
EPI	3.291.207	11.115.762
PTBA	8.744.166	8.495.375
PGN	3.572.641	2.872.993
BAG	3.225.060	2.429.140
PLN	910.320	1.163.314
NR	594.479	499.007
TPI	-	358.357
Haleyora	69.317	72.647
ICON+	30.729	40.661
PNP	5.948	318
PLNE	17.445	80
Lain-lain Others	222.519	944.658
Jumlah Total	23.688.686	45.882.830

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp116,67 miliar dan Rp121,38 miliar. Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tersebut merupakan imbalan kerja jangka pendek.

The total compensation paid to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors in 2024 and 2023 amounted to Rp116.67 billion and Rp121.38 billion, respectively. All compensation to the Board of Commissioners and Board of Directors constitutes short-term employee benefits.

Kewajaran Transaksi Pihak Berelasi

Fairness of Transactions with Related Parties

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan, telah sesuai dengan standar PSAK 224: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Selain itu, penilaian kewajaran transaksi dengan pihak berelasi didasarkan pada the arm's length principle.

The fairness of all transactions conducted with related parties, whether made under terms and conditions similar to those with third parties or not, as disclosed in the financial statements, complies with PSAK 224: Related Party Disclosures. Additionally, the assessment of the fairness of related party transactions is based on the arm's length principle.

Keterlibatan Organ Perusahaan dalam Proses Review Transaksi Pihak Berelasi

Involvement of Company Organs in the Process of Reviewing Transactions with Related Parties

Mekanisme reviu atas transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui proses audit, baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Dalam proses audit tersebut, Perusahaan melibatkan Organ Perusahaan diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan beberapa Divisi yang terkait.

The review mechanism for transactions with related parties is carried out through an audit process, conducted by both internal and external auditors. In this audit process, the Company involves corporate bodies including the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, and several related Divisions.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Komite Audit, Dewan Komisaris berperan dalam memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar transaksi dengan pihak berelasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).

Based on the review conducted by the Audit Committee, the Board of Commissioners plays a role in providing guidance and input to the Directors to ensure that transactions with related parties are carried out in accordance with the principle of fair transactions (*arm's length principle*).

Direksi memastikan seluruh transaksi dengan pihak berelasi di sepanjang tahun 2023, telah melalui prosedur yang memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*). Informasi lebih rinci terkait transaksi pihak berelasi telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan pada Catatan 27.

The Board of Directors ensure that all related party transactions throughout 2023 have gone through adequate procedures and have been conducted in accordance with generally accepted business practices and comply with the arm's length principle. More detailed information regarding related party transactions is disclosed in the Company's Consolidated Financial Statements in Note 27.

Mekanisme Review dan Pemenuhan Peraturan Transaksi Pihak Berelasi

Mechanism of Review and Compliance with Regulations for Transactions with Related Parties

Mekanisme review atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor. Salah satu tujuan pengungkapan transaksi pihak berelasi adalah upaya pemenuhan PSAK 224: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

The review mechanism for related party transactions is conducted through an audit process by both internal and external auditors. As an effort to ensure the fairness of the transactions and compliance with generally accepted accounting standards in Indonesia, the above affiliate transaction reports have been audited by the Auditor. One of the objectives of disclosing related party transactions is to fulfill PSAK 224: Related Party Disclosures.

Kepatuhan terhadap Peraturan yang Berlaku

Compliance with Applicable Regulations

Perusahaan tidak menghadapi kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material, terutama dalam tiga tahun terakhir.

The Company has not faced any cases of non-compliance with laws, rules, and regulations related to significant or material related party transactions, particularly in the last three years.

Informasi Material terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and/or Restructuring

Seiring dengan terbentuknya subholding PLN, PLN Indonesia Power melakukan beberapa *corporate action* untuk mendukung kelancaran operasi Perusahaan untuk memaksimalkan kinerja operasional dan nilai Perusahaan.

In line with the establishment of PLN's subholding, PLN Indonesia Power has carried out several corporate actions to support the smooth operation of the Company in order to maximize operational performance and corporate value.

Informasi Investasi Information on Investment

Terkait dengan kegiatan investasi, PLN Indonesia Power melakukan tiga jenis kegiatan investasi yaitu diantaranya adalah Investasi Pembangkit Eksisting, Pengembangan Usaha dan Penyertaan; Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama; dan Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Anak. Berikut adalah penjelasan singkatnya:

Regarding investment activities, PLN Indonesia Power undertakes three types of investment activities, namely: Investment in Existing Power Plants, Business Development, and Equity Participation; Equity Investment in Associated Entities and Joint Ventures; and Equity Investment in Subsidiaries. The following is a brief explanation:

Investasi Pembangkit Eksisting, Pengembangan Usaha dan Penyertaan Investment in Existing Power Plants, Business Development, and Equity Participation

Investasi ini dilakukan PLN Indonesia Power dengan tujuan untuk keandalan dan efisiensi pembangkit eksisting dan pengembangan pembangkit baru serta usaha terkait lainnya. PLN Indonesia Power mengatur mekanisme investasi ini dalam Keputusan Direksi (Kepdir) No. 031.K/010/IP/2020 tentang Pengelola Anggaran Perusahaan Serta Wewenang dan Tanggung Jawabnya, Kepdir No. 032.K/010/IP/2020 tentang Kebijakan dan Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Kepdir No. 033.K/010/IP/2020 tentang Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Anggaran Perusahaan dan Kepdir No. 0563.K/IP/2023 perihal Pedoman Evaluasi Investasi Pengelolaan Pembangkitan dan Pengembangan di Lingkungan PT PLN Indonesia Power.

This investment is carried out by PLN Indonesia Power with the aim of ensuring the reliability and efficiency of existing power plants, as well as the development of new power plants and other related businesses. PLN Indonesia Power regulates the investment mechanism through the Board of Directors' Decision (Kepdir) No. 031.K/010/IP/2020 on Company Budget Managers and Their Authorities and Responsibilities, the Board of Directors' Decision No. 032.K/010/IP/2020 on Policies and Procedures for the Preparation of the Company's Work Plan and Budget, the Board of Directors' Decision No. 033.K/010/IP/2020 on Policies and Procedures for the Implementation of the Company Budget, and the Board of Directors' Decision No. 0563.K/IP/2023 on Guidelines for Investment Evaluation in Generation Management and Development within PT PLN Indonesia Power.

Dana yang dialokasikan untuk investasi ini menggunakan dana dari internal, maupun melalui pendanaan alternatif seperti ECA.

The funds allocated for this investment are sourced from internal funding as well as alternative financing such as ECA.

Realisasi *disburse* tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 17,33% menjadi Rp5,82 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4,96 triliun. Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan investasi untuk keandalan pembangkit yaitu meningkat sebesar 54,94%.

The disbursement realization in 2024 increased by 17.33% to Rp5.82 trillion compared to Rp4.96 trillion in 2023. This increase was due to an increase in investment requirements for power plant reliability by 54.94%.

Realisasi investasi pada pembangkit eksisting, pengembangan usaha dan penyertaan disajikan pada tabel berikut:

The realization of investment in existing power plants, business development, and equity participation is presented in the following table:

Tabel Investasi Pembangkit Eksisting, Pengembangan Usaha dan Penyertaan

Table of Investment in Existing Power Plants, Business Development, and Equity Participation

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)(in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024
Program Investasi Pembangkit Existing: Existing Power Plants Investment Plan:					
Program Keandalan Pembangkit Power Plant Reliability Program	1.021.572	1.078.440	3.269.777	5.066.174	54,94%
Program Efisiensi Pembangkit Power Plant Efficiency Program	-	19.997	27.688	-	100,00%
Program Pelestarian Lingkungan Environmental Preservation Program	24.487	25.807	90.624	5.616	(93,80)%
Program Sarana Fasilitas Penunjang Supporting Facilities Program	37.715	67.748	242.829	112.508	(53,67)%
Sub Jumlah Sub Total	1.083.774	1.191.991	3.630.919	5.184.298	42,78%
Program Pengembangan Usaha: Business Development Program:					
Pengembangan Pembangkit Baru New Power Plant Development	2.455.928	1.825.024	1.299.380	534.869	(58,84)%
Jasa Konsultan Consultant Service	2.565	11.475	279	5.856	1.998,92%
Pengembangan Usaha Lainnya Other Business Developments	38.446	88	31.000	96.627	211,70%
Sub Jumlah Sub Total	2.496.939	1.836.587	1.330.659	637.352	(52,10)%
Jumlah Pembangkit Existing, Pengembangan Usaha dan Penyertaan Total Existing Power Plants, Business Development, and Equity Participation	3.580.713	3.028.578	4.961.578	5.821.650	17,33%

Investasi Persentase Kepemilikan Saham pada Entitas Anak

Share Percentage Investment in Subsidiaries

PLN Indonesia Power mengatur mekanisme investasi pada entitas anak yang merupakan salah satu aksi korporasi Perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Perusahaan.

PLN Indonesia Power regulates the investment mechanism in subsidiaries as one of the Company's corporate actions carried out in accordance with the Company's Budget.

Investasi ini dilakukan PLN Indonesia Power dengan tujuan untuk pengembangan pembangkit baru dan usaha terkait lainnya dengan menggunakan dana dari internal. Realisasi investasi saham pada entitas anak disajikan pada tabel berikut:

This investment is carried out by PLN Indonesia Power with the aim of developing new power plants and other related businesses using internal funding. The realization of equity investment in subsidiaries is presented in the following table:

Tabel Persentase Kepemilikan Saham pada Entitas Anak

Table of Share Investment Percentage in Subsidiaries

Entitas Anak Subsidiary	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Komersial Year of Commercial Operation	Penyertaan (%) Equity Participation/Investment (%)			
			2021	2022*)	2023	2024
PT PLN Indonesia Power Services, sebelumnya bernama PT Cogindo DayaBersama PT PLN Indonesia Power Services, formerly known as PT Cogindo DayaBersama	Co-generation, pemasok energi, jasa pelayanan energi dan manajemen Co-generation, energy supplier, energy services, and management	1999	99,99	99,99	99,99	99,99
PT Artha Daya Coalindo	Perdagangan dan jasa pengangkutan batu bara Coal trading and transportation services	1998	80,00	80,00	80,00	80,00
PT Indo Ridlatama Power	Pembangkitan tenaga listrik Electric power generation	2018	90,00	90,00	90,00	90,00
PT PLN Indonesia Power Renewables dan entitas anak	Ketenagalistrikan dan energi Electricity and energy	2016	99,99	99,99	99,99	99,99

Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Share Investment in Associates and Joint Ventures

PLN Indonesia Power mengatur mekanisme investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang merupakan salah satu aksi korporasi Perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Perusahaan.

PLN Indonesia Power regulates the investment mechanism in associated entities and joint ventures as one of the Company's corporate actions carried out in accordance with the Company's Budget.

Investasi ini dilakukan PLN Indonesia Power dengan tujuan untuk pengembangan pembangkit baru dan usaha terkait lainnya dengan menggunakan dana dari internal. Realisasi investasi penyertaan saham pada entitas asosiasi dan ventura bersama disajikan pada tabel berikut:

This investment is carried out by PLN Indonesia Power with the aim of developing new power plants and other related businesses using internal funding. The realization of equity investment in associated entities and joint ventures is presented in the following table:

Tabel Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Table of Share Investment in Associates and Joint Ventures

Nama Perusahaan Company Name	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Komersial Year of Commercial Operation	Penyertaan (%) Equity Participation/ Investment (%)			
			2021	2022*)	2023	2024
Entitas Asosiasi: Associates:						
PT Indo Pusaka Berau	Pembangkit tenaga listrik. Electric power generation.	2005	46,53	46,53	46,53	46,53
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	Perdagangan barang dan jasa, enjiiring <i>supply chain</i> dan konsultasi dibidang ketenagalistrikan. Trading of goods and services, engineering, supply chain, and consultancy in the electricity sector.	2018	49,00	49,00	49,00	49,00

Nama Perusahaan Company Name	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Komersial Year of Commercial Operation	Penyertaan (%) Equity Participation/ Investment (%)			
			2021	2022*)	2023	2024
PT Trina Mas Agra Indonesia	Manufaktur Solar PV Solar PV manufacturing	*				
Ventura Bersama: Joint Ventures:						
PT Perta Daya Gas**	Transportasi, penyimpanan dan regasifikasi LNG. LNG transportation, storage, and regasification.	2015	35,00	35,00	35,00	-
PT Rajamandala Electric Power	Pembangkitan tenaga listrik. Electric power generation.	2019	51,00	51,00	51,00	51,00
PT GCL Indotenaga	Pembangkitan tenaga listrik. Electric power generation.	2021	35,00	35,00	35,00	35,00
PT Indo Raya Tenaga	Pembangkitan tenaga listrik. Electric power generation.	*	51,00	51,00	51,00	51,00
PT Maxpower Cogindo Batam	Pembangkit tenaga listrik, aktivitas penunjang kelistrikan, perdagangan mesin, suku cadang dan perlengkapannya. Electric power generation, electricity support activities, trading of machinery, spare parts, and related equipment.	2022	30,00	30,00	30,00	30,00
PT Indo ACWA Tenaga Saguling***	Pembangkitan tenaga listrik. Electric power generation.	*	-	-	-	51,00
PT Minahasa Brantas Energi***	Pembangkitan tenaga listrik. Electric power generation.	*	-	-	-	51,00
PT Indo ACWA Tenaga Singkarak***	Pembangkitan tenaga listrik. Electric power generation.	*	-	-	-	51,00

* Dalam tahap pengembangan

** PT Perta Daya Gas telah dialihkan ke PT Energi Primer Indonesia sebagai tindak lanjut HSH PLN Group mendukung keselarasan strategi pengembangan bisnis PT PLN (Persero) pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagaimana Akta Jual Beli Saham No. 83 oleh Notaris Syahreza Annaz, S.H., M.Kn

*** Penyertaan pada tahun 2024

* Under development

** PT Perta Daya Gas has been transferred to PT Energi Primer Indonesia as a follow-up to PLN Group's HSH to support the alignment of PT PLN (Persero)'s business development strategy on October 29, 2024, as stated in Share Purchase Deed No. 83 by Notary Syahreza Annaz, S.H., M.Kn.

*** Equity participation in 2024

Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power melakukan penyertaan melalui PT PLN Indonesia Power Renewables pada ventura bersama berikut:

1. Penyertaan pada PT Indo ACWA Tenaga Saguling (IATS) dilakukan berdasarkan Akta Penyertaan Keputusan Pemegang Saham IATS No. 98, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. Tujuan dari penyertaan pada IATS secara umum untuk pengembangan pembangkit listrik melalui PLTS Saguling 60 MW.
2. Penyertaan pada PT Minahasa Brantas Energi (MBE) dilakukan berdasarkan Akta Penyertaan Keputusan Pemegang Saham MBE No. 339, tanggal 19 November 2024 oleh Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. Tujuan dari penyertaan pada MBE secara umum untuk pengembangan pembangkit listrik melalui PLTA Poigar 2x15 MW.

In 2024, PLN Indonesia Power made equity participations through PT PLN Indonesia Power Renewables in the following joint ventures:

1. The equity participation in PT Indo ACWA Tenaga Saguling (IATS) was made based on the Shareholders' Resolution Deed of IATS No. 98, dated August 12, 2024, by Notary Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. The purpose of the participation in IATS is generally for the development of power plants through the Saguling SPP 60 MW.
2. The equity participation in PT Minahasa Brantas Energi (MBE) was made based on the Shareholders' Resolution Deed of MBE No. 339, dated November 19, 2024, by Notary Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. The purpose of the participation in MBE is generally for the development of power plants through the Poigar 2x15 MW HPP.

3. Penyertaan pada PT Indo ACWA Tenaga Singkarak (IATSing) dilakukan berdasarkan Akta Penyertaan Keputusan Pemegang Saham IATSing No. 14, tanggal 30 Desember 2024 oleh Notaris Anisa Syamsiah Soraya, S.H., M.Kn. Tujuan dari penyertaan pada IATSing secara umum untuk secara umum untuk pengembangan pembangkit listrik melalui PLTS Singkarak 60 MW.

3. The equity participation in PT Indo ACWA Tenaga Singkarak (IATSing) was made based on the Shareholders' Resolution Deed of IATSing No. 14, dated December 30, 2024, by Notary Anisa Syamsiah Soraya, S.H., M.Kn. The purpose of the participation in IATSing is generally for the development of power plants through the Singkarak SPP 60 MW.

Investasi Penyertaan Saham PT PLN Indonesia Power Renewables pada Entitas Anak Equity Investment of PT PLN Indonesia Power Renewables in Subsidiaries

Tabel Persentase Kepemilikan Saham PT PLN Indonesia Power Renewables pada Entitas Anak

Table of Shareholding Percentages of PT PLN Indonesia Power Renewables in Subsidiaries

Entitas Anak Subsidiary	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Komersial Year of Commercial Operation	Penyertaan (%) Equity Participation/ Investment (%)			
			2021	2022*)	2023	2024
PT PLN Indonesia Geothermal	Pengembangan energi baru dan terbarukan. New and renewable energy development	2019	95,45	95,81	96,04	96,04
PT Suralaya Indo Tenaga	Ketenagalistrikan dan energi. Electricity and energy.	-	99,99	99,99	99,99	99,99
PT Putra Suralaya Indotenaga	Ketenagalistrikan dan energi. Electricity and energy.	-	99,99	99,99	99,99	99,99
PT PLN Indonesia Power Renewables dan entitas anak	Ketenagalistrikan dan energi. Electricity and energy.	2016	99,99	99,99	99,99	99,99

Informasi Ekspansi Information on Expansion

PLN Indonesia Power mengatur mekanisme ekspansi yang merupakan salah satu aksi korporasi Perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Perusahaan.

PLN Indonesia Power regulates the expansion mechanism as one of the Company's corporate actions carried out in accordance with the Company's Budget.

Pada tahun 2024, tidak terdapat kegiatan ekspansi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan ekspansi.

In 2024, there were no expansion activities; therefore, there is no information regarding objectives, value or transaction amount, and source of funds from expansion activities.

Informasi Divestasi Information on Divestment

PLN Indonesia Power mengatur mekanisme divestasi yang merupakan salah satu aksi korporasi Perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Perusahaan.

PLN Indonesia Power regulates the divestment mechanism as one of the Company's corporate actions carried out in accordance with the Company's Budget.

Pada tahun 2024, terdapat divestasi entitas ventura bersama yaitu PT Perta Daya Gas. PT Perta Daya Gas telah dialihkan ke PT Energi Primer Indonesia sebagai tindak lanjut HSH PLN Group mendukung keselarasan strategi pengembangan bisnis PT PLN (Persero) pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagaimana Akta Jual Beli Saham No. 83 oleh Notaris Syahreza Annaz, S.H., M.Kn.

In 2024, there was a divestment of a joint venture entity, namely PT Perta Daya Gas. PT Perta Daya Gas was transferred to PT Energi Primer Indonesia as a follow-up to the PLN Group's HSH supporting the alignment of PT PLN (Persero)'s business development strategy on October 29, 2024, as stated in Share Purchase Deed No. 83 by Notary Syahreza Annaz, S.H., M.Kn.

Informasi Akuisisi

Information on Acquisition

PLN Indonesia Power mengatur mekanisme akuisisi yang merupakan salah satu aksi korporasi Perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Perusahaan.

PLN Indonesia Power regulates the acquisition mechanism as one of the Company's corporate actions carried out in accordance with the Company's Budget.

Pada tahun 2024, tidak terjadi akuisisi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan restrukturisasi.

In 2024, no acquisition occurred; therefore, there is no information regarding objectives, value or transaction amount, and source of funds from restructuring activities.

Informasi Restrukturisasi Utang atau Modal

Information on Debt or Capital Restructuring

PLN Indonesia Power mengatur mekanisme restrukturisasi yang merupakan salah satu aksi korporasi Perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Perusahaan.

PLN Indonesia Power regulates the restructuring mechanism as one of the Company's corporate actions carried out in accordance with the Company's Budget.

Pada tahun 2024, tidak terjadi restrukturisasi utang/modal sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan restrukturisasi.

In 2024, no debt or capital restructuring occurred; therefore, there is no information regarding objectives, value or transaction amount, and source of funds from restructuring activities.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of Proceeds from Public Offering

Sampai dengan tahun 2024, PLN Indonesia Power belum menjadi perusahaan terbuka (*go public*) atau belum melakukan Penawaran Umum di bursa efek, sehingga tidak ada informasi terkait dengan total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana dan tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas perubahan penggunaan dana.

As of 2024, PLN Indonesia Power has not become a publicly listed company (*go public*) and has not conducted a Public Offering on the stock exchange. Therefore, there is no information available regarding total funds raised, planned use of proceeds, details of fund utilization, fund balances, or the date of approval by the General Meeting of Shareholders (GMS) concerning any changes in the use of proceeds.



Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts after Accountant's Report Date

Tidak terdapat informasi dan fakta material atau kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan tahun 2024, sehingga tidak terdapat informasi yang diungkapkan beserta dengan potensi dampak yang akan timbul.

There is no material information and facts or significant events after the accountant's report date in 2024, and therefore no information is disclosed along with the potential impact that may arise.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Changes in Accounting Policies and Their Impacts on the Company

Pernyataan Kepatuhan Kebijakan Akuntansi

Statement of Compliance with Accounting Policies

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) Ikatan Akuntan Indonesia.

The consolidated financial statements have been prepared in line with Indonesian Financial Accounting Standards. These include the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI).

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Changes in Accounting Policies

Penerapan dari amendemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup PLN Indonesia Power dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

1. Amendemen PSAK No. 201, Penyajian Laporan Keuangan – Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
2. Amendemen PSAK No. 201, Penyajian Laporan Keuangan – Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
3. Amendemen PSAK No. 116, Sewa – Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik;
4. Amendemen PSAK No. 207, Laporan Arus Kas dan PSAK No. 107, Instrumen Keuangan: Pengungkapan – Pengaturan Pembiayaan Pemasok.

The implementation of amendments to accounting standards, effective from January 1, 2024, did not result in significant changes to the accounting policies of the PLN Indonesia Power Group and did not have a material impact on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year:

1. Amendment to PSAK No. 201, Presentation of Financial Statements – Classification of Liabilities as Current or Non-Current;
2. Amendment to PSAK No. 201, Presentation of Financial Statements – Long-term Liabilities with Covenants;
3. Amendment to PSAK No. 116, Leases – Lease Liabilities in a Sale and Leaseback Transaction;
4. Amendments to PSAK No. 207, Statement of Cash Flows and PSAK No. 107, Financial Instruments: Disclosures – Supplier Finance Arrangements.

Perubahan Kebijakan Akuntansi PSAK dan ISAK

Changes in PSAK and ISAK Accounting Policies

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup PLN Indonesia Power adalah sebagai berikut:

1. PSAK No. 117, Kontrak Asuransi;
2. Amendemen PSAK No. 117, Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109, Informasi Komparatif;
3. Amendemen PSAK No. 221, Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran.

Standar baru dan amendemen di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, kecuali untuk PSAK No. 74, Amendemen PSAK No. 10 dan Amendemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Indonesia.

Certain new accounting standards and interpretations that have been issued but are not required to be applied in the year ended December 31, 2024, and have not been early adopted by PLN Indonesia Power Group are as follows:

1. PSAK No. 117, Insurance Contracts;
2. Amendment to PSAK No. 117, Insurance Contracts on the Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109, Comparative Information;
3. Amendment to PSAK No. 221, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates – Lack of Exchangeability.

The new standards and amendments above are effective starting January 1, 2024, except for PSAK No. 74, the Amendment to PSAK No. 10, and the Amendment to PSAK No. 74, which are effective from January 1, 2025; however, early adoption is permitted.

Starting January 1, 2024, references to each PSAK and ISAK will be revised in accordance with the issuance by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants.

Perubahan Kebijakan Akuntansi Lainnya

Changes in Other Accounting Policies

Pada tahun 2024, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi lainnya selain perubahan ISAK dan PSAK.

In 2024, there were no changes in accounting policies other than the amendments to ISAK and PSAK.

Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi pada Perusahaan

Impacts of the Changes in Accounting Policies on the Company

Penyesuaian Perubahan Kebijakan Akuntansi PSAK dan ISAK terhadap Laporan Keuangan

Adjustment to the Changes in PSAK and ISAK Accounting Policies on Financial Statements

Penerapan dari amendemen dan revisi terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan. Implementasi

The adoption of the amendments and revisions to accounting standards, which became effective on January 1, 2024, did not result in significant changes to the Company's accounting policies and did not have a material impact on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year. The implementation of these accounting



dari standar-standar akuntansi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dapat dilihat pada Laporan Keuangan Audit pada Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampirkan dalam Laporan Tahunan ini.

Sedangkan dampak dari standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan belum diterapkan secara dini, saat ini masih dalam proses penilaian potensi dampak yang timbul terhadap Perusahaan.

standards, both qualitatively and quantitatively, can be found in the Notes to the Financial Statements attached to the Audited Financial Statements in this Annual Report.

Meanwhile, the impact of certain new accounting standards and interpretations that have been issued but are not mandatory for the year ending December 31, 2024, and have not been early adopted, is currently still under assessment for potential impacts on the Company.

Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Lainnya terhadap Perusahaan

Impacts of the Changes in Other Accounting Policies on the Company

Pada tahun 2024, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi lainnya selain perubahan ISAK dan PSAK.

In 2024, there were no changes in accounting policies other than the amendments to ISAK and PSAK.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Signifikan dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Significant Amendments to Laws and Regulations and Their Impacts on the Company

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan menjadi komitmen PLN Indonesia Power dalam menjalankan operasional Perusahaan. Dalam rangka upaya pemenuhan tersebut, PLN Indonesia Power senantiasa melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang baru terbit maupun yang terjadi perubahan.

Compliance with all relevant laws and regulations is a commitment of PLN Indonesia Power in carrying out the Company's operations. In an effort to fulfill this commitment, PLN Indonesia Power consistently conducts reviews of newly issued and amended regulations.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Amendments to Laws and Regulations

Di tahun 2024, terdapat peraturan baru dan berubah yang berpengaruh terhadap Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

In 2024, there were new and amended regulations that impacted the Company, including the following:

No	Nama Peraturan Regulation Name	Keterangan Perubahan Description of Amendments	Uraian Penyesuaian oleh PLN Indonesia Power Description of Adjustment made by PLN Indonesia Power
1	Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP"). Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection ("PDP Law").	UU PDP diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2022 dan mempunyai masa transisi 2 tahun hingga berlaku penuh pada 17 Oktober 2024. PDP Law was enacted on October 17, 2022, and has a transition period of 2 years until it is fully effective on October 17, 2024.	Adanya kewajiban prosesor data pribadi (dhi PLN Indonesia Power) untuk menerapkan kebijakan pelindungan data pribadi sejak 17 Oktober 2024 dengan ditetapkan Peraturan Direksi 0012.P/DIR/2025 tentang Pedoman Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan PT PLN Indonesia Power. There is an obligation for personal data processors (including PLN Indonesia Power) to implement personal data protection policies starting October 17, 2024, as stipulated in the Board of Directors' Regulation 0012.P/DIR/2025 on Guidelines for Personal Data Protection within PT PLN Indonesia Power.
2	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 11 of 2024 on the Use of Domestic Products for the Development of Power Infrastructure.	Ketentuan baru terkait penggunaan produk dalam negeri yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian. New provisions related to the use of domestic products, which were previously regulated under the Regulation of the Minister of Industry.	Pengaturan umum terhadap penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pengaturan pemberlakuan relaksasi impor terhadap <i>project</i> PLTS. General provisions regarding the use of domestic products for the development of power infrastructure and regulations on the implementation of import relaxation for SPP projects.
3	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia No. 33 of 2024 on the Revocation of the Regulation of the Minister of Industry No. 54/M-IND/PER/3/2012 on Guidelines for the Use of Domestic Products for the Development of Power Infrastructure as Amended Several Times, Most Recently by the Regulation of the Minister of Industry No. 23 of 2023 on the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Industry No. 54/M-IND/PER/3/2012 on Guidelines for the Use of Domestic Products for the Development of Power Infrastructure.	ketentuan ini berfungsi untuk mencabut ketentuan Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Menteri ESDM. This regulation serves to revoke the provisions of the Guidelines for the Use of Domestic Products for the Development of Power Infrastructure issued by the Ministry of Industry, which will subsequently be governed under a regulation issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM).	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, sudah tidak digunakan lagi dalam ketentuan penggunaan produk dalam negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. The Regulation of the Minister of Industry No. 54/M-IND/PER/3/2012 on Guidelines for the Use of Domestic Products for the Development of Power Infrastructure, as amended several times, most recently by the Regulation of the Minister of Industry No. 23 of 2023 on the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Industry No. 54/M-IND/PER/3/2012, is no longer applicable under the current provisions on the use of domestic products for the development of power infrastructure.



No	Nama Peraturan Regulation Name	Keterangan Perubahan Description of Amendments	Uraian Penyesuaian oleh PLN Indonesia Power Description of Adjustment made by PLN Indonesia Power
4	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Modul Surya. Regulation of the Minister of Industry No. 34 of 2024 on Procedures for Calculating the Local Content Value (TKDN) of Solar Module Products.	Mencabut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/2/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya. This regulation revokes the Regulation of the Minister of Industry Number 04/M-IND/PER/2/2017 on Provisions and Procedures for Assessing Local Content for Solar Power Plants.	Perhitungan nilai TKDN Modul Surya dilakukan dengan pembobotan faktor produksi. The calculation of the local content value (TKDN) for solar modules is carried out using a weighted production factor method.

Dampak Perubahan Peraturan Perundang-undangan Impacts of the Amendments to Laws and Regulations

Dampak kualitatif dari perubahan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan baru di tahun 2024 bagi PLN Indonesia Power sampai dengan saat ini masih dipetakan melalui peninjauan dan akan dilakukan penyesuaian terhadap proses bisnis Perusahaan apabila terkena dampak dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut.

Adapun untuk dampak kuantitatif telah diakomodir dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit tahun 2024. Dalam prosesnya, Satuan Legal, Risk, and Compliance telah menyampaikan informasi dan data kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2024. Selain penyesuaian yang telah dilakukan sebagaimana dalam tabel di atas, tidak terdapat dampak signifikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

The qualitative impact of the amendments and enactment of new laws and regulations in 2024 on PLN Indonesia Power is currently being assessed through reviews, and adjustments will be made to the Company's business processes, if necessary, due to the enforcement of these new regulations.

Regarding the quantitative impact, it has been reflected in the Audited Consolidated Financial Statements for the year 2024. In the process, the Legal, Risk, and Compliance Unit has provided information and data to the Public Accounting Firm (KAP) conducting the audit of the 2024 Consolidated Financial Statements. Apart from the adjustments already made, as shown in the table above, there are no significant qualitative or quantitative impacts.

Informasi Keuangan yang mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Di sepanjang tahun 2024, tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi, sehingga tidak terdapat informasi yang diungkapkan beserta dampaknya.

Throughout 2024, there was no financial information involving extraordinary and rare events, and therefore no information is disclosed along with their impact.

Dampak Perubahan Harga terhadap Kinerja Perusahaan

Impact of Price Change on the Company's Performance

Pendapatan penjualan tenaga listrik diakui berdasarkan energi listrik (kWh) yang dipasok kepada PT PLN (Persero) dengan menggunakan formula tarif yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Formula tarif mencakup perhitungan komponen harga kapasitas, harga tetap operasi dan pemeliharaan, harga bahan bakar, tingkat pasokan energi, serta variabel lainnya. Pada kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir faktor signifikan yang mempengaruhi pendapatan dan laba Perusahaan adalah perubahan harga energi primer.

Revenue from electricity sales is recognized based on the electrical energy (kWh) supplied to PT PLN (Persero) using a tariff formula stipulated in the power purchase agreement. The tariff formula includes the calculation of components such as capacity charge, fixed operation and maintenance charge, fuel price, energy supply level, and other variables. Over the past 2 (two) years, the most significant factor affecting the Company's revenue and profit has been changes in primary energy prices.

Kondisi Harga Batubara

Coal Price Conditions

Dalam rangka memastikan ketersediaan dan kecukupan energi primer dalam kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan pembangkit, PLN Indonesia Power mengupayakan diperolehnya energi primer dengan harga yang lebih kompetitif sehingga harga satuan kalor menjadi lebih rendah dan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik yang dihasilkan kompetitif. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan merit order pembangkit sehingga dapat mendukung sustainability pembangkit dalam jangka panjang. Perubahan harga energi primer sangat mempengaruhi besaran BPP mengingat porsinya mencapai 60%-70% dari BPP.

In order to ensure the availability and adequacy of primary energy in both quality and quantity according to the needs of the power plants, PLN Indonesia Power strives to procure primary energy at more competitive prices so that the calorific unit price becomes lower and the resulting Electricity Generation Cost (BPP) remains competitive. This is expected to contribute to improving the merit order of power plants, thereby supporting the long-term sustainability of the plants. Changes in primary energy prices significantly affect the BPP, as they account for 60%-70% of the total cost.

Kondisi harga batubara di tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Harga batubara global mengalami fluktuasi dengan rentang antara US\$116/Ton hingga US\$141/Ton (Newcastle Index);
2. Secara keseluruhan, harga batubara global di tahun 2024 cenderung stabil walaupun terjadi penurunan secara rata-rata tahunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan penggunaan batubara yang cukup signifikan di Uni Eropa dan Amerika Serikat sehubungan dengan peningkatan proyek pembangkit listrik energi terbarukan;

The coal price conditions in 2024 can be described as follows:

1. Global coal prices fluctuated within a range of US\$116/ton to US\$141/ton (Newcastle Index);
2. Overall, global coal prices in 2024 tended to be stable despite a year-on-year average decline compared to the previous year. This was due to a significant decrease in coal consumption in the European Union and the United States, coinciding with an increase in renewable energy power plant projects.



3. Secara *forecast*, diperkirakan pada tahun 2025 harga batubara akan mengalami penurunan sekitar 12%, dimana kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebijakan pemerintah, peningkatan produksi batubara China, dan semakin tingginya pemanfaatan sumber energi terbarukan di seluruh dunia;
4. Tinggi atau rendahnya harga batubara di pasar global masih belum berpengaruh terhadap harga batubara domestik mengingat adanya capping harga dari Kepmen ESDM No. 267 Tahun 2022 (HBA maksimal US\$70/Ton).

Adapun hal-hal yang menjadi pembentuk harga batubara PLN Indonesia Power:

1. Harga Batubara Global (ICI, GCNC, NEX, dan Platts Index) -> Berpengaruh terhadap HBA Minerba yang digunakan sebagai harga batubara domestik,
2. Kurs US\$-> Berpengaruh terhadap konversi nilai HBA Minerba dari US\$ ke IDR,
3. Harga BBM Industri Pertamina -> Berpengaruh terhadap harga jasa alat angkut batubara (*freight cost*).

Berikut ini merupakan tren harga batubara pada market global di sepanjang tahun 2024 sampai dengan Februari tahun 2025. Terlihat terjadi kecenderungan penurunan harga mulai bulan Oktober 2024 sampai dengan Februari tahun 2025.

3. Based on forecasts, coal prices are expected to decline by approximately 12% in 2025. This projection is influenced by several factors, including government policies, increased coal production in China, and the growing utilization of renewable energy sources worldwide;
4. The high or low global coal prices have yet to significantly impact domestic coal prices, as the price cap set by the Ministry of Energy and Mineral Resources, as per Decree No. 267 of 2022, limits the benchmark coal price (HBA) to a maximum of US\$70 per ton.

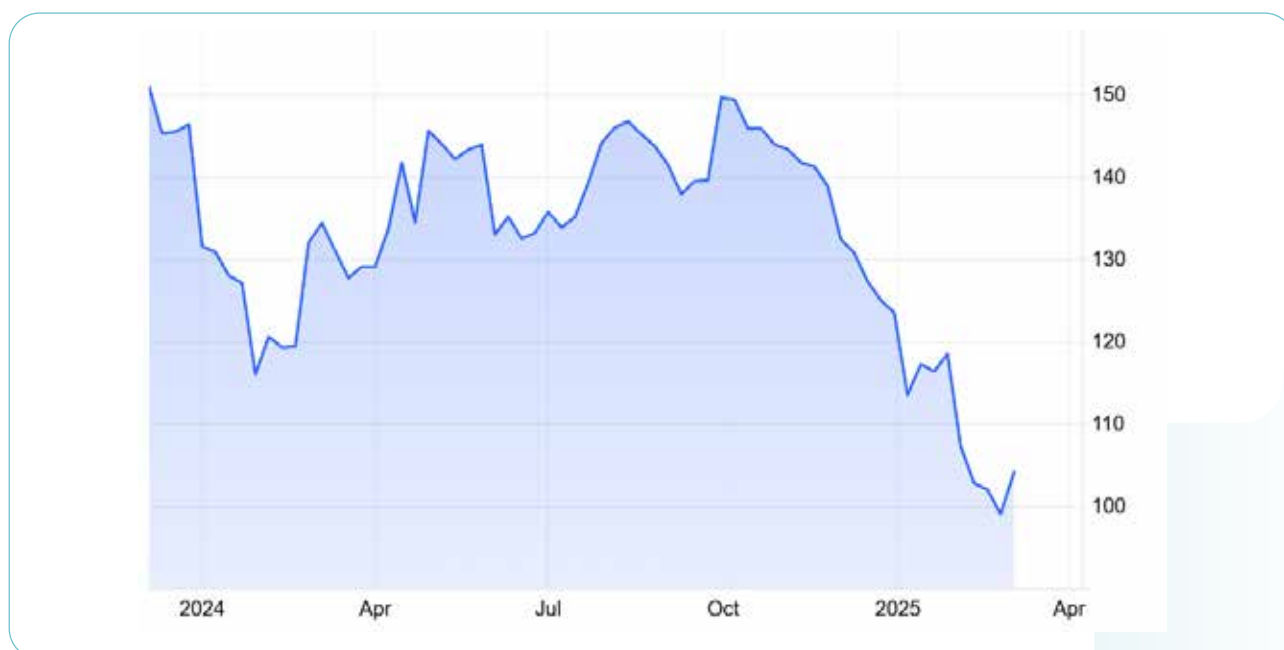
The components that determine the coal price for PLN Indonesia Power are as follows:

1. Global Coal Prices (ICI, GCNC, NEX, and Platts Index) -> Affect the Minerba Benchmark Coal Price (HBA), which is used as the domestic coal price;
2. =USD Exchange Rate -> Influences the conversion of the Minerba HBA from USD to IDR;
3. Pertamina's Industrial Fuel Prices -> Affect the freight cost of coal transportation services.

The following is the trend of global coal prices throughout 2024 up to February 2025. A downward trend in prices can be observed starting from October 2024 through February 2025.

Grafik Tren Rata-Rata Harga Batubara Tahunan (US\$/Ton)

Trend Graph of Average Annual Coal Prices (US\$/Ton)



Sumber : tradingeconomics.com

Source : tradingeconomics.com

Bentuk antisipasi PLN Indonesia Power dengan dinamika harga batubara di sepanjang tahun 2025 adalah:

1. Berkoordinasi dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) untuk melakukan kontrak jangka menengah/panjang kepada pemasok tertentu mengingat harga batubara sedang rendah sehingga pasar domestik dianggap lebih menarik bagi pemasok batubara,
2. Melakukan pengalihan pasokan antar unit PLTU untuk menjaga kehandalan operasional di seluruh PLTU PLN Indonesia Power,
3. Optimasi pemanfaatan pasokan biomassa dimana sekaligus dapat meningkatkan produksi kWh *Green* dan penurunan emisi karbon.

PLN Indonesia Power's anticipatory measures in response to coal price dynamics throughout 2025 include:

1. Coordinating with PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) to establish medium/long-term contracts with selected suppliers, considering that coal prices are currently low, making the domestic market more attractive for coal suppliers,
2. Redirecting the coal supply among PLN Indonesia Power's SPP to maintain operational reliability across all units,
3. Optimizing the use of biomass supply, which simultaneously supports increased Green kWh production and carbon emission reduction.

Kondisi Harga BBM

Fuel Oil Price Conditions

Harga Jual BBM Pertamina ke PLN Grup diatur sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak (PJBBM) antara PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), dimana harga tersebut di-*update* setiap bulan dan dihitung berdasarkan formulas yang tertuang di PJBBM. Adapun hal-hal yang mempengaruhi harga jual BBM Pertamina ke PLN Grup adalah sebagai berikut:

1. $(1 + \text{Alpha HSD})$,
2. $(1 + \text{Alpha MFO})$,
3. MOPS Gasoil 0,25% S,
4. MOPS HSFO 180 CST,
5. MOPS LSFO 180 CST,
6. JISDOR = Jakarta Interbank Spot Dollar Rate,
7. JIBOR RATE 1 Bulan,
8. 158,9 = konversi dari Barrel ke Liter,
9. 1.009,015 = konversi dari MT ke Liter.

Variabel-variabel tersebut berubah setiap bulan, sehingga perlu penyesuaian harga setiap bulan. Adapun tren harga BBM di Tahun 2024 dapat dijelaskan berdasarkan grafik berikut:

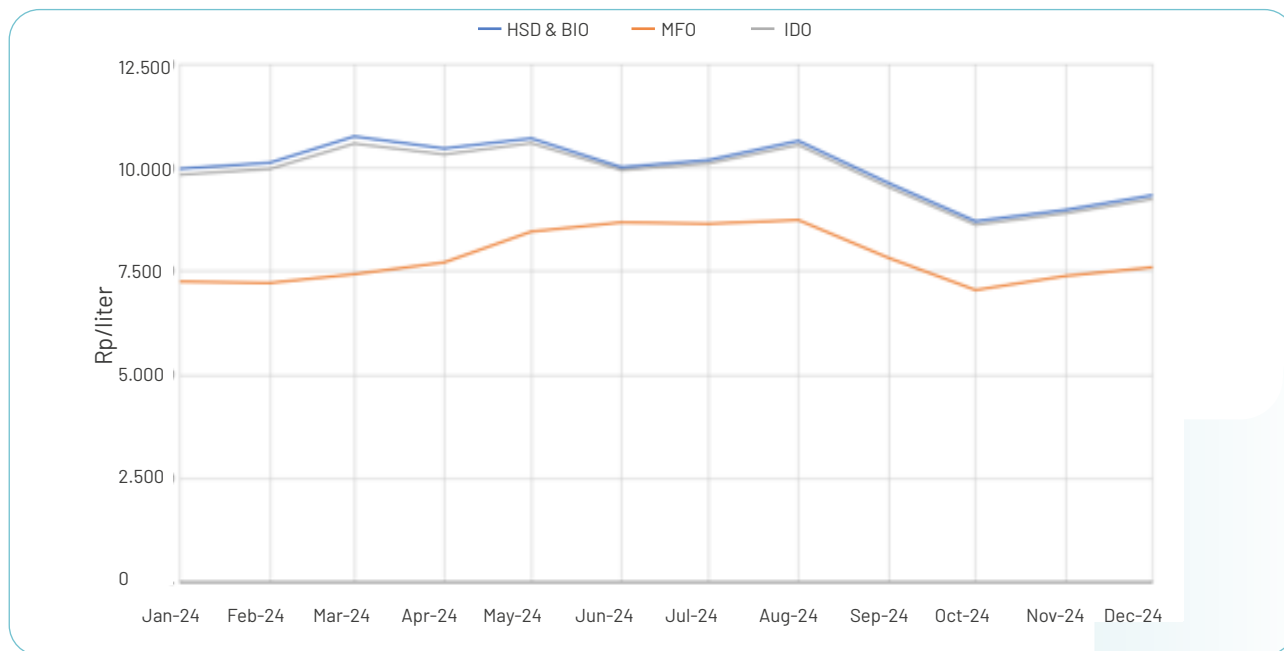
The Fuel Selling Price from Pertamina to the PLN Group is regulated under the Fuel Oil Sales and Purchase Agreement (PJBBM) between PT PLN (Persero) and PT Pertamina (Persero), in which the price is updated monthly and calculated based on formulas stipulated in the PJBBM. The factors influencing Pertamina's fuel selling price to the PLN Group include the following:

1. $(1 + \text{Alpha HSD})$,
2. $(1 + \text{Alpha MFO})$,
3. MOPS Gasoil 0.25% S,
4. MOPS HSFO 180 CST,
5. MOPS LSFO 180 CST,
6. JISDOR = Jakarta Interbank Spot Dollar Rate,
7. JIBOR 1-Month Rate,
8. 158.9 = conversion from Barrel to Liter,
9. 1,009.015 = conversion from MT to Liter.

These variables fluctuate monthly, requiring monthly price adjustments. The trend of fuel prices in 2024 is illustrated in the following graph:

Grafik Harga BBM HSD, BBM MFO, dan BBM IDO

Graph of HSD Fuel, MFO Fuel, and IDO Fuel Prices



*harga belum termasuk PPN

*Prices exclude VAT

Bentuk antisipasi PLN Indonesia Power dengan dinamika harga BBM sepanjang tahun 2024 adalah:

1. Dengan menjaga agar pemesanan BBM seoptimal mungkin sesuai kebutuhan (tidak berlebihan) apalagi disaat harga BBM sedang naik;
2. Berkoordinasi dengan PLN EPI agar titik pengambilan BBM dari TBBM terdekat dengan lokasi pembangkit sehingga menghemat ongkos angkut.

PLN Indonesia Power's anticipatory measures in response to fuel price dynamics throughout 2024 include:

1. Ensuring that fuel orders are as optimal as possible and aligned with actual needs (avoiding over-ordering), especially during periods of rising fuel prices;
2. Coordinating with PLN EPI to ensure fuel is picked up from the nearest Fuel Terminal (TBBM) to the power plant location to reduce transportation costs.

Kondisi Harga Gas Gas Price Conditions

Harga Gas pipa cenderung tetap atau tidak mengalami fluktuasi, mengingat harga gas tiap sumber berbeda berdasarkan keekonomian masing-masing sumur, yang ditetapkan melalui penetapan harga oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tiap Perjanjian Jual Beli Gas dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).

Pipeline gas prices tend to remain stable or show minimal fluctuation, as gas prices from each source vary depending on the economic viability of each well. These prices are determined through price stipulations set by the Minister of Energy and Mineral Resources in each Gas Sales and Purchase Agreement (PJBG) with Cooperation Contract Contractors (K3S).

Selain itu sejak 30 Juni 2021 pemerintah juga menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Listrik melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral No. 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Listrik, yang kemudian diperbaharui melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber

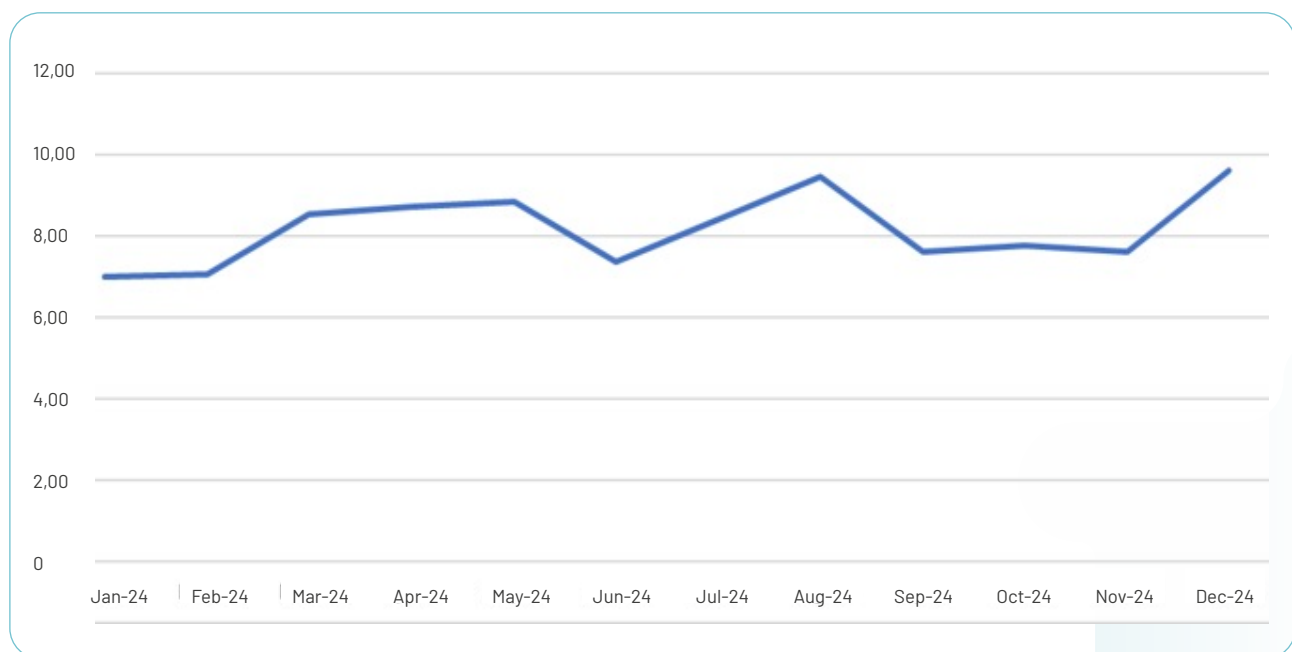
Furthermore, since June 30, 2021, the government has also stipulated the Specific Natural Gas Price at Power Plants through the Decree of the Minister (Kepmen) of Energy and Mineral Resources No. 118.K/MG.04/MEM.M/2021 on the Specific Natural Gas Price at Power Plants, which was subsequently updated through the Decree of the Minister of

Daya Mineral No. 135.K/HK.02/MEM.M/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Listrik (*Plant Gate*). Dimana Kepmen ini mengatur Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tahun 2021 s.d. 2024. Berbeda dengan harga gas pipa, untuk harga *Liquid Natural Gas* (LNG) cukup fluktuatif, yang dipengaruhi oleh harga jual minyak mentah Indonesia (*Indonesian crude price/ICP*) untuk LNG yang *Uncommitted*. Sedangkan untuk LNG Committed menggunakan HGBT sampai dengan batasan kecukupan bagian negara terpenuhi.

Energy and Mineral Resources No. 135.K/HK.02/MEM.M/2021 dated August 2, 2021 on the Amendment to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 118.K/MG.04/MEM.M/2021 on the Specific Natural Gas Price at Power Plants (*Plant Gate*). This Decree regulates the Specific Natural Gas Price (HGBT) for the period of 2021 to 2024. Unlike pipeline gas prices, Liquefied Natural Gas (LNG) prices are relatively volatile, influenced by the Indonesian Crude Price (ICP) for uncommitted LNG. Meanwhile, committed LNG applies the HGBT scheme until the limit of the state's entitlement is fulfilled.

Grafik Tren Rata-rata Harga Gas 2024 (US\$/MMBTU)

Trend Graph of Average Gas Prices in 2024 (US\$/MMBTU)



Bentuk antisipasi PLN Indonesia Power dengan dinamika harga gas sepanjang tahun 2024 adalah:

1. Berkoordinasi dengan PLN EPI untuk melakukan kontrak jangka menengah/panjang kepada pemasok.
2. Pengusulan HGBT untuk sumber-sumber pasokan yang belum diakomodir pada Kepmen ESDM No. 135.K/HK.02/MEM.M/2021, untuk periode 2025 dst.
3. Optimalisasi gas dengan harga yang lebih murah untuk pembangkit-pembangkit yang di-supply oleh beberapa sumber pasokan gas.
4. Meminta Potensi Potensi Gas yang ada untuk meningkatkan kehandalan rantai pasokan gas di unit pembangkit yang kekurangan/declain pasokan gas.

PLN Indonesia Power's anticipatory measures in response to gas price dynamics throughout 2024 include:

1. Coordinating with PLN EPI to establish medium/long-term contracts with suppliers.
2. Proposing HGBT for supply sources not yet accommodated under Ministerial Decree of Energy and Mineral Resources No. 135.K/HK.02/MEM.M/2021, for the period of 2025 onward.
3. Optimizing the use of lower-priced gas for power plants supplied by multiple gas sources.
4. Requesting available gas potential to enhance the reliability of the gas supply chain for power plant units experiencing gas shortages or declining supply.

5. Optimasi pasokan LNG *committed cargo* dari BP Tangguh, melalui skema *breakbulking* dari *Floating Storage* Regasification Unit (FSRU) Jawa Satu milik PT Jawa Satu Power (JSP) untuk pasokan gas Bali s.d. tahun 2033.

5. Optimizing the supply of committed LNG cargo from BP Tangguh through a breakbulking scheme from the Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Jawa Satu owned by PT Jawa Satu Power (JSP) for Bali gas supply until 2033.

Kondisi Harga Biomass Biomass Price Conditions

Dalam rangka mendorong pencapaian target bauran energi baru dan terbarukan PT PLN (Persero) sebesar 23% di tahun 2025, PLN Indonesia Power turut mendukung program tersebut salah satunya dengan mengimplementasikan *co-firing* dimana juga dapat memberikan kontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca melalui kombinasi penggunaan batubara dengan biomassa. Pelaksanaan *co-firing* di lingkungan pembangkit PLTU PT PLN (Persero) diatur dalam Peraturan Direksi (Perdir) PT PLN (Persero) No. 0004.P/DIR/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan *Co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batubara dengan Bahan Bakar Biomassa. Dalam hal penentuan harga biomassa, Perdir tersebut telah mengaturnya dengan menggunakan skema Harga Patokan Tertinggi (HPT) menggunakan konsep harga satuan energi dengan referensi harga rata-rata batubara pada periode sebelumnya.

In support of PT PLN (Persero)'s target to achieve a 23% share of new and renewable energy in the national energy mix by 2025, PLN Indonesia Power contributes to this goal through the implementation of co-firing, which also helps reduce greenhouse gas emissions by combining the use of coal with biomass. The implementation of co-firing at PT PLN (Persero)'s SPP is regulated under the Board of Director's Regulation of PT PLN (Persero) No. 0004.P/DIR/2022 on the Guidelines for Co-firing Implementation in Coal-Fired Power Plants Using Biomass Fuel. Regarding biomass pricing, the regulation stipulates the use of a Maximum Benchmark Price (HPT) scheme based on the energy unit price concept, using the average coal price from a prior period as a reference.

Mengingat adanya fluktuasi harga batubara yang dapat berpengaruh pada meningkatnya harga biomassa, maka bentuk antisipasi PLN Indonesia Power dengan dinamika harga biomassa sepanjang tahun 2024 adalah:

1. Berkoordinasi dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) untuk memilih sumber pasokan biomassa dari lokasi yang terdekat dengan PLTU tujuan sehingga dapat menekan harga ongkos transportasi biomassa.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap kargo biomassa yang masuk ke PLTU agar kualitas biomassa yang dikonsumsi benar-benar yang memiliki kualitas baik sehingga dapat meningkatkan produksi kWh Green dan menurunkan *Specific Fuel Consumption* (SFC) unit PLTU.

Given the fluctuations in coal prices that can impact biomass pricing, PLN Indonesia Power's anticipatory measures in response to biomass price dynamics throughout 2024 include:

1. Coordinating with PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) to select biomass supply sources located closest to the target SPP to minimize biomass transportation costs;
2. Enhancing monitoring of biomass cargo entering SPP to ensure that only high-quality biomass is used, thereby improving Green kWh production and reducing the Specific Fuel Consumption (SFC) of SPP units.

Kondisi Harga Air Water Price Conditions

Untuk harga air saat ini terdapat 2 (dua) komponen yang menjadi bentuk biaya Energi Primer diantaranya adalah Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dan Pajak Permukaan Air (PAP) yang saat ini dikenakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

For current water pricing, two components constitute the Primary Energy Cost, namely the Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) and the Surface Water Tax (PAP), which are currently applied to Hydroelectric Power Plants (HPP).

Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)

Water Resources Management Service Fee (BJPSDA)

Nama PLTA Name of HPP	Wilayah Sungai River Area	Tarif BJPSDA (Rp/kWh sebelum PPN) BJPSDA Tariff (Rp/kWh before VAT)
UBP Saguling - PLTA Saguling GBU Saguling - HPP Saguling	Citarum	14,01
UBP Mrica - PLTA Wonogiri GBU Mrica - HPP Wonogiri	Bengawan Solo	222
UBP Mrica - PLTA Kedungombo GBU Mrica - HPP Kedungombo	Jratunseluna	49,82
UBP Mrica - PLTA Sidorejo GBU Mrica - HPP Sidorejo	Jratunseluna	49,82
UBP Mrica - PLTA Klambu GBU Mrica - HPP Klambu	Jratunseluna	49,82
UBP Mrica - PLTA Jelok GBU Mrica - HPP Jelok	Jratunseluna	49,82
UBP Mrica - PLTA Timo GBU Mrica - HPP Timo	Jratunseluna	49,82
UBP Mrica - PLTA Sempor GBU Mrica - HPP Sempor	Serayu Bogowonto	50,06
UBP Mrica - PLTA Wadaslintang GBU Mrica - HPP Wadaslintang	Serayu Bogowonto	50,06
UBP Mrica - PLTA Pejengkolan GBU Mrica - HPP Pejengkolan	Serayu Bogowonto	50,06
UBP Mrica - PLTA Ketenger GBU Mrica - HPP Katenger	Serayu Bogowonto	50,06
UBP Mrica - PLTA P. B. Soedirman GBU Mrica - HPP P. B. Soedirman	Serayu Bogowonto	50,06
UBP Mrica - PLTA Tulis GBU Mrica - HPP Tulis	Serayu Bogowonto	50,06
UBP Mrica - PLTA Garung GBU Mrica - HPP Garung	Serayu Bogowonto	50,06
UBP Saguling - PLTA Parakan Kondang GBU Saguling - HPP Parakan Kondang	Cimanuk - Cisanggarung	27
UBP Jatigede - PLTA Jatigede GBU Jatigede - HPP Klambu	Cimanuk - Cisanggarung	27

- Tarif BJPSDA untuk periode 2024 masih sama seperti tahun 2023. Untuk WS Citarum menggunakan dasar tarif berdasarkan Kepmen PUPR 935/2017; untuk WS Jratunseluna dan WS Bengawan Solo menggunakan dasar tarif berdasarkan Kepmen PUPR 684/2015; dan untuk WS Bengawan Solo menggunakan dasar tarif berdasarkan Kepmen PUPR 274/2018.
- Tahun 2024 terbit Kepmen PUPR No. 1475 tahun 2024 tanggal 27 Juni 2024 yang mengatur tarif BJPSDA WS Cimanuk - Cisanggarung, yang berpotensi meningkatkan biaya EP pada UBP Saguling (PLTA Parakan Kondang) dan UBP Jatigede (PLTA Jatigede). Penerapan Kepmen tersebut dilaksanakan menggunakan Perjanjian JPSDA antara PLN Indonesia Power dengan PJT II.
- BJPSDA yang dibayarkan PLN Indonesia Power ke Perum Jasa Tirta memberikan manfaat langsung ke unit pembangkit dengan cara membagi persentase BJPSDA menjadi Program Manfaat Langsung/Program Jasa Pengelolaan SDA dan Non PML/Program JPSDA. PML/PJPSDA ditargetkan dapat membantu meningkatkan ketersediaan air sebagai energi primer PLTA, meningkatkan produktivitas PLTA, serta menormalkan volume tampungan waduk dan memperpanjang usia layanan waduk.

- The BJPSDA tariff for the 2024 period remains the same as in 2023. For Citarum River, the tariff is based on Minister of Public Works and Housing Decree No. 935/2017; for Jratunseluna and Bengawan Solo River, the tariff is based on Minister of Public Works and Housing Decree No. 684/2015; and for Bengawan Solo River also based on Minister of Public Works and Housing Decree No. 274/2018.
- In 2024, Minister of Public Works and Housing Decree No. 1475 of 2024, dated June 27, 2024, was issued to regulate the BJPSDA tariff for Cimanuk-Cisanggarung River, which may potentially increase the EP cost at GBU Saguling (HPP Parakan Kondang) and GBU Jatigede (HPP Jatigede). The implementation of this decree is carried out through a JPSDA Agreement between PLN Indonesia Power and PJT II.
- The BJPSDA paid by PLN Indonesia Power to Perum Jasa Tirta provides direct benefits to power generation units by allocating a portion of the BJPSDA into two components: the Direct Benefit Program/Water Resources Management Service Program (PML/PJPSDA) and Non-PML/General JPSDA Program. The PML/PJPSDA is intended to help improve the availability of water as a primary energy source for HPPs, enhance HPP productivity, normalize reservoir storage volumes, and extend the service life of the reservoirs.

Pajak Air Permukaan (PAP) Surface Water Tax (PAP)

PAP saat ini sudah dikenakan ke seluruh PLTA PLN Indonesia Power. PAP dibayarkan ke masing-masing Pemda sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dikeluarkan Dispenda/Bapenda. Untuk tarif PAP yang berlaku sebagai berikut:

PAP is currently imposed on all HPPs under PLN Indonesia Power. The tax is paid to the respective local governments in accordance with the Regional Tax Assessment Letter issued by the Regional Revenue Office (Dispenda/Bapenda). The applicable PAP rates are as follows:

Tabel Tarif PAP

Table of PAP Tariff

Pembangkit Listrik Power Plant	Harga/Tarif PAP (Rp/kWh) PAP Price/Tariff (Rp/kWh)
UBP Saguling - PLTA Saguling GBU Saguling - HPP Saguling	2,73
UBP Saguling - PLTA Ubrug GBU Saguling - HPP Ubrug	2,76
UBP Saguling - PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Cikalong, PLTA Dago + Bengkok, PLTA Parakan Kondang, dan PLTA Kracak GBU Saguling - HPP Plengan, HPP Lamajan, HPP Cikalong, HPP Dago + Bengkok, HPP Parakan Kondang, and HPP Kracak	1,76
UBP Mrica - semua PLTA GBU Mrica - all HPPs	5
UBP Bukittinggi - PLTA Singkarak GBU Bukittinggi - HPP Singkarak	7,76
UBP Bukittinggi - PLTA Maninjau GBU Bukittinggi - HPP Maninjau	3,37
UBP Bukittinggi - PLTA Batang Agam GBU Bukittinggi - HPP Batang Agam	4,04
UBP Bengkulu - PLTA Musi dan PLTA Tes GBU Bengkulu - HPP Musi and HPP Tes	9,694
UBP Barito - PLTA Ir. P. M. Noor GBU Barito - HPP Ir. P. M. Noor	15,863
UBP Jatigede - PLTA Jatigede GBU Jatigede - HPP Jatigede	6,074

Bentuk antisipasi PLN Indonesia Power dengan dinamika harga air sepanjang tahun 2024 adalah:

1. Berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) Kantor Pusat sehubungan dengan wacana pengesahan Rancangan Permen PUPR terbaru mengenai Nilai Perolehan Air Permukaan.
2. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap Program JPSDA agar tepat sasaran; dengan sasaran meningkatkan ketersediaan air sebagai energi primer PLTA, meningkatkan produktivitas PLTA, serta menormalkan volume tampungan waduk dan memperpanjang usia layanan waduk.

PLN Indonesia Power's anticipatory measures in response to water price dynamics throughout 2024 are as follows:

1. Coordinating with PT PLN (Persero) Head Office regarding the proposed enactment of the latest draft of the Minister of Public Works and Housing Regulation on the Surface Water Acquisition Value.
2. Conducting supervision and monitoring of the JPSDA Program to ensure proper targeting; aiming to improve the availability of water as a primary energy source for HPPs, enhance HPP productivity, normalize reservoir storage volumes, and extend the service life of the reservoirs.

Kondisi Harga Panas Bumi

Geothermal Energy Price Conditions

Tidak banyak dinamika yang mempengaruhi harga energi panas bumi, mengingat kontrak panas bumi merupakan kontrak jangka panjang. Hampir semua kontrak Panas Bumi diterapkan skema eskalasi harga tiap tahunnya dengan besaran yang bervariasi untuk masing-masing kontrak.

There are not many dynamics affecting geothermal energy prices, as geothermal contracts are long-term in nature. Nearly all geothermal contracts apply an annual price escalation scheme, with the escalation rates varying across contracts.

Tabel Tarif Harga Uap

Table of Steam Price Tariff

Pembangkit Listrik Power Plant	Harga/Tarif PAP (Rp/kWh) Harga/Tarif PAP (Rp/kWh)
PLTP Darajat GPP Darajat	0.06100
PLTP Gunung Salak GPP Gunung Salak	0.07506
PLTP Kamojang GPP Kamojang	0.07030
PLTP Ulubelu Unit 1 GPP Ulubelu Unit 1	0.05540
PLTP Ulubelu Unit 2 GPP Ulubelu Unit 2	0.05540
PLTP Lahendong Unit 1 GPP Lahendong Unit 1	0.06497
PLTP Lahendong Unit 2&3 GPP Lahendong Unit 2&3	0.07030
PLTP Lahendong Unit 4 GPP Lahendong Unit 4	0.07030

Bentuk antisipasi PLN Indonesia Power dengan dinamika harga energi panas bumi sepanjang tahun 2024 adalah:

1. Optimalisasi produksi PLTP Kamojang dengan penyusunan *Interim Agreement* terkait diskon harga uap untuk PLTP Kamojang 1-3, dengan batasan *cut off* 81% CF dan harga diskon uap 1.8 cent US\$/kWh (Periode Mei s.d. Agustus 2024) serta diskon uap dengan *cut off* 75% dan harga diskon uap 2.33 cent US\$/kWh (Periode September s.d Desember 2024).
2. *Monitoring* penyaluran dan penyerapan panas bumi, serta koordinasi dengan PLN UIP2B terkait serapan panas bumi, untuk menghindari *Take or Pay*(TOP).

PLN Indonesia Power's anticipatory measures regarding geothermal energy price dynamics throughout 2024 are:

1. Optimizing production at Kamojang GPP by preparing an Interim Agreement related to steam price discounts for Kamojang units 1-3 GPP, with a cut-off limit of 81% capacity factor (CF) and a discounted steam price of 1.8 US cents/kWh (for the period May to August 2024), as well as a steam discount with a cut-off of 75% and a discounted steam price of 2.33 US cents/kWh (for the period September to December 2024).
2. Monitoring the distribution and utilization of geothermal energy and coordinating with PLN UIP2B regarding geothermal energy absorption to avoid Take or Pay (TOP) penalties.

Prospek Usaha ke Depan Business Outlook

Pertumbuhan ekonomi global dalam laporan *World Economic Outlook* (WEO) diproyeksikan berada pada level 3,3% baik pada tahun 2025 maupun 2026, yang masih berada di bawah rata-rata historis periode 2000–2019 sebesar 3,7%. Hal ini disebabkan oleh revisi kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang mengimbangi penurunan proyeksi di beberapa negara utama lainnya.

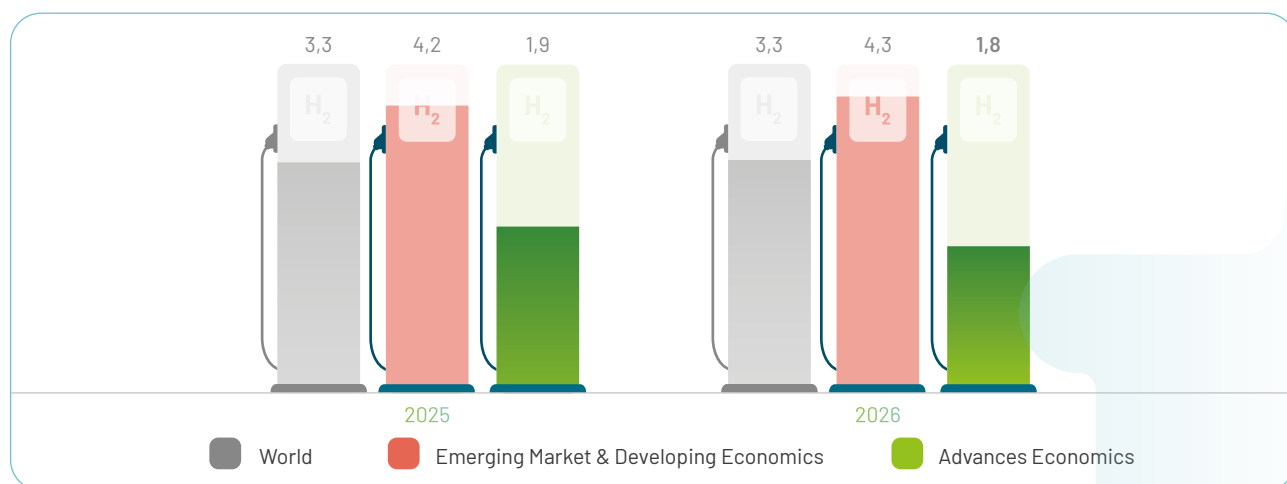
Dari sisi inflasi, inflasi global secara umum diperkirakan menurun menjadi 4,2% pada tahun 2025 dan kembali turun menjadi 3,5% pada tahun 2026. Proses penurunan inflasi ini diperkirakan akan lebih cepat mencapai target di negara-negara maju dibandingkan dengan negara-negara berkembang dan pasar negara berkembang.

Global economic growth, according to the *World Economic Outlook* (WEO) report, is projected to remain at 3.3% in both 2025 and 2026, still below the historical average of 3.7% recorded during the 2000–2019 period. This projection reflects an upward revision in the United States' economic growth forecast, which offsets downward revisions in several other major economies.

On the inflation front, global inflation is generally expected to decline to 4.2% in 2025 and further down to 3.5% in 2026. The disinflation process is anticipated to reach target levels more rapidly in advanced economies compared to developing and emerging market economies.

Tren Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2025–2026 (%)

Trend of Global Economic Growth Projection for 2025–2026 (%)



Sumber: *World Economic Outlook* (WEO), *International Monetary Fund* (IMF), terbitan Januari 2025

Source: *World Economic Outlook* (WEO), *International Monetary Fund* (IMF), January 2025 Edition

Perusahaan menyadari bahwa dinamika kondisi global yang penuh ketidakpastian dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap iklim usaha dan stabilitas perekonomian nasional. Dalam konteks tersebut, Perusahaan secara aktif mengambil peran dalam menyusun langkah-langkah antisipatif dan strategi adaptif.

The Company recognizes that the dynamic and uncertain global environment can have a significant impact on the business climate and the stability of the national economy. In this context, the Company actively takes part in formulating anticipatory measures and adaptive strategies.

Prospek/ *Outlook* Perekonomian Indonesia Tahun 2025

Indonesia's Economic Outlook for 2025

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap optimis meskipun ada tantangan domestik dan eksternal yang perlu dihadapi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 diperkirakan stabil di kisaran 5%, sejalan dengan prediksi dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang hanya diperkirakan sebesar 2,9% pada tahun 2025. Beberapa lembaga yang memperkirakan besaran pertumbuhan perekonomian Indonesia pada 2025 antara lain IMF dan Bank Dunia dengan proyeksi masing-masing sebesar 5%, serta OECD yang memperkirakan 5,1%.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2%, yang sejalan dengan keyakinan bahwa konsumsi domestik akan tetap menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh di atas 5% dan menjadi komponen terbesar dalam PDB Indonesia. Selain itu, sektor investasi juga diperkirakan tumbuh, meskipun tantangan dari kondisi global dan domestik tetap ada.

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus menghadapi tantangan domestik yang cukup signifikan, seperti kenaikan suku bunga dalam negeri yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, serta ketahanan pangan dan pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi. Selain itu, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang telah berlangsung diharapkan dapat memberikan kepercayaan lebih kepada investor, yang berpotensi mendukung laju investasi.

Inflasi Indonesia pada tahun 2024 tercatat moderat, di bawah 3%, yang membantu menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Pada awal 2025, inflasi Indonesia tercatat pada angka sangat rendah, yaitu 0,76% *year-on-year* (y-o-y), yang merupakan angka terendah dalam 25 tahun terakhir. Penurunan ini didorong oleh harga komoditas yang terkendali serta kebijakan pemerintah yang efektif untuk menjaga daya beli.

Indonesia's economy in 2025 is projected to remain optimistic despite the presence of both domestic and external challenges. The economic growth projection for Indonesia in 2025 is expected to remain stable at around 5%, in line with forecasts from international institutions such as the IMF, World Bank, and OECD. This figure is higher compared to the projected global economic growth, which is estimated at only 2.9% in 2025. Several institutions projecting Indonesia's economic growth in 2025 include the IMF and World Bank, each with a projection of 5%, as well as the OECD, which estimates 5.1%.

The Indonesian government has set a growth target of 5.2% for 2025, in line with the belief that domestic consumption will continue to be the main driver of the national economy. Household consumption is expected to grow above 5% and remain the largest component of Indonesia's GDP. In addition, the investment sector is also projected to grow, although challenges from both global and domestic conditions persist.

To achieve this target, Indonesia must face significant domestic challenges, such as rising domestic interest rates that may affect consumer purchasing power, as well as food security issues and the depreciation of the rupiah, which could impact economic stability. Additionally, the 2024 General Election is expected to boost investor confidence, potentially supporting investment growth.

Indonesia's inflation in 2024 was recorded at a moderate level, below 3%, which helped maintain consumer purchasing power and price stability. At the beginning of 2025, Indonesia's inflation stood at a very low rate of 0.76% year-on-year (y-o-y), the lowest figure in the past 25 years. This decline was driven by stable commodity prices and effective government policies in preserving purchasing power.



Meskipun Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, tantangan dari luar seperti ketidakpastian global, terutama dalam pasar komoditas dan geopolitik, tetap mempengaruhi prospek ekonomi Indonesia. Sebagai langkah antisipatif, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperkuat sektor domestik, menjaga inflasi tetap rendah, dan meningkatkan daya saing investasi.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan tetap ada, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan masih tumbuh stabil dan optimis di kisaran 5%.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Although Indonesia has successfully maintained economic stability, external challenges such as global uncertainties, particularly in commodity markets and geopolitics, continue to affect Indonesia's economic outlook. As an anticipatory measure, the Indonesian government continues to strengthen the domestic sector, keep inflation low, and enhance investment competitiveness.

Overall, despite persistent challenges, Indonesia's economy in 2025 is projected to grow steadily and optimistically at around 5%.

Source: Statistics Indonesia (BPS)

Prospek/ Outlook Industri Listrik Indonesia Tahun 2025

Prospects/Outlook of Indonesia's Electricity Industry in 2025

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% hingga 5,6% untuk tahun 2025, sedikit lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 5% pada tahun 2024 dan 5,1% pada tahun 2025.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut, diperkirakan akan terjadi peningkatan konsumsi listrik yang lebih besar. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah program hilirisasi industri, yang diprediksi akan terus mendorong pertumbuhan investasi langsung dan penanaman modal tetap bruto (PMTB). Beberapa inisiatif hilirisasi yang penting, antara lain gasifikasi batubara, pembangunan smelter bauksit, smelter tembaga, smelter nikel, pabrik pupuk, dan pabrik sel baterai kendaraan listrik. Perubahan perilaku konsumen terhadap penggunaan energi listrik sebagai pengganti bahan bakar fosil untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari juga menjadi peluang bagi perusahaan untuk terus menjaga keandalan dan efisiensi pembangkit eksisting yang dimiliki, melakukan pengembangan pembangkit yang berbahan bakar energi bersih dan EBT yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta peluang bagi bisnis beyond kWh, seperti pengembangan bisnis SPKLU dan SPBKLU sebagaimana rencana pemerintah untuk memenuhi proyeksi peningkatan *demand* listrik akibat penggunaan kendaraan listrik di masa mendatang.

The Government of Indonesia has set an economic growth target of 5.2% to 5.6% for 2025, slightly higher than the previous projections of 5% in 2024 and 5.1% in 2025.

With the projected economic growth, a greater increase in electricity consumption is expected. One of the factors influencing Indonesia's economic growth is the industrial downstreaming program, which is predicted to continue driving the growth of direct investment and gross fixed capital formation (PMTB). Several key downstreaming initiatives include coal gasification, the development of bauxite smelters, copper smelters, nickel smelters, fertilizer plants, and electric vehicle battery cell factories. Changes in consumer behavior toward the use of electricity as a substitute for fossil fuels in daily needs also present opportunities for the Company to continue maintaining the reliability and efficiency of its existing power plants, developing power plants that use cleaner and more environmentally friendly renewable energy sources, and pursuing opportunities in beyond kWh businesses, such as the business development of SPKLU (Public Electric Vehicle Charging Stations) and SPBKLU (Public Electric Battery Swap Stations), in line with the government's plan to meet projected increases in electricity demand due to future electric vehicle usage.

Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa proyeksi kebutuhan listrik dalam negeri di tahun 2025 akan mencapai kenaikan antara 3,6% hingga 4,2% dibandingkan dengan konsumsi tahun 2024 yang diperkirakan mencapai sekitar 294,87 TWh, lebih besar dari 283,12 TWh pada tahun 2023. Selain itu, pada tahun 2025, Pemerintah menargetkan konsumsi listrik per kapita mencapai 1.495 kWh/kapita, meningkat dibandingkan dengan 1.408 kWh/kapita pada tahun 2024.

Hal ini merupakan peluang besar bagi sektor industri kelistrikan untuk meningkatkan keandalan sarana dan prasarana yang sudah ada, serta untuk mengembangkan pembangkit dan transmisi baru guna memenuhi kebutuhan listrik yang terus berkembang di masa depan.

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) revealed that the projected domestic electricity demand in 2025 is expected to increase by between 3.6% and 4.2% compared to the consumption in 2024, which is estimated to reach around 294.87 TWh, higher than 283.12 TWh in 2023. Additionally, in 2025, the government targets electricity consumption per capita to reach 1,495 kWh per capita, an increase from 1,408 kWh per capita in 2024.

This presents a significant opportunity for the electricity industry sector to improve the reliability of existing facilities and infrastructure, as well as to develop new power plants and transmission systems to meet the growing electricity demand in the future.

Prospek Usaha PLN Indonesia Power Business Outlook of PLN Indonesia Power

Dalam rangka mencapai target *Net Zero Emissions* (NZE) tahun 2060, yang dituangkan dalam *roadmap* transisi energi, pada tahun 2025 ditargetkan pencapaian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 25%. Hal ini merupakan prospek bagi PLN Indonesia Power untuk terus menjaga keandalan pembangkit EBT yang saat ini sudah dimiliki oleh Perusahaan.

Seiring dengan *roadmap* transisi energi tersebut, potensi sumber daya EBT yang belum dimanfaatkan di Indonesia masih sangat besar. Hal ini merupakan peluang bagi PLN Indonesia Power, yang sudah memiliki pengalaman dalam O&M pembangkit EBT, untuk melakukan pengembangan pembangkit EBT. Seiring dengan hal tersebut, terdapat hal-hal yang mendukung percepatan realisasi pengembangan pembangkit EBT, antara lain biaya LCOE pembangkit EBT semakin kompetitif dibandingkan dengan pembangkit fosil, regulasi Perpres 112 Tahun 2022 yang mendukung percepatan pengembangan EBT, serta semakin banyaknya sumber pendanaan untuk pengembangan pembangkit EBT tersebut.

Namun demikian, karena biaya peralihan pembelian listrik oleh PLN dari pembangkit fosil ke EBT cukup tinggi, dan juga biaya *retirement* untuk pembangkit fosil cukup tinggi, maka prospek pembangkit batubara milik PLN Indonesia

To achieve the Net Zero Emissions (NZE) target by 2060, as outlined in the energy transition roadmap, a target of 25% renewable energy (NRE) mix is set for 2025. This presents a promising outlook for PLN Indonesia Power to continue maintaining the reliability of the renewable energy (NRE) power plants currently owned by the Company.

In line with the energy transition roadmap, the potential of untapped renewable energy (NRE) resources in Indonesia remains very large. This presents an opportunity for PLN Indonesia Power, which already has experience in the O&M of NRE power plants, to develop more NRE power plants. In line with this, there are several factors supporting the acceleration of renewable energy development, including increasingly competitive LCOE costs of NRE power plants compared to fossil power plants, Presidential Regulation No. 112 of 2022 which supports the acceleration of renewable energy development, as well as the growing number of funding sources available for the development of such power plants.

Nevertheless, due to the high cost of transitioning PLN's electricity purchases from fossil-based to renewable energy (NRE) power plants, as well as the substantial cost of retiring fossil fuel power plants, the prospects for PLN Indonesia

Power masih akan berlangsung cukup baik dalam beberapa waktu ke depan sebagai pembangkit yang dapat memenuhi listrik ekonomis, stabil dan dapat memenuhi kebutuhan listrik dalam jumlah yang besar. Begitu juga dengan pembangkit gas milik PLN Indonesia Power, memiliki prospek yang baik sebagai pembangkit dengan energi bersih yang *fast respon* dalam menghadapi *Variable Renewable Energy* (VRE) untuk menjaga keamanan sistem kelistrikan di Indonesia.

PLN Indonesia Power sebagai Perusahaan yang memiliki SDM dengan kompetensi O&M di hampir seluruh jenis pembangkit listrik, memiliki prospek untuk mengembangkan bisnis *beyond kWh*, sekaligus untuk menangkap peluang BUMN GO GLOBAL yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN, melalui kerjasama dengan *strategic partnership*.

Power's coal-fired power plants are expected to remain relatively strong in the near future. These plants are still seen as capable of providing economical, stable, and large-scale electricity supply. Similarly, PLN Indonesia Power's gas-fired power plants also have positive prospects as clean energy generators with fast response capabilities, which are crucial for handling Variable Renewable Energy (VRE) and maintaining power system security in Indonesia.

PLN Indonesia Power, as a company with human resources competent in O&M across almost all types of power plants, has the prospect of developing beyond kWh businesses, as well as capturing the BUMN GO GLOBAL opportunity initiated by the Ministry of State-Owned Enterprises through collaboration with strategic partnerships.

Politik Politics	Prospek Perusahaan untuk mengembangkan bisnis, khususnya bisnis <i>beyond kWh</i> , di pasar global, sesuai dengan arahan Menteri BUMN yang mencanangkan BUMN GO GLOBAL.	Company's prospects to expand its business, particularly beyond kWh business, in the global market, in line with the directive of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) through the BUMN GO GLOBAL initiative.
Ekonomi Economy	Prospek Perusahaan untuk meningkatkan pengembangan bisnis pembangkitan EBT, dengan semakin banyaknya dukungan pendanaan <i>green energy</i> .	Company's prospects to enhance the development of renewable energy (NRE) generation business, supported by the increasing availability of green energy financing.
	Prospek Perusahaan untuk melakukan pengembangan pembangkit dan juga senantiasa meningkatkan keandalan pembangkit untuk dapat memenuhi peluang <i>captive market</i> seperti <i>smelter</i> , Kawasan Ekonomi Khusus, dan Listrik Premium.	Company's prospects to develop power plants and continuously improve plant reliability to capture opportunities in captive markets such as smelters, Special Economic Zones, and Premium Electricity.
Sosial Social	Prospek Perusahaan untuk meningkatkan penjualan tenaga listrik, seiring dengan meningkatnya trend elektrifikasi di kalangan masyarakat, seperti penggunaan mobil listrik, motor listrik, kompor listrik, dll.	Company's prospects to increase electricity sales in line with the rising electrification trend among the public, such as the use of electric vehicles, electric motorcycles, electric stoves, and others.
	Prospek Perusahaan untuk menerapkan konsep dan kriteria <i>Environment, Social, and Governance</i> (ESG) sebagai salah satu pendekatan untuk menurunkan risiko keberlanjutan, dimana kini hal tersebut menjadi salah satu dasar untuk mendapatkan pendanaan.	Company's prospects to implement the Environment, Social, and Governance (ESG) concept and criteria as one of the approaches to reduce sustainability risks, which is now one of the fundamental considerations for obtaining financing.
Teknologi Technology	Prospek Perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pada proses bisnis melalui implementasi berbagai teknologi digital, baik di bidang pembangkitan maupun non pembangkitan.	Company's prospects to enhance efficiency in business processes through the implementation of various digital technologies, both in generation and non-generation areas.
	Prospek Perusahaan untuk meningkatkan pengembangan bisnis pembangkitan EBT dengan memanfaatkan teknologi baru di bidang pembangkitan, antara lain <i>Nuclear Small Modular Reactor</i> (SMR), <i>Battery Energy Storage System</i> (BESS), <i>Wind Turbine</i> , <i>Solar Photo Voltaic</i> (PV), <i>Smart Grid</i> , <i>Hydrogen Fuel Cell</i> , Teknologi <i>Carbon Capture & Storage</i> (CCS) & <i>Carbon Capture, Utilization, and Storage</i> (CCUS).	Company's prospects to expand renewable energy generation (NRE) business development by utilizing new generation technologies, including Nuclear Small Modular Reactors (SMR), Battery Energy Storage Systems (BESS), Wind Turbines, Solar Photovoltaic (PV), Smart Grids, Hydrogen Fuel Cells, Carbon Capture & Storage (CCS), and Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).
	Prospek Perusahaan untuk meningkatkan implementasi teknologi digital pada seluruh aspek bisnis, termasuk pembangkitan dan proses bisnis lainnya, guna meningkatkan kinerja operasional dan pemeliharaan pembangkit menuju <i>high quality growth</i> , serta untuk mencegah terjadinya ancaman <i>cyber security</i> .	Company's prospects to enhance the implementation of digital technologies across all business aspects, including power generation and other business processes, to improve operational and maintenance performance of power plants toward high quality growth, as well as to prevent cybersecurity threats.

Environment	Peluang Perusahaan untuk berperan dalam mencapai target NZE tahun 2060 melalui transisi energi, diantaranya dengan mengembangkan pembangkit listrik yang berbasis EBT, melakukan transisi energi penggunaan primer pada pembangkit fosil diantaranya dengan memanfaatkan biomassa, <i>hydrogen</i> , amonia, dll, serta menyediakan <i>green energy as a service</i> .	Company's opportunities to contribute to achieving the NZE 2060 target through energy transition, including by developing renewable energy-based power plants, transitioning primary energy use in fossil-based power plants—such as utilizing biomass, hydrogen, ammonia, etc.—and providing green energy as a service.
	Prospek Perusahaan untuk berperan dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup, dengan menjaga baku mutu emisi pembangkit listrik agar sesuai dengan Permen KLHK No. 15 Tahun 2019.	Company's prospects to play a role in preserving and managing the environment, by maintaining power plant emission quality standards in accordance with the Ministry of Environment and Forestry Regulation No. 15 of 2019.
Legal	Prospek Perusahaan untuk turut berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca sebagaimana ditekankan pada beberapa regulasi antara lain, Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan POJK No.14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.	Company's prospects to contribute to reducing greenhouse gas emissions as emphasized in several regulations, including Presidential Regulation No. 98 of 2021 on Carbon Economic Value (NEK), Law No. 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations, and OJK Regulation No. 14 of 2023 on Carbon Trading Through the Carbon Exchange.
	Prospek Perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pembangkit melalui peningkatan tata kelola pembangkit yang lebih baik dengan didukung peningkatan implementasi pada digitalisasi pembangkit, guna dapat memenuhi Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2020 terkait <i>Specific Fuel Consumption</i> (SFC).	Company's prospects to improve power plant efficiency through enhanced power plant governance, supported by increased implementation of power plant digitalization, to comply with Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 9 of 2020 on Specific Fuel Consumption (SFC).
	Prospek Perusahaan untuk mengembangkan bisnis pembangkitan di daerah Kalimantan, seiring dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Company's prospects to expand power generation business in the Kalimantan region, in line with the enactment of Law No. 3 of 2022 on the National Capital.
	Prospek Perusahaan untuk turut berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri melalui implementasi Permen Perin No. 04/M-IND/PER/2/2017 tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang P3DN.	Company's prospects to contribute to domestic economic growth through the implementation of Ministry of Industry Regulation No. 04/M-IND/PER/2/2017 on Domestic Component Level (TKDN) and Presidential Instruction No. 2 of 2022 on P3DN.

Dasar Asumsi Kelangsungan Usaha

Basis for Business Continuity Assumptions

Posisi Perusahaan saat ini berada pada kuadran II yaitu *Grow and Build*. Pada RJPP 2024–2028 terdapat tantangan baru antara lain pembentukan *Subholding* Pembangkitan, dimana terdapat penambahan ±10 GW pasca peralihan aset dari PLN, yang 89% diantaranya berbahan bakar fosil. Ada pula pembentukan Transformasi 2.0 PLN dan juga target kinerja jangka panjang yang lebih menantang. Selain itu adanya agenda *sustainability*, antara lain penetapan target NZE dan juga peluang untuk semakin memperluas jaringan bisnis baik secara nasional maupun global, dengan memanfaatkan keunggulan Perusahaan dan mengatasi kelemahan yang dimiliki Perusahaan.

The Company is currently positioned in Quadrant II, namely *Grow and Build*. In the Corporate Long-Term Plan (RJPP) 2024–2028, new challenges have emerged, including the establishment of Power Generation Subholding, which involves the addition of approximately ±10 GW following asset transfers from PLN, 89% of which are fossil-fueled. There is also the implementation of PLN Transformation 2.0 and more demanding long-term performance targets. In addition, there is a sustainability agenda, including the establishment of the Net Zero Emissions (NZE) target, as well as opportunities to further expand the Company's business network both nationally and globally by leveraging its strengths and addressing its weaknesses.





PLTA TES, UBP Bengkulu
TES HPP, Bengkulu GBU



Tata Kelola (Governansi) Perusahaan

Corporate Governance



Tata Kelola (Governansi) Perusahaan

Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) di PLN Indonesia Power berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN RI PER-2/MBU/03/2023, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan empat pilar Tata Kelola Korporat yang terdapat dalam Pedoman Umum Tata Kelola Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yaitu Perilaku Etis, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan (ETAK). Dengan menginternalisasi kelima prinsip dan empat pilar tersebut, PLN Indonesia Power berkomitmen untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi Perusahaan serta seluruh pemangku kepentingan.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) at PLN Indonesia Power is based on the principles set out in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023, on Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. These principles are aligned with the four pillars of Corporate Governance as outlined in the 2021 Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUG-KI) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG), covering Ethical Behavior, Accountability, Transparency, and Sustainability (ETAS). By internalizing these five principles and four pillars, PLN Indonesia Power is committed to creating sustainable value for the Company and all stakeholders.

Empat Pilar Governansi Korporat Sebagai Landasan Prinsip-Prinsip Governansi Perusahaan

The Four Pillars of Corporate Governance as the Foundation of Corporate Governance Principles



Pada tahun 2024, sesuai dengan visi Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris PLN Indonesia Power telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung kinerja Perusahaan secara berkelanjutan dengan fokus pada tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan juga terus mengantisipasi risiko perubahan lingkungan bisnis dalam menjalankan kegiatan operasionalnya saat ini dan di masa yang akan datang dengan berlandaskan pada pilar governansi (ETAK). Semua kegiatan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam buku terpisah, yaitu pada Laporan Keberlanjutan tahun 2024.

In 2024, in line with the Company's vision, the Board of Directors and Board of Commissioners of PLN Indonesia Power had carried out various initiatives to support the Company's sustainable performance, focusing on three main aspects: economic, social, and environmental. The Company also continued to anticipate risks arising from changes in the business environment in both current and future operations, guided by the governance pillars (ETAK). All these activities are further detailed in a separate document, the 2024 Sustainability Report.

Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris telah mengimplementasikan prinsip governansi (ETAK) dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* melalui langkah strategis, seperti meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta menjalin kemitraan yang erat dengan pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah, pemegang saham, masyarakat sekitar, perangkat desa, dan LSM. Semua pemangku kepentingan yang teridentifikasi dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pengembangan proyek atau pembangkit, dan informasi terkait disampaikan secara efektif kepada pihak yang relevan.

Dengan mengintegrasikan pilar governansi (ETAK) dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil, PLN Indonesia Power memastikan bahwa strategi mitigasi risiko yang diterapkan tidak hanya menjaga kelangsungan operasional perusahaan, tetapi juga menciptakan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang.

Furthermore, the Board of Directors and Board of Commissioners have implemented the governance principles (ETAK) by considering the interests of stakeholders through strategic measures such as enhancing transparency, strengthening accountability, and building strong partnerships with stakeholders, including the Government, shareholders, surrounding communities, village authorities, and NGOs. All identified stakeholders are involved in the decision-making process related to project or power plant planning and development, and relevant information is effectively communicated to the appropriate parties.

By integrating the governance pillars (ETAK) into every decision and action taken, PLN Indonesia Power ensures that the risk mitigation strategies implemented not only safeguard the continuity of the Company's operations but also generate long-term value for all stakeholders, both now and in the future.

Dasar Hukum dan Kebijakan Penerapan Governansi Perusahaan

Foundation and Policy for Implementing Corporate Governance

PLN Indonesia Power menerapkan Governansi Perusahaan dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER- 1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER- 2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER- 3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
6. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 Tentang tentang Nilai-nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

PLN Indonesia Power implements Corporate Governance by referring to various laws and regulations, as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption;
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises;
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 on Organizational Structure and Human Resources of State-Owned Enterprises;
6. Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020, on Core Values of Human Resources in State-Owned Enterprises;

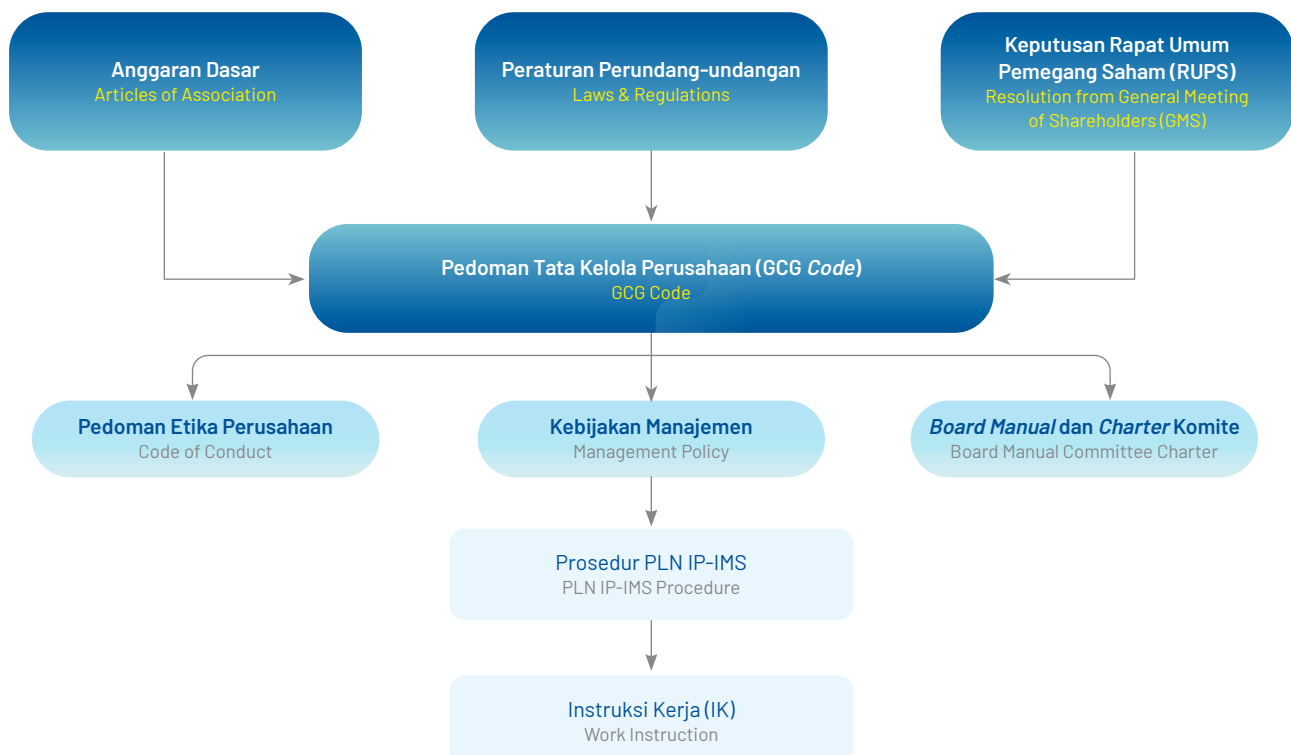
7. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-12/MBU/10/2021 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 8. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Republik Indonesia Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 9. Surat Kementerian BUMN No. S-17/S.MBU/02/2020 Tentang Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di BUMN;
 10. ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF);
 11. Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUG-KI) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) tahun 2021;
 12. Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
 13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
 14. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 15. Peraturan dan Kebijakan Perusahaan.
7. Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-12/MBU/10/2021 on the Obligation to Submit the State Officials' Wealth Report (LHKPN) for Officials within State-Owned Enterprises;
 8. Decree of the Deputy for Finance and Risk Management, Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia No. SK-3/DKU.MBU/05/2023 on Technical Guidelines on the Composition and Qualifications of Risk Management Organs within State-Owned Enterprises;
 9. Letter from the Ministry of SOEs No. S-17/S.MBU/02/2020 on ISO 37001 Anti-Bribery Management System (ABMS) Certification in SOEs;
 10. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) issued by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
 11. The Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUG-KI) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in 2021;
 12. Financial Services Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Guidelines for Public Corporate Governance
 13. Financial Services Authority Circular (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 on Guidelines for Public Corporate Governance
 14. The Company's Articles of Association and Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS);
 15. Company regulations and policies.

Perangkat kebijakan tata kelola PLN Indonesia Power terdiri dari 5 (lima) level kebijakan sebagai berikut:

PLN Indonesia Power's governance policy framework consists of 5 (five) levels of policy, as follows:

Hirarki Kebijakan Perusahaan

Company Policy Hierarchy



PLN Indonesia Power telah menyusun dan menerapkan berbagai kebijakan yang sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kualitas implementasi tata kelola secara berkelanjutan, antara lain:

PLN Indonesia Power has developed and implemented various policies aligned with corporate governance principles to enhance the quality of governance implementation on a sustainable basis, including the following:

Kebijakan dan Pedoman Policy and Code	Keterangan Description	
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG Code) GCG Code	Merupakan arahan strategis Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai Perusahaan, Visi dan Misi yang menjadi acuan dalam mengelola Perusahaan. GCG Code pertama kali disusun pada tahun 2002, yang kemudian mengalami penyempurnaan beberapa kali, dan terakhir diperbarui pada tahun 2019 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 178.K/010/IP/2019 dan 006.SK/DEKOMIP/2019 tanggal 26 Juni 2019. Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power telah melakukan review dan pembaharuan GCG Code seiring dengan terbitnya peraturan BUMN terbaru, namun hingga saat ini, GCG Code tersebut masih dalam proses pengesahan Perusahaan.	A strategic directive from the Board of Directors and the Board of Commissioners in applying GCG principles, corporate values, and the Company's Vision and Mission, which serve as references for managing the Company. The first GCG Code was established in 2002 and had undergone several revisions, most recently updated in 2019 through Joint Decision Letter of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 178.K/010/IP/2019 and 006.SK/DEKOMIP/2019 dated June 26, 2019. In 2024, PLN Indonesia Power reviewed and revised the GCG Code in line with the latest SOE regulations; however, it was still in the process of being ratified by the Company.
Pedoman Etika Perusahaan Code of Conduct	Menjadi acuan Perusahaan dalam melakukan interaksi manajemen, pegawai serta para pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) sesuai dengan nilai dan budaya Perusahaan serta prinsip-prinsip GCG. Perusahaan telah menyusun Pedoman Etika Perusahaan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor No. 0179.K/DIR/2023 dan No.004.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai pemutakhiran dari Pedoman Etika Perusahaan tahun 2019	Serving as a reference for interactions among management, employees, and stakeholders in accordance with the Company's values, culture, and GCG principles. The Company established a Code of Conduct formalized through the Joint Decision Letter of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 0179.K/DIR/2023 and No. 004.SK/DK-PLNIP/2023 dated June 27, 2023, as an update to the 2019 Code of Conduct.
Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>) Board Manual	Seperangkat petunjuk tata laksana hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>) disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 051.K/010/IP/2020 dan 005.SK/DEKOMIP/2020 Tanggal 20 Maret 2020.	A set of guidelines governing the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors, detailing their respective duties and responsibilities. The Board Manual was ratified through the Joint Decision Letter of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 051.K/010/IP/2020 and 005.SK/DEKOMIP/2020 dated March 20, 2020.
Kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) Kebijakan Whistle Blowing System (WBS)	Perusahaan mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau <i>Whistleblowing System</i> (WBS) dalam rangka mencegah terjadinya tindak kecurangan dengan melaporkan kejadian perilaku pelanggaran serta mendorong budaya kejujuran dan keterbukaan. Pedoman pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan mengacu pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Power Nomor 0020.P/DIR/2024 dan 011.SK/DK-PLNIP/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) sebagai pembaharuan kebijakan <i>Whistleblowing System</i> tahun 2019.	The Company implements a Whistleblowing System (WBS) to prevent fraud by reporting incidents of violations and encouraging a culture of honesty and transparency. The guidelines for implementing the Whistleblowing System in the Company refer to the Joint Decision of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Indonesia Power No. 0020.P/DIR/2024 and 011.SK/DK-PLNIP/2024 dated May 20, 2024 on the Whistleblowing System Management Policy as an update to the 2019 Whistleblowing System policy.
Pedoman Benturan Kepentingan Conflict of Interest Code	PLN Indonesia Power telah menetapkan Pedoman Benturan Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>) yang disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor 018.K/010/IP/2020 tanggal 11 Februari 2020. Pedoman tersebut bertujuan agar potensi benturan kepentingan tersebut ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga tetap menjunjung tinggi etika dan praktik bisnis yang sehat, mencegah kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya.	PLN Indonesia Power has established a Conflict-of-Interest Code, ratified through the Board of Directors' Decision No. 018.K/010/IP/2020 dated February 11, 2020. This policy aims to ensure that potential conflicts of interest are handled in accordance with Good Corporate Governance principles, upholding ethical conduct and sound business practices while preventing fraud and other misconduct.

Kebijakan dan Pedoman Policy and Code		Keterangan Description
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Gratuity Control Guidelines	Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menciptakan perusahaan yang bersih dan terhindar dari praktik korupsi dan gratifikasi, PLN Indonesia Power menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang disahkan melalui Peraturan Direksi No. 0089.P/DIR/2023 tanggal 27 September 2023 sebagai pemutakhiran dari Pedoman Pengendalian Gratifikasi tahun 2020.	As part of its commitment to maintaining a clean and corruption-free organization, PLN Indonesia Power issued an updated Gratification Control Policy through the Board of Directors' Regulation No. 0089.P/DIR/2023 dated September 27, 2023, as a revision of the 2020 version.
Pedoman Penerapan Tata Kelola Governance, Risk and Compliance (GRC) Governance, Risk, and Compliance (GRC) Guidelines	Pedoman dan acuan dalam penerapan Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, pertumbuhan dan keberlanjutan Perusahaan. Pedoman ini disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor Peraturan Direksi Nomor 0073.P/DIR/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai pemutakhiran dari Pedoman GRC tahun 2019.	Guidelines and references for implementing governance, risk management, and compliance to enhance the Company's effectiveness, efficiency, growth, and sustainability. The updated GRC Guidelines were ratified through the Board of Directors' Regulation No. 0073.P/DIR/2023 dated June 27, 2023, replacing the 2019 version.
Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) State Officials' Wealth Report (LHKPN) Submission Guidelines	Pemenuhan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel salah satunya diwujudkan melalui kewajiban wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kebijakan tentang kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor 112.K/010/IP/2021 tanggal 24 November 2021.	Compliance with transparent and accountable corporate governance is implemented, one of the ways, by enforcing the obligation to report State Officials' Wealth (LHKPN). This policy is outlined in the Board of Directors' Decision No. 112.K/010/IP/2021 dated November 24, 2021.
Kebijakan Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Policy on ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System (SMAP) Implementation	Komitmen Perusahaan untuk menjalankan usaha dengan berintegritas, jujur, beretika dan tidak memberikan toleransi pada korupsi dan suap mengacu kepada Pemenuhan Klausul dalam SNI ISO 37001:2016. Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power melakukan pembaharuan pada Kebijakan Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 0098.P/DIR/2023 dan No.007.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Anti Penyuapan.	The Company's commitment to conducting business with integrity, honesty, ethics, and zero tolerance for bribery and corruption is reflected in its compliance with the SNI ISO 37001:2016 clauses. In 2023, the Company updated its ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Policy through the Joint Decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 0098.P/DIR/2023 and No. 007.SK/DK-PLNIP/2023 dated December 13, 2023, concerning the General Policy on Anti-Bribery Governance.
Kebijakan Anti Fraud Fraud Control Policy	Sebagai tindak lanjut arahan PT PLN (Persero) dalam membangun sistem manajemen <i>anti fraud</i> , Perusahaan sebagai entitas anak PT PLN (Persero) turut mendukung program tersebut melalui kebijakan yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 0085.P/DIR/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai pemutakhiran dari Kebijakan <i>Anti Fraud</i> tahun 2020.	As a follow-up to the directives from PT PLN (Persero) in building an anti-fraud management system, PLN Indonesia Power, as a subsidiary of PT PLN (Persero), supports the program through the policy stipulated in the Board of Directors' Regulation No. 0085.P/DIR/2023 dated September 20, 2023, which updated the 2020 Anti-Fraud Policy.
Kebijakan Sistem Manajemen Kepatuhan Compliance Management System Policy	Dalam rangka mewujudkan PT PLN Indonesia Power sebagai Perusahaan kelas dunia yang tumbuh berkelanjutan, unggul dan terpercaya serta guna mencegah, mendeteksi dan menindaklanjuti terjadinya risiko kepatuhan, PT PLN Indonesia Power memiliki pedoman dalam pengelolaan kepatuhan tersebut dengan mengacu pada Peraturan Direksi No.0021.P/DIR/2024 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Kepatuhan tanggal 20 Mei 2024 sebagai pembaharuan dari Kebijakan Sistem Manajemen Kepatuhan tahun 2023.	In order to bring PT PLN Indonesia Power to be a superior and trusted world-class company that grows sustainably, and to prevent, detect, and follow up on the occurrence of compliance risks, PT PLN Indonesia Power has guidelines in managing compliance by referring to the Board of Directors' Regulation No. 0021.P/DIR/2024 on the Compliance Management System Policy dated May 20, 2024 as an update of the 2023 Compliance Management System Policy.

Perusahaan melakukan evaluasi dan pemutakhiran atas perangkat kebijakan yang dimiliki secara berkala, agar terus memiliki relevansinya, baik terhadap perkembangan Perusahaan maupun perkembangan regulasi yang berlaku.

The Company conducts regular evaluations and updates on its policy instruments to ensure their continued relevance, both in relation to the Company's developments and the applicable regulatory changes.

Tujuan Penerapan Governansi Perusahaan

Objectives of Corporate Governance Implementation

1. Tercapainya kesinambungan usaha dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dengan sah dan beretika;
 2. Pemberdayaan fungsi dan kemandirian organ Perusahaan, yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi;
 3. Pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 4. Terciptanya kesadaran dan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar;
 5. Optimalisasi nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya;
 6. Peningkatan daya saing Perusahaan secara nasional maupun internasional;
 7. Mendorong manajemen melakukan mekanisme *check and balance* pada setiap fungsi dalam proses bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG.
1. Achieving business continuity and the Company's goals established in a lawful and ethical manner;
 2. Empowering the functions and independence of the Company's organs, which consist of the GMS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors;
 3. Resolution Adoption by Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors based on high moral values and compliance with laws and regulations;
 4. Creating corporate social awareness and responsibility toward the community and environmental sustainability;
 5. Optimizing the Company's value for Shareholders while also considering other stakeholders;
 6. Enhancing the Company's competitiveness both nationally and internationally;
 7. Encouraging management to implement a check-and-balance mechanism for each function within the business process based on the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Struktur Tata Kelola Perusahaan

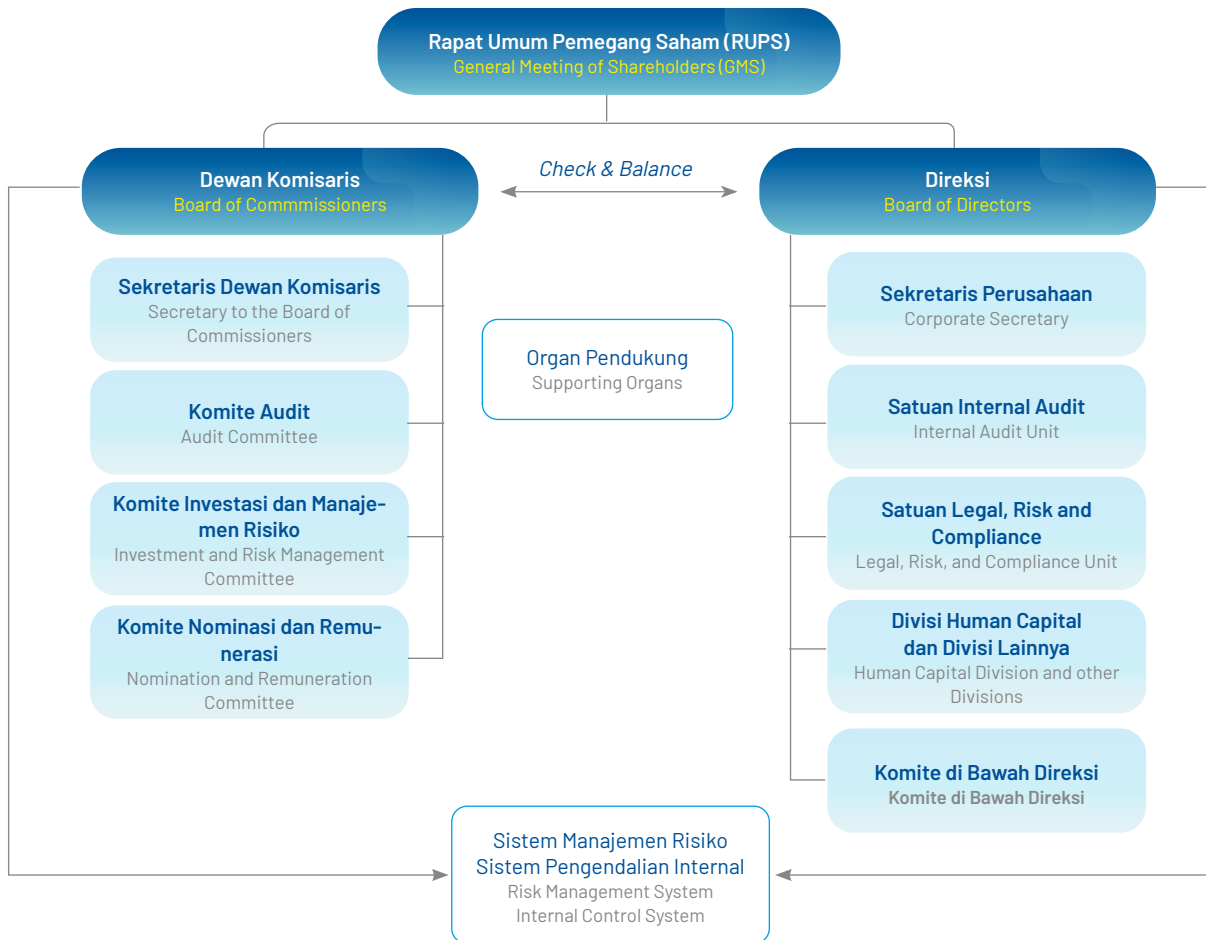
Corporate Governance Structure

Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power membentuk organ pendukung Direksi yaitu Komite *Sustainability*, sehingga organ tata kelola PLN Indonesia Power per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

In 2024, PLN Indonesia Power established a supporting organ for the Board of Directors, namely the Sustainability Committee. Thus, the governance organs of PLN Indonesia Power as of December 31, 2024, are as follows:

Struktur Organ Tata Kelola PLN Indonesia Power

PLN Indonesia Power Governance Organ Structure



Strategi Perusahaan dalam Menjaga Konsistensi Kualitas Governansi PLN Indonesia Power

PLN Indonesia Power's Strategy in Improving the Quality of Corporate Governance

Sepanjang tahun 2024, PLN Indonesia Power telah melakukan berbagai upaya meningkatkan kualitas dan memperkuat penerapan Tata Kelola yang Baik dalam setiap aktivitas Perusahaan agar mampu secara konsisten menerapkan governansi Perusahaan yang berkelanjutan. Berikut beberapa program yang dilakukan selama tahun 2024:

Throughout 2024, PLN Indonesia Power took various efforts to improve the quality and strengthen the implementation of Good Corporate Governance in every Company activity, with the aim of consistently applying sustainable corporate governance. The following are some of the programs carried out during 2024:

Himbauan Pengisian LHKPN melalui email maupun sosialisasi LHKPN di IPKU pada 01 Januari 2024 s.d 29 Februari 2024. Sebanyak 1.080 Pejabat Wajib Laporan LHKPN PLN Indonesia Power telah menyampaikan secara tepat Waktu kepada KPK

Reminders of LHKPN filing delivered via email and through LHKPN dissemination programs at IPKU from January 1 to February 29, 2024. A total of 1,080 obligated officials at PLN Indonesia Power submitted their LHKPN on time to the Corruption Eradication Commission (KPK).

Sosialisasi Himbauan Gratifikasi Hari Raya Idul Fitri pada 02 April 2024 dan Sosialisasi Himbauan Gratifikasi terkait Perayaan Hari Raya Natal Tahun 2024 dan Perayaan Tahun Baru 2025 pada 20 Desember 2024

Dissemination of Gratification Warnings for Eid al-Fitr was held on April 2, 2024, and for the Christmas 2024 and New Year 2025 celebrations on December 20, 2024.

Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai dan Pasangan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh Senior Leader di Perusahaan PT PLN Indonesia Power pada 01 Maret 2024 s.d 31 Maret 2024

Signing of the Employee and Spouse Integrity Pact by the Board of Directors, Board of Commissioners, and all Senior Leaders of PT PLN Indonesia Power from March 1 to March 31, 2024.

Survey pemahaman pegawai atas pemahaman integritas pada Bulan Desember dengan Rata-rata skor pemahaman integritas sebesar 93,28%. Skor rata-rata tahunan survei pemahaman integritas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

An employee integrity awareness survey was conducted in December, yielding an average integrity understanding score of 93.28%. The annual average score showed an improvement compared to the previous year.

Menerapkan program pengembangan kompetensi setiap personil auditor melalui sertifikasi dan pelatihan berdasarkan *Training Need Analysis*. Hingga akhir Desember 2024, 33 auditor Internal Audit PLN Indonesia Power telah bersertifikasi *Qualified Internal Auditor (QIA)* Tingkat Manajerial dari 37 total Auditor Internal

Implementing a competency development program for each auditor through certification and training based on a Training Need Analysis. By the end of December 2024, 33 out of a total of 37 Internal Auditors at PLN Indonesia Power had obtained certification as Qualified Internal Auditors (QIA) at the Managerial Level.

Sosialisasi Himbauan Benturan Kepentingan Hari Raya Idul Adha pada 03 Juni 2024

Dissemination of Conflict-of-Interest Warnings for Eid al-Adha was conducted on June 3, 2024.

Membentuk Komite *Sustainability* pada April 2024

The Sustainability Committee was established in April 2024

Penilaian dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Pedoman Tata Kelola oleh pihak eksternal dengan menggunakan beberapa parameter yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional yaitu berdasarkan alat uji ASEAN ACGS, POJK dan PUG-KI.

Conducting regular assessments and evaluations of the implementation of the Governance Guidelines by external parties using various applicable national and international parameters, including the ASEAN ACGS assessment tool, POJK, and the PUG-KI framework.

Survey Pemahaman GCG, CoC, WBS dan Gratifikasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Pegawai. Hasil Survey tersebut menunjukkan Pemahaman yang Sangat Baik yaitu rata-rata diatas 98%

Survey of Understanding of GCG, CoC, WBS, and Gratification to the Board of Directors, Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board of Commissioners, and Employees. The Survey results show a Very Good Understanding, with an average of above 98%.

Menindaklanjuti laporan pengaduan termasuk Laporan Gratifikasi yang masuk melalui sarana pelaporan WBS

Following up on complaint reports, including Gratification Reports, submitted through the WBS reporting channel.

Penandatanganan Komitmen SMAP oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power di Bandung pada 18 Januari 2024

Signing of the Anti-Bribery Management System (SMAP) Commitment by the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power in Bandung on January 18, 2024.

Menyusun dan Menetapkan Roadmap Tata Kelola Perusahaan Tahun 2024–2028 sebagai pembaharuan dari Roadmap Tahun 2019–2023

Developing and establishing the 2024–2028 Corporate Governance Roadmap as an update to the 2019–2023 Roadmap.

Survey Pemahaman Budaya Pada tanggal 30 September 2024 – 9 Oktober 2024. Hasil survey menunjukan skor 87 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya

Conducting a Culture Understanding Survey from September 30 to October 9, 2024. The survey results showed a score of 87, an increase compared to the previous year.

Menyelenggarakan sejumlah program pelatihan terkait anti korupsi yang diikuti oleh 2.525 orang pegawai di seluruh jenjang jabatan dan unit bisnis Perusahaan

Organizing a number of anti-corruption training programs attended by 2,386 employees across all job levels and business units of the Company.

Melakukan *Monitoring* Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Anak Perusahaan PT Artha Daya Coalindo (PT ADC) dan PT PLN Indonesia Power Services (PT PLN IPS). Khusus bagi Anak Perusahaan PT PLN Indonesia Power Renewables (PT PLN IPren) diperlukan pendampingan lebih lanjut dalam rangka penguatan implementasi GCG kedepannya

Conducting Monitoring of the Assessment Results of Good Corporate Governance Implementation to Subsidiaries of PT Artha Daya Coalindo (PT ADC) and PT PLN Indonesia Power Services (PT PLN IPS). Specifically for the Subsidiary of PT PLN Indonesia Power Renewables (PT PLN IPren), further assistance is required to strengthen the GCG implementation in the future.

Sinergi Perusahaan Bersama Unit dan Anak Perusahaan melalui:

Selama tahun 2024, PLN Indonesia Power melakukan 3 (tiga) kali Forum Kepatuhan dengan Unit dan Anak Perusahaan pada tanggal 6 Februari 2024, 7 Juni 2024 dan 21 November 2024 dengan agenda SMAP, Kepatuhan, Pengendalian Gratifikasi, WBS, Anti Korupsi serta pembahasan Fraud Profil Risiko.

Synergy Between the Company, Units, and Subsidiaries through:

Throughout 2024, PLN Indonesia Power held 3 (three) Compliance Forums with its Units and Subsidiaries on February 6, 2024, June 7, 2024, and November 21, 2024. The forums covered agendas including the Anti-Bribery Management System (SMAP), Compliance, Gratification Control, Whistleblowing System (WBS), Anti-Corruption, and discussions on Fraud Risk Profiles.

Menerapkan program pengembangan kompetensi setiap personil Manajemen Risiko, sampai dengan akhir tahun 2024, personil Satuan Legal, Risk and Compliance berjumlah 18 orang sebanyak 14 Orang telah sertifikat profesi yaitu QRG/CRGP; ERM/ERMA; QRM/QRMO dan QRMP

Implementing a competency development program for each auditor through certification and training based on a Training Need Analysis. By the end of December 2024, 33 out of a total of 37 Internal Auditors at PLN Indonesia Power had obtained certification as Qualified Internal Auditors (QIA) at the Managerial Level.

Hasil Penilaian Implementasi Governansi Perusahaan

Assessment Results of Corporate Governance Implementation



Skor ACGS untuk Level 1 sebesar **82,59 poin** dan Level 2 sebesar **12,41 poin**, sehingga total skor keseluruhan (Level 1 dan Level 2) adalah sebesar **95,01 poin**.
The ACGS score for Level 1 is **82.59 points** and for Level 2 is **12.41 points**, resulting in a total overall score (Level 1 and Level 2) of **95.01 points**.



Berdasarkan 5 aspek, 8 prinsip dan 25 rekomendasi yang dipetakan atas penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka POJK 21/POJK.04/ 2015 dan SEOJK 32 / SEOJK.04/2015 pada PT PLN Indonesia Power Tahun Buku 2024, terdapat **10 status comply** dan **15 status explain**.
Based on 5 aspects, 8 principles, and 25 recommendations mapped against the implementation of the Public Company Governance Guidelines as regulated by POJK 21/POJK.04/2015 and SEOJK 32/ SEOJK.04/2015 at PT PLN Indonesia Power for the 2024 fiscal year, there are 10 items with a "comply" status and 15 items with an "explain" status.



Evaluasi atas penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) pada PT PLN Indonesia Power Tahun buku 2024, terdapat **45 Rekomendasi** yang berstatus **Apply** dan **36 Rekomendasi** yang berstatus **Explain**.
An evaluation of the implementation of the Indonesian GCG General Guidelines (PUG-KI) at PT PLN Indonesia Power for the 2024 fiscal year shows that **45** recommendations have an "apply" status and **36** recommendations have an "explain" status.

Penjelasan lebih lanjut terkait Penilaian dan Evaluasi Penerapan GCG dijelaskan di masing-masing bab pada bab Governansi Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

Further explanation regarding the Assessment and Evaluation of GCG Implementation is provided in each section under the Corporate Governance chapter of this Annual Report.

Roadmap Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Roadmap

Pada tahun 2024, PT PLN Indonesia Power menyusun *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan sebagai pembaharuan dari *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan 2019-2023. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan 2024-2028 disusun sebagai *grand design* atau peta jalan strategis yang mengarahkan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik secara terukur dan terstruktur, dengan tujuan utama untuk mencapai tata kelola yang mampu mendukung keberlanjutan jangka panjang Perusahaan. *Grand design* ini merupakan landasan yang menetapkan arah dan kebijakan tata kelola Perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika industri energi yang semakin kompleks.

Saat ini, *grand design* GCG PLN Indonesia Power telah memasuki tahap penguatan lima tahun kedua. Tahap ini melanjutkan langkah-langkah yang telah diambil dalam periode sebelumnya, dengan fokus pada pemantapan

In 2024, PT PLN Indonesia Power developed the Corporate Governance Roadmap as an update to the 2019-2023 Corporate Governance Roadmap. The 2024-2028 Corporate Governance Roadmap is designed as a grand design or strategic roadmap to guide the implementation of good corporate governance in a measurable and structured manner, with the primary goal of achieving governance that supports the Company's long-term sustainability. This grand design serves as the foundation that sets the direction and governance policies of the Company in facing various challenges and dynamics of the increasingly complex energy industry.

Currently, PLN Indonesia Power's GCG grand design has entered the strengthening phase of the second five-year period. This phase continues the steps taken in the previous

dan penyempurnaan berbagai elemen tata kelola yang mendukung efisiensi operasional dan keberlanjutan Perusahaan.

Berikut gambaran *grand design* GCG PLN Indonesia Power:

period, focusing on consolidating and refining various governance elements that support operational efficiency and the Company's sustainability.

The following is an overview of PLN Indonesia Power's GCG grand design:

Gambar *Grand Design Good Corporate Governance* PLN Indonesia Power

Grand Design of Good Corporate Governance of PLN Indonesia Power



Untuk mewujudkan lima strategi dalam *Roadmap* ini, PLN Indonesia Power telah merancang sejumlah inisiatif yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Setiap strategi dilengkapi dengan satu atau lebih inisiatif kunci yang dirancang secara terintegrasi untuk mencapai *outcome* yang diharapkan. Pelaksanaan inisiatif tersebut akan direalisasikan melalui rencana aksi yang terperinci.

Dalam *Roadmap* GCG PLN Indonesia Power Tahun 2024-2028, setiap tahapan pembangunan didasarkan pada tiga dimensi manajemen utama yang menjadi pondasi dalam menetapkan strategi yang akan dijalankan, meliputi:

1. Penguatan Infrastruktur Tata Kelola;
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
3. Kepatuhan dan Pelaporan kepada Pemangku Kepentingan.

In order to realize the five strategies in this Roadmap, PLN Indonesia Power has designed a number of initiatives to be implemented over the next five years. Each strategy is equipped with one or more key initiatives that are integrated to achieve the expected outcomes. The implementation of these initiatives will be carried out through detailed action plans.

In the PLN Indonesia Power GCG Roadmap for 2024-2028, each development phase is based on three main management dimensions that serve as the foundation for determining the strategies to be implemented, including:

1. Strengthening Governance Infrastructure;
2. Enhancing Human Resource Capacity;
3. Compliance and Reporting to Stakeholders.

Roadmap Tata Kelola Perusahaan 2024-2028

Corporate Governance Roadmap 2024-2028

Visi Perusahaan: "To be a Global Top Performance and Sustainable Power Company"
"To be a Global Top Performance and Sustainable Power Company"

Penguatan Infrastruktur Tata Kelola berkelanjutan
Strengthening Sustainable Governance Infrastructure

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Enhancing Human Resource Capacity

Kepatuhan dan Pelaporan kepada Pemangku Kepentingan
Compliance and Reporting to Stakeholders



2024 GOVERNANCE MINDSET

Fokus: Perubahan mindset terhadap standar GCG terbaru yang diikuti dengan pemuktahiran dan penataan organisasi yang berlandaskan budaya berintegritas

Focus: Changing mindset towards the latest GCG standards followed by organizational renewal and structuring based on a culture of integrity.



2025 RELIABLE SYSTEM

Fokus: Pengembangan Tata Kelola melalui penguatan organisasi dan sistem berbasis Teknologi Informasi guna mendukung efektivitas penerapan GCG

Focus: Governance development through strengthening organization and IT-based systems to support the effective implementation of GCG.



2026 INTEGRATED GOVERNANCE

Fokus: Penerapan tata kelola terintegrasi pada seluruh entitas grup Perusahaan sejalan dengan standar terbaik (*best practice*)

Focus: Implementation of integrated governance across all group entities in line with best practice standards.



2027 SUSTAINABLE GOVERNANCE

Fokus: Integrasi prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam seluruh sistem tata kelola Perusahaan secara keberlanjutan

Focus: Integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into all corporate governance systems sustainably.



2028 GLOBAL RESILIENCE

Fokus: Terwujudnya Perusahaan yang tangguh, adaptif dan menjadi pemimpin global industri pembangkit berkelanjutan.

Focus: Realizing a resilient, adaptive company that becomes a global leader in the sustainable power generation industry.

Prinsip GCG : Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness*
GCG Principles: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and *Fairness*

Sejalan dengan Roadmap Tata Kelola Perusahaan, integritas menjadi fondasi yang sangat penting dalam membangun strategi bisnis. Dengan mengedepankan integritas, Perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pegawai, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Berikut adalah cara-cara Perusahaan menanamkan integritas di lingkungan Perusahaan:

In line with the Corporate Governance Roadmap, integrity is a crucial foundation in building business strategy. By prioritizing integrity, the Company can build a good reputation, increase customer and employee trust, and create a positive work environment. The following are ways in which the Company instills integrity in the Company's environment:

1. Mengimplementasikan nilai-nilai Perusahaan secara konsisten, memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat.
2. Mematuhi Kode Etik Perusahaan dan memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada pegawai mengenai pentingnya penerapan kode etik dalam setiap aktivitas bisnis.
3. Menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan efektif, sehingga pegawai dapat menyampaikan masalah atau kekhawatirannya dengan rasa aman dan tanpa takut akan konsekuensi.
4. Mengedepankan keteladanan dengan membangun kepemimpinan yang berintegritas dan bertanggung jawab dalam setiap aspek operasional Perusahaan.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap kepatuhan terhadap nilai-nilai dan kode etik Perusahaan, guna memastikan bahwa seluruh praktik bisnis tetap selaras dengan prinsip integritas yang diterapkan.

Dengan mengimplementasikan integritas sebagai bagian dari strategi bisnis, perusahaan diyakini akan mampu menciptakan nilai yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan, dan mencapai kesuksesan jangka panjang.

1. Applying the Company's values consistently, ensuring that these values are understood and implemented by all parties involved.
2. Complying with the Company's Code of Conduct and providing ongoing training to employees on the importance of implementing the code of conduct in every business activity.
3. Creating open and effective communication channels, enabling employees to convey their problems or concerns with a sense of security and without fear of consequences.
4. Prioritizing exemplary behavior by building leadership with integrity and responsibility in every aspect of the Company's operations.
5. Conducting regular monitoring and evaluation of compliance with the Company's values and code of conduct, ensuring that all business practices remain in line with the principles of integrity applied.

By implementing integrity as part of the business strategy, the Company is deemed able to create sustainable value, increase trust, and achieve long-term success.



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting Of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola PLN Indonesia Power yang berfungsi sebagai sarana bagi para pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. RUPS memiliki wewenang tersendiri, yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

The General Meeting of Shareholders (GMS) represents the highest organ within Indonesia Power's governance framework, functioning as a platform of shareholders to exercise their rights and responsibilities. The GMS possesses exclusive authority that is not transferred to the Board of Directors or the Board of Commissioners, as regulated by applicable laws and/or the Company's Articles of Association.

Hak Pemegang Saham

Shareholders' Rights

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham Persero, dengan ketentuan 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara.
 2. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan, secara tepat waktu, terukur, dan teratur.
 3. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham/pemilik modal dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya.
 4. Diperlakukan setara yang didukung aturan dan prosedur Perusahaan, atau hak untuk menerima pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.
1. Attending and voting in a GMS, specifically for Company shareholders, with the provision that 1 (one) share gives the holder the right to cast one vote.
 2. Obtaining material information about the Company in a timely, measurable, and regular manner.
 3. Receiving distribution of the Company's profits allocated to shareholders/investors in the form of dividends, and the remaining assets from liquidation, proportional to the number of shares/capital owned.
 4. Being treated equally, supported by the Company's rules and procedures, or having the right to receive disclosure of those rules and procedures, as well as disclosure of the capital structure and arrangements that enable certain shareholders to gain influence or control disproportionate to their share ownership.

Jenis-Jenis Pelaksanaan RUPS

Types of GMS

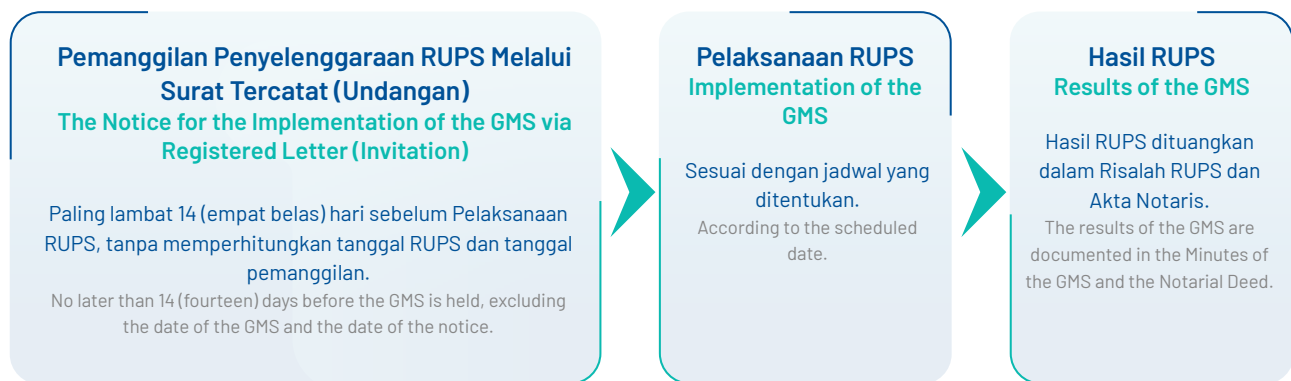
Sesuai dengan penyelenggaraannya, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan terkait Pengesahan RKAP dan Persetujuan Laporan Tahunan, serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang waktu penyelenggaraannya bisa terjadi di luar waktu RUPST. Pelaksanaan RUPS mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

In accordance with its implementation, the GMS consists of the Annual GMS related to the Approval of the Work Plan and Budget (RKAP) and the Approval of the Annual Report, as well as the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), which can be held outside the time of the AGMS. The implementation of the GMS refers to the laws and regulations and the Company's Articles of Association concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders.

Sejalan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 22, Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Pemanggilan RUPS dilakukan melalui surat tercatat dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan tata cara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan.

In line with Article 22 of the Company's Articles of Association, the notice for the GMS must be made no later than 14 days from the date the request for holding the GMS is received. The notice is conducted by registered mail, stating the date, time, place, and procedures of the meeting, along with a notice that the materials to be discussed in the GMS are available at the Company's office.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Stages for Organizing the Company's GMS



Tata Tertib RUPS Tahun 2024 Rules of the Annual GMS 2024

- Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia
- Rapat dipimpin oleh Kuasa Pemegang Saham Mayoritas
- Hihghlight Run Down* RUPS
- Hanya Pemegang Saham yang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat
- Undangan atas permintaan Pimpinan Rapat dapat memberikan sumbangan pikiran namun masukan hanya untuk bahan pertimbangan Pemegang Saham dan masukan tersebut tidak dimuat dalam Risalah Rapat
- Tanya Jawab
 - Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat
 - Pimpinan Rapat dapat memberikan kesempatan kepada Undangan Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan kepada Perseroan
 - Pertanyaan-pertanyaan hanya yang berhubungan dengan Agenda Rapat
 - Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat diajukan secara lisan
- The meeting was conducted in Bahasa Indonesia.
- The meeting was chaired by the Power of Majority Shareholder.
- Highlight rundown of the GMS.
- Only shareholders had the right to express opinions and vote during the meeting.
- Invitees, upon the Chairperson's request, might provide input, but such input was only for shareholders' consideration and would not be included in the meeting minutes.
- Questions and Answers
 - Shareholders might ask questions or express opinions.
 - The Chairperson might grant the meeting invitees the opportunity to ask questions and/or give opinions and/or suggestions to the Company.
 - Questions must only relate to the meeting agenda.
 - Every question and/or opinion during the meeting must be presented orally.

7. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat berdasarkan persetujuan Pemegang Saham.

7. Matters not regulated in these rules of procedure would be determined later by the Chairperson based on shareholders' approval.

Mekanisme Pemungutan Suara Voting Mechanism

Selaras dengan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 25 ayat 4 dan 5 dalam hal pemungutan suara (*voting*) maka dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk 1 (satu) suara. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

In accordance with Article 25, paragraphs 4 and 5 of the Company's Articles of Association regarding voting, in the meeting, each share grants its owner 1 (one) vote. Voting on the election of individuals is conducted by unsigned closed ballot, while voting on other matters is done orally, unless the Chairperson of the Meeting decides otherwise without any objection from the shareholders present at the Meeting.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2024 GMS Implementation in 2024

Sepanjang tahun 2024, PLN Indonesia Power telah menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu RUPS Tahunan tentang Persetujuan RKAP tanggal 31 Januari 2024 dan RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan tanggal 28 Juni 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

Throughout 2024, PLN Indonesia Power held the Annual GMS twice, namely the Annual GMS for the Approval of the Work Plan and Budget (RKAP) on January 31, 2024, and the Annual GMS for the Approval of the Annual Report on June 28, 2024, with the following explanations:

RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 GMS on Ratification of the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) 2024

Tanggal Undangan RUPS Date of GMS Notice	8 Januari 2024	January 8, 2024
Tanggal & Waktu RUPS Date & Time of the GMS	31 Januari 2024, Pukul 08.00 WIB	January 31, 2024, at 08.00 AM
Lokasi Location	Jakarta, Indonesia	Jakarta, Indonesia
Peserta RUPS GMS Participants	Perwakilan Pemegang Saham Mayoritas, Perwakilan Pemegang Saham Minoritas, Dewan Komisaris, Direksi PT PLN Indonesia Power	Representative of the Majority Shareholders, Representative of Minor Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors of PT PLN Indonesia Power
Pimpinan RUPS Chairperson of AGMS	Wiluyo Kusdiharto selaku Komisaris Utama	Wiluyo Kusdiharto as President Commissioner
Kuorum Meeting Quorum	Setuju 100% dengan dihadiri dan diwakili sebanyak 357.165.633.599 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan) lembar saham, yang merupakan seluruh saham dalam Perseroan dengan hak suara yang sah.	Agreed 100% with attendance and representation of 357,165,633,599 (Three Hundred Fifty-Seven Billion One Hundred Sixty-Five Million Six Hundred Thirty-Three Thousand Five Hundred Ninety-Nine) shares, which constituted all the shares in the Company with valid voting rights.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Attendance	Dapat dilihat pada bab Tata Kelola Perusahaan dan Sub Bab Dewan Komisaris serta Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini	This can be seen in the Corporate Governance chapter and the subchapters of the Board of Commissioners and the Board of Directors in this Annual Report.
Pihak Independen Independent Party	Muhammad Hanafi, SH. sebagai Notaris	Muhammad Hanafi, SH., as Notary.
Mekanisme Perhitungan Suara Voting Mechanism	Perhitungan suara dalam setiap mata acara rapat dilakukan oleh Notaris	The vote count for each agenda item of the meeting was conducted by the Notary.

Adapun untuk agenda dan keputusan atas pelaksanaan RUPS RKAP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The agenda and resolutions of the 2024 GMS on RKAP are as follows:

Agenda dan Keputusan RUPS RKAP tanggal 31 Januari 2024 Agenda and Resolutions of the RKAP GMS on January 31, 2024		Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up
Agenda Pertama Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024.	First Agenda Item Approval and Ratification of the 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP)	RKAP Tahun 2024 telah disahkan pada saat RUPS berlangsung The 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) was ratified during the GMS
Keputusan RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024	Resolution The GMS resolution approved and ratified the 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP)	
Agenda Kedua Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator Tahun 2024	Second Agenda Item Approval and Ratification of the 2024 Management Contract/Key Performance Indicators (KPI)	Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator Tahun 2024 telah disahkan pada saat RUPS berlangsung The 2024 Management Contract / Key Performance Indicators (KPI) was ratified during the GMS
Keputusan RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2024 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan	Resolution The GMS approved and ratified the 2024 Management Contract/Key Performance Indicators (KPI) between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Company's Shareholders	

RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023

GMS on Approval and Ratification of Annual Report 2023

Tanggal Undangan RUPS Date of GMS Notice	30 Mei 2024.	May 30, 2024.
Tanggal & Waktu RUPS Date & Time of the GMS	28 Juni 2024, Pukul 11.30 WIB.	June 28, 2024, at 11.30 AM.
Lokasi Location	Jakarta, Indonesia.	Jakarta, Indonesia.
Peserta RUPS GMS Participants	Perwakilan Pemegang Saham Mayoritas, Perwakilan Pemegang Saham Minoritas, Dewan Komisaris, Direksi PT PLN Indonesia Power.	Representative of the Majority Shareholders, Representative of Minor Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors of PT PLN Indonesia Power.
Pimpinan RUPS Chairperson of AGMS	Wiluyo KUSDWiharto selaku Komisaris Utama.	Wiluyo KUSDWiharto selaku Komisaris Utama.
Kuorum Meeting Quorum	Setuju 100% dengan dihadiri dan diwakili sebanyak 357.165.633.599 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan) lembar saham, yang merupakan seluruh saham dalam Perseroan dengan hak suara yang sah.	Approved 100% with a total of 357,165,633,599 (Three Hundred Fifty-Seven Billion One Hundred Sixty-Five Million Six Hundred Thirty-Three Thousand Five Hundred Ninety-Nine) shares present and represented, representing all shares in the Company with valid voting rights.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Attendance	Dapat dilihat pada bab Tata Kelola Perusahaan dan Sub Bab Dewan Komisaris serta Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini	This can be seen in the Corporate Governance chapter, the Board of Commissioners sub-chapter, and the Board of Directors sub-chapter in this Annual Report
Pihak Independen Independent Party	Shahreza Annaz, SH. M. KN. sebagai Notaris.	Shahreza Annaz, SH., M.Kn. served as the Notary.
Mekanisme Perhitungan Suara Voting Mechanism	Perhitungan suara dalam setiap mata acara rapat dilakukan oleh Notaris	Vote counting for each agenda item was conducted by the Notary.

Agenda, Keputusan dan Tindak Lanjut atau Realisasi Atas Pelaksanaan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2023

Agenda, Resolutions, and Follow up or Realization of the GMS on the 2023 Annual Report

Agenda dan Keputusan RUPS Laporan Tahunan tanggal 28 Juni 2024 Agenda and Resolutions of the GMS on Annual Report on June 28, 2024		Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up
Agenda Pertama Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 serta Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengelolaan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.	First Agenda Item Approval and Ratification of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2023, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for Fiscal Year 2023, as well as the Granting of Full Release and Discharge of Responsibility to the Board of Directors and Board of Commissioners for the Management and Supervision Conducted During Fiscal Year 2023.	Laporan Tahunan yang terdiri dari atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan selama tahun 2023 telah disahkan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung. The Annual Report, consisting of the Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report for the year 2023, was approved by the Shareholders during the GMS.
Keputusan 1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2023 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan 2. RUPS Menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023. 3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dalam laporannya. 4. RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan sesuai tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.	Resolutions 1. The GMS approved and accepted the Annual Report on the condition and operations of the Company during fiscal year 2023, consisting of the Financial Report, Performance Evaluation Report, and Compliance Report. 2. The GMS approved and accepted the Supervisory Report of the Board of Commissioners for fiscal year 2023. 3. The GMS ratified the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2023, which were audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners with an "Unqualified Opinion" as stated in their report. 4. The GMS granted full release and discharge of responsibility (acquitted et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision conducted during Fiscal Year 2023, insofar as such actions were not in conflict with prevailing laws and regulations and are reflected in the audited Financial Statements by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners.	

Agenda dan Keputusan RUPS Laporan Tahunan tanggal 28 Juni 2024 <i>Agenda and Resolutions of the GMS on Annual Report on June 28, 2024</i>		Realisasi/Tindak Lanjut <i>Realization/Follow-up</i>
Agenda Kedua Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023.	Second Agenda Item Determination of the Use of Net Profit for Fiscal Year 2023.	PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 melalui surat PLN No. No.54734/MNJ.01.01/F01000000/2024-SR tanggal 24 September 2024. PT PLN (Persero), as the Majority Shareholder, determined the appropriation of the 2023 net profit through PLN Letter No. 54734/MNJ.01.01/F01000000/2024-SR dated September 24, 2024
Keputusan RUPS memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023.	Resolution The GMS granted authority to the Majority Shareholder to determine the Use of Net Profit for Fiscal Year 2023.	
Agenda Ketiga Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Remunerasi Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus bagi Karyawan Tahun Buku 2023.	Third Agenda Item Approval of Bonus (Tantiem) for Fiscal Year 2023 and Remuneration for Fiscal Year 2024 for the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as Bonuses for Employees for Fiscal Year 2023.	PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan besaran tantiem tahun 2023 dan penghasilan 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan melalui Surat PLN No. 54734/MNJ.01.02/F01000000/2024-SR tanggal 24 September 2024. PT PLN (Persero), as the Majority Shareholder, determined the amount of 2023 bonus (tantiem) and 2024 remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company through PLN Letter No. 54734/MNJ.01.02/F01000000/2024-SR dated September 24, 2024-SR tanggal 24 September 2024.
Keputusan RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Remunerasi Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan Tahun Buku 2023.	Resolution The GMS granted authority to the Majority Shareholder to determine the Bonus (Tantiem) for Fiscal Year 2023 and Remuneration for Fiscal Year 2024 for the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as Bonuses for Employees for Fiscal Year 2023.	
Agenda Keempat Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Perseroan Tahun Buku 2024.	Fourth Agenda Item Appointment of the Public Accounting Firm for the Audit of the Company's Reports for Fiscal Year 2024.	PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT PLN(Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 melalui Surat PLN No. 56480/DAN.01.02/F01070400/2024 tanggal 01 Oktober 2024 PT PLN(Persero), as the Majority Shareholder, appointed the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners to audit the Financial Statements for Fiscal Year 2024 through PLN Letter No. 56480/DAN.01.02/F01070400/2024 dated October 1, 2024
Keputusan RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk tahun buku 2024.	Resolution The GMS granted authority to the Majority Shareholder to determine the appointment of a Public Accounting Firm as the Auditor to audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report for Fiscal Year 2024.	

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Implementation of the Extraordinary GMS 2024

Sepanjang tahun 2024, Pemegang Saham telah menerbitkan Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler sebanyak 15 (lima belas) Keputusan, meliputi:

Throughout 2024, Shareholders had adopted a total of 15 (fifteen) Shareholders' Circular Resolutions, which include:

Tanggal RUPS GMS Date	Perihal Subject	
30 Januari 2024 January 30, 2024	Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power tentang Persetujuan Pelaksanaan Addendum Keenam atas Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Oyong untuk PLTGU Grati antara Perseroan dengan Medco Energy Sampang Pty Ltd, Singapore Petroleum Sampang Ltd dan Cue Sampang Pty Ltd	Shareholders' Resolution outside the GMS (Circular) of PT PLN Indonesia Power regarding the Approval of the Sixth Addendum to the Gas Sales Purchase Agreement (PJBG) of Oyong for the PLTGU Grati between the Company and Medco Energy Sampang Pty Ltd, Singapore Petroleum Sampang Ltd, and Cue Sampang Pty Ltd
29 Februari 2024 February 29, 2024	Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power tentang Pengalihan Nomenklatur Anggota Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power	Shareholders' Resolution outside the GMS (Circular) of PT PLN Indonesia Power regarding the Adjustment of Nomenclature for Members of the Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power
1 Juli 2024 July 1, 2024	Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power tentang Pengalihan Nomenklatur Direksi Perseroan	Shareholders' Resolution outside the GMS (Circular) of PT PLN Indonesia Power regarding the Adjustment of Nomenclature of the Company's Board of Directors
10 Juli 2024 July 10, 2024	Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power tentang Perubahan Batasan Kewenangan Direksi PT PLN Indonesia Power	Shareholders' Resolution outside the GMS (Circular) of PT PLN Indonesia Power regarding the Amendment to the Authority Limits of the Board of Directors of PT PLN Indonesia Power
30 Juli 2024 July 30, 2024	Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Modal Disetor oleh PT PLN Indonesia Power kepada PT PLN Indonesia Power Renewables untuk Pengembangan PLTS Terapung Saguling 60 MW	Shareholders' Resolution outside the GMS (Circular) of PT PLN Indonesia Power regarding the Approval for Additional Paid-in Capital by PT PLN Indonesia Power to PT PLN Indonesia Power Renewables for the Development of the 60 MW Saguling Floating Solar Power Plant (PLTS).
31 Juli 2024 July 31, 2024	Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power tentang Persetujuan Penugasan kepada PT PLN Indonesia Power untuk pengembangan pembangkit listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Jatigede 100 MW, PLTS Terapung Kedungombo 100 MW, PLTS Terapung Gajah Mungkur 100 MW, PLTS Pasuruan 100 MW, dan PLTS Banyuwangi 100 MW, serta Persetujuan Anggaran Investasi Murni kepada PT PLN Indonesia Power untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya PLTS Terapung Jatigede 100 MW, PLTS Terapung Kedungombo 100 MW, PLTS Pasuruan 100 MW dan PLTS Banyuwangi 100 MW	Shareholders' Resolution outside the GMS (Circular) of PT PLN Indonesia Power regarding the Approval of the Assignment to PT PLN Indonesia Power for the Development of Floating Solar Power Plants: Jatigede 100 MW, Kedungombo 100 MW, Gajah Mungkur 100 MW, Pasuruan 100 MW, and Banyuwangi 100 MW, as well as the Approval of Capital Expenditure Budget for the Development of Floating Solar Power Plants: Jatigede 100 MW, Kedungombo 100 MW, Pasuruan 100 MW, and Banyuwangi 100 MW.
1 Agustus 2024 August 1, 2024	Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power tentang Persetujuan Pengembangan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Skema <i>Independent Power Producer</i> (IPP) dan Pengembangan Pembangkit Listrik Non PLTM Skema IPP oleh Subholding Genco	Shareholders' Resolution outside the GMS (Circular) of PT PLN Indonesia Power regarding the Approval of Mini Hydro Power Plant (PLTM) Development Projects under the Independent Power Producer (IPP) Scheme and the Development of Non-PLTM Power Plants under the IPP Scheme by the Genco Subholding
10 September 2024 September 10, 2024	Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power tentang Tambahan Modal Disetor Proyek PLTS Terapung Singkarak 50 MW	Shareholders' Resolution outside the GMS (Circular) of PT PLN Indonesia Power regarding Additional Paid-in Capital for the 50 MW Singkarak Floating Solar Power Plant Project
17 September 2024 September 17, 2024	Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power tentang Penambahan Modal Disetor oleh PT PLN Indonesia Power kepada PT PLN Indonesia Power Renewables untuk Pengembangan Manufaktur Sel dan Modul Solar PV melalui penyertaan modal kedalam perusahaan manufaktur Solar PV	Shareholders' Resolution outside the GMS (Circular) of PT PLN Indonesia Power regarding Additional Paid-in Capital by PT PLN Indonesia Power to PT PLN Indonesia Power Renewables for the Development of Solar PV Cell and Module Manufacturing through equity participation in a Solar PV manufacturing company
30 September 2024 September 30, 2024	Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Modal Disetor oleh PT PLN Indonesia Power kepada PT PLN Indonesia Power Renewables untuk Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poigar-2 (2x15 MW)	Shareholders' Resolution outside the GMS (Circular) of PT PLN Indonesia Power regarding the Approval for Additional Paid-in Capital by PT PLN Indonesia Power to PT PLN Indonesia Power Renewables for the Development of the Poigar-2 Hydropower Plant (PLTA) (2x15 MW)

Tanggal RUPS GMS Date	Perihal Subject	
15 Oktober 2024 October 15, 2024	Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power tentang Persetujuan Pelepasan Saham PT PLN Indonesia Power pada PT Perta Daya Gas	Shareholders' Resolution outside the GMS (Circular) of PT PLN Indonesia Power regarding the Approval of Share Divestment in PT Perta Daya Gas
19 November 2024 November 19, 2024	Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power tentang Penyesuaian Batasan Kewenangan Direksi <i>Subholding</i> /Anak Perusahaan ("SH/AP") dalam melakukan transaksi energi primer antar SH/AP PT PLN (Persero)	Shareholders' Resolution outside the GMS (Circular) of PT PLN Indonesia Power regarding the Adjustment of Authority Limits for Subholdings/Subsidiaries ("SH/AP") in conducting primary energy transactions among PT PLN (Persero) SH/APs
28 November 2024 November 28, 2024	Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Jangka Panjang (RJP) PT PLN Indonesia Power Tahun 2024-2028	Shareholders' Resolution outside the GMS (Circular) of PT PLN Indonesia Power regarding the Approval and Ratification of the 2024-2028 Long-Term Plan (RJP) of PT PLN Indonesia Power
23 Desember 2024 December 23, 2024	Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power tentang Persetujuan Penghapusbukuan Aset Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) PT PLN Indonesia Power	Shareholders' Resolution outside the GMS (Circular) of PT PLN Indonesia Power regarding the Approval of Write-Off of Non-Operating Fixed Assets (ATTB) at the Generation Business Units (UBP) of PT PLN Indonesia Power
24 Desember 2024 December 24, 2024	Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power tentang Persetujuan Penugasan Perseroan untuk Pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi atas WKP Penugasan kepada PT PLN (Persero)	Shareholders' Resolution outside the GMS (Circular) of PT PLN Indonesia Power regarding the Approval for the Assignment of the Company for the Development of Geothermal Working Areas (WKP) Assigned to PT PLN (Persero)

Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham RUPS Tahun 2023

Follow up on the Shareholders' Directives during the 2023 GMS

Pelaksanaan RUPS tahun 2024 menghasilkan beberapa arahan dari Pemegang Saham dan telah direalisasikan oleh Perusahaan, sebagaimana tabel berikut:

The implementation of the 2024 GMS resulted in several directives from Shareholders and had been realized by the Company, as shown in the following table:

Arahan RUPS 2024 dan Tindak Lanjutnya

2024 GMS Directives and the Follow Up

RUPS GMS	Jumlah Arahan Pemegang Saham Number of Shareholders' Directives	Status Tindak Lanjut Follow Up Status		
		Realisasi Hasil RUPS Realization of the GMS Results	Persentase Progress Percentage	Alasan Keputusan RUPS yang Belum Direalisasikan Reason for Unrealized GMS Resolution
RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 The GMS for Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the 2023 Fiscal Year	47	47	100%	-
RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 The GMS for Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2024	54	54	100%	-

Keputusan RUPS Sebelumnya dan Tindak Lanjutnya

Previous GMS Resolutions and the Follow Up

Indonesia Power terus memantau tindak lanjut dan status realisasi dari keputusan serta arahan RUPS secara berkelanjutan dan melaporkan progres tindak lanjutnya kepada Pemegang Saham dalam bentuk penyajian Laporan Manajemen setiap triwulan.

Indonesia Power continuously monitors the follow-up actions and realization status of the resolutions and directives from the GMS and reports the progress of these follow-ups to the Shareholders in the form of Management Reports every quarter.

Seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS tahun buku 2022 yang diselenggarakan tahun 2023 telah dilaksanakan. Berikut Keputusan RUPS tahun Tahun 2023 dan tindak lanjutnya:

All recommendations from the 2022 fiscal year GMS Resolutions held in 2023 had been implemented. Below are the 2023 GMS resolutions and their follow-ups:

Keputusan RUPS Tahun 2023 GMS Resolutions 2023	Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow Up
RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama tahun buku 2022 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan serta menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 The General Meeting of Shareholders (GMS) approved and accepted the Annual Report on the condition and operations of the Company during the 2022 fiscal year, consisting of the Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report, as well as approving and accepting the Supervisory Duties Implementation Report of the Board of Commissioners for the 2022 fiscal year.	Laporan Tahunan yang terdiri dari atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan selama tahun 2022 telah disahkan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung yaitu pada tanggal 28 Juni 2023 The Shareholder ratified the Annual Report, which consisted of the Financial Report, Performance Evaluation Report, and Compliance Report for the year 2022, during the GMS held on June 28, 2023.
RUPS memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022. The GMS authorized the Majority Shareholder to determine the use of the Net Profit for the 2022 fiscal year.	PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2022 melalui surat PLN No. 42946/MNJ.01.02/F01000000/2023-R tanggal 2 Agustus 2023. PT PLN (Persero), as the Majority Shareholder, determined the use of the net profit for the 2022 fiscal year through PLN Letter No. 42946/MNJ.01.02/F01000000/2023-R dated August 2, 2023.
RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan Tahun Buku 2022. The GMS authorized the Majority Shareholder to determine the bonuses (Tantiem) for the 2022 fiscal year and the remuneration for the 2022 fiscal year for the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as bonuses for employees for the 2022 fiscal year.	PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan besaran tantiem tahun 2022 dan penghasilan 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan melalui Surat PLN No. 42946/MNJ.01.02/F01000000/2023-R tanggal 2 Agustus 2023 dan menetapkan besaran bonus pegawai tahun 2022 melalui Surat PLN No. 34147/SDM.06.01/F01080000/2023-R tanggal 21 Juni 2023. PT PLN (Persero), as the Majority Shareholder, had set the amount of the 2022 bonuses (tantiem) and 2023 remuneration for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners through PLN Letter No. 42946/MNJ.01.02/F01000000/2023-R dated August 2, 2023, and had determined the amount of the 2022 employee bonuses through PLN Letter No. 34147/SDM.06.01/F01080000/2023-R dated June 21, 2023.
RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk tahun buku 2023. The GMS authorized the Majority Shareholder to appoint a Public Accounting Firm as the Auditor to audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report for the 2023 fiscal year.	PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 melalui Surat PLN No. 39023/KEU.02.04/F01070400/2023 tanggal 13 Juli 2023 PT PLN (Persero), as the Majority Shareholder, had appointed the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners to audit the Financial Statements for the 2023 fiscal year through PLN Letter No. 39023/KEU.02.04/F01070400/2023 dated July 13, 2023.

Direksi Board of Directors

Direksi merupakan organ pengelola Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggungjawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan prinsip-prinsip GCG.

The Board of Directors is the Company's organ responsible for managing the Company and holds the authority and accountability for the Company's operations. In carrying out its duties, the Board of Directors is accountable to the GMS. This accountability to the GMS reflects the Board's responsibility for managing the Company in accordance with the provisions of the Articles of Association and the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Appointment and Dismissal of the Board of Directors

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan melalui RUPS dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, serta Salinan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN tanggal 20 Maret 2023 dan Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi yang ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS. Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, diantaranya mengatur mengenai: (a) penjurangan atau nominasi calon Anggota Direksi; (b) penilaian bagi calon Anggota Direksi.

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed through the GMS in accordance with the Company's Articles of Association and the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning SOE Organs and Human Resources dated March 20, 2023 and the guidelines for the appointment and dismissal of the Board of Directors are determined by the Shareholders/GMS. The guidelines for appointment and dismissal cover, among others: (a) the selection or nomination process of candidates for the Board of Directors; and (b) the assessment of candidates for the Board of Directors.

Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap calon Direksi dengan mencakup semua kriteria penilaian Direksi yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Perusahaan (penilaian terhadap persyaratan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan). Proses penilaian calon Direksi didukung dengan Berita Acara Penilaian.

The Shareholders/GMS conduct an assessment of candidates for the Board of Directors based on all criteria established under the laws and regulations in the corporate sector, including assessment of integrity, dedication, understanding of management issues, and sufficient knowledge of the Company's business. The assessment process for the Board of Directors candidates is documented in an Assessment Minutes.

Pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

1. meninggal dunia,
2. masa jabatannya berakhir,
3. diberhentikan berdasarkan RUPS, dan/atau
4. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

The dismissal of the Board of Directors is carried out by the GMS. The term of office of members of the Board of Director ends if:

1. They pass away,
2. Their term of office expires,
3. They are dismissed by resolution of the GMS, and/or
4. They no longer meet the requirements to serve as a member of the Board of Directors as stipulated in the Articles of Association and other prevailing laws and regulations.

Rencana pemberhentian Anggota Direksi diberitahukan kepada Anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan dan tertulis oleh Pemegang Saham.

Any plan to dismiss a member of the Board of Directors is communicated to the concerned member of the Board of Directors both verbally and in writing by the Shareholders.

Komposisi Direksi

Board of Directors' Composition

Selama tahun 2024, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi, namun pada tahun 2024 terdapat perubahan nomenklatur Direksi Keuangan menjadi Direksi Keuangan dan Manajemen Risiko yang dijabat oleh Sdri. Endang Astharanti. Informasi terkait perubahan nomenklatur telah disajikan pada bab Profil Perusahaan sub bab Informasi Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2024 dan Setelah Tahun Buku 2024.

Komposisi Direksi PT PLN Indonesia Power per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Throughout 2024, there was no change in the Board of Directors' composition, but there was a change in the nomenclature of Finance Director to Finance and Risk Management Director, which was held by Ms. Endang Astharanti. Information related to changes in nomenclature has been presented in Information on Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2024 Fiscal Year and After the 2024 Fiscal Year.

The Board of Directors' composition of PT PLN Indonesia Power as of December 31, 2024 is as follows:

Komposisi Anggota Direksi per 31 Desember 2024

Composition of Members of the Board of Directors as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Edwin Nugraha Putra	Direktur Utama President Director	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022 Shareholders' Circular GMS dated September 21, 2022	2022-2026
M. Hanafi Nur Rifai	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 19 September 2023 Shareholders' Circular GMS dated September 19, 2023	2023-2027
Djoko Mulyono	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022 Shareholders' Circular GMS dated September 21, 2022	2022-2026
Bernadus Sudarmanta	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022 Shareholders' Circular GMS dated September 21, 2022	2022-2026
Endang Astharanti	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 25 November 2021 Shareholders' Circular GMS dated November 25, 2021	2021-2025
Wisnoe Satrijono	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 September 2022 Shareholders' Circular GMS dated September 21, 2022	2022-2026

Penetapan komposisi dan jumlah anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi serta rencana strategis Perusahaan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta menjunjung tinggi independensi dan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.

The composition and number of members of the Board of Directors is determined by considering the Company's vision, mission, and strategic plans, to ensure that decision-making can be conducted effectively, accurately, and promptly, while upholding independence and serving solely in the best interest of the Company.

Masa Jabatan Direksi

Term of Office of the Board of Directors

Sejalan dengan *Board Manual* Perusahaan, masa jabatan Anggota Direksi ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

In line with the Company's Board Manual, the term of office for members of the Board of Directors is set at 4 (four) years and may be reappointed for 1 (one) additional term.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Guidelines of the Work, Duties, and Responsibilities of the Board of Directors

Pedoman Kerja Direksi PLN Indonesia Power mengacu pada *Board Manual* yang disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 20 Maret 2020. Dalam *Board Manual* tersebut, menjelaskan secara terperinci aspek-aspek pedoman kerja Direksi, antara lain terkait:

The Working Guidelines for the Board of Directors of PLN Indonesia Power refer to the Board Manual, which was ratified through a Joint Decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners on March 20, 2020. The Board Manual provides a detailed explanation of various aspects of the Board of Directors' working guidelines, including:

1. Pengertian dan Persyaratan Direksi;	1. Definition and Requirements of the Board of Directors;
2. Komposisi Direksi;	2. Composition of the Board of Directors;
3. Pengaturan Rangkap Jabatan;	3. Regulation on Concurrent Positions;
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi;	4. Appointment and Dismissal of the Board of Directors;
5. Masa Jabatan Direksi ;	5. Term of Office of the Board of Directors;
6. Program Pengenalan dan Pelatihan;	6. Orientation and Training Programs;
7. Rencana Kerja dan Anggaran Direksi;	7. Work Plan and Budget of the Board of Directors;
8. Tugas Direksi;	8. Duties of the Board of Directors;
9. Wewenang Direksi;	9. Authority of the Board of Directors;
10. Kewajiban Direksi;	10. Obligations of the Board of Directors;
11. Tanggung Jawab Direksi;	11. Responsibilities of the Board of Directors;
12. Rapat Direksi;	12. Board of Directors Meetings;
13. Pelaporan Pertanggungjawaban Direksi;	13. Accountability Reporting by the Board of Directors;
14. Remunerasi Direksi;	14. Remuneration of the Board of Directors;
15. Organ Pendukung Direksi.	15. Supporting Organs of the Board of Directors.

Tugas dan tanggung Jawab Direksi

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Sejalan dengan *Board Manual*, Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi meliputi:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan. Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap Anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

In line with the Board Manual, the duties and responsibilities of members of the Board of Directors include:

1. In carrying out their duties, the Board of Directors is fully responsible for managing the Company in the interest and for the purpose of the Company, and for representing the Company, both in and out of court. Such management must be carried out by each member of the Board of Directors in good faith and with full responsibility;

2. Menyusun RKAP dan RJPP.
3. Memberikan arahan terkait kebijakan operasional dan Standar Operasional baku (SOP), manajemen risiko, sistem pengendalian intern, informasi perseroan kepada stakeholders, pemenuhan target kinerja, teknologi informasi, mutu produk dan pelayanan, tanggung jawab sosial perusahaan, sumber daya manusia, anak perusahaan (*subsidiary governance*) dan/atau perusahaan patungan, pengendalian operasional dan keuangan, pengurusan perseroan, hubungan dengan *stakeholder*, potensi benturan kepentingan, keterbukaan informasi dan Komunikasi, pengadaan barang dan jasa.
4. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Direksi terdiri atas dua anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 4 tidak mengurangi hak Anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perusahaan;
7. Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hukum pidana;
8. Dalam hal kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan dalam kepailitan tersebut, setiap Anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi Anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai Anggota Direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit;
9. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perusahaan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
2. Preparing the RKAP and RJPP;
3. Providing direction related to operational policies and Standard Operating Procedures (SOP), risk management, internal control systems, corporate information disclosure to stakeholders, performance target achievement, information technology, product and service quality, corporate social responsibility, human resources, subsidiaries (*subsidiary governance*) and/or joint ventures, operational and financial control, corporate management, stakeholder relations, potential conflicts of interest, information disclosure and communication, procurement of goods and services;
4. Each member of the Board of Directors is personally and fully responsible for losses incurred by the Company if the person is at fault or negligent in performing their duties. In the case of the Board of Directors comprising two or more members, such responsibility shall be borne jointly and severally by each member of the Board of Directors;
5. A member of the Board of Directors shall not be held liable for Company losses if they can prove:
 - a. The loss is not caused by their fault or negligence
 - b. Having managed the Company in good faith and with prudence in the interest and in accordance with the purpose and objectives of the Company
 - c. Having no direct or indirect conflict of interest in the management actions that resulted in the loss;
 - d. Having taken action to prevent the loss or its continuation
6. The provision in point 4 does not diminish the right of other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to file a lawsuit on behalf of the Company;
7. The provision on the responsibilities of the Board of Directors for fault and negligence as regulated in this law does not reduce the provisions regulated under criminal law;
8. In the event of bankruptcy caused by fault or negligence of the Board of Directors and the bankruptcy estate is insufficient to cover the Company's liabilities in such bankruptcy, each member of the Board of Directors shall be jointly and severally liable for all remaining obligations not settled from the bankruptcy estate. This liability also applies to members of the Board of Directors at fault or negligent who served within five years before the declaration of bankruptcy;
9. A member of the Board of Directors shall not be held liable for the Company's bankruptcy if they can prove:
 - a. The bankruptcy was not caused by their fault or negligence

- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan
10. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi Direksi dari Perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Sedangkan wewenang yang dimiliki Direksi, meliputi:

1. Menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditujukan untuk itu;
3. Mengatur kebijakan kepegawaian termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan;
6. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;
7. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan, atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan. Adapun yang berhak mewakili Perusahaan adalah Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan, Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan, Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
8. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perusahaan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;

- b. Having managed the Company in good faith, prudently, and responsibly in the interest of the Company and in line with its purposes and objectives;
 - c. Having no direct or indirect conflict of interest in the management actions taken;
 - d. Having taken actions to prevent the bankruptcy
10. These provisions also apply to the Board of Directors of a Company that is declared bankrupt based on a third-party lawsuit.

The authorities held by the Board of Directors include:

1. Establishing policies for the management of the Company;
2. Regulating the delegation of the Board of Directors' authority to represent the Company in and out of court to one or more members of the Board specifically appointed for this purpose;
3. Regulating personnel policies including the determination of salaries, pensions or old-age benefits, and other income for employees based on applicable laws and regulations;
4. Appointing and dismissing Company employees in accordance with employment regulations and applicable laws;
5. Appointing a Corporate Secretary;
6. Carrying out all other actions related to Company management, binding the Company with other parties and/or binding other parties with the Company, and representing the Company in and out of court regarding all matters and events as regulated in laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the GMS;
7. A member of the Board of Directors is not authorized to represent the Company if there is a court case between the Company and that member, or if that member has a conflict of interest with the Company. The parties authorized to represent the Company in such cases are other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company, the Board of Commissioners if all members of the Board of Directors have conflicts of interest, or other parties appointed by the GMS if all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have conflicts of interest with the Company;
8. The Board of Directors is not authorized to file for the Company's own bankruptcy at the Commercial Court without obtaining approval from the GMS, without prejudice to the provisions regulated in laws on bankruptcy and suspension of debt payment obligations;

9. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan dalam kepailitan tersebut, setiap Anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

9. In the event that bankruptcy occurs due to the fault or negligence of the Board of Directors and the bankruptcy estate is insufficient to pay all the Company's liabilities in that bankruptcy, each member of the Board of Directors shall be jointly and severally liable for all obligations unpaid from the bankruptcy estate.

Ruang Lingkup Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Scope of Duties and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

Pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan jabatan masing-masing anggota Direksi sebagaimana ditetapkan dalam pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS. Selanjutnya Direksi menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi melalui Peraturan Direksi No. 0008.P/DIR/2025 tentang Organisasi PT PLN Indonesia Power tanggal 10 Februari 2024 sebagai pembaharuan dari Perubahan Ketiga atas Keputusan Direksi No.0001.P/DIR/2024 tentang Organisasi PT PLN Indonesia Power.

The division of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is determined based on the position of each member of the Board of Directors as outlined in the appointment of members of the Board of Directors by the GMS. Furthermore, the Board of Directors determines the division of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors under the Board of Directors' Regulation No. 0008.P/DIR/2025 on the Organization of PT PLN Indonesia Power dated February 10, 2024 as an update of the Third Amendment to Board of Directors' Decision No. 0001.P/DIR/2024 on the Organization of PT PLN Indonesia Power.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Segregation of Duties and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Pembagian Tugas Segregation of Duties
Edwin Nugraha Putra	Direktur Utama President Director	Bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola Perusahaan, serta mengendalikan semua aspek strategi, operasional dan bisnis Perusahaan untuk memastikan pencapaian visi, misi dan tujuan Perusahaan sesuai dengan prinsip GCG, kepatuhan pada SMAP dan SMK. Responsible for leading, developing, and managing the Company, as well as controlling all aspects of the Company's strategy, operations, and business to ensure the achievement of the Company's vision, mission, and objectives in line with GCG principles, compliance with SMAP and SMK.
M. Hanafi Nur Rifai	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	Memastikan pengelolaan pembangkit yang meliputi perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan pada seluruh Unit Pembangkit di bawah kewenangan Direktorat Operasi Pembangkit Batu Bara yang menjadi kewenangannya, termasuk di dalamnya perencanaan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan keandalan pembangkit, perencanaan dan pengendalian energi primer, serta operasi sistem dan pengendalian kontrak jasa O&M yang dapat menunjang kinerja operasional Perusahaan yang sesuai dengan strategi Perusahaan yang sesuai dengan prinsip GCG dan kepatuhan pada SMAP serta melakukan koordinasi sesuai dengan fungsi utama dengan pihak internal dan eksternal. Ensuring the management of power plants which covers planning and controlling operations and maintenance of all Power Units under the authority of the Directorate of Coal Power Plant Operations, including planning and evaluating operation and maintenance of plant reliability, planning and controlling primary energy, system operations, and managing O&M contract services that support the Company's operational performance in accordance with the Company's strategy, GCG principles, and compliance with ABMS, as well as coordinating according to the main functions with internal and external parties.

Nama Name	Jabatan Position	Pembagian Tugas Segregation of Duties	
Djoko Mulyono	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	Memastikan pengelolaan pembangkit termasuk pembangkit energi baru terbarukan yang meliputi perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan pada seluruh Unit Pembangkit dan <i>Maintenance Services Unit</i> di bawah kewenangan Direktorat Operasi Pembangkit Gas yang menjadi kewenangannya, termasuk di dalamnya perencanaan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan keandalan pembangkit, perencanaan dan pengendalian energi primer, serta operasi sistem dan pengendalian kontrak jasa O&M dan Jasa Pemeliharaan yang dapat menunjang kinerja operasional Perusahaan yang sesuai dengan strategi Perusahaan yang sesuai dengan prinsip GCG dan kepatuhan pada SMAP serta melakukan koordinasi sesuai dengan fungsi utama dengan pihak internal dan eksternal.	Ensuring the management of power plants, including new and renewable energy power plants, involving planning and controlling operations and maintenance of all Power Units and Maintenance Services Units under the authority of the Directorate of Gas Power Plant Operations, including planning and evaluating operation and maintenance of plant reliability, planning and controlling primary energy, system operations, and managing O&M and Maintenance Service contracts that support the Company's operational performance in accordance with the Company's strategy, GCG principles, and compliance with ABMS, as well as coordinating according to the main functions with internal and external parties.
Bernadus Sudarmanta	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	Memastikan berjalannya penetapan strategi korporat serta keberlanjutannya, pelaksanaan manajemen kinerja perusahaan, anak perusahaan, perusahaan afiliasi dan asosiasi, serta pengembangan bisnis baik bisnis ketenagalistrikan termasuk energi baru terbarukan maupun turunannya yang sesuai dengan prinsip GCG dan kepatuhan pada SMAP.	Ensuring the implementation and continuity of corporate strategy determination, managing the performance of the Company, subsidiaries, affiliated companies, and associations, as well as developing business, both in the electricity sector including new and renewable energy and its derivatives, in accordance with GCG principles and compliance with ABMS.
Endang Astharanti	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Bertanggung jawab, memimpin dan membina fungsi anggaran, pendanaan, perbendaharaan, akuntansi, teknologi informasi, manajemen risiko, dan kepatuhan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Perusahaan sesuai dengan prinsip GCG kepatuhan pada SMAP dan SMK.	Responsible for Leading and developing budget, funding, treasury, accounting, information technology, risk management, and compliance functions to support the achievement of the Company's vision, mission, and objectives in line with the principles of GCG compliance with SMAP and SMK.
Wisnoe Satrijono	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	Memastikan kegiatan pengembangan human capital secara kapasitas dan kapabilitas, yang meliputi sistem SDM dan organisasi, pengembangan talenta, budaya perusahaan, remunerasi, hubungan industrial, performance management, tenaga alih daya non core, sistem informasi SDM, manajemen pembelajaran, K3 dan Lingkungan serta memastikan kegiatan pengelolaan pelayanan umum (General Affairs) yang sesuai dengan prinsip GCG dan kepatuhan pada SMAP.	Ensuring the development of human capital capacity and capability, including HR and organizational systems, talent development, corporate culture, remuneration, industrial relations, performance management, non-core outsourced labor, HR information systems, learning management, occupational health and safety and environment (OHSE), and ensuring the management of general affairs services in compliance with GCG principles and ABMS.

Independensi Direksi

Independence of the Board of Directors

Perusahaan menilai faktor independensi Direksi merupakan salah satu hal penting yang harus dijaga agar seluruh anggota Direksi senantiasa bertindak maksimal demi kepentingan Perusahaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perusahaan telah menetapkan ketentuan bahwa selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan intervensi atau campur tangan dalam pengurusan

The Company considers the independence of the Board of Directors as a crucial factor that must be maintained so that all members of the Board of Directors consistently act optimally for the benefit of the Company. To realize this, the Company has established provisions stating that, aside from the Board of Directors, no other parties are allowed to intervene or interfere in the management of the Company.

Perusahaan. Setiap anggota Direksi harus dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Selain itu, setiap anggota Direksi juga dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.

Each member of the Board of Directors must be able to make decisions objectively, without conflicts of interest, and free from any pressure from any party. Additionally, each member of the Board of Director is prohibited from engaging in activities that may compromise the independence in managing the Company.

Seluruh anggota Direksi yang menjabat di tahun 2024 telah menyatakan independensinya dalam surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan yang ditandatangani pada awal pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun.

All members of the Board of Directors serving in 2024 had declared their independence in a statement letter confirming no conflicts of interest, signed at the beginning of their appointment and renewed at the start of each year.



Direktur Utama
President Director



Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara
Director of Coal Power Plant Operations



Direktur Operasi Pembangkit Gas
Director of Gas Power Plant Operations



**Direktur Pengembangan
Bisnis dan Niaga**
Director of Business Development and
Commerce



**Direktur Keuangan
dan Manajemen Risiko**
Director of Finance
and Risk Management



**Direktur Manajemen
Human Capital dan Administrasi**
Director of Human Capital Management
and Administration

Benturan Kepentingan Direksi Board of Directors' Conflict of Interest

Selama tahun 2024, seluruh anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Perusahaan. Direksi memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun.

Kebijakan benturan kepentingan Direksi PLN Indonesia Power diatur dalam *Board Manual*. Mekanisme pengawasan atas penerapan kebijakan benturan kepentingan oleh Direksi dilakukan dengan:

1. Menyusun surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.
2. Membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.
3. Melaporkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan Perusahaan lain dalam Daftar Khusus kepada Sekretaris Perusahaan.

During 2024, all members of the Board of Directors had no conflicts of interest or potential conflicts of interest with the Company. The Directors are committed to avoiding any potential conflicts of interest or always positioning themselves to avoid situations that may lead to potential conflicts of interest under any circumstances.

The conflict-of-interest policy for the Board of Directors of PLN Indonesia Power is regulated in the Board Manual. The oversight mechanism for the implementation of the conflict-of-interest policy by the Board of Directors is carried out by:

1. Preparing a statement letter declaring no conflict of interest at the beginning of the appointment, which is renewed at the start of each year.
2. Creating an Integrity Pact attached to the Board of Directors' proposed actions that must receive recommendations from the Board of Commissioners and approval from the GMS.
3. Reporting their own and/or their family's share ownership in the Company and other companies in a Special Register to the Corporate Secretary.

Rangkap Jabatan Direksi Concurrent Positions by the Board of Directors

Rangkap jabatan Direksi PLN Indonesia mengacu pada *Board Manual* Perusahaan. Sejalan dengan pedoman tersebut, Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Perseroan
2. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan/atau Daerah
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pada tahun 2024, seluruh anggota Direksi yang menjabat tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain. Informasi lebih lanjut terkait rangkap Jabatan Direksi telah diuraikan Pada Bab Profil Perusahaan di bagian sub bab Profil Direksi dalam Laporan tahunan ini.

The concurrent positions by the Board of Directors of PLN Indonesia refers to the Company's Board Manual. In accordance with this guideline, members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as:

1. Members of the Board of Commissioners and/or Supervisory Board in the Company
2. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions
3. Other positions as stipulated in the laws and regulations, political party administrators and/or members of political parties and/or legislative candidates/members and/or regional head/deputy regional head candidates and/or regional heads/deputy regional heads; and/or
4. Other positions that may cause conflicts of interest.

In 2024, all serving members of the Board of Directors did not hold concurrent positions in other companies. Further information regarding the concurrent positions of the Board of Directors is detailed in the Company Profile chapter under the sub-chapter on the Board of Directors' Profile in this Annual Report.

Kepemilikan Saham Direksi

Shareholding by the Board of Directors

Kepemilikan saham anggota Direksi senantiasa diungkapkan secara berkala melalui Daftar Khusus yang diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Daftar Khusus tersebut berisi informasi kepemilikan saham anggota Direksi beserta keluarganya. Pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) orang Anggota Direksi yang tercatat memiliki saham di perusahaan lain. Rincian Kepemilikan Saham masing-masing anggota Direksi disajikan dalam tabel berikut:

Share ownership of the members of the Board of Directors is regularly disclosed through a Special Register administered by the Corporate Secretary. This Special Register contains information on the share ownership of the members of the Board of Directors and their families. In 2024, there were 2 (two) members of the Board of Directors recorded as owning shares in other companies. Details of the share ownership of each Board member are presented in the following table:

Nama Name	Kepemilikan Saham Shareholding							
	Pribadi Pada Perusahaan Personal in the Company		Keluarga pada Perusahaan Family in the Company		Pribadi Pada Perusahaan Lain Personal in the Company		Keluarga pada Perusahaan Lain Family in the Company	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Edwin Nugraha Putra	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A
M. Hanafi Nur Rifai	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A
Djoko Mulyono	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A
Bernadus Sudarmanta	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A
Endang Astharanti	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	242.400 lembar saham 242,400 shares	287.400 lembar saham 287,400 shares	Nihil N/A	Nihil N/A
Wisnoe Satrijono	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A

Pelaksanaan Tugas Direksi

Implementation of the Board of Directors' Duties

Rapat Direksi

Board of Directors' Meeting

Rapat Direksi adalah rapat yang dilaksanakan oleh Direksi yang berkenaan dengan tugas dan fungsinya. Kebijakan rapat Direksi mengacu pada *Board Manual* Perusahaan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:

- Dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi
- Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris

Board of Directors Meeting refers to a meeting held by the Board of Directors concerning their duties and functions. The policy regarding the Board of Directors meetings refers to the Company's Board Manual and Articles of Association. The Board of Directors meeting may be convened at any time if:

- Deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;
- Based on a written request from one or more members of the Board of Commissioners;

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

c. Based on a written request from one or more shareholders who collectively represent 1/10 (one-tenth) or more of the total shares with voting rights.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

The Board of Directors meeting is valid and authorized to make binding decisions if attended by more than half of the total members of the Board of Directors or their lawful representatives, in accordance with the provisions. If the number of votes in favor and against is equal, the decision shall follow the opinion of the chairperson of the meeting, while still considering the provisions regarding accountability. In the case where there are more than two alternatives proposed and no single alternative receives more than half of the total votes cast, a re-vote shall be conducted between the two proposals that received the highest number of votes.

Kebijakan frekuensi rapat Direksi telah diatur dalam *Board Manual*, yaitu rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris. Rapat gabungan diselenggarakan jika dipandang perlu oleh salah satu organ dan bila dianggap perlu. Frekuensi rapat selain diatur dalam *Board Manual*, diatur juga dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Direksi. Berikut rencana frekuensi rapat Direksi yang dimuat dalam RKAT Direksi tahun 2024:

The frequency policy for Board of Directors meetings is regulated in the Board Manual, which states that meetings must be held regularly, at least once every month. In such meetings, the Board of Directors may invite the Board of Commissioners. Joint meetings shall be held when deemed necessary by either organ. In addition to being regulated in the Board Manual, the frequency of meetings is also outlined in the Board of Directors' Annual Work and Budget Plan (RKAT). The following is the planned frequency of Board of Directors meetings as outlined in the 2024 RKAT:

Rapat Internal Direksi Board of Directors' Internal Meeting	Rapat Gabungan Direksi Board of Directors Joint Meetings	Rapat dengan Pemegang Saham Meetings with the Shareholders
12	12	2

Pelaksanaan Frekuensi Rapat Direksi Tahun 2024

Frequency of the Board of Directors' Meeting in 2024

Selama tahun 2024, Direksi telah melakukan rapat sebanyak 26 kali rapat, yang terdiri dari rapat internal Direksi sebanyak 14 kali rapat dan rapat gabungan sebanyak 12 kali rapat dengan tingkat kehadiran Direksi sebagai berikut:

Throughout 2024, the Board of Directors held a total of 26 meetings, consisting of 14 internal Board of Directors meetings and 12 joint meetings, with the attendance rate of the Board of Directors as follows:

Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal dan Rapat Gabungan Direksi Tahun 2024

Board of Directors' Attendance in Internal Meetings and Joint Meetings in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal Direksi Board of Directors Attendance in Internal Meetings			Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan (Direksi dan Dewan Komisaris) Board of Directors Attendance in Joint Meetings (Board of Directors and Board of Commissioners)		
		Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Attendees	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Attendees	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency
Edwin Nugraha Putra	Direktur Utama President Director	14	14	100%	12	9	75%
M. Hanafi Nur Rifai	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	14	13	93%	12	12	100%
Djoko Mulyono	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	14	14	100%	12	10	92%
Bernadus Sudarmanta	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	14	14	100%	12	10	83%
Endang Astharanti	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	14	14	100%	12	12	100%
Wisnoe Satrijono	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	14	14	100%	12	10	83%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Direksi Average Attendance of the Board of Directors				99%	89%		

Kehadiran Anggota Direksi dalam RUPS Tahunan

Board of Directors Members' Attendance in Annual GMS

Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan tahun 2024. Berikut tingkat kehadiran Direksi dalam RUPS Tahunan selama tahun 2024:

The Board of Directors' accountability for the execution of their duties and responsibilities was presented to the shareholders through the 2024 Annual GMS. The following is the attendance rate of the Board of Directors during the AGMS in 2024:

No	Tanggal Date	Agenda	Realisasi Realization					
			Edwin Nugraha Putra	M. Hanafi Nur Rifai	Djoko Mulyono	Bernadus Sudarmanta	Endang Astharanti	Wisnoe Satrijono
1	31 Januari 2024 January 31, 2024	RUPS Tahunan Rencana Kerja & Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2025 Annual GMS for the Company's 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP)	✓	✓	✓	✓	✓	✗ Ibadah Haji Hajj Pilgrimage
2	28 Juni 2024 June 28, 2024	RUPS Tahunan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 Annual GMS for the Company's 2023 Fiscal Year Annual Report	✓	✓	✗ Ibadah Umroh Umroh Pilgrimage	✓	✓	✓

Keterangan: ✓: Hadir; ✗: Tidak hadir

Description: ✓ Present; ✗ Absent

Ketepatan Penyampaian Undangan Rapat Direksi

Timely Invitation Procedures of the Board of Directors Meeting

Penyampaian undangan rapat Direksi telah sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam *Board Manual* adalah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Selama tahun 2024 tidak terdapat keterlambatan penyampaian undangan rapat kepada peserta rapat Direksi.

The delivery of the Board of Directors meeting invitations has complied with the policy set out in the Company's Board Manual, which stipulates that invitations must be sent no later than 3 (three) days before the meeting is held, or within a shorter period in urgent situations, excluding the date of the invitation and the date of the meeting. Throughout 2024, there were no delays in delivering meeting invitations to the members of the Board of Directors.

Rencana Rapat Direksi Tahun 2024

Board of Directors Meeting Plan in 2024

Sejalan dengan *Board Manual* atau Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris, Direksi akan merencanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan dengan memfokuskan pada agenda umum yang mencakup evaluasi kinerja, strategi perusahaan, serta keputusan strategis untuk mencapai keunggulan bersama.

In line with the Board Manual or Work Guidelines for the Board of Directors and Board of Commissioners, the Board of Directors shall plan to hold meetings at least once a month, focusing on a general agenda that includes performance evaluation, corporate strategy, and strategic decisions aimed at achieving collective excellence.

Program Pengenalan Bagi Direksi Baru

Orientation Program for New Board of Directors

Kebijakan program pengenalan Direksi baru mengacu pada *Board Manual*. Selaras dengan kebijakan tersebut Program Pengenalan mengenai Perusahaan wajib diberikan kepada Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya.

The policy on the orientation program for newly appointed Board of Directors refers to the Board Manual. In line with this policy, an Orientation Program about the Company must be provided to any member of the Board of Directors appointed for the first time.

Program Pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan. Tanggung jawab untuk mengadakan Program Pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Materi Program Pengenalan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Selama tahun 2024, tidak terdapat pengangkatan Direksi baru, sehingga tidak terdapat pelaksanaan program pengenalan Direksi baru.

The Orientation Program may consist of presentations, meetings, site visits, document reviews, or other programs deemed appropriate by the Company. The responsibility for organizing the Orientation Program lies with the Corporate Secretary or whoever is performing the function of Corporate Secretary.

The Orientation Program materials include:

1. The implementation of GCG principles by the Company;
2. An overview of the Company regarding its objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive positioning, risks, and other strategic issues;
3. Information related to delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information on the roles and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as matters that are prohibited.

Throughout 2024, there were no new appointments to the Board of Directors; therefore, no orientation program for new Board of Directors was conducted.

Keputusan Direksi Tahun 2024

Board of Directors' Decisions in 2024

Selama tahun 2024, Direksi PT PLN Indonesia Power telah mengeluarkan berbagai keputusan diantaranya terkait:

1. Perubahan Kedua atas keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 139.K/010/IP/2022 tentang Organisasi PT PLN Indonesia Power
2. Tim Implementasi Aplikasi SAP *Successfactors Performance and Goal Management* (PMGM) sebagai Sistem Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan PT PLN Indonesia Power
3. Tim Asesor dan Tim *Counterpart Self Assessment* GCG Tahun 2023
4. Tim *Corporate Transformation Office*
5. Kebijakan Keamanan Informasi
6. Kebijakan *Employee Well Being Policy* (EWP)
7. Pembentukan Komite Sustainability PT PLN Indonesia Power
8. Kebijakan Pengarusutamaan *Gender*
9. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Sistem Pengaduan Pelanggaran (WBS) di Lingkungan PT PLN Indonesia Power

During 2024, the Board of Directors of PT PLN Indonesia Power issued various decisions, including those related to:

1. The Second Amendment to the Board of Directors' Decision of PT Indonesia Power No. 139.K/010/IP/2022 on the Organization of PT PLN Indonesia Power
2. The Implementation Team for SAP SuccessFactors Performance and Goal Management (PMGM) Application as the Employee Performance Management System within PT PLN Indonesia Power
3. The Assessor Team and Counterpart Team for the 2023 GCG Self-Assessment
4. The Corporate Transformation Office Team
5. Information Security Policy
6. Employee Well-Being Policy (EWP)
7. Establishment of the Sustainability Committee of PT PLN Indonesia Power
8. Gender Mainstreaming Policy
9. Joint Decision of the Board of Directors and Board of Commissioners on the Whistleblowing System (WBS) within PT PLN Indonesia Power

10. Komite Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025 dan 2026 11. Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN Indonesia Power 12. Sistem Pengendalian Internal PT PLN Indonesia Power 13. Pembentukan Tim Implementasi Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301 14. Sistem Tata Kelola Pergudangan di Lingkungan PT PLN Indonesia Power	10. The Committee for Preparing the Company's Work Plan and Budget for 2025 and 2026 11. Strategic Policy on Integrated Risk Management of PT PLN Indonesia Power 12. Internal Control System of PT PLN Indonesia Power 13. Formation of the Implementation Team for the ISO 37301 Compliance Management System 14. Warehouse Governance System within PT PLN Indonesia Power

Kebijakan dan Program Pelatihan/Peningkatan Kompetensi Direksi

Policy and Training/Competency Development Program of the Board of Directors

Kebijakan pengembangan kompetensi Direksi PLN Indonesia Power mengacu pada *Board Manual*. Pengembangan/Pemutakhiran Kompetensi Direksi dirancang Untuk memfasilitasi pelaksanaan *update knowledge* tersebut, maka Anggota Direksi perlu untuk mendapatkan pendidikan berkelanjutan, yang dikombinasikan dalam *self-study* dan keikutsertaan pada pendidikan khusus, pelatihan, *workshop*, seminar, *conference*, yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Dewan Komisaris. Pendidikan berkelanjutan dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri, dan atas beban Perusahaan.

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi Anggota Direksi direalisasikan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Direksi dan termasuk dalam *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi.

The competency development policy for the Board of Directors of PLN Indonesia Power is based on the Board Manual. The development/updating of the Board of Directors' competencies is designed to facilitate the implementation of such knowledge updates. Therefore, the Board of Directors members need to receive continuous education, which is a combination of self-study and participation in specialized education, training, workshops, seminars, and conferences that can be beneficial in enhancing the effectiveness of the Board of Commissioners' functions. Continuous education can be conducted both domestically and abroad, with expenses borne by the Company.

The implementation of competency development for the Board of Directors members is realized in accordance with the Board of Directors' Annual Work Plan and is included in the Board of Directors' Key Performance Indicators (KPI).

Pelaksanaan Pelatihan Direksi Tahun 2024

Implementation of Training Program of the Board of Directors in 2024

Direksi (jabatan) Board of Directors (position)	Nama Workshop/Seminar Workshop/Seminar Name	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Edwin Nugraha Putra (Direktur Utama President Director)	PLN CEO Insight	PT PLN (Persero)	21-22 Februari February 21-22, 2024	Batam
	<i>Renewable</i> 100 CEO FORUM	Pusat Studi Energi UGM UGM Energy Study Center	31 Januari - 1 Februari 2024 January 31 - February 1, 2024	Yogyakarta
	KOMPAS 100 CEO Forum	Harian Kompas & PT PLN (Persero)	10-12 Oktober 2024 October 10-12, 2024	Balikpapan
	Forum Bisnis KBRI-MEDEF KBRI (Indonesian Embassy)-MEDEF Business Forum	KBRI Paris - Prancis KBRI (Indonesian Embassy) Paris-France	26 September 2024 September 26, 2024	Paris
	The 7 th ASEAN 3 <i>Clean Energy Roundtable</i>	ASEAN Centre For Energy	6-8 November 2024 November 6-8, 2024	Shanwei, China

Direksi (jabatan) Board of Directors (position)	Nama Workshop/Seminar Workshop/Seminar Name	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Djoko Mulyono (Direktur Operasi Pembangkit Gas/ Director of Gas Power Plant Operations)	<i>Seminar Joint Leadership Executive Training Batch 2</i>	PT PLN (Persero)	26 Agustus 2024 August 26, 2024	Jakarta
Bernadus Sudarmanta (Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce)	<i>Workshop Business Development Accelerator Sesi #3 dan #4</i> Workshop on Business Development Accelerator Sessions #3 and #4	PT PLN (Persero)	7 Juni dan 4 Juli 2024 June 7 and July 4, 2024	Jakarta
	<i>Business Development & Portofolio Leadership Forum Bulan Februari 2024</i> Business Development & Portfolio Leadership Forum February 2024	PT PLN (Persero)	29 Februari 2024 February 29, 2024	Jakarta
	<i>Pembelajaran Capacity Building Business Development and Investment Decision Making untuk Leaders PLN Group</i> Learning on Capacity Building for Business Development and Investment Decision Making for PLN Group Leaders	PT PLN (Persero)	25-26 April 2024 April 25-26, 2024	Jakarta
	<i>Seminar Joint Leadership Executive Training Batch 1 & 2</i>	PT PLN (Persero)	23 & 26 Agustus 2024 August 23 & 26, 2024	Jakarta
Endang Astharanti (Direktur Keuangan dan Manajemen Risk Director of Finance and Risk Management)	<i>Pembelajaran Capacity Building Business Development and Investment Decision Making untuk Leaders PLN Group</i> Learning on Capacity Building for Business Development and Investment Decision Making for PLN Group Leaders	PT PLN (Persero)	22 April - 27 Mei 2024 April 22 - May 27, 2024	Jakarta
	<i>Business Essential Batch II Tahun 2024</i> Business Essentials Batch II Year 2024	BUMN School of Excellence	26 Juni - 05 September 2024 June 26 - September 05, 2024	Bogor
	<i>Workshop Business Development Accelerator Sesi #3 dan #4</i> Workshop on Business Development Accelerator Sessions #3 and #4	PT PLN (Persero)	7 Juni dan 4 Juli 2024 June 7 and July 4, 2024	Jakarta
	<i>Business Essential Immersion</i>	BUMN School of Excellence	06-08 November 2024 06-08 November 2024	Insead Singapore
Wisnoe Satrijono (Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration)	Peningkatan kinerja individu dan organisasi Improving Individual and Organizational Performance	PT PLN (Persero)	30 - 31 Januari 2024 January 30-31, 2024	Online
	Cara praktis terapkan <i>employee wellbeing</i> Practical Ways to Implement Employee Wellbeing	MSECB APAC	2 Februari 2024 February 2, 2024	Online
	Pengelolaan kesehatan Health Management	PT PLN (Persero)	26 Maret 2024 March 26, 2024	Jakarta
	<i>2024 Global talent trends</i>	MERCER	2 April 2024 April 2, 2024	Online
	<i>CHRO Masterclass 4 : Future strategic workforce planning</i>	PT PLN (Persero)	5 Agustus 2024 August 5, 2024	Jakarta
	Perhitungan dampak program pemberdayaan masyarakat dengan metode SROI (<i>Social Return on Investment</i>) Calculating the Impact of Community Empowerment Programs Using the SROI (Social Return on Investment) Method	PT PLN Indonesia Power - UNPAD	6 Agustus 2024 August 6, 2024	Online

Direksi (jabatan) Board of Directors (position)	Nama Workshop/Seminar Workshop/Seminar Name	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
	<i>Leadership executive training 2024</i>	PT PLN (Persero)	23 Agustus 2024 August 23, 2024	Jakarta
	<i>Joint leadership executive training : Future of energy and digital transformation</i>	PT PLN (Persero)	26 Agustus 2024 August 26, 2024	Jakarta
	<i>Workshop Wakil Menteri BUMN : "SOE's Strategic Program and Risk Management for Indonesia's Future"</i> Workshop by Deputy Minister of SOEs: "SOE's Strategic Program and Risk Management for Indonesia's Future"	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	13 September 2024 September 13, 2024	Jakarta

Kegiatan Direksi Tahun 2024

Board of Directors' Activities in 2024

- Menyusun Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2025 dan telah disahkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025
 - Memaksimalkan Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2024 dengan mencapai target 105,56% dari target 100%
 - Memastikan pelaksanaan Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, Teknologi Informasi, Mutu Produk dan Pelayanan, CSR, SDM sudah tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi Perusahaan.
 - Memastikan pelaksanaan pengelolaan Anak Perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan Perusahaan diantaranya dengan melakukan monitoring atas kinerja Anak Perusahaan, pengangkatan dan pemberhentian calon Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan serta penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
 - Memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan Perusahaan dengan memberikan sertifikasi terhadap Laporan Keuangan Tahunan.
 - Melakukan penandatanganan surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan, kepemilikan saham, komitmen kepatuhan *Code of Conduct* (CoC) dan pakta integritas.
 - Menyusun dan menyampaikan LHKPN
- Preparing the Company's Budget Plan for the year 2025 and having it approved by the Shareholders through the GMS for the Approval of the 2025 RKAP dated January 31, 2025.
 - Maximizing the achievement of the 2024 Key Performance Indicators (KPI) by reaching a target of 105.56% out of 100%.
 - Ensuring the implementation of Risk Management, Internal Control, Information Technology, Product and Service Quality, CSR, and HR management was appropriate and effective, aligned with the Company's vision, mission, goals, objectives, and strategies.
 - Ensuring the management of Subsidiaries was conducted in accordance with Company policies, including monitoring Subsidiary performance, appointing and dismissing candidates for Subsidiary Board of Directors and Boards of Commissioners, and determining Subsidiary remuneration.
 - Ensuring the integrity of the Company's accounting and financial reporting systems by certifying the Annual Financial Statements.
 - Signing declarations of no conflict of interest, share ownership, commitment to comply with the Code of Conduct (CoC), and integrity pact.
 - Preparing and submitting the LHKPN (State Officials' Wealth Report).

Penilaian Atas Kinerja Komite Di Bawah Direksi

Performance Assessment of Committees under the Board of Directors

Pada tahun 2024 tepatnya bulan April 2024, PLN Indonesia Power membentuk Komite di bawah Direksi yaitu Komite *Sustainability* dan Komite Investasi. Penilaian terhadap Komite *Sustainability* dan Komite Investasi dilakukan oleh Direksi setiap tahun sekali, berdasarkan kriteria penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta pelaksanaan rapat. Informasi lebih lanjut terkait hasil penilaian Komite *Sustainability* dan Komite Investasi dapat ditemukan pada bab Komite *Sustainability* dan bab Komite Investasi dalam Laporan Tahunan ini.

In 2024, specifically in April 2024, PLN Indonesia Power established a committee under the Board of Directors called the Sustainability Committee and Investment Committee. The assessment of the Sustainability Committee and Investment Committee is conducted by the Board of Directors once a year, based on criteria for evaluating the implementation of duties and responsibilities as well as meeting implementation. Further information regarding the results of the Sustainability Committee's and Investment Committee's assessment can be found in the Sustainability Committee and Investment Committee chapter of this Annual Report.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan Perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

The Board of Commissioners is a Company organ which has the duty and responsibility to collectively carry out supervisory function and provide advice to the Board of Directors and ensure that the Company implements GCG at all levels and tiers of the organization.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui RUPS dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, serta Salinan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN tanggal 20 Maret 2023 dan Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS.

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed through the GMS by referring to the Company's Articles of Association and a copy of the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 on SOE Organs and Human Resources dated March 20, 2023. The guidelines for the appointment and dismissal of the Board of Commissioners are determined by the Shareholders/GMS.

Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, diantaranya mengatur mengenai: (a) penjurangan atau nominasi calon Anggota Dewan Komisaris; (b) penilaian bagi calon Anggota Dewan Komisaris.

The guidelines for appointment and dismissal, among others, regulate: (a) the screening or nomination of candidates for the Board of Commissioners; (b) the assessment of candidates for the Board of Commissioners.

Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap calon Dewan Komisaris dengan mencakup semua kriteria penilaian Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Perusahaan (penilaian

The Shareholders/GMS conduct assessments of candidates for the Board of Commissioners, covering all assessment criteria stipulated by the laws and regulations in the field of corporate governance (including assessments of integrity,

terhadap persyaratan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan). Proses penilaian calon Dewan Komisaris didukung dengan Berita Acara Penilaian.

Pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Meninggal dunia,
2. Masa jabatannya berakhir,
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS, dan/atau
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Rencana pemberhentian Anggota Dewan Komisaris diberitahukan kepada Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan dan tertulis oleh Pemegang Saham.

dedication, understanding of management issues, and adequate knowledge of the Company's line of business). The assessment process for candidates for the Board of Commissioners is supported by an Assessment Minutes of Meeting.

The dismissal of the Board of Commissioners is carried out by the GMS. The term of office of a member of the Board of Commissioners ends if:

1. The individual passes away,
2. The term of office ends,
3. Dismissed based on the GMS, and/or
4. The individual no longer meets the requirements to serve as a member of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and other applicable laws and regulations.

The plan for the dismissal of a member of the Board of Commissioners shall be notified to the concerned member of the Board of Commissioners both verbally and in writing by the Shareholders.

Komposisi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Composition

Pada tahun 2024 terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dengan adanya perubahan nomenklatur sebagaimana yang dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan Sub Bab Informasi Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2024 dan Setelah Tahun Buku 2024. Komposisi Anggota Dewan Komisaris PLN Indonesia Power per 31 Desember 2024 terdiri dari 7 (tujuh) orang termasuk Komisaris Utama dengan susunan dan komposisi sebagai berikut:

In 2024, there was a change in the composition of the Board of Commissioners due to an adjustment in nomenclature as described in Company Profile, Sub-chapter Information on Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2024 Fiscal Year and After the 2024 Fiscal Year. As of December 31, 2024, the composition of the Board of Commissioners of PLN Indonesia Power consisted of 7 (seven) members, including the President Commissioner, with the following structure and composition:

Komposisi Anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2024

Composition of Board of Commissioners as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office
Iskandar Simorangkir ¹	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	2024-2029
Wiluyo Kusdiharto	Komisaris Commissioner	2022-2026
Djoko Siswanto	Komisaris Commissioner	2021-2025
M.P Dwinugroho	Komisaris Commissioner	2022-2026
Arief Budiman	Komisaris Commissioner	2022-2026

Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office
Haryanto W.S. ²	Komisaris Independen Independent Commissioner	2022-2026
Lukmanul Hakim	Komisaris Independen Independent Commissioner	2022-2026

Keterangan:

- 1 Pengalihan nomenklatur Sdr. Iskandar Simorangkir yang diangkat melalui RUPS Perseroan tanggal 09 Februari 2021, yang semula sebagai Komisaris, berubah menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan berdasarkan RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 29 Februari 2024
- 2 Pengalihan nomenklatur Sdr. Haryanto W.S yang diangkat melalui RUPS Perseroan tanggal 09 Februari 2021, yang semula sebagai Komisaris, berubah menjadi Komisaris Independen Perseroan berdasarkan RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 29 Februari 2024

Remarks:

- 1 The adjustment of nomenclature for Mr. Iskandar Simorangkir, who was appointed through the Company's GMS on February 9, 2021, from previously serving as Commissioner to serving as President Commissioner concurrently as Independent Commissioner of the Company based on Circular GMS of Shareholders dated February 29, 2024.
- 2 The adjustment of nomenclature for Mr. Haryanto W.S, who was appointed through the Company's GMS on February 9, 2021, from previously serving as Commissioner to serving as Independent Commissioner of the Company based on Circular GMS of Shareholders dated February 29, 2024

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Term of Office of the Board of Commissioner

Sejalan dengan *Board Manual* Perusahaan, masa jabatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

Based on the Company's Board Manual, the term of office of members of the Board of Commissioners is set at 4 (four) years and can be re-appointed for 1 (one) term of office.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Guidelines of the Works, Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris telah dilengkapi Pedoman Kerja Komisaris (*Board Manual*) yang disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 20 Maret 2020.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is guided by the Board Manual, which was ratified through a Joint Decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners on March 20, 2020.

Dalam *Board Manual* tersebut, menjelaskan secara terperinci aspek-aspek pedoman kerja Dewan Komisaris, antara lain terkait:

The Board Manual provides detailed guidance on various aspects of the duties of the Board of Commissioners, including but not limited to:

1. Etika Jabatan	1. Code of Ethics for the Position
2. Pengertian dan Persyaratan Dewan Komisaris	2. Definition and Requirements of the Board of Commissioners
3. Komposisi Dewan Komisaris	3. Composition of the Board of Commissioners
4. Pengaturan Rangkap Jabatan	4. Regulation on Concurrent Positions
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris	5. Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners
6. Masa Jabatan Dewan Komisaris	6. Term of Office of the Board of Commissioners
7. Program Pengenalan dan Pelatihan	7. Orientation and Training Program
8. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris	8. Work Plan and Budget of the Board of Commissioners
9. Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris	9. Performance Achievement Indicators of the Board of Commissioners
10. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris	10. Performance Evaluation of the Board of Commissioners
11. Tugas Dewan Komisaris	11. Duties of the Board of Commissioners

12. Wewenang Dewan Komisaris	12. Authority of the Board of Commissioners
13. Pendelegasian Wewenang Di Antara Anggota Dewan Komisaris	13. Delegation of Authority Among Members of the Board of Commissioners
14. Tanggung Jawab Dewan Komisaris	14. Responsibilities of the Board of Commissioners
15. Rapat Dewan Komisaris	15. Meetings of the Board of Commissioners
16. Penetapan Kebijakan Pengawasan Perusahaan	16. Establishment of Corporate Supervisory Policies
17. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris	17. Reporting and Accountability of the Board of Commissioners
18. Remunerasi Dewan Komisaris	18. Remuneration of the Board of Commissioners
19. Organ Pendukung Dewan Komisaris.	19. Supporting Organs of the Board of Commissioners
20. Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi	20. Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors

Tugas dan tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Sejalan dengan *Board Manual*, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

In line with the Board Manual, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are as follows:

Tugas Dewan Komisaris

Duties of the Board of Commissioners

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar
 2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
 3. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing Anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.
 4. Dewan Komisaris sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG.
1. In performing its duties, the Board of Commissioners must comply with the prevailing laws and regulations and/or the Articles of Association.
 2. The Board of Commissioners supervises the management policies and the general conduct of management, both with regard to the Company and its business activities, and provides advice to the Board of Directors. Such supervision and advice are carried out in the interest of the Company and in accordance with the Company's purpose and objectives.
 3. The Board of Commissioners must not be involved in making operational decisions. Each member of the Board of Commissioners, including the President Commissioner, holds an equal position. The role of the President Commissioner as *primus inter pares* is to coordinate the activities of the Board of Commissioners.
 4. As a Company organ, the Board of Commissioners is collectively tasked with and responsible for supervising and providing advice to the Board of Directors, as well as ensuring that the Company implements GCG.

5. Memberikan persetujuan RKAP dan RJPP.
6. Memberikan arahan terkait perubahan lingkungan bisnis, hubungan dengan *stakeholder*, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, sistem teknologi informasi, Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir, kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan pengadaan, kebijakan mutu dan pelayanan.
7. Melakukan Pengawasan terhadap kepatuhan Direksi sesuai RKAP/RJPP, RKAT Dewan Komisaris, kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, pengawasan terkait gejala menurunnya kinerja Perusahaan, kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan, pengawasan terkait persetujuan atas transaksi, pengawasan terkait pengajuan calon auditor eksternal serta pengawasan efektivitas audit internal dan audit eksternal.
8. Mengusulkan calon anggota direksi kepada pemegang saham, penilaian kinerja direksi (individu dan kolegal) dan pengajuan usulan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.
9. Memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

5. Approving the RKAP and RJPP.
6. Providing direction regarding changes in the business environment, stakeholder relations, internal control systems, risk management, information technology systems, career development policies and implementation, accounting policies and financial statement preparation, procurement policies, and quality and service policies.
7. Supervising the Board of Directors' compliance with the RKAP/RJPP, the Board of Commissioners' RKAT, compliance with laws and regulations, overseeing signals of declining Company performance, policies on managing subsidiaries/joint ventures, supervision related to transaction approvals, submission of external auditor candidates, and the effectiveness of internal and external audits.
8. Proposing candidates for the Board of Directors to the Shareholders, evaluate the performance of the Board of Directors (both individual and collective), and proposing bonuses/ performance incentives in accordance with prevailing regulations and based on the performance of the Board of Directors.
9. Monitoring and ensuring that good corporate governance practices are implemented effectively and sustainably.

Tanggung jawab Dewan Komisaris

Responsibilities of the Board of Commissioners

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perusahaan.
2. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) Anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada poin 3 apabila dapat membuktikan:

1. The Board of Commissioners is responsible for supervising the Company.
2. Each member of the Board of Commissioners is required to act in good faith, with due diligence, and responsibly in carrying out supervisory duties and providing advice to the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives.
3. Each member of the Board of Commissioners is personally liable for the Company's losses if they are proven to be at fault or negligent in performing their duties.
4. If the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members, the responsibility as referred to in point 3 shall be joint and several among all members of the Board of Commissioners.
5. Members of the Board of Commissioners cannot be held liable for the losses referred to in point 3 if they can prove: (a) Having conducted supervision in good faith and with due diligence for the benefit of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives;

- (a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; (b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan (c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6. Atas nama Perusahaan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat Anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan ke pengadilan negeri.
 7. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan akibat kepailitan tersebut, setiap Anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan Anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi
 8. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1 berlaku juga bagi Anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
 9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 apabila dapat membuktikan: (a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; (c) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan (d) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.
 10. Ketentuan mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana
- (b) Having no personal interest, directly or indirectly, in the management actions of the Board of Directors that caused the losses; and (c) having provided advice to the Board of Directors to prevent the occurrence or continuation of such losses.
6. On behalf of the Company, shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of the total shares with voting rights may file a lawsuit against members of the Board of Commissioners who, due to their fault or negligence, cause losses to the Company in a district court.
 7. In the event of bankruptcy caused by the fault or negligence of the Board of Commissioners in supervising the management carried out by the Board of Directors, and the Company's assets are insufficient to pay all obligations resulting from the bankruptcy, each member of the Board of Commissioners shall be jointly and severally liable together with the members of the Board of Directors for any unpaid obligations.
 8. The responsibilities referred to in point 1 also apply to members of the Board of Commissioners who have ceased to serve within 5 (five) years prior to the declaration of bankruptcy.
 9. Members of the Board of Commissioners cannot be held liable for the Company's bankruptcy as referred to in point 1 if they can prove that; (a) The bankruptcy was not due to their fault or negligence; (b) They performed supervisory duties in good faith and with due diligence for the benefit of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives; (c) They have no personal interest, directly or indirectly, in the management actions of the Board of Directors that caused the bankruptcy; and (d) They provided advice to the Board of Directors to prevent the occurrence of bankruptcy.
 10. The provisions concerning the responsibilities of the Board of Commissioners for their faults and negligence regulated in this law do not diminish the provisions regulated in the criminal law legislation.

Sedangkan hal-hal yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris Perusahaan, yaitu:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan.
1. Inspecting the books, letters, and other documents, examining the cash for verification purposes, and other securities, as well as inspecting the Company's assets.

Meanwhile, the authorities of the Company's Board of Commissioners are as follows:

2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.
7. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
8. Membentuk komite-komite lain selain komite audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.
13. Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi Perusahaan sesuai kewenangannya.
2. Entering the grounds, buildings, and offices used by the Company.
3. Requesting explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding any matters related to the management of the Company.
4. Being informed of all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors.
5. Requesting the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors, with the knowledge of the Board of Directors, to attend meetings of the Board of Commissioners.
6. Appointing and dismissing the Secretary to the Board of Commissioners, if deemed necessary.
7. Temporarily dismissing members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association.
8. Establishing other committees besides the audit committee, if deemed necessary, by considering the Company's capacity.
9. Employing experts for certain matters for a certain period at the Company's expense, if deemed necessary.
10. Carrying out management actions of the Company under certain conditions for a certain period in accordance with the provisions of the Articles of Association.
11. Attending meetings of the Board of Directors and providing opinions on matters discussed.
12. Exercising other supervisory authorities as long as they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and/or General Meeting of Shareholders (GMS) decisions.
13. The Board of Commissioners has access to Company information according to their authority.

Jenis Keputusan yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris

Types of Decision Requiring the Board of Commissioners' Approval

Sejalan dengan *Board Manual*, usulan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Mengagunkan Aktiva Tetap Untuk Penarikan Kredit Jangka Pendek.
2. Mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha atau Pihak Lain
3. Menerima atau Memberikan Pinjaman Jangka Menengah/ Panjang.

In line with the Board Manual, proposals from the Board of Directors that require written approval from the Board of Commissioners are as follows:

1. Pledging Fixed Assets for Short-Term Credit Withdrawals.
2. Entering into Cooperation with Business Entities or Other Parties.
3. Receiving or Providing Medium/Long-Term Loans.

4. Menghapuskan dari Pembukuan Piutang Macet dan Persediaan Barang Mati. 5. Melepaskan Aktiva Tetap Bergerak dengan Umur Ekonomis yang Lazim Berlaku dalam Industri pada Umumnya sampai dengan 5 (lima) Tahun. 6. Menetapkan Struktur Organisasi jabatan 1 (satu) Tingkat Di Bawah Direksi.	4. Writing off Non-Performing Receivables and Obsolete Inventory from the Books. 5. Disposing of Movable Fixed Assets with an Economic Life Generally Accepted in the Industry up to 5 (five) Years. 6. Determining the Organizational Structure in positions 1 (one) Level Below the Board of Directors.

Pembagian Tugas Pengawasan Masing-Masing Dewan Komisaris

Segregation of Supervisory Duties for the Board of Commissioners

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan, pengarahan dan penasehatan, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris. Pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris tahun 2024 ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.007.SK/DK-PLNIP/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pembagian tugas sebagai berikut:

In order to improve the effectiveness and success of carrying out the functions of supervision, guidance, and advice, the Board of Commissioners assigns duties among its members. The segregation of duties among the members of the Board of Commissioners for 2024 was stipulated in the Board of Commissioners' Decision Letter No. 007.SK/DK-PLNIP/2024 dated March 27, 2024, with the following segregation of duties:

Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Segregation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners

Nama Name	Keahlian Expertise	Jabatan Position	Pembagian Tugas Segregation of Duties
Iskandar Simorangkir	Spesialisasi Ekonomi Moneter dan Perbankan serta Manajemen Risiko Monetary Economics and Banking Specialization	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	• Keseluruhan Bidang • Overall fields
Iskandar Simorangkir		Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	
Wiluyo Kusdiharto	Enjiniring Pembangkit, Konstruksi, Pengadaan Barang/Jasa dan Manajemen Risiko Power Plant Engineering, Construction, Procurement of Goods/Services	Komisaris Commissioner	• Audit • GCG • Whistle Blowing • SMAP ABMS
Lukmanul Hakim	Ekonomi Keuangan Financial Economics	Komisaris Independen Independent Commissioner	
Djoko Siswanto	Teknik Perminyakan, <i>Specialist Oil & Gas Management</i> serta Manajemen Risiko Petroleum Engineering, Specialist in Oil & Gas Management	Komisaris Commissioner	• Investasi dan Manajemen Risiko • SMAP • Investment and Risk Management • ABMS
M.P Dwinugroho	Ekonomi Sumber Daya Alam dan Geologi Natural Resources Economics and Geology	Komisaris Commissioner	

Nama Name	Keahlian Expertise	Jabatan Position	Pembagian Tugas Segregation of Duties
Haryanto W.S.	Pembangkitan Tenaga Listrik, Ilmu Fisika Power Generation, Physics	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Nominasi & Remunerasi • SDM & Organisasi
Arief Budiman	<i>Electoral Field, Political Funding, Pemerintahan dan Bisnis</i> Electoral Field, Political Funding, Government and Business	Komisaris Commissioner	• Nomination & Remuneration • HR & Organization

Pembagian tugas tersebut telah mencakup seluruh bidang tugas Direksi, termasuk penugasan Anggota Dewan Komisaris sebagai ketua/wakil/Anggota Komite Dewan Komisaris. Fokus bidang pengawasan masing-masing anggota Dewan Komisaris mengacu pada pembagian peran sesuai kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.

The segregation of duties has covered all areas of the Board of Directors' duties, including the assignment of members of the Board of Commissioners as chairpersons/vice chairpersons/members of the Board of Commissioners' Committees. The focus of each member of the Board of Commissioners refers to the delegation of roles according to the respective competencies and experience.

Komisaris Independen Independent Commissioner

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

Independent Commissioners' presence aims to ensure that the supervisory mechanism runs effectively and in accordance with laws and regulations, as well as to provide a balance between the interests of majority shareholders and minority shareholders.

Anggota Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, managerial, share ownership, and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or controlling shareholders or any relationship with the Company that may affect their ability to act independently.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen dan Pemenuhannya Criteria for Determining Independent Commissioners and its Fulfillment

Keberadaan Komisaris Independen yang ada di Perusahaan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria penentuan Komisaris Independen Perusahaan mencakup:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan

The Company's Independent Commissioners aim to ensure that the supervisory mechanism runs effectively and in accordance with laws and regulations. The criteria for determining the Company's Independent Commissioners include:

1. Having no affiliation with the Company, Commissioners, Board of Directors, or the Company's Majority/Controlling Shareholders.

2. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan usaha Perusahaan
3. Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan
4. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan yang bersangkutan.

2. Having no direct or indirect business relationship related to the Company's business.
3. Having no shares, either directly or indirectly, in the Company.
4. Not concurrently serving as a Director in other companies affiliated with the relevant Company.

Jumlah Komisaris Independen

Number of Independent Commissioners

Jumlah Komisaris Independen PLN Indonesia Power tahun 2024 mengalami perubahan seiring dengan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. 2 Pasal 15 ayat 2, yang mensyaratkan minimal 20% dari total komisaris merupakan komisaris independen. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara sirkuler pada 29 Februari 2024, jumlah Komisaris Independen yang sebelumnya hanya 1 (satu) orang menjadi 3 (tiga) orang yaitu yang dijabat oleh Sdr. Iskandar Simorangkir, Sdr. Haryanto WS, dan Sdr. Lukmanul Hakim, sehingga jumlah Komisaris Independen mencapai 43% dari total komisaris.

The number of Independent Commissioners at PLN Indonesia Power in 2024 changed in line with adjustments to the provisions of the Ministry of SOEs Regulation No. 2 Article 15 paragraph 2, which requires a minimum of 20% of the total commissioners to be independent commissioners. Based on the Shareholders' Resolution outside the General Meeting of Shareholders (GMS) held circularly on February 29, 2024, the number of Independent Commissioners increased from 1 (one) person to 3 (three) persons, namely held by Mr. Iskandar Simorangkir, Mr. Haryanto WS, and Mr. Lukmanul Hakim, thus making the Independent Commissioners constitute 43% of the total commissioners.

Pada tahun 2025, jumlah Komisaris Independen PLN Indonesia Power mengalami perubahan menjadi 67% dengan adanya pemberhentian Sdr. Wiluyo Kusdiharto berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara sirkuler tertanggal 23 April 2025.

In 2025, the number of Independent Commissioners of PLN Indonesia Power changed to 67%, which is more than 50%, following the dismissal of Mr. Wiluyo Kusdiharto based on the Shareholders' Resolution outside the General Meeting of Shareholders (GMS) held circularly on April 23, 2025.

Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur mengenai larangan rangkap jabatan bagi anggota Direksi BUMN dalam ketentuan Pasal 15B UU BUMN, dimana Sdr. Wiluyo Kusdiharto merupakan Direksi di Pemegang Saham yaitu PT PLN (Persero)

This change is a follow-up to Law No. 1 of 2025 on the Third Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, which regulates the prohibition of concurrent positions for members of the Board of Directors of SOEs under the provisions of Article 15B of the SOE Law, where Mr. Wiluyo Kusdiharto was a member of the Board of Directors at the Shareholder, namely PT PLN (Persero).

Pernyataan Komisaris Independen

Statement of the Independent Commissioners

Dalam rangka memenuhi ketentuan mengenai independensi Komisaris Independen, hingga akhir Desember 2024 tidak terdapat Komisaris Independen yang menjabat melebihi 2 (dua) periode masa jabatan.

In order to comply with the provisions regarding the independence of Independent Commissioners, until the end of December 2024, there were no Independent Commissioners serving more than 2 (two) terms of office.

Pernyataan Komisaris Independen PLN Indonesia Power dinyatakan dalam surat pernyataan independensi yang diperbarui secara berkala. Berikut pernyataan independensi Komisaris Independen PLN Indonesia Power:

The declaration of independence by the Independent Commissioners of PLN Indonesia Power is stated in an independence statement letter that is updated periodically. Below is the independence statement of the Independent Commissioners of PLN Indonesia Power:



Iskandar Simorangkir



Lukmanul Hakim



Haryanto WS

Berdasarkan surat pernyataan diatas, Komisaris Independen Perusahaan telah memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Based on the above statement letter, the Company's Independent Commissioners have met the independence requirements in accordance with established provisions.

Independensi Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Independence

Seluruh Dewan Komisaris telah menandatangani surat pernyataan bebas benturan kepentingan yang menyatakan tidak adanya hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya guna menjamin independensi Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya termasuk apabila terdapat rangkap jabatan maupun adanya perubahan kepemilikan saham baik pribadi maupun keluarga di Perusahaan dan/atau Perusahaan lain. Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan.

All members of the Board of Commissioners have signed a statement of no conflict of interest, declaring that there are no affiliations with members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners in order to ensure the independence of the Board of Commissioners. Members of the Board of Commissioners are also obligated to report any changes in status that may affect their independence, including concurrent positions or changes in share ownership, whether personal or by family members, in the Company and/or other companies. Throughout 2024, there were no situations involving potential conflicts of interest faced by members of the Board of Commissioners in decision-making processes.



Wiluyo Kusdiharto



Djoko Siswanto



M.P. Dwinugroho



Arief Budiman

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Conflict of Interest of the Board of Commissioners

Selama tahun 2024, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Perusahaan. Dewan Komisaris memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun.

Kebijakan benturan kepentingan Dewan Komisaris PLN Indonesia Power diatur dalam *Board Manual*. Mekanisme pengawasan atas penerapan kebijakan benturan

Throughout 2024, all members of the Board of Commissioners had no conflicts of interest nor any potential conflicts of interest with the Company. The Board of Commissioners is committed to avoiding any potential conflicts of interest and consistently ensures they are not placed in situations that may rise to such conflicts.

The conflict-of-interest policy for the Board of Commissioners of PLN Indonesia Power is regulated in the Board Manual. The mechanism for supervising the implementation of this policy

kepentingan oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan:

1. Menyusun surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.
2. Membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.
3. Melaporkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan Perusahaan lain dalam Daftar Khusus kepada Sekretaris Perusahaan.

by the Board of Commissioners includes the following:

1. Preparing a declaration of no conflict of interest at the start of appointment, which is renewed at the beginning of each year.
2. Signing an Integrity Pact attached to proposals submitted by the Board of Directors that require the recommendation of the Board of Commissioners and approval of the GMS.
3. Reporting their own and/or their family's share ownership in the Company and other companies in a Special Register submitted to the Corporate Secretary.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Concurrent Positions of the Board of Commissioners

Rangkap jabatan Dewan Komisaris PLN Indonesia mengacu pada *Board Manual* Perusahaan. Sejalan dengan pedoman tersebut, Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; dan/atau
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

Concurrent positions of the Board of Commissioners of PLN Indonesia Power are regulated in the Company's Board Manual. In line with this guideline, members of the Board of Commissioners are prohibited from concurrently holding the following positions:

1. Members of the Board of Directors in Regional-Owned Enterprises or Private-Owned Enterprises;
2. Other positions as regulated by applicable laws and regulations, including political party officials and/or legislative candidates/ members and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head; and/or
3. Other positions that may give rise to a conflict of interest.

Pada tahun 2024, terdapat beberapa anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan. Namun dapat dipastikan rangkap jabatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Informasi rangkap jabatan Dewan Komisaris disajikan di Bab Profil Perusahaan pada sub bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

In 2024, several members of the Board of Commissioners held concurrent positions. However, it had been ensured that the concurrent positions did not violate any applicable laws and regulations. Information on concurrent positions held by the Board of Commissioners is presented in the Company Profile chapter, under the subsection Board of Commissioners' Profile in this Annual Report.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Shareholding by Board of Commissioners' Members

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris senantiasa diungkapkan secara berkala melalui Daftar Khusus yang diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Daftar Khusus tersebut berisi informasi kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya. Pada tahun 2024, terdapat 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris yang tercatat memiliki saham di perusahaan lain. Rincian Kepemilikan Saham masing-masing anggota Dewan Komisaris disajikan dalam tabel berikut:

Share ownership by members of the Board of Commissioners is regularly disclosed through a Special Register administered by the Corporate Secretary. This Special Register contains information on the share ownership of the Board of Commissioners and their family members. In 2024, 1 (one) member of the Board of Commissioners was recorded as having shares in another company. The details of share ownership by each member of the Board of Commissioners are presented in the following table:

Nama Nama	Jabatan Jabatan	Kepemilikan Saham Shareholding							
		Pribadi Pada Perusahaan Personal in the Company		Keluarga pada Perusahaan Family in the Company		Pribadi Pada Perusahaan Lain Personal in the Company		Keluarga pada Perusahaan Lain Family in the Company	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Iskandar Simorangkir	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	243.000 lembar saham 243,000 shares	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A
Wiluyo Kusdiharto	Komisaris Commissioner	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A
Djoko Siswanto	Komisaris Commissioner	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A
M.P Dwinugroho	Komisaris Commissioner	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A
Arief Budiman	Komisaris Commissioner	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A
Haryanto W.S.	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A
Lukmanul Hakim	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A	Nihil N/A

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Report of Supervisory Duties of the Board of Commissioners

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Meeting

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yang berkenaan dengan tugas dan fungsinya. Kebijakan Rapat Dewan Komisaris mengacu pada *Board Manual* dan Anggaran Dasar Perusahaan. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Board of Commissioners Meetings are meetings conducted by the Board of Commissioners in relation to its duties and functions. The policy on Board of Commissioners meetings refers to the Board Manual and the Company's Articles of Association. The Board of Commissioners may hold meetings at any time upon the request of one or more members of the Board of Commissioners, the request of the Board of Directors, or a written request from one or more shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of the total shares with voting rights, stating the matters to be discussed.

Sejalan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 12.10 bahwa kuorum kehadiran Rapat Direksi adalah 1/2 dari jumlah anggota, dan dalam Pasal 16.13 kuorum kehadiran Rapat Dewan Komisaris adalah 1/2 dari jumlah anggota.

Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan Rapat memutuskan hasil rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.

Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Keputusan dapat diambil di luar rapat Dewan Komisaris melalui cara sirkuler sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

Kebijakan frekuensi rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam *Board Manual*, yaitu Dewan Komisaris mengadakan rapat internal Dewan Komisaris paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi (rapat gabungan). Rapat gabungan diselenggarakan jika dipandang perlu oleh salah satu organ dan bila dianggap perlu. Frekuensi rapat selain diatur dalam *Board Manual*, diatur juga dalam Program Kerja Dewan Komisaris. Berikut rencana frekuensi rapat Dewan Komisaris yang muat dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2024:

In accordance with Article 12.10 of the Company's Articles of Association, the quorum for a Board of Directors meeting is 1/2 (half) of the total number of members, and as stated in Article 16.13, the quorum for a Board of Commissioners meeting is also 1/2 (half) of the total members.

All decisions in the Board of Commissioners meetings are made based on deliberation to reach a consensus. If consensus cannot be reached, decisions are made by a simple majority vote. If the number of votes in favor and against is equal, the meeting chair shall decide the outcome of the meeting, by considering the responsibilities involved. However, for matters concerning individuals, decisions must be made through a closed ballot. Abstentions are considered as agreeing to the proposals presented in the meeting.

If there are more than two alternatives in a proposal and no single option receives more than half of the total votes cast, a revote is conducted between the two alternatives with the highest number of votes until one receives more than half of the total votes cast. Decisions may also be made outside of a formal Board of Commissioners meeting through circular decision, provided all members of the Board of Commissioners agree on the procedure and subject matter.

The frequency policy for Board of Commissioners meetings is regulated in the Board Manual, which states that the Board of Commissioners shall hold internal meetings at least once a month. In such meetings, the Board of Commissioners may invite the Board of Directors to attend (joint meetings). Joint meetings are held if deemed necessary by either body. In addition to be stipulated in the Board Manual, the frequency of meetings is also outlined in the Board of Commissioners' Work Program. The following is the planned frequency of Board of Commissioners meetings as stated in the 2024 Work Plan of the Board of Commissioners:

Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Meeting	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Joint Meetings with the Board of Directors	Rapat dengan Pemegang Saham Meetings with the Shareholders
12	12	2

Pelaksanaan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024

Frequency of the Board of Commissioners' Meeting in 2024

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 25 kali rapat, yang terdiri dari rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 13 kali rapat dan rapat gabungan sebanyak 12 kali rapat dengan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagai berikut:

Throughout 2024, the Board of Commissioners held a total of 25 meetings, consisting of 13 internal Board of Commissioners meetings and 12 joint meetings with the Board of Directors, with the attendance rate of the Board of Commissioners as follows:

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris Tahun 2024

Board of Commissioners' Attendance in Internal Meetings and Joint Meetings in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Attendance in Internal Meetings			Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan (Dewan Komisaris dan Direksi) Board of Commissioners Attendance in Joint Meetings (Board of Commissioners and Board of Directors)		
		Jumlah Wajib Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Frequency	Jumlah Wajib Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Frequency
Iskandar Simorangkir	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	13	13	100%	12	12	100%
Wiluyo Kusdiharto	Komisaris Commissioner	13	12	92%	12	11	92%
Djoko Siswanto	Komisaris Commissioner	13	12	92%	12	11	92%
M.P Dwinugroho	Komisaris Commissioner	13	11	85%	12	10	83%
Arief Budiman	Komisaris Commissioner	13	13	100%	12	12	100%
Haryanto W.S.	Komisaris Independen Independent Commissioner	13	13	100%	12	12	100%
Lukmanul Hakim	Komisaris Independen Independent Commissioner	13	13	100%	12	12	100%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Average Attendance of the Board of Commissioners				96%	95%		

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam RUPS Tahunan

Board of Commissioners Members Attendance in Annual GMS

No	Tanggal Date	Agenda	Realisasi Realization						
			Iskandar Simorangkir*	Wiluyo Kusdwiarto	Djoko Siswanto	M.P Dwinugroho	Arief Budiman	Haryanto W.S.	Lukmanul Hakim
1	31 Januari 2024 January 31, 2024	RUPS Tahunan Rencana Kerja & Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2025 Annual GMS for the Company's 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	28 Juni 2024 June 28, 2024	RUPS Tahunan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 Annual GMS for the Company's 2023 Fiscal Year Annual Report	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan:

✓: Hadir; ✗: tidak hadir

Remarks:

✓: Present; ✗: Not Present

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Meeting Agenda

Agenda rapat internal Dewan Komisaris tahun 2024 diantaranya membahas terkait dengan isu-isu strategis Perusahaan dan pergantian organ pendukung Dewan Komisaris sesuai ketentuan Surat Pemegang Saham, Program kerja dan *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris. Adapun agenda rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi membahas diantaranya terkait Pembahasan Persiapan RUPS RKAP Tahun 2024 PLN Indonesia Power, Laporan Kinerja Perusahaan Bulanan, *Monitoring* dan Evaluasi HSSE serta Isu-isu strategis lainnya.

The agenda of the 2024 internal meetings of the Board of Commissioners included discussions on the Company's strategic issues and the replacement of supporting organs of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the Shareholders' Letter, as well as the work program and Key Performance Indicators of the Board of Commissioners. Meanwhile, the agenda of the joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors included discussions on the Preparation for the 2024 RKAP General Meeting of Shareholders of PLN Indonesia Power, Monthly Company Performance Reports, HSSE Monitoring and Evaluation, and other strategic issues.

Ketepatan Penyampaian Undangan Rapat Dewan Komisaris

Timely Invitation Procedures of Board of Commissioners' Meeting

Penyampaian undangan rapat Dewan Komisaris telah sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam *Board Manual* adalah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Selama tahun 2024 tidak terdapat keterlambatan penyampaian undangan rapat kepada peserta rapat Dewan Komisaris.

The delivery of invitations to Board of Commissioners meetings has complied with the policy stipulated in the Board Manual, requiring invitations to be sent no later than 3 (three) days prior to the meeting, or within a shorter period in urgent situations, excluding the date of the invitation and the date of the meeting. Throughout 2024, there were no delays in the delivery of meeting invitations to the members of the Board of Commissioners.

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025

Board of Commissioners' Meeting Plan in 2025

Sejalan dengan Program Kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan pada awal tahun 2024. Rencana rapat Dewan Komisaris untuk tahun 2025 paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan dengan memfokuskan pada agenda umum yang mencakup evaluasi kinerja, strategi Perusahaan, serta keputusan strategis untuk mencapai keunggulan bersama.

In line with the Board of Commissioners' Work Program established at the beginning of 2024, the planned meetings of the Board of Commissioners for 2025 will be held at least once a month, focusing on general agendas that include performance evaluation, Corporate strategy, and strategic decisions aimed at achieving shared excellence.

Rekomendasi, Tanggapan dan Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2024

Recommendation, Response, and Decision of the Board of Commissioners in 2024

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya yang sebagian diantaranya dituangkan dalam bentuk surat keputusan dan surat lainnya yang bersifat pengawasan dan persetujuan, antara lain:

1. Rekomendasi atas Persetujuan Harga Batubara untuk PLTU Suralaya dari PT Berau Coal Tahun 2023
2. Rekomendasi atas Rencana Alignment Bisnis Portofolio Energi Primer PT PLN Indonesia Power pada PT Perta Daya Gas (PDG) kepada PT PLN Energi Primer Indonesia
3. Tanggapan Tertulis atas Setoran Modal PLN Indonesia Power kepada PLN IPRen untuk pengembangan Proyek PLTS Terapung Saguling (60 MW)
4. Rekomendasi untuk Usulan RKAP Tahun 2024 PT PLN Indonesia Power
5. Persetujuan atas Usulan Manajemen Menengah PT PLN Indonesia Power
6. Persetujuan atas Usulan Tambahan Modal Disetor PT PLN Indonesia Power kepada PT PLN Indonesia Power Renewables untuk Pengembangan Manufaktur Sel dan Modul Solar PV melalui Penyertaan Modal ke dalam Perusahaan Manufaktur Solar PV (PT Trina Mas Agra Indonesia/PT TMAI)

Throughout 2024, the Board of Commissioners had carried out its functions, duties, and responsibilities, some of which had been formalized in the form of decision letters and other supervisory and approval letters, including:

1. Recommendation for Approval of Coal Prices for Suralaya Coal-Fired Power Plant from PT Berau Coal for 2023
2. Recommendation on the Business Portfolio Alignment Plan of Primary Energy of PT PLN Indonesia Power from PT Perta Daya Gas (PDG) to PT PLN Energi Primer Indonesia
3. Written Response regarding Capital Injection from PLN Indonesia Power to PLN IPRen for the Development of Saguling Floating Solar Power Plant Project (60 MW)
4. Recommendation for the 2024 RKAP Proposal of PT PLN Indonesia Power
5. Approval of the Proposal for Middle Management of PT PLN Indonesia Power
6. Approval of the Proposal for Additional Paid-in Capital from PT PLN Indonesia Power to PT PLN Indonesia Power Renewables for the Development of Solar Cell and Solar PV Module Manufacturing through Capital Participation in Solar PV Manufacturing Company (PT Trina Mas Agra Indonesia/PT TMAI)

7. Rekomendasi persetujuan Dewan Komisaris Hasil *Talent Committee Meeting* BoD PT PLN Indonesia Power 2024
8. Tanggapan Tertulis atas setoran Modal PT PLN Indonesia Power kepada PLN IPRen untuk Pengembangan Proyek PLTS Terapung Singkarak (50 MW)
9. Rekomendasi Persetujuan Pengisian Pejabat Jenjang Manajemen Menengah PT PLN Indonesia Power
10. Tanggapan Tertulis atas Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap/Material Tidak Beroperasi Kamojang POMU
11. Tanggapan Tertulis atas Pengembangan Proyek Hijaunesia 2023 PLN *Group* Standar PT PLN Indonesia Power melalui Skema *Strategic Partnership*
12. Tanggapan Tertulis atas Pembentukan *Geothermal Company* di PLN Group
13. Tanggapan Tertulis atas Usulan Pembagian Laba Tahun 2023
14. Rekomendasi Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan PT PLN Indonesia Power dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2023
15. Rekomendasi Usulan Pemberian Tantiem dan Dewan Komisaris Serta Bonus Pegawai Tahun 2023, serta Penyesuaian Honorarium Direksi & Dewan Komisaris Tahun 2024.
7. Recommendation for Board of Commissioners' Approval of the Results of Talent Committee Meeting for the BoD of PT PLN Indonesia Power 2024
8. Written Response regarding Capital Injection from PT PLN Indonesia Power to PLN IPRen for the Development of Singkarak Floating Solar Power Plant Project (50 MW)
9. Recommendation for Approval of the Appointment of Officials at Middle Management Level of PT PLN Indonesia Power
10. Written Response on the Write-off and Disposal of Fixed/ Non-operational Material Assets of Kamojang POMU
11. Written Response on the Development of PLN Group Standards Hijaunesia 2023 Project of PT PLN Indonesia Power through Strategic Partnership Scheme
12. Written Response on the Formation of a Geothermal Company within PLN Group
13. Written Response on the Proposal for Profit Distribution for the Year 2023
14. Recommendation for Appointment of Public Accounting Firm for the Audit of Financial Statements of PT PLN Indonesia Power and Subsidiaries for Fiscal Year 2023
15. Recommendation for Proposals on the Granting of Bonuses (Tantiem) and Board of Commissioners' Remuneration for 2023, as well as Adjustments to the Honorarium of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2024.

Kebijakan dan Program Pengenalan Komisaris Baru

Policy and Orientation Program for New Commissioners

Kebijakan program pengenalan Dewan Komisaris baru mengacu pada *Board Manual*. Selaras dengan kebijakan tersebut Program Pengenalan mengenai Perusahaan wajib diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya.

Program Pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan. Tanggung jawab untuk mengadakan Program Pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Materi Program Pengenalan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;

The policy for the orientation program of new Board of Commissioners members refers to the Board Manual. In line with this policy, the Introduction Program about the Company must be provided to Board of Commissioners members appointed for the first time.

The Orientation Program can include presentations, meetings, visits to the Company, and document reviews or other programs deemed appropriate by the Company where the program is conducted. The responsibility for organizing the Introduction Program lies with the Corporate Secretary or whoever performs the function of the Corporate Secretary.

The Introduction Program materials include:

1. Implementation of GCG (Good Corporate Governance) principles by the Company;
2. An overview of the Company related to its objectives, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;

3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat pelaksanaan program pengenalan Dewan Komisaris dikarenakan tidak terdapat pengangkatan Dewan Komisaris di lingkungan PLN Indonesia Power.

3. Information related to delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as prohibited matters.

Throughout 2024, no orientation program for the Board of Commissioners was conducted due to no new appointments within PLN Indonesia Power.

Kebijakan dan Program Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Policy and Training and/or Competency Development Program of the Board of Commissioners

Kebijakan pengembangan kompetensi Dewan Komisaris PLN Indonesia Power mengacu pada *Board Manual*. Pengembangan/Pemutakhiran Kompetensi Dewan Komisaris dirancang untuk meningkatkan kompetensi bidang pengawasan, pengarahannya dan penasehatan. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi Anggota Dewan Komisaris direalisasikan sesuai dengan Rencana Kerja Dewan Komisaris dan termasuk dalam *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris.

The competency development policy for the Board of Commissioners of PLN Indonesia Power refers to the Board Manual. The development/updating of the competencies of the Board of Commissioners is aimed to enhance their oversight, guidance, and advisory competencies. The implementation of competency development for Board of Commissioners members is carried out in accordance with the Board of Commissioners' Work Plan and is included in the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI).

Pelaksanaan Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2024

Implementation of Training for the Board of Commissioners in 2024

Berikut kegiatan pelaksanaan pelatihan yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris PLN Indonesia Power selama tahun 2024:

The training activities attended by the Board of Commissioners of PLN Indonesia Power in 2024 are as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Nama Workshop/Seminar Workshop/Seminar Name	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Iskandar Simorangkir	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko X 10 th Conference of National Professional Risk Management	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Professional Certification Institute for Risk Management	12 - 13 Desember 2024 December 12 - 13, 2024	Bali
Arief Budiman	Implementasi GRC & ESG mendukung <i>Business Judgment Rule</i> sesuai UU PT No. 40 thn 2007 & UU BUMN No. 19 thn 2003 Implementation of GRC & ESG Supporting the Business Judgment Rule in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies & Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises	Forum Manajemen Risiko BUMN SOE Risk Management Forum	4 - 6 Desember 2024 December 4 - 6, 2024	Bandung
M.P. Dwinugroho	Implementasi GRC & ESG mendukung <i>Business Judgment Rule</i> sesuai UU PT No. 40 thn 2007 & UU BUMN No. 19 thn 2003 Implementation of GRC & ESG Supporting the Business Judgment Rule in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies & Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises	Forum Manajemen Risiko BUMN SOE Risk Management Forum	4 - 6 Desember 2024 December 4 - 6, 2024	Bandung

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Nama <i>Workshop</i> /Seminar <i>Workshop</i> /Seminar Name	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
	<i>Hawai Visit for USAID SINAR, Ministry of Energy and Mineral Resources, and PLN Benchmarking Related to Smart Grid and Modern Distribution System</i>	University of Hawaii – Hawaii Natural Energy Institute	27 Februari – 8 Maret 2024 February 27 – March 8, 2024	Hawaii
Haryanto W.S.	Pelatihan Teknologi Pembakaran Batubara dan Penerapan AI Training on Coal Combustion Technology and AI Application	Badan Riset dan Inovasi Nasional National Research and Innovation Agency	29 – 30 April 2024 April 29 – 30, 2024	Tangerang

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Performance Assessment

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kinerja Perusahaan. Hasil evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan arahan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris.

The performance of the Board of Commissioners is evaluated by the Shareholders at the GMS based on the Company's performance. The results serve as a basis for providing guidance to enhance the effectiveness of the Board of Commissioners' performance.

Kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual* Perusahaan, dimana penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui

1. Hasil Indikator Pencapaian Kinerja (KPI);
2. Penilaian Mandiri (*Self Assessment*).

The performance evaluation policy for the Board of Commissioners is stipulated in the Company's Board Manual, where the evaluation is conducted through:

1. Key Performance Indicator (KPI) achievement results;
2. Self-assessment.

Kriteria Penilaian kinerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Performance Assessment Criteria

Penilaian kinerja Dewan Komisaris menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Indikator Pencapaian Kinerja (KPI)

Merupakan KPI Perusahaan yang ditandatangani bersama dengan Direksi, KPI tersebut dirancang untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan, pengarahan dan penasehatan, dalam hal:

- a. Pelaksanaan GCG;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan RJPP dan RKAP;
- d. Operasional kerja/bidang;
- e. Penyusunan laporan perusahaan.

2. Penilaian Mandiri (*Self Assessment*)

Penilaian mandiri Anggota Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang diketuai oleh salah satu Anggota Dewan Komisaris dengan sistem *Self assessment* atau *peer evaluation*. Penilaian mandiri Dewan Komisaris diukur berdasarkan kriteria meliputi:

The performance evaluation of the Board of Commissioners is conducted using the following criteria:

1. Key Performance Indicators (KPI)

The Company KPIs jointly signed with the Board of Directors. The KPIs are designed to measure the effectiveness and success in carrying out supervisory, advisory, and directional functions in the following areas:

- a. GCG Implementation;
- b. Compliance with laws and regulations;
- c. Implementation of the RJPP and RKAP;
- d. Operational/functional performance;
- e. Preparation of Company reports.

2. Self-Assessment

Self-assessment of Board of Commissioners' Members is carried out by the Committee that performs the Nomination and Remuneration function, chaired by one of the Board of Commissioners' Members, with a self-assessment or peer evaluation system. Self-assessment of the Board of Commissioners can be measured based on general criteria including:

- a. *Review* dan tanggapan Rencana Perusahaan;
- b. *Review* dan tanggapan Kinerja Perusahaan;
- c. *Review* tindak lanjut hasil/ temuan Audit Internal/ Eksternal;
- d. Memberi tanggapan tertulis/ persetujuan/ nasehat/ saran/ teguran/ kepada Direksi;
- e. Menyampaikan Program kerja dan KPI Dewan Komisaris Tahunan;
- f. Menyampaikan pendapat/ usul Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham/ RUPS;
- g. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris;
- h. RUPS;
- i. Rapat Dewan Komisaris;
- j. Pengenalan/Induksi/peningkatan kompetensi;
- k. Pengelolaan GCG.

- a. Review and response to the Company's Plans;
- b. Review and response to the Company's Performance;
- c. Review of follow-up on Internal/External Audit findings;
- d. Providing written responses/ approvals/ advice/ suggestions/ warnings to the Board of Directors;
- e. Submission of the Annual Work Program and KPI of the Board of Commissioners;
- f. Submission of opinions/ suggestions by the Board of Commissioners to the Shareholders/ GMS;
- g. Submission of reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners;
- h. Participation in the GMS;
- i. Participation in Board of Commissioners meetings;
- j. Orientation/ induction/ competency development;
- k. GCG implementation.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Performance Assessment Results

Berikut hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2024:

The following is the performance assessment result of the Board of Commissioners in 2024:

Indikator Pencapaian Kinerja (KPI) Key Performance Indicators (KPI)	Penilaian Mandiri (Self Assessment) Self-Assessment
100% dari target 100%. 100% of the target 100%	(Sangat Baik) dari target (Baik) (Very Good) of the target (Good)

Penilaian Kinerja Direksi

Board of Directors' Performance Assessment

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk dilaporkan kepada Pemegang Saham sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Direksi.

The performance evaluation of the Board of Directors is carried out by the Board of Commissioners and reported to the Shareholders as a basis for evaluating the Board of Directors performance as well as their accountability for the execution of their duties.

Kebijakan penilaian kinerja Direksi diatur dalam *Board Manual* Perusahaan. Sejalan dengan kebijakan tersebut penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui:

The policy for assessing Board of Directors' performance is stipulated in the Company's Board Manual. In line with this policy, the performance evaluation of the Board of Directors is conducted through:

1. Penilaian kinerja kolegal Direksi (*Key Performance Indicator/KPI*);
2. Penilaian kinerja individu masing-masing anggota Direksi.

1. Collegial performance evaluation of the Board of Directors (*Key Performance Indicators/KPI*);
2. Individual performance evaluation of each member of the Board of Directors.

Kriteria Penilaian kinerja Direksi

Board of Directors' Performance Assessment Criteria

Pada tanggal 31 Januari 2024, PLN Indonesia Power telah melaksanakan RUPS tahunan terkait persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen/ *Key Performance Indicator* baik yang kolegal maupun yang individu dengan kriteria penilaian kinerja Direksi sebagai berikut:

On January 31, 2024, PLN Indonesia Power held its Annual GMS regarding the approval and ratification of the Management Contract/Key Performance Indicators, both collegial and individual, with the following performance evaluation criteria for the Board of Directors:

Key Performance Indicator	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	
Kolegal dan Direktur Utama Collegial and President Director	I. <i>Economic and Social Value</i> meliputi indikator: EBITDA; Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkit; ROIC; <i>Equivalent Forced Outage Rate</i> (EFOR) PLTU dan Non PLTU; <i>Equivalent Availability Factor</i> (EAF) PLTU dan Non PLTU; <i>Specific Fuel Consumption</i> (SFC) Batubara, Gas dan BBM; Pengelolaan Komunikasi & TJSL, <i>Maturity Level Sustainability</i>, <i>Carbon Emission Reduction</i>; Penyelesaian RJPP; dan Total of unit with PROPER (<i>beyond Compliance</i>) II. <i>Business Model Innovation</i> meliputi indikator: Implementasi <i>Roadmap</i> Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko <i>Sub Holding</i> (SH)/Anak Perusahaan (AP); Pendapatan Beyond kWh (Pendapatan dari Luar PLN <i>Group</i> (<i>Beyond kWh</i>) dan Jumlah Kontrak Bisnis di Luar Negeri); Jumlah <i>project</i> SPE teregister di SRN dan siap diperdagangkan; Sinergi <i>Sub Holding</i>, Anak Perusahaan Lain & Pusharlis; Optimalisasi <i>Holding Subholding</i> III. <i>Technology Leadership</i> meliputi indikator <i>Digital Power Plant Implementation</i>; <i>Maturity Level EAM</i> Pembangkitan; <i>Value Creation</i>; dan Umur Persediaan Batubara IV. <i>Energize Investment</i> meliputi indikator: EPC & <i>Project Completion</i>; <i>Green Industrial Cluster</i>; <i>Solar PV Manufacturing</i>; Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP V. <i>Unleash Talent</i> meliputi indikator: Rasio <i>Top Talent</i> Milenial (<=42 tahun) dalam <i>Nominated Talent</i>; Rasio Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i>; Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko SH/AP; <i>Human Capital Readiness</i> (HCR) & <i>Organizational Capital Readiness</i> (OCR) dan Produktivitas Pegawai; Nihil Kecelakaan VI. <i>Compliance</i> meliputi indikator: <i>Compliance</i> (GCG, <i>Zero Fatality</i>, Kepatuhan K3L, SPI, <i>Reporting</i>, Busdev <i>Alignment</i>)	
Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	A. KPI Bersama EBITDA; ROIC; Pendapatan dari Luar PLN <i>Group</i> dan Jumlah Kontrak Bisnis di Luar Negeri B. KPI Direktorat I. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia meliputi indikator: BPP PLTU Batubara; EFOR PLTU Batubara; EAF PLTU Batubara; SFC Batubara; <i>Carbon Emission Reduction</i> dan Tingkat Proper Unit (<i>Beyond Compliance</i>) II. <i>Business Model Innovation</i> meliputi indikator: Pemenuhan <i>Roadmap</i> Perbaikan Penerapan dan Sinergi antar <i>Sub Holding</i> & Anak Perusahaan Lain (tidak termasuk sinergi Unit PLN)	I. <i>Economic and Social Value</i>, includes the following indicators: EBITDA; Generation Cost (BPP); ROIC; Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) for PLTU and Non-PLTU; Equivalent Availability Factor (EAF) for Coal-Fired and Non-Coal-Fired Power Plants; Specific Fuel Consumption (SFC) for Coal, Gas, and Fuel Oil; Communication & CSR Management; Sustainability Maturity Level; Carbon Emission Reduction; RJPP Completion; and Total Units with PROPER (beyond compliance). II. <i>Business Model Innovation</i>, includes the following indicators: Implementation of the Risk Management Improvement Roadmap; Sub-holdings (SH)/Subsidiaries (AP); Revenue Beyond kWh (Revenue Outside PLN Group/Beyond kWh and Number of Overseas Business Contracts); Number of SPE projects registered in SRN and ready for trading; Synergy between Sub-holdings, Other Subsidiaries & Pusharlis; Optimization of Holding-Subholding. III. <i>Technology Leadership</i>, includes the following indicators: Digital Power Plant Implementation; EAM Generation Maturity Level; Value Creation; and Coal Inventory Age. IV. <i>Energize Investment</i>, includes the following indicators: EPC & Project Completion; Green Industrial Cluster; Solar PV Manufacturing; and Control of Investment Budget Utilization in accordance with the RKAP. V. <i>Unleash Talent</i>, includes the following indicators: Ratio of Millennial Top Talent (<=42 years old) in Nominated Talent; Ratio of Women in Nominated Talent; Ratio of Risk Management Organs in SH/AP Meeting Qualifications; Human Capital Readiness (HCR) & Organizational Capital Readiness (OCR); and Employee Productivity; Zero Accidents. VI. <i>Compliance</i>, includes the following indicators: Compliance (GCG, Zero Fatality, OHSE Compliance, Internal Audit, Reporting, Business Development Alignment).

Key Performance Indicator	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	
	III. Technology Leadership meliputi indikator: <i>Digital Power Plant Implementation; Maturity Level EAM Pembangkitan; Value Creation; Jaminan Penyediaan Energi Primer Batubara</i> IV. Energize Investment meliputi indikator: Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2024 V. Unleash Talent: #NA VI. Compliance meliputi indikator: Kepatuhan (GCG, CSR, <i>Safety, Security & Environment, SPI, Reporting</i>)	III. Technology Leadership, includes the following indicators: Digital Power Plant Implementation; EAM Generation Maturity Level; Value Creation; and Assurance of Primary Energy Supply (Coal) IV. Energize Investment, includes the following indicator: Control of Investment Budget Utilization in accordance with the 2024 RKAP V. Unleash Talent: #NA VI. Compliance, includes the following indicators: Compliance (GCG, CSR, Safety, Security & Environment, Internal Audit, Reporting)
Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	A. KPI Bersama EBITDA; ROIC; Pendapatan dari Luar PLN <i>Group</i> dan Jumlah Kontrak Bisnis di Luar Negeri B. KPI Direktorat I. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia meliputi indikator: BPP Non PLTU Batubara; (EFOR) Pembangkit Non PLTU <i>Equivalent Availability Factor</i> (EAF) Non PLTU; <i>Specific Fuel Consumption</i> (SFC) Gas dan BBM; Total of Unit with Proper (<i>Beyond Compliance</i>) dan <i>Carbon Emission Reduction</i> dari Produksi PLTGU Tambak Lorok #3 II. Business Model Innovation meliputi indikator: Pemenuhan <i>Roadmap</i> Perbaikan Penerapan; Sinergi antar <i>Sub Holding</i> & Anak Perusahaan Lain (tidak termasuk sinergi Unit PLN); serta Project SPE GRK teregister di SRN dan siap diperdagangkan III. Technology Leadership meliputi indikator: <i>Digital Power Plant Implementation; Maturity Level EAM Pembangkitan; dan Value Creation</i> IV. Energize Investment meliputi indikator: Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2024 V. Unleash Talent: #NA VI. Compliance meliputi indikator: Kepatuhan (GCG, CSR, <i>Safety, Security & Environment, SPI, Reporting</i>)	A. Joint KPI EBITDA; ROIC; Revenue from Outside the PLN Group and Number of Overseas Business Contracts B. Directorate KPI I. Economic and Social Value for Indonesia, includes the following indicators: Non-Coal-Fired Power Plants Generation Cost (BPP); Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of Non-Coal-Fired Power Plants; Equivalent Availability Factor (EAF) of Non-Coal-Fired Power Plants; Specific Fuel Consumption (SFC) for Gas and Fuel Oil; Total Number of Units with PROPER (Beyond Compliance); and Carbon Emission Reduction from the Operation of Tambak Lorok PLTGU Unit #3 II. Business Model Innovation, includes the following indicators: Fulfillment of Risk Management Implementation Improvement Roadmap; Synergy among Sub-holdings & Other Subsidiaries (excluding synergy with PLN Units) III. Technology Leadership, includes the following indicators: Digital Power Plant Implementation; EAM Generation Maturity Level; and Value Creation IV. Energize Investment, includes the following indicator: Control of Investment Budget Utilization in accordance with the 2024 RKAP V. Unleash Talent: #NA VI. Compliance, includes the following indicators: Compliance (GCG, CSR, Safety, Security & Environment, Internal Audit, Reporting)
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	A. KPI Bersama EBITDA; ROIC; Pendapatan dari Luar PLN <i>Group</i> dan Jumlah Kontrak Bisnis di Luar Negeri B. KPI Direktorat I. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia meliputi indikator: <i>Maturity Level Sustainability; dan Penyelesaian RJPP</i> II. Business Model Innovation meliputi indikator: Sinergi antar <i>Sub Holding</i>, Anak Perusahaan Lain dan Pusharlis; Optimalisasi <i>Holding Subholding</i>; dan <i>Milestone</i> Pemenuhan TKDN III. Technology Leadership: #N/A IV. Energize Investment meliputi indikator: <i>EPC Project Completion; Green Industrial Cluster; Solar PV Manufacturing</i>; Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2024. V. Unleash Talent: #NA VI. Compliance meliputi indikator: Kepatuhan (GCG, CSR, <i>Safety, Security & Environment, SPI, Reporting</i>)	A. Joint KPI EBITDA; ROIC; Revenue from Outside the PLN Group and Number of Overseas Business Contracts B. Directorate KPI I. Economic and Social Value for Indonesia, includes the following indicators: Sustainability Maturity Level; and Completion of the Long-Term Corporate Plan (RJPP) II. Business Model Innovation, includes the following indicators: Synergy among Sub-Holdings, Other Subsidiaries, and Pusharlis; Optimization of Holding-Subholding Structure; and Milestone Achievement of Domestic Component Level (TKDN) Fulfillment III. Technology Leadership: #N/A IV. Energize Investment, includes the following indicators: EPC Project Completion; Green Industrial Cluster; Solar PV Manufacturing; Control of Investment Budget Utilization according to the 2024 RKAP; and Strategic Partnership for Generation Companies (Genco) V. Unleash Talent: #N/A VI. Compliance, includes the following indicators: Compliance (GCG, CSR, Safety, Security & Environment, Internal Audit, Reporting)

Key Performance Indicator	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	A. KPI Bersama EBITDA; ROIC; Pendapatan dari Luar PLN Group dan Jumlah Kontrak Bisnis di Luar Negeri B. KPI Direktorat I. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia meliputi indikator: Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkit II. Business Model Innovation meliputi indikator: Sinergi antar Sub Holding, Anak Perusahaan Lain dan Pusharlis III. Technology Leadership: Digital Power Plant Implementation; Value Creation: Efisiensi Biaya Pemeliharaan Pembangkit IV. Energize Investment meliputi indikator: Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2024 V. Unleash Talent: #NA VI. Compliance meliputi indikator: Kepatuhan (GCG, CSR, Safety, Security & Environment, SPI, Reporting)	A. Joint KPI EBITDA; ROIC; Revenue from Outside the PLN Group and Number of Overseas Business Contracts B. Directorate KPI I. Economic and Social Value for Indonesia, includes the following indicator: Generation Cost (BPP) II. Business Model Innovation, includes the following indicator: Synergy among Sub-Holdings, Other Subsidiaries, and Pusharlis III. Technology Leadership, includes the following indicators: Digital Power Plant Implementation; Value Creation: Efficiency in Power Plant Maintenance Costs IV. Energize Investment, includes the following indicator: Control of Investment Budget Utilization according to the 2024 RKAP V. Unleash Talent: #N/A VI. Compliance, includes the following indicators: Compliance (GCG, CSR, Safety, Security & Environment, Internal Audit, Reporting)
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	A. KPI Bersama EBITDA; ROIC; Pendapatan dari Luar PLN Group dan Jumlah Kontrak Bisnis di Luar Negeri B. KPI Direktorat I. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia meliputi indikator: Carbon Emission Reduction; Pengendalian Biaya Kepegawaian; dan Pengendalian Biaya Administrasi II. Business Model Innovation meliputi indikator: Pendapatan dari Luar PLN Grup dari asset dan property; Jumlah project SPE GRK teregister di SRN dan siap diperdagangkan; Sinergi antar Sub Holding, Anak Perusahaan Lain dan Pusharlis III. Technology Leadership: #N/A IV. Energize Investment meliputi indikator: Total of units with PROPER (Beyond Compliance); Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2024 V. Unleash Talent: Talent Milenial (<=42 tahun); Perempuan dalam nominated talent; Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelolaan Risiko SH/AP; Human Capital Readiness (HCR), Organization Capital Readiness (OCR); Nihil Kecelakaan; Pemenuhan Formasi Tenaga Kerja; Program Making Digital Talent VI. Compliance meliputi indikator: Kepatuhan (GCG, CSR, Safety, Security & Environment, SPI, Reporting)	A. Joint KPI EBITDA; ROIC; Revenue from Outside the PLN Group and Number of Overseas Business Contracts B. Directorate KPI I. Economic and Social Value for Indonesia, including indicators: Carbon Emission Reduction; Control of Personnel Costs; Control of Administrative Costs II. Business Model Innovation, including indicators: Revenue from Outside the PLN Group from assets and properties; Number of GHG SPE projects registered in SRN and ready to be traded; Synergy among Sub Holdings, Other Subsidiaries, and Pusharlis III. Technology Leadership: #N/A IV. Energize Investment, including indicators: Total units with PROPER (Beyond Compliance); Control of Investment Budget usage according to 2024 RKAP V. Unleash Talent, including indicators: Millennial Talent (<=42 years old); Women in nominated talent; Qualification Fulfillment Ratio of Risk Management Organs SH/AP; Human Capital Readiness (HCR), Organizational Capital Readiness (OCR); Zero accidents; Fulfillment of Workforce Formation; Making Digital Talent Program VI. Compliance, including indicators: Compliance (GCG, CSR, Safety, Security & Environment, Internal Audit, Reporting)

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Board of Directors' Performance Assessment Results

Berikut hasil penilaian kinerja Direksi PLN Indonesia Power secara kolegal dan individual yang dicapai per 31 Desember 2024 (Audited):

The following is performance assessment results of the Board of Directors of PLN Indonesia Power, both collegially and individually, as of December 31, 2024 (Audited):

Nama Name	Jabatan Position	Target Pencapaian KPI KPI Achievement Target	Skor Pencapaian KPI KPI Achievement Score
Edwin Nugraha Putra	Kolegial dan Direktur Utama Collegial and President Director	100	105,56
M. Hanafi Nur Rifai	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal Power Plant Operations	100	103,26
Djoko Mulyono	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	100	104,83
Bernadus Sudarmanta	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	100	100,90
Endang Astharanti	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	100	104,63
Wisnoe Satrijono	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	100	105,75

Penilaian Kinerja Masing-Masing Komite Dewan Komisaris

Performance Assessment of Each Committee under the Board of Commissioners

Sejalan dengan kebijakan yang diatur dalam *Board Manual* Perusahaan, salah satu tugas Dewan Komisaris adalah melakukan penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris. Penilaian ini dilakukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Piagam Komite serta Program Kerja Komite.

Evaluasi kinerja Komite Dewan Komisaris dilaksanakan setiap triwulan oleh Dewan Komisaris, dengan mengacu pada realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite. Parameter penilaian kinerja meliputi:

1. Kontribusi terhadap pencapaian target tim
2. Jumlah kajian, analisis, dan rekomendasi yang dihasilkan
3. Tingkat keaktifan dalam kegiatan tim
4. Kerjasama dan sinergi dalam tim
5. Mutu dan kualitas konsep yang dikembangkan

Penjelasan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dapat dilihat pada uraian bagian Komite Di Bawah Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

In line with the policy stipulated in the Company's Board Manual, one of the duties of the Board of Commissioners is to evaluate the performance of the Committees under its supervision. This evaluation is conducted based on the duties and responsibilities outlined in the Committee Charters and the Committee Work Programs.

The performance evaluation of the Committees under the Board of Commissioners is carried out quarterly by the Board of Commissioners, referring to the realization and completion of work programs listed in the Committee's Work Plan and Budget. The performance assessment parameters include:

1. Contribution to achieving team targets
2. Number of reviews, analyses, and recommendations produced
3. Level of participation in team activities
4. Collaboration and synergy within the team
5. Quality and standard of developed concepts

Further explanation regarding the performance evaluation of the Committees under the Board of Commissioners can be found in the section "Committees Under the Board of Commissioners" in this Annual Report.

Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris

Work Relations Between the Board of Directors and Board of Commissioners

Salah satu faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan Perusahaan yang baik adalah hubungan kerja yang baik antara Direksi dengan Dewan Komisaris agar masing-masing organ Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik Perusahaan.

Hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris PLN Indonesia Power diatur dalam *Board Manual* Perusahaan. Ruang lingkup hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam *Board Manual*, mencakup:

1. Perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris;
2. Perbuatan Direksi yang memerlukan tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS;
3. Pertemuan formal dan informal Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Komunikasi formal dan informal Dewan Komisaris dan Direksi.

One of the key success factors in good corporate governance is a strong working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, ensuring that both corporate organs maintain a close, open, constructive, professional, and mutually trusting relationship for the best interest of the Company.

The working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners of PLN Indonesia Power is governed by the Company's Board Manual. The scope of the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors as stipulated in the Board Manual includes:

1. Actions of the Board of Directors that require written approval from the Board of Commissioners;
2. Actions of the Board of Directors that require written responses from the Board of Commissioners and approval from the GMS;
3. Formal and informal meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors;
4. Formal and informal communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition

Kombinasi keberagaman dalam komposisi Direksi/Dewan Komisaris PLN Indonesia Power saat ini telah memenuhi standar keberagaman yang mencakup variasi dalam hal usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, serta pengalaman yang relevan.

Penetapan komposisi ini dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Pemegang Saham, yaitu PT PLN (Persero). Komposisi yang saat ini berlaku telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris, khususnya Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan Perusahaan.

The combination of diversity within the current composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PLN Indonesia Power has met diversity standards, encompassing variations in age, gender, educational background, and relevant experience.

The composition is determined through the mechanism of the General Meeting of Shareholders (GMS) by the Shareholder, namely PT PLN (Persero). The current composition has considered recommendations from the Board of Commissioners, particularly the Nomination and Remuneration Committee, to ensure alignment with the Company's needs.

Tujuan dari keberagaman dalam komposisi Direksi/Dewan Komisaris PLN Indonesia Power adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota dapat memberikan kontribusi maksimal dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis. Dengan adanya keberagaman yang mencakup berbagai latar belakang, keahlian, dan pengalaman, diharapkan Perusahaan dapat mencapai tujuan jangka panjang, beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan industri, serta terus meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, keberagaman ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta menghadapi tantangan yang ada dengan perspektif yang lebih luas dan inovatif.

The objective of diversity in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PLN Indonesia Power is to ensure that each member can contribute optimally in formulating policies and making strategic decisions. With diversity in backgrounds, expertise, and experience, the Company is expected to achieve its long-term goals, adapt swiftly to industry developments, and continuously enhance corporate performance. Additionally, this diversity aims to strengthen the Company's capacity to realize its established vision and mission, and to address challenges with broader and more innovative perspectives.

Berikut merupakan ringkasan keberagaman anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan tahun 2024.

The following is a summary of the diversity of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2024.

Keberagaman Komposisi Direksi PLN Indonesia Power Tahun 2024

Diversity of PLN Indonesia's Board of Directors Composition in 2024

Usia Age	Keberagaman usia anggota Direksi pada rentang usia yang cukup produktif dan tingkat kematangan (<i>mature</i>), yaitu 47 tahun – 56 tahun.	The age diversity of the members of the Board of Directors falls within a productive and mature range, namely between 47 and 56 years old.
Jenis Kelamin Gender	Terdapat 1 (satu) orang Direksi yang berjenis kelamin wanita dari total 6 (enam) orang anggota Direksi.	There is 1 (one) female Director out of a total of 6 (six) members of the Board of Directors.
Pendidikan Education	Jenjang pendidikan anggota Direksi meliputi tingkat Sarjana dan Magister dengan berbagai bidang Teknik seperti Elektro Teknik Mesin, Ekonomi Akuntansi, Psikolog Magister Teknologi Informasi, Teknik, Manajemen Bisnis, SDM, Psikologi, Ekonomi dan Manajemen Bidang Lainnya	The educational background of members of the Board of Directors includes Bachelor's and Master's degrees in various disciplines such as Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Accounting, Psychology, Information Technology, Engineering, Business Management, Human Resources, Psychology, Economics, and other fields of Management.
Pengalaman Kerja Work Experience	Pengalaman kerja yang beragam, antara lain menjadi Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Pejabat atau Senior Eksekutif atau posisi penting lainnya pada di Bidang Keuangan, Ketenagalistrikan, Manajemen Risiko, Pembangkit, Manajemen Mutu dan Kinerja, Pemasaran, SDM, Operasi dan Lainnya.	They also possess diverse professional experience, including serving as members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors, or as executives or senior officials in key positions in the areas of Finance, Electricity, Risk Management, Power Generation, Quality and Performance Management, Marketing, Human Resources, Operations, and other fields.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris PLN Indonesia Power Tahun 2024

Diversity of PLN Indonesia's Board of Commissioners Composition in 2024

Jabatan Position	Terdapat 3 (tiga) orang Komisaris Independen	There are 3 (three) Independent Commissioners.
Usia Age	Keberagaman usia anggota Dewan Komisaris pada rentang usia yang cukup produktif dan tingkat kematangan (<i>mature</i>), yaitu 49 tahun – 64 tahun.	The age diversity of the members of the Board of Commissioners falls within a productive and mature range, namely between 49 and 64 years old.
Pendidikan Education	Jenjang pendidikan anggota Dewan Komisaris meliputi tingkat Sarjana, Magister dan doktor dengan berbagai bidang pendidikan seperti Ekonomi, Teknik, Manajemen bisnis, Hubungan Internasional serta Listrik dan Kimia.	The educational background of the Board of Commissioners includes Bachelor's, Master's, and Doctoral degrees in various fields such as Economics, Engineering, Business Management, International Relations, as well as Electrical and Chemical studies.

Pengalaman Kerja Work Experience

Pengalaman kerja yang beragam, antara lain menjadi Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Pejabat dan/atau Senior Eksekutif atau posisi penting lainnya pada di Bidang Keuangan, Ketenagalistrikan, Pembangkit, Asuransi, Minyak dan Gas Bumi, Energi dan SDM, Keagamaan dan Politik.

They also have diverse professional experience, including serving as members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors and/or officials and/or senior executives or holding other key positions in the fields of Finance, Electricity, Power Generation, Insurance, Oil and Gas, Energy and Human Resources, Religion, and Politics.

Profil lengkap masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The complete profiles of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors can be found in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Keberagaman yang diterapkan di PLN Indonesia Power telah memberikan dampak yang positif terhadap Perusahaan, yaitu diantaranya meningkatnya kinerja Perusahaan dan hubungan dengan *stakeholder* serta adanya peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan baru dan kompleksitas pasar.

The diversity applied in PLN Indonesia Power has had a positive impact on the Company, including increasing the Company's performance and relations with stakeholders as well as increasing the Company's ability to face new challenges and market complexity.

Selain itu, keberagaman usia, *gender*, pengalaman kerja yang berbeda, serta keberadaan Komisaris independen memperkuat proses pengawasan dan memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, adil dan turut meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap Perusahaan.

In addition, the diversity of age, gender, different work experiences, and having independent Commissioners strengthen the supervision process and ensure that decisions taken are in accordance with the principles of good governance, transparency, fairness, and also increase stakeholder trust in the Company.



Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination of the Board of Commissioners and Board of Directors

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan salah satu tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mempersiapkan regenerasi dan menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang. Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka pengangkatan dan pemberhentian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dalam prinsip GCG.

Dengan pendekatan yang cermat dan berbasis pada prinsip-prinsip GCG, proses ini bukan hanya menjadi instrumen formal, tetapi juga menjadi wujud komitmen perusahaan untuk mengelola kepemimpinan dengan bijaksana, memastikan adanya inovasi dan keberlanjutan, serta memberikan kontribusi positif terhadap nilai perusahaan secara keseluruhan.

Kebijakan dasar terkait Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris di lingkup Perusahaan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan serta Salinan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN tanggal 20 Maret 2023. Adapun mekanisme suksesi Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham, yaitu PT PLN (Persero). Untuk memastikan integritas dan profesionalisme di bidangnya, seluruh calon Direksi menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Direksi terpilih diangkat oleh Pemegang Saham melalui RUPS.

Berikut proses alur pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PLN Indonesia Power:

Nomination of the Board of Commissioners and Directors is one of the duties of the Nomination and Remuneration Committee in preparing for leadership regeneration and maintaining leadership continuity in the future. In order to create a transparent, accountable, and responsible process and mechanism for the selection and replacement of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, appointments and dismissals are carried out based on professionalism principles within the GCG principles.

With a careful approach and guided by GCG principles, this process is not merely a formal instrument but also a manifestation of the Company's commitment to managing leadership wisely, ensuring innovation and sustainability, and contributing positively to the overall corporate value.

The fundamental policy related to the nomination of the Board of Directors and Board of Commissioners within the Company refers to the Articles of Association of the Company as well as a copy of the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of SOEs dated March 20, 2023. The succession mechanism for the Board of Directors and Board of Commissioners is carried out in accordance with provisions set by the Shareholders, namely PT PLN (Persero). To ensure integrity and professionalism in their respective fields, all prospective Board of Directors undergo a fit and proper test process conducted according to the prevailing laws and regulations. Subsequently, the elected Board of Directors are appointed by the Shareholders through the GMS.

The following is the appointment process flow for the Board of Directors and Board of Commissioners of PLN Indonesia Power:



Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

Kebijakan penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada:

1. Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Kebijakan Pemegang Saham;
3. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN tanggal 20 Maret 2023
4. Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) No. 54734/MNJ.01.02/F01000000/2024-SR tanggal 24 September 2024 Perihal Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2023, Penetapan Tantiem 2023, dan Penghasilan 2024 Direksi/Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power

The policy for determining the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to:

1. The Company's Articles of Association;
2. Shareholders' Policy;
3. Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/2023 on SOE Organs and Human Resources dated March 20, 2023;
4. Letter of the President Director of PT PLN (Persero) No. 54734/MNJ.01.02/F01000000/2024-SR dated September 24, 2024, on the Determination of the Use of 2023 Net Profit, Determination of 2023 Bonuses, and 2024 Remuneration for the Board of Directors/Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power.

Prosedur dan Mekanisme Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Procedures and Mechanism of Proposal up to Determination of Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2024 dilakukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh Pemegang Saham serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana yang tercantum pada Surat Dewan Komisaris No.111/002/DK-PLNIP/VI/2024-R tentang Rekomendasi Usulan Pemberian Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus Pegawai Tahun 2023, serta Penyesuaian Honorarium Direksi & Dewan Komisaris Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024.

The remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for 2024 is based on a formula determined by the Shareholders and had been reviewed by the Company's Board of Commissioners, as stated in the Board of Commissioners' Letter No. 111/002/DK-PLNIP/VI/2024-R on the Recommendation on the Proposed Distribution of Bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners as well as Employee Bonuses for 2023, and the Adjustment of Honorarium for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2024, dated June 21, 2024.

Kajian remunerasi telah berdasarkan pada rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan sebagaimana tercantum pada Sidang Komite Evaluasi Usulan Tantiem bonus dan remunerasi.

The remuneration review is conducted based on the recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee, as outlined in the Committee Meeting for the Evaluation of Proposed Bonuses, and Remuneration.

Besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Berikut prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi:

The remuneration amount for the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined by the Shareholders through the GMS mechanism. The following is the procedure for determining the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors:



Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Indicator for Determining Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

Sejalan dengan Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) No. 54734/MNJ.01.02/F01000000/2024-SR tanggal 24 September 2024 Perihal Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2023, Penetapan Tantiem 2023, dan Penghasilan 2024 Direksi/Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power, penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi telah mempertimbangkan faktor (indikator) pencapaian target, tingkat kesehatan, *salary survey* dan kemampuan keuangan, serta faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*) yang berlaku umum dalam industri sejenis dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

In line with the Letter of the President Director of PT PLN (Persero) No. 54734/MNJ.01.02/F01000000/2024-SR dated September 24, 2024, on the Determination of the Use of 2023 Net Profit, Determination of 2023 Bonuses (Tantiem), and 2024 Remuneration for the Board of Directors/Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power, the determination of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors has considered various factors (indicators) such as target achievement, financial soundness, salary survey results, financial capacity, and other relevant factors (*merit system*) that are generally applied in similar industries, aligned with the corporation's long-term interests and the creation of sustainable value.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Structure for the Board of Commissioners and Board of Directors

Pemberian remunerasi kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) tanggal 24 September 2024 dengan struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

The remuneration granted to each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors has been implemented based on the Letter of the President Director of PT PLN (Persero) dated September 24, 2024, with the following remuneration structure:

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024

Table of Remuneration Structure for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024

Jabatan Position	Keterangan Struktur Description
Dewan Komisaris Dewan Komisaris	STRUKTUR REMUNERASI JANGKA PENDEK - Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Direktur Utama sedangkan Honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari Komisaris Utama. - Tunjangan yang terdiri dari: - Tunjangan Transportasi sebesar 20% dari honorarium - Asuransi Purna Jabatan sebesar Maksimal 25% dari Honorarium dalam satu tahun. - Tunjangan Hari Raya - Fasilitas yang terdiri dari: - Fasilitas Kesehatan, yaitu Rawat jalan dan obat, rawat inap, obat-obatan dan <i>general check up</i> 1 kali setahun termasuk kepada seorang istri/ suami dan maksimal 3 orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun, belum bekerja dan belum menikah. Diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau biaya pengobatan. - Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. SHORT-TERM REMUNERATION STRUCTURE - The honorarium for the President Commissioner is set at 45% of the President Director's honorarium, while the honorarium for members of the Board of Commissioners is set at 90% of the President Commissioner's honorarium. - Allowances, consisting of: - Transportation Allowance amounting to 20% of the honorarium - Post-Employment Insurance up to a maximum of 25% of the annual honorarium - Religious Holiday Allowance - Facilities, consisting of: - Healthcare Facility, including outpatient care, inpatient care, medication, and 1 annual general check-up, also covering one spouse and up to 3 children who are under 25 years old, unmarried, and unemployed. This is provided in the form of health insurance or medical reimbursement. - Legal Assistance Facility, provided in the event of actions or conduct carried out for and on behalf of their official duties related to the Company's objectives and business activities.

Jabatan Position	Keterangan Struktur Description	
	4. Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi besaran untuk Komisaris Utama yaitu 45% dari Direktur Utama dan Anggota bagi anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama. STRUKTUR REMUNERASI JANGKA PANJANG Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power belum menerapkan skema kompensasi kepada Dewan Komisaris Perusahaan dalam jangka Panjang.	4. Bonus (Tantiem) is determined by the Shareholders, with the composition set at 45% of the President Director's bonus for the President Commissioner, and 90% of the President Commissioner's bonus for other members of the Board of Commissioners. LONG-TERM REMUNERATION STRUCTURE As of 2024, PLN Indonesia Power did not implement a long-term compensation scheme for the Company's Board of Commissioners.
Direksi Board of Directors	STRUKTUR REMUNERASI JANGKA PENDEK 1. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp264.000.000 per bulan. Gaji Anggota Direktur Lainnya sebesar 85% dari Direktur Utama. 2. Tunjangan, terdiri dari: - Tunjangan Perumahan sebesar Rp27.500.000 per bulan untuk Daerah Khusus Ibukota Negara - Asuransi Purna Jabatan sebesar Maksimal 25% dari gaji dalam satu tahun. - Tunjangan Hari Raya 3. Fasilitas, terdiri dari: - Fasilitas Kendaraan Dinas 1(satu) Unit Mobil beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan - Fasilitas Kesehatan, yaitu Rawat jalan dan obat, rawat inap, obat-obatan dan general check up 1 (satu) kali setahun termasuk kepada seorang istri / suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun, belum bekerja dan belum menikah. Diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau biaya pengobatan. - Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. 4. Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi besaran Anggota Direktur Lainnya sebesar 85% dari Direktur Utama. STRUKTUR REMUNERASI JANGKA PANJANG Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power belum menerapkan skema kompensasi kepada Direksi Perusahaan dalam jangka Panjang.	SHORT-TERM REMUNERATION STRUCTURE 1. The salary of the President Director is set at Rp264,000,000 per month. The salary of other Directors is set at 85% of the President Director's salary. 2. Allowances, consisting of: - Housing Allowance of Rp27,500,000 per month for the Special Capital Region - Post-Employment Insurance of up to a maximum of 25% of the annual salary - Religious Holiday Allowance 3. Facilities, consisting of: - Official Vehicle Facility: 1 (one) unit of car along with maintenance and operational costs, subject to the Company's financial condition - Healthcare Facility, including outpatient care, inpatient care, medication, and 1 (one) annual general check-up, also covering one spouse and up to 3 (three) children who are under 25 years old, unmarried, and unemployed. Provided in the form of health insurance or medical reimbursement - Legal Assistance Facility, provided in the event of actions or conduct carried out for and on behalf of their official duties related to the Company's objectives and business activities 4. Bonus (Tantiem) is determined by the Shareholders, with the amount for other Directors set at 85% of the President Director's bonus. LONG-TERM REMUNERATION STRUCTURE As of 2024, PLN Indonesia Power did not implement a long-term compensation scheme for the Company's Board of Directors.

Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024

Remuneration Component for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024

Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Jumlah Anggota Dewan Komisaris Number of Members of the Board of Commissioners	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun (Rupiah) Number of Members of the Board of Commissioners
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS		
Honorarium	7	7.817.040.000
Tantiem Bonus	7	5.776.110.000

Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Jumlah Anggota Dewan Komisaris Number of Members of the Board of Commissioners	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun (Rupiah) Number of Members of the Board of Commissioners
Tunjangan Allowance	7	2.216.808.000
Jumlah Total	7	15.809.958.000
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS		
Honorarium	6	16.632.000.000
Tantiem* Bonus*	6	12.479.250.000
Tunjangan Allowance	6	1.716.000.000
Jumlah Total	6	30.827.250.000
Total Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi 2023	13	46.637.208.000
Total Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023		

* Terdapat Pembayaran Tantiem di Tahun 2024 Kepada Sdr. Rachmad Handoko atas kinerja Tahun 2023

* There will be Bonus Payment in 2024 to Mr. Rachmad Handoko for the performance in 2023.

Jumlah Remunerasi yang Diterima Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024

Total Remuneration Received by the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 Tahun Total Remuneration per Person in 1 Year	2024
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS	
Di Atas 1 miliar Above Rp1 billion	6
Di antara 500 juta s/d 1 miliar Between Rp500 million and Rp1 billion	-
Di Bawah 500 juta Under Rp500 million	1
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	
Di Atas 1 miliar Above Rp1 billion	7
Di antara 500 juta s/d 1 miliar Between Rp500 million and Rp1 billion	-
Di Bawah 500 juta Under Rp500 million	-

Remunerasi Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris Tahun 2024

Remuneration for Each Member of the Board of Commissioners in 2024

Nama Dewan Komisaris Name of the Board of Commissioners	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office	Honor per Bulan Monthly Salary	Tunjangan Transport Transportation Allowance	Total per Bulan Monthly Total	Tantiem Bonus	THR Holiday Allowance	Penghasilan per Tahun Annual Income	Masa Jabatan di 2024 Term of Office in 2024
Iskandar Simorangkir ¹	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	29 Februari -2024- 2025 February 29, 2024 - 2025	118.800.000	23.760.000	142.560.000	962.685.000	118.800.000	2.507.085.000	10

Nama Dewan Komisaris Name of the Board of Commissioners	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office	Honor per Bulan Monthly Salary	Tunjangan Transport Transportation Allowance	Total per Bulan Monthly Total	Tantiem Bonus	THR Holiday Allowance	Penghasilan per Tahun Annual Income	Masa Jabatan di 2024 Term of Office in 2024
Iskandar Simorangkir ¹	Komisaris Commissioner	9 Februari 2021-29 Februari 2024 February 9, 2021 – February 29, 2024	106.920.000	21.384.000	128.304.000	1	1	256.608.000	2
Wiluyo Kusdiharto ²	Komisaris Commissioner	2022 – 2026	2	2	2	2	2	2	12
Djoko Siswanto	Komisaris Commissioner	2021-2025	106.920.000	21.384.000	128.304.000	962.685.000	106.920.000	2.609.253.000	12
Muhammad Priharto Dwinugroho	Komisaris Commissioner	2022 – 2026	106.920.000	21.384.000	128.304.000	962.685.000	106.920.000	2.609.253.000	12
Haryanto W.S.	Komisaris Independen Independent Commissioner	2022 – 2026	106.920.000	21.384.000	128.304.000	962.685.000	106.920.000	2.609.253.000	12
Arief Budiman	Komisaris Commissioner	2022 – 2026	106.920.000	21.384.000	128.304.000	962.685.000	106.920.000	2.609.253.000	12
Lukmanul Hakim	Komisaris Independen Independent Commissioner	2022 – 2026	106.920.000	21.384.000	128.304.000	962.685.000	106.920.000	2.609.253.000	12

Keterangan:

- 1 Pengalihan nomenklatur Sdr. Iskandar Simorangkir yang diangkat melalui RUPS Perseroan tanggal 29 Februari 2024, semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
2 Menjabat Direksi Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan di Pemegang Saham yaitu PT PLN (Persero)

Remarks:

- 1 The adjustment of nomenclature for Mr. Iskandar Simorangkir, who was appointed through the Company's GMS on February 29, 2024, from Commissioner to President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner of the Company.
2 Holding the position of Director of Mega Projects and New & Renewable Energy at the Shareholder, namely PT PLN (Persero).

Remunerasi Masing-Masing Anggota Direksi Tahun 2024

Remuneration for Each Member of the Board of Directors in 2024

Nama Direksi Name of the Board of Directors	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office	Honor per Bulan Monthly Salary	Tunjangan Transport Housing Allowance	Total per Bulan Monthly Total	Tantiem Bonus	THR Religious Holiday Allowance	Penghasilan per Tahun Annual Income	Masa Jabatan di 2024 Term of Office in 2024
Edwin Nugraha Putra	Direktur Utama President Director	2022-2026	264.000.000	27.500.000 ¹	291.500.000	2.377.000.00	264.000.000	6.139.000.000	12
Rachmad Handoko ³	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	2022-2023	3	2	3	1.453.601.528	3	1.453.601.528	0

Nama Direksi Name of the Board of Directors	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office	Honor per Bulan Monthly Salary	Tunjangan Transport Housing Allowance	Total per Bulan Monthly Total	Tantiem Bonus	THR Religious Holiday Allowance	Penghasilan per Tahun Annual Income	Masa Jabatan di 2024 Term of Office in 2024
M. Hanafi Nur Rifai ¹	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	2023-2027	224.400.000	²	224.400.000	566.848.472	224.400.000	3.484.048.472	12
Djoko Mulyono	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	2022-2026	224.400.000	²	224.400.000	2.020.450.000	224.400.000	4.937.650.000	12
Bernadus Sudarmanta	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	2021-2025	224.400.000	²	224.400.000	2.020.450.000	224.400.000	4.937.650.000	12
Endang Astharanti	Direktur Keuangan Director of Finance	2022-2026	224.400.000	²	224.400.000	2.020.450.000	224.400.000	4.937.650.000	12
Wisnoe Satrijono	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	2022-2026	224.400.000	²	224.400.000	2.020.450.000	224.400.000	4.937.650.000	12

Keterangan:

- 1 Sdr. Edwin Nugraha Putra mendapatkan tunjangan perumahan dikarenakan beliau tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas.
- 2 Mendapatkan fasilitas rumah dinas
- 3 Berhenti menjabat sejak 19 September 2023
- 4 Menjabat sejak 19 September 2023

Remarks:

- 1 Mr. Edwin Nugraha Putra receives a housing allowance because he does not receive official housing facilities.
- 2 Receives official housing facilities.
- 3 Term of Office ended as of September 19, 2023.
- 4 Serving since September 19, 2023.

Bonus Non Kinerja dan Opsi Saham Non-Performance Bonus and Stock Option

Sampai dengan periode laporan, tidak terdapat Bonus Non Kinerja dan penawaran Opsi Saham yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif PLN Indonesia Power.

As of the reporting period, there were no Non-Performance Bonuses or Stock Option offerings granted to members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Executive Officers of PLN Indonesia Power.

Kebijakan Penghargaan Berdasarkan Kinerja Jangka Panjang dan Program Kepemilikan Saham Perusahaan

Reward Policy Based on Long-Term Performance and Company Share Ownership Program

Sampai akhir tahun 2024, Perusahaan belum memiliki kebijakan penghargaan atau kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan jangka panjang, termasuk tidak adanya kepemilikan saham oleh karyawan atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) dan tidak ada kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP). Hal ini dikarenakan struktur kepemilikan saham Perusahaan sebanyak 99,99% dimiliki oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan 0,01% dimiliki oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK) PLN, sehingga tidak ada informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/ atau manajemen yang berhak serta harga *exercise*.

As of the end of 2024, the Company did not implement any reward or compensation policy that considered long-term corporate performance, including the absence of employee share ownership or an Employee Stock Option Program (ESOP), as well as the absence of management share ownership or a Management Stock Option Program (MSOP). It is because the Company's shareholding structure, in which 99.99% is owned by PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) and 0.01% is owned by the Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (Education and Welfare Foundation/YPK) of PLN. Therefore, there is no information available regarding the number of ESOP/MSOP shares and their realization, duration, eligibility requirements for employees and/or management, or exercise price.

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of the Board of Commissioners

Hingga 31 Desember 2024, Organ Pendukung Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Sekretariat Dewan Komisaris
2. Komite Audit
3. Komite Nominasi dan Remunerasi
4. Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Organ Pendukung Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN tanggal 23 Maret 2023 Pasal 123.

As of December 31, 2024, the Supporting Organs of the Board of Commissioners consist of:

1. Secretariat of the Board of Commissioners
2. Audit Committee
3. Nomination and Remuneration Committee
4. Investment and Risk Management Committee

The Supporting Organs of the Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power are established based on the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises dated March 23, 2023, Article 123.

Sekretariat Dewan Komisaris Secretary to the Board of Commissioners

Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power memiliki Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power has a Secretariat of the Board of Commissioners, led by a Secretary to the Board of Commissioners and supported by the Secretariat staff. The appointment and dismissal of the Secretary and the Secretariat staff are determined by the Board of Commissioners.

Hingga akhir Desember 2024, Sekretaris Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power dijabat oleh Sdr. Kishartanto Purnomo Putro berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001.SK/DKPLNIP/2022 Tanggal 17 Oktober 2022. Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris telah berdasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dipersyaratkan Perusahaan sebagaimana yang dapat dilihat pada Profil Sekretaris Dewan Komisaris sebagai berikut:

Until the end of December 2024, the position of Secretary to the Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power was held by Mr. Kishartanto Purnomo Putro, based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. 001.SK/DKPLNIP/2022 dated October 17, 2022. The appointment of the Secretary to the Board of Commissioners was made based on the educational background and work experience required by the Company, as detailed in the following Profile of the Secretary to the Board of Commissioners:

Profil Sekretaris Dewan Komisaris Profile of the Secretary to the Board of Commissioners



Kishartanto Purnomo Putro

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place, Date of Birth	43 tahun per 31 Desember 2024/11 Juli 1980	43 years old as of December 31, 2024/ July 11, 1980
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisil Domicile	Tangerang Selatan	South Tangerang
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Informatika dari Universitas Dian Nuswantoro (2002).	Bachelor's degree in Informatics from Universitas Dian Nuswantoro University (2002).

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Work Experience	Selain menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris di PT PLN Indonesia Power sejak Oktober 2022, saat ini beliau juga masih aktif di PT PLN (Persero) sebagai VP Eksekutif Direksi pada Direktorat Manajemen Proyek & EBT, serta terdapat beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah sebagai Corporate Secretary pada Pelayanan Listrik Batam (2020-2021), Senior Manager SDM dan Umum pada PT PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat (2019-2020), Manajer Area Lubuk Pakam pada PT PLN Wilayah Sumatera Utara (2018-2019), Manajer Area Sibolga pada PT PLN Wilayah Sumatera Utara (2016-2018), dan Deputy Manager IT pada PT PLN Distribusi Banten (Jan-Nov 2016)	In addition to serving as Secretary to the Board of Commissioners at PT PLN Indonesia Power since October 2022, he is also currently active at PT PLN (Persero) as Executive Vice President to the Board of Directors at the Directorate of Project Management & NRE. He has also held several other positions, including Corporate Secretary at Pelayanan Listrik Batam (2020-2021), Senior Manager of HR and General Affairs at PT PLN Regional Main Unit of West Sumatra (2019-2020), Area Manager of Lubuk Pakam at PT PLN North Sumatra Region (2018-2019), Area Manager of Sibolga at PT PLN North Sumatra Region (2016-2018), and Deputy Manager of IT at PT PLN Banten Distribution (Jan-Nov 2016).
Dasar hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001.SK/DK-PLNIP/2022 Tanggal 17 Oktober 2022.	Decision Letter of the Board of Commissioners No. 001.SK/DK-PLNIP/2022 dated October 17, 2022.

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Komisaris

Work Guidelines for the Secretary to the Board of Commissioners

Dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya, Sekretaris Dewan Komisaris mengacu pada *Board Manual*. Tugas dan tanggung jawab utama Sekretaris Dewan Komisaris adalah membantu kelancaran pekerjaan dan memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang mencakup:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris;
2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya;
3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:
 - a. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris;
 - b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan;
 - c. Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.

In carrying out his duties and responsibilities, the Secretary to the Board of Commissioners refers to the Board Manual. The main duties and responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners are to facilitate the work and provide support to the Board of Commissioners in performing its duties and functions, which include:

1. Organizing secretarial administrative activities within the Board of Commissioners;
2. Organizing meetings of the Board of Commissioners and meetings between the Board of Commissioners and Shareholders, the Board of Directors, as well as other relevant parties;
3. Providing data/information required by the Board of Commissioners and the committees under the Board of Commissioners related to:
 - a. Monitoring the follow-up of decisions, recommendations, and directives of the Board of Commissioners;
 - b. Administrative materials regarding reports/activities of the Board of Directors in managing the Company;
 - c. Administrative support and monitoring related to matters that require approval or recommendations from the Board of Commissioners in relation to the Company's management activities carried out by the Board of Directors.
4. Collecting technical data from the committees under the Board of Commissioners and experts engaged by the Board of Commissioners for the needs of the Board of Commissioners.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Implementation of the Duties of Secretary to the Board of Commissioners

Selama tahun 2024, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris;
2. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Perusahaan;
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat;
4. Mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
5. Mengadministrasikan surat keluar masuk Dewan Komisaris, selama tahun 2024 terdapat 123 surat masuk kepada Dewan Komisaris dan 239 surat keluar Dewan Komisaris;
6. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahunan 2024.

Throughout 2024, the Secretary to the Board of Commissioners carried out the following duties and functions, among others:

1. Organizing secretarial activities within the Board of Commissioners;
2. Coordinating the provision of information required by the Board of Commissioners, such as periodic reports from the Board of Directors (Monthly Reports, Quarterly Reports, Annual Reports, Internal Audit Reports), as well as other reports/information regarding the Company;
3. Organizing meetings of the Board of Commissioners, including but not limited to preparing and sending invitations, delivering meeting materials, and preparing minutes of meetings;
4. Administering minutes of meetings and other documents of the Board of Commissioners, as well as distributing the meeting resolutions to relevant parties;
5. Administering incoming and outgoing correspondence of the Board of Commissioners; during 2024, there were 123 incoming letters addressed to the Board of Commissioners and 239 outgoing letters issued by the Board of Commissioners;
6. Preparing the 2024 Annual Report on the Implementation of Duties of the Secretary to the Board of Commissioners.

Komite Audit Audit Committee

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan nasehat terhadap kebijakan Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan, agar memperoleh hasil dan manfaat serta dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan.

Komite Audit bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

The Audit Committee is established by the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in performing its supervisory and advisory functions on the policies of the Board of Directors in managing the Company, as mandated by the Company's Articles of Association, in order to achieve optimal results, benefits, and positive impact from the Company's performance.

The Audit Committee operates independently, both in the execution of its duties and in its reporting, and is directly accountable to the Board of Commissioners.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Appointment and Dismissal of Audit Committee

Ketua dan anggota Komite Audit dipilih dan diangkat oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari personil yang memiliki integritas, kompetensi, profesional, serta jujur. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris Perusahaan atau dari luar Perusahaan yang bersangkutan. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

Pengangkatan Anggota Komite Audit PLN Indonesia Power telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Piagam Komite, Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dan No. PER-3/MBU/03/2023 yaitu:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan yang bersangkutan;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
5. Syarat lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit.

Pemberhentian Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya atau diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Head and members of the Audit Committee are selected and appointed by the Board of Commissioners and consist of individuals with integrity, competence, professionalism, and honesty. Members of the Audit Committee may come from the Company's Board of Commissioners or from outside the Company. The appointment and dismissal of Audit Committee members are carried out by the Board of Commissioners and reported to the GMS.

The appointment of the Audit Committee members of PLN Indonesia Power has complied with the requirements stipulated in the Audit Committee Charter, the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 and No. PER-3/MBU/03/2023, which include:

1. Having good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/audit;
2. Having no personal interest/affiliation that may create a negative impact or conflict of interest with the Company;
3. Being able to communicate effectively;
4. Being able to allocate sufficient time to carry out duties; and
5. Meeting other requirements as stated in the Audit Committee Charter.

Dismissal of Audit Committee members may occur upon the expiry of their term of office or if they are dismissed for failing to meet the required performance standards and/or are deemed incompetent in carrying out their duties, based on a decision of the Board of Commissioners.

Susunan dan Komposisi Komite Audit

Structure and Composition of Audit Committee

Pada tahun 2024, terdapat perubahan susunan dan komposisi Komite Audit PLN Indonesia Power dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian sebagai berikut:

1. Mengangkat Sdr. Denny Triyanto sebagai Sekretaris Komite merangkap Anggota dan memberhentikan Sdr. Djoko Siswanto (Komisaris) sebagai Wakil Ketua 2 serta memberhentikan Sdr. Afif Farihin berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.005.SK/DK-PLNIP/2024 tentang Pembentukan Komite Audit pada Dewan Komisaris tanggal 7 Februari 2024.

In 2024, there were changes in the structure and composition of the Audit Committee of PLN Indonesia Power due to the following appointments and dismissals:

1. Appointing Mr. Denny Triyanto as Secretary of the Committee concurrently serving as a Member, while Mr. Djoko Siswanto (Commissioner) was dismissed from his role as Deputy Chair 2, and Mr. Afif Farihin was also dismissed, based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. 005.SK/DK-PLNIP/2024 on the Formation of the Audit Committee under the Board of Commissioners dated February 7, 2024.

2. Mengangkat Sdr. Iskandar Simorangkir yang merupakan Komisaris Independen menjadi Ketua Komite Audit; Merubah jabatan Sdr. Wiluyo Kusdiharto yang semula Ketua Komite Audit menjadi Wakil Ketua Komite Audit 1; Merubah jabatan Sdr. Lukmanul Hakim yang semula sebagai Wakil Ketua Komite 1 menjadi Wakil Ketua Komite 2; serta perubahan jabatan Sdr. Linda Agustina yang semula Sekretaris Komite merangkap anggota menjadi Anggota dan digantikan oleh Sdr. Denny Triyanto dari anggota menjadi Sekretaris Komite merangkap anggota berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.009.SK/DK-PLNIP/2024 tentang Pembentukan Komite Audit pada Dewan Komisaris tanggal 1 April 2024.
3. Memberhentikan Sdr. Leonardus Sitinjak sebagai anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.016.SK/DK-PLNIP/2024 tentang Pembentukan Komite Audit pada Dewan Komisaris tanggal 25 September 2024.

2. Appointing Mr. Iskandar Simorangkir, an Independent Commissioner, as Head of the Audit Committee; Mr. Wiluyo Kusdiharto's position changed from Head of the Audit Committee to Deputy Head 1; Mr. Lukmanul Hakim's position changed from Deputy Head 1 to Deputy Head 2; and Ms. Linda Agustina's position changed from Secretary of the Committee concurrently served as Member to Member, with Mr. Denny Triyanto assuming the role of Secretary of the Committee concurrently serving as Member, based on the Decision of the Board of Commissioners No. 009.SK/DK-PLNIP/2024 on the Formation of the Audit Committee under the Board of Commissioners dated April 1, 2024.
3. Dismissing Mr. Leonardus Sitinjak from his position as a Member of the Audit Committee based on the Decision of the Board of Commissioners No. 016.SK/DK-PLNIP/2024 on the Formation of the Audit Committee under the Board of Commissioners dated September 25, 2024.

Sehingga komposisi Komite Audit PT PLN Indonesia Power per 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.016.SK/DK-PLNIP/2024 tentang Pembentukan Komite Audit pada Dewan Komisaris tanggal 25 September 2024 adalah sebagai berikut:

Accordingly, as of December 31, 2024, the composition of the Audit Committee of PT PLN Indonesia Power, based on the Decision of the Board of Commissioners No. 016.SK/DK-PLNIP/2024 on the Formation of the Audit Committee under the Board of Commissioners dated September 25, 2024, is as follows:

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di Komite Audit Position in the Committee
Iskandar Simorangkir	Komisaris Utama President Commissioner	Ketua Komite Head of Committee
Wiluyo Kusdiharto	Komisaris Komisaris	Wakil Ketua 1 Deputy Head 1
Lukmanul Hakim	Komisaris Independen Independent Commissioner	Wakil Ketua 2 Deputy Head 2
Denny Triyanto	Tidak ada None	Sekretaris Komite merangkap Anggota Secretary of the Committee concurrently serving as a Member
Linda Agustina	Tidak ada None	Anggota Member

Adapun kronologis perubahan susunan dan komposisi Komite Audit PLN Indonesia Power selama tahun buku 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

The chronology of changes in the structure and composition of the Audit Committee of PLN Indonesia Power during the 2024 fiscal year is presented in the following table:

1 Januari 2024 - 7 Februari 2024 January 1, 2024 - February 7, 2024			7 Februari 2024 - 1 April 2024 February 7, 2024 - April 1, 2024			1 April 2024 - 25 September 2024 April 1, 2024 - September 25, 2024		
Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di Komite Audit Position in the Audit Committee	Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di Komite Audit Position in the Audit Committee	Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di Komite Audit Position in the Audit Committee
Wiluyo Kusdiharto	Komisaris Commissioner	Ketua Komite Head of Committee	Wiluyo Kusdiharto	Komisaris Commissioner	Ketua Komite Head of Committee	Iskandar Simorangkir	Komisaris Utama President Commissioner	Ketua Komite* Head of Committee*
Lukmanul Hakim	Komisaris Independen Independent Commissioner	Wakil Ketua 1 Deputy Head 1	Lukmanul Hakim	Komisaris Independen Independent Commissioner	Wakil Ketua 1 Deputy Head 1	Wiluyo Kusdiharto	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua 1 Deputy Head 1
Djoko Siswanto	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua 2 Deputy Head 2	Djoko Siswanto	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua 2 Deputy Head 2	Lukmanul Hakim	Komisaris Independen Independent Commissioner	Wakil Ketua 2 Deputy Head 2
Linda Agustina	Tidak ada None	Sekretaris Komite merangkap Anggota Secretary of the Committee concurrently served as a Member	Linda Agustina	Tidak ada None	Sekretaris Komite merangkap Anggota Secretary of the Committee concurrently served as a Member	Denny Triyanto	Tidak ada None	Sekretaris Komite merangkap Anggota Secretary of the Committee concurrently served as a Member
Leonardus Sitinjak	Tidak ada None	Anggota Komite Member of the Committee	Leonardus Sitinjak	Tidak ada None	Anggota Komite Member of the Committee	Linda Agustina	Tidak ada None	Anggota Komite Member of the Committee
Afif Farihin	Tidak ada None	Anggota Komite Member of the Committee	Denny Triyanto	Tidak ada None	Anggota Komite Member of the Committee	Leonardus Sitinjak	Tidak ada None	Anggota Komite Member of the Committee

Susunan dan komposisi Komite Audit telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam Komite dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 pasal 132 dan *Asean Corporate Governance* (ACGS) yaitu Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen yaitu yang dijabat oleh Sdr. Iskandar Simorangkir, serta anggota Komite Audit PLN Indonesia Power memiliki latar belakang independen, keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, pemahaman yang baik terhadap industri dan bisnis perusahaan, serta pengetahuan di bidang hukum dan akuntansi publik, sebagaimana yang tercantum dalam Profil Anggota Komite Audit.

The structure and composition of the Audit Committee are determined in accordance with the provisions stipulated in the Audit Committee Charter and Article 132 of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023, as well as the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Head of the Audit Committee is a member of the Board of Commissioners and serves as an Independent Commissioner, a role currently held by Mr. Iskandar Simorangkir. Furthermore, the members of the Audit Committee of PLN Indonesia Power possess independent backgrounds, expertise in accounting or finance, a strong understanding of the Company's industry and business, as well as knowledge in the fields of law and public accounting, as outlined in the Audit Committee Members' Profiles.

Profil Anggota Komite Audit

Profile of the Audit Committee Members

Berikut Profil Anggota Komite Audit PLN Indonesia Power 31 Desember 2024:

Profile of members of the Audit Committee of PLN Indonesia Power as of December 31, 2024 is as follows:



Iskandar Simorangkir

Ketua Komite
Head of Committee

Diangkat sebagai Ketua Komite Audit PLN Indonesia Power berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 016.SK/DK-PLNIP/2024 Tanggal 25 September 2024.

Informasi lebih lanjut terkait Usia, Kewarganegaraan, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan diuraikan pada bab Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini

Periode Jabatan: Pertama

Appointed as Head of the Audit Committee of PLN Indonesia Power based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. 016.SK/DK-PLNIP/2024 dated September 25, 2024.

Further information regarding age, nationality, educational background, service history/work experience, and concurrent positions is presented in the Board of Commissioners Profile chapter of this Annual Report.

Term of Office: First Period



Wiluyo Kusdwiarto

Wakil Ketua I
Deputy Head I

Diangkat sebagai Wakil Ketua Komite Audit 1 PLN Indonesia Power berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 016.SK/DK-PLNIP/2024 Tanggal 25 September 2024.

Informasi lebih lanjut terkait Usia, Kewarganegaraan, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan diuraikan pada bab Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini

Periode Jabatan: Pertama

Appointed as Deputy Head 1 of the Audit Committee of PLN Indonesia Power based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. 016.SK/DK-PLNIP/2024 dated September 25, 2024.

Further information regarding age, nationality, educational background, service history/work experience, and concurrent positions is presented in the Board of Commissioners Profile chapter of this Annual Report.

Term of Office: First Period



Lukmanul Hakim

Wakil Ketua II
Deputy Head II

Diangkat sebagai Wakil Ketua Komite Audit 2 PLN Indonesia Power berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.009.SK/DK-PLNIP/2024 tanggal 1 April 2024.

Informasi lebih lanjut terkait Usia, Kewarganegaraan, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan diuraikan pada bab Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini.

Periode Jabatan: Pertama

Appointed as Deputy Head 2 of the Audit Committee of PLN Indonesia Power based on the Decision of the Board of Commissioners No. 009.SK/DK-PLNIP/2024 dated April 1, 2024.

Further information regarding age, nationality, educational background, service history/work experience, and concurrent positions is presented in the Board of Commissioners Profile chapter of this Annual Report.

Term of Office: First Period



Denny Triyanto

Sekretaris Komite merangkap Anggota
Secretary of the Committee concurrently serving as a Member

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place, Date of Birth	48 tahun per 31 Desember 2024	48 years old as of December 31, 2024
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	Bachelors of Science, Mechanical Engineering San Diego State University - USA (1996 - 2001); dan Masters of Engineering, Engineering Management Griffith University - Australia (2003 - 2004)	Bachelor of Science in Mechanical Engineering, San Diego State University - USA (1996-2001); and Master of Engineering in Engineering Management, Griffith University - Australia (2003-2004)
Sertifikasi Certification	<i>Certified Project Risk Manager (CPRM); Certificate of Competence Qualified Risk Management Professional (QRMP); Business Model Development; Contract Drafting; Financial Analysis; Legal Drafting; Malcolm Baldrige; ISO 9001:2015; Pengadaan Barang/ Jasa; Claim, Variation and Force Account Work; Negotiation Skill.</i>	Certified Project Risk Manager (CPRM); Certificate of Competence on Qualified Risk Management Professional (QRMP); Business Model Development; Contract Drafting; Financial Analysis; Legal Drafting; Malcolm Baldrige; ISO 9001:2015; Procurement of Goods/Services; Claim, Variation, and Force Account Work; Negotiation Skills.

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Work Experience	Seorang spesialis energi dan utility yang menghabiskan 8 tahun di Amerika Serikat (AS) menempuh studi di San Diego State University dan berkarir sebagai engineer di perusahaan engineering di San Diego, California. Memiliki pengalaman yang ekstensif dalam melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi korporasi terkait program transformasi dalam menciptakan keseimbangan antara <i>short-term</i> dan <i>long-term improvement</i> . Memiliki pengalaman dalam perencanaan strategis pembangkit, dan perencanaan ketenagalistrikan di remote areas. Denny Triyanto BSc., MEng. menyelesaikan studi postgraduate di bidang Engineering Management di Griffith University, Australia dengan thesis yang menganalisa <i>environmental sustainability</i> pada industri manufaktur dan sektor <i>utility</i> . Kembali ke Indonesia tahun 2004, Denny Triyanto bekerja di PT Inco sebelum berkarir di PT PLN (Persero) sejak tahun 2007 dengan jabatan diantaranya Panitia Pengadaan <i>Independent Power Producer</i> (2010 - 2014); Ketua Tim Daftar Penyedia Terseleksi (2017 - 2018); Manager Engineering Pembangkit Thermal (2014 - 2018); Manager Strategic Business Development (2018 - 2019); Senior Manager Perencanaan Wilayah Papua dan Papua Barat (2019); Vice President Perencanaan dan Evaluasi Manajemen Perubahan (2021 - 2022); Vice President Strategic (2022); Specialist Perencanaan Strategis Pembangkitan dan Manajemen Aset (2022-2024) dan saat ini sebagai Vice President Manajemen Risiko Keuangan, Legal dan Human Capital(2024)	An energy and utility specialist who spent 8 years in the United States pursuing his studies at San Diego State University and working as an engineer at an engineering firm in San Diego, California. He has extensive experience in evaluating corporate policies and strategies related to transformation programs aimed at balancing short-term and long-term improvements. He also has experience in power plant strategic planning and electricity planning in remote areas. Denny Triyanto, BSc., MEng. completed his postgraduate studies in Engineering Management at Griffith University, Australia, with a thesis analyzing environmental sustainability in the manufacturing industry and utility sector. Returning to Indonesia in 2004, Denny Triyanto joined PT Inco before beginning his career at PT PLN (Persero) in 2007. He held various positions, including Member of the Independent Power Producer Procurement Committee(2010-2014), Head of the Selected Vendor List Team (2017-2018), Manager of Thermal Power Plant Engineering (2014-2018), Manager of Strategic Business Development (2018-2019), Senior Manager for Papua and West Papua Regional Planning (2019), Vice President of Planning and Change Management Evaluation (2021-2022), Vice President of Strategic Generation Planning and Asset Management Specialist (2022-2024), and currently serves as Vice President of Financial Risk, Legal, and Human Capital Management (2024).
Dasar hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.005.SK/DK-PLNIP/2024 tanggal 7 Februari 2024	Board of Commissioners' Decision Letter No. 005. SK/DK-PLNIP/2024 dated February 7, 2024.
Periode Jabatan Term of Office	Periode Pertama	First Period
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Pengendali.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, but he has an affiliation with the Controlling Majority Shareholder.
Rangkap Jabatan di PT PLN Indonesia Power Concurrent Positions at PT PLN Indonesia Power	Tidak Ada	None
Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain Concurrent Positions in other companies	Vice President Manajemen Risiko Keuangan, Legal dan Human Capital PT PLN (Persero)	Vice President of Financial Risk, Legal, and Human Capital Management at PT PLN (Persero)



Linda Agustina

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/Place, Date of Birth	45 tahun per 31 Desember 2024	45 years old as of December 31, 2024
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Tangerang	Tangerang
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada (2003).	Bachelor of Law from Universitas Katolik Parahyangan (2003).
Sertifikasi Certification	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Work Experience	Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Komite Audit, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum (2016-2022), Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (2015-2016), dan Kepala Subbagian Petimbangan Hukum (di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2012-2015).	Before serving as Secretary of the Audit Committee, she also served as Head of Legal Division (2016-2022), Head of Subdivision for Legislation Drafting (2015-2016), and Head of Subdivision for Legal Considerations at the Ministry of Energy and Mineral Resources (2012-2015).
Dasar hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.009.SK/DK-PLNIP/2024 tanggal 1 April 2024	Board of Commissioners' Decision Letter No. 009. SK/DK-PLNIP/2024 dated April 1, 2024
Periode Jabatan Term of Office	Periode Pertama	First Period
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and the Majority and Controlling Shareholder
Rangkap Jabatan di PT PLN Indonesia Power Concurrent Positions at PT PLN Indonesia Power	Tidak Ada	None
Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain Concurrent Positions in other companies	Analisis Hukum Ahli Madya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	Associate Legal Analyst at the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Masa Jabatan Komite Audit

Audit Committee's Term of Office

Sejalan dengan Piagam Komite Audit, masa jabatan Ketua Komite Audit dipilih oleh Dewan Komisaris dari Anggota Komisaris Independen dengan masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali

In accordance with the Audit Committee Charter, the term of office of the Head of the Audit Committee is elected by the Board of Commissioners from members of the Independent Commissioners for a period of 1 (one) year and

masa jabatan berturut-turut. Masa kerja Wakil Ketua dan Anggota Komite Audit paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris ditetapkan selama 3 (tiga) tahun. Jabatan ini dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk periode tambahan selama 2 (dua) tahun.

may be reappointed for up to 2 (two) consecutive terms. The term of office for the Deputy Head and Members of the Audit Committee is a maximum of 1 (one) year and may be reappointed for the following term.

The term of office for Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners is set for 3 (three) years. This position may be extended once for an additional period of 2 (two) years.

Pernyataan Independensi Anggota Komite Audit

Statement of Independence of Audit Committee's Members

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

All members of the Audit Committee have met all independence criteria and are able to carry out their duties independently, uphold the interests of the Company, and cannot be influenced by any party.

Tabel Independensi Komite Audit Tahun 2024

Table of Audit Committee's Independence in 2024

Aspek Independensi Independence Aspect		Iskandar Simorangkir	Wiluyo Kusdiharto	Lukmanul Hakim	Denny Triyanto	Linda Agustina
Merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.	An individual within a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, or other party providing audit services, non-audit services, and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months prior to being appointed by the Commissioner.	X	X	X	X	X
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris	An individual who has the authority and responsibility to plan, lead, or control the Company's activities within the last 6 (six) months prior to being appointed by the Commissioner.	X	X	X	X	X
Memiliki Hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit	Having a family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or other members of the Audit Committee.	X	X	X	X	X
Mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan	Holding shares, either directly or indirectly, in the Company.	X	X	X	X	X
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	Having s financial relationships with the Board of Commissioners and Board of Directors.	X	X	X	X	X
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah	Serving as a political party official or a regional government official.	X	X	X	X	X

Keterangan: ✓ : Iya X: Tidak

Remarks: ✓ : Yes X: No

Pedoman Kerja Komite Audit

Audit Committee's Work Guidelines

Pedoman Kerja Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power No.017.SK/DK-PLNIP/2024 tentang Piagam Komite Audit Desember 2024 sebagai pembaharuan Piagam Komite Audit PT Indonesia Power tanggal 23 Desember 2022. Pembaharuan Piagam Komite Audit PT PLN Indonesia Power telah merujuk pada Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

Ruang Lingkup Piagam Komite Audit PLN Indonesia Power terdiri dari :

The Work Guidelines of the Audit Committee are regulated in the Audit Committee Charter established through the Decision of the Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power No. 017.SK/DK-PLNIP/2024 on the Audit Committee Charter in December 2024 as an update to the Audit Committee Charter of PT Indonesia Power dated December 23, 2022. The update of the Audit Committee Charter of PT PLN Indonesia Power has referred to the Ministry of SOEs Regulation PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs.

The Scope of the Audit Committee Charter of PLN Indonesia Power consists of:

Bab I Chapter I	Pendahuluan	Introduction
Bab II Chapter II	Maksud dan Tujuan	Purpose and Objectives
Bab III Chapter III	Fungsi dan Tugas Pokok Komite Audit	Functions and Main Duties of the Audit Committee
Bab IV Chapter IV	Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit	Obligation, Responsibilities and Authority of the Audit Committee
Bab V Chapter V	Anggota dan Organisasi Komite Audit	Members and Organizational Structure of Audit Committee
Bab VI Chapter VI	Kode Etik Komite Audit	Code of Conduct of Audit Committee
Bab VII Chapter VII	Rapat	Meetings
Bab VIII Chapter VIII	Penilaian Kinerja	Performance Assessment
Bab IX Chapter IX	Honorarium dan Pembebanan Biaya	Honorarium and Expenses
Bab X Chapter X	Penutup	Conclusion

Fungsi dan Tugas Pokok Komite Audit

Functions and Main Duties of Audit Committee

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan penelaahan atau hasil pemeriksaan oleh auditor internal dan auditor eksternal termasuk memantau pelaksanaan GCG dalam pengelolaan perusahaan dengan tugas pokok yaitu sebagai berikut:

1. Menelaah program audit tahunan yang disusun Auditor Internal dan Auditor Eksternal
2. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal dan Auditor Eksternal;
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut temuan audit, termasuk temuan signifikan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas;
4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti Laporan Keuangan, Proyeksi dan Informasi Keuangan lainnya;

The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties by reviewing the results of audits conducted by internal and external auditors, including monitoring the implementation of GCG in Company management. The main duties are as follows:

1. Reviewing the annual audit programs prepared by the Internal Auditor and External Auditor;
2. Reviewing the adequacy of audits conducted by the Internal Auditor and External Auditor;
3. Providing input to the Board of Commissioners regarding follow-up on audit findings, including significant findings that have not been fully addressed;
4. Reviewing financial information to be issued by the Company, such as Financial Statements, Projections, and other Financial Information;

5. Melakukan penelaahan atas hasil pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan *code of conduct* serta pencegahan tindakan kecurangan;
 6. Melakukan penelaahan atas Laporan Audit Investigasi terhadap indikasi kecurangan;
 7. Memberikan saran kepada Manajemen melalui Dewan Komisaris mengenai berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses audit;
 8. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit;
 9. Mengevaluasi hasil pemantauan Auditor Internal atas tindak lanjut hasil audit dan menelaah kecukupan sumber daya serta kualifikasi tenaga Auditor Internal;
 10. Bersama tim seleksi memilih Auditor Eksternal yang akan melakukan audit dan mengusulkan agar dilakukan penggantian Auditor Eksternal apabila Auditor Eksternal yang sedang bertugas dinilai tidak kompeten;
 11. Memantau pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan melakukan evaluasi hasil *assessment* berkala atas penerapan GCG guna memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan dalam pengelolaan perusahaan oleh organ perusahaan termasuk organ pendukungnya;
 12. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan sistem dan kelengkapan GCG perusahaan.
 13. Membuat laporan tertulis dan melakukan paparan kepada Dewan Komisaris; dan
 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Reviewing the results of supervision related to the implementation of the code of conduct and prevention of fraudulent actions;
 6. Reviewing Investigation Audit Reports related to indications of fraud;
 7. Providing suggestions to Management through the Board of Commissioners on matters that can improve the smoothness and effectiveness of the audit process;
 8. Providing input to the Board of Commissioners regarding changes and improvements to the Audit Committee Charter;
 9. Evaluating results of the Internal Auditor's monitoring on audit follow-ups and reviewing the adequacy of resources and qualifications of Internal Auditors;
 10. Selecting, together with the selection team, the External Auditor to perform the audit and proposing a replacement if the current External Auditor is deemed incompetent;
 11. Monitoring the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and evaluating periodic assessments of GCG implementation to ensure GCG principles are applied in Company management by corporate organs, including supporting organs;
 12. Evaluating and providing recommendations on improvements to the Company's GCG systems and completeness;
 13. Preparing written reports and presenting them to the Board of Commissioners; and
 14. Carrying out other tasks assigned by the Board of Commissioners as long as they are within the scope of the Board of Commissioners' duties and obligations based on applicable laws and regulations.

Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Obligations, Responsibilities, and Authority of Audit Committee

Komite Audit bersifat mandiri baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

1. Komite Audit wajib melaporkan segera hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris, yaitu meliputi:
 - a. Laporan Berkala, berisi pokok-pokok hasil kerjanya berdasarkan penugasan Dewan Komisaris; dan
 - b. Laporan khusus, berisi setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan usaha Perusahaan.
2. Komite Audit berwenang untuk :
 - a. Memperoleh semua dokumen audit termasuk hasil audit internal dan eksternal dan Piagam Komite Audit

The Audit Committee is independent both in carrying out its duties and in reporting, and is directly accountable to the Board of Commissioners.

1. The Audit Committee is required to immediately report the results of its evaluations to the Board of Commissioners, which include:
 - a. Periodic Reports, containing the main results of its work based on assignments from the Board of Commissioners; and
 - b. Special Reports, containing any findings that are estimated to potentially disrupt the Company's business activities.
2. The Audit Committee has the authority to:
 - a. Obtaining all audit documents, including the results of internal and external audits, and this Audit Committee

ini dinyatakan sebagai permintaan tertulis untuk mendapatkan dokumen audit termasuk laporan temuan hasil audit internal dan eksternal;

- b. Memperoleh informasi dan mengundang Auditor Internal dan Auditor Eksternal untuk diminta keterangan;
- c. Memberikan rekomendasi atas usulan pemilihan Auditor Eksternal;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan dan pemberhentian Kepala Satuan Internal Audit (KSIAD); dan
- e. Memberikan usulan kepada Dewan Komisaris dalam penunjukan tenaga ahli/konsultan untuk membantu tugas Komite Audit

Charter serves as a written request to access audit documents including findings reports from internal and external audits;

- b. Obtaining information and summoning Internal and External Auditors to provide explanations;
- c. Providing recommendations on proposals for the selection of External Auditors;
- d. Providing recommendations to the Board of Commissioners on the appointment and dismissal of the Head of the Internal Audit Unit (KSIAD); and
- e. Proposing to the Board of Commissioners the appointment of experts/consultants to assist the Audit Committee's duties.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Report on the Implementation of Audit Committee's Activities

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan program kerja tahun 2024 yang telah disusun dan disepakati dengan Dewan Komisaris 18 Desember 2023, antara lain:

Throughout 2024, the Audit Committee carried out various activities in accordance with the 2024 work program that was prepared and agreed upon with the Board of Commissioners on December 18, 2023, including:

Rapat Komite Audit

Audit Committee's Meetings

Kebijakan Rapat Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit. Sejalan dengan kebijakan tersebut, frekuensi pertemuan/rapat berkala dapat diberlakukan sebagai berikut:

1. Rapat Komite Audit dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam satu bulan.
2. Melakukan pertemuan dengan pihak Satuan Internal Audit dan Audit Eksternal pada saat terdapat jadwal pemeriksaan (*audit engagement*), sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
3. Rapat berkala dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
4. Dalam pelaksanaan rapat, Komite Audit dapat mengundang Manajemen Eksekutif melalui Satuan Internal Audit untuk memberikan informasi yang diperlukan.

The Audit Committee's Meeting Policy is regulated in the Audit Committee Charter. In line with this policy, the frequency of regular meetings can be implemented as follows:

1. The Audit Committee meetings are held at least once a month.
2. Meetings with the Internal Audit Unit and External Audit are conducted during scheduled audits (*audit engagements*), at least once a month.
3. Regular meetings with the Board of Commissioners are held at least once every 2 (two) months.
4. During meetings, the Audit Committee may invite Executive Management through the Internal Audit Unit to provide necessary information.

Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 39 kali rapat yang terdiri dari rapat internal Komite Audit, rapat dengan Satuan Internal Audit, Eksternal Audit, Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Audit Committee's Meeting Frequency

Throughout 2024, the Audit Committee held a total of 39 meetings, consisting of internal Audit Committee meetings, meetings with the Internal Audit Unit, External Audit, the Board of Directors, and the Board of Commissioners as follows:

Keterangan Description	Rapat Internal Internal Audit Committee Meetings	Rapat berkala dengan Dewan Komisaris Regular Meeting with the Board of Commissioners	Rapat Komite Audit dengan Direksi Audit Committee Meeting with Board of Directors	Rapat Komite Audit dengan Dept IAD dan BPO Audit Committee Meeting with Dept. of IAD and BPO	Jumlah Rapat Total Meetings
Rencana Plan	11	3	4	11	29
Realisasi Realization	9	5	12	13	39

Kehadiran Komite Audit dalam Rapat

Berikut kehadiran Komite Audit dalam Rapat selama tahun 2024:

Audit Committee's Meeting Attendance

The following is the attendance of the Audit Committee at meetings throughout 2024:

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di Komite Audit Position in Audit Committee	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency
Iskandar Simorangkir ¹	Komisaris Utama President Commissioner	Ketua Komite* Head of Committee*	32	32	100%
Wiluyo Kusdiharto ²	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua 1 Deputy Head 1	39	30	77%
Djoko Siswanto ³	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua 2 Deputy Head 2	7	7	100%
Lukmanul Hakim ⁴	Komisaris Independen Independent Commissioner	Wakil Ketua 2 Deputy Head 2	39	39	100%
Denny Triyanto ⁵	-	Sekretaris Komite merangkap Anggota Secretary of the Committee concurrently serving as Member	37	37	100%
Linda Agustina	-	Anggota Member	39	37	95%
Leonardus ⁶	-	Anggota Member	27	27	100%
Afif Farihin ⁷	-	Anggota Member	8	8	100%

Keterangan:

- Menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak 1 April 2024
- Menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Audit 1 yang semula menjabat sebagai Ketua Komite Audit 1 April 2024
- Berhenti menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Audit 2 sejak 1 April 2024
- Menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Audit 2 yang semula menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Audit 1 April 2024
- Menjabat sebagai anggota Komite Audit 7 Februari 2024,
- Berhenti menjabat sebagai anggota Komite Audit 7 Februari 2024
- Berhenti menjabat sebagai anggota Komite Audit 25 September 2024

Remarks:

- Serving as Head of the Audit Committee since April 1, 2024
- Serving as Deputy Head 1 of Audit Committee, previously served as Head of the Audit Committee as of April 1, 2024
- Resigned as Deputy Head 2 of Audit Committee as of April 1, 2024
- Serving as Deputy Head 2 of Audit Committee, previously served as Deputy Head 1 of Audit Committee as of April 1, 2024
- Appointed as a member of the Audit Committee on February 7, 2024
- Resigned as Audit Committee member on February 7, 2024
- Resigned as Audit Committee member on September 25, 2024

Kebijakan dan Pelaksanaan Pelatihan Komite Audit

Kebijakan pelatihan dan peningkatan Komite Audit mengacu pada Program Kerja Komite Audit. Sejalan dengan Program Kerja Komite Audit, pelatihan Komite Audit dapat dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi maupun konferensi/seminar.

Policy and Implementation of Training of Audit Committee

The training and development policy for the Audit Committee refers to the Audit Committee Work Program. In line with the Work Program, Audit Committee training can be conducted through training sessions, certifications, or conferences/seminars.

Selama tahun 2024, Anggota Komite Audit PLN Indonesia Power telah melakukan berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi sebagai berikut:

Throughout 2024, the Audit Committee members of PLN Indonesia Power participated in various training and competency development programs as follows:

Nama Name	Nama Pelatihan Training Name	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Iskandar Simorangkir	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko ke X 10 th National Conference for Risk Management Professionals	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Professional Certification Institute for Risk Management (LSPMR)	12-13 Desember 2024 December 12 – 13, 2024	Bali
Denny Triyanto	<i>Qualified Risk Management Profesional (QRMP)</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi – Mitra Kalyana Sejahtera (LSPMKS) Professional Certification Body – Mitra Kalyana Sejahtera (LSPMKS)	Juni 2024 June 2024	Jakarta

Kunjungan Komite Audit

Guna memberikan motivasi kepada seluruh unit Perusahaan dan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi dan gambaran atas kemajuan/perkembangan serta permasalahan yang dihadapi unit, komite melakukan kunjungan atas persetujuan dari Dewan Komisaris. Selama tahun 2024, Komite Audit telah melakukan kunjungan ke Surabaya, tanggal 8-9 Juli 2024 dengan agenda Peninjauan Lapangan Dewan Komisaris dan Komite Audit PLN Indonesia Power ke BMPP Nusantara 2 PT PAL.

Audit Committee's Visits

In order to motivate all Company units and to obtain information, clarification, and an overview of progress/developments as well as issues faced by the units, the Committee conducts visits with the approval of the Board of Commissioners. Throughout 2024, the Audit Committee conducted a visit to Surabaya on July 8-9, 2024, with the agenda of a Field Review by the Board of Commissioners and Audit Committee of PLN Indonesia Power to BMPP Nusantara 2 PT PAL.

Penyampaian Laporan Komite Audit

Sejalan dengan yang diatur dalam piagam Komite Audit bahwa Komite Audit wajib menyampaikan Laporan berkala, untuk itu pada tahun 2024, Komite Audit telah menyampaikan Laporan Triwulanan kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

Submission of Audit Committee's Report

In line with the provisions set forth in the Audit Committee Charter, which requires the Audit Committee to submit periodic reports, in 2024 the Audit Committee submitted Quarterly Reports to the Board of Commissioners as follows:

Keterangan Description	Tanggal Date
Laporan Komite Audit TW I Tahun 2024 Audit Committee Report for Q1 2024	30 April 2024 April 30, 2024
Laporan Komite Audit TW II Tahun 2024 Audit Committee Report for Q2 2024	28 Juli 2024 July 28, 2024
Laporan Komite Audit TW III Tahun 2024 Audit Committee Report for Q3 2024	5 Oktober 2024 October 5, 2024
Laporan Komite Audit TW IV Tahun 2024 Audit Committee Report for Q4 2024	22 Januari 2025 January 22, 2025

Aktivitas Komite Audit

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit juga telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengevaluasi Program Kerja Komite;

Audit Committee's Activities

Throughout 2024, the Audit Committee also carried out the following activities:

1. Preparing and evaluating the Committee Work Programs;

2. Melakukan telaah atas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal serta melakukan rapat koordinasi/ pertemuan dengan Satuan Internal Audit untuk mengawasi progress tindak lanjut atas temuan audit;
 3. Rapat internal Komite Audit dengan Komite Manajemen Risiko;
 4. Rapat evaluasi kinerja Perusahaan dan *monitoring* pelaksanaan GCG bersama dengan Corporate Secretary;
 5. Rapat dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Internal Audit mengenai rencana pemeriksaan tahunan dan hasil audit rutin atau khusus KAP di lingkungan PLN Indonesia Power;
 6. Meninjau piagam komite.
2. Reviewing the Internal Audit Inspection Reports and conducting coordination meetings with the Internal Audit Unit to monitor the progress of follow-up actions on audit findings;
 3. Organizing Internal Audit Committee meetings with the Risk Management Committee;
 4. Organizing Company performance evaluation meetings and monitoring the implementation of GCG together with the Corporate Secretary;
 5. Meetings with the Public Accounting Firm (KAP) and Internal Audit Unit regarding the annual audit plan and routine or special audit results by KAP within PLN Indonesia Power;
 6. Reviewing the committee charter.

Kebijakan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Komite Audit

Policy and Implementation of Audit Committee's Performance Assessment

Kebijakan penilaian Kinerja Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit. Sejalan dengan kebijakan tersebut, penilaian kinerja Komite Audit dilakukan setiap triwulanan oleh Dewan Komisaris berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris dalam mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Komite Audit antara lain mencakup Kontribusi terhadap pencapaian target Tim, Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi, Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim, Kerjasama dalam Tim, serta Mutu dan Kualitas Konsep. Berikut hasil penilaian Kinerja Komite Audit tahun 2024:

The Audit Committee performance assessment policy is regulated in the Audit Committee Charter. In line with this policy, the performance assessment of the Audit Committee is conducted quarterly by the Board of Commissioners based on the realization and completion of the work programs outlined in the Audit Committee's Work Plan and Budget. The results of this assessment serve as considerations for the Board of Commissioners in reappointing and/or dismissing Audit Committee members for the next term.

The criteria used in the Audit Committee performance assessment include contributions to achieving team targets, the number of reviews, analyses, recommendations, level of participation in team activities, teamwork, as well as the quality and standard of concepts. The following are the results of the Audit Committee's performance assessment for 2024:

Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Hasil Penilaian Assessment Results	
	Denny Triyanto	Linda Agustin
Kontribusi terhadap pencapaian target Contribution to achieving team targets	3	4
Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi Number of reviews, analyses, and recommendations	3	4
Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim Level of activeness in team activities	3	4
Kerjasama dalam Tim Teamwork	3	3
Mutu dan Kualitas Konsep Quality and standard of concepts	3	3

Keterangan skor penilaian: 1= Tidak Sesuai Harapan; 2= Kurang Sesuai Harapan; 3= Sesuai Harapan; 4= Melampaui Harapan.

Explanation of the scoring: 1= Unsatisfactory; 2= Improvement Needed; 3= Meets Expectations; 4= Exceeds Expectations.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan nasehat terhadap kebijakan-kebijakan Direksi dalam mengelola Perusahaan seperti diamanatkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan agar memperoleh hasil dan manfaat serta dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan.

Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki hubungan fungsional dengan Direktur Human Capital dan Administrasi. Direksi PLN Indonesia Power memberikan pelimpahan kewenangan kepada Direktorat Human Capital dan Administrasi sebagai *partner* dari Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PLN Indonesia Power.

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) is established to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory and advisory functions over the policies implemented by the Board of Directors in managing the Company, as mandated by the Company's Articles of Association, in order to achieve optimal results, benefits, and positive impacts from the Company's performance.

The Nomination and Remuneration Committee operates independently, both in the execution of its duties and in its reporting, and is directly accountable to the Board of Commissioners.

The Nomination and Remuneration Committee maintains a functional relationship with the Director of Human Capital and Administration. The Board of Directors of PLN Indonesia Power delegates authority to the Directorate of Human Capital and Administration as a partner of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PLN Indonesia Power.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi

Appointment and Dismissal of Nomination and Remuneration Committee

Anggota KNR dipilih dan diangkat oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari personil yang memiliki integritas, kompetensi, profesional, serta jujur. Anggota KNR dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris Perusahaan atau dari luar Perusahaan yang bersangkutan. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KNR dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PLN Indonesia Power telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Piagam Komite, Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dan No. PER-3/MBU/03/2023 yaitu:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang nominasi dan remunerasi;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan yang bersangkutan;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan

Members of the Nomination and Remuneration Committee (NRC) are selected and appointed by the Board of Commissioners and consist of individuals who possess integrity, competence, professionalism, and honesty. NRC members may come from within the Company's Board of Commissioners or from outside the Company. The appointment and dismissal of NRC members are carried out by the Board of Commissioners and reported to the GMS.

The appointment of members of the Nomination and Remuneration Committee of PLN Indonesia Power has fulfilled the requirements as stipulated in the Committee Charter, the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 and No. PER-3/MBU/03/2023, which are as follows:

1. Possessing good integrity as well as sufficient knowledge and work experience in the field of nomination and remuneration;
2. Having no personal interests/affiliations that could lead to negative impacts or conflicts of interest with the Company;
3. Being able to communicate effectively;
4. Being able to allocate sufficient time to carry out their duties; and

5. Syarat lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama, jika diperlukan.

Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya atau diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

5. Meeting other requirements as specified in the Charter of the Nomination and Remuneration Committee or any other nomenclature with a similar function, if necessary.

The dismissal of members of the Nomination and Remuneration Committee may occur upon the expiration of their term of office or if they are dismissed due to failure to meet the established performance criteria and/or deemed incompetent in carrying out their duties based on the decision of the Board of Commissioners.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Composition of Nomination and Remuneration Committee Members

Pada tahun 2024, terdapat perubahan susunan dan komposisi anggota KNR dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian sebagai berikut:

1. Memberhentikan Sdr. Mundhakir dan mengangkat Sdr. Sumarno sebagai Sekretaris Komite merangkap Anggota berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.004.SK/DK-PLNIP/2024 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris tanggal 7 Februari 2024.
2. Memberhentikan Sdr. Sumarno dan mengangkat Sdr. Yoserianto sebagai Sekretaris Komite merangkap anggota berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.014.SK/DK-PLNIP/2024 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris tanggal 19 September 2024.

In 2024, there were changes in the structure and composition of the members of the Nomination and Remuneration Committee (NRC) due to the following appointments and dismissals:

1. The dismissal of Mr. Mundhakir and the appointment of Mr. Sumarno as Committee Secretary concurrently serving as a Member, based on the Board of Commissioners' Decision Letter No. 004.SK/DK-PLNIP/2024 on the Formation of the Nomination and Remuneration Committee under the Board of Commissioners dated February 7, 2024.
2. The dismissal of Mr. Sumarno and the appointment of Mr. Yoserianto as Committee Secretary concurrently serving as a Member, based on the Board of Commissioners' Decision Letter No. 014.SK/DK-PLNIP/2024 on the Formation of the Nomination and Remuneration Committee under the Board of Commissioners dated September 19, 2024.

Sehingga perubahan susunan dan Komisaris anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PLN Indonesia Power selama tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

Thus, the changes in the composition and structure of the Nomination and Remuneration Committee of PLN Indonesia Power during the 2024 fiscal year are as follows:

1 Januari 2024 - 7 Februari 2024 January 1, 2024 - February 7, 2024			7 Februari 2024 - 19 September 2024 February 7, 2024 - September 19, 2024			19 September 2024 - 31 Desember 2024 September 19, 2024 - December 31, 2024		
Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di KNR Position in NRC	Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di KNR Position in NRC	Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di KNR Position in NRC
Haryanto W.S	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Head of Committee	Haryanto W.S	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Head of Committee	Haryanto W.S	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Head of Committee
Arief Budiman	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Deputy Head	Arief Budiman	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Deputy Head	Arief Budiman	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Deputy Head
Mundhakir	-	Sekretaris Komite merangkap Anggota Secretary of Committee concurrently serving as a Member	Sumarno	-	Sekretaris Komite merangkap Anggota Secretary of Committee concurrently serving as a Member	Yoserianto	-	Sekretaris Komite merangkap Anggota Secretary of Committee concurrently serving as a Member

1 Januari 2024 – 7 Februari 2024 January 1, 2024 – February 7, 2024			7 Februari 2024 – 19 September 2024 February 7, 2024 – September 19, 2024			19 September 2024 – 31 Desember 2024 September 19, 2024 – December 31, 2024		
Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di KNR Position in NRC	Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di KNR Position in NRC	Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di KNR Position in NRC
Alvin Nur Widjajanti	-	Anggota Komite Member of the Committee	Alvin Nur Widjajanti	-	Anggota Komite Member of the Committee	Alvin Nur Widjajanti	-	Anggota Komite Member of the Committee

Susunan dan komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam Komite dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 pasal 138 dan *Asean Corporate Governance* (ACGS) yaitu Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi adalah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen yaitu yang dijabat oleh Sdr.Haryanto W.S, serta anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PLN Indonesia Power memiliki latar belakang pengetahuan, pengalaman kerja yang cukup dibidang nominasi dan remunerasi sebagaimana sebagaimana yang tercantum dalam Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

The structure and composition of the Nomination and Remuneration Committee are determined in accordance with the provisions set out in the Committee Charter and the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 Article 138, as well as the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Head of the Nomination and Remuneration Committee is a member of the Board of Commissioners who serves as an Independent Commissioner, namely Mr. Haryanto W.S. In addition, the members of the Nomination and Remuneration Committee of PLN Indonesia Power possess adequate knowledge and work experience in the field of nomination and remuneration, as outlined in the Profile of the Members of the Nomination and Remuneration Committee.

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of Nomination and Remuneration Committee Members



Haryanto W.S.

Ketua Komite
Head of Committee

Diangkat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN Indonesia Power berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 21 desember 2023.

Informasi lebih lanjut terkait Usia, Kewarganegaraan, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan diuraikan pada bab Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini

Periode Jabatan: Pertama

Appointed as Head of the Nomination and Remuneration Committee of PT PLN Indonesia Power based on the Board of Commissioners' Decision Letter No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 dated December 21, 2023.

Further information regarding Age, Nationality, Educational Background, Service History/Work Experience, and Concurrent Positions is presented in the Board of Commissioners Profile chapter of this Annual Report.

Term of Office: First Period



Arief Budiman

Wakil Ketua
Deputy Head

Diangkat sebagai Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Indonesia Power berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 21 desember 2023.

Appointed as Deputy Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee of Indonesia Power based on the Board of Commissioners' Decision Letter No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 dated December 21, 2023.

Informasi lebih lanjut terkait Usia, Kewarganegaraan, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan diuraikan pada bab Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini.

Further information regarding Age, Nationality, Educational Background, Service History/Work Experience, and Concurrent Positions is presented in the Board of Commissioners Profile chapter of this Annual Report.

Periode Jabatan: Pertama

Term of Office: First Period



Yoserianto

Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi
Secretary of Nomination and Remuneration Committee

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/ Plance, Date of Birth	48 tahun per 31 Desember 2024 / 18 Agustus 1976	48 years old as of December 31, 2024/ August 18, 1976
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Hukum Universitas Andalas (2001).	Sarjana Hukum Universitas Andalas (2001).
Sertifikasi Certification	Sertifikasi Human Resource	Sertifikasi Human Resource

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Work Experience	Memulai karir di PT PLN (Persero) sejak tahun 2002, saat ini beliau masih aktif sebagai Vice President Pengembangan Talenta Eksekutif pada Bidang Pengembangan Talenta Eksekutif Divisi Pengembangan Talenta Direktorat Legal dan Manajemen Human Capital (2024-sekarang). Adapun 5 jabatan terakhir yang pernah dijabat beliau diantara adalah Vice President Pengembangan Talent A Area 7 pada Bidang Pengembangan Talenta Area 7 Divisi Pengembangan Talenta Direktorat Legal dan Manajemen Human Capital (2022-2024); Vice President Pengembangan Talenta Area 7 pada Divisi Pengembangan Talenta Direktorat Manajemen Sumber Daya Manusia (2022); Vice President Pengembangan Talent A Area 4 pada Divisi Pengembangan Talenta Direktorat Manajemen Sumber Daya Manusia (2021-2022); Senior Manager SDM dan Umum pada Unit Induk Wilayah Aceh (2019-2021)	Started his career at PT PLN (Persero) in 2002, and is currently serving as Vice President of Executive Talent Development in the Executive Talent Development Division under the Directorate of Legal and Human Capital Management (2024-present). His five most recent positions include Vice President of Talent Development Area A7 in the Area 7 Talent Development Division under the Directorate of Legal and Human Capital Management (2022-2024); Vice President of Talent Development Area 7 in the Talent Development Division under the Directorate of Human Resource Management (2022); Vice President of Talent Development Area A4 in the Talent Development Division under the Directorate of Human Resource Management (2021-2022); and Senior Manager of Human Resources and General Affairs at the Aceh Regional Main Unit (2019-2021).
Dasar hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.014.SK/DK-PLNIP/2024 tanggal 19 September 2024	Board of Commissioners' Decision Letter No. 014. SK/DK-PLNIP/2024 dated September 19, 2024
Periode Jabatan Term of Office	Periode Pertama	First Period
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors, but has an affiliation with the Majority and Controlling Shareholder.
Rangkap Jabatan di PT PLN Indonesia Power Concurrent Positions at PLN Indonesia Power	Tidak Ada	None
Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain Concurrent Positions in other companies	Vice President Pengembangan Talenta Eksekutif pada Bidang Pengembangan Talenta Eksekutif Divisi Pengembangan Talenta Direktorat Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero) Kantor Pusat.	Vice President of Executive Talent Development in the Executive Talent Development Division of Talent Development Department of Directorate of Legal and Human Capital Management at PT PLN (Persero) Head Office.



Alvin Nur Widjanti

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration Committee

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/ Pance, Date of Birth	55 tahun per 31 Desember 2024 / Jakarta 5 November 1969	55 years old as of December 31, 2024/Jakarta, November 5, 1969
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi	Bekasi

Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Trisakti-Jakarta (1995) dan Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta (1997)	Bachelor of Civil Engineering degree from Universitas Trisakti, Jakarta (1995), and Master of Management degree from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997).
Sertifikasi Certification	Sertifikasi <i>Qualified Risk Management Professional</i>	Certification on <i>Qualified Risk Management Professional</i>
Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Work Experience	Sebelum menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di PT PLN Indonesia Power, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subbidang Riset BUMN II (2019-2020), Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan Jasa Survei dan Konsultan Ia-1(2015-2019), Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi Ila (2014-2015).	Before serving as a member of the Nomination and Remuneration Committee at PT PLN Indonesia Power, she held positions as Head of the SOE Research Subdivision II (2019-2020), Head of the Financial Services, Survey, and Consulting Business Subdivision Ia-1(2015-2019), and Head of the Banking and Insurance Business Subdivision Ila (2014-2015).
Dasar hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 010.SK/DK-PLNIP/2023 tentang pembentukan komite NR tanggal 21 desember 2023.	Board of Commissioners' Decision Letter No. 010. SK/DK-PLNIP/2023 concerning the formation of the Nomination and Remuneration Committee dated December 21, 2023.
Periode Jabatan Term of Office	Periode kedua	Second Period
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Majority and Controlling Shareholders.
Rangkap Jabatan di PT PLN Indonesia Power Concurrent Positions at PLN Indonesia Power	Tidak Ada	None
Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain Concurrent Positions in other companies	Penata Kelola Perusahaan Negara Muda pada Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung	Junior State-Owned Enterprise Governance Officer in the Deputy Assistant for Tourism and Supporting Services.

Pernyataan Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Statement of Independence of Nomination and Remuneration Committee's Members

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan menyatakan independensinya untuk senantiasa bekerja secara profesional, independen dan objektif serta terbebas dari intervensi atau hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

All members of the Company's Nomination and Remuneration Committee declare their independence to consistently work professionally, independently, and objectively, and to remain free from any interventions or matters that could potentially cause conflicts of interest.

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

Table of Independence of Nomination and Remuneration Committee in 2024

Aspek Independensi Independence Aspect		Iskandar Simorangkir	Lukmanul Hakim	Denny Triyanto	Linda Agustina
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	Having financial relationships with the Board of Commissioners and the Board of Directors	X	X	X	X
Memiliki Hubungan kepengurusan di Indonesia Power, anak Perusahaan maupun Perusahaan afiliasi	Having managerial relationships at Indonesia Power, its subsidiaries, or affiliated companies	X	X	X	X
Memiliki Hubungan kepemilikan saham di Perusahaan	Having share ownership relationships in the Company	X	X	X	X

Aspek Independensi Independence Aspect		Iskandar Simorangkir	Lukmanul Hakim	Denny Triyanto	Linda Agustina
Memiliki Hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	Having family relationships with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or other members of the Nomination and Remuneration Committee	X	X	X	X
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat Pemerintah Daerah	Serving as an official of a political party or a regional government official	X	X	X	X
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah	Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah	X	X	X	X

Keterangan: ✓ : Iya X: Tidak

Remarks: ✓ : Yes X: No

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Work Guidelines

Pedoman pelaksanaan mengenai tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab dan hak-hak KNR diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang dituangkan dalam Piagam KNR yang disepakati oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No 008.SK/DK-PLNIP/2023 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 27 September 2023 sebagai pembaharuan Piagam KNR PT Indonesia Power tanggal 17 Oktober 2023.

The guidelines for the implementation of the duties, authorities, obligations, responsibilities, and rights of the Nomination and Remuneration Committee (NRC) are further regulated in the provisions set forth in the NRC Charter, which was agreed upon by the Board of Commissioners through the Board of Commissioners' Decision Letter No. 008.SK/DK-PLNIP/2023 on the Nomination and Remuneration Committee Charter dated September 27, 2023, as an update to the NRC Charter of PT Indonesia Power dated October 17, 2023.

Pembaharuan Piagam KNR PT PLN Indonesia Power telah merujuk pada Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

The updated NRC Charter of PT PLN Indonesia Power refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises PER-2/MBU/03/2023 concerning the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Ruang Lingkup Piagam KNR PT PLN Indonesia Power terdiri dari:

The Scope of the NRC Charter of PT PLN Indonesia Power consists of:

Bab I Chapter I	Pendahuluan	Introduction
Bab II Chapter II	Maksud dan Tujuan	Purpose and Objectives
Bab III Chapter III	Fungsi dan Tugas Pokok Komite Nominasi dan Remunerasi	Functions and Main Duties of the Nomination and Remuneration Committee
Bab IV Chapter IV	Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi	Obligations, Responsibilities, and Authorities of the Nomination and Remuneration Committee
Bab V Chapter V	Anggota dan Organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi	Members and Organizational Structure of Nomination and Remuneration Committee
Bab VI Chapter VI	Kode Etik Komite Nominasi dan Remunerasi	Code of Conduct of the Nomination and Remuneration Committee
Bab VII Chapter VII	Rapat	Meeting
Bab VIII Chapter VIII	Penilaian Kinerja	Performance Assessment
Bab IX Chapter IX	Honorarium dan Pembebanan Biaya	Honorarium and Expenses
Bab X Chapter X	Penutup	Conclusion

Fungsi dan Tugas Pokok Komite Nominasi dan Remunerasi

Functions and Main Duties of Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah suatu unit organisasi di bawah Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam rangka tercapainya *Good Corporate Governance* di Perusahaan. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:

1. Menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan dan BoD-1
2. Sistem remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan

Adapun tugas pokok dan fungsi KNR adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, pedoman, strategi, dan sistem SDM termasuk didalamnya melakukan review secara berkala atas pengelolaan Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*), melakukan *monitoring*, evaluasi terhadap sistem dan prosedur termasuk pelaksanaannya;
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi;
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*);
4. Melakukan analisa memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM dan organisasi yang dilakukan Perusahaan;
5. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Menyiapkan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris;
7. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebelum diajukan kepada RUPS.
8. Bersama Komite lainnya melakukan analisa dan memberi masukan sesuai dengan bidang komite kepada Dewan Komisaris atas:
 - a. Pelaksanaan Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan;
 - b. RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan);
 - c. RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan);
 - d. Laporan Tahunan, Triwulanan dan Laporan Kinerja bulanan;

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) is an organizational unit under the Board of Commissioners that assists the Board of Commissioners in fulfilling its responsibilities to achieve Good Corporate Governance within the Company. The NRC is tasked to assist the Board of Commissioners in:

1. Establishing criteria for the selection of candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of Subsidiaries and BoD-1.
2. The remuneration system for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

The main duties and functions of the NRC include:

1. Analyzing, providing input, and recommending policies, guidelines, strategies, and HR systems to the Board of Commissioners, including reviewing periodically the management of the Talent Management System, monitoring, and evaluating the system and procedures including their implementation;
2. Evaluating the Talent Classification system and procedures conducted by the Board of Directors;
3. Validating and calibrating the Talent proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners/Supervisory Board (Selected Talent) to produce a list of Talent to be nominated by the Board of Commissioners/Supervisory Board to the GMS/Minister (Nominated Talent);
4. Analyzing, providing input, and recommending on the implementation of HR management and organizational activities conducted by the Company;
5. Preparing development program proposals for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
6. Preparing evaluations of remuneration policies for employees requiring approval or feedback from the Board of Commissioners;
7. Evaluating candidates for Deputy of the Company proposed as members of the Board of Directors or Board of Commissioners of Subsidiaries before submission to the GMS;
8. Collaborating with other Committees by analyzing and providing input in their respective areas to the Board of Commissioners on:
 - a. Implementing the Company's Articles of Association and Board Manual;
 - b. Company's Long-Term Plan (RJPP);
 - c. Company's Work Plan and Budget (RKAP);
 - d. Annual, quarterly, and monthly performance reports;

e. GCG (<i>Good Corporate Governance</i>); f. KPI (<i>Key Performance Indicator</i>) Perseroan; g. KPI Dewan Komisaris. 9. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris khususnya atas kebijakan dan pelaksanaan kegiatan: a. KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) dan <i>Malcolm Baldrige</i>; b. Pengembangan Teknologi Informasi. 10. Mempelajari, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap Laporan Manajemen Kinerja SDM dan Organisasi dan Laporan K3L yang disusun oleh Direksi. 11. Melakukan analisa, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan-usulan Direksi dalam: a. Program Pengembangan SDM dan Organisasi yang mendukung <i>Human Capital Readiness</i> (HCR) dan <i>Organizational Capital Readiness</i> (OCR); b. Nominasi pejabat satu tingkat di bawah Direksi; c. Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. 12. Melakukan analisa dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan LK3 (Lingkungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja) perusahaan; 13. Melakukan analisa dan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi perusahaan serta integrasi pengelolaannya; 14. Melakukan analisa dan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan budaya perusahaan, hubungan industrial serta pelaksanaan <i>reward and punishment</i> pegawai serta menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah menerapkan sistem nominasi dan remunerasi PT PLN (Persero) yang mengacu kepada <i>best practice</i>; 15. Menyusun rencana kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan pembebanan pembiayaan kegiatan pada anggaran Dewan Komisaris, melaksanakan rapat-rapat komite, membuat risalah rapat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas komite secara berkala kepada Dewan Komisaris; 16. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian, memastikan selesainya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai lingkup tugas dan kewajiban komite Dewan Komisaris; 17. Menjaga kerahasiaan data serta informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dewan Komisaris.	e. Good Corporate Governance (GCG); f. Company Key Performance Indicators (KPI); g. Board of Commissioners' KPI. 9. Analyzing, providing input, and recommending especially on policies and implementation regarding: a. Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) and Malcolm Baldrige; b. Information Technology Development. 10. Studying, evaluating, and providing input on the HR and Organizational Performance Management Report and OHSE Report prepared by the Board of Directors; 11. Analyzing, providing input, and recommending on proposals from the Board of Directors regarding: a. HR and Organizational Development Programs supporting Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR); b. Nominating officials one level below the Board of Directors; c. Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors. 12. Analyzing and recommending policies, strategies, and implementation related to managing Occupational Health, Safety and Environment (OHSE) within the Company; 13. Analyzing, providing input, and recommending policies, strategies, and implementation of the Company's information systems management and integration; 14. Analyzing, providing input, and recommending policies, strategies, and implementation of Company culture management, industrial relations, employee reward and punishment systems, as well as conducting review and supervision to ensure the Board of Directors has implemented PT PLN (Persero)'s nomination and remuneration system referring to best practices; 15. Preparing activity plans for the NRC with financing charged to the Board of Commissioners' budget, conducting committee meetings, preparing meeting minutes, and submitting periodic reports on committee duties implementation to the Board of Commissioners. 16. Identifying matters requiring attention, ensuring completion, and performing other tasks assigned by the Board of Commissioners in accordance with the scope of duties and obligations of the committee. 17. Maintaining the confidentiality of Company data and information according to applicable provisions at the Board of Commissioners.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Report on the Implementation of Nomination and Remuneration Committee's Activities

Selama tahun 2023, komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan program kerja yang telah disusun, antara lain:

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee carried out various activities in the implementation of its duties and responsibilities in accordance with the established work programs, including:

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee's Meetings

Kebijakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pertemuan/rapat berkala KNR dilakukan sebagai berikut:

1. Rapat KNR akan dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam satu bulan;
2. Melakukan pertemuan dengan pihak direktorat *Human Capital* dan Administrasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam dua bulan
3. Rapat berkala atau laporan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
4. Dalam pelaksanaan rapat KNR dapat mengundang Direktorat *Human Capital* dan Administrasi untuk memberikan informasi yang diperlukan,

The meeting policy of the Nomination and Remuneration Committee is regulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter. In line with this policy, regular meetings of the Committee are held as follows:

1. Committee meetings are to be held at least once a month;
2. Meetings with the Directorate of Human Capital and Administration are to be held at least once every 2 (two) months;
3. Regular meetings or reporting to the Board of Commissioners are to be held at least once every 3 (three) months;
4. In the execution of its meetings, the Committee may invite the Directorate of Human Capital and Administration to provide necessary information.

Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 27 kali rapat yang terdiri dari rapat internal KNR, Rapat koordinasi dengan Direktur Management Human Capital; dan Rapat berkala dengan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Implementation of Nomination and Remuneration Committee Meeting Frequency

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee held a total of 27 meetings, consisting of internal committee meetings, coordination meetings with the Director of Human Capital Management, and regular meetings with the Board of Commissioners, as follows:

Keterangan Description	Rapat Internal KNR NRC Internal Meetings	Rapat berkala dengan Dewan Komisaris Regular Meetings with the Board of Commissioners	Rapat koordinasi dengan Direktur Management Human Capital Coordinating Meetings with Director of Human Capital Management	Jumlah Rapat Total Meetings
Rencana Plan	11	3	4	29
Realisasi Realization	3	16	12	40

Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi

Berikut kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat selama tahun 2024:

Attendance of the Nomination and Remuneration Committee

The following is the attendance record of the Nomination and Remuneration Committee at meetings during 2023.

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di KNR Position in NRC	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency
Haryanto WS	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite* Head of Committee *	27	27	100%
Arief Budiman	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua 1 Deputy Head 1	27	27	100
Yoserianto ¹	-	Sekretaris Komite merangkap Anggota Secretary of the Committee concurrently serving as a Member	3	3	100
Mundhakir ²	-	Sekretaris Komite merangkap Anggota Secretary of the Committee concurrently served as a Member	2	2	100
Sumarno ³	-	Sekretaris Komite merangkap Anggota Secretary of the Committee concurrently served as a Member	22	22	100
Alvin Nur Widjajanti	-	Anggota Anggota	27	27	100

Keterangan:

- 1 Menjabat sebagai Sekretaris Komite dan Anggota sejak 19 September 2024
- 2 Berhenti menjabat sebagai Sekretaris Komite dan Anggota sejak 19 September 2024
- 3 Berhenti menjabat sebagai Sekretaris Komite dan Anggota sejak 7 Februari 2024

Remarks:

- 1 Serving as Secretary of the Committee and Member since September 19, 2024
- 2 Resigning from the position as Secretary of the Committee and Member as of September 19, 2024
- 3 Resigning from the position as Secretary of the Committee and Member as of February 7, 2024

Kebijakan dan Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan Pelatihan dan peningkatan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu Program Kerja Komite KNR. Sejalan dengan Program Kerja KNR, pelatihan KNR dapat dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi maupun konferensi/seminar.

Selama tahun 2024, Anggota KNR PLN Indonesia Power telah melakukan berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi sebagai berikut:

Policy and Training of Nomination and Remuneration Committee

The policy on training and competency development for the Nomination and Remuneration Committee refers to the NRC Committee Work Program. In line with the NRC Work Program, training for the NRC may be carried out through training programs, certifications, or conferences/seminars.

Throughout 2024, members of the NRC of PLN Indonesia Power participated in various training and competency development programs as follows:

Nama Name	Nama Pelatihan Training Name	Lembaga Penyelenggara Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Haryanto WS	Pelatihan Teknologi Pembakaran Batubara dan Penerapan AI Training on Coal Combustion Technology and AI Application	Badan Riset dan Inovasi Nasional National Research and Innovation Agency	29 - 30 April 2024 April 29 - 30, 2024	Tangerang

Kunjungan Komite Nominasi dan Remunerasi

Guna memberikan motivasi kepada seluruh unit Perusahaan dan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi dan gambaran atas kemajuan/perkembangan serta permasalahan yang dihadapi unit, komite melakukan kunjungan atas persetujuan dari Dewan Komisaris. Berikut daftar kunjungan Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2024:

Nama Nama	Agenda	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Haryanto WS	Kunjungan Kerja ke PLTP Gunung Salak Working Visit to Gunung Salak Geothermal Power Plant	16 Desember 2024 December 16, 2024	Bogor
Arief Budiman	Kunjungan Kerja ke PLTP Gunung Salak Working Visit to Gunung Salak Geothermal Power Plant	16 Desember 2024 December 16, 2024	Bogor
Yoserianto	Kunjungan Kerja ke PLTP Gunung Salak Working Visit to Gunung Salak Geothermal Power Plant	16 Desember 2024 December 16, 2024	Bogor
Alvin Nur Widjajanti	Kunjungan Kerja ke PLTP Gunung Salak Working Visit to Gunung Salak Geothermal Power Plant	16 Desember 2024 December 16, 2024	Bogor

Nomination and Remuneration Committee's Visits

In order to motivate all units of the Company and to obtain information, clarification, and an overview of the progress, developments, and challenges faced by each unit, the Committee conducts visits upon approval from the Board of Commissioners. The following is a list of visits conducted by the Nomination and Remuneration Committee in 2024:

Penyampaian Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi

Sejalan dengan yang diatur dalam piagam KNR bahwa KNR wajib menyampaikan Laporan berkala, untuk itu pada tahun 2024, KNR telah menyampaikan Laporan Triwulanan kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

Submission of Nomination and Remuneration Committee's Report

In line with the provisions set out in the NRC Charter, which require the NRC to submit periodic reports, in 2024 the NRC submitted Quarterly Reports to the Board of Commissioners as follows:

Keterangan Description	Tanggal Date
Laporan KNR TW I Tahun 2024 NRC Report for Q1 2024	30 April 2024 April 30, 2024
Laporan KNR TW II Tahun 2024 NRC Report for Q2 2024	28 Juli 2024 July 28, 2024
Laporan KNR TW III Tahun 2024 NRC Report for Q3 2024	5 Oktober 2024 October 5, 2024
Laporan KNR TW IV Tahun 2024 NRC Report for Q4 2024	22 Januari 2024 January 22, 2024

Aktivitas Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah melakukan beberapa kegiatan dan memberikan beberapa rekomendasi diantaranya mencakup tentang:

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Nominasi dan Remunerasi
2. RJP dan RKAP PLN Indonesia Power.
3. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi.

Nomination and Remuneration Committee's Activities

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee also carried out several activities and provided various recommendations, including the following:

1. Implementation of policies in the field of nomination and remuneration.
2. RJPP and RKAP of PLN Indonesia Power.
3. Evaluating the system and procedures for Talent Classification conducted by the Board of Directors.

4. Laporan Kinerja dan Manajemen Perusahaan.
5. Evaluasi Dokumen Nominasi dan Remunerasi yang disampaikan oleh Direksi dalam pengajuan program Perusahaan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6. KPI Manajemen PT Indonesia Power di bidang SDM, yaitu mengenai *Human Capital Readiness* (HCR), *Organization Capital Readiness* (OCR) dan *Information Capital Readiness* (ICR).

4. Company performance and management reports.
5. Evaluation of nomination and remuneration documents submitted by the Board of Directors in relation to corporate programs requiring approval from the Board of Commissioners.
6. Management KPIs of PT Indonesia Power in the field of human capital, including Human Capital Readiness (HCR), Organizational Capital Readiness (OCR), and Information Capital Readiness (ICR).

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee's Performance Assessment

Penilaian kinerja Komite didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dievaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara triwulanan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk periode jabatan berikutnya.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja KNR antara lain mencakup Kontribusi terhadap pencapaian target Tim, Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi, Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim, Kerjasama dalam Tim, serta Mutu dan Kualitas Konsep. Berikut hasil penilaian Kinerja KNR tahun 2024:

The performance evaluation of the Committee is based on the provisions established by the Board of Commissioners while considering applicable regulations. The performance of the Nomination and Remuneration Committee is evaluated quarterly by the Board of Commissioners based on the realization and completion of the work program outlined in the Work Plan and Budget of the Nomination and Remuneration Committee. The results of this evaluation serve as a consideration for the Board of Commissioners in reappointing and/or dismissing members of the Nomination and Remuneration Committee for the next term of office.

The criteria used in evaluating the performance of the NRC include contributions to achieving team targets, the number of studies, analyses, and recommendations, the level of activity in team activities, teamwork, as well as the quality and standard of concepts. The following are the performance evaluation results of the NRC for 2024:

Kriteria Penilaian Assessment Parameter	Hasil Penilaian Assessment	
	Yoserianto	Alvin Nur Widjajanti
Kontribusi terhadap pencapaian target Contribution to achieving team targets	4	4
Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi Number of reviews, analyses, and recommendations	4	4
Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim Level of activeness in team activities	4	4
Kerjasama dalam Tim Teamwork	4	4
Mutu dan Kualitas Konsep Quality and standard of concepts	4	4

Keterangan skor penilaian: 1= Tidak Sesuai Harapan; 2= Kurang Sesuai Harapan; 3= Sesuai Harapan; 4= Melampaui Harapan.

Score explanation: 1 = Unsatisfactory; 2 = Improvement Needed; 3 = Meets Expectations

Komite Investasi dan Manajemen Risiko Investment and Risk Management Committee

Dewan Komisaris membentuk Komite Investasi dan Manajemen Risiko (KIMR) dengan tujuan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan nasehat terhadap kebijakan-kebijakan Direksi dalam mengelola Perusahaan seperti melakukan penilaian terhadap kajian risiko yang dilakukan oleh Manajemen Perusahaan dan hal lainnya sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan agar memperoleh hasil dan manfaat serta dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan.

The Board of Commissioners established the Investment and Risk Management Committee (IRMC) with the aim of assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory and advisory functions regarding the policies of the Board of Directors in managing the Company. This includes assessing risk studies conducted by the Company's Management and other matters as mandated by the Company's Articles of Association, in order to achieve optimal results, benefits, and positive impacts from the Company's performance.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Investasi dan Manajemen Risiko Appointment and Dismissal of Investment and Risk Management Committee

Anggota KIMR dipilih dan diangkat oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari personil yang memiliki integritas, kompetensi, profesional, serta jujur. Anggota KIMR dapat berasal dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan atau dari luar Perusahaan yang bersangkutan. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KIMR dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

Members of the Investment and Risk Management Committee (IRMC) are selected and appointed by the Board of Commissioners and consist of individuals who possess integrity, competence, professionalism, and honesty. IRMC members may come from the Company's Board of Commissioners or from outside the Company. The appointment and dismissal of IRMC members are carried out by the Board of Commissioners and reported to the GMS.

Pengangkatan Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko PLN Indonesia Power telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dan No. PER-3/MBU/03/2023 yaitu:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang investasi dan risiko;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan yang bersangkutan;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
5. Syarat lain yang ditetapkan dalam piagam komite Investasi dan Manajemen Risiko.

Pemberhentian Komite Investasi dan Manajemen Risiko dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya atau diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

The appointment of members of the Investment and Risk Management Committee of PLN Indonesia Power complies with the requirements stipulated in the Minister of SOEs Regulations No. PER-2/MBU/03/2023 and No. PER-3/MBU/03/2023, which are:

1. Having good integrity and sufficient knowledge and work experience in the fields of investment and risk;
2. Having no personal interests or connections that could cause negative impacts or conflicts of interest with the Company concerned;
3. Being able to communicate effectively;
4. Being able to allocate sufficient time to complete their duties; and
5. Other requirements set forth in the Investment and Risk Management Committee charter.

The dismissal of Investment and Risk Management Committee members may occur when their term ends or if they are dismissed due to failing to meet the established performance standards and/or incompetence in carrying out their duties based on the Board of Commissioners' decision.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Structure and Composition of Investment and Risk Management Committee Members

Pada tahun 2024, terdapat perubahan susunan dan komposisi anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian sebagai berikut:

1. Mengangkat Sdr. Djoko Siwanto sebagai Ketua KIMR dan memberhentikan Sdr. Iskandar Simorangkir sebagai Ketua KIMR berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 008.SK/DK-PLNIP/2024 tentang Pembentukan Investasi dan Manajemen Risiko pada Dewan Komisaris tanggal 1 April 2024;
2. Memberhentikan Sdr. Robiatna Agus Fanhar sebagai anggota KIMR berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 015.SK/DK-PLNIP/2024 tentang Pembentukan Investasi dan Manajemen Risiko pada Dewan Komisaris tanggal 25 September 2024

Sehingga perubahan susunan dan Komisaris anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko PLN Indonesia Power selama tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

In 2024, there were changes in the structure and composition of the Investment and Risk Management Committee (IRMC) due to the following appointments and dismissals:

1. Mr. Djoko Siwanto was appointed as Head of the IRMC and Mr. Iskandar Simorangkir was dismissed from his position as Head of the IRMC based on the Board of Commissioners' Decision Number: 008.SK/DK-PLNIP/2024 on the Establishment of the Investment and Risk Management Committee under the Board of Commissioners dated April 1, 2024;
2. Mr. Robiatna Agus Fanhar was dismissed as a member of the IRMC based on the Board of Commissioners' Decision Number: 015.SK/DK-PLNIP/2024 on the Establishment of the Investment and Risk Management Committee under the Board of Commissioners dated September 25, 2024.

Thus, the changes in the structure and composition of the Investment and Risk Management Committee members of PLN Indonesia Power during the 2024 fiscal year are as follows:

1 Januari 2024 - 1 April 2024 January 1, 2024 - April 1, 2024			1 April 2024 - 25 September 2024 April 1, 2024 - September 25, 2024			25 September 2024 - 31 Desember 2024 September 25, 2024 - December 31, 2024		
Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di KIMR Position in IRMC	Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di KIMR Position in IRMC	Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di KIMR Position in IRMC
Iskandar Simorangkir	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Head of Committee	Djoko Siwanto	Komisaris Commissioner	Ketua Komite Head of Committee	Djoko Siwanto	Komisaris Commissioner	Ketua Komite Head of Committee
M.P Dwinugroho	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Deputy Head	M.P Dwinugroho	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Deputy Head	M.P Dwinugroho	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Deputy Head
Dewanto	-	Sekretaris Komite merangkap Anggota Secretary of the Committee concurrently serving as a Member	Dewanto	-	Sekretaris Komite merangkap Anggota Secretary of the Committee concurrently serving as a Member	Dewanto	-	Sekretaris Komite merangkap Anggota Secretary of the Committee concurrently serving as a Member
Robiatna Agus Fanhar	-	Anggota Member	Robiatna Agus Fanhar	-	Anggota Member	Ferry Triansyah	-	Anggota Komite Anggota Komite
Ferry Triansyah	-	Anggota Member	Ferry Triansyah	-	Anggota Member			

Susunan dan komposisi Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam Komite dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 pasal 138 yaitu Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko adalah anggota Dewan Komisaris yaitu yang dijabat oleh Sdr. Djoko Siswanto, serta anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko PLN Indonesia Power memiliki latar belakang pengetahuan, pengalaman kerja yang cukup di bidang investasi dan manajemen risiko sebagaimana yang tercantum dalam Profil Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko.

The structure and composition of the Investment and Risk Management Committee are determined in accordance with the provisions set forth in the Committee Charter and Article 138 of the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023, which states that the Head of the Investment and Risk Management Committee must be a member of the Board of Commissioners, in this case, Mr. Djoko Siswanto, and the members of the Investment and Risk Management Committee of PLN Indonesia Power possess the appropriate background, knowledge, and work experience in the fields of investment and risk management, as outlined in the Profile of the Investment and Risk Management Committee Members.

Profil Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Profile of Investment and Risk Management Committee Members

Berikut profil anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko PLN Indonesia Power per 31 Desember 2024:

The following is the profile of the members of the Investment and Risk Management Committee of PLN Indonesia Power as of December 31, 2024:



Djoko Siswanto

Ketua Komite
Head of Committee

Diangkat sebagai Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko PT PLN Indonesia Power berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 008.SK/DK-PLNIP/2024 tanggal 1 April 2024.

Informasi lebih lanjut terkait Usia, Kewarganegaraan, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan diuraikan pada bab Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini

Periode Jabatan: Pertama

Appointed as Head of the Investment and Risk Management Committee of PT PLN Indonesia Power based on the Board of Commissioners' Decision Number: 008.SK/DK-PLNIP/2024 dated April 1, 2024.

Further information regarding Age, Nationality, Educational Background, Service History/Work Experience, and Concurrent Positions is presented in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Term of Office: First Period



M.P Dwinugroho

Wakil Ketua
Deputy Head

Diangkat sebagai Wakil Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko Indonesia Power berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 009.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 18 Oktober 2023

Appointed as Deputy Head of the Investment and Risk Management Committee of Indonesia Power based on the Board of Commissioners' Decision Number: 009.SK/DK-PLNIP/2023 dated October 18, 2023.

Informasi lebih lanjut terkait Usia, Kewarganegaraan, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan diuraikan pada bab Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini.

Further information regarding Age, Nationality, Educational Background, Service History/Work Experience, and Concurrent Positions is presented in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Periode Jabatan: Kedua

Term of Office: Second Period



Dewanto

Sekretaris merangkap Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Secretary of Investment and Risk Management Committee concurrently serving as a Member

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/ Place, Date of Birth	54 tahun per 31 Desember 2024/Madiun, 29 Agustus 1972	54 years old as of December 31, 2024/Madiun, August 29, 1972
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Kimia di Universitas Wahid Hasyim Semarang (2016)	Bachelor's Degree in Chemical Engineering from Universitas Wahid Hasyim University, Semarang (2016).
Sertifikasi Certification	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Work Experience	Selain menjabat sebagai Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko, beliau juga pernah menjabat sebagai Manajer Aneka Energi PT PLN (Persero) (2018 - 2021), Deputy Manajer Energi Alternatif PT PLN (Persero) (2017 - 2018), Deputy Manajer Energi Primer dan Pelabuhan Unit 3-4 PT PLN (Persero) (2012 - 2017).	In addition to serving as a Member of the Investment and Risk Management Committee, he previously served as Manager of Various Energy at PT PLN (Persero) (2018 - 2021), Deputy Manager of Alternative Energy, PT PLN (Persero) (2017 - 2018), and Deputy Manager of Primary Energy and Ports Unit 3-4, PT PLN (Persero) (2012 - 2017).
Dasar hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 009.SK/DKPLNIP/2023 tanggal 18 Oktober 2023	Board of Commissioners' Decision Letter Number: 009.SK/DKPLNIP/2023 dated October 18, 2023.
Periode Jabatan Term of Office	Periode Ketiga	Third Period
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no affiliate relationship with other members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors; however, he does have an affiliate relationship with the Majority and Controlling Shareholder.
Rangkap Jabatan di PT PLN Indonesia Power Concurrent Positions at PLN Indonesia Power	Tidak Ada	None
Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain Concurrent Positions in other companies	Vice President Aneka Energi PT PLN (Persero)	Vice President of Various Energy at PT PLN (Persero)



Ferry Triansyah

Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Member of Investment and Risk Management Committee

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/ Place, Date of Birth	56 tahun per 31 Desember 2024/20 Januari 1968	56 years old as of December 31, 2024/January 20, 1968
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Mesin di Universitas Sumatera Selatan (1992) dan Magister Teknik Elektro di Politeknik Negeri Jakarta (2022)	Bachelor's degree in Mechanical Engineering from the Universitas Sumatera Selatan (1992) and Master's degree in Electrical Engineering from Politeknik Negeri Jakarta (2022).
Sertifikasi Certification	Sertifikasi Kompetensi, Asesor Kompetensi Utama Pembangkit Tenaga (DJK)	Competency Certification, Assessor of the Core Competence of Power Generation (DJK)

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Work Experience	Sebelum menjabat sebagai Komite Investasi dan Manajemen Risiko, beliau juga pernah menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya selaku Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (2022), Analis Kebijakan Madya selaku Koordinator Harga Tenaga Listrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (2021), Kasubdit Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (2019), dan Kasubdit Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (2016)	Before serving as a member of the Investment and Risk Management Committee, he held several key positions, including Senior Policy Analyst and Coordinator of Electricity Business Services at the Directorate General of Electricity (2022), Senior Policy Analyst and Coordinator of Electricity Pricing at the Directorate General of Electricity (2021), Head of Sub-Directorate for Electricity Business Preparation at the Directorate General of Electricity (2019), and Head of Sub-Directorate for Technical Electricity Personnel at the Directorate General of Electricity (2016).
Dasar hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 009.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 18 Oktober 2023	Board of Commissioners' Decision Letter Number: 009.SK/DK-PLNIP/2023 dated October 18, 2023
Periode Jabatan Term of Office	Periode Kedua	Second Period
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no affiliate relationship with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors, but he does have an affiliate relationship with the Majority and Controlling Shareholder.
Rangkap Jabatan di PT PLN Indonesia Power Concurrent Positions at PLN Indonesia Power	Tidak Ada	None
Rangkap Jabatan pada perusahaan Lain Concurrent Positions in other companies	Analis Kebijakan Madya selaku Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagakerjaan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Associate Policy Analyst as Coordinator of Employment Business Services at the Directorate General of Electricity

Masa Jabatan Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Term of Office of Investment and Risk Management Committee

Sejalan dengan Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko, masa jabatan Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko dipilih oleh Dewan Komisaris dari anggota Dewan Komisaris dengan masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. Masa kerja wakil Ketua dan Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

In line with the Investment and Risk Management Committee Charter, Head of the Investment and Risk Management Committee is appointed by the Board of Commissioners from its members for a term of 1(one) year and may be reappointed for up to 2 (two) consecutive terms. The term of office for the Deputy Head and Members of the Investment and Risk Management Committee is a maximum of 1 (one) year and may be reappointed for the following term.

Pernyataan Independensi Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Statement of Independence of Investment and Risk Management Committee Members

Seluruh anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko Perusahaan menyatakan independensinya untuk senantiasa bekerja secara profesional, independen dan objektif serta terbebas dari intervensi atau hal-hal yang berpotensi

All members of the Company's Investment and Risk Management Committee declare their independence to consistently work professionally, independently, and objectively, free from any intervention or matters that could

menimbulkan benturan kepentingan. Independensi anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko tercermin dalam hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, serta kepemilikan saham di PLN Indonesia Power dan perusahaan lainnya sebagaimana tabel berikut:

potentially cause conflicts of interest. The independence of the members of the Investment and Risk Management Committee is reflected in family relationships, financial matters, management roles, and share ownership in PLN Indonesia Power and other companies, as shown in the following table:

Tabel Independensi Komite Investasi dan Manajemen Risiko Tahun 2024

Table of Independence of Investment and Risk Management Committee in 2024

Aspek Independensi Independence Aspect		Djoko Siswanto	M.P Dwinugroho	Dewanto	Ferry Triansyah
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	Having financial relationships with the Board of Commissioners and the Board of Directors	X	X	X	X
Memiliki Hubungan kepengurusan di Indonesia Power, anak Perusahaan maupun Perusahaan afiliasi	Having managerial relationships at Indonesia Power, its subsidiaries, or affiliated companies	X	X	X	X
Memiliki Hubungan kepemilikan saham di Perusahaan	Having share ownership relationships in the Company	X	X	X	X
Memiliki Hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko	Having family relationships with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or other members of the Investment and Risk Management Committee	X	X	X	X
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah	Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah	X	X	X	X

Keterangan: ✓ : Iya X: Tidak

Remarks: ✓ : Yes X: No

Pedoman Kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Investment and Risk Management Committee's Work Guidelines

Pedoman kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko diatur dalam Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001.SK/DK-PLNIP/2025 Tentang Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko PLN Indonesia Power tanggal 6 Januari 2025 sebagai pembaharuan Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko 10 Desember 2019.

The work guidelines of the Investment and Risk Management Committee are regulated in the Investment and Risk Management Committee Charter, which was ratified through the Board of Commissioners' Decision Letter Number 001. SK/DK-PLNIP/2025 on the Investment and Risk Management Committee Charter of PLN Indonesia Power dated January 6, 2025, as an update to the Investment and Risk Management Committee Charter dated December 10, 2019.

Pembaharuan Piagam tersebut telah merujuk pada Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

This Charter update refers to the Ministry of SOEs Regulation PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Ruang Lingkup Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko PLN Indonesia Power terdiri dari :

The Scope of the Investment and Risk Management Committee Charter of PLN Indonesia Power consists of:

Bab I Chapter I	Pendahuluan	Introduction
Bab II Chapter II	Maksud dan Tujuan	Purpose and Objectives
Bab III Chapter III	Fungsi dan Tugas Pokok Komite Investasi dan Manajemen Risiko	Functions and Main Duties of the Investment and Risk Management Committee
Bab IV Chapter IV	Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Investasi dan Manajemen Risiko	Obligations, Responsibilities, and Authorities of the Investment and Risk Management Committee
Bab V Chapter V	Anggota dan Organisasi Komite Investasi dan Manajemen Risiko	Members and Organizational Structure of the Investment and Risk Management Committee
Bab VI Chapter VI	Kode Etik Komite Investasi dan Manajemen Risiko	Code of Conduct of the Investment and Risk Management Committee
Bab VII Chapter VII	Rapat	Meetings
Bab VIII Chapter VIII	Penilaian Kinerja	Performance Assessment
Bab IX Chapter IX	Honorarium dan Pembebanan Biaya	Honorarium and Expenses
Bab X Chapter X	Penutup	Conclusion

Fungsi dan Tugas Pokok Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Functions and Main Duties of Investment and Risk Management Committee

Komite Investasi dan Manajemen Risiko berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam tanggung jawab utamanya untuk:

1. Menjamin telah dilakukannya identifikasi serta kajian/analisis risiko secara independen, objektif dan profesional pada seluruh kegiatan Perusahaan.
2. Mendorong terciptanya sistem pengendalian risiko internal yang baik.
3. Meningkatkan kualitas hasil kajian/analisis risiko yang dilakukan oleh Manajemen Perusahaan.

Secara garis besar tugas pokok Komite Investasi dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris berupa penelaahan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko serta kajian Risiko yang dilakukan oleh Manajemen Perusahaan pada:
 - Kegiatan Perencanaan strategi Perusahaan
 - Kegiatan investasi Perusahaan
 - Kegiatan operasi Perusahaan
 - Kegiatan menganalisis dan menilai risiko bertanggung jawab bisnis Perusahaan antara lain menghadapi perkembangan *Disruptive Technology*
 - Kegiatan menganalisis dan menilai risiko pengembangan usaha Perusahaan utamanya dalam bidang EBT

The Investment and Risk Management Committee functions to assist the Board of Commissioners in its primary responsibilities to:

1. Ensuring that risk identification and risk studies/analyses are conducted independently, objectively, and professionally across all Company activities.
2. Encouraging the establishment of a sound internal risk control system.
3. Improving the quality of risk studies/analyses conducted by Company Management.

In general, the main duties of the Investment and Risk Management Committee are as follows:

1. Providing input to the Board of Commissioners in the form of a review of the implementation of Risk Management and risk assessments conducted by Company Management on:
 - The Company's strategic planning activities
 - The Company's investment activities
 - The Company's operational activities
 - Activities related to analyzing and assessing business risk responsibilities, including responses to developments in *Disruptive Technology*
 - Activities related to analyzing and assessing business development risks, particularly in the renewable energy sector

2. Memantau dan memastikan bahwa semua kegiatan Perusahaan yang ada didalam RJP dan RKAP telah memperhatikan prinsip-prinsip Manajemen Risiko 3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut hasil evaluasi terutama terhadap kebijakan yang mempunyai dampak keuangan yang signifikan 4. Memberikan rekomendasi kepada Manajemen Perusahaan melalui Dewan Komisaris untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk berbagi hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses kajian risiko 5. Pengawasan Kebijakan Mutu, Pelayanan dan Kepatuhan kegiatan bisnis PLN Indonesia Power 6. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	2. Monitoring and ensuring that all Company activities within the RJP and RKAP comply with Risk Management principles. 3. Providing input to the Board of Commissioners regarding follow-up actions from evaluations, especially for policies with significant financial impacts. 4. Providing recommendations to Company Management through the Board of Commissioners for designing and implementing Risk Management policies, including various measures to enhance the efficiency and effectiveness of the risk assessment process. 5. Supervising the Company's Quality, Service, and Compliance Policies in the business operations of PLN Indonesia Power. 6. Submitting reports to the Board of Commissioners. 7. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners as long as they remain within the scope of the Board Commissioners' duties and responsibilities in accordance with prevailing laws and regulations.

Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Obligation, Responsibilities, and Authority of Investment and Risk Management Committee

Komite Investasi dan Manajemen Risiko bersifat mandiri baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris:

1. Komite Investasi dan Manajemen Risiko wajib melaporkan segera hasil evaluasi yang telah dilakukan Dewan Komisaris, yaitu meliputi:
 - Laporan berkala, berisi pokok-pokok hasil kerjanya berdasarkan penugasan Dewan Komisaris
 - Laporan Khusus, berisikan kajian risiko yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan usaha Perusahaan
 - Rekomendasi sesuai hasil telaahan dan evaluasi terhadap Kajian Risiko yang telah dilakukan
2. Komite Investasi dan Manajemen Risiko berwenang untuk:
 - Memperoleh semua dokumen yang berkaitan dengan pembuatan Kajian Risiko
 - Memperoleh semua informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko
 - Memberikan usulan kepada Dewan Komisaris dalam menunjukan tenaga ahli/konsultan untuk membantu tugas-tugas Komite Investasi dan Manajemen Risiko

The Investment and Risk Management Committee operates independently in both the execution of its duties and its reporting, and is directly accountable to the Board of Commissioners:

1. The Investment and Risk Management Committee is required to promptly report the results of evaluations conducted to the Board of Commissioners, which include:
 - Periodic Reports, containing summaries of key results based on assignments from the Board of Commissioners
 - Special Reports, containing risk assessments that are considered to potentially disrupt the Company's business activities
 - Recommendations based on reviews and evaluations of conducted Risk Assessments
2. The Investment and Risk Management Committee has the authority to:
 - Obtaining all documents related to the preparation of Risk Assessments
 - Accessing all information necessary for the implementation of Risk Management
 - Submitting proposals to the Board of Commissioners regarding the appointment of experts/consultants to support the tasks of the Investment and Risk Management Committee

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Report on the Implementation of Investment and Risk Management Committee's Activities

Sepanjang tahun 2024, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan program kerja tahun 2024 yang telah disusun dan disepakati dengan Dewan Komisaris, antara lain:

Throughout 2024, the Investment and Risk Management Committee carried out various activities in accordance with the 2024 work program, which was prepared and approved in coordination with the Board of Commissioners, including:

Rapat Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Investment and Risk Management Committee's Meetings

Kebijakan Pelaksanaan rapat Komite Investasi dan Manajemen Risiko diatur dalam Piagam Investasi dan Manajemen Risiko. Sejalan dengan kebijakan rapat tersebut, pelaksanaan Rapat Komite Investasi dan Manajemen Risiko dapat diberlakukan sebagai berikut:

1. Rapat KIMR akan dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 3(tiga) bulan
2. Melakukan pertemuan dengan Divisi Manajemen Risiko dan *Compliance* serta Divisi Perencanaan Korporat c.q *Group of Corporate Risk Management* (Group of CRM) sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 2(dua) bulan
3. Rapat berkala dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 2(dua) bulan
4. Dalam pelaksanaan rapat KIMR dapat mengundang Divisi Manajemen Risiko dan Compliance serta Divisi Perencanaan Korporat ca Group of Corporate Risk Management (Group of CRM) untuk memberikan informasi yang diperlukan.

The policy on the implementation of IRMC meetings is regulated in the Investment and Risk Management Charter. In line with this meeting policy, the implementation of IRMC meetings may be conducted as follows:

1. The IRMC meeting shall be held at least once every 3 (three) months.
2. Meetings with the Risk Management and Compliance Division as well as the Corporate Planning Division under the Group of Corporate Risk Management (Group of CRM) shall be held at least once every 2 (two) months.
3. Regular meetings with the Board of Commissioners shall be held at least once every 2 (two) months.
4. In conducting IRMC meetings, the Risk Management and Compliance Division as well as the Corporate Planning Division under the Group of Corporate Risk Management (Group of CRM) may be invited to provide the necessary information.

Pelaksanaan Frekuensi Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2024, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 17 kali rapat yang dilakukan secara internal dan gabungan sebagai berikut:

IRMC Meeting Frequency

Throughout 2024, the Investment and Risk Management Committee (IRMC) held a total of 17 meetings, both internal and joint, as detailed below:

Keterangan Description	Rapat Internal KIMR IRMC Internal Meetings	Rapat berkala dengan Dewan Komisaris Regular Meetings with the Board of Commissioners	Rapat dengan Divisi terkait Risiko Meetings with Risk-related Division	Rapat dengan Satuan Legal, Risk and Compliance Meetings with Legal, Risk and Compliance Unit	Jumlah Rapat Total Meetings
Rencana Plan	12	12	12	11	47
Realisasi Realization	12	16	15	3	46

Kehadiran Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Berikut kehadiran Komite Investasi dan Manajemen Risiko dalam Rapat selama tahun 2024:

Attendance of the Investment and Risk Management Committee Members

The following is the attendance of the Investment and Risk Management Committee (IRMC) at meetings throughout 2024:

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di KIMR Position at IRMC	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency
Djoko Siswanto ¹	Komisaris Commissioner	Ketua Komite Head of Committee	39	38	97%
Iskandar Simorangkir ²	Komisaris Utama President Commissioner	Ketua Komite Head of Committee	8	8	100%
M.Priharto Dwinugroho	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua 1 Deputy Head 1	46	46	100%
Dewanto	-	Sekretaris Komite merangkap Anggota Secretary of the Committee concurrently serving as a Member	46	46	100%
Robiatna Agus Fanhar ³	-	Anggota Member	25	25	100%
Ferry Triansyah	-	Anggota Member	22	21	95%

Keterangan:

- ¹ Menjabat sebagai Ketua KIMR sejak 1 April 2024
- ² Berhenti menjabat sebagai Ketua KIMR sejak April 2024
- ³ Berhenti menjabat sebagai anggota KIMR sejak 25 September 2024

Remarks:

- ¹ Serving as Head of the IRMC since April 1, 2024
- ² Resigned as Head of the IRMC as of April 2024
- ³ Resigned as a member of the IRMC as of September 25, 2024

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Training and Competency Development of Investment and Risk Management Committee

Kebijakan pelatihan dan peningkatan Komite Investasi dan Manajemen Risiko mengacu pada Program Kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko. Sejalan dengan Program Kerja tersebut pelatihan Komite Investasi dan Manajemen Risiko dapat dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi maupun konferensi/seminar.

The training and development policy for the Investment and Risk Management Committee refers to the Committee's Work Program. In line with this Work Program, training for the Investment and Risk Management Committee may be conducted through training programs, certifications, and conferences/seminars.

Selama tahun 2024, Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko PLN Indonesia Power telah melakukan berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi sebagai berikut:

In 2024, members of the Investment and Risk Management Committee of PLN Indonesia Power participated in various training and competency development activities as follows:

Nama Name	Nama Pelatihan Training Name	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
M.P Dwinugroho	Implementasi GRC & ESG mendukung <i>Business Judgment Rule</i> sesuai UU PT No 40 th 2007 & UU No 19 Th 2003 Implementation of GRC & ESG supports the Business Judgment Rule in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 19 of 2003	Forum Manajemen Risiko BUMN State-Owned Enterprises Risk Management Forum	5-6 Desember 2024 December 5 -6, 2024	Aryaduta Hotel - Bandung

Kunjungan Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Investment and Risk Management Committee's Visits

Guna memberikan motivasi kepada seluruh unit Perusahaan dan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi dan gambaran atas kemajuan/perkembangan serta permasalahan yang dihadapi unit, Komite Investasi dan Manajemen Risiko melakukan kunjungan atas persetujuan dari Dewan Komisaris. Pada tahun 2024, Komite Investasi dan Manajemen Risiko melakukan kunjungan ke Kawasan Industri Kendal – Jawa Tengah pada tanggal 5-6 Juli 2024 dengan agenda Pembahasan Progres Pengembangan Manufaktur Solar PV dan Site Visit Manufaktur Solar PV di Kendal dan Kunjungan Kerja ke UBP Priok pada tanggal 31 Desember 2024.

In order to motivate all company units and to obtain information, clarification, and an overview of the progress/developments as well as the challenges faced by the units, the Investment and Risk Management Committee conducts visits with the approval of the Board of Commissioners. In 2024, the Investment and Risk Management Committee conducted a visit to the Kendal Industrial Estate, Central Java, on July 5-6, 2024, with the agenda of discussing the progress of Solar PV Manufacturing development and a site visit to the Solar PV Manufacturing facility in Kendal, as well as a working visit to UBP Priok on December 31, 2024.

Penyampaian Laporan Investasi dan Manajemen Risiko

Submission of Investment and Risk Management Committee Report

Sejalan dengan yang diatur dalam piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko bahwa Komite Investasi dan Manajemen Risiko wajib menyampaikan Laporan berkala, untuk itu pada tahun 2024, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah menyampaikan Laporan Triwulanan kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

In accordance with the provisions set forth in the Investment and Risk Management Committee Charter, the Investment and Risk Management Committee is required to submit periodic reports. Therefore, in 2024, the Committee submitted Quarterly Reports to the Board of Commissioners as follows:

Keterangan Description	Tanggal Date
Laporan KIMR TW I Tahun 2024 IRMC Report for Q1 2024	30 April 2024 April 30, 2024
Laporan KIMR TW II Tahun 2024 IRMC Report for Q2 2024	28 Juli 2024 July 28, 2024
Laporan KIMR TW III Tahun 2024 IRMC Report for Q3 2024	5 Oktober 2024 October 5, 2024
Laporan KIMR TW IV Tahun 2024 IRMC Report for Q4 2024	22 Januari 2025 January 22, 2025

Aktivitas Pengawasan Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Investment and Risk Management Committee's Supervisory Activities

Selama tahun 2024, Komite Investasi dan Manajemen Risiko juga telah melakukan beberapa kegiatan dan memberikan beberapa rekomendasi diantaranya mencakup tentang:

1. RJPP dan RKAP PLN Indonesia Power.
2. Analisa Risiko Korporat dan Profil Risiko Korporat.
3. Usulan RKAP dan Investasi Murni
4. Laporan Kinerja dan Manajemen Perusahaan.

Throughout 2024, the Investment and Risk Management Committee also carried out several activities and provided several recommendations, including those related to:

1. RJPP and RKAP of PLN Indonesia Power.
2. Corporate Risk Analysis and Corporate Risk Profile.
3. Proposals for the RKAP and Pure Investments.
4. Company Performance and Management Reports.

5. Evaluasi Dokumen Manajemen Risiko yang disampaikan oleh Direksi dalam pengajuan program Perusahaan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Kegiatan-kegiatan lain yang menjadi perhatian Dewan Komisaris. pada topik-topik strategis Perusahaan Tahun 2023 yang perlu diperhatikan oleh Manajemen Perusahaan.

5. Evaluation of Risk Management Documents submitted by the Board of Directors in the submission of Company programs requiring the approval of the Board of Commissioners.
6. Other activities that had drawn the attention of the Board of Commissioners on strategic Company topics in 2023 that needed to be considered by Company Management.

Penilaian Kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Performance Assessment of Investment and Risk Management Committee

Kebijakan penilaian kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko diatur dalam Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko. Sejalan dengan kebijakan tersebut, penilaian kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko dilakukan setiap triwulanan oleh Dewan Komisaris berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Investasi dan Manajemen Risiko. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris dalam mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko untuk periode jabatan berikutnya.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko antara lain mencakup Kontribusi terhadap pencapaian target Tim, Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi, Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim, Kerjasama dalam Tim, serta Mutu dan Kualitas Konsep. Berikut hasil penilaian Kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko tahun 2024:

The performance assessment policy for the Investment and Risk Management Committee is regulated in the Investment and Risk Management Committee Charter. In line with this policy, the performance assessment of the Investment and Risk Management Committee is conducted quarterly by the Board of Commissioners based on the realization and completion of the work program outlined in the Investment and Risk Management Committee's Work Plan and Budget. The results of this assessment serve as consideration for the Board of Commissioners in reappointing and/or dismissing members of the Investment and Risk Management Committee for the next term of office.

The criteria used in assessing the performance of the Investment and Risk Management Committee include contributions to team target achievement, number of studies, analyses, recommendations, level of activeness in team activities, teamwork, as well as the quality and standard of concepts. The following are the 2024 performance assessment results of the Investment and Risk Management Committee:

Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Hasil Penilaian Assessment Result	
	Dewanto	Ferry Triansyah
Kontribusi terhadap pencapaian target Contribution to achieving team targets	4	3
Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi Number of reviews, analyses, and recommendations	4	3
Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim Level of activeness in team activities	4	3
Kerjasama dalam Tim Teamwork	3	3
Mutu dan Kualitas Konsep Quality and standard of concepts	3	3

Keterangan skor penilaian: 1 = Tidak Sesuai Harapan; 2 = Kurang Sesuai Harapan; 3 = Sesuai Harapan; 4 = Melampaui Harapan.

Score description: 1 = Unsatisfactory; 2 = Improvement Needed; 3 = Meets Expectations; 4 = Exceeds Expectations.

Komite di Bawah Direksi

Committees under the Board of Directors

Direksi PLN Indonesia Power membentuk Komite di bawah Direksi guna membantu tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengawasi, mengarahkan, dan memberikan saran strategis terkait berbagai aspek operasional atau kebijakan Perusahaan. Komite-komite ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keputusan strategis yang diambil oleh Perusahaan berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan berfokus pada keberlanjutan Perusahaan.

The Board of Directors of PLN Indonesia Power has formed Committees under the Board of Directors to assist the duties and responsibilities of the Board of Directors in supervising, directing, and providing strategic advice related to various operational aspects or Company policies. These Committees have an important role in ensuring that strategic decisions taken by the Company run properly, in accordance with applicable regulations, and focus on the Company's sustainability.

Hingga akhir Desember 2024, PLN Indonesia Power memiliki 2 (dua) Komite di bawah Direksi yaitu Komite *Sustainability* dan Komite Investasi sebagaimana yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

As of the end of December 2024, PLN Indonesia Power has 2 (two) Committees under the Board of Directors, namely the Sustainability Committee and the Investment Committee as explained below:

Komite *Sustainability*

Sustainability Committee

Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power membentuk Komite *Sustainability* sebagai wujud komitmen Perusahaan untuk mendukung dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembentukan komite ini berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0373.K/DIR/2024 tanggal 26 April 2024. Komite *Sustainability* memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pencapaian tujuan keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan.

In 2024, PLN Indonesia Power established a Sustainability Committee as a manifestation of the Company's commitment to supporting and implementing the principles of sustainable development. The formation of this committee was based on the Board of Directors' Decision Number 0373.K/DIR/2024 dated April 26, 2024. The Sustainability Committee plays a crucial role in ensuring the achievement of the Company's overall sustainability goals.

Tugas utama Komite Sustainability adalah memastikan tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam berbagai bidang atau *workstream*, yang meliputi: *workstream* lingkungan, *workstream* pengelolaan perubahan iklim, *workstream* sosial, *workstream* tata kelola, *workstream* komunikasi dan hubungan kelembagaan, *workstream* pengembangan kapasitas, serta *workstream* keuangan dan risiko.

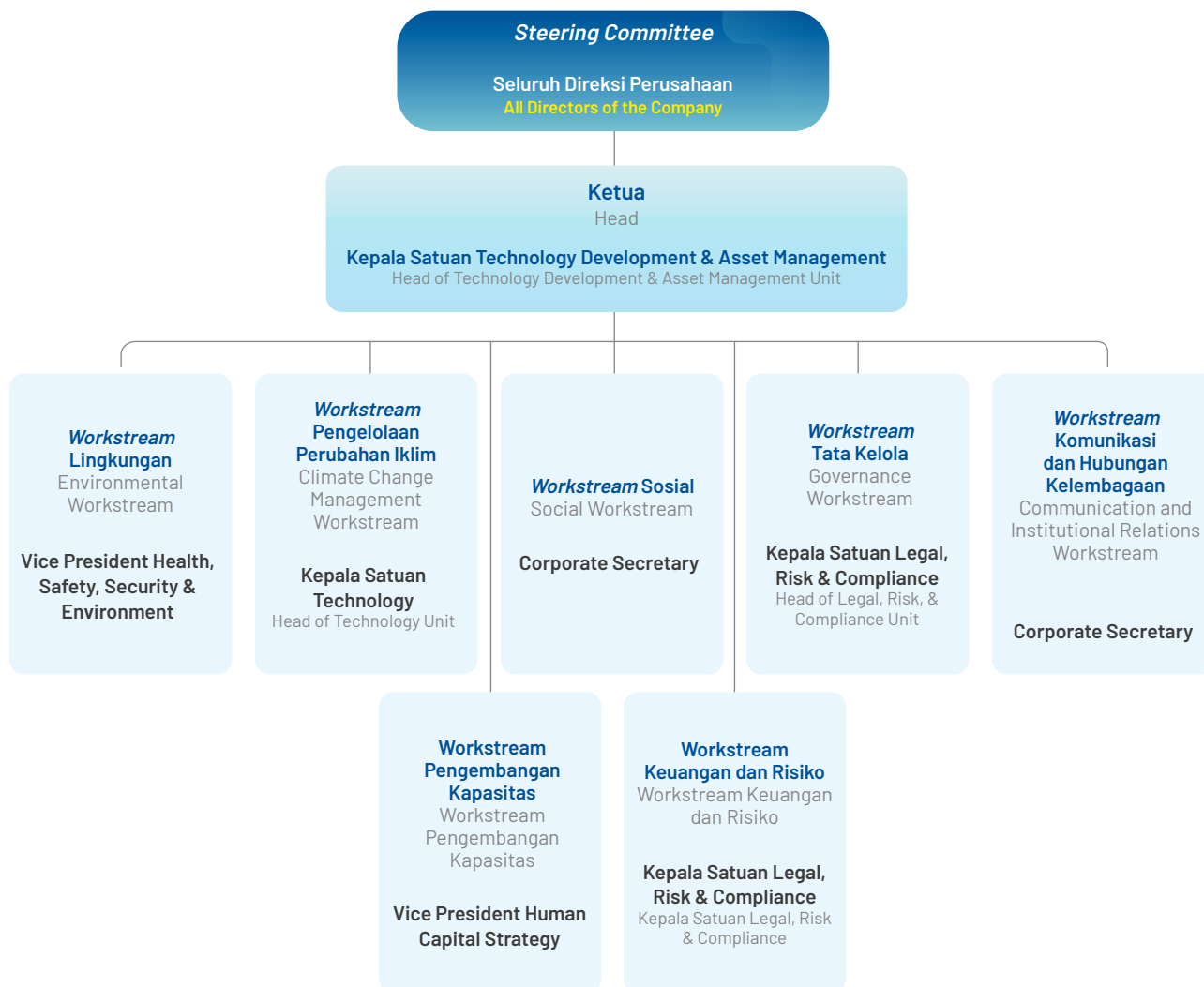
The main duty of the Sustainability Committee is to ensure the attainment of targets set across various fields or workstreams, which include: the environmental workstream, climate change management workstream, social workstream, governance workstream, communication and institutional relations workstream, capacity development workstream, and finance and risk workstream.

Struktur dan Keanggotaan Komite *Sustainability*

Structure and Composition of Sustainability Committee

Sejalan dengan Keputusan Direksi Nomor 0373.K/DIR/2024 tanggal 26 April 2024 tentang Komite *Sustainability*, susunan Komite *Sustainability* PLN Indonesia Power per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

In line with the Board of Directors' Decision Number 0373.K/DIR/2024 dated April 26, 2024, on the Sustainability Committee, the composition of the Sustainability Committee OF PLN Indonesia Power as of December 31, 2024, is as follows:



Uraian terkait struktur dan keanggotaan Komite *Sustainability* dijelaskan lebih lanjut pada buku terpisah yaitu Laporan Keberlanjutan tahun 2024 yang menjadi satu kesatuan dengan Laporan Tahunan ini.

The description of structure and composition of the Sustainability Committee is explained further in a separate book, the 2024 Sustainability Report, which is an integral part of this Annual Report.

Profil Komite *Sustainability*

Profil Komite Sustainability

Profil Komite Sustainability yang dari unsur Direksi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan Sub Bab Profil Direksi. Adapun untuk Corporate Secretary dan Kepala Satuan Legal, Risk & Compliance dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan Sub Bab Sekretaris Perusahaan dan Sub Bab Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of the Sustainability Committee members from the Board of Directors can be found in the Company Profile Chapter, under the Board of Directors Profile subchapter. Meanwhile, the profile of the Corporate Secretary and the Head of Legal, Risk & Compliance Unit can be found in the Corporate Governance Chapter, under the Corporate Secretary subchapter and the Risk Management subchapter of this Annual Report.

Independensi Komite *Sustainability*

Independence of Sustainability Committee

Komite *Sustainability* PLN Indonesia Power telah bertindak secara independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak ada intervensi yang dapat mengurangi objektivitasnya.

The Sustainability Committee of PLN Indonesia Power has acted independently in carrying out its duties and functions, ensuring that every decision made is free from any interference that could compromise its objectivity.

Pedoman Kerja dan Tugas Tanggung Jawab Komite *Sustainability*

Work Guidelines and Responsibilities of Sustainability Committee

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite *Sustainability* mengacu pada Keputusan Direksi Nomor 0373.K/DIR/2024 tanggal 26 April 2024. Sejalan dengan pedoman kerja tersebut, tugas dan tanggung jawab Komite *Sustainability* antara lain adalah:

In carrying out its duties and responsibilities, the Sustainability Committee refers to the Board of Directors' Decision Number 0373.K/DIR/2024 dated April 26, 2024. Based on these working guidelines, the duties and responsibilities of the Sustainability Committee include the following:

Steering Committee

Steering Committee

1. Menentukan arah strategis dari implementasi *sustainability*;
2. Melakukan pembahasan progres *sustainability* dengan Komite *Sustainability* PLN Indonesia Power melalui rapat rutin;
3. Melaporkan progres *sustainability* kepada Dewan Komisaris melalui rapat laporan manajemen.

1. Determining the strategic direction for the implementation of sustainability;
2. Discussing sustainability progress with the Sustainability Committee of PLN Indonesia Power through regular meetings;
3. Reporting sustainability progress to the Board of Commissioners through management report meetings.

Ketua dan Wakil Ketua

Head and Deputy Head

1. Memimpin keseluruhan anggota tim untuk melaksanakan, memonitor, dan memastikan penerapan prinsip *sustainability*;
2. Memimpin penyusunan dan pemutakhiran kerangka kerja *sustainability*, termasuk *key performance indicator* (KPI) dan target seluruh aspek *sustainability* serta mengkoordinasikan seluruh *workstream*;
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala atas pencapaian target pencapaian *sustainability*;
4. Menyampaikan keseluruhan progres dan perkembangan *sustainability* kepada dewan komisaris sebagai pembina, melalui Laporan Manajemen;
5. Melaporkan setiap progres dan perkembangan *sustainability* kepada Direksi setiap satu bulan melalui *committee meeting* yang dihadiri oleh minimal 2 (dua) Direksi;

1. Leading the entire team to implement, monitor, and ensure the application of sustainability principles;
2. Leading the preparation and updating of the sustainability framework, including key performance indicators (KPIs) and targets for all aspects of sustainability, and coordinating all workstreams;
3. Conducting regular monitoring and evaluation of the achievement of sustainability targets;
4. Presenting the overall progress and development of sustainability to the Board of Commissioners as supervisors, through Management Reports;
5. Reporting all progress and developments in sustainability to the Board of Directors on a monthly basis through committee meetings attended by at least 2 (two) members of the Board of Directors;

6. Menyiapkan seluruh proses administrasi termasuk surat-menyurat dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Sustainability PLN Indonesia Power;
7. Mendokumentasikan dan melakukan pengarsipan seluruh dokumen selama proses pelaksanaan tugas Komite Sustainability PLN Indonesia Power.

6. Preparing all administrative processes including correspondence and necessary documents related to the duties and responsibilities of the Sustainability Committee of PLN Indonesia Power;
7. Documenting and archiving all documents during the implementation of the duties of the Sustainability Committee of PLN Indonesia Power.

Workstream Lingkungan

Environmental Workstream

1. Memastikan ketercapaian target *workstream* lingkungan (non transisi energi) seperti manajemen lingkungan, manajemen sumber daya, pengelolaan lahan, dan keanekaragaman hayati.
2. Menyesuaikan dan berkontribusi pada program-program terkait SDG lingkungan (non transisi energi) yang ada di lingkungan perusahaan seperti kebersihan air, energi bersih dan murah, aksi terhadap iklim, kehidupan laut, dan kehidupan daratan.
3. Menyiapkan rancangan inisiatif *workstream* lingkungan (non-transisi energi) sesuai dengan target lingkungan tahunan perusahaan untuk meningkatkan kualitas sosial serta ceklis kriteria lembaga independen.
4. Memonitor seluruh progres inisiatif *workstream* lingkungan (non-transisi energi) pada *workstream* untuk memastikan terselesaikannya isu-isu yang dapat memperlambat pencapaian KPI lingkungan sesuai dengan target nasional.
5. Melaporkan progres implementasi inisiatif *workstream* lingkungan (non-transisi energi) secara berkala kepada Koordinator Komite Sustainability PLN Indonesia Power.

1. Ensuring the achievement of environmental workstream targets (non-energy transition), such as managing the environment, managing resources, managing land, and preserving biodiversity.
2. Aligning with and contributing to environmental-related SDG programs (non-energy transition) within the Company, such as providing clean water, affordable and clean energy, taking climate action, protecting life below water, and conserving life on land.
3. Preparing drafts of environmental workstream initiatives (non-energy transition) in accordance with the Company's annual environmental targets, aiming to improve social quality and meet the checklist criteria of independent institutions.
4. Monitoring the progress of all environmental workstream initiatives (non-energy transition) to ensure timely resolution of issues that could hinder the achievement of environmental KPIs in line with national targets.
5. Regularly reporting the progress of the implementation of environmental workstream initiatives (non-energy transition) to the Coordinator of the Sustainability Committee of PLN Indonesia Power.

Workstream Pengelolaan Perubahan Iklim

Climate Change Management Workstream

1. Melakukan analisis terhadap inisiatif-inisiatif perubahan iklim serta inisiatif pendukungnya, yaitu: Dekarbonisasi pembangkit tenaga fosil, ekspansi EBT, dan Ekosistem Hijau, agar dapat sesuai dengan keseluruhan target transisi energi pada RUPTL;
2. Menyusun target bulanan untuk perubahan iklim dan pendukungnya (dekarbonisasi pembangkit fosil, ekspansi EBT, ekosistem hijau) sesuai dengan capaian setiap bulannya;
3. Melaporkan ketercapaian transisi energi kepada Koordinator Komite Sustainability PLN Indonesia Power |secara berkala;

1. Analyzing climate change initiatives and their supporting actions, namely: decarbonizing fossil fuel power plants, expanding NRE, and green ecosystem, to ensure alignment with the overall energy transition targets in the Electricity Supply Business Plan (RUPTL).
2. Setting monthly targets for climate change and its supporting components (decarbonizing fossil plants, expanding NRE, and green ecosystem) based on monthly achievements.
3. Regularly reporting the progress of achieving energy transition targets to the Coordinator of the Sustainability Committee of PLN Indonesia Power.

4. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan terkait transisi energi untuk dapat memenuhi kriteria lembaga independen;
5. Dalam mendukung pertumbuhan ekosistem hijau nasional;
6. Untuk memastikan target penurunan emisi tercapai;
7. Untuk memastikan ekspansi EBT.

4. Completing the required documentation related to the energy transition to meet the criteria of independent institutions.
5. Supporting the growth of the national green ecosystem.
6. Ensuring the achievement of emission reduction targets.
7. Ensuring the expansion of renewable energy.

Workstream Sosial

Social Workstream

1. Memastikan ketercapaian target *workstream* sosial seperti pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender, tata kelola produk (seperti ketahanan ketersediaan listrik), pengembangan sumber daya manusia, kesetaraan untuk disabilitas, dan inklusi sosial;
2. Menyesuaikan dan berkontribusi pada program-program terkait SDG sosial yang ada di lingkungan perusahaan seperti pemberantasan kemiskinan, pemberantasan kelaparan, peningkatan kesehatan, peningkatan edukasi, kesetaraan gender, kualitas pekerjaan dan ekonomi. dan kota berkelanjutan;
3. Menyiapkan rancangan inisiatif sesuai dengan target sosial tahunan perusahaan untuk meningkatkan kualitas sosial serta pemenuhan ceklis kriteria lembaga independen;
4. Memonitor seluruh progres inisiatif *workstream* sosial pada workstream untuk memastikan terselesaikannya isu-isu yang dapat memperlambat pencapaian KPI sosial di lingkungan Perusahaan;
5. Melaporkan progres implementasi inisiatif *workstream* sosial secara berkala kepada Koordinator Komite *Sustainability* PLN Indonesia Power.

1. Ensuring the achievement of social workstream targets such as empowering communities, promoting gender equality, managing product governance (e.g., electricity supply resilience), developing human resources, ensuring disability inclusion, and fostering social inclusion;
2. Aligning with and contributing to social-related SDG programs within the Company, such as eradicating poverty, ending hunger, improving health, enhancing education, promoting gender equality, ensuring decent work and economic growth, and building sustainable cities;
3. Preparing initiative drafts in line with the Company's annual social targets to improve social quality and fulfill the checklist criteria of independent institutions;
4. Monitoring the progress of all social workstream initiatives to ensure the resolution of issues that may hinder the achievement of social KPIs within the Company;
5. Regularly reporting the progress of the implementation of social workstream initiatives to the Coordinator of the Sustainability Committee of PLN Indonesia Power.

Workstream Tata Kelola

Governance Workstream

1. Memastikan ketercapaian target *workstream* tata kelola seperti etika bisnis dan tata kelola perusahaan secara umum;
2. Menyesuaikan dan berkontribusi pada program-program terkait SDG tata kelola yang ada di lingkungan perusahaan seperti inovasi industri, konsumsi & produksi yang bertanggung jawab, kedamaian dan keadilan, dan kerjasama menuju tujuan kolektif;
3. Menyiapkan rancangan inisiatif tata kelola workstream sesuai dengan target lingkungan tahunan perusahaan untuk meningkatkan kualitas tata kelola serta ceklis kriteria lembaga independen;

1. Ensuring the achievement of governance workstream targets such as business ethics and overall corporate governance;
2. Aligning with and contributing to governance-related SDG programs within the Company, such as industrial innovation, responsible consumption and production, peace and justice, and partnerships for collective goals;
3. Preparing governance initiative drafts in line with the Company's annual governance targets to enhance governance quality and fulfill the checklist criteria of independent institutions;

4. Memonitor seluruh progres inisiatif *workstream* tata kelola pada *workstream* untuk memastikan terselesaikannya isu-isu yang dapat memperlambat pencapaian KPI tata kelola sesuai dengan target Perusahaan;
5. Melaporkan progres implementasi inisiatif *workstream* tata kelola secara berkala kepada Koordinator Komite *Sustainability* PLN Indonesia Power.

4. Monitoring the progress of all governance *workstream* initiatives to ensure the resolution of issues that may hinder the achievement of governance KPIs in line with Company targets;
5. Regularly reporting the progress of the implementation of governance *workstream* initiatives to the Coordinator of the Sustainability Committee of PLN Indonesia Power.

Workstream Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan

Communication and Institutional Relations Workstream

1. Menyusun strategi komunikasi terkait *sustainability* kepada *stakeholder* internal dan eksternal;
2. Menyusun rencana komunikasi kepada *stakeholder* eksternal dan internal terkait program *sustainability*;
3. Mengarusutamakan *sustainability* dalam media komunikasi eksternal perusahaan, seperti *sustainability* report, website, dan media resmi lainnya.
4. Memberikan dukungan komunikasi dan media komunikasi baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab tim.

1. Developing communication strategies related to sustainability for internal and external stakeholders;
2. Preparing communication plans for external and internal stakeholders regarding sustainability programs;
3. Mainstreaming sustainability in the Company's external communication media, such as sustainability reports, websites, and other official media;
4. Providing communication support and media resources for both internal and external needs related to the team's duties and responsibilities.

Workstream Pengembangan Kapasitas

Capacity Development Workstream

1. Menyiapkan kecukupan organisasi dan sumber daya manusia dalam mendukung program dan pencapaian target *sustainability*;
2. Melaksanakan kerjasama dengan institusi eksternal terkait pembelajaran formal dan informal terkait *sustainability*;
3. Melaksanakan program pembelajaran formal dan informal terkait *sustainability*.

1. Ensuring sufficient organizational capacity and human resources to support sustainability programs and target achievement;
2. Collaborating with external institutions for formal and informal learning related to sustainability;
3. Implementing formal and informal learning programs related to sustainability.

Workstream Keuangan dan Risiko

Finance and Risk Workstream

1. Menyiapkan kajian, perhitungan, dan dukungan yang diperlukan baik dari Aspek Keuangan dan Risiko atas implementasi program *sustainability*;
2. Memberikan masukan dan pertimbangan berdasarkan kajian dan perhitungan untuk pelaksanaan *sustainability*;
3. Mengintegrasikan tujuan *sustainability* pada aspek pendanaan, manajemen risiko, dan komersial.

1. Preparing studies, calculations, and necessary support from financial and risk aspects for the implementation of sustainability programs;
2. Providing input and considerations based on studies and calculations for sustainability implementation;
3. Integrating sustainability goals in funding, risk management, and commercial aspects.

Pelaksanaan Kegiatan Tugas Komite *Sustainability*

Implementation of Sustainability Committee's Duties

Sepanjang tahun 2024, Komite *Sustainability* melakukan penilaian *maturity level sustainability* secara semesteran dalam rangka memberikan gambaran kemampuan PLN Indonesia Power sebagai Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam semua aspek operasional dan strateginya mencakup tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil dari penilaian *maturity level sustainability* semester II PLN Indonesia Power tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Throughout 2024, the Sustainability Committee conducted a semesterly sustainability maturity level assessment aiming to obtain an overview of PLN Indonesia Power's ability as a Company to implement sustainability principles in all aspects of its operations and strategies, covering three main pillars: economic, social, and environmental. The results of the second semester sustainability maturity level assessment of PLN Indonesia Power in 2024 are as follows:

No	Kriteria Criteria	Level
1	<i>Environmental Management</i>	3,43
2	<i>Community Relation</i>	4,00
3	<i>Resource Use</i>	3,500
4	<i>Climate Change Management</i>	3,00
5	<i>Land Use & Biodiversity</i>	3,00
6	<i>Human Capital Management</i>	3,00
7	<i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	3,50
8	<i>Product Governance</i>	3,33
Level Final		3,35

Pelaksanaan Pelatihan Komite *Sustainability*

Implementation of Sustainability Committee's Training

Pelaksanaan pelatihan yang diikuti oleh Komite *Sustainability* yang dari unsur Direksi, Corporate Secretary dan Kepala Satuan Legal, Risk & Compliance dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The trainings attended by the Sustainability Committee consisting of the Board of Directors, Corporate Secretary, and Head of Legal, Risk & Compliance Unit, can be seen in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.

Evaluasi Kinerja Komite *Sustainability*

Performance Evaluation of Sustainability Committee

Evaluasi kinerja Komite *Sustainability* PLN Indonesia Power dilakukan oleh Direksi dengan merujuk pada kriteria pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pelaksanaan rapat Komite. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komite *Sustainability* telah melaksanakan tugasnya dengan efektif dan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

The performance evaluation of the Sustainability Committee of PLN Indonesia Power is conducted by the Board of Directors by referring to the criteria for carrying out duties and responsibilities, including the implementation of committee meetings. The evaluation results indicate that the Sustainability Committee has performed its duties effectively and in accordance with the applicable guidelines.

Komite Investasi Investment Committee

Dalam rangka memastikan perencanaan investasi dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian, PLN Indonesia Power membentuk Komite Investasi. Pembentukan Komite Investasi berdasarkan pada Peraturan Direksi PT PLN Indonesia Power No. 0041.P/DIR/2024.

To ensure careful and prudent investment planning, PT PLN Indonesia Power has formed an Investment Committee. The Investment Committee was established based on the Board of Directors' Regulation of PT PLN Indonesia Power No. 0041.P/DIR/2024.

Struktur dan Keanggotaan Komite Investasi Structure and Membership of the Investment Committee

Struktur dan keanggotaan Komite Invertasi berdasarkan Pedoman Evaluasi Investasi Pengeloan dan Pengembangan Nomor 0041.P/DIR/2024 adalah sebagai berikut:

The structure and membership of the Investment Committee based on the Investment Evaluation Guidelines for Management and Development Number 0041.P/DIR/2024 are as follows:

Kelompok Investasi Pengembangan Usaha Business Development Investment Group

Batasan Kewenangan Authority Limitation	Pengembangan Usaha Business Development
Pengambil Keputusan Decision Maker	Direksi Board of Directors
Tim Verifikasi & Validasi Investasi (TVVI) Investment Verification & Validation Team (TVVI)	TVVI

Kelompok Investasi Maintenance Capex & Non Infrastruktur Pembangkit Plant Maintenance Capex & Non Infrastructure Investment Group

Batasan Kewenangan Authority Limitation	>Rp100 Milyar >Rp100 Billion	s.d Rp100 Milyar up to Rp100 billion
Pengambil Keputusan Decision Maker	Direksi Board of Directors	Anggota Komite Investasi: 1) Direktur Operasi Fungsi Terkait 2) Direktur Keuangan & Manajemen Risiko 3) Kepala Satuan Legal, Risk & Compliance Sekretaris Komite Investasi: Kepala Satuan Technology Development & Aset Management Members of the Investment Committee: 1) Director of Operations of Related Functions 2) Director of Finance & Risk Management 3) Head of Legal, Risk & Compliance Unit Secretary of the Investment Committee: Head of Technology Development & Asset Management Unit
Tim Verifikasi & Validasi Investasi Investment Verification & Validation Team	TVV II,III,IV, V	TVV II,III,IV, V

Profil Komite Investasi

Investment Committee's Profile

Profil Komite Investasi yang dari unsur Direksi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan Sub Bab Profil Direksi.

The profile of Investment Committee from the Board of Directors can be seen in the Company Profile Chapter, Sub-Chapter of Board of Directors Profile.

Independensi Komite Investasi

Independence of Investment Committee

Komite Investasi PLN Indonesia Power telah bertindak secara independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau intervensi yang dapat mengurangi objektivitasnya.

The Investment Committee of PLN Indonesia Power has acted independently in carrying out its duties and functions, by ensuring that every decision taken is not influenced by external factors or interventions that can reduce its objectivity.

Pedoman Kerja dan Tugas Tanggung Jawab Komite Investasi

Investment Committee's Work Guidelines and Duties and Responsibilities

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Investasi mengacu pada Keputusan Direksi Nomor 0041.P/DIR/2024 tentang Pedoman Evaluasi Investasi Pengelolaan Pembangkitan dan Pengembangan di Lingkungan PT PLN Indonesia Power tanggal 11 Desember 2024. Adapun muatan dari pedoman kerja tersebut mencakup:

1. Maksud dan Tujuan;
2. Ruang Lingkup;
3. Prinsip-Prinsip Pengembalian Investasi;
4. Organisasi dan Kewenangan;
5. Kewenangan Direktur yang Membina Fungsi Keuangan;
6. Komite Investasi;
7. Tim Verifikasi dan Validasi Investasi (TVVI);
8. Pemrakarsa;
9. Usulan Program Investasi;
10. Mekanisme Pengembalian Keputusan Investasi;
11. Kriteria Program Investasi;
12. Batasan Kewenangan;
13. Persyaratan Umum Usulan Program Investasi;
14. Prosedur Pengambilan Keputusan Terhadap Usulan Investasi Murni;
15. Verifikasi dan Validasi Program Investasi Murni;
16. Pengambilan Keputusan Investasi Murni;
17. Prosedur Pengambilan Keputusan Terhadap Usulan Tambahan Anggaran Program Investasi Luncuran;
18. Pelaksanaan Program Investasi;
19. Ketentuan Penutup.

In carrying out its duties and responsibilities, the Investment Committee refers to the Board of Directors' Decision No. 0041.P/DIR/2024 on Guidelines for Investment Evaluation for Generation Management and Development within PT PLN Indonesia Power dated December 11, 2024. The content of the guidelines includes:

1. Purpose and Objectives;
2. Scope;
3. Principles of Return on Investment;
4. Organization and Authority;
5. Authority of the Director in Charge of the Financial Function;
6. Investment Committee;
7. Investment Verification and Validation Team (TVVI);
8. Initiator;
9. Investment Program Proposal;
10. Investment Decision Return Mechanism;
11. Investment Program Criteria;
12. Authority Limitation;
13. General Requirements for Investment Program Proposals;
14. Decision-Making Procedures for Pure Investment Proposals;
15. Verification and Validation of Pure Investment Programs;
16. Pure Investment Decision-Making;
17. Decision-Making Procedures for Additional Budget Proposals for Launched Investment Programs;
18. Implementation of Investment Programs;
19. Closing Provisions.

Pelaksanaan Kegiatan Tugas Komite Investasi

Implementation of Investment Committee's Duties

Sepanjang tahun 2024, Komite Investasi telah melakukan rapat sebanyak 4 kali rapat dengan tingkat kehadiran Direksi sebagai berikut:

Throughout 2024, the Sustainability Committee held 4 meetings with the following levels of Board of Directors' attendance:

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	Peserta rapat Meeting Participants
07 Agustus 2024 August 7, 2024	Persetujuan Investasi Program Peningkatan Keandalan PLTU Suralaya Approval of Investment Program for Increasing Reliability of Suralaya Steam Power Plant	Direksi, anggota komite investasi dan TVV Board of Directors, members of Investment Committee, and TVV
10 Oktober 2024 October 10, 2024	Persetujuan Komite Investasi atas usulan Anggaran Investasi 2025 Approval of the Investment Committee on the proposed 2025 Investment Budget	Direksi, anggota komite investasi dan TVV Board of Directors, members of Investment Committee, and TVV
16 Oktober 2024 October 16, 2024	Persetujuan Komite Investasi atas usulan Anggaran Investasi 2025 Pengembangan Infrastruktur Approval of the Investment Committee on the proposed 2025 Investment Budget for Infrastructure Development	Direksi, anggota komite investasi dan TVV Board of Directors, members of Investment Committee, and TVV
13 November 2024 November 13, 2024	Persetujuan Komite Investasi PLN IP: Anggaran Investasi tahun 2025 bisang OMP 1 Approval of the Investment Committee for PLN IP: Investment Budget 2025 bisang OMP 1	Direksi, anggota komite investasi dan TVV Board of Directors, members of Investment Committee, and TVV

Pelaksanaan Pelatihan Komite Investasi

Implementation of Investment Committee's Training

Pelaksanaan pelatihan yang diikuti oleh Komite Investasi yang dari unsur Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The trainings attended by the Investment Committee from the Board of Directors can be seen in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.

Evaluasi Kinerja Komite Investasi

Investment Committee's Performance Evaluation

Evaluasi kinerja Komite Investasi PLN Indonesia Power dilakukan oleh Direksi dengan merujuk pada kriteria pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pelaksanaan rapat Komite. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komite Investasi telah melaksanakan tugasnya dengan efektif dan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

The performance evaluation of PLN Indonesia Power's Investment Committee is carried out by the Board of Directors by referring to the criteria for implementing duties and responsibilities, including implementing Committee's meetings. The evaluation results indicate that the Investment Committee has carried out its duties effectively and in accordance with applicable guidelines.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan memegang peran strategis dalam membangun dan membina hubungan yang produktif antara PLN Indonesia Power dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Fungsi ini menjadi penghubung utama antara manajemen Perusahaan dengan pemegang saham, regulator, media, masyarakat, serta mitra strategis lainnya, guna membangun kepercayaan dan menjaga reputasi Perusahaan.

Sebagai bagian dari organ pendukung Direksi dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Sekretaris Perusahaan berkontribusi penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendorong keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan komunikasi korporat, koordinasi rapat Dewan Komisaris dan Direksi, pengelolaan dokumen legal, serta pelaporan yang dibutuhkan oleh pemegang saham dan otoritas terkait.

The Corporate Secretary plays a strategic role in building and fostering productive relationships between PLN Indonesia Power and stakeholders, both internal and external. This function serves as the primary liaison between the Company's management and shareholders, regulators, the media, the public, as well as other strategic partners, in order to build trust and maintain the Company's reputation.

As part of the supporting organs of the Board of Directors in implementing the principles of Good Corporate Governance, the Corporate Secretary makes a significant contribution to ensuring compliance with laws and regulations, as well as promoting the disclosure of accurate and timely information. This responsibility includes managing corporate communications, coordinating meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, managing legal documents, and preparing reports required by shareholders and relevant authorities.

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary's Work Guidelines

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan mengacu pada Pedoman Kerja Direksi (*Board Manual*) serta uraian tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi terkait pembentukan organ Sekretaris Perusahaan. Pedoman tersebut mencakup tugas pokok Sekretaris Perusahaan, uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, serta pedoman komunikasi Perusahaan dan hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Fungsi Sekretaris Perusahaan.

The implementation of the duties and functions of the Corporate Secretary refers to the Board of Directors' Work Guidelines (*Board Manual*) as well as the description of duties and responsibilities outlined in the Board of Directors' Decision Letter regarding the establishment of the Corporate Secretary function. These guidelines cover the main duties of the Corporate Secretary, a detailed description of the Corporate Secretary's responsibilities, the Company's communication guidelines, and other matters related to the implementation of the Corporate Secretary's function.

Dasar Hukum Pengangkatan dan Profil Sekretaris Perusahaan

Legal Basis of Appointment and Corporate Secretary Profile

Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Agung Siswanto yang ditunjuk Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 613.K/020/IP/2022 tanggal 16 Februari 2022. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan telah mempertimbangkan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan.

The position of Corporate Secretary is currently held by Agung Siswanto, who was appointed by the Board of Directors based on Board of Directors' Decision Letter Number 613.K/020/IP/2022 dated February 16, 2022. The appointment of the Corporate Secretary had received approval from the Board of Commissioners and was made with due consideration of educational qualifications, work experience, and competencies in accordance with the Company's business needs.



Agung Siswanto

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/ Place, Date of Birth	51 tahun per 31 Desember 2024/5 Juli 1973	51 years old as of December 31, 2024/July 5, 1973.
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Periode Jabatan Term of Office	2022 sampai saat ini.	2022 – present
Riwayat Pendidikan Educational Background	Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga Tahun 1996 dan Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM Tahun 1999.	
Riwayat Jabatan Service History	Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PLN Indonesia Power, Beliau pernah menjabat di beberapa Perusahaan dengan berbagai jabatan sebagai berikut: • Manajer SDM dan Humas UBP Suralaya tahun 2010 –2013; • Kepala Divisi Administrasi SDM & Hubungan Industrial tahun 2013 – 2014; • Kepala Divisi Pengembangan SDM dan Talenta tahun 2014 –2017; • Kepala Divisi Talenta tahun 2017 – 2018; dan • Eksekutif Senior Bidang SDM Kantor Pusat Tugas Karya Ke PT PLN (Persero) tahun 2017 – 2018.	
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 613.K/020/IP/2022 tanggal 16 Februari 2022.	Board of Directors' Decision Letter of PT Indonesia Power Number 613.K/020/IP/2022 dated February 16, 2022.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.	Having concurrent positions in other companies.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham.	

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary's Organizational Structure

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan PLN Indonesia Power dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi tata kelola perusahaan, komunikasi strategis, serta kepatuhan terhadap peraturan dan keterbukaan informasi. Unit ini berada langsung di bawah koordinasi Direksi dan memiliki beberapa sub unit atau bidang utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hubungan eksternal, komunikasi korporat, kesekretariatan, serta pengelolaan kepatuhan informasi dan pelaporan.

Secara struktural, Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat setingkat satu tingkat di bawah Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Fungsi dan bidang yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Perusahaan dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direksi Nomor 246.K/010/IP/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Bagan Susunan Jabatan, Position *Grade*, dan Formasi Tenaga Kerja Sekretariat Perusahaan, sebagai berikut:

The organizational structure of the Corporate Secretary of PLN Indonesia Power is designed to support the effective implementation of corporate governance functions, strategic communication, regulatory compliance, and information disclosure. This unit operates directly under the coordination of the Board of Directors and comprises several sub-units or main divisions responsible for managing external relations, corporate communications, secretarial functions, and the oversight of information compliance and reporting.

Structurally, the Corporate Secretary is an official at a level one tier below the Board of Directors, appointed and dismissed by the Board of Directors, and reports directly to the President Director. The functions and divisions under the coordination of the Corporate Secretary are carried out in accordance with the provisions set out in the Board of Directors' Decision Letter Number 246.K/010/IP/2022 dated December 17, 2022, on the Organizational Chart, Position Grades, and Workforce Formation of the Corporate Secretariat, as follows:

Bagan Susunan Jabatan Sekretariat Perusahaan
Corporate Secretary Structure



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Sebagai organ penting pendukung Direksi, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengkaji strategi jangka Panjang, kebijakan, proses bisnis dan proses Sekretaris Perusahaan;
2. Menyusun dan mengendalikan program kerja dan anggaran sesuai fungsi utama Sekretaris Perusahaan untuk mendukung RJPP dan RKAP;
3. Menyusun kajian risiko dan mengelola mitigasinya atas kegiatan di lingkungan Sekretaris Perusahaan;
4. Menyusun usulan dan perencanaan pengadaan Sekretaris Perusahaan;
5. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan, desain dan strategi komunikasi internal termasuk pengelolaan media sosial, kegiatan Perusahaan dan protokoler;
6. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan komunikasi eksternal, pengelolaan *website*, *media relation* dan *sponsorship* termasuk komunikasi dengan lembaga Negara dan lembaga pembuat kebijakan ketenagalistrikan;
7. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan CSR;
8. Melaksanakan pembinaan kegiatan aneka usaha non pembangkit yang ada di Lingkungan Perusahaan;
9. Menyusun dan mengendalikan laporan korporat (Laporan Manajemen, Laporan Kinerja, *Annual Report*), rapat korporat, laporan statistik Perusahaan, Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Prosedur serta Surat Keputusan terkait informasi korporat;
10. Menyusun dan mengevaluasi dan kebijakan GCG;
11. Merencanakan, memonitor dan mengevaluasi RKAP administrasi korporat dan administrasi Anak Perusahaan konsolidasi;
12. Menyusun laporan dan mengendalikan realisasi Tenaga Kerja *outsourcing* di luar struktur organisasi Perusahaan;
13. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan fasilitas Perusahaan dan kesekretariatan;
14. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penyediaan fasilitas Perusahaan dan kesekretariatan;
15. Mengelola dan mengendalikan aset dan properti Perusahaan;

As a key supporting organ of the Board of Directors, the Corporate Secretary holds the following duties and responsibilities:

1. Developing and reviewing long-term strategies, policies, business processes, and procedures of the Corporate Secretary;
2. Preparing and controlling work programs and budgets in line with the core functions of the Corporate Secretary to support the RJPP and the RKAP;
3. Conducting risk assessments and managing mitigation efforts for activities within the Corporate Secretary's scope;
4. Proposing and planning procurement activities related to the Corporate Secretary;
5. Planning, executing, and controlling internal communication activities, including social media management, corporate events, and protocol arrangements;
6. Planning, executing, and controlling external communication activities, managing the website, media relations, and sponsorships, including communication with state institutions and electricity policy-making agencies;
7. Planning, executing, and controlling CSR activities;
8. Overseeing the beyond kWh business activities within the Company;
9. Preparing and managing corporate reports (Management Reports, Performance Reports, Annual Reports), coordinating corporate meetings, compiling Company statistics reports, managing Public Information Disclosure (KIP), and drafting procedures and decision letters related to corporate information;
10. Developing and evaluating Good Corporate Governance (GCG) policies;
11. Planning, monitoring, and evaluating the administrative RKAP and the consolidated administration of subsidiaries;
12. Preparing reports and monitoring the implementation of outsourced labor outside the Company's organizational structure;
13. Developing and evaluating policies for managing Company facilities and secretarial functions;
14. Planning, executing, and controlling the provision of Company facilities and secretarial services;
15. Managing and controlling the Company's assets and properties;

16. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan general cleaning pada area kerja fasilitas, sarana gedung dan bangunan di lingkungan Perusahaan;	16. Carrying out and supervising general cleaning activities in work areas, facilities, buildings, and structures within the Company;
17. Membuat dan mengevaluasi laporan rutin dan non rutin Sekretaris Perusahaan;	17. Preparing and evaluating both routine and non-routine reports of the Corporate Secretary;
18. Melakukan pembinaan kegiatan terkait bidang kerja kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Perusahaan.	18. Supervising activities related to the Corporate Secretary's functions across all Work Units within the Company.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2024

Implementation of Corporate Secretary's Duties in 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kegiatan tersebut mencakup:

1. Menyusun dan mengendalikan kebijakan, sasaran, desain dan strategi komunikasi internal termasuk pengelolaan media sosial, kegiatan Perusahaan dan protokoler
2. Menyusun dan mengendalikan kebijakan, sasaran dan strategi komunikasi eksternal, pengelolaan *website*, *media relation* dan *sponsorship* termasuk komunikasi dengan lembaga Negara dan lembaga pembuat kebijakan ketenagalistrikan
3. Menyusun dan mengelola sasaran dan strategi serta kegiatan *corporate social responsibility* guna mendukung pencapaian sasaran kerja Perusahaan
4. Melaksanakan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal sebagai berikut:
 - a. Optimalisasi hubungan dua arah dengan *stakeholder* internal dan eksternal melalui media Indonesia Power *Daily New Share* (IDEA), InPower Weekly News (IPWN), Buku Pedoman *Strategic Awareness*, *Wallpaper Desktop*, TV Wall, Videotron, *Standing Banner*, Intranet dan Media sosial.
 - b. Kegiatan Pengelolaan Hubungan dengan *Stakeholders*:
 - Hubungan dengan Pegawai dilaksanakan melalui kegiatan BOD Menyapa Unit, Seminar, Halal Bihalal, *Culture Festival* PLN
 - Hubungan dengan Pelanggan (P2B dan PLN Distribusi) dilakukan melalui Koordinasi rutin yang dilakukan oleh Divisi Niaga dan *Settlement* setiap bulannya.
 - Hubungan dengan *stakeholder* lainnya dilakukan melalui kegiatan *Media Gathering*, RUPS, Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Kerjasama/MOU.

Throughout 2024, the Corporate Secretary carried out various programs and activities as part of fulfilling its duties and responsibilities. These activities include:

1. Developing and managing policies, objectives, designs, and strategies for internal communication, including social media management, corporate events, and protocol arrangements
2. Developing and managing policies, objectives, and strategies for external communication, including website management, media relations, and sponsorships, as well as communication with state institutions and electricity policy-making bodies
3. Developing and managing objectives, strategies, and activities for corporate social responsibility to support the achievement of the Company's performance targets
4. Conducting communication with internal and external parties as follows:
 - a. Optimizing two-way relationships with internal and external stakeholders through Indonesia Power Daily News Share (IDEA), InPower Weekly News (IPWN), the Strategic Awareness Handbook, desktop wallpapers, TV walls, videotrons, standing banners, the intranet, and social media.
 - b. Stakeholder Relations Activities:
 - Employee engagement was carried out through BOD Visits to Units, seminars, Halal Bihalal gatherings, and the PLN Culture Festival
 - Customer relations (with P2B and PLN Distribution) were managed through regular monthly coordination meetings held by the Commercial and Settlement Division.
 - Relations with other stakeholders were maintained through media gatherings, the GMS, coordination meetings, and the signing of cooperation agreements/MOUs.

Pengembangan Kompetensi Competency Development

Guna meningkatkan kompetensinya, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pelatihan dan pendidikan di sepanjang tahun 2024 sebagai berikut:

In order to improve his competency, the Company's Corporate Secretary participated in training and education programs in 2024, as follows:

Nama/Topik Pelatihan Name/Topic of Training	Tanggal Pelaksanaan Date
Workshop Evaluasi Dokumen PROPER Aspek Pemberdayaan Masyarakat Workshop on Evaluation of PROPER Documents – Community Empowerment Aspect	4-8 Februari 2024 4-8 February 2024
Forum Anak Perusahaan PLN Indonesia Power Subsidiaries Forum of PLN Indonesia Power	11-13 Juni 2024 11-13 June 2024
Forum Sekretaris Perusahaan Tahun 2024 Corporate Secretary Forum 2024	6-8 November 2024

Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary's Performance Evaluation

Penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan dilakukan secara berkala oleh Direksi setiap semester, sebagai bagian dari mekanisme pemantauan dan penguatan peran strategis Sekretaris Perusahaan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan dengan mengacu pada pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta kontribusi Sekretaris Perusahaan. Pada tahun 2024, Sekretaris Perusahaan dinilai telah menjalankan seluruh peran dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Berdasarkan hasil capaian KPI tahun 2024, kinerja Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun secara keseluruhan melampaui target yang telah ditetapkan.

The performance of the Corporate Secretary is periodically evaluated by the Board of Directors every semester as part of the monitoring mechanism and to strengthen the strategic role of the Corporate Secretary. This evaluation is conducted based on Key Performance Indicators (KPIs) established by referring to the duties, responsibilities, and contributions of the Corporate Secretary. In 2024, the Corporate Secretary was considered to have carried out all roles and responsibilities very well. Based on the 2024 KPI achievements, the overall performance of the Corporate Secretary throughout the year exceeded the targets set.

Internal Audit

Internal Audit

PT PLN Indonesia Power telah memiliki Satuan Internal Audit yang memegang peranan strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik melalui evaluasi yang sistematis terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Internal Audit tidak hanya menilai desain dan implementasi sistem, tetapi juga memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi secara optimal, selaras dengan tujuan strategis perusahaan, serta mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, aktivitas audit internal dijalankan berdasarkan kebijakan, piagam audit, pedoman, dan prosedur yang telah ditetapkan, yang selaras dengan standar profesi dan praktik terbaik. Sebagai bagian dari komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan, Satuan Internal Audit juga berperan aktif dalam mengidentifikasi peluang perbaikan dan memberikan layanan konsultasi yang bertujuan untuk menambah nilai serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional Perusahaan. Hal ini sejalan dengan peran utama Satuan Internal Audit dalam memberikan *assurance* yang independen kepada Direksi dan pemangku kepentingan bahwa risiko-risiko yang dihadapi telah dikelola secara memadai dan berkelanjutan.

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, Satuan Internal Audit diberikan kewenangan penuh berupa akses tanpa batas ke seluruh unit kerja, aset, dan dokumentasi Perusahaan. Selain itu, Satuan Internal Audit memiliki jalur komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris maupun Komite Audit. Secara rutin, Satuan Internal Audit melaporkan hasil kinerjanya kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dengan fokus pada temuan-temuan utama, identifikasi kelemahan sistem serta rekomendasi perbaikan. Proses ini memberikan landasan yang kuat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis serta memperkuat lingkungan pengendalian internal di lingkungan Perusahaan secara menyeluruh.

PT PLN Indonesia Power has established an Internal Audit Unit that plays a strategic role in supporting the creation of good corporate governance through a systematic evaluation of the effectiveness of internal control systems, risk management, and governance processes. In carrying out its duties, the Internal Audit Unit not only assesses the design and implementation of systems but also ensures that these systems function optimally, align with the Company's strategic objectives, and comply with applicable laws and regulations.

In its implementation, internal audit activities are conducted based on established policies, audit charters, guidelines, and procedures that align with professional standards and best practices. As part of its commitment to continuous improvement, the Internal Audit Unit also actively identifies opportunities for improvement and provides consulting services aimed at adding value and enhancing the Company's operational effectiveness and efficiency. This aligns with the primary role of the Internal Audit Unit in providing independent assurance to the Board of Directors and stakeholders that risks faced are adequately and sustainably managed.

To maintain independence and objectivity, the Internal Audit Unit is granted full authority, including unrestricted access to all work units, assets, and documentation of the Company. Additionally, the Internal Audit Unit has direct communication channels with the Board of Commissioners and the Audit Committee. Regularly, the Internal Audit Unit reports its performance results to the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Audit Committee, focusing on key findings, identification of system weaknesses, and recommendations for improvements. This process provides a strong foundation for management in making strategic decisions and strengthens the internal control environment throughout the Company.

Pedoman Kerja Internal Audit

Internal Audit Work Guidelines

Satuan Internal Audit telah memiliki Piagam Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 0121.K/DIR/2023 dan Nomor 003.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Piagam Audit Internal Terintegrasi (*Integrated Internal Audit Charter*) PT PLN Indonesia Power. Piagam ini disusun untuk mengatur prosedur audit internal Perusahaan, memastikan kepatuhan Satuan Internal Audit terhadap prinsip-prinsip pengaturan dan pelaksanaan audit internal, dan menentukan ruang lingkup tugas dan prosedur pengendalian untuk menjamin dan meningkatkan kualitas audit internal.

Piagam tersebut memuat pengaturan, antara lain tentang:

1. Struktur organisasi Satuan Internal Audit;
2. Tugas dan tanggung jawab serta lingkup pekerjaan;
3. Wewenang;
4. Pelaporan;
5. Audit Internal terintegrasi;
6. Penggunaan jasa eksternal untuk mendukung tugas Audit Internal;
7. Komunikasi audit;
8. Standar pelaksanaann tugas Audit Internal, kode etik dan program *quality assurance*; serta
9. Pertanggungjawaban Satuan Internal Audit.

Selain Piagam Audit, pelaksanaan tugas Satuan Internal Audit juga mengacu pada Pedoman Audit Internal Perusahaan Nomor 0070.P/DIR/2023 tanggal 16 Juni 2023, Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan prosedur lainnya yang diintegrasikan dengan penerapan manajemen risiko.

The Internal Audit Unit has an Internal Audit Charter established by the Board of Directors and the Board of Commissioners through Joint Decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners Number 0121.K/DIR/2023 and Number 003.SK/DK-PLNIP/2023 dated June 15, 2023, on the Integrated Internal Audit Charter of PT PLN Indonesia Power. This charter is designed to regulate the Company's internal audit procedures, ensure the Internal Audit Unit's compliance with principles governing internal audit implementation, and define the scope of duties and control procedures to assure and enhance the quality of internal audits.

The charter outlines provisions including, but not limited to:

1. The organizational structure of the Internal Audit Unit;
2. Duties, responsibilities, and scope of work;
3. Authority;
4. Reporting;
5. Integrated internal audit;
6. Use of external services to support internal audit functions;
7. Audit communication;
8. Standards for internal audit task execution, code of conduct, and quality assurance programs; and
9. Accountability of the Internal Audit Unit.

In addition to the Audit Charter, the Internal Audit Unit carries out its duties by referring to the Company's Internal Audit Guidelines Number 0070.P/DIR/2023 dated June 16, 2023, the Annual Audit Work Program (PKAT), and other procedures integrated with risk management implementation.

Etika dan Profesionalisme Internal Audit

Internal Audit's Ethics and Professionalism

Dalam menjalankan fungsinya, Satuan Internal Audit berpedoman pada prinsip-prinsip etika yang menjadi dasar integritas dan kredibilitas profesional, sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Auditor Internal yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA). Kode Etik ini dilandasi oleh empat prinsip utama, yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Semua auditor internal wajib menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip dalam kode etik, sebagai berikut:

In carrying out its functions, the Internal Audit Unit adheres to ethical principles that form the foundation of professional integrity and credibility, as outlined in the Internal Auditor Code of Conduct issued by The Institute of Internal Auditors (IIA). This Code of Conduct is based on four key principles: integrity, objectivity, confidentiality, and competency. All internal auditors are required to apply and uphold the principles of the code as follows:

Integritas

1. Melakukan pekerjaan audit internal dengan jujur, produktif, profesional dan tanggung jawab;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang berlaku di Perusahaan;
3. Tidak ikut serta dalam kegiatan yang tidak legal atau melakukan kegiatan yang dilarang oleh profesi Auditor; dan
4. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan hukum dan etika yang ditetapkan Perusahaan.

Objektivitas

1. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi penilaian Auditor
2. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya; dan
3. Mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya dalam melaksanakan tugasnya dan jika tidak dilaporkan dapat merugikan Perusahaan.

Kerahasiaan

1. Bijaksana dalam menggunakan dan melindungi informasi yang didapat dalam melakukan pekerjaan; dan
2. Tidak menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan diri sendiri dengan cara yang tidak legal atau tidak berjalan dengan tujuan hukum dan etika di Perusahaan.

Kompetensi

1. Melakukan audit pada objek yang sesuai keterampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan audit;
2. Melaksanakan audit sesuai dengan Piagam dan Pedoman Audit Internal Perusahaan yang sejalan dengan Standar Profesi Auditor Internal; dan
3. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan untuk tujuan peningkatan kualitas dan efisiensi kerja.

Integrity

1. Performing internal audit duties honestly, productively, professionally, and responsibly;
2. Complying with applicable laws, regulations, and internal Company rules;
3. Refraining from engaging in unlawful activities or actions prohibited by the auditing profession; and
4. Respecting and contributing to the legal and ethical objectives set by the Company.

Objectivity

1. Avoiding participation in any activities that may impair the auditor's judgment;
2. Not accepting anything of value that could influence their professional judgment; and
3. Disclosing all material facts known during the performance of duties that, if not reported, may distort the reporting process and harm the Company.

Confidentiality

1. Exercising discretion in the use and protection of information obtained during the course of work; and
2. Not using information obtained in the course of duties for personal gain or in a manner contrary to the legal and ethical objectives of the Company.

Competency

1. Conducting audits in areas aligned with the auditor's skills, knowledge, expertise, and experience;
2. Performing audits in accordance with the Company's Audit Charter and Internal Audit Guidelines, consistent with Internal Auditor Professional Standards; and
3. Continuously enhancing professional competence through ongoing education to improve work quality and efficiency.

Conflict of Interest Statement Satuan Internal Audit

Conflict of Interest Statement of Internal Audit Unit

Satuan Internal Audit senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam Kode Etik Auditor Internal sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas secara profesional, transparan, independen, dan menjaga kerahasiaan informasi. Kepatuhan terhadap kode etik ini mencerminkan komitmen Satuan Internal Audit dalam menjaga integritas fungsi pengawasan serta membangun kepercayaan para pemangku kepentingan.

Sebagai upaya menjaga objektivitas dan independensi, Seluruh Personil Satuan Internal Audit menandatangani Pakta Integritas setiap tahun. Pernyataan ini untuk memastikan bahwa seluruh auditor terbebas dari potensi benturan kepentingan yang dapat memengaruhi kualitas dan objektivitas pelaksanaan fungsi Satuan Internal Audit di PLN Indonesia Power.

The Internal Audit Unit consistently upholds the principles outlined in the Internal Auditor Code of Conduct as its primary guide in carrying out duties in a professional, transparent, and independent manner while maintaining the confidentiality of information. Adherence to this code of conduct reflects the Internal Audit Unit's commitment to preserving the integrity of its oversight function and building trust among stakeholders.

As part of its efforts to maintain objectivity and independence, all Internal Audit Unit Personnel sign the Integrity Pact annually. This declaration ensures that all auditors remain free from any potential conflicts of interest that could compromise the quality and objectivity of the Internal Audit Unit's functions at PLN Indonesia Power.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Duties and Responsibilities of Internal Audit

Satuan Internal Audit bertanggung jawab untuk melakukan audit berbasis risiko yang mencakup semua aspek di Perusahaan. Sesuai dengan Piagam Audit Internal, tugas dan tanggung jawab Satuan Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan audit internal, kebijakan audit, standar audit, metodologi audit, sistem dan teknologi informasi audit Perusahaan sesuai dengan arahan dari PT PLN (Persero), termasuk di dalamnya meningkatkan kualitas audit Perusahaan;
2. Melaksanakan dan mengimplementasikan strategi dan kebijakan bidang tugas internal audit yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan milik Perusahaan dan PT PLN (Persero);
3. Menjalankan peran sebagai *third line of defense* dalam melakukan kegiatan pengendalian internal melalui pelaksanaan audit berdasarkan hasil inputan dari *first line of defense* dan *second line of defense* pengendalian internal perusahaan berjalan dengan optimal;

The Internal Audit Unit is responsible for conducting risk-based audits for all aspects of the Company. In accordance with the Internal Audit Charter, the duties and responsibilities of the Internal Audit Unit are as follows:

1. Aligning the planning, implementation, and evaluation of internal audit management policies and strategies, audit policies, audit standards, audit methodologies, and the Company's audit information systems and technologies in accordance with the directives of PT PLN (Persero), including enhancing the quality of the Company's audits;
2. Implementing and carrying out strategies and policies in the field of internal audit responsibilities in line with the vision, strategies, and policies of the Company and PT PLN (Persero);
3. Acting as the third line of defense in performing internal control activities through audits based on input from the first and second lines of defense to ensure the Company's internal control operates optimally;

4. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program audit internal/audit eksternal (BPK dan KAP)/audit khusus (investigasi/*fraud*) yang berbasis risiko di seluruh lingkup Perusahaan, termasuk di dalamnya berperan sebagai *counterpart* audit eksternal dan memberikan rekomendasi hasil audit internal serta memonitor tindak lanjut penyelesaiannya;
 5. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap usulan atau kebijakan mengenai sistem dan prosedur untuk memastikan sistem dan prosedur tersebut memiliki aspek-aspek pengendalian internal;
 6. Mengelola hubungan kerja dengan auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik, dan/atau instansi lain) dan tindak lanjut hasil audit eksternal;
 7. Memastikan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab internal audit serta Laporan hasil Audit, Temuan Audit dan Rekomendasi Tindak Lanjut kepada pihak internal dan eksternal;
 8. Memastikan perencanaan audit investigasi sesuai dengan penugasan dari Direksi/Dewan Komisaris serta melaksanakan audit investigasi, penyusunan rekomendasi saran perbaikan atas hasil pelaksanaan audit investigasi kepada Direktur Utama;
 9. Memastikan penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA) sebagai masukan bagi auditee dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan proses pengendalian internal manajemen risiko dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) serta memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan Perusahaan;
 10. Menjalankan fungsi pengawasan untuk menjamin terselenggaranya evaluasi dan peran aktif Internal Audit dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal, *Risk Management* dan *Governance Process* secara berkesinambungan berkaitan dengan operasional Perusahaan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Manajemen;
 11. Melakukan evaluasi kecukupan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan oleh *auditee* untuk mengurangi temuan auditor internal dan eksternal;
 12. Memastikan penyusunan, pemantauan dan pelaporan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT); serta
 13. Melaksanakan kegiatan konsultasi dan pemberian saran secara independen dan objektif atas proses bisnis yang sedang dijalankan Manajemen.
4. Ensuring the planning, execution, and evaluation of risk-based internal audit programs/external audits (by the BPK and KAP)/special audits (investigative/*fraud*) across all areas of the Company, including serving as a counterpart to external auditors and providing audit recommendations while monitoring their follow-up;
 5. Providing recommendations based on analysis and evaluation of proposals or policies regarding systems and procedures to ensure that these contain internal control elements;
 6. Managing working relationships with external auditors (Audit Board of Indonesia and Public Accounting Firms, and/or other institutions) and overseeing the follow-up to external audit results;
 7. Ensuring the reporting of the implementation of internal audit duties and responsibilities, as well as reporting Audit Results, Audit Findings, and Follow-Up Recommendations to both internal and external parties;
 8. Ensuring the planning of investigative audits as assigned by the Board of Directors/Board of Commissioners and conducting investigations, compiling recommendations for improvements, and reporting them to the President Director;
 9. Ensuring the preparation of Audit Reports (LHA) as input for auditees to enhance the effectiveness of internal control processes, risk management, and the implementation of Good Corporate Governance (GCG), while adding value toward achieving the Company's goals;
 10. Performing supervisory functions to ensure continuous evaluation and the active role of Internal Audit in enhancing the effectiveness of the Internal Control System, Risk Management, and Governance Process related to Company operations in achieving the objectives set by Management;
 11. Evaluating the adequacy of corrective actions taken by auditees to reduce internal and external audit findings;
 12. Ensuring the preparation, monitoring, and reporting of the Annual Audit Work Program (PKAT); and
 13. Conducting consulting activities and providing independent and objective advice regarding business processes currently being carried out by Management.



Struktur dan Kedudukan Internal Audit Di Perusahaan

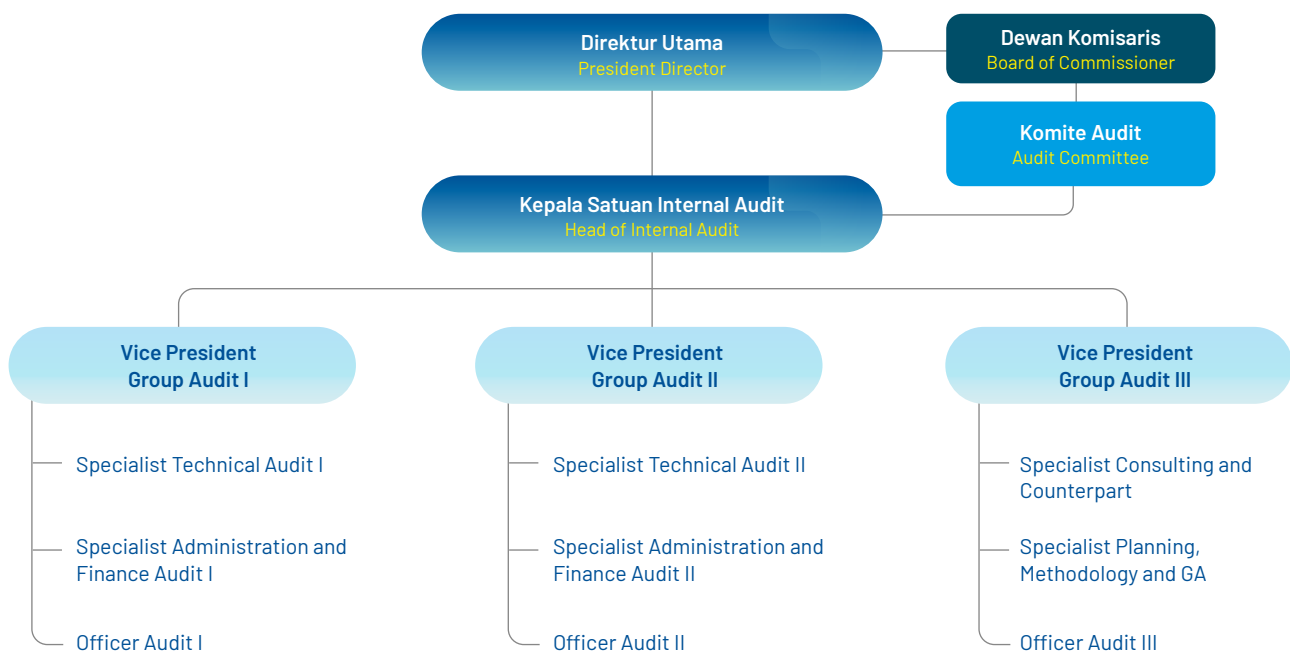
Structure and Position of Internal Audit at the Company

Satuan Internal Audit berkedudukan satu tingkat di bawah Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi langsung ke Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Dalam menjalankan fungsinya, Satuan Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta bertindak independen atau bebas dari campur tangan pihak lain dalam bentuk apapun. Satuan Internal Audit dipimpin oleh Kepala Satuan Internal Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 0058.P/DIR/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Bagan Susunan Jabatan, *Position Grade* dan Formasi Tenaga Kerja Satuan Internal Audit PT PLN Indonesia Power, struktur organisasi Satuan Internal Audit per adalah sebagai berikut:

The Internal Audit Unit's position is one level below the President Director and has a direct line of communication with the Board of Commissioners through the Audit Committee. In carrying out its functions, the Internal Audit Unit reports directly to the President Director and operates independently, free from any interference from other parties in any form. The Internal Audit Unit is led by the Head of the Internal Audit Unit, who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

In accordance with the Board of Directors Regulation Number 0058.P/DIR/2023 dated June 7, 2023, on the Organizational Structure, Position Grades, and Workforce Formation of the Internal Audit Unit of PT PLN Indonesia Power, the organizational structure of the Internal Audit Unit is as follows:



Profil Kepala Satuan Internal Audit

Profile of the Head of Internal Audit

Kepala Satuan Internal Audit saat ini dijabat oleh Sdr. Suparlan yang diangkat oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 3825.K/020/IP/2022. Pengangkatan Kepala Satuan Internal Audit ini telah melalui persetujuan Dewan Komisaris dan memenuhi kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja dan kompetensi yang ditetapkan oleh Perusahaan.

The current Head of the Internal Audit Unit is Mr. Suparlan, who was appointed by the Board of Directors through the Board of Directors' Decision Letter Number 3825.K/020/IP/2022. The appointment of the Head of the Internal Audit Unit had received approval from the Board of Commissioners and met the educational background, work experience, and competency qualifications established by the Company.



Suparlan

Kepala Satuan Internal Audit
Head of Internal Audit

Usia/Tempat Tanggal Lahir Age/ Place, Date of Birth	55 tahun per 31 Desember 2024/13 Februari 1969	51 years old as of December 31, 2024/February 13, 1969.
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesia

Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Periode Jabatan Term of Office	2023 sampai saat ini.	2023-present
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi Nomor 3825.K/020/IP/2022 tanggal 28 Desember 2022.	Board of Directors' Decision Letter Number 3825.K/020/IP/2022 dated December 28, 2022.
Riwayat Pendidikan Riwayat Pendidikan	Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin di STT PLN tahun 2000.	He obtained his Bachelor's degree in Mechanical Engineering from STT PLN in 2000.
Riwayat Jabatan Service History	Sebelum menjabat sebagai Kepala Satuan Internal Audit PLN Indonesia Power, Beliau juga pernah menjabat sebagai: Manajer Operasi UBP Perak Garti 2010 -2012; GM UBP Mrica 2012 -2014; GM UBP Perak Grati 2015 -2017; GM Semarang PGU 2017 -2019;GM Priok POMU 2019-2021; serta EVP Riset, Inovasi & Engenering 2021-2022.	Prior to serving as the Head of the Internal Audit Unit at PLN Indonesia Power, he held several positions, including: Operations Manager of UBP Perak Grati (2010-2012); General Manager of UBP Mrica (2012-2014); General Manager of UBP Perak Grati (2015-2017); General Manager of Semarang PGU (2017-2019); General Manager of Priok POMU (2019-2021); and EVP of Research, Innovation & Engineering (2021-2022)
Sertifikasi Profesi Internal Audit Internal Audit Professional Certification	Beliau telah memperoleh sertifikasi Internal Audit Executive (CIAE).	He holds the Certified Internal Audit Executive (CIAE) certification.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak ada	None
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham.	He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or Shareholders.

Jumlah, Kualifikasi dan Sertifikasi Audit Internal Number, Qualifications, and Certifications of Internal Audit

Sampai dengan akhir tahun 2024, Satuan Internal Audit memiliki 37 orang personil dengan berbagai latar belakang pendidikan dan telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana tercantum di Piagam Audit Internal.

Until the end of 2024, the Internal Audit Unit consisted of 37 personnel with diverse educational backgrounds and had met the qualification and competency requirements as stipulated in the Internal Audit Charter.

Berikut kualifikasi pendidikan yang dimiliki pegawai Satuan Internal Audit Perusahaan tahun 2024.

The following are the educational qualifications held by the Company's Internal Audit Unit personnel in 2024.

Nama Name	Jabatan Position	Latar Belakang Pendidikan Educational Background
Suparlan	Kepala Satuan Internal Audit Head of Internal Audit	Sarjana Mesin Bachelor of Mechanical Engineering
Bayu Husodho	Vice President Group Audit I	Magister Teknik Informatika Master of Informatics Engineering
Hery Suryansyah	Specialist Administration and Finance Audit I	Sarjana Ilmu Ekonomi Bachelor of Economics
Dana Wisastra	Specialist Administration and Finance Audit I	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting
Muarief Edhi Pambudi	Specialist Administration and Finance Audit I	D3 Akuntansi Diploma 3 in Accounting
Robert Sunarijanto	Specialist Technical Audit I	STM Elektro Electronics Technical High School (STM Elektro)
Ganjar Prihartanto	Specialist Technical Audit I	D3 Mesin Diploma 3 in Mechanical Engineering
Setyo Harsono	Specialist Technical Audit I	Magister Teknik Mesin Master of Mechanical Engineering

Nama Name	Jabatan Position	Latar Belakang Pendidikan Educational Background
Choirul Anam	Specialist Technical Audit I	Sarjana Mesin Bachelor of Mechanical Engineering
Yulianti	Specialist Technical Audit I	Sarjana Kimia Bachelor of Chemistry
Unggul Satriatama	Specialist Technical Audit I	Sarjana Elektro/Listrik Bachelor of Electrical/Electronic Engineering
Resta Purnita	Officer Audit I	Sarjana Ekonomi Manajemen Bachelor of Management Economics
Putri Muqodimatul Wahyu Inayah	Officer Audit I	Sarjana Teknik Industri Bachelor of Industrial Engineering
Tomy Afrilianto	Officer Audit I	Sarjana Teknik Industri Bachelor of Industrial Engineering
Yudi Mulyadi	Vice President Group Audit II	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting
Adek Hendriana	Specialist Administration and Finance Audit II	Magister Bidang Manajemen Master in Management
Ika Ramalia	Specialist Administration and Finance Audit II	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting
Agung Wicaksana	Specialist Administration and Finance Audit II	Magister Teknologi Informasi Master of Information Technology
Pupung Purwaningsih	Specialist Administration and Finance Audit II	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting
Hasan Basori	Specialist Technical Audit II	Sarjana Mesin Bachelor of Mechanical Engineering
Harpendi	Specialist Technical Audit II	Sarjana Mesin Bachelor of Mechanical Engineering
Leo Rinaldi Hastasani	Specialist Technical Audit II	Sarjana Mesin Bachelor of Mechanical Engineering
Yovinus Jean Steven	Specialist Technical Audit II	Sarjana Mesin Bachelor of Mechanical Engineering
Zainal Abidin	Specialist Technical Audit II	Magister Teknik Mesin Master of Mechanical Engineering
Mohammad Hisyam Lanang	Officer Audit II	Sarjana Elektronika Bachelor of Electronics
Rudi Istianto	Officer Audit II	D3 Teknik Sipil Diploma 3 in Civil Engineering
Suwarna	Vice President Group Audit III	Sarjana Mesin Bachelor of Mechanical Engineering
Arief Hidayat	Specialist Planning, Methodology and QA	Magister HR & Organizational Studies Master of HR & Organizational Studies
Retno Wulandari	Specialist Planning, Methodology and QA	Magister Manajemen Master of Management
Purwo Adiwiyanto	Specialist Consulting and Counterpart	Sarjana Ilmu Ekonomi Bachelor of Economics
Sentot Kristanto	Specialist Consulting and Counterpart	Magister Manajemen Master of Management
Marpodho	Specialist Consulting and Counterpart	Sarjana Mesin Bachelor of Mechanical Engineering
Musyawir	Specialist Consulting and Counterpart	Sarjana Elektro/Listrik Bachelor of Electrical/Electronic Engineering
Bastian Edward Trijayanto	Officer Audit III	Sarjana Teknik Industri Bachelor of Industrial Engineering
Andreas Novier	Officer Audit III	Sarjana Teknik Sipil Bachelor of Civil Engineering
Betrecia Nurhelena T	Officer Audit III	Sarjana Psikologi Bachelor of Psychology
Nurma Amalia	Junior Officer of Human Capital Development Assigned to Audit III	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting

Untuk menunjang kebutuhan kompetensi auditor dalam pelaksanaan audit, Satuan Internal Audit PLN Indonesia Power menerapkan program pengembangan kompetensi setiap personil auditor melalui sertifikasi dan pelatihan berdasarkan *Training Need Analysis*. Selama tahun 2024 telah dilaksanakan sertifikasi sebagai berikut:

To support the competency needs of auditors in conducting audits, the Internal Audit Unit of PLN Indonesia Power implements a competency development program for each auditor through certification and training based on Training Need Analysis. During 2024, the following certifications had been carried out:

Sertifikasi Certification	Jumlah Sertifikasi Number of Certifications
<i>Qualified Internal Auditor(QIA) Tingkat Manajerial</i> Qualified Internal Auditor (QIA) Managerial Level	33
<i>Qualified Internal Auditor(QIA) Tingkat Dasar</i> Qualified Internal Auditor (QIA) Basic Level	4
<i>Qualified Risk Management Professional(QRMP)</i>	6
<i>Certified Risk Management Professional(CRMP)</i>	2
<i>Qualified Risk Management Officer(QRMO)</i>	18
<i>Certified Internal Auditor Executive(CIAE)</i>	1
<i>Certified Forensic Auditor</i>	1

Program Pengembangan Kompetensi Audit Internal

Competency Development Programs for Internal Audit

Selama tahun 2024, Satuan Internal Audit telah mengikuti berbagai program untuk mengembangkan kompetensi profesional auditor, sebagai berikut:

Throughout 2024, the Internal Audit Unit participated in various programs to develop the professional competencies of auditors, as follows:

Jabatan Position	Nama Diklat Name of Education & Training	Waktu Pelaksanaan Date
Vice President Group Audit I	Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit</i> Qualified Internal Audit Certification	25 - 27 Maret 2024 March 25 - 27, 2024
Specialist Technical Audit II	Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit</i> Qualified Internal Audit Certification	25 - 27 Maret 2024 March 25 - 27, 2024
Specialist Administration and Finance Audit II	Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit</i> Qualified Internal Audit Certification	25 - 27 Maret 2024 March 25 - 27, 2024
Specialist Planning, Methodology and QA	Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit</i> Qualified Internal Audit Certification	25 - 27 Maret 2024 March 25 - 27, 2024
Specialist Administration and Finance Audit II	Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit</i> Qualified Internal Audit Certification	8 - 13 Agustus 2024 August 8 - 13, 2024
Specialist Technical Audit I	Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit</i> Qualified Internal Audit Certification	8 - 13 Agustus 2024 August 8 - 13, 2024
Officer Audit II	Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit</i> Qualified Internal Audit Certification	8 - 13 Agustus 2024 August 8 - 13, 2024
Specialist Consulting and Counterpart	<i>Fraud Auditing I</i>	3 - 6 Desember 2024 December 3 - 6, 2024
Specialist Consulting and Counterpart	<i>Fraud Auditing I</i>	4 - 7 Desember 2024 December 4 - 7, 2024
Officer Audit III	<i>Fraud Auditing I</i>	5 - 8 Desember 2024 December 5 - 8, 2024
Vice President Group Audit III	Seminar Nasional Internal Auditor National Seminar for Internal Auditors	4 - 5 Desember 2024 December 4 - 5, 2024
Vice President Group Audit I	Seminar Nasional Internal Auditor National Seminar for Internal Auditors	4 - 5 Desember 2024 December 4 - 5, 2024
Specialist Planning, Methodology and QA	Seminar Nasional Internal Auditor National Seminar for Internal Auditors	4 - 5 Desember 2024 December 4 - 5, 2024

Jabatan Position	Nama Diklat Name of Education & Training	Waktu Pelaksanaan Date
Specialist Technical Audit II	Seminar Nasional Internal Auditor National Seminar for Internal Auditors	4 - 5 Desember 2024 December 4 - 5, 2024
Specialist Administration and Finance Audit II	Seminar Nasional Internal Auditor National Seminar for Internal Auditors	4 - 5 Desember 2024 December 4 - 5, 2024
Specialist Technical Audit I	Seminar Nasional Internal Auditor National Seminar for Internal Auditors	4 - 5 Desember 2024 December 4 - 5, 2024

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Audit Internal

Report on Implementation of Internal Audit Unit's Work Program

Satuan Internal Audit menyampaikan hasil kerjanya secara berkala dalam bentuk Laporan Hasil Audit kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Pada tahun 2024, Satuan Internal Audit telah melakukan kegiatan sesuai Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang telah disusun berdasarkan pendekatan Risk Based Internal Audit, sebagai berikut.

1. Kegiatan Audit Operasional dan Tematik

Kegiatan audit operasional dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja audit yang telah disetujui oleh Direksi. Selama tahun 2024, Satuan Internal Audit telah melakukan Audit Operasional pada 28 objek audit, yang terdiri dari 1 audit operasional kantor pusat dan 27 audit unit kerja. Selain itu, pada tahun 2024, Satuan Internal Audit juga melakukan audit tematik terhadap beberapa program strategis Perusahaan.

2. Kegiatan Konsultasi dan Review

Sebagai bentuk optimalisasi peran sebagai *strategic business partner*, Satuan Internal Audit turut aktif memberikan layanan konsultasi kepada Kantor Pusat dan unit kerja, dengan tujuan memperkuat proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Sepanjang tahun 2024, Satuan Internal Audit telah memberikan konsultasi aktif dan pasif sebanyak 14 terhadap berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian khusus. Selain itu, Satuan Internal Audit juga melakukan berbagai kegiatan *review* sebanyak 12 kali, di antaranya meliputi *review* atas proses penghapusan aset, evaluasi proyek-proyek perusahaan, dan isu-isu operasional lainnya.

The Internal Audit Unit regularly submits its work results in the form of Audit Reports to the Board of Directors and to the Board of Commissioners through the Audit Committee. In 2024, the Internal Audit Unit carried out activities according to the Annual Audit Work Program (PKAT), which was prepared based on a Risk-Based Internal Audit approach, as follows:

1. Operational and Thematic Audit Activities

Operational audits were conducted according to the audit work plan approved by the Board of Directors. Throughout 2024, the Internal Audit Unit conducted Operational Audits on 28 audit objects, consisting of 1 operational audit at the head office and 27 audits of work units. In addition, in 2024, the Internal Audit Unit also performed thematic audits on several of the Company's strategic programs.

2. Consultation and Review Activities

As part of optimizing its role as a strategic business partner, the Internal Audit Unit actively provided consultation services to the Head Office and work units, aiming to strengthen governance processes, risk management, and internal controls. Throughout 2024, the Internal Audit Unit offered consultations on various strategic issues requiring special attention. Moreover, the Internal Audit Unit also carried out several review activities, including reviews of asset write-off processes, evaluations of Company projects, and other operational issues.

3. Kegiatan Pendampingan

Dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas, Satuan Internal Audit juga melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan audit eksternal yang dilakukan oleh SPI PT PLN (Persero), BPK RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses audit eksternal serta memberikan klarifikasi dan dukungan informasi yang diperlukan oleh auditor eksternal selama proses pemeriksaan berlangsung.

4. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit

Satuan Internal Audit secara aktif melaksanakan proses monitoring terhadap tindak lanjut hasil temuan audit sebagai bagian dari upaya memastikan efektivitas pengendalian internal dan perbaikan berkelanjutan. Seluruh temuan audit telah disampaikan kepada Unit/Departemen terkait, dan proses tindak lanjutnya dimonitor secara berkala melalui aplikasi ProRBA. Per 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 406 rekomendasi audit yang dihasilkan dari penugasan audit pada Kantor Pusat, Unit Bisnis Pembangkitan (UBP), Unit Bisnis Pemeliharaan (UBH), serta entitas anak perusahaan (subsidiaries). Hasil temuan atau rekomendasi yang menjadi kewajiban tindak lanjut pada tahun 2024 seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti dengan tingkat penyelesaian 100%

5. Kebijakan dan Frekuensi Rapat Audit Internal Bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

Satuan Internal Audit melakukan komunikasi dengan Direksi dan Komite Audit dengan mengadakan rapat secara berkala mengenai rencana strategis Perusahaan, penyusunan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan perkembangan rencana audit tahunan, serta kinerja Satuan Internal Audit yang terdiri atas laporan hasil audit dan status implementasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Satuan Internal Audit dapat mengikuti rapat Direksi dan rapat yang diselenggarakan atas inisiasi Satuan Internal Audit maupun atas permintaan Komite Audit.

Sepanjang tahun 2024, Satuan Internal Audit telah mengikuti rapat bersama Direksi sebanyak 13 kali rapat dan rapat bersama Komite Audit sebanyak 3 (tiga) kali rapat.

3. Assistance Activities

To support transparency and accountability, the Internal Audit Unit also provided assistance during external audits conducted by the Internal Audit Unit of PT PLN (Persero), the Audit Board of Indonesia (BPK RI), the Inspectorate General of the Ministry of Finance, and the Directorate General of Customs and Excise. This assistance aimed to ensure the smooth running of the external audit process as well as to provide clarifications and necessary information to external auditors during the examination process.

4. Monitoring Follow-up on Audit Findings

The Internal Audit Unit actively monitors the follow-up process on audit findings as part of efforts to ensure the effectiveness of internal controls and continuous improvements. All audit findings have been communicated to the relevant Units/Departments, and the follow-up process is monitored regularly through the ProRBA application. As of December 31, 2024, there were 406 audit recommendations resulting from audit assignments at the Head Office, Generation Business Units (UBP), Maintenance Business Units (UBH), and subsidiaries. All findings or recommendations requiring follow-up in 2024 had been fully addressed with a 100% completion rate.

5. Policy and Frequency of Internal Audit Meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee

The Internal Audit Unit communicates with the Board of Directors and Audit Committee by holding regular meetings regarding the Company's strategic plans, preparation of the Annual Audit Work Program (PKAT), developments in the annual audit plan, and the performance of the Internal Audit Unit consisting of audit reports and the status of corrective actions implemented. The Internal Audit Unit may attend Board of Directors meetings and meetings initiated by the Internal Audit Unit or requested by the Audit Committee.

Throughout 2024, the Internal Audit Unit attended 13 meetings with the Board of Directors and 3 meetings with the Audit Committee.

Keterangan Description	Rapat Satuan Internal Audit dengan Internal Audit Unit Meeting with	
	Direksi Board of Directors	Komite Audit Audit Committee
Jumlah Rapat Total Meetings	13	3
Kehadiran Attendances	100%	100%

Evaluasi Kinerja Audit Internal

Evaluation of Internal Audit Performance

Evaluasi terhadap kinerja Satuan Internal Audit dilakukan secara periodik melalui pengukuran pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) tahunan yang telah disepakati antara Kepala Satuan Internal Audit dan Direktur Utama. Penilaian ini mencakup berbagai aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Internal Audit sepanjang tahun 2024, termasuk efektivitas pelaksanaan audit, ketepatan waktu penyelesaian audit, serta kontribusi dalam mendukung tata kelola dan manajemen risiko perusahaan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja telah tercapai melebihi target 100%. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Satuan Internal Audit dalam menjalankan fungsi assurance dan konsultasi secara optimal demi peningkatan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Evaluation of the Internal Audit Unit's performance is conducted periodically through the measurement of annual Key Performance Indicators (KPIs) agreed upon between the Head of the Internal Audit Unit and the President Director. This assessment covers various aspects of the Internal Audit Unit's duties and responsibilities throughout 2024, including the effectiveness of audit implementation, timeliness of audit completion, and contributions to supporting corporate governance and risk management. The evaluation results show that all performance indicators had been achieved, exceeding the 100% target. This reflects the Internal Audit Unit's strong commitment to optimally carrying out its assurance and consulting functions for the sustainable improvement of corporate governance.



Manajemen Risiko

Risk Management

PLN Indonesia Power menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas dan proses bisnis, termasuk inisiatif strategis yang dijalankan dalam sektor ketenagalistrikan yang dinamis. Oleh karena itu, manajemen risiko diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam seluruh lini bisnis dan fungsi operasional Perusahaan sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan yang berbasis risiko (*risk-based decision making*) guna menjamin pencapaian tujuan strategis dan operasional secara berkelanjutan.

Sepanjang tahun buku 2024, sistem manajemen risiko terus dikembangkan dan diperkuat untuk meningkatkan efektivitasnya. Inisiatif penguatan ini meliputi penyempurnaan kebijakan risiko, penyusunan *risk roadmap*, serta pengukuran efektivitas manajemen risiko yang diselaraskan dengan ketentuan terkini, termasuk regulasi terbaru dari Kementerian BUMN. Penguatan ini juga mencakup integrasi aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST/ESG) ke dalam kerangka manajemen risiko sebagai bagian dari komitmen Perusahaan terhadap keberlanjutan.

PLN Indonesia Power recognizes that risk is an inseparable part of all activities and business processes, including strategic initiatives implemented in the dynamic electricity sector. Therefore, risk management is thoroughly integrated into all business lines and operational functions of the Company as a foundation for risk-based decision making to ensure the sustainable achievement of strategic and operational objectives.

Throughout the 2024 fiscal year, the risk management system had been continuously developed and strengthened to improve its effectiveness. These enhancement initiatives included the refinement of risk policies, the development of a risk roadmap, and the measurement of risk management effectiveness in alignment with the latest provisions, including new regulations from the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs). This strengthening also covered the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects into the risk management framework as part of the Company's commitment to sustainability.

Kebijakan dan Kerangka Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

Risk Management Policy and Framework

PLN Indonesia Power menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko Perusahaan secara menyeluruh. Kebijakan ini mendefinisikan proses manajemen risiko, penetapan tanggung jawab yang jelas, serta mekanisme pelaporan yang transparan dan terukur. Sebagai respons terhadap perkembangan regulasi terbaru, khususnya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, PLN Indonesia Power telah melakukan pembaruan terhadap kebijakan risiko Perusahaan. Pembaruan tersebut dituangkan dalam Peraturan Direksi No. 0027.P/DIR/2024 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN Indonesia Power.

PLN Indonesia Power has established the Corporate Risk Management Policy as a guideline for the comprehensive implementation of risk management across the Company. This policy defines the risk management process, sets clear responsibilities, and outlines transparent and measurable reporting mechanisms. In response to recent regulatory developments, particularly the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. PER-2/MBU/03/2023 on Governance Guidelines and Significant Corporate Actions for State-Owned Enterprises, PLN Indonesia Power has updated its corporate risk policy. This update is outlined in the Board of Directors Regulation No. 0027.P/DIR/2024 on the Strategic Policy for Integrated Risk Management of PT PLN Indonesia Power.

Selain itu, PLN Indonesia Power juga telah memiliki sejumlah pedoman pendukung untuk memastikan penerapan manajemen risiko secara konsisten, terstruktur, dan berkelanjutan di seluruh lini bisnis. Pedoman-pedoman tersebut meliputi:

1. Peraturan Direksi No. 0073.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Umum Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (*Governance, Risk, and Compliance*/GRC) Terintegrasi;
2. Surat Keputusan Direksi No. 030.K/010/IP/2019 tentang Peningkatan *Risk Awareness & Risk Culture* di Lingkungan Perusahaan;
3. Surat Edaran Direksi No. 12.E/012/IP/2021 tentang Taksonomi Risiko Perusahaan sebagai acuan klasifikasi dan pemetaan risiko yang sistematis;
4. Surat Edaran Direksi No. 0005.E/DIR/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan *Fraud Risk Assessment* sebagai bentuk penguatan pengendalian terhadap risiko kecurangan.

Seluruh kebijakan dan pedoman tersebut disusun untuk mendukung pengembangan sistem manajemen risiko yang adaptif, akuntabel, dan selaras dengan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Furthermore, PLN Indonesia Power has developed a number of supporting guidelines to ensure consistent, structured, and sustainable implementation of risk management across all business lines. These guidelines include:

1. Board of Directors Regulation No. 0073.P/DIR/2023 on the General Policy for the Implementation of Integrated Governance, Risk Management, and Compliance (GRC);
2. Board of Directors' Decision Letter No. 030.K/010/IP/2019 on the Enhancement of Risk Awareness & Risk Culture within the Company;
3. Board of Directors' Circular Letter No. 12.E/012/IP/2021 on the Company Risk Taxonomy as a reference for the systematic classification and mapping of risks;
4. Board of Directors' Circular Letter No. 0005.E/DIR/2023 dated 15 September 2023 on Guidelines for Conducting Fraud Risk Assessment as a measure to strengthen fraud risk controls.

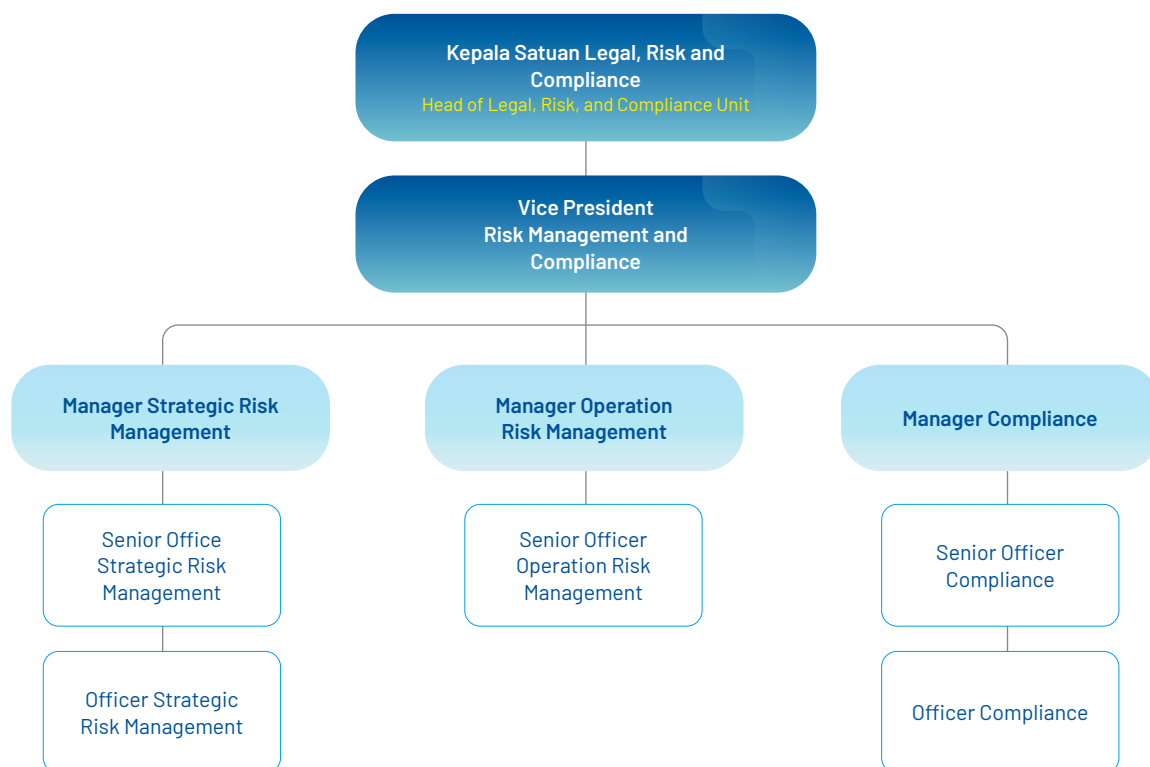
All these policies and guidelines are designed to support the development of an adaptive, accountable risk management system aligned with good corporate governance principles.

Pengelola Manajemen Risiko Perusahaan

Risk Management Administrator

Sistem manajemen risiko PLN Indonesia Power dijalankan secara fungsional melalui unit khusus yang menangani proses manajemen risiko secara terintegrasi. Fungsi ini berada di bawah pengelolaan Satuan Legal, Risk and Compliance, yang bertanggung jawab atas implementasi dan pengawasan manajemen risiko di Perusahaan. Pembentukan fungsi manajemen risiko tersebut ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. 060.P/DIR/2023, sebagai perubahan atas Keputusan Direksi No. 247.K/010/IP/2022 tentang Bagan Susunan Jabatan, Position Grade, dan Formasi Tenaga Kerja pada Satuan Legal, Risk and Compliance.

PLN Indonesia Power's risk management system is functionally implemented through a special unit that handles the risk management process in an integrated manner. This function operates under the management of the Legal, Risk, and Compliance Unit, which is responsible for the implementation and oversight of risk management within the Company. The establishment of this risk management function is stipulated in the Board of Directors Regulation No. 060.P/DIR/2023, which amends the Board of Directors' Decision No. 247.K/010/IP/2022 on the Organizational Structure, Position Grades, and Workforce Formation within the Legal, Risk, and Compliance Unit.



Jumlah, Kualifikasi dan Sertifikasi Manajemen Risiko

Number, Qualification and Certification of Risk Management

Sampai dengan akhir tahun 2024, personil Satuan Legal, Risk and Compliance berjumlah 15 orang dan seluruhnya telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagai fungsi pengelola manajemen risiko. Sebanyak 14 orang personel manajemen risiko telah memiliki sertifikat profesi, sebagaimana tabel berikut:

Until the end of 2024, the Legal, Risk, and Compliance Unit consisted of 15 personnel, all of whom had met the qualification and competency requirements for their roles in risk management. A total of 14 risk management personnel had obtained professional certifications, as shown in the following table:

Nama Sertifikasi Certification Name	Jumlah Personel Manajemen Risiko yang Tersertifikasi Number of Certified Risk Management Personnel
Qualified Risk Governance Professional (QRGP/CRGP)	1
Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	1
Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	4
Qualified Risk Management Officer (QRMO)	3
Qualified Risk Management Professional (QRMP)	5

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Manajemen Risiko

Duties and Responsibilities of Risk Management Administrator

Pengelolaan risiko di PLN Indonesia Power dilaksanakan oleh seluruh pemilik risiko (*risk owner*) di setiap lini kegiatan. Bidang Manajemen Risiko bertugas memastikan pengelolaan risiko berjalan sesuai kebijakan, ketentuan, dan praktik terbaik, serta memberikan pendampingan dalam penyusunan dan verifikasi dokumen manajemen risiko, seperti kajian operasi, lingkungan, hukum, finansial, dan risiko. Bidang Manajemen Risiko juga mendukung penyusunan kajian risiko strategis untuk pengambilan keputusan Direksi serta proses persetujuan oleh Dewan Komisaris atau RUPS, guna memastikan seluruh keputusan berbasis risiko.

Rincian tugas dan tanggung jawab pengelolaan risiko di setiap tingkat organisasi, termasuk Dewan Komisaris dan Komite, diatur dalam Peraturan Direksi No. 0027.P/DIR/2024 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi.

Risk management at PLN Indonesia Power is carried out by all risk owners in each line of activity. The Risk Management Department is responsible for ensuring that risk management is implemented in accordance with policies, regulations, and best practices. It also provides assistance in the preparation and verification of risk management documents, such as operational, environmental, legal, financial, and risk assessments. The Risk Management Department also supports the development of strategic risk assessments to inform decision-making by the Board of Directors and the approval process by the Board of Commissioners or the GMS, ensuring that all decisions are risk-based.

The detailed duties and responsibilities of risk management at each organizational level, including the Board of Commissioners and Committees, are governed by the Board of Directors Regulation No. 0027.P/DIR/2024 on the Strategic Policy for Integrated Risk Management.

Pihak/Pengelola Party/Manager	Pokok dan Tanggung Jawab Utama Main Principle and Responsibilities	
Dewan Komisaris Board of Commissioners	1. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat korporat. 2. Memastikan adanya upaya pengawasan yang efektif, proaktif dan berkesinambungan atas berlangsungnya pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat korporat.	1. Overseeing the implementation of risk management at the corporate level. 2. Ensuring the existence of effective, proactive, and continuous oversight of the implementation of risk management at the corporate level.
Dewan Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	Mengawasi penerapan manajemen risiko korporat secara efektif, sesuai dengan Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Korporat yang berlaku.	Supervising the effective implementation of corporate risk management in accordance with the prevailing Corporate Risk Management Policy.
Direksi Board of Directors	1. Memastikan terbangunnya sistem pengelolaan manajemen risiko korporat. 2. Memastikan tersedianya profil risiko korporat. 3. Penanggungjawab utama pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat korporat. 4. Memastikan keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan risiko perusahaan secara efektif, proaktif dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan dan Kebijakan yang berlaku serta elemen tata kelola Manajemen Risiko Korporat (kriteria dampak dan kemungkinan, format peta risiko, standar respon risiko, kebijakan Manajemen Risiko). 5. Memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko (SDM, finansial serta infrastruktur pendukung lainnya) 6. Sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan risiko di tingkat korporat.	1. Ensuring the establishment of a corporate risk management system. 2. Ensuring the availability of the corporate risk profile. 3. Serving as the primary person responsible for the implementation of risk management at the corporate level. 4. Ensuring the effective, proactive, and continuous implementation of corporate risk management in accordance with applicable regulations and policies, as well as the elements of corporate risk management governance (impact and possible criteria, risk map format, risk response standards, and Risk Management Policy). 5. Ensuring the availability of necessary resources for the implementation of risk management (human resources, financial resources, and other supporting infrastructure). 6. Acting as the decision-maker in corporate-level risk management

Pihak/Pengelola Party/Manager	Pokok dan Tanggung Jawab Utama Main Principle and Responsibilities	
Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR) Risk Management Governing Director (DPMR)	- Berperan sebagai anggota Direksi pemegang mandat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melaksanakan pengelolaan Risiko perusahaan - Berperan sebagai pembina Satuan Kerja Manajemen Risiko di Kantor Pusat maupun Fungsi Manajemen Risiko di Unit Induk/Pusat-Pusat	- Acting as a member of the Board of Directors mandated by the General Meeting of Shareholders (GMS) to carry out the Company's Risk Management. - Acting as a mentor for the Risk Management Unit at the Head Office as well as for the Risk Management Function at the Parent Unit/Centers.
Bidang Manajemen Risiko Risk Management Department	- Sebagai penanggung jawab penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi perusahaan sesuai dengan desain kerangka kerja dan tata kelola Risiko, beserta upaya pengembangannya. - Sebagai pendamping dan Checker/Reviewer, dan Approval sesuai mekanisme pendelegasian wewenang terhadap penilaian Risiko maupun tindak lanjut Risiko perusahaan. - Sebagai pemberi masukan terhadap penilaian Risiko maupun tindak lanjut Risiko yang dijalankan oleh <i>Risk Leader</i> dan <i>Risk Champion</i> di Unit Kerja dan Kantor Pusat. - Melakukan <i>update</i> dan perbaikan tools, aplikasi, <i>dashboard</i> Manajemen Risiko	- Serving as the person in charge of implementing the Company's Integrated Risk Management in accordance with the designed risk framework and governance, including its development efforts. - Serving as a companion, checker/reviewer, and approver in accordance with the delegated authority mechanism for risk assessments and the Company's risk mitigation actions. - Providing input on risk assessments and mitigation actions conducted by Risk Leaders and Risk Champions in Work Units and the Head Office. - Carrying out updates and improvements to Risk Management tools, applications, and dashboards.
Risk Officer	- Mengoordinasikan dan memfasilitasi proses Manajemen Risiko Terintegrasi (identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, pendokumentasian, pemantauan dan pelaporan) yang dilakukan Risk Leader pada bidang kerjanya - Berperan sebagai penghubung dalam proses komunikasi dan konsultasi dengan Bidang Manajemen Risiko dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	- Coordinating and facilitating the Integrated Risk Management process (identifying, analyzing, evaluating, treating, documenting, monitoring, and reporting) carried out by the Risk Leader in its respective work areas. - Acting as a liaison in the communication and consultation process with the Risk Management Division in implementing Integrated Risk Management.
Pemilik Risiko Risk Owner	- Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan risiko (berikut pelaporannya) secara efektif, proaktif dan berkesinambungan pada area tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka melakukan suatu upaya pemastian atas pencapaian sasaran perusahaan di tingkatnya masing-masing. - Melakukan pengelolaan risiko (berikut pelaporannya) yang dihadapi secara efektif, proaktif dan berkesinambungan.	- Being responsible for implementing risk management (including reporting) effectively, proactively, and sustainably within its respective areas of duty and responsibility, as part of ensuring the achievement of the Company's objectives at their level. - Managing risks (including reporting) effectively, proactively, and sustainably.
Satuan Internal Audit Internal Audit Unit	- Berperan dalam melaksanakan fungsi audit internal PLN Indonesia Power. - Sebagai <i>reviewer</i> terhadap pelaksanaan penerapan manajemen Risiko terintegrasi dan praktik pengelolaan Risiko perusahaan	- Playing a role in carrying out the internal audit function of PLN Indonesia Power. - Reviewing the implementation of integrated risk management and the Company's risk management practices.
Risk Leader	- Sebagai <i>reviewer</i> dan <i>approver</i> atas: - Penilaian dan tindak lanjut Kajian Risiko dalam proses pengambilan keputusan kritikal; - Penilaian dan tindak lanjut Profil Risiko pada Unit Kerja dan Kantor Pusatnya; dan <i>Risk Leader</i> Kantor Pusat dan Unit Kerja bertanggung jawab kepada Direksi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi serta pengendalian internal pada entitas kerjanya	- Reviewing and approving the following: - Risk assessment and follow-up of Risk Studies in critical decision-making processes; - Risk assessment and follow-up of Risk Profiles in Work Units and its respective Head Office. - Risk Leaders at the Head Office and Work Units are responsible to the Board of Directors for the effectiveness of Integrated Risk Management implementation and internal control within their respective entities.

Pihak/Pengelola Party/Manager	Pokok dan Tanggung Jawab Utama Main Principle and Responsibilities	
Risk Champion	- Berperan sebagai <i>Marker</i> atas : - penilaian dan tindak lanjut Kajian Risiko dalam proses pengambilan keputusan kritikal. - penilaian dan tindak lanjut Kajian Risiko pada Unit Kerja; dan - pelaporan Risiko kepada <i>Risk Leader</i>. <i>Risk Champion</i> bertanggung jawab kepada <i>Risk Leader</i> masing-masing atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi serta pengendalian internal pada Unit Kerja	- Acting as a Marker for: - assessing and following up on Risk Studies in critical decision-making processes; - assessing and following up on Risk Studies in Work Units; and - reporting risks to the Risk Leader. - Risk Champions are responsible to their respective Risk Leaders for the effectiveness of Integrated Risk Management implementation and internal control within the Work Units.



Kerangka Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

Risk Management System Framework

PLN Indonesia Power menerapkan kerangka sistem manajemen risiko yang dirancang secara menyeluruh dan terstruktur untuk mendukung pencapaian tujuan strategis dan operasional Perusahaan. Kerangka ini mengacu pada pendekatan *Three Lines of Defense*, yang bertujuan untuk memastikan tata kelola yang kuat dan pengendalian internal yang efektif di seluruh jenjang organisasi. Pengembangan sistem manajemen risiko Perusahaan mengadopsi prinsip-prinsip *Enterprise Risk Management* (ERM) yang selaras dengan standar internasional SNI ISO 31000:2018, serta mengacu pada Kebijakan Manajemen Risiko PLN Indonesia Power.

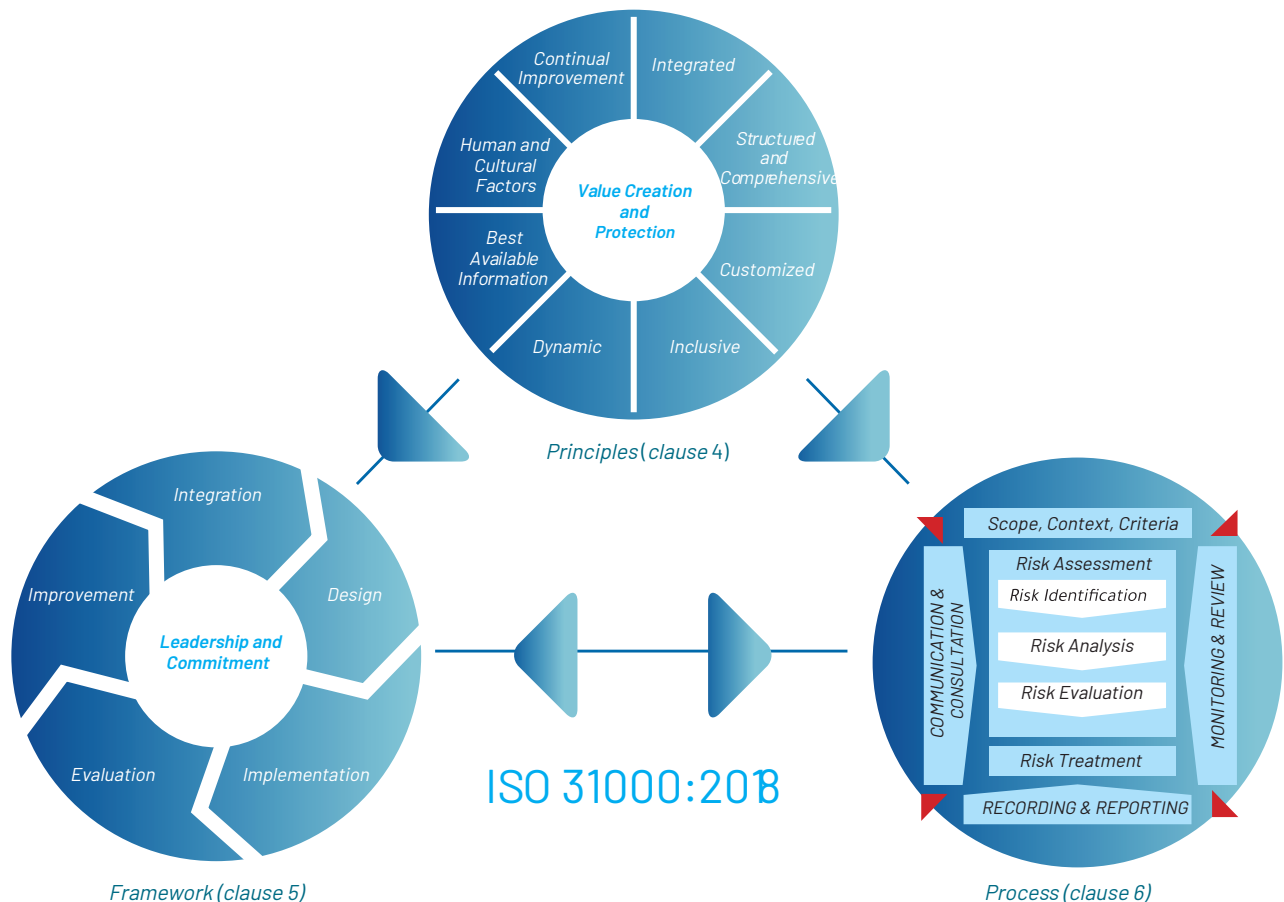
PLN Indonesia Power implements a comprehensive and structured risk management system framework designed to support the achievement of the Company's strategic and operational objectives. This framework adopts the Three Lines of Defense approach, which aims to ensure strong governance and effective internal control across all levels of the organization. The development of the Company's risk management system is based on Enterprise Risk Management (ERM) principles aligned with the international standard SNI ISO 31000:2018, and refers to the PLN Indonesia Power Risk Management Policy.

Kerangka ini didukung oleh tiga komponen utama, yaitu: Kebijakan manajemen risiko yang komprehensif, Struktur organisasi yang mendukung fungsi manajemen risiko secara terintegrasi, dan Proses manajemen risiko yang berkelanjutan dan terdokumentasi dengan baik.

This framework is supported by three main components: a comprehensive risk management policy, an organizational structure that supports integrated risk management functions, and a sustainable and well-documented risk management process.

Penerapan SNI ISO 31000:2018 Manajemen Risiko

Implementation of SNI ISO 31000:2018 Risk Management



Proses manajemen risiko dilakukan secara terpusat untuk memastikan bahwa setiap risiko dan peluang dapat diidentifikasi secara tepat waktu, dinilai secara objektif, serta dilaporkan secara transparan. Hal ini memungkinkan Perusahaan untuk menetapkan prioritas risiko secara efektif dan mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko di seluruh tingkatan manajemen. Penanggung jawab risiko (*risk owner*) di setiap unit kerja ditetapkan secara jelas dan memiliki peran aktif dalam pengelolaan serta pemantauan risiko di unit masing-masing.

The risk management process is carried out in a centralized manner to ensure that every risk and opportunity can be identified in a timely manner, assessed objectively, and reported transparently. This enables the Company to effectively prioritize risks and support risk-based decision-making at all levels of management. Risk owners in each work unit are clearly designated and play an active role in managing and monitoring risks within their respective units.

Peta Profil Risiko Tahun 2024

Risk Profile Map in 2024

PLN Indonesia Power telah mengelola berbagai jenis risiko yang meliputi risiko operasional dan non-operasional, risiko strategis, risiko bisnis, serta risiko yang bersifat emergen atau memiliki tingkat ketidakpastian tinggi. Perusahaan secara proaktif memetakan seluruh potensi risiko dan peluang yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan bisnis, sekaligus menyusun rencana mitigasi yang terukur, terarah, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Proses identifikasi dan evaluasi risiko dituangkan dalam *Risk Register* Risiko Utama Perusahaan, yang ditetapkan setelah dilakukan pengendalian dan penilaian terhadap risiko residu melalui pemetaan risiko residu (*Residu Risk Mapping*).

PLN Indonesia Power has managed various types of risks, including operational and non-operational risks, strategic risks, business risks, as well as emerging risks or risks with a high level of uncertainty. The Company proactively maps all potential risks and opportunities that may affect the achievement of its business objectives, while also developing measurable, targeted, and effectively executable mitigation plans. The process of risk identification and evaluation is documented in the Company's Key Risk Register, which is established after conducting controls and assessing residual risks through Residual Risk Mapping.

Peta Profil Risiko Perusahaan Tahun 2024
Risk Profile Map in 2024

Tingkat Kemungkinan Possibility	Sangat Besar Very High Possibility	E	Moderat Moderate	Moderat Moderate	Tinggi High	Sangat Tinggi Very High	Ekstrim Extreme
	Besar High Possibility	D	Rendah Low	Moderat Moderate	7 Tinggi High	2 4 Sangat Tinggi Very High	Ekstrim Extreme
	Sedang Medium Possibility	C	Rendah Low	Moderat Moderate	3 8 Tinggi High	3 5 6 Tinggi High	Sangat Tinggi Very High
	Kecil Low Possibility	B	Rendah Low	5 9 Rendah Low	1 2 4 Moderat Moderate	Tinggi High	Sangat Tinggi Very High
	Sangat Kecil Very Low Possibility	A	Rendah Low	Rendah Low	10 12 Moderat Moderate	11 Tinggi High	Tinggi High
			1 Tidak Signifikan Insignificant	2 Minor	3 Medium	4 Signifikan Significant	5 Malapetaka Disastrous
			Tingkat Dampak Impact Level				

Keterangan

- Risiko Residu
- Risiko Target

Remarks

- Residual Risk
- Target Risk

No	ID Risiko Risk ID	Kelompok Risiko Risk Group	
1	0.5-PIP.2024	Risiko Ketersediaan dan Keandalan Pembangkit tidak tercapai dari target	Power Plant Availability and Reliability Risk not achieved as targeted
2	0.4-PIP.2024	Kontinuitas Pasokan Energi Primer	Continuity of Primary Energy Supply
3	0.14.1-PIP.2024	Terjadi Kecelakaan Kerja serta Bahaya Kebakaran dikarenakan Implementasi K2 & K3 belum optimal	Occurrence of Work Accidents and Fire Hazards due to suboptimal implementation of Electrical Safety & OHS
4	0.14.2-PIP.2024	Pengelolaan Lingkungan yang belum Optimal berdampak pada tidak tercapainya target Proper Perusahaan	Suboptimal environmental management impacting the Company's PROPER performance target achievement
5	0.13-PIP.2024	Ancaman terhadap <i>Cyber Security System</i> pada Infrastruktur Teknologi Informasi Perusahaan	Threats to the Cyber Security System of the Company's information technology infrastructure
6	P.8-PIP.2024	Keterlambatan Penyelesaian Proyek & Pemeliharaan Pembangkit	Delays in Project Completion and Power Plant Maintenance
7	S.3.6.1-PIP.2024	Pengembangan Energi Transisi Hijau belum optimal	Suboptimal development of Green Energy Transition
8	S.3.6.2-PIP.2024	Pengembangan Portofolio Bisnis dan Pendapatan Beyond KWH belum optimal	Suboptimal development of Business Portfolio and Revenue Beyond kWh
9	0.11-PIP.2024	Kapasitas, Kapabilitas & Budaya SDM belum Optimal dalam menghadapi <i>New Business Model</i>	Suboptimal Human Resource Capacity, Capability, and Culture in facing the New Business Model
10	0.9.14.7-PIP.2024	Implementasi Digitalisasi Pembangkit Kurang Optimal	Suboptimal Implementation of Power Plant Digitalization
11	0.7.1-PIP.2024	Kontribusi APPA PLN Indonesia Power belum optimal dalam mendukung <i>Sustainability</i> Perusahaan	Suboptimal contribution of APPA PLN Indonesia Power in supporting the Company's sustainability
12	K.19-PIP.2024	Impelementasi Kepatuhan terhadap Regulasi belum Optimal	Suboptimal implementation of Regulatory Compliance

Jenis Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Mitigasinya

Types of Risks Exposed to the Company and Their Mitigation

Dari hasil identifikasi risiko, diperoleh 12 risiko utama Perusahaan dan telah melaksanakan pengelolaan risiko-risiko tersebut, termasuk melakukan mitigasi risiko, sebagai berikut:

Based on the results of risk identification, 12 significant risks of the Company have been identified, and risk management efforts have been carried out, including risk mitigation, as follows:

Jenis Risiko yang Dihadapi Type of Risks	Mitigasi Mitigation
Ketersediaan dan Keandalan Pembangkit tidak tercapai dari target Power Plant Availability and Reliability Not Achieving the Target	Untuk memitigasi risiko tidak tercapainya target ketersediaan dan keandalan pembangkit, PLN Indonesia Power melaksanakan berbagai program strategis, seperti revitalisasi, rehabilitasi, dan modifikasi peralatan, serta penggantian komponen utama yang telah usang. Optimalisasi pemeliharaan dilakukan melalui pelaksanaan overhaul berbasis prinsip 50N, kapitalisasi biaya overhaul, dan penguatan manajemen aset. Selain itu, kompetensi personel ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi, serta pemanfaatan sistem REOC sebagai early warning system guna memastikan monitoring pembangkit berjalan optimal.
	To mitigate the risk of not achieving the targeted generation availability and reliability, PLN Indonesia Power implements various strategic programs, such as revitalization, rehabilitation, and equipment modification, as well as the replacement of obsolete key components. Maintenance optimization is carried out through overhaul activities based on the 50N principles, capitalization of overhaul costs, and asset management strengthening. In addition, personnel competencies are enhanced through training and certification, and the use of the REOC system as an early warning system ensures optimal power plant monitoring.

Jenis Risiko yang Dihadapi Type of Risks		Mitigasi Mitigation
Gangguan Kontinuitas Pasokan Energi Primer Disruption to the Continuity of Primary Energy Supply	Untuk memitigasi risiko gangguan kontinuitas pasokan energi primer, PLN Indonesia Power melaksanakan sejumlah langkah strategis, antara lain revitalisasi dan overhaul peralatan <i>Coal & Ash Handling System</i> , serta pengadaan <i>strategic part</i> untuk sistem konveyor. Perusahaan juga menjalin koordinasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk PLN dan Kementerian ESDM, guna memastikan alternatif pasokan batu bara dan penambahan pasokan gas dalam negeri. Selain itu, dilakukan evaluasi kinerja mitra penyedia biomassa, analisis kualitas batu bara dan gas melalui laboratorium independen, serta strategi pengadaan batu bara spot untuk mengantisipasi kondisi darurat pasokan.	To mitigate the risk of disruption to the continuity of primary energy supply, PLN Indonesia Power undertakes several strategic measures, including revitalization and overhaul of Coal & Ash Handling System equipment, as well as procurement of strategic parts for the conveyor system. The Company also maintains close coordination with various stakeholders, including PLN and the Ministry of Energy and Mineral Resources, to ensure alternative coal supply options and increased domestic gas supply. Moreover, performance evaluations of biomass supply partners are conducted, along with coal and gas quality analyses through independent laboratories, and the implementation of spot coal procurement strategies to anticipate emergency supply conditions.
Terjadi Kecelakaan Kerja serta Bahaya Kebakaran dikarenakan Implementasi K2 & K3 belum optimal Occurrence of Work Accidents and Fire Hazards due to Suboptimal Implementation Electrical Safety & OHS	PLN Indonesia Power mengimplementasikan sejumlah langkah untuk meningkatkan keselamatan kerja dan pencegahan kebakaran. Ini mencakup revitalisasi sistem pemadam kebakaran sesuai standar NFPA, perbaikan mobil damkar, serta penguatan sistem deteksi dan alarm kebakaran. Selain itu, dilakukan sertifikasi ulang peralatan pembangkit, tindak lanjut hasil survei risiko, serta penerapan budaya K3 melalui observasi, patroli, dan pembelajaran keselamatan. Proses pengadaan juga diperkuat dengan penerapan sistem manajemen keselamatan kontraktor (CSMS) secara menyeluruh.	PLN Indonesia Power implements several measures to improve workplace safety and fire prevention. These include the revitalization of fire extinguishing systems in accordance with NFPA standards, repair of fire trucks, and strengthening of fire detection and alarm systems. Additionally, power plant equipment is recertified, risk survey findings are followed up, and the OHS culture is reinforced through observations, safety patrols, and learning programs. The procurement process is also enhanced through the comprehensive implementation of the Contractor Safety Management System (CSMS).
Risiko Pengelolaan Lingkungan yang Belum Optimal dan Dampaknya terhadap Target PROPER Risk of Suboptimal Environmental Management and Its Impact on PROPER Performance Targets	Perusahaan melakukan berbagai inisiatif untuk mencapai target PROPER, seperti peningkatan kapasitas WWTP, revitalisasi sistem <i>sanitary sewage</i> , serta penguatan sistem pemantauan emisi melalui CEMS. Selain itu, dilakukan pemantauan data emisi GRK, penyusunan dokumen LCA yang terintegrasi dengan PROPER, serta optimalisasi pelaporan ke APPLE-GATRIK. Strategi ini didukung dengan peningkatan kapasitas SDM, kalibrasi peralatan lingkungan, serta sertifikasi terkait pengelolaan lingkungan dan PROPER.	The Company takes various initiatives to achieve its PROPER targets, such as increasing the capacity of WWTPs, revitalizing sanitary sewage systems, and strengthening emissions monitoring systems through CEMS. Additionally, the Company monitors GHG emission data, prepares LCA documents integrated with PROPER, and optimizes reporting to APPLE-GATRIK. These strategies are supported by capacity building for human resources, calibration of environmental equipment, and certifications related to environmental management and PROPER compliance.
Risiko Ancaman terhadap Keamanan Siber Infrastruktur TI Risk of Cybersecurity Threats to IT Infrastructure	Perusahaan memperkuat sistem keamanan TI melalui pelaksanaan <i>penetration test</i> , pembaruan <i>firewall</i> dan OS, serta instalasi antivirus di seluruh perangkat. Perusahaan juga membentuk <i>Security Operation Center</i> (SOC) dan bekerjasama dengan tim CSIRT PLN serta BSSN. Perlindungan data ditingkatkan melalui <i>multi-factor authentication</i> , penggunaan perangkat <i>email gateway</i> , serta pengelolaan perangkat secara terpusat. Di sisi infrastruktur, dilakukan <i>upgrade</i> jaringan dan penambahan kapasitas server untuk mendukung keandalan layanan TI.	The Company strengthens its IT security systems by conducting penetration tests, updating firewalls and operating systems, and installing antivirus software on all devices. It has also established a Security Operation Center (SOC) and collaborates with the PLN CSIRT team and BSSN. Data protection is enhanced through multi-factor authentication, use of email gateway devices, and centralized device management. On the infrastructure side, the Company upgrades networks and increases server capacity to support the reliability of IT services.
Risiko Keterlambatan Proyek dan Pemeliharaan Pembangkit Risk of Delays in Power Plant Projects and Maintenance	Untuk mengatasi potensi keterlambatan proyek, Perusahaan mengintensifkan koordinasi dengan vendor, manufaktur, dan pihak berwenang, termasuk bea cukai. Dilakukan pengadaan alat penilaian kondisi pembangkit serta penguatan <i>database personel</i> dan peralatan. Perusahaan juga mengoptimalkan pemantauan <i>timeline</i> proyek melalui aplikasi ProPMO guna memastikan efisiensi dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek.	To address potential project delays, the Company intensifies coordination with vendors, manufacturers, and authorities, including customs. It procures equipment for assessing power plant conditions and strengthens the personnel and equipment databases. Project timeline monitoring is also optimized through the ProPMO application to ensure project execution is efficient and timely.

Jenis Risiko yang Dihadapi Type of Risks		Mitigasi Mitigation
Risiko Pengembangan Energi Transisi Hijau yang Belum Optimal Risk of Suboptimal Development of Green Energy Transition	PLN Indonesia Power memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pengembangan EBT, mengusulkan penugasan pembangkit EBT ke pemegang saham, serta membangun kemitraan strategis untuk proyek seperti PLTS dan PLTP. Co-firing biomass dilaksanakan secara berkelanjutan, dan dilakukan migrasi transmisi serta pemenuhan aspek regulasi seperti TKDN. Perusahaan juga mendorong pendanaan eksplorasi panas bumi dan melibatkan mitra berpengalaman.	PLN Indonesia Power strengthens coordination with stakeholders in NRE development, proposes the assignment of NRE power plants to shareholders, and builds strategic partnerships for projects such as solar and geothermal power plants (PLTS and PLTP). Biomass co-firing is carried out continuously, along with transmission migration and compliance with regulations such as local content requirements (TKDN). The Company also promotes funding for geothermal exploration and the involvement of experienced partners.
Risiko Pengembangan Bisnis dan Pendapatan <i>Beyond</i> KWH yang Belum Optimal Risk of Suboptimal Business and Beyond kWh Revenue Development	Upaya mitigasi meliputi pengembangan PV Manufacture berstandar TopCon-Tier 1, diversifikasi bisnis seperti jasa O&M, MRO, hingga <i>hydrogen greenfield project</i>. Perusahaan juga melakukan canvassing pasar non-PLN Group, memperluas kemitraan, serta meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi untuk memperkuat kapabilitas bisnis <i>beyond</i> KWH.	Mitigation efforts include developing TopCon Tier-1 standard PV manufacturing, diversifying into businesses such as O&M services, MRO, and greenfield hydrogen projects. The Company also conducts canvassing of non-PLN Group markets, expands partnerships, and enhances HR competencies through training and certification to strengthen its <i>beyond</i> kWh business capabilities.
Risiko Kapasitas, Kapabilitas & Budaya SDM yang Belum Optimal Risk of Suboptimal Human Resource Capacity, Capability, and Culture	Perusahaan fokus pada peningkatan kapasitas SDM melalui program sertifikasi, integrasi database SDM, pengembangan kompetensi leadership, serta pelaksanaan workshop budaya dan job posting lintas unit. Perusahaan juga melakukan kajian organisasi dan penambahan personel untuk mendukung bisnis model baru secara adaptif.	The Company focuses on enhancing human resource capacity through certification programs, HR database integration, leadership competency development, and the implementation of culture workshops and cross-unit job postings. The Company also conducts organizational reviews and adds personnel to adaptively support the new business model.
Risiko Implementasi Digitalisasi Pembangkit yang Belum Optimal Risk of Suboptimal Implementation of Power Plant Digitalization	Strategi mitigasi mencakup optimalisasi REOC sebagai pusat monitoring pembangkit, pengembangan <i>dashboard Business Intelligence</i>, serta implementasi aplikasi pendukung proses bisnis. Perusahaan terus meningkatkan efisiensi sistem <i>dispatch</i> dan penguatan teknologi digital guna mendukung operasional pembangkit secara <i>real-time</i> dan efisien.	Mitigation strategies include optimizing REOC as a power plant monitoring center, developing a Business Intelligence dashboard, and implementing applications to support business processes. The Company continuously improves dispatch system efficiency and strengthens digital technology to support real-time and efficient power plant operations.
Risiko Kontribusi APPA PLN IP yang Belum Optimal terhadap Keberlanjutan Perusahaan Risk of Suboptimal Contribution of APPA PLN IP to the Company's Sustainability	Upaya yang dilakukan antara lain transformasi ITH menjadi GeoCo, peningkatan kerja sama bisnis luar negeri, serta perluasan portofolio anak perusahaan. Perusahaan juga memperkuat sarana pendukung seperti fasilitas <i>workshop</i> dan DRUPS, serta menyelaraskan RJPP anak perusahaan dengan strategi induk perusahaan.	Efforts include transforming ITH into GeoCo, enhancing international business collaborations, and expanding the subsidiary portfolio. The Company also strengthens supporting facilities such as workshops and DRUPS, while aligning the subsidiaries' RJPP with the parent company's strategy.
Risiko Implementasi Kepatuhan terhadap Regulasi yang Belum Optimal Risk of Suboptimal Implementation of Regulatory Compliance	Perusahaan menerapkan sistem pemantauan regulasi secara berkala, melakukan <i>self-assessment</i>, serta menyelaraskan dokumen GRC dengan regulasi terkini. Evaluasi kepatuhan dilakukan di seluruh unit, termasuk pencapaian PROPER melalui pengelolaan lingkungan yang sesuai peraturan.	The Company implements a regular regulatory monitoring system, conducts self-assessments, and aligns GRC documents with the latest regulations. Compliance evaluations are carried out across all units, including achieving PROPER ratings through environmentally compliant management.

Pemetaan Risiko Keberlanjutan Berdasarkan Kerangka Kerja IFRS

Sustainability Risk Mapping Based on the IFRS Framework

PLN Indonesia Power tidak hanya memitigasi berbagai risiko strategis, tetapi juga telah memetakan profil risiko keberlanjutan berdasarkan kerangka kerja IFRS, khususnya terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Perusahaan telah menetapkan mekanisme pengelolaan risiko iklim yang terintegrasi ke dalam sistem manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Perusahaan untuk memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan memastikan pencapaian target keberlanjutan jangka panjang.

PLN Indonesia Power not only mitigates various strategic risks, but has also mapped out a sustainability risk profile based on the IFRS framework, especially related to environmental, social, and governance (ESG) aspects. The Company has established a climate risk management mechanism that is integrated into the Company's risk management system. This step is part of the Company's commitment to strengthening resilience to climate change impacts and ensuring long-term sustainability target achievements.

Penjelasan lebih rinci dapat dilihat dalam Laporan Keberlanjutan Perusahaan Tahun 2024 Bagian Manajemen Risiko Keberlanjutan.
Further details can be found in the Company's 2024 Sustainability Report, under the Sustainability Risk Management section.



Pengembangan Manajemen Risiko Perusahaan

Development of Company Risk Management

Sejak tahun 2016, PLN Indonesia Power telah mengembangkan aplikasi IRMA (*Integrated Risk Management Application*) sebagai bagian dari infrastruktur manajemen risiko dan penguatan budaya sadar risiko di seluruh lini Perusahaan. Aplikasi ini dirancang untuk memaksimalkan efektivitas pengelolaan risiko, khususnya dalam mendukung proses kajian risiko secara sistematis dan terintegrasi. Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power melakukan pengembangan sistem informasi manajemen risiko melalui optimalisasi IRMA yang telah digunakan sebelumnya. Selanjutnya, sebagai bagian dari transformasi digital manajemen risiko, Perusahaan juga mengembangkan aplikasi *Risk Business Intelligence* (RBI) guna memperkuat kemampuan analitik dan prediktif terhadap risiko bisnis. RBI dirancang untuk mengolah data risiko secara mendalam dan menyajikan arahan strategis melalui *dashboard* interaktif, sehingga membantu manajemen dalam mengantisipasi potensi risiko serta menyusun strategi mitigasi yang lebih responsif.

Since 2016, PLN Indonesia Power has developed the IRMA (Integrated Risk Management Application) as part of its risk management infrastructure and to strengthen a risk-aware culture across all levels of the Company. This application is designed to maximize the effectiveness of risk management, particularly in supporting a systematic and integrated risk assessment process. In 2024, PLN Indonesia Power enhanced its risk management information system through the optimization of the existing IRMA application. Furthermore, as part of the digital transformation of risk management, the Company also developed the Risk Business Intelligence (RBI) application to strengthen its analytical and predictive capabilities for business risks. RBI was designed to process risk data in depth and provide strategic insights through an interactive dashboard, thereby supporting management in anticipating potential risks and formulating more responsive mitigation strategies.

Pengembangan aplikasi IRMA dan RBI menjadi pilar penting dalam transformasi digital manajemen risiko PLN Indonesia Power, guna menciptakan sistem pengelolaan risiko yang adaptif, responsif, dan selaras dengan arah bisnis berkelanjutan di era digital.

The development of the IRMA and RBI applications has become a key pillar in the digital transformation of risk management at PLN Indonesia Power, aimed at creating an adaptive, responsive risk management system that aligns with the Company’s sustainable business direction in the digital era.

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluation of Risk Management System Effectiveness

PLN Indonesia Power secara konsisten melakukan evaluasi atas efektivitas implementasi sistem manajemen risiko. Evaluasi ini mencakup penilaian atas keberhasilan pelaksanaan rencana mitigasi terhadap berbagai risiko utama yang telah diidentifikasi dalam *Risk Register* Perusahaan. Sepanjang tahun 2024, PLN Indonesia Power telah melaksanakan berbagai program mitigasi risiko secara terukur dan sistematis, baik untuk risiko strategis, operasional, maupun emerging risk. Hasil monitoring mitigasi menunjukkan bahwa sebagian besar tindakan pengendalian risiko telah berjalan efektif dan berkontribusi dalam meminimalkan potensi dampak negatif terhadap pencapaian sasaran strategis Perusahaan.

PLN Indonesia Power consistently evaluates the effectiveness of its risk management system implementation. This evaluation includes an assessment of the success of mitigation plan execution for various significant risks identified in the Company’s Risk Register. Throughout 2024, PLN Indonesia Power had implemented various risk mitigation programs in a measured and systematic manner, covering strategic, operational, and emerging risks. The results of the mitigation monitoring indicated that most risk control actions had been effective and contributed to minimizing the potential negative impacts on the achievement of the Company’s strategic objectives.

Berikut hasil *monitoring* mitigasi risiko Perusahaan pada tahun 2024:

The following are the results of the Company’s risk mitigation monitoring in 2024:

Kejadian Risiko Risk Occurrence	Pemantauan Mitigasi Risiko 2024 Risk Mitigation Monitoring 2024	
	Risiko Awal Initial Risk	Level Risiko Residu Triwulan IV Residual Risk Level Q4
Ketersediaan dan Keandalan Pembangkit tidak tercapai dari target Availability and Reliability of Power Plants not meeting targets	High	Low To Moderate
Gangguan Kontinuitas Pasokan Energi Primer Disruption in Continuity of Primary Energy Supply	Moderate to High	Low To Moderate
Terjadi Kecelakaan Kerja serta Bahaya Kebakaran dikarenakan Implementasi K2 & K3 belum optimal Occupational Accidents and Fire Hazards due to Suboptimal Implementation of Electrical Safety & OHS	Moderate to High	Low To Moderate
Risiko Ancaman terhadap <i>Cyber Security System</i> pada infrastruktur Teknologi Informasi Perusahaan Risk of Threat to the Company’s Information Technology Cybersecurity System	Moderate to High	Low To Moderate
Keterlambatan Penyelesaian Proyek & Pemeliharaan Pembangkit Delays in Project Completion & Power Plant Maintenance	Moderate	Low To Moderate
Pengembangan Energi Transisi Hijau belum optimal Suboptimal Development of Green Transition Energy	Moderate to High	Moderate
Pengembangan Portofolio Bisnis dan Pendapatan <i>Beyond KWH</i> belum optimal Suboptimal Development of Business Portfolio and Beyond KWH Revenue	Moderate to High	Moderate

Kejadian Risiko Risk Occurrence	Pemantauan Mitigasi Risiko 2024 Risk Mitigation Monitoring 2024	
	Risiko Awal Initial Risk	Level Risiko Residu Triwulan IV Residual Risk Level Q4
Kapasitas, Kapabilitas & Budaya SDM belum Optimal dalam menghadapi <i>New Business Model</i> Human Resources Capacity, Capability & Culture not yet optimal in facing the New Business Model	Moderate to High	Low To Moderate
Kontribusi APPA PLN Indonesia Power belum optimal dalam mendukung <i>sustainability</i> perusahaan PLN Indonesia Power's APPA Contribution not yet optimal in supporting the Company's sustainability	Moderate to High	Low To Moderate
Implementasi Kepatuhan terhadap Regulasi belum Optimal Compliance Implementation with Regulations not yet optimal	Moderate	Low To Moderate

Hasil *monitoring* di atas mencerminkan efektivitas penerapan sistem manajemen risiko yang terintegrasi, didukung oleh penguatan peran *risk owner*, koordinasi lintas fungsi, serta pemanfaatan sistem informasi risiko berbasis teknologi dalam setiap langkah mitigasi. Progres mitigasi dipantau melalui *dashboard* pemantauan risiko secara berkala dan dilaporkan kepada manajemen sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan yang berbasis risiko.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapabilitas manajemen risiko, PLN Indonesia Power telah melakukan pengukuran Risk Maturity Index (RMI) dengan menggunakan metode terkini yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 serta arahan dari PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham. Pengukuran ini dilaksanakan secara independen oleh Konsultan *Risk Resolution* Indonesia guna menjamin objektivitas dan kredibilitas hasil evaluasi. Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power memperoleh skor RMI sebesar 2,8. Capaian ini mencerminkan bahwa tingkat kematangan manajemen risiko Perusahaan berada pada fase Berkembang (+), yaitu tahap transisi dari fase Berkembang menuju fase Praktik Baik, di mana penerapan manajemen risiko telah melampaui level dasar dan mulai menunjukkan praktik yang lebih sistematis.

Selanjutnya, hasil pengukuran RMI ini menjadi dasar dalam penyusunan Roadmap Implementasi Manajemen Risiko untuk periode 2025–2029, dengan target pencapaian skor RMI sebesar 4,0 pada tahun 2029, yang mencerminkan fase Praktik Lebih Baik. Penyusunan *roadmap* ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko dapat berjalan secara lebih terstruktur, terarah, serta adaptif terhadap dinamika lingkungan bisnis yang terus berkembang.

The monitoring results above reflect the effectiveness of implementing an integrated risk management system, supported by the strengthening of risk owners' roles, cross-functional coordination, and the utilization of technology-based risk information systems in every mitigation step. Mitigation progress is monitored regularly through a risk monitoring dashboard and reported to management as part of risk-based decision-making processes.

As part of its ongoing efforts to enhance risk management capabilities, PLN Indonesia Power has conducted a Risk Maturity Index (RMI) assessment using the latest methodology, which refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 and the directives from PT PLN (Persero) as the Shareholder. This assessment was carried out independently by Risk Resolution Indonesia Consultants to ensure the objectivity and credibility of the evaluation results. In 2024, PLN Indonesia Power achieved an RMI score of 2.8. This achievement reflects that the Company's risk management maturity level is at the Developing (+) phase, which marks a transition from the Developing phase to the Good Practice phase, where risk management implementation has surpassed the basic level and is beginning to demonstrate more systematic practices.

Furthermore, the RMI assessment results becomes the foundation for preparing the Risk Management Implementation Roadmap for the 2025–2029 period, with a target RMI score of 4.0 by 2029, representing the Better Practice phase. The development of this roadmap aims to ensure that the planning and implementation of risk management processes can be carried out in a more structured, focused, and adaptive manner in response to the ever-evolving business environment.

Kecukupan Sistem Manajemen Risiko yang Diterapkan Perusahaan

Adequacy of Risk Management System Implemented by the Company

PLN Indonesia Power mengadopsi kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM) yang terstruktur dan terintegrasi, mencakup proses identifikasi, penilaian, mitigasi, pemantauan, hingga peninjauan ulang risiko. Seluruh proses ini dijalankan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal dan internal, serta diintegrasikan ke dalam budaya kerja dan proses pengambilan keputusan di setiap jenjang organisasi. Tanggung jawab pengelolaan risiko didistribusikan secara jelas kepada seluruh unit kerja, didukung dengan mekanisme pemantauan dan peninjauan yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan kemampuan adaptasi sistem terhadap perkembangan risiko yang terjadi.

Direksi PLN Indonesia Power memegang tanggung jawab utama dalam menetapkan kebijakan serta mengimplementasikan sistem manajemen risiko di seluruh lini Perusahaan. Untuk memastikan efektivitasnya, Direksi secara berkala melakukan penilaian sistematis terhadap pelaksanaan manajemen risiko. Sistem ini didukung oleh infrastruktur dan sistem informasi yang memadai untuk menjalankan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara menyeluruh dan berkesinambungan. Di sisi lain, Dewan Komisaris bersama Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko menjalankan fungsi pengawasan terhadap kecukupan dan efektivitas sistem manajemen risiko melalui peninjauan berkala atas laporan risiko, termasuk pemutakhiran peta risiko utama serta tingkat kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko yang dilaporkan oleh Direksi. Selanjutnya, Dewan Komisaris dan Direksi juga melakukan evaluasi bersama secara berkala terhadap kebijakan, implementasi, dan efektivitas kerangka kerja manajemen risiko, guna memastikan sistem tersebut mendukung pencapaian tujuan strategis Perusahaan.

PLN Indonesia Power adopts a structured and integrated Enterprise Risk Management (ERM) framework, encompassing the processes of risk identification, assessment, mitigation, monitoring, and review. All these processes are carried out by considering the dynamics of the external and internal environment and are integrated into the work culture and decision-making processes at every organizational level. The responsibility for risk management is clearly distributed across all work units, supported by continuous monitoring and review mechanisms to ensure the system's effectiveness and adaptability to evolving risks.

The Board of Directors of PLN Indonesia Power holds the primary responsibility for establishing policies and implementing the risk management system throughout the Company. To ensure its effectiveness, the Board of Directors periodically conducts systematic assessments of risk management implementation. This system is supported by adequate infrastructure and information systems to carry out the functions of risk identification, measurement, monitoring, and control comprehensively and continuously. On the other hand, the Board of Commissioners, together with the Audit Committee and Risk Management Committee, performs oversight functions regarding the adequacy and effectiveness of the risk management system through regular reviews of risk reports, including updates to the key risk map and compliance levels with risk management policies as reported by the Board of Directors. Furthermore, the Board of Commissioners and the Board of Directors also jointly conduct periodic evaluations of policies, implementation, and the effectiveness of the risk management framework to ensure that the system supports the achievement of the Company's strategic objectives.

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

Board of Commissioners and Board of Directors Statement on the Adequacy of the Company Risk Management System

Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan PLN Indonesia Power telah memadai dan efektif dalam menangani risiko-risiko yang bersifat material bagi keberlanjutan bisnis. Penilaian ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga keberlangsungan operasional, melindungi aset Perusahaan, serta memastikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya tetap terjaga. Sistem manajemen risiko yang diterapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi, tetapi juga menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan yang berbasis risiko serta penguatan ketahanan Perusahaan terhadap potensi gangguan di masa mendatang.

Kecukupan Sistem Manajemen Risiko ini semakin ditegaskan melalui capaian prestasi PLN Indonesia Power yang berhasil meraih *Gold Medal Category - Best Risk Improvement* dalam ajang PLN Risk Award, melalui inisiatif strategis bertajuk *"Developing Risk Culture for PLN Indonesia Power Sustainability."* Penghargaan ini menjadi pengakuan atas keseriusan Perusahaan dalam membangun budaya risiko yang kuat dan menyeluruh di seluruh lini organisasi, serta sebagai bukti nyata bahwa upaya peningkatan kapasitas pengelolaan risiko telah memberikan dampak positif yang terukur terhadap ketahanan dan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

The Board of Commissioners and the Board of Directors assess that the risk management system implemented by PLN Indonesia Power is adequate and effective in managing risks that are material to business sustainability. This assessment reflects a strong commitment to maintaining operational continuity, protecting the Company's assets, and ensuring the interests of shareholders and other stakeholders remain safeguarded. The risk management system not only functions as a mitigation tool but also serves as a foundation for risk-based decision-making and strengthening the Company's resilience against potential future disruptions.

The adequacy of this Risk Management System is further affirmed by PLN Indonesia Power's achievement of the Gold Medal Category- Best Risk Improvement at the PLN Risk Award, through the strategic initiative titled "Developing Risk Culture for PLN Indonesia Power Sustainability." This award recognizes the Company's seriousness in building a strong and comprehensive risk culture across all organizational levels, as well as concrete proof that efforts to enhance risk management capacity have produced measurable positive impacts on resilience and sustainability of the Company's business.



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal merupakan fondasi utama dalam tata kelola PLN Indonesia Power yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha Perusahaan berjalan searah dengan strategi Perusahaan serta memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Sistem ini tidak hanya mencerminkan komitmen Perusahaan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, tetapi juga menjadi mekanisme penting dalam mendorong pencapaian tujuan strategis secara berkelanjutan.

PLN Indonesia Power secara konsisten menerapkan pengendalian internal yang terintegrasi dengan proses bisnis dan operasional di seluruh unit kerja. Sistem ini tidak hanya berperan dalam mendukung efisiensi operasional, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat dipercaya dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang akuntabel. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas, Perusahaan secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal yang telah diterapkan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka memperkuat pengendalian dan mitigasi risiko yang mungkin timbul.

Melalui implementasi sistem pengendalian internal yang efektif dan adaptif, PLN Indonesia Power berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan usaha, melindungi dan mengembangkan aset serta reputasi Perusahaan, sekaligus mengamankan kepentingan Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

The Internal Control System is the fundamental foundation of governance at PLN Indonesia Power, functioning to ensure that all the Company's business activities align with its strategy and meet stakeholder expectations. This system not only reflects the Company's commitment to good governance principles but also serves as a crucial mechanism to drive the sustainable achievement of strategic objectives.

PLN Indonesia Power consistently implements integrated internal controls within the business processes and operations across all work units. This system not only supports operational efficiency, but also ensuring that reported information is reliable and can be used as the basis for accountable decision-making. As part of ongoing efforts to maintain integrity and accountability, the Company routinely monitors and evaluates the effectiveness of the internal control system in place. The evaluation results are used as a foundation for continuous improvements aimed at strengthening controls and mitigating potential risks.

Through the implementation of an effective and adaptive internal control system, PLN Indonesia Power is committed to sustaining business continuity, protecting and developing the Company's assets and reputation, while safeguarding the interests of Shareholders and all other stakeholders.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dan Kerangka COSO (*Internal Control Framework*)

Conformity of the Internal Control System with the COSO Framework (*Internal Control Framework*)

PLN Indonesia Power menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang mengacu pada *Internal Control Framework* yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yang telah diakui secara global. Kerangka ini menjadi dasar dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal di seluruh jenjang organisasi.

Sistem pengendalian internal Perusahaan disusun berdasarkan katalog risiko terpusat yang mengidentifikasi risiko-risiko utama, termasuk risiko yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan. Katalog ini juga

PLN Indonesia Power implements an Internal Control System that refers to the Internal Control Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), which is globally recognized. This framework serves as the foundation for designing, implementing, and evaluating the effectiveness of internal controls across all levels of the organization.

The Company's internal control system is developed based on a centralized risk catalog that identifies key risks, including those related to accounting and reporting processes. This catalog also serves as a guide for designing and documenting

berfungsi sebagai panduan dalam merancang dan mendokumentasikan aktivitas pengendalian yang spesifik pada masing-masing fungsi, sekaligus menjadi alat bantu dalam memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip pengendalian yang bersifat umum.

Kerangka kerja COSO menekankan lima komponen utama, yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan. Berikut penjelasan masing-masing komponen yang telah diterapkan oleh PLN Indonesia Power.

control activities specific to each function, while also functioning as a tool to ensure conformity with general control principles.

The COSO framework emphasizes five main components, namely: Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring. The following is an explanation of each component as implemented by PLN Indonesia Power.

Kerangka Pengendalian Internal

Internal Control Framework

Komponen Component	Penerapan Implementation
Lingkungan Pengendalian: Seperangkat standar, proses dan struktur yang memberikan dasar untuk melakukan pengendalian internal. Control Environment: A set of standards, processes, and structures that provide the foundation for performing internal control.	Pemberlakuan Pedoman Etika Perusahaan (<i>Code of Conduct</i>) dan membangun budaya organisasi. Pemberlakuan Matriks Delegasi Kewenangan untuk mengatur tingkat persetujuan transaksi dan pemisahan tugas yang tepat. Pembagian fungsi, tugas dan kewenangan melalui <i>Board Manual</i>, <i>Internal Audit Charter</i> dan Piagam Komite Di Bawah Dewan Komisaris. Pembentukan Unit Pengendalian Internal untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan. Implementation of the Company's Code of Conduct and the development of an organizational culture. Implementation of the Delegation of Authority Matrix to regulate the approval levels of transactions and proper segregation of duties. Distribution of functions, duties, and authorities through the Board Manual, Internal Audit Charter, and Committees' Charters under the Board of Commissioners. Establishment of the Internal Control Unit to ensure compliance and effectiveness of the Company's internal control system.
Penilaian Risiko: Dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh Perusahaan. Risk Assessment: The basis for determining how risks should be managed by the Company.	Dalam menjalankan operasional bisnisnya, Indonesia Power memiliki potensi risiko yang perlu terus diidentifikasi dan diukur yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Penilaian risiko dilakukan melalui pelaksanaan <i>Maturity Level Assessment</i> manajemen risiko di Kantor Pusat dan Unit untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dikelola dengan baik dengan tindakan mitigasi yang diperlukan. In conducting its business operations, Indonesia Power faces potential risks that need to be continuously identified and measured, influenced by various internal and external factors. Risk assessment is carried out through the implementation of a Risk Management Maturity Level Assessment at the Head Office and Units to ensure that existing risks are well managed with the necessary mitigation actions.
Aktivitas Pengendalian: Tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan telah dilakukan. Control Activities: Actions established through policies and procedures to ensure that management's directives to mitigate risks to achieving objectives are carried out.	Kontrol sistem aktivitas adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan, melalui: 1. Pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan sesuai dengan fungsi dari masing-masing unit organisasi; 2. Mempersiapkan sistem pencatatan data dan penyimpanan dokumen Perusahaan yang baik; 3. Mempersiapkan sistem pengamanan data dan dokumen Perusahaan dengan baik; 4. Manajemen SDM berbasis kompetensi; 5. Komitmen penerapan manajemen risiko yang mengarah pada budaya sadar risiko; 6. Melakukan penilaian atau pemeriksaan atas kinerja Perusahaan oleh pihak independen seperti oleh Kantor Akuntan Publik; serta 7. Implementasi <i>Internal Control over Financial Reporting</i> (ICoFR) secara konsisten dan efektif. Control system activities are policies and procedures established by management to achieve set objectives, through: 1. The division of tasks, responsibilities, and authorities according to the functions of each organizational unit; 2. Preparing a proper system for data recording and document storage of the Company; 3. Preparing a proper system for safeguarding the Company's data and documents; 4. Competency-based human resource management; 5. Commitment to risk management implementation that fosters a risk-aware culture; 6. Conducting performance assessments or audits of the Company by independent parties such as Public Accounting Firms; and 7. Consistent and effective implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)
Informasi dan Komunikasi: Informasi yang diperlukan Perusahaan adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik, yang berasal dari proses komunikasi antara pihak internal maupun eksternal. Information and Communication: The information needed by the Company is relevant and of good quality, originating from communication processes between internal and external parties.	Salah satu unsur penting dalam mendukung tercapainya sistem pengendalian internal yang efektif adalah pelaksanaan informasi dan komunikasi melalui berbagai forum komunikasi internal yaitu: (1) Sistem pelaporan formal; (2) Aplikasi sistem teknologi informasi, dan (3) Program komunikasi manajemen antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi, serta melalui pelaksanaan <i>coffee morning</i>. One important element in supporting the achievement of an effective internal control system is the implementation of information and communication through various internal communication forums, namely: (1) formal reporting systems; (2) information technology system applications; and (3) management communication programs, including meetings of the Board of Commissioners, Board of Directors meetings, Audit Committee meetings, Risk Management Committee and Nomination and Remuneration Committee meetings, as well as through coffee morning sessions.

Komponen Component	Penerapan Implementation
Kegiatan Pemantauan: Kegiatan evaluasi yang digunakan untuk memastikan masing-masing dari kelima komponen ada dan berfungsi. Monitoring Activities: Evaluation activities used to ensure that each of the five components exists and functions effectively.	Perusahaan terus meningkatkan evaluasi atas implementasi sistem pengendalian internal, yang mencakup pengendalian keuangan maupun pengendalian operasional secara berkala. Evaluasi berkelanjutan dilakukan oleh Satuan Internal Audit dan fungsi pengawasan lain di Perusahaan. Pelibatan auditor eksternal dan assessor independen lain secara berkala. The Company continuously improves the evaluation of the implementation of the internal control system, including both financial controls and operational controls on a regular basis. Ongoing evaluations are conducted by the Internal Audit Unit and other supervisory functions within the Company, with periodic involvement of external auditors and other independent assessors.

Sistem pengendalian Perusahaan dilakukan secara kolektif untuk seluruh fungsi operasi dengan mekanisme pengawasan berjenjang (*three lines of defense*). Pada lini pertama, yaitu *Business Process Owner* bertugas menjalankan sistem pengendalian internal dan pengawasan Perusahaan yang memadai. Pada lini berikutnya, terdapat fungsi pengendali, termasuk Satuan *Legal, Risk and Compliance*, yang menerapkan framework ISO 31000 dalam pelaksanaan identifikasi risiko, pengendalian risiko, penilaian tingkat risiko dan mitigasi risiko. Satuan Legal, Risk and Compliance khususnya Bidang Manajemen Risiko melakukan pendampingan penyusunan *risk register*, serta melakukan validasi atas kesesuaian nya, guna memastikan bahwa seluruh potensi risiko telah diidentifikasi dan ditentukan pengendalian dan rencana mitigasinya oleh *business process owner*.

Pada lini ketiga, Satuan Internal Audit memastikan keefektifan dan koordinasi yang baik antara fungsi-fungsi pengendalian Perusahaan, termasuk pengendalian keuangan dan operasional. Satuan Internal Audit membantu para pemangku kepentingan dengan memberikan jasa asurans dan konsultansi dengan menerapkan pendekatan risiko (*risk-based approach*) yang relevan dan signifikan. Satuan Internal Audit juga memiliki proses *Quality Assurance* yang bertujuan untuk melakukan kajian dan memberikan keyakinan, bahwa audit yang dilakukan dalam lingkungan Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

The Company's control system is carried out collectively across all operational functions with a tiered oversight mechanism (*three lines of defense*). The first line, the Business Process Owner, is responsible for implementing an adequate internal control system and supervision within the Company. The next line includes control functions such as the Legal, Risk, and Compliance Unit, which applies the ISO 31000 framework in conducting risk identification, risk control, risk level assessment, and risk mitigation. The Legal, Risk, and Compliance Unit, specifically, Risk Management Division assists in the preparation of the risk register and validates its accuracy to ensure that all potential risks have been identified and that controls and mitigation plans have been determined by the business process owner.

In the third line, the Internal Audit Unit ensures the effectiveness and good coordination among the Company's control functions, including financial and operational controls. The Internal Audit Unit supports stakeholders by providing assurance and consulting services using a relevant and significant risk-based approach. The Internal Audit Unit also has a Quality Assurance process aimed at reviewing and providing assurance that audits conducted within the Company are performed in accordance with applicable professional standards.

Pengendalian Keuangan, Operasional, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Financial and Operational Control, and Compliance with the Laws and Regulations

PLN Indonesia Power menerapkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan operasional yang berbasis pada Kerangka Pengendalian Internal COSO serta kerangka manajemen risiko yang mengacu pada *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis ISO 31000:2009. Penerapan

PLN Indonesia Power implements internal controls over financial and operational reporting based on the COSO Internal Control Framework and a risk management framework referring to Enterprise Risk Management (ERM) based on ISO 31000:2009. The implementation of this

kerangka ini dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan *top-down* berbasis risiko yang diintegrasikan ke dalam seluruh unit kerja dan area bisnis Perusahaan.

Pengendalian internal atas pelaporan keuangan dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap keandalan data dan informasi keuangan, serta memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Direksi bertanggung jawab penuh atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang wajar sesuai standar *International Financial Reporting Standards* (IFRS), termasuk memberikan sertifikasi atas laporan keuangan tahunan guna menjamin akurasi dan transparansi, serta bebas dari salah saji material akibat kesalahan maupun kecurangan.

Selain aspek keuangan, sistem pengendalian internal juga mendukung efektivitas dan efisiensi operasional Perusahaan. Melalui pemantauan berkelanjutan, PLN Indonesia Power memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan kebijakan internal serta ketentuan hukum dan regulasi eksternal yang berlaku. Hingga akhir periode pelaporan, tidak terdapat pelanggaran atau sanksi hukum yang dikenakan kepada Perusahaan, sebagai wujud komitmen terhadap kepatuhan dan integritas.

framework is carried out comprehensively through a top-down, risk-based approach integrated into all work units and business areas of the Company.

Internal controls over financial reporting are designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial data and information, as well as to ensure that the preparation of financial statements complies with generally accepted accounting principles. The Board of Directors holds full responsibility for the preparation and presentation of consolidated financial statements that fairly reflect the Company's condition in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), including providing certification of the annual financial statements to guarantee accuracy, transparency, and freedom from material misstatement due to error or fraud.

In addition to financial aspects, the internal control system also supports the effectiveness and efficiency of the Company's operations. Through continuous monitoring, PLN Indonesia Power ensures that all operational activities comply with internal policies as well as applicable external laws and regulations. Up to the end of the reporting period, there have been no violations or legal sanctions imposed on the Company, demonstrating its commitment to compliance and integrity.

Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)

Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)

Perusahaan juga telah mengimplementasikan Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 174.K/010/IP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Kebijakan Implementasi ICoFR. Pengendalian ini mencakup proses pada tingkat transaksi di berbagai segmen strategis, termasuk: Pendapatan Penjualan Listrik, Biaya Operasi, Aset Tetap, Persediaan, Pengembangan Proyek, Perbendaharaan, Perpajakan dan Pelaporan Keuangan.

Evaluasi pengendalian dilakukan secara periodik melalui *Control Self Assessment* (CSA) yang dilaporkan melalui sistem aplikasi daring sejak tahun 2016. Pelaporan CSA menjadi bagian penting dari sistem pemantauan internal dan merupakan upaya penguatan budaya kepatuhan serta akuntabilitas dalam seluruh proses keuangan Perusahaan.

The Company has also implemented Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) based on the Board of Directors' Decision Number 174.K/010/IP/2016 dated August 12, 2016, on the ICoFR Implementation Policy. This control covers processes at the transaction level across various strategic segments, including: Electricity Sales Revenue, Operating Expenses, Fixed Assets, Inventory, Project Development, Treasury, Taxation, and Financial Reporting.

Control evaluations are conducted periodically through Control Self-Assessment (CSA), which has been reported via an online application system since 2016. The CSA reporting is an important part of the internal monitoring system and represents an effort to strengthen the culture of compliance and accountability throughout the Company's financial processes.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Review of Internal Control System Effectiveness

Perusahaan secara berkala meninjau efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) melalui pengawasan yang dilaksanakan oleh Satuan Internal Audit serta audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor eksternal. Manajemen memegang tanggung jawab utama atas terselenggaranya SPI yang andal dan efektif, serta memastikan penerapannya terintegrasi di setiap jenjang organisasi. Evaluasi efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan dilakukan dengan mengacu pada *Internal Control – Integrated Framework* yang diterbitkan oleh COSO. Kerangka kerja ini menjadi dasar dalam menilai kecukupan desain serta efektivitas implementasi pengendalian internal.

Selain itu, Dewan Komisaris melalui Komite Audit turut melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan SPI. Hasil evaluasi ini disampaikan kepada Manajemen sebagai masukan strategis untuk perbaikan sistem dan kebijakan agar lebih efektif dan adaptif dalam mendukung pencapaian target perusahaan. Setiap rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan SPI berjalan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan.

Selain itu, pada tahun 2024, Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianti & Rekan juga telah melakukan penilaian terhadap kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengendalian internal sebagai bagian dari proses audit eksternal.

The Company periodically reviews the effectiveness of the Internal Control System (ICS) through oversight conducted by the Internal Audit Unit as well as audits by the Public Accounting Firm (KAP) as the external auditor. Management holds the primary responsibility for ensuring a reliable and effective ICS and for guaranteeing its integrated implementation at every organizational level. The evaluation of the effectiveness of internal controls over financial reporting is conducted by referring to the Internal Control – Integrated Framework issued by COSO. This framework serves as the basis for assessing the adequacy of the design and the effectiveness of the implementation of internal controls.

Moreover, the Board of Commissioners, through the Audit Committee, also conducts regular evaluations to assess the effectiveness of the ICS implementation. The results of these evaluations are submitted to Management as strategic input for improving systems and policies to be more effective and adaptive in supporting the achievement of the Company's targets. Every recommendation resulting from these evaluations is followed up and monitored to ensure the ICS adequately supports the attainment of the Company's goals and objectives.

Furthermore, in 2024, the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianti & Rekan also conducted an assessment of the Company's compliance with laws and regulations as well as internal controls as part of the external audit process.

Pernyataan atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Statement on the Internal Control System Adequacy

Dalam upaya memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan rapat dengan Satuan Internal Audit dan Audit Eksternal secara berkala. Berdasarkan evaluasi Komite Audit, Direksi bersama Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah dijalankan secara memadai, yang diturunkan mulai dari kode etik, kebijakan, prosedur hingga Instruksi Kerja yang disinergikan dengan penerapan penilaian *Key Performance Indicator* (KPI).

In an effort to ensure the effectiveness of the internal control system, the Board of Directors and the Board of Commissioners, through the Audit Committee, hold regular meetings with the Internal Audit Unit and External Auditors. Based on the Audit Committee's evaluation, the Board of Directors together with the Board of Commissioners assess that the Company's internal control system has been implemented adequately, starting from the code of conduct, policies, procedures, to Work Instructions, all synergized with the implementation of Key Performance Indicator (KPI) assessments.

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan

**Statement of the Board of Commissioners and Board of Directors on the Adequacy of the
Company's Internal Control System**

Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa PLN Indonesia Power telah memiliki dan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai dalam mendukung penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang andal serta dalam mendeteksi dan memitigasi risiko yang berdampak material terhadap kegiatan operasional Perusahaan. Pernyataan ini merujuk pada hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Independen terhadap efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Auditor telah melaksanakan evaluasi atas desain dan implementasi pengendalian internal yang signifikan, termasuk pada proses pelaporan keuangan akhir periode, pengelolaan teknologi informasi, pendapatan dan piutang, pengadaan dan persediaan, hingga penggajian dan aset tetap.

Berdasarkan evaluasi tersebut, tidak ditemukan kelemahan material yang berindikasi terhadap ketidakefektifan sistem pengendalian internal. Meskipun demikian, manajemen menerima catatan atas hal-hal tertentu yang tidak material dan telah menindaklanjutinya sesuai rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Auditor. Dengan demikian, Dewan Komisaris dan Direksi memandang bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan sepanjang tahun 2024 telah berjalan secara memadai dan efektif dalam mendukung tata kelola yang baik serta pencapaian tujuan Perusahaan.

The Board of Commissioners and Board of Directors assess that PLN Indonesia Power has had and implemented an adequate internal control system to support the preparation of reliable consolidated financial statements and to detect and mitigate risks that have a material impact on the Company's operations. This statement refers to the results of an audit conducted by the Independent Auditor on the effectiveness of the Company's internal control system for the financial year ending December 31, 2024. The Auditor has conducted an evaluation of the design and implementation of significant internal control, including the end-of-period financial reporting process, information technology management, revenue and receivables, procurement and inventory, to payroll and fixed assets.

Based on this evaluation, no material weaknesses were found indicating ineffectiveness of internal control system. Nonetheless, management received notes on certain immaterial matters and has followed up on them according to the recommendations stated in the Auditor's Report. As such, the Board of Commissioners and Board of Directors view that the Company's internal control system throughout 2024 had been running adequately and effectively in supporting good governance and achieving the Company's goals.

Perkara Hukum dan Sanksi Administratif Tahun 2024

Legal Issues and Administrative Sanctions in 2024

Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power berhasil menjaga kepatuhan penuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya pelanggaran hukum terkait ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, kepailitan, persaingan usaha, maupun lingkungan. Hal ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang baik.

In 2024, PLN Indonesia Power managed to maintain its full compliance with all applicable laws and regulations with no legal violation related to labor, consumer protection, bankruptcy, business competition, or the environment. This reflects the Company's commitment to implementing good governance.

PLN Indonesia Power menegaskan komitmennya terhadap pemenuhan kepatuhan Perusahaan dengan mewajibkan seluruh Insan Perusahaan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, serta Entitas Anak Perusahaan, untuk mematuhi seluruh kebijakan Perusahaan dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari upaya ini, PLN Indonesia Power telah membentuk Satuan Legal, Risk, and Compliance yang berperan strategis dalam melindungi kepentingan hukum Perusahaan serta memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku.

PLN Indonesia Power juga mengedepankan upaya kepatuhan hukum dan etika bisnis yang relevan, sehingga baik Perusahaan maupun Dewan Komisaris, Direksi, dan entitas anak Perusahaan dinyatakan bebas dari sengketa hukum apapun dan/atau tidak sedang terlibat dalam perkara pada Lembaga pengadilan maupun arbitrase yang dapat memiliki dampak signifikan atau memberikan risiko untuk Perusahaan.

PLN Indonesia Power reaffirms its commitment to corporate compliance by requiring all personnel, including the Board of Commissioners, Board of Directors, and Subsidiaries, to comply with all Company policies and applicable laws and regulations. As part of this effort, PLN Indonesia Power has established the Legal, Risk, and Compliance Unit, which plays a strategic role in safeguarding the Company's legal interests and ensuring full compliance with prevailing regulations.

PLN Indonesia Power also prioritizes legal compliance and relevant business ethics, ensuring that the Company, along with its Board of Commissioners, Board of Directors, and subsidiaries, remains free from any legal disputes and/or is not involved in any proceedings before courts or arbitration bodies that could have a significant impact or pose risks to the Company.

Permasalahan Hukum yang Dihadapi Perusahaan Tahun 2024

Legal issues faced by the Company in 2024

Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power menghadapi sejumlah perkara penting berupa permasalahan hukum perdata, baik yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) maupun yang masih dalam proses penyelesaian dengan rincian sebagai berikut:

In 2024, PLN Indonesia Power faced a number of significant legal cases in the form of civil lawsuit, both those that had been concluded (with permanent legal force) and those still in the process of resolution, with the detail as follows:

Permasalahan Hukum Legal Case	Pidana Criminal Law	Perdata Civil Law
Perusahaan Company		
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Concluded with permanent legal force	-	1
Dalam proses penyelesaian In the process of resolution	-	2*
Jumlah Total	-	3
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors		
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Concluded with permanent legal force	-	-
Dalam proses penyelesaian In the process of resolution	-	-
Jumlah Total	-	-
Entitas Anak Subsidiaries		
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Concluded with permanent legal force	-	-
Dalam proses penyelesaian In the process of resolution	-	-
Jumlah Total	-	-

Keterangan:

Keterangan: *) Pada 1 (satu) perkara No. 211/G/TF/2024/PTUN.JKT dalam proses penyelesaian terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 21 Januari 2025 yang menyatakan menerima Eksepsi PT PLN Indonesia Power sebagai "Tergugat II Intervensi", sehingga memenangkan pihak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai "Tergugat" dan PT PLN Indonesia Power sebagai "Tergugat II Intervensi". Selanjutnya, terdapat upaya hukum banding oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) LBH Padang sebagai "Penggugat/Pembanding" tertanggal 3 Februari 2025, dimana pada perkara ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai "Tergugat/Terbanding I" dan PT PLN Indonesia Power sebagai "Tergugat II Intervensi/Terbanding II". Hingga saat ini, perkara masih dalam proses persidangan dan belum ada putusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Description:

*) In 1(one) case No. 211/G/TF/2024/PTUN.JKT in the settlement process, there is a decision of Jakarta State Administrative Court dated January 21, 2025, which states that it accepts the Exception of PT PLN Indonesia Power as "Defendant II Intervention", thus winning the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia as "Defendant" and PT PLN Indonesia Power as "Defendant II Intervention". Furthermore, there is an appeal by the Legal Aid Foundation (YLBHI) LBH Padang as "Plaintiff/Appellant" dated February 3, 2025, where in this case the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia is "Defendant/Appellee I" and PT PLN Indonesia Power as "Defendant II Intervention/Appellee II". Until now, the case is still in the trial process and no decision has been issued by the authorized party.

Berikut rincian pokok perkara hukum yang masih dalam proses penyelesaian oleh Perusahaan:

The following are details of legal cases currently in the process of resolution by the Company:

Pada tahun 2024, Perusahaan menghadapi 1 (satu) perkara hukum perdata yang saat ini masih dalam proses penyelesaian, yaitu terkait perkara pajak dengan nomor 005251.11/2024/PP, yang pengajuan bandingnya dilakukan pada 26 Juni 2024.

In 2024, the Company faced one civil legal case that is currently in the process of resolution, namely a tax-related case with reference number 005251.11/2024/PP, for which an appeal was filed on June 26, 2024.

Pihak yang Berperkara:

Dalam perkara ini, PLN Indonesia Power bertindak sebagai Penggugat, sementara pihak Tergugat adalah Kementerian Keuangan RI, khususnya Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar.

Disputing Parties:

In this case, PLN Indonesia Power acts as the Plaintiff, while the Defendant is the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, specifically the Directorate General of Taxes, Regional Office for Large Taxpayers.

Pokok Perkara:

Sengketa ini berkaitan dengan objek perkara berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00095/KEB/PJ/WPJ.19/2024, yang mengacu pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh Pasal 22 No. 00003/202/21/051/23. Dalam SKP tersebut, PLN Indonesia Power dinyatakan memiliki kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 sebesar Rp50.122.339.998, yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini.

Issue:

This dispute concerns a case object in the form of the Decree of the Director General of Taxes No. KEP-00095/KEB/PJ/WPJ.19/2024, which refers to the Tax Assessment Letter (SKP) for Income Tax Article 22 No. 00003/202/21/051/23. In the SKP, PLN Indonesia Power is stated to have an underpayment of Income Tax Article 22 amounting to Rp50,122,339,998, which is the core issue of this dispute.

Status Penyelesaian: Hingga saat ini, perkara masih dalam proses persidangan dan belum ada putusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.	Settlement Status: As of now, the case is still in the trial process and no decision has been issued by the authority.
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan: Perkara hukum ini belum memberikan dampak langsung terhadap kondisi keuangan maupun operasional perusahaan, mengingat proses banding masih berlangsung dan belum terdapat putusan yang bersifat final dan mengikat.	Impact on the Company's Condition: This legal case has not had a direct impact on the Company's financial or operational condition, considering that the appeal process is still ongoing and there has been no final and binding decision yet.
Upaya Manajemen Perusahaan: Pemohon Banding, dalam hal ini PLN Indonesia Power, berpendapat bahwa ekualisasi PPh Pasal 22 yang menjadi dasar penerbitan SKP seharusnya tidak dikenakan atas pembelian bahan bakar gas. Adapun dasar posita yang diajukan mencakup adanya kesalahan formal dalam penerbitan SKP, ketentuan yang menyatakan bahwa pembelian bahan bakar gas dikecualikan dari PPh Pasal 22, serta fakta bahwa PLN Indonesia Power tidak melakukan pembelian gas dari PT PLN (Persero). Selain itu, PLN Indonesia Power juga merujuk pada putusan pengadilan pajak dan Mahkamah Agung yang relevan dengan perkara ini sebagai dasar argumen hukum yang memutuskan bahwa pembelian bahan bakar gas yang dilakukan Pemohon Banding bukan merupakan objek PPh Pasal 22. Melalui petitum dalam banding ini, PLN Indonesia Power meminta agar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00095/KEB/PJ/WPJ.19/2024 dicabut serta menegaskan bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan PPh Pasal 22 yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut.	Company Management's Efforts: The Appellant, in this case PLN Indonesia Power, is of the opinion that the equalization of Income Tax Article 22 used as the basis for issuing the Tax Assessment Letter (SKP) should not be applied to the purchase of gas fuel. The legal arguments (posita) submitted include a formal error in the issuance of the SKP, the provision stating that the purchase of gas fuel is exempt from Income Tax Article 22, and the fact that PLN Indonesia Power did not purchase gas from PT PLN (Persero). In addition, PLN Indonesia Power also refers to decisions of the tax court and the Supreme Court relevant to this case as the legal basis for the argument that the Appellant's gas fuel purchases are not subject to Income Tax Article 22. Through the claim (petitum) in this appeal, PLN Indonesia Power requests the revocation of the Decree of the Director General of Taxes No. KEP-00095/KEB/PJ/WPJ.19/2024 and asserts that the Company has no obligation to pay the Income Tax Article 22 underpayment stipulated in the said decree.
Nilai Perkara: Rp50.122.339.998	Case Value: Rp50.122.339.998
Sanksi yang Dikenakan: Tidak ada	Sanction Imposed: None

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan akhir 2024, Perusahaan tidak pernah memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi berkaitan dengan pajak maupun sengketa pajak.

For the past 3 (three) years, from 2022 until the end of 2024, the Company never received a guilty verdict from the highest tax court related to tax or tax disputes.

Sanksi Administratif

Administrative Sanction

Sebagai bentuk komitmen Perusahaan terhadap pemenuhan kepatuhan peraturan perundang-undangan, selama 2024 PLN Indonesia Power tidak mendapatkan teguran ataupun sanksi administratif dari instansi/lembaga yang berwenang di bidang usaha Perusahaan.

As a form of the Company's commitment to complying with the Laws and Regulations, during 2024 PLN Indonesia Power never received any warnings or administrative sanctions from authorized agencies/institutions in the Company's business sector.

Kerangka Governansi, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan

Governance Framework, Management and Control of Tax Aspects

PLN Indonesia Power berkomitmen penuh untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu entitas strategis dalam sektor ketenagalistrikan nasional, Perusahaan menempatkan kepatuhan terhadap aspek perpajakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Kepatuhan pajak dipandang bukan hanya sebagai kewajiban legal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap kontribusi fiskal dan pembangunan negara.

Dalam kerangka governansi perpajakan, Perusahaan mengadopsi sistem yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik guna memastikan bahwa perencanaan, pelaporan, serta pengendalian pajak dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan berkelanjutan. Untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian aspek perpajakan, PLN Indonesia Power menempatkan peran strategis pada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit yang secara berkala melakukan peninjauan atas implementasi tata kelola perpajakan. Pelaksanaan tata kelola pajak dikelola oleh unit khusus di bawah koordinasi Direktorat Keuangan, melalui fungsi *Treasury* and *Tax*. Fungsi ini bertanggung jawab dalam memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pajak Perusahaan berjalan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun ruang lingkup utama dari fungsi *Treasury* and *Tax* mencakup: Penyusunan strategi pajak, perhitungan, pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak, termasuk evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan internal sebagai respons atas perubahan regulasi perpajakan yang dinamis. Fungsi ini juga melakukan *monitoring* atas potensi risiko pajak serta memastikan bahwa seluruh praktik perpajakan di internal Perusahaan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Uraian terkait Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan telah diuraikan secara lengkap dalam Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen.

PLN Indonesia Power is fully committed to fulfilling its tax obligations in a transparent, accountable manner, and in accordance with the prevailing laws and regulations. As one of the strategic entities in the national electricity sector, the Company recognizes tax compliance as an integral part of the implementation of good corporate governance (GCG). Tax compliance is regarded not merely as a legal obligation but also as a form of the Company's responsibility in contributing fiscally to national development.

Within the framework of tax governance, the Company has adopted a well-structured and well-documented system to ensure that tax planning, reporting, and control are carried out systematically, effectively, and sustainably. To perform tax oversight and control functions, PLN Indonesia Power assigns a strategic role to the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Audit Committee, which periodically reviews the implementation of tax governance. Tax governance implementation is managed by a dedicated unit under the coordination of the Directorate of Finance through the Treasury and Tax function. This function is responsible for ensuring that the Company's tax planning, implementation, and management are conducted efficiently and in compliance with the applicable tax laws and regulations. The main scope of the Treasury and Tax function includes: the development of tax strategies; tax calculation, collection, payment, and reporting; as well as the evaluation and adjustment of internal policies in response to dynamic changes in tax regulations. This function also monitors potential tax risks and ensures that all internal tax practices comply with the applicable regulations.

Details regarding the Management and Control of Tax Aspects are thoroughly explained in the Management Discussion and Analysis chapter.

Kode Etik Perusahaan

Code of Conduct

PLN Indonesia Power senantiasa menjadikan integritas dan profesionalisme sebagai nilai utama dalam menjalankan setiap aspek kegiatan usahanya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penegakan Kode Etik Perusahaan yang menjadi pedoman perilaku seluruh insan PLN Indonesia Power, baik dalam hubungan internal maupun eksternal. Penerapan Kode Etik tidak hanya mencerminkan budaya integritas yang tertanam kuat dalam organisasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan beretika. Dengan implementasi yang menyeluruh, Kode Etik berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, menjunjung tinggi prinsip etika bisnis, serta memperkuat kepercayaan dan kredibilitas Perusahaan di mata para pemangku kepentingan.

PLN Indonesia Power consistently upholds integrity and professionalism as core values in carrying out every aspect of its business activities. This commitment is realized through the enforcement of the Company's Code of Conduct, which serves as a behavioral guideline for all personnel of PLN Indonesia Power, both in internal and external relations. The implementation of the Code of Conduct not only reflects a deeply ingrained culture of integrity within the organization but also serves as an important instrument in realizing clean, transparent, and ethical corporate governance. With comprehensive implementation, the Code of Conduct functions as a control tool to prevent conflicts of interest, uphold business ethics principles, and strengthen the Company's trust and credibility in front of its stakeholders.

"Penerapan Kode Etik sebagai kompas moral bagi seluruh insan PLN Indonesia Power menjadi wujud nyata pengawalan terhadap nilai integritas. Melalui pelaksanaan yang konsisten, menyeluruh, dan berkelanjutan, Perusahaan terus berupaya memperkuat kepercayaan publik serta menjaga reputasi di mata seluruh pemangku kepentingan."

The implementation of the Code of Conduct as a moral compass for all personnel of PLN Indonesia Power is a tangible manifestation of safeguarding the integrity value. Through consistent, comprehensive, and continuous implementation, the Company strives to strengthen public trust and maintain its reputation in the eyes of all stakeholders.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Perusahaan telah menetapkan Pedoman Etika Perusahaan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 0179.K/DIR/2023 dan No. 004.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 27 Juni 2023. Pedoman ini memuat seperangkat aturan dan prinsip etika yang menjadi panduan dalam bertindak dan mengambil keputusan di seluruh level organisasi.

Pedoman Etika Perusahaan ini juga secara eksplisit selaras dengan nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai budaya kerja PLN Indonesia Power. Dengan menjadikan nilai AKHLAK sebagai landasan, Perusahaan berkomitmen untuk menegakkan standar etika tertinggi, sekaligus membangun lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

As a concrete manifestation of this commitment, the Company has set the Code of Conduct through the Joint Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors No. 0179.K/DIR/2023 and No. 004.SK/DK-PLNIP/2023 dated June 27, 2023. These guidelines contain a set of rules and ethical principles that serve as guidance for actions and decision-making at all levels of the organization.

The Company Code of Conduct is also explicitly aligned with the AKHLAK values (Amanah/ Trustworthy, Kompeten/ Competent, Harmonis/ Harmonious, Loyal/ Loyal, Adaptif/ Adaptive, and Kolaboratif/ Collaborative) as the work culture of PLN Indonesia Power. By adopting the AKHLAK values as the foundation, the Company is committed to upholding the highest ethical standards while building a healthy, inclusive, and highly competitive work environment.

Pokok-Pokok Isi Kode Etik Perusahaan

Core of the Code of Conduct

Pedoman Etika Perusahaan mengatur prinsip-prinsip dan perilaku yang harus diterapkan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Pokok-pokok Pedoman Etika Perusahaan mencakup antara lain:

The Corporate Ethics Guidelines regulate the principles and behaviors that must be applied when interacting with stakeholders. The main points of the Corporate Code of Conduct include, among others:

BAB 01 CHAPTER 01

Pernyataan Komitmen Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power

Joint Statement of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PLN Indonesia Power

BAB 02 CHAPTER 02

Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Visi dan Misi Perusahaan
3. Tata Nilai Perusahaan
4. Tujuan Pedoman Etika Perusahaan
5. Pihak yang wajib mematuhi Pedoman Etika Perusahaan
6. Tanggung Jawab Pegawai PLN Indonesia Power
7. Tanggung Jawab Para Pimpinan PLN Indonesia Power

Introduction

1. Background
2. Vision and Mission
3. Corporate Value
4. Purpose of the Code of Conduct
5. Parties with Mandatory Compliance with the Code of Conduct
6. Responsibility of PLN Indonesia Power Employees
7. Responsibility of PLN Indonesia Power Leaders

BAB 03 CHAPTER 03

Pedoman Etika dan Perilaku Pegawai

1. Etika terkait Hubungan dengan *Stakeholder / Pemegang Kepentingan Perusahaan*
2. Perilaku Etis terhadap sesama Pegawai
3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perusahaan
4. Benturan Kepentingan
5. Memberi dan Menerima Gratifikasi
6. Pembayaran Tidak Wajar (imbalan) , Partisipasi Politik dan Organisasi Profesi
7. Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja
8. Integritas Laporan Keuangan
9. Pengawasan dan Penggunaan Aset Perusahaan
10. Kerahasiaan Informasi dan Media Komunikasi
11. Sistem Teknologi Informasi
12. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
13. Aktivitas Sosial Perusahaan dan Pegawai

Policy on the Code of Conduct

1. Ethics related to Relationships with Stakeholders / Company Stakeholders
2. Ethical Behavior towards Fellow Employees
3. Compliance with Laws and Company Regulations
4. Conflict of Interest
5. Giving and Receiving Gratification
6. Improper Payments (Rewards), Political Participation, and Professional Organizations
7. Occupational Safety, Health, and Environment
8. Integrity of Financial Statements
9. Supervision and Use of Company Assets
10. Confidentiality of Information and Communication Media
11. Information Technology Systems
12. Intellectual Property Rights (IPR)
13. Corporate and Employee Social Activities

BAB 04 CHAPTER 04

Petunjuk Pelaksanaan

1. Konsultasi berhubungan dengan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*)
2. Pelanggaran Etika Perusahaan
3. Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)
4. Penghargaan dan Sanksi
5. Pernyataan Komitmen
6. Sosialisasi Pedoman Etika Perusahaan/*Code of Conduct*

Implementation Guidelines

1. Consultation related to the Code of Conduct
2. Violations of the Code of Conduct
3. Violation Reporting (Whistleblowing System)
4. Rewards and Sanctions
5. Commitment Statement
6. Dissemination of the Code of Conduct

Pemberlakuan Kode Etik Bagi Seluruh Level Organisasi

Enforcement of the Code of Conduct to All Organizational Level

PLN Indonesia Power secara konsisten menerapkan Kode Etik secara menyeluruh dan tanpa pengecualian kepada seluruh jenjang organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga seluruh pegawai di berbagai unit kerja. Penerapan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya perusahaan yang mengedepankan integritas, etika, dan kepatuhan dalam setiap aspek aktivitas bisnis. Melalui pemberlakuan Kode Etik yang merata, Perusahaan memastikan bahwa setiap insan PLN Indonesia Power memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya perilaku etis, serta menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan.

PLN Indonesia Power mengharapkan seluruh insan Perusahaan tidak hanya mematuhi isi Pedoman Etika, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam sikap dan tindakan nyata. Seluruh pegawai di setiap level bertanggung jawab untuk menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan, serta berperan aktif dalam mendorong rekan kerja untuk menjunjung prinsip yang sama. Dengan demikian, nilai-nilai AKHLAK dan prinsip etika tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja yang hidup dan terus berkembang dalam organisasi.

PLN Indonesia Power consistently implements the Code of Conduct comprehensively and without exception across all levels of the organization, from the Board of Commissioners, the Board of Directors, to all employees in various work units. This implementation is not merely normative but also an integral part of the Company culture that prioritizes integrity, ethics, and compliance in every aspect of business activities. Through the uniform enforcement of the Code of Conduct, the Company ensures that all members of PLN Indonesia Power share the same understanding of the importance of ethical behavior and demonstrates a strong commitment to carrying out their responsibilities in accordance with the established values.

PLN Indonesia Power expects all personnel not only to comply with the contents of the Code of Conduct but also to internalize these values into their attitudes and concrete actions. Every employee at every level is responsible for setting an example in applying the Company's values and actively encouraging colleagues to uphold the same principles. Thus, the AKHLAK values and ethical principles are not merely slogans but become a living and continuously developing part of the organizational work culture.

Sosialisasi dan Penegakkan Kode Etik Perusahaan

Dissemination and Enforcement of the Code of Conduct

PLN Indonesia Power secara aktif menyediakan ruang dan forum bagi seluruh insan perusahaan untuk berdiskusi, memahami, serta menginternalisasi nilai-nilai inti, tujuan, dan prinsip yang tertuang dalam Pedoman Etika Perusahaan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berkala melalui berbagai media komunikasi perusahaan, baik secara daring maupun luring, serta melalui integrasi materi dalam kegiatan pelatihan, onboarding pegawai baru, dan forum internal lainnya. Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power mengintensifkan sosialisasi Pedoman Etika melalui kegiatan penandatanganan Pernyataan Komitmen atas Kepatuhan terhadap Pedoman Etika oleh seluruh pegawai, termasuk jajaran Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, dilakukan juga survei pemahaman untuk mengukur tingkat pengenalan dan internalisasi nilai-nilai etika di kalangan pegawai, serta penyebaran materi Pedoman Etika melalui berbagai saluran komunikasi resmi Perusahaan seperti portal internal, media sosial korporat, dan buletin internal.

PLN Indonesia Power actively provides space and forums for all personnel to discuss, understand, and internalize the core values, objectives, and principles outlined in the Code of Conduct. Dissemination activities are carried out regularly through various corporate communication media, both online and offline, as well as through the integration of materials into training programs, new employee onboarding, and other internal forums. In 2024, PLN Indonesia Power intensified the dissemination of the Code of Conduct through the signing of a Commitment Statement on Compliance with the Code of Conduct by all employees, including members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. In addition, understanding surveys were conducted to measure the level of awareness and internalization of ethical values among employees, and the Code of Conduct materials were distributed through various official Company communication channels such as the internal portal, corporate social media, and internal newsletters.

Lebih lanjut, penegakan Kode Etik di PLN Indonesia Power juga diperkuat dengan sistem pengawasan dan pelaporan yang kredibel. Perusahaan menyediakan saluran pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang aman dan terpercaya, guna mendorong pegawai maupun pihak eksternal menyampaikan dugaan pelanggaran. Seluruh laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara objektif, rahasia, dan profesional oleh unit terkait sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Secara khusus, PLN Indonesia Power juga telah menetapkan fungsi/unit kerja khusus sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi dan penegakan Pedoman Etika. Fungsi ini berperan dalam merancang strategi komunikasi etika, melakukan pemantauan kepatuhan, serta memastikan bahwa proses tindak lanjut pelanggaran berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Furthermore, the enforcement of the Code of Conduct at PLN Indonesia Power is also reinforced by a credible monitoring and reporting system. The Company provides a secure and reliable whistleblowing system to encourage employees and external parties to report suspected violations. All incoming reports will be followed up objectively, confidentially, and professionally by the relevant unit in accordance with applicable mechanisms and regulations.

PLN Indonesia Power has also specifically established a dedicated function/unit responsible for the implementation of the dissemination and enforcement of the Code of Conduct. This function is responsible for designing ethical communication strategies, monitoring compliance, and ensuring that the follow-up process for violations is conducted fairly, transparently, and accountably.



Sebagai bentuk konsistensi dalam menegakkan integritas, PLN Indonesia Power memberlakukan sistem pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap Pedoman Etika, yang berlaku menyeluruh kepada seluruh pegawai. Setiap pelanggaran akan dikenai ketentuan disiplin sesuai kebijakan internal Perusahaan, sebagai berikut:

As a form of consistency in upholding integrity, PLN Indonesia Power enforces a sanction system for violations of the Code of Conduct, which applies universally to all employees. Every violation is subject to disciplinary measures in accordance with the Company's internal policies, as follows:

Kategori Pelanggaran Violation Category	Jenis Sanksi Type of Sanction	
Pelanggaran Ringan Minor Violation	- Sanksi tertulis selama 3 bulan - Sanksi tertulis selama 6 bulan	- Written sanction for 3 months - Written sanction for 6 months
Pelanggaran Sedang Moderate Violation	- Sanksi tertulis selama 9 bulan - Sanksi tertulis selama 12 bulan	- Written sanction for 9 months - Written sanction for 12 months
Pelanggaran Berat Major Violation	- Demosi pada jenjang jabatan satu tingkat di bawahnya dan diturunkan minimum satu <i>grade</i> di bawahnya - Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	- Demotion to a position one level below and downgraded by at least one grade - Dismissal with dishonor as an Employee, in accordance with the applicable laws and regulations

Untuk tindakan yang belum tercantum dalam klasifikasi pelanggaran tetapi berpotensi merugikan pihak lain atau Perusahaan, penetapan klasifikasi pelanggaran akan dilakukan oleh Lembaga Kerja Sama Bipartit, sesuai prosedur yang berlaku.

For actions not yet listed in the violation classification but that have the potential to harm other parties or the Company, the classification of the violation will be determined by the Bipartite Cooperation Institution in accordance with the applicable procedures.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Tindak Lanjutnya

Number of Code of Conduct Violations and Their Follow-up

Sepanjang tahun 2024, tercatat terdapat tiga (3) kasus pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan, yang terdiri atas: 1 (satu) pelanggaran ringan, 1 (satu) pelanggaran sedang dan 1 (satu) pelanggaran berat. Seluruh pelanggaran tersebut telah diselesaikan melalui proses tindak lanjut yang objektif dan profesional, dengan pemberian sanksi tertulis dan/atau tindakan disipliner lainnya yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan.

Throughout 2024, a total of 3 (three) violations of the Company's Code of Conduct were recorded, consisting of: 1 (one) minor violation, 1 (one) moderate violation, and 1 (one) major violation. All of these violations had been resolved through an objective and professional follow-up process, with the imposition of written sanctions and/or other disciplinary actions in accordance with the severity of the violation as stipulated in the Company's Code of Conduct.

Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Penyuapan

Anti-Corruption and Anty-Bribery Policy



Penandatanganan Komitmen oleh Dewan Komisaris dan Direksi PLN Indonesia Power:
Perwujudan Komitmen Tanpa Toleransi terhadap Suap dan Korupsi selaras dengan agenda nasional Pemerintah Indonesia melalui Gerakan Nasional Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju.
Signing of the Commitment by the Board of Commissioners and Board of Directors of PLN Indonesia Power:
A Zero Tolerance Commitment to Bribery and Corruption, in alignment with the Indonesian Government's national agenda through the National Movement for Synergy in Eradicating Corruption, for an Advanced Indonesia.

Komitmen Anti Korupsi dan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Corruption Commitment and Implementation of the Anti-Bribery Management System

PLN Indonesia Power berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan menjunjung tinggi standar perilaku etis tertinggi. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Perusahaan mewajibkan seluruh Insan Perusahaan, termasuk mitra kerja, untuk menahan diri dari segala bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan, pemberian balas jasa, atau bentuk pembayaran tidak pantas lainnya. Perilaku semacam ini tidak hanya bertentangan dengan nilai dan prinsip etika yang dianut oleh Perusahaan, tetapi juga berpotensi melanggar hukum yang berlaku di Indonesia maupun secara internasional. Setiap individu yang terbukti melanggar prinsip ini akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Komitmen PLN Indonesia Power terhadap kepatuhan dan pemberantasan korupsi diwujudkan melalui penerapan serangkaian kebijakan dan program kerja yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan ini menjadi acuan bagi seluruh Insan Perusahaan dalam bertindak secara etis, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis.

PLN Indonesia Power is committed to conducting its business activities by upholding the highest standards of ethical behavior. As part of this commitment, the Company requires all personnel, including business partners, to refrain from any actions that may be categorized as bribery, the provision of rewards, or other improper payments. Such behavior not only contradicts the Company's values and ethical principles but may also violate applicable laws in Indonesia and internationally. Any individual found to be in breach of this principle will be subject to strict sanctions in accordance with applicable regulations.

PLN Indonesia Power's commitment to compliance and the eradication of corruption is realized through the implementation of a series of policies and work programs based on prevailing laws and regulations, particularly Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This policy serves as a guideline for all Company personnel to act ethically, honestly, and responsibly in carrying out all business activities.

Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 0098.P/DIR/2023 dan No.007.SK/DK-PLNIP/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Anti Penyuapan.

Joint Decision of the Board of Directors and Board of Commissioners No. 0098.P/DIR/2023 and No.007.SK/DK-PLNIP/2023 dated December 13, 2023, on the General Policy on Anti-Bribery Governance.

Peraturan Direksi No. 0085.P/DIR/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Kebijakan Anti Fraud.

Board of Directors Regulation No. 0085.P/DIR/2023 dated September 20, 2023 on Anti-Fraud Policy

Peraturan Direksi No. 0089.P/DIR/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Pengendalian Gratifikasi.

Board of Directors Regulation No. 0089.P/DIR/2023 dated September 27, 2023 on Gratuity Control.

Keputusan Direksi No. 112.K/010/IP/2021 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Board of Directors Regulation No. 112.K/010/IP/2021 on State Official Wealth Report (LHKPN) Submission Guidelines.



Untuk memastikan bahwa seluruh praktik bisnis yang dijalankan senantiasa sesuai dengan standar hukum dan etika, PLN Indonesia Power telah mengadopsi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016. Sistem ini memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan komprehensif dalam penerapan kebijakan serta prosedur anti suap, sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Perusahaan dalam membangun lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyuapan.

Sebagai wujud dari komitmen tersebut, PLN Indonesia Power berhasil meraih sertifikasi ISO 37001:2016, menjadikannya sebagai perusahaan pertama di sektor ketenagalistrikan di Indonesia yang memperoleh sertifikasi internasional ini. Pencapaian ini menegaskan posisi PLN Indonesia Power sebagai pelopor dalam penerapan tata kelola anti-suap, serta memperkuat integritas dan kredibilitas Perusahaan di tingkat nasional maupun internasional.

To ensure that all business practices are always in line with legal and ethical standards, PLN Indonesia Power has adopted an Anti-Bribery Management System (ABMS) based on ISO 37001:2016. This system provides a structured and comprehensive framework for implementing anti-bribery policies and procedures, while also serving as tangible proof of the Company's commitment to building a clean, transparent, and bribery-free work environment.

As a manifestation of this commitment, PLN Indonesia Power successfully obtained ISO 37001:2016 certification, making it the first company in Indonesia's electricity sector to achieve this international certification. This achievement affirms PLN Indonesia Power's position as a pioneer in implementing anti-bribery governance and strengthens the Company's integrity and credibility at both the national and international levels.

Program Penerapan Anti Korupsi dan Penyuapan Anti-Corruption and Anti-Bribery Program Implementation

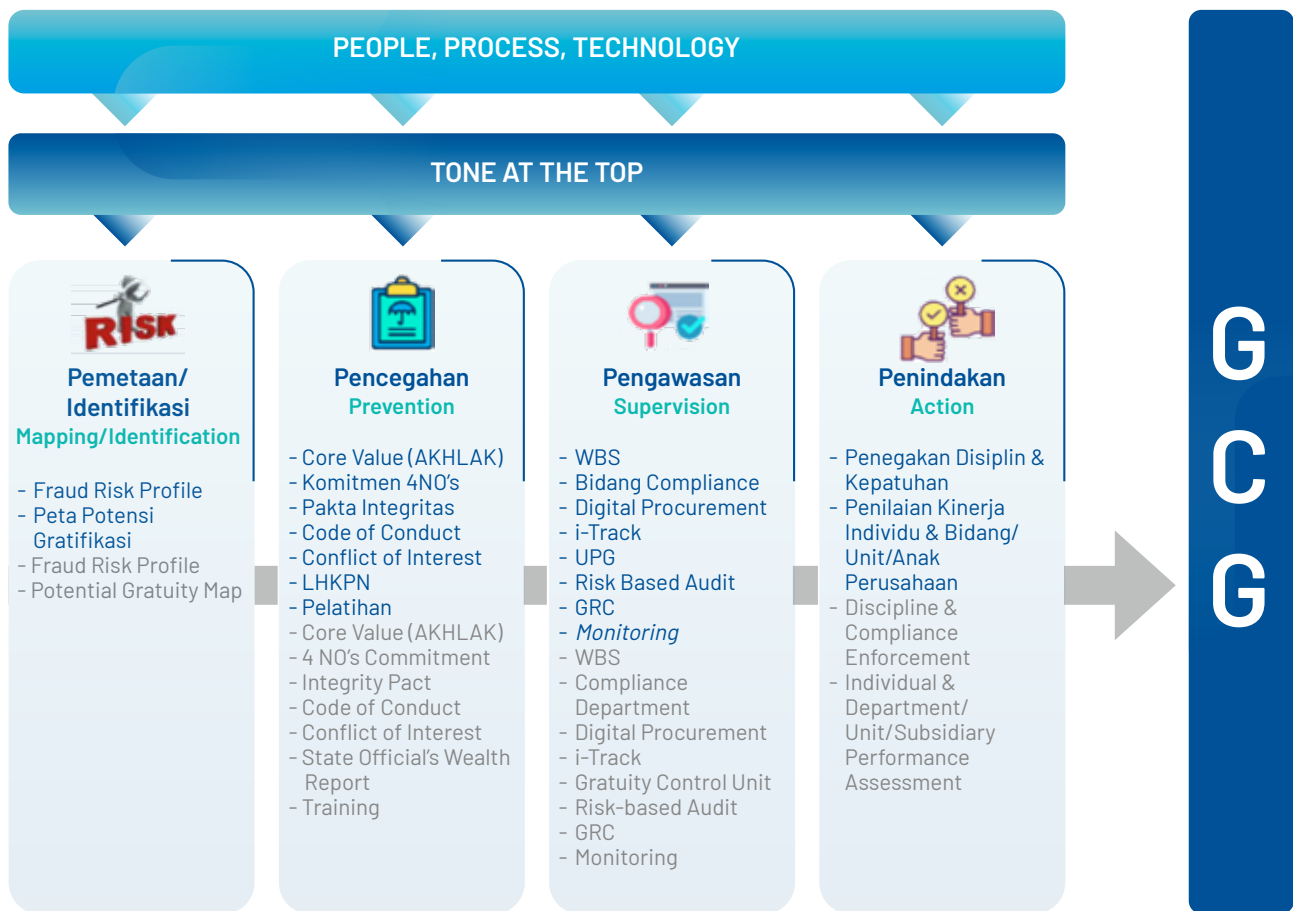
Program Anti-korupsi di PLN Indonesia Power merupakan upaya untuk melawan praktik korupsi yang berpotensi terjadi di setiap Proses Bisnis Perusahaan. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai lini mulai dari *People*, *Process* dan *Technology* yang ada di perusahaan dan didukung dengan adanya *Tone From The Top* oleh Pimpinan dan Manajemen PLN Indonesia Power melalui Komitmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Program Anti Korupsi meliputi 4 (empat) tahapan yaitu Pemetaan /Identifikasi, Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan, sehingga diharapkan dengan penerapan program ini maka tata kelola PLN Indonesia Power menjadi lebih bersih, transparan dan mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Ke depannya, Perusahaan berfokus pada perluasan implementasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ke seluruh unit dan anak perusahaan melalui penerapan Manajemen kepatuhan pada setiap proses bisnis.

The Anti-Corruption Program at PLN Indonesia Power is an effort to combat potential corruption practices that may occur in every business process within the Company. This effort can be carried out through various lines, from *People*, *Process*, and *Technology* within the Company, supported by 'Tone From The Top' from the Leadership and Management of PLN Indonesia Power through the commitment to the Anti-Bribery Management System.

The Anti-Corruption Program consists of 4 (four) stages: Mapping/ Identification, Prevention, Monitoring, and Enforcement. This program is expected to make the implementation of governance at PLN Indonesia Power to become cleaner, more transparent, and support the application of good corporate governance. In the future, the Company focuses on expanding the implementation and certification of the Anti-Bribery Management System (ABMS) across all units and subsidiaries through the application of Compliance Management in every business process.

Program Anti Korupsi di PLN Indonesia Power
PLN Indonesia Power Anti-Corruption Program



Sepanjang tahun 2024, PLN Indonesia Power telah mengimplementasikan program antikorupsi secara terintegrasi sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memperkuat budaya integritas dan tata kelola perusahaan yang bersih. Beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan antara lain adalah kegiatan sosialisasi antikorupsi yang ditujukan kepada unit-unit kerja, yang diselenggarakan pada tanggal 2 Februari dan 1 April 2024. Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada 12 Desember, PLN Indonesia Power turut berpartisipasi aktif dengan menggelar kampanye internal yang menekankan pentingnya kesadaran dan partisipasi seluruh insan perusahaan dalam upaya pemberantasan korupsi. Perusahaan juga mendorong pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui program Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2024 sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menciptakan agen perubahan di lingkungan kerja.

Throughout 2024, PLN Indonesia Power had implemented an integrated anti-corruption program as part of its ongoing commitment to strengthening a culture of integrity and clean corporate governance. Some of the initiatives carried out include anti-corruption dissemination activities targeted at work units, held on February 2 and April 1, 2024. In addition, in commemoration of International Anti-Corruption Day on December 12, PLN Indonesia Power actively participated by conducting an internal campaign emphasizing the importance of awareness and participation of all Company personnel in efforts to eradicate corruption. The Company also encouraged human resource capacity building through the First Level Anti-Corruption Instructor Certification Program (PAKSI) conducted from March to April 2024 as a concrete contribution to creating change agents within the workplace.

Lebih lanjut, dalam rangka memenuhi persyaratan *Maturity Level* Kepatuhan di lingkungan PLN Group, PLN Indonesia Power secara aktif berperan dalam penyusunan *Fraud Risk Assessment* (FRA) pada proses bisnis korporat. Selain itu, Perusahaan juga memberikan pendampingan kepada para pemilik proses dalam menyusun FRA di tingkat unit kerja masing-masing. Penilaian ini difokuskan pada identifikasi dan evaluasi risiko kepatuhan, terutama yang berkaitan dengan korupsi, penyuapan, serta aspek hukum lainnya yang relevan. Hasil FRA ini menjadi landasan penting dalam perumusan langkah mitigasi dan upaya pencegahan terhadap potensi praktik kecurangan (*fraud*), sebagai bagian dari komitmen PLN Indonesia Power untuk membangun budaya integritas dan tata kelola yang bersih, transparan, serta berkelanjutan.

Pelatihan Anti Korupsi Tahun 2024

Anti-Corruption Training in 2024

Dalam rangka meningkatkan integritas dan membangun budaya antikorupsi, pada tahun 2024 PLN Indonesia Power telah menyelenggarakan sejumlah program pelatihan terkait anti korupsi yang diikuti oleh 2.525 orang pegawai di seluruh jenjang jabatan dan unit bisnis Perusahaan. Jumlah ini mewakili 45,73% dari total pegawai Perusahaan. Beberapa topik pelatihan yang diberikan antara lain:

1. *Awareness* Internal Audit Course ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System dan Fraud Risk Assessment yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) dan Mutu Agung.
2. *Awareness* ISO 37301:2021 *Compliance Management System* yang diselenggarakan oleh Mutu Institute.
3. *Self Learning* Pemahaman Gratifikasi BUMN yang diselenggarakan oleh KPK.
4. *E-Learning* Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) yang diselenggarakan oleh KPK.
5. Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Tingkat Pertama yang diselenggarakan oleh KPK.

Program-program pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan antikorupsi serta meningkatkan budaya etika yang tinggi di seluruh aspek operasional Perusahaan.

Furthermore, in order to meet the Compliance Maturity Level requirements within the PLN Group, PLN Indonesia Power actively participates in preparing the Fraud Risk Assessment (FRA) for corporate business processes. The Company also provides guidance to process owners in preparing FRA at the respective work unit levels. This assessment focuses on identifying and evaluating compliance risks, especially those related to corruption, bribery, and other relevant legal aspects. The FRA results serve as an important basis for formulating mitigation steps and preventive efforts against potential fraudulent practices, as part of PLN Indonesia Power's commitment to building a culture of integrity and clean, transparent, and sustainable governance.

To enhance integrity and build an anti-corruption culture, in 2024 PLN Indonesia Power conducted a series of anti-corruption training programs attended by 2,525 employees across all levels and business units of the Company. This number represented 45.73% of the Company's total workforce. Some of the training topics provided include:

1. Internal Audit Awareness Course on ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System and Fraud Risk Assessment, organized by PT PLN (Persero) and Mutu Agung.
2. Awareness on ISO 37301:2021 Compliance Management System, organized by Mutu Institute.
3. Self-Learning on State-Owned Enterprises (SOEs) Gratification Understanding, organized by KPK.
4. E-Learning on Basic Anti-Corruption Knowledge and Integrity (PADI), organized by KPK.
5. First Level Anti-Corruption Instructor Certification, organized by KPK.

These training programs aim to strengthen employees' knowledge, awareness, and skills in implementing anti-corruption policies and to foster a high ethical culture across all operational aspects of the Company.

Sosialisasi Program Anti Korupsi

Dissemination of Anti-Corruption Program

PLN Indonesia Power secara rutin melakukan sosialisasi komitmen anti korupsi kepada pemangku kepentingan, termasuk mitra dan pemasok lokal. Sosialisasi kepada internal Perusahaan senantiasa dilakukan secara konsisten dan berkala melalui kegiatan diseminasi SMAP termasuk sosialisasi, pelatihan, dan *workshop*. Perusahaan juga melakukan evaluasi terhadap integritas dan solvabilitas calon mitra untuk mengurangi risiko korupsi. Dalam proses pengadaan barang/jasa, PLN Indonesia Power menerapkan persyaratan kualifikasi yang ketat dan mewajibkan pemasok menandatangani Pakta Integritas dengan klausul anti-korupsi. Hingga 31 Desember 2024, tidak ada insiden korupsi yang mengakibatkan pemecatan pegawai atau penghentian kontrak dengan mitra bisnis.

PLN Indonesia Power routinely conducts dissemination on anti-corruption commitment to stakeholders, including local partners and suppliers. Dissemination to the Company's internal stakeholders is consistently and regularly carried out through SMAP dissemination activities, including socialization, training, and workshops. The Company also organizes evaluations of the integrity and solvency of prospective partners to mitigate corruption risks. In the procurement of goods and services, PLN Indonesia Power applies strict qualification requirements and mandates suppliers to sign an Integrity Pact containing anti-corruption clauses. As of December 31, 2024, there had been no corruption incidents resulting in employee dismissals or contract terminations with business partners.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control Management

Pengelolaan pengendalian gratifikasi di PLN Indonesia Power dilakukan untuk mendukung komitmen perusahaan dalam menjaga integritas dan kejujuran, serta mempertahankan budaya bisnis yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Secara rutin, Perusahaan mengadakan sosialisasi terkait kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Manajemen, pegawai, anak perusahaan, afiliasi, serta mitra kerja.

The management of gratification control at PLN Indonesia Power is carried out to support the Company's commitment to upholding integrity and honesty, as well as maintaining a business culture free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). The Company regularly conducts outreach activities related to gratification control policies for Management, employees, subsidiaries, affiliates, and business partners.

PLN Indonesia Power telah menetapkan ketentuan pengelolaan gratifikasi melalui Peraturan Direksi No. 0089.P/DIR/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Pengendalian Gratifikasi. Peraturan ini menegaskan bahwa seluruh insan Perusahaan dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak lain. Selain itu, baik individu di Perusahaan maupun keluarganya dilarang meminta atau menerima gratifikasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

PLN Indonesia Power has established provisions for gratification management through the Board of Directors Regulation No. 0089.P/DIR/2023 dated September 27, 2023, on Gratification Control. This regulation emphasizes that all members of the Company are prohibited from accepting any form of gratification from other parties. Furthermore, individuals within the Company and their family members are prohibited from soliciting or accepting gratification that could lead to a conflict of interest, either directly or indirectly.



Laporan Penerimaan Gratifikasi Tahun 2024

Gratification Receipt Report in 2024

Insan PLN Indonesia Power telah melaporkan penerimaan gratifikasi sebagai wujud dari komitmen untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian gratifikasi yang berlaku di PLN Indonesia Power. Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power telah mencatat sebanyak 6 (enam) laporan terkait gratifikasi yang diterima melalui aplikasi ProGCG. Dari jumlah tersebut, 2 (dua) laporan berupa penolakan gratifikasi, sedangkan 4 (empat) laporan terkait penerimaan gratifikasi. Laporan penerimaan tersebut berkaitan dengan pemberian hadiah kecil yang diterima oleh pegawai, yang setelah diperiksa, tidak termasuk dalam kategori pelanggaran gratifikasi yang dapat merugikan Perusahaan atau pihak lain. Sebagai bagian dari prosedur yang berlaku, seluruh laporan penerimaan tersebut telah diserahkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang ada, guna memastikan bahwa tindakan tersebut tidak menimbulkan potensi benturan kepentingan atau melanggar aturan pengendalian gratifikasi yang telah ditetapkan.

Personnel of PLN Indonesia Power have reported the receipt of gratification as a manifestation of their commitment to upholding integrity, transparency, and compliance with the gratification control policies in place at PLN Indonesia Power. In 2024, the Company recorded a total of 6 (six) gratification-related reports submitted through the ProGCG application. Of these, 2 (two) reports involved the rejection of gratification, while 4 (four) reports pertained to the receipt of gratification. The reported cases of receipt involved small gifts received by employees, which, upon review, were found not to fall under the category of gratification violations that could harm the Company or any other party. As part of the applicable procedures, all reported receipts were submitted to the Gratification Control Unit (UPG) for further processing in accordance with the prevailing regulations, to ensure that such actions do not lead to potential conflicts of interest or violate established gratification control rules.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Officials' Wealth Report (LHKPN)



100%

"PLN Indonesia Power wujudkan komitmen anti-korupsi melalui 100% kepatuhan LHKPN: Sebanyak 1.080 pejabat wajib lapor telah menyampaikan laporan harta kekayaannya secara tepat waktu kepada KPK."

PLN Indonesia Power demonstrates its anti-corruption commitment through 100% LHKPN compliance: A total of 1,080 mandatory-reporting officials submitted their asset declarations to KPK on time.

LHKPN merupakan salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan negara. Kewajiban ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menunjukkan dukungan aktif PLN Indonesia Power terhadap program pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan berintegritas.

PLN Indonesia Power secara konsisten mengarahkan dan mengoordinasikan seluruh jajaran manajemen untuk senantiasa mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas bisnis. Melalui pelaksanaan kewajiban LHKPN secara tertib dan tepat waktu, Perusahaan menegaskan peran aktifnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.

Sebagai wujud nyata komitmen Perusahaan terhadap integritas, transparansi, dan tata kelola perusahaan yang baik, PLN Indonesia Power berhasil mencatatkan capaian 100% kepatuhan dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Seluruh pejabat yang menjadi wajib lapor sebanyak 1.080 orang, telah menyampaikan laporan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tepat waktu pada tahun 2024.

LHKPN is one of the key measures in preventing corruption, collusion, and nepotism (KKN) in the administration of the state. This obligation not only reflects compliance with prevailing laws and regulations but also demonstrates PLN Indonesia Power's active support for the government's program in realizing clean and integrity-driven governance.

PLN Indonesia Power consistently guides and coordinates all levels of management to uphold the principles of transparency and accountability in every business activity. Through the timely and orderly fulfillment of LHKPN obligations, the Company reaffirms its active role in creating a clean, professional work environment free from conflicts of interest.

As a concrete manifestation of its commitment to integrity, transparency, and good corporate governance, PLN Indonesia Power successfully achieved 100% compliance in the submission of the State Officials' Wealth Report (LHKPN). All 1,080 officials required to report had submitted their asset declarations to the Corruption Eradication Commission (KPK) on time in 2024.

Kebijakan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Policy on State Officials' Wealth Report

Kebijakan tentang kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 112.K/010/IP/2021 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Indonesia Power. Sesuai dengan pedoman tersebut, pejabat yang menjadi wajib lapor LHKPN mencakup:

1. Dewan Komisaris Perusahaan, dimana dalam pengelolaannya mengikuti pengelolaan pada instansi asal;
2. Direksi Perusahaan;
3. Pegawai pada jenjang jabatan Eksekutif Utama, Eksekutif Senior dan Eksekutif pada jenis jabatan struktural dan fungsional;
4. Pegawai yang memegang jabatan struktural pada jenjang jabatan Generalis III;
5. Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan; serta
6. Pegawai Organik Jenjang Supervisor/Penyelia Atas, Eksekutif dan Eksekutif Senior pada Anak Perusahaan.

The policy regarding compliance with the submission of the LHKPN is regulated under the Board of Directors' Decision Letter Number 112.K/010/IP/2021 concerning the Guidelines for the State Officials' Wealth Report (LHKPN) within Indonesia Power. According to these guidelines, the officials required to submit LHKPN include:

1. The Company's Board of Commissioners, whose reporting follows the procedures of their originating institutions;
2. The Company's Board of Directors;
3. Employees at the levels of Principal Executive, Senior Executive, and Executive in both structural and functional positions;
4. Employees holding structural positions at the Generalis III;
5. Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries; and
6. Permanent Employees at the Supervisor/Senior Supervisor, Executive, and Senior Executive levels in Subsidiaries.

Prosedur dan Pelaksanaan Laporan LHKPN Tahun 2024 Procedure and Implementation of LHKPN Submission in 2024

LHKPN disampaikan satu (1) kali dalam setahun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara elektronik melalui aplikasi berbasis web e-LHKPN. Prosedur penyampaian LHKPN di Perusahaan mengacu pada Peraturan KPK Nomor 03 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

LHKPN is submitted once (1) a year to the Corruption Eradication Commission (KPK) electronically through the web-based e-LHKPN application. The procedure for submitting the LHKPN within the Company refers to KPK Regulation Number 02 of 2020 on Amendments to KPK Regulation Number 07 of 2016 on the Procedures for Registration, Announcement, and Audit of State Officials' Wealth.



LHKPN disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ berakhirnya jabatan/ pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun dan masih menjabat sebagai Penyelenggara Negara.

The LHKPN must be submitted no later than 2 (two) months from the date of initial appointment, end of term of office, retirement, or reappointment after the end of term or retirement, provided the individual still holds a position as a State Official.



Selama penyelenggara negara menjabat, LHKPN wajib disampaikan secara periodik setiap tahun atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun pelaporan, dan paling lambat dilaporkan pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

During their term of office, incumbent State Officials shall submit LHKPN once a year by detailing their wealth as of December 31 of the reporting year. The report shall be submitted no later than on March 31 of the next year.

Sosialisasi Pelaporan LHKPN

Dissemination of LHKPN Submission

Dalam rangka mendorong tingkat kepatuhan para pejabat wajib lapor di lingkungan Perusahaan untuk menyampaikan LHKPN secara tepat waktu, Bidang Risk Management and Compliance selaku penanggung jawab pelaporan telah mengambil peran aktif melalui berbagai inisiatif. Upaya yang dilakukan antara lain mencakup pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai tata cara pelaporan LHKPN, baik secara langsung maupun melalui media digital. Informasi dan panduan teknis disampaikan melalui distribusi dokumen pendukung serta pemanfaatan platform e-LHKPN secara daring guna mempermudah proses pelaporan oleh para pejabat terkait.

As an effort to encourage timely compliance among mandatory officials within the Company in submitting their State Officials' Wealth Report (LHKPN), the Risk Management and Compliance Unit responsible for the reporting process, has taken an active role through various initiatives. These efforts include conducting dissemination sessions and technical guidance on LHKPN reporting procedures, both in-person and through digital media. Technical information and guidelines are provided via the distribution of supporting documents and the use of the online e-LHKPN platform to facilitate the reporting process for the relevant officials.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Dalam rangka menjaga integritas dan mencegah potensi kerugian bagi Perusahaan, PLN Indonesia Power secara konsisten telah menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) sebagai sarana untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan maupun di dalam proses bisnis Perusahaan. Sistem ini terbuka bagi karyawan dan pihak eksternal, serta menyediakan opsi pelaporan secara anonim guna menjamin keamanan dan kerahasiaan pelapor.

WBS dirancang untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan potensi risiko serta pelanggaran secara dini, sehingga memungkinkan penanganan cepat dan mencegah dampak yang lebih luas. Melalui sistem ini, PLN Indonesia Power berupaya membangun budaya transparansi, akuntabilitas, serta perilaku etis di seluruh tingkatan organisasi Perusahaan.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Perusahaan, pengelolaan WBS Perusahaan dapat diakses melalui *website* resmi PLN Indonesia Power pada bagian Tata Kelola melalui tautan:

In order to uphold integrity and prevent potential losses for the Company, PLN Indonesia Power has consistently implemented a Whistleblowing System (WBS) as a mechanism for reporting suspected violations occurring within the Company or along Company's business process. The system is accessible to both employees and external parties and provides an option for anonymous reporting to ensure the safety and confidentiality of whistleblowers.

The WBS is designed to detect and disclose potential risks and violations at an early stage, allowing for prompt handling and the prevention of broader impacts. Through this system, PLN Indonesia Power aims to foster a culture of transparency, accountability, and ethical behavior at all levels of the organization.

As a manifestation of the Company's transparency and accountability, the management of the Company's WBS can be accessed through the official website of PLN Indonesia Power under the Governance section via the following link:

<https://www.plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Form-Aduan-WBS.aspx>

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Policy

Dalam pelaksanaannya, PLN Indonesia Power telah menetapkan pedoman WBS yang mengatur secara jelas proses, tanggung jawab, serta mekanisme investigasi atas setiap laporan yang diterima. Untuk memperkuat implementasi sistem WBS, pada tahun 2024 PLN Indonesia Power telah memperbarui kebijakan WBS melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Power Nomor 0020.P/DIR/2024 dan 011.SK/DK-PLNIP/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Kebijakan ini disusun untuk mendorong seluruh pegawai dan pihak lainnya agar berani menyampaikan kekhawatiran mereka secara bertanggung jawab, serta memberikan panduan menyeluruh mengenai proses pelaporan, investigasi, tindak lanjut perbaikan, dan perlindungan terhadap pelapor. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan WBS, sosialisasi secara berkala dilakukan kepada seluruh pegawai, jajaran Direksi, Dewan Komisaris, serta mitra kerja perusahaan. Sepanjang tahun 2024, sosialisasi dilakukan melalui media internal seperti email perusahaan dan survei pemahaman WBS, serta kepada pihak eksternal melalui forum *vendor gathering*.

In its implementation, PLN Indonesia Power has established WBS guidelines that clearly regulate the processes, responsibilities, and investigation mechanisms for every report received. To strengthen the implementation of the WBS, in 2024 PLN Indonesia Power updated the WBS policy through a Joint Decision of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Indonesia Power Number 0020.P/DIR/2024 and 011.SK/DK-PLNIP/2024 dated May 20, 2024, on the Policy on the Management of Violation Reports (*Whistleblowing System*).

This policy is developed to encourage all employees and other parties to responsibly voice their concerns and to provide comprehensive guidance on the processes of reporting, investigation, corrective actions, and whistleblower protection. To improve the effectiveness of WBS implementation, regular outreach efforts have been conducted for all employees, members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and business partners. Throughout 2024, these efforts were carried out through internal media such as corporate email and WBS understanding surveys, as well as external engagement through vendor gathering forums.

Perlindungan Bagi Pelapor Protection for Whistleblower

PLN Indonesia Power menjamin perlindungan sepenuhnya kepada pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, maupun tindakan balas dendam seperti pemutusan hubungan kerja, penurunan pangkat, penangguhan insentif, dan bentuk pembalasan lainnya. Apabila pelapor mengalami tindakan pembalasan, mereka berhak menyampaikan pengaduan kepada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan komitmen ini, PLN Indonesia Power bertekad untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem pengawasan internal serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan berintegritas.

PLN Indonesia Power guarantees full protection for whistleblowers against all forms of threats, intimidation, or retaliation, such as termination of employment, demotion, suspension of incentives, and other forms of retribution. If a whistleblower experiences any retaliatory actions, they have the right to file a complaint with the Violation Reporting Management Team through the established mechanism. Through this commitment, PLN Indonesia Power is determined to uphold trust in its internal oversight system and to create a clean, healthy, and integrity-driven work environment.

Pihak yang Mengelola Pengaduan Whistleblowing Management Team

Untuk menjamin pengelolaan laporan secara profesional, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, PLN Indonesia Power telah membentuk dan menetapkan pihak-pihak yang berwenang dalam menangani serta menindaklanjuti seluruh pengaduan yang masuk melalui WBS. Penetapan ini dilakukan melalui Keputusan Direksi Nomor 1004.K/020/IP/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS). Dalam kebijakan tersebut, Perusahaan telah menyusun struktur kewenangan yang jelas dan terukur dalam menangani pelaporan pelanggaran, termasuk siapa saja yang berwenang menerima, menelaah, melakukan investigasi, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut, sebagaimana tabel berikut:

1. Kewenangan Direksi dan Tim Pengelola Pengaduan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai, sebagai berikut:

Terduga Pelaku Pelanggaran (Terlapor) Suspected Offender (Reportee)	Ketua Tim Pengelola Pelanggaran Head of Whistleblowing Management Team	Anggota Member	Admin Pengelola Pengaduan Pelanggaran Administrator of Whistleblowing Management
Pegawai Manajemen Atas Senior Management Employee	Direktur Utama President Director	• Direktur Operasi Pembangkit Batubara • Direktur Operasi Pembangkit Gas • Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga • Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko • Direktur Human Capital Management & Administrasi	• Kepala Satuan Internal Audit • Vice President Risk Management • Head of Internal Audit Unit • Vice President of Risk Management
Pegawai Manajemen Menengah, Manajemen Dasar dan Generalist Middle Management, Junior Management, and Generalist Employees	Kepala Satuan Internal Audit Head of Internal Audit Unit	• Kepala Satuan Legal, Risk and Compliance • Vice President Human Capital Services • Vice President Risk Management and Compliance	• Head of Legal, Risk, and Compliance Unit • Vice President of Human Capital Services • Vice President of Risk Management and Compliance

2. Kewenangan Dewan Komisaris dan Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan sehubungan dengan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan organ penunjang Dewan Komisaris, sebagai berikut:

To ensure that reports are managed professionally, objectively, and accountably, PLN Indonesia Power has established and appointed authorized parties to handle and follow up on all complaints submitted through the Whistleblowing System (WBS). This appointment was formalized through the Board of Directors' Decision Letter Number 1004.K/020/IP/2024 dated November 4, 2024, on the Establishment of the Whistleblowing System (WBS) Management Team. In this policy, the Company has established a clear and measurable authority structure for handling whistleblowing reports, including who is authorized to receive, review, investigate, and provide follow-up recommendations, as outlined in the following table:

1. The authority of the Board of Directors and the Whistleblowing Management Team in relation to violations committed by employees is as follows:

2. Authority of the Board of Commissioners and the Establishment of the Whistleblowing Management Team concerning alleged violations committed by members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and supporting organs of the Board of Commissioners is as follows:

Terduga Pelaku Pelanggaran (Terlapor) Suspected Offender (Reportee)	Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran Whistle-Blowing Management Team	Ketua Tim Pengelola Pelanggaran Head of Whistle-Blowing Management Team
Anggota Direksi Member of Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Komisaris Utama President Commissioner
Anggota Organ Penunjang Dewan Komisaris Member of Supporting Organs for the Board of Commissioners	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Komisaris Utama President Commissioner
Anggota Dewan Komisaris Member of Board of Commissioners	Pemegang Saham Shareholders	Pemegang Saham Shareholders

Hierarki kewenangan di atas dirancang agar setiap laporan ditangani secara tepat, tidak memihak, serta menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, akuntabilitas, dan integritas.

The above hierarchy of authority is designed so that every report is handled appropriately, impartially, and upholds the principles of confidentiality, accountability, and integrity.

Sarana dan Media Pelaporan Pelanggaran Channels and Means of Report Submission

PLN Indonesia Power menyediakan berbagai saluran yang dapat digunakan oleh pelapor untuk menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran. Saluran-saluran ini dapat diakses secara mudah, menjamin kerahasiaan identitas pelapor, serta memastikan bahwa laporan diterima dan ditindaklanjuti secara tepat waktu. Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai sarana dan media berikut:

PLN Indonesia Power provides various accessible channels for reporters to submit alleged violation reports. These channels are easy to access, ensure the confidentiality of the whistleblower's identity, and guarantee that reports are received and followed up on in a timely manner.



Email
pengaduan@plnindonesiapower.co.id



Website
www.plnindonesiapower.co.id



Aplikasi WBS WBS Application
<https://cos.pln.co.id>



Whatsapp
081-1979-8888



Fungsi Kepatuhan Compliance Unit
Cq Vice President Risk Management and Compliance



Surat Resmi melalui Pos Official Letter via Mail
Ditujukan kepada: Addressed to:
Up. Admin Pengaduan Pelanggaran
PT PLN Indonesia Power Head Office
Jl. Jend Gatot Subroto kav 18,
Jakarta Selatan 12950



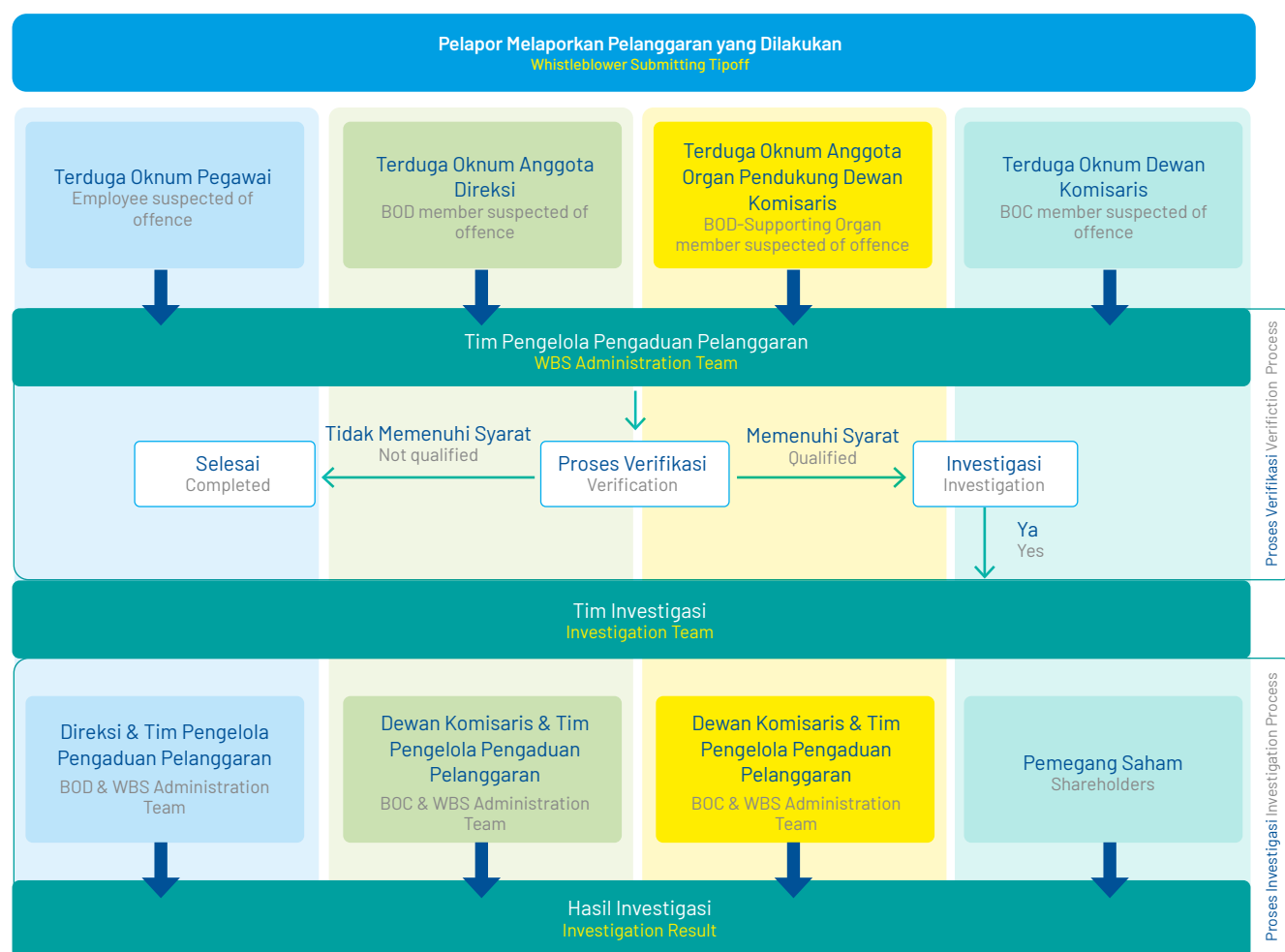
Drop Box
Berada di Lobby Lantai 1 Head Office
Located in the Lobby, 1st Floor, Head Office

Mekanisme Penanganan Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing Handling Mechanism

PLN Indonesia Power telah menetapkan mekanisme penanganan pelaporan pelanggaran yang sistematis, transparan, dan akuntabel guna memastikan setiap laporan yang diterima melalui saluran WBS ditindaklanjuti secara tepat.

PLN Indonesia Power has established a systematic, transparent, and accountable mechanism for whistleblowing handling to ensure that every report received through the WBS channel is followed up appropriately.

Alur Proses Penanganan Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing Process Flow



Seluruh laporan yang masuk terlebih dahulu akan melalui tahap verifikasi untuk menilai keberadaan bukti awal yang valid dan relevan. Jika laporan memenuhi kriteria, maka proses investigasi akan dilakukan oleh tim yang berwenang dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, profesionalisme, dan ketidakberpihakan.

Hasil investigasi menjadi dasar pengambilan keputusan terhadap tindakan korektif maupun sanksi yang perlu dijatuhkan. Jika terbukti terjadi pelanggaran, maka pegawai yang terlibat dapat dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya, mulai dari teguran, surat peringatan, penurunan jabatan, hingga pemutusan hubungan kerja. Sementara itu, bagi mitra kerja eksternal yang terbukti melakukan pelanggaran, Perusahaan berhak melakukan pemutusan kontrak kerja sama. Sebaliknya, apabila hasil investigasi menunjukkan bahwa laporan disampaikan dengan itikad tidak baik, mengandung informasi palsu, unsur fitnah, atau tanpa dasar yang jelas, maka Perusahaan berhak mengambil tindakan hukum terhadap pelapor, termasuk kemungkinan gugatan balik atau sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini ditetapkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pelapor yang beritikad baik dan pencegahan terhadap penyalahgunaan sistem pelaporan.

All incoming reports will first undergo a verification stage to assess the presence of valid and relevant preliminary evidence. If the report meets the criteria, an investigation will be conducted by an authorized team, upholding the principles of objectivity, professionalism, and impartiality.

The investigation results will serve as the basis for deciding on corrective actions or sanctions to be imposed. If a violation is proven, the employee involved may be subject to sanctions based on the severity of the violation, from a warning, written reprimand, demotion, to termination of employment. Meanwhile, external partners found to have committed violations may face termination of their cooperation contract with the Company. On the other hand, if the investigation reveals that the report was submitted in bad faith, contains false information, defamatory content, or lacks a clear basis, the Company reserves the right to take legal action against the reporter, including potential counterclaims or administrative sanctions in accordance with applicable regulations. This mechanism is established to maintain a balance between protecting well-intentioned whistleblowers and preventing misuse of the reporting system.

Jumlah Pelaporan Pelanggaran dan Tindak Lanjut

Number of Tipoffs and Follow-ups

Selama tahun 2024, terdapat 23 laporan pengaduan yang masuk melalui sarana pelaporan WBS dan semuanya telah selesai ditindaklanjuti. Dari seluruh laporan yg diterima di tahun 2024, Tim Pengelola WBS tidak menerima laporan yang dikategorikan sebagai praktik korupsi di sepanjang tahun 2024.

Throughout 2024, there were 23 complaint reports received through the WBS reporting channel, and all of them had been followed up. Of all the reports received in 2024, the WBS Management Team did not receive any reports categorized as corrupt practices in 2024.

Akses Informasi dan Komunikasi bagi Para Pemangku Kepentingan

Access to Information and Communication for Stakeholders

PLN Indonesia Power menyadari bahwa keterlibatan pemangku kepentingan merupakan elemen fundamental dalam mendukung kesuksesan dan pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, keterlibatan serta pengelolaan pemangku kepentingan harus dilakukan secara berkelanjutan dan terus berkembang seiring waktu. PLN Indonesia Power berkomitmen untuk membangun komunikasi yang transparan dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan guna memperkuat kepercayaan serta menciptakan hubungan jangka panjang yang solid.

Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Perusahaan senantiasa menjaga dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan melalui transparansi dalam penyampaian informasi yang akurat, terkini, tepat waktu, dan memadai. Informasi ini mencakup berbagai aspek penting, seperti perkembangan bisnis, strategi, serta kondisi Perusahaan. Selain itu, PLN Indonesia Power terus menjalin hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan. Perusahaan secara aktif mengadakan pertemuan dan dialog untuk memahami harapan serta kebutuhan terkini para pemangku kepentingan.

PLN Indonesia Power recognizes that stakeholder engagement is a fundamental element in supporting the Company's success and growth. Therefore, stakeholder engagement and management must be carried out continuously and evolve over time. PLN Indonesia Power is committed to building transparent and constructive communication with stakeholders to strengthen trust and establish strong long-term relationships.

As part of its responsibilities, the Company consistently maintains and enhances the trust of shareholders and all stakeholders through transparency in delivering accurate, up-to-date, timely, and adequate information. This information covers various important aspects, such as business developments, strategies, and the Company's condition. In addition, PLN Indonesia Power continues to foster harmonious relationships with stakeholders. The Company actively holds meetings and dialogues to understand the current expectations and needs of its stakeholders.

Akses Informasi dan Komunikasi Bagi Internal Perusahaan

Access to Information and Communication for Company Personnel

PLN Indonesia Power memfasilitasi internal Perusahaan dalam sebuah forum komunikasi dua arah antara pegawai dan manajemen yang dilakukan melalui kegiatan *Coffee Morning* dan *Team Briefing*. Forum ini merupakan saluran tatap muka langsung antara Manajemen dan pegawai yang dilaksanakan 1 (satu) kali per semester, dimana dalam forum tersebut Manajemen dapat menyampaikan arahan strategis Perusahaan. PLN Indonesia Power juga menerbitkan e-buletin mingguan yaitu *Indonesia Power Weekly News* (IPWN) dan *Kabar Sepekan* yang memuat beragam aktivitas Perusahaan. Selain itu masih terdapat saluran informasi internal lainnya seperti *Visual Management*, *Email*, *Whatsapp Group*.

PLN Indonesia Power facilitates internal communication within the Company through a two-way communication forum between employees and management, conducted through *Coffee Morning* and *Team Briefing* sessions. This forum serves as a direct face-to-face channel between Management and employees and is held once every semester, during which Management can deliver the Company's strategic directives. PLN Indonesia Power also publishes weekly e-bulletins, namely *Indonesia Power Weekly News* (IPWN) and *Kabar Sepekan*, which highlight various Company activities. In addition, there are other internal communication channels such as *Visual Management*, *Email*, and *WhatsApp Groups*.

Komunikasi dan Akses informasi Bagi Dewan Komisaris

Communication and Access to Information for the Board of Commissioners

PLN Indonesia Power menjamin bahwa Dewan Komisaris memiliki akses yang luas, akurat, dan tepat waktu terhadap seluruh informasi yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Akses informasi yang memadai merupakan elemen krusial dalam memastikan independensi, efektivitas, dan ketepatan pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris. Komunikasi yang terbuka dan transparan antara Dewan Komisaris, Direksi, serta jajaran manajemen eksekutif merupakan prinsip utama yang terus dijaga untuk mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan operasional dan kebijakan strategis Perusahaan.

Dalam praktiknya, Direksi berkewajiban untuk menyampaikan laporan dan informasi secara rutin kepada Dewan Komisaris yang mencakup antara lain: Laporan Manajemen, Laporan Tahunan, Laporan Manajemen Risiko, Laporan Hasil Audit Internal dan Eksternal serta Laporan khusus lainnya yang diminta secara langsung oleh Dewan Komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris juga memiliki hak dan kewenangan untuk sewaktu-waktu meminta informasi tambahan kepada Direksi apabila dibutuhkan dalam proses pengawasan atau pengambilan keputusan strategis. Untuk memperkuat komunikasi, forum formal seperti rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan secara berkala. Dalam forum ini, Direksi menyampaikan data, laporan, dan perkembangan penting terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

PLN Indonesia Power ensures that the Board of Commissioners has broad, accurate, and timely access to all information needed to optimally carry out its supervisory function. Adequate access to information is a crucial element in ensuring the independence, effectiveness, and accuracy of decision-making by the Board of Commissioners. Open and transparent communication between the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the executive management team is the main principle consistently upheld to support oversight of the Company's operations and strategic policy implementation.

In practice, the Board of Directors is obligated to regularly submit reports and information to the Board of Commissioners, including but not limited to: Management Reports, Annual Reports, Risk Management Reports, Internal and External Audit Reports, as well as other special reports requested directly by the Board of Commissioners. In addition, the Board of Commissioners holds the right and authority to request additional information from the Board of Directors at any time, should it be required for supervisory purposes or strategic decision-making. To strengthen communication, formal forums such as joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors are held regularly. In these forums, the Board of Directors presents data, reports, and key updates related to the duties and authorities of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

Akses Informasi dan Komunikasi Bagi Pemegang Saham

Access to Information and Communication for Shareholders

PLN Indonesia Power menjadikan transparansi informasi dan komunikasi efektif dengan pemegang saham sebagai prinsip utama dalam menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan menyadari bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan yang berkelanjutan dengan para pemegang saham.

Dengan kepemilikan saham mayoritas oleh PT PLN (Persero), PLN Indonesia Power secara konsisten berupaya menjaga kredibilitas dan akuntabilitas melalui penyampaian informasi yang tepat waktu, relevan,

PLN Indonesia Power upholds information transparency and effective communication with shareholders as a core principle in conducting its business activities. The Company recognizes that information disclosure is an important foundation for building trust and strengthening sustainable relationships with shareholders.

With the majority of shares owned by PT PLN (Persero), PLN Indonesia Power consistently strives to maintain credibility and accountability by providing timely, relevant, accurate, and adequate information, particularly regarding operational

akurat, dan memadai, khususnya terkait aspek kinerja operasional, strategi bisnis, pengelolaan risiko, serta kondisi keuangan Perusahaan. Sepanjang tahun 2024, penyampaian informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komunikasi dilakukan melalui berbagai kanal resmi seperti:

performance, business strategy, risk management, and the Company's financial condition. Throughout 2024, information disclosure had been carried out in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. Communication had been conducted through various official channels such as:



Pelibatan Langsung **Direct Engagement**

PLN Indonesia Power secara langsung melibatkan pemegang saham untuk mendiskusikan strategi dan tata kelola Perusahaan agar Perusahaan selalu mengetahui harapan/aspirasi dari Pemegang Saham. Secara berkala, Perusahaan juga melakukan *meeting* untuk membahas rancangan RKAP dan RJPP melalui pelaksanaan pra-RUPS.

PLN Indonesia Power directly involves shareholders in discussions on the Company's strategy and governance to ensure a clear understanding of Shareholders' expectations and aspirations. The Company also regularly holds meetings to discuss the draft of the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and the Corporate Long-Term Plan (RJPP) through pre-General Meeting of Shareholders (pre-GMS) sessions.



Website Perusahaan **Company Website**

Semua informasi tata kelola perusahaan yang relevan, termasuk Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PLN Indonesia Power, tersedia di situs web Perusahaan di www.plnindonesiapower.co.id.

All relevant corporate governance information, including PLN Indonesia Power's Annual Report and Sustainability Report, is available on the Company's website at www.plnindonesiapower.co.id.



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) **General Meeting of Shareholders**

PLN Indonesia Power memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk mendengar penjelasan tentang kinerja Perusahaan dan mengajukan pertanyaan sekaligus berinteraksi dengan Dewan Komisaris dan Direksi melalui pelaksanaan RUPS Tahunan. Sebelum RUPST, para pemegang saham diberikan seluruh informasi material yang dimiliki Perusahaan yang relevan dengan mata acara rapat.

PLN Indonesia Power provides all shareholders with the opportunity to hear explanations about the Company's performance and to ask questions as well as interact with the Board of Commissioners and the Board of Directors during the Annual GMS. Prior to the AGMS, shareholders are provided with all material information relevant to the meeting agenda.



Penyampaian Laporan Berkala **Submission of Periodical Reports**

Secara berkala, Perusahaan juga menyampaikan laporan kepada Pemegang Saham, baik mayoritas maupun minoritas terkait Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan, Laporan Keuangan serta laporan lainnya.

The Company also regularly submits reports to both majority and minority shareholders, including the Annual Report, Sustainability Report, Quarterly and Annual Management Reports, Financial Statements, and other related reports.

Akses dan Informasi Perusahaan Bagi Publik

Access to Company Information for the Public

PLN Indonesia Power terlibat dengan pemangku kepentingan yang relevan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati serta memahami harapan dan aspirasi mereka. Dalam hal keterbukaan informasi publik, Perusahaan telah mengesahkan Kebijakan terkait keterbukaan informasi melalui Peraturan Direksi Nomor 0005.P/DIR/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Komunikasi Perusahaan serta Keputusan Direksi No. 246.K/010/IP/2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik. Kebijakan ini memberikan panduan bagi Sekretaris Perusahaan sebagai pengelola informasi dan dokumen Perusahaan untuk berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengaturan terkait keterbukaan informasi dan informasi rahasia.

PLN Indonesia Power engages with relevant stakeholders to build strong, respectful relationships and to understand their expectations and aspirations. In terms of public information disclosure, the Company has enacted policies on information transparency through the Board of Directors Regulation No. 0005.P/DIR/2023 dated May 30, 2023, on the Guidelines for Corporate Communication, as well as the Board of Directors' Decision Letter No. 246.K/010/IP/2017 dated December 31, 2017, on Public Information Service, Disclosure, and Transparency. These policies provide guidance for the Corporate Secretary as the manager of the Company's information and documents in communicating with all stakeholders, including provisions regarding information disclosure and the handling of confidential information.



**Website
Perusahaan**
Company Website

Seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi Perusahaan situs web Perusahaan di www.plnindonesiapower.co.id yang tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Hal-hal yang dipublikasikan dalam situs web Perusahaan antara lain pengungkapan material terkait Perusahaan, kinerja operasional Perusahaan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan juga telah menyediakan forum komunikasi dan publikasi informasi publik melalui media sosial yang dimiliki Perusahaan.

All stakeholders can access the Company's data and information through its website at www.plnindonesiapower.co.id, which is available in both Indonesian and English. Information published on the Company's website includes material disclosures related to the Company, operational performance, Annual Reports, and Sustainability Reports, all of which are accessible to stakeholders. The Company has also provided communication forums and public information dissemination through its official social media channels.



**Kontak
Perusahaan**
Company Contact

Untuk keperluan informasi lebih lanjut mengenai PLN Indonesia Power, publik juga dapat menghubungi Perusahaan melalui:

For further information regarding PLN Indonesia Power, the public may also contact the Company through:



PLN
Indonesia Power

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18

Jakarta Selatan, Indonesia

☎ (+62-21) 5267666

📠 (+62-21) 5252623

Manajemen Rantai Pasok dan Pengadaan Barang/Jasa

Supply Chain Management and Goods & Services Procurement

PLN Indonesia Power menempatkan kualitas produk dan keandalan layanan sebagai faktor strategis utama dalam mendukung keberhasilan bisnis dan operasional Perusahaan. Sebagai bagian dari komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, Perusahaan memahami bahwa rantai nilai yang kuat memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, PLN Indonesia Power berkomitmen untuk menjalin hubungan kerja sama yang adil, transparan, dan berkelanjutan dengan seluruh pemasok.

PLN Indonesia Power memberikan kesempatan yang sama kepada bagi perusahaan besar, usaha besar, menengah dan kecil untuk menjadi mitra kerja/pemasok di Perusahaan. Untuk memaksimalkan efektivitas dan transparansi dalam proses pengadaan, kegiatan pengadaan barang/jasa di Perusahaan telah mengadopsi sistem otomatis berbasis digital. Melalui aplikasi *Supply Chain Management* (SCM) yang dapat diakses melalui <https://scm.plnindonesiapower.co.id>, para pemasok dapat memperoleh informasi terkini terkait: Pengadaan barang dan jasa, Kebijakan pengadaan terbaru, Berita dan informasi terkini tentang *Supply Chain Management* serta Pendaftaran *online* sebagai vendor resmi.

Selanjutnya, sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, PLN Indonesia Power terus memperkuat kerja sama dengan pemasok lokal guna menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. Hingga akhir tahun 2024, jumlah total pemasok perusahaan mencapai 2.411 pemasok, dengan 98,59% atau 2.377 pemasok merupakan pemasok lokal, yang berkontribusi terhadap total nilai pengadaan sebesar Rp89,098 miliar.

PLN Indonesia Power places product quality and service reliability as main strategic factors in supporting the Company's business and operational success. As part of its commitment to responsible business practices, the Company understands that a strong value chain has a direct impact on economic growth, environmental sustainability, and community welfare. Therefore, PLN Indonesia Power is committed to establishing fair, transparent, and sustainable partnerships with all suppliers.

PLN Indonesia Power provides equal opportunities for large, medium, and small enterprises to become business partners or suppliers to the Company. To maximize effectiveness and transparency in the procurement process, the Company has adopted an automated digital-based system. Through the Supply Chain Management (SCM) application accessible at <https://scm.plnindonesiapower.co.id>, suppliers can obtain up-to-date information related to: procurement of goods and services, the latest procurement policies, news, and updates on Supply Chain Management, as well as online registration as official vendors.

Furthermore, as part of its commitment to supporting regional economic growth, PLN Indonesia Power continues to strengthen cooperation with local suppliers to create broader and more sustainable economic impacts. By the end of 2024, the total number of suppliers reached 2,411, with 98.59% or 2,377 were local suppliers, contributing to a total procurement value of Rp89,098 billion.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Goods/Services Procurement Policy

Kebijakan pengadaan barang dan jasa ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 218.K/010/IP/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Indonesia Power. Kebijakan ini mengatur ketentuan mengenai Organisasi pengadaan barang dan jasa, Pengelolaan perencanaan pengadaan, Pengelolaan pengadaan barang dan jasa, Manajemen penyedia barang dan jasa, *e-Procurement* serta Pengendalian pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan dilakukan oleh Divisi Supply Chain Management and Procurement.

Perusahaan telah menetapkan bahwa proses pengadaan harus didasarkan pada konsep *Value for Money* (nilai beli yang sepadan), yaitu kombinasi optimum dari 6 (enam) *rights* (6 Rs) yaitu tepat kualitas, kuantitas, waktu, tempat, tujuan sosial ekonomi, dan harga, yang memenuhi kebutuhan dari pengguna, dan tidak selalu merupakan opsi harga awal paling murah (*lowest initial price option*), tetapi merupakan kembalian tertinggi (*best return*) dari investasi yang mempertimbangkan kriteria evaluasi yang sudah ditentukan. Dalam konsep 6 Rs, tepat harga merupakan paling akhir karena tergantung pada 5 Rs lainnya, sedangkan tujuan sosial ekonomi ini dapat berupa tujuan sosial, lingkungan, dan tujuan strategis lain, seperti mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Selain itu, menegaskan komitmen Perusahaan dalam pemberantasan praktik anti korupsi, pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan juga telah mengimplementasikan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini diterapkan untuk menciptakan iklim pengadaan barang dan jasa yang bersih dan memperkuat sistem pencegahan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa termasuk persyaratan pendaftaran calon pemasok. Para Penyedia juga diwajibkan menandatangani Pakta Integritas dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini ditujukan agar seluruh proses bisnis dan operasional dapat berjalan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The procurement policy for goods and services is established through the Board of Directors' Decision No. 218.K/010/IP/2016 dated November 1, 2016, on the Procurement Guidelines of PT Indonesia Power. This policy regulates provisions related to organization of goods and services procurement, procurement planning management, procurement management, supplier management, *e-Procurement*, and procurement control. The procurement of goods and services in the Company is carried out by the Supply Chain Management and Procurement Division.

The Company has determined that the procurement process must be based on the concept of Value for Money, which is the optimal combination of the 6 (six) rights (6 Rs), namely right quality, quantity, time, place, socio-economic purpose, and price. These must meet user needs and are not necessarily the option with the lowest initial price but rather the best return on investment, considering predetermined evaluation criteria. Within the 6 Rs concept, the right price is considered last because it depends on the other five Rs, while the socio-economic purpose may include social, environmental, and other strategic objectives, such as promoting the use of domestic products.

Furthermore, to affirm the Company's commitment to eradicating anti-corruption practices, the management of goods and services procurement has also implemented ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System. This system is applied to create a clean procurement environment and strengthen prevention systems against corruption, collusion, and nepotism at every stage of the goods and services procurement process, including supplier registration requirements. Providers are also required to sign an Integrity Pact in relation to the procurement of goods and services, aiming to ensure that all business and operational processes run objectively and in accordance with applicable regulations.

Seleksi Penyedia Barang dan Jasa Selection of Goods and Services Providers

PLN Indonesia Power mengambil pendekatan yang bertanggung jawab dalam seleksi penyedia barang/jasa, dengan memprioritaskan mitra yang mematuhi dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab dan beretika. Untuk itu, Perusahaan memastikan seluruh pemasok telah memenuhi dan mematuhi ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Pedoman Etika Perusahaan, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, serta kontrak tertulis yang telah disepakati.

Guna mendapatkan penyedia barang /jasa sesuai dengan yang dibutuhkan Perusahaan, PLN Indonesia Power menerapkan persyaratan kualifikasi, dimana persyaratan kualifikasi yang ditetapkan merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Untuk pekerjaan yang risiko teknis dan komersialnya tinggi atau pekerjaan kompleks dapat ditambahkan persyaratan yang lebih spesifik dan khusus, baik yang berkaitan dengan peralatan, tenaga ahli dan pengalamannya.

Untuk mendorong dan memastikan pemasok telah menerapkan kebijakan dan prosedur bisnis yang berkelanjutan, Perusahaan juga menetapkan bahwa Penyedia harus terdaftar dan memiliki sertifikat CSMS (*Contractor Safety Management System*) dan menyampaikan dokumen rencana K3L atau HSSE Plan. Dalam salah satu klausul kontrak, Perusahaan telah menetapkan hak dan kewajiban Penyedia untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan, baik di dalam maupun di luar lokasi pekerjaan, dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan Penyedia. Selain itu, di beberapa proses pengadaan, Perusahaan juga mewajibkan Penyedia untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PLN Indonesia Power implements a responsible approach in the selection of goods and services providers by prioritizing partners who comply with applicable laws and regulations and are committed to conducting their business in a responsible and ethical manner. Therefore, the Company ensures that all suppliers meet and adhere to the provisions and requirements set forth in the Company's Code of Conduct, Procurement Guidelines, and the mutually agreed written contracts.

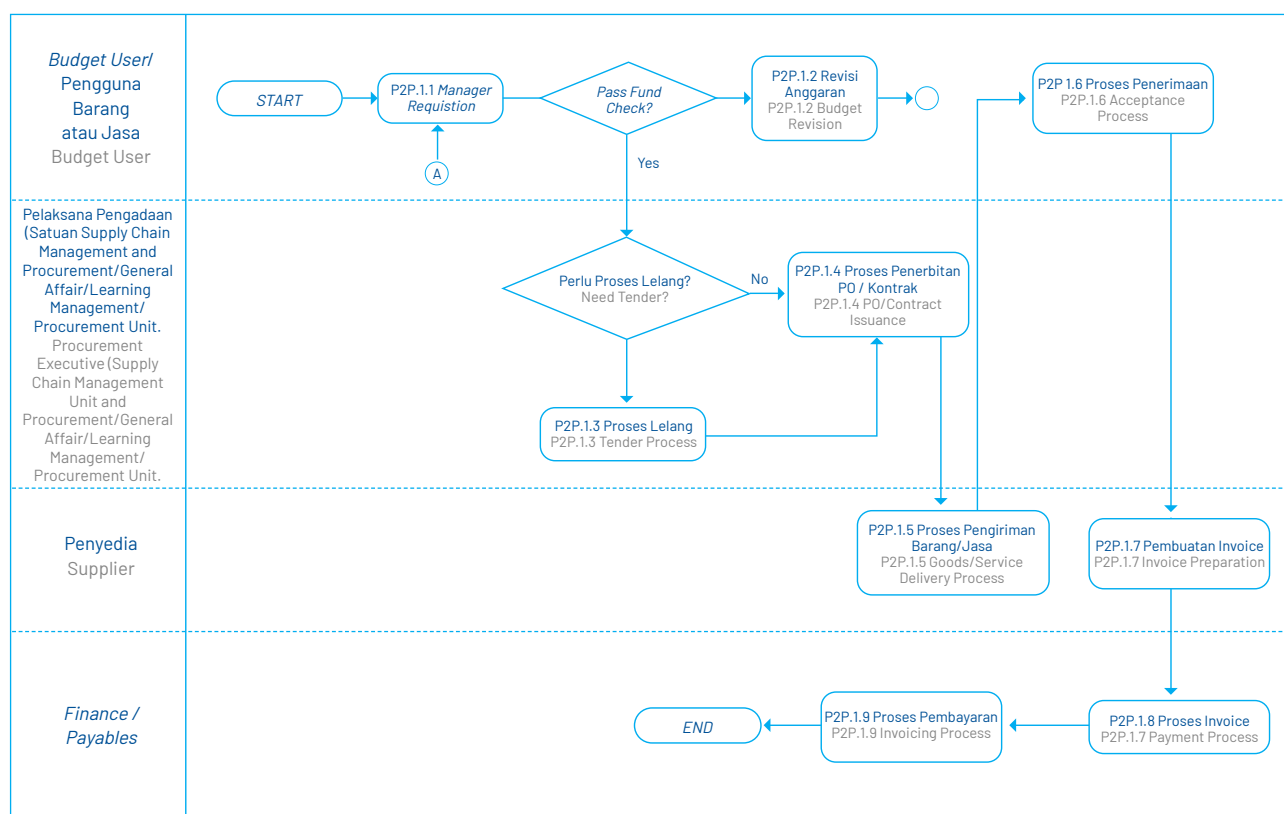
In order to ensure the selection of goods and services providers that meet the Company's needs, PLN Indonesia Power sets qualification requirements, which serve as the minimum criteria necessary for the execution of activities. For jobs with high technical and commercial risks or complex tasks, more specific and detailed requirements may be added, particularly those related to equipment, expert personnel, and experience.

To promote and ensure that suppliers implement sustainable business policies and procedures, the Company also requires that providers be registered and hold a CSMS (Contractor Safety Management System) certificate and submit an Occupational Health, Safety, Security, and Environmental (HSSE) Plan. One of the contract clauses stipulates the supplier's rights and obligations to take measures to protect the environment, both within and outside the worksite, and to minimize damage and disruption to the surrounding community and the property due to pollution, noise, or other impacts caused by the supplier's activities. In addition, in certain procurement processes, the Company also requires suppliers to guarantee the fulfillment of labor rights in accordance with the applicable laws and regulations.

Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Procedures

Secara umum mekanisme proses pengadaan barang dan jasa di Perusahaan digambarkan dalam bagan berikut:

Generally, the mechanism of goods and services procurement process within the Company are described in the following chart:



Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Upaya Penciptaan Nilai (*Value Creation*) Goods/Services Procurement as an Effort to Drive Value Creation

PLN Indonesia Power meyakini bahwa pengadaan barang dan jasa harus menjadi kegiatan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga mendorong penciptaan nilai (*value creation*) bagi Perusahaan dan para pemangku kepentingan. Melalui penerapan strategi pengadaan berbasis nilai optimal (*based purchasing strategy*), PLN Indonesia Power telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengadaan. Hasilnya, pada tahun 2024, Perusahaan mencatat penghematan biaya (*cost saving*) sebesar 7,59% terhadap RKAP, dengan pencapaian *Procurement Return on Investment* (ROI) sebesar 1.498,42%. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen PLN Indonesia Power dalam menerapkan praktik pengadaan yang strategis, efisien, dan berkelanjutan.

PLN Indonesia Power believes that the procurement of goods and services should not only fulfill operational needs but also drive value creation for the Company and its stakeholders. Through the implementation of a value-based purchasing strategy, PLN Indonesia Power has successfully improved the efficiency and effectiveness of its procurement processes. As a result, in 2024, the Company recorded cost savings of 7.59% against the RKAP, with a Procurement Return on Investment (ROI) of 1,498.42%. This achievement reflects PLN Indonesia Power's commitment to implementing strategic, efficient, and sustainable procurement practices.

Pelaksanaan *Vendor Gathering* dan Penghargaan kepada Pemasok

Implementation of Vendor Gathering and Supplier Awards

Pada tanggal 22 Oktober 2024, PLN Indonesia Power telah menggelar forum pertemuan dengan para pemasok (*Vendor Gathering*) sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam mempererat hubungan dan meningkatkan kerja sama dengan para pemasok. Dalam forum ini, PLN Indonesia Power menyampaikan berbagai program dan kebijakan terbaru terkait pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Perusahaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemasok mengenai standar, regulasi, serta prosedur yang diterapkan, sehingga dapat tercipta proses pengadaan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. *Vendor Gathering* ini juga menjadi wadah bagi para mitra kerja untuk menyampaikan masukan dan saran guna meningkatkan kinerja dalam hubungan kemitraan.

Selain itu, dalam forum ini PLN Indonesia Power juga memberikan penghargaan kepada pemasok yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam mendukung operasional Perusahaan.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi para pemasok dalam menjaga kualitas layanan, kepatuhan terhadap standar Perusahaan, sekaligus memotivasi pemasok untuk meningkatkan kinerja para pemasok.

Berikut adalah daftar pemasok yang menerima penghargaan pada tahun 2024.

On October 22, 2024, PLN Indonesia Power held a *Vendor Gathering* forum as a demonstration of the Company's commitment to strengthening relationships and enhancing collaboration with its suppliers. During this forum, PLN Indonesia Power presented various new programs and policies related to the procurement of goods and/or services within the Company. This initiative aimed to improve suppliers' understanding of the standards, regulations, and procedures implemented, thereby fostering a more effective, transparent, and accountable procurement process. The *Vendor Gathering* also served as a platform for business partners to provide input and suggestions to improve partnership performance.

Moreover, during the forum, PLN Indonesia Power presented awards to suppliers who demonstrated outstanding performance in supporting the Company's operations.

These awards represent appreciation for the dedication and contributions of the suppliers in maintaining service quality, complying with Company standards, and encouraging them to continuously improve their performance.

The following is the list of suppliers who received awards in 2024.

Pemasok Supplier	Kategori Category	Penilaian Assessment
PT Bambang Djaja	Penyedia Barang/Jasa Terbaik Best Goods/Services Vendor	Terbaik Best
PT Samudera Atlantis International	Penyedia Pekerjaan Sipil Terbaik Best Civil Works Vendor	Terbaik Best
PT Wartsila Indonesia	Penyedia Barang Terbaik Best Goods Vendor	Terbaik Best
PT Berca Hardayaperkasa	Penyedia TI Terbaik Best IT Vendor	Terbaik Best
Desyana Werdhaningrum (GE Vernova Aero)	Sales Terbaik Best Sales Partner	Terbaik Best
PT Bando Indonesia	Industri yang Aktif mengembangkan PDN Most Active Industry in Developing Domestic Content (PDN)	Terbaik Best
UBP BSLA	Unit Pembangkit dengan Implementasi TKDN terbaik Power Plant Unit with the Best Implementation of Domestic Component Level (TKDN)	Terbaik Best

Evaluasi Kinerja Pemasok Supplier Performance Evaluation

Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam hubungan kerja dengan pemasok, PLN Indonesia Power secara berkala melakukan evaluasi kinerja pemasok. Evaluasi ini dilakukan setelah proses pekerjaan selesai guna menilai sejauh mana pemasok memenuhi kewajiban dalam kontrak serta ekspektasi kinerja yang telah disepakati.

Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power telah melakukan penilaian terhadap masing-masing pemasok dengan klasifikasi dalam empat kategori, yaitu kinerja dengan kategori hijau, kuning, merah dan hitam. Selanjutnya, hasil evaluasi ini kemudian disampaikan kepada masing-masing pemasok sebagai bahan perbaikan, sehingga masing-masing pemasok dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas layanan serta memenuhi standar yang ditetapkan oleh PLN Indonesia Power.

Survei Perilaku Etis Ethical Behavior Survey

PLN Indonesia Power secara berkala melakukan survei perilaku etis untuk menilai tingkat penerapan etika perusahaan dalam interaksi dengan pemasok. Survei ini juga berfungsi sebagai evaluasi dari pemasok terhadap PLN Indonesia Power dalam aspek perencanaan pengadaan, proses pengadaan, implementasi kontrak, dan pembayaran yang dilakukan setiap bulan oleh Perusahaan. Survei perilaku etis dilakukan secara independen oleh LPT UI tanpa intervensi dari PLN Indonesia Power.

Pada tahun 2024, skor survei perilaku etis mencapai 97%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum, pemasok memberikan penilaian positif terhadap etika dan reputasi PLN Indonesia Power, terutama dalam proses pengadaan mulai dari rencana sampai dengan proses pembayaran. Selanjutnya, hasil survei ini digunakan oleh PLN Indonesia Power untuk mengidentifikasi beberapa peluang perbaikan sehingga dapat semakin meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pemasok.

To ensure effectiveness and efficiency in its working relationships with suppliers, PLN Indonesia Power regularly conducts supplier performance evaluations. These evaluations are carried out after the completion of work processes to assess the extent to which suppliers have fulfilled their contractual obligations and met the agreed performance expectations.

In 2024, PLN Indonesia Power conducted assessments of each supplier, classifying their performance into four categories: green, yellow, red, and black. The evaluation results were then communicated to each supplier as input for improvement, enabling them to identify areas that need enhancement in order to improve service quality and meet the standards set by PLN Indonesia Power.

PLN Indonesia Power regularly conducts ethical behavior surveys to assess the level of corporate ethics implementation in interactions with suppliers. This survey also serves as an evaluation by suppliers of PLN Indonesia Power in aspects such as procurement planning, procurement processes, contract implementation, and payment execution, which is conducted monthly by the Company. The ethical behavior survey is carried out independently by LPT UI without any intervention from PLN Indonesia Power.

In 2024, the ethical behavior survey score reached 97%. This result indicates that, in general, suppliers gave a positive assessment of PLN Indonesia Power's ethics and reputation, especially regarding procurement processes, from planning through to payment. Furthermore, the survey results are used by PLN Indonesia Power to identify areas for improvement in order to further enhance supplier trust and satisfaction.

Kebijakan Perlindungan Hak Kreditur

Policy on the Protection of Creditors' Rights

PLN Indonesia Power berkomitmen untuk menjaga hubungan yang sehat dan profesional dengan para kreditur sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan hubungan dengan kreditur diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan, yang menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam berinteraksi dengan kreditur maupun investor. Pedoman ini mencakup hal-hal yang diperbolehkan (*the do's*) maupun yang harus dihindari (*the don'ts*) sebagai berikut:

PLN Indonesia Power is committed to maintaining healthy and professional relationships with creditors as part of good corporate governance. The policy on relations with creditors is outlined in the Company's Code of Conduct, which sets forth the principles to be followed in interactions with both creditors and investors. This guideline includes the do's and don'ts as follows:



The Do's

- Pemilihan berdasarkan kreditur/investor dilakukan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- Menyampaikan informasi keuangan maupun non-keuangan secara akuntabel untuk menjaga kepercayaan kreditur / investor;
- Kreditur dan investor mematuhi ketentuan yang berlaku;
- Komitmen untuk memenuhi setiap kontrak perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur / investor;
- Syarat perjanjian mengedepankan prinsip transparansi dan kewajaran (*fairness*) sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
- Selection of creditors/investors is based on credible and accountable aspects, as well as in accordance with applicable procedures and mechanisms;
- Providing both financial and non-financial information in an accountable manner to maintain the trust of creditors/investors;
- Creditors and investors must comply with applicable regulations;
- Commitment to fulfilling every contractual agreement made with creditors/investors;
- Contract terms prioritize the principles of transparency and fairness so that no party is disadvantaged



The Don'ts

- Pembukuan ganda untuk kepentingan kreditur / investor;
- Pelanggaran kontrak/ perjanjian;
- Syarat perjanjian yang tidak transparan dan wajar.
- Double bookkeeping for the interests of creditors/investors;
- Breach of contract/agreement;
- Non-transparent and unfair Contract terms

Sebagai wujud pelaksanaan kebijakan tersebut, sejak 12 November 2018, PLN Indonesia Power menjalin kerja sama pembiayaan melalui Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (*Shareholder Loan*) dengan PT PLN (Persero), yang digunakan untuk pendanaan proyek PLTGU Tambak Lorok Blok III. Perjanjian tersebut berlaku efektif sejak ditandatangani dan akan berakhir setelah seluruh kewajiban pokok maupun bunga diselesaikan oleh Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, PLN Indonesia Power senantiasa mematuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian pinjaman tersebut. Perusahaan berkomitmen untuk menjamin perlindungan penuh atas hak-hak PT PLN (Persero) sebagai pemberi pinjaman, serta menjalankan seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perusahaan secara tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya Perusahaan dalam menjamin kredibilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak kreditur secara menyeluruh.

As an implementation of this policy, since November 12, 2018, PLN Indonesia Power has established financing cooperation through a Shareholder Loan Agreement with PT PLN (Persero), which is used to fund the PLTGU Tambak Lorok Block III project. The agreement has been effective since it was signed and will end after all principal and interest obligations have been fulfilled by the Company. In its execution, PLN Indonesia Power consistently complies with all provisions in the loan agreement. The Company is committed to ensuring full protection of PT PLN (Persero)'s rights as the lender, as well as fulfilling all obligations that are the Company's responsibility in a timely manner and in accordance with the agreement. This commitment is part of the Company's efforts to ensure credibility, transparency, and comprehensive protection of creditors' rights.

Kebijakan Mencegah Penyalahgunaan Informasi Orang Dalam

Insider Trading Prevention Policy

PLN Indonesia Power senantiasa menjaga integritas dan kepercayaan publik melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya dengan menerapkan kebijakan pencegahan penyalahgunaan informasi orang dalam (*insider information*). Kebijakan ini juga merupakan salah satu bagian dari upaya Perusahaan dalam mencegah insider trading, yaitu penggunaan informasi material yang belum tersedia untuk publik oleh pihak internal untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau memberikan keuntungan kepada pihak lain.

Kebijakan ini tertuang dalam Pedoman Etika Perusahaan dan mengatur bahwa setiap insan PLN Indonesia Power, termasuk manajemen dan karyawan, dilarang menyalahgunakan informasi non-publik yang diperoleh dalam kapasitasnya di Perusahaan. Informasi yang dimaksud mencakup antara lain informasi keuangan, rencana strategis, aksi korporasi, pengadaan, serta keputusan bisnis penting lainnya.

Sepanjang tahun 2024, PLN Indonesia Power tidak pernah menerima pengaduan terkait dugaan penyebaran informasi non-publik oleh internal Perusahaan untuk kepentingan pihak tertentu.

PLN Indonesia Power consistently upholds integrity and public trust through the implementation of good corporate governance, one of which is by enforcing a policy to prevent the misuse of insider information. This policy is also part of the Company's efforts to prevent insider trading, namely the use of material information not yet available to the public by internal parties to gain personal advantage or to benefit others.

This policy is outlined in the Company's Code of Conduct and stipulates that every individual within PLN Indonesia Power, including management and employees, is prohibited from misusing non-public information obtained in their capacity at the Company. The information referred to includes, among others, financial information, strategic plans, corporate actions, procurement, and other important business decisions.

Throughout 2024, PLN Indonesia Power never received any complaints regarding allegations of the dissemination of non-public information by internal parties for the benefit of certain individuals.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan PLN Indonesia Power

Implementation of the Corporate Governance Guidelines of PLN Indonesia Power

Selama tahun 2024, PLN Indonesia Power telah melakukan tindak lanjut rekomendasi atas hasil penilaian Penerapan Atas Pedoman Governansi tahun 2023 Perusahaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Throughout 2024, PLN Indonesia Power had followed up on the recommendation from the 2023 assessment of the Implementation of the Company's Governance Guidelines, which can be explained as follows:

Pernyataan mengenai Rekomendasi yang telah Dilaksanakan atas Hasil Penilaian Penerapan Pedoman Governansi Perusahaan

Statement regarding the Recommendations that Have Been Implemented Based on the Assessment Results of the Implementation of the Corporate Governance Guidelines

Berikut tindak lanjut rekomendasi atas hasil penilaian *assessment* Governansi berdasarkan parameter SK-16/S.MBU/2012 Tahun 2023:

The following are the follow-ups to the recommendations based on the results of the 2023 governance assessment using the parameters of SK-16/S.MBU/2012:

Aspek Aspect	Rekomendasi dan Tindak Lanjut beserta Alasannya Recommendation, Follow-up, and Reason	
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	Dari 3 Rekomendasi, 2 telah ditindaklanjuti yaitu: 1. Menambahkan muatan CoC dengan ketentuan terkait kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi; 2. Melakukan survei pemahaman GCG Code dan CoC kepada organ pendukung Dewan Komisaris tahun 2024, dimana hasil survei tersebut menunjukkan tingkat pemahaman yang sangat baik yaitu Sekretaris Dewan Komisaris sebesar 95.00% dan Komite Dewan Komisaris sebesar 98.33% Adapun untuk Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah terkait Mengesahkan draft GCG Code hasil review yang telah mengacu kepada ketentuan Permen BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023, di karenakan masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan Dewan Komisaris terkait batas kewenangan Dewan Komisaris.	Out of the 3 recommendations, 2 had been followed up, namely: 1. Incorporating provisions into the CoC regarding equal opportunities for employment and promotion; 2. Conducting an understanding survey in 2024 on the GCG Code and CoC among the supporting organs of the Board of Commissioners, the results of which showed a very high level of understanding: 95.00% for the Secretary to the Board of Commissioners and 98.33% for the Committees of the Board of Commissioners. The recommendation that has not yet been followed up is the ratification of the revised GCG Code draft, which refers to the provisions of the Ministry of SOEs Regulation Number: PER-2/MBU/03/2023, as further discussion is still needed with the Board of Commissioners regarding the limits of the Board's authority.
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Dari 17 Rekomendasi 11 telah selesai ditindaklanjuti yaitu diantaranya terkait: - Dewan Komisaris telah membuat Laporan hasil pelatihan atas pelatihan yang telah diikuti selama tahun 2024 serta laporan hasil pelatihan tersebut telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris tanggal 14 Maret 2024 dan 30 April 2024 (atas pelatihan yang diikuti tanggal 29-30 April (Pelatihan Teknologi Pengembangan Batubara dan Penerapan AI) - Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris telah memuat KPI Dewan Komisaris - Telah menyampaikan RKAT tahun 2024 Dewan Komisaris Kepada Pemegang Saham melalui surat No.17/003/DK-PLNIP/1/2024-R tanggal 26 Januari 2024	Out of the 17 recommendations, 11 had been completed, including the following: - The Board of Commissioners prepared reports on the training attended during 2024, and these reports were signed by the Board of Commissioners on March 14, 2024, and April 30, 2024 (for the training held on April 29-30 on "Coal Development Technology and the Application of AI"); - The Board of Commissioners' Annual Work Plan and Budget (RKAT) included the Key Performance Indicators (KPIs) for the Board of Commissioners; - Submitting a proposal for the ratification of performance achievement indicators along with their targets (Board of Commissioners' KPIs) to the Shareholders together with the submission of the Board of Commissioners' RKAT

Aspek Aspect	Rekomendasi dan Tindak Lanjut beserta Alasannya Recommendation, Follow-up, and Reason
	- Menyampaikan usulan pengesahan indikator pencapaian kinerja beserta target-targetnya (KPI Dewan Komisaris) kepada Pemegang Saham bersamaan dengan Penyampaian RKAT Dewan Komisaris - Melakukan pembaharuan Piagam Komite Dewan Komisaris dengan mengacu pada peraturan BUMN yang terbaru yaitu Piagam Komite Audit disahkan 30 Desember 2024, Piagam Investasi dan Manajemen Risiko tanggal 6 Januari 2025, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 14 Januari 2025 Submit a proposal for the ratification of performance achievement indicators and targets (KPIs of the Board of Commissioners) to the Shareholders together with the Submission of the RKAT of the Board of Commissioners. Updating the Charters of the Board of Commissioners' Committees in accordance with the latest SOE regulations, namely: the Audit Committee Charter ratified on December 30, 2024; the Investment and Risk Management Committee Charter on January 6, 2025; and the Nomination and Remuneration Committee Charter on January 14, 2025. Adapun untuk yang belum ditindaklanjuti diantaranya terkait Mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Komite serta dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris dikarenakan Perusahaan belum menyusun KPI individu Dewan Komisaris As for the recommendations that have not yet been followed up, one of them is the evaluation of the performance of each member of the Board of Commissioners and Committees, and the documentation of such evaluations in the minutes of the Board of Commissioners' Meeting. This has not been done because the Company has not yet established individual KPIs for the Board of Commissioners.
Direksi Board of Directors	Dari 20 Rekomendasi, 16 telah selesai ditindaklanjuti yaitu diantaranya terkait: 1. Direksi telah melakukan pelatihan serta menyusun laporan hasil pelatihan yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2024 2. Telah Menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian terhadap prosedur atas hasil Audit SMT yaitu Hingga akhir tahun 2024 sebagaimana yang tertuang pada dokumen Non Conformity.Observation report yang diterbitkan oleh Lembaga independen menunjukan tindak lanjut hasil rekomendasi audit telah selesai dilakukan sesuai dengan SLA waktu yang ditetapkan yaitu 30 Desember 2024. 3. Telah Menyampaikan Rapat Tinjauan Manajemen yang membahas penyempurnaan SOP secara berkala sebagaimana dalam risalah RTM tahun 2024. 4. Telah menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu yaitu pada tanggal 29 september 2023 melalui surat Direksi NO. 4790/REN.00.01/PLNIP0101/00/2023 5. Telah menyampaikan dokumentasi pembahasan dengan Dewan Komisaris terkait perubahan lingkungan bisnis sebagaimana yang terdapat pada Risalah Rapat Direksi tahun 2024 (Risalah Rapat Direksi tanggal 7 Agustus 2024 dengan salah satu agendanya laporan kinerja beyond kWh - cofiring ; dan Risalah <i>Management Meeting</i> tanggal 16 Okt 2024 dgn agenda laporan progress kinerja <i>beyond kWh</i>) sebagai pembahasan perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya yang berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan (antara lain progress pendapatan beyond kWh, pencapaian kontrak luar negeri, solar PV manufacturing, <i>carbon emission reduction</i>) Out of 20 recommendations, 16 had been completed, including the following: 1. The Board of Directors conducted training and prepared reports on the training attended by the Board of Directors throughout 2024. 2. Following up on non-conformity findings related to procedures from the SMT Audit results, showing that by the end of 2024, as documented in the Non-Conformity Observation report issued by an independent institution, the audit recommendation follow-ups were completed within the set SLA deadline of December 30, 2024. 3. Submitting the Management Review Meeting that discussed periodic improvements to the SOPs, as documented in the 2024 Management Review Meeting(RTM) minutes. 4. Submitting the draft Annual Work Plan and Budget (RKAP) to the Board of Commissioners on time, specifically on September 29, 2023, through the Board of Directors' letter No. 4790/REN.00.01/ PLNIP0101/00/2023. 5. Submitting documentation of discussions with the Board of Commissioners related to changes in the business environment as reflected in the 2024 Board of Directors Meeting minutes (Board of Directors Meeting minutes dated August 7, 2024, with one of the agendas being the beyond kWh - cofiring performance report; and Management Meeting minutes dated October 16, 2024, with the agenda on progress report on beyond kWh performance), covering discussions of significant business environment changes and their impact on the Company's operations and performance (including progress in beyond kWh revenue, achievement of overseas contracts, solar PV manufacturing, and carbon emission reduction).

Aspek Aspect	Rekomendasi dan Tindak Lanjut beserta Alasannya Recommendation, Follow-up, and Reason
	6. Telah menindaklanjuti kelemahan pada jaringan internet sistem keamanan IT Menyusun prosedur TI terkait sebagaimana Pada tanggal 18-19 2024, dilakukan agenda IT <i>Security meeting</i> kelima bersama dengan PLN Group. Pembahasan pada agenda tersebut meliputi: 1. Arahan PLN terkait Keamanan Siber PLN Group; 2. Penyampaian kondisi keamanan Siber masing -masing SH AP; 3. <i>Knowledge Sharing Red team Development</i>; dan 4. Pembahasan Mitigasi risiko keamanan Siber Tahun 2025 dari Div MRF. 6. Following up on weaknesses in the IT security system's internet network by developing relevant IT procedures. On January 18-19, 2024, the fifth IT Security meeting was held together with the PLN Group. The agenda included: 1. PLN's direction regarding PLN Group's cybersecurity; 2. Presentation of cybersecurity conditions of each SH AP; 3. Knowledge Sharing on Red Team Development; and 4. Discussion on cybersecurity risk mitigation for 2025 by the MRF Division. Adapun terkait rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti yaitu diantaranya terkait: 1. Memisahkan Anggaran Pelatihan Dewan Komisaris & Direksi dan mendetailkan Rencana Program Pelatihan Direksi belum selesai ditindaklanjuti di tahun 2024, namun telah ditindaklanjuti tahun 2025 dan telah menjadi bagian dari RKAP 2025. 2. Menyusun Rencana Rapat Direksi termasuk agenda yang dibahas akan ditindaklanjuti di tahun 2025 yang dimasukkan pada RKAP 2026. As for the recommendations that have not yet been fully followed up, they include: 1. Separating the Training Budget for the Board of Commissioners and the Board of Directors, and detailing the Board of Directors' Training Program Plan, which was not completed in 2024 but has been followed up in 2025 and included as part of the 2025 RKAP. 2. Preparing the Board of Directors' Meeting Plan, including the agenda to be discussed, which will be followed up in 2025 and included in the 2026 RKAP.
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	Dari 2 Rekomendasi seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti yaitu telah mempublikasikan kebijakan dan informasi penting dalam <i>website</i> antara lain Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG Code), Pedoman Etika Perusahaan (<i>Code of Conduct/CoC</i>) dan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, serta kebijakan tersebut dapat di unduh pada <i>website</i> Perusahaan https://plnindonesiapower.co.id/ dalam menu tata kelola. Out of 2 recommendations, all had been fully followed up, including the publication of important policies and information on the website, such as the Corporate Governance Policy (GCG Code), the Company's Code of Conduct (CoC), and the Gratification Control Policy. These policies can be downloaded from the Company's website at https://plnindonesiapower.co.id/ under the governance menu.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan dengan Pendekatan "*Comply or Explain*" atau "*Apply or Explain*"

Implementation of the Corporate Guidelines using the "Comply or Explain" or "Apply or Explain" approach

Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power telah melakukan penilaian/evaluasi penerapan atas pedoman governansi Perusahaan dengan pendekatan "*comply or explain*" atau "*apply or explain*" dengan menggunakan alat uji atau parameter berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka POJK 21/POJK.04/2015 dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI).

In 2024, PLN Indonesia Power conducted an assessment/ evaluation of the implementation of the Company's governance guidelines using the "*comply or explain*" or "*apply or explain*" approach, utilizing testing tools or parameters based on the Corporate Governance Guidelines for Public Companies POJK 21/POJK.04/2015 and the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUG-KI).

Evaluasi Governansi Berdasarkan Standar Otoritas Jasa Keuangan

Governance Evaluation based on the Financial Services Authority Standard

Hingga 31 Desember 2024, PLN Indonesia Power belum berstatus terbuka, namun Perusahaan memiliki komitmen untuk menerapkan GCG berstandar Perusahaan terbuka. Untuk itu pada tahun 2024, PLN Indonesia Power melakukan Pemetaan atas implementasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka merujuk pada Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang terdiri dari penerapan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi.

As of December 31, 2024, PLN Indonesia Power has not yet had a publicly listed company status, but the Company is committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) based on public company standards. Therefore, in 2024, PLN Indonesia Power conducted a mapping of the implementation of the Corporate Governance Guidelines for Public Companies, referring to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies and the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 on the Corporate Governance Guidelines for Public Companies, which consist of the implementation of 5 (five) aspects, 8 (eight) principles of good corporate governance, and 25 (twenty-five) recommendations.

Evaluasi Tata Kelola Berdasarkan Standar Otoritas Jasa Keuangan tersebut dilakukan oleh Pihak Independen.

The Evaluation of Governance based on the Financial Services Authority standards was conducted by an Independent Party.

Dari aspek, prinsip dan rekomendasi yang dipetakan atas penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka pada PT PLN IP Tahun Buku 2024, terdapat 10 status *comply* dan 15 status *explain*, sebagaimana tabel berikut:

From the aspects, principles, and recommendations mapped regarding the implementation of the Corporate Governance Guidelines for Public Companies at PT PLN Indonesia Power for the 2024 Fiscal Year, there are 10 comply statuses and 15 explain statuses, as shown in the following table:

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Status	
			Comply	Explain
A. Hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham The Company's Relationship with Shareholders in Ensuring Shareholders' Rights	2	5	1	4
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Functions and Roles of the Board of Commissioners	2	6	2	4
C. Fungsi dan Peran Direksi Functions and Roles of the Board of Directors	2	6	3	3
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement	1	6	2	4
E. Keterbukaan Informasi Information Transparency	1	2	2	0
TOTAL	8	25	10	15

Adapun hasil pemetaan atas penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka selama periode tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The results of the mapping on the implementation of the Corporate Governance Guidelines for Public Companies during the 2024 period are as follows:

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation	
Aspek A. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Aspect A. Relationship of Public Company with Shareholders in Ensuring Shareholders' Rights				
Prinsip 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Principle 1. Enhancing the Value of the Implementation of General Meeting of Shareholders (GMS).				
1.1.	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. The Public Company has technical procedures for collecting votes, both openly and secretly, prioritizing independence and the interests of shareholders.	Explain	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait pemungutan suara dalam RUPS sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 25 ayat 5 "Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat". Namun Perusahaan belum memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar	The Company has a policy regarding voting in the GMS as regulated in the Articles of Association Article 25, paragraph 5: "Voting on individuals is conducted by unsigned closed ballots, and voting on other matters is done orally, unless the Chairperson of the Meeting decides otherwise without objection from the Shareholders present at the Meeting". However, the Company does not yet have technical procedures for collecting votes (<i>voting</i>), either openly or secretly, that prioritize independence and the interests of shareholders as regulated in the Articles of Association.
1.2.	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners attend the Annual GMS.	Explain	Seluruh Dewan Komisaris dan sebagai Direksi telah menghadiri RUPS RKAP pada tanggal 31 Januari 2024. Seluruh Dewan Komisaris dan Sebagian anggota Direksi PT PLN IP telah hadir dalam pelaksanaan RUPS LPT Tahun Buku 2023 pada tanggal 28 Juli 2024. Namun Terdapat 1 orang anggota Direksi yang belum hadir dalam RUPS LPT (Wisnoe Satrijono) dan 1 orang Direksi yang belum hadir dalam RUPS RKAP (Djoko Mulyono) sebagaimana yang dapat dilihat dilihat pada <i>website</i> Perusahaan https://plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Informasi-RUPS.aspx .	All members of the Board of Commissioners and the Board of Directors attended the Annual Work Plan and Budget (RKAP) GMS on January 31, 2024. All members of the Board of Commissioners and some members of the Board of Directors of PT PLN IP attended the Annual Financial Statements (LPT) GMS for the 2023 Fiscal Year held on July 28, 2024. However, one member of the Board of Directors (Wisnoe Satrijono) was absent from the LPT GMS, and one member of the Board of Directors (Djoko Mulyono) was absent from the RKAP GMS, as can be seen on the Company's website at https://plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Informasi-RUPS.aspx .
1.3.	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan paling sedikit selama 1(satu) tahun. A summary of the GMS minutes is available on the Company's website for at least 1(one) year.	Explain	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan https://plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Informasi-RUPS.aspx .	A summary of the GMS minutes is available on the Company's website at https://plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Informasi-RUPS.aspx .
Prinsip 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2. Enhancing the Quality of Communication between the Public Company and Shareholders or Investors.				
2.1	Perusahaan memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Perusahaan memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Explain	Perusahaan telah memiliki kebijakan komunikasi dengan stakeholder sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi No.0005.P/DIR/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Komunikasi Perusahaan 30 Mei 2023. Namun dalam kebijakan tersebut belum memuat secara khusus terkait strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi	The Company has a communication policy with stakeholders as regulated in the Board of Directors Regulation No. 0005.P/DIR/2023 on the Guidelines for Implementing Corporate Communication dated May 30, 2023. However, this policy does not yet specifically include strategies, programs, and timelines for communication implementation, nor guidelines that support shareholders or investors in participating in communication.
2.2	Perusahaan mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan dengan pemegang saham atau investor dalam situs web. The Company discloses its communication policy with shareholders or investors on its website.	Explain	Perusahaan <u>belum</u> mengungkapkan Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor dalam <i>website</i> Perusahaan.	The Company <u>has not</u> disclosed the Communication Policy with Shareholders or Investors on the Company's website.

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
Aspek B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect B. Functions and Roles of the Board of Commissioners		
Prinsip 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Principle 3. Enhancing Membership and Composition of the Board of Commissioners		
3.1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan. The determination of the number of members of the Board of Commissioners considers the Company's conditions.	<i>Explain</i>	Dewan Komisaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kondisi Perusahaan dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun jumlah Anggota Dewan Komisaris maksimal sama dengan Direksi The Company's Board of Commissioners is appointed and dismissed by the GMS. The determination of the number of Board of Commissioners members considers the Company's conditions, referring to the Articles of Association and applicable laws and regulations. However, the maximum number of Board of Commissioners members is the same as that of the Board of Directors.
3.2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of the composition of the Board of Commissioners members considers the diversity of expertise, knowledge, and experience needed.	<i>Comply</i>	Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2024 telah memperhatikan latar belakang yang beragam dalam hal keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan Perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Dewan Komisaris dalam website Perusahaan dan Laporan Tahunan Perusahaan sebagaimana yang dijelaskan pada Laporan Tahunan Perusahaan 2023. (Selama tahun 2024 tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris PT PLN IP) The composition of the Company's Board of Commissioners in 2024 had considered diverse backgrounds in terms of expertise, knowledge, and experience aimed at supporting the Company's development. This can be seen from the profiles of each Board of Commissioners member on the Company's website and in the Company's Annual Report as explained in the 2023 Annual Report. (During 2024, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners of PT PLN IP).
Prinsip 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4. Enhancing the Quality of the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.		
4.1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners.	<i>Explain</i>	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris sebagaimana yang dimuat dalam Board Manual yang mencakup pengaturan antara lain waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan berdasarkan rekomendasi yang diberikan Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun Kebijakan tersebut belum memuat maksud dan tujuan penilaian serta yang melakukan penilaian adalah Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate its performance as outlined in the Board Manual, which includes arrangements such as the periodic timing of the assessment and the benchmarks or evaluation criteria used based on recommendations from the Nomination and Remuneration Committee. However, the policy does not yet specify the purpose and objectives of the assessment, nor that the assessment is conducted by the Board of Commissioners itself.
4.2. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan. The self-assessment policy for evaluating the Board of Commissioners' performance is disclosed in the Company's Annual Report.	<i>Explain</i>	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris secara lengkap belum diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The complete self-assessment policy of the Board of Commissioners has not been disclosed in the Annual Report.
4.3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of Board members if involved in financial crimes.	<i>Explain</i>	Dewan Komisaris belum memiliki kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Kebijakan ini dalam rangka meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. The Board of Commissioners does not yet have a policy regarding the resignation of Board members involved in financial crimes. This policy aims to enhance stakeholder confidence in the Company and maintain the Company's integrity.
4.4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Committee responsible for Nomination and Remuneration functions formulates a succession policy in the nomination process for Board of Directors members.	<i>Comply</i>	Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki kebijakan/ <i>charter</i> Komite Nominasi dan Remunerasi yang disahkan pada 2 Desember 2024 dengan mencakup pengaturan terkait kebijakan suksesi Direksi sebagaimana yang diatur pada bagian tugas dan tanggung jawab The Nomination and Remuneration Committee has a policy/ <i>charter</i> for the Nomination and Remuneration Committee, ratified on December 2, 2024, which includes provisions related to the succession policy of the Board of Directors as regulated in the section on duties and responsibilities.

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
Aspek C. Fungsi dan Peran Direksi Aspect C. Function and Roles of the Board of Directors		
Prinsip 5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5. Strengthening Membership and Composition of the Board of Directors.		
5.1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. The determination of the number of Board of Directors members considers the condition of the Public Company as well as effectiveness in decision-making.	Comply	Direksi Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. The Company's Board of Directors is appointed and dismissed by the GMS. The determination of the number of Board of Directors members has considered the Company's condition, referring to the Articles of Association and applicable laws and regulations.
5.2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of the composition of the Board of Directors members considers the diversity of expertise, knowledge, and experience needed	Comply	Komposisi Direksi Perusahaan Tahun 2024 telah memperhatikan latar belakang yang beragam dalam hal keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan Perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi dalam website Perusahaan dan Laporan Tahunan Perusahaan 2023. The composition of the Company's Board of Directors in 2024 had considered diverse backgrounds in terms of expertise, knowledge, and experience aimed at supporting the Company's development. This can be seen from the profiles of each Board member on the Company's website and the 2023 Annual Report.
5.3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors responsible for accounting and finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting.	Comply	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan telah memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Tahun 2024, Direktur Keuangan Perusahaan dijabat oleh Sdri. Endang Astharanti yang merupakan lulusan Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (1999). Members of the Board of Directors responsible for accounting and finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting. In 2024, the Company's Director of Finance was Ms. Endang Astharanti, a graduate with a Bachelor's degree in Accounting from Universitas Gadjah Mada (1999).
Prinsip 6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6. Enhancing the Quality of the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.		
6.1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors	Explain	Direksi belum memiliki kebijakan Penilaian Sendiri atau <i>Self Assessment</i> Direksi (pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal) The Board of Directors does not yet have a Self-Assessment Policy (a guideline used as a form of accountability for the collegial performance evaluation of the Board of Directors).
6.2. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan. The self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors is disclosed in the Company's annual report.	Explain	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai Direksi secara lengkap belum diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The self-assessment policy for evaluating the Board of Directors has not been fully disclosed in the Annual Report.
6.3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of Board members if involved in financial crimes.	Explain	Direksi belum memiliki kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors does not yet have a policy regarding the resignation of Board members involved in financial crimes.
Aspek D. Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect D. Stakeholders Engagement		
Prinsip 7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7. Enhancing Corporate Governance Aspect through Stakeholders Engagement		
7.1 Perusahaan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . The Company has a policy to prevent insider trading.	Explain	Sampai dengan akhir tahun 2024, PLN IP bukan merupakan Perusahaan terbuka dan merupakan subholding dari grup PT PLN (Persero) dan hampir seluruh sahamnya dimiliki oleh PT PLN (Persero) sebagai salah satu holding BUMN. Sehingga tidak terdapat kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading yang memuat aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh Direktur, Komisaris dan orang dalam. Until the end of 2024, PLN IP was not a publicly listed company and is a sub-holding of the PT PLN (Persero) group, with almost all of its shares owned by PT PLN (Persero) as one of the State-Owned Enterprise (SOE) holdings. Therefore, there is no policy to prevent insider trading that contains clear rules regarding any trading in corporate shares by Directors, Commissioners, and insiders.

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
7.2 Perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> . The Company has an anti-corruption and anti-fraud policy.	Comply	Perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> sebagaimana yang dijelaskan dalam Laporan Tahunan Perusahaan 2023. Kebijakan tersebut antara lain: - Peraturan Direksi No. 0089.P/DIR/2023 tanggal 27 September 2023 tentang anti fraud - Surat Keputusan Direksi Nomor 112.K/010/IP/2021 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) - Peraturan Direksi No. 0089.P/DIR/2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT PLN Indonesia Power tanggal 27 September 2023 - Edaran Direksi NO.08.E/012/IP/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Larangan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi - Surat keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 0098.P/DIR/2023 dan 007.SK/DK-PLNIP/2023 tentang Tata Kelola Anti Penyuapan di Lingkungan PT PLN Indonesia Power tanggal 13 Desember 2023 - Surat keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 250.K/010/IP/2019 dan 020.SK/DEKOM-IP/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) di Lingkungan PT Indonesia Power - Keputusan Direksi Nomor 053.K/020/IP/2023 tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran (<i>Whistleblowing</i>) dan Tim Investigasi pengaduan pelanggaran tanggal 31 Maret 2023 The Company has an anti-corruption and anti-fraud policy as outlined in the Company's 2023 Annual Report. These policies include: - Board of Directors Regulation No. 0089.P/DIR/2023 dated September 27, 2023, on anti-fraud - Board of Directors' Decision No. 112.K/010/IP/2021 on Guidelines for State Official Wealth Reporting (LHKPN) - Board of Directors Regulation No. 0089.P/DIR/2023 on Guidelines for Gratification Control at PT PLN Indonesia Power dated September 27, 2023 - Board of Directors' Circular No. 08.E/012/IP/2021 dated April 30, 2021, on the Prohibition of Giving and Receiving Gratification - Joint Decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 0098.P/DIR/2023 and 007.SK/DK-PLNIP/2023 on Anti-Bribery Governance at PT PLN Indonesia Power dated December 13, 2023 - Joint Decision Letter of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 250.K/010/IP/2019 and 020.SK/DEKOM-IP/2019 dated December 13, 2019, on the Policy for Whistleblowing System Management at PT Indonesia Power - Board of Directors' Decision No. 053.K/020/IP/2023 on the Whistleblowing Management Team and the Whistleblowing Investigation Team dated March 31, 2023
7.3 Perusahaan memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. The Company has a policy on the selection and capacity building of suppliers or vendors.	Explain	Perusahaan telah memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana yang diatur dalam: - Keputusan Direksi No.218.K/010/IP/2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Indonesia Power - Keputusan Direksi No.169.K/010/IP/2017 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direksi No.218.K/010/IP/2016 - Keputusan Direksi No.131.K/010/IP/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi No. 218.K/010/IP/2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa The Company has established a Procurement Policy as stipulated in: - Board of Directors' Decision No. 218.K/010/IP/2016 on Guidelines for the Procurement of Goods/Services at PT Indonesia Power - Board of Directors' Decision No. 169.K/010/IP/2017 on the First Amendment to the Board of Directors' Decision No. 218.K/010/IP/2016 - Board of Directors' Decision No. 131.K/010/IP/2021 on the Second Amendment to the Board of Directors' Decision No. 218.K/010/IP/2016 on Guidelines for the Procurement of Goods/Services Cakupan kebijakan tersebut meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. Namun Kebijakan dan prosedur Pengadaan Barang dan Jasa belum memuat cakupan upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor termasuk penjabaran programnya The scope of the policy includes criteria for selecting suppliers or vendors, a transparent procurement mechanism, and the fulfillment of rights related to suppliers or vendors. However, the Procurement Policy and Procedures do not yet include efforts to improve the capabilities of suppliers or vendors, nor do they elaborate any programs related to this.
7.4 Perusahaan memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The Company has a policy on fulfilling the rights of creditors.	Explain	Perusahaan belum memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur The Company does not yet have a policy on the fulfillment of creditors' rights.
7.5 Perusahaan memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> . The Company has a whistleblowing system policy.	Compy	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) sebagaimana yang telah diungkapkan dalam <i>website</i> Perusahaan https://plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Form-Aduan-WBS.aspx The Company has established a policy related to the whistleblowing system as disclosed on the Company's website: https://plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Form-Aduan-WBS.aspx

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation	
7.6	Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The Company has a policy on granting long-term incentives to the Board of Directors and employees.	<i>Explain</i>	Dalam praktiknya, Perusahaan telah pemberian insentif jangka pendek kepada Direksi berdasarkan pencapaian dalam tahun buku sebelumnya atas capaian kinerja Direksi. Namun Perusahaan belum memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang untuk Direksi dan karyawan	In practice, the Company has provided short-term incentives to the Board of Directors based on achievements in the previous fiscal year. However, the Company does not yet have a policy on granting long-term incentives to the Board of Directors and employees.
Aspek E. Keterbukaan Informasi Aspect E. Information Disclosure				
Prinsip 8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8. Enhancing the Implementation of Information Disclosure.				
8.1	Perusahaan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. The Company utilizes information technology more broadly, beyond just the website, as a medium for information disclosure.	<i>Comply</i>	Perusahaan telah memanfaatkan teknologi informasi secara lebih luas. Selain website, Perusahaan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi media lainnya seperti majalah dan platform media sosial, yaitu: • Instagram : @plnindonesiapower • Twitter : @pln_ip • Facebook: PLN Indonesia Power • Website: www.plnindonesiapower.co.id • Email: kontak-ip@indonesiapower.co.id • Youtube: PLN Indonesia Power	The Company has utilized information technology more broadly. In addition to its website, the Company makes use of information technology and other media platforms such as magazines and social media, including: • Instagram: @plnindonesiapower • Twitter: @pln_ip • Facebook: PLN Indonesia Power • Website: www.plnindonesiapower.co.id • Email: kontak-ip@indonesiapower.co.id • YouTube: PLN Indonesia Power
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Company's Annual Report discloses the ultimate beneficial owners holding at least 5% (five percent) of shares in the Public Company, in addition to disclosures of the ultimate beneficial owners through the majority and controlling shareholder.	<i>Comply</i>	Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2023 telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan yang memiliki saham paling sedikit 5% (lima persen), serta pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali. Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2023, Sampai dengan 31 Desember 2024, Pemegang Saham mayoritas PT PLN IP adalah PT PLN (Persero). Dengan demikian maka persentase kepemilikan saham 5% atau lebih adalah oleh PT PLN (Persero).	The Company's Annual Report for the 2023 Fiscal Year had disclosed the ultimate beneficial owners of shares in the Company holding at least 5% (five percent), as well as information on the majority and controlling shareholder. As stated in the 2023 Annual Report, as of December 31, 2024, the majority shareholder of PT PLN IP is PT PLN (Persero). Accordingly, the shareholder owning 5% or more of shares is PT PLN (Persero).

Evaluasi Governansi Berdasarkan Berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia

Governance Evaluation Based on the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance

Sebagai wujud kepatuhan Perusahaan terhadap Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUG-KI) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) tahun 2021, PLN Indonesia Power kembali melakukan penilaian berdasarkan parameter PUG-KI yang dilakukan oleh pihak independen. Pemetaan atas implementasi PUG-KI tersebut terdiri dari penerapan 8 Prinsip, 28 Sub Prinsip dan 81 Rekomendasi.

As a form of the Company's compliance with the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUG-KI) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in 2021, PLN Indonesia Power has once again conducted an assessment based on the PUG-KI parameters, carried out by an independent party. The mapping of the PUG-KI implementation consists of the application of 8 Principles, 28 Sub-Principles, and 81 Recommendations.

Dari prinsip dan rekomendasi yang dipetakan atas penerapan Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUG-KI) pada PLN Indonesia Power Tahun Buku 2024, terdapat 45 Rekomendasi yang berstatus *Apply* dan 36 Rekomendasi yang berstatus *Explain*. Dari 36 Rekomendasi berstatus *Explain*, terdapat 53 saran yang diberikan sebagai area of improvement, sedangkan 16 Rekomendasi tidak diberikan saran karena dianggap tidak relevan (*Not Applicable* (N/A)) sebagaimana dapat dilihat pada tabel status pemetaan PUG-KI PLN Indonesia Power Tahun Buku 2024 berikut:

Based on the mapping of principles and recommendations from the implementation of the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUG-KI) at PLN Indonesia Power for the 2024 Fiscal Year, there are 45 Recommendations with "Apply" status and 36 Recommendations with "Explain" status. Of the 36 Recommendations with "Explain" status, 53 advices were provided as areas of improvement, while 16 Recommendations were not given advice as they were deemed Not Applicable (N/A), as shown in the PUG-KI mapping status table for PLN Indonesia Power for the 2024 Fiscal Year below:

No	Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Status		Kategori Kategori	
				<i>Apply</i> ^(a)	<i>Explain</i> ^(b)	Saran ^(c) Advice ^(c)	N/A ^(d)
I.	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners	7	31	19	12	11	4
II.	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	2	11	2	9	7	5
III.	Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Work Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners	3	5	5	0	0	0
IV.	Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab Ethical and Responsible Conduct	3	4	3	1	3	0
V.	Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control, and Compliance	4	6	5	1	1	0
VI.	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	3	9	5	4	3	3
VII.	Hak-hak Pemegang Saham Shareholders' Rights	3	11	3	8	11	3
VIII.	Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan Rewards for Stakeholders	3	4	3	1	1	0
Total		28	81	45	36	53	16

Keterangan:

- (a) Rekomendasi yang telah diterapkan
- (b) Penjelasan atas rekomendasi yang belum diterapkan
- (c) Saran atas rekomendasi berstatus *Explain*
- (d) *Not Applicable* atas rekomendasi berstatus *Explain*

Remarks:

- (a) Recommendations that have been implemented
- (b) Explanations for recommendations not yet implemented
- (c) Suggestions for recommendations with "Explain" status
- (d) Not Applicable for recommendations with "Explain" status

Adapun hasil pemetaan atas penerapan Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUG-KI) periode tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The results of the mapping of the implementation of the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUG-KI) for 2024 are below:

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation	
Prinsip 1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Principle 1. Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners				
1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of the Board of Directors				
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (<i>corporate resilience</i>). To achieve sustainable value creation, the Board of Directors exercises its leadership role and strives to achieve the following governance outcomes: a. Competitive and focused on long-term performance; b. Ethical and responsible in conducting business; c. Contributing positively to society and the environment; and d. Capable of resilience and growth (corporate resilience).	Apply	Perusahaan telah memiliki sasaran strategi yang bertujuan untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa Direksi telah menjalankan perannya melalui penetapan kinerja jangka panjang agar dapat mempunyai daya saing. Dalam pengelolaannya, Direksi senantiasa memastikan Perusahaan dikelola secara beretika dan bertanggung jawab sesuai dengan pedoman etika bisnis yang telah ditetapkan, berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) setiap tahunnya serta memastikan Perusahaan mampu bertahan dan bertumbuh melalui pengembangan bisnis Perusahaan sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 0179.K/DIR/2023 Nomor: 004.SK/DK-PLNIP/2023 tentang Pedoman Etika Perusahaan (<i>Code of Conduct</i>); Peraturan Direksi PT No. 0043.P/DIR/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); Laporan Keuangan Perusahaan Bulan Desember 2024; dan Laporan Manajemen Tahunan (<i>Unaudited</i>) 2024	The Company has established strategic targets aimed at achieving sustainable value creation. It is explained that the Board of Directors has carried out its role by setting long-term performance objectives to ensure competitiveness. In its management, the Board of Directors consistently ensures that the Company is managed ethically and responsibly in accordance with the established business ethics guidelines, contributes positively to society and the environment through the annual implementation of the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL), and ensures the Company's ability to survive and grow through business development as stipulated in the Joint Decision of the Board of Directors and Board of Commissioners Number: 0179.K/DIR/2023 and Number: 004.SK/DK-PLNIP/2023 on the Company's Code of Conduct; Directors' Regulation No. 0043.P/DIR/2024 on the Guidelines for the Implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL); the Company's Financial Statements as of December 2024; and the Annual Management Report (Unaudited) 2024.
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporation's mission, vision, purposes, objectives, strategies, and annual and medium-term plans are consistent with long-term objectives, by effectively utilizing innovation and technology.	Apply	Direksi senantiasa memastikan bahwa seluruh perencanaan strategis mulai dari visi, misi, tujuan serta strategi Perusahaan telah disusun secara selaras dan konsisten dengan RJPP dan RKAP Perusahaan. Perusahaan juga telah mengintegrasikan pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam penyusunan strategi dan perencanaan korporasi. Hal ini tercermin melalui berbagai inisiatif transformasi digital yang secara sistematis dituangkan dalam dokumen RJPP, RKAP serta IT <i>Masterplan</i> sebagaimana yang tertuang pada Visi dan Misi Perusahaan; Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024; Buku RJPP Tahun 2024-2028; Tinjauan Visi dan Misi Perusahaan; dan IT <i>Master Plan</i> Perusahaan	The Board of Directors continuously ensures that all strategic planning, from the Company's vision, mission, objectives, to strategies, has been prepared in alignment and consistency with the Company's Long-Term Strategic Plan (RJPP) and Annual Work and Budget Plan (RKAP). The Company has also integrated the use of innovation and technology in formulating corporate strategies and plans. This is reflected in various digital transformation initiatives systematically documented in the RJPP, RKAP, and IT Masterplan, as outlined in the Company's Vision and Mission; 2024 Work Plan and Budget; RJPP Book for 2024-2028; Review of the Company's Vision and Mission; and the Company's IT Master Plan.

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.1.3 Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that align with the corporation's vision, mission, goals, objectives, and strategies, as well as comply with applicable laws and regulations, and standards.	<i>Apply</i>	Direksi telah memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif melalui proses bisnis manajemen risiko yang di dalamnya terdapat matriks pengukuran manajemen risiko (<i>risk maturity</i>), pemantauan risiko, serta meningkatkan budaya risiko. Direksi juga menetapkan rancangan sistem pengendalian intern berdasarkan kerangka <i>three lines model</i> yang efektif dan telah melakukan evaluasi/ penilaian atas efektivitas pengendalian intern di Perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Laporan Eksternal Auditor atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang pada - Buku RJPP Tahun 2024-2028 - <i>Roadmap</i> Manajemen Risiko - Peraturan Direksi No. 0027.P/DIR/2024 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi - Peraturan Direksi No. 0029.P/DIR/2024 tentang Sistem Pengendalian Internal - Laporan Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024 Bagian Manajemen Risiko Perusahaan - Laporan Eksternal Auditor atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan - Laporan Hasil Audit Terkait Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Tahun 2023 The Board of Directors has ensured the implementation of effective risk management through a risk management business process that includes a risk maturity measurement matrix, risk monitoring, and the enhancement of risk culture. The Board of Directors also establishes the design of the internal control system based on the effective three lines model framework and has conducted evaluations/assessments of the effectiveness of internal controls within the Company, as outlined in the External Auditor's Report on the Effectiveness of the Internal Control System and Compliance with laws and regulations, as reflected in: - The RJPP Book for 2024-2028 - Risk Management Roadmap - Board of Directors Regulation No. 0027.P/DIR/2024 on the Strategic Policy for Integrated Risk Management - Board of Directors Regulation No. 0029.P/DIR/2024 on the Internal Control System - Reports for Quarter I, II, III, and IV of 2024 from the Company's Risk Management Division - External Auditor's Report on the Effectiveness of the Internal Control System and Compliance with laws and regulations - Audit Report on the Company's Internal Control System for 2023
1.1.4 Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of accounting, financial reporting systems, and timely and accurate disclosure of all material information about the corporation.	<i>Explain</i>	Direksi telah memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan Perusahaan. Direksi Perusahaan wajib menandatangani Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Laporan Keuangan setiap tahunnya. Perusahaan juga selalu melaporkan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham secara tepat waktu dan mengungkapkan kinerja Laporan Keuangan setiap tahun dalam Laporan Tahunan sebagaimana yang tertuang pada Laporan Keuangan Perusahaan Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024; Laporan Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Audited Perusahaan Tahun 2023; dan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023. Namun belum terdapat publikasi atas Laporan Keuangan secara triwulanan yang diinformasikan secara terbuka kepada investor, analis dan pemangku kepentingan lainnya. The Board of Directors has ensured the integrity of the Company's accounting and financial reporting system. The Company's Board of Directors is required to sign the Board of Directors' Statement of Responsibility for Financial Statements annually. The Company also consistently reports its Financial Statements to Shareholders in a timely manner and discloses financial performance annually in the Annual Report, as reflected in the Company's Quarterly Financial Reports for Q1, Q2, Q3, and Q4 of 2024; the External Audit Report on the Audited Financial Statements for 2023; and the Company's Annual Report for 2023. However, there is no public disclosure of the quarterly financial statements made openly available to investors, analysts, and other stakeholders.

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.1.5 Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting is properly prepared.	<i>Apply</i>	Laporan Keberlanjutan Perusahaan (<i>Sustainability Report</i>) tahun 2023 telah disusun dengan memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip pengungkapan yang relevan sesuai dengan sektor utilitas listrik. Laporan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, hingga tata kelola (ESG) sebagaimana yang dijelaskan pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Tahun 2023 dan telah terpublikasi dalam <i>website</i> Perusahaan https://www.plnindonesiapower.co.id/reports/sustainability-report/Sustainability-Report-Indonesia-Power-2021/index.aspx The Company's 2023 Sustainability Report has been prepared by considering and following relevant disclosure principles in accordance with the electricity utilities sector. This report covers various important aspects, ranging from economic, environmental, social, to governance (ESG) performance, as described in the 2023 Company Sustainability Report, which has been published on the Company's website at https://www.plnindonesiapower.co.id/reports/sustainability-report/Sustainability-Report-Indonesia-Power-2021/index.aspx
1.1.6 Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors establishes a framework for corporate information technology (IT) governance that aligns with the corporation's business needs and priorities, encourages business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports the corporation's objectives and strategies.	<i>Apply</i>	Perusahaan telah memiliki kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi yang mendukung kegiatan bisnis Perusahaan. Saat ini Perusahaan telah menyusun IT <i>Master Plan</i>, <i>Information Technology Service Management</i> (ITSM) dan IT <i>Disaster Recovery Management</i> sebagaimana yang tertuang pada IT <i>Master Plan</i>; <i>Information Technology Service Management</i> (ITSM); IT <i>Disaster Recovery Management</i>; dan Laporan Manajemen Triwulan I, II, III terkait Laporan Kinerja IT 2024 The Company has established a framework for information technology governance that supports the Company's business activities. Currently, the Company has prepared an IT Master Plan, Information Technology Service Management (ITSM), and IT Disaster Recovery Management as outlined in the IT Master Plan; Information Technology Service Management (ITSM); IT Disaster Recovery Management; and the Management Reports for Quarters I, II, and III related to the 2024 IT Performance Report.
1.1.7 Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations operating business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting mechanisms so that the Sharia Supervisory Board can effectively carry out its role.	<i>Explain</i>	Saat ini, PLN Indonesia Power tidak menjalankan kegiatan usaha yang berbasis prinsip Syariah (<i>Not Applicable</i>). Oleh karena itu, Perusahaan tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah atau perangkat pendukung lainnya yang terkait dengan penerapan prinsip Syariah dalam operasional bisnis At present, PLN Indonesia Power does not conduct business activities based on Sharia principles (<i>Not Applicable</i>). Therefore, the Company does not have a Sharia Supervisory Board or other supporting devices related to the implementation of Sharia principles in business operations.
1.1.8 Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors Charter is reviewed periodically. The Charter includes, among other things, the division of Directors' roles individually, which can be regulated in the Board of Directors Charter or by a Decision Letter of the Board of Directors.		Piagam Direksi (<i>Board Manual</i>) yang berlaku saat ini disahkan pada tahun 2020. Pembagian tugas dan peran masing-masing Direksi diatur secara rinci dalam Keputusan Direksi Nomor 139.K/010/IP/2022 tentang Organisasi PT PLN Indonesia Power tanggal 9 Desember 2022, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Namun, hingga saat ini, belum ada pemutakhiran yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN. The current Board of Directors Charter (<i>Board Charter</i>) was enacted in 2020. The segregation of duties and roles of each Director is detailed in the Board of Directors' Decision No. 139.K/010/IP/2022 on the Organization of PT PLN Indonesia Power dated December 9, 2022, which serves as the reference for the implementation of the functions and responsibilities of each member of the Board of Directors. However, up to now, there has been no update referring to the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/2023 on the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.1.9 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of a member of the Board of Directors if involved in financial crime and proven guilty of wrongdoing.	<i>Explain</i>	Perusahaan belum menetapkan kebijakan khusus terkait pengunduran diri Direksi apabila terlibat dan terbukti melakukan kejahatan keuangan. Namun dalam Anggaran Dasar dan Board Manual telah terdapat pengaturan terkait pemberhentian anggota Direksi, salah satunya apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara serta dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau mengundurkan diri. The Company has not yet established a specific policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in and proven to have committed financial crimes. However, the Articles of Association and the Board Manual already contain provisions related to the dismissal of Board of Directors members, including cases where a member violates laws and regulations and/or the Company's Articles of Association, is involved in actions detrimental to the Company and/or the State, is declared guilty based on a court ruling with permanent legal force; and/or resigns.
1.2 Penilaian Kinerja Direksi dan Anggotanya Performance Assessment of the Board of Directors and its Members		
1.2.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	<i>Explain</i>	Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direksi setiap bulan berdasarkan Kontrak Manajemen maupun <i>Key Performance Indicator</i> masing-masing Direksi. Hasil dari evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai bahan pembahasan dalam RUPS Tahunan. Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris terkait penilaian kinerja Direksi sebagaimana tercantum dalam <i>Board Manual</i>. Namun Kebijakan tersebut belum memuat penilaian kinerja Direksi yang secara khusus memuat tolok ukur (indikator) yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan serta sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. The Board of Commissioners monitors and evaluates the performance of the Board of Directors every month based on the Management Contract and the Key Performance Indicators (KPIs) of each member of the Board of Directors. The results of this evaluation are then submitted to the Shareholders as material for discussion at the Annual GMS. The Board of Commissioners has had a policy regarding the performance assessment of the Board of Directors as stated in the Board Manual. However, this policy does not yet include performance assessments of the Board of Directors that specifically contain benchmarks (indicators) that are specific, measurable, achievable, relevant, and aligned with the performance targets set by the Board of Commissioners.
1.2.2 Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with consideration from the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining the performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.		Dewan Komisaris telah menentukan kriteria evaluasi kinerja yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Direktorat. Setiap tahun, Dewan Komisaris bersama dengan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penilaian atas capaian kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya terhadap pencapaian target-target yang tercantum dalam KPI sebagaimana yang tertuang pada Materi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi terkait KPI Direksi 2024 dan Rencana KPI Direksi Tahun 2025 dan Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi terkait Realisasi KPI Perusahaan Tahun 2024. Namun belum terdapat rekomendasi tertulis yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi terkait indikator kinerja utama (KPI), baik secara kolegal maupun individu, yang akan dijadikan dasar pertimbangan Dewan Komisaris dalam menetapkan target kinerja Direksi. The Board of Commissioners has established evaluation criteria outlined in the Directorate Management Contract. Each year, the Board of Commissioners together with the Nomination and Remuneration Committee assess the performance achievements of the President Director and other members of the Board of Directors against the targets listed in the KPIs, as outlined in the Nomination and Remuneration Committee Meeting materials related to the 2024 Board of Directors' KPIs, the 2025 Board of Directors' KPI Plan, and the Joint Meeting Minutes of the Board of Commissioners and Board of Directors concerning the Realization of the Company's 2024 KPIs. However, there is not yet a written recommendation from the Nomination and Remuneration Committee regarding the key performance indicators (KPIs), either collectively or individually, that will serve as the basis for the Board of Commissioners' consideration in setting the performance targets for the Board of Directors.

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation	
1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners.				
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision, and corporate strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides input on, and approves the corporate long-term business plans and financial plans, as well as the short-term financial plans. The Board of Commissioners advises and monitors the Board of Directors in managing the implementation. The Board of Directors and the Board of Commissioners are involved in decisions that are critical to the corporation, as regulated in the corporation's articles of association.	Apply	Dewan Komisaris telah memberikan telaah atas rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disampaikan Direksi. Dewan Komisaris telah memberikan telaah dan arahan kepada Direksi sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA)Dewan Komisaris Tahun 2024 terkait pengawasan RJPP dan RKAP. Selain itu, sepanjang tahun 2024, Direksi dan Dewan Komisaris telah terlibat dalam pengambilan keputusan penting bagi Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar sebagaimana yang tertuang pada Surat Dewan Komisaris perihal Rekomendasi dan Persetujuan Dewan Komisaris atas Permohonan Telaahan dan Persetujuan Penandatanganan RJPP Tahun 2024-2028; dan Surat Dewan Komisaris perihal Rekomendasi dan Persetujuan Dewan Komisaris atas Permohonan Telaahan dan Persetujuan Penandatanganan Usulan RKAP Tahun 2024	The Board of Commissioners reviewed the draft of the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) submitted by the Board of Directors. The Board of Commissioners provided reviews and guidance to the Board of Directors in accordance with the 2024 Work Plan and Budget (RKA) of the Board of Commissioners related to the supervision of the RJPP and RKAP. Furthermore, throughout 2024, the Board of Directors and the Board of Commissioners had been involved in making important decisions for the Company as regulated in the Articles of Association, as outlined in the Board of Commissioners' Letter regarding the Recommendation and Approval of the Board of Commissioners on the Request for Review and Approval of the Signing of the RJPP for 2024-2028; and the Board of Commissioners' Letter regarding the Recommendation and Approval of the Board of Commissioners on the Request for Review and Approval of the Proposed RKAP for 2024.
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. Types of decisions requiring approval from the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	Apply	Laporan Tahunan Perusahaan 2023 telah mengungkapkan jenis keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan	The Company's 2023 Annual Report disclosed the types of decisions by the Board of Directors that required approval from the Board of Commissioners as stated in the Company's Articles of Association.
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur non diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. By considering recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and for adopting resolution, the GMS regarding the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. In making these proposals, the Board of Commissioners considers diversity, non-discriminatory elements, and provides equal opportunity without discrimination based on ethnicity, religion, race, group, or gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election process of members of the Board of Directors and Board of Commissioners is formal and transparent.	Apply	Komite Nominasi dan Remunerasi telah berperan aktif dalam membantu Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Proses ini dilakukan melalui telaah dan tanggapan terhadap usulan calon yang disampaikan oleh <i>Top Talent Management</i>, yang kemudian diteruskan kepada PLN (Persero) sebagai Pemegang Saham untuk dipertimbangkan. Pada praktiknya, di sepanjang tahun 2024 tidak ada pergantian Dewan Komisaris dan Direksi sehingga tidak ada usulan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. (<i>Not Applicable</i>)	The Nomination and Remuneration Committee has played an active role in assisting the Board of Commissioners in setting criteria for the selection of candidates for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. This process is carried out through review and feedback on candidate proposals submitted by Top Talent Management, which are then forwarded to PLN (Persero) as the Shareholder for consideration. In practice, throughout 2024 there had been no changes in the Board of Commissioners and the Board of Directors, so there were no proposals from the Board of Commissioners to the Shareholders. (<i>Not Applicable</i>)

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.3.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the committee responsible for nomination function formulates a succession policy in the nomination process of Board of Directors members. Every year, the Board of Commissioners reviews reports on the implementation of development and succession plans submitted by the President Director.	<i>Apply</i>	Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan fungsi nominasi dan menyusun kebijakan suksesi bagi Direksi sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap tahun Dewan Komisaris telah meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan oleh Direktur Utama. Pada tahun 2024 tidak terdapat suksesi Direksi yang disampaikan oleh Direktur Utama mengingat tidak ada pengangkatan anggota Direksi yang baru. Selain itu, kewenangan pengangkatan calon anggota Direksi sepenuhnya menjadi kewenangan Pemegang Saham. <i>(Not Applicable)</i> The Board of Commissioners or the Nomination and Remuneration Committee has carried out the nomination function and formulated succession policies for the Board of Directors as stated in the Nomination and Remuneration Committee Charter. Every year, the Board of Commissioners reviews reports on the implementation of development and succession plans submitted by the President Director. In 2024, there was no succession of the Board of Directors reported by the President Director, given that there were no new appointments of Board of Directors members. Furthermore, the authority to appoint candidates for Board of Directors members fully rests with the Shareholders. <i>(Not Applicable)</i>
1.3.5 Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereview sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners a) submits to the GMS, which may be preceded by proposals from the committee responsible for remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners aligned with the sustainable development of the corporation and the long-term interests of the corporation and shareholders; b) periodically reviews the remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners.	<i>Apply</i>	Ketentuan mengenai besarnya gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi di Perusahaan yaitu menetapkan dan menelaah kebijakan mengenai pengusulan remunerasi yang dilakukan oleh Direksi serta menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas serta tantiem/ insentif kerja) kepada RUPS. Provisions regarding the amount of salary or remuneration and/or allowances for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company are determined by the General Meeting of Shareholders (GMS). The Board of Commissioners, through the Remuneration and Nomination Committee in the Company, establishes and reviews policies concerning remuneration proposals made by the Board of Directors and submits remuneration proposals (salary, allowances, facilities, and tantiem(bonus)/ incentives) to the GMS.
1.3.6 Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners supervises the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	<i>Apply</i>	Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan termasuk kebijakan governansi di Perusahaan, secara berkala Dewan Komisaris mengawasi struktur, proses, dan hasil governansi Perusahaan serta mengusulkan perbaikannya. Hal ini diimplementasikan melalui telaah atas kebijakan governansi serta pelaksanaan penilaian atas implementasi praktik governansi di Perusahaan. In accordance with the duties and responsibilities of the Board of Commissioners to conduct oversight, including governance policies in the Company, the Board of Commissioners periodically supervises the structure, processes, and outcomes of the Company's governance and proposes improvements. This is implemented through reviews of governance policies and assessments of the implementation of governance practices in the Company.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems aligned with the corporation's objectives, targets, and strategies as well as compliance with laws and regulations, code of conduct, and applicable standards.	Apply	Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi dalam penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang efektif dan selaras dengan rencana bisnis Perusahaan. Melalui rapat internal, Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan dan implementasi manajemen risiko dan memberikan arahan dalam rapat gabungan agar Direksi senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners is tasked with overseeing and providing input to the Board of Directors in implementing effective risk management and internal control systems aligned with the Company's business plans. Through internal meetings, the Board of Commissioners reviews risk management policies and implementation and provides direction in joint meetings to ensure the Board of Directors consistently complies with laws and regulations, code of conduct, and applicable standards. Dewan Komisaris juga telah memiliki Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi sistem manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal serta menilai toleransi risiko Perusahaan. The Board of Commissioners has also established an Investment and Risk Management Committee to assist the Board of Commissioners in evaluating the risk management system, including internal control systems, and assessing the Company's risk tolerance.
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and directs to ensure integrity of accounting and corporate financial reporting systems, as well as the independence of internal and external audit functions.	Apply	Dewan Komisaris memastikan bahwa integritas atas pelaporan akuntansi dan Laporan Keuangan Perusahaan dapat terjaga. Laporan Keuangan senantiasa di reviu dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham maupun dipublikasikan kepada publik dalam Laporan Tahunan. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan atas kegiatan audit internal dan eksternal namun tidak mengintervensi proses dan hasil audit The Board of Commissioners ensures that the integrity of the Company's accounting reporting and Financial Statements is maintained. The Financial Statements are always reviewed and approved by the Board of Commissioners and the Audit Committee before being submitted to the Shareholders or published to the public in the Annual Report. The Board of Commissioners also supervises internal and external audit activities but does not intervene in the audit process or results.
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereview dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews, and approves the corporation's annual report and sustainability report, ensuring their integrity, and supervises the corporation's disclosure and communication processes.	Apply	Dewan Komisaris telah memantau, mereview dan menyetujui Laporan Tahunan serta memastikan integritas laporan dan mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasiannya melalui penandatanganan Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT PLN Indonesia Power Tahun 2023. The Board of Commissioners has monitored, reviewed, and approved the Annual Report and ensured the integrity of the report while overseeing the disclosure and communication processes through the signing of the Board of Commissioners and Board of Directors' Statement of Responsibility for the 2023 Annual Report and Sustainability Report of PT PLN Indonesia Power.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners Charter is reviewed periodically.	Explain	Piagam Dewan Komisaris (<i>Board Manual</i>) yang berlaku saat ini disahkan pada tahun 2020. Namun, hingga saat ini, belum ada pemutakhiran yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN. The current Board of Commissioners Charter (<i>Board Manual</i>) was enacted in 2020. However, to date, there has been no update referring to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/2023 on the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has policies related to the resignation of Board of Commissioners members if involved in financial crimes and proven guilty.	Explain	Perusahaan belum menetapkan kebijakan khusus terkait pengunduran diri Dewan Komisaris apabila terlibat dan terbukti melakukan kejahatan keuangan. Namun dalam Anggaran Dasar dan Board Manual telah terdapat pengaturan terkait pemberhentian anggota Dewan Komisaris, salah satunya apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara serta dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau mengundurkan diri. The Company has not established a specific policy concerning the resignation of Board of Commissioners members if they are involved in and proven to have committed financial crimes. However, the Articles of Association and the Board Manual contain provisions regarding the dismissal of Board of Commissioners members, including if they violate laws and regulations and/or the Company's Articles of Association, are involved in actions detrimental to the Company and/or the State, are found guilty based on a final and binding court ruling, and/or resign.

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.3.12 Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are highly expected to contribute to honest, objective, active, and constructive discussions in the Board of Commissioners meetings.	Apply	Komisaris Independen telah berkontribusi dalam mengawasi dan memberikan arahan secara independen dan berintegritas dalam setiap rapat Dewan Komisaris. Komisaris Independen Perusahaan saat ini dijabat oleh Sdr. Iskandar Simorangkir, Sdr. Haryanto WS dan Sdr. Lukmanul Hakim dan seluruhnya telah memenuhi kriteria independensi dan membuat pernyataan independensi sebagaimana disampaikan dalam Laporan Tahunan The Independent Commissioners have contributed to supervising and providing guidance independently and with integrity in every meeting of the Board of Commissioners. The Company's current Independent Commissioners are Mr. Iskandar Simorangkir, Mr. Haryanto WS, and Mr. Lukmanul Hakim, all of whom have met the independence criteria and have made declarations of independence as stated in the Annual Report.
1.3.13 Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialogue that allows various views to be expressed, including coordinating the establishment of appropriate meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. Furthermore, there should be opportunities for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	Explain	Komisaris Utama memimpin seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya. Tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama antara lain memastikan dan mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, serta melaksanakan tugas sebagai ketua rapat. Dewan Komisaris juga melakukan dialog dan koordinasi dengan Direksi beserta jajarannya di Perusahaan dalam rapat gabungan bersama Direksi. The President Commissioner leads all other members of the Board of Commissioners. The duties and responsibilities of the President Commissioner include ensuring and coordinating the activities and task implementation of the Board of Commissioners, as well as serving as the chairperson of meetings. The Board of Commissioners also holds dialogue and coordination with the Board of Directors and its management in joint meetings with the Board of Directors. Namun belum terdapat pengaturan terkait penugasan Komisaris Utama untuk mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris. However, there is currently no provision regarding the assignment of the President Commissioner to represent the Board of Commissioners in dealings with parties outside the Board of Commissioners.
1.4 Pembentukan Komite Establishment of Committees		
1.4.1 Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The corporation has committees under the Board of Commissioners, consisting at minimum of: the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management Monitoring Committee.	Apply	Perusahaan telah memiliki 3 (tiga) Komite, yaitu Komite Audit, Komite Investasi dan Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi. The Company currently has 3 (three) Committees, namely the Audit Committee, the Investment and Risk Management Committee, and the Nomination and Remuneration Committee.
1.4.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent, and that the other committees formed by the Board of Commissioners have a majority of independent members. Furthermore, all committee members possess the competence, commitment, and adequate authority to carry out their roles effectively and independently.	Apply	Saat ini Ketua Komite Audit dijabat oleh Komisaris Independen dan seluruh anggota Komite Audit dan Komite lainnya berasal dari pihak independen atau pihak profesional yang tidak memiliki hubungan dengan Perusahaan. Seluruh anggota Komite Perusahaan telah memiliki keahlian dan kompetensi sesuai pembedaan masing-masing. Seluruh anggota Komite telah membuat pernyataan independensi Komite sebagaimana dipublikasikan dalam Laporan Tahunan. At present, the Head of the Audit Committee is held by an Independent Commissioner, and all members of the Audit Committee and other Committees are independent parties or professionals who have no relationship with the Company. All Committee members possess expertise and competence in their respective fields. All Committee members have made independence declarations, which are published in the Annual Report.

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation	
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure objective and independent oversight of the Audit Committee's duties, the President Commissioner must not serve as the Head of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances which must be explained in the annual report.	Apply	Saat ini Ketua Komite Audit dijabat oleh Sdr. Wiluyo Kusdiharto yang merupakan anggota Komisaris Independen	Currently, the Head of the Audit Committee is Mr. Wiluyo Kusdiharto, who is an Independent Commissioner.
1.5 Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Assessment – Board of Commissioners and its Members				
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual commissioner.	Explain	Kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris telah diatur dalam Board Manual Perusahaan. Namun kebijakan tersebut belum mencakup kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris yang secara khusus memuat tolok ukur (indikator) yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan serta sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Dalam praktiknya, Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara kolektif, komitenya, dan setiap anggota Dewan Komisaris, namun belum melibatkan konsultan eksternal independen untuk membantu evaluasi kinerja Dewan Komisaris.	The policy on the performance assessment of the Board of Commissioners is regulated in the Company's Board Manual. However, this policy does not yet include a performance assessment policy for the Board of Commissioners that specifically contains benchmarks (indicators) that are specific, measurable, achievable, relevant, and aligned with the performance targets set by the Board of Commissioners. In practice, the Board of Commissioners monitors and evaluates the performance of the Board of Commissioners collectively, its committees, and each member of the Board of Commissioners, but has not involved independent external consultants to assist in the evaluation of the Board of Commissioners' performance.
1.6 Benturan Kepentingan Conflict of Interest				
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner must notify the Board of Commissioners and the head of the committee responsible for the nomination function before accepting a new appointment as a director or commissioner of a publicly listed corporation, another director position, or any other position with a significant time commitment.	Explain	Seluruh anggota Direksi yang menjabat tidak memiliki rangkap jabatan. Ketentuan rangkap jabatan Direksi telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Namun ketentuan tersebut belum secara spesifik menyebutkan jumlah perusahaan yang diijinkan dirangkap oleh Direksi sebagai Komisaris.	All current members of the Board of Directors do not hold concurrent positions. The provisions regarding concurrent positions of the Board of Directors have been established in the Company's Articles of Association and the Guidelines for the Working Procedures of the Board of Commissioners and Board of Directors. However, these provisions do not specifically state the number of companies in which a member of Board of Directors is allowed to concurrently serve as a Commissioner.
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.	Apply	Perusahaan telah memiliki kebijakan Benturan Kepentingan yang di dalamnya mengatur apabila anggota Komisaris memiliki potensi dan/atau benturan kepentingan, maka wajib tidak melibatkan diri dari proses pengambilan keputusan. Perusahaan menindak tegas bagi yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan. Dewan Komisaris dan Direksi juga menandatangani surat pernyataan tidak memiliki Benturan Kepentingan setiap tahunnya.	The Company has a Conflict-of-Interest policy which regulates that if a Commissioner has a potential and/or actual conflict of interest, they must abstain from involvement in the decision-making process. The Company takes strict action against those proven to commit acts of conflict of interest. The Board of Commissioners and Board of Directors also sign annual declarations stating they have no conflicts of interest.

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest involving management, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions. Commissioners who have conflicts of interest do not participate in monitoring and decision-making regarding potential conflicts of interest involving the concerned Commissioner or their affiliates.		
1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Enhancing Competency of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners		
1.7.1 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that the members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, the characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations and standards, as well as other applicable obligations. The Board of Directors, through the corporate secretary, supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing the skills and knowledge they need to perform their roles on the Board.	<i>Apply</i>	Dewan Komisaris telah memastikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing. Perusahaan memiliki kebijakan memberikan induksi atau program pengenalan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru menjabat. Setiap tahunnya, Perusahaan juga memfasilitasi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengikuti program program pelatihan dan pengembangan Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk pelatihan terkait keberlanjutan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga mendapatkan informasi update terkait perkembangan bisnis Perusahaan yang disampaikan secara rutin. The Board of Commissioners has ensured that all members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their respective roles, duties, and responsibilities. The Company has a policy to provide induction or orientation programs to all newly appointed members of the Board of Commissioners and Board of Directors. Each year, the Company also facilitates every member of the Board of Directors and Board of Commissioners to participate in training and development programs, including sustainability-related training. All members of the Board of Commissioners and Board of Directors also regularly receive updated information regarding the Company's business developments.
Prinsip 2. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Principle 2. Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners		
2.1 Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris		
2.1.1 Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining candidates for directors, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not rely solely on recommendations from the Board of Commissioners, management, or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee may use independent sources to identify qualified candidates.	<i>Explain</i>	Dalam menentukan kandidat calon Direktur dan Dewan Komisaris telah melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi belum menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat In determining candidates for Directors and the Board of Commissioners, the Nomination and Remuneration Committee does not rely solely on recommendations from the Board of Commissioners, management, or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee has not yet used independent sources to identify qualified candidates.

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
2.1.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, skills, and expertise required to properly fulfill the role of the Board of Directors, while also considering the fulfillment of diversity within the Board of Directors.	<i>Explain</i>	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. Kewenangan untuk memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi berdasarkan usulan Kementerian BUMN dan dari PT PLN (Persero) di luar kewenangan Perusahaan. Tidak terdapat pengangkatan di tahun 2024. Terdapat Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, tercermin antara lain dari latar belakang Pendidikan Sarjana Akuntansi dan <i>Master Business Administration</i> (MBA) serta sertifikasi <i>Sertifikasi Qualified Risk Governance</i> (QRGP). Namun belum secara khusus memiliki sertifikasi profesi yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi yang diakui pemerintah dan terdaftar sebagai anggota di asosiasi profesi tersebut. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, skills, and expertise needed to properly fulfill the role of the Board of Directors and pays attention to fulfilling diversity within the Board of Directors. The authority to ensure that the criteria for selecting Board members are based on proposals from the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) and PT PLN (Persero) lies outside the authority of the Company. There were no appointments in 2024. There are members of the Board of Directors overseeing accounting or finance who possess expertise and/or knowledge in accounting, reflected among others by their Bachelor's degree in Accounting, Master of Business Administration (MBA), and Qualified Risk Governance Professional (QRGP) certification. However, they do not yet hold professional certifications specifically issued by government-recognized accounting professional associations nor are they registered members of such professional associations.
2.1.3 Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The corporation's policy on diversity in the Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	<i>Explain</i>	Korporasi telah mengungkapkan tentang keberagaman pada Direksi dan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan namun pengungkapan belum mencakup tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat di Direksi dan Dewan Komisaris. Namun informasi belum mencakup target komposisi yang terukur dan kemajuan yang dicapai dalam mencapai target tersebut serta referensi tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat di Direksi dan Dewan Komisaris. The Corporation has disclosed diversity in the Board of Directors and Board of Commissioners in the Annual Report, but the disclosure does not include how diversity is achieved through proper succession planning in the Board of Directors and Board of Commissioners. Furthermore, the information does not cover measurable target composition, progress made toward these targets, or references on how diversity is achieved through proper succession planning for the Board of Directors and Board of Commissioners.
2.1.4 Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to identify qualified candidates.	<i>Explain</i>	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN, sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan Komisaris yang diinginkan. Kewenangan untuk menentukan kandidat Dewan Komisaris yang berdasarkan usulan Kementerian BUMN dan dari PLN Persero di luar kewenangan Perusahaan. Tidak terdapat pengangkatan di tahun 2024. (<i>not applicable</i>) The Board of Commissioners has ensured that policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent in accordance with the Minister of SOEs Regulation, thus producing the desired composition of the Board of Commissioners. The authority to determine candidates for the Board of Commissioners based on proposals from the Ministry of SOEs and PLN Persero lies outside the Company's authority. There were no appointments in 2024. (Not applicable)

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
2.1.5 Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners / Committee that performs the nomination function establishes nomination procedures and criteria consistent with the Board of Commissioners' competency matrix approved by the Board of Commissioners and ensures that candidate profiles meet the requirements set forth in the competency matrix and nomination criteria.	Explain	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi (<i>Not Applicable</i>). Mengingat proses tersebut dijalankan oleh Kementerian BUMN dan PT PLN (Persero). The Board of Commissioners/Committee performing the nomination function establishes nomination procedures and criteria consistent with the competency matrix approved by the Board of Commissioners and ensures candidate profiles meet the requirements set in the competency matrix and nomination criteria (<i>Not Applicable</i>), considering that this process is carried out by the Ministry of SOEs and PT PLN (Persero).
2.1.6 Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed so that the members as a group reflect diversity in terms of abilities, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and gender needed to properly fulfill the role of the Board of Commissioners.	Explain	Komposisi Dewan Komisaris secara kolegal telah mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris, Namun komposisi tersebut belum mencerminkan dari aspek <i>gender</i> The composition of the Board of Commissioners collectively reflects diversity in terms of ability, expertise, knowledge, experience, age, and cultural background needed to properly fulfill the Board of Commissioners' role. However, the composition does not yet reflect gender diversity.
2.1.7 Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles with potential conflicts of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office, and discloses the membership period and their independence from the corporation's perspective.	Apply	Untuk memaksimalkan kemampuan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, telah terdapat 3 (tiga) Komisaris Independen, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi To maximize the ability of the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles with potential conflicts of interest, there are 3 (three) Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosures of their membership duration and independence from the corporate perspective.
2.1.8 Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, strict, and transparent process for the appointment and election of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Apply	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi telah memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yaitu melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas (<i>Selected Talent</i>), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan (<i>Nominated Talent</i>) oleh Dewan Komisaris kepada RUPS. To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee has ensured there is a formal, strict, and transparent process for appointing and electing members of the Board of Directors and Board of Commissioners by validating and calibrating the talent proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners/Supervisory Board (<i>Selected Talent</i>) to produce a list of talents to be nominated (<i>Nominated Talent</i>) by the Board of Commissioners to the GMS.

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation	
2.1 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners				
2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure oriented towards sustainable corporate development and encouraging the achievement of long-term objectives. The remuneration for the Board of Directors must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors, as well as the economic situation and corporate performance.	Explain	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan namun belum mendorong pencapaian tujuan jangka panjang (LTI <i>Long Term Insentif</i>) sebagaimana diatur dalam Peraturan BUMN. Remunerasi Direksi diusulkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi.	The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure oriented toward sustainable corporate development but has not yet encouraged the achievement of long-term objectives (LTI – Long Term Incentive) as regulated in the State-Owned Enterprises (SOEs) Regulation. The remuneration for the Board of Directors is proposed through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners, to the GMS to be adopted as a resolution. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors, as well as the economic situation and corporate performance.
2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure oriented towards sustainable corporate development and encouraging the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners, the economic situation, and corporate performance. In addition, the position as the President Commissioner, chairman, and membership in committees must also be considered.	Explain	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan namun belum mendorong pencapaian tujuan jangka panjang (LTI <i>Long Term Insentif</i>) sebagaimana diatur dalam Peraturan BUMN. Remunerasi Dewan Komisaris diusulkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi	The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure oriented toward sustainable corporate development but has not yet encouraged the achievement of long-term objectives (LTI – Long Term Incentive) as regulated in the SOEs Regulation. The remuneration for the Board of Commissioners is proposed through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners, to the GMS to be adopted as a resolution. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners, as well as the economic situation and corporate performance.

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
2.2.3 Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that remuneration packages are determined based on the performance, qualifications, and competence of directors and commissioners, while considering corporate operational performance, individual performance, and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures to establish the remuneration policy for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	<i>Explain</i>	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris saat ini menjadi wewenang PLN Persero selaku Holding Perusahaan. In carrying out its role, the Nomination and Remuneration Committee has not yet included: (a) Performance indicators, including non-financial indicators, are ensured to be relevant and designed to support the achievement of the corporation's long-term performance; (b) Consideration of whether directors and commissioners qualify for annual bonuses and/or allowances under the long-term incentive scheme; (c) Consideration of the consequences of pension obligations and other long-term benefits for directors and commissioners on the corporation, including the impact of increased employee benefits and other changes, especially for directors and commissioners nearing retirement; (d) Consideration and responsibility in appointing independent remuneration consultants, including the selection and terms of their assignment, as well as disclosing the identity and fees of the consulting services.
Prinsip 3. Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Principle 3. Work Relationship between Board of Directors and Board of Commissioners		
3.1 Sifat Hubungan Kerja Sifat Hubungan Kerja		
3.1.1 Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There is open discussion between the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as among members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it remains important to maintain the confidentiality of information to prevent leaks of confidential information.	<i>Apply</i>	Telah terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dengan tetap memandang penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia sebagaimana yang terdapat Board Manual Perusahaan dan Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris Direksi There have been open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as among members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, while still recognizing the importance of maintaining the confidentiality of information to prevent leakage of confidential information, as stated in the Company's Board Manual and the Minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors.
3.1.2 Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. Based on the respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the corporation's mission, vision, and strategy and regularly discusses its implementation.	<i>Apply</i>	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi telah bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya sebagaimana yang tertuang pada: - Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2024-2028 - Risalah Rapat Gabungan Pembahasan Dewan Komisaris dan Direksi - Alur Pengesahan RJPP PLN Indonesia Power 2024-2028 In accordance with the respective duties and roles, the Board of Directors has collaborated with the Board of Commissioners in formulating the corporation's mission, vision, and strategy and regularly discussed its implementation, as reflected in: - The Company's Long-Term Plan for 2024-2028 - Minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors - Approval Flow of RJPP of PLN Indonesia Power 2024-2028

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
3.1.3 Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary plays an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	<i>Apply</i>	Sekretaris Korporasi telah memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Korporasi juga telah diangkat berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana yang tertuang pada: - <i>Board Manual</i> - Surat Keputusan pengangkatan Sekretaris Perusahaan - Fungsi Utama dan Tugas Pokok Satuan Kerja dalam Struktur Organisasi bagian Sekretaris Perusahaan The Corporate Secretary has played an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders. The Corporate Secretary has also been appointed based on the approval of the Board of Commissioners as stated in: - <i>Board Manual</i> - Decision Letter on the appointment of the Corporate Secretary - Main Functions and Duties of the Work Unit in the Organizational Structure under the Corporate Secretary section
3.2 Akses Informasi Dewan Komisaris Access to Information for the Board of Commissioners		
3.2.1 Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners receives accurate, relevant, and timely information. Members of the Board of Commissioners themselves ensure that they obtain adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay, and comprehensively regarding all matters relevant to the corporation. The Board of Commissioners may request additional information from the Board of Directors at any time.	<i>Apply</i>	Direksi telah bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan sebagaimana yang tertuang pada risalah rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi 2024 dan Laporan Manajemen Triwulan tahun 2024 The Board of Directors has been responsible for ensuring the Board of Commissioners receives accurate, relevant, and timely information. Members of the Board of Commissioners themselves ensure that they obtain adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay, and comprehensively regarding all matters relevant to the corporation. The Board of Commissioners may request additional information from the Board of Directors at any time, as documented in the minutes of the 2024 joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors and the 2024 Quarterly Management Report.
3.3 Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi. Responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structure to the Corporation		
3.3.1 Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of ownership structure on the corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the corporation's share ownership structure and the relationships among shareholders that may affect the management and operations of the corporation.	<i>Apply</i>	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris telah mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi sebagaimana yang tertuang pada: - Anggaran Dasar Perusahaan - Pengelolaan Interaksi Korporasi antara PT PLN (Persero) dengan Sub-Holding (<i>Corporate Charter</i>) tanggal 30 Desember 2022. - Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) tentang Perubahan Batasan Kewenangan Perseroan. - <i>Board Manual</i> - Pakta Integritas Dewan Komisaris - Pakta Integritas Direksi The Board of Directors and the Board of Commissioners have considered their responsibilities in the context of the corporation's share ownership structure and the relationships among shareholders that may affect the management and operations of the corporation as outlined in: - The Company's Articles of Association - Management of Corporate Interaction between PT PLN (Persero) and the Sub-Holding (<i>Corporate Charter</i>) dated December 30, 2022 - Shareholders' Resolution Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) regarding Amendments to the Company's Authority Limits - Board Manual - Integrity Pact of the Board of Commissioners - Integrity Pact of the Board of Directors

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
Prinsip 4. Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab Principle 4. Ethical and Responsible Conduct		
4.1 Pedoman Etika dan Perilaku Code of Conduct		
4.1.1 Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan:	Apply	The Company's Code of Conduct clearly outlines the corporation's expectations for every member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees in:
a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi.	a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi;	a. Acting in the best interest of the corporation;
b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi.	b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi;	b. Acting honestly and with high standards of integrity;
c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian.	c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian.	c. Being independent and acting based on complete information, in good faith, exercising due diligence and prudence;
d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya.	d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya;	d. Complying with laws and regulations applicable to the corporation and its operations;
e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi.	e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi;	e. Avoiding actions violating laws or engaging in unethical behavior based on the code of conduct;
f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi.	f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi;	f. Avoiding involvement or participation in any activities causing conflicts of interest with the corporation's best interests or negatively impacting the corporation's reputation;
g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya.	g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya.	g. Refraining from benefiting from the corporation's property or information, ownership of other assets, or customers for personal gain or causing losses to the corporation and its customers;
h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi.	h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi.	h. Not exploiting their position or opportunities arising from their position for personal gain;
i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan.	i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan.	i. Avoiding requesting or accepting payments, gratuities, or other benefits from third parties for themselves or others causing conflicts of interest or unlawfully benefiting third parties;
j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan.	j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan.	j. Respecting differences of opinion and the rights of every member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees;
k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.	k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya	k. Ensuring complete, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.
	Pedoman Etika Perusahaan telah diungkapkan pada website Perusahaan https://www.plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Pedoman-Perilaku.aspx	The Company's Code of Conduct has been disclosed on the Company's website at https://www.plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Pedoman-Perilaku.aspx

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
This statement is set forth in the Code of Business Conduct and Ethics Guidelines, clearly expressing the corporation's expectations that every member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees will be: - Acting in the best interest of the corporation. - Acting honestly and with high integrity standards. - Being independent and acting based on complete information, in good faith, with due diligence and prudence. - Complying with laws and regulations applicable to the corporation and its operations. - Avoiding actions that violate laws or engaging in unethical behavior based on the code of conduct. - Not involving or participating in any activities causing conflicts of interest with the best interests of the corporation or negatively impacting the corporation's reputation. - Not taking advantage of the corporation's property or information, ownership of other assets, or its customers for personal benefit or causing losses to the corporation and its customers. - Not exploiting their position or opportunities arising from their position for personal gain. - Avoiding requesting or accepting payments, gratuities, or other benefits from third parties for themselves or others causing conflicts of interest or providing unlawful benefits to third parties. - Respecting differences of opinion and the rights of every member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees. - Ensuring complete, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.		
4.1.2 Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan (anti fraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors is establishing policies and practicing anti-money laundering and counter-terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political involvement by referring to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, or other related standards.	<i>Explain</i>	Direksi telah menetapkan kebijakan dan praktik anti suap, anti korupsi, anti kecurangan (<i>anti fraud</i>), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti suap, antikorupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. Namun Perusahaan belum menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana yang tertuang pada: - Pedoman Etika Perusahaan PT PLN Indonesia Power - https://www.plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Pengendalian-Gratifikasi.aspx - Annual Report tahun 2023 Hal 427-431 https://www.plnindonesiapower.co.id/id/komunikasi-berkelanjutan/Reports.aspx The Board of Directors has established policies and practices on anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political involvement, referring to national or international standards regarding anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, or related standards. However, the Company has not yet established policies and practices on anti-money laundering and counter-terrorism financing as outlined in: - The Code of Conduct of PT PLN Indonesia Power - https://www.plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Pengendalian-Gratifikasi.aspx - 2023 Annual Report pages 427-431 https://www.plnindonesiapower.co.id/id/komunikasi-berkelanjutan/Reports.aspx

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
4.2 Nilai-Nilai dan Budaya Organisasi Organizational Value and Culture		
4.2.1 Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. The corporation articulates, fosters, and discloses the corporate culture and values	Apply	Korporasi telah mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi, terdapat penilaian dan program pemantauan agar seluruh Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan korporasi memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan korporasi dalam perilaku yang tidak tepat sebagaimana yang tertuang: - Survey Budaya Organisasi yang dilakukan PLN - Survei Pedoman Etika Perusahaan - Pernyataan Komitmen Pedoman Etika Perusahaan The corporation has articulated, fostered, and disclosed the corporate culture and values, conducted assessments and monitoring programs to ensure that all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees understand the relevant code of conduct and are applying it effectively to avoid the corporation's involvement in inappropriate behaviors, as outlined in: - Organizational Culture Survey conducted by PLN - Code of Conduct Survey - Statement of Commitment to the Code of Conduct
4.3 Penegakan dan Komunikasi Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya. Enforcement and Communication of Code of Conduct, Values and Culture.		
4.3.1 Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. Communicating the corporate code of conduct and ethics effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees, integrating them into the corporate strategy and operations including the risk management system and remuneration structure, and enforcing them.	Apply	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi telah dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan sebagaimana yang tertuang pada: - Pedoman Etika Perusahaan PT PLN Indonesia Power - Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) - Laporan WBS Tahun 2024 - Annual Report tahun 2023 Hal 427 https://www.plnindonesiapower.co.id/id/komunikasi-berkelanjutan/Reports.aspx The corporate code of conduct and ethics has been communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees, being integrated into the corporate strategy and operations including the risk management system and remuneration structure, and being enforced as outlined in: - Code of Conduct of PT PLN Indonesia Power - Whistleblowing System - WBS Report 2024 - Annual Report 2023 Page 427 https://www.plnindonesiapower.co.id/id/komunikasi-berkelanjutan/Reports.aspx
Prinsip 5. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Principle 5. Risk Management, Internal Control and Compliance		
5.1 Pengendalian Internal dan Kepatuhan. Internal Control and Compliance		
5.1.1 Direksi melakukan reu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors conducts a periodic review on the appropriateness of the design and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal controls, and corporate compliance, and reports the implementation and results of the reviews to shareholders through the Corporation's annual report.	Apply	Direksi telah melakukan <i>review</i> secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi sebagaimana yang tertuang pada: - Laporan Manajemen SPI Triwulanan tahun 2024 - Laporan audit pengendalian internal oleh KAP tahun buku 2023 - Annual Report tahun 2023 https://www.plnindonesiapower.co.id/id/komunikasi-berkelanjutan/Reports.aspx - Laporan Manajemen Risiko Triwulanan 2024 The Board of Directors has conducted periodic reviews on the appropriateness of the design and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal controls, and corporate compliance, and reporting the implementation and results of the reviews to shareholders through the Corporation's annual report as outlined in: - SPI Management Report Quarterly 2024 - Internal control audit report by the Public Accounting Firm for fiscal year 2023 - Annual Report 2023 https://www.plnindonesiapower.co.id/id/komunikasi-berkelanjutan/Reports.aspx - Risk Management Report Quarterly 2024

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation	
5.2 Manajemen Risiko Risk Management				
5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Integrating strategy and risk as a unified whole, transparently disclosing them, incorporating them into the execution of duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as discussing them in the meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.	Apply	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana yang tertuang pada: - Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi - RKAP 2024 - Risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi - Laporan Manajemen Risiko Triwulanan 2024	Strategy and risk are integrated as a unified whole, transparently disclosed, incorporated into the execution of duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as discussed in meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors, as reflected in: - Integrated Risk Management Strategic Policy - 2024 RKAP - Minutes of the Board of Commissioners and Board of Directors meetings - 2024 Quarterly Risk Management Reports
5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Committee assists the Board of Commissioners in carrying out its duties by creating a transparent, focused, and independent mechanism for overseeing the corporation's risk management.	Apply	Direksi telah membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya	The Board of Directors has established an integrated governance, risk management, and compliance (GRC) system, addressing various uncertainties in a comprehensive manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its objectives.
5.3 Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management and Compliance				
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors is building an integrated governance, risk management, and compliance (GRC) system, handling various uncertainties in a unified manner and with high integrity, ensuring the corporation's ability to achieve its objectives.	Apply	Direksi telah membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya sebagaimana yang tertuang pada: - Nomor 0073.P/DIR/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai pemutakhiran dari Pedoman GRC tahun 2019. - Peraturan Direksi Nomor 0027.P/DIR/2024 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi	The Board of Directors has built an integrated governance, risk management, and compliance (GRC) system, handling various uncertainties in a unified manner and with high integrity, ensuring the corporation's ability to achieve its objectives as stated in: - Number 0073.P/DIR/2023 dated June 27, 2023, as an update to the 2019 GRC Guidelines. - Board of Directors Regulation Number 0027.P/DIR/2024 on the Strategic Policy for Integrated Risk Management.
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors is ensuring that the department overseeing the compliance function is not concurrently performing functions that could potentially cause conflicts of interest.	Apply	Direksi telah memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Direksi tentang Organisasi PT PLN Indonesia Power Nomor 0001.P/DIR/2024	The Board of Directors has ensured that the department overseeing the compliance function is not concurrently performing functions that could potentially cause conflicts of interest as stipulated in the Board of Directors Regulation on the Organization of PT PLN Indonesia Power Number 0001.P/DIR/2024.

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
5.4 Audit Internal Internal Audit		
5.4.1 Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function is helping the corporation in achieving its objectives by bringing an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.	<i>Explain</i>	Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. Namun Komite Audit belum merekomendasikan kepada Dewan Komisaris menunjuk konsultan eksternal independen untuk mengkaji ulang kinerja Audit Internal The Board of Commissioners, through the Audit Committee, has monitored and ensured that the internal audit function is helping the Corporation in achieving its objectives by bringing an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance. However, the Audit Committee has not yet recommended to the Board of Commissioners the appointment of an independent external consultant to review the performance of the Internal Audit.
Prinsip 6. Pengungkapan dan Transparansi Principle 6. Disclosure and Transparency		
6.1 Kebijakan dan Pengungkapan Kebijakan dan Pengungkapan		
6.1.1 Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. The corporation has been having policies and procedures for disclosure and transparency, ensuring disclosing material information while safeguarding sensitive and confidential corporate information.	<i>Apply</i>	Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia Perusahaan yang diatur dalam Keputusan Direksi sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Direksi Nomor: 0005.P/DIR/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Komunikasi Perusahaan dan Keputusan Direksi Nomor: 246.K/010.IP/2017 tentang Pelayanan, Pengungkapan, dan Keterbukaan Informasi Publik The Company has set policies and procedures for disclosure and transparency that ensure disclosing material information while safeguarding sensitive and confidential Company information, as regulated in the Board of Directors' Decision, as set forth in Board of Directors Regulation Number: 0005.P/DIR/2023 on the Guidelines for Implementing Corporate Communication and Board of Directors Decree Number: 246.K/010.IP/2017 on Service, Disclosure, and Public Information Transparency.
6.1.2 Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. The shareholders' rights to regularly and timely obtain relevant material information about the corporation must be fulfilled.	<i>Explain</i>	Secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang Perusahaan telah dipenuhi dengan adanya kewajiban pengungkapan kepada Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar maupun secara parsial, namun belum memiliki dan mengungkapkan kebijakan tertulis dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan secara terus-menerus/keterbukaan informasi berdasarkan peraturan berlaku kepada Pemegang Saham Regularly and timely disclosing relevant material information about the Company has been fulfilled through disclosure obligations to Shareholders in the Articles of Association and partially otherwise, yet the Company has not established and disclosed a written policy for continuously implementing disclosure obligations / information transparency based on applicable regulations to Shareholders.
6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial Statement and Sustainability Report		
6.2.1 Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The corporation discloses systems and procedures ensuring that interim financial statements that are unaudited or not reviewed by external auditors are materially accurate, complete, and providing investors with timely information for making appropriate investment decisions.	<i>Explain</i>	Perusahaan telah mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat berupa pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim, peran fungsi manajemen risiko/kepatuhan/pengawasan manajemen dan fungsi audit internal dalam memastikan integritas laporan keuangan interim. Namun terkait publikasi Laporan Keuangan Interim belum dilakukan Perusahaan. The Company has disclosed systems and procedures ensuring that interim financial reports that are unaudited or not reviewed by external auditors are materially accurate, complete, and providing investors with timely information for making appropriate investment decisions. These include internal controls over financial reporting, including interim financial statements, the roles of risk management, compliance, management monitoring functions, and internal audit functions in ensuring the integrity of interim financial reports. However, the Company has not yet conducted the publication of the Interim Financial Statements.

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
6.2.2 Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of the financial statement audits conducted by external auditors. This activity includes recommending the appointment, reappointment, and, if necessary, dismissal and remuneration of external auditors.	<i>Explain</i>	Komite Audit telah memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. Proses seleksi auditor eksternal telah dilakukan secara transparan. Dewan Komisaris atau Komite Audit juga telah memastikan agar auditor eksternal segera menginformasikan semua temuan dan masalah signifikan yang ditemukan auditor eksternal selama pelaksanaan audit sebagaimana yang tertuang pada, Risalah RUPS Tahunan Tahun buku 2023, Notulen Rapat Komite Audit tanggal 24 September Tahun 2024 dan Surat Rekomendasi penunjukan KAP untuk Audit Laporan keuangan PT PLN Indonesia Power dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2024 dari VP Accounting & Assurance kepada Direktur Utama Namun, Komite Audit belum memastikan bahwa dalam kontrak dengan auditor tidak terdapat klausula yang dapat mengganggu independensi atau kompetensi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan termasuk melakukan dialog yang memadai dengan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen dan memantau interaksi antara manajemen dan auditor eksternal, termasuk mereviu management letter yang diberikan oleh auditor eksternal dan mengawasi tanggapan manajemen. Komite Audit juga tidak melakukan reviu setiap jasa non audit yang diberikan oleh auditor eksternal dan afiliasinya serta biaya terkait, untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak mengganggu independensi auditor karena peran tersebut dilaksanakan oleh PT PLN (Persero). The Audit Committee has ensured the quality of the financial statement audits conducted by external auditors. These activities include recommending the appointment, reappointment, and, if necessary, dismissal and remuneration of external auditors. The external auditor selection process has been carried out transparently. The Board of Commissioners or Audit Committee has also ensured that external auditors promptly inform all significant findings and issues encountered during the audit, as documented in the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, the Audit Committee Meeting Minutes dated September 24, 2024, and the Recommendation Letter for appointing the Public Accounting Firm for the 2024 Financial Statement Audit of PT PLN Indonesia Power and its subsidiaries from the VP of Accounting & Assurance to the President Director. However, the Audit Committee has not ensured that the contract with the auditor excludes clauses that could impair the auditor's independence or competence in conducting the financial statement audit. This includes having adequate dialogue with the external auditor without management presence and monitoring interactions between management and the external auditor, including reviewing the management letter provided by the external auditor and overseeing management's responses. The Audit Committee has also not reviewed each non-audit service provided by the external auditor and its affiliates, along with the related fees, to ensure these services do not compromise auditor independence, as these roles are performed by PT PLN (Persero).
6.2.3 Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately, following national or international sustainability reporting frameworks.	<i>Apply</i>	Laporan keberlanjutan telah disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional yaitu GRI Standards dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021. Laporan Keberlanjutan diungkapkan pada website Perusahaan https://www.plnindonesiapower.co.id/reports/sustainability-report/Sustainability-Report-Indonesia-Power-2021/index.aspx The sustainability report has been prepared and disclosed accurately, following national or international sustainability reporting frameworks, namely the GRI Standards and the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017, and the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021. The Sustainability Report is disclosed on the Company's website at https://www.plnindonesiapower.co.id/reports/sustainability-report/Sustainability-Report-Indonesia-Power-2021/index.aspx.

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
6.2.4 Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The corporation issues integrated annual reports placing historical performance in context and describing the risks, opportunities, and future prospects of the corporation, thus helping shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and progress in creating sustainable value.	Apply	Perusahaan telah menerbitkan laporan tahunan yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek Perusahaan di masa depan berupa realisasi kinerja keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir, dalam uraian perbandingan antara target dan realisasi, serta proyeksi di tahun selanjutnya. Selain itu dalam Laporan Tahunan juga memuat Prospek Usaha sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis Perusahaan dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Laporan Tahunan Perusahaan diungkapkan pada website perusahaan https://www.plnindonesiapower.co.id/reports/annual-report/ar-indonesia-power-2021/index.aspx The Company has published annual reports placing historical performance in context and describing the risks, opportunities, and future prospects of the Company. These include financial performance realizations over the last 3 (three) years, with comparative explanations between targets and realizations, as well as projections for the coming year. Furthermore, the Annual Report includes Business Prospects, helping shareholders and stakeholders understand the Company's strategic objectives and progress in creating sustainable value. The Annual Report is disclosed on the Company's website at https://www.plnindonesiapower.co.id/reports/annual-report/ar-indonesia-power-2021/index.aspx.
6.3 Diseminasi Informasi Dissemination of Information		
6.3.1 Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. The information dissemination channels must provide equal, timely, and relatively low-cost access to relevant information for users.	Apply	Perusahaan telah memiliki saluran penyebaran informasi yang menyediakan akses setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna selain situs website yaitu melalui sosial media. Perusahaan juga telah memastikan bahwa informasi yang disebarkan dijaga dan terproteksi keamanannya dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Direksi No. 136.K/010/IP/2017 tentang Kebijakan Keamanan Informasi dan diperolehnya sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Namun, Perusahaan belum mengadakan pertemuan dengan analis keuangan secara berkala The Company has established information dissemination channels providing equal, timely, and relatively low-cost access to relevant information for users, in addition to its website, through social media. The Company has also ensured that the disseminated information is secured and protected, as evidenced by the issuance of Board of Directors' Decision Letter No. 136.K/010/IP/2017 on Information Security Policy and the acquisition of ISO 27001:2013 certification for the Information Security Management System. However, the Company has not conducted regular meetings with financial analysts.
6.3.2 Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The corporation ensures that the annual statement regarding the implementation of the General Guidelines of Indonesian Corporate Governance, including explanations on the application of each Recommendation and Guidance, is available on the website for a minimum period of five years.	Apply	Perusahaan melaksanakan penilaian penerapan PUGKI untuk tahun buku 2023 sehingga penjelasan atas penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan serta telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan 2023 halaman 456 yang tersedia dalam situs web Perusahaan https://www.plnindonesiapower.co.id/reports/annual-report/ar-indonesia-power-2021/index.aspx The Company carried out an assessment of the implementation of the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI) for the 2023 fiscal year, so the explanation regarding the implementation of the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance, including each Recommendation and Guidance, has been disclosed in the Company's 2023 Annual Report on page 456, which is available on the Company's website https://www.plnindonesiapower.co.id/reports/annual-report/ar-indonesia-power-2021/index.aspx.
6.3.3 Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations listed on capital markets in jurisdictions other than their home jurisdiction, the applicable corporate governance laws and regulations must be clearly disclosed. In cases of cross-listing, the criteria and procedures for cross-listing, as well as the criteria and procedures for recognizing listing requirements for the primary listing, must be transparent and documented.	Explain	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur <i>cross listing</i>, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk <i>listing</i> utama harus transparan dan didokumentasikan <i>Not Applicable (N/A)</i> karena Perusahaan tidak melakukan perdagangan saham maupun penerbitan obligasi. For corporations listed on capital markets in jurisdictions other than their home jurisdiction, the applicable corporate governance laws and regulations must be clearly disclosed. In the case of cross-listing, the criteria and procedures for cross-listing, as well as the criteria and procedures for recognizing listing requirements for the primary listing, must be transparent and documented. Not Applicable (N/A) because the Company does not conduct stock trading nor issue bonds.

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation	
Prinsip 7. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Principle 7. Protection of Shareholders' Rights				
7.1 Hak Pemegang Saham Shareholders' Rights				
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The corporation has a communication policy facilitating and encouraging the participation of shareholders or investors.	Explain	Perusahaan telah memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor dengan menyediakan wadah atau platform dialog konstruktif antara seluruh pemegang saham dengan manajemen hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan RUPS. Namun Perusahaan belum memiliki kebijakan yang mengatur Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, diperbolehkan untuk melakukan konsultasi satu dengan lainnya tentang isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham secara khusus sebagaimana yang tertuang pada Anggaran Dasar PT PLN Indonesia Power dan Risalah RUPS, namun Perusahaan belum memiliki kebijakan yang mengatur Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, diperbolehkan untuk melakukan konsultasi satu dengan lainnya tentang isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham secara khusus.	The Company has established a communication policy facilitating and encouraging the engagement of shareholders or investors by providing a platform for constructive dialogue between all shareholders and management, as evidenced by the implementation of the GMS. However, the Company has not yet established a policy allowing shareholders, including institutional shareholders, to consult with one another regarding issues related to shareholders' fundamental rights specifically, as stipulated in the Articles of Association of PT PLN Indonesia Power and the GMS minutes.
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sependang yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The corporation, as a parent entity, ensures that its corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which the corporation's investment is significant.	Apply	Perusahaan telah memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak berupa Kerangka kerja dan kebijakan governansi korporat di entitas anak termasuk kebijakan tertulis antara lain mengenai: a. wewenang untuk menunjuk komisaris dan direktur. Umumnya, untuk entitas anak dengan ukuran relatif besar, Dewan Komisaris perlu dilibatkan dalam penunjukkan pengurus di entitas anak. Untuk entitas anak yang lebih kecil, Direksi yang berwenang melaksanakannya; b. efektivitas sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku; dan c. pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas informasi material entitas anak, termasuk informasi keuangan, transaksi dengan pihak berelasi dan informasi material lainnya. Sedangkan Perusahaan tidak mengatur jika Perusahaan memiliki/membentuk entitas berbadan hukum selain perseroan terbatas, Perusahaan memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas tersebut disesuaikan dengan konteks jenis badan hukumnya, mengingat Perusahaan tidak memiliki/membentuk entitas berbadan hukum selain perseroan terbatas.	The company has ensured that its corporate governance policy applies to subsidiaries through governance frameworks and written policies at the subsidiary level, including policies regarding: a. the authority to appoint commissioners and directors. Generally, for relatively large subsidiaries, the Board of Commissioners needs to be involved in appointing management at the subsidiary. For smaller subsidiaries, the Board of Directors has the authority to carry out these appointments; b. the effectiveness of the internal control system and compliance with applicable laws and regulations; and c. timely and accurate disclosure of material information from subsidiaries, including financial information, related-party transactions, and other material information. Meanwhile, the Company does not regulate governance policies for entities with legal status other than limited liability companies, but ensures that its governance policy applies to such entities adjusted to the context of their legal form, noting that the Company does not own or establish entities other than limited liability companies.

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
		Dokumen pendukung atas penjelasan rekomendasi tersebut tertuang pada - Pengelolaan Interaksi Korporasi Antara PLN Indonesia Power dengan Anak Perusahaan (<i>Corporate Charter</i>) - Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor: 118/K/010/IP/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan Dan Perusahaan Asosiasi (AP/P/A) - Laporan kinerja bulanan - Laporan Triwulanan
7.1.3 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. The corporation has rules and procedures regulating acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and substantial asset sales to ensure these transactions occur transparently, under fair conditions, and protect the rights of all shareholders according to their respective classes.	<i>Explain</i>	Perusahaan belum memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset Perusahaan yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. Namun Perusahaan belum mengungkapkan aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti <i>merger</i> dan penjualan aset sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi dalam website. Selain itu Perusahaan belum memiliki kebijakan yang mengatur menghindari adanya taktik yang mencegah pengambilalihan (<i>anti-take-over devices</i>) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas.
7.2 Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham PEqual Treatment of Shareholders		
7.2.1 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: - semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara; - pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The corporation has rules and procedures that ensure: - all shareholders of the same series within a class of shares are treated equally; - disclosure of such rules and procedures as well as disclosure of the capital structure and arrangements that enable certain shareholders to obtain influence or control disproportionate	<i>Explain</i>	Mengingat Perusahaan belum Tbk maka tidak ada ketentuan para investor memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri maupun kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam nilai ekonomi saham atau hak suara mendapat persetujuan dari kelas saham yang terdampak secara negatif. Perusahaan belum menyediakan mekanisme/prosedur yang memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka sesuai dengan aturan perundangan berlaku dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan. Namun secara umum Perusahaan telah mengungkapkan Hak-hak Pemegang Saham dalam Laporan Tahunan.

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
7.2.2 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The corporation has rules and procedures to ensure that related-party transactions are approved and carried out in a manner that reasonably assures conflicts of interest are properly managed and that the interests of the corporation and its shareholders are protected.	<i>Explain</i>	Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur operasional baku terkait transaksi dengan pihak berelasi untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan wajar (<i>arm's length transaction</i>). Dewan Komisaris dan Komite Audit berperan dalam memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar transaksi dengan pihak berelasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (<i>arm's-length principle</i>). Mekanisme review atas transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui proses audit, baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Dalam proses audit tersebut, Perusahaan melibatkan Organ Perusahaan diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan beberapa Divisi yang terkait. Dewan Komisaris juga melakukan pengungkapan terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan, maka Anggota Dewan Komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan. Namun Perusahaan belum memiliki kebijakan bahwa transaksi yang sudah pasti merugikan pemegang saham minoritas dilarang.
7.2.3 Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/ belum tersedia di pasar. The corporation has and discloses a policy to prevent insider trading. The corporation has clear rules regarding any trading of its shares by directors, commissioners, and insiders to ensure that no person may gain, directly or indirectly, from information that is not yet available to the market.	<i>Explain</i>	Mengingat saat ini Perusahaan belum berstatus emiten, sehingga Perusahaan belum memiliki kebijakan khusus untuk mencegah terjadinya insider trading. Namun secara parsial dalam Board Manual telah diatur bahwa Dewan Komisaris dan Direksi harus mematuhi etika terkait benturan kepentingan yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (Insider Trading) untuk memperoleh keuntungan pribadi
7.3 Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders		
7.3.1 Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. The corporation convenes the GMS with the agenda and meeting materials provided as comprehensively and as early as possible (no later than 28 days prior to the GMS) to allow shareholders sufficient time and information to thoroughly review the meeting agenda. The meeting invitation and all GMS-related information are disclosed through electronic means, such as the corporation's website.	<i>Apply</i>	Perusahaan telah melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi lengkap dan tidak terlambat (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) dan menyampaikan informasi yang relevan dan lengkap yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dalam RUPS sebagaimana tercantum dalam undangan RUPS dan surat kelengkapan. Pemanggilan RUPS disampaikan tanggal 27 Mei 2024 dan pelaksanaan RUPS tanggal 28 Juni 2024 sebagaimana yang tertuang pada Undangan RUPS dan surat kelengkapan. Risalah RUPS Tahunan tahun buku 2023 dan telah diungkapkan pada website Perusahaan https://www.plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Informasi-RUPS.aspx

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
7.3.2 Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS.	<i>Explain</i>	Perusahaan telah memiliki aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS yang diatur secara umum dalam Anggaran Dasar. Namun masih terdapat seorang anggota Direksi yang belum hadir dalam RUPS Laporan Tahunan, dan seorang anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam RUPS RKAP. Serta Perusahaan belum menunjuk pihak independen (pengawas/inspektur) untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPS dan mengungkapkannya dalam risalah RUPS. The Company has established rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS, which are generally stipulated in the Articles of Association. However, one member of the Board of Directors was absent from the Annual Report GMS, and one member of the Board of Commissioners did not attend the GMS on the RKAP. Furthermore, the Company has not appointed an independent party (supervisor/inspector) to count and/or validate votes during the GMS, nor has this been disclosed in the GMS minutes.
7.3.3 Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders participate effectively in the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	<i>Explain</i>	Pemegang saham telah berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kandidat Direktur dan Komisaris serta menyampaikan semua informasi relevan yang material mengenai kandidat kepada pemegang saham dalam proses pemilihan anggota dewan. Informasi yang diungkapkan termasuk informasi mengenai jabatan Direktur atau Komisaris di Perusahaan lain, dan penilaian atas independensi dari sudut pandang Perusahaan <i>Not Applicable</i> (N/A) karena peran tersebut dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero). Namun Pemegang saham tidak melakukan pemungutan suara secara langsung untuk tiap-tiap kandidat Direktur dan Komisaris. Penetapan untuk jabatan Direktur dan Komisaris kewenangannya ada di PT PLN (Persero) dan dilakukan melalui Keputusan RUPS secara sirkuler. Shareholders have effectively participated in the appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, conducted a thorough assessment of the candidates for Director and Commissioner and provided all relevant material information regarding the candidates to shareholders during the selection process. The disclosed information included positions held by the candidates as Directors or Commissioners in other companies and the Company's assessment of their independence. This is marked <i>Not Applicable</i> (N/A) since the role is carried out by the Nomination and Remuneration Committee of PT PLN (Persero). However, shareholders did not cast votes individually for each candidate for Director and Commissioner. The appointments are under the authority of PT PLN (Persero) and are conducted through a circular GMS resolution.
7.3.4 Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures transparency and accountability of the external auditor at the GMS.	<i>Explain</i>	Dalam Undangan RUPS, Perusahaan belum mengidentifikasi dan menginformasikan calon auditor eksternal yang akan ditunjuk atau ditunjuk kembali dalam RUPS. Selain itu, Perusahaan belum memastikan bahwa auditor eksternal menghadiri RUPS dan berkewajiban menjawab pertanyaan dari pemegang saham terkait dengan audit atas laporan keuangan. In the GMS Invitation, the Company has not yet identified or provided information regarding the external auditor to be appointed or reappointed during the GMS. Additionally, the Company has not yet ensured the attendance of the external auditor at the GMS or require them to answer questions from shareholders concerning the audit of the financial statements.
7.3.5 Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. The voting results and a summary of the GMS minutes are fully announced to the public on the following business day.	<i>Explain</i>	Risalah RUPS diinformasikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS. Namun Risalah RUPS belum memuat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan oleh pimpinan rapat atau pihak yang menjawab. Selain itu, media digital komunikasi resmi Perusahaan belum memuat dan menyediakan Penyelenggaraan RUPS, beserta semua materi rapat, laporan dan dokumen terkait yang meliputi antara lain laporan tahunan dan hasil pemungutan suara, termasuk agenda rapat yang bersangkutan selama paling tidak 10 (sepuluh) tahun. The GMS minutes are communicated to shareholders no later than 30 working days after the GMS. However, the minutes does not include questions raised by shareholders or the responses provided by the meeting chair or relevant parties. Moreover, the Company's official digital communication channels do not host or provide access to GMS proceedings, including all meeting materials, reports, and related documents, such as the annual report and voting results, for a minimum period of 10 (ten) years.

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation	
Prinsip 8. Penghargaan Terhadap Pemangku Kepentingan Principle 8. Rewards for Stakeholders				
8.1 Keterlibatan Pemangku kepentingan Kunci (Stakeholder Engagement) Stakeholder Engagement				
8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The corporation, through the Corporate Secretary, conducts regular, transparent, and effective communication with key stakeholders and engages them to understand their expectations and concerns, as well as the corporation's impact on them.	Apply	Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci Perusahaan telah mengungkapkan proses dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan kunci yang akan dilibatkan. Perusahaan telah menyediakan saluran yang dapat digunakan para pemangku kepentingan kunci (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll) untuk menyampaikan pendapat dan masukan, menyuarakan keluhan dan/atau pengaduan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka melalui media penyampaian keluhan Pelanggan dan Media Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing system). Perusahaan telah mengungkapkan pandangan, masukan dan keluhan signifikan yang disampaikan para pemangku kepentingan kunci yang diperoleh dari keterlibatan pemangku kepentingan kunci	The Company, through the Corporate Secretary, conducts regular, transparent, and effective communication with key stakeholders. The Company has disclosed the process of identifying and selecting key stakeholders to be engaged. The Company has provided channels that can be used by key stakeholders (such as customers, suppliers, the general public, etc.) to express their opinions and feedback, raise concerns, and/or file complaints regarding possible violations of their rights through the Customer Complaint Submission Media and the Whistleblowing System. The Company has disclosed significant views, feedback, and complaints submitted by key stakeholders obtained through stakeholder engagement.
8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis Integration of Sustainability into the Business Model				
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners, together with the Board of Directors, is responsible, accountable, and transparent for sustainability governance, including the establishment of the corporation's sustainability strategy, priorities, and targets. The Board of Directors and the Board of Commissioners incorporate sustainability considerations in carrying out their roles, including but not limited to the development and implementation of corporate strategy, business plans, key action plans, and risk management.	Apply	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi telah bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan Perusahaan. Direksi telah memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan Perusahaan serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa mengikuti dan memahami masalah keberlanjutan yang relevan bagi Perusahaan dan bisnisnya. Evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris telah mencakup kinerja mereka dalam mengawasi dan menangani risiko serta peluang yang signifikan tentang keberlanjutan. Dalam Struktur Organisasi terdapat jabatan Vice President Risk and Compliance yang berperan khusus dalam mengelola secara strategis keberlanjutan, termasuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam kegiatan korporasi sebagaimana yang tertuang pada: - Sustainability Report PT PLN Indonesia Power 2023 hal. 33 - Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi - Annual Report bagian Pelatihan Direksi hal.331 dan Pelatihan Dewan Komisaris hal.346	The Board of Commissioners, together with the Board of Directors, has taken responsibility and demonstrated accountability and transparency in sustainability governance, including the establishment of the Company's sustainability strategy, priorities, and targets. The Board of Directors has ensured that the Company's sustainability strategy, priorities, targets, and performance against these targets are communicated to stakeholders. The Board of Directors and the Board of Commissioners continuously monitor and understand sustainability issues relevant to the Company and its business. The performance evaluation of the Board of Directors and the Board of Commissioners includes their performance in overseeing and addressing significant sustainability-related risks and opportunities. Within the organizational structure, there is a designated position of Vice President of Risk and Compliance, which plays a strategic role in managing sustainability, including integrating sustainability considerations into corporate activities, as outlined in: - Sustainability Report of PT PLN Indonesia Power 2023, page 33 - Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors - Annual Report, section on Board of Directors' Training, page 331, and Board of Commissioners' Training, page 346

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
		- KPI Direksi dan KPI Dewan Komisaris - <i>Annual Report</i> PT PLN Indonesia Power Tahun 2023 - Laporan Triwulan IV Unaudited Tahun 2024 hal. 138-139 - Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power Tahun 2023 - Peraturan Direksi PT PLN Indonesia Power Nomor: 0001.P/DIR/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 139.K/010/IP/2022 Tentang Organisasi PT PLN Indonesia Power
8.3 Perlindungan Terhadap Pemangku Kepentingan Protection for Stakeholders		
8.3.1 Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that the corporation's operations reflect the implementation of high standards of ethics, social responsibility, and environmental responsibility throughout the corporation, and ensures that appropriate policies and procedures are applied to respect and comply with the rights of stakeholders.	Apply	Direksi telah memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi Perusahaan mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh Perusahaan dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana yang tertuang pada: - Keputusan Direksi Nomor: 053.K.010/IP/2021 tentang Kebijakan Fokus Pelanggan - PLN Indonesia Power <i>Integrated Management System</i> melaksanakan Survey Kepuasan, Ketidakpuasan, dan Keterikatan Pelanggan termasuk menentukan metodologi dan metode survey - PLN Indonesia Power <i>Integrated Management System</i> memonitor Tindak lanjut penyelesaian AFI terkait Pemenuhan Permintaan dan Penanganan Keluhan Pelanggan - <i>Sustainability Report</i> PT PLN Indonesia Power 2023 hal.123 - http://supplier.indonesiapower.co.id/ - <i>Sustainability Report</i> PT PLN Indonesia Power 2023 hal.67 dan 109 The Board of Directors has ensured and disclosed that the Company's operations reflect the implementation of high standards of ethics, social responsibility, and environmental responsibility throughout the Company, and ensures that appropriate policies and procedures are applied to respect and comply with the rights of stakeholders, as outlined in: - Board of Directors' Decision Number: 053.K.010/IP/2021 on Customer Focus Policy - PLN Indonesia Power <i>Integrated Management System</i> conducts surveys on Customer Satisfaction, Dissatisfaction, and Engagement, including determining survey methodologies and methods - PLN Indonesia Power <i>Integrated Management System</i> monitors the follow-up resolution of AFI related to meeting customer requests and handling customer complaints - Sustainability Report of PT PLN Indonesia Power 2023, page 123 - http://supplier.indonesiapower.co.id/ - Sustainability Report of PT PLN Indonesia Power 2023, pages 67 and 109
8.3.2 Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work in the long-term interest of the corporation and to prioritize sustainability.	Explain	Direksi telah mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang Perusahaan dan mengedepankan keberlanjutan. Namun Perusahaan belum memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan. Namun Perusahaan belum memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan. Hal ini diungkapkan dalam Laporan Tahunan sampai akhir tahun 2023, PT PLN Indonesia Power belum menerapkan skema kompensasi berbasis kinerja jangka Panjang untuk manajemen dan karyawan karena saham PT PLN Indonesia Power sebanyak 99,99% dimiliki oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan 0,01% dimiliki oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK) PLN. Oleh karena itu, PLN Indonesia Power tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan atau <i>Employee Stock Option Program</i> (ESOP) dan tidak ada kepemilikan saham oleh manajemen atau <i>Management Stock Option Program</i> (MSOP). This is disclosed in the Annual Report up to the end of 2023, stating that PT PLN Indonesia Power does not implement a long-term performance-based compensation scheme for management and employees because 99.99% of PT PLN Indonesia Power's shares are owned by PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) and 0.01% by the PLN Education and Welfare Foundation (YPK PLN). Therefore, PLN Indonesia Power does not have an Employee Stock Ownership Program (ESOP) or a Management Stock Option Program (MSOP).

Penilaian atas Pedoman Governansi Perusahaan dengan Parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard

Assessment of Corporate Governance Guidelines using the ASEAN Corporate Governance Scorecard Parameters

Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power melakukan penilaian berdasarkan parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dikeluarkan oleh ACMF pada Maret 2024. Kriteria penilaian ACGS terdiri dari 2 Level dengan rincian sebagai berikut:

Level 1 terdiri dari:

- A. Hak-hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham
- B. Keberlanjutan dan Ketahanan
- C. Transparansi dan Pengungkapan
- D. Tanggung Jawab Dewan

Level 2 Terdiri dari:

- A. Bonus
- B. Pinalti

Penilaian penerapan atas Pedoman governansi Perusahaan berdasarkan ACGS tahun 2024 dilakukan oleh pihak independen. Berdasarkan penilaian Penilaian tersebut, total skor yang dicapai PT PLN Indonesia Power tahun 2024 untuk Level 1 sebesar 82,59 poin dan Level 2 sebesar 12,41 poin, sehingga total skor keseluruhan (Level 1 dan Level 2) adalah sebesar 95,01 poin. Dari Penilaian tersebut menghasilkan rekomendasi diantaranya adalah:

1. Perusahaan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum rapat dimulai
2. Risalah RUPST memuat pertanyaan yang diajukan pemegang saham serta jawaban pertanyaan
3. Perusahaan memberikan suara melalui jajak pendapat (bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPST terbaru
4. Perusahaan mengungkapkan menunjuk pihak independen (pengawas/ pemeriksa) untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara dalam RUPST
5. Perusahaan mengumumkan kepada publik pada hari kerja berikutnya hasil pemungutan suara pada RUPST/RUPSLB terkini untuk semua keputusan
6. Perusahaan menyampaikan alasan dan penjelasan untuk setiap agenda RUPS dalam pemanggilan RUPS yang disampaikan
7. Perusahaan mengungkapkan praktiknya untuk mendorong pemegang saham terlibat dengan perusahaan di luar rapat umum
8. Perusahaan menerjemahkan undangan RUPS ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada waktu yang sama dalam versi bahasa Indonesia

In 2024, PLN Indonesia Power conducted an assessment based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) parameters issued by ACMF in March 2024. The ACGS evaluation criteria consist of 2 Levels with the following details:

Level 1 consists of:

- A. Rights and Equal Treatment of Shareholders
- B. Sustainability and Resilience
- C. Transparency and Disclosure
- D. Board Responsibilities

Level 2 consists of:

- A. Bonus
- B. Penalty

The assessment of the implementation of the Company's governance guidelines based on the 2024 ACGS was conducted by an independent party. Based on the assessment, the total score achieved by PT PLN Indonesia Power in 2024 was 82.59 points for Level 1 and 12.41 points for Level 2, resulting in an overall total score (Level 1 and Level 2) of 95.01 points. The assessment produced several recommendations, including:

1. The Company discloses the voting procedures used before the meeting begins.
2. The minutes of the GMS include questions raised by shareholders and the answers to those questions.
3. The Company conducts voting through polls (not by a show of hands) for all resolutions in the latest GMS.
4. The Company discloses the appointment of an independent party (supervisor/auditor) to count and/or validate votes in the AGMS.
5. The Company announces to the public on the next working day the voting results of the latest AGMS/EGMS for all resolutions
6. The Company provides reasons and explanations for each agenda item in the GMS notice.
7. The Company discloses its practices to encourage shareholder engagement with the Company outside the general meetings.
8. The Company translates the GMS invitation into English and publishes it simultaneously with the Indonesian version.

9. Perusahaan mengungkapkan bahwa Dewan Komisaris melakukan <i>review</i> setiap tahun untuk memastikan struktur modal dan utang Perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko yang terkait 10. Perusahaan memiliki kebijakan penghargaan/ kompensasi yang memperhitungkan kinerja Perusahaan dalam jangka panjang. 11. Perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, fasilitas serta imbalan lainnya, yaitu insentif berdasarkan ukuran kinerja jangka panjang) untuk anggota Direksi termasuk Direktur Utama. 12. Perusahaan menerbitkan Laporan Tahunan secara tepat waktu yaitu 120 hari dari akhir tahun buku 13. Website Perusahaan mengungkapkan Laporan Keuangan (Triwulanan terbaru) 14. <i>Website</i> Perusahaan mengungkapkan Anggaran Dasar Perusahaan 15. Perusahaan memiliki Komisaris independen setidaknya 50% dari total Dewan Komisaris 16. Komite Nominasi sebagian besar terdiri dari Komisaris Independen 17. Perusahaan menetapkan minimal kuorum 2/3 dalam menentukan keputusan Direksi dan keputusan Dewan Komisaris 18. Perusahaan mempunyai standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja bagi Direktur dan Manajemen Senior dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan, seperti pemberian <i>clawback provision</i> (penerapan pengambilan kembali dana/keuntungan kepada individu jika penerima tidak memenuhi syarat yang disepakati/melanggar kontrak) dan bonus yang ditangguhkan 19. <i>Whistle Blowing System</i> Perusahaan dikelola oleh pihak/ institusi yang independen 20. Laporan keuangan tahunan audited dirilis dalam waktu 60 hari dari akhir tahun keuangan	9. The Company discloses that the Board of Commissioners conducts an annual review to ensure the Company's capital and debt structure align with strategic objectives and related risk appetite. 10. The Company has a reward/ compensation policy that considers Company long-term performance. 11. The Company discloses remuneration policies/ practices (costs, allowances, facilities, and other rewards, i.e., incentives based on long-term performance metrics) for Board members including the President Director. 12. The Company publishes the Annual Report timely, within 120 days from the fiscal year-end. 13. The Company's website discloses the latest Quarterly Financial Statements. 14. The Company's website discloses the Company's Articles of Association. 15. The Company has independent commissioners comprising at least 50% of the total Board of Commissioners. 16. The Nomination Committee is mostly composed of Independent Commissioners. 17. The Company sets a minimum quorum of 2/3 for decisions made by the Board of Directors and Board of Commissioners. 18. The Company has measurable standards to align performance-based remuneration for Directors and Senior Management with the Company's long-term interests, such as the implementation of clawback provisions (reclaiming funds/ profits from individuals if they fail to meet agreed criteria/ violate contracts) and deferred bonuses. 19. The Company's Whistleblowing System is managed by an independent party/institution. 20. The audited annual financial statements are released within 60 days from the fiscal year-end.

Tindak lanjut atas Rekomendasi Tahun 2023

Follow-up on the 2023 Recommendations

Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Penilaian ACGS tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 yaitu diantaranya adalah:

1. Perusahaan telah mengungkapkan Proses penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang telah diungkapkan pada *website* Perusahaan <https://plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Informasi-RUPS.aspx>. Dalam *website* tersebut telah terdapat Undangan RUPS, Ringkasan RUPS dan Tata Tertib RUPS.

Follow-up on the Recommendations from the Previous Year's ACGS Assessment in 2023 include, among others:

1. The Company has disclosed the process of convening the GMS as revealed on the Company's website <https://plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Informasi-RUPS.aspx>. The website contains the GMS Invitation, GMS Summary, and GMS Rules of Procedure.

2. Perusahaan telah mengungkapkan Materi *Analyst Briefing* sebagaimana yang diungkapkan dalam *website* Perusahaan <https://www.plnindonesiapower.co.id/id/profil/Pages/Sekilas-Indonesia-Power.aspx> dengan menu Unduh *Company Profile* Sekarang.
3. Perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi atas perusahaan memiliki lebih dari satu kelas saham serta mempublikasikan hak suara yang melekat pada masing-masing kelas saham dengan mengungkapkan pada *website* Perusahaan juga <https://plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Informasi-Pemegang-Saham.aspx> yang menjelaskan bahwa "PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham utama dan pengendali PLN Indonesia Power dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% yang terdiri dari 1 lembar Saham Seri 1 dan 357.165.633.598 lembar Saham Seri 2. Pemegang saham utama dan pengendali diwakili oleh Direktur Utama PT PLN (Persero), dimana secara teknis hubungan dengan pemegang saham berada di bawah Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero). Adapun pemegang saham lainnya yaitu YPK PLN dengan kepemilikan saham sebesar 0,01%. Saham Seri 1 adalah saham dengan klasifikasi hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan saham Seri 2 adalah saham biasa".
2. The Company has disclosed the Analyst Briefing Materials as presented on the Company's website <https://www.plnindonesiapower.co.id/id/profil/Pages/Sekilas-Indonesia-Power.aspx> under the "Download Company Profile Now" menu.
3. The Company has followed up on the recommendation regarding having more than one class of shares and publishing the voting rights attached to each share class by disclosing on the Company's website <https://plnindonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Informasi-Pemegang-Saham.aspx> the explanation that: "PT PLN (Persero) is the majority and controlling shareholder of PLN Indonesia Power with 99.99% ownership consisting of 1 share of Series 1 and 357,165,633,598 shares of Series 2. The majority and controlling shareholder is represented by the President Director of PT PLN (Persero), while technically the relationship with shareholders is managed under the Corporate Secretary of PT PLN (Persero). The other shareholder is YPK PLN with 0.01% ownership. Series 1 shares are shares with special rights to nominate members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to be appointed by the General Meeting of Shareholders, whereas Series 2 shares are ordinary shares."

Kepatuhan terhadap Prinsip GCG dan Tidak Terlibat dalam Praktik *Bad Corporate Governance*

Compliance with GCG Principles and Non-Involvement in Bad Corporate Governance Practices

PLN Indonesia Power menegaskan komitmennya dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas usaha. Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dalam setiap aspek operasional dan manajerialnya. Sebagai bagian dari komitmen ini, PLN Indonesia Power memastikan bahwa seluruh jajaran manajemen dan karyawan memahami serta menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan, yang secara khusus tercermin dalam uraian pada laporan tahunan ini.

PLN Indonesia Power reaffirms its commitment to upholding the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the foundation for all decision-making processes and business activities. The Company consistently prioritizes transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in every aspect of its operations and management. As part of this commitment, PLN Indonesia Power ensures that all levels of management and employees understand and implement GCG principles in a consistent and sustainable manner, as reflected throughout this Annual Report.



Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

Statement of the Board of Commissioners and Board of Directors

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan beserta seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi tidak terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip GCG atau yang tergolong sebagai *bad corporate governance*. Komitmen ini diwujudkan melalui kepatuhan yang konsisten terhadap peraturan perundang-undangan, pemenuhan seluruh kewajiban hukum dan administratif, serta penerapan etika bisnis yang tinggi di seluruh lini organisasi. PLN Indonesia Power tidak tercatat melakukan pelanggaran terhadap aspek lingkungan hidup, kewajiban perpajakan, hak-hak tenaga kerja, maupun pelaporan keuangan. Selain itu, hingga laporan ini disusun, Perusahaan tidak pernah menerima sanksi administratif maupun material dari regulator.

Pernyataan ini menjadi wujud nyata dari upaya Perusahaan dalam membangun dan mempertahankan reputasi sebagai entitas bisnis yang kredibel, akuntabel, dan berintegritas tinggi, serta sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan terhadap standar nasional maupun internasional.

Throughout 2024, the Company along with all members of the Board of Commissioners and Board of Directors were not involved in any practices that contradict GCG principles or qualify as bad corporate governance. This commitment is manifested through consistent compliance with laws and regulations, fulfillment of all legal and administrative obligations, and the application of high business ethics across all organizational levels. PLN Indonesia Power has not been recorded to violate environmental aspects, tax obligations, labor rights, or financial reporting. In addition, up to the preparation of this report, the Company never received any administrative or material sanctions from regulators.

This statement reflects the Company's concrete efforts to build and maintain a reputation as a credible, accountable, and highly integrity-driven business entity, in line with the principles of sustainability and compliance with both national and international standards.

Iskandar Simorangkir

Pelaksana Tugas Komisaris Utama
merangkap Komisaris Independen
Acting President Commissioner
concurrently Independent Commissioner

Edwin Nugraha Putra

Direktur Utama
President Director



PLTA TES, UBP Bengkulu
TES HPP, Bengkulu GBU



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environment Responsibility



Strategi Keberlanjutan Melalui Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sustainability Strategy through the Implementation of Social and Environmental Responsibility

Misi PLN Indonesia Power untuk menyediakan solusi energi hijau, inovatif dan terjangkau yang melampaui harapan pelanggan merupakan manifestasi komitmen keberlanjutan yang termaktub dalam visi menjadi perusahaan listrik global berkinerja terbaik dan berkelanjutan di tahun 2028.

PLN Indonesia Power's mission to provide green, innovative, and affordable energy solutions beyond customer expectations is the manifestation of sustainability commitment set out in the vision of becoming the best performing and sustainable global electricity company in 2028.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup terus mengalami peningkatan, seiring dengan semakin nyata dan mendesaknya dampak perubahan iklim terhadap kehidupan manusia. Perubahan iklim tidak lagi menjadi isu semata, melainkan telah menyentuh berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari bencana alam yang makin sering terjadi hingga gangguan terhadap ketahanan pangan dan kesehatan. Dalam menghadapi tantangan global ini, muncul dorongan yang kuat untuk beralih dari penggunaan energi fosil menuju pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan.

Salah satu langkah strategis yang kini menjadi fokus banyak negara, termasuk Indonesia, adalah percepatan transisi energi. Transisi ini mencakup pergeseran sistem energi dari sumber yang tidak terbarukan dan bersifat polutif, menuju sistem yang mengedepankan keberlanjutan dan emisi karbon rendah. Dalam konteks ini, sektor ketenagalistrikan memainkan peran yang sangat vital. Hal ini disebabkan oleh dominannya peran energi listrik dalam menopang berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, transportasi, industri, hingga layanan publik.

Oleh karena itu, transformasi dalam industri ketenagalistrikan baik dari sisi pembangkitan, distribusi, maupun konsumsi menjadi kunci utama dalam mendukung suksesnya agenda transisi energi. Pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan biomassa, serta peningkatan efisiensi energi dan digitalisasi sistem kelistrikan, menjadi langkah-langkah konkret yang perlu terus didorong agar target netralitas karbon dapat tercapai secara berkelanjutan.

Public awareness on the importance of preserving environment continues to increase, along with the more apparent and urgent impact of climate change on human life. Climate change is not solely an issue anymore, but rather affects various aspects of daily life, from more frequent natural disasters to disruptions in food security and health. In facing this global challenge, a strong drive has emerged to shift from the use of fossil fuels to the use of clean and environmentally friendly energy.

One strategic step currently being the focus of many countries, including Indonesia, is the acceleration of energy transition. This transition includes shifting the energy system from non-renewable and polluting sources, to a system prioritizing sustainability and low carbon emissions. In this context, electricity sector plays a very vital role. This is due to the dominant role of electricity in supporting various sectors of people's lives, from household needs, transportation, industry, to public services.

Therefore, transformation in electricity industry, including in terms of generation, distribution, and consumption, is the main key to supporting the success of energy transition agenda. Renewable energy development, such as solar, wind, water, and biomass, as well as increased energy efficiency and electricity system digitalization are concrete steps that require continuous support in order to achieve the carbon neutrality target in a sustainable manner.



PLN Indonesia Power menjabarkan kata berkelanjutan (*Sustainable*) dengan menjalankan bisnis sesuai kerangka *Environmental, Social and Governance* (ESG) guna mendukung transisi energi, serta memiliki portfolio bisnis yang bertumbuh, baik secara nasional maupun global. Dengan demikian, PLN Indonesia Power menetapkan tujuan strategis untuk mencapai keberlanjutan pembangkit Perusahaan melalui dekarbonisasi dan penurunan ESG *risk rating*. Dengan ditetapkannya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2024 – 2028 menandakan babak baru transformasi PLN Indonesia Power dalam mendukung suksesnya agenda transisi energi, penurunan emisi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

PLN Indonesia Power describes the word sustainable by running business according to Environmental, Social, and Governance (ESG) framework to support energy transition, as well as by growing its business portfolio, both nationally and globally. Thus, PLN Indonesia Power sets strategic goals to achieve the sustainability of the Company's power plants through decarbonization and lowering the ESG risk rating. The establishment of the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2024 – 2028 marks a new chapter in PLN Indonesia Power's transformation in supporting the success of energy transition agenda, reducing emissions, and adapting to the impacts of climate change.

Landasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Foundation for Social and Environmental Responsibility Implementation

Pelaksanaan tanggung jawab sosial di lingkungan PLN Indonesia Power didasarkan pada kerangka hukum nasional yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya Pasal 74 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban bagi entitas bisnis yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keberlanjutan kegiatan usahanya.

Social responsibility within PLN Indonesia Power is implemented based on a strong national legal framework, namely Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (UUPT), particularly Article 74 and Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility (TJSL), and is strengthened by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises. The regulation emphasizes the obligation for business entities that operate their businesses in the field of and/or related to natural resources to implement social responsibility programs as part of sustainability of their business activities.

PLN Indonesia Power juga telah mengembangkan pedoman internal sebagai wujud komitmen Perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan. Pedoman ini dirancang dengan mengacu pada standar internasional, yaitu ISO 26000 tentang *Guidance on Social Responsibility*, yang memberikan kerangka kerja menyeluruh mengenai pelaksanaan TJSL secara sistematis, etis, dan terintegrasi. Implementasi TJSL di lingkungan PLN Indonesia Power diformalkan melalui sejumlah Keputusan Direksi, yang secara bertahap membentuk sistem pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang terstruktur. Beberapa di antaranya sebagai berikut:

- Keputusan Direksi Nomor 26.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan InPower Care,

PLN Indonesia Power has also developed internal guidelines as the manifestation of the Company's commitment to sustainability principle. These guidelines are designed by referring to international standards, namely ISO 26000 on Guidance on Social Responsibility, which provides a comprehensive framework for implementing TJSL in a systematic, ethical, and integrated manner. The implementation of TJSL within PLN Indonesia Power is formalized through a number of Board of Directors' Decisions, which gradually form a structured system for implementing the Company's social and environmental responsibilities. Some of them are as follows:

- Board of Directors' Decision No. 26.K/010/IP/2014 on the Guidelines for InPower Care Implementation,

- Keputusan Direksi Nomor 249.K/010/IP/2015 tentang Pedoman *Green Power Plant*,
- Keputusan Direksi Nomor 211.K/010/IP/2016 mengenai Komitmen Menjaga Ekosistem dan Pelestarian Lingkungan dalam Menjaga Keberlanjutan Planet,
- Keputusan Direksi Nomor 180.K/010/IP/2018 tentang Komitmen *Community Development* melalui Program Inspirasi Perempuan,
- Keputusan Direksi Nomor 56.K/010/IP/2019 tentang Pengelolaan Program Unggulan *Community Development*,
- Keputusan Direksi Nomor 24.K/010/IP/2022 tentang Pedoman *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbasis ISO 26000:2013 Direksi PT Indonesia Power,
- Peraturan Direksi Nomor 0043.P/DIR/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN Indonesia Power,
- Edaran Direksi Nomor 46.E/012/IP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bakti Pelayanan Masyarakat dalam Program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Masyarakat di Lingkungan PT Indonesia Power, dan
- Edaran Direksi Nomor 7.E/012/IP/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Perusahaan.
- Board of Directors' Decision No. 249.K/010/IP/2015 on the Guidelines for Green Power Plant,
- Board of Directors' Decision No. 211.K/010/IP/2016 on Commitment to Preserving Ecosystem and Environment to Maintain the Planet's Sustainability,
- Board of Directors' Decision No. 180.K/010/IP/2018 on Community Development Commitment through Women's Inspiration Program,
- Board of Directors' Decision No. 56.K/010/IP/2019 on Management of the Community Development Flagship Program,
- Board of Directors' Decision No. 24.K/010/IP/2022 on ISO 26000:2013-based Corporate Social Responsibility (CSR) Guidelines of PT Indonesia Power Board of Directors,
- Board of Directors' Regulation No. 0043.P/DIR/2024 on the Guidelines for the Implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) of PT PLN Indonesia Power,
- Board of Directors' Circular No. 46.E/012/IP/2013 on the Guidelines for Community Assistance in the Community Education Assistance Program within PT Indonesia Power, and
- Board of Directors' Circular No. 7.E/012/IP/2014 on the Guidelines for the Implementation of Corporate Social Assistance.

Seluruh kebijakan tersebut mencerminkan kesungguhan PLN Indonesia Power dalam mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan ke dalam strategi korporasi, serta menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan di sekitar wilayah kerja Perusahaan.

All these policies reflect PLN Indonesia Power's seriousness in integrating social and environmental aspects into corporate strategies, as well as becoming the operational basis for implementing various community empowerment, environmental preservation, and sustainable development programs around the Company's work areas.

Perumusan Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Formulation of the Scope of Social and Environmental Responsibility

Aspek keberlanjutan (*sustainability*) telah menjadi pilar utama dalam proses perumusan kebijakan serta program strategis di lingkungan PLN Indonesia Power. Perusahaan secara aktif mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap tahapan perencanaan jangka panjangnya, dengan melakukan pemetaan isu-isu strategis yang relevan terhadap dinamika bisnis dan lingkungan eksternal. Selain itu, mekanisme evaluasi berkala terhadap rencana strategis juga diterapkan guna memastikan kesesuaian dan efektivitas kebijakan yang diambil terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan jangka panjang.

The sustainability aspect has become a main pillar in the process of formulating policies and strategic programs in PLN Indonesia Power. The Company actively integrates sustainability principles in every stage of its long-term planning, by mapping strategic issues that are relevant to business dynamics and the external environment. In addition, a periodic evaluation mechanism for strategic plans is also implemented to ensure the suitability and effectiveness of the policies taken towards achieving long-term sustainability goals.



Salah satu komponen penting dalam strategi keberlanjutan tersebut adalah implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang tidak hanya merupakan kewajiban yuridis, tetapi juga bagian integral dari strategi bisnis perusahaan. Perumusan lingkup TJSL di PLN Indonesia Power dirancang agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kinerja perusahaan secara holistik, mencakup pilar utama keberlanjutan yaitu pilar lingkungan (*environmental*), pilar sosial (*social*), pilar ekonomi (*economic*) serta pilar hukum dan tata kelola (*governance*). Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah tidak hanya bagi pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lebih luas, termasuk pekerja, pelanggan, mitra kerja (*vendor*), masyarakat sekitar, serta negara sebagai entitas regulator dan penerima manfaat. Dalam merumuskan arah kebijakan TJSL, PLN Indonesia Power mengadopsi pendekatan 5P *Sustainability Framework*, yang terdiri dari lima prinsip dasar yang mencakup keseimbangan kehidupan sosial (*people*); kelestarian lingkungan (*planet*); kemakmuran atau kemandirian ekonomi (*prosperity*); kedamaian atau kerukunan (*peace*) dan kemitraan (*partnership*).

One important component in sustainability strategy is the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL), which is not only a legal obligation, but also an integral part of the Company's business strategy. The formulation of TJSL scope in PLN Indonesia Power is designed to provide concrete contribution to improving the Company's performance holistically, covering the main pillars of sustainability, namely the environmental pillar, social pillar, economic pillar, and legal and governance pillar. This approach aims to create added value not only for shareholders, but also for wider stakeholders, including workers, customers, partners (vendors), surrounding communities, and the state as a regulatory entity and beneficiary. In formulating the direction of TJSL policy, PLN Indonesia Power adopted the 5P Sustainability Framework approach, which consists of five basic principles covering the people; planet; prosperity; peace, and partnership.



People

Komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan pada masyarakat sekitar pembangkit atau unit Kerja melalui program IPPintar, SehatIP, Hijaunesiapower, IPreneur, Inspirasi Perempuan, dan AdIPertiwi.
A commitment to social and environmental responsibility to the community around the power plants or work units through IPPintar, SehatIP, Hijaunesiapower, IPreneur, Inspirasi Perempuan, and AdIPertiwi programs.



Planet

Komitmen menjaga ekosistem lingkungan melalui program pemenuhan ketaatan aturan lingkungan (PROPER), G090, Hijaunesia Power dan Kawan Hijaunesia Power.
A commitment to preserving environmental ecosystem through the compliance with the environmental regulations (PROPER), G090, Hijaunesia Power, and Kawan Hijaunesia Power.



Prosperity

Komitmen untuk menciptakan kemakmuran atau kemandirian ekonomi masyarakat sekitar pembangkit atau unit kerja melalui kegiatan *community empowerment* dengan program IPreneur dan Inspirasi Perempuan.
A commitment to creating prosperity or economic well-being of the community around the power plants or work units through community empowerment programs, namely IPreneur and Inspirasi Perempuan.



Peace

Komitmen untuk menciptakan kedamaian atau kerukunan dengan masyarakat sekitar pembangkit atau unit kerja melalui kegiatan *community relation* (komunikasi sosial, forum warga, partisipasi hari besar keagamaan dan nasional, dan partisipasi kegiatan masyarakat).
A commitment to keeping the peace or harmony with the community around the power plants or work units through community relations activities (social communication, community forum, participation in religious and national holidays, and contribution to the participation in community activities).



Partnership

Komitmen untuk menjalankan program CSR yang berbasis kemitraan antara perusahaan, pemerintah, swasta dan masyarakat.
A commitment to executing partnership-based CSR programs between the Company, government, private sector, and community.

Dukungan Terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) Support to Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kerangka kolektif untuk menciptakan perdamaian, kesejahteraan umat manusia, serta menjaga keberlangsungan planet bumi. Agenda ini terdiri dari 17 tujuan utama dan 169 target yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang ditetapkan untuk dicapai secara global hingga tahun 2030. SDGs tidak hanya ditujukan bagi pemerintah, tetapi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk sektor swasta, dalam mewujudkan pembangunan yang

Sustainable Development Goals (SDGs) are global development agenda initiated by the United Nations (UN) as a collective framework to keep the peace, human welfare, and maintain the sustainability of planet earth. This agenda consists of 17 main goals and 169 targets covering social, economic, and environmental aspects, set to be achieved globally by 2030. The SDGs are not only intended for the government, but also emphasize the importance of cross-sector collaboration, including private sector, in realizing inclusive and sustainable development. The Indonesian government actively participates in this global agenda and has integrated the SDGs into national development plan.



inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam agenda global ini dan telah mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah juga mendorong dunia usaha untuk memainkan peran strategis dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab.

PLN Indonesia Power, sebagai entitas anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT PLN (Persero), memiliki posisi strategis dalam menjalankan peran sebagai *agent of development*. Dalam konteks tersebut, PLN Indonesia Power menegaskan komitmennya terhadap implementasi SDGs sebagai bagian dari strategi keberlanjutan Perusahaan. Komitmen ini tidak hanya tercermin melalui kebijakan internal Perusahaan, tetapi juga melalui kemitraan aktif dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung agenda pembangunan lokal yang selaras dengan tujuan global.

Perusahaan juga mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen ekosistem bisnisnya, termasuk pegawai, pemasok, dan mitra strategis lainnya, untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan operasional masing-masing. Pendekatan ini dilakukan secara adaptif dan proporsional, dengan mempertimbangkan kapasitas, relevansi, serta dampak yang dapat dihasilkan oleh setiap pihak terhadap pencapaian SDGs. Prinsip-prinsip SDGs telah diadopsi sebagai salah satu landasan utama dalam perumusan kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di PLN Indonesia Power. Dengan mengintegrasikan SDGs ke dalam strategi keberlanjutan perusahaan, PLN Indonesia Power berupaya menciptakan nilai bersama (*shared value*) yang tidak hanya memperkuat kinerja bisnis jangka panjang, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

As part of this effort, the government also encourages the business world to play a strategic role in supporting the achievement of sustainable development targets through responsible business practices.

PLN Indonesia Power, as a subsidiary of the State-Owned Enterprise (SOE) PT PLN (Persero), has a strategic position in carrying out its role as an agent of development. In this context, PLN Indonesia Power affirms its commitment to implementing SDGs as part of the Company's sustainability strategy. This commitment is not only reflected through the Company's internal policies, but also through active partnerships with local governments, civil society organizations, and other stakeholders in supporting local development agendas that are aligned with global goals.

The Company also encourages active participation from all elements of its business ecosystem, including employees, suppliers, and other strategic partners, to integrate sustainability principles into their respective operational activities. This approach is carried out adaptively and proportionally, by considering capacity, relevance, and impact that each party can generate towards achieving the SDGs. The SDGs principles are adopted as one of the main foundations in formulating Social and Environmental Responsibility (TJSL) policy at PLN Indonesia Power. By integrating the SDGs into the Company's sustainability strategy, PLN Indonesia Power seeks to create shared value that not only strengthens long-term business performance, but also provides concrete contribution to community development and sustainable environmental preservation.

Visi Misi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Vision and Missions of Social and Environmental Responsibility

Visi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Vision of Corporate Social and Environmental Responsibility

“Bersahabat dengan lingkungan dan menjadikan tanggung jawab sosial Perusahaan sebagai bagian dari tata kelola Perusahaan yang baik”.

“To be environmentally friendly and view corporate social responsibility as a part of good corporate governance”.

Misi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Missions of Corporate Social and Environmental Responsibility

1. Meningkatkan reputasi Perusahaan di kalangan pemangku kepentingan.
2. Membangun sinergi Perusahaan dengan pemangku kepentingan untuk keberlanjutan Operasional Perusahaan.
3. Berkontribusi dalam meningkatkan kualitas Pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui potensi yang dimiliki sesuai kemampuan Perusahaan.
5. Berkontribusi dalam pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan.

1. Improving the Company's reputation among stakeholders.
2. Building synergy between the Company and stakeholders for the sustainability of the Company's operations.
3. Contributing to improving the quality of education.
4. Improving community's quality of life through their existing potential in accordance with the Company's abilities.
5. Contributing to achieve sustainable development goals.

Perumusan Strategi dan Program Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Formulation of Corporate Social and Environmental Responsibility Strategy and Work Program

Dalam rangka mendukung pencapaian visi keberlanjutan Perusahaan, PLN Indonesia Power merumuskan strategi dan program kerja TJSL yang terarah, terukur, dan selaras dengan RJPP. Perumusan strategi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan TJSL tidak hanya bersifat simbolik atau seremonial, melainkan mampu menghasilkan dampak nyata yang berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Langkah fundamental yang harus ditempuh adalah pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Uji tuntas ini berfungsi sebagai

To support the achievement of the Company's sustainability vision, PLN Indonesia Power formulates TJSL strategy and work program that is focused, measurable, and in line with RJPP. The formulation of this strategy aims to ensure that TJSL implementation is not only symbolic or ceremonial, but is also able to produce concrete, sustainable impacts for the community, environment, and other stakeholders.

The fundamental step that must be taken is the implementation of due diligence on social and environmental responsibility. This due diligence functions as an evaluative and preventive

instrumen evaluatif dan preventif dalam mengidentifikasi serta menilai potensi risiko sosial dan lingkungan yang mungkin timbul dari aktivitas operasional Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan pendekatan ini, Perusahaan dapat merancang program mitigasi dan strategi intervensi yang tepat guna mencegah terjadinya dampak negatif serta mengoptimalkan manfaat positif dari operasional Perusahaan. Metode dan lingkup uji tuntas terhadap dampak dari aktivitas operasional Perusahaan antara lain:

1. Menetapkan dan meninjau secara berkala kebijakan tanggung jawab sosial Perusahaan terkait dampak dari kegiatan operasional yang dijalankan Perusahaan.
2. Melakukan kajian Pemetaan Sosial dan Pemangku Kepentingan (*Social and Stakeholder Mapping*) untuk mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang terdampak ataupun memberi dampak bagi operasi Perusahaan dari segi sosial, ekonomi dan Lingkungan; mengetahui hubungan/derajat hubungan antar stakeholder; mengetahui potensi serta masalah yang ada sehingga program yang akan dilaksanakan tepat sasaran sesuai ekspektasi para stakeholder dan menyusun rencana program CSR.
3. Mengintegrasikan pengelolaan dampak tersebut ke dalam budaya Perusahaan dan sistem manajemen dengan melibatkan dan membangun kesadaran kepada masing-masing individu pada setiap level jabatan yang ada di Perusahaan mulai dari Direksi sebagai manajemen puncak serta Dewan Komisaris sebagai pelaksana fungsi pengawasan akan pentingnya pengelolaan dampak risiko dari aktivitas Perusahaan.
4. Menetapkan indikator kinerja, melaporkan kinerja pelaksanaan, serta mengevaluasi indikator dan capaian kinerja tanggung jawab sosial Perusahaan.

Selain itu, PLN Indonesia Power juga menyiapkan mekanisme penanganan keluhan (*grievance mechanism*) yang bersifat responsif, transparan, dan partisipatif. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap isu atau pengaduan yang muncul dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya dapat ditangani secara adil dan efektif. Dengan adanya sistem penanganan keluhan yang terstruktur, Perusahaan dapat membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya.

instrument in identifying and assessing potential social and environmental risks that may arise from the Company's operational activities, both directly and indirectly. With this approach, the Company can design appropriate mitigation programs and intervention strategies to prevent negative impacts and optimize the positive benefits of the Company's operations. The methods and scope of due diligence on the impacts of the Company's operational activities include:

1. Establishing and periodically reviewing the Company's social responsibility policies related to the impacts of the Company operations.
2. Reviewing Social and Stakeholder Mapping to identify stakeholders affected by or affecting Company operations in social, economic, and environmental aspects; recognizing the correlation/relationship degree between stakeholders; acknowledging existing potentials and issues so that the programs to be implemented are executed accurately according to stakeholder expectation, and preparing CSR programs.
3. Integrating impact management with Corporate culture and management system by involving and establishing awareness of each individual at every position in the Company starting from the Board of Directors as top management and the Board of Commissioners as the supervisory function executor of the importance of managing risk impact on the Company's activities.
4. Setting out performance indicators, reporting implementation performance, and evaluating Corporate social responsibility indicators and performance achievement.

Furthermore, PLN Indonesia Power also prepares a responsive, transparent, and participatory complaint handling mechanism. This mechanism is designed to ensure that any issues or complaints that arise from the community or other stakeholders can be handled fairly and effectively. With a structured complaint handling system, the Company can build public confidence while increasing accountability in implementing its social responsibilities.

Strategi dan Program Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Corporate Social and Environmental Responsibility Strategy and Work Program

PLN Indonesia Power merancang strategi dan program kerja TJSL dengan mengacu pada prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan, kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), visi dan misi Perusahaan, hasil pemetaan sosial, serta temuan dari survei persepsi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan Perusahaan untuk mengembangkan kebijakan TJSL yang berbasis data, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam proses perumusannya, PLN Indonesia Power secara aktif melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui mekanisme dialog dan konsultasi yang terbuka dan partisipatif. Pelibatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi keberlanjutan yang dirancang mencerminkan aspirasi bersama serta memperkuat legitimasi sosial perusahaan di wilayah operasionalnya. Dengan demikian, TJSL tidak hanya menjadi kewajiban korporasi, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan.

PLN Indonesia Power designs TJSL strategies and work programs by referring to the principles of social and environmental responsibility, the Sustainable Development Goals (SDGs) framework, the Company's vision and mission, social mapping results, and findings from community perception surveys. This approach allows the Company to develop TJSL policies that are data-based, contextual, and relevant to the needs of the community and stakeholders. In the formulation process, PLN Indonesia Power actively involves stakeholders through open and participatory dialogue and consultation mechanisms. This involvement aims to ensure that the sustainability strategy designed reflects shared aspirations and strengthens the company's social legitimacy in its operational areas. Thus, TJSL is not only a corporate obligation, but also a strategic instrument in building harmonious and sustainable relationships with all stakeholders.

Sustainability Roadmap

Sustainability Roadmap

**Tahun Pencapaian
2028**
Achievement Year
2028

**Tahun Percepatan
2027**
Acceleration Year
2027

**Tahun Pemenuhan
Awal 2026**
Early Fulfillment Year
2026

**Tahun Persiapan
2025**
Preparation Year
2025

**Tahun Baseline
2024**
Baseline Year 2024

Seluruh infrastruktur yang menjadi syarat keharusan & syarat kecukupan mulai diinisiasi & dilengkapi
All infrastructure that is a mandatory requirement and sufficient requirement is initiated and completed

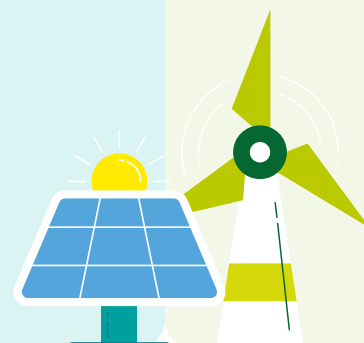
Seluruh syarat keharusan & syarat kecukupan terpenuhi di akhir tahun, dan beberapa program inti kegiatan mulai diinisiasi & dipenuhi
All mandatory requirements and sufficient requirement are fulfilled by the end of the year, and several core activity programs are initiated and fulfilled

Beberapa program inti mulai terpenuhi, sebagian yang baru lainnya juga mulai diinisiasi, *Engagement* dengan ESG Rating diawasi untuk persiapan *rating* di akhir tahun.

Several core programs are fulfilled, some other new ones are also initiated. Engagement with ESG rating is explored in preparation for rating at the end of the year

Perbaikan yang berkelanjutan untuk semua program inti & pengembangannya terjadi peningkatan hasil ESG Rating Continuous improvement for all core programs and their development. There is an increase in ESG rating results

Perbaikan untuk semua program ini tetap dilaksanakan hasil ESG Rating terbaik (*Low Risk*) paling lambat bisa tercapai
Improvement for all these programs is still being implemented. The best ESG rating results (low risk) can be achieved at the latest



Sustainability Commitment

Sustainability Commitment



Visi Vision

Menjadi Perusahaan Listrik Global Berkinerja Terbaik dan Berkelanjutan
To be a Global Top Performance and Sustainable Power Company

Misi Mission

Menyediakan solusi energi hijau, inovatif, dan terjangkau yang melampaui harapan pelanggan
Delivering green, innovative, and affordable energy solutions, that goes beyond customer expectation

STRATEGIC RESULTS

Performance Excellence & Cost Leadership

Global Innovative Growth

Sustainable Power Generation

STRATEGIC THEMES

Operation & Maintenance Excellence (OME)

Low-carbon Energy Development (LCE)

Beyond KWH Business Development (BBD)



Community Assistance

1. Bantuan Sarana dan Prasarana
2. Bantuan Pelayanan Kesehatan
3. Bantuan Pelayanan Pendidikan
4. Bantuan Bencana Alam
1. Facilities and Infrastructure Assistance
2. Health Service Assistance
3. Education Service Assistance
4. Natural Disaster Relief

Community Relation

1. Komunikasi Sosial
2. Partisipasi Peringatan Hari Besar
3. Partisipasi Kegiatan Masyarakat
1. Social Communication
2. Participation in National Holiday Commemoration
3. Participation in Community Activities

Community Empowerment

1. Bantuan Pengembangan modal usaha
2. Bantuan Peningkatan Keterampilan
3. Bantuan Pemasaran Produk
4. Riset dan Pengembangan
1. Business Capital Development Assistance
2. Skill Development Assistance
3. Product Marketing Assistance
4. Research and Development



Tata Nilai: AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), GCG, ISO 26000, dan Kebijakan Perundangan

Values: AKHLAK (Amanah), (Trustworthy), Kompeten (Competent), Harmonis (Harmonious), Loyal, Adaptif (Adaptable), Kolaboratif (Collaborative), GCG, ISO 26000, and Laws and Policies

Tahapan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Stages of Implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility

Penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) semakin menjadi fokus utama dalam praktik bisnis dan tata kelola korporasi modern. Dalam konteks ini, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL tidak lagi dipandang sebagai aktivitas filantropis semata, melainkan sebagai bagian integral dari strategi keberlanjutan perusahaan yang bersifat sistematis dan terukur.

TJSL berperan penting dalam mewujudkan aspek environmental dan social dari pilar ESG. Pada dimensi lingkungan, implementasi TJSL mencakup berbagai inisiatif untuk mengurangi dampak ekologis perusahaan, seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta konservasi sumber daya alam. Sementara itu, pada dimensi sosial, pelaksanaan TJSL tercermin melalui upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Strategi dan program kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan diimplementasi melalui beberapa tahapan mulai dari perumusan, penetapan dan peninjauan kembali kebijakan; *baseline study*; serta penyusunan rencana, implementasi, *monitoring*, evaluasi Program sebagai berikut:

The implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles is increasingly becoming a major focus in modern business practices and corporate governance. In this context, the implementation of TJSL's social and environmental responsibilities is no longer seen as merely a philanthropic activity, but rather as an integral part of the company's sustainability strategy that is systematic and measurable.

TJSL plays an important role in realizing environmental and social aspects of the ESG pillar. In environmental dimension, TJSL implementation includes various initiatives to reduce the company's ecological impact, such as energy efficiency, waste management, and natural resource conservation. Meanwhile, in social dimension, TJSL implementation is reflected through efforts to improve the quality of life of communities around the company's operational areas, empowering the local economy, and protecting labor rights. The strategy and work program for social and environmental responsibility are implemented through several stages starting from the formulation, determination, and review of policies; baseline study; and the preparation of plans, implementation, monitoring, and evaluation of the Program as follows:

Tahapan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Stages of Implementation of Social and Environmental Responsibility



Pelaksanaan TJSL secara konsisten menunjukkan komitmen Perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang, tidak hanya bagi pemegang saham tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, integrasi TJSL ke dalam kerangka ESG menjadi instrumen strategis dalam membangun reputasi Perusahaan, memperkuat daya saing, serta memastikan keberlanjutan bisnis di tengah meningkatnya tuntutan akan akuntabilitas dan kepedulian terhadap isu-isu lingkungan dan sosial.

The consistent implementation of TJSL demonstrates the Company's commitment to creating long-term value, not only for shareholders but also for all stakeholders. Thus, the integration of TJSL into ESG framework becomes a strategic instrument in building the company's reputation, strengthening competitiveness, and ensuring business sustainability amidst increasing demands for accountability and concern for environmental and social issues.

Tata Kelola Keberlanjutan

Sustainability Governance

Tata kelola keberlanjutan (*sustainability governance*) merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan visi bisnis jangka panjang, terutama dalam konteks meningkatnya kesadaran global terhadap isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Konsep ini mencerminkan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam struktur, kebijakan, dan mekanisme pengambilan keputusan perusahaan, sehingga setiap aktivitas bisnis tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, dan tata kelola yang etis. Dengan mengadopsi standar dan kerangka global seperti GRI, ISO 26000, ISO 37000, dan ESG *metrics*, PLN Indonesia Power menegaskan posisinya sebagai perusahaan energi yang tidak hanya unggul dalam operasional bisnis, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta berkomitmen pada prinsip keberlanjutan jangka panjang.

PLN Indonesia Power mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja keberlanjutan yang menyeluruh. Melalui indikator yang berbasis ESG dan GRI *Standards*, Perusahaan secara periodik mengevaluasi efektivitas program dan inisiatif keberlanjutan serta mengidentifikasi ruang perbaikan. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan secara terbuka dalam Laporan Keberlanjutan tahunan yang ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan, sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Sustainability governance is a fundamental element in realizing long-term business vision, especially in increasing global awareness of environmental, social, and governance issues. This concept reflects the integration of sustainability principles into the Company's structure, policies, and decision-making mechanisms, so that every business activity not only generates economic value, but also provides concrete contribution to environmental preservation, social welfare, and ethical governance. By adopting global standards and frameworks such as GRI, ISO 26000, ISO 37000, and ESG metrics, PLN Indonesia Power confirms its position as an energy company that not only excels in business operations, but is also socially and environmentally responsible, and is committed to the principles of long-term sustainability.

PLN Indonesia Power develops a comprehensive sustainability performance monitoring and evaluation system. Through indicators based on ESG and GRI Standards, the Company periodically evaluates the effectiveness of sustainability programs and initiatives and identifies room for improvement. The evaluation results are reported openly in the annual Sustainability Report addressed to all stakeholders, as a form of responsibility and commitment to transparent and accountable governance.

Penanggung jawab Penerapan Program Keberlanjutan

Party in Charge of Sustainability Program Implementation

Merujuk pada kerangka standar internasional seperti ISO 37000:2021 – *Governance of Organizations*, tata kelola keberlanjutan didefinisikan sebagai sistem kepemimpinan dan pengendalian organisasi yang menjamin akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk yang berkaitan dengan isu keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penanggung jawab program yang berperan sebagai pemimpin dalam mempromosikan budaya keberlanjutan di seluruh organisasi, serta dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pelanggan, investor, mitra bisnis, dan masyarakat luas. Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Sehingga Direksi yang dipimpin Direktur Utama bertanggung jawab secara kolegal pada pencapaian kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial.

Pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan Direksi kepada Eksekutif Senior terkait dengan aspek keberlanjutan dalam kegiatan operasional Perusahaan. Kemudian, Eksekutif senior yang dimaksud dapat melakukan pendelegasian kembali kepada Perusahaan di bawahnya, sehingga unit-unit dimaksud bertanggung jawab secara langsung kepada atasannya termasuk pada Direksi. Adapun Divisi/Departemen khusus yang dimiliki PLN Indonesia Power untuk menangani isu-isu terkait topik ekonomi, lingkungan dan sosial diantaranya yaitu Direktorat Sumber Daya Manusia dan Administrasi; *Division of Health, Safety and Environment*; Bidang *Corporate Communication and CSR* yang berada dibawah Sekretariat Perusahaan, dan Bidang *Corporate Planning and Sustainability*.

Program tanggung jawab sosial Perusahaan yang juga menyentuh isu-isu terkait aspek ekonomi dan lingkungan dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan Unit Bisnis Pembangkitan serta Unit Bisnis Pemeliharaan. Di Kantor Pusat, program tanggung jawab sosial Perusahaan dikelola oleh Bidang *Corporate Communication and CSR* yang berada dibawah Sekretariat Perusahaan, sedangkan di Unit Bisnis Pembangkitan dan Unit Bisnis Pemeliharaan dikelola oleh Bidang Administrasi, Keuangan dan Umum serta Bidang SDM dan Humas. Selain itu, terdapat Komite

Referring to the international standard framework such as ISO 37000:2021 – *Governance of Organizations*, sustainability governance is defined as an organizational leadership and control system that ensures accountability, transparency, and participation in strategic decision-making, including those related to sustainability issues. Therefore, it needs a party in charge of the program to take part as a leader in promoting sustainability culture across organizations, as well as to various stakeholders, such as customers, investors, business partners, and the wider community. The Board of Directors is authorized and fully accountable for managing the Company for the Company benefit, in accordance with the intent and purpose of the Company. Thus, the Board of Directors led by the President Director is collegially accountable for achieving economic, environmental, and social performance.

Authority in decision-making may be delegated by the Board of Directors to Senior Executives with regard to sustainability aspects in the Company operations. Then, the relevant senior executives may re-delegate the assignment to their subordinates, and therefore, the corresponding units are directly responsible to their supervisors, including the Board of Directors. The specific Divisions/Departments of PLN Indonesia Power to handle issues related to economic, environmental, and social topics include the Directorate of Human Capital and Administration; Division of Health, Safety, and Environment; Corporate Communication and CSR Division under the Corporate Secretary, and Corporate Planning and Sustainability Division.

The Corporate Social Responsibility program also affects the issues related to economic and environmental aspects implemented by the Head Office and Generation Business Unit as well as Maintenance Business Unit. At the Head Office, the Corporate Social Responsibility program is managed by the Corporate Communication and CSR Division under the Corporate Secretary, while in Generation Business Unit and Maintenance Business Unit, it is managed by the Administration, Finance, and General Affairs Division and Human Capital and Public Relations Division. Furthermore, the

CSR yang bertindak sebagai koordinator setiap subyek inti dalam ISO 26000 yang meliputi tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, Lingkungan, praktek operasi yang adil, isu-isu konsumen serta pelibatan dan pengembangan komunitas. Pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan PLN Indonesia Power melibatkan setiap level organisasi di lingkungan Perusahaan dan dilakukan secara terintegrasi.

Company has established CSR Committee as the coordinator of each core subject in ISO 26000 that includes organizational governance, human rights, employment, environment, fair operations, consumer issues, and community engagement and development. The CSR of PLN Indonesia Power is carried out in an integrated manner by involving each and every level of organization within the Company.

Pengembangan Kompetensi Terkait Aspek Kelanjutan

Competency Development Related to Sustainability Aspects

Perusahaan secara berkelanjutan menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan mengenai isu-isu keberlanjutan, ESG, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Upaya ini bertujuan untuk membangun budaya keberlanjutan yang terinternalisasi dalam setiap jenjang organisasi. Pada tahun 2024, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan mengikuti program pengembangan kompetensi yang menyangkut topik keberlanjutan diantaranya sebagai berikut:

The Company continuously organizes training and dissemination to employees regarding sustainability issues, ESG, and social and environmental responsibility. This effort aims to build a sustainability culture that is internalized at every level of the organization. In 2024, the Company's Board of Directors and Board of Commissioners attended competency development programs related to sustainability topics, including the following:

Program Pengembangan Kompetensi Organ Tata Kelola

Competency Development Program for Governance Organ

Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Lembaga Penyelenggara Host	Tanggal Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Pengelolaan kesehatan Health management	PT PLN (Persero)	26 Maret 2024 March 26, 2024	Jakarta
2024 <i>Global talent trends</i>	MERCER	2 April 2024 April 2, 2024	Zoom
Perhitungan dampak program pemberdayaan masyarakat dengan metode SROI (<i>Social Return on Investment</i>). Calculation of the impact of community empowerment programs by using SROI (Social Return on Investment) method.	PT PLN Indonesia Power - UNPAD	6 Agustus 2024 August 6, 2024	Zoom
<i>Joint leadership executive training : Future of energy and digital transformation.</i>	PT PLN (Persero)	26 Agustus 2024 August 26, 2024	Jakarta
Implementasi GRC & ESG mendukung Business Judgement Rule sesuai UU PT No. 40 thn 2007 & UU BUMN No. 19 thn 2003. GRC & ESG implementation supports the Business Judgement Rule in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies & Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises.	Forum Manajemen Risiko BUMN SOEs Risk Management Forum	4 - 6 Desember 2024 December 4 - 6, 2024	Bandung
Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko X. National Conference of Risk Management Professionals X.	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Risk Management Professional Certification Institute	12 - 13 Desember 2024 December 12 - 13, 2024	Bali
<i>Workshop Wakil Menteri BUMN : "SOE's Strategic Program and Risk Management for Indonesia's Future".</i> Workshop of the Deputy Minister of SOEs: "SOE's Strategic Program and Risk Management for Indonesia's Future".	Kementrian BUMN Ministry of SOEs	13 September 2024 September 13, 2024	Jakarta

Penilaian Risiko Atas Penerapan Aspek Keberlanjutan

Risk Assessment on the Implementation of Sustainability Aspect

PLN Indonesia Power secara aktif melakukan penilaian risiko terkait aspek keberlanjutan yang meliputi dampak perubahan iklim, ketidakpastian pasokan energi dan bahan baku, serta perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah. Penilaian risiko merupakan upaya untuk memahami dampak potensial dari praktik bisnis sehingga Perusahaan dapat mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan penerapan aspek keberlanjutan dalam operasi bisnis yang dijalankan, dalam rangka meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Penilaian risiko atas penerapan aspek keberlanjutan menjadi bagian dari proses manajemen risiko PLN Indonesia Power.

PLN Indonesia Power menerapkan kerangka kerja *Enterprise Risk Management* sesuai dengan *framework* ISO 31000:2018 dalam proses manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko PLN Indonesia Power tertuang dalam Peraturan Direksi No.0073.P/DIR/2023 Tentang Kebijakan Umum Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan / *Governance, Risk and Compliance* (GRC) Terintegrasi, Keputusan Direksi Nomor 138.K./010/IP/2021 tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT Indonesia Power tanggal 30 Desember 2021, Keputusan Direksi Nomor 030.K/010/IP/2019 tentang Peningkatan *Risk Awareness & Risk Culture* di Lingkungan PT Indonesia Power, serta Surat Edaran Direksi Nomor 12.E/012/IP/2021 Tentang Taksonomi Risiko PT Indonesia Power. Kebijakan manajemen risiko Perusahaan telah dilengkapi dengan Dokumen Manajemen Risiko (DMR) untuk memastikan efektivitas manajemen risiko pada masing-masing pemilik program atau pemilik proses sebagai pihak pemilik risiko (*risk owner*). DMR berisi berbagai kajian mengenai topik ekonomi, lingkungan dan sosial yakni Kajian Kelayakan Operasi, Kajian Kelayakan Lingkungan, Kajian Hukum, Kajian Kelayakan Finansial dan Kajian Risiko.

Perusahaan telah memiliki Satuan Legal, *Risk Management and Compliance* (LRC) yang secara khusus membantu Direksi dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko. Pengawasan penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dukungan dari Komite Manajemen Risiko yang bertugas melakukan peninjauan efektivitas

PLN Indonesia Power actively conducts risk assessments related to sustainability aspects including the impact of climate change, uncertainty of energy and raw material supply, and changes in government policies and regulations. Risk assessment is a means to understand the potential impacts of business practices. It is implemented to identify, mitigate, and manage risks related to the implementation of sustainability aspects in business practice to improve the success of sustainability goals. The risk assessment of sustainability aspects is part of PLN Indonesia Power's risk management process.

PLN Indonesia Power applies the Enterprise Risk Management framework in accordance with ISO 31000:2018 framework in risk management process. PLN Indonesia Power's risk management policy is stated in the Board of Directors' Regulation No. 0073.P/DIR/2023 on General Policy on the Implementation of Integrated Governance, Risk Management, and Compliance (GRC), Board of Directors' Decision No. 138.K./010/IP/2021 on General Guidelines for Integrated Risk Management of PT Indonesia Power dated December 30, 2021, Board of Directors' Decision No. 030.K/010/IP/2019 on Enhancing Risk Awareness and Risk Culture in PT Indonesia Power, and Board of Directors' Circular No. 12.E/012/IP/2021 on PT Indonesia Power's Risk Taxonomy. The Company's risk management policy has been complemented with the Risk Management Document (DMR) to ensure the effectiveness of risk management of each program or process owner as the risk owner. DMR contains various studies on economic, environmental, and social topics, namely Review on Operational Feasibility, Review on Environmental Feasibility, Review on Legal Matters, Review on Financial Feasibility, and Review on Risks.

The Company has a Legal, Risk Management, and Compliance (LRC) Unit that specifically assists the Board of Directors in managing, conducting periodic reviews, and monitoring the effectiveness of risk management process. The risk management implementation is supervised by the Board of Commissioners, assisted by Risk Management Committee which is in charge of reviewing the effectiveness of the Board

Direksi dalam mengidentifikasi, menilai dan memitigasi risiko Perusahaan yang disertai dengan pemberian nasihat kepada Direksi tentang isu-isu manajemen risiko dan kepatuhan yang potensial seperti topik ekonomi, lingkungan dan sosial.

Perusahaan menentukan risiko utama korporat berdasarkan pada sasaran, faktor internal dan eksternal serta fokus Perusahaan dan telah diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Berdasarkan hasil Identifikasi Risiko dan Analisa Evaluasi Risiko pada *Risk Register* Risiko utama korporat Tahun 2024, Perusahaan telah menetapkan pemetaan risiko setelah dilakukannya pengendalian (eksisting kontrol) dengan *Risk Mapping*. Informasi rinci mengenai manajemen risiko Perusahaan telah dijelaskan pada bagian Tata Kelola Perusahaan terkait uraian Manajemen Risiko.

of Directors in identifying, assessing, and mitigating the Company's risks, as well as advising the Board of Directors on risk management and potential compliance issues such as economic, environmental, and social topics.

The Company's key risks were determined based on the Company's goals, internal and external factors, and focus. These matters were aligned with the Company's Long-Term Plans. Based on the results of Risk Identification and Risk Evaluation Analysis on the 2024 corporate key risk on the Risk Register, the Company determined risk mapping after the existing control. The detailed information on the Company's risk management is outlined in the Risk Management part in Corporate Governance section.

Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan Stakeholder Relations

Partisipasi para pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*) merupakan pilar utama dalam tata kelola keberlanjutan perusahaan. PLN Indonesia Power melibatkan karyawan, pelanggan, mitra usaha, pemerintah, dan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan inisiatif strategis. Praktik ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam GRI, di mana isu-isu yang paling relevan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan menjadi prioritas dalam pengelolaan dan pelaporan keberlanjutan.

Stakeholder relation is a key pillar in corporate sustainability governance. PLN Indonesia Power involves employees, customers, business partners, government, and local communities in the decision-making process and formulation of strategic initiatives. This practice is in line with the materiality principle in GRI, in which issues that are most relevant to the Company and stakeholders are prioritized in sustainability management and reporting.

Kajian pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholders mapping*) dilakukan untuk mengidentifikasi kategori pemangku kepentingan yang terdampak maupun yang memberi dampak bagi operasi Perusahaan dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial. Pemetaan ini dilakukan dengan tujuan mengetahui hubungan antar pemangku kepentingan dengan Perusahaan, mengetahui potensi serta masalah yang ada sehingga program yang akan dilaksanakan tepat sasaran sesuai ekspektasi para *stakeholders* dan menyusun rencana program. Berdasarkan hasil identifikasi, PLN Indonesia Power telah mengkategorikan pemangku kepentingan ke dalam 6 (enam) kelompok, yaitu (1) Pemegang Saham; (2) Pemerintah; (3) Pegawai; (4) Pelanggan; (5) Pemasok; dan (6) Komunitas.

Review on stakeholder mapping is conducted to identify their categories into parties impacting and parties impacted by the Company operations in terms of economy, environment, and social aspects. This mapping is conducted to identify stakeholder relationship with the Company, identify actual and potential issues that hinder the program implementation as expected by the stakeholders, and plan the program accordingly. Based on the identification results, PLN Indonesia Power has categorized stakeholders into 6 (six) groups, namely (1) Shareholders; (2) Government; (3) Employees; (4) Customers; (5) Suppliers; and (6) Community.

Pelibatan Pemangku Kepentingan Perusahaan

Company Stakeholder Engagement

Kategori Pemangku Kepentingan Stakeholder Category	Pendekatan/Metode Pelibatan Engagement Approach/Method	
Pemegang Saham Shareholders	1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 2. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite. 3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. 4. Rapat <i>Performance Business Review</i> (PBR).	1. General Meeting of Shareholders (GMS). 2. Board of Commissioners' Meeting with the Committee. 3. Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors. 4. Performance Business Review (PBR) Meeting.
Pemerintah (Pusat dan Daerah) Government (Central and Regional)	1. Pelaporan terkait pengelolaan lingkungan, kepegawaian, perizinan usaha pembangkitan dan proyek. 2. Melakukan kerjasama project. 3. Sosialisasi dan diskusi ketentuan teknis pengelolaan lingkungan. 4. Audit Sistem Manajemen K3 (Internal dan Eksternal).	1. Reporting on environmental management, employment, power generation business licensing, and projects. 2. Conducting collaborative project. 3. Dissemination of and discussion about technical terms on environmental management. 4. HSE Management System Audit (Internal and External).
Pegawai Employee	1. Coffee morning. 2. Pertemuan periodik. 3. <i>Employee dan Family Gathering</i>. 4. Perayaan Hari Ulang Tahun Perusahaan. 5. Survei HRSE. 6. Simulasi Tanggap Darurat Bencana di Unit dan Kantor Pusat. 7. Partisipasi diklat.	1. Coffee morning. 2. Regula meetings. 3. Employee and Family Gathering. 4. Company Anniversary Celebration. 5. HRSE Survey. 6. Disaster Response Simulation at Units and Head Office. 7. Participation in training.
Pelanggan Customer	1. Program mendengarkan suara pelanggan/ Forum Komunikasi Pelanggan/<i>Customer Gathering</i>. 2. Rapat Alokasi Energi. 3. Kunjungan Pelanggan. 4. Aplikasi Harian Deklarasi Ketidaksiapan Pembangkit (HDKP)/RAPSODI. 5. Rapat Operasi Sistem. 6. Survei Kepuasan Pelanggan.	1. Listening to the voice of the customer/ Customer Communication Forum/Customer Gathering Program. 2. Energy Allocation Meeting. 3. Customer Visit. 4. Power Plant Unreadiness Daily Declaration (HDKP)/RAPSODI Application. 5. System Operation Meeting. 6. Customer Satisfaction Survey.
Penyedia/Pemasok Vendor/Supplier	1. <i>Vendor Gathering</i>. 2. <i>Business Review Meeting</i>. 3. Survei Perilaku Etis atau survei lainnya. 3. <i>Sales Engineering Support</i> berupa <i>Assessment, Inspection, Consultation</i>. 5. Sosialisasi anti korupsi (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).	1. Vendor Gathering. 2. Business Review Meeting. 3. Ethical Behavior Survey or other surveys. 4. Sales Engineering Support, covering Assessment, Inspection, Consultation. 5. Dissemination of anti-corruption policy (Anti-Bribery Management System).
Komunitas Penduduk Sekitar Pembangkit: • Masyarakat di Wilayah Binaan • LSM Lokal & Internasional • Tokoh Masyarakat • Institusi/Lembaga Profesi • Media Community Surrounding the Power Plants: • Communities in the Fostered Areas • Local & International NGOs • Public Figures • Institution/Professional Association • Media	1. Forum Koordinasi dengan Aparat Negara. 2. Program CSR dan COMDEV yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat. 3. Kerjasama project dan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan atau pengelolaan sampah (3R sampah) dan penanaman pohon. 4. Kegiatan CSR (<i>Charity</i>). 5. Forum Warga.	1. Coordination Forum with State Apparatus. 2. CSR and COMDEV programs focused on community empowerment. 3. Project cooperation and community involvement in waste utilization or management (3R) and tree planting. 4. CSR activity (Charity). 5. Community Members' Forum.

Tantangan Terhadap Pengelolaan Aspek Keberlanjutan Challenges in Sustainability Management

PLN Indonesia Power menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan tuntutan terhadap pemenuhan aspek keberlanjutan yang tinggi. Dalam merespon hal tersebut, Perusahaan melakukan upaya strategis berupa penyelarasan terhadap proses rantai nilai (*value chain*) perusahaan secara menyeluruh (*end-to-end*). Penyelarasan ini tidak terbatas pada aspek pembiayaan (*financing*), melainkan mencakup proses pengembangan usaha yang adaptif terhadap dinamika transisi energi. Perusahaan berupaya membangun *core competencies* dan technical skills yang relevan dan futuristik guna menjawab tantangan pengembangan usaha jangka panjang. Langkah strategis ini juga melibatkan penyesuaian proses bisnis serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam fase transisi menuju era operasional baru yang menuntut efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan. Pembangunan kompetensi internal tidak hanya dilihat sebagai respon terhadap tantangan eksternal, tetapi juga sebagai bentuk kesiapan institusional dalam mengelola disrupti teknologi, kebijakan lingkungan, serta perubahan preferensi konsumen energi.

PLN Indonesia Power saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan strategis dalam konteks keberlanjutan. Tantangan tersebut antara lain meliputi:

1. Pengendalian perubahan iklim, sejalan dengan komitmen nasional dan global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca;
2. Disrupsi digital dalam sektor ketenagalistrikan, yang menuntut adaptasi terhadap model bisnis baru berbasis teknologi cerdas;
3. Pengetatan regulasi terhadap baku mutu emisi, yang mewajibkan penerapan teknologi bersih dalam proses pembangkitan; serta
4. Dorongan percepatan transisi energi, terutama melalui pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi masa depan.

Perusahaan dituntut untuk melakukan investasi pada teknologi rendah karbon, sistem pembangkitan energi terbarukan, serta mengadopsi pendekatan ekonomi sirkular dalam operasionalnya. Namun demikian, implementasi teknologi dan inovasi untuk keberlanjutan tidak jarang menghadapi kendala teknis, seperti tingginya biaya investasi awal, ketidakmatangan teknologi, serta risiko implementasi yang belum sepenuhnya terukur. Oleh karena itu, proses *risk assessment* dan *technology readiness analysis* menjadi sangat penting dalam tahapan perencanaan dan eksekusi strategi keberlanjutan.

PLN Indonesia Power faces the increasingly complex business environment dynamics and demands for high sustainability aspects. In response to such matters, the Company carries out strategic efforts in aligning the Company's end-to-end value chain processes. This alignment is not limited to financing aspect, but also includes business development process that is adaptive to the dynamics of energy transition. The Company strives to establish relevant and futuristic core competencies and technical skills to answer the challenges of long-term business development. This strategic step also involves adjusting business processes and increasing human capital capacity, particularly in the transition phase towards a new operational era that demands efficiency, innovation, and sustainability. Internal competency development is not only seen as a response to external challenges, but also as a form of institutional readiness in managing technology disruption, environmental policies, and changes in energy consumer preferences.

PLN Indonesia Power currently deals with various strategic challenges in sustainability. These challenges include:

1. Climate change control, in line with the national and global commitments to reduce greenhouse gas emissions;
2. Digital disruption in electricity sector, which requires adaptation to new business models based on smart technology;
3. Stringent regulations on emission quality standards, which require the application of clean technology in the generation process; and
4. Accelerated drive of energy transition, particularly through the development of New Renewable Energy (NRE) as a future energy source.

The Company is required to invest in low-carbon technology, renewable energy generation systems, and adopt a circular economy approach in its operations. However, the implementation of technology and innovation for sustainability often faces technical obstacles, such as high initial investment costs, technology immaturity, and implementation risks that are not yet fully measurable. Therefore, risk assessment and technology readiness analysis processes are very crucial in the planning and execution stages of sustainability strategies.

Di sisi lain, tantangan keberlanjutan juga berkaitan dengan dimensi sosial, khususnya dalam hal rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku bisnis terhadap urgensi keberlanjutan. Kurangnya literasi keberlanjutan ini berdampak pada lambatnya adopsi praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan edukatif yang berkelanjutan, baik dalam bentuk pelatihan internal, kampanye publik, maupun kolaborasi lintas sektor untuk membangun budaya keberlanjutan yang lebih inklusif dan transformatif.

Strategi PLN Indonesia Power dalam menyelaraskan rantai nilai, membangun kapabilitas internal, dan memperkuat literasi keberlanjutan menjadi prasyarat penting dalam memastikan kesiapan perusahaan untuk bertransformasi secara utuh. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung peran strategis PLN Indonesia Power sebagai pelaku utama dalam mendukung agenda transisi energi nasional sekaligus memperkuat daya saingnya dalam lanskap industri energi yang semakin kompetitif dan berbasis nilai keberlanjutan.

Perusahaan menyadari bahwa tantangan keberlanjutan yang ada saat ini harus direspon dengan menyiapkan langkah strategis demi keberlanjutan bisnis. Strategi tersebut terangkum dalam beberapa poin berikut:

1. Menjaga kesiapan dan keandalan pembangkit;
2. Melakukan inovasi untuk meningkatkan kesiapan, keandalan dan daya saing pembangkit eksisting;
3. Melakukan pengembangan pembangkit EBT & *Co-firing* PLTU Batubara;
4. Meningkatkan riset baik untuk pengembangan pembangkit EBT maupun *beyond kWh*;
5. Melakukan pengembangan bisnis *beyond kWh*;
6. Mengimplementasikan program *coal switching*;
7. Melakukan transformasi digital; dan
8. Meningkatkan kapasitas organisasi dan kapabilitas.

On the other hand, sustainability challenges are also related to the social dimension, especially in the low awareness and understanding of the community and business owners regarding the urgency of sustainability. This lack of sustainability literacy has resulted in the slow adoption of environmentally friendly and sustainable practices. Therefore, a sustainable educational approach is needed, either in the form of internal training, public campaigns, or cross-sector collaboration to build a more inclusive and transformative sustainability culture.

PLN Indonesia Power's strategy in aligning the value chain, establishing internal capabilities, and strengthening sustainability literacy is an important prerequisite in ensuring the Company's readiness to transform completely. This approach is expected to support PLN Indonesia Power's strategic role as a key player in supporting the national energy transition agenda while strengthening its competitiveness in the increasingly competitive energy industry landscape based on sustainability values.

The Company realizes that the current sustainability challenges must be responded to by preparing strategic steps for business sustainability. The strategy is summarized in the following points:

1. Maintaining the readiness and reliability of power plants;
2. Carrying out innovation to improve the readiness, reliability, and competitiveness of existing power plants;
3. Developing NRE & Coal-fired SPP power plants;
4. Increasing research for both NRE and beyond kWh power plant development;
5. Developing beyond kWh business;
6. Implementing a coal switching program;
7. Carrying out digital transformation; and
8. Improving organizational capacity and capabilities.

Membangun Budaya Keberlanjutan

Building a Culture of Sustainability

Komitmen, kesadaran, dan partisipasi dari semua individu pada setiap tingkatan organisasi sangat diperlukan dalam membangun budaya keberlanjutan. PLN Indonesia Power membangun budaya yang mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dan menginspirasi tindakan yang berkelanjutan di semua jenjang jabatan yang ada di Perusahaan. Komitmen membangun budaya keberlanjutan diantaranya dengan memberikan keteladanan pemimpin

Commitment, awareness, and participation from all individuals at every level of the organization are essential in building a culture of sustainability. PLN Indonesia Power builds a culture that integrates sustainability values and inspires sustainable actions at all levels of office in the Company. The commitment to building a culture of sustainability includes providing exemplary leadership regarding sustainability aspects, both from the main

terkait aspek keberlanjutan baik organ utama tata kelola sampai dengan ke jenjang unit terkecil. Pimpinan memberi kesempatan dan meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai untuk berkontribusi dengan gagasan, proyek, atau tindakan yang mendukung keberlanjutan.

PLN Indonesia Power juga telah mengimplementasikan GRC Culture pada setiap kegiatan dan proses bisnis Perusahaan. Dasar penerapan GRC di PLN Indonesia Power telah diatur dalam Peraturan Direksi PLN Indonesia Power No.0073.P/DIR/2023 Tentang Kebijakan Umum Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan/ *Governance, Risk and Compliance* (GRC) Terintegrasi. Penerapan *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) sangat penting bagi perusahaan untuk mengantisipasi dan menghadapi risiko serta tantangan global. Penerapan GRC yang efektif akan membantu perusahaan mengatasi berbagai masalah sekaligus mengantisipasi berbagai risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Selain itu, Komitmen PLN Indonesia Power dalam membangun budaya keberlanjutan juga tercermin melalui penerapan berbagai strategi bisnis yang berlandaskan pada prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Strategi ini tidak hanya diwujudkan dalam kebijakan makro perusahaan, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam aktivitas sehari-hari, baik di tingkat organisasi maupun individu. Perusahaan mendorong partisipasi aktif seluruh pegawai melalui serangkaian inisiatif yang bertujuan untuk menanamkan perilaku berkelanjutan, seperti penghematan energi listrik, efisiensi penggunaan air dan kertas, serta kebijakan penggunaan botol minum tumbler guna mengurangi konsumsi plastik sekali pakai yang sulit terurai.

PLN Indonesia Power secara konsisten mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam budaya kerja Perusahaan. Integrasi ini dijalankan dengan mengacu pada kerangka *Maturity Level Sustainability* yang telah ditetapkan oleh induk Perusahaan yaitu PT PLN (Persero). Salah satu aspek utama dalam kerangka tersebut adalah penguatan pengelolaan sumber daya manusia, yang mencakup pengukuran dan percepatan implementasi kebijakan keberlanjutan di seluruh unit kerja, dengan tujuan meningkatkan efektivitas serta efisiensi operasional yang sejalan dengan visi besar PLN Group dalam mendorong transisi menuju energi berkelanjutan.

governance organs to the smallest unit level. Leaders provide opportunities and increase employee motivation and commitment to contribute with ideas, projects, or actions that support sustainability.

PLN Indonesia Power has also implemented GRC Culture in every activity and business process of the Company. The basis for implementing GRC at PLN Indonesia Power has been regulated in PLN Indonesia Power's Board of Directors, Regulation No. 0073.P/DIR/2023 on General Policy for the Implementation of Integrated Governance, Risk Management, and Compliance (GRC). The implementation of Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) is very important for companies to anticipate and face global risks and challenges. Effective GRC implementation will help companies overcome various problems while anticipating various unprecedented risks.

Furthermore, PLN Indonesia Power's commitment to building a culture of sustainability is also reflected through the implementation of various business strategies based on the principles of Environmental, Social, and Governance (ESG). This strategy is not only manifested in the Company's macro policies, but is also implemented in real terms in daily activities, both at the organizational and individual levels. The Company encourages all employees' active participation through a series of initiatives aimed at instilling sustainable behavior, such as saving electricity, efficient use of water and paper, and a policy of using tumbler drinking bottles to reduce the consumption of single-use plastic that is difficult to decompose.

PLN Indonesia Power consistently integrates sustainability values into the Company's work culture. This integration is carried out by referring to the Maturity Level Sustainability framework that has been established by the parent company, PT PLN (Persero). One of the main aspects of this framework is strengthening human resource management, which includes measuring and accelerating the implementation of sustainability policies in all work units, with the aim of increasing operational effectiveness and efficiency in line with PLN Group's grand vision in encouraging the transition to sustainable energy.

Dalam rangka mendukung agenda tersebut, PLN Indonesia Power telah menetapkan berbagai target strategis, ambisi jangka panjang, serta inisiatif pengembangan berkelanjutan. Fokus pengembangan ini mencakup peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kesetaraan gender, penyediaan akses yang setara bagi penyandang disabilitas, serta penciptaan lingkungan kerja yang inklusif dan adil. Seluruh upaya ini dilaksanakan sesuai dengan standar keberlanjutan yang diterapkan oleh PLN Group, sekaligus mencerminkan komitmen perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

In order to support this agenda, PLN Indonesia Power has set various strategic targets, long-term ambitions, and sustainable development initiatives. The focus of this development includes improving the competence and quality of human resources, strengthening gender equality, providing equal access for people with disabilities, and creating an inclusive and fair work environment. All these efforts are carried out in accordance with the sustainability standards applied by PLN Group, while also reflecting the Company's commitment to creating long-term value for all stakeholders.

Kinerja Ekonomi

Economic Performance

Kinerja ekonomi dalam perspektif keberlanjutan tidak hanya menempatkan pencapaian tujuan keuangan dalam jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan secara menyeluruh dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan Masyarakat. Perusahaan menyadari bahwa keberlanjutan ekonomi hanya dapat dicapai melalui penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan efisien, terutama dalam penggunaan sumber daya alam seperti energi, air, dan bahan baku lainnya. Efisiensi operasional ini menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga daya saing serta menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan kinerja ekonomi, PLN Indonesia Power secara aktif melakukan inovasi pada produk dan layanan yang ditawarkan. Inovasi ini dilakukan seiring dengan upaya diversifikasi portofolio produk guna menjawab tantangan pasar yang dinamis dan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Inisiatif-inisiatif tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Perusahaan di sektor energi serta menciptakan peluang pertumbuhan baru.

Economic performance from a sustainability perspective not only focuses on achieving short-term financial goals but also thoroughly considers the long-term impacts on the environment and society. The Company recognizes that economic sustainability can only be achieved through the implementation of responsible and efficient business practices, especially in the use of natural resources such as energy, water, and other raw materials. This operational efficiency serves as one of the main pillars in maintaining competitiveness and creating sustainable added value. To enhance economic performance, PLN Indonesia Power actively innovates its products and services. These innovations are carried out in line with efforts to diversify the product portfolio in response to dynamic market challenges and the evolving needs of customers. These initiatives are aimed at strengthening the Company's position in the energy sector and creating new growth opportunities.

Perusahaan juga memberikan perhatian yang tinggi terhadap kontribusi ekonomi bagi komunitas lokal di sekitar wilayah operasional. Hal ini tercermin dari komitmen dalam menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, memenuhi kewajiban pajak secara konsisten dan transparan, serta mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. PLN Indonesia Power berupaya memastikan bahwa keberhasilan ekonomi Perusahaan dapat berjalan seiring dengan terciptanya manfaat sosial yang nyata bagi para pemangku kepentingan.

The Company also places great emphasis on its economic contribution to local communities surrounding its operational areas. This is reflected in its commitment to creating employment opportunities for local labor, fulfilling tax obligations consistently and transparently, and supporting various community economic empowerment programs. PLN Indonesia Power strives to ensure that the Company's economic success goes hand in hand with the creation of tangible social benefits for stakeholders.

Kinerja Produksi dan Keuangan Production and Financial Performance

Pada tahun 2024, kinerja ekonomi PLN Indonesia Power menunjukkan hasil yang positif, sebagaimana tercermin dari capaian pada aspek produksi, penjualan, dan indikator keuangan utama Perusahaan. Perusahaan mencatatkan total realisasi produksi energi listrik sebesar 87.210,96 GWh, yang setara dengan 113,56% dari target RKAP 2024. Di sisi penjualan, realisasi energi listrik yang berhasil direalisasikan mencapai 82.535,52 GWh, atau 113,51% dari target yang telah ditetapkan dalam RKAP 2024. Capaian ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kapasitas operasional, tetapi juga menunjukkan efektivitas strategi optimalisasi aset pembangkit yang diterapkan secara konsisten.

Sebagai hasil dari kinerja operasional yang solid, PLN Indonesia Power berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp110.577.056 juta, yang melampaui target RKAP 2024 dengan tingkat pencapaian sebesar 103,96%. Tidak hanya itu, efisiensi dalam pengelolaan beban usaha serta peningkatan produktivitas turut berkontribusi terhadap pencapaian laba tahun berjalan sebesar Rp13.095.866 juta, atau 138,07% dari target RKAP 2024.

In 2024, PLN Indonesia Power demonstrated strong economic performance, as reflected in achievements across production, sales, and the Company's key financial indicators. The Company recorded a total electricity production realization of 87,210.96 GWh, equivalent to 113.56% of the 2024 WP&B (Work Plan and Budget) target. On the sales side, the realized electricity sales reached 82,535.52 GWh, or 113.51% of the target set in the 2024 WP&B. These achievements reflect not only an increase in operational capacity but also the effectiveness of consistently implemented power plant asset optimization strategies.

As a result of this solid operational performance, PLN Indonesia Power successfully recorded revenues of Rp110,577,056 million, surpassing the 2024 WP&B target with an achievement rate of 103.96%. Moreover, efficiency in managing operating expenses and improved productivity contributed to the realization of net profit for the year amounting to Rp13,095,866 million, or 138.07% of the 2024 WP&B target.

Perbandingan Target dan Kinerja Produksi dan Keuangan

Comparison of Target and Performance on Production and Finance

Indikator Indicator	2022		Pencapaian Achievement	2023		Pencapaian Achievement	2024		Pencapaian Achievement
	Target	Realisasi Realization		Target	Realisasi Realization		Target	Realisasi Realization	
Produksi Listrik (GWh) Electricity Production (GWh)	31.550,74	37.510,12	118,89%	78.734,67	84.205,29	106,95%	76.797,05	87.210,96	113,56%
Penjualan Listrik (GWh) Electricity Sales (GWh)	30.115,04	35.935,34	119,33%	74.403,53	79.670,27	107,08%	72.714,48	82.535,52	113,51%
Pendapatan Usaha (Rp Juta) Revenue (Rp Million)	42.250.460	81.090.566	191,93%	99.255.467	103.480.111	104,26%	106.368.374	110.577.056	103,96%
Laba Tahun Berjalan (Rp Juta) Income for the Year (Rp Million)	4.099.309	4.683.660	114,25%	8.106.653	8.189.314	101,02%	9.484.881	13.095.866	138,07%

Adapun realisasi produksi energi listrik pembangkit EBT tahun 2024 tercatat sebesar 10.963,56 GWh dengan capaian sebesar 100,24% dari target RKAP dan realisasi penjualan energi listrik dari pembangkit EBT mencapai 10.635,22 GWh, atau sebesar 100,99% dari target RKAP.

The realization of new renewable energy (NRE) power plant electricity production in 2024 was recorded at 10,963.56 GWh, achieving 100.24% of the Corporate Work Plan and Budget (WP&B) target. Meanwhile, the realization of electricity sales from NRE power plants reached 10,635.22 GWh, or 100.99% of the WP&B target.

Perbandingan Target dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan

Comparison of Targets and Performance of Sustainable Finance

Indikator Indicator	2022		Pencapaian Achievement	2023		Pencapaian Achievement	2024		Pencapaian Achievement
	Target	Realisasi Realization		Target	Realisasi Realization		Target	Realisasi Realization	
Produksi Energi Listrik Pembangkit EBT (GWh) Electricity Production at New and Renewable Energy Power Plants (GWh)	6.530,10	7.453,11	114,13%	10.907,46	10.066,48	92,29%	10.937,60	10.963,56	100,24%
Penjualan Energi Listrik Pembangkit EBT (GWh) Electricity Sales at New and Renewable Energy Power Plants (GWh)	6.337,35	7.279,93	114,87%	10.580,48	9.759,69	92,24%	10.530,83	10.635,22	100,99%

Kontribusi Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Contribution

PLN Indonesia Power terus mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dengan secara aktif mendorong inovasi untuk menciptakan diversifikasi portofolio produk. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang terbatas maupun berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Perusahaan berupaya menciptakan solusi energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan ketahanan bisnis di tengah dinamika sektor energi global. PLN Indonesia Power juga menempatkan peran strategis dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab keberlanjutan Perusahaan. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan, dengan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, memperoleh manfaat dari proses pembangunan yang dijalankan.

Perusahaan berupaya mengelola dan menghadirkan dampak ekonomi tidak langsung yang nyata bagi para pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional. Hal ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, penguatan kapasitas masyarakat lokal, penciptaan peluang usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah, peningkatan keterlibatan penyedia barang dan jasa lokal, serta prioritas penggunaan tenaga kerja lokal. Seluruh inisiatif ini diarahkan untuk mendorong

PLN Indonesia Power continues to support inclusive and sustainable growth by actively promoting innovation to diversify its product portfolio. This effort aims to reduce dependence on limited resources and those that may pose negative environmental impacts. The Company strives to create more environmentally friendly and sustainable energy solutions while enhancing business resilience amid the dynamics of the global energy sector. PLN Indonesia Power also assumes a strategic role in the socio-economic development of communities as part of the Company's sustainability responsibility. This commitment is realized through various programs aimed at improving living standards and promoting equitable welfare, by ensuring that all segments of society, including vulnerable groups, benefit from the ongoing development processes.

The Company strives to manage and deliver tangible indirect economic impacts for stakeholders in the areas surrounding its operations. This is achieved through sustainable infrastructure development, strengthening the capacity of local communities, creating business opportunities for small and medium enterprises, increasing the involvement of local goods and services providers, and prioritizing the use of local labor. All these initiatives are aimed at promoting the realization of a more self-reliant and competitive economic

terwujudnya pembangunan ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing, serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan dan aktivitas operasional PLN Indonesia Power tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Perusahaan, tetapi juga memberikan nilai tambah yang luas bagi komunitas dan pemangku kepentingan lainnya.

development, while directly contributing to the sustainable improvement of community welfare. Thus, the presence and operational activities of PLN Indonesia Power not only drive the Company's economic growth but also generate broader added value for communities and other stakeholders.

Pembangunan Infrastruktur PLN Indonesia Power Tahun 2024

Infrastructure Development of PLN Indonesia Power in 2024

No	Program	Wilayah Operasi Operational Area	Nilai Investasi (Rp Juta) Investment Value (Rp million)	Sifat Type	Dampak Impact
1	<i>Barge Mounted Power Plant (BMPP)</i> Nusantara I	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	1.088.370	Komersial Commercial	• Mendorong pembangunan infrastruktur nasional • Meningkatkan kemandirian energi di wilayah Indonesia Timur • Memenuhi 50 persen kebutuhan listrik di wilayah Ambon • Supporting national infrastructure development • Enhancing energy self-sufficiency in Eastern Indonesia • Meeting 50% of the electricity demand in the Ambon region
2	PLTGU Jawa Bali 1 Tambaklorok Blok 3	Semarang	5.921.533	Komersial Commercial	• Mendorong pembangunan infrastruktur nasional • Memperkuat sistem kelistrikan Jawa - Bali • Supporting national infrastructure development • Strengthening the Java-Bali electricity system
3	Rehabilitasi Jalan hantar Power House PLTA Saguling Rehabilitation of access road to the Power House of the HPP Saguling	Saguling	8.376	Non Komersial (Bantuan) Non-Commercial (Assistance)	• Mempermudah mobilisasi karyawan dan masyarakat sekitar • Supporting national infrastructure development
4	Pembangunan dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Construction and renovation of uninhabitable houses (RTLH)	Kantor Pusat Head Office, Kamojang, Adipala, Jeranjang, Lontar, Grati, Bali, Pangkalan Susu, Mrica	312	Non Komersial (Bantuan) Non-Commercial (Assistance)	• Mendorong pembangunan infrastruktur nasional • Meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan rumah • Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas • Supporting national infrastructure development • Promoting self-reliance in home improvement • Enhancing welfare and productivity

No	Program	Wilayah Operasi Operational Area	Nilai Investasi (Rp Juta) Investment Value (Rp million)	Sifat Type	Dampak Impact
5	Pembangunan dan perbaikan sarana fasilitas umum Development and improvement of public facilities	Kantor Pusat, Head Office Grati, Kamojang, Baru, Adipala, Palabuhan Ratu, Mrica, Pangkalan Susu, Saguling, Labuan, Bali, Banten 1 Suralaya, Semarang, Sintang, Cilegon	1.306	Non Komersial (Bantuan) Non-Commercial (Assistance)	• Mendorong pembangunan infrastruktur nasional • Meningkatkan aksesibilitas • Stimulasi pertumbuhan ekonomi lokal • Supporting the development of national infrastructure • Enhancing accessibility • Stimulating local economic growth
6	Pembangunan dan perbaikan sarana ibadah Construction and renovation of worship facilities	Jeranjang, Suralaya, Mrica, Kamojang, Labuan Angin, Pangkalan Susu, Saguling, Grati, Priok, Adipala, Palabuhan Ratu, Tello, Bali, Sanggau, Lontar, Banten 1 Suralaya	348	Non Komersial (Bantuan) Non-Commercial (Assistance)	• Mendorong pembangunan infrastruktur nasional • Meningkatkan kualitas sarana ibadah • Meningkatkan kesejahteraan emosional dan sosial • Supporting the "Healthy Village Free from Open Defecation" (BABS) program • Enhancing public health quality • Reducing medical expenses and the community's disease burden
7	Pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan Development and enhancement of educational infrastructure	Priok, Adipala, Kamojang, Grati, Pangkalan Susu, Palabuhan Ratu, Saguling, Mrica, Labuan, Banten 1 Suralaya, Lontar, Suralaya	180	Non Komersial (Bantuan) Non-Commercial (Assistance)	• Mendorong pembangunan infrastruktur nasional • Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan • Supporting national infrastructure development • Improving the quality and accessibility of education
8	Pembangunan dan perbaikan sarana sanitasi Construction and improvement of sanitation facilities	Suralaya, Baru, Palabuhan Ratu, Bali, Pangkalan Susu, Banten 1 Suralaya, Kamojang	104	Non Komersial (Bantuan) Non-Commercial (Assistance)	• Mendukung program Desa Sehat Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) • Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat • Mengurangi biaya pengobatan dan beban penyakit masyarakat • Supporting the "Healthy Village Free from Open Defecation" (BABS) program • Enhancing public health quality • Reducing medical expenses and the community's disease burden

Selama tahun 2024, PLN Indonesia Power bekerja sama dengan 2.377 penyedia nasional, atau setara dengan 98,59% dari total penyedia. Nilai kontrak pengadaan yang dialokasikan kepada penyedia nasional mencapai Rp89.098.945,15 juta, atau sebesar 93,78% dari total nilai pengadaan Perusahaan. Capaian ini mencerminkan konsistensi PLN Indonesia Power dalam memperkuat pemberdayaan pemasok/penyedia lokal dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional melalui dampak ekonomi tidak langsung yang berkelanjutan.

Throughout 2024, PLN Indonesia Power collaborated with 2,377 national suppliers, representing 98.59% of the total suppliers. The value of procurement contracts allocated to national suppliers reached Rp89,098,945.15 million, or 93.78% of the Company's total procurement value. This achievement reflects PLN Indonesia Power's consistent commitment to strengthening the empowerment of local suppliers and enhancing its contribution to the national economy through sustainable indirect economic impact.



PLN Indonesia Power mendefinisikan tenaga kerja lokal sebagai pekerja yang berdomisili di sekitar unit Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, komitmen ini diwujudkan melalui kerja sama dengan mitra kerja dalam menyediakan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) yang direkrut dari masyarakat lokal. Sepanjang tahun 2024, PLN Indonesia Power telah menyerap sebanyak 5.527 tenaga kerja lokal untuk posisi bidang pembangkitan, serta 6.661 tenaga kerja lokal untuk posisi di bidang penunjang. Di tingkat manajemen, hingga akhir tahun 2024 terdapat sebanyak 161 orang manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal, atau setara dengan 2,98 % dari total pegawai tetap. PLN Indonesia Power mendefinisikan manajemen senior sebagai pejabat pada jenjang manajemen atas, menengah, maupun pimpinan tertinggi di masing-masing unit.

PLN Indonesia Power defines local labor as workers who reside in the vicinity of the Company's units. In practice, this commitment is realized through collaboration with business partners in providing outsourced labor recruited from the local community. Throughout 2024, PLN Indonesia Power has employed a total of 5,527 local workers for generation-related positions and 6,661 local workers for supporting roles. At the management level, by the end of 2024, there were 161 senior management personnel originating from the local community, equivalent to 2.98% of the total permanent employees. PLN Indonesia Power defines senior management as officials at the upper, middle, or highest leadership levels within each unit.



Kinerja Lingkungan Hidup

Environmental Performance

Kinerja lingkungan bukan hanya menjadi indikator kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menciptakan harmonisasi antara kegiatan usaha dan kelestarian alam. Dengan terus memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan aspek-aspek lingkungan dalam operasional, PLN Indonesia Power berupaya meminimalkan risiko ekologis dan mendukung terwujudnya praktik bisnis yang ramah lingkungan. Sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip keberlanjutan, PLN Indonesia Power secara aktif mengelola berbagai dampak lingkungan yang mungkin timbul dari seluruh kegiatan operasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan ini mencerminkan kesungguhan Perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan dan mendorong terciptanya keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Melalui strategi dan inisiatif lingkungan yang terencana, Perusahaan ingin memastikan bahwa pertumbuhan bisnis sejalan dengan perlindungan terhadap sumber daya alam demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

PLN Indonesia Power telah mengimplementasikan sistem manajemen lingkungan sesuai standar nasional dan internasional (SNI ISO 14001:2015) serta mematuhi peraturan dan ketentuan Rencana Pengelolaan/Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi dan Daerah yang harus dipenuhi oleh masing-masing Unit dalam kegiatan operasional yang dijalankan. Perusahaan juga telah memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan izin-izin pengelolaan lingkungan. Implementasi manajemen risiko juga dilakukan secara integral dan menyeluruh untuk semua proses bisnis termasuk terkait dengan isu lingkungan dan perubahan iklim.

Perusahaan menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari tata kelola Perusahaan yang bertanggung jawab. Seluruh kebijakan internal yang mengatur aspek tanggung jawab lingkungan disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara khusus, kebijakan lingkungan Perusahaan merujuk pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,

Environmental performance is not merely an indicator of regulatory compliance but also serves as an important pillar in harmonizing business activities with environmental preservation. By continuously monitoring, evaluating, and improving environmental aspects within its operations, PLN Indonesia Power strives to minimize ecological risks and promote the implementation of environmentally friendly business practices. As part of its commitment to sustainability principles, PLN Indonesia Power actively manages various environmental impacts that may arise from all operational activities, both directly and indirectly. This management reflects the Company's dedication to fulfilling its responsibilities in environmental conservation and in supporting the well-being of surrounding communities. These efforts are carried out to create long-term value for stakeholders and fostering a sustainable balance within ecosystems. Through well-planned environmental strategies and initiatives, the Company seeks to ensure that business growth aligns with the protection of natural resources for a greener and more sustainable future.

PLN Indonesia Power has implemented an environmental management system in accordance with both national and international standards (SNI ISO 14001:2015) and complies with the requirements and provisions of the Environmental Management/Monitoring Plans (RKL/RPL) issued by the Ministry of Environment (KLH) as well as the Provincial and Regional Environmental Agencies (DLH), which must be fulfilled by each unit in their respective operational activities. The Company also possesses Environmental Impact Analysis (AMDAL) documents and the necessary environmental management permits. Risk management is also integrated and comprehensively applied across all business processes, including those related to environmental issues and climate change.

The Company places environmental protection and management as an integral part of responsible corporate governance. All internal policies governing environmental responsibility are formulated in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia. Specifically, the Company's environmental policies refer to Law No. 18 of 2008 on Waste Management, Law No. 17 of 2019 on Water Resources, Law No. 6 of 2023 on the Enactment of

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi. Regulasi tersebut menjadi landasan utama dalam merumuskan langkah-langkah strategis Perusahaan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan operasional dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, pencegahan pencemaran, serta pelestarian fungsi lingkungan. Kebijakan internal terkait tanggung jawab Perusahaan terhadap aspek lingkungan hidup yang ditetapkan PLN Indonesia Power adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi Nomor 57.K/010/IP/2010 tentang Manajemen pembangkit yang di dalamnya terdapat pengelolaan energi yaitu Manajemen efisiensi.
2. Keputusan Direksi Nomor 41.K/010/IP/2012 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di PT Indonesia Power.
3. Keputusan Direksi Nomor 249.K/010/IP/2015 tentang Pedoman Penerapan Green Power Plant di Lingkungan PT Indonesia Power.
4. Keputusan Direksi Nomor 211.K/010/IP/2016 tentang Komitmen Menjaga Ekosistem dan Pelestarian dalam Menjaga Keberlanjutan Planet di PT Indonesia Power.
5. Keputusan Direksi Nomor 191.K/010/IP/2019 tentang Pengelolaan Limbah di Lingkungan PT Indonesia Power.
6. Edaran Direksi Nomor 10.E/012/IP/2021 tentang Pedoman Manajemen Efisiensi Listrik Pembangkit Thermal di Lingkungan PT Indonesia Power.
7. Kebijakan Integrated Management System (IMS) PT PLN Indonesia Power.

Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation, Government Regulation No. 79 of 2014 on National Energy Policy, Government Regulation No. 121 of 2015 on the Management of Water Resources, Government Regulation No. 22 of 2021 on the Implementation of Environmental Protection and Management, and Government Regulation No. 33 of 2023 on Energy Conservation. These regulations serve as the primary foundation for the formulation of the Company's strategic actions to ensure that all operational activities are carried out with prudence, pollution prevention, and the preservation of environmental functions in mind. PLN Indonesia Power has established the following internal policies related to the Company's environmental responsibility:

1. Board of Directors' Decision No. 57.K/010/IP/2010 on Power Plant Management, which includes energy management through efficiency management.
2. Board of Directors' Decision No. 41.K/010/IP/2012 on Occupational Health, Safety, and Environmental Policy at PT Indonesia Power.
3. Board of Directors' Decision No. 249.K/010/IP/2015 on Guidelines for the Implementation of Green Power Plants within PT Indonesia Power.
4. Board of Directors' Decision No. 211.K/010/IP/2016 on Commitment to Ecosystem Protection and Conservation to Support Planet Sustainability at PT Indonesia Power.
5. Board of Directors' Decision No. 191.K/010/IP/2019 on Waste Management within PT Indonesia Power.
6. Board of Directors' Circular No. 10.E/012/IP/2021 on Guidelines for Electricity Efficiency Management in Thermal Power Plants within PT Indonesia Power.
7. PT PLN Indonesia Power's Integrated Management System (IMS) Policy.

Kegiatan Tanggung Jawab Lingkungan Environmental Responsibility Activities

Sebagai bentuk nyata dari komitmen terhadap keberlanjutan, PLN Indonesia Power secara konsisten berupaya menurunkan dampak kerusakan dan risiko terhadap lingkungan melalui pelaksanaan berbagai inisiatif tanggung jawab lingkungan. Upaya ini merupakan bagian penting dari strategi Perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara kinerja operasional dan

As a tangible manifestation of its commitment to sustainability, PLN Indonesia Power consistently strives to reduce environmental damage and risk through the implementation of various environmental responsibility initiatives. These efforts form a vital part of the Company's strategy to maintain a balance between operational performance and environmental protection. This

perlindungan lingkungan hidup. Komitmen tersebut diwujudkan melalui beberapa inisiatif seperti efisiensi penggunaan energi dan sumber daya alam lainnya, peningkatan kualitas lingkungan secara berkelanjutan, serta pemenuhan terhadap seluruh regulasi dan standar lingkungan yang berlaku.

PLN Indonesia Power juga memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional senantiasa berorientasi pada prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. Perusahaan secara rutin melakukan evaluasi terhadap implementasi tanggung jawab lingkungannya. Evaluasi ini mencakup aspek kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan lingkungan, realisasi investasi pada teknologi hijau dan ramah lingkungan, serta tingkat partisipasi dalam berbagai inisiatif atau kolaborasi lingkungan.

commitment is realized through several initiatives, including the efficient use of energy and other natural resources, continuous improvement of environmental quality, and full compliance with all applicable environmental regulations and standards.

PLN Indonesia Power also ensures that all operational activities are consistently guided by the principles of sustainability and environmental friendliness. The Company routinely evaluates the implementation of its environmental responsibilities. These evaluations cover aspects such as compliance with environmental laws and regulations, realization of investments in green and environmentally friendly technologies, and the level of participation in various environmental initiatives or collaborations.

Sistem Manajemen Lingkungan

Environmental Management System

Sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap praktik operasional yang berkelanjutan, PLN Indonesia Power senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya melalui penerapan sistem yang terstandarisasi dan terintegrasi. Salah satu upaya utama dalam hal ini adalah implementasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang mengacu pada standar internasional ISO 14001:2015 dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PLN Indonesia Power Integrated Management System (PLN IP-IMS). Sistem ini tidak hanya menjadi alat pengendalian internal, tetapi juga menjadi landasan bagi peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam pengelolaan lingkungan di setiap unit kerja. Beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas sistem manajemen lingkungan yang telah dilakukan PLN Indonesia Power sepanjang tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan dan persyaratan pelanggan serta standar nasional dan internasional yang berlaku serta berkaitan dengan proses bisnis Perusahaan.
2. Menerapkan dan melaksanakan secara konsisten serta sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan sesuai dengan standar ISO 14001:2015.
3. Melakukan *monitoring*, evaluasi dan audit internal Sistem Manajemen Lingkungan secara periodik.

As a company committed to sustainable operational practices, PLN Indonesia Power consistently strives to improve its environmental management performance through the implementation of standardized and integrated systems. One of the main efforts in this regard is the implementation of an Environmental Management System (EMS) that refers to the international standard ISO 14001:2015. This EMS has become an integral part of the PLN Indonesia Power Integrated Management System (PLN IP-IMS). This system is not only an internal control tool but also a foundation for continuous improvement in environmental management across every work unit. Some of the activities organized by PLN Indonesia Power throughout 2024 to enhance the quality of its environmental management system are as follows:

1. Complying with environmental laws and regulations, customer requirements, and applicable national and international standards related to the Company's business processes.
2. Consistently implementing and certifying the Environmental Management System in accordance with ISO 14001:2015.
3. Periodically monitoring, evaluating, and conducting internal audits of the Environmental Management System.

4. Melakukan audit eksternal ISO 14001:2015 terkait Sistem Manajemen Lingkungan yang terintegrasi dengan Audit eksternal PLN IP-IMS.
 5. Menjadikan kebijakan lingkungan sebagai dasar dalam menetapkan tujuan dan sasaran dalam melakukan pengelolaan lingkungan.
 6. Mencegah pencemaran terhadap air, tanah dan udara, mendorong adanya sistem pengelolaan lingkungan yang efektif dengan mengutamakan konsep *Reduce, Reuse, Recycle* (3R), mendorong program kepedulian dan pengembangan masyarakat sekitar (*Community Development/CSR*) dan melakukan upaya perlindungan keanekaragaman hayati.
 7. Memberikan pemahaman/kepedulian dan pelatihan mengenai lingkungan secara terus menerus kepada seluruh pegawai baik organik maupun mitra kerja.
 8. Meningkatkan peran aktif dan menanamkan kepedulian pegawai terhadap lingkungan.
 9. Memelihara dan mendokumentasikan dokumen-dokumen terkait Sistem Manajemen Lingkungan.
 10. Mengkomunikasikan kebijakan lingkungan kepada seluruh kontraktor/supplier atau mitra kerja untuk dapat mengikuti kebijakan serta mengkomunikasikan kepada masyarakat setempat.
 11. Melakukan perbaikan berkelanjutan, penyempurnaan dan peningkatan secara terus menerus terhadap sasaran organisasi pada setiap proses bisnis masing-masing bidang.
4. Conducting external ISO 14001:2015 audits related to the Environmental Management System, integrated with the PLN IP-IMS external audit.
 5. Using environmental policy as the basis for setting objectives and targets in environmental management.
 6. Preventing pollution of water, soil, and air, promoting an effective environmental management system by prioritizing the Reduce, Reuse, Recycle (3R) concept, encouraging Community Development/CSR programs, and undertaking biodiversity protection efforts.
 7. Continuously providing environmental awareness and training to all employees, both organic and partners.
 8. Increasing the active role and fostering employee environmental awareness.
 9. Maintaining and documenting all Environmental Management System-related documents.
 10. Communicating environmental policy to all contractors/suppliers and partners so they could adhere to it, and also communicating it to local communities.
 11. Continuously making improvements, refinements, and enhancements to organizational objectives in each business process area.

Pengelolaan Kinerja dan Dampak Lingkungan

Environmental Performance and Impact Management

PLN Indonesia Power terus memperkuat komitmennya dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan kinerja dan dampak lingkungan. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis dan aktivitas operasional Perusahaan berjalan selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan, sekaligus meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap ekosistem.

PLN Indonesia Power continues to strengthen its commitment to environmental sustainability through performance and environmental impact management. This program is designed to ensure that all of the Company's business processes and operational activities align with environmental conservation principles, while simultaneously minimizing potential negative impacts on the ecosystem.

Program Pengelolaan Lingkungan

Environmental Management Program

No	Rencana Kegiatan Activity Plan	Realisasi Kegiatan Realization
1	Monitoring dan Pemenuhan Kepatuhan terhadap Regulasi Monitoring and Compliance with Regulations	- Melakukan monitoring pengelolaan lingkungan hidup melalui <i>Video Conference</i> progres kemajuan Penaatan Pengelolaan Lingkungan hidup dan PROPER yang dilakukan tiap bulan. - <i>Monitoring</i> penerbitan perizinan lingkungan terbaru.
2	Peningkatan kompetensi personil pengelola lingkungan Enhancing the Competence of Environmental Management Personnel	- Sertifikasi Pengelola Lingkungan untuk memenuhi ketentuan regulasi pengelolaan lingkungan hidup. - Pelatihan dan sertifikasi pengelola lingkungan dan tim terkait untuk memenuhi persyaratan PROPER <i>Beyond Compliance</i>. - Bimbingan Teknis Inventarisasi emisi gas rumah kaca bagi para peserta perdagangan karbon. - <i>Capacity building</i> untuk peningkatan <i>awareness</i> terkait isu pengelolaan lingkungan hidup terbaru.
3	Pemenuhan perizinan lingkungan alih aset Environmental Permits for Asset Transfers	- <i>Monitoring</i> Pemenuhan Perizinan Lingkungan.
4	Monitoring dan pendampingan PROPER Beyond Compliance Monitoring and Support for PROPER Beyond Compliance	- Monitoring pemenuhan target nilai Dokumen Hijau. - Pelaksanaan penyusunan beberapa kajian terkait Dokumen Hijau terpusat. - <i>Workshop</i> penyusunan Dokumen Hijau PROPER.
5	Digitalisasi monitoring Pengelolaan dan Ketaatan Lingkungan Seluruh Unit serta Sentralisasi database pengelolaan Lingkungan Korporat Digitization of Environmental Management and Compliance Monitoring Across All Units, and Centralization of Corporate Environmental Management Database	- Pengembangan Aplikasi "<i>Environment Data Monitoring System (EDMOS)</i>" untuk <i>monitoring</i> Data dan Dokumen Lingkungan.
6	Pengelolaan Limbah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) Management of Fly Ash and Bottom Ash (FABA) Waste	- <i>Monitoring</i> Pengelolaan FABA. - <i>Workshop</i> pengelolaan FABA. - Pengembangan pemanfaatan FABA. - Pengembangan aplikasi pengelolaan FABA.
7	Penyelesaian Sanksi Administrasi Resolution of Administrative Sanctions	- Melakukan pendampingan dan penyelesaian ketidaksesuaian hasil Pengawasan <i>Stakeholder</i>.
8	Keikutsertaan dalam Nilai Ekonomi Karbon Participation in Carbon Economic Value	- <i>Workshop Carbon Trading</i>. - Penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia. - Partisipasi PLN IP pada IDX Carbon. - Verifikasi Emisi Gas Rumah Kaca peserta <i>trading carbon</i> oleh LVV.

No	Rencana Kegiatan Activity Plan	Realisasi Kegiatan Realization
9	Pengelolaan Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas Emission Management	- Inventarisasi emisi gas rumah kaca unit. - Pelaporan emisi gas rumah kaca ke APPLE-GATRIK.
10	Program <i>Sustainability</i> Sustainability Programs	- Program <i>Recycle</i> Limbah Baju Seragam Bekas. - Program Move4Ronment. - Program Penanaman Pohon rutin. - Program <i>coastal clean up</i>.

Pengembangan Pembangkit Ramah Lingkungan (*Green Power Plant*) Development of Green Power Plants

PLN Indonesia Power berupaya untuk dapat beroperasi secara andal, aman dan ramah lingkungan serta berhasil meningkatkan benefit, baik terhadap ekonomi, sosial maupun lingkungan guna mendukung keberlanjutan usaha secara jangka panjang melalui *Green Power Plant* sebagai salah satu program strategis penanggulangan perubahan iklim.

Program ini juga mencakup penggunaan material yang ramah lingkungan dalam pengoprasian dan perawatan unit pembangkit serta kegiatan operasional lainnya baik di *Head Office* maupun di setiap unit yang dimiliki Perusahaan. Selama tahun 2024, program yang telah dilakukan dalam mewujudkan *Green Power Plant* adalah sebagai berikut:

1. Memantau, mengaudit, mengevaluasi dan membimbing pengelolaan lingkungan hidup di seluruh unit produksi.
2. Mendukung, mengawasi dan mengkoordinasikan penyusunan pemenuhan kepatuhan lingkungan hidup dan dokumen *Beyond Compliance*.
3. Pelatihan dan sertifikasi di bidang lingkungan hidup untuk meningkatkan kompetensi personil lingkungan dan pemenuhan kepatuhan lingkungan hidup serta PROPER.
4. Melakukan penghijauan di lingkungan Unit Pembangkit dengan menanam berbagai jenis pohon endemik yang berdampak untuk mereduksi emisi dan meningkatkan indeks keanekaragaman hayati.
5. Memberikan penghargaan prestasi pengelolaan lingkungan pada Unit yang telah berhasil dalam pencapaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan.
6. Program *beyond kWh* melalui pembangunan pabrik panel surya dengan kapasitas produksi 1 GWp.

PLN Indonesia Power strives to conduct operation in a reliable, safe, and environmentally friendly manner while successfully increasing benefits across economic, social, and environmental aspects to support long-term business sustainability through the Green Power Plant program, which is one of the strategic initiatives to combat climate change.

This program also includes the use of environmentally friendly materials in the operation and maintenance of power plant units, as well as other operational activities both at the Head Office and across all Company units. Throughout 2024, the programs implemented to realize the Green Power Plant initiative include the following:

1. Monitoring, auditing, evaluating, and guiding environmental management at all production units.
2. Supporting, supervising, and coordinating the preparation of environmental compliance fulfillment and Beyond Compliance documentation.
3. Conducting training and certification in the field of environmental management to enhance the competence of environmental personnel and meet environmental compliance requirements, including the PROPER program.
4. Conducting reforestation around power plant units by planting various endemic tree species to help reduce emissions and improve biodiversity index scores.
5. Awarding units that had successfully achieved Environmental Management Performance in recognition of their environmental management achievements.
6. Implementing the beyond kWh program through the construction of a solar panel factory with a production capacity of 1 GWp.

7. Implementasi hydrogen refueling station Senayan dan *Green Hydrogen Plant* di UBP Kamojang.
8. Program bauran energi Implementasi *co-firing* limbah uang kertas di UBP Adipala dan UBP Singkawang.
9. Program akselerasi transisi energi pendirian tempat produksi biomassa di kota Medan melalui UBP Pangkalan Susu.
10. Memperoleh SPE (Sertifikat Pengurangan Emisi) bagi unit pembangkit *renewable energy* PLTM Gunung Wugul, PLTGU Priok dan PLTGU Grati.
11. Program EBT melalui implementasi pembangunan PLTS Hybrid Nusa Penida berkapasitas 3,5 MWac.
12. Program *upgrade* Ecopark Suralaya melalui penanaman pohon sebanyak 2.631 pohon serta pengurangan emisi sebesar 2.711,83 Ton CO₂e di lahan seluas 7,4 Hektare.
13. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan eksternal yang terkait dengan bidang lingkungan hidup.
14. Memberikan penghargaan prestasi pengelolaan lingkungan pada Unit yang telah berhasil dalam pencapaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan.
15. Pengembangan inisiatif program sustainability di *Head Office* PLN Indonesia Power.
16. Perdagangan emisi PTBAE bagi 14 unit PLTU.
17. Inventarisasi emisi GRK *scope* 1,2,3 di unit pembangkit PLN Indonesia Power.
7. Implementing a hydrogen refueling station in Senayan and a Green Hydrogen Plant at GBU Kamojang.
8. Energy mix program through *co-firing* with waste banknotes at GBU Adipala and GBU Singkawang.
9. Accelerating energy transition through the establishment of a biomass production facility in Medan via GBU Pangkalan Susu.
10. Obtaining Emission Reduction Certificates (SPE) for renewable energy power generation units: MHPP Gunung Wugul, CCGP Priok, and CCGP Grati.
11. NRE program through the implementation of a 3.5 MWac Nusa Penida Hybrid Solar Power Plant (SoPP Hybrid).
12. Upgrading the Suralaya Ecopark by planting 2,631 trees and reducing emissions by 2,711.83 tons CO₂e over an area of 7.4 hectares.
13. Coordinating with external stakeholders related to environmental issues.
14. Awarding units that had successfully achieved Environmental Management Performance in recognition of their environmental management achievements.
15. Developing sustainability program initiatives at the PLN Indonesia Power Head Office.
16. Emission trading (PTBAE) involving 14 coal-fired power plant (SPP) units.
17. Inventorying greenhouse gas (GHG) emissions *scope* 1, 2, and 3 at PLN Indonesia Power's power generation units.

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan

New Renewable Energy Development Program

Sebagai sumber energi alternatif yang berasal dari proses alam dan dapat diperbarui secara terus-menerus, Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi bagian penting dalam transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2024, PLN Indonesia Power yang telah mengoperasikan Pembangkit EBT terdiri dari PLTA, PLTM, PLTP dan PLTS dengan total kapasitas 2270,57 MW.

PLN Indonesia Power menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pengembangan EBT di Indonesia. Saat ini, Perusahaan memiliki dua proyek unggulan pengembangan EBT, yaitu Hijaunesia dan Hydronesia. Proyek Hijaunesia mencakup pembangunan 12 PLTS dan 1 PLTB dengan kapasitas total sebesar 1.055 MW. Proyek ini diproyeksikan akan menambah suplai listrik berbasis EBT secara bertahap hingga mencapai 2,4 GWh pada tahun 2035. Sementara itu, melalui proyek Hydronesia, PLN Indonesia Power mengembangkan PLTA dengan total kapasitas 1.345 MW, yang dijadwalkan selesai secara bertahap hingga tahun 2035.

As an alternative energy source derived from natural processes and continuously renewable, New Renewable Energy (NRE) plays a vital role in the transition toward a cleaner, more environmentally friendly, and sustainable energy system. As of 2024, PLN Indonesia Power had operated NRE-based power plants consisting of HPP, MHPP, GPP, and SoPP, with a total capacity of 2,270.57 MW.

PLN Indonesia Power demonstrates a strong commitment to promoting the development of NRE in Indonesia. Currently, the Company has two flagship NRE development projects, namely Hijaunesia and Hydronesia. The Hijaunesia project includes the construction of 12 solar power plants (SoPP) and 1 wind power plant (WPP) with a total capacity of 1,055 MW. This project is expected to gradually increase the NRE-based electricity supply to 2.4 GWh by 2035. Meanwhile, through the Hydronesia project, PLN Indonesia Power is developing hydropower plants (HPP) with a total capacity of 1,345 MW, scheduled for gradual completion by 2035.

Selain itu, Perusahaan juga tengah mengembangkan proyek panas bumi (*geothermal*) berkapasitas 280 MW dan menjajaki potensi energi panas bumi lainnya melalui kerja sama dengan mitra global. Salah satu terobosannya adalah penerapan teknologi binary yang memanfaatkan air *brine* dari lapangan panas bumi eksisting. PLN Indonesia Power juga menyiapkan energi alternatif masa depan dengan membangun *Geothermal Green Hydrogen Plant* pertama di Asia Tenggara dan *Hydrogen Refuelling Station* pertama di Indonesia.

Furthermore, the Company is currently developing a 280 MW geothermal power project and exploring further geothermal energy potential through collaboration with global partners. One of its innovations is the application of binary technology, which utilizes brine water from existing geothermal fields. PLN Indonesia Power is also preparing for the future of alternative energy by building Southeast Asia's first Geothermal Green Hydrogen Plant and Indonesia's first Hydrogen Refueling Station.

Pengelolaan Energi

Energy Management

Energi primer menjadi bahan baku utama dalam kegiatan produksi PLN Indonesia Power, baik yang bersumber dari energi fosil maupun energi baru dan terbarukan. Upaya peningkatan efisiensi energi dalam proses produksi dan utilitas pendukung, penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan, optimalisasi kinerja mesin pembangkit, serta efisiensi bangunan diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi dan mewujudkan lingkungan yang lebih bersih.

Primary energy serves as the main raw material in PLN Indonesia Power's production activities, whether sourced from fossil fuels or new renewable energy. Efforts to enhance energy efficiency in production processes and supporting utilities, the use of more environmentally friendly technologies, optimization of power plant machinery performance, and building efficiency are expected to contribute to emission reduction and the realization of a cleaner environment.

Penggunaan Energi

Energy Use

PLN Indonesia Power memanfaatkan sumber energi primer yang berasal dari energi fosil dan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dalam penggunaan energi, PLN Indonesia Power menghitung intensitas energi, yaitu rasio total energi yang dikonsumsi terhadap volume energi listrik yang dihasilkan. Energi yang termasuk dalam perhitungan ini meliputi batubara, HSD, MFO, IDO, gas alam, panas bumi, air, BioFame, Biomassa dan solar panel sebagai bahan bakar dalam proses produksi listrik. Rasio intensitas energi Perusahaan menggunakan denominator jumlah produksi listrik bruto pembangkit unit eksisting dan pembelian tenaga listrik sebagai faktor yang paling relevan. Pada tahun 2024, nilai intensitas energi Perusahaan tercatat sebesar 14.228,11 Gigajoule/GWh, berhasil menurun 1,55% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 14.011,31 Gigajoule/GWh.

PLN Indonesia Power utilizes primary energy sources derived from fossil fuels and New Renewable Energy (NRE) to support its operational activities. To assess the efficiency of its energy use, PLN Indonesia Power calculates energy intensity, which is the ratio of total energy consumed to the volume of electricity generated. The types of energy included in this calculation comprise coal, HSD, MFO, IDO, natural gas, geothermal, hydro, BioFame, biomass, and solar panels used as fuel in the electricity generation process. The Company's energy intensity ratio uses the total gross electricity production of existing power plant units and purchased electricity as the most relevant denominator. In 2024, the Company's energy intensity value was recorded at 14,228.11 Gigajoules/GWh, marking a 1.55% decrease compared to 2023, which was 14,011.31 Gigajoules/GWh.

Sepanjang tahun 2024, total konsumsi energi primer Perusahaan mencapai 1.240.847.071 Gigajoule, meningkat 5,17% dibandingkan tahun 2023 sebesar 1.179.826.166 Gigajoule. Penggunaan energi fosil selama tahun 2024, sebesar 1.227.890.810 Gigajoule yang mengalami peningkatan 4,87% dari tahun 2023 yaitu sebesar 1.170.861.398 Gigajoule. Sedangkan jumlah konsumsi energi terbarukan di tahun 2024 adalah sebesar 12.956.260 Gigajoule yang mengalami peningkatan 44,52% dari tahun sebelumnya 8.964.767 Gigajoule. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya pengalihan asset beberapa pembangkit PLN ke *subholding* PLN Indonesia Power sehingga meningkatkan jumlah konsumsi energi Perusahaan untuk memproduksi tenaga listrik.

Throughout 2024, the Company's total primary energy consumption reached 1,240,847,071 Gigajoules, an increase of 5.17% compared to 1,179,826,166 Gigajoules in 2023. Fossil energy usage in 2024 amounted to 1,227,890,810 Gigajoules, an increase of 4.87% from 1,170,861,398 Gigajoules in 2023. Meanwhile, the total renewable energy consumption in 2024 was 12,956,260 Gigajoules, representing a 44.52% increase from the previous year's 8,964,767 Gigajoules. This increase was driven by the transfer of several PLN power plant assets to the PLN Indonesia Power subholding, which led to a higher volume of energy consumption for electricity production.

Program Peningkatan dan Pembudayaan Manajemen Efisiensi Energi (PPME)

Energy Efficiency Management Improvement and Cultivation Program (PPME)

PLN Indonesia Power secara berkelanjutan mengimplementasikan strategi dan inisiatif efisiensi energi melalui Program Peningkatan dan Pembudayaan Manajemen Efisiensi Energi (PPME), atau *Enhancing and Embedding Energy Efficiency Excellence* (5E). Program ini merupakan komponen integral dari Strategi Transformasi Perusahaan (*IP Transformation Strategy*) yang dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Unit Pembangkitan. Tujuannya adalah untuk membentuk budaya efisiensi energi yang sistematis dan berkelanjutan, sekaligus sebagai langkah antisipatif terhadap implementasi kebijakan Performance Based Regulatory (PBR) oleh Pemerintah. Selama tahun 2024, total efisiensi energi yang berhasil dicapai Perusahaan mencapai 7.221.662,94 GJ, berhasil meningkat 47,39% dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 4.899.725,65 GJ. Efisiensi energi ini juga memberikan dampak ekonomi berupa penghematan biaya operasional sebesar Rp1.481,30 miliar per tahun.

PLN Indonesia Power continuously implements energy efficiency strategies and initiatives through the Energy Efficiency Management Improvement and Cultivation Program (PPME), also known as *Enhancing and Embedding Energy Efficiency Excellence* (5E). This program is an integral component of the IP Transformation Strategy, which is comprehensively implemented across all power generation units. Its objective is to establish a systematic and sustainable culture of energy efficiency, while also serving as a proactive step in anticipation of the Government's implementation of the Performance-Based Regulatory (PBR) policy. In 2024, the Company achieved a total energy efficiency of 7,221,662.94 GJ, representing a 47.39% increase compared to the 2023 achievement of 4,899,725.65 GJ. This energy efficiency also delivered an economic impact in the form of operational cost savings amounting to Rp1,481.30 billion per year.

Pengelolaan Sumber Daya Air

Water Resources Management

Sumber air yang digunakan PLN Indonesia Power meliputi air tanah, air permukaan, air PAM/PDAM, serta air daur ulang yang dimanfaatkan kembali dalam proses operasi dan kegiatan pendukung. Perusahaan secara aktif menerapkan langkah-langkah konservasi air dengan memanfaatkan kembali air bekas pakai untuk keperluan lain serta mengolah air limbah melalui instalasi pengolahan

The water sources used by PLN Indonesia Power include groundwater, surface water, PAM/PDAM water, and recycled water, which is reused in operational processes and supporting activities. The Company actively implements water conservation measures by reusing wastewater for other purposes and treating wastewater through treatment facilities so that it can be reused in operations. This

agar dapat digunakan kembali dalam proses operasional. Praktik pengelolaan air yang berkelanjutan ini memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan efisiensi energi, penghematan biaya operasional, pengurangan pencemaran air, serta mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Selain itu, inisiatif ini juga memperkuat hubungan dengan komunitas dan para pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan citra Perusahaan di bidang sosial dan lingkungan, sejalan dengan komitmen PLN Indonesia Power terhadap prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab ekologis.

Total volume pengambilan air dari seluruh sumber pada tahun 2024 tercatat sebesar 21.093.497,90 megaliter, atau mengalami penurunan sebesar 16,63% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 25.301.716,63 megaliter. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan pengambilan dari sumber air permukaan (air laut) dan air tanah. Namun demikian, terdapat peningkatan substansial pada pengambilan dari air permukaan (air sungai) pada 2024 yang mengindikasikan adanya pergeseran sumber air utama yang digunakan dari air laut ke air sungai, untuk menyesuaikan dengan biaya operasional, efisiensi proses pendinginan, atau ketersediaan air di lokasi pembangkit. Penurunan total volume air secara keseluruhan ini di antaranya disebabkan adanya efisiensi teknologi pembangkit yang meningkat, penyesuaian beban operasi akibat fluktuasi permintaan listrik, penerapan kebijakan efisiensi air dan konservasi lingkungan, serta ketersediaan sumber air di wilayah pembangkit.

Total penggunaan air oleh Perusahaan selama tahun 2024 sebanyak 6.920.105,68 megaliter, berhasil menurun 18,75% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 8.516.974,88 megaliter. Selain itu, rasio intensitas air Perusahaan pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,000077 megaliter/kWh, yang juga berhasil menurun 23,00% dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,000100 megaliter/kWh. Penurunan ini dapat terjadi karena terdapat program minimasi penggunaan air oleh PLN Indonesia Power akibat dari kebijakan *Holding-Subholding* PT PLN (Persero), sehingga jumlah penggunaan air Perusahaan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah produksi bruto pembangkit yang dikelolanya.

Selain itu, selama tahun 2024 PLN Indonesia Power berhasil mencatatkan volume konservasi air sebesar 2.735,449,79 m³, atau setara dengan 39,53% dari total penggunaan air. Berbagai inisiatif efisiensi dan konservasi

sustainable water management practice brings various benefits, such as improved energy efficiency, operational cost savings, reduced water pollution, and support for clean water availability for communities. Moreover, this initiative also strengthens relationships with local communities and stakeholders, while enhancing the Company's social and environmental reputation, in line with PLN Indonesia Power's commitment to sustainability and ecological responsibility.

The total volume of water withdrawal from all sources in 2024 was recorded at 21,093,497.90 megaliters, representing a 16.63% decrease compared to 25,301,716.63 megaliters in 2023. This reduction was largely due to decreased withdrawals from surface water (seawater) and groundwater. However, there was a substantial increase in withdrawals from surface water (river water) in 2024, indicating a shift in the primary water source from seawater to river water. This shift may be driven by factors such as operational cost considerations, cooling process efficiency, or water availability at power plant locations. The overall decrease in total water volume was influenced by factors such as improved power plant technology efficiency, adjustments in operational load due to fluctuations in electricity demand, implementation of water efficiency and environmental conservation policies, and the availability of water sources in power plant areas.

The total water consumption by the Company in 2024 was 6,920,105.68 megaliters, representing a decrease of 18.75% compared to 8,516,974.88 megaliters in 2023. In addition, the Company's water intensity ratio in 2024 was recorded at 0.000077 megaliters/kWh, a 23.00% decrease from 0.000100 megaliters/kWh in 2023. This reduction was possible due to PLN Indonesia Power's water minimization program resulting from the *Holding-Subholding* policy of PT PLN (Persero). As a result, the Company's water usage increased in line with the rise in gross power generation managed by the Company.

Moreover, in 2024, PLN Indonesia Power successfully recorded a water conservation volume of 2,735,449.79 m³, equivalent to 39.53% of total water usage. Various water resource efficiency and conservation initiatives based

sumber daya air berdasarkan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) yang telah dilakukan diantaranya pemanfaatan limbah cair dengan sistem *Reverse Osmosis* (RO); reusing limbah cair PLTU batubara untuk penyiraman *stockpile*; optimalisasi *Water Treatment Plant* dengan penggantian resin Anion dan Kation; pemanfaatan air produk *Sampling Balance of Plant* untuk perkantoran dan pemadam kebakaran; optimalisasi pemakaian Air *Make Up* dengan mencegah kebocoran dan program lainnya; serta implementasi pengolahan air limbah dari proses produksi yang diolah di WWTP dengan metode ekualisasi, netralisasi, koagulasi, filtrasi.

on the Reduce, Reuse, Recycle (3R) principles included: utilization of wastewater using a Reverse Osmosis (RO) system; reusing wastewater from coal-fired power plants for stockpile irrigation, optimization of the Water Treatment Plant by replacing anion and cation resins; utilization of Sampling Balance of Plant water for office and fire-fighting purposes; optimization of Make-Up Water usage through leak prevention programs and other initiatives; and implementation of wastewater treatment from production processes at the WWTP using methods such as equalization, neutralization, coagulation, and filtration.

Pengelolaan Emisi Udara

Air Emission Management

PLN Indonesia Power secara konsisten melakukan pemantauan, pengukuran, dan pengendalian terhadap pencemaran udara guna memastikan bahwa seluruh emisi gas buang dari Unit Pembangkitan tetap berada dalam batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Upaya pengelolaan emisi ini mencakup inventarisasi dan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), inventarisasi dan intensitas Emisi Gas Buang, pelaksanaan program pengurangan emisi dan zat perusak ozon, serta penerapan mekanisme pembangunan bersih.

PLN Indonesia Power consistently monitors, measures, and controls air pollution to ensure that all exhaust gas emissions from its power generation units remain within the stipulated environmental quality standards. These emission management efforts include inventory and intensity of Greenhouse Gas (GHG) Emissions, inventory and intensity of exhaust gas emissions, implementation of programs for emission and ozone-depleting substance reduction, and application of clean development mechanisms.

Inventarisasi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Greenhouse Gas (GHG) Emission Inventory and Intensity

Inventarisasi Emisi GRK *Scope 1*, dilakukan atas emisi dari pembakaran stasioner (*stationary combustion kit*) pada unit pembangkit, penggunaan genset, serta pembakaran pada kendaraan operasional dan alat berat (*mobile combustion*). Selain itu, emisi *fugitive* yang berasal dari pelepasan gas SF₆, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan refrigeran turut dihitung, termasuk emisi dari sistem pengolahan air bersih (*Water Treatment Plant/WTP*) dan air limbah (*Wastewater Treatment Plant/WWTP*). Adapun emisi GRK *Scope 2* mencakup emisi tidak langsung dari konsumsi listrik yang diimpor, termasuk penggunaan listrik di seluruh kantor dan bangunan operasional Perusahaan yang berasal dari luar pembangkit. PLN Indonesia Power mulai mengembangkan cakupan inventarisasi GRK untuk

The Scope 1 GHG emission inventory covers direct emissions from stationary combustion kits at power generation units, the use of gensets, and combustion from operational vehicles and heavy equipment (mobile combustion). Additionally, it includes fugitive emissions from the release of SF₆ gas, light fire extinguishers (APAR), and refrigerants, along with emissions from water treatment plants (WTP) and wastewater treatment plants (WWTP). Meanwhile, scope 2 GHG emissions encompass indirect emissions from imported electricity consumption, including electricity used across all Company offices and operational buildings that originates from outside the power plants. PLN Indonesia Power has also begun expanding its GHG inventory to Scope 3, which includes other indirect emissions from activities

Scope 3, yang mencakup emisi tidak langsung lainnya dari aktivitas di luar kendali langsung Perusahaan. Inventarisasi ini masih bersifat parsial, yaitu untuk kategori "*upstream transportation and distribution*" yang dihitung dari transportasi bahan bakar yang dibeli, "*business travel*" yang dihitung dari perjalanan dinas pegawai, dan "*waste generated in operations*" yang dihitung dari limbah padat. Hasil penghitungan inventarisasi gas rumah kaca pada tahun 2024 adalah 75.963.590,05 ton CO₂e, meningkat 9,47% dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 69.394.393,61 ton CO₂e.

PLN Indonesia Power juga secara rutin menghitung intensitas emisi GRK untuk mengukur tingkat reduksi emisi GRK. Intensitas emisi GRK merupakan parameter penting untuk mengetahui total beban emisi GRK untuk setiap produksi tenaga listrik. Jenis kegiatan yang termasuk dalam perhitungan timbulan emisi GRK terdiri dari *scope 1*, *scope 2*, dan *scope 3* yang meliputi gas rumah kaca CO₂, CH₄, dan N₂O. Pada tahun 2024, rasio intensitas emisi GRK Perusahaan tercatat sebesar 0,844 ton CO₂e/MWh, meningkat 3,30% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,817 ton CO₂e/MWh. Peningkatan intensitas emisi ini disebabkan oleh adanya perluasan lingkup inventarisasi, yang meliputi emisi dari semua sumber yang tercakup dalam *Scope 1*, *Scope 2* dan *Scope 3*, serta peningkatan volume produksi listrik yang berdampak pada peningkatan total emisi yang dihasilkan.

Mekanisme Pembangunan Bersih

Clean Development Mechanism

PLN Indonesia Power turut berpartisipasi dalam skema Mekanisme Pembangunan Bersih atau *Clean Development Mechanism* (CDM) untuk mendorong pengembangan proyek-proyek rendah karbon yang dapat memitigasi timbulnya emisi GRK, sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi melalui skema perdagangan karbon (*carbon credit*). Salah satu proyek CDM yang dijalankan PLN Indonesia Power adalah *Capacity Upgrade* Unit PLTP Gunung Salak, yang dioperasikan sejak tahun 1994 dengan dua unit pembangkit dengan kapasitas 2x55 MW. Tiga tahun kemudian yakni tahun 1997, satu unit tambahan mulai dioperasikan dengan kapasitas yang sama, dan pada tahun 2004 dilakukan peningkatan kapasitas (*capacity upgrade*) sebesar 5 MW per unit. Dengan peningkatan tersebut, total kapasitas PLTP

outside the Company's direct control. This inventory is currently partial, focusing on "upstream transportation and distribution" (calculated from purchased fuel transportation), "business travel" (from employee business trips), and "waste generated in operations" (from solid waste). In 2024, the total greenhouse gas emissions were calculated at 71,589,177.51 tons CO₂e, an increase of 3.16% compared to 2023's 69,394,393.61 tons CO₂e.

PLN Indonesia Power also routinely calculates its GHG emission intensity to measure the level of GHG emission reduction. This intensity is a crucial parameter for determining the total GHG emission burden for each unit of electricity produced. The activities included in the GHG emission calculation cover Scope 1, Scope 2, and Scope 3, encompassing greenhouse gases like CO₂, CH₄, and N₂O. In 2024, the Company's GHG emission intensity ratio was 0.844 tons CO₂e/MWh, a 3.30% increase from 0.817 tons CO₂e/MWh in 2023. This rise in emission intensity was attributed to the expanded scope of the inventory, including all sources under Scope 1, Scope 2, and Scope 3, as well as an increase in electricity production volume, which led to higher overall emissions.

PLN Indonesia Power has participated in the Clean Development Mechanism (CDM) scheme to promote the development of low-carbon projects that can mitigate greenhouse gas (GHG) emissions while also generating economic benefits through carbon trading (carbon credits). One of the CDM projects implemented by PLN Indonesia Power is the Capacity Upgrade of the Gunung Salak Geothermal Power Plant (GPP), which has been in operation since 1994 with two generating units, each with a capacity of 55 MW. Three years later, in 1997, an additional unit with the same capacity began operations. In 2004, a capacity upgrade of 5 MW per unit was carried out. With this upgrade, the total capacity of the Gunung Salak GPP increased to 3 x 60 MW, or a total of 180 MW, which is distributed to the Java-Madura-Bali power grid. Following the Holding-Subholding restructuring,

Gunung Salak menjadi 3 × 60 MW atau setara dengan 180 MW, yang disalurkan ke sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali. Paska *Holding-Subholding*, PLN Indonesia Power menerima alih aset VCS PLTA Musi, sehingga saat ini PLN Indonesia Power memiliki dua aset *carbon credit* internasional, yakni VCS PLTP Gunung Salak dan VCS PLTA Musi. Proses validasi dan verifikasi pertama proyek telah selesai pada tahun 2009, dan hingga kini PLTP Gunung Salak telah menghasilkan 1,603,460 ton *Verified Carbon Units*(VCUs).

Inventarisasi dan Intensitas Emisi Gas Buang

Inventory and Intensity of Exhaust Gas Emissions

Inventarisasi juga dilakukan terhadap emisi non-GRK, yakni emisi gas buang yang bersumber dari cerobong pembangkit, mencakup Karbon Monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Oksida (NO_x). PLN Indonesia Power telah melakukan upaya untuk menekan timbulan emisi gas buang tersebut diantaranya melalui coal blending, implementasi Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (IPPU), pengendalian operasi, melakukan riset dan pengembangan untuk teknologi baru yang lebih bersih dan efisien, serta melakukan monitoring kualitas pengendalian emisi melalui Pemasangan *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) yang terintegrasi ke Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinu (SISPEK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Emisi gas buang yang dihasilkan PLN Indonesia Power pada tahun 2024 adalah sebesar 282.303.060 kg/tahun, meningkat 6,75% dibandingkan tahun 2023 sebesar 264.443.130 kg/tahun.

Penghitungan intensitas beban emisi gas buang menggunakan denominator jumlah produksi listrik bruto seluruh pembangkit thermal sebagai faktor yang paling relevan juga dilakukan untuk melihat tingkat kontribusi beban emisi gas buang yang dihasilkan dari pembangkit Perusahaan. Jenis emisi yang termasuk dalam perhitungan terdiri dari CO, SO₂, dan NO_x. Rasio intensitas emisi gas buang PLN Indonesia Power tahun 2024 sebesar 0,0031361 kg/kWh, meningkat 0,68% dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 0,0031150 kg/kWh. Peningkatan ini terjadi karena terdapat penambahan jumlah unit pembangkit yang dikelola oleh PLN Indonesia Power akibat dari kebijakan *Holding Subholding* PT PLN (Persero), sehingga jumlah timbulan emisi gas buang Perusahaan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah produksi bruto pembangkit yang dikelolanya.

PLN Indonesia Power acquired the VCS asset of the Musi Hydropower Plant (HPP Musi), bringing the number of international carbon credit assets owned by PLN Indonesia Power to two: the VCS Gunung Salak Geothermal Power Plant and the VCS Musi Hydropower Plant. The first validation and verification process for the project was completed in 2009, and to date, the Gunung Salak GPP has generated 1,603,460 tons of Verified Carbon Units (VCUs).

An inventory was also conducted for non-GHG emissions, namely exhaust gas emissions originating from power plant stacks, which include Carbon Monoxide (CO), Sulfur Dioxide (SO₂), and Nitrogen Oxides (NO_x). PLN Indonesia Power strives to reduce the generation of these exhaust gas emissions through measures such as coal blending, the implementation of Air Pollution Control Installations (IPPU), operational controls, research and development of cleaner and more efficient new technologies, as well as emission quality monitoring through the installation of Continuous Emission Monitoring Systems (CEMS), which are integrated into the Ministry of Environment and Forestry's Continuous Industrial Emission Monitoring Information System (SISPEK). In 2024, the exhaust gas emissions generated by PLN Indonesia Power amounted to 282,303,060 kg/year, an increase of 6,75% compared to 2023, which stood at 264,443,130 kg/year.

To assess the level of contribution from power plant emissions, the emission load intensity was calculated using the total gross electricity production of all thermal power plants as the most relevant denominator. The types of emissions included in this calculation are CO, SO₂, and NO_x. The exhaust gas emission intensity ratio for PLN Indonesia Power in 2024 was 0.0031361 kg/kWh, an increase of 0,68% compared to 2023, which was 0.0031150 kg/kWh. This increase occurred due to the addition of generating units managed by PLN Indonesia Power as a result of PT PLN (Persero)'s *Holding-Subholding* policy, which led to a rise in the Company's total exhaust gas emissions in line with the increase in gross power production from the plants under its management.

Program Inisiatif Penurunan Emisi dan Bahan Perusak Ozon

Ozone Depleting Substances and Emission Reduction Initiative Program

Program inisiatif penurunan emisi juga dilakukan dimana PLN Indonesia Power berhasil mencatatkan penurunan pencemaran udara sebesar 12.733.438,49 ton CO₂e di tahun 2024, meningkat 33,43% dari tahun 2023 yaitu sebesar 9.543.482,66 ton CO₂e. Program inisiatif penurunan emisi tahun 2024 diantaranya:

1. Peningkatan implementasi *Co-firing* di Unit pembangkit PLTU PLN Indonesia Power;
2. Operasional PLTG;
3. Penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) unit PLTM Gunung Wugul, PLTGU Grati *add on*, dan PLTGU Priok berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam upaya menghadapi Nilai Ekonomi Karbon;
4. Peningkatan Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pengembangan PLTA, PLTS, PLTMH, PLTB, PLTBio dan Pembangkit *Hybrid*;
5. Implementasi program efisiensi energi;
6. Program inovasi penurunan emisi lainnya.

Selain itu, PLN Indonesia Power mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam Protokol Montreal untuk melakukan perlindungan lapisan ozon (penghapusan BPO) dengan melakukan upaya dalam mengurangi emisi Bahan Perusak Ozon (BPO) antara lain :

1. Tidak menggunakan bahan yang mengandung BPO/ ODP pada *chiller* dengan menggunakan alternatif bahan Non CFC dan mengganti *refrigerant* AC dari R-22 yang memiliki ODP dan GWP tinggi menjadi R-32 yang lebih ramah lingkungan;
2. Penetapan kebijakan dalam kontrak kerjasama dengan vendor untuk pemakaian pendingin ruangan dengan tidak menggunakan bahan *refrigerant* dan AC yang mengandung BPO;
3. Penetapan kebijakan dalam penyediaan peralatan pemadam kebakaran yang bebas dari kandungan bahan perusak ozon (BPO).

Emission reduction initiative programs have also been implemented, with PLN Indonesia Power successfully recording an air pollution reduction of 12,733,438.49 tons CO₂e in 2024, marking a 33.43% increase compared to 2023, which stood at 9,543,482.66 tons CO₂e. The emission reduction initiatives in 2024 included:

1. Enhanced implementation of co-firing in PLN Indonesia Power's SPP units;
2. Operation of GTPP;
3. Issuance of Emission Reduction Certificates (SPE) for MHPP Gunung Wugul, CCPP Grati add-on unit, and CCPP Priok, based on criteria set as an effort to address the Carbon Economic Value;
4. Increased of New Renewable Energy (NRE) mix through the development of HPP, SoPP, PLTMH, WPP, PLTBio, and hybrid power plants;
5. Implementation of energy efficiency programs;
6. Other innovative emission reduction programs.

Furthermore, PLN Indonesia Power supports the Indonesian Government's commitment to the Montreal Protocol for ozone layer protection (elimination of Ozone-Depleting Substances/ODS) by undertaking efforts to reduce ODS emissions, including:

1. Avoiding the use of ODS/ODP-containing substances in chillers by opting for non-CFC alternatives and replacing R-22 refrigerants, which have high ODP and GWP, with the more environmentally friendly R-32;
2. Establishing policies in cooperation contracts with vendors to use air conditioners and refrigerants free from ozone-depleting substances;
3. Implementing policies to procure fire extinguishing equipment that is free from ozone-depleting substances (ODS).

Pengelolaan Limbah dan Efluen

Waste and Effluent Management

Sebagai hasil sampingan dari proses produksi, limbah dan efluen yang dihasilkan oleh PLN Indonesia Power berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah dari kegiatan pembangkitan diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), limbah non-B3, serta limbah cair (effluen). Untuk meminimalkan dampaknya, perusahaan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) dalam pengelolaan limbah tersebut.

As a byproduct of the production process, waste and effluents generated by PLN Indonesia Power have the potential to cause environmental pollution if not properly managed. Waste from power generation activities is classified into three categories, namely hazardous and toxic waste (B3 waste), non-B3 waste, and liquid waste (effluents). To minimize their impact, the Company applies the 3R principles (*Reduce, Reuse, and Recycle*) in its waste management practices.

Pengelolaan limbah B3

B3 Waste Management

Kegiatan produksi listrik dan pemeliharaan pembangkit menghasilkan limbah B3, seperti pelumas bekas, aki bekas, sludge dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL), resin bekas, limbah yang terkontaminasi B3, majun bekas, serta jenis limbah B3 lainnya seperti sludge oil, kemasan bekas bahan kimia berbahaya, filter oli bekas, bahan kimia kadaluarsa, lampu TL bekas, dan limbah klinis. Penyimpanan limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan izin yang dimiliki masing-masing unit. Pengangkutan limbah dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin resmi sebagai pengangkut limbah B3. Limbah tersebut kemudian diserahkan kepada pihak pemanfaat limbah B3 yang juga memiliki izin dan menjalin kerja sama dengan pengangkut resmi. Pemanfaatan limbah B3 di lingkungan internal hanya diperbolehkan di unit-unit yang telah memperoleh izin pemanfaatan. Sementara itu, unit yang belum memiliki izin wajib mengirimkan limbah B3 ke pihak pemanfaat yang telah terakreditasi dan memiliki kerja sama resmi.

Electricity production and power plant maintenance activities generate hazardous and toxic waste (B3 waste), such as used lubricants, used batteries, sludge from wastewater treatment plants (WWTP), spent resin, B3-contaminated waste, used cleaning rags, and other types of B3 waste such as sludge oil, used chemical containers, used oil filters, expired chemicals, used fluorescent lamps (TL), and clinical waste. The storage of B3 waste is carried out in accordance with applicable regulations and the permits held by each unit. Waste transportation is conducted in cooperation with third parties that are officially licensed to transport B3 waste. The waste is then handed over to licensed B3 waste utilization companies that have established partnerships with the authorized transporters. Internal utilization of B3 waste is only permitted at units that have obtained the required utilization permits. Meanwhile, units that do not have such permits are required to send their B3 waste to accredited and officially partnered utilization entities.

Limbah B3 yang tidak dapat dimanfaatkan secara internal akan dikeluarkan dari Unit Pembangkit dengan cara dikirimkan kepada pihak ketiga yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), baik sebagai pengumpul maupun pemanfaat limbah B3. Limbah yang masih menunggu pengangkutan disimpan sementara di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, dengan durasi penyimpanan yang disesuaikan dengan izin dan peraturan yang berlaku. Setelah limbah B3 diserahkan kepada pihak eksternal yang berwenang, pengelolaannya tidak lagi berada dalam pengawasan langsung Perusahaan, baik terkait jenis limbah maupun proses pengolahannya.

B3 waste that cannot be utilized internally is removed from the power plant unit by being delivered to third parties that are officially licensed by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), either as collectors or B3 waste utilizers. Waste awaiting transportation is temporarily stored in Temporary Hazardous Waste Storage Facilities (TPS), with storage durations adjusted in accordance with the applicable permits and regulations. Once B3 waste is handed over to authorized external parties, it is no longer under the direct supervision of the Company, both in terms of the type of waste and the processing it undergoes.

Selama tahun 2024, jumlah limbah B3 yang dihasilkan dari aktivitas operasional dan pemeliharaan Perusahaan sebesar 2.120,54 ton, berhasil menurun 84,08% dari tahun 2023 yaitu sebanyak 13.322,29 ton dan tidak terdapat limbah B3 yang diimpor/diekspor maupun dikirim secara internasional. Penurunan timbulan limbah B3 ini disebabkan oleh semakin digalakkannya pelaksanaan program reduksi timbulan limbah B3 di unit pembangkit.

PLN Indonesia Power belum memiliki izin pemanfaatan limbah B3. Oleh karena itu, strategi pengurangan timbulan limbah B3 dilakukan melalui upaya reduksi penggunaan B3 dalam proses operasional, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan potensi pencemaran lingkungan. Pada tahun 2024, unit-unit PLN Indonesia Power berhasil melakukan reduksi timbulan limbah B3 sebesar 1.780,61 ton atau 83,97% dari total limbah B3 yang dihasilkan. Jumlah ini meningkat 51,88% dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan reduksi sebesar 1.172,35 ton, yang secara umum disebabkan karena ada penambahan lingkup unit yg melakukan program pengurangan timbulan limbah B3 serta adanya pengembangan dan peningkatan jumlah program pengurangan timbulan limbah B3 di unit pembangkit.

Pengelolaan Limbah Non B3 Terdaftar

Registered Non-B3 Waste Management

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tercantum dalam Lampiran XIV, menyebutkan bahwa limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) hasil pembakaran batubara di fasilitas PLTU dikategorikan sebagai Limbah Non B3 Terdaftar. Dengan klasifikasi ini, pengelolaan FABA dapat dilakukan sebagai limbah non B3, namun tetap memerlukan pengajuan Dokumen Rincian Teknis (DRT) untuk penyimpanan dan pemanfaatannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pengajuan DRT tersebut telah dilakukan pada tahun 2022, dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam Dokumen Persetujuan Lingkungan. Secara keseluruhan, pada tahun 2024 jumlah limbah Non B3 Terdaftar yang dihasilkan sebanyak 1.686.594,18 ton, meningkat 11,04% dari tahun 2023 yaitu sebanyak 1.518.877,78 ton. Peningkatan ini berkorelasi langsung dengan peningkatan produksi listrik di sejumlah pembangkit yang dioperasikan oleh PLN Indonesia Power.

In 2024, the total amount of hazardous and toxic waste (B3 waste) generated from the Company's operational and maintenance activities was 2,120.54 tons, marking a significant decrease of 84.08% compared to 2023, which recorded 13,322.29 tons. In addition, there was no import, export, or international shipment of B3 waste. This reduction in B3 waste generation was driven by the increased implementation of B3 waste reduction programs at power plant units.

PLN Indonesia Power does not yet hold a permit for the utilization of B3 waste. Therefore, the strategy for reducing B3 waste generation is focused on minimizing the use of B3 materials in operational processes, while still complying with applicable regulations to avoid potential environmental pollution. In 2024, PLN Indonesia Power units successfully reduced B3 waste generation by 1,780.61 tons, or 83.97% of the total B3 waste produced. This figure represents a 51.88% increase compared to the 2023 reduction of 1,172.35 tons. The increase was generally attributed to the expanded scope of units implementing B3 waste reduction programs, as well as the development and enhancement of such programs across power plant units.

Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 22 of 2021 on the Implementation of Environmental Protection and Management, as outlined in Annex XIV, stipulates that Fly Ash and Bottom Ash (FABA) waste resulting from coal combustion in coal-fired power plants (SPP) is classified as Registered Non-Hazardous and Toxic Waste (Non-B3 Waste). Under this classification, the management of FABA can be conducted as non-B3 waste, but it still requires the submission of a Technical Detail Document (DRT) for its storage and utilization to the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). The DRT submission was made in 2022 and has since been integrated into the Environmental Approval Document. The total amount of Registered Non-B3 Waste generated in 2024 reached 1,686,594.18 tons, representing an 11.04% increase from 2023, which recorded 1,518,877.78 tons. This increase was directly correlated with the rise in electricity production at several power plants operated by PLN Indonesia Power. The higher national electricity demand, particularly in the Java and Bali regions, had driven increased

Peningkatan beban pasokan listrik nasional, terutama di wilayah Jawa dan Bali, mendorong peningkatan utilisasi PLTU yang secara teknis menghasilkan limbah non B3 seperti FABA sebagai residu dari proses pembakaran batu bara.

Seiring dengan status FABA dari PLTU yang telah dikategorikan sebagai limbah non B3 terdaftar, pemanfaatan limbah tersebut kini dapat dilakukan secara masif baik di lingkungan internal unit pembangkit maupun oleh pihak eksternal. Pemanfaatan ini tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Pada tahun 2024, unit-unit PLTU PLN Indonesia Power telah melakukan pemanfaatan limbah FABA secara masif baik untuk di internal maupun di luar unit melalui kerjasama dengan pihak eksternal. Adapun produk pemanfaatan FABA di Tahun 2024 meliputi paving, batako, hebel dan sejenisnya, *subbase & subgrade*, *ready mix*, beton cor non struktural, substitusi bahan baku semen, jalan beton, kansteen, tetrapod, substitusi material NAF, betor cor struktur, pembenah tanah & bahan pupuk, stabilisasi lahan, bahan baku asbes, penetralisir air asam tambang, briket (bahan bakar PLTU), beton siap pakai, dengan total limbah FABA yang telah dimanfaatkan sebanyak 1.703.887,32 ton atau 101,03% dari total limbah FABA yang dihasilkan.

Jumlah Limbah Non B3 Terdaftar yang dikirimkan ke Pembuangan Akhir pada tahun 2024 sebesar 2.069.577 ton meningkat 0,81% dari tahun 2023 yang tercatat sebesar 2.052.864 ton. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas pembangkitan listrik di sejumlah unit pembangkit PLN Indonesia Power, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya volume residu berupa FABA.

Pengelolaan Limbah Padat Non B3

Non-B3 Solid Waste Management

Limbah non B3 dari kegiatan operasional Perusahaan meliputi sampah organik dan non-organik. PLN Indonesia Power melakukan pemisahan sampah organik dan non-organik, dimana sampah organik diantaranya dimanfaatkan untuk pupuk kompos, pakan ternak serta bahan baku biomassa dan sampah non organik dimanfaatkan menjadi *eco brick*, pengembangan *co-firing* menggunakan campuran sampah serta dikirim ke pihak ketiga atau

utilization of coal-fired power plants, which technically produce non-B3 waste such as FABA as a byproduct of coal combustion.

In line with the reclassification of FABA from SPP as registered non-B3 waste, its utilization can now be carried out on a large scale both internally within power plant units and by external parties. This utilization remains subject to the applicable laws and regulations and must ensure no environmental pollution is caused. In 2024, PLN Indonesia Power's SPP units conducted large-scale utilization of FABA both internally and externally through partnerships with third parties. FABA was utilized in the production of paving blocks, concrete blocks, lightweight concrete and similar products, subbase and subgrade layers, ready-mix concrete, non-structural cast concrete, cement raw material substitution, concrete roads, curbstones (kansteen), tetrapods, NAF material substitution, structural cast concrete, soil amendments and fertilizer materials, land stabilization, raw materials for asbestos, acid mine water neutralization, briquettes (SPP fuel), and ready-to-use concrete. The total amount of FABA utilized in 2024 was 1,703,887.32 tons or 101.03% of the total FABA waste generated.

The total amount of Registered Non-B3 Waste sent to final disposal in 2024 was 2,069,577 tons, an increase of 0.81% from 2023, which recorded 2,052,864 tons. This increase was due to higher electricity generation activity at several PLN Indonesia Power units, which directly led to an increase in the volume of FABA residue.

Non-hazardous and toxic waste (non-B3 waste) from the Company's operational activities includes both organic and non-organic waste. PLN Indonesia Power separates organic and non-organic waste, with organic waste being utilized for compost, animal feed, and biomass raw materials. Meanwhile, non-organic waste is reprocessed into eco-bricks, used in co-firing development by mixing it with other waste, or sent to third parties or Company partners to be processed into

mitra Perusahaan untuk diolah menjadi cinderamata atau kerajinan tangan yang bernilai ekonomis bagi masyarakat. Untuk limbah non B3 yang sudah tidak dapat diolah atau dimanfaatkan, selanjutnya dikelola melalui kerjasama dengan Dinas Kebersihan setempat untuk di buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Selain itu, limbah padat non B3 yang dihasilkan dari aktivitas Perusahaan 1.827,96 ton, meningkat 73,63% dibandingkan tahun 2023 yaitu sebanyak 1.052,80 ton. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas domestik dan penambahan unit yang masuk ke dalam lingkup. Dari total limbah yang dihasilkan tersebut, PLN Indonesia Power berhasil melakukan daur ulang sampah organik menjadi kompos serta daur ulang sampah non-organik menjadi kerajinan tangan dan produk bernilai ekonomi lainnya, sebanyak 115,70 ton atau 6,33% dari total limbah padat non B3.

Pengelolaan Efluen (Air Limbah)

Effluent Management (Waste Water)

Limbah cair yang timbul dari aktivitas produksi dikelola dengan pengawasan dan analisis berkala guna memastikan kepatuhan terhadap standar baku mutu yang berlaku. Pengelolaan ini mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah untuk Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Berdasarkan hasil pemantauan pada tahun 2024, seluruh unit PLN Indonesia Power menunjukkan tingkat kepatuhan 100% terhadap baku mutu air limbah, dengan seluruh parameter yang diuji berada dalam kategori "TAAT". Total volume air limbah PLN Indonesia Power selama tahun 2024 sebanyak 2.851.027,60 megaliter, menurun 14,73% dibandingkan tahun 2023 sebesar 3.343.356,10 megaliter. Penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan limbah cair serta kemungkinan peningkatan kapasitas daur ulang internal, sehingga volume efluen yang dibuang ke lingkungan semakin kecil. Selain itu, kebijakan yang lebih ketat terhadap baku mutu lingkungan dan penerapan praktik 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) juga berkontribusi dalam menekan jumlah efluen yang dilepas ke perairan umum.

souvenirs or handicrafts that hold economic value for the community. Non-B3 waste that can no longer be processed or utilized is managed in collaboration with local sanitation agencies for disposal at the Final Disposal Site (TPA).

Furthermore, the amount of non-B3 solid waste generated from the Company's activities in 2024 was 1,827.96 tons, marking a 73.63% increase from 2023, which recorded 1,052.80 tons. This increase was mainly caused by higher domestic activity and the addition of new operational units included within the reporting scope. Out of the total waste generated, PLN Indonesia Power successfully recycled 115.70 tons of organic waste into compost and non-organic waste into handicrafts and other economically valuable products, representing 6.33% of the total non-B3 solid waste.

Wastewater generated from production activities is managed under strict supervision and regular analysis to ensure compliance with applicable quality standards. This management refers to the provisions outlined in the Indonesian Minister of Environment Regulation No. 8 of 2009 on Wastewater Quality Standards for Thermal Power Plant Activities and Regulation No. 68 of 2016 on Domestic Wastewater Quality Standards. Based on monitoring results in 2024, all PLN Indonesia Power units achieved a 100% compliance rate with wastewater quality standards, with all tested parameters falling within the "COMPLIANT" category. The total volume of wastewater produced by PLN Indonesia Power in 2024 was 2,851,027.60 megaliters, representing a 14.73% decrease compared to 2023, which recorded 3,343,356.10 megaliters. This decrease reflects improved efficiency in wastewater management as well as a possible increase in internal recycling capacity, resulting in a smaller volume of effluent being discharged into the environment. In addition, stricter environmental quality policies and the implementation of the 3R practices (*Reduce, Reuse, Recycle*) have also contributed to reducing the volume of effluent released into public water bodies.

Penanganan Tumpahan

Spill Handling

Sebagai bahan bakar utama dalam operasional PLTU, batubara diangkut ke lokasi pembangkit oleh pihak ketiga. PLN Indonesia Power mensyaratkan kepada pihak ketiga pemilik kapal agar melengkapi kapal dengan alat/tempat penampungan tumpahan (*spillage plate*) di sisi kapal. PLN Indonesia Power juga telah memiliki Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan B3 dan Limbah B3 serta Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3. Atas implementasi sistem dan prosedur yang baik, selama tahun 2024 tidak tercatat adanya insiden tumpahan batubara maupun minyak di seluruh unit pembangkit.

Bahan kimia yang digunakan untuk mendukung pengendalian kualitas siklus uap air pembangkit, pengolahan air baku dan pengolahan air limbah antara lain NaOH, HCl, Chlorine, Hydrazine dan *Phospat/TSP*. Sebagai bentuk mitigasi, PLN Indonesia Power melakukan prosedur pengelolaan bahan kimia untuk memitigasi timbulnya bahaya dan pencemaran lingkungan. Seluruh bahan kimia yang digunakan Perusahaan juga telah dilengkapi dengan *Material Safety Data Sheet* (MSDS) yang diantaranya berisi keterangan identifikasi dan komposisi; pengenalan bahaya; tata cara penanggulangan kebakaran dan tumpahan; penanganan dan penyimpanan dan tata cara perlindungan diri. Selama tahun 2024 tidak tercatat adanya insiden tumpahan bahan kimia di seluruh unit pembangkit PLN Indonesia Power.

As the primary fuel used in the operations of coal-fired power plants (SPP), coal is transported to the power plant sites by third-party contractors. PLN Indonesia Power requires vessel owners to equip their ships with spillage plates on the sides of the vessels. PLN Indonesia Power has also established a Hazardous and Toxic Waste (B3) Emergency Response System and a B3 and B3 Waste Emergency Management Program. With proper implementation of these systems and procedures, no coal or oil spillage incidents were recorded at any power plant unit throughout 2024.

The chemicals used to support steam-water cycle quality control, raw water treatment, and wastewater treatment include NaOH, HCl, Chlorine, Hydrazine, and Phosphate/TSP. As a mitigation measure, PLN Indonesia Power implements a chemical management procedure to prevent hazards and environmental pollution. All chemicals used by the Company are accompanied by a Material Safety Data Sheet (MSDS), which contains information such as identification and composition; hazard identification; fire and spill response procedures; handling and storage guidelines; and personal protection instructions. No chemical spillage incidents were reported at any PLN Indonesia Power generating units in 2024.

Pelestarian Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati

Environmental Conservation and Biodiversity

PLN Indonesia Power memandang pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati sebagai bagian penting dari tanggung jawab Perusahaan demi mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. PLN Indonesia Power berkomitmen untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam dan melindungi keanekaragaman hayati. Berbagai inisiatif telah dijalankan, antara lain program *Eco Office*, *Hijaunesia Power*, serta *Kawan Hijaunesia Power*, sebagai bentuk nyata kontribusi perusahaan terhadap pelestarian lingkungan hidup.

PLN Indonesia Power considers environmental conservation and biodiversity preservation as an essential part of the Company's responsibility in supporting the achievement of sustainable development. The Company is committed to playing an active role in protecting nature and conserving biodiversity. Various initiatives have been implemented, including the *Eco Office* program, *Hijaunesia Power*, and *Kawan Hijaunesia Power*, as tangible contributions to environmental preservation.



Eco Office

Eco Office

Dalam rangka menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada keberlanjutan, PLN Indonesia Power secara berkelanjutan menerapkan program *Eco-Office* di lingkungan kerja. Inisiatif ini dirancang untuk menciptakan suasana kantor yang bersih, nyaman, hemat energi, dan ramah lingkungan, sekaligus menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai keberlanjutan serta membentuk pola pikir peduli lingkungan di kalangan seluruh karyawan.

In order to foster a sustainability-oriented work culture, PLN Indonesia Power continuously implements the Eco-Office program within the workplace. This initiative is designed to create a clean, comfortable, energy-efficient, and environmentally friendly office environment, while also serving as a means to instill sustainability values and cultivate an environmentally conscious mindset among all employees.

Implementasi *Eco-office* di Unit Pembangkit PLN Indonesia Power

Implementation of Eco-office at PLN Indonesia Power Generating Unit



Pengelolaan sampah yang terpilah sesuai dengan jenis sampahnya. Reduksi limbah yang tidak dapat didaur ulang, seperti dengan program reduksi limbah kemasan kantin dengan penggunaan kemasan/alat makan yang dapat digunakan Kembali.

Waste management that is separated according to the type of waste. Reduction of non-recyclable waste, such as with a canteen packaging waste reduction program by using reusable packaging/cutlery.

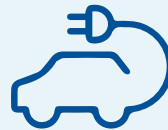


Pemasangan *eco-sign* untuk penghematan tisu di toilet dan penghematan air pada saklar lampu, keran air, lokasi strategis dan ruang publik lainnya di sekitar lingkungan sebagai bentuk dan ajakan kepedulian terhadap lingkungan. Installing *eco-signs* to save tissue in toilets and save water on light switches, water taps, strategic locations, and other public spaces around the environment as a form and invitation to care for the environment.



Digitalisasi kegiatan yang sebelumnya membutuhkan kertas untuk penghematan kertas.

Digitization of activities that previously required paper to save paper.



Transformasi kendaraan operasional berbahan bakar fuel menjadi kendaraan berbahan bakar Listrik.

Transformation of operational vehicles using fuel into electric vehicles.



Program Daur Ulang Baju Bekas Pakai Kedinasan: Transformasi Menuju Masa Depan Berkelanjutan. Recycling Program for Used Official Uniforms: Transformation Towards a Sustainable Future.

PLN Indonesia Power juga melakukan berbagai program peningkatan kesadaran pegawai untuk cinta lingkungan melalui program sustainability, dengan pelaksanaan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penanaman pohon dari hasil konversi aktivitas olahraga pegawai. Pada tahun 2024 telah berhasil dilakukan penanaman sebanyak 8.115 pohon dari 514 peserta.
2. Program Daur Ulang Limbah Seragam Pegawai merupakan program inisiatif untuk mengurangi limbah pakaian bekas yang ditimbulkan dari limbah seragam kantor dan menghindari penyalahgunaan seragam oleh pihak lain. Program ini diluncurkan pada HUT PLN IP Tahun 2024. Pada tahun 2024, program ini diinisiasi untuk Head Office terlebih dahulu, dengan jumlah baju yang dikelola sebanyak 476,7 kg.
3. Coastal clean up yang diselenggarakan bekerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka menjaga kebersihan pantai dari sampah dan pencemaran limbah.
4. Uji emisi kendaraan operasional kantor dan pegawai yang diselenggarakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya menurunkan polusi udara dari kendaraan yang berpotensi berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan.
5. Pelaksanaan *One Employee One Tree* yang merupakan kegiatan penanaman pohon dengan mengajak pegawai PLN Indonesia Power dan mitra kerja untuk melakukan penanaman pohon dan turut menjaga keberlangsungan hidup pohon yang ditanam.

PLN Indonesia Power also carries out various employee awareness programs to foster environmental stewardship through sustainability initiatives. The programs implemented in 2024 include:

1. Tree planting through employee sports activity conversion. In 2024, a total of 8,115 trees were successfully planted by 514 participants.
2. Employee Uniform Recycling Program. This initiative aims to reduce waste from old work uniforms and prevent misuse by unauthorized parties. Launched during the 2024 anniversary of PLN Indonesia Power, the program initially targeted the Head Office, managing a total of 476.7 kg of used uniforms.
3. Coastal Clean-Up program was conducted in collaboration with stakeholders. This activity aimed to maintain coastal cleanliness and reduce waste and pollution.
4. Vehicle Emissions Testing was carried out on office and employee operational vehicles to support government policies in reducing air pollution caused by motor vehicles, which could have negative impacts on human health and the environment.
5. One Employee One Tree Program. This initiative encourages PLN Indonesia Power employees and business partners to plant trees and take part in ensuring the survival and growth of the trees they plant.

Hijaunesia Power

Komitmen PLN Indonesia Power terhadap pelestarian lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan program Hijaunesia Power. Program ini dijalankan oleh unit-unit pembangkit bekerja sama dengan Balai Konservasi, pengelola Taman Nasional, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya, dengan fokus pada upaya konservasi dan restorasi untuk menjaga kelestarian flora dan fauna yang dilindungi.

Proses penetapan metode, wilayah konservasi, dan sumber daya pendukung dilakukan melalui koordinasi bersama para mitra terkait dalam kerangka kerjasama konservasi

PLN Indonesia Power's commitment to environmental preservation and biodiversity conservation in Indonesia is realized through the implementation of Hijaunesia Power program. This program is run by generating units in collaboration with the Conservation Center, National Park managers, the Environmental Service, and other related agencies, with a focus on conservation and restoration efforts to maintain the sustainability of protected flora and fauna.

The process of determining methods, conservation areas, and supporting resources is carried out through coordination with related partners within the framework of





keanekaragaman hayati (KEHATI). Hingga akhir tahun 2024, terdapat enam unit bisnis PLN Indonesia Power yang berada di sekitar kawasan lindung atau wilayah dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, yaitu PLTP Gunung Salak – UBP Kamojang, PLTG Gilimanuk – UBP Bali, UBP Banten 2 Labuan, UBP Grati, PLTP Lahendong – UBP Kamojang, dan UBP Keramasan. Di antara unit-unit tersebut, PLTP Gunung Salak – UBP Kamojang berlokasi langsung di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang merupakan area dengan nilai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, masing-masing unit pembangkit melaksanakan program konservasi dan restorasi KEHATI secara mandiri sesuai karakteristik wilayahnya. Secara keseluruhan, upaya konservasi yang dilakukan oleh PLN Indonesia Power telah mencakup area seluas 365.307,6 hektare.

Upaya konservasi tersebut turut berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan satwa langka dan dilindungi diantaranya spesies Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*) dan Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*). PLN Indonesia Power berhasil mengkonservasi sebanyak 32 ekor Elang Jawa, yang mewakili sekitar 5,85% dari total populasi Elang Jawa di Indonesia. PLN Indonesia Power juga turut berkontribusi dalam konservasi seluruh populasi Badak Jawa yang tercatat sebanyak 81 ekor, atau 100% dari total populasi spesies tersebut.

biodiversity conservation cooperation (KEHATI). As of the end of 2024, there are six PLN Indonesia Power business units located around protected areas or areas with high levels of biodiversity, namely GPP Gunung Salak – GBU Kamojang, GTPP Gilimanuk – GBU Bali, GBU Banten 2 Labuan, GBU Grati, GPP Lahendong – GBU Kamojang, and GBU Keramasan. Among these units, GPP Gunung Salak – GBU Kamojang is located directly within Gunung Halimun Salak National Park area, which is an area with very high biodiversity value. Through collaboration with related parties, each generating unit independently implements KEHATI conservation and restoration program according to the characteristics of its area. Overall, the conservation efforts carried out by PLN Indonesia Power have covered an area of 365,307.6 hectares.

These conservation efforts also contribute to maintaining and preserving rare and protected animals, including Javan Hawk Eagle (*Nisaetus bartelsi*) and Javan Rhinoceros (*Rhinoceros sondaicus*) species. PLN Indonesia Power has successfully conserved 32 Javan Hawk Eagles, representing around 5.85% of the total population of Javan Hawk Eagles in Indonesia. PLN Indonesia Power has also contributed to the conservation of the entire population of Javan Rhinoceros, which is recorded at 81 individuals, or 100% of the total population of the species.

KaWan Hijaunesia Power

Program KaWan Hijaunesia Power merupakan inisiatif penghijauan melalui kegiatan penanaman pohon secara masif di area sekitar unit pembangkit dan kawasan lainnya yang membutuhkan rehabilitasi vegetasi. Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power telah berhasil melakukan penanaman sebanyak 83.295 pohon.

Mengacu pada data dari Canada's National Environmental Agency, rata-rata produksi oksigen per pohon adalah 260 pound atau setara 130 kilogram per tahun. Sehingga jika dikonversikan total pohon yang ditanam melalui Program KaWan Hijaunesia Power diproyeksikan mampu menghasilkan oksigen (O₂) sebesar 10.828.350

KaWan Hijaunesia Power program is a greening initiative through massive tree planting activities in areas around power plants and other areas that require vegetation rehabilitation. In 2024, PLN Indonesia Power succeeded in planting 83,295 trees.

Referring to data from Canada's National Environmental Agency, the average oxygen production per tree is 260 pounds or equivalent to 130 kilograms per year. Thus, if converted, the total trees planted through KaWan Hijaunesia Power Program are projected to be able to produce oxygen (O₂) of 10,828,350 kg/year. This action supports



kg/tahun. Aksi ini mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kualitas udara, yang sekaligus memperkuat peran PLN Indonesia Power dalam mendukung SDGs, khususnya tujuan nomor 13: Penanganan Perubahan Iklim dan tujuan nomor 15: Menjaga Ekosistem Daratan.

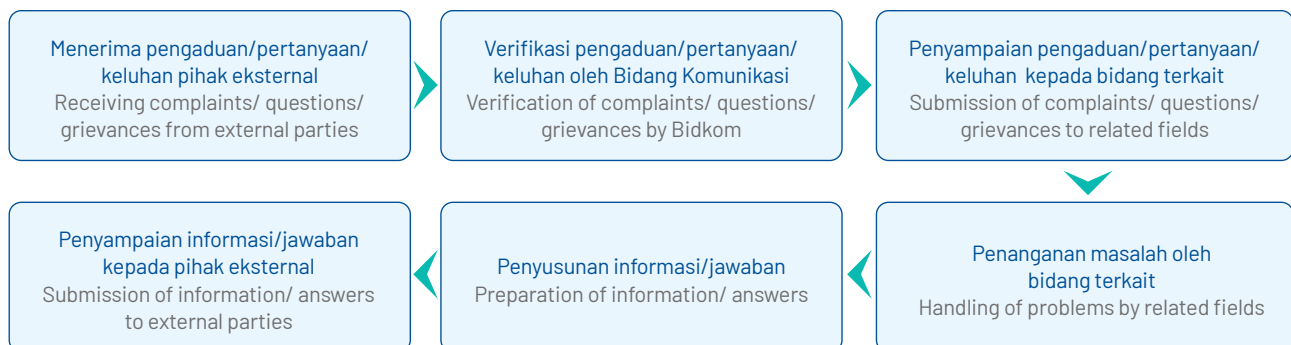
climate change mitigation efforts and improving air quality, which also strengthens the role of PLN Indonesia Power in supporting the SDGs, especially goal number 13: Addressing Climate Change and goal number 15: Maintaining Terrestrial Ecosystems.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan Environmental Complaint Mechanism

Setiap keluhan atau pengaduan yang berkaitan dengan dampak lingkungan akibat aktivitas operasional Perusahaan dapat disampaikan langsung kepada Unit Pembangkit yang bersangkutan, dengan ditujukan kepada General Manager unit tersebut. Penyampaian pengaduan dilakukan sesuai dengan prosedur pelaporan dan mekanisme penyelesaian konflik yang telah ditetapkan. Sepanjang tahun 2024, PLN Indonesia Power tidak menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya terkait isu lingkungan. Selain itu tidak terdapat sanksi administratif, denda, maupun sanksi lainnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang dikenakan kepada Perusahaan.

Any complaints or grievances related to the environmental impact from the Company's operational activities can be submitted directly to the relevant Power Plant Unit, addressed to its General Manager. Submitting a complaint must follow the established reporting procedures and conflict resolution mechanisms. Throughout 2024, PLN Indonesia Power did not receive any reports or complaints from the public or other stakeholders concerning environmental issues. Furthermore, the Company incurred no administrative sanctions, fines, or other penalties related to violations of environmental laws and regulations.

Mekanisme Penanganan Pengaduan Aspek Lingkungan Environmental Complaint Handling Mechanism



Biaya Pengelolaan Lingkungan Environmental Management Costs

Biaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang direalisasikan PLN Indonesia Power pada tahun 2024 sebesar Rp192.943 juta. Biaya tersebut meliputi biaya pengendalian pencemaran air Rp30.793 juta, biaya pengendalian pencemaran udara Rp45.084 juta, biaya pengelolaan limbah B3 Rp24.836 juta, biaya pengelolaan limbah Non B3 dan Non B3 Terdaftar Rp81.407 juta, dan biaya pelestarian KEHATI Rp10.824 juta.

In 2024, PLN Indonesia Power spent Rp192,943 million on environmental management and conservation. This amount included Rp30,793 million for water pollution control, Rp45,084 million for air pollution control, Rp24,836 million for hazardous waste (B3) management, Rp81,407 million for non-hazardous and registered non-hazardous waste management, and Rp10,824 million for biodiversity (KEHATI) conservation.

Kinerja Sosial

Social Performance

Kinerja Sosial Aspek Pelanggan

Social Performance of Customer Aspect

Perusahaan secara konsisten berkomitmen untuk memenuhi ekspektasi para pelanggan dengan menjunjung tinggi prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam setiap interaksinya. Pendekatan ini tidak hanya diarahkan pada pencapaian keuntungan finansial semata, melainkan juga bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang yang harmonis serta menciptakan nilai bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks operasional, energi listrik yang dihasilkan oleh Perusahaan tidak disalurkan secara langsung kepada konsumen akhir. Penyaluran tersebut dilakukan melalui jaringan transmisi kepada PT PLN (Persero), yang dalam hal ini berperan sebagai pembeli tunggal (*single buyer*) atas daya listrik yang diproduksi oleh PLN Indonesia Power.

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan, salah satu inisiatif yang diimplementasikan adalah program sosial yang berfokus pada aspek pelanggan. Program ini merupakan bagian dari upaya strategis Perusahaan dalam mengaktualisasikan kebijakan fokus pelanggan. Tujuannya adalah untuk mendukung PT PLN (Persero) dalam menjaga standar kualitas layanan, memastikan keberlanjutan pengembangan produk dan jasa, memberikan perlindungan kepada pelanggan, serta menjamin akses layanan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam mendukung komitmen tersebut, PLN Indonesia Power telah menetapkan sejumlah kebijakan internal yang mengatur aspek layanan pelanggan. Salah satu kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor 053.K/010/IP/2021 tentang Kebijakan Fokus Pelanggan PT Indonesia Power. Kebijakan ini menjadi landasan normatif dalam pengelolaan hubungan Perusahaan dengan pelanggan serta sebagai bentuk konkret dari penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

The Company is consistently committed to meeting customer expectations by upholding ethical principles and social responsibility in every interaction. This approach is not only directed at achieving financial profit, but also aims to build harmonious long-term relationships and create shared value for all stakeholders. In its operations, the electricity generated by the Company is not distributed directly to end consumers. Such distribution is carried out through a transmission network to PT PLN (Persero), which in this case acts as the single buyer of the electrical power generated by PLN Indonesia Power.

As a form of its social responsibility, the Company implements one initiative of social program that focuses on customers. This program is part of the Company's strategic efforts in actualizing the customer focus policy. The aim is to support PT PLN (Persero) in maintaining service quality standards, ensuring the sustainability of product and service development, providing protection to customers, and ensuring equal access to services for all levels of community. In supporting this commitment, PLN Indonesia Power has established a number of internal policies that stipulate aspects of customer service. One of these policies is stated in the Board of Directors' Decision No. 053.K/010/IP/2021 on Customer-Focused Policy of PT Indonesia Power. This policy is a normative basis in managing the Company's relationship with customers as well as a concrete form of implementing good corporate governance principles.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Aspek Pelanggan

Social Responsibility of Customer Aspect

PLN Indonesia Power berupaya menciptakan nilai tambah yang bersifat mutualistik, yaitu memberikan manfaat timbal balik bagi berbagai pihak. Pelibatan aktif pelanggan dalam berbagai proses bisnis, seperti pengembangan produk, pengambilan keputusan strategis, maupun inisiatif keberlanjutan, diyakini mampu memperkuat keterikatan dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap Perusahaan.

PLN Indonesia Power strives to create mutualistic added value by providing reciprocal benefits for various parties. Active involvement of customers in various business processes, such as product development, strategic decision-making, and sustainability initiatives, is believed to strengthen customer engagement and improve loyalty to the Company. Relationships built on the principles of openness

Hubungan yang dibangun di atas prinsip keterbukaan dan partisipasi ini tidak hanya memperkaya perspektif Perusahaan dalam memahami kebutuhan pasar, tetapi juga mendorong terciptanya inovasi yang lebih relevan dan berkelanjutan.

Dalam konteks tanggung jawab sosial pada aspek pelanggan, PLN Indonesia Power melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat relasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lingkup kegiatan tersebut mencakup mekanisme mendengarkan aspirasi dan masukan pelanggan yang tersebar di berbagai unit pembangkit, serta upaya proaktif dalam memenuhi harapan pelanggan melalui sejumlah inisiatif. Beberapa program yang dijalankan antara lain Forum *Sharing Pembangkit* sebagai wadah pertukaran informasi teknis dan operasional, kegiatan *Customer Gathering* sebagai ajang penguatan relasi dan apresiasi, pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan sebagai alat evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas layanan, serta penyediaan berbagai kanal komunikasi dan informasi produk guna memastikan transparansi serta kemudahan akses bagi pelanggan.

and participation not only enrich the Company's perspective in understanding market needs, but also encourage the creation of more relevant and sustainable innovations.

In social responsibility on customers, PLN Indonesia Power carries out various activities aimed at strengthening relations and improving customer satisfaction. The scope of these activities includes mechanisms for listening to the aspirations and input of customers spread across various generating units, as well as proactive efforts to meet customer expectations through a number of initiatives. Several programs carried out include Power Generation Sharing Forum as a means of exchanging technical and operational information, Customer Gathering activities as a forum for strengthening relations and appreciation, Customer Satisfaction Survey implementation as a tool for continuous evaluation of service quality, and provision of various communication channels and product information to ensure transparency and ease of access for customers.

Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2023 dan Menyusun *Action Plan* OFI Kepuasan Pelanggan 2024

Evaluation of 2023 Customer Satisfaction Survey Results and Preparation of OFI Action Plan for 2024 Customer Satisfaction

Workshop Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Pelanggan dilaksanakan pada 19–21 Februari 2024 secara *offline* di Gedung Dago Inspirasi, PLTA Bengkok dengan peserta dari seluruh Unit PT PLN Indonesia Power baik Unit Bisnis Pembangkitan/ Pemeliharaan dan Bidang terkait di *Head Office* serta mengundang perwakilan Pelanggan dari PLN (Persero) UIP2B JAMALI, PLN (Persero) UIP3B Sumatera, PLN (Persero) UIP3B Kalimantan, dan PLN (Persero) UIP3B Sulawesi. dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2024.
2. Penyusunan Action Plan OFI Kepuasan Pelanggan oleh masing-masing Unit terhadap prioritas perbaikan.
3. Informasi dari pelanggan terkait kinerja Pembangkitan PT PLN Indonesia Power dalam mensuplai sistem kelistrikan di Indonesia.
4. Penandatanganan Komitmen Bersama *Action Plan* OFI Kepuasan Pelanggan Tahun 2024 oleh seluruh perwakilan Unit dan Bidang di *Head Office* yang terkait serta dari

The Evaluation of Customer Satisfaction Survey Results was presented on an offline workshop held on February 19–21, 2024, in Gedung Dago Inspirasi, HPP Bengkok. The attendees came from all PT PLN Indonesia Power Units, including Generation/ Maintenance Business Units and relevant Divisions at Head Office and inviting Customer representatives from PLN (Persero) UIP2B JAMALI, PLN (Persero) UIP3B Sumatra, PLN (Persero) UIP3B Kalimantan, and PLN (Persero) UIP3B Sulawesi. The details of the event are as follows:

1. Evaluation of 2024 Customer Satisfaction Survey Results.
2. Preparation of the OFI Action Plan for Customer Satisfaction by each Unit towards priority improvements.
3. Information from the customers related to power generation performance of PT PLN Indonesia Power in supplying the national system of electricity.
4. Signing of the Joint Commitment on OFI Action Plan for Customer Satisfaction in 2024 by all Unit representatives and relevant Divisions at Head Office as well as Customer

perwakilan pihak Pelanggan. *Action Plan* OFI Kepuasan Pelanggan setiap Unit dengan KPI per item selanjutnya akan dimonitor dan dievaluasi oleh Bidang CMR I dan Bidang CMR II serta diupdate secara rutin dalam Aplikasi Pengelolaan Pelanggan (APPGAN) setiap triwulan.

representatives. OFI Action Plan for Customer Satisfaction of every Unit with the KPI per item will then be monitored and evaluated by CMR I Division and CMR II Division and updated quarterly in the Customer Management Application (APPGAN).

Program Mendengarkan Suara Pelanggan di Unit Pembangkit

Listening to Voice of Customers in the Power Generation Unit

Program mendengarkan suara pelanggan di unit pembangkit sepanjang tahun 2024 dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain:

1. *Forum Sharing* Pembangkit, yang diselenggarakan secara virtual oleh beberapa Unit PT PLN Indonesia Power diantaranya :
 - a. UBP Adipala dengan PLN UIP2B JAMALI tanggal 30 Januari 2024;
 - b. UBP Grati dengan PLN UP2B Jawa Timur tanggal 28 Maret 2024;
 - c. UBP Bali dengan PLN UP2B Bali tanggal 7, 13, dan 27 Mei 2024;
 - d. UBP Mrica dengan PLN UP2B Jawa Tengah & DIY dan PLN UPT Purwokerto tanggal 9 Juli 2024;
 - e. UBP Semarang dengan PLN UP2B Jawa Tengah & DIY tanggal 23 September 2024.
2. *Site Visit* atau Kunjungan dan Sosialisasi ke Pelanggan oleh beberapa Unit diantaranya UBP Tello dengan PLN UP3 Bulukumba tanggal 21 Juni 2024.
3. *Customer Gathering*, yang diselenggarakan oleh beberapa Unit, diantaranya :
 - a. UBP Saguling bersama dengan PLN UP2B Jawa Barat tanggal 25 Maret 2024;
 - b. UBP Semarang bersama dengan PLN UP2B Jawa Tengah & DIY tanggal 28-29 Juni 2024.
 - c. UBP Grati bersama dengan PLN UIP2B Jamali dan PLN UP2B Jawa Timur tanggal 9 Agustus 2024.
 - d. UBP Kamojang bersama dengan PLN UP2B Jawa Barat tanggal 23 - 24 Agustus 2024.
 - e. UBP tello bersama dengan PLN UIP3B Sulawesi tanggal 13 September 2024.
4. Program peringatan Hari Konsumen tanggal 20 April dan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September 2024 dengan memberikan *flyer* / karangan bunga / *pamflet* ucapan kepada para pelanggan Perusahaan.

Listening to voice of customers in the power generation unit program throughout 2024 was carried out through the following activities:

1. Power Generation Sharing Forum, held virtually by several Power Generation Units, including:
 - a. GBU Adipala with PLN UIP2B JAMALI on January 30, 2024;
 - b. GBU Grati with PLN UP2B East Java on March 28, 2024;
 - c. GBU Bali with PLN UP2B Bali on May 7, 13, and 27, 2024;
 - d. GBU Mrica with PLN UP2B Central Java & DIY and PLN UPT Purwokerto on July 9, 2024;
 - e. GBU Semarang with PLN UP2B Central Java & DIY on September 23, 2024.
2. Site Visit and Dissemination to Customers by several Units including GBU Tello with PLN UP3 Bulukumba on June 21, 2024.
3. Customer Gathering, held by several Units, including:
 - a. GBU Saguling together with PLN UP2B West Java on March 25, 2024;
 - b. GBU Semarang together with PLN UP2B Central Java & DIY on June 28-29, 2024.
 - c. GBU Grati together with PLN UIP2B Jamali and PLN UP2B East Java on August 9, 2024.
 - d. GBU Kamojang together with PLN UP2B West Java on August 23-24, 2024.
 - e. GBU Tello together with PLN UIP3B Sulawesi on September 13, 2024.
4. Commemoration program for Consumer Day on April 20 and National Customer Day on September 4, 2024, by providing flyers / flower arrangements / greeting pamphlets to the Company's customers.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2024

Implementation of 2024 Customer Satisfaction Survey

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 1 September - 13 Oktober 2024 kepada seluruh Pelanggan PLN Indonesia Power yang dilakukan oleh pihak Surveyor Independen. Survei Kepuasan Pelanggan dilakukan dengan 2 (dua) metode Survei, yaitu:

1. Metode Kuantitatif, melalui kuesioner yang sifatnya *close* dan *open question*.
2. Metode Kualitatif, melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan *In-depth Interview*.

Pada tahun 2024, diperoleh nilai indeks kepuasan pelanggan untuk Pelanggan Jual Beli Tenaga Listrik sebesar 89.72% meningkat 1.56% dari tahun sebelumnya dengan nilai indeks sebesar 88.34%. Sedangkan untuk nilai indeks kepuasan pelanggan dari Pelanggan Jasa O&M sebesar 88.73% meningkat 3.44% dari tahun sebelumnya dengan nilai indeks sebesar 85.78%. Nilai Kepuasan Pelanggan baik pelanggan Jual Beli Tenaga Listrik maupun Jasa O&M, keduanya termasuk dalam kategori sangat memuaskan.

Peningkatan nilai kepuasan pelanggan ini tidak lepas dari meningkatnya pelayanan prima atas produk dan jasa yang diberikan kepada pelanggan, sehingga pelanggan merasa lebih puas dan *engage* dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Perusahaan akan terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan prima atas produk dan jasa kepada pelanggan sehingga mampu melampaui harapan pelanggan.

The 2024 Customer Satisfaction Survey was carried out on September 1 - October 13, 2024, for all customers of the Company by an Independent Surveyor. The survey was conducted by using 2 (two) survey methods, namely:

1. Quantitative Method, through a questionnaire comprising closed- and open-ended questions.
2. Qualitative Method, through Focus Group Discussion (FGD) and In-depth Interview.

In 2024, the customer satisfaction index value for Electricity Purchase and Sale Customers was 89.72%, an increase of 1.56% from that of the previous year of 88.34%. Meanwhile, the customer satisfaction index value for O&M Service Customers was 88.73%, an increase of 3.44% from that of the previous year of 85.78%. Customer Satisfaction Value for both Electricity Purchase and Sale and O&M Service customers fall under the category of very good.

The increased customer satisfaction value is inseparable from the enhancement in excellent service for products and services provided to customers, thus, customers feel more satisfied and engaged than the previous year. Nevertheless, the Company will continuously strive to maintain and improve excellent service for products and services to customers to go beyond customer expectations.

Workshop Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2024

Workshop on Presentation of 2024 Customer Satisfaction Survey Results

Workshop penyampaian Hasil Survei Kepuasan, Ketidakpuasan dan Keterikatan Pelanggan PLN Indonesia Power tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 20-22 November 2024 yang berlokasi UBP Semarang PT PLN Indonesia Power. Acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Unit Pembangkit PLN IP dan dari *Head Office* serta dari pihak surveyor independen yaitu PT Sucofindo, dengan jumlah peserta sekitar 70 orang. Pada agenda ini disampaikan bahwa hasil Nilai Kepuasan Pelanggan PT PLN Indonesia Power Tahun 2024 sebesar 89,72% meningkat dari tahun sebelumnya, dan Nilai Ketidakpuasan Pelanggan sebesar 9,72% lebih baik dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Nilai Keterikatan Pelanggan sebesar 96,10% lebih baik dari tahun sebelumnya. Dalam kegiatan ini juga dilakukan diskusi terkait hasil survey dan membuat saran untuk perbaikan.

The 2024 Customer Satisfaction, Dissatisfaction, and Engagement Survey Results were presented in a workshop on November 20-22, 2024, in GBU Semarang of PT PLN Indonesia Power. This event was attended by 70 people, comprising all representatives of PLN IP Generation Unit, of Head Office, and of independent surveyor, namely PT Sucofindo. The 2024 Customer Satisfaction Value of PT PLN Indonesia Power was 89.72%, an increase from that of the previous year, and the Customer Dissatisfaction Value was 9.72%, better than that of the previous year. Meanwhile, Customer Engagement Value was 96.10%, better than that of the previous year. This event also discussed the survey results and made suggestions for improvement.



Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk yang Setara kepada Pelanggan

Commitment to Providing Equal Products to Customers

PLN Indonesia Power terus berupaya memberikan layanan yang adil dan setara atas produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Dalam rangka memenuhi hak-hak serta menjawab ekspektasi pelanggan, Perusahaan secara konsisten menyelenggarakan berbagai program dukungan yang berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan (*customer experience*), sekaligus memastikan tersedianya akses informasi yang memadai, akurat, dan transparan mengenai produk dan layanan yang ditawarkan.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan jaminan terhadap kualitas serta mutu produk, PLN Indonesia Power membuka ruang partisipasi pelanggan melalui penerimaan saran, masukan, dan pengaduan secara terbuka. Setiap keluhan yang disampaikan ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku, guna menjamin perbaikan berkelanjutan dalam proses layanan. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian mutu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan kapabilitas layanan Perusahaan.

PLN Indonesia Power strives to provide fair and equal services for the products offered to customers. To fulfill the rights and address customer expectations, the Company consistently organizes various support programs that focus on improving customer experience, while ensuring the availability of adequate, accurate, and transparent access to information regarding the products and services offered.

As a form of accountability and assurance of product quality, PLN Indonesia Power opens up space for customer participation through open acceptance of suggestions, input, and complaints. Every complaint submitted is handled professionally and proportionally in accordance with applicable procedures and provisions, in order to ensure continuous improvement in the service process. This approach not only reflects the Company's commitment to customer satisfaction, but also strengthens the quality control system and increases public confidence in the integrity and capabilities of the Company's services.

Upaya Perusahaan dalam Memenuhi Hak dan Harapan Pelanggan

Company's Measure in Ensuring Customers' Rights and Meeting Their Expectations

Sebagai bagian dari komitmen Perusahaan dalam memenuhi ekspektasi serta menjamin pemenuhan hak-hak pelanggan, PLN Indonesia Power telah merumuskan dan mengimplementasikan serangkaian langkah strategis yang berfokus pada dukungan terhadap pelanggan. Inisiatif-inisiatif tersebut dirancang secara sistematis guna memastikan terciptanya layanan yang responsif, berkualitas, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, sekaligus mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalin hubungan yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan. Adapun langkah-langkah dukungan pelanggan yang dimaksud meliputi:

As part of the Company's commitment to meeting expectations and ensuring the fulfillment of customers' rights, PLN Indonesia Power has formulated and implemented a series of strategic steps that focus on customer support. These initiatives are systematically designed to ensure the creation of responsive, quality, and customer satisfaction-oriented services, while reflecting the Company's social responsibility in establishing sustainable relationships with stakeholders. The customer support measures include:

Upaya Memenuhi Hak dan Harapan Pelanggan

Measures in Ensuring Customers' Rights and Meeting Their Expectations

Uraian Description		Proses Memenuhi Dukungan Pelanggan Process of Fulfilling Customer Support	Proses Menyebarluaskan Persyaratan Dukungan Pelanggan ke Pihak Terkait Process of Disseminating Terms of Customer's Support to Related Parties
Energi Listrik Electrical Energy	Kesiapan 24 Jam Operator Control Room dan ETMC 24 Hours Readiness of Control Room Operator and ETMC	- Menetapkan PIC. - Menetapkan durasi kesiapan. - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan - Determining PIC. - Determining duration of readiness. - Determining etiquette of receiving and answering phone calls. - Evaluating information and media effectiveness for improvement	Membuat dan menetapkan prosedur terkait Pengendalian Niaga Formulating and determining procedure regarding Commerce Control
	Optimalisasi penggunaan aplikasi realtime kesiapan pembangkit Optimization of application utilization on generator's realtime readiness	- Menetapkan PIC untuk setiap aplikasi sesuai dengan Tupoksi. - Menetapkan response time mengacu pada Protap. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan. - Determining PIC for each application in accordance with their job description. - Determining Response Time accordingly to Standard Operation Procedure. - Evaluating information and media effectiveness for improvement.	Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait Protap Conducting socialization toward employees regarding Standard Operating Procedure
	Kesiapan Operator Control Room Readiness of Control Room Operator	- Menetapkan PIC. - Menetapkan durasi kesiapan. - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan - Determining PIC. - Determining duration of readiness. - Determining etiquette of receiving and answering phone calls. - Evaluating information and media effectiveness for improvement	Membuat dan menetapkan prosedur terkait Pengendalian Niaga Formulating and determining procedure regarding Commerce Control
Jasa O&M O&M Service	Kesiapan Operator Control Room dan ETMC Readiness of Control Room Operator and ETMC	- Menetapkan PIC. - Menetapkan durasi kesiapan. - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan - Determining PIC. - Determining duration of readiness. - Determining etiquette of receiving and answering phone calls. - Evaluating information and media effectiveness for improvement.	Membuat dan menetapkan prosedur terkait Pengendalian Niaga Formulating and determining procedure regarding Commerce Control
	Optimalisasi penggunaan aplikasi realtime kesiapan pembangkit Optimization of application utilization on generator's realtime readiness	- Menetapkan PIC untuk setiap aplikasi sesuai dengan Tupoksi. - Menetapkan response time mengacu pada Protap. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan. - Determining PIC for each application in accordance with their job description. - Determining Response Time accordingly to Standard Operation Procedure. - Evaluating information and media effectiveness for improvement	Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait Protap Conducting socialization toward employees regarding Standard Operating Procedure

Informasi Produk dan Sarana Komunikasi Pelanggan

Product Information and Customer Relations Communication Media

Ketersediaan informasi yang akurat serta kemudahan akses terhadap informasi produk merupakan aspek krusial dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan minat pelanggan terhadap layanan yang disediakan oleh perusahaan. PLN Indonesia Power menempatkan transparansi informasi sebagai elemen penting dalam strategi komunikasi Perusahaan, khususnya dalam upaya memperkuat hubungan dengan pelanggan serta memastikan kepuasan mereka terhadap produk dan layanan yang diberikan.

Informasi terkait produk dan layanan PLN Indonesia Power dapat diakses secara terbuka melalui berbagai kanal resmi, termasuk situs web Perusahaan di alamat www.plnindonesiapower.co.id, serta publikasi rutin seperti laporan tahunan yang memuat data dan informasi terperinci mengenai kinerja, inovasi, dan komitmen perusahaan terhadap pelanggan.

Selain menyediakan akses informasi satu arah, PLN Indonesia Power juga membuka ruang interaksi dua arah dengan pelanggan. Pelanggan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, saran, maupun umpan balik terkait tingkat kepuasan mereka terhadap layanan yang diterima. Interaksi ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme evaluasi kinerja layanan, tetapi juga menjadi sarana penting dalam proses perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

The availability of accurate information and easy access to product information are crucial aspects in building trust and increasing customer interest in the services provided by the Company. PLN Indonesia Power places transparency of information as an important element in the Company's communication strategy, particularly in efforts to strengthen relationships with customers and ensure their satisfaction with the products and services provided.

Information related to PLN Indonesia Power products and services is openly accessible through various official channels, including the Company's website at www.plnindonesiapower.co.id, as well as regular publications such as annual reports containing detailed data and information regarding the Company's performance, innovation, and commitment to customers.

In addition to providing one-way access to information, PLN Indonesia Power also opens up a two-way interaction space with customers. Customers are given the opportunity to submit complaints, questions, suggestions, or feedback regarding their level of satisfaction with the services received. This interaction not only functions as a mechanism for evaluating service performance, but also becomes an important means in the continuous improvement process.

Media Komunikasi Hubungan Pelanggan

Customer Relations Communication Media

Media Komunikasi Utama Main Communication Media	Proses Menetapkan Persyaratan Dukungan Pelanggan Customer Support Requirement Determination Process	Proses Menyebarluaskan Persyaratan ke Internal Tenaga Kerja Requirement Dissemination to Workforce
PLN melalui PLN UI P2B (Energi Listrik 500kV dan 150kV) PLN via PLN UI P2B (500 kV and 150 kV electricity)		
Telepon/WhatsApp 021-526 7666 - Ext. 2222/3333 : <i>Operasional Realtime</i>(ETMC) - Ext. 2222/3333 : Realisasi Kinerja Pembangkit HDKP (Harian Deklarasi Ketidaksiapan Pembangkit) - WA Group-ROM P2B-IP: komunikasi ROM - Handphone ETMC 0811 937 740 : Kondisi pembangkit dan operasional - Handphone ETMC 0811 937 740 : Kondisi Pembangkit dan Operasional - Hotline Unit Pembangkit : Naik turun beban, <i>Start-Stop</i> Pembangkit, Kondisi Pembangkit	- Menetapkan PIC untuk telepon. - Menetapkan respon time. - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan. - Determining PIC for phone calls. - Setting up response time. - Establishing etiquette to receive and answer calls. - Evaluating information and media effectiveness for improvement.	- Menetapkan instruksi kerja (IPM, IK). - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction (IPM, IK). - Disseminating relevant information to the related employees.

Media Komunikasi Utama Main Communication Media	Proses Menetapkan Persyaratan Dukungan Pelanggan Customer Support Requirement Determination Process	Proses Menyebarluaskan Persyaratan ke Internal Tenaga Kerja Requirement Dissemination to Workforce
Phone/WhatsApp Number 021-526 7666 - Ext. 2222/3333: Real-time Operations (ETMC) - Ext. 2222/3333: Power Plant Performance realization		
HDKP (Power Plant Unreadiness Daily Declaration) - WA Group-ROM P2B-IP: ROM communication - ETMC phone number 0811937740: Power Plant Condition and Operations - Power Generation Unit Hotline: Load fluctuation, power plant start-stop, plant conditions		
Website/Aplikasi - Aplikasi HDKS (Rapsodi): Naik turun beban dan Start-Stop Pembangkit - Aplikasi HDKP IKP : Ketidaksiapan Pembangkit - Aplikasi GAIS : Kinerja Pembangkit. - Aplikasi JBOS Plan : Perencanaan Pembangkit - Aplikasi ProNIA : kondisi realtime sistem pembangkitan - Aplikasi Neraca Energi : kWh Energi	- Menetapkan PIC untuk aplikasi sesuai dengan Tupoksi. - Menetapkan respon time mengacu pada Protap. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan. - Determining PIC for every application in line with job descriptions - Determining response time referring to procedures - Evaluating information and media effectiveness for improvement.	- Menetapkan instruksi kerja (IPM, IK). - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction (IPM, IK). - Disseminating relevant information to related employees.
Website/Application - HDKS app (Rapsodi): Load fluctuation and Plant Start-Stop - HDKP IKP app: Power Plant Unreadiness - GAIS app: Power Plant Performance - JBOS Plan app: Power Plant Planning - ProNIA app: the real-time status of the generation system - Neraca Energi app: Energy kWh		
E-mail etmc@plnindonesiapower.co.id Perencanaan Operasi, Operasional Realtime Operation Plan, Real-time Operations	- Menetapkan kesiapan pembangkit (ROB, ROM, dan ROH). - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan. - Determining plant readiness (ROB, ROM, and ROH). - Evaluating information and media	- Menetapkan instruksi kerja (IPM, IK). - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction. - Disseminating relevant information to related employees.
Surat PT PLN Indonesia Power Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18, Jakarta Selatan, 12950 Settlement/Kontrak Mail PT PLN Indonesia Power Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18, Jakarta Selatan, 12950 Settlement/Contract	- Menetapkan kontrak Single Price. - Menetapkan JTF. - Menetapkan perencanaan penjualan. - Menetapkan kondisi status pembangkit. - Determining Single Price contract. - Determining JTF. - Determining sales plan. - Determining power plant status.	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction. - Disseminating relevant information to related employees.
Rapat Rapat Alokasi Energi (RAE) dan Rapat koordinasi pembahasan Kontrak dan Settlement Meeting Energy Allocation Meeting (RAE) and coordination meeting to discuss Contract and Settlement	- Menetapkan hasil evaluasi energi bulan yang lalu dan perencanaan bulan depan. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan. - Determining the results of preceding months' energy evaluation and planning for the following month - Evaluating information and media effectiveness for improvement.	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction. - Disseminating relevant information to related employees.

Media Komunikasi Utama Main Communication Media	Proses Menetapkan Persyaratan Dukungan Pelanggan Customer Support Requirement Determination Process	Proses Menyebarluaskan Persyaratan ke Internal Tenaga Kerja Requirement Dissemination to Workforce
PLN melalui PLN Distribusi (energi listrik ≤20kV) PLN Via PLN Distribusi (electricity ≤20 kV)		
Telepon • 021-526 7666 • Handphone ETMC: 0811 937 740 • Telepon direct ETMC: 021-522 9813 Phone • 021-526 7666 • ETMC Cellular phone: 0811 937 740 • Direct call to ETMC: 021-522 9813	- Menetapkan PIC untuk telepon. - Menetapkan respon time. - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon. - Determining PIC for phone calls. - Setting up response time. - Establishing etiquette to receive and answer calls.	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction. - Disseminating relevant information to related employees.
E-mail E-mail kepada Bidang CMR II/ personal E-mail : Settlement/kontrak E-mail E-mail to DIV CMR I/personal e-mail: Settlement/Contract	- Menetapkan kesiapan pembangkit. - Determining plant readiness.	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction. - Disseminating relevant information to related employees.
Surat PT PLN Indonesia Power Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18, Jakarta Selatan, 12950 Settlement/Kontrak Mail PT PLN Indonesia Power Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18, Jakarta Selatan, 12950 Settlement/Contract	- Menetapkan kontrak Single Price. - Menetapkan JTF. - Menetapkan kondisi status pembangkit. - Determining Single Price contract. - Determining JTF. - Determining power plant status.	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction. - Disseminating relevant information to related employees.
Rapat Rapat koordinasi pembahasan kontrak dan settlement Meeting Coordination meeting to discuss contract and settlement	- Menetapkan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kontrak/settlement. - Determining planning and evaluation of contract/settlement implementation.	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction. - Disseminating relevant information to related employees.
PLN Pelanggan Jasa O&M PLN via O&M Services Customers		
Telepon • 021-526 7666 : Koordinasi, Progres, Kajian • Telepon personal : Koordinasi, Progres, Kajian Phone • 021-526 7666: Coordination, Progress, Review • Personal phone: Coordination, Progress, Review	- Menetapkan PIC untuk telepon. - Menetapkan respon time. - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon. - Determining PIC for phone calls. - Setting up response time. - Establishing etiquette to receive and answer calls.	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan rapat internal Jasa O&M. - Determining work instruction. - Holding internal O&M Services meeting.
E-mail E-mail ke Bidang CMR I dan Bidang CMR II / personal e-mail E-mail E-mail to Division CMR I and Division CMR II /personal e-mail	- Menetapkan kesiapan pembangkit (ROB, ROM, dan ROH). - Determining plant readiness (ROB, ROM, and ROH).	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan rapat internal Jasa O&M. - Determining work instruction. - Holding internal O&M Services meeting.
Rapat Rapat Jasa O&M Meeting O&M Service Meeting	- Melakukan hasil evaluasi kontrak yang masih berjalan. - Conducting evaluation of ongoing contract.	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan rapat internal Jasa O&M. - Determining work instruction. - Holding internal O&M Services meeting.

Mekanisme Penyampaian dan Penanganan Pengaduan Pelanggan

Customer Complaint Filing and Handling Mechanism

Sebagai wujud komitmen terhadap tanggung jawab sosial Perusahaan serta menjamin perlindungan hak-hak pelanggan, PLN Indonesia Power telah mempersiapkan berbagai perangkat pendukung yang berfungsi untuk mengoptimalkan kualitas layanan. Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah penyediaan mekanisme penanganan pengaduan pelanggan yang terstruktur, responsif, dan mudah diakses.

Mekanisme ini dirancang sebagai bagian integral dari sistem manajemen layanan pelanggan yang tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan keluhan secara efektif, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi perbaikan layanan melalui umpan balik yang diterima. Dengan demikian, Perusahaan tidak hanya mampu merespons secara tepat terhadap setiap permasalahan yang muncul, tetapi juga dapat secara proaktif meningkatkan standar pelayanan dalam jangka panjang.

As a form of commitment to the Company's social responsibility and to ensure the protection of customer rights, PLN Indonesia Power has prepared various supporting tools that function to optimize service quality. One concrete form of this effort is the provision of a structured, responsive, and easily accessible customer complaint handling mechanism.

This mechanism is designed as an integral part of customer service management system that not only aims to resolve complaints effectively, but also to identify potential service improvements through the feedback received. Thus, the Company is not only able to respond appropriately to any problems that arise, but can also proactively improve service standards in the long term.

Mekanisme Penanganan Pengaduan Pelanggan

Customer Complaint Handling Mechanism



Selama tahun 2024, tidak terdapat pengaduan pelanggan baik dari aspek kesehatan dan keselamatan terkait dengan pendistribusian listrik kepada pelanggan dan pengaduan mengenai privasi pelanggan maupun aspek ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait dengan penyediaan informasi produk dan komunikasi pemasaran.

Penanganan pengaduan pelanggan dikelola dan dilaksanakan oleh Divisi di *Head Office* PLN Indonesia Power, yaitu Bidang Contract Management and Customer Relations I (CMR I) untuk Pelanggan Unit Pembangkit dibawah Direktorat Operasi Pembangkit Batubara dan Bidang Contract Management and Customer Relations II (CMR II) Pelanggan Unit Pembangkit dibawah Direktorat Operasi Pembangkit Gas, serta dimonitor secara otomatis dalam *Report Application of Power System Operation and Data Integration* (RAPSODI) oleh operator ETMC. Hasilnya dikompilasi dan dievaluasi oleh Vice President of Contract Management and Customer Relations I dan Vice President of Contract Management and Customer Relations II serta Unit Pembangkit/Divisi di *Head Office* yang terkait, untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi dan kemudian ditindaklanjuti.

Throughout 2024, no customer complaints were made about the health and safety aspects related to power distribution to customers, their privacy or non-compliance with relevant regulations on provision of product information and marketing communications.

At the Head Office, customer complaints are handled by the Division of Contract Management and Customer Relations I (CMR I) for Generation Unit Customers under Coal-Fired Generator Operation Directorate and the Division of Contract Management and Customer Relations II (CMR II) for Generation Unit Customers under Gas-Fired Generator Operation Directorate. They are automatically monitored by Report Application of Power System Operation and Data Integration (RAPSODI) by ETMC operator. The result is compiled and evaluated by the Vice President of Contract Management and Customer Relations I, Vice President of Contract Management and Customer Relations II, as well as Power Generation Unit/Division at the corresponding Head Office, to come up with solutions and be followed up.

Pengembangan Pelayanan dan Keamanan Produk bagi Pelanggan

Development of Customer Service and Product Security

PLN Indonesia Power secara berkelanjutan melakukan pengembangan dan inovasi dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan listrik yang andal sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen strategis perusahaan untuk memberikan kontribusi positif, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Dalam pelaksanaannya, Perusahaan senantiasa mengedepankan prinsip produksi yang bertanggung jawab, sejalan dengan tujuan untuk memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan bagi masyarakat luas. Hal ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan, tetapi juga menunjukkan peran aktif PLN Indonesia Power dalam mendukung transisi energi yang inklusif dan berkeadilan.

PLN Indonesia Power continuously carries out development and innovation to ensure the availability of reliable electricity supply while improving service quality to all stakeholders. This effort is part of the Company's strategic commitment to provide positive contributions, both directly and indirectly, to the sustainable development agenda.

In its implementation, the Company always prioritizes the principle of responsible production, in line with the goal of ensuring access to affordable, reliable, and sustainable energy for the wider community. This not only reflects the Company's environmental and social responsibility, but also demonstrates PLN Indonesia Power's active role in supporting an inclusive and equitable energy transition.

Pengembangan dan Inovasi Pelayanan Pelanggan

Impact and Security of Products for Customers

Perusahaan secara konsisten melaksanakan pengembangan produk yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan PT PLN (Persero). Inisiatif ini mencerminkan upaya Perusahaan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan energi saat ini, tetapi juga memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap relevan, efisien, dan bertanggung jawab terhadap aspek lingkungan, sosial, serta ekonomi dalam jangka panjang. Pengembangan dan inovasi pelayanan pelanggan yang dilakukan PLN Indonesia Power pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan media komunikasi pelanggan dengan aplikasi *messenger* sebagai media komunikasi privat dengan Pelanggan serta sarana untuk menginformasikan laporan-laporan terkait kinerja unit pembangkit listrik Perusahaan secara rutin.
2. Menambahkan media Komunikasi berupa JWOT sebagai sarana komunikasi dengan pelanggan yang dapat merekam suara pembicaraan yang terjadi saat itu.
3. Menambahkan aplikasi niaga sebagai sarana untuk *monitoring* kinerja pembangkit Perusahaan secara *realtime* yang dapat diakses oleh pelanggan berbasis *web bases*.
4. Mengembangkan aplikasi pengelolaan pelanggan untuk monitoring dan evaluasi tindak lanjut *action plan* OFI atas hasil survei pelanggan.

The Company consistently carries out product development that is oriented towards sustainability principle part of its commitment to supporting the improvement of PT PLN (Persero) service quality. This initiative reflects the Company's efforts to not only meet current energy needs, but also ensure that the services provided remain relevant, efficient, and responsible for environmental, social, and economic aspects in the long term. The development and innovation of customer service carried out by PLN Indonesia Power in 2024 were as follows:

1. Adding a messenger application as a private communication medium with customers as well as a means to inform reports on the performance of the Company's power plant units on a regular basis.
2. Adding JWOT communication medium as a means of communication with customers. This service features voice recording of ongoing conversations.
3. Adding a web-based commercial application for real-time monitoring of the Company's power plants.
4. Developing a customer management application for monitoring and evaluating the follow-up of OFI action plan on the customer survey results.

Dampak dan Keamanan Produk bagi Pelanggan

Impact and Security of Products for Customers

Kualitas layanan yang mencakup keandalan pasokan listrik, kecepatan pemulihan dalam kasus gangguan atau pemadaman, serta stabilitas tegangan, merupakan faktor-faktor utama yang secara langsung mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dan pengguna akhir terhadap kinerja PT PLN (Persero). Dalam hal ini, PLN Indonesia Power, sebagai salah satu produsen energi listrik, memiliki peran strategis dalam mendukung terjaminnya ketersediaan energi listrik bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Produk yang dihasilkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dampak signifikan terhadap akses masyarakat terhadap energi, yang digunakan untuk keperluan penting seperti penerangan, pengoperasian peralatan rumah tangga, perangkat elektronik, serta mesin-mesin produksi.

Service quality, including reliability of electricity supply, speed of recovery in the event of disruptions or blackouts, and voltage stability, are the main factors that directly affect the customer satisfaction and end-users with PT PLN (Persero) performance. In this case, PLN Indonesia Power, as one producer of electricity, has a strategic role in supporting the guaranteed availability of electrical energy for people's daily lives. The products generated, both directly and indirectly, have a significant impact on people's access to energy, which is used for important purposes such as lighting, operating household appliances, electronic devices, and production machines.

Ketidakandalan dalam pasokan listrik atau penggunaan peralatan yang tidak sesuai standar dapat menimbulkan berbagai risiko keselamatan, seperti potensi kebakaran, kejutan listrik, maupun cedera lainnya yang dapat membahayakan keselamatan pengguna akhir. Sebaliknya, ketersediaan listrik yang stabil, andal, dan terjangkau memiliki peran fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini diwujudkan melalui dukungan terhadap aktivitas industri, komersial, dan rumah tangga, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan inovasi teknologi.

Risiko langsung terhadap keselamatan dan kesehatan pelanggan dari produk yang dihasilkan PLN Indonesia Power relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh skema distribusi listrik, di mana PT PLN (Persero) bertindak sebagai pembeli tunggal (*single buyer*) yang menyalurkan energi listrik kepada pengguna akhir. Dengan demikian, energi listrik yang diproduksi oleh PLN Indonesia Power tidak didistribusikan langsung kepada konsumen akhir, melainkan melalui jaringan transmisi milik PT PLN (Persero). Oleh karena itu, tidak terdapat data atau informasi mengenai produk yang ditarik kembali (*product recall*) maupun alasan penarikan tersebut.

Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan pelanggan akhir, PLN Indonesia Power tetap berkomitmen untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan yang berlaku, guna meminimalkan dampak negatif terhadap pengguna listrik secara keseluruhan. Perusahaan telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 9001:2015, di mana salah satu fokus utamanya adalah *Customer Focus*, sebagai bentuk nyata dari komitmen Perusahaan terhadap prinsip kepuasan dan perlindungan pelanggan.

Sebagai bagian dari strategi pengelolaan dampak atas produk dan layanan, PLN Indonesia Power juga menegaskan komitmennya dalam menjamin perlindungan terhadap aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan pelanggan. Di samping itu, perusahaan secara konsisten menerapkan prinsip transparansi dalam penyediaan informasi produk serta pelaksanaan komunikasi pemasaran, guna memastikan pelanggan memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan dapat diakses dengan mudah. Komitmen ini diwujudkan dengan memastikan bahwa:

Unreliability in electricity supply or the use of equipment that does not meet standards can pose various safety risks, such as the potential for fire, electric shock, or other injuries that can endanger the safety of end users. Conversely, the availability of stable, reliable, and affordable electricity plays a fundamental role in driving economic growth. This matter is realized through support for industrial, commercial, and household activities, as well as the creation of a climate conducive to investment and technology innovation.

The direct risk to customer safety and health from products generated by PLN Indonesia Power is relatively small. This is due to the electricity distribution scheme, of which PT PLN (Persero) acts as a single buyer that distributes electricity to end users. Thus, the electricity generated by PLN Indonesia Power is not distributed directly to end consumers, but rather through the transmission network owned by PT PLN (Persero). Therefore, there is no data or information regarding the recalled products or the reasons for the recall.

Though not directly in contact with end customers, PLN Indonesia Power remains committed to running its operations in accordance with applicable safety and health standards, in order to minimize the negative impact on electricity users as a whole. The Company has implemented a Quality Management System based on ISO 9001:2015 whose main focuses include Customer Focus as a concrete form of the Company's commitment to the principle of customer satisfaction and protection.

As part of the strategy for managing the impact of products and services, PLN Indonesia Power also emphasizes its commitment to ensuring protection of customer safety, health, and security aspects. In addition, the Company consistently applies transparency principle in providing product information and implementing marketing communications, to ensure that customers obtain accurate, clear, and easily accessible information. This commitment is realized by ensuring that:

1. Seratus persen (100%) unit pembangkit PLN Indonesia Power telah memenuhi kepatuhan (<i>compliance</i>) dan melampaui kepatuhan (<i>beyond compliance</i>) pada Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); 2. Seratus persen (100%) atau seluruh unit pembangkit PLN Indonesia Power berhasil tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja yang dialami oleh pegawai Perusahaan maupun kontraktor/mitra (<i>zero accident</i>) di seluruh unit Perusahaan; 3. Dalam memastikan operasi unit pembangkit berjalan dengan aman dan andal, setiap unit pembangkit PLN Indonesia Power telah memenuhi Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; serta 4. Melakukan evaluasi atas kinerja pembangkit Perusahaan secara berkala.	1. All power generation units of PLN Indonesia Power have obtained 'compliance' and 'beyond compliance' ranks in Assessment Program of Corporate Performance Rank in Environmental Management (PROPER) from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK); 2. All power generation units of PLN Indonesia Power have achieved zero accident as there is no occupational accident taking place involving employees or contractors/partners; 3. To ensure safe and reliable operation of the Company's power generation units, each of them has obtained Certificate of Operational Eligibility (SLO) as referred to in the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 12 of 2021 on Classification, Qualification, Accreditation, and Certification of Electricity Support Service Businesses; and 4. Performance evaluation on every generator is conducted on a regular basis.

Biaya Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pelanggan

Cost of Corporate Social Responsibility Related to Customers

PLN Indonesia Power telah merealisasikan biaya tanggung jawab sosial pelanggan selama tahun 2024 adalah sebesar Rp 865,38 Juta yang meliputi rangkaian kegiatan survei pelanggan mulai dari evaluasi, pelaksanaan dan tindak lanjutnya.

PLN Indonesia Power realized Rp865.38 million for customer social responsibility related to customers throughout 2024, among others were a series of customer survey activities starting from evaluation, implementation, and follow-up.

Kinerja Sosial Aspek Ketenagakerjaan

Social Performance of Employment Aspect

Konteks pembangunan berkelanjutan dan transformasi organisasi modern menekankan adanya keseimbangan antara kehidupan kerja (*work-life balance*) dan kehidupan pribadi dalam mendukung produktivitas, kepuasan kerja, serta kesinambungan karier sumber daya manusia. Keseimbangan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga secara strategis menopang keberlangsungan pengelolaan bisnis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, PLN Indonesia Power memandang pentingnya penerapan prinsip kesejahteraan tenaga kerja sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. Perusahaan

The context of sustainable development and the transformation of modern organizations emphasizes the importance of maintaining a work-life balance to support productivity, job satisfaction, and long-term career continuity of human resources. This balance not only impacts individuals but also strategically supports the long-term sustainability of business operations. Therefore, PLN Indonesia Power views the implementation of workforce well-being principles as an integral part of the company's sustainability strategy. The Company is committed to fostering a fair, safe, and inclusive work environment through

berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan inklusif melalui serangkaian kebijakan dan program ketenagakerjaan yang mengedepankan keadilan sosial. Komitmen ini diwujudkan dalam penyediaan upah yang layak, kesetaraan gender, peluang karir tanpa diskriminasi, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, serta akses pada pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

PLN Indonesia Power telah merujuk dan menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaannya dengan peraturan nasional yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, pelaksanaan program tanggung jawab sosial ketenagakerjaan juga sejalan dengan prinsip-prinsip *Decent Work* yang dicanangkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 5 (*Gender Equality*), SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), dan SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*). Inisiatif keberlanjutan perusahaan dalam aspek ketenagakerjaan mencakup:

1. Pemberian kesempatan kerja yang setara tanpa diskriminasi terhadap suku, agama, gender, maupun latar belakang sosial.
2. Dukungan terhadap peningkatan partisipasi kerja perempuan melalui kebijakan ramah keluarga dan ruang aman di tempat kerja.
3. Pemenuhan hak pegawai atas fasilitas sosial, termasuk cuti, asuransi kesehatan, dan program kesejahteraan lainnya.
4. Implementasi budaya keselamatan kerja (*safety culture*) untuk mewujudkan *zero accident*.
5. Pembangunan sistem kesiapsiagaan tanggap bencana di seluruh unit operasional.
6. Penciptaan lingkungan kerja yang bersih dan sehat sebagai langkah preventif terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Dalam jangka panjang, pelaksanaan tanggung jawab sosial ketenagakerjaan oleh PLN Indonesia Power diposisikan sebagai strategi bisnis berkelanjutan yang memberikan nilai tambah tidak hanya bagi pegawai dan pemangku kepentingan internal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham dan masyarakat luas. Inisiatif ini berkontribusi terhadap efisiensi operasional, penurunan biaya akibat insiden kerja, serta peningkatan reputasi korporasi.

labor policies and programs prioritizing social equity. This commitment is manifested in the provision of decent wages, gender equality, non-discriminatory career opportunities, health, and occupational safety guarantees, as well as access to continuous education and training.

PLN Indonesia Power has aligned and adapted its employment policies with applicable national regulations, including Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety and Law No. 13 of 2003 on Manpower. Besides, the implementation of the employment social responsibility program is also in line with the principles of Decent Work launched by the International Labor Organization (ILO) as well as the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 5 (Gender Equality), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), and SDG 12 (Responsible Consumption and Production). The company's sustainability initiatives in the labor aspect include:

1. Providing equal employment opportunities without discrimination based on ethnicity, religion, gender, or social background.
2. Supporting increased female labor participation through family-friendly policies and the provision of safe spaces in the workplace.
3. Fulfilling employees' rights to social benefits, including leave, health insurance, and other welfare programs.
4. Implementing a safety culture to achieve zero accidents.
5. Developing disaster preparedness systems across all operational units.
6. Creating a clean and healthy work environment as a preventive measure against occupational accidents and diseases.

In the long term, the implementation of employment social responsibility by PLN Indonesia Power is positioned as a sustainable business strategy that provides added value not only for employees and internal stakeholders but also as a form of corporate responsibility to shareholders and the wider community. These initiatives contribute to operational efficiency, reduced costs related to workplace incidents, and enhanced corporate reputation.

Tanggung jawab sosial dalam bidang ketenagakerjaan juga diharapkan mampu memberikan dampak positif secara eksternal melalui perluasan akses terhadap pekerjaan yang layak, penguatan peran perempuan dalam dunia kerja, serta produksi yang bertanggung jawab dan beretika. Hal ini sejalan dengan visi PLN Indonesia Power sebagai entitas bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, namun juga membawa dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan.

The employment social responsibility is also expected to generate positive external impacts by expanding access to decent work, strengthening the role of women in the workforce, and promoting responsible and ethical production. This is aligned with PLN Indonesia Power's vision to be a business entity that is not only focused on profitability but also delivers a lasting positive impact on society and the environment.

Kesetaraan dan Kesempatan Kerja

Equal Employment Opportunity

PLN Indonesia Power menjadikan prinsip kesetaraan dan kesempatan kerja yang setara (*equal opportunity employment*) sebagai landasan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh individu memiliki akses yang adil terhadap peluang kerja, pengembangan karier, dan pengakuan atas prestasi tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan pada ras, jenis kelamin, agama, etnis, latar belakang sosial, opini politik, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan dengan kompetensi dan kinerja profesional. Komitmen terhadap kesetaraan tersebut tidak hanya tercermin dalam pernyataan nilai dan etika Perusahaan, tetapi juga diimplementasikan secara sistematis dalam seluruh siklus pengelolaan ketenagakerjaan. Hal ini mencakup proses rekrutmen yang transparan dan inklusif, pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan dan potensi, sistem evaluasi kinerja yang objektif, serta pengelolaan remunerasi dan kesejahteraan pegawai yang berlandaskan keadilan distributif.

PLN Indonesia Power upholds the principle of equality and equal opportunity employment as a fundamental basis in human resource management. The Company is committed to ensuring that all individuals have equal access to employment opportunities, career development, and recognition based on merit, without discrimination on the grounds of race, gender, religion, ethnicity, social background, political opinion, or any other factors irrelevant to professional competence and performance. This commitment to equality is not only reflected in the Company's statement of values and ethics but is also systematically implemented throughout the employment management cycle. This includes a transparent and inclusive recruitment process, competency development based on individual needs and potential, an objective performance evaluation system, as well as a fair and distributive approach to employee remuneration and welfare management.

PLN Indonesia Power juga secara aktif mendorong penciptaan lingkungan kerja yang mendukung partisipasi semua kelompok masyarakat, termasuk dukungan terhadap keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, yang diwujudkan melalui regulasi internal dan kebijakan kolektif. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pengaturan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2024-2025 beserta amendemennya, yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak reproduktif perempuan pekerja. Pengaturan tersebut antara lain tercantum dalam Pasal 82 tentang hak atas cuti bersalin, Pasal 84 mengenai cuti haid, dan Pasal 86 tentang izin khusus karena kepentingan pribadi. Ketentuan tersebut juga turut diperkuat oleh Surat Keputusan Direksi No. 49.K/010/IP/2010 yang mengatur hak atas cuti sakit, cuti haid, dan cuti bersalin sebagai bentuk perlindungan kesejahteraan dan kesehatan bagi pegawai perempuan.

PLN Indonesia Power also actively encourages the realization of a work environment that supports the participation of all community groups, including support for the involvement of women in the workforce, which is realized through internal regulations and collective policies. A tangible manifestation of this commitment is reflected in the 2024-2025 Collective Labor Agreement (CLA) and its amendments, which safeguard the reproductive rights of female employees. These arrangements are stated in Article 82 on the right to maternity leave, Article 84 on menstrual leave, and Article 86 on special permission due to personal interests. These provisions are also reinforced by the Board of Directors' Decision No. 49.K/010/IP/2010, which regulates the right to sick leave, menstrual leave, and maternity leave as a form of welfare and health protection for female employees. The Company also provides specialized social facilities to support

Perusahaan juga menyediakan fasilitas sosial khusus untuk mendukung pegawai dengan kebutuhan tertentu. Fasilitas ini diatur dalam Pasal 92 PKB yang mencakup penyediaan sarana pelayanan kesehatan, termasuk ruang laktasi bagi ibu menyusui, serta Pasal 100 yang mengatur penyediaan alat bantu rehabilitasi, seperti alat bantu dengar, penyangga tubuh, kacamata, dan prothesa (alat pengganti fungsi anggota tubuh), sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak pegawai disabilitas. Prinsip kesetaraan juga tercermin dalam penegakan kode etik perusahaan, yang secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi merupakan pelanggaran serius terhadap norma etik dan tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan hasil pemantauan internal selama tahun 2024, PLN Indonesia Power tidak menerima laporan terkait praktik diskriminatif terhadap pegawai atau pemangku kepentingan eksternal di seluruh wilayah operasionalnya. Hal ini menunjukkan adanya sistem pengawasan, pelaporan, serta budaya organisasi yang secara aktif menolak diskriminasi berbasis identitas maupun latar belakang. Dengan demikian, penerapan prinsip kesetaraan dan kesempatan kerja di PLN Indonesia Power tidak hanya sebatas pemenuhan kewajiban normatif atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, melainkan merupakan wujud nyata dari komitmen Perusahaan dalam membangun organisasi yang berkeadilan, dan responsif terhadap dinamika sosial. Praktik ini sejalan dengan nilai-nilai *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nomor 5 tentang Kesetaraan Gender, nomor 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, serta nomor 10 tentang Pengurangan Ketimpangan.

employees with specific needs. As stipulated in Article 92 of the CLA, these facilities include access to healthcare services, such as nursery rooms for breastfeeding mothers, while Article 100 regulates the provision of rehabilitation aids, such as hearing aids, body supports, eyeglasses, and prosthetics, as a form of respect for the rights of employees with disabilities. The principle of equality is also reflected in the enforcement of the Company's code of ethics, which explicitly states that all forms of discrimination constitute a serious violation of ethical standards and sound corporate governance.

Based on the internal monitoring conducted throughout 2024, PLN Indonesia Power did not receive any reports of discriminatory practices involving employees or external stakeholders across its operational areas. This indicates the presence of a robust monitoring and reporting system, as well as an organizational culture that actively rejects identity- or background-based discrimination. Therefore, the application of equal opportunity and non-discriminatory employment practices at PLN Indonesia Power extends beyond mere compliance with labor laws and regulations but is a tangible manifestation of the company's commitment to building an equitable organization, and responsive to social dynamics. These practices are aligned with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles and support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 5 on Gender Equality, SDG 8 on Decent Work and Economic Growth, and SDG 10 on Reduced Inequalities.

Pemenuhan Ketentuan Terkait Tenaga Kerja Anak dan Kerja Paksa

Compliance with Provisions Regarding Child Labor and Forced Labor

Isu pekerja anak (*child labor*) dan kerja paksa (*forced labor*) masih menjadi persoalan sosial yang kompleks, baik di tingkat global maupun nasional. Meskipun berbagai instrumen hukum dan kebijakan telah diberlakukan untuk menanggulanginya, praktik-praktik ini tetap menjadi tantangan serius dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama di sektor ketenagakerjaan. Pekerja anak didefinisikan sebagai keterlibatan individu di bawah usia minimum yang ditetapkan oleh hukum,

Child labor and forced labor remain complex social issues at both global and national levels. Despite implementing various legal instruments and policies to address these problems, such practices continue to pose significant challenges to advancing and protecting human rights, particularly in the labor sector. Child labor is defined as the involvement of individuals below the minimum legal working age in forms of work that are hazardous, harmful to physical and mental health, interfere with a child's development, constitute

dalam bentuk pekerjaan yang bersifat membahayakan, merugikan kesehatan fisik dan mental, mengganggu tumbuh kembang anak, mengeksploitasi secara ekonomi, serta menghambat akses terhadap pendidikan. Sementara itu, kerja paksa merujuk pada segala bentuk pekerjaan atau jasa yang diperoleh dari seseorang di bawah ancaman hukuman, tekanan, atau pemaksaan, dan tidak dilakukan secara sukarela.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Konvensi ILO No. 138 dan No. 182, serta prinsip-prinsip *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs), PLN Indonesia Power menyatakan komitmen penuh untuk tidak melakukan praktik pekerja anak maupun kerja paksa dalam seluruh proses bisnisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui rantai pasok dan kemitraan usaha. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya Perusahaan dalam menegakkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2024, PLN Indonesia Power tidak mencatat adanya kasus atau pelanggaran hukum terkait dengan praktik pekerja anak maupun kerja paksa di seluruh lini operasional Perusahaan. Hal tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional, namun juga merupakan bagian dari kontribusi Perusahaan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi serta SDG 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

economic exploitation, and hinder access to education. Meanwhile, forced labor refers to all forms of work or services extracted from individuals under threat of penalty, coercion, or compulsion, and not performed voluntarily.

In accordance with the provisions of Law No. 13 of 2003 on Manpower, ILO Conventions No. 138 and No. 182, and the principles of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), PLN Indonesia Power affirms its full commitment to prohibiting child labor and forced labor in all aspects of its business operations, both directly and indirectly through its supply chains and business partnerships. This commitment is part of the Company's efforts to uphold Human Rights (HAM) values and ensure sustainable corporate social responsibility.

In 2024, PLN Indonesia Power did not record any cases or legal violations related to child labor or forced labor practices in all operational lines of the Company. This not only reflects compliance with national and international regulations, but also demonstrates the Company's contribution to supporting the Sustainable Development Goals, particularly SDG 8 on Decent Work and Economic Growth, and SDG 16 on Peace, Justice, and Strong Institutions.

Pemenuhan atas Upah Minimum Regional Fulfillment of Regional Minimum Wage

Komitmen PLN Indonesia Power terhadap prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, salah satunya diwujudkan dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan pengupahan dan remunerasi disusun dan diimplementasikan secara adil, layak, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian remunerasi kepada pegawai mencakup komponen kompensasi langsung maupun tidak langsung yang dirancang berdasarkan

PLN Indonesia Power's commitment to the principles of social justice and employee welfare is reflected, among other things, in its efforts to ensure that all wage and remuneration policies are formulated and implemented fairly, appropriately, and in accordance with applicable legal provisions. Employee remuneration comprises both direct and indirect compensation components, designed based on a merit system, performance, and position equity. These

sistem merit, kinerja, serta kesetaraan posisi. Kebijakan tersebut tertuang secara eksplisit dalam PKB 2024-2025 beserta amandemennya, khususnya pada Bab VI Pasal 55 mengenai Dasar Penghargaan, yang menjadi landasan hukum dan normatif dalam pengelolaan sistem kompensasi di lingkungan Perusahaan.

PLN Indonesia Power tidak hanya mematuhi ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga menunjukkan komitmen lebih dalam menjamin kesejahteraan pegawai melalui praktik pengupahan yang jauh di atas standar minimum. Hal ini tercermin dari rata-rata perbandingan gaji pegawai baru terhadap UMR di wilayah operasional pada tahun 2024 yang mencapai angka 3,45 dengan rasio terendah sebesar 1,92 untuk pegawai tetap, rata-rata rasio sebesar 2,06 dengan rasio terendah sebesar 1,27 untuk pegawai tidak tetap dan rata-rata rasio sebesar 1,31 dengan rasio terendah sebesar 1,06 untuk pegawai alih daya. Rasio ini menunjukkan bahwa Perusahaan tidak hanya mencerminkan kepatuhan hukum, tetapi juga tanggung jawab moral Perusahaan dalam memberikan penghidupan yang layak bagi pekerja.

policies are explicitly outlined in the 2024-2025 CLA and its amendments, particularly in Chapter VI, Article 55 on the Basis of Rewards, which serves as the legal and normative foundation for the Company's compensation management system.

PLN Indonesia Power not only complies with the Regional Minimum Wage (UMR) regulations set by the government but also demonstrates a more profound commitment to employee welfare through wage practices that significantly exceed minimum standards. This is reflected in the average ratio of new employee salaries to the minimum wage in the operational area in 2024, which reached 3.45 with the lowest ratio of 1.92 for permanent employees, an average ratio of 2.06 with the lowest ratio of 1.27 for non-permanent employees and an average ratio of 1.31 with the lowest ratio of 1.06 for outsourced employees. These ratios indicate that the Company not only adheres to legal compliance but also upholds its moral responsibility to provide a decent standard of living for its workforce.

Pengembangan Kompetensi Pegawai

Employee Competency Development

Keberlanjutan jangka panjang suatu perusahaan tidak semata ditentukan oleh kekuatan finansial atau kapasitas teknologi, melainkan sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Dalam konteks ini, pegawai memegang peran strategis sebagai agen perubahan di tingkat operasional, yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian kinerja keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan serta kemampuan untuk mengimplementasikannya dalam aktivitas operasional menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

PLN Indonesia Power menempatkan pengembangan SDM sebagai prioritas strategis dalam mendukung visi keberlanjutan Perusahaan. Upaya ini diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program pengembangan kompetensi yang terstruktur dan berkelanjutan, yang dikelola oleh unit pelatihan internal Perusahaan, yakni IP Academy.

The long-term sustainability of a company is not solely determined by its financial strength or technological capacity, but is largely dependent on the quality and competence of its human resources (HR). In this context, employees play a strategic role as agents of change at the operational level, directly contributing to the achievement of the company's sustainability performance. Therefore, a comprehensive understanding of sustainability principles and the ability to implement them in daily operations is an indispensable requirement.

PLN Indonesia Power places HR development as a strategic priority to support the Company's sustainability vision. This effort is realized through implementing various structured and continuous competency development programs managed by the Company's internal training unit, the IP Academy. The IP Academy is responsible for designing, implementing, and

IP Academy bertugas untuk merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi efektivitas program-program pelatihan dan pengembangan pegawai agar senantiasa selaras dengan dinamika bisnis serta kebutuhan kompetensi masa depan.

Kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 terkait pengembangan kompetensi pegawai meliputi Program Pembelajaran Prajabatan, Program Pembelajaran Profesi dan Sertifikasi, Program Pembelajaran Kepemimpinan, Program Pembelajaran Inisiatif Strategik Korporat, Program Pembelajaran Penunjang dan Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti. Uraian lebih rinci terkait pelaksanaan program pengembangan kompetensi pegawai dijelaskan dalam Bab Tinjauan Pendukung Bisnis pada Laporan Tahunan ini.

evaluating the effectiveness of training and development programs to ensure alignment with business dynamics and future competency needs.

Activities carried out throughout 2024 related to employee competency development include Pre-service Learning Program, Professional Learning and Certification Program, Leadership Learning Program, Corporate Strategic Initiative Learning Program, Supporting Learning Program, and Pre-Retirement Training Program. A more detailed explanation of the implementation of these employee competency development programs is provided in the Business Support Review chapter of this Annual Report.

Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety Program

Lingkungan kerja yang nyaman dan aman bukan hanya unsur penting dalam menunjang produktivitas pegawai tetapi juga menjadi tanggung jawab Perusahaan dalam memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bagi pegawai. PLN Indonesia Power memiliki kebijakan resmi sebagai komitmen terhadap kesehatan dan keselamatan kerja yang mencakup kepatuhan terhadap peraturan, menyediakan pelatihan, dan melindungi karyawan dari bahaya potensial. Pemenuhan aspek kesehatan dan keselamatan kerja mencakup pengimplementasian ISO 45001:2018 (*Occupational Health and Safety Management Systems*) dan pengimplementasian SMK3 dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan. Program strategis dalam pemenuhan aspek kesehatan dan keselamatan kerja yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A comfortable and safe work environment is not only a crucial element in supporting employee productivity but also a corporate responsibility in fulfilling health and safety standards for employees. PLN Indonesia Power has established an official policy as a commitment to occupational health and safety, which includes compliance with regulations, provision of training, and protection of employees from potential hazards. Fulfillment of occupational health and safety aspects includes the implementation of ISO 45001:2018 (*Occupational Health and Safety Management Systems*) and the application of OHSMS following the Government Regulation No. 50 of 2012 on the Implementation of the Occupational Health and Safety Management System. The strategic programs implemented throughout 2024 to fulfill occupational health and safety aspects are as follows:

Program Strategis Kesehatan dan Keselamatan Kerja Strategic Program for Occupational Health and Safety

No	Rencana Kegiatan Activity Plan	Realisasi Kegiatan Activity Realization	Dampak Kegiatan Activity Impact
1	Audit Internal SMK3 Audit Internal SMK3	1. UBP Saguling tanggal 29-31 Mei 2024 2. UBP Mrica tanggal 20-22 Mei 2024 3. UBP Bali tanggal 20-22 Mei 2024 4. Unit Bisnis Pemeliharaan (UBH) tanggal 20-22 Mei 2024 5. UBP Banten 1 Suralaya tanggal 29-31 Mei 2024 6. UBP Banten 2 Labuan tanggal 29-31 Mei 2024 7. UBP Banten 3 Lontar tanggal 29-31 Mei 2024	Audit SMK3 digunakan untuk mengukur kesiapan unit kerja dalam pengelolaan Sistem Manajemen K3 sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan. The OHSMS Audit is conducted to assess the readiness of work units in managing the OHS Management System in accordance with Government Regulation No. 50 of 2012 for continuous improvement.

No	Rencana Kegiatan Activity Plan	Realisasi Kegiatan Activity Realization	Dampak Kegiatan Activity Impact
		8. UBP Sntang tanggal 19-21 Juni 2024 9. UBP Bengkulu tanggal 17-19 Juli 2024 10. UBP Bukittinggi tanggal 29-30 Juli 2024 11. UBP Teluk Sirih tanggal 24-26 Juli 2024 12. UBP Ombilin tanggal 24-26 Juli 2024 1. UBP Saguling, May 29-31, 2024 2. UBP Mrica, May 20-22, 2024 3. UBP Bali, May 20-22, 2024 4. Unit Bisnis Pemeliharaan (UBH), May 20-22, 2024 5. UBP Banten 1 Suralaya, May 29-31, 2024 6. UBP Banten 2 Labuan, May 29-31, 2024 7. UBP Banten 3 Lontar, May 29-31, 2024 8. UBP Sntang, June 19-21, 2024 9. UBP Bengkulu, July 17-19, 2024 10. UBP Bukittinggi, July 29-30, 2024 11. UBP Teluk Sirih, July 24-26, 2024 12. UBP Ombilin, July 24-26, 2024	
2	Usulan Diklat K3 dan monitoring Proposed OHS Training and Monitoring	Pelatihan dan Sertifikasi K3 Korporat 2024: 1. Sertifikasi Auditor SMK3 Batch 1 (19-23 Agustus 2024) 2. Sertifikasi Auditor SMK3 Batch 2 (26-30 Agustus 2024) 3. Pelatihan dan Sertifikasi CSMS Batch 1 (17-19 September 2024) 4. Pelatihan dan Sertifikasi CSMS Batch 2 (24-26 September 2024) 5. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi SMK2 Batch 1 (7-11 Oktober 2024) di SLA 6. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi SMK2 Batch 2 (7-11 Oktober 2024) di BSLA 7. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi SMK2 Batch 3 (14-18 Oktober 2024) di Grati 8. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi SMK2 Batch 4 (14-18 Oktober 2024) di Bali 9. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi SMK2 Batch 5 (21-25 Oktober 2024) di Kamojang Corporate OHS Training and Certification in 2024: 1. OHSMS Auditor Certification Batch 1 (August 19-23, 2024) 2. OHSMS Auditor Certification Batch 2 (August 26-30, 2024) 3. CSMS Training and Certification Batch 1 (September 17-19, 2024) 4. CSMS Training and Certification Batch 2 (September 24-26, 2024) 5. SMK2 Competency Training and Certification Batch 1 (October 7-11, 2024) in SLA 6. SMK2 Competency Training and Certification Batch 2 (October 7-11, 2024) in BSLA 7. SMK2 Competency Training and Certification Batch 3 (October 14-18, 2024) in Grati 8. SMK2 Competency Training and Certification Batch 4 (October 14-18, 2024) in Bali 9. SMK2 Competency Training and Certification Batch 5 (October 21-25, 2024) in Kamojang	Pelatihan dan Sertifikasi K3 diharapkan mampu meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan perannya sesuai dengan jabatan yang ia emban. HSE Training and Certification are expected to increase employee competence in playing their respective roles.

No	Rencana Kegiatan Activity Plan	Realisasi Kegiatan Activity Realization	Dampak Kegiatan Activity Impact
3	Pengadaan Material K3 Procurement of OHS Materials	Pengadaan Material K3 untuk melengkapi atau mengganti material K3 yang sudah terpakai atau habis masa berlaku. Procurement of OHS materials to supplement or replace materials that have been used or have expired.	Material K3 dipastikan dalam keadaan siap pakai apabila diperlukan. OHS materials are ensured to be in ready-to-use condition when needed.
4	Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan Kerja Workplace Environmental Monitoring and Measurement	Pelaksanaan pengukuran lingkungan kerja oleh lembaga eksternal meliputi aspek Fisika, Kimia, Biologi, Ergonomi dan Psikologi. Workplace environment measurements conducted by an external institution covering aspects of Physics, Chemistry, Biology, Ergonomics, and Psychology.	Lingkungan kerja dipantau agar selalu memenuhi parameter laik, sehat dan nyaman untuk bekerja. The work environment is continuously monitored to ensure it meets proper, healthy, and comfortable parameters for working.
5	Video Conference Evaluasi Kinerja Pengelolaan K3 Triwulan Quarterly OHS Management Performance Evaluation via Video Conference	Pengelolaan K3 unit kerja yang dilaporkan setiap bulan dievaluasi melalui Video Conference setiap triwulan. The OHS management in each work unit is reported monthly and evaluated quarterly through video conferences.	Evaluasi pengelolaan K3 dilakukan dalam rangka memberi masukan kepada pengelola K3 di unit kerja sehingga kinerja K3 unit dapat terus ditingkatkan. OHS management evaluations are conducted to provide feedback to OHS coordinators in each work unit, enabling continuous improvement of OHS performance at the unit level.
6	Implementasi IPSAFE modul CSMS dan Izin Kerja Implementation of IPSAFE - CSMS and Work Permit Modules	Implementasi IPSAFE modul CSMS dan Izin Kerja dimonitoring dan dievaluasi secara triwulan melalui Video Conference Evaluasi Kinerja Pengelolaan K3 Triwulan. The implementation of the IPSAFE CSMS and Work Permit modules is monitored and evaluated quarterly through Video Conferences for Quarterly OHS Management Performance Evaluation.	Implementasi IPSAFE modul CSMS dan Izin Kerja dilakukan guna memastikan setiap unit sudah melaksanakan proses CSMS siklus penuh dan proses Izin Kerja untuk setiap pekerjaan di lingkungan unitnya sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh mitra kerja dapat dipastikan telah memenuhi kaidah K3. The implementation of the IPSAFE CSMS and Work Permit modules aims to ensure that each unit has carried out the full cycle of the CSMS process and the Work Permit process for every job conducted within their respective areas. This ensures that all work performed by contractors complies with OHS standards.
7	Pelatihan/Simulasi Tanggap Darurat Emergency Response Training/Drills	Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat Gempa Bumi di Gedung Head Office pada tanggal 17-19 September 2024. Emergency response training and an earthquake simulation were conducted at the Head Office building on September 17-19, 2024.	Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat bertujuan untuk melatih kesiapan penghuni gedung dan memeriksa kesiapan sarana prasarana keadaan darurat agar siap saat terjadi situasi darurat yang sebenarnya. The Emergency Response Training and Simulation aims to train the readiness of building occupants and to assess the preparedness of emergency facilities and infrastructure to ensure responsiveness during actual emergency situations.
8	Forum K3 Korporat Corporate OHS Forum	Forum K3 secara korporat dilaksanakan pada tanggal 7-9 Agustus 2024. The Corporate OHS Forum was held on August 7-9, 2024.	Dalam Forum K3 dibahas terkait pengenalan program atau peraturan terbaru K3, lesson learned kejadian yang pernah terjadi, kendala teknis yang dihadapi pengelola K3 dan arahan strategis dari manajemen kantor pusat kepada unit kerja. The OHS Forum discussed the introduction of new OHS programs or regulations, lessons learned from past incidents, technical challenges faced by OHS coordinators, and strategic directives from the head office management to operational units.

No	Rencana Kegiatan Activity Plan	Realisasi Kegiatan Activity Realization	Dampak Kegiatan Activity Impact
9	Rangkaian Kegiatan Bulan K3 Nasional Series of Activities for the National OHS Month	Peringatan Bulan K3 Nasional dilaksanakan dari tanggal 12 Januari - 12 Februari 2024 dengan rangkaian kegiatan yang dapat meningkatkan <i>awareness</i> terkait K3 baik di tingkat unit kerja maupun <i>head office</i> . The National OHS Month was commemorated from January 12 to February 12, 2024, through a series of activities aimed at increasing awareness of OHS at both the work unit and head office levels.	Rangkaian kegiatan Bulan K3 Nasional dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan <i>awareness</i> pegawai maupun mitra kerja terhadap K3 sehingga budaya K3 dapat terbentuk yang pada akhirnya membantu tercapainya <i>zero accident</i> . The series of National OHS Month activities are carried out with the aim of increasing OHS awareness among the employees and work partners, thus an OHS culture can be developed, which ultimately helps achieve zero accidents.
10	Seminar/Sosialisasi K3 Seminars/ Dissemination	Seminar/Sosialisasi K3 dilaksanakan secara online maupun <i>offline</i> oleh internal maupun eksternal perusahaan. OHS seminars and dissemination sessions were conducted both online and offline by the company's internal and external parties.	Seminar/Sosialisasi K3 yang disampaikan menyesuaikan dengan isu K3 yang aktual dan perlu disampaikan kepada seluruh pekerja. OHS seminars and dissemination activities are tailored to address current and relevant OHS issues that need to be communicated to all employees.
11	Pengadaan Apresiasi <i>Zero Accident</i> Procurement for Zero Accident Award	Apresiasi diberikan setiap tahun sebagai bentuk reward kepada pegawai yang telah mendukung tercapainya <i>Zero Accident</i> . Annual appreciation is awarded as a form of reward to employees who have contributed to achieving the Zero Accident goals	Pemberian apresiasi kepada pegawai diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai dalam membantu meraih <i>zero accident</i> di tahun-tahun selanjutnya. Employee appreciation is expected to boost motivation and support the achievement of zero accidents in the coming years.
12	Tindak Lanjut <i>Medical Check Up</i> (Pemeriksaan Kesehatan) Pekerja Tindak Lanjut <i>Medical Checkup</i> (Pemeriksaan Kesehatan) Pekerja	Rekapitulasi 10 penyakit dominan hasil pemeriksaan kesehatan dievaluasi oleh bidang K3 bersama UPPK (Unit Pelayanan Kesehatan Kerja) untuk penetapan tindak lanjut program kesehatan kerja. Rekapitulasi 10 penyakit dominan hasil pemeriksaan kesehatan dievaluasi oleh bidang K3 bersama UPPK (Unit Pelayanan Kesehatan Kerja) untuk penetapan tindak lanjut program kesehatan kerja.	Program kesehatan kerja yang ditetapkan untuk memastikan persentase 10 penyakit dominan tersebut dapat turun dapat pemeriksaan kesehatan berikutnya. Program kesehatan kerja yang ditetapkan untuk memastikan persentase 10 penyakit dominan tersebut dapat turun dapat pemeriksaan kesehatan berikutnya.
13	Pelaksanaan <i>Safety Committee</i> Dirop Gas dan Batubara Implementation of Safety Committees Meeting by the Director of Oration for Gas and Coal	Rapat <i>Safety Committee</i> setiap bulan untuk membahas statistik pelaporan aplikasi <i>Nearmiss</i> dan <i>Lesson Learned</i> kejadian K3 dengan melibatkan Direktorat Operasi (ketua), VP HSE (sekretaris) dan seluruh pimpinan unit kerja (anggota). Safety Committee Meeting is held every month to discuss the statistics from <i>Nearmiss</i> application reporting and <i>Lesson Learned</i> related to HSE by involving the Operational Directorate (chairperson) VP HSE (secretary), and all work unit heads (members).	<i>Safety Committee</i> menjadi wadah seluruh pimpinan unit kerja berdiskusi dan berbagi pengetahuan terkait isu-isu K3 yang terjadi di unit kerjanya serta wadah bagi Direktur Operasi terkait memberi arahan dan masukan kepada unit-unit kerja dibawahnya. The Safety Committee is a forum for all work unit leaders to discuss and share knowledge related to OHS issues that occur in their work units and a forum for the Director of Operations to provide direction and input to the work units.
14	Implementasi Transformasi Budaya K3 Implementation of OHS Culture Transformation	Implementasi Transformasi Budaya K3 dimonitoring dan dievaluasi secara triwulan melalui <i>Video Conference</i> Evaluasi Kinerja Pengelolaan K3 Triwulan. The implementation of the OHS Culture Transformation is monitored and evaluated quarterly through the Quarterly OHS Management Performance Evaluation Video Conference.	Program Transformasi Budaya K3 yang saat ini dijalankan di perusahaan dalam rangka membentuk budaya K3 di seluruh insan PLN Indonesia Power adalah: 1. <i>Safety Contact</i> ; 2. Manajemen <i>Walkdown</i> ; 3. <i>Safety Observation</i> ; 4. Pelaporan Aplikasi <i>Nearmiss</i> . The OHS Culture Transformation Program, currently implemented by the company, aims to foster OHS culture across all personnel of PLN Indonesia Power, including: 1. Safety Contact; 2. Management Walkdown; 3. Safety Observation; 4. Nearmiss Reporting via Application.

No	Rencana Kegiatan Activity Plan	Realisasi Kegiatan Activity Realization	Dampak Kegiatan Activity Impact
15	Laporan Bulanan K3 Monthly OHS Reports	Unit kerja mengirimkan laporan pengelolaan K3 di unitnya setiap bulan kepada bidang K3 <i>Head Office</i> . Each work unit submits its monthly OHS management report to the OHS Division at the Head Office	Laporan Bulanan K3 yang dikirimkan akan dievaluasi oleh bidang K3 Head Office melalui Video Conference Evaluasi Kinerja Pengelolaan K3 Triwulan. Monthly OHS Reports submitted by work units are evaluated by the OHS Division at the Head Office through the Quarterly OHS Management Performance Evaluation Video Conference.
16	<i>Assessment Maturity Level K3</i> OHS Maturity Level Assessment	<i>Maturity Level K3</i> dilakukan penilaian oleh Kantor Pusat pada Triwulan 4 setiap tahun, setelah sebelumnya dilakukan <i>self assessment</i> oleh masing-masing unit pada setiap TW 1-3 dan dievaluasi oleh Bidang K3 <i>Head Office</i> . The OHS Maturity Level is assessed by the Head Office in the fourth quarter of each year. This follows self-assessments conducted by each unit in Q1-Q3, which are then evaluated by the OHS Division at the Head Office.	Pemberian target penilaian Kinerja Maturity Level K3 digunakan untuk mengukur kesiapan dan kematangan unit kerja dalam pengelolaan K3 sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan. OHS Maturity Level Performance Targets are set to assess the readiness and maturity of work units in managing OHS, enabling continuous improvement.
17	Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) Implementation of the Electrical Safety Management System (SMK2)	Implementasi SMK2 untuk meraih predikat "TAAT" dari Kementerian ESDM. Implement SMK2 to achieve the "TAAT" (Compliant) rating from the Ministry of Energy and Mineral Resources.	Implementasi SMK2 digunakan untuk mengukur kesiapan unit kerja dalam pengelolaan Sistem Manajemen K2 sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2021 sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan. The implementation of SMK2 is used to evaluate the readiness of work units in managing the K2 Management System in accordance with Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 10 of 2021, thereby supporting continuous improvement.
18	<i>Review</i> Prosedur K3 Korporat Review of Corporate OHS Procedures	Prosedur K3 Korporat direview atau ditambahkan dalam guna mendukung program strategis K3 perusahaan dan pelaksanaan aturan pemerintah. Corporate OHS procedures are reviewed or added as needed to support the company's strategic OHS programs and compliance with government regulations.	<i>Review</i> prosedur K3 ini dilakukan guna mendukung tercapainya <i>Zero Accident</i> perusahaan pada tahun 2024. Review of OHS Procedures is conducted to support the achievement of the Company's Zero Accident target in 2024.
19	<i>Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Maximo HSE</i> Monitoring and Evaluation of Maximo HSE Application Usage	Penggunaan Aplikasi Maximo HSE dimonitoring dan dievaluasi secara triwulan melalui <i>Video Conference</i> Evaluasi Kinerja Pengelolaan K3 Triwulan. The use of the Maximo HSE application is monitored and evaluated quarterly through the Quarterly OHS Management Performance Evaluation Video Conference.	Modul Program Manajemen K3 (PMK3) memudahkan dalam memonitoring dan disposisi pelaksanaan program kerja K3 baik di sisi pelaksana maupun atasan. Modul HIRADC memudahkan dalam penyusunan dan review dokumen HIRADC karena sudah memiliki tampilan dan format yang <i>user friendly</i> serta memudahkan koordinasi antar bidang sebagai user area yang bertanggung jawab dalam pengisian dokumen HIRADC areanya. The OHS Management Program (PMK3) Module facilitates the monitoring and delegation of OHS work program implementation, both for executors and supervisors. The HIRADC Module simplifies the preparation and review of HIRADC documents with a user-friendly interface and format, and enhances coordination among departments responsible for completing HIRADC documentation in their respective areas.

No	Rencana Kegiatan Activity Plan	Realisasi Kegiatan Activity Realization	Dampak Kegiatan Activity Impact
20	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Aplikasi Nearmiss</i> Monitoring and Evaluation of Nearmiss Reporting Application	Pelaporan Aplikasi Nearmiss <i>dimonitoring</i> dan dievaluasi secara triwulan melalui Video Conference Evaluasi Kinerja Pengelolaan K3 Triwulan dan Rapat <i>Safety Committee</i> . Reporting through the Nearmiss application is monitored and evaluated quarterly via the Quarterly OHS Management Performance Evaluation Video Conference and Safety Committee Meetings.	Pelaporan Temuan K3 dalam Aplikasi Nearmiss digunakan untuk memitigasi potensi kecelakaan kerja baik yang disebabkan oleh <i>Unsafe Action</i> maupun <i>Unsafe Condition</i> . Reporting of OHS Findings via the Nearmiss Application is used to mitigate potential workplace accidents caused by either Unsafe Actions or Unsafe Conditions.
21	<i>Monitoring dan Evaluasi Kinerja Industrial Cleaning Service</i> Monitoring and Evaluation of Industrial Cleaning Service Performance	Kinerja <i>Industrial Cleaning Service</i> (ICS) <i>dimonitoring</i> dan dievaluasi secara triwulan melalui Video Conference Evaluasi Kinerja Pengelolaan K3 Triwulan. The performance of the Industrial Cleaning Service (ICS) is monitored and evaluated quarterly through the Quarterly OHS Management Performance Evaluation Video Conference.	Evaluasi kinerja <i>Industrial Cleaning Service</i> (ICS) dilakukan dalam rangka memberi masukan kepada pelaksana pekerjaan ICS di unit kerja sehingga kinerja kebersihan unit dapat terus ditingkatkan. Evaluation of Industrial Cleaning Services (ICS) is conducted to provide feedback to ICS personnel in work units, enabling continuous improvement in unit cleanliness performance.

PLN Indonesia Power juga melaksanakan kegiatan pendukung dalam rangka peningkatan keselamatan kerja sepanjang tahun 2024, sebagai berikut:

PLN Indonesia Power also carried out supporting activities throughout 2024 to improve occupational safety, including the following:

Program Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety Improvement Program

Program Peningkatan Kesehatan Kerja Occupational Health Improvement Program		Program Peningkatan Keselamatan Kerja Occupational Safety Improvement Program	
- Audit Internal SMK3 - Usulan Diklat K3 dan <i>monitoring</i> - Pengadaan Material K3 - Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan Kerja - Video Conference Evaluasi Kinerja Pengelolaan K3 Triwulan - Implementasi IPSAFE modul CSMS dan Izin Kerja - Pelatihan/Simulasi Tanggap Darurat - Forum K3 Korporat - Rangkaian Kegiatan Bulan K3 Nasional - Seminar/Sosialisasi K3 - Pengadaan Apresiasi <i>Zero Accident</i> - Pelaksanaan Safety Committee Dirop Gas dan Batubara - Implementasi Transformasi Budaya K3 - Laporan Bulanan K3 <i>Assessment Maturity Level</i> K3	- Internal OHSMS Audit - Proposed OHS Training and Monitoring - Procurement of OHS Materials - Workplace Environmental Monitoring and Measurement - Quarterly OHS Management Performance Evaluation via Video Conference - Implementation of IPSAFE – CSMS and Work Permit Modules - Emergency Response Training and Simulation - Corporate OHS Forum - National OHS Month Activities - OHS Seminars and Awareness Campaigns - Procurement of Zero Accident Awards - Implementation of the Safety Committee for the Director of Gas and Coal Operations - Implementation of OHS Culture Transformation - Monthly OHS Reporting - OHS Maturity Level Assessment	<i>Medical Check Up</i> (Pemeriksaan Kesehatan) Pekerja - Tindak Lanjut <i>Medical Check Up</i> (Pemeriksaan Kesehatan) Pekerja - Melakukan <i>health risk assessment</i> di masing-masing area kerja - Memastikan ketersediaan dan penggunaan alat pelindung diri yang standar - Melakukan inspeksi <i>hygiene</i> kantin - Penempatan pegawai mempertimbangkan riwayat kesehatan pegawai - Pemberian <i>extra fooding</i> pada pekerja <i>shift</i> - Memberikan sosialisasi/ penyuluhan kesehatan kerja - Penyediaan Unit Pelayanan Kesehatan Kerja (UPKK) - Kunjungan dokter Perusahaan ke pegawai - Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan Kerja	- Employee Medical Check-ups - Follow-up on Employee Medical Check-ups - Conducting Health Risk Assessments in Each Work Area - Ensuring Availability and Use of Standard Personal Protective Equipment (PPE) - Canteen Hygiene Inspections - Employee Placement Based on Health History Considerations - Provision of Extra Food for Shift Workers - Occupational Health Education and Awareness Campaigns - Provision of Occupational Health Service Units (UPKK) - Company Doctor Visits to Employees - Workplace Environmental Monitoring and Measurement

Program Peningkatan Kesehatan Kerja Occupational Health Improvement Program		Program Peningkatan Keselamatan Kerja Occupational Safety Improvement Program	
- Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) - Review Prosedur K3 Korporat - Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Maximo HSE - Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Aplikasi Nearmiss - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Industrial Cleaning Service	- Implementation of the Electrical Safety Management System (SMK2) - Review of Corporate OHS Procedures - Monitoring and Evaluation of Maximo HSE Application Usage - Monitoring and Evaluation of Nearmiss Reporting Application - Monitoring and Evaluation of Industrial Cleaning Service Performance	- Program olahraga rutin - Penyediaan fitness center - Sertifikasi P3K untuk pekerja - Penyediaan kotak dan isi P3K sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	- Regular Exercise Programs - Provision of Fitness Centers - First Aid Certification for Employees - Provision of First Aid Kits and Supplies in Compliance with Applicable Regulations

Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan Provision of Health Service Facilities

PLN Indonesia Power memiliki klinik atau pelayanan kesehatan bernama Unit Pelayanan Kesehatan Kerja (UPKK) yang tersedia di Kantor Pusat (*Head Office*) maupun unit kerja yang seluruhnya telah memenuhi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No: Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja. Pelayanan UPKK tersebut di mulai dari jam 07.00 hingga 18.00 dan melayani telemedicine. Setiap UPKK dilengkapi dengan tenaga ahli yang kompeten dengan kualifikasi dan terakreditasi yang diakui. Untuk UPKK yang berlokasi di kantor pusat terdiri dari 1 dokter magister kedokteran kerja, 1 dokter umum, 1 perawat dan 1 administrator. Sedangkan untuk UPKK unit kerja setidaknya terdiri dari 1 dokter umum.

Selama tahun 2024, PLN Indonesia Power telah melakukan evaluasi untuk meningkatkan layanan UPKK diantaranya menyediakan telepon khusus UPKK, menetapkan alur koordinasi saat menghadapi kondisi darurat kesehatan, membuat kerjasama dengan Rumah Sakit terdekat dan menyediakan peta kesehatan Rumah Sakit untuk mengakomodir pegawai gawat darurat atau untuk pengobatan pegawai, inspeksi hygiene kantin, serta sosialisasi kesehatan secara rutin kepada pegawai dan tenaga alih daya.

PLN Indonesia Power operates health clinics known as Occupational Health Service Units (UPKK), available at both the Head Office and operational units, which comply with the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. Per.03/MEN/1982 on Occupational Health Services. UPKK services operate from 07:00 to 18:00 and include telemedicine support. Each UPKK is staffed by qualified and accredited professionals. The UPKK at the Head Office is staffed by one occupational health physician with a master's degree in occupational medicine, one general practitioner, one nurse, and one administrator. Meanwhile, UPKKs at operational units are staffed by at least one general practitioner.

Throughout 2024, PLN Indonesia Power has undertaken several initiatives to enhance UPKK services, such as providing a dedicated UPKK telephone line, establishing coordination protocols for health emergencies, partnering with nearby hospitals, providing hospital health maps to accommodate emergency or routine employee medical needs, conducting hygiene inspections of canteens, and delivering regular health awareness campaigns to employees and outsourced personnel.

Penyediaan Sarana Keselamatan Kerja dan Penanganan Keadaan Darurat

Provision of Occupational Safety Facilities and Emergency Handling

PLN Indonesia Power menjamin keselamatan bagi pegawai dan mitra kerja agar terhindar dari kejadian berbahaya di lokasi kerja. Area operasional Perusahaan telah dilengkapi dengan berbagai perangkat keselamatan kerja untuk memastikan keselamatan kerja pegawai dalam menunjang kinerja Pegawai.

PLN Indonesia Power ensures the safety of employees and business partners by preventing hazardous incidents in the workplace. The Company's operational areas are equipped with various occupational safety equipment to safeguard employees and support their performance.

Sarana Keselamatan Kerja

Occupational Safety Facilities

Sarana Keselamatan Kerja Occupational Safety Facilities		Kegunaan Sarana Keselamatan Kerja Use of Occupational Safety Facilities	Tempat Penggunaan Place of Use
Alat Pelindung Diri (APD) Personal Protective Equipment (PPE)		Melindungi sebagian atau seluruh badan personil dari potensi bahaya yang jenisnya disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di area kerjanya. Protects parts or the entire body of the personnel from potential hazards, which type is adjusted according to potential hazards in the corresponding work area.	Sebagian atau seluruh bagian tubuh personil. Part or entire body of the personnel.
Rambu-Rambu K3 (<i>Safety Sign</i>) HSE Signs (Safety Signs)		Menunjukkan adanya potensi bahaya di area kerja, mengingatkan personil untuk berperilaku aman, menunjukkan lokasi peralatan pemadam dan tanggap darurat dan memberikan arahan/petunjuk saat keadaan darurat. Indicates potential hazards in the work area, warns personnel to operate safely, indicates the location of fire extinguishers and emergency response, and provides direction/guidance for emergencies.	Ditempatkan di area yang strategis/mudah terlihat dan sesuai risiko yang ditimbulkan. Conveniently located/clearly visible, and corresponding to the potential risk.
Sistem Proteksi Kebakaran (Manual & Otomatis): 1) APAR 2) Hydrant 3) APAT 4) Mobil Damkar 5) Pompa Fire Fighting 6) Deluge Sprinkler System 7) Fire Alarm System 8) Low Pressure CO ₂ System 9) Foam System 10) <i>Wet sprinkler system</i>	Fire Protection System (Manual & Automatic): 1) Fire Extinguishers 2) Hydrants 3) Conventional Firefighting Equipment 4) Firefighting Vehicles 5) Firefighting Pumps 6) Deluge Sprinkler System 7) Fire Alarm System 8) Low Pressure CO ₂ System 9) Foam System 10) Wet Sprinkler System	Untuk mengendalikan potensi bahaya kebakaran yang dapat terjadi di area pembangkit listrik. To control potential fire hazards that may occur in the power generation unit.	Seluruh area pembangkit listrik. All power generation areas.
Fasilitas tanggap darurat: 1) Tim Tanggap darurat 2) Ambulance 3) Kotak P3K 4) Perlengkapan tanggap darurat lainnya (Tandu, <i>Breathing Apparatus</i> , dll)	Emergency response facilities: 1) Emergency Response Team 2) Ambulance 3) First Aid Kit 4) Other emergency response equipment (Stretcher, Breathing Apparatus, etc.)	Tersedianya perlengkapan tanggap darurat pada kondisi <i>emergency</i> . Availability of emergency response equipment in emergency situations.	Area terdampak kondisi <i>emergency</i> . Areas impacted by emergency conditions.

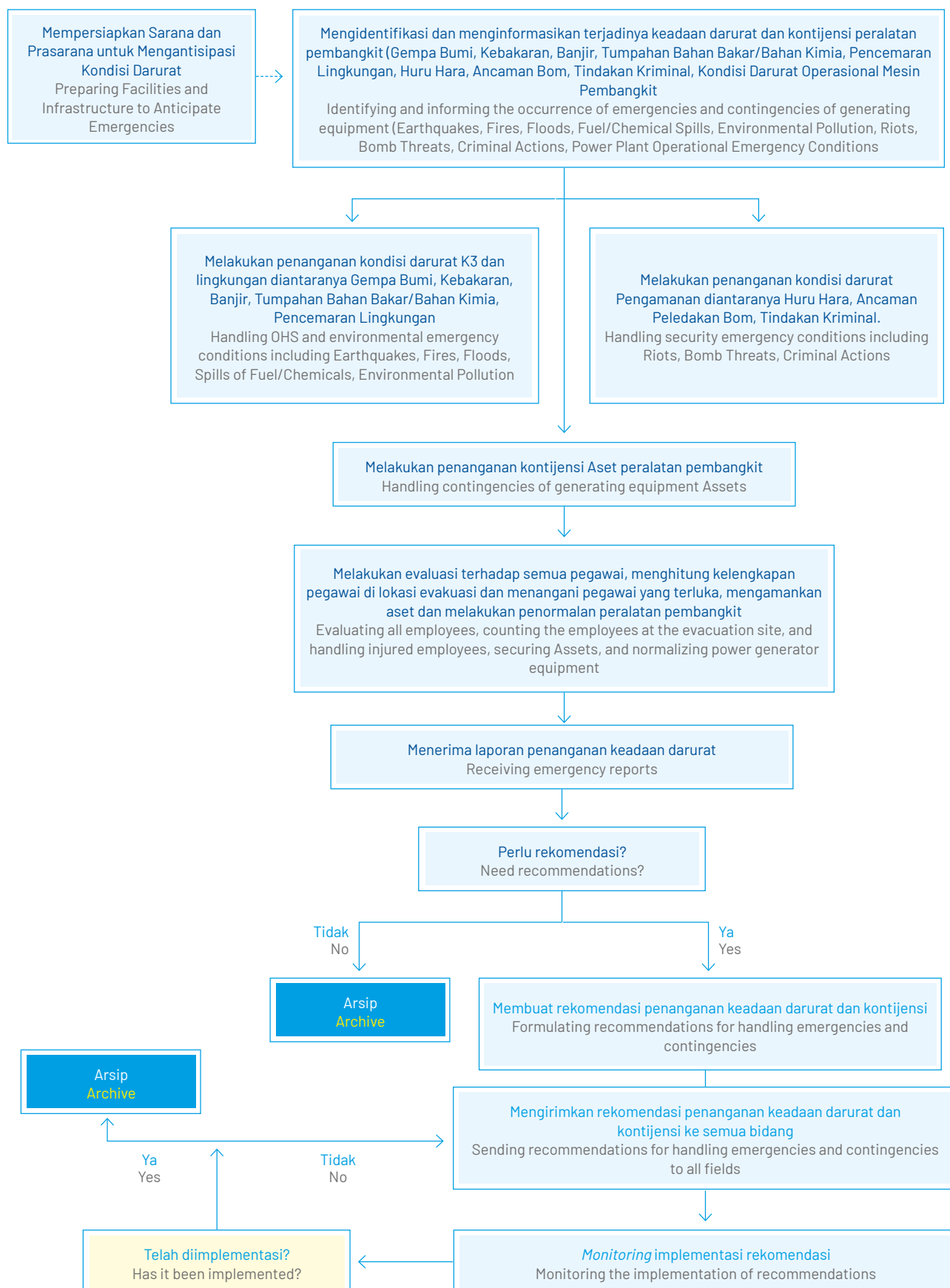
Sarana Keselamatan Kerja Occupational Safety Facilities	Kegunaan Sarana Keselamatan Kerja Use of Occupational Safety Facilities	Tempat Penggunaan Place of Use
Vacuum truck	Kendaraan penghisap debu melalui pipa saluran dengan koneksi dari pipa vacuum ke dalam truck menggunakan mesin. A vacuum-cleaning truck with a suction machine and a pipe attached to the tank.	Area transfer tower dan bunker Transfer tower area and bunker



Pemenuhan aspek kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku salah satunya dengan memastikan tersedianya mekanisme penanganan keadaan darurat serta simulasi secara berkala. Selama tahun 2024, PLN Indonesia Power menerima pelaporan temuan K3 (baik yang bersifat perbaikan maupun yang bersifat positif) melalui Aplikasi Nearmiss dengan total sebanyak 27.887 laporan. Setiap laporan yang diterima melalui Aplikasi Nearmiss ditindaklanjuti oleh PLN Indonesia Power melalui proses investigasi kecelakaan kerja atau insiden K3 secara menyeluruh. Perusahaan memastikan bahwa setiap laporan ditangani dengan tepat, termasuk melakukan tindakan perbaikan hingga tuntas. Untuk laporan yang masih berstatus terbuka (open), penyelesaiannya dibahas dalam forum rapat P2K3 guna mencari solusi terbaik demi mencegah potensi risiko serupa di masa mendatang. Mekanisme penanganan keadaan darurat di lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Compliance with occupational health and safety standards is ensured, among other ways, by establishing emergency response mechanisms and conducting regular emergency drills. Throughout 2024, PLN Indonesia Power received a total of 27,887 OHS-related reports (including both corrective and positive findings) through the Nearmiss Application. Each report submitted via the Nearmiss Application is followed-up by PLN Indonesia Power through a comprehensive investigation process of the related work accident or OHS incident. The Company ensures that every report is addressed appropriately, including the implementation of corrective actions until completion. For reports that remain open, their resolution is discussed in P2K3 meetings to identify the best solutions and prevent similar risks in the future. The Company's emergency response mechanism is structured as follows:

Mekanisme Penanganan Keadaan Darurat Emergency Response Mechanism



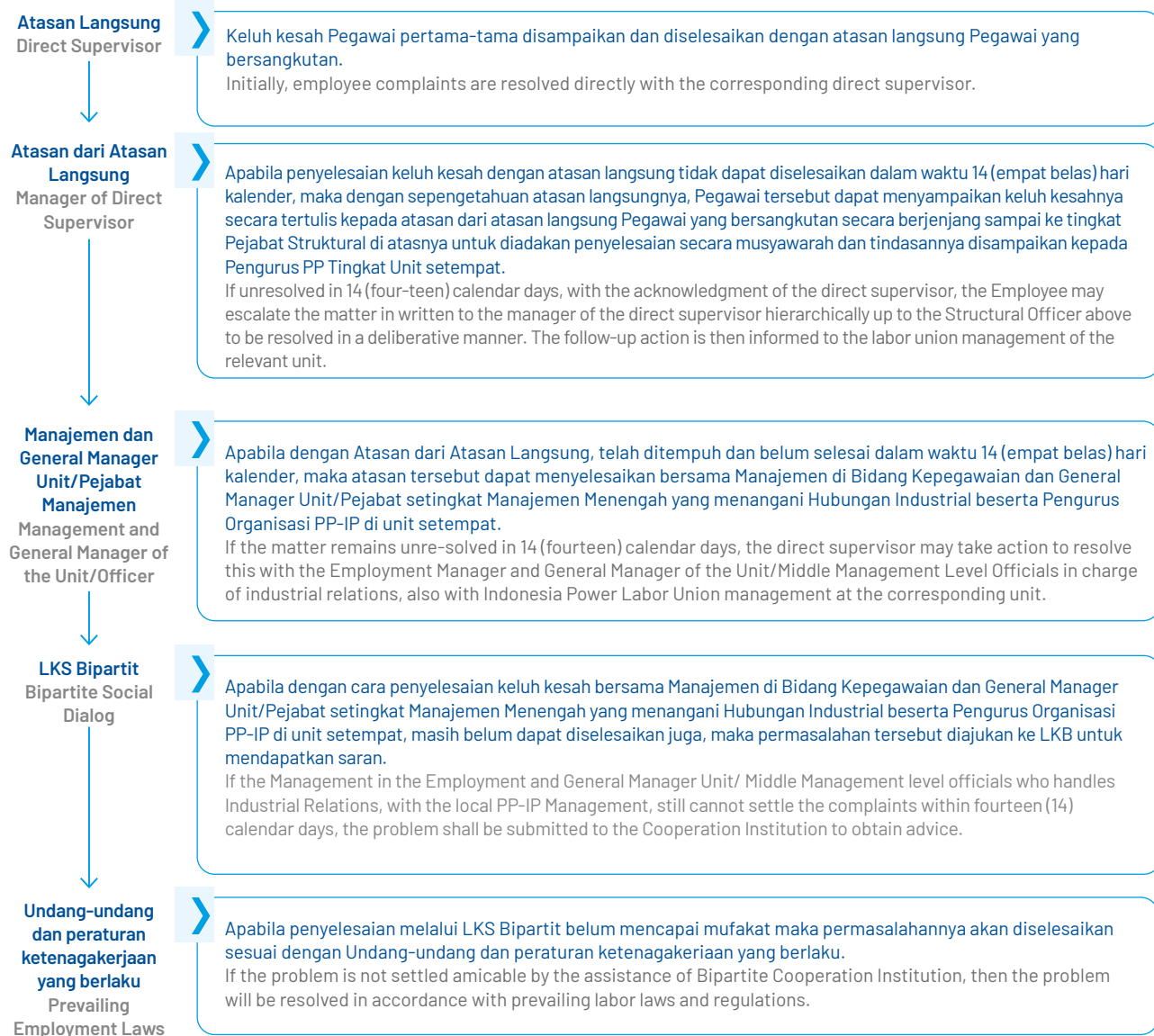
Mekanisme Penyampaian dan Penanganan Pengaduan serta Konflik Terkait Ketenagakerjaan

Mechanism for Submitting and Handling Complaints and Conflicts Related to Employment

PLN Indonesia Power menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan kerja serta konflik terkait aspek ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pemenuhan atas tanggung jawab dan komitmen Perusahaan terhadap keberlanjutan dalam aspek sosial. Mekanisme penanganan keluhan dan konflik terkait ketenagakerjaan sejalan dengan PKB 2024–2025 Bab VIII Hubungan Industrial Pasal 133 tentang Keluh Kesah Pegawai dan Pasal 134 tentang Penyelesaian Keluh Kesah Pegawai. Mekanisme penyampaian keluhan pegawai dapat dilihat pada *Flowchart* sebagai berikut:

PLN Indonesia Power provides a mechanism for complaints and handling work grievances and conflicts related to employment aspects as part of efforts to fulfill the Company's responsibility and commitment to sustainability in social aspects. The mechanism for handling labor-related grievances and conflicts is in line with the 2024–2025 CLA Chapter VIII Industrial Relations Article 133 on Employee Grievances and Article 134 on Employee Grievance Resolution. The employee grievance mechanism can be seen in the following Flow chart:

Penyelesaian Keluh Kesah Pegawai Resolving Employee Complaints



Selama tahun 2024, tidak terdapat pengaduan terkait pelanggaran praktik ketenagakerjaan dan pelanggaran hak asasi manusia termasuk insiden diskriminasi, insiden pelanggaran maupun pengaduan terkait kebebasan berserikat dan insiden kerja paksa yang dialami pegawai dan mitra kerja Perusahaan yang disampaikan kepada Perusahaan.

Throughout 2024, there were no reported complaints regarding labor practices or human rights violations, including incidents of discrimination, rights violations, or complaints related to freedom of association and forced labor involving employees or the Company's business partners.

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Ketenagakerjaan

Costs incurred for employment activities

PLN Indonesia Power menetapkan alokasi anggaran pada tahun 2024 dengan nilai realisasi dana untuk pengelolaan kepegawaian sebesar Rp3.612,72 miliar, pengembangan kompetensi sebesar Rp22,46 miliar dan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja sebesar Rp82,89 miliar.

PLN Indonesia Power set a budget allocation in 2024 with a realized value of funds for personnel management of Rp Rp3,612.72 billion, competency development of Rp 22.46 billion, and occupational health and safety management of Rp 82.89 billion.

Kinerja Sosial Aspek Masyarakat

Social Performance of Community Aspect

Perusahaan mendorong kegiatan operasional bisnis yang berintegritas dan etis serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. PLN Indonesia Power mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan dan aktivitas bisnis yang dilakukan. Lebih dari sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tanggung jawab sosial mencakup inisiatif proaktif dalam memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial, lingkungan, serta perekonomian di sekitar wilayah operasional Perusahaan. Tanggung jawab sosial juga berfungsi sebagai sarana strategis untuk menjalin dan memperkuat hubungan yang harmonis antara Perusahaan dan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya mendukung kelancaran kegiatan operasional dan menjamin keberlanjutan Perusahaan dalam jangka panjang.

The Company promotes business operations that are conducted with integrity and ethics, while making a tangible contribution to the broader improvement of community welfare. PLN Indonesia Power considers the social impacts of every business decision and activity undertaken. Beyond mere compliance with regulations, social responsibility encompasses proactive initiatives to improve and enhance social, environmental, and economic conditions in the areas surrounding the Company's operations. Social responsibility also serves as a strategic tool to establish and strengthen harmonious relationships between the Company and its stakeholders, ultimately supporting smooth operational activities and ensuring the Company's long-term sustainability.

PLN Indonesia Power melaksanakan program tanggung jawab sosial Perusahaan dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi landasan pelaksanaan tanggung jawab sosial serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang menjadi dasar penetapan kebijakan internal sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi Nomor 26.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan InPower Care,

PLN Indonesia Power implements its corporate social responsibility (CSR) programs by referring to the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Government Regulation No. 47 of 2012 on Corporate Social and Environmental Responsibility, which serve as the foundation for CSR implementation and the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises, which underlies the formulation of the following internal policies:

1. Board of Directors' Decision No. 26.K/010/IP/2014 on Guidelines for InPower Care Implementation,

2. Keputusan Direksi Nomor 249.K/010/IP/2015 tentang Pedoman <i>Green Power Plant</i>, 3. Keputusan Direksi Nomor 211.K/010/IP/2016 mengenai Komitmen Menjaga Ekosistem dan Pelestarian Lingkungan dalam Menjaga Keberlanjutan Planet, 4. Keputusan Direksi Nomor 180.K/010/IP/2018 tentang Komitmen <i>Community Development</i> melalui Program Inspirasi Perempuan, 5. Keputusan Direksi Nomor 56.K/010/IP/2019 tentang Pengelolaan Program Unggulan <i>Community Development</i>, 6. Keputusan Direksi Nomor 24.K/010/IP/2022 tentang Pedoman <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) berbasis ISO 26000:2013 Direksi PT Indonesia Power, 7. Peraturan Direksi Nomor 0043.P/DIR/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN Indonesia Power, 8. Edaran Direksi Nomor 46.E/012/IP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bakti Pelayanan Masyarakat dalam Program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Masyarakat di Lingkungan PT Indonesia Power, dan 9. Edaran Direksi Nomor 7.E/012/IP/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Perusahaan.	2. Board of Directors' Decision No. 249.K/010/IP/2015 on Guidelines for Green Power Plant, 3. Board of Directors' Decision No. 211.K/010/IP/2016 on Commitment to Ecosystem Conservation and Environmental Preservation to Ensure Planetary Sustainability, 4. Board of Directors' Decision No. 180.K/010/IP/2018 on Community Development Commitment through the Women's Inspiration Program 5. Board of Directors' Decision No. 56.K/010/IP/2019 on the Management of Community Development Flagship Programs 6. Board of Directors' Decision No. 24.K/010/IP/2022 on Corporate Social Responsibility (CSR) Guidelines based on ISO 26000:2013 for the Board of Directors of PT Indonesia Power 7. Board of Directors' Regulation No. 0043.P/DIR/2024 on Guidelines for the Implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) at PT PLN Indonesia Power 8. Board of Directors' Circular Letter No. 46.E/012/IP/2013 on Implementation Guidelines for Community Service Assistance in the Educational Assistance Program for Communities around PT Indonesia Power 9. Board of Directors' Circular Letter No. 7.E/012/IP/2014 on Implementation Guidelines for the Provision of Corporate Social Assistance

Partisipasi aktif PLN Indonesia Power dalam berbagai kegiatan sosial terus ditingkatkan, melalui pemberian dukungan kepada komunitas, serta berupaya memahami, menghargai, dan menyesuaikan diri terhadap norma-norma serta nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan bukan hanya menjadi cerminan integritas korporasi, melainkan juga menjadi elemen penting dalam menciptakan nilai bersama (*shared value*) antara perusahaan dan masyarakat.

PLN Indonesia Power's active participation in various social activities continues to be strengthened through support for communities, as well as efforts to understand, respect, and adapt to the prevailing social norms and values within society. Thus, the implementation of the Company's social responsibility is not only a reflection of corporate integrity but also an essential element in creating shared value between the Company and the community.

Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar

Impact of Operations Towards Local Communities

Kegiatan operasional Perusahaan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Upaya meminimalisasi dampak negatif terus dilakukan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan Perusahaan melalui kegiatan tanggung jawab sosial serta pembangunan yang berkelanjutan.

The Company's operational activities have both direct and indirect impacts on the surrounding communities and environment. Efforts to minimize negative impacts are continuously carried out as part of the Company's sustainability strategy through social responsibility activities and sustainable development.

Sebagai bentuk implementasi komitmen tersebut, Perusahaan secara berkala melaksanakan analisis menyeluruh terhadap dampak dan risiko yang mungkin timbul

As a form of commitment implementation, the Company regularly conducts comprehensive analyses of the potential impacts and risks arising from all operational activities. The

dari seluruh aktivitas operasional. Tujuan dari pelaksanaan analisis ini adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas kebijakan serta penerapan tanggung jawab sosial Perusahaan, guna memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan prinsip etika dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Di samping itu, PLN Indonesia Power secara aktif menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu sosial kemasyarakatan. Perusahaan berupaya memahami ekspektasi dan merespon isu yang berkembang di masyarakat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan inisiatif sosial yang relevan, sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis, partisipatif, dan berkelanjutan antara Perusahaan dan komunitas sekitar.

objective of this analysis is to evaluate the adequacy and effectiveness of corporate social responsibility policies and their implementation, to ensure that all business activities are conducted in accordance with ethical principles and compliance with applicable regulations.

Furthermore, PLN Indonesia Power actively engages in communication with stakeholders, particularly concerning social and community-related issues. The Company strives to understand expectations and respond to emerging issues within the community as a foundation for formulating relevant social policies and initiatives, thereby fostering harmonious, participatory, and sustainable relationships between the Company and surrounding communities.

Analisis Dampak, Risiko dan Tindakan Penanggulangan

Analysis of Impacts, Risks, and Countermeasures

Potensi Dampak Teridentifikasi Identified Potential Impact	Potensi Risiko Potential Risk		Tindakan Penanggulangan Countermeasure	
Sedikitnya Lapangan Pekerjaan Limited Employment Opportunities	• Kemiskinan • Pengangguran • Meningkatnya tindak kejahatan	• Poverty • Unemployment • Rising crime rates	• Membina dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Program Kemiraan. • Meningkatkan mitra kerja dengan tenaga kerja lokal.	• Fostering and developing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through the Partnership Program • Increasing collaboration with local labor as business partners
Kerusakan Lingkungan Environmental Degradation	• Berkurangnya ketersediaan air bersih. • Menghilangnya sumber mata pencaharian masyarakat. • Gangguan kesehatan masyarakat dan tenaga kerja di lingkungan pembangkit. • Bencana Alam	• Lack of clean water. • Loss of people's livelihoods. • Community and employee health issue at the power plant environment. • Natural Disaster	• Pengendalian operasi dan pengelolaan limbah cair. • Pengendalian operasi dan Pengendalian baku mutu emisi. • Pemantauan emisi gas buang secara <i>continue</i> melalui CEMS (<i>Continuous Emission Monitoring System</i>) dan periodik melalui pemantauan laboratorium.	• Controlling operations and managing liquid waste • Controlling operations and maintaining emission quality standards • Monitoring exhaust gas emissions continuously through CEMS (Continuous Emission Monitoring System) and periodically through laboratory monitoring
Minimnya Akses dan Infrastruktur Pendidikan Lack of Access to and Infrastructure for Education	• Meningkatnya anak putus sekolah. • Rendahnya mutu pendidikan. • Rendahnya kompetensi masyarakat. • Meningkatnya pengangguran.	• Rising dropout rate. • Poor education quality. • Poor community competency. • Rising unemployment	• Bantuan dan Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. • Program kerja sama bidang pendidikan. • Bantuan Biaya Pendidikan.	• Providing and improving educational facilities and infrastructure • Collaborating on educational programs • Providing educational financial assistance

Potensi Dampak Teridentifikasi Identified Potential Impact	Potensi Risiko Potential Risk		Tindakan Penanggulangan Countermeasure	
Kesehatan, Sosial dan Keagamaan Health, Social, and Religious Issues	• Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. • Hilangnya kearifan lokal. • Tempat tinggal tidak layak. • Sarana ibadah tidak layak.	• Poor public health quality. • Loss of local wisdom. • Inadequate housing. • Inadequate place of worship.	• Bantuan pemeriksaan dan pengobatan gratis. • Bantuan sosial bencana alam dan non alam. • Partisipasi peringatan hari besar dan kegiatan adat. • Bantuan renovasi rumah. • Bantuan perbaikan sarana ibadah.	• Providing free medical check-ups and treatments • Providing social assistance for natural and non-natural disasters • Participating in national celebrations and traditional ceremonies • Providing assistance for home renovations • Providing support for the improvement of worship facilities
Hubungan dengan Stakeholder Relations with Stakeholders	• Kredibilitas Perusahaan. • Perilaku Menyimpang.	• Corporate Credibility. • Deviant Behaviors	• Komitmen pada penerapan pedoman etika Perusahaan. • Forum diskusi dengan stakeholders.	• Committing to the implementation of the Company's code of ethics • Organizing discussion forums with stakeholders

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan Social Responsibility Activities on Communities

Tanggung jawab sosial Perusahaan diantaranya direalisasikan melalui Program InPower CARE (Indonesia Power – *Community Assistance, Relation and Empowerment*) yang mencakup tiga program utama, yaitu: Pelayanan Masyarakat (*Community Assistance*), Pembinaan Hubungan Masyarakat (*Community Relation*) dan Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*).

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program kerja tanggung jawab sosial Perusahaan di tingkat unit, PLN Indonesia Power secara rutin melaksanakan kegiatan pembinaan yang berkelanjutan. Pembinaan dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka maupun melalui sarana komunikasi virtual seperti *video conference*, yang memungkinkan interaksi dua arah secara *real-time*. Selain itu, PLN Indonesia Power juga memanfaatkan media komunikasi elektronik seperti surat elektronik (email) dan aplikasi pesan instan, seperti *WhatsApp Group*, untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian informasi, diskusi teknis, serta tindak lanjut dari hasil rapat atau arahan manajemen. Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan di beberapa unit kerja sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The Company's social responsibility is implemented, among others, through the InPower CARE Program (Indonesia Power – *Community Assistance, Relation, and Empowerment*), which encompasses three main programs: Community Assistance, Community Relation, and Community Empowerment.

To ensure the effectiveness of the Company's social responsibility work programs at the unit level, PLN Indonesia Power routinely conducts continuous development activities. These are carried out through face-to-face meetings as well as virtual communication platforms such as video conferences, enabling real-time two-way interaction. In addition, PLN Indonesia Power utilizes electronic communication media such as email and instant messaging applications like *WhatsApp Groups* to facilitate and expedite information delivery, technical discussions, and follow-ups on meeting outcomes or management directives. The Community Empowerment Programs implemented in several work units throughout 2024 were as follows:

Program Pemberdayaan Masyarakat

Community Empowerment Program

No	Unit Kerja dan Program Pemberdayaan Masyarakat Work Unit and Community Empowerment Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goal (SDG)	Alokasi Dana Budget Allocation	Capaian Achievement
1	PLTGU Keramasan PALEMBANG CINDO NIAN "Clean Batik Initiative for Indonesia, New Inspirative, Art and Nice" CCPP Keramasan PALEMBANG CINDO NIAN "Clean Batik Initiative for Indonesia, New Inspirative, Art and Nice"		Rp258.215.823	1. Jumlah pengangguran yang berasal dari perempuan dan kelompok rentan mengalami penurunan sebesar 31,8% 2. Peningkatan pendapatan pengepul sebanyak 12.000.000/tahun 3. Pemanfaatan limbah holtikultura dan sampah sisa makanan sebanyak 12,78% 4. Mengurangi timbulan sampah pada lokasi program sebesar 46,3% 5. Penurunan kasus TBC sebesar 33,6% pada lokasi program 6. Peningkatan Partisipasi Program dari 60 menjadi 113 Orang 1. The number of unemployed individuals from women and vulnerable groups decreased by 31.8% 2. An increase in collectors' income by Rp12,000,000/year 3. Utilization of horticultural waste and food scraps reached 12.78% 4. Reducing waste generation at the program site by 46.3% 5. Reduction of tuberculosis (TB) cases by 33.6% at the program site 6. Increase in program participation from 60 to 113 people
2	PLTGU Indralaya SEKANCAN OGAN "Sinergi Ekonomi Kreatif dan Pangan Lokal Berbasis Limbah untuk Mitigasi Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir" CCPP Indralaya SEKANCAN OGAN "Creative Economy and Local Food Synergy Based on Waste for Forest and Land Fire Mitigation in Ogan Ilir Regency"		Rp233.882.650	1. Pengurangan limbah pelepah kelapa sawit sebesar 8,2 ton dan pengurangan emisi karbon sebesar 1.911,9 ton CO₂eq, serta meningkatkan panen harian menjadi 16 kg/hari 2. Pengurangan limbah baglog sebesar 1,179 ton dan pengurangan emisi karbon sebesar 289,9 ton CO₂eq, serta menghasilkan 507 liter bio oil 3. Pelibatan 70 warga miskin, 4 perempuan rawan sosial ekonomi, 2 lansia, dan 2 mantan preman, serta 70 orang balita penerima manfaat 4. 7 Ha lahan karet dan 3 Ha lahan budidaya sayur telah beralih pada bio oil sebagai pembeku getah dan pestisida nabati 5. Pendapatan kelompok dari budidaya jamur tiram sebesar Rp275.760.000, pemanfaatan limbah pelepah sawit menghemat biaya produksi baglog sebesar Rp5.400.000, peningkatan kas menjadi Rp26.157.000 per September 2024 1. Reduction of oil palm frond waste by 8.2 tons and carbon emission reduction by 1,911.9 tons CO₂eq, as well as an increase in daily harvest to 16 kg/day 2. Reduction of baglog waste by 1.179 tons and carbon emission reduction by 289.9 tons CO₂eq, along with the production of 507 liters of bio-oil 3. Involvement of 70 poor residents, 4 women vulnerable to socio-economic issues, 2 elderly people, and 2 former gang members, as well as 70 toddlers as beneficiaries 4. 7 hectares of rubber plantation and 3 hectares of vegetable cultivation land have switched to using bio-oil as latex coagulant and plant-based pesticide 5. Group income from oyster mushroom cultivation reached Rp275,760,000, utilization of palm frond waste saved baglog production costs by Rp5,400,000, and cash reserves increased to Rp26,157,000 as of September 2024
3	PLTU Suralaya JAMUS KALIMASADA "Jaringan Masyarakat untuk Kembangkan Limbah secara Inovatif Demi Masa Depan yang Sejahtera"		Rp366.282.086	1. 25 Ton/Bulan RDF sebagai substitusi bahan bakar produksi batu bata; 3 Ton/Bulan sebagai media tanam; penurunan CO dari proses pembakaran batu bata hingga 1.005 mg/Nm³; termanfaatkannya 1,8 ton abu plastik untuk bauran produksi paving block yang dicampurkan faba. 1. 25 tons/month of RDF used as a fuel substitute for brick production; 3 tons/month used as planting media; reduction of CO emissions from brick burning process by up to 1,005 mg/Nm³; utilization of 1.8 tons of plastic ash blended with FABA in paving block production.

No	Unit Kerja dan Program Pemberdayaan Masyarakat Work Unit and Community Empowerment Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goal (SDG)	Alokasi Dana Budget Allocation	Capaian Achievement
	SPP Suralaya JAMUS KALIMASADA "Community Network to Innovatively Develop Waste for a Prosperous Future"			- Lapangan kerja bagi 134 orang dan 93 orang diantaranya kelompok rentan; Penghematan bahan bakar dan media tanam Rp127.142.000,-; serta peningkatan pendapatan anggota kelompok Rp2.800.000 bulan/orang. - Ruang inklusi bagi 93 orang; terbangunnya jaringan kemitraan pentahelix; integrasi antar program serta centre of learning bagi 137 Kota/Kabupaten. 8 Disabilitas dan 35 perempuan berdaya sosial ekonomi; MOU CSR antara perusahaan dan pemerintah kota sekaligus mendorong terbitnya SK pemilahan sampah untuk keberlanjutan BBJP yang diperkuat dengan Perwal No 56 tahun 2023 tentang rencana induk pengelolaan sampah Kota Cilegon.
4	PLTU Banten 1 Suralaya TEPIAN SALIRA BIRU "Integrated Plastic Management for Blue Economy" SPP Banten 1 Suralaya TEPIAN SALIRA BIRU "Integrated Plastic Management for Blue Economy"		Rp605.800.617	- Pemanfaatan sampah 150 ton/ bulan dan Pengelolaan sampah plastik 3 ton/bln melalui pirolisis di kawasan Kota Cilegon - Peningkatan keandalan unit - Rata-rata pendapatan anggota Bank Sampah Puma Mandiri Rp2.185.000/bulan dan nelayan Rp4.500.000/bulan - Efisiensi biaya listrik Rp200.000/ bulan di Wisata Tepian Salira Biru - Menghidupkan Kembali potensi wisata di Desa Salira - Peningkatan Kapabilitas pengelolaan sampah dan wisata untuk Kelompok Bank Sampah Puma Mandiri 14 orang, Kelompok Nelayan Salira 12 orang dan Poklaksar Nyi Mas Samudera 15 orang - Menjadi pusat edukasi, penelitian dan pengabdian masyarakat terkait pengelolaan sampah organik menjadi Bahan Bakar Jumpatan Padat dan sampah plastik melalui pirolisis - Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 1,18 Kg CO₂ eq/kWh atau sebesar 1,88% dan pengurangan photochemical oxidation sebesar 7,01x10⁻¹³ kg C₂H₄ eq/kWh atau 8,47%

No	Unit Kerja dan Program Pemberdayaan Masyarakat Work Unit and Community Empowerment Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goal (SDG)	Alokasi Dana Budget Allocation	Capaian Achievement
5	PLTU Banten 2 Labuan KORSA "Program Konservasi dan Rekonsiliasi Sistem Pertanian" SPP Banten 2 Labuan KORSA "Conservation and Agricultural System Reconciliation Program"		Rp466.862.082	1. Hasil pemeriksaan BTPH, Metafora mampu meningkatkan kandungan pada tanah: pH dari 4,9 -> 5,7, C Organik 2.26 -> 2.78%, N 0.24% -> 0.38%, P 1.94 ppm -> 237.59 ppm, Struktur Tanah Liat -> Lempung Berpasir 2. Peningkatan dan diversifikasi pendapatan Eks Narapidana Teroris melalui kegiatan pemanfaatan METAFORA dan hasil dari penerapan pertanian berkelanjutan mampu mendapatkan Rp18.000.000 di tahun 2024 dan peningkatan pendapatan kelompok Pagelaran Mandiri rata-rata Rp 2.000.000/bulan menjadi Rp5.000.000/bulan 3. Mampu memberdayakan Kelompok Rentan yaitu 183 petani dengan pendapatan rendah, 9 orang petani Wanita, 2 orang prasejahtera anggota Kel. Cireban Jaya, 2 Orang prasejahtera anggota Pagelaran Mandiri, 16 Eks-Napiter 4. Intervensi gizi pada anak-anak beresiko stunting sebanyak 20 anak di Kec. Labuan dan 20 anak di Kec. Pagelaran 5. Menjadi pusat pembelajaran bagi siswa sekolah dan Masyarakat luas 6. Penghematan pembelian pupuk oleh petani Desa Kaduengang dan Kelompok Koperasi BIM sebesar Rp5.334/kg atau total Rp486.000.000 1. Based on the BTPH examination, METAFORA has improved soil content: pH from 4.9 to 5.7, Organic C from 2.26% to 2.78%, N from 0.24% to 0.38%, P from 1.94 ppm to 237.59 ppm, and Soil Structure from Clay to Sandy Loam. 2. Increased and diversified income for Former Terrorism Convicts through the utilization of METAFORA and the implementation of sustainable agriculture, generating Rp18,000,000 in 2024 and increasing the average monthly income of the Pagelaran Mandiri group from Rp2,000,000 to Rp5,000,000. 3. Empowered vulnerable groups including 183 low-income farmers, 9 female farmers, 2 underprivileged members of the Cireban Jaya group, 2 underprivileged members of the Pagelaran Mandiri group, and 16 former terrorism convicts. 4. Nutrition intervention for children at risk of stunting: 20 children in Labuan District and 20 children in Pagelaran District. 5. Served as a learning center for school students and the wider community. 6. Fertilizer cost savings for farmers in Kaduengang Village and the BIM Cooperative Group amounting to Rp5,334/kg, with a total saving of Rp486,000,000.
6	PLTU Banten 3 Lontar SPP Banten 3 Lontar HARVEST MOON "Harnessing Agriculture Resources via Versatile and Efficient Sustainable Technologies"		Rp670.886.249	1. Peningkatan panen sebesar 960 kg atau nilai persentase peningkatan sebesar 88,24% 2. Peningkatan pendapatan rata-rata anggota Tim Kreatif Desa Lontar per tahun yang awalnya Rp19,666,667/tahun menjadi Rp30,433,333/tahun 3. Penanaman sebanyak 3.310 pohon yang dilakukan kelompok mitra binaan UBP Lontar telah menghasilkan penyerapan karbon dioksida sebesar 3.475,5 CO₂eq/tahun 4. Kebutuhan air berkualitas baik dalam kegiatan pertanian diatasi melalui sistem filtrasi air berbasis bottom ash dan berhasil memberikan rata-rata penghematan biaya pembelian air hingga 25,71% tiap tahunnya 1. Harvest increase of 960 kg, representing a percentage growth of 88.24%. 2. Average annual income of the Lontar Village Creative Team members increased from Rp19,666,667/year to Rp30,433,333/year. 3. A total of 3,310 trees planted by UBP Lontar's assisted partner groups resulted in carbon dioxide absorption of 3,475.5 CO₂eq/year. 4. The need for quality water in agricultural activities was addressed through a bottom ash-based water filtration system, achieving an average annual water purchase cost saving of 25.71%.

No	Unit Kerja dan Program Pemberdayaan Masyarakat Work Unit and Community Empowerment Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goal (SDG)	Alokasi Dana Budget Allocation	Capaian Achievement
				5. Penghematan biaya pembelian media tanam dari Formula 1 (media tanam konvensional) ke Formula 4 (media tanam konvensional + FABA + cangkang kerang) sebesar 49% 6. Total penerima manfaat langsung dan tidak langsung program HARVEST MOON sebanyak 859 orang. 5. Cost savings on planting media by switching from Formula 1 (conventional planting media) to Formula 4 (conventional media + FABA + seashells) amounted to 49%. 6. Total direct and indirect beneficiaries of the HARVEST MOON program: 859 people.
7	PLTGU Cilegon KAMI BERSEMI "Kampung Inovatif, Bersih, Sejahtera, dan Mandiri" CCPP Cilegon KAMI BERSEMI "Innovative, Clean, Prosperous, and Independent Village" <td></td> <td>Rp543.202.000</td> <td> 1. Pendapatan hingga Rp312 juta/ tahun dari 5 kegiatan pengelolaan sampah dan produk olahan turunannya serta Pendapatan UMKM Hub hingga Rp232 juta/ tahun 2. Mengelola 11.350,5 ton/tahun sampah Reduksi emisi hingga 824 Ton CO₂/tahun dan mencegah pelepasan metan sebesar 810,3 ton/tahun melalui pencegahan pembakaran sampah 1.350,5 ton/tahun dan serapan karbon sebanyak 790,65 Ton CO₂ melalui penanaman 3350 bibit mangrove 3. Mengantisipasi potensi banjir di 3 desa 4. <i>Center Learning</i> bagi 753 orang mengenai pengelolaan sampah dan lingkungan di Provinsi Banten 5. Eksistensi 12 perempuan sebagai penggerak lingkungan dan ekonomi 6. Terdapat 1 kampung PROKLIM Trophy Utama 1. Income of up to Rp312 million/ year from five waste management activities and their derivative products, and UMKM Hub income reaching up to Rp232 million/year. 2. Management of 11,350.5 tons/ year of waste, emission reduction of up to 824 tons CO₂/year, and prevention of methane release amounting to 810.3 tons/year by avoiding the burning of 1,350.5 tons/year of waste, along with carbon absorption of 790.65 tons CO₂ through the planting of 3,350 mangrove seedlings. 3. Anticipated flood mitigation in three villages. 4. Learning center for 753 individuals on waste and environmental management in Banten Province. 5. The active involvement of 12 women as environmental and economic drivers. 6. One village was awarded the Main PROKLIM Trophy. </td>		Rp543.202.000	1. Pendapatan hingga Rp312 juta/ tahun dari 5 kegiatan pengelolaan sampah dan produk olahan turunannya serta Pendapatan UMKM Hub hingga Rp232 juta/ tahun 2. Mengelola 11.350,5 ton/tahun sampah Reduksi emisi hingga 824 Ton CO₂/tahun dan mencegah pelepasan metan sebesar 810,3 ton/tahun melalui pencegahan pembakaran sampah 1.350,5 ton/tahun dan serapan karbon sebanyak 790,65 Ton CO₂ melalui penanaman 3350 bibit mangrove 3. Mengantisipasi potensi banjir di 3 desa 4. <i>Center Learning</i> bagi 753 orang mengenai pengelolaan sampah dan lingkungan di Provinsi Banten 5. Eksistensi 12 perempuan sebagai penggerak lingkungan dan ekonomi 6. Terdapat 1 kampung PROKLIM Trophy Utama 1. Income of up to Rp312 million/ year from five waste management activities and their derivative products, and UMKM Hub income reaching up to Rp232 million/year. 2. Management of 11,350.5 tons/ year of waste, emission reduction of up to 824 tons CO₂/year, and prevention of methane release amounting to 810.3 tons/year by avoiding the burning of 1,350.5 tons/year of waste, along with carbon absorption of 790.65 tons CO₂ through the planting of 3,350 mangrove seedlings. 3. Anticipated flood mitigation in three villages. 4. Learning center for 753 individuals on waste and environmental management in Banten Province. 5. The active involvement of 12 women as environmental and economic drivers. 6. One village was awarded the Main PROKLIM Trophy.
8	PLTGU Priok KELASI EMAS "Keberlanjutan Program Ketapang Kuning Melalui Stimulasi Menuju Generasi Emas" CCPP Priok KELASI EMAS "Sustainability of the Ketapang Kuning Program Through Stimulation Towards a Golden Generation" <td></td> <td>Rp1.234.444.986</td> <td> 1. Terjadi penurunan angka <i>stunting</i> khususnya di wilayah intervensi Program Kelas Emas (RW08 3 Anak & RW05 10 Anak) 2. DQ anak <i>stunting</i> mendekati anak normal rata-rata menjadi 92 yg sebelum nya rata-rata 86. Melalui kegiatan pemenuhan gizi dan stimulasi balita <i>stunting</i> 3. Transfer knowledge dari Agen Stimulasi ke Orangtua balita. Agen Stimulasi mampu untuk menjalankan kegiatan simulasi, <i>transfer knowledge</i>, dan monitoring kepada balita dan orangtua 4. Orangtua memiliki pendapatan tambahan dari UMKM penunjang Program Kelas Emas 5. Terselenggaranya Layanan stimulasi rutin oleh ILC yang dijalankan oleh guru PAUD melalui NANAS (Layanan Stimulasi Anak Stunting di ILC) untuk stimulasi intensif 1. A decrease in stunting rates, particularly in the intervention areas of the Kelas Emas Program (RW08: 3 children & RW05: 10 children). 2. DQ (Development Quotient) of stunted children is approaching that of normal children, with an average increase to 92 from the previous average of 86, achieved through nutrition fulfillment and stimulation activities for stunted toddlers. 3. Knowledge transfer from Stimulation Agents to parents of toddlers. Stimulation Agents are capable of conducting simulation activities, knowledge transfer, and monitoring of toddlers and parents. 4. Parents gain additional income from MSMEs supporting the Kelas Emas Program. 5. Regular stimulation services conducted by the ILC, run by PAUD teachers through NANAS (Stunting Child Stimulation Services at ILC) for intensive stimulation. </td>		Rp1.234.444.986	1. Terjadi penurunan angka <i>stunting</i> khususnya di wilayah intervensi Program Kelas Emas (RW08 3 Anak & RW05 10 Anak) 2. DQ anak <i>stunting</i> mendekati anak normal rata-rata menjadi 92 yg sebelum nya rata-rata 86. Melalui kegiatan pemenuhan gizi dan stimulasi balita <i>stunting</i> 3. Transfer knowledge dari Agen Stimulasi ke Orangtua balita. Agen Stimulasi mampu untuk menjalankan kegiatan simulasi, <i>transfer knowledge</i>, dan monitoring kepada balita dan orangtua 4. Orangtua memiliki pendapatan tambahan dari UMKM penunjang Program Kelas Emas 5. Terselenggaranya Layanan stimulasi rutin oleh ILC yang dijalankan oleh guru PAUD melalui NANAS (Layanan Stimulasi Anak Stunting di ILC) untuk stimulasi intensif 1. A decrease in stunting rates, particularly in the intervention areas of the Kelas Emas Program (RW08: 3 children & RW05: 10 children). 2. DQ (Development Quotient) of stunted children is approaching that of normal children, with an average increase to 92 from the previous average of 86, achieved through nutrition fulfillment and stimulation activities for stunted toddlers. 3. Knowledge transfer from Stimulation Agents to parents of toddlers. Stimulation Agents are capable of conducting simulation activities, knowledge transfer, and monitoring of toddlers and parents. 4. Parents gain additional income from MSMEs supporting the Kelas Emas Program. 5. Regular stimulation services conducted by the ILC, run by PAUD teachers through NANAS (Stunting Child Stimulation Services at ILC) for intensive stimulation.

No	Unit Kerja dan Program Pemberdayaan Masyarakat Work Unit and Community Empowerment Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goal (SDG)	Alokasi Dana Budget Allocation	Capaian Achievement										
9	PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu RAKA KREASI "Pertanian Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Inovasi" SPP West Java 2 Pelabuhan Ratu RAKA KREASI "Sustainable Agriculture Based on Local Wisdom and Innovation"		Rp904.640.741	1. Pengurangan sampah kayu pantai 45 ton/bulan – 52% 2. Pengairan sawah tadah hujan 40 hektar di musim kedua – 61% 3. Peningkatan frekuensi tanam dari 1 kali menjadi 2 kali per tahun oleh 52 petani– Rp449.512.219 4. Zero konflik antar petani maupun antar masyarakat dalam pengelolaan air – 20 KK 5. 10 anggota Bumdes Loji terampil membuat pupuk organik formulasi <i>sawdust</i> 6. 93 anak-anak memiliki 1 ruang pendidikan kebudayaan baru melalui festival RAKA KREASI 1. Reduction of coastal wood waste by 45 tons/month – 52% 2. Irrigation of 40 hectares of rain-fed rice fields during the second planting season – 61% 3. Increase in planting frequency from once to twice a year by 52 farmers – Rp449,512,219 4. Zero conflicts among farmers or communities in water management – 20 households 5. 10 members of BUMDes Loji skilled in producing organic fertilizer formulated from sawdust 6. 93 children have access to 1 new cultural education space through the RAKA KREASI festival <tr><td>10</td><td>PLTA Saguling BUMI PASUNDAN "Bangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Sumber Daya Terbarukan" HPP Saguling BUMI PASUNDAN "Building Community Economy Through Renewable Resource Management"</td><td></td><td>Rp1.753.199.434</td><td> 1. Pembangunan 3 <i>knowledge center</i> oleh PLN IP a. Terdapat 26 Bank Sampah Unit yang sudah teredukasi oleh PLN IP b. Kegiatan Event Lingkungan Festival Citarum melibatkan 756 orang c. Keterlibatan masyarakat langsung atau tidak langsung yaitu 3155 orang 2. Pengurangan limbah plastik & eceng gondok = 756 Ton. Pengurangan emisi dari pembakaran sampah = 24,2648 Ton CO₂e 3. Sampah <i>low value</i> dimanfaatkan menjadi paving blok, plastik <i>board</i>, <i>furniture</i> 4. Limbah eceng gondok 1,7 hektar dimanfaatkan menjadi kerajinan, pupuk organik cair, pakan ternak 5. Kelompok rentan (pemulung, mantan preman, lansia, pengangguran, dan perempuan fakir miskin) mendapatkan penghasilan sebesar Rp2.137.010,4 tiap bulan/ orang. Keterlibatan dalam program = 207 orang 1. Development of 3 knowledge centers by PLN IP a. 26 Waste Bank Units have been educated by PLN IP b. Environmental Event "Citarum Festival" involved 756 participants c. Total community engagement (direct and indirect): 3,155 people 2. Reduction of plastic and water hyacinth waste = 756 tons. Emission reduction from waste burning = 24.2648 tons CO₂e 3. Low-value waste is repurposed into paving blocks, plastic boards, and furniture 4. 1.7 hectares of water hyacinth waste utilized for handicrafts, liquid organic fertilizer, and animal feed 5. Vulnerable groups (scavengers, former thugs, elderly, unemployed, and impoverished women) earned an average income of Rp2,137,010.4 per person per month. Total participants in the program: 207 people. <tr><td>11</td><td>PLTP Kamojang Darajat PELITA BERSAMA "Pemberdayaan Disabilitas Untuk Berkarya Sejahtera Bersama" GPP Kamojang Darajat PELITA BERSAMA "Empowering Persons with Disabilities for Inclusive Prosperity"</td><td></td><td>Rp291.295.365</td><td> 1. Peningkatan perekonomian disabilitas 2. Pengentasan kemiskinan disabilitas di Kab. Garut sebesar 8,4% 3. Penyerapan tenaga kerja disabilitas sebesar 1,01% 4. Terdapat 4 program usaha bersama kelompok disabilitas yang menjadi wadah disabilitas untuk berkarya 5. 37 Disabilitas bisa produktif dengan keterbatasannya 1. Improvement in the economic condition of persons with disabilities 2. Poverty reduction among persons with disabilities in Garut Regency by 8.4% 3. Employment absorption rate for persons with disabilities reached 1.01% 4. Establishment of 4 joint business programs for disability groups as a platform for creativity and productivity 5. 37 persons with disabilities are now productively engaged despite their limitations </td></tr></td></tr>	10	PLTA Saguling BUMI PASUNDAN "Bangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Sumber Daya Terbarukan" HPP Saguling BUMI PASUNDAN "Building Community Economy Through Renewable Resource Management"		Rp1.753.199.434	1. Pembangunan 3 <i>knowledge center</i> oleh PLN IP a. Terdapat 26 Bank Sampah Unit yang sudah teredukasi oleh PLN IP b. Kegiatan Event Lingkungan Festival Citarum melibatkan 756 orang c. Keterlibatan masyarakat langsung atau tidak langsung yaitu 3155 orang 2. Pengurangan limbah plastik & eceng gondok = 756 Ton. Pengurangan emisi dari pembakaran sampah = 24,2648 Ton CO₂e 3. Sampah <i>low value</i> dimanfaatkan menjadi paving blok, plastik <i>board</i>, <i>furniture</i> 4. Limbah eceng gondok 1,7 hektar dimanfaatkan menjadi kerajinan, pupuk organik cair, pakan ternak 5. Kelompok rentan (pemulung, mantan preman, lansia, pengangguran, dan perempuan fakir miskin) mendapatkan penghasilan sebesar Rp2.137.010,4 tiap bulan/ orang. Keterlibatan dalam program = 207 orang 1. Development of 3 knowledge centers by PLN IP a. 26 Waste Bank Units have been educated by PLN IP b. Environmental Event "Citarum Festival" involved 756 participants c. Total community engagement (direct and indirect): 3,155 people 2. Reduction of plastic and water hyacinth waste = 756 tons. Emission reduction from waste burning = 24.2648 tons CO₂e 3. Low-value waste is repurposed into paving blocks, plastic boards, and furniture 4. 1.7 hectares of water hyacinth waste utilized for handicrafts, liquid organic fertilizer, and animal feed 5. Vulnerable groups (scavengers, former thugs, elderly, unemployed, and impoverished women) earned an average income of Rp2,137,010.4 per person per month. Total participants in the program: 207 people. <tr><td>11</td><td>PLTP Kamojang Darajat PELITA BERSAMA "Pemberdayaan Disabilitas Untuk Berkarya Sejahtera Bersama" GPP Kamojang Darajat PELITA BERSAMA "Empowering Persons with Disabilities for Inclusive Prosperity"</td><td></td><td>Rp291.295.365</td><td> 1. Peningkatan perekonomian disabilitas 2. Pengentasan kemiskinan disabilitas di Kab. Garut sebesar 8,4% 3. Penyerapan tenaga kerja disabilitas sebesar 1,01% 4. Terdapat 4 program usaha bersama kelompok disabilitas yang menjadi wadah disabilitas untuk berkarya 5. 37 Disabilitas bisa produktif dengan keterbatasannya 1. Improvement in the economic condition of persons with disabilities 2. Poverty reduction among persons with disabilities in Garut Regency by 8.4% 3. Employment absorption rate for persons with disabilities reached 1.01% 4. Establishment of 4 joint business programs for disability groups as a platform for creativity and productivity 5. 37 persons with disabilities are now productively engaged despite their limitations </td></tr>	11	PLTP Kamojang Darajat PELITA BERSAMA "Pemberdayaan Disabilitas Untuk Berkarya Sejahtera Bersama" GPP Kamojang Darajat PELITA BERSAMA "Empowering Persons with Disabilities for Inclusive Prosperity"		Rp291.295.365	1. Peningkatan perekonomian disabilitas 2. Pengentasan kemiskinan disabilitas di Kab. Garut sebesar 8,4% 3. Penyerapan tenaga kerja disabilitas sebesar 1,01% 4. Terdapat 4 program usaha bersama kelompok disabilitas yang menjadi wadah disabilitas untuk berkarya 5. 37 Disabilitas bisa produktif dengan keterbatasannya 1. Improvement in the economic condition of persons with disabilities 2. Poverty reduction among persons with disabilities in Garut Regency by 8.4% 3. Employment absorption rate for persons with disabilities reached 1.01% 4. Establishment of 4 joint business programs for disability groups as a platform for creativity and productivity 5. 37 persons with disabilities are now productively engaged despite their limitations
10	PLTA Saguling BUMI PASUNDAN "Bangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Sumber Daya Terbarukan" HPP Saguling BUMI PASUNDAN "Building Community Economy Through Renewable Resource Management"		Rp1.753.199.434	1. Pembangunan 3 <i>knowledge center</i> oleh PLN IP a. Terdapat 26 Bank Sampah Unit yang sudah teredukasi oleh PLN IP b. Kegiatan Event Lingkungan Festival Citarum melibatkan 756 orang c. Keterlibatan masyarakat langsung atau tidak langsung yaitu 3155 orang 2. Pengurangan limbah plastik & eceng gondok = 756 Ton. Pengurangan emisi dari pembakaran sampah = 24,2648 Ton CO₂e 3. Sampah <i>low value</i> dimanfaatkan menjadi paving blok, plastik <i>board</i>, <i>furniture</i> 4. Limbah eceng gondok 1,7 hektar dimanfaatkan menjadi kerajinan, pupuk organik cair, pakan ternak 5. Kelompok rentan (pemulung, mantan preman, lansia, pengangguran, dan perempuan fakir miskin) mendapatkan penghasilan sebesar Rp2.137.010,4 tiap bulan/ orang. Keterlibatan dalam program = 207 orang 1. Development of 3 knowledge centers by PLN IP a. 26 Waste Bank Units have been educated by PLN IP b. Environmental Event "Citarum Festival" involved 756 participants c. Total community engagement (direct and indirect): 3,155 people 2. Reduction of plastic and water hyacinth waste = 756 tons. Emission reduction from waste burning = 24.2648 tons CO₂e 3. Low-value waste is repurposed into paving blocks, plastic boards, and furniture 4. 1.7 hectares of water hyacinth waste utilized for handicrafts, liquid organic fertilizer, and animal feed 5. Vulnerable groups (scavengers, former thugs, elderly, unemployed, and impoverished women) earned an average income of Rp2,137,010.4 per person per month. Total participants in the program: 207 people. <tr><td>11</td><td>PLTP Kamojang Darajat PELITA BERSAMA "Pemberdayaan Disabilitas Untuk Berkarya Sejahtera Bersama" GPP Kamojang Darajat PELITA BERSAMA "Empowering Persons with Disabilities for Inclusive Prosperity"</td><td></td><td>Rp291.295.365</td><td> 1. Peningkatan perekonomian disabilitas 2. Pengentasan kemiskinan disabilitas di Kab. Garut sebesar 8,4% 3. Penyerapan tenaga kerja disabilitas sebesar 1,01% 4. Terdapat 4 program usaha bersama kelompok disabilitas yang menjadi wadah disabilitas untuk berkarya 5. 37 Disabilitas bisa produktif dengan keterbatasannya 1. Improvement in the economic condition of persons with disabilities 2. Poverty reduction among persons with disabilities in Garut Regency by 8.4% 3. Employment absorption rate for persons with disabilities reached 1.01% 4. Establishment of 4 joint business programs for disability groups as a platform for creativity and productivity 5. 37 persons with disabilities are now productively engaged despite their limitations </td></tr>	11	PLTP Kamojang Darajat PELITA BERSAMA "Pemberdayaan Disabilitas Untuk Berkarya Sejahtera Bersama" GPP Kamojang Darajat PELITA BERSAMA "Empowering Persons with Disabilities for Inclusive Prosperity"		Rp291.295.365	1. Peningkatan perekonomian disabilitas 2. Pengentasan kemiskinan disabilitas di Kab. Garut sebesar 8,4% 3. Penyerapan tenaga kerja disabilitas sebesar 1,01% 4. Terdapat 4 program usaha bersama kelompok disabilitas yang menjadi wadah disabilitas untuk berkarya 5. 37 Disabilitas bisa produktif dengan keterbatasannya 1. Improvement in the economic condition of persons with disabilities 2. Poverty reduction among persons with disabilities in Garut Regency by 8.4% 3. Employment absorption rate for persons with disabilities reached 1.01% 4. Establishment of 4 joint business programs for disability groups as a platform for creativity and productivity 5. 37 persons with disabilities are now productively engaged despite their limitations					
11	PLTP Kamojang Darajat PELITA BERSAMA "Pemberdayaan Disabilitas Untuk Berkarya Sejahtera Bersama" GPP Kamojang Darajat PELITA BERSAMA "Empowering Persons with Disabilities for Inclusive Prosperity"		Rp291.295.365	1. Peningkatan perekonomian disabilitas 2. Pengentasan kemiskinan disabilitas di Kab. Garut sebesar 8,4% 3. Penyerapan tenaga kerja disabilitas sebesar 1,01% 4. Terdapat 4 program usaha bersama kelompok disabilitas yang menjadi wadah disabilitas untuk berkarya 5. 37 Disabilitas bisa produktif dengan keterbatasannya 1. Improvement in the economic condition of persons with disabilities 2. Poverty reduction among persons with disabilities in Garut Regency by 8.4% 3. Employment absorption rate for persons with disabilities reached 1.01% 4. Establishment of 4 joint business programs for disability groups as a platform for creativity and productivity 5. 37 persons with disabilities are now productively engaged despite their limitations										

No	Unit Kerja dan Program Pemberdayaan Masyarakat Work Unit and Community Empowerment Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goal (SDG)	Alokasi Dana Budget Allocation	Capaian Achievement
				6. Penurunan emisi GRK sebesar 83 ton CO ₂ eq 7. Meningkatnya kepercayaan diri disabilitas 8. Draft kebijakan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Hak Disabilitas tahun 2024
12	PLTP Gunung Salak PERMATA TANI PULOSARI "Pemanfaatan Biodigester untuk Mendukung Optimalisasi Kualitas Pertanian Desa Pulosari" GPP Gunung Salak PERMATA TANI PULOSARI Utilization of Biodigester to Support Agricultural Quality Optimization in Pulosari Village"		Rp795.480.188	1. Instalasi digester biogas berkapasitas 11 m ³ , mampu menghasilkan pupuk padat sejumlah 18,25 ton serta POC sebanyak 27.375 liter dan memberikan penghematan biaya operasional dapur umum posyandu sebesar Rp2.189.173/ tahun pada tahun 2024 2. Pengembangan produk inovasi bioslurry dan BIOS+ membantu petani mengurangi penggunaan pupuk kimia sebesar 3,2 ton/ tahun dan mampu memperbaiki kualitas lahan seluas 8,28 ha pada tahun 2024 serta melahirkan Pusat Pembelajaran Raksamala menjadi pusat edukasi bagi Masyarakat dan kelompok tani se-Kecamatan 3. Kalapanunggal serta pusat penelitian dan pengabdian masyarakat bagi akademisi 3 perguruan tinggi pada tahun 2024 4. Peningkatan bobot domba 4,5 kg per bulan dari pemberian pakan silase dan permen domba mampu memberikan keuntungan penjualan bagi 20 peternak sebesar Rp43.824.000/tahun 5. Pemberdayaan UMKM Posyandu sebagai pengelola peternakan ayam petelur mampu menyediakan kebutuhan sumber protein secara mandiri bagi balita <i>stunting</i>
				6. Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions by 83 tons CO ₂ eq 7. Increased self-confidence among persons with disabilities 8. Draft of the Regent Regulation on the Fulfillment of Disability Rights proposed for 2024
13	PLTA Mrica PB Soedirman BIMA LUKAR "Bina Mandiri Pemulihan Lahan Melalui Produk Pupuk Berbahan Organik" HPP Mrica PB Soedirman BIMA LUKAR "Bina Mandiri: Land Restoration Through Organic Fertilizer Products"		Rp589.854.606	1. Mengurangi laju sedimentasi sebesar 13.616,2 m ³ /tahun dan mampu menyerap 1.805 ton CO ₂ dengan menghasilkan 1.155,33 ton O ₂ 2. Efisiensi dari peralihan penggunaan pupuk kimia menjadi pupuk organik sebesar Rp205.200.000 per tahun 3. Tanaman kopi yang hampir mati berhasil disembuhkan dengan sistem injeksi nutrisi serta peningkatan produksi tanaman dari 4 Kg menjadi 15 Kg per pohon 4. 49 ibu dan balita serta kader posyandu mendapat sosialisasi penanganan <i>stunting</i>
				1. Reduced sedimentation rate by 13,616.2 m ³ /year and achieved carbon dioxide absorption of 1,805 tons while producing 1,155.33 tons of oxygen 2. Efficiency gains from switching from chemical to organic fertilizers amounting to Rp205,200,000 per year 3. Coffee plants that were nearly dead were successfully revived using a nutrient injection system, with an increase in yield from 4 kg to 15 kg per tree 4. A total of 49 mothers, toddlers, and health post (Posyandu) cadres received stunting treatment education

No	Unit Kerja dan Program Pemberdayaan Masyarakat Work Unit and Community Empowerment Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goal (SDG)	Alokasi Dana Budget Allocation	Capaian Achievement
				5. Peningkatan ekonomi kelompok dari hasil panen kopi yang mencapai Rp318.920.000 di tahun 2024 6. Adanya wadah <i>Learning Center</i> untuk <i>sharing</i> pengetahuan dan modul pertanian organik untuk para petani di desa Pegundungan
				5. Economic improvement of the community group through coffee harvests totaling Rp318,920,000 in 2024 6. Establishment of a Learning Center as a knowledge-sharing hub and provider of organic farming modules for farmers in Pegundungan Village
14	PLTGU Tambak Lorok Semarang JULANG EMAS "Jaga Gunung Ungaran Lestarkan Lingkungan Bersama Masyarakat" CCPU Tambak Lorok Semarang JULANG EMAS "Protect Mount Ungaran, Preserve the Environment with the Community"		Rp1.384.187.114	1. UMKM Kopi Endemix memiliki NIB, PIRT, merek dagang, dan sertifikasi Halal 2. Penggunaan PLTMH Menggantikan Generator listrik BBM berbahan material limbah non B3 PVC bekas dari Plant Desalination 1,2 Ton dan penurunan emisi sebesar 9,125 ton CO ₂ /tahun 3. Pendapatan 10 anggota UMKM Kopi Endemix Sebesar Rp252.000.000/ tahun 4. Sebanyak 66 dari 177 warga Miskin Terentaskan diantaranya 15 warga terdidik dan terlatih budidaya kopi konservasi, 10 warga terlatih pengolahan kopi dan 22 warga terlatih mengelola ekowisata 5. Menjadi pusat edukasi, penelitian dan pengabdian masyarakat terkait konservasi lingkungan dan konservasi kopi dari dalam dan luar negeri dengan 4.878 kunjungan di tahun 2024
				1. Endemix Coffee MSME has obtained a Business Identification Number (NIB), Home Industry Food Permit (PIRT), trademark, and Halal certification 2. Utilization of Micro-Hydro Power Plant (PLTMH) replaces diesel-powered generators using 1.2 tons of non-B3 PVC waste materials from a desalination plant, resulting in emissions reduction of 9.125 tons of CO ₂ /year 3. Annual income of 10 Endemix Coffee MSME members reaches Rp252,000,000 4. 66 out of 177 impoverished residents have been uplifted, including 15 trained in conservation coffee cultivation, 10 trained in coffee processing, and 22 trained in ecotourism management 5. Became a center for education, research, and community service related to environmental and coffee conservation, with 4,878 visits in 2024 from both domestic and international participants
15	PLTU Jawa Tengah 2 Adipala MAJU BERSAMA PARANG NUSAKAMBANGAN "Program Pengembangan Menuju Kesejahteraan Masyarakat dengan Kriya Batik yang Berwawasan Lingkungan" PLTU Jawa Tengah 2 Adipala SPP Jawa Tengah 2 Adipala MAJU BERSAMA PARANG NUSAKAMBANGAN "Program Pengembangan Menuju Kesejahteraan Masyarakat dengan Kriya Batik yang Berwawasan Lingkungan"		Rp255.958.043	1. Limbah terolah per tahun meningkat -> 2023: 5.300 liter; 2024: 72.00 liter 2. Jumlah kelompok rentan dan marginal yang terlibat: pemuda pengangguran (8 orang), lanjut usia (4 orang), disabilitas (7 orang), miskin (9 orang) 3. Peningkatan pendapatan pembatik dari Rp 500.000 menjadi Rp 2.000.000 per bulan 4. Peningkatan rata-rata omzet tiap tahun yaitu 30%. Omzet pada tahun 2024 yaitu Rp 171.310.000 (data hingga bulan September) 5. Kelompok Batik Seloka dan Kabupaten Cilacap memiliki motif khas yang berkekuatan hukum yaitu motif "Parang Nusakambangan"
				1. Processed waste per year increased -> 2023: 5,300 liters; 2024: 72,000 liters 2. Number of vulnerable and marginalized individuals involved: unemployed youth (8 people), elderly (4 people), persons with disabilities (7 people), impoverished (9 people) 3. Increased income of batik artisans from Rp500,000 to Rp2,000,000 per month 4. Annual average revenue increased by 30%. Revenue in 2024 reached Rp171,310,000 (data as of September) 5. Batik Seloka Group and Cilacap Regency now have a legally recognized signature batik motif called "Parang Nusakambangan"

No	Unit Kerja dan Program Pemberdayaan Masyarakat Work Unit and Community Empowerment Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goal (SDG)	Alokasi Dana Budget Allocation	Capaian Achievement
16	PLTGU Grati ANUGRAH PAKARTI "Pelestarian Ranu Grati untuk Ketahanan Pangan Konservasi Hayati" CCPU Grati ANUGRAH PAKARTI "Ranu Grati Conservation for Food Security and Biodiversity"		Rp354.742.597	1. 17 Pemuda pengangguran berwirausaha, ramah lingkungan, 19 lansia mengelola sampah & 7 lansia budidaya kungan 2. 2 Kelompok budidaya ikan ramah lingkungan dengan menjaga produksi ikan sebanyak 17,1 ton per tahun 2024 3. Tebar eco enzyme sebanyak 2.2 ton per tahun 2024 dan menjaga kadar BOD < 6 mg/L 4. 11 Petani menggunakan pupuk cair organik JLOFER 5. Tanaman lotus diolah menjadi pupuk kompos oleh Rumah Kompos <i>Power Green</i> 6. Sampah terkelola tahun 2024 sebanyak 21,8 ton 1. 17 unemployed youth engaged in environmentally friendly entrepreneurship; 19 elderly manage waste & 7 elderly involved in silkworm farming 2. Two eco-friendly fish farming groups maintaining fish production at 17.1 tons in 2024 3. Spread of 2.2 tons of eco enzyme in 2024 while maintaining BOD levels < 6 mg/L 4. 11 farmers using JLOFER organic liquid fertilizer 5. Lotus plants processed into compost fertilizer by Power Green Compost House 6. Managed waste in 2024 totaled 21.8 tons
17	PLTDG Pesanggaran MELUKAT "Memuliakan Laut untuk Kesejahteraan Masyarakat" DGPP Pesanggaran MELUKAT "Honoring the Ocean for Community Prosperity"		Rp1.961.799.859	1. Peningkatan dan diversifikasi pendapatan nelayan melalui pemanfaatan hutan mangrove dan ekosistemnya secara berkelanjutan di Ekowisata Mangrove Batu Lumbang mencapai Rp.406.796.000,- di tahun 2024 2. Meningkatkan rasio tutupan lahan hutan mangrove menjadi 82% (penanaman 1.569 bibit mangrove dengan estimasi serapan karbon 44.760,62 ton CO₂) 3. Peningkatan pendapatan Ekowisata Mangrove Batu Lumbang Rp291.983.500,- 4. Membersihkan sampah sebanyak 60,25 ton s.d Juli 2024 (dengan peningkatan jangkauan area yang dibersihkan mencapai 2 km dari Kawasan Batu Lumbang) 5. Menjadi pusat edukasi, penelitian dan pengabdian masyarakat dari dalam negeri dan mancanegara untuk konservasi mangrove dan pelestarian budaya (4.998 kunjungan di tahun 2024) 6. Memfasilitasi upacara adat yang berhubungan dengan laut (nganyud abu jenazah pengabenan) bagi 774 KK Umat Hindu-Bali di Desa Adat Pemogan. 1. Increased and diversified income for fishers through sustainable utilization of mangrove forests and their ecosystems at the Batu Lumbang Mangrove Ecotourism area, reaching Rp406,796,000 in 2024 2. Improved mangrove forest land cover ratio to 82% (with the planting of 1,569 mangrove seedlings and an estimated carbon absorption of 44,760.62 tons of CO₂) 3. Increased income from Batu Lumbang Mangrove Ecotourism reaching Rp291,983,500 4. Waste cleanup totaling 60.25 tons as of July 2024 (with expanded cleanup coverage reaching 2 km from the Batu Lumbang area) 5. Established as a center for education, research, and community service on mangrove conservation and cultural preservation, both nationally and internationally (4,998 visits in 2024) 6. Facilitated traditional sea-related ceremonies (such as the "nganyud" ritual of scattering cremated ashes at sea) for 774 Hindu-Balinese households in Desa Adat Pemogan
18	PLTG Pemaron WANA KERTI "Berkawan dengan Alam Kembangkan Ekonomi Rakyat Desa Bukti" GTPP Pemaron WANA KERTI "Living in Harmony with Nature to Develop the People's Economy in Bukti Village"		Rp392.119.206	1. Mitigasi penanganan perubahan iklim dan kekeringan Resapan CO₂ sebesar 90,86 Ton CO₂/tahun* 2. Penjualan pisang dan produk olahan pisang Rp181.440.00,00 3. Kemitraan dalam pengembangan laboratorium kultur jaringan dengan Institut Teknologi Bandung, BPTP Prov. Bali 4. Melahirkan kelompok KTT Kerti Winangun dan KWT Sekar Sari 1. Climate change and drought mitigation through CO₂ absorption totaling 90.86 tons of CO₂ per year 2. Sales of bananas and banana-based processed products amounting to Rp181,440,000.00 3. Partnerships in the development of a tissue culture laboratory with Institut Teknologi Bandung and BPTP Bali Province 4. Establishment of the KTT Kerti Winangun and KWT Sekar Sari groups

No	Unit Kerja dan Program Pemberdayaan Masyarakat Work Unit and Community Empowerment Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goal (SDG)	Alokasi Dana Budget Allocation	Capaian Achievement
19	PLTG Gilimanuk MESATUA BALI "Mengelola Sampah untuk Alam Bali Lestari" GPP Gilimanuk MESATUA BALI "Managing Waste for a Sustainable Bali Environment"	   	Rp158.766.000	1. Pengelolaan 0,34 ton limbah ampas tahu sebagai bahan baku camilan, 852 liter limbah air tahu untuk bahan baku POC dan 0,2 ton sampah organik 2. Peningkatan kesejahteraan 13KK dari hasil penjualan POC Kelompok Suketeki sebesar Rp3.500.00,00 per bulan, serta 10KK dari penjualan produk Camilan Cari Tahu yang mencapai Rp75.300.000,00 di tahun 2024 3. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, kesadaran lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat di RT 10 dan RT 14 yang mengelola limbah dan sampah dengan 65 rumah tangga di Kelurahan Gilimanuk yang menerapkan kegiatan budidaya sayur 1. Management of 0.34 tons of tofu dregs as raw material for snacks, 852 liters of tofu wastewater for liquid organic fertilizer (POC), and 0.2 tons of organic waste 2. Improved welfare for 13 households from the sale of POC by the Suketeki Group, earning Rp3,500,000.00 per month, and for 10 households from the sale of "Cari Tahu" snack products reaching Rp75,300,000.00 in 2024 3. Increased knowledge, skills, environmental awareness, and behavioral change among residents in RT 10 and RT 14, with 65 households in Gilimanuk Subdistrict implementing vegetable cultivation and waste management activities
20	PLTU Jeranjang LENTERA PAMAN TOPA "Transplantasi karang dengan media transplantasi dari FABA yang disebut sebagai Block MACS (Modular Ash Coral Structure)" SPP Jeranjang LENTERA PAMAN TOPA "Coral Transplantation Using FABA-Based Media Called Block MACS (Modular Ash Coral Structure)"	  	Rp261.477.902	1. Keberhasilan transplantasi terumbu karang seluas 500 m2 menggunakan media transplantasi dari FABA 2. Penciptaan pendapatan baru bagi masyarakat dari adanya aktivitas penelitian dan pengembangan 3. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem laut 4. Terjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam mengembangkan program di Pantai Pandanan (Universitas Mataram; BPSPL Denpasar; Dinas Pariwisata NTB; Dinas Kelautan dan Perikanan; LANAL Mataram; Kejaksaan Tinggi NTB) 1. Successful coral reef transplantation covering an area of 500 m² using FABA-based transplantation media 2. Creation of new income opportunities for the community through research and development activities 3. Increased public awareness and knowledge in preserving marine ecosystems 4. Established collaboration with various stakeholders in developing the program at Pandanan Beach (University of Mataram; BPSPL Denpasar; West Nusa Tenggara Tourism Office; Department of Marine Affairs and Fisheries; Mataram Naval Base; West Nusa Tenggara High Prosecutor's Office)
21	PLTP Lahendong 1-2 MAENGKET "Maju Sejahteraan Keluarga Melalui Komposting dan Pertanian" GPP Lahendong 1-2 MAENGKET "Advance and Prosper Families Through Composting and Agriculture"	   	Rp489.381.650	1. Perubahan perilaku masyarakat dalam memandang sampah menjadi rupiah mendorong masyarakat sebagai motor perubahan melalui pembentukan 6 kelompok binaan 2. Terciptanya sistem pengolahan limbah yang berdampak pada penurunan Gas Rumah Kaca sebesar 0,1519 ton CO₂eq/ tahun dan penurunan emisi GWP sebesar 1.024,4 Kg CO₂eq atau penghematan sebesar Rp.8.222.991,54 3. Terbangunnya Rumah Pupuk KABASARAN sebagai Excellent Learning Center dan secara aktif dikelola oleh 89 beneficiary sebagai wadah capacity building Masyarakat 4. Peningkatan penghasilan sebesar 40% setara dengan Rp31.480.000,00/bulan yang tergabung dalam 6 kelompok binaan sekaligus kelompok rentan (40 warga prasejahtera, 30 perempuan rawan sosial ekonomi, 150 anak-anak, 10 buruh tani, dan 9 lanjut usia) 1. Behavioral changes in the community toward viewing waste as economic value have encouraged citizens to become agents of change through the formation of 6 assisted groups 2. The creation of a waste management system resulted in a reduction of Greenhouse Gas emissions by 0.1519 tons CO₂eq/year and a reduction in Global Warming Potential (GWP) emissions by 1,024.4 kg CO₂eq, equivalent to savings of Rp8,222,991.54 3. The establishment of the KABASARAN Compost House as an Excellent Learning Center, actively managed by 89 beneficiaries, serves as a platform for community capacity building 4. Income increased by 40%, equivalent to Rp31,480,000.00/ month among 6 assisted groups, which also include vulnerable populations (40 underprivileged individuals, 30 socially and economically vulnerable women, 150 children, 10 farm laborers, and 9 elderly people)

Pelayanan Masyarakat

Community Assistance

Sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, PLN Indonesia Power melaksanakan Program Pelayanan Masyarakat yang dirancang untuk mendukung pengembangan sosial secara berkelanjutan. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat guna memastikan keberhasilan implementasi serta relevansi terhadap kebutuhan Masyarakat sekitar.

Selain itu, pelaksanaan program Pelayanan Masyarakat merupakan bagian dari kontribusi Perusahaan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Program ini secara khusus diarahkan untuk mendukung berbagai aspek penting, antara lain pengentasan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penyediaan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, penguatan sektor industri melalui inovasi dan infrastruktur, pengurangan kesenjangan sosial, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kegiatan Pelayanan Masyarakat yang dilaksanakan tahun 2024 dalam bentuk:

1. Pembangunan tempat ibadah, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan dan fasilitas umum dan sosial dengan jumlah sebanyak 189 bangunan.
2. Program kesehatan sebanyak 247 kegiatan.
3. Kegiatan pendidikan sebanyak 168 kegiatan.
4. Bantuan bencana alam di 75 lokasi.
5. Bantuan 107 sarana prasarana bidang lingkungan dan sosial budaya.
6. Bantuan kegiatan dibidang lingkungan maupun sosial sebanyak 284 kegiatan.
7. Bantuan kegiatan untuk meningkatkan ekonomi untuk membantu masyarakat membutuhkan sebanyak 1.887 jiwa.

As a manifestation of its commitment to improving the quality of life in communities, PLN Indonesia Power implements the Community Assistance Program designed to support sustainable social development. This program is carried out through collaboration with local governments to ensure successful implementation and relevance to the needs of surrounding communities.

Furthermore, the implementation of the Community Assistance Program is part of the Company's contribution to achieving the Sustainable Development Goals. This program is specifically aimed at supporting several key aspects, including poverty and hunger alleviation, improving public health and well-being, providing access to quality education, strengthening the industrial sector through innovation and infrastructure, reducing social inequality, as well as efforts in climate change mitigation and adaptation. The Community Assistance activities carried out in 2024 took the form of:

1. Construction of houses of worship, educational facilities, health facilities, and public and social infrastructure totaling 189 buildings.
2. Health programs totaling 247 activities.
3. Educational activities totaling 168 activities.
4. Natural disaster aid provided in 75 locations.
5. Support for 107 infrastructure facilities in the environmental and socio-cultural sectors.
6. Support for 284 environmental and social-related activities.
7. Economic empowerment assistance programs reaching 1,887 underprivileged individuals.

Pembinaan Hubungan

Community Relation

Kegiatan Pembinaan Hubungan merupakan bentuk komunikasi dua arah yang bertujuan untuk membangun pemahaman yang selaras serta menciptakan komitmen bersama antara Perusahaan dan para pemangku kepentingan. Melalui pendekatan ini, PLN Indonesia Power berupaya menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan

Community Relation activities represent a form of two-way communication aimed at building aligned understanding and creating mutual commitment between the Company and its stakeholders. Through this approach, PLN Indonesia Power strives to create synergy in achieving shared goals while also encouraging the development of positive attitudes from the



bersama, sekaligus mendorong terbentuknya sikap positif dari komunitas terhadap keberadaan dan operasional Perusahaan. Kegiatan ini juga berperan strategis dalam memperkuat dialog yang konstruktif guna mendorong terbentuknya kebijakan publik yang mendukung iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Komunikasi yang terjalin secara efektif diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.

Program Pembinaan Hubungan menjadi wujud nyata kontribusi PLN Indonesia Power terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek perdamaian, keadilan, dan penguatan kelembagaan yang tangguh. Program ini juga mencerminkan komitmen Perusahaan dalam membangun kemitraan strategis sebagai sarana untuk mempercepat pencapaian tujuan bersama antara Perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Kegiatan Pembinaan Hubungan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 dalam bentuk:

1. Program Komunikasi sosial sebanyak 92 kegiatan untuk menciptakan hubungan baik dengan para stakeholder.
2. Program Forum warga terselenggara sebanyak 23 kegiatan.
3. Publikasi sebanyak 90 kegiatan seperti pembuatan buku, katalog produk csr, video, serta peliputan media.
4. Partisipasi peringatan hari besar nasional/ agama sebanyak 809 kegiatan.
5. Partisipasi kegiatan masyarakat berjumlah 762 kegiatan.

Pemberdayaan Masyarakat

Community Empowerment

Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan bentuk kontribusi nyata Perusahaan terhadap upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan. Program ini secara strategis diarahkan untuk mendukung berbagai aspek prioritas dalam SDGs, antara lain pengentasan kemiskinan dan kelaparan, penguatan kesetaraan gender, perluasan akses terhadap pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, program ini juga mencakup dukungan terhadap pengembangan sektor industri melalui inovasi dan pembangunan infrastruktur, pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi, penguatan kemitraan lintas sektor

community toward the Company's presence and operations. This activity also plays a strategic role in strengthening constructive dialogue to promote the development of public policies that support a healthy and sustainable business climate. Effective communication is expected to foster a conducive environment for the Company's long-term business continuity.

The Community Relation Program serves as a tangible manifestation of PLN Indonesia Power's contribution to achieving the Sustainable Development Goals, particularly in the areas of peace, justice, and the strengthening of resilient institutions. This program also reflects the Company's commitment to building strategic partnerships as a means of accelerating the achievement of shared objectives between the Company, the government, and the community. Community Relation activities implemented throughout 2024 included:

1. A total of 92 Social Communication Programs were conducted to foster good relationships with stakeholders.
2. Community Forums were successfully held in 23 activities.
3. Publications were carried out in 90 activities, including the production of books, CSR product catalogs, videos, and media coverage.
4. Participation in national/religious commemorative events totaled 809 activities.
5. Participation in community activities amounted to 762 activities.

The Community Empowerment Program represents the Company's concrete contribution to achieving sustainable development. This program is strategically directed to support several priority areas within the SDGs, including poverty and hunger alleviation, gender equality enhancement, expanded access to decent work, and inclusive economic growth.

Furthermore, the program also includes support for industrial sector development through innovation and infrastructure improvement, reduction of social and economic disparities, strengthening of cross-sector partnerships to achieve

guna mencapai tujuan bersama serta pelestarian seni budaya lokal. Pemberdayaan masyarakat turut difokuskan pada upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, sebagai bagian dari tanggung jawab Perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Program pemberdayaan masyarakat tahun 2024 dilaksanakan dalam bentuk:

1. Bantuan pengembangan dan modal usaha bagi 342 kelompok usaha mikro,
2. 490 kelompok dan 1.317 orang masyarakat mendapatkan bantuan peningkatan keterampilan.
3. Sebanyak 108 kelompok usaha dibantu untuk pemasaran produk.
4. Sebanyak 102 kegiatan riset dan pengembangan periode Januari - Desember 2024.

common goals, as well as the preservation of local arts and culture. Community empowerment efforts are also focused on climate change mitigation and adaptation as part of the Company's responsibility to protect the environment and ensure ecosystem sustainability. The Community Empowerment Program in 2024 was carried out in the form of:

1. Assistance in business development and capital for 342 micro-enterprise groups.
2. 490 groups and 1,317 community members received support for skills enhancement.
3. A total of 108 business groups were supported in product marketing.
4. A total of 102 research and development activities were carried out from January to December 2024.

Manfaat Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan

Benefits of Corporate Social Responsibility Activities

PLN Indonesia Power menjalankan kegiatan usahanya tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari seluruh aktivitas bisnisnya. Komitmen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan sosial, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Manfaat tersebut antara lain berupa dukungan terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pengembangan keterampilan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat, serta kontribusi terhadap percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Program ini juga mendorong kemandirian masyarakat dalam menyediakan tempat tinggal yang layak, meningkatkan kualitas sarana pendidikan, serta memperbaiki fasilitas ibadah demi mendukung kehidupan sosial yang harmonis.

Dari sisi Perusahaan, implementasi tanggung jawab sosial memberikan manfaat berupa peningkatan reputasi *brand image*, *Social License to Operate* sebagai bentuk penerimaan sosial dari masyarakat, pengurangan biaya dan risiko operasional, serta penguatan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi, indeks kepuasan masyarakat terhadap unit-unit PLN Indonesia Power berada pada kategori "baik" hingga "sangat baik," yang turut berkontribusi terhadap perolehan berbagai penghargaan di bidang tanggung jawab sosial

PLN Indonesia Power conducts its business activities not solely with the goal of achieving financial profit, but also by emphasizing its responsibility toward the social and environmental impacts arising from all of its operations. The commitment to create sustainable value for the Company and all stakeholders serves as the main foundation for the implementation of its corporate social responsibility (CSR) programs. The execution of CSR programs not only reflects the Company's concern for the social environment but also provides tangible benefits to the community. These benefits include support for improving public health, the development of skills and enhancement of community economic standards, and contributions to accelerating national infrastructure development. The program also encourages community self-sufficiency in providing proper housing, improving the quality of educational facilities, and enhancing places of worship to support a harmonious social life.

From the Company's perspective, the implementation of social responsibility provides benefits such as enhanced brand image reputation, Social License to Operate as a form of social acceptance from the community, reduced operational costs and risks, and strengthened relationships with stakeholders. In addition, based on evaluation results, the public satisfaction index toward PLN Indonesia Power's units falls within the "good" to "very good" category, which also contributes to the Company's receipt of various awards in the field of corporate social responsibility. From the evaluation

perusahaan. Dari hasil evaluasi program unggulan tahun 2024 nilai SROI juga menunjukkan bahwa investasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan berhasil membangun perekonomian Masyarakat dengan nilai rata-rata 2,03.

of the flagship programs in 2024, the SROI (Social Return on Investment) value also shows that the Company's investment in Community Empowerment Programs successfully supports the development of the community's economy with an average value of 2.03.

Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Konflik Sosial Kemasyarakatan

Mechanisms for Complaint Handling and Social Conflict

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara optimal, PLN Indonesia Power telah menyiapkan berbagai perangkat penunjang yang dirancang untuk memastikan terlaksananya komunikasi yang efektif serta respon yang cepat terhadap isu-isu sosial di lingkungan sekitar wilayah operasional. Perangkat tersebut mencakup mekanisme yang sistematis untuk penyampaian dan penanganan keluhan, penanggulangan situasi darurat, serta penyelesaian potensi konflik sosial kemasyarakatan, yang seluruhnya dijalankan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

To support the optimal implementation of corporate social responsibility, PLN Indonesia Power has prepared various supporting instruments designed to ensure effective communication and prompt response to social issues in the surrounding operational areas. These instruments include systematic mechanisms for grievance submission and handling, emergency response, and resolution of potential social conflicts, all of which are carried out in accordance with applicable laws and regulations.

Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat

Mechanism for Handling Public Complaints



PLN Indonesia Power menempatkan aspek perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif kegiatan operasional sebagai salah satu prioritas utama dalam strategi keberlanjutan dan tata kelola sosialnya. Dengan pendekatan yang proaktif dan berbasis mitigasi risiko, Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta menjaga stabilitas sosial di wilayah operasional.

PLN Indonesia Power places the protection of communities from the negative impacts of operational activities as one of its top priorities in its sustainability strategy and social governance. Through a proactive and risk-mitigation-based approach, the Company is committed to fostering harmonious relationships with the community and maintaining social stability within its operational areas.

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat laporan pengaduan maupun terjadinya konflik sosial kemasyarakatan yang terkait dengan aktivitas operasional PLN Indonesia Power. Hal ini diharapkan dapat terus dijaga melalui efektivitas mekanisme pengelolaan keluhan serta membangun komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja sosial Perusahaan.

Throughout 2024, there were no reported complaints or occurrences of social conflicts related to the operational activities of PLN Indonesia Power. This outcome is expected to be sustained through the effectiveness of the complaint management mechanism and the establishment of good communication with stakeholders, thereby strengthening public trust in the Company's social performance.

Biaya Program Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan

Program Cost for Social Responsibility on Community

Kegiatan InPower-Care tahun 2024 telah direalisasikan untuk program pelayanan masyarakat, pembinaan hubungan, dan pemberdayaan masyarakat dengan rincian biaya sebagai berikut:

The InPower-Care activities in 2024 were implemented across three key programs: Community Assistance, Community Relation, and Community Empowerment, with the following breakdown of costs:

Realisasi Biaya Kegiatan InPower-Care Tahun 2024

Realized Budget for InPower-Care Activities in 2024

Program	Biaya Expense
Bakti Pelayanan Masyarakat Community Assistance	Rp17.565.185.078
Bakti Pembinaan Hubungan Community Relation	Rp 12.948.416.663
Bakti Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment	Rp 42.392.468.350

Laporan Keberlanjutan

Sustainability Report

PLN Indonesia Power menyusun Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagai bentuk pemenuhan atas aspek transparansi mengenai kinerja keberlanjutan Perusahaan dalam tiga dimensi utama yang mencakup ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporan ini disusun guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak operasional Perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan, serta menguraikan upaya yang telah dilakukan untuk mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan di seluruh lini operasional.

PLN Indonesia Power has prepared a Sustainability Report as a form of fulfillment of the transparency aspect regarding the Company's sustainability performance in three main dimensions, covering the economy, environment, and social. This report is prepared to provide a comprehensive overview of the Company's operational impacts on all stakeholders, as well as to describe the efforts made to support the creation of sustainable development across all operational lines.

Penyusunan Laporan Keberlanjutan PLN Indonesia Power dilakukan dengan mengacu pada standar internasional dan peraturan nasional yang relevan, guna memastikan kualitas pelaporan yang kredibel dan dapat dibandingkan secara global. Untuk periode pelaporan 1 Januari hingga 31 Desember 2024, PLN Indonesia Power telah menyusun laporan sesuai (*in accordance*) dengan merujuk pada:

1. GRI *Standards*, dimana PLN Indonesia Power telah melaporkan sesuai (*in accordance*) dengan GRI *Standards*, dan menyertakan Pengungkapan Sektor Utilitas Listrik (*Electric Utilities Sector Disclosures*);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
4. *The International Financial Reporting Standards (IFRS) Sustainability Disclosure Standards*:
 - a. IFRS S1: *General Requirements for Disclosure of Sustainability related Financial Information*;
 - b. IFRS S2: *Climate-related Disclosures and Industry-based Guidance on implementing Climate-related Disclosures (Electric Utilities & Power Generators)*; serta
5. *The Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standards - Infrastructure Sector: Electric Utilities & Power Generators*.

Melalui Laporan Keberlanjutan, PLN Indonesia Power menegaskan komitmennya terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, berintegritas dan beretika dalam rangka mencapai keberlanjutan di masa depan, sekaligus memperkuat transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. Laporan ini tidak hanya menyajikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan, tetapi juga menggambarkan langkah konkret perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan guna berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

PLN Indonesia Power's Sustainability Report is prepared with reference to international standards and relevant national regulations, to ensure the quality of credible reporting that is globally comparable. For the reporting period from January 1 to December 31, 2024, PLN Indonesia Power has prepared a report in accordance with:

1. GRI *Standards*, where PLN Indonesia Power has reported in accordance with GRI *Standards*, and includes Electric Utilities Sector Disclosures;
2. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies;
3. Financial Services Authority Circular of the Republic of Indonesia (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies;
4. *The International Financial Reporting Standards (IFRS) Sustainability Disclosure Standards*:
 - a. IFRS S1: *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*;
 - b. IFRS S2: *Climate-related Disclosures and Industry-based Guidance on implementing Climate-related Disclosures (Electric Utilities & Power Generators)*; and
5. *The Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standards - Infrastructure Sector: Electric Utilities & Power Generators*.

Through the Sustainability Report, PLN Indonesia Power affirms its commitment to responsible, integrity, and ethical business practices in order to achieve sustainability in the future, while strengthening transparency to all relevant stakeholders. This report not only presents information on achievements and challenges, but also describes the Company's concrete steps in carrying out social and environmental responsibilities to contribute to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

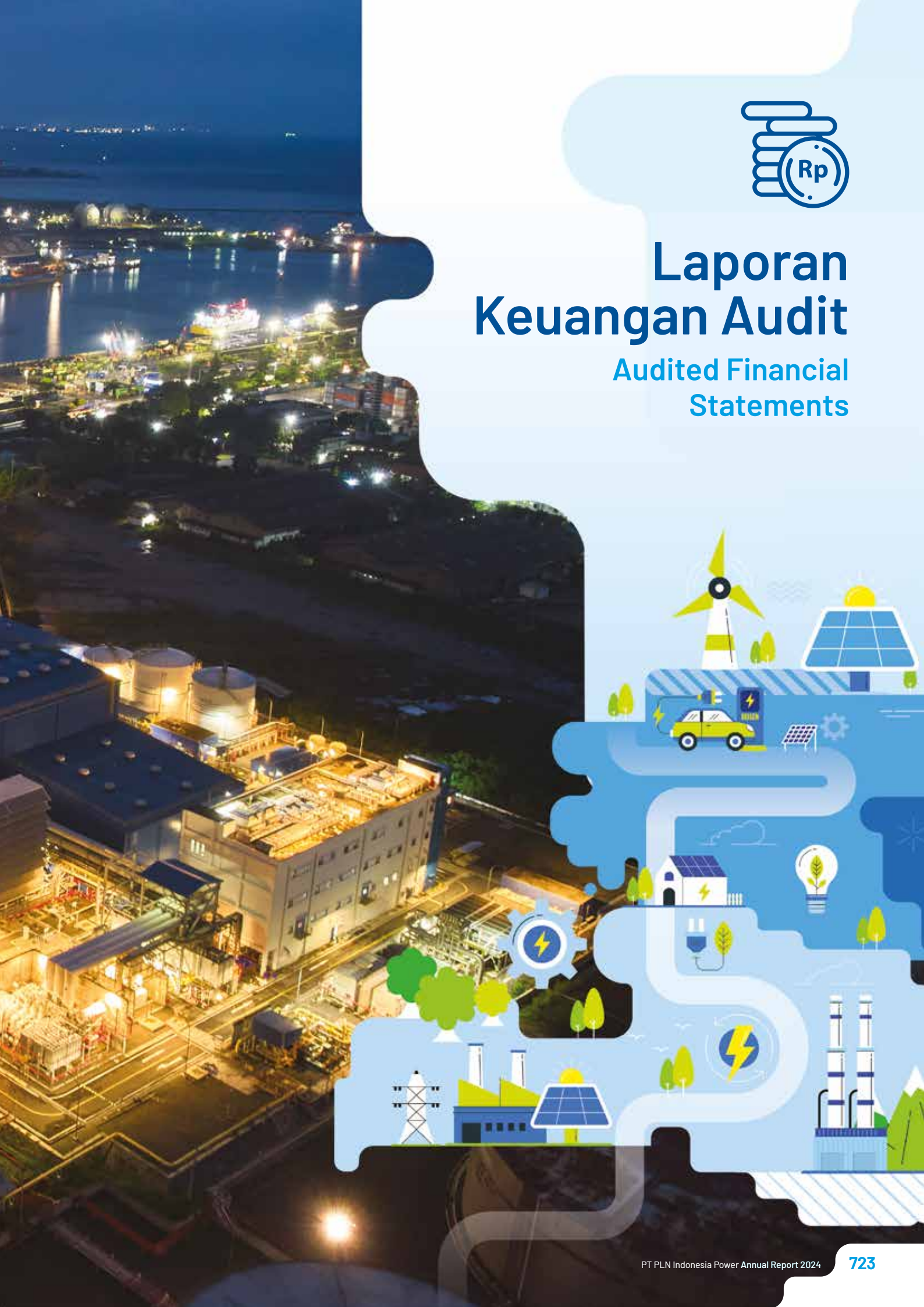


PLTGU Tambak Lorok Blok 3, Semarang, Jawa Tengah
Tambak Lorok Block 3 CCPP, Semarang, Central Java



Laporan Keuangan Audit

Audited Financial
Statements



**PT PLN INDONESIA POWER
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2024/
*31 DECEMBER 2024***



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT 31 DECEMBER 2024
AND FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024**

Kami yang bertandatangan dibawah ini/ *We, the undersigned:*

1. Nama/ <i>Name</i>	: Edwin Nugraha Putra
Alamat kantor/ <i>Office address</i>	: Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.18, Jakarta Selatan, 12950
Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ <i>Domicile as stated in ID Card</i>	: Bukit Cimanggu City Blok E No.16, RT 001/RW 011 Cibadak, Tanah Sareal, Bogor
Nomor telepon/ <i>Phone number</i>	: 081339337994
Jabatan/ <i>Position</i>	: Direktur Utama/ <i>President Director</i>
2. Nama/ <i>Name</i>	: Endang Astharanti
Alamat kantor/ <i>Office address</i>	: Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.18, Jakarta Selatan, 12950
Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ <i>Domicile as stated in ID Card</i>	: Jl. AMD VIII No. 17, RT 010/RW 001, Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan
Nomor telepon/ <i>Phone number</i>	: 08158063410
Jabatan/ <i>Position</i>	: Direktur Keuangan/ <i>Director of Finance</i>

menyatakan bahwa:

state that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian;	1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements;</i>
2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. <i>The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i>
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;	3. a. <i>All information contained in the Consolidated Financial statements is complete and correct;</i>
b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	b. <i>The Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;</i>
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan dan entitas anak.	4. <i>We are responsible for the internal control system of the Company and subsidiaries.</i>

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement letter is made truthfully.

Edwin Nugraha Putra
Direktur Utama/
President Director

Endang Astharanti
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Director of Finance and Risk Management





**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PLN INDONESIA POWER

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT PLN Indonesia Power dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT PLN Indonesia Power and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2024, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-315/KM.1/2024.

00888/2.1457/AU.1/02/0241-5/1/V/2025



Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*



- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
16 Mei/May 2025


Yanto S.E., Ak., M.Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.0241



00888/2.1457/AU.1/02/0241-5/1/V/2025

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 1/1 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION

AS AT 31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4,569,811	7	3,535,896	Cash and cash equivalents
Piutang usaha		8		Trade receivables
Pihak berelasi	69,362,079		52,135,921	Related parties
Pihak ketiga	153,077		85,666	Third parties
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak berelasi	885,522	11	336,533	Related parties
Pihak ketiga	43,501		47,675	Third parties
Persediaan	5,151,067	9	5,283,975	Inventories
Pajak dibayar di muka	329,477	26a	246,043	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	432,720		399,882	Prepaid expenses and advances
Aset keuangan dari konsesi jasa jatuh tempo dalam satu tahun	129,094	10	119,839	Current maturities of financial assets of service concession
Jumlah Aset Lancar	81,056,348		62,191,430	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	329,952,364	12	307,625,776	Property, plant and equipment
Aset hak guna	4,671,193	13	5,445,976	Right-of-use assets
Properti investasi	95,583		94,405	Investment properties
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	9,163,403	14	7,835,695	Investments in associates and joint ventures
Aset pajak tangguhan	38,613	26d	22,240	Deferred tax assets
Pajak dibayar di muka	368,368	26a	720,965	Prepaid taxes
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak berelasi	463,520	11	734,753	Related parties
Pihak ketiga	197,757		180,719	Third parties
Biaya dibayar di muka dan uang muka	40,914		41,563	Prepaid expenses and advances
Aset keuangan dari konsesi jasa - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	899,855	10	1,028,949	Financial assets of service concession - net of current portion
Aset tidak lancar lain	389,514		278,392	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	346,281,084		324,009,433	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET	427,337,432		386,200,863	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 1/2 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2024</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023</u>	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha		15		Trade payables
Pihak berelasi	8,505,425		5,749,847	Related parties
Pihak ketiga	4,586,696		3,911,961	Third parties
Utang pajak		26b		Taxes payable
Pajak penghasilan badan	1,520,486		29,541	Corporate income tax
Pajak lain-lain	597,688		886,643	Other taxes
Beban yang masih harus dibayar	318,405		479,540	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun				Current maturities of long-term liabilities
Liabilitas sewa	664,061	16	654,594	Lease liabilities
Pinjaman dari pemegang saham	369,995	27	233,007	Loans from a shareholder
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	749,136	17	675,790	Short-term employee benefits liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	17,311,892		12,620,923	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan	25,270,943	26d	17,904,528	Deferred tax liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term liabilities - net of current portion
Liabilitas sewa	3,741,186	16	4,471,612	Lease liabilities
Pinjaman dari pemegang saham	2,816,420	27	1,526,492	Loans from a shareholder
Liabilitas imbalan kerja	4,805,593	17	4,221,982	Employee benefits liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	36,634,142		28,124,614	Total Non-current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	53,946,034		40,745,537	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 1/3 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF

FINANCIAL POSITION

AS AT 31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal				Capital stock - par value of
Rp500 (nilai penuh) per saham				Rp500 (full amount) per share
Modal dasar -				Authorised -
1.428.662.534.400 saham				1,428,662,534,400 shares
modal ditempatkan				issued and paid-up -
dan disetor penuh -				357,165,633,600 shares
357.165.633.600 saham	178,582,817	18	178,582,817	Additional paid-in capital
Tambahan modal disetor	(119,868,272)	19	(119,868,272)	Retained earnings
Saldo laba				Appropriated
Ditentukan penggunaannya	2,122,213		2,122,213	Unappropriated
Belum ditentukan penggunaannya	39,055,406		33,354,404	Other comprehensive income
Penghasilan komprehensif lain	<u>273,401,052</u>		<u>251,168,984</u>	
Ekuitas yang dapat diatribusikan				Equity attributable to
kepada pemilik entitas induk	373,293,216		345,360,146	owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	<u>98,182</u>		<u>95,180</u>	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS	<u>373,391,398</u>		<u>345,455,326</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN				TOTAL LIABILITIES
EKUITAS	<u>427,337,432</u>		<u>386,200,863</u>	AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 2/1 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
PENDAPATAN USAHA				REVENUE
Penjualan tenaga listrik	108,706,764	21	101,934,634	Sales of electricity
Pendapatan dari konsesi jasa	256,344	10	268,658	Revenue from service concession
Pendapatan jasa	1,613,948	22	1,276,819	Service revenue
Jumlah pendapatan usaha	110,577,056		103,480,111	Total revenue
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban bahan bakar dan pelumas	69,500,760	23	61,558,594	Fuel and lubricants expenses
Penyusutan aset tetap	11,241,448	12	10,719,996	Property, plant and equipment depreciation
Perbaikan dan pemeliharaan	5,157,939	24	4,567,747	Repairs and maintenance
Beban kepegawaian	4,327,907	25	4,027,567	Employee costs
Pembelian tenaga listrik	988,634		910,320	Purchased electricity
Penyusutan aset hak guna	758,449	13	775,807	Right-of-use assets depreciation
Konsesi jasa	268,412	10	244,974	Service concession
Sewa	121,048	16	87,643	Rental
Lain-lain	1,331,266		660,454	Others
Jumlah beban usaha	93,695,863		83,553,102	Total operating expenses
LABA USAHA	16,881,193		19,927,009	OPERATING INCOME
Penghasilan keuangan	201,248		162,383	Finance income
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing - bersih	75,327		(19,652)	Gain/(loss) on foreign exchange - net
Beban keuangan	(503,855)		(494,649)	Finance costs
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	1,035,267	14	1,110,846	Share in net income of associates and joint ventures
Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi	-	12	4,228	Gain on sale of assets not used in operations
Kerugian atas penghentian aset keuangan konsesi jasa	-	10	(9,349,721)	Loss on derecognition of financial assets of service concession
Beban lain-lain - bersih	(925,754)		(659,458)	Other expenses - net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	16,763,426		10,680,986	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	(3,667,560)	26c	(2,491,672)	Income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN	13,095,866		8,189,314	PROFIT FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 2/2 Schedule

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 'Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				Other comprehensive income for the year
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Bagian penghasilan/(rugi) komprehensif lain dari entitas ventura bersama	395,609	14	(198,317)	Share in other comprehensive income/(loss) from joint ventures
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas kewajiban manfaat karyawan	(274,786)	17	(8,342)	Remeasurements of employee benefit obligations
Revaluasi atas aset tetap	28,611,768	12	274,203	Revaluation of property, plant and equipment
Beban pajak terkait	(5,953,135)	26d	(58,489)	Related income tax expenses
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	22,779,456		9,055	Other comprehensive income for the year, net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	35,875,322		8,198,369	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	13,090,663		8,176,665	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	5,203		12,649	Non-controlling interests
Jumlah	13,095,866		8,189,314	Total
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	35,870,070		8,185,720	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	5,252		12,649	Non-controlling interests
Jumlah	35,875,322		8,198,369	Total

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 3 Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Paid-up and additional paid-in capital stock	Saldo laba/Retained earnings	Ekuitas restrukturisasi/ Equity of restructured entities	Saldo laba/Retained earnings	Surplus revaluasi aset tetap/ Plant and equipment revaluation surplus	Pengukuran kembali kewajiban manfaat karyawan/ Remeasurements of employee benefit obligations	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ Share in other associates and joint ventures	Jumlah penghasilan komprehensif lain/ Total other comprehensive income	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas/ Equity attributable to owners of the parent	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	Balance as at 1 January 2023	Dividends	Impact from restructuring entities under common control	Reclassification of property, plant and equipment revaluation surplus	Total comprehensive income for the year	Balance as at 31 December 2023	Dividends	Reclassification of property, plant and equipment revaluation surplus	Total comprehensive income for the year	Balance as at 31 December 2024
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023		2.607.824	5.513.843	50.592.878	2.122.213	30.576.503	(370.345)	2.383.419	251.920.430	342.933.691	88.413	343.022.104										
Dividen	20	-	-	-	-	(5.759.265)	-	-	-	(5.759.265)	(5.882)	(5.765.147)										
Dampak dari restrukturisasi entitas sepengendali	6	175.974.993	(125.382.115)	(50.592.878)	-	-	-	-	-	-	-	-										
Reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	12	-	-	-	-	360.501	-	-	(360.501)	-	-	-										
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	8.176.665	(6.507)	(198.317)	9.055	8.185.720	12.649	8.198.369										
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		178.682.817	(119.868.272)	-	2.122.213	33.354.404	(376.852)	2.185.102	251.168.984	345.380.146	95.180	345.455.326										
Dividen	20	-	-	-	-	(7.937.000)	-	-	-	(7.937.000)	(2.250)	(7.939.250)										
Reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	12	-	-	-	-	547.339	-	-	(547.339)	-	-	-										
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	13.090.663	(214.333)	395.560	22.779.407	35.870.070	5.252	35.875.322										
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024		178.682.817	(119.868.272)	-	2.122.213	39.055.406	(591.185)	2.580.662	273.401.052	373.293.216	98.182	373.391.398										

Catatan atas laporan keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 4/1 Schedule

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	68,592,406	55,977,194	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(61,852,742)	(50,515,338)	Cash paid to suppliers, employees and others
Penerimaan restitusi pajak	473,457	554,537	Tax restitution received
Penerimaan bunga	177,667	145,593	Interest received
Pembayaran bunga	(498,186)	(567,431)	Interest paid
Pembayaran pajak penghasilan	(498,816)	(191,974)	Income tax paid
Pembayaran surat ketetapan pajak	(25,595)	(50,122)	Payments of tax assessment letter
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	6,368,191	5,352,459	Net cash generated from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(5,761,059)	(5,238,416)	Additions of property, plant and equipment
Penambahan piutang lain-lain pihak berelasi	(7,092)	(3,836)	Additions of other receivables from related parties
Perolehan aset tidak lancar lain	(216,788)	(76,213)	Additions of other non-current assets
Perolehan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama	126,012	67,836	Proceeds from dividends of associates and joint ventures
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	94,621	118,755	Receipts of loan from related parties
Hasil dari penjualan kepemilikan atas entitas ventura bersama	101,476	-	Proceeds from sale of ownership in joint venture
Penyertaan modal pada entitas ventura bersama	(150,330)	(31,000)	Capital subscription in joint ventures
Hasil penjualan aset tidak digunakan dalam operasi	-	4,228	Proceeds from sale of assets not used in operations
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(5,813,160)	(5,158,646)	Net cash used in investing activities

Lihat Catatan 30 untuk penyajian informasi arus kas Grup.

Refer to Note 30 for the presentation of the Group's cash flow information.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 4/2 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran liabilitas sewa	(885,285)	(684,427)	Payments of lease liabilities
Penerimaan pinjaman			Proceeds from loan
dari pemegang saham	1,631,013	618,262	from a shareholder
Pembayaran pinjaman			Loan repayments
dari pemegang saham	(276,592)	(272,920)	from a shareholder
Kas bersih diperoleh/(digunakan) untuk aktivitas pendanaan	469,136	(339,085)	Net cash generated/(used) in financing activities
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1,024,167	(145,272)	NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Pengaruh perubahan kurs			Effect of changes
mata uang asing	9,748	(943)	in foreign currency
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	3,535,896	3,682,111	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4,569,811	3,535,896	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Lihat Catatan 30 untuk penyajian informasi arus kas Grup.

Refer to Note 30 for the presentation of the Group's cash flow information.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/1 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT PLN Indonesia Power (dahulu PT Indonesia Power) ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 3 Oktober 1995 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-12496. HT.01.01.Th.95 tanggal 3 Oktober 1995, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 9249 tanggal 7 November 1995, Tambahan No. 89.

Anggaran Dasar Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 16 tanggal 13 April 2023 dari Notaris Shahreza Annaz S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan dalam rangka perubahan nama dan struktur organisasi Perusahaan akibat pembentukan *Subholding* PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0022811.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 17 April 2023.

Perusahaan berdomisili di Jakarta, dengan kantor atau satuan-satuan usaha yang tersebar di wilayah Indonesia. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Gedung Indonesia Power, Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas serta melaksanakan penugasan dari Pemegang Saham Mayoritas dalam rangka mendukung kegiatan usaha Pemegang Saham dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan kepatutan serta etika bisnis pada Perseroan Terbatas, yang mencakup kegiatan usaha sebagai berikut:

- i. Pembangkitan tenaga listrik.
- ii. Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik yang meliputi:
 - Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis;
 - Jasa investigasi, desain, operasi, dan pemeliharaan serta persewaan peralatan pembangkitan;
 - Konstruksi bangunan elektrik;

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT PLN Indonesia Power (previously PT Indonesia Power) (the "Company") was established in Jakarta based on Notarial Deed No. 15 dated 3 October 1995 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his decision letter No. C2-12496. HT.01.01.Th.95 dated 3 October 1995, and was published in the State Gazette No. 9249 dated 7 November 1995, Supplement No. 89.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 16 dated 13 April 2023 of Shahreza Annaz S.H., M.Kn., notary in South Jakarta in order to change the Company's name and organisational structure due to formation of the *Subholding* of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-0022811.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 17 April 2023.

The Company is domiciled in Jakarta, with offices or business units spread all over Indonesia. The Company's head office is located in Gedung Indonesia Power, Jenderal Gatot Subroto Street Kav. 18, Jakarta.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities is to conduct electricity business based on sound industrial and commercial principles by applying the principles of a Limited Liability Company and carrying out the assignment of the Majority Shareholder in order to support the business activities of the Shareholders by applying the principles of good corporate governance and propriety and business ethics in limited liability companies, which include the following business activities:

- i. Power generation.
- ii. Business related to supply of electricity which includes the following:
 - Engineering and technical consultation activities;
 - Investigation, design, operation and maintenance services as well as the generation of equipment rental income;
 - Electrical building construction;

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas serta melaksanakan penugasan dari Pemegang Saham Mayoritas dalam rangka mendukung kegiatan usaha Pemegang Saham dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan kepatutan serta etika bisnis pada Perseroan Terbatas, yang mencakup kegiatan usaha sebagai berikut: (lanjutan)

ii. Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik yang meliputi: (lanjutan)

- Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- Pendidikan teknik swasta;
- Produksi, perbaikan, dan perdagangan peralatan tenaga listrik;
- Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas;
- Pertambangan batubara;
- Industri produk dari batubara;
- Produksi pengolahan, pengangkutan, dan perdagangan gambut, biomas dan gas alam;
- Pengusahaan tenaga panas bumi;
- Kogenerasi; dan
- Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air.

iii. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas, Perusahaan dapat melakukan perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, termasuk memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN") suatu perusahaan yang berdomisili di Jakarta, Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anaknya (secara keseluruhan dirujuk sebagai "Grup") masing-masing sebanyak 8.354 (tidak diaudit) dan 8.430 (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and general information (continued)

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities is to conduct electricity business based on sound industrial and commercial principles by applying the principles of a Limited Liability Company and carrying out the assignment of the Majority Shareholder in order to support the business activities of the Shareholders by applying the principles of good corporate governance and propriety and business ethics in Limited Liability Company, which include the following business activities: (continued)

ii. Business related to supply of electricity which includes the following: (continued)

- Installation of industrial machines and equipment;
- Private engineering education;
- Production, repairs, and trade of electric power equipment;
- Large-scale trade in solid, liquid and gas fuels products;
- Coal mining;
- Coal products industry;
- Production of processing, transportation, and trade in peat, biomass and natural gas;
- Exploitation of geothermal power;
- Cogeneration; and
- Construction of water resources infrastructure buildings.

iii. In addition to the business activities referred to above, the Company can conduct trading and/or supporting business activities in the context of optimising the use of resources owned by the Company, including assigning Subsidiaries.

The Company is one of the group of companies owned by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN"), a company domiciled in Jakarta, Indonesia.

As at 31 December 2024 and 2023, the Company and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") had a total of 8,354 (unaudited) and 8,430 (unaudited) employees, respectively.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/3 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Pembentukan struktur subholding

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.S-886/MBU/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Persetujuan Pembentukan Holding dan Subholding PLN Masa/Tahap Legal End-State serta Restrukturisasi dan Pengalihan Harta yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 69 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta Selatan, PLN membentuk empat subholding yang terdiri dari:

1. Dua subholding di bidang pembangkitan tenaga listrik, yaitu PLN Nusantara Power ("PNP") (sebelumnya Pembangkitan Jawa Bali) dan Perusahaan atau disebut PLN Indonesia Power, nama merek yang digunakan;
2. Satu subholding di bidang penyediaan dan logistik energi primer, yaitu PT PLN Energi Primer Indonesia ("EPI") (sebelumnya PLN Batubara); dan
3. Satu subholding untuk kegiatan usaha di luar pembangkitan, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan (Beyond kWh), yaitu bernama Indonesia Comnet Plus ("ICON+").

Sebagai tindak lanjut pembentukan subholding PLN tersebut sesuai dengan Akta Notaris No. 77 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta Selatan tentang Pemisahan Kegiatan Usaha Pembangkitan Listrik PLN kepada Perusahaan, yang menyatakan bahwa sebagian aset dan liabilitas kegiatan usaha pembangkitan listrik PLN akan beralih secara hukum menjadi hak serta kewajiban dari Perusahaan yang menerima pemisahan sejak tanggal efektif pemisahan di 1 Januari 2023.

c. Susunan pengurus dan informasi lain

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, susunan pengurus Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2024
Komisaris Utama	Iskandar Simorangkir*)
Komisaris	Djoko Siswanto M. Priharto Dwinugroho Wiluyo Kusdiharto*) Arif Budiman -
Komisaris Independen	Iskandar Simorangkir*) Haryanto WS*) Lukmanul Hakim*)

*) Berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 22 Maret 2024, dari Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

1. GENERAL (continued)

b. Establishment of subholding structures

Based on the Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. S-886/MBU/12/2022 dated 30 December 2022 regarding the Approval for the Establishment of Holding and Subholding of PLN for the Legal End-State Period/Stage as well as the Restructuring and Transfer of Assets as stated in the Notarial Deed No. 69, dated 30 December 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., notary in South Jakarta, PLN established four subholdings, consisting of:

1. Two subholdings in the power generation sector, namely PLN Nusantara Power ("PNP") (formerly Pembangkitan Jawa Bali) and the Company or namely PLN Indonesia Power, the branding name used;
2. One subholding in the primary energy procurement and logistics sector, namely PT PLN Energi Primer Indonesia ("EPI") (formerly PLN Batubara); and
3. One subholding for business activities outside of power generation, transmission, and distribution (Beyond kWh), namely Indonesia Comnet Plus ("ICON+").

As a follow-up to the establishment of the PLN subholding in accordance with Notary Deed No. 77 dated 30 December 2022 from Muhammad Hanafi, S.H., notary in South Jakarta regarding Separation of PLN's Power Generation Business Activities to the Company, it was stated that several assets and liabilities of PLN's power generation business activities will legally be transferred to become the rights and obligations of the Company that received the separation from the effective date of the separation on 1 January 2023.

c. Management and other information

As at 31 December 2024 and 2023, the composition of the Company's Board of Commissioners was as follows:

	2023	
Wiluyo Kusdiharto	President Commissioner	
Djoko Siswanto	Commissioners	
M. Priharto Dwinugroho		
Iskandar Simorangkir		
Arif Budiman		
Haryanto WS		
Lukmanul Hakim	Independent Commissioners	
-		
-		

*) Based on Notarial Deed No. 12 dated 22 March 2024, of Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., notary in Jakarta.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/4 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Susunan pengurus dan informasi lain
(lanjutan)

c. Management and other information
(continued)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, susunan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2024 and 2023, the composition of the Company's Board of Directors was as follows:

Direktur Utama	Edwin Nugraha Putra	President Director
Direktur Operasional Pembangkit Batubara	M. Hanafi Nur Rifai	Coal Power plant Operational Director
Direktur Operasional Pembangkit Gas	Djoko Mulyono	Gas Power plant Operational Director
Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi	Wisnoe Satrijono	Human Capital Management and Administration Director
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga	Bernadus Sudarmanta	Business Development and Commercial Director
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Endang Astharanti	Finance and Risk Management Director

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2024 and 2023 was as follows:

	2024	2023	
Ketua	Wiluyo Kusdiharto	Wiluyo Kusdiharto	Chairman
Wakil ketua 1	Lukmanul Hakim	Lukmanul Hakim	Vice chairman 1
Wakil ketua 2	Djoko Siswanto	Djoko Siswanto	Vice chairman 2
Sekretaris/Anggota	Linda Agustina	Linda Agustina	Secretary/Member
Anggota	Denny Triyanto	Afif Farihin	Member
Anggota	Leonardus Sitinjak	Leonardus Sitinjak	Member

2. ENTITAS ANAK

2. SUBSIDIARIES

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries:

Entitas anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership		Tahun operasi komersial/ Year of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			2024	2023		2024	2023
PT PLN Indonesia Power Services ("PIPS") (dahulu/formerly PT Cogindo Daya Bersama ("CDB"))	Jakarta	Kogenerasi, pemasok energi, jasa pelayanan energi dan manajemen/ Cogeneration, energy distribution, energy services and management	99.99	99.99	1999	1,436,727	1,095,475
PT Artha Daya Coalindo ("ADC")	Jakarta	Perdagangan dan jasa pengangkutan batubara/Trade and coal transportation services	80.00	80.00	1998	674,751	742,381
PT Indo Ridlatama Power ("IRP")	Kutai	Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation	90.00	90.00	2018	1,393,643	1,538,507
PT PLN Indonesia Power Renewables ("IPRen") (dahulu/formerly PT Putra Indotenaga ("PIT")) dan entitas anak /and its subsidiaries	Jakarta	Investasi ketenagalistrikan/ Investment in electricity	99.99	99.99	2016	9,997,399	8,190,409
PT PLN Indonesia Geothermal ("IGeo") (dahulu/formerly PT Indo Tenaga Hijau ("ITH") *)	Jakarta	Pengembangan energi baru dan terbarukan/Development of new and renewable energy	96.04	96.04	2019	242,009	202,708
PT Suralaya Indo Tenaga ("SIT") dan entitas anak /and its subsidiary *)	Jakarta	Investasi ketenagalistrikan/ Investment in electricity	99.99	99.99	-	7,657,786	6,444,347
PT Putra Suralaya Indotenaga ("PSI") *)	Jakarta	Investasi ketenagalistrikan/ Investment in electricity	99.99	99.99	-	7,657,737	6,444,942

*) Pemilikan tidak langsung/Indirect ownership

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/5 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

**3. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU DAN
AMENDEMEN SERTA INTERPRETASI STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK")**

Penerapan dari amendemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan";
- Amendemen PSAK No. 116, "Sewa - Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik"; dan
- Amendemen PSAK No. 207, "Laporan Arus Kas" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Pengaturan Pembiayaan Pemasok".

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK No. 117 Kontrak Asuransi tentang penerapan awal PSAK 117 dan PSAK 109 – informasi komparatif; dan
- Amendemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran".

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup masih menilai dampak dari standar akuntansi dan interpretasi baru.

**3. NEW AND AMENDMENTS TO STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD ("SFAS")
AND INTERPRETATION OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS ("IFAS")**

The adoption of the following amendments to accounting standards, which are effective from 1 January 2024 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year:

- *Amendment to SFAS No. 201, "Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current";*
- *Amendment to SFAS No. 201, "Presentation of Financial Statements - Long-term Liabilities with Covenants";*
- *Amendment to SFAS No. 116, "Leases - Lease Liability in a Sale and Leaseback"; and*
- *Amendments to SFAS No. 207, "Statement of Cash Flows" and SFAS No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" - Supplier Finance Arrangements".*

Certain new accounting standards and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended 31 December 2024 and have not been early adopted by the Group are as follows:

- *SFAS No. 117, "Insurance Contracts";*
- *The amendments to SFAS 117, "Insurance Contract" about initial application of SFAS 117 and SFAS 109 – comparative information; and*
- *Amendment to SFAS No. 221, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability".*

As at 31 December 2024, the Group is still assessing the impact of the new accounting standard and interpretation.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 5.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

Presented below are the material accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Compliance with the Financial Accounting Standards ("FAS")

The Group's consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared using the accrual basis of accounting. The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on the going concern assumption and the measurement basis is historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statement of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 5.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/7 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2024

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

c. Principles of consolidation

i. Entitas anak

i. Subsidiaries

i.1. Konsolidasi

i.1. Consolidation

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Subsidiaries are all entities (including structured entities), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Subsidiaries are consolidated from the date control is transferred to the Group and are de-consolidated from the date on which that control ceases.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

i.2. Akuisisi

i.2. Acquisition

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquired entity and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred is the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired, liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values as at the acquisition date.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/8 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN
MATERIAL (lanjutan)**

AKUNTANSI

**4. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

POLICY

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

c. Principles of consolidation (continued)

i. Entitas anak (lanjutan)

i. Subsidiaries (continued)

i.2. Akuisisi (lanjutan)

i.2. Acquisition (continued)

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owners of the parent entity.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value at its acquisition date and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or a liability are recognised in profit or loss. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/9 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

ii. Perubahan kepemilikan atas entitas anak tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset bersih yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

iii. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang melakukan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset bersih pengaturan tersebut. Ventura bersama ini menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

ii. Changes in ownership interest in subsidiaries without loss of control

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

iii. Disposal of subsidiaries

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

iv. Accounting for associates and joint ventures

An associate is an entity over which the Group has significant influence, but not control, generally accompanied by a shareholding giving rise to voting rights of 20% or greater but not exceeding 50%. Investments in associates are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

A joint venture is a joint arrangement in which the parties that share joint control have rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/10 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

**iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan
ventura bersama (lanjutan)**

- Akuisisi

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dengan bagian Grup atas nilai wajar bersih aset teridentifikasi dari entitas asosiasi atau ventura bersama dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

- Metode ekuitas

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

**4. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

c. Principles of consolidation (continued)

**iv. Accounting for associates and joint
ventures (continued)**

- Acquisitions

Investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed as at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.

Goodwill on acquisition of an associate or a joint venture represents the excess of the cost of acquisition of the associate or joint venture over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate or joint venture and is included in the carrying amount of the investment.

- Equity method

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's or joint venture's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

These post-acquisition movements and distributions received from an associate or a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Group's share of the losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associate or joint venture.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/11 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

c. Principles of consolidation (continued)

**iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan
ventura bersama (lanjutan)**

**iv. Accounting for associates and joint
ventures (continued)**

- Metode ekuitas (lanjutan)

- Equity method (continued)

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associate or joint venture are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate or joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate or joint venture have been changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Dividend receivables from an associate or a joint venture are recognised as reductions in the carrying amounts of the investment.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

At each reporting date, the Group determines whether there is any objective evidence that the investment in an associate or joint venture is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or the joint venture and its carrying amount and recognises the amount in profit or loss.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/12 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**4. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

c. Principles of consolidation (continued)

**iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan
ventura bersama (lanjutan)**

**iv. Accounting for associates and joint
ventures (continued)**

- Pelepasan

- Disposal

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan dan Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

An investment in an associate or a joint venture is derecognised when the Group loses significant influence and any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date when significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi, dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

Gains and losses arising from the partial disposal or dilution of an investment in an associate and joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss, and only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss, where appropriate.

d. Penjabaran mata uang asing

d. Foreign currency translation

i. Mata uang fungsional dan penyajian

i. Functional and presentation currency

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional").

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency").

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah Indonesia ("Rp"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

The consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah ("Rp"), which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/13 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, berdasarkan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

	2024 ^{*)}
Dolar Amerika Serikat ("US\$")	16,157
Yen Jepang ("JPY")	103
Euro ("EUR")	16,823
Dolar Kuwait ("KWD")	52,454

^{*)} dalam nilai penuh

e. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", sebagai berikut:

- (a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
- (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

**4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

d. Foreign currency translation (continued)

ii. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions.

As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the consolidated statement of financial position dates, the exchange rates used, based on the exchange rates prevailing at the date of consolidated statement of financial position published by Bank Indonesia, were as follows:

<u>2023^{*)}</u>	
15,439	United States Dollars ("US\$")
109	Japanese Yen ("JPY")
17,086	Euro ("EUR")
50,220	Kuwait Dollars ("KWD")

in full amount ^{*)}

e. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS No. 224, "Related Parties Disclosures", as follows:

- (a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
- (i) Has control or joint control over the reporting entity;
 - (ii) Has significant influence over the reporting entity; or
 - (iii) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/14 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

e. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - (viii) entitas, atau setiap anggota dari kelompok yang menjadi bagiannya, memberikan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah Indonesia, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

**4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

e. Transactions with related parties (continued)

- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:
- (i) The entity and the reporting entity are members of the same Group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Group of which the other entity is a member);
 - (iii) Both entities are joint ventures of the same third party;
 - (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
 - (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
 - (vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or
 - (viii) the entity, or any member of the group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A Government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government. Government refers to the Government of the Republic of Indonesia, Government agencies and similar bodies whether local, national or international.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/15 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2024

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

f. Aset keuangan

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain; dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah memilih tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

e. Transactions with related parties (continued)

Government related entities include entities which are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Governments being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of State-Owned Enterprises ("SOE") as shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

f. Financial assets

i. Classification, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:

- financial assets measured at fair value either through profit or loss ("FVTPL") or through other comprehensive income ("FVOCI"); and
- those to be measured at amortised cost.

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI").

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing such assets changes.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/16 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

f. Aset keuangan (lanjutan)

**i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran
(lanjutan)**

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**4. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

f. Financial assets (continued)

**i. Classification, recognition and
measurement (continued)**

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are SPPI.

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flows characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Group classifies its debt instruments:

- Amortised cost: Assets that are held for the collection of contractual cash flows in cases where such cash flows represent SPPI are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and that is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/17 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

f. Aset keuangan (lanjutan)

**i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran
(lanjutan)**

Instrumen utang (lanjutan)

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam penghasilan atau beban lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam penghasilan dan beban kurs mata uang asing dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.
- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi dan disajikan bersih dalam laba rugi.

**4. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

f. Financial assets (continued)

**i. Classification, recognition and
measurement (continued)**

Debt instruments (continued)

- Fair value through other comprehensive income: Assets that are held for the collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, in cases where the assets' cash flows represent SPPI, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income and expenses. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other gains and losses on foreign exchanges, net and impairment expenses in other expenses.
- Fair value through profit or loss: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at fair value through profit or loss. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and that is not part of a hedging relationship, is recognised in profit or loss and presented net in profit or loss.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/18 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**4. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

f. Aset keuangan (lanjutan)

f. Financial assets (continued)

ii. Penghentian pengakuan

ii. Derecognition

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan

iii. Offsetting financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah bersihnya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

g. Penurunan nilai aset keuangan

g. Impairment of financial assets

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, which is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/19 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

g. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Grup menerapkan "pendekatan yang disederhanakan" untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha, dan piutang lain-lain, dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa, terkecuali kepada piutang-piutang yang dapat dinilai sendiri kerugian kredit ekspektasiannya.

g. Impairment of financial assets (continued)

The Group applies the "simplified approach" to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected credit loss allowance or all trade receivables, other receivables, and contract assets without significant financing components. The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due, with the exception of the receivables which can be assessed at their own rating of expected credit losses.

h. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

h. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks, and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

i. Piutang usaha dan piutang nonusaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan listrik atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Piutang nonusaha dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Grup. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

i. Trade and non-trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for electricity sold or services performed in the ordinary course of business. Non-trade receivables from related parties are receivables balance reflecting loan given to related parties of the Group. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Piutang usaha dan nonusaha pada awalnya diakui sebesar imbalan yang tidak bersyarat, kecuali jika piutang tersebut mengandung komponen pendanaan, dalam hal ini mereka diakui pada nilai wajar. Selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penyisihan kerugian.

Trade and non-trade receivables are recognised initially at the amount of consideration that is unconditional, unless they contain significant financing components, in which case they are recognised at fair value. They are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, less loss allowance.

Lihat Catatan 4f untuk kebijakan akuntansi terkait penurunan nilai piutang.

See Note 4f for accounting policies related to impairment of receivables.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/20 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN
MATERIAL (lanjutan)**

AKUNTANSI

**4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

j. Persediaan

Persediaan suku cadang, batubara, bahan bakar, minyak pelumas, perlengkapan dan bahan pendukung dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan pada masa mendatang.

j. Inventories

Spare parts, coal, fuel, lubricants, tools and supplies are valued at cost less a provision for obsolete and slow moving inventory. Cost is determined based on the moving average method. A provision for obsolete and slow moving inventory is determined on the basis of estimated future usage.

k. Aset keuangan dari konsesi jasa

Piutang yang timbul dari proyek konsesi merupakan jasa yang diberikan sehubungan dengan pengaturan konsesi jasa dimana minimum pembayaran terjamin telah disepakati terlepas dari jumlah pemakaian. Karena panjangnya rencana pembayaran, piutang dicatat sebesar nilai kini dari penerimaan kas yang dijamin dan didiskontokan dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu. Bunga piutang yang diakumulasi setiap tahun dicatat sebagai pendapatan keuangan dari pengaturan konsesi jasa dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pembayaran akan dibagi menjadi bagian yang akan dikurangkan dari piutang dan bunga atas jumlah yang belum dibayar.

k. Financial assets of service concession

Receivables due from the concession project represent services provided in connection with a service concession arrangement for which guaranteed minimum payments have been agreed upon irrespective of the extent of use. Due to the length of the payment plans, receivables are the present value of future guaranteed cash receipts discounted using a certain interest rate. The annual accumulation of interest on these receivables is presented as finance income from the service concession arrangement using the effective interest method. Payments will be divided into a portion to be deducted from the receivables and interest on the unpaid amounts.

l. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

l. Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are initially recognised at cost, which comprises the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Setelah pengakuan awal, kelas-kelas aset berikut ini yang diukur menggunakan metode revaluasi:

- Hak atas tanah;
- Bangunan umum, waduk dan prasarana;
- Instalasi dan mesin pembangkit;
- Perlengkapan transmisi;
- Perlengkapan distribusi;
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik; dan
- Material cadang utama.

After initial recognition, the following classes of assets are measured using the revaluation method:

- Land rights;
- Buildings, reservoirs and infrastructure;
- Installations and power plants;
- Transmission equipment;
- Distribution equipment;
- Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply; and
- Major spare parts.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/21 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Aset tetap (lanjutan)

Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar dikurangi penyusutan, kecuali hak atas tanah, dan penurunan nilai. Hak atas tanah tidak didepresiasi. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Manajemen melakukan revaluasi aset secara berkala. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai bersihnya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Apabila penurunan melebihi "surplus revaluasi aset tetap", maka selisih lebihnya dibebankan pada laba rugi.

Terkait hak atas tanah, Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 116, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 216, "Aset Tetap" yaitu hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

I. Property, plant and equipment (continued)

The classes of asset above are shown at fair value less subsequent depreciation, except land rights, and impairment losses. Land rights are not depreciated. Valuation of those assets is performed by external independent valuers which are registered with the Financial Services Authority ("FSA"). Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Management revaluates the assets in regular basis. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is presented to the revalued amount of the property, plant and equipment.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of property, plant and equipment that use a revaluation model are credited to "property, plant and equipment revaluation surplus" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "property, plant and equipment revaluation surplus" as part of other comprehensive income. If the decrease exceeds the "property, plant and equipment revaluation surplus", the excess difference is charged to profit or loss.

For land rights, the Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group accounts for these transactions as leases under SFAS No. 116, "Leases". If the land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS No. 216, "Property, plant and equipment" under which land rights are recognised at cost and not depreciated.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/22 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

I. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap, kecuali hak atas tanah, disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya sebagai berikut:

I. Property, plant and equipment (continued)

Property, plant and equipment, except land rights, are depreciated to their residual values using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

Tahun/Years

Bangunan umum, waduk, dan prasarana	10 - 50	<i>Buildings, reservoirs, and infrastructure</i>
Instalasi dan mesin pembangkit	12 - 40	<i>Installations and power plants</i>
Perlengkapan transmisi	40	<i>Transmission equipment</i>
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	10	<i>Telecommunication and data processing equipment</i>
Perlengkapan umum	5	<i>General equipment</i>
Kendaraan bermotor	5	<i>Motor vehicles</i>
Material cadang utama	10 - 40	<i>Major spare parts</i>

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

The useful lives, residual values and depreciation methods of property, plant and equipment are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss when the changes arise.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 41).

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 41).

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The costs of repairs and maintenance are charged to profit or loss as incurred. Subsequent costs incurred to add, replace part of, or service an item of property, plant and equipment are recognised as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

For property, plant and equipment that can no longer be utilised or sold, the carrying amounts are eliminated from the group of property, plant and equipment. The resulting gains or losses on disposals of property, plant and equipment are recognised in profit or loss.

Jika aset yang direvaluasi dihapuskan, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

When revalued assets are disposed, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/23 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

l. Aset tetap (lanjutan)

Aset tidak digunakan dalam operasi terdiri dari aset tetap yang akan direlokasi/ditransfer, sedang diperbaiki, dan akan dihapus. Aset yang tidak digunakan dalam operasi, kecuali aset yang akan dihapus, disusutkan dengan metode garis lurus dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Aset dalam pembangunan

Aset dalam pembangunan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi. Aset dalam pembangunan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya *goodwill*, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi.

**4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

l. Property, plant and equipment (continued)

Assets not used in operations consist of property, plant and equipment that will be relocated/transferred, repaired, and disposed of. Assets not used in operations, except for assets to be disposed of, are depreciated using the same method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

Construction in progress

Construction in progress represents costs directly attributable to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, depreciation of property, plant and equipment used in the construction and cost of testing whether the asset is functioning properly. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

m. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful live - for example, *goodwill* - are not subject to amortisation but are tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/24 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

m. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Aset nonkeuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai. Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset selain *goodwill*, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

n. Sewa

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka diklasifikasikan sebagai merupakan sewa operasi.

Pendapatan sewa dari kegiatan operasi sewa dimana Grup bertindak sebagai pemberi sewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi saat mendapatkan sewa operasi ditambahkan pada nilai tercatat aset pendasar dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan basis yang sama dengan pendapatan sewa. Aset terkait yang disewakan ditampilkan di laporan posisi keuangan berdasarkan sifatnya.

**4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

**m. Impairment of non-financial assets
(continued)**

Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date. Reversal on impairment losses for assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognised in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other SFAS. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

n. Leases

The Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is classified as an operating lease.

Lease income from operating leases where the Group is a lessor is recognised in income on a straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in obtaining an operating lease are added to the carrying amount of the underlying asset and recognised as expense over the lease term on the same basis as lease income. The respective leased assets are included in the statement of financial position based on their nature.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/25 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

n. Sewa (lanjutan)

n. Leases (continued)

Grup sebagai penyewa

The Group as a lessee

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and assessment of whether fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

Grup menyewa aset tetap tertentu, yang kontrak sewanya dibuat untuk periode tetap dari 2 hingga 40 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi. Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non-sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

The Group leases certain property, plant and equipment, for which the rental contracts are typically made for fixed periods of 2 to 40 years but may have extension options. A contract may contain both lease and non-lease components based on their relative stand-alone prices.

Sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup.

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date on which the leased asset is available for use by the Group.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- Harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut; dan
- Pembayaran penalti karena penghentian awal sewa, kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

- *Fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable;*
- *Variable lease payments that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *Amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *The exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option; and*
- *Payment of penalties for early termination of the lease, unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/26 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

n. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup:

- jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima;
- menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Grup, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini; dan
- membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, mata uang dan jaminan.

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap tahun.

**4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

n. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Group, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

To determine the incremental borrowing rate, the Group:

- where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received;
- uses a build-up approach that starts with a risk-free interest rate adjusted for credit risk for leases held by the Group, which does not have recent third-party financing; and
- makes adjustments specific to the lease, e.g., term, currency and security.

The Group is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance costs. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each year.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/27 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan) 4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

n. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- biaya langsung awal; dan
- biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Aset hak guna juga mengalami penurunan nilai (Catatan 4I).

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari peralatan umum.

Opsi ekstensi dan terminasi

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi perpanjangan dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Modifikasi sewa

Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

n. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- the amount of the initial measurement of lease liability;
- any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received;
- any initial direct costs; and
- restoration costs.

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful lives and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying asset's useful lives.

The right-of-use assets are also subject to impairment (Note 4I).

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets comprise general equipment.

Extension and termination options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases across the Group. These terms are used to maximise operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of the extension and termination options that are held are exercisable only by the Group and not by the respective lessor.

Lease modification

A lessee accounts for a lease modification as a separate lease if:

- the modification increase the scope of lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/28 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan) **4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)**

n. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Modifikasi sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, penyewa:

- mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian; dan
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan; atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan:

- menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau sepenuhnya sewa tersebut.
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

n. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

Lease modification (continued)

For lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, a lessee shall:

- allocate the consideration in the modified contract;
- determine the lease term of the modified lease; and
- remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. The revised discount rate is determined as the interest rate implicit in the lease for the remainder of the lease term, if that rate can be readily determined, or the lessee's incremental borrowing rate at the effective date of the modification, if the interest rate implicit in the lease cannot be readily determined.

For lease modification that is not accounted for as a separate lease, the lessee shall account for the remeasurement of the lease liability by:

- decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The lessee recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease.
- making a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

o. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Accounts payable are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/29 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

p. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama tahun berjalan, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

q. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak diselesaikan, dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau biaya keuangan.

p. Borrowing costs

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the year, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

q. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are derecognised from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/30 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

q. Pinjaman (lanjutan)

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kovenan yang harus dipatuhi oleh Grup, pada atau sebelum akhir periode pelaporan, dipertimbangkan dalam mengklasifikasikan perjanjian pinjaman dengan perjanjian sebagai lancar atau tidak lancar. Kovenan yang harus dipatuhi oleh Grup setelah periode pelaporan tidak memengaruhi klasifikasi pada tanggal pelaporan.

r. Imbalan kerja

Kewajiban jangka pendek

Liabilitas untuk upah dan gaji, termasuk imbalan non-moneter dan akumulasi cuti sakit yang akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah akhir dari periode ketika pekerja memberikan jasa yang berhubungan diakui hingga jasa yang diberikan hingga akhir dari periode pelaporan dan dihitung pada jumlah yang diperkirakan akan dibayar ketika liabilitas diselesaikan. Liabilitas disajikan sebagai kewajiban imbalan kerja masa kini pada neraca.

Imbalan pascakerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program manfaat pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

**4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

q. Borrowings (continued)

Loans are classified as current liabilities unless the Group has a right to defer payment of the liability for at least 12 months after the reporting date.

Covenants that the Group is required to comply with, on or before the end of the reporting period, are considered in classifying loan arrangements with covenants as current or non-current. Covenants that the Group is required to comply with after the reporting period do not affect the classification at the reporting date.

r. Employee benefits

Short-term obligations

Liabilities for wages and salaries, including non-monetary benefits and accumulating sick leave that are expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service are recognised in respect of employees' services up to the end of the reporting period and are measured at the amounts expected to be paid when the liabilities are settled. The liabilities are presented as current employee benefit obligations in the balance sheet

Post-employment benefits

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/31 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Program manfaat pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program manfaat pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

Grup harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") atau Peraturan Perusahaan ("PP"), mana yang lebih tinggi. Karena Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan atau PKB adalah program manfaat pasti.

Sehubungan dengan program manfaat pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian setara dengan nilai kini kewajiban manfaat pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban manfaat pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Imbalan pascakerja terdiri dari imbalan pesangon, penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan, dan tunjangan kecelakaan dinas.

Nilai kini kewajiban manfaat pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi Pemerintah.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

r. *Employee benefits (continued)*

Post-employment benefits (continued)

A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive upon retirement, which is usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Manpower Regulations or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA") or the Company Regulation (the "CR"), whichever is higher. Since the Manpower Regulations sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Manpower Regulations or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is equivalent to the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Post-employment benefits consist of severance benefits, employment awards, and disability benefits.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of Government bonds are used.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/32 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

r. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program manfaat pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lain pada saat terjadinya. Keuntungan dan kerugian ini termasuk di dalam laba ditahan pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran kepada dana pensiun yang dikelola oleh publik atau swasta, dengan dasar wajib, kontraktual dan sukarela. Grup tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar di muka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

Grup memberikan imbalan pascakerja seperti uang tunjangan kecelakaan dinas serta bantuan kematian dan pemakaman. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada PKB.

Tunjangan kecelakaan dinas diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan dinas. Bantuan kematian diberikan kepada ahli waris bagi karyawan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maupun tidak.

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Grup menyediakan imbalan pemeliharaan kesehatan untuk karyawan yang berhak atas imbalan tersebut. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan pada karyawan aktif dan pensiunan yang memenuhi masa kerja minimum tertentu atau berhenti bekerja karena cacat atau meninggal dunia. Perkiraan biaya imbalan ini dicadangkan sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode akuntansi yang sama dengan yang digunakan untuk program pensiun manfaat pasti. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas di penghasilan komprehensif lain pada periode saat terjadinya.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

r. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised when the curtailment or settlement occurs.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise. They are included in retained earnings in the consolidated statement of changes in equity and in the consolidated statement of financial position.

For defined contribution plans, the Group pays contributions to public or private pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. The Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are recognised as employee benefit expenses when they become due. Prepaid contributions are recognised as an asset to the extent that a cash refund or reduction in the future payments is available.

The Group provides other employee benefits such disability benefit and death and funeral allowances benefit. The benefits that are paid are based on the CLA.

The disability benefit is provided to employees who have a work accident. The death benefit is provided to the heirs whether or not the employee passes away as a result of a work accident.

Health care benefits

The Group provides health care benefits to its employees who are entitled to these benefits. The entitlement to these benefits is usually granted to both active and retired employees who have fulfilled the minimum service period or cease working due to disability or death. The expected costs of these benefits are accrued over the years of employment using the same accounting method as used for defined benefit pension plans. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period they arise.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/33 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

r. Imbalan kerja (lanjutan)

r. Employee benefits (continued)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefits

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti uang cuti besar dan penghargaan kesetiaan kerja. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada PKB Grup.

The Group provides other long-term employee benefits such as long leave allowance and loyalty benefit. The benefit is paid based on the Group's CLA.

Cuti besar diberikan kepada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun terus menerus. Penghargaan kesetiaan kerja diberikan setiap delapan tahun bagi pegawai yang telah bekerja selama 16 tahun terus menerus.

Long leave allowance is given to employees who have worked for at least six years continuously. Loyalty benefit is given every eight years for employees who have worked for 16 years continuously.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

Long-term benefits are determined using the *Projected Unit Credit Method*. The long-term employee benefits liabilities recognised in the consolidated statement of financial position represent the present value of the defined benefit obligation.

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Termination benefits

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Grup memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara (i) ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 237 dan melibatkan pembayaran pesangon. Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the entity recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS 237 and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/34 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL 4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(lanjutan) (continued)

s. Provisi

Provisi restorasi lingkungan, biaya restrukturisasi dan tuntutan hukum diakui ketika: Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

Ketika terdapat beberapa kewajiban yang serupa, kemungkinan penyelesaian mengakibatkan arus keluar ditentukan dengan mempertimbangkan kelas kewajiban secara keseluruhan. Provisi diakui walaupun kemungkinan adanya arus keluar sehubungan dengan item manapun yang termasuk dalam kelas kewajiban yang sama mungkin kecil.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban. Peningkatan provisi karena berjalannya waktu diakui sebagai beban bunga.

t. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas, dan biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru atau opsi disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

u. Pembagian dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode ketika pembagian dividen telah diumumkan.

s. Provisions

Provision for environmental restoration, restructuring costs and legal claims is recognised when: the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. Provision is not recognised for future operating losses.

Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is recognised even if the likelihood of an outflow with respect to any one item included in the same class of obligations may be small.

Provisions are measured at the present value of management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pretax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as interest expense.

t. Share capital

Ordinary shares are classified as equity, and incremental costs directly attributable to the issuance of new shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

u. Dividend distributions

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognised as liabilities in the consolidated financial statements in the period when the dividends are declared.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/35 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan) 4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

v. Pengakuan pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah penilaian sebagai berikut:

- i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- iii. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
- iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
- v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

v. Revenue and expense recognition

Revenue recognition

Revenue from contracts with customers

Revenue recognition has to fulfil five steps of assessment as follows:

- i. Identify contract(s) with a customer;
- ii. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
- iii. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;
- iv. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct items of goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price is estimated based on expected cost plus margin; and
- v. Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring the promised good or service to the customer (which is when the customer obtains control of the goods or services).

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/36 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan) 4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

v. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Dalam hal kontrak harga tetap, pelanggan membayar jumlah tetap berdasarkan jadwal pembayaran. Jika jasa yang diberikan oleh Grup melebihi pembayaran, maka aset kontrak diakui. Jika pembayaran melebihi jasa yang diberikan, liabilitas kontrak diakui.

Penjualan tenaga listrik

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh) yang pasok kepada PLN dengan menggunakan formula tarif yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Formula tarif mencakup perhitungan komponen harga kapasitas, harga tetap operasi dan pemeliharaan, harga bahan bakar, tingkat pasokan energi serta variabel lainnya.

Grup mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam sepanjang waktu ketika listrik dikonsumsi oleh PLN.

Aset keuangan dari konsesi jasa

Grup mengadakan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBT") dengan PLN. PJBT antara PLN dan Grup memenuhi definisi perjanjian konsesi jasa dimana PLN bertindak sebagai pemberi dan Grup bertindak sebagai operator. Grup setuju untuk merancang, membiayai, membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik ("infrastruktur") dan menyerahkan listrik yang dihasilkan kepada PLN dengan syarat dan ketentuan yang disepakati dalam PJBT.

v. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue recognition (continued)

Revenue from contracts with customers (continued)

A performance obligation may be satisfied at the following:

- A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

In the case of fixed-price contracts, the customer pays the fixed amount based on a payment schedule. If the services rendered by the Group exceed the payment, a contract asset is recognised. If the payments exceed the services rendered, a contract liability is recognised.

Sales of electricity

Revenue from sales of electricity is recognised based on electricity usage (kWh) to PLN using the tariff formula stipulated in the power purchase agreements. The tariff formula includes the calculation of the capacity component, the fixed cost for operations and maintenance components, the fuel costs, power supply levels and other variables.

The Group recognises revenue for a performance obligation satisfied over time when electricity is consumed by PLN.

Financial assets from service concession

The Group entered into a Power Purchase Agreement ("PPA") with PLN. The PPA between PLN and the Group meets the definition of a service concession arrangement where PLN acts as a grantor and the Group acts as the operator. The Group agrees to design, finance, construct, own and operate a power generation facility ("infrastructure") and to deliver the generated electricity to PLN in accordance with terms and conditions as agreed in the PPA.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/37 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

v. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

v. Revenue and expense recognition (continued)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Revenue recognition (continued)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

Revenue from contracts with customers (continued)

Aset keuangan dari konsesi jasa (lanjutan)

Financial assets from service concession (continued)

Infrastruktur digunakan selama masa manfaatnya untuk tujuan pengaturan konsesi jasa. Dalam akuntansi konsesi jasa, Grup tidak mengakui infrastruktur sebagai aset tetap tetapi mengakuinya sebagai aset keuangan, karena Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menerima uang tunai dari PLN melalui pembayaran kapasitas berdasarkan PJBT. Aset keuangan dicatat sebagai "aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi" sesuai dengan PSAK No. 109.

The infrastructure is used for its entire useful live for the purpose of the service concession arrangement. Under service concession accounting, the Group does not recognise the infrastructure as property, plant and equipment but recognises it as a financial asset, as the Group has an unconditional right to receive cash from PLN through the capacity payments under the PPA. The financial asset is accounted for as "financial assets held at amortised cost" in accordance with SFAS No. 109.

Pendapatan jasa pemeliharaan dan operasi untuk pembangkit tenaga listrik

Rendering of services on maintenance and operation for power plant

Grup mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam sepanjang waktu hanya jika Grup dapat mengukur dengan andal atas penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tertentu, Grup mungkin tidak dapat mengukur hasil atas kewajiban pelaksanaan secara wajar, tetapi Grup berekspektasi untuk memulihkan biaya yang timbul dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tersebut, Grup mengakui pendapatan hanya sebatas biaya yang timbul sampai saat yang dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar.

The Group recognises revenue for a performance obligation satisfied over time only if the Group can reasonably measure its progress towards the complete satisfaction of the performance obligation. In some circumstances, the Group may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the Group expects to recover the costs that have been incurred in satisfying the performance obligation. In those circumstances, the Group recognises revenue only to the extent of the costs that have been incurred until such a time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation.

Pendapatan jasa pemeliharaan dan operasi pembangkit tenaga listrik diakui atas dasar pekerjaan yang diselesaikan dalam sepanjang - waktu pada saat jasa tersebut diberikan kepada pelanggan.

Revenue from services on maintenance and operation and power plant is recognised on the basis of the work completed over time as the services are rendered to the customers.

Komponen pembiayaan

Financing component

Grup tidak memperkirakan adanya kontrak di mana jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan melebihi satu tahun. Akibatnya, Grup tidak menyesuaikan harga transaksi apa pun dengan nilai waktu uang.

The Group does not expect to have any contracts where the period between the transfer of the promised goods or services to the customer and payment by the customer exceeds one year. As a consequence, the Group does not adjust any of the transaction prices for the time value of money.

Pengakuan beban

Expense recognition

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/38 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

w. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

**4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

w. Income tax

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws that have been enacted as at the reporting date and computed using the prevailing tax rates. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

For income which is subject to final tax, tax expenses are recognised proportionally with the accounting revenue recognised and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Deferred income tax is recognised using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using the tax rate and laws that has been enacted or substantially enacted at the end of the reporting year and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

w. Pajak penghasilan (lanjutan)

w. Income tax (continued)

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Liabilitas dan aset pajak tangguhan tidak diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak atas dalam dalam ventura bersama dan asosiasi dimana Grup dapat mengendalikan waktu pembalikan perbedaan temporer dan kemungkinan perbedaan tersebut tidak akan dibalik di masa mendatang.

Deferred tax liabilities and assets are not recognised for temporary differences between the carrying amount and tax bases of investments in joint ventures and associates where the Group is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that the differences will not be reversed in the foreseeable future.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities.

x. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

x. Business combination of entities under common control

Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dicatat berdasarkan PSAK No. 338 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dimana selisih jumlah imbalan yang dialihkan dengan nilai tercatat aset bersih yang diperoleh dicatat sebagai bagian akun "Tambahan modal disetor" di ekuitas.

Business combination transactions between entities under common control are accounted for in accordance with SFAS No. 338 "Business Combination of Entities Under Common Control" where the differences between the purchase consideration and the carrying value of net assets acquired is recorded as part of the "Additional paid-in capital" account in equity.

Berdasarkan PSAK No. 338, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

In accordance with SFAS No. 338, the financial statement items of the combined entities, for the period in which the business combination under common control occurred and for any comparative period, shall be presented as if the combination had occurred from the beginning of the period for which the combined entities were under common control.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali yang terjadi pada tahun berjalan dijelaskan di Catatan 6.

Business combination of entities under common control occurring in the current year is described in Note 6.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/40 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**5. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

Pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 4, Grup telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Penentuan umur sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Umur sewa dinilai kembali ketika opsi sebenarnya diambil (atau tidak diambil) atau Grup menjadi berkewajiban untuk mengambil (atau tidak mengambil) opsi tersebut. Penilaian kepastian yang wajar hanya direvisi ketika peristiwa signifikan atau perubahan signifikan terjadi, yang mempengaruhi penilaian ini, dan hal tersebut dalam pengendalian penyewa.

**5. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES**

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates, judgements and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group as reported in future years.

Critical judgements in applying accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 4, the Group has identified the following matters under which significant judgements are made:

Determining lease term

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

In determining the lease term, the Group considers all of the facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not to exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

The lease term is reassessed if an option is actually exercised (or not exercised) or the Group becomes obliged to exercise (or not exercise) it. The assessment of reasonable certainty is only revised if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment, and that is within the control of the lessee.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/41 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

5. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

5. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)

Pertimbangan penting dalam penerapan
kebijakan akuntansi (lanjutan)

Critical judgements in applying accounting
policies (continued)

Sewa – estimasi suku bunga pinjaman inkremental

Lease – estimating the incremental borrowing rate

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan estimasi untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need estimation in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

In determining the incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Interest in joint arrangements

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement.

Secara khusus, Grup mempertimbangkan:

Specifically, the Group considers:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah; dan
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
 - bentuk legal dari kendaraan terpisah;
 - persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
 - fakta dan kondisi lain (ketika relevan).

- The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle; and
- When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:
 - the legal form of the separate vehicle;
 - the terms of the contractual arrangement; and
 - other facts and circumstances (when relevant).

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/42 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**5. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Pertimbangan penting dalam penerapan
kebijakan akuntansi (lanjutan)**

Kepentingan dalam pengaturan bersama (lanjutan)

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, lihat Catatan 14 untuk daftar ventura bersama tersebut. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan kesimpulan final dari penilaian yang dilakukan adalah pengaturan tersebut merupakan ventura bersama.

Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir tahun pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan aset keuangan lainnya

Dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian piutang, manajemen diharuskan untuk melakukan pertimbangan dalam menentukan apa yang dianggap sebagai peningkatan risiko kredit yang signifikan dan dalam membuat asumsi dan estimasi untuk memasukkan informasi yang relevan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, dan prakiraan kondisi ekonomi. Pertimbangan telah diterapkan dalam menentukan umur dan titik pengakuan awal piutang.

Tingkat penyisihan tertentu dievaluasi oleh manajemen berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi kolektibilitas akun. Dalam kasus ini, Grup menggunakan penilaian berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk hubungan dengan status kredit pelanggan berdasarkan laporan kredit pihak ketiga dan faktor pasar yang diketahui, untuk mencatat cadangan khusus untuk pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo dalam jumlah yang diharapkan dapat diterima. Cadangan spesifik ini dievaluasi ulang dan disesuaikan karena informasi tambahan yang diterima memengaruhi jumlah yang diestimasi.

**5. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

**Critical judgements in applying accounting
policies (continued)**

Interest in joint arrangements (continued)

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures, see Note 14 for the list of joint ventures. These structures and the terms of the contractual arrangements indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangements. The Group also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded that the arrangements are joint ventures.

Sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting year which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Provision for expected credit losses ("ECL") of trade receivables and other financial assets

In determining ECL, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions, and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectability of the accounts. In these cases, the Group uses judgement based on the best available facts and circumstances, including but relationship with the customers credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in amounts that it expects to collect. These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**5. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**5. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Sources of estimation uncertainty (continued)

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Estimated useful lives of property, plant and equipment

Masa manfaat setiap aset tetap, Grup ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

The useful live of each item of the Group's property, plant, and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful live of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

A change in the estimated useful live of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.

Nilai wajar aset tetap yang menggunakan model revaluasi

Fair value of property, plant and equipment that use the revaluation model

Dalam proses revaluasi aset, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai sebagai bagian dari proses penilaian. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

In the process of asset revaluation, management, with the assistance of an independent public valuer, determines the data inputs and assumptions, assesses valuation methods, and holds discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the asset class. While it is believed that the Group's data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use the revaluation model.

Rincian dari pendekatan dan data input signifikan yang digunakan dalam melakukan revaluasi aset tetap diungkapkan dalam Catatan 12.

Details of the valuation approach and significant data input used in the revaluation of property, plant and equipment are disclosed in Notes 12.

Imbalan pascakerja

Post-employment benefits

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Grup.

The determination of post-employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuaries when calculating such amounts. Those assumptions include, among others, the discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from assumptions are accumulated and amortised over future periods and therefore, generally affect the recognised expenses and liabilities recorded in such future periods. While it is believed that the assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the post-employment benefits liability of the Group.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 17.

Assumptions used in the calculation of post-employment benefits are disclosed in Note 17.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/44 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**5. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

**5. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

Sources of estimation uncertainty (continued)

Income taxes

The calculations of income tax expense for the Group requires judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxes ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities, can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by the level of sales and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/45 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PENGALIHAN BISNIS PEMBANGKITAN LISTRIK SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN HOLDING SUBHOLDING

Pada tanggal 21 September 2022, Kementerian BUMN resmi meluncurkan *Holding Subholding* PLN. Perusahaan merupakan salah satu anak perusahaan PLN yang bertransformasi menjadi *subholding* PLN sebagai *Generation Company* 2.

Pengalihan ini diformalkan melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia No. S-886/MBU/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Persetujuan Pembentukan *Holding* dan *Subholding* PLN Masa/Tahap *Legal End-State* serta Restrukturisasi dan Pengalihan Harta yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 70 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa sebagian aset dan liabilitas kegiatan usaha pembangkitan listrik PLN akan beralih secara hukum menjadi hak serta kewajiban Perusahaan.

Oleh karena PLN memiliki dan memenuhi definisi 'pengendalian' atas Perusahaan, sebagaimana diatur dalam PSAK No. 110, maka atas transaksi pengalihan bisnis ini dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan sebagaimana diharuskan dalam PSAK No. 338.

Sebelum pengalihan, bisnis pembangkitan listrik adalah bagian dari unit bisnis yang tergabung dalam PLN. Ketika masih menjadi bagian dari unit bisnis PLN, transaksi kas untuk pembayaran dan penerimaan terkait aktivitas operasi dan investasi di unit bisnis dilakukan secara terpusat melalui rekening Kantor Pusat PLN. Dampak transaksi kas dengan Kantor Pusat PLN ini dicatat sebagai "Kas *pooling* untuk pendanaan umum" dalam laporan arus kas konsolidasian.

Efektif pada tanggal 1 Januari 2023, PLN menerbitkan saham sebanyak 351,949,986,000 saham dengan nilai pengalihan sebesar Rp175,974,993. Selisih sebesar Rp125,382,115 antara nilai pengalihan dengan nilai buku yang terima disajikan sebagai tambahan modal disetor dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

6. TRANSFER OF POWER GENERATING BUSINESS RELATED TO FORMATION OF HOLDING SUBHOLDING

On 21 September 2022, the Ministry of SOE of Indonesia officially launched the *Holding Subholding* of PLN. The Company is one of the subsidiaries of PLN which was transformed into PLN *Subholding* as *Generation Company* 2.

This transfer was formalised through a Decision Letter of the Minister of SOE of the Republic of Indonesia No. S-886/MBU/12/2022 dated 30 December 2022, regarding the Approval for The Establishment of *Holding* and *Subholding* of PLN for the *Legal End-State* Period/Stage as well as the Restructuring and Transfer of Assets as stated in the Notarial Deed No. 70, dated 30 December 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., notary in South Jakarta, which states that some of the assets and liabilities of PLN's power generation business activities will legally transfer to the rights and obligations of the Company.

Considering PLN has and fulfills the definition of 'control' over the Company, in accordance with SFAS No. 110, then the transfer of business was accounted for using the pooling-of-interests method as required under SFAS No. 338.

Prior to the transfer, power generating businesses were parts of the business unit under PLN's. When they were still parts of PLN's business unit, cash transaction for payments and receipts related to the operating and investing activities in the business unit were conducted centrally through the accounts of PLN's Head Office. The impact of cash transactions with PLN's Head Office is recorded as "Cash pooling for general funding activities" in the consolidated statement of cash flows.

Effective on 1 January 2023, PLN issued shares of 351,949,986,000 shares with a transaction value of Rp175,974,993. The difference between the transaction value and the net book value amounted to Rp125,382,115 is presented as additional paid-in capital in the consolidated financial statements of the Group.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/46 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. KAS DAN SETARA KAS

7. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2024	2023	
Kas	45	46	Cash on hand
Kas di bank			Cash in banks
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")			PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")
Rupiah	3,838,978	3,125,320	Rupiah
US\$	140,474	89,024	US\$
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")
Rupiah	275,017	162,865	Rupiah
US\$	60,415	14,722	US\$
EUR	4,796	14,607	EUR
JPY	4	6	JPY
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")
Rupiah	190,233	86,021	Rupiah
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")			PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")
Rupiah	34,770	27,150	Rupiah
Subjumlah	4,544,687	3,519,715	Subtotal
Pihak ketiga			Third parties
The National Bank of Kuwait KWD	18,818	10,357	The National Bank of Kuwait KWD
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")			PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")
US\$	2,152	169	US\$
Rupiah	109	109	Rupiah
Subjumlah	21,079	10,635	Subtotal
Jumlah	4,565,811	3,530,396	Total
Deposito berjangka - Rupiah			Time deposits - Rupiah
Pihak berelasi			Related parties
BNI	2,500	2,500	BNI
Bank Mandiri	1,500	3,000	Bank Mandiri
Subjumlah	4,000	5,500	Subtotal
Jumlah	4,569,811	3,535,896	Total
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun - Rupiah	2.25% - 2.75%	2.25% - 2.75%	Interest rates per annum on time deposits - Rupiah
Jangka waktu	1-3 Bulan/ Months	1-3 Bulan/ Months	Maturity
Lihat Catatan 27 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.			Refer to Note 27 for information about the transactions and balances with related parties

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/47 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. PIUTANG USAHA

8. TRADE RECEIVABLES

	2024	2023	
Pihak berelasi	69,366,978	52,138,602	Related parties
Cadangan kerugian kredit ekspektasian			Allowance for ECL
Pihak berelasi	(4,899)	(2,681)	Related parties
Jumlah, bersih - pihak berelasi	69,362,079	52,135,921	Total, net - related parties
Pihak ketiga	195,303	118,793	Third parties
Cadangan kerugian kredit ekspektasian			Allowance for ECL
Pihak ketiga	(42,226)	(33,127)	Third parties
Jumlah, bersih - pihak ketiga	153,077	85,666	Total, net - third parties
Jumlah, bersih	69,515,156	52,221,587	Total, net

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	2024	2023	
Belum jatuh tempo	10,153,457	6,910,456	Not yet due
Sudah jatuh tempo			Past Due
1 s/d 30 hari	9,089,651	8,482,146	1 to 30 days
31 s/d 60 hari	9,488,693	8,838,556	31 to 60 days
61 s/d 90 hari	9,031,117	8,864,957	61 to 90 days
91 s/d 120 hari	9,214,990	7,593,944	91 to 120 days
> 120 hari	22,584,373	11,567,336	> 120 days
Jumlah	69,562,281	52,257,395	Total

Pergerakan cadangan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for ECL is as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	35,808	42,068	Balance at beginning of year
Penambahan	11,317	-	Additions
Pembalikan cadangan kerugian	-	(6,260)	Reversal of loss allowance
Saldo akhir tahun	47,125	35,808	Balance at end of year

Berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan PLN, piutang usaha Perusahaan disalinghapuskan terhadap utang usaha terkait pembelian energi primer (Catatan 29e).

Based on the agreement between the Company and PLN, the trade receivables of the Company were offset with trade payables related to the purchase of primary energy (Note 29e).

Manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah cukup untuk menutupi kerugian kredit ekspektasian nilai dari piutang usaha.

Management believes that the allowance for ECL for trade receivables as at 31 December 2024 and 2023 is sufficient to cover the ECL of trade receivables.

Lihat Catatan 27 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 27 for information about the transactions and balances with related parties.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/48 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERSEDIAAN

9. INVENTORIES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Batubara, bahan bakar dan pelumas	5,187,306	5,269,286	Coal, fuel and lubricants
Suku cadang	<u>336,080</u>	<u>358,323</u>	Spare parts
Jumlah	5,523,386	5,627,609	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	<u>(372,319)</u>	<u>(343,634)</u>	Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence
Jumlah, bersih	<u>5,151,067</u>	<u>5,283,975</u>	Total, net

Pergerakan cadangan kerugian penurunan nilai dan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence is as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Saldo awal tahun	343,634	239,382	Balance at beginning of year
Penambahan	<u>28,685</u>	<u>104,252</u>	Additions
Saldo akhir tahun	<u>372,319</u>	<u>343,634</u>	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup risiko penurunan nilai persediaan dan persediaan usang pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses on decline in value of inventories and inventory obsolescence as at 31 December 2024 and 2023.

Jumlah pemakaian persediaan yang diakui sebagai beban usaha dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 untuk bahan bakar dan pelumas adalah masing-masing sebesar Rp69.500.760 dan Rp61.558.594 (Catatan 23), dan pemakaian suku cadang adalah masing-masing sebesar Rp1.110.900 dan Rp1.041.900 (Catatan 24).

The total amount of inventories used recognised as operating expenses in profit or loss for the years ended 31 December 2024 and 2023 for fuel and lubricants amounting to Rp69,500,760 and Rp61,558,594, respectively (Note 23), and for spare parts used amounting to Rp1,110,900 and Rp1,041,900, respectively (Note 24).

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/49 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET KEUANGAN DARI KONSESI JASA

Akun ini merupakan tagihan jangka panjang dari PLN sehubungan dengan pembayaran kapasitas minimum di masa depan yang ditetapkan dalam PJBTL yang telah diklasifikasikan sebagai aset keuangan sebagai akibat dari adopsi ISAK No.112.

10. FINANCIAL ASSETS OF SERVICE CONCESSION

This account represents long-term receivables from PLN in relation to the future minimum capacity payments set forth in PPA that have been classified as financial assets as a result of adoption of ISFAS No. 112.

	2024	2023	
Pembayaran minimum kapasitas di masa depan			Future minimum capacity payments
Tidak lebih dari satu tahun	201,523	201,523	Not later than one year
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	646,733	793,834	Later than a year but not later than five years
Lebih dari lima tahun	727,132	781,554	Later than five years
Jumlah pembayaran minimum kapasitas di masa depan	1,575,388	1,776,911	Total future minimum capacity payments
Dikurangi: penghasilan keuangan yang belum diterima	(546,439)	(628,123)	Less: unearned financial revenue
Nilai kini pembayaran minimum kapasitas di masa depan	1,028,949	1,148,788	Present value of future capacity payments
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(129,094)	(119,839)	Less: current portion
Bagian jangka panjang	899,855	1,028,949	Non-current portion

a. Perusahaan

Pada tanggal 10 Maret 2017, Perusahaan menandatangani PJBTL atas pembangkit listrik tenaga uap Suralaya ("SLA") unit 1-7. Jangka waktu perjanjian adalah lima tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017. Pada tanggal 22 Agustus 2017, perjanjian tersebut telah diamendemen dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017. Amendemen tersebut terutama mencakup perubahan atas jangka waktu perjanjian menjadi 30 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2046.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan dan PLN telah menandatangani kontrak perubahan dan pernyataan kembali atas PJBTL untuk SLA unit 1-7 yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dengan jangka waktu selama 10 tahun terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan akhir periode penagihan Desember 2032 (Catatan 28a). Dengan ditandatanganinya perubahan dan pernyataan kembali atas PJBTL ini, maka PJBTL sebelumnya sudah tidak berlaku. Manajemen berpendapat bahwa perubahan PJBTL tersebut telah mengakhiri perjanjian konsesi jasa dengan PLN sejak 1 Januari 2023.

a. The Company

On 10 March 2017, the Company entered into a PPA for Suralaya steam power plant ("SLA") units 1-7. The term of the agreement is five years, effective from 1 January 2017. On 22 August 2017, the agreement was amended and applied retroactively since 1 January 2017. The amendment primarily covers changes to the terms of the agreement to 30 years, effective from 1 January 2017 until 31 December 2046.

On 30 December 2022, the Company and PLN have signed a contract of amendment and restatement of the PPA for SLA units 1-7 which became effective on 1 January 2023 with a term of 10 years from the effective date until the end of the December 2032 billing period (Note 28a). With the signing of the amendment and restatement of this PPA, therefore the previous PPA is no longer valid. Management believes that the changes to the PPA have ended the service concession agreement with PLN since 1 January 2023.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/50 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET KEUANGAN DARI KONSESI JASA (lanjutan)

a. Perusahaan (lanjutan)

Atas pengakhiran perjanjian konsesi jasa dengan PLN, Perusahaan menghentikan pengakuan atas aset keuangan dari konsesi jasa dengan jumlah tercatat pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp40.511.862.

Pada tahun 2023, Perusahaan mengakui aset tetap SLA unit 1-7 sebesar Rp31.162.141 yang sesuai dengan nilai wajar aset keuangan yang diserahkan. Dengan demikian, Perusahaan mengakui kerugian atas selisih jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai wajarnya sebesar Rp9.349.721 pada laba rugi.

b. IRP

Pada tanggal 30 Oktober 2007, IRP mengadakan PJBTl dengan PLN untuk jangka waktu 30 tahun setelah tanggal operasi komersial yaitu pada tanggal 30 November 2018. Dalam PJBTl tersebut PLN akan membayar pasokan tenaga listrik yang akan disediakan oleh IRP sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup beberapa komponen yaitu biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam PJBTl.

Manajemen berpendapat bahwa PJBTl sesuai dengan kriteria perjanjian konsesi jasa.

Grup mengakui pendapatan dari konsesi jasa sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Bahan bakar dan pemeliharaan	174,660	178,383
Pendapatan keuangan	<u>81,684</u>	<u>90,275</u>
Jumlah	<u>256,344</u>	<u>268,658</u>

Lihat Catatan 27 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Beban konsesi jasa yang diakui pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Bahan bakar dan pemeliharaan	<u>268,412</u>	<u>244,974</u>

Manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian tidak material sehingga penyisihan dianggap tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

**10. FINANCIAL ASSETS OF SERVICE CONCESSION
(continued)**

a. The Company (continued)

Due to the termination of service concession agreement with PLN, the Company has derecognised the financial assets from service concession with the carrying amount on 1 January 2023 amounting to Rp40,511,862.

In 2023, the Company recognised property, plant and equipment of SLA unit 1-7 amounting to Rp31,162,141 which is equal to the fair value of the financial assets given up. As such, the Company recognised loss on the difference between the carrying amount of financial assets and its fair value amounting to Rp9,349,721 in profit or loss.

b. IRP

On 30 October 2007, IRP entered into a PPA with PLN for a period of 30 years after the Commercial Operation Date ("COD") on 30 November 2018. Based on the PPA, PLN will pay for the power supply electricity to be provided by IRP in the amount that is determined by the formula of payment. The payments cover several components, that is capacity, energy, operational and maintenance costs depending on the energy supply level and other variables specified in the PPA.

Management believes that PPA meets the criteria of service concession arrangements.

The Group recognised revenue of service concession as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Bahan bakar dan pemeliharaan	174,660	178,383
Pendapatan keuangan	<u>81,684</u>	<u>90,275</u>
Jumlah	<u>256,344</u>	<u>268,658</u>

Refer to Note 27 for information about the transactions and balances with related parties.

Service concession expenses recognised during the years were as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Bahan bakar dan pemeliharaan	<u>268,412</u>	<u>244,974</u>

The Group's management opinion is that the provision for ECL is not material, therefore, it is not considered necessary as at 31 December 2024 and 2023.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/51 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK BERELASI

11. OTHER RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES

	2024	2023	
PT Rajamandala Electric Power ("REP")	485,856	437,855	PT Rajamandala Electric Power ("REP")
PLN	469,042	240,839	PLN
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali ("SGPJB")	195,167	195,167	PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali ("SGPJB")
PT GCL Indotenaga ("GCL")	123,836	58,923	PT GCL Indotenaga ("GCL")
PNP	-	55,566	PNP
PT Perta Daya Gas ("PDG")	-	36,387	PT Perta Daya Gas ("PDG")
PT Indo Pusaka Berau ("IPB")	-	1,411	PT Indo Pusaka Berau ("IPB")
Lain-lain	124,544	93,857	Other
Subjumlah	1,398,445	1,120,005	Subtotal
Dikurangi: Cadangan kerugian kredit ekspektasian Pihak berelasi	(49,403)	(48,719)	Less: Allowance for ECL Related parties
Jumlah	1,349,042	1,071,286	Total
Dikurangi: bagian jangka pendek	(885,522)	(336,533)	Less: current portion
Bagian jangka panjang	463,520	734,753	Long-term portion

Pergerakan cadangan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for ECL is as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	48,719	48,719	Balance at beginning of year
Penambahan	684	-	Additions
Saldo akhir tahun	49,403	48,719	Balance at end of year

Lihat Catatan 27 untuk informasi rincian transaksi dan saldo pihak berelasi.

Refer to Note 27 for information on the details of transactions and balance with related parties.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang lain-lain pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah cukup untuk menutupi kerugian kredit ekspektasian nilai dari piutang lain-lain pihak berelasi.

Management believes that the allowance for ECL for other receivables from related parties as at 31 December 2024 and 2023 is sufficient to cover the ECL of other receivables from related parties.

REP

Pada tanggal 4 Juli 2014, Perusahaan memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US\$9.399.962 kepada REP untuk membiayai proyek 46,6 Megawatt di Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTA") Sungai Citarum di Cianjur, Jawa Barat. Pinjaman ini dikenakan bunga 10,00% per tahun dengan jangka waktu 17,5 tahun setelah grace period selama pembangunan.

REP

On 4 July 2014, the Company provided a long-term loan of US\$9,399,962 to REP for the financing of the 46.6 Megawatt project in Hydroelectric Power Plant ("HPP") Citarum River at Cianjur, West Java. This loan bears interest of 10.00% per annum with a 17.5 years term of repayment after a grace period during construction.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/52 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK BERELASI (lanjutan)

REP (lanjutan)

Tanggal operasi komersial PLTA telah diamendemen, terakhir kali melalui Amendemen Pertama atas PJBTTL tertanggal 10 Agustus 2017, menjadi 57 bulan setelah tanggal pendanaan. Pada tanggal 12 Mei 2019, PLTA Rajamandala 1 x 47 MW telah beroperasi secara komersial berdasarkan sertifikat tanggal operasi komersial No. 188.BA/159/REP/2019. Pokok pinjaman akan ditagihkan dan terutang setiap enam bulan sejak tanggal operasi komersial.

Pada tanggal 23 November 2016, Perusahaan memberikan tambahan pinjaman sebesar US\$5.724.490 kepada REP dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pinjaman sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo pokok pinjaman Perusahaan kepada REP masing-masing adalah sebesar US\$15.124.452 (setara dengan Rp244.366) dan US\$15.124.452 (setara dengan Rp233.507) dan piutang bunga masing-masing sebesar US\$14.516.149 (setara dengan Rp234.537) dan US\$12.999.560 (setara dengan Rp200.700). Piutang lainnya sebesar Rp6.953 (2023: Rp3.648) merupakan biaya relokasi pegawai.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, penghasilan bunga masing-masing adalah sebesar US\$1.516.589 (setara dengan Rp24.133) dan US\$1.512.445 (setara dengan Rp23.011) yang disajikan dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunga yang dibayarkan oleh REP. Perusahaan tidak berhak untuk meminta pembayaran kembali atas pokok pinjaman yang diberikan kepada REP sebelum Tanggal Pembebasan Fasilitas Senior, namun untuk pembayaran bunga yang dilakukan oleh REP harus memenuhi syarat dan kondisi yang tertuang dalam perjanjian pemegang saham sebagai berikut:

- Uang yang ada pada kredit dari Rekening Distribusi; atau
- Sumber - sumber lain yang dapat disetujui secara tertulis oleh Agen Antar Kreditur.

PLN

Pada tanggal 31 Desember 2024, piutang lain-lain pihak berelasi dari PLN merupakan piutang penggunaan bahan bakar dan pelumas sebesar Rp323.596 (2023: Rp95.393) dan penggantian terkait biaya pembebasan lahan sebesar Rp145.446 (2023: Rp145.446).

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

11. OTHER RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES (continued)

REP (continued)

The COD has been amended, most recently through the First Amendment of PPA dated 10 August 2017, 57 months after the financial close date. On 12 May 2019, the Rajamandala 1 x 47 MW HPP was commercially operated based on COD certificate No. 188.BA/159/REP/2019. The principal shall be invoiced and due every six months starting on COD.

On 23 November 2016, the Company provided additional loans of US\$5,724,490 to REP with similar terms and conditions to the previous loan.

As at 31 December 2024 and 2023, the Company's principal outstanding loan balance to REP was US\$15,124,452 (equivalent to Rp244,366) and US\$15,124,452 (equivalent to Rp233,507), respectively, and interest receivables amounting to US\$14,516,149 (equivalent to Rp234,537) and US\$12,999,560 (equivalent to Rp200,700) respectively. Other receivables of Rp6,953 (2023: Rp3,648) represent costs of employee relocation.

For the years ended 31 December 2024 and 2023, interest income amounting to US\$1,516,589 (equivalent to Rp24,133) and US\$1,512,445 (equivalent to Rp23,011) which is presented in profit or loss.

As at 31 December 2024 and 2023, there was no repayment of the loan principal and interest paid by REP. The Company is not entitled to request repayment of principal loan provided to REP before the Senior Facility Release Date, while interest paid by REP should fulfil several terms and conditions as stated in the shareholder agreement as follows:

- The monies standing to the credit of the Distribution Accounts; or
- Other sources as may be approved in writing by the Intercreditor Agent.

PLN

As of 31 December 2024, other receivables from PLN represent receivables from usage of fuel and lubricants amounting to Rp323,596 (2023: Rp95,393) and reimbursements related to land acquisitions cost amounting to Rp145,446 (2023: Rp145,446).

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/53 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

**11. PIUTANG LAIN-LAIN DARI PIHAK - PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**11. OTHER RECEIVABLES FROM RELATED
PARTIES (continued)**

SGPJB

SGPJB

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, piutang lain-lain pihak berelasi dengan SGPJB merupakan piutang atas penggunaan batubara oleh SGPJB sebesar Rp195.167.

As of 31 December 2024 and 2023, other receivables from SGPJB are receivables for the use of coal by SGPJB amounting to Rp195,167.

GCL

GCL

Pada tanggal 24 Juni 2024, GCL melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") No. 005/GMS-GCLIT/2024 telah mengumumkan dividen kepada IPRen sebesar US\$9.721.784 atau setara dengan Rp160.001 (Catatan 14).

On 24 June 2024, GCL through the General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 005/GMS-GCLIT/2024 has declared its dividends to IPRen amounting to US\$9,721,784 or equivalent to Rp160,001 (Note 14).

Selama tahun 2024, GCL telah membayar IPRen atas sisa saldo piutang dividen 2023 dan 2022 yang belum dibayar sebesar US\$7.700.000 setara dengan Rp124.601.

During 2024, GCL has paid IPRen the remaining amount of the dividend receivable that has not been paid in 2023 and 2022 amounted to US\$7,700,000 or equivalent to Rp124,601.

Sehingga sisa saldo piutang dividen yang belum dibayar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$5.838.314 (2023: US\$3.816.530) atau setara dengan Rp94.323 (2023: Rp58.923).

Therefore remaining amount of the dividend receivables that has not been paid as of 31 December 2024 amounting to US\$5,838,314 (2023: to US\$3,816,530) or equivalent to Rp94,323 (2023: Rp58,923).

Pada tanggal 31 Desember 2024, terdapat piutang lainnya atas pendapatan operasi dan pemeliharaan Rp29.506.

On 31 December 2024, there is other receivable from operating and maintenance revenue amounting to Rp29,506.

PNP

PNP

Pada tanggal 31 Desember 2023, piutang lain-lain pihak berelasi dengan PNP merupakan piutang atas penggunaan gas oleh PNP sebesar Rp55.566. Pada tahun 2024, PNP telah melakukan pembayaran penuh atas piutang tersebut.

As of 31 December 2023, other receivables from related parties with PNP represent receivables for gas used by PNP amounting to Rp55,566. In 2024, PNP has fully repaid these receivables.

PDG

PDG

Pada tanggal 12 Juni 2013, Perusahaan memberikan pinjaman jangka panjang kepada PDG, ventura bersama, sebesar US\$18.837.112 untuk membiayai Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tambak Lorok, Semarang. Pada tanggal 30 November 2015, perjanjian ini telah diamendemen yang merubah jumlah pinjaman menjadi US\$18.191.529 sesuai dengan jumlah seluruh pencairan dana sampai dengan tanggal 9 Januari 2014 dan tanggal jatuh tempo pinjaman ini adalah 1 Desember 2023. Pada tanggal 27 November 2020, perjanjian ini telah diamendemen yang merubah tanggal jatuh tempo pinjaman ini menjadi 1 Desember 2024. Pemberian pinjaman ini dikenakan bunga 6,50% per tahun.

On 12 June 2013, the Company provided a long-term loan to PDG, a joint venture, amounting to US\$18,837,112, for financing the Tambak Lorok Steam Power Plant, Semarang. On 30 November 2015, this agreement has been amended which resulted in the revision of the total loan provided by the Company to US\$18,191,529, in accordance with the funds transferred up to 9 January 2014 and the maturity date of the loan is 1 December 2023. On 27 November 2020, this agreement has been amended to change the maturity of the loan to 1 December 2024. This loan bears an interest rate of 6.50% per annum.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/54 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

**11. PIUTANG LAIN-LAIN DARI PIHAK - PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

PDG (lanjutan)

Jumlah bunga atas pokok pinjaman terutang selama masa pembangunan proyek dihitung sejak tanggal pencairan dana sampai tanggal 30 Mei 2014 dan dibayarkan secara penuh pada tanggal 1 Juni 2016. Pokok pinjaman akan ditagihkan setiap enam bulan dari tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 1 Desember 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo pokok pinjaman Perusahaan dari PDG masing-masing adalah sebesar nil dan US\$2.273.941 (setara dengan Rp35.107) dan piutang bunga sebesar nil dan US\$34.077 (setara dengan Rp526).

Pada tahun 2024, PDG melakukan pembayaran pinjaman atas pokok sebesar US\$2.273.941 (setara dengan Rp35.860) dan bunga sebesar US\$129.125 (setara dengan Rp2.067) (2023: pokok US\$2.273.941 (setara dengan Rp34.681) dan bunga sebesar US\$680.250 (setara dengan Rp10.361)).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, penghasilan bunga masing-masing adalah sebesar US\$95.048 (setara dengan Rp1.515) dan US\$254.966 (setara dengan Rp3.873) yang disajikan dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, piutang lainnya sebesar nil dan Rp754, merupakan piutang biaya pegawai.

IPB

Pada tanggal 25 Oktober 2023, IPB melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") telah mengumumkan dividen kepada Grup sebesar Rp1.881 (Catatan 14).

Selama tahun 2023, IPB telah membayar Perusahaan atas sisa saldo piutang dividen 2022 yang belum dibayar sebesar Rp3.276 dan pembayaran dividen 2023 sebesar Rp470.

Selama tahun 2024, IPB telah melunasi saldo piutang dividen 2023 yang belum dibayar sebesar Rp1.411.

**11. OTHER RECEIVABLES FROM RELATED
PARTIES (continued)**

PDG (continued)

The total interest on the principal during the construction of the project is effective from the date of cash withdrawal until 30 May 2014 and paid in full on 1 June 2016. The principal shall be collected every six months from 1 June 2016 until 1 December 2024.

As at 31 December 2024 and 2023, the Company's principal outstanding loan balance from PDG was nil and US\$2,273,941 (equivalent to Rp35,107), respectively, and interest receivables amounting to nil and US\$34,077 (equivalent to Rp526), respectively.

In 2024, PDG has made loan payments of principal amounting to US\$2,273,941 (equivalent to Rp35,860) and interest amounting to US\$129,125 (equivalent to Rp2,067) (2023: principal US\$2,273,941 (equivalent to Rp34,681) and interest amounting to US\$680,250 (equivalent to Rp10,361)).

For the years ended 31 December 2024 and 2023, interest income amounting to US\$95,048 (equivalent to Rp1,515) and US\$254,966 (equivalent to Rp3,873) which is presented in profit or loss.

As at 31 December 2024 and 2023, other receivables amounting to nil and Rp754, respectively, represent receivable of employee costs.

IPB

On 25 October 2023, IPB through the General Meeting of Shareholders ("GMS") declared its dividends to the Group, amounted to Rp1,881 (Note 14).

During 2023, IPB has paid the Company the remaining amount of the dividend receivable that has not been paid in 2022 amounted to Rp3,276 and payment for 2023 dividend amounted to Rp470.

During 2024, IPB has fully repaid the dividend receivable that has not been paid in 2023 amounted to Rp1,411.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/55 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

2024						
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Dampak revaluasi/ Revaluation impact	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition cost
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Hak atas tanah	17,832,992	-	-	42,157	1,277,534	Land rights
Bangunan umum, waduk dan prasarana	25,874,415	147,160	(12,684)	215,078	(1,752,059)	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	267,001,118	772,177	(811,673)	10,093,371	(810,170)	Installations and power plants
Perlengkapan transmisi	5,597,800	98,750	(10,083)	43,033	(73,382)	Transmission equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	213,790	22,152	(102)	1,654	(76,714)	Telecommunication and data processing equipment
Perlengkapan umum	5,105,729	155,918	(3,846)	32,943	-	General equipment
Kendaraan bermotor	652,891	44,303	-	2,571	-	Motor vehicles
Material cadang utama	549,043	51,020	-	(65,804)	12,130	Major spare parts
Subjumlah	322,827,778	1,291,480	(838,388)	10,365,003	(1,422,661)	Subtotal
Aset dalam pembangunan	9,009,609	4,387,584	-	(10,564,160)	-	Construction in progress
Aset tidak digunakan dalam operasi	2,021,740	-	-	233,804	-	Assets not used in operations
Jumlah	333,859,127	5,679,064	(838,388)	34,647	(1,422,661)	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Bangunan umum, waduk dan prasarana	1,610,580	850,504	(12,684)	28	(2,448,428)	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	17,055,013	10,090,097	(811,673)	(14,229)	(26,319,208)	Installations and power plants
Perlengkapan transmisi	602,529	527,958	(10,083)	(1,531)	(1,118,873)	Transmission equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	58,305	29,534	(102)	(182)	(87,555)	Telecommunication and data processing equipment
Perlengkapan umum	4,397,523	303,576	(3,846)	(8,660)	-	General equipment
Kendaraan bermotor	554,752	49,512	-	(6,374)	-	Motor vehicles
Material cadang utama	30,310	18,900	-	-	(49,210)	Major spare parts
Subjumlah	24,309,012	11,870,081	(838,388)	(30,948)	(30,023,274)	Subtotal
Aset tidak digunakan dalam operasi	1,831,519	208,897	-	30,948	-	Assets not used in operations
Jumlah	26,140,531	12,078,978	(838,388)	-	(30,023,274)	Total
Penyisihan untuk penurunan nilai	92,820	-	-	(91,242)	-	Provision for impairment
Jumlah tercatat bersih	307,625,776				329,952,364	Net carrying value
2023						
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ penyesuaian Reclassifications/ adjustments		Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition cost
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Hak atas tanah	17,449,448	380,784	-	2,760	17,832,992	Land rights
Bangunan umum, waduk dan prasarana	25,545,547	185,700	(1,176)	144,344	25,874,415	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	232,870,498	30,410,700	(571,319)	4,291,239	267,001,118	Installations and power plants
Perlengkapan transmisi	4,426,539	1,134,365	(1,762)	38,658	5,597,800	Transmission equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	174,248	12,559	-	26,983	213,790	Telecommunication and data processing equipment
Perlengkapan umum	4,806,773	270,292	-	28,664	5,105,729	General equipment
Kendaraan bermotor	609,089	54,743	-	(10,941)	652,891	Motor vehicles
Material cadang utama	419,002	135,610	-	(5,569)	549,043	Major spare parts
Subjumlah	286,301,144	32,584,753	(574,257)	4,516,138	322,827,778	Subtotal
Aset dalam pembangunan	8,762,242	3,878,893	-	(3,631,526)	9,009,609	Construction in progress
Aset tidak digunakan dalam operasi	2,942,791	-	(60,381)	(860,670)	2,021,740	Assets not used in operations
Jumlah	298,006,177	36,463,646	(634,638)	23,942	333,859,127	Total

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/56 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

	2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ penyesuaian Reclassifications/ adjustments	Saldo akhir/ Ending balance	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Bangunan umum, waduk dan prasarana	800,311	810,405	(63)	(73)	1,610,580	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	8,052,883	9,004,464	(33,640)	31,306	17,055,013	Installations and power plants
Perlengkapan transmisi	128,129	475,109	(209)	(500)	602,529	Transmission equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	30,303	28,088	-	(86)	58,305	Telecommunication and data processing equipment
Perlengkapan umum	4,090,487	325,851	-	(18,815)	4,397,523	General equipment
Kendaraan bermotor	506,096	60,329	-	(11,673)	554,752	Motor vehicles
Material cadang utama	14,985	15,750	-	(425)	30,310	Major spare parts
Subjumlah	13,623,194	10,719,996	(33,912)	(266)	24,309,012	Subtotal
Aset tidak digunakan dalam operasi	1,752,280	139,354	(60,381)	266	1,831,519	Assets not used in operations
Jumlah	15,375,474	10,859,350	(94,293)	-	26,140,531	Total
Penyisihan untuk penurunan nilai	92,820	-	-	-	92,820	Provision for impairment
Jumlah tercatat bersih	282,537,883				307,625,776	Net carrying value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2024	2023	
Beban usaha	11,241,448	10,719,996	Operating expenses
Beban lain-lain - bersih	837,530	139,354	Other expenses - net
Jumlah	12,078,978	10,859,350	Total

Grup memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan ("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu sedangkan HGB Grup jatuh tempo antara tahun 2026 sampai dengan 2054, tetapi dapat diperpanjang. Grup juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Grup.

The Group owns several pieces of land with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB"). Rights to Use have no expiration date while HGB will expire from 2026 to 2054, but they are renewable by the Group. The Group also has several pieces of land rights which are still in an extension process and in the process of transfer of certificate to the name of the Group.

Instalasi mesin pembangkit serta perlengkapan transmisi diasuransikan kepada perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (2023: PT Asuransi Central Asia) terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar US\$12.936.660.180 (setara dengan Rp209.017.619) pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: US\$12.426.927.100 (setara dengan Rp191.859.327)). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan.

Power plant installations and transmission equipment were insured with insurance company against fire and other possible risks with PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (2023: PT Asuransi Central Asia) against the risk of fire and other possible risks with insurance coverage of US\$12,936,660,180 (equivalent to Rp209,017,619) as at 31 December 2024 (2023: US\$12,426,927,100 (equivalent to Rp191,859,327)). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/57 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Revaluasi aset

Pada tahun 2024, manajemen mempekerjakan penilai eksternal independen dan berkualifikasi untuk menentukan nilai wajar aset tetap yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR"). KJPP RHR merupakan penilai Independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

Tabel di bawah ini menganalisis aset tetap yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan hierarki nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 113 berdasarkan valuasi tanggal 31 Desember 2024. Perbedaan tingkatan nilai wajar dijelaskan sebagai berikut:

Asset revaluation

In 2024, the Group engaged external and independence and qualified valuers, Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Partners ("KJPP RHR") to determine the fair value of property, plant and equipment. KJPP RHR is an independent valuer registered in the Ministry of Finance and OJK.

The table below analyses the property, plant and equipment that have been recorded at fair value, based on the fair value hierarchy in SFAS No. 113 based on valuation as at 31 December 2024. The different levels of fair value are defined as follows:

Pengukuran nilai wajar 31 Desember 2024 menggunakan/ Fair value measurement at 31 December 2024 using					
Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total		
Pengukuran nilai wajar berulang					Recurring fair value measurement
Hak atas tanah	-	599,480	18,553,203	19,152,683	Land rights
Bangunan umum, waduk dan prasarana	-	439,489	24,032,421	24,471,910	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	-	-	276,244,823	276,244,823	Installations and power plants
Perlengkapan transmisi	-	-	5,656,118	5,656,118	Transmission equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	-	160,780	160,780	Telecommunication and data processing equipment
Material cadang utama	-	-	546,389	546,389	Major spare parts
Jumlah	-	1,038,969	325,193,734	326,232,703	Total

Perbedaan tingkatan nilai wajar dijelaskan sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain kuotasian dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Tidak terdapat aset tetap yang bisa diukur dengan nilai wajar Tingkat 1.

Tidak terdapat transfer antara Tingkat 1 dan Tingkat 2 selama tahun berjalan.

The different levels of fair value are defined as follows:

- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);
- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and
- Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).

There were no property, plant and equipment which could be measured as Level 1 fair value.

There were no transfers between Levels 1 and 2 during the years.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/58 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Nilai wajar Tingkat 2 dari hak atas tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan, sedangkan untuk bangunan menggunakan pendekatan biaya. Input yang diperoleh dari pendekatan pasar yaitu:

- Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
- Tingkat hunian;
- Tingkat pertumbuhan;
- Tingkat diskonto dan kapitalisasi;
- Biaya pembuatan baru per meter persegi;
- Tingkat depresiasi;
- Biaya operasional;
- Keuntungan pengembangan; dan
- Indeks kemahalan konstruksi.

Rekonsiliasi atas saldo awal terhadap saldo akhir dari pengukuran nilai wajar dengan menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

**12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)**

The Level 2 fair value of land rights is calculated using the market approach and income approach, while building value is calculated using the cost approach. Data inputs were obtained from the market approach that consists of the following:

- Sale or rental price per square metre;
- Occupancy rate;
- Growth rate;
- Discount and capitalisation rate;
- Replacement cost new per square metre;
- Depreciation rate;
- Operational expense;
- Developers margin; and
- Construction cost index.

Reconciliation of the beginning balances to the closing balances of the fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) is as follows:

	1 Januari/ January 2024	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Jumlah yang diakui dalam laba rugi/ Amount recognised in profit or loss	Keuntungan/ (kerugian) yang diakui pada penghasilan komprehensif lain/ Gain/(losses) recognised in other comprehensive income	31 Desember 2024/ 31 December 2024	
				Depresiasi/ Depreciation	Penurunan nilai/ Impairment		
Hak atas tanah	17,415,269	-	-	-	-	1,137,934	Land rights
Bangunan umum, waduk dan prasarana	23,901,641	147,160	202,394	(850,504)	(1,371)	633,101	Building, reservoirs and infrastructures
Instalasi dan mesin pembangkit	250,772,693	772,177	9,281,698	(10,090,097)	(6,299)	25,514,651	Installations and power plants
Perlengkapan transmisi	5,006,953	98,750	32,950	(527,958)	(3,468)	1,048,891	Transmissions equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	160,353	22,152	1,552	(29,534)	-	6,257	Telecommunications and data processing equipments
Material cadangan utama	518,733	51,020	(65,804)	(18,900)	(3)	61,343	Major spare parts
Jumlah	297,775,642	1,091,259	9,452,790	(11,516,993)	(11,141)	28,402,177	Total
						325,193,734	

Nilai wajar Tingkat 3 dihitung dengan menerapkan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya dengan menggunakan input yang tidak dapat diobservasi. Selain menggunakan input yang berasal dari pasar, KJPP RHR juga menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dari pasar dan menggunakan asumsi khusus terkait dengan jenis aset yang tergolong sebagai properti khusus, seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi, dan lainnya. Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, kapasitas, usia, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

The Level 3 fair value is calculated through the market approach, income approach, and cost approach by using unobservable inputs. Other than the data inputs observed from the market, KJPP RHR also used unobservable market data inputs and used special assumptions related to the assets classified as specialised property, such as power plants, transmission and distribution networks, and others. Adjustments were made based on size, capacity, age, location, shape and specification, land rights and other comparison elements.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/59 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) is as follows:

	Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024/ Fair value as at 31 December 2024	Teknik penilaian/ Valuation technique	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ Unobservable inputs	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi/ Range of unobservable inputs	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ Relationship of unobservable inputs to fair value	
Hak atas tanah						Land rights
Hak atas tanah pembangkit	19,094,895	Pendekatan pendapatan dengan metode pengembangan lahan/ The income approach with the land development method	-Penyesuaian parameter pengembangan/ Adjustment of parameter development	60% - 80%*	-Semakin tinggi koefisien luas bangunan ("KLB") maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the KLB, the higher the fair value	Power plant land rights
			-Data luas dan aspek legal/ Land area and legal aspects	-	-Tanah bersertifikat akan memiliki nilai wajar lebih tinggi/ Certified land will have the higher fair value	
			-Perubahan peruntukan/ Zoning changes	-	-Peruntukan tanah sekitar mengindikasikan nilai wajar yang lebih tinggi/ Zoning of neighboring land might have the higher fair value	
Bangunan						Buildings
Bangunan pembangkit	19,604,576	Pendekatan biaya/ Cost approach	-Indeks koefisien jenis pembangkit/ Power plant type index coefficient**	1.50 - 6.91	-Semakin besar indeks koefisien maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the index coefficient, the higher the fair value	Power plant buildings
			-Volume bangunan/ Building volumes	60% - 70%*	-Semakin besar volume maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the building volumes, the higher the fair value	
Waduk dan prasarana	5,578,932	Trending/ Trending	-Indeks koefisien berdasarkan Badan Pusat Statistik ("BPS")/ Index coefficient BPS	1.00 - 2.57	-Semakin besar tingkat indeks koefisien maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the index coefficient, the higher the fair value	Reservoir and infrastructure
			-Nilai perolehan/ Acquisition value	10% - 30%	-Semakin besar nilai perolehan, semakin tinggi nilai wajar/ The higher the acquisition costs, the higher the fair value	
Jalan dan sepur samping	102,299	Trending/ Trending	-Indeks koefisien BPS/ Index coefficient BPS	1.00 - 2.57	-Semakin besar tingkat indeks koefisien maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher index coefficient, the higher the fair value	Road and rail side
			-Nilai perolehan/ Acquisition value	10% - 30%	-Semakin besar nilai perolehan maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the acquisition costs, the higher the fair value	
Instalasi dan mesin pembangkit	263,982,639	Pendekatan biaya/ Cost approach	-Tingkat kemunduran fungsional/ Functional obsolescence rate	1% - 71%	-Semakin besar tingkat kemunduran fungsional maka semakin rendah nilai wajar/ The higher the functional obsolescence rate, the lower the fair value	Installation and power plants
			-Nilai pengganti baru/ Replacement cost new ("RCN")	50% - 60%*	-Semakin tinggi nilai pengganti baru maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the RCN, the higher the fair value	
			-Tingkat indeks Producer Price Index ("PPI")/ PPI index rate	1.00 - 3.80	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the PPI index rate, the higher the fair value	

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/60 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) is as follows:

	Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024/ Fair value as at 31 December 2024	Teknik penilaian/ Valuation technique	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ Unobservable inputs	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi/ Range of unobservable inputs	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ Relationship of unobservable inputs to fair value	
Perengkapan transmisi dan distribusi	17,212,279	Pendekatan biaya/ Cost approach	-Tingkat kemunduran fungsional/ Functional obsolescence rate -Nilai pengganti baru/ RCN -Tingkat indeks PPI/ PPI index rate	1% - 71% 50% - 60%* 1.00 - 3.80	-Semakin besar tingkat kemunduran fungsional maka semakin rendah nilai wajar/ The higher the functional obsolescence rate, the lower the fair value -Semakin tinggi nilai pengganti baru maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the RCN, the higher the fair value -Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the PPI index rate, the higher the fair value	Installation and power plants
Perengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	156,771	Pendekatan biaya/ Cost approach	-Tingkat indeks PPI/ PPI index rate -Nilai perolehan/ Acquisition value	1.00 - 1.10 50% - 60%*	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher PPI index rate, the higher fair value -Semakin besar nilai perolehan maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the acquisition costs, the higher the fair value	Telecommunications and data processing equipment
Material cadang utama	604,172	Pendekatan biaya/ Cost approach	-Tingkat indeks PPI/ PPI index rate -Nilai perolehan/ Acquisition value	1.00 - 3.80 50% - 60%*	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the PPI index rate, the higher the fair value -Semakin besar nilai perolehan maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the acquisition costs, the higher the fair value	Major spare parts

*) Kisaran bobot dari input yang tidak dapat diobservasi/The range of weights of the unobservable input

**) Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minyak Gas ("PLTMG") dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mobile Power Plant ("PLTG MPP")/For PLTMG and PLTG MPP

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/61 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Surplus revaluasi, dikurangi dengan penghasilan pajak tangguhan yang terkait, telah dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai "surplus revaluasi aset tetap" pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

Jika Grup tidak menerapkan model revaluasi, nilai tercatat bersih aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp58.821.790 dan Rp58.265.042.

Mutasi surplus revaluasi aset tetap yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal tahun	249,360,734	249,507,356
Peningkatan surplus revaluasi	28,611,768	-
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba	(547,339)	(360,501)
Reklasifikasi surplus revaluasi ke akumulasi depresiasi atas aset tidak digunakan dalam operasi	-	274,203
Manfaat pajak terkait (Catatan 26d)	(6,013,588)	(60,324)
Saldo akhir tahun	271,411,575	249,360,734

Aset dalam pembangunan

Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan renovasi/perbaikan sarana kelistrikan, sebagai berikut:

	2024	2023
Pembangkit listrik:		
Tenaga gas	1,030,103	1,849,704
Tenaga uap	814,503	574,300
Tenaga air	341,241	339,316
Tenaga gas/uap	335,414	5,727,753
Tenaga diesel	111,666	20,872
Tenaga panas bumi	102,374	70,098
Fungsi pendukung	97,732	427,566
Jumlah	2,833,033	9,009,609

Setelah penyelesaian suatu proyek, masih perlu dilakukan sejumlah pengujian-pengujian sebelum proyek pekerjaan dalam pelaksanaan menerima sertifikat laik operasi.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan masing-masing sebesar Rp75.179 dan Rp88.999.

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)

The revaluation surplus, net of applicable deferred income taxes, has been credited to other comprehensive income and is presented as a of "property, plant and equipment revaluation surplus" in the consolidated statement of changes in equity.

If the Group did not apply the revaluation model, the net carrying value of the property, plant and equipment as at 31 December 2024 and 2023 would have amounted to Rp58,821,790 and Rp58,265,042, respectively.

The movements of property, plant and equipment revaluation surplus which are presented in the consolidated statement of changes in equity are as follows:

Balance at beginning of year
Increase on revaluation surplus
Reclassification of revaluation surplus to retained earnings
Reclassification of revaluation surplus to accumulated depreciation from assets not used in operations
Related income tax benefit (Note 26d)
Balance at end of year

Construction in progress

This account represents costs incurred in relation to the construction and renovation/betterment of power supply facilities, as follows:

Power plants:
Gas power
Steam power
Hydro power
Gas/steam power
Diesel power
Geothermal power
Supporting function
Total

After completion of a project, there are still a number of tests that need to be performed before the projects are certified for operations.

As at 31 December 2024 and 2023, the borrowing costs that were capitalised to construction in progress were Rp75,179 and Rp88,999, respectively.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/62 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

12. ASET TETAP (lanjutan)

Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkat bunga rata-rata tertimbang dari pinjaman adalah sebesar 6,53% pada tahun 2024 (2023: 5,53%).

Aset tidak digunakan dalam operasi

Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap yang akan direlokasi, yang sementara belum digunakan dalam operasi, aset tetap akan diperbaiki, dan aset tetap yang akan dihapus.

Pada tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat aset tidak beroperasi yang dijual. Pada tanggal 31 Desember 2023, aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi dijual dengan harga jual bersih Rp4.228, dengan keuntungan penjualan aset tersebut sebesar Rp4.228 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Berdasarkan penelaahan manajemen, manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai Grup adalah cukup untuk menutupi kemungkinan adanya kerugian yang timbul dari nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Borrowing costs were capitalised at the weighted average rate of borrowings of 6.53% in 2024 (2023: 5.53%).

Assets not used in operations

Assets not used in operations comprised property, plant and equipment to be relocated, those temporarily not in used in operations, assets to be repaired, and assets to be disposed of.

As at 31 December 2024, there were no assets not used in operations were sold. As at 31 December 2023, certain assets not used in operations were sold with net selling price Rp4,228, with gain on sales of assets amounting to Rp4,228 for the year ended 31 December 2023.

Based on management's assessment, management is of the opinion that the provision for impairment is adequate to cover the possible impairment losses of the carrying amount of property, plant and equipment as at 31 December 2024 and 2023.

13. ASET HAK GUNA

13. RIGHT-OF-USE ASSETS

	2024				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions *)	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan					Acquisition cost
Hak atas tanah	2,435,930	1,403	(178,874)	2,258,459	Land rights
Bangunan umum, waduk dan prasarana	81,832	-	(1,972)	79,860	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	4,787,976	-	(4)	4,787,972	Installations and power plants
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	-	-	-	Telecommunication and data processing equipment
Perlengkapan umum	3,784	540	(2,543)	1,781	General equipment
Kendaraan bermotor	301,148	162,383	(118,598)	344,933	Motor vehicles
Jumlah	7,610,670	164,326	(301,991)	7,473,005	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Hak atas tanah	218,744	137,796	(1,405)	355,135	Land rights
Bangunan umum, waduk dan prasarana	56,913	20,588	2,328	79,829	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	1,720,709	468,759	(1,754)	2,187,714	Installations and power plants
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	-	-	-	Telecommunication and data processing equipment
Perlengkapan umum	2,610	941	(3,076)	475	General equipment
Kendaraan bermotor	165,718	130,365	(117,424)	178,659	Motor vehicles
Jumlah	2,164,694	758,449	(121,331)	2,801,812	Total
Jumlah tercatat bersih	5,445,976			4,671,193	Net carrying value

*) termasuk modifikasi kontrak sewa di tahun berjalan/including modifications to lease contracts in the current year

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/63 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

13. ASET HAK GUNA (lanjutan)

13. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

	2023			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan				Acquisition cost
Hak atas tanah	790,560	1,645,370	-	2,435,930
Bangunan umum, waduk dan prasarana	92,711	-	(10,879)	81,832
Instalasi dan mesin pembangkit	4,650,919	1,041,112	(904,055)	4,787,976
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	213	14	(227)	-
Perlengkapan umum	2,924	860	-	3,784
Kendaraan bermotor	234,725	117,562	(51,139)	301,148
Jumlah	5,772,052	2,804,918	(966,300)	7,610,670
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Hak atas tanah	64,038	154,706	-	218,744
Bangunan umum, waduk dan prasarana	36,518	20,613	(218)	56,913
Instalasi dan mesin pembangkit	2,103,783	505,180	(888,254)	1,720,709
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	71	78	(149)	-
Perlengkapan umum	1,971	639	-	2,610
Kendaraan bermotor	118,206	94,591	(47,079)	165,718
Jumlah	2,324,587	775,807	(935,700)	2,164,694
Jumlah tercatat bersih	3,447,465			Net carrying value

Beban penyusutan untuk aset hak guna disajikan sebagai bagian dari beban usaha dan dicatat dalam laba rugi sebesar Rp760.877 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (2023: Rp775.807).

Depreciation expense for right-of-use assets was presented as part of operating expenses and is recognised in profit or loss amounting to Rp760,877 for the year ended 31 December 2024 (2023: Rp775,807).

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup telah mereklasifikasi aset hak guna ke aset tetap sebesar Rp21.414 (Catatan 12).

As of 31 December 2023, the Group has reclassified the right-of-use assets to property, plant and equipment amounted to Rp21,414 (Note 12).

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset hak guna secara signifikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Based on management's review, there are no events or changes in circumstances that indicate a significant decline in the value of the right-of-use assets on 31 December 2024 and 2023.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/64 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

The details of investments in associates and joint ventures are as follows:

Entitas/Entity	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Tahun operasi/ Commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	
				2024	2023
<u>Entitas asosiasi/Associates</u>					
PT Indo Pusaka Berau ("IPB")	Berau	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2005	46.53	46.53
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang ("PLNSC")	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa, <i>engineering</i> supply chain dan konsultasi di bidang ketenagalistrikan/ Operation and services trading, <i>engineering</i> supply chain and consultation in the electricity sector	2018	49.00	49.00
PT Trina Mas Agra Indonesia ("TMAI")	Kendal	Manufaktur solar PV/ Solar PV Manufacture	*)	25.00	25.00
<u>Ventura bersama/Joint ventures</u>					
PT Rajamandala Electric Power ("REP")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2019	51.00	51.00
PT Perta Daya Gas ("PDG")	Jakarta	Transportasi, penyimpanan dan regasifikasi <i>liquefied natural gas</i> ("LNG")/ Transportation, storage and regasification of LNG	2015	-	35.00
PT GCL Indotenaga ("GCL")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2021	35.00	35.00
PT Indo Raya Tenaga ("IRT")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	51.00	51.00
PT Maxpower Cogindo Batam ("MCB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik, aktivitas penunjang kelistrikan, perdagangan mesin, suku cadang dan perlengkapannya/ Electricity supplier, electrical support activities, sale of machinery, spare parts and accessories	2022	30.00	30.00
PT Indo Acwa Tenaga Saguling ("IATS") ^{a)}	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	51.00	-
PT Minahasa Brantas Energi ("MBE") ^{a)}	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	51.00	-
PT Indo Acwa Tenaga Singkarak ("IATSing") ^{a)}	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	51.00	-

*) Dalam tahap pengembangan/In development stage

^{a)} Diakuisisi pada tahun 2024/Acquired in 2024

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Grup dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar dikutip yang tersedia untuk sahamnya.

All associates and joint ventures are recorded by the Group using the equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for their shares.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama.

As at 31 December 2024 and 2023, management believes that there is no restriction and significant risk regarding the investments in associates and joint ventures.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/65 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)

14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURES (continued)

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura
bersama adalah sebagai berikut:

The movements in investments in associates and
joint ventures were as follows:

2024							
Jumlah tercatat/ Carrying amount 1 Januari/ January 2024	Penambahan/ Additions	Bagian atas laba bersih/ Share in net income	Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya/ Share of other comprehensive income	Pengurangan/ Deduction	Dividen/ Dividends	Jumlah tercatat/ Carrying amount 31 Desember/ December 2024	
Entitas asosiasi							Associates
IPB	126,174	-	(52,088)	-	-	74,086	IPB
PLNSC	141,576	-	32,948	-	-	174,524	PLNSC
TMAI	30,468	96,627	(20,781)	-	-	106,314	TMAI
Subjumlah	298,218	96,627	(39,921)	-	-	354,924	Subtotal
Ventura bersama							Joint ventures
REP	146,743	-	(10,578)	6,307	-	142,472	REP
PDG	79,208	-	14,289	-	(93,497)	-	PDG
GCL	854,342	-	146,886	107,347	(160,001)	948,574	GCL
IRT	6,444,894	-	931,190	281,605	-	7,657,689	IRT
MCB	12,290	-	(366)	-	-	11,924	MCB
IATS	-	10,710	(6,236)	350	-	4,824	IATS
MBE	-	32,283	3	-	-	32,286	MBE
IATSing	-	10,710	-	-	-	10,710	IATSing
Subjumlah	7,537,477	53,703	1,075,188	395,609	(160,001)	8,808,479	Subtotal
Jumlah	7,835,695	150,330	1,035,267	395,609	(160,001)	9,163,403	Total

2023							
Jumlah tercatat/ Carrying amount 1 Januari/ January 2023	Penambahan/ Additions	Bagian atas laba bersih/ Share in net income	Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya/ Share of other comprehensive income	Dividen/ Dividends		Jumlah tercatat/ Carrying amount 31 Desember/ December 2023	
Entitas asosiasi							Associates
IPB	122,602	-	5,453	-	(1,881)	126,174	IPB
PLNSC	118,178	-	23,398	-	-	141,576	PLNSC
TMAI	-	31,000	(532)	-	-	30,468	TMAI
Subjumlah	240,780	31,000	28,319	-	(1,881)	298,218	Subtotal
Ventura bersama							Joint ventures
REP	142,903	-	5,180	(1,340)	-	146,743	REP
PDG	62,992	-	16,216	-	-	79,208	PDG
GCL	796,983	-	117,796	(7,846)	(52,591)	854,342	GCL
IRT	5,693,459	-	940,566	(189,131)	-	6,444,894	IRT
MCB	9,521	-	2,769	-	-	12,290	MCB
Subjumlah	6,705,858	-	1,082,527	(198,317)	(52,591)	7,537,477	Subtotal
Jumlah	6,946,638	31,000	1,110,846	(198,317)	(54,472)	7,835,695	Total

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/66 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) 14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada 31 Desember 2024 dan 2023 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

The following table contains the summarised financial information for associates and joint ventures as at 31 December 2024 and 2023 which are accounted for using the equity method.

Entitas Asosiasi

Associates

	2024				
	IPB	PLNSC	TMAI	Jumlah/Total	
Kas dan setara kas	8,727	97,192	28,880	134,799	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	148,671	860,028	293,016	1,301,715	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	157,398	957,220	321,896	1,436,514	Total current assets
Aset tidak lancar	216,246	9,245	642,048	867,539	Non-current assets
Liabilitas keuangan (tidak termasuk utang usaha)	1,226	195,905	33,897	231,028	Financial liabilities (excluding trade payables)
Liabilitas lancar lainnya (termasuk utang usaha)	119,936	392,455	21,741	534,132	Other current liabilities (including trade payables)
Jumlah liabilitas lancar	121,162	588,360	55,638	765,160	Total current liabilities
Liabilitas keuangan	494	-	-	494	Financial liabilities
Liabilitas tidak lancar lainnya	14,569	490	483,051	498,110	Other non-current liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	15,063	490	483,051	498,604	Total non-current liabilities
Aset bersih	237,419	377,615	425,255	1,040,289	Net assets
% kepemilikan	46.53%	49%	25%	-	% of ownership
Bagian Grup atas aset bersih entitas asosiasi	110,471	185,032	106,314	401,817	The Group's share of the net assets of associates
Penyesuaian metode ekuitas	(36,385)	(10,508)	-	(46,893)	Adjustments of equity methods
Jumlah tercatat	74,086	174,524	106,314	354,924	Total carrying value
Pendapatan	140,021	1,568,804	-	1,708,825	Revenue
Beban pokok pendapatan	-	(1,360,814)	-	(1,360,814)	Cost of revenue
Beban usaha	(183,079)	(54,563)	(87,239)	(324,881)	Operating expenses
Penghasilan keuangan	59	773	965	1,797	Finance income
Beban keuangan	-	-	-	-	Finance costs
Beban lain-lain, bersih	(78,370)	(48,569)	3,151	(123,788)	Other expenses, net
Beban pajak penghasilan	9,425	(38,390)	-	(28,965)	Income tax expense
Laba/(rugi) tahun berjalan	(111,944)	67,241	(83,123)	(127,826)	Profit/(loss) for the year
% kepemilikan	46.53%	49%	25%	-	% of ownership
Bagian Grup atas laba/(rugi) bersih entitas asosiasi	(52,088)	32,948	(20,781)	(39,921)	The Group's share of the net income/(loss) of associates

	2023				
	IPB	PLNSC	TMAI	Jumlah/Total	
Kas dan setara kas	2,346	178,649	118,203	299,198	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	53,408	731,680	1,727	786,815	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	55,754	910,329	119,930	1,086,013	Total current assets
Aset tidak lancar	228,048	15,135	1,973	245,156	Non-current assets
Liabilitas keuangan (tidak termasuk utang usaha)	-	232,233	31	232,264	Financial liabilities (excluding trade payables)
Liabilitas lancar lainnya (termasuk utang usaha)	7,746	402,084	-	409,830	Other current liabilities (including trade payables)
Jumlah liabilitas lancar	7,746	634,317	31	642,094	Total current liabilities
Liabilitas keuangan	4,890	-	-	4,890	Financial liabilities
Liabilitas tidak lancar lainnya	-	2,216	-	2,216	Other non-current liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	4,890	2,216	-	7,106	Total non-current liabilities
Aset bersih	271,166	288,931	121,872	681,969	Net assets
% kepemilikan	46.53%	49.00%	25.00%	-	% of ownership
Bagian Grup atas aset bersih entitas asosiasi	126,174	141,576	30,468	298,218	The Group's share of the net assets of associates

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES**Lampiran 5/67 Schedule****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024****14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)****Entitas Asosiasi (lanjutan)****Associates (continued)**

	2023				
	IPB	PLNSC	TMAI	Jumlah/Total	
Pendapatan	100,609	864,119	-	964,728	Revenue
Beban pokok pendapatan	-	(748,203)	-	(748,203)	Cost of revenue
Beban usaha	(85,459)	(42,137)	(2,141)	(129,737)	Operating expenses
Penghasilan keuangan	153	475	13	641	Finance income
Beban keuangan	(149)	-	(1)	(150)	Finance costs
Beban lain-lain, bersih	(131)	(12,201)	-	(12,332)	Other expenses, net
Beban pajak penghasilan	(3,304)	(14,302)	-	(17,606)	Income tax expense
Laba/(rugi) tahun berjalan	11,719	47,751	(2,129)	57,341	Profit/(loss) for the year
% kepemilikan	46.53%	49.00%	25.00%	-	% of ownership
Bagian Grup atas laba bersih dari entitas asosiasi	5,453	23,398	(532)	28,319	The Group's share of the net income of associates
Dividen yang diterima dari entitas asosiasi	(1,881)	-	-	(1,881)	Dividends received from associates

Ventura bersama**Joint ventures**

	2024									
	REP	PDG*	IATS	MBE	IATSing	GCL	IRT	MCB	Jumlah/Total	
Kas dan setara kas	53,679	-	73,343	32,323	21,001	453,960	1,206,361	2,716	1,843,383	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	109,408	-	-	11	-	452,459	25,818	62,274	649,970	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	163,087	-	73,343	32,334	21,001	906,419	1,232,179	64,990	2,493,353	Total current assets
Aset tidak lancar	2,381,243	-	-	31,209	-	5,753,034	55,507,022	364,487	64,036,995	Non-current assets
Liabilitas keuangan (tidak termasuk utang usaha)	99,931	-	9,568	9	-	386,043	368,435	4,062	868,048	Financial liabilities (excluding trade payables)
Liabilitas lancar lainnya (termasuk utang usaha)	7,189	-	1,330	-	1	278,023	266,549	25,476	578,568	Other current liabilities (including trade payables)
Jumlah liabilitas lancar	107,120	-	10,898	9	1	664,066	634,984	29,538	1,446,616	Total current liabilities
Liabilitas keuangan	-	-	-	-	-	-	38,271,749	-	38,271,749	Financial liabilities
Liabilitas tidak lancar lainnya	2,132,052	-	52,986	228	-	3,285,176	2,817,391	356,081	8,643,914	Other non-current liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	2,132,052	-	52,986	228	-	3,285,176	41,089,140	356,081	46,915,663	Total non-current liabilities
Aset bersih	305,158	-	9,459	63,306	21,000	2,710,211	15,015,077	43,858	18,168,069	Net assets
% kepemilikan	51%	0%	51%	51%	51%	35%	51%	30%	-	% of ownership
Bagian Grup atas aset bersih ventura bersama	155,631	-	4,824	32,286	10,710	948,574	7,657,689	13,157	8,822,871	The Group's share in the net assets of joint ventures
Penyesuaian metode ekuitas	(13,159)	-	-	-	-	-	-	(1,233)	(14,392)	Adjustments of equity methods
Jumlah tercatat	142,472	-	4,824	32,286	10,710	948,574	7,657,689	11,924	8,808,479	Total carrying value
Pendapatan	204,031	191,670	-	-	-	1,772,573	8,163,534	61,056	10,392,864	Revenue
Beban pokok pendapatan	(13,196)	(77,637)	-	(41)	-	(1,079,349)	(3,490,907)	(24,853)	(4,685,983)	Cost of revenue
Beban usaha	(34,442)	(54,446)	(10,995)	(13)	-	(48,332)	(42,346)	(36,607)	(227,181)	Operating expenses
Penghasilan keuangan	-	609	89	-	-	3,968	473	-	5,139	Finance income
Beban keuangan	(131,923)	(4,211)	(1,301)	-	-	(229,186)	(2,117,346)	-	(2,483,967)	Finance costs
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	(45,211)	2,870	(21)	59	-	-	(66,971)	-	(109,274)	Other income/(expenses), net
Beban pajak penghasilan	-	(18,029)	-	-	-	-	(620,574)	(815)	(639,418)	Income tax expense
Laba/(rugi) tahun berjalan	(20,741)	40,826	(12,228)	5	-	419,674	1,825,863	(1,219)	2,252,180	Profit/(loss) for the year
% kepemilikan	51%	35%	51%	51%	51%	35%	51%	30%	-	% of ownership
Bagian Grup atas laba/(rugi) bersih ventura bersama	(10,578)	14,289	(6,236)	3	-	146,886	931,190	(366)	1,075,188	The Group's share in income/(loss) of joint ventures
Laba komprehensif lainnya	12,366	-	687	-	-	306,706	552,167	-	871,926	Other comprehensive income
% kepemilikan	51%	35%	51%	51%	51%	35%	51%	30%	-	% of ownership
Bagian Grup atas laba komprehensif lainnya ventura bersama	6,307	-	350	-	-	107,347	281,605	-	395,609	The Group's share of other comprehensive income of joint ventures
Dividen yang diterima entitas dari ventura bersama	-	-	-	-	-	(160,001)	-	-	(160,001)	Dividends received from joint ventures

*) Laba tahun berjalan sampai dengan tanggal pelepasan kepemilikan/Profit for the year up to the date of divestment

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/68 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

Ventura bersama (lanjutan)

**14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURES (continued)**

Joint ventures (continued)

	2023					Jumlah /Total	
	REP	PDG	GCL	IRT	MCB		
Kas dan setara kas	49,536	27,253	418,394	509,503	4,002	1,008,688	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	104,431	86,541	1,317,750	28,287	28,520	1,565,529	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	153,967	113,794	1,736,144	537,790	32,522	2,574,217	Total current assets
Aset tidak lancar	2,331,286	283,279	4,797,380	45,536,418	403,380	53,351,743	Non-current assets
Liabilitas keuangan (tidak termasuk utang usaha)	117,907	60,989	910,981	1,199,739	26,939	2,316,555	Financial liabilities (excluding trade payables)
Liabilitas lancar lainnya (termasuk utang usaha)	544	104,216	126,344	136,834	1,829	369,767	Other current liabilities (including trade payables)
Jumlah liabilitas lancar	118,451	165,205	1,037,325	1,336,573	28,768	2,686,322	Total current liabilities
Liabilitas keuangan	1,569,379	360	2,887,608	29,992,545	293,232	34,743,124	Financial liabilities
Liabilitas tidak lancar lainnya	509,692	5,199	167,614	2,108,043	72,934	2,863,482	Other non-current liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	2,079,071	5,559	3,055,222	32,100,588	366,166	37,606,606	Total non-current liabilities
Aset bersih	287,731	226,309	2,440,977	12,637,047	40,968	15,633,032	Net assets
% kepemilikan	51.00%	35.00%	35.00%	51.00%	30.00%	-	% of ownership
Bagian Grup atas aset bersih ventura bersama	146,743	79,208	854,342	6,444,894	12,290	7,537,477	The Group's share in the net assets of joint ventures
Pendapatan	200,962	214,098	1,670,718	11,016,251	63,507	13,165,536	Revenue
Beban pokok pendapatan	(41,328)	(88,333)	(965,577)	(7,077,375)	(9,765)	(8,182,378)	Cost of revenue
Beban usaha	-	(55,167)	(44,086)	(36,031)	(5,179)	(140,463)	Operating expenses
Penghasilan keuangan	-	704	6,976	913,980	44	921,704	Finance income
Beban keuangan	(134,003)	(10,939)	(296,758)	(2,589,953)	(39,238)	(3,070,891)	Finance costs
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	(66)	5,927	(3,794)	19,212	2,416	23,695	Other income/(expenses), net
Beban pajak penghasilan	(15,409)	(19,958)	(30,918)	(401,836)	(2,554)	(470,675)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	10,156	46,332	336,561	1,844,248	9,231	2,246,528	Profit for the year
% kepemilikan	51.00%	35.00%	35.00%	51.00%	30.00%	-	% of ownership
Bagian Grup atas laba bersih ventura bersama	5,180	16,216	117,796	940,566	2,769	1,082,527	The Group's share in net income of joint ventures
Rugi komprehensif lainnya	(2,627)	-	(22,416)	(370,845)	-	(395,888)	Other comprehensive loss
% kepemilikan	51.00%	35.00%	35.00%	51.00%	30.00%	-	% of ownership
Bagian Grup atas rugi komprehensif lainnya ventura bersama	(1,340)	-	(7,846)	(189,131)	-	(198,317)	The Group's share of other comprehensive loss of joint ventures
Dividen yang diterima dari entitas ventura bersama	-	-	(52,591)	-	-	(52,591)	Dividends received from joint ventures

Investasi pada entitas di atas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Grup. Manajemen meyakini bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai.

The investments in the above entities are held primarily for long-term growth potential, since these entities are engaged in the same electricity industry as the Group. Management believes that there is no indication of impairment.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/69 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. UTANG USAHA

Akun ini merupakan utang pembelian bahan bakar, barang dan jasa sebagai berikut:

15. TRADE PAYABLES

This account represents payables arising from purchases of fuel, other goods and services as follows:

	2024	2023	
Pihak berelasi	8,505,425	5,749,847	Related parties
Pihak ketiga	4,586,696	3,911,961	Third parties
Jumlah	13,092,121	9,661,808	Total

Lihat Catatan 27 untuk informasi rincian transaksi dan saldo pihak berelasi.

Refer to Note 27 for information on the details of transactions and balances with related parties.

16. LIABILITAS SEWA

Nilai tunai pembayaran minimum atas liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

16. LEASE LIABILITIES

The present value of minimum lease payments for the lease liabilities as at 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			Minimum lease payments due:
Tidak lebih dari satu tahun	1,073,100	1,103,872	Not later than a year
Antara lebih dari satu tahun sampai tiga tahun	1,731,503	2,042,018	Later than one year and not later than three years
Antara lebih dari tiga tahun sampai lima tahun	1,338,704	1,439,192	Later than three years and not later than five years
Lebih dari lima tahun	4,408,703	5,000,419	Later than five years
Jumlah	8,552,010	9,585,501	Total
Dikurangi: bunga	(4,146,763)	(4,459,295)	Less: interest
Nilai kini pembayaran sewa masa datang	4,405,247	5,126,206	Present value of future minimum lease payments
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(664,061)	(654,594)	Less: current portion
Bagian jangka panjang	3,741,186	4,471,612	Long-term portion

Arus kas keluar untuk seluruh sewa pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.462.792 dan Rp1.265.450.

The cash outflows for all leases in 2024 and 2023 were Rp1,462,792 and Rp1,265,450, respectively.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/70 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS SEWA (lanjutan)

16. LEASE LIABILITIES (continued)

	2024	2023	
Pihak berelasi			Related parties
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo")	1,157,553	1,138,102	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo")
PLN	883,197	1,189,674	PLN
PDG	850,622	990,143	PDG
PT PLN Energi Gas ("PLN EG")	471,881	483,141	PT PLN Energi Gas ("PLN EG")
Subjumlah	3,363,253	3,801,060	Subtotal
Pihak ketiga			Third parties
PT Benoa Gas Terminal	511,638	741,444	PT Benoa Gas Terminal
PT Sumber Petrindo Perkasa	301,528	356,416	PT Sumber Petrindo Perkasa
Lain-lain	228,828	227,286	Others
Subjumlah	1,041,994	1,325,146	Subtotal
Jumlah	4,405,247	5,126,206	Total

Lihat Catatan 27 untuk informasi rincian transaksi dan saldo pihak berelasi.

Refer to Note 27 for information on the details of transactions and balances with related parties.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi grup termasuk menyajikan jumlah berkaitan dengan sewa:

The Group's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income include the following amounts related to leases:

	2024	2023	
Biaya bunga (disajikan sebagai bagian dari biaya keuangan)	468,482	493,380	Interest expense (presented as part of finance costs)
Biaya yang berkaitan dengan pembayaran sewa variabel tidak termasuk dalam kewajiban sewa (disajikan sebagai bagian dari beban usaha)	30,133	17,286	Expenses related to variable leases which are not included as lease liabilities (presented as part of operating expenses)
Biaya terkait sewa jangka pendek (disajikan sebagai bagian dari beban usaha)	36,794	36,447	Expenses related to short-term leases (presented as part of operating expenses)
Biaya yang berkaitan dengan sewa aset bernilai rendah yang bukan merupakan sewa jangka pendek (disajikan sebagai bagian dari beban usaha)	54,121	33,910	Expenses related to low value assets which are not classified as short-term leases (presented as part of operating expenses)

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/71 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

	2024	2023	
Liabilitas diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian:			Liabilities recognised in the consolidated statements of financial position:
Program pensiun manfaat pasti	-	-	Defined benefit pension program
Imbalan pascakerja lainnya	1,728,644	1,658,356	Other post-employment benefits
Imbalan pemeliharaan kesehatan	3,161,807	2,713,585	Health care benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	82,824	72,793	Other long-term benefits
Jumlah	4,973,275	4,444,734	Total
Jumlah bagian jangka panjang	(4,805,593)	(4,221,982)	Total non-current portion
Bagian jangka pendek:			Current portion:
Gaji dan upah	581,454	453,038	Salaries and wages
Liabilitas imbalan kerja	167,682	222,752	Employee benefits
Jumlah bagian jangka pendek	749,136	675,790	Total current portion
Beban diakui di laba rugi: (Catatan 25)			Expenses recognised in profit or loss: (Note 25)
Program pensiun manfaat pasti	11,713	13,499	Defined benefit pension program
Imbalan pascakerja lainnya	219,461	210,536	Other post-employment benefits
Imbalan pemeliharaan kesehatan	241,584	281,003	Health care benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	31,605	53,318	Other long-term benefits
Jumlah	504,363	558,356	Total
Pengukuran kembali program manfaat pasti diakui di penghasilan komprehensif lain: (Catatan 26d)			Remeasurement on defined benefit recognised in other comprehensive income: (Note 26d)
<u>Imbalan pascakerja</u>			<u>Post-employment benefits</u>
Program pensiun manfaat pasti	8,259	(36,181)	Defined benefit pension program
Imbalan pascakerja lainnya	(22,211)	62,244	Other post-employment benefits
Imbalan pemeliharaan kesehatan	288,738	(17,721)	Health care benefits
Jumlah	274,786	8,342	Total

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan

Post-employment benefits obligations

Program pensiun manfaat pasti

Defined benefit pension program

Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

The Group has established a defined benefit pension program covering all of its eligible permanent employees. This plan provides benefits based on the basic pension income and the period of employment.

Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

This pension plan is managed by Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), a related party, whose deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated 15 May 1997.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 19,45% dari penghasilan dasar pensiun (2023: 6,00% dan 19,45%).

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer, which are 6,00% and 19,45% from basic pension income, respectively (2023: 6.00% and 19.45%).

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/72 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Post-employment benefits obligations (continued)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Defined benefit pension program (continued)

Jumlah liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

The liabilities recognised in the consolidated statement of financial position as at 31 December 2024 and 2023 were determined as follows:

	2024	2023	
Nilai kini kewajiban yang didanai	1,060,760	1,001,624	Present value of funded obligations
Nilai wajar aset program	(1,096,524)	(1,050,815)	Fair value of plan assets
Jumlah	(35,764)	(49,191)	Total
Dampak batas atas aset	35,764	49,191	Impact of asset ceiling
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	-	-	Liability in the consolidated statement of financial position
Mutasi kewajiban program pensiun manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:			The movements in the defined benefit pension program during the years were as follows:
	2024	2023	
Saldo awal	1,001,624	968,530	Beginning balance
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	18,490	17,533	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	-	Past service cost
Biaya bunga	64,131	66,814	Interest expense
	82,621	84,347	
(Keuntungan)/kerugian aktuarial dari perubahan:			Actuarial (gains)/losses from changes in:
Asumsi demografik	(2,423)	-	Demographic assumptions
Asumsi keuangan	(8,982)	7,289	Financial assumptions
Asumsi lainnya	232	-	Other assumptions
Penyesuaian atas Pengalaman	59,286	9,590	Experience adjustments
	48,113	16,879	
Pembayaran manfaat	(71,598)	(68,132)	Benefit payments
Saldo akhir balance	1,060,760	1,001,624	Ending

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/73 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Post-employment benefits obligations (continued)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Defined benefit pension program (continued)

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movements of fair value of plan assets during the years were as follows:

	2024	2023	
Pada awal tahun	1,050,815	926,804	At beginning of the year
Dikreditkan ke laba rugi:			Credited to profit or loss:
Iuran pekerja	5,917	6,118	Employees' contributions
Imbal hasil atas aset program	68,257	64,730	Return on plan assets
	74,174	70,848	
Keuntungan aktuarial dari:			Actuarial gains from changes in:
Pengukuran kembali imbal hasil atas aset	23,162	102,251	Remeasurement of return on plan assets
Iuran pemberi kerja	19,971	19,044	Employer's contributions
Pembayaran manfaat	(71,598)	(68,132)	Benefit payments
Pada akhir tahun	1,096,524	1,050,815	At the end of the year

Mutasi program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the defined benefits pension program are as follows:

	2024	2023	
Pada awal tahun	-	41,726	At beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	18,490	17,533	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	-	Past service cost
Biaya bunga	64,131	66,814	Interest expense
Iuran pekerja	(5,917)	(6,118)	Employee's contributions
Imbal hasil atas aset program	(68,257)	(64,730)	Return on plan assets
Iuran pemberi kerja	(19,971)	(19,044)	Employer's contributions
Bunga atas dampak batas atas aset	3,266	-	Interest from asset ceiling
(Keuntungan)/kerugian aktuarial dari perubahan:			Actuarial (gains)/losses from changes in:
Asumsi demografik	(2,423)	-	Demographic assumptions
Asumsi keuangan	(8,982)	7,289	Financial assumptions
Asumsi lainnya	232	-	Other assumptions
Penyesuaian atas pengalaman	59,286	9,590	Experience adjustments
Pengukuran kembali imbal hasil atas aset	(23,162)	(102,251)	Remeasurement of return on plan assets
Dampak pembatasan aset	(16,693)	49,191	Impact of asset ceiling
Pada akhir tahun	-	-	At the end of the year

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/74 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Post-employment benefits obligations (continued)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Defined benefit pension program (continued)

Aset program terdiri dari:

Plan assets comprise the following:

	2024		2023		
	Jumlah/ Total	%	Jumlah/ Total	%	
Instrumen utang	572,499	52.21%	582,265	55.41%	Debt instruments
Instrumen ekuitas	243,220	22.18%	217,078	20.66%	Equity instruments
Properti	119,034	10.86%	114,460	10.89%	Properties
Kas dan setara kas	138,736	12.65%	107,876	10.27%	Cash and cash equivalents
Lain-lain	23,035	2.10%	29,136	2.77%	Other
Jumlah	1,096,524	100.00%	1,050,815	100.00%	Total

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2024	2023	
Table mortalitas			Mortality table
Program pensiun manfaat pasti			Defined benefit pension program
Aktif	CSO-58	CSO-58	Active
Pasif	AMT-49	CSO-58	Passive
Tingkat diskonto	7.09%	6.65%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5.00%	5.00%	Salary increase rate per annum
Usia pensiun normal (tahun)	56	56	Normal retirement age (years)

Sensitivitas dari kewajiban program pensiun manfaat pasti untuk program pensiun terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit pension program obligations to changes in the principle actuarial assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban program pensiun manfaat pasti/ Impact on defined benefit pension program obligations			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1.00%	(20,375)	22,640	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1.00%	22,866	(20,767)	Salary increase rate

Imbalan pascakerja lainnya

Other post-employment benefits

Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Grup menyediakan imbalan pesangon, penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan, tunjangan kecelakaan dinas dan bantuan kematian bagi pegawai yang memenuhi syarat.

In addition to the pension plan and health care benefits, the Group also provides unfunded severance benefits, completion of employment awards, disability benefit and death benefits for eligible employees.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/75 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Post-employment benefits obligations (continued)

Imbalan pascakerja lainnya (lanjutan)

Other post-employment benefits (continued)

Mutasi kewajiban manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the defined benefit obligation during the years were as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	1,658,356	1,463,033	Beginning balance
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Biaya jasa lalu-vested	-	-	Past service cost-vested
Biaya jasa kini	111,271	105,732	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	-	Past service cost
Biaya bunga	108,190	104,804	Interest expense
	219,461	210,536	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			Charged to other comprehensive income:
(Keuntungan)/kerugian aktuarial dari perubahan:			Actuarial (gains)/losses from changes in:
Asumsi demografik	(9,677)	-	Demographic assumptions
Asumsi keuangan	(46,959)	70,650	Financial assumptions
Asumsi lainnya	(7,318)	-	Other assumptions
Penyesuaian atas pengalaman	41,743	(8,406)	Experience adjustments
	(22,211)	62,244	
Pembayaran manfaat	(126,962)	(77,457)	Benefit payments
Saldo akhir	1,728,644	1,658,356	Ending balance

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2024	2023	
Tabel mortalitas:			Mortality table:
Imbalan pascakerja lainnya	TMI-IV 2019 Unisex	CSO-58	Other post-employment benefits
Tingkat diskonto	7.12% - 7.14%	6.73% - 7.05%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	3.00% - 7.12%	7.12%	Salary increase rate per annum
Usia pensiun normal (tahun)	56	56	Normal retirement age (years)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pascakerja lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other post-employment benefits obligations to changes in the principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pascakerja lainnya/ Impact on other post-employment benefits obligations			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1.00%	(158,306)	187,698	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1.00%	191,099	(164,093)	Salary increase rate

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/76 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Post-employment benefits obligations (continued)

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Health care benefits

Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Grup menyediakan imbalan program kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

In addition to the pension plan managed by DP-PLN, the Group also provides unfunded health care benefit plans for its pensioners and their eligible dependents.

Grup memiliki beberapa skema imbalan pemeliharaan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema imbalan pensiun.

The Group has several post-employment health care benefit schemes. The method of accounting, assumptions and the frequency of valuations are similar to those used for pension benefit schemes.

Mutasi kewajiban imbalan pemeliharaan kesehatan selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movements of health care benefits obligations during the years were as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	2,713,585	2,519,040	Beginning balance
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Biaya bunga atas kewajiban	186,276	188,835	Interest expense on liabilities
Biaya jasa kini	55,308	92,168	Current service cost
	<u>241,584</u>	<u>281,003</u>	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			Charged to other comprehensive income
(Keuntungan)/kerugian aktuarial dari perubahan:			Actuarial (gains)/losses from changes in:
Asumsi demografik	290,948	-	Demographic assumptions
Asumsi keuangan	540,362	167,416	Financial assumptions
Asumsi lainnya	102,796	-	Other assumptions
Penyesuaian atas pengalaman	<u>(645,368)</u>	<u>(185,137)</u>	Experience adjustments
	<u>288,738</u>	<u>(17,721)</u>	
Pembayaran manfaat	<u>(82,100)</u>	<u>(68,737)</u>	Benefit payments
Saldo akhir	<u>3,161,807</u>	<u>2,713,585</u>	Ending balance

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2024	2023	
Tabel mortalitas:			Mortality table:
Imbalan pemeliharaan kesehatan			Health care benefits
Aktif	CSO-58	CSO-58	Active
Pasif	ANN-49	CSO-58	Passive
Tingkat diskonto	7.14%	7.60%	Discount rate
Tingkat kenaikan biaya kesehatan jangka panjang	6.00%	5.35%	Long-term increase rate in health cost
Usia pensiun normal (tahun)	56	56	Normal retirement age (years)

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/77 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Post-employment benefits obligations (continued)

Imbalan pemeliharaan kesehatan (lanjutan)

Health care benefits (lanjutan)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan untuk pemeliharaan kesehatan terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the health care benefit obligations to changes in the principal actuarial assumptions was as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pemeliharaan kesehatan/ Impact on health care benefit obligations			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1.00%	(434,757)	561,665	Discount rate
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	1.00%	562,355	(442,449)	Increase in health cost rate

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term benefits

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa uang cuti besar dan manfaat penghargaan winduan bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.

The Group provides other long-term employee benefits such as long service leave and an eight-year service awards for the qualifying employees.

Perhitungan aktuarial atas imbalan pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dihitung oleh kantor konsultan aktuarial terdaftar, Kantor Konsultan Aktuarial Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan dalam laporannya masing-masing tertanggal 7 Mei 2025 dan 2 April 2024.

The actuarial calculations of pension benefits, other post-employment benefits, health care benefits and other long-term benefits for the years ended 31 December 2024 and 2023 were calculated by a registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuarial Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan based on its reports dated 7 May 2025 and 2 April 2024.

Mutasi kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the other long-term benefit obligations during the year were as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	72,793	65,730	Beginning balance
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	20,280	18,327	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	-	Past service cost
Biaya bunga	3,013	2,729	Interest expense
(Keuntungan)/kerugian aktuarial dari perubahan:			Actuarial (gains)/losses from changes in:
Asumsi demografik	516	-	Demographic assumptions
Asumsi keuangan	(1,098)	416	Financial assumptions
Asumsi lainnya	(13)	-	Other assumptions
Penyesuaian atas pengalaman	8,907	31,846	Experience adjustments
	31,605	53,318	
Pembayaran manfaat	(21,574)	(46,255)	Benefit payments
Saldo akhir	82,824	72,793	Ending balance

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/78 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Tabel mortalitas	TMI-IV 19	CSO-58
Tingkat diskonto	6.98% - 7.00%	6.43% - 6.52%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	3.00% - 7.12%	7.12%
Usia pensiun normal (tahun)	56	56

Sensitivitas dari kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

Dampak atas kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Impact on other long-term benefits obligations			
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1.00%	(2,106)	2,223
Tingkat kenaikan gaji	1.00%	2,380	(2,294)

Grup terekspos dengan beberapa risiko melalui program manfaat pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset

Kewajiban dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada *Zero Coupon Bond* dari *Indonesia Government Securities Yield Curve* ("IGSYC"). Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Grup menempatkan investasi aset program pada beragam jenis aset investasi agar dapat terdiversifikasi dengan baik sehingga dapat meminimalisir dampak kinerja buruk dari satu aset terhadap seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen utang, meskipun Grup juga berinvestasi pada instrumen ekuitas, properti, reksadana dan kas. Grup meyakini bahwa instrumen utang memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Post-employment benefits obligations (continued)

Other long-term benefits (continued)

The principal actuarial assumptions used were as follows:

Tabel mortalitas	CSO-58	Mortality table
Tingkat diskonto	6.43% - 6.52%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.12%	Salary increase rate per annum
Usia pensiun normal (tahun)	56	Normal retirement age (years)

The sensitivity of the other long-term benefit obligations to changes in the principal actuarial assumptions was as follows:

Dampak atas kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Impact on other long-term benefits obligations			
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1.00%	(2,106)	2,223
Tingkat kenaikan gaji	1.00%	2,380	(2,294)

The Group is exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans and health care benefits. The most significant risks are as follows:

Assets volatility

The liabilities are calculated using a discount rate set with reference to the *Zero Coupon Bond* from *Indonesia Government Securities Yield Curve* ("IGSYC"). If plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

The Group places its investment plan assets in various types of investment assets so that it can be properly diversified to minimise the impact of the poor performance of one asset on all asset groups. The largest proportion of assets investment is invested in debt instruments, although the Group also invests in equity instruments, property, mutual funds and cash. The Group believes that debt instruments offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/79 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Harapan umur hidup

Sebagian besar dari kewajiban manfaat pasti menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas manfaat karyawan.

Rata-rata durasi adalah masing-masing 10,68 tahun untuk program pensiun manfaat pasti, 13,43-26,54 tahun untuk imbalan pascakerja lainnya, 22,32 tahun untuk imbalan pemeliharaan kesehatan dan 3,13-6,13 tahun untuk imbalan jangka panjang lainnya.

Manajemen Grup berpendapat bahwa estimasi liabilitas imbalan pascakerja cukup untuk menutupi semua imbalan yang diatur dalam Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan, PKB atau PP.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Life expectancy

The majority of the defined benefits obligations are to provide benefits for the life of the members, so increases in life expectancy will result in an increase in the employee benefit liabilities.

The weighted average durations are 10.68 years for defined benefit pension program, 13.43-26.54 years for other post-employment benefits, 22.32 years for health care benefits, and 3.13-6.13 years for other long-term benefits, respectively.

The management of the Group believes that the estimated liability provided for post-employment benefits is adequate to cover the requirements of the manpower regulations, CLA or CR.

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits and other long-term benefits is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ Less than a year	1 - 2 tahun/ Between 1 - 2 years	2 - 5 tahun/ Between 2 - 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/Total	
Program pensiun manfaat pasti	74,784	77,729	253,222	3,685,972	4,091,707	Defined benefit pension program
Imbalan pascakerja lainnya	160,206	177,409	640,410	13,946,881	14,924,906	Other post-employment benefits
Imbalan pemeliharaan kesehatan	111,406	119,909	412,144	11,212,218	11,855,677	Health care benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	22,826	22,453	104,958	53,954	204,191	Other long-term liabilities benefits
Jumlah	369,222	397,500	1,410,734	28,899,025	31,076,481	Total

18. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, setelah transaksi diatas, adalah sebagai berikut:

18. CAPITAL STOCK

The shareholders composition of the Company as at 31 December 2024 and 2023, after the above transactions, is as follows:

Pemegang saham/Shareholders	Jumlah Saham/ Number of Shares*)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-in capital
PLN	357,165,633,599	100.00%	178,582,817
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN ("YPK PLN")	1	-	-
Jumlah/Total	357,165,633,600	100.00%	178,582,817

*) Dalam jumlah penuh/In full amount

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/80 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR

19. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pengalihan aset tetap, aset tidak lancar lainnya dan material cadang yang diterima dari PLN	5,503,599	5,503,599	Property, plant and equipment, non-current assets and spare parts transferred by PLN
Pengampunan pajak	10,244	10,244	Tax amnesty
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 6)	(125,382,115)	(125,382,115)	Difference in value from restructuring transaction of entities under common control (Note 6)
Jumlah	<u>(119,868,272)</u>	<u>(119,868,272)</u>	Total

Tambahan modal disetor berasal dari nilai pengalihan aset tetap, aset tidak lancar lainnya dan material cadang sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 yang diterima dari PLN, pemegang saham dari perusahaan adalah sebesar Rp5.503.599.

Additional paid-in capital represents property, plant and equipment, non-current assets and spare parts transferred by PLN, a shareholder, to the Company during 1996 to 2000 amounting to Rp5,503,599.

Pada tahun 2016, tambahan modal disetor berasal dari partisipasi Grup dalam Pengampunan Pajak adalah sebesar Rp10.244.

In 2016, Additional paid-in capital arising from the Group's participation in Tax Amnesty was amounted to Rp10,244.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali di tahun 2023 berasal dari selisih antara nilai imbalan yang dialihkan PLN kepada Perusahaan melalui penerbitan saham sebesar Rp175.974.993 berdasarkan laporan penilaian independen dengan nilai buku aset bersih yang diperoleh sebesar Rp50.592.878 (Catatan 6).

Difference in value from restructuring transactions of entities under common control in 2023 arises from the difference between consideration transferred by PLN to the Company through issuance shares Rp175,974,993 based on an independent valuer's report and the book value of net assets acquired amounting to Rp50,592,878 (Note 6).

20. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

20. DIVIDENDS AND GENERAL RESERVE

A. Dividen

A. Dividends

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2024, Perusahaan mengumumkan total dividen final sebesar Rp7.937.000 (Rp22 per lembar saham - nilai penuh) untuk tahun 2023. Dividen tersebut telah dibayarkan pada tanggal 30 September 2024.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders on 28 June 2024, the Company declared total final dividend of Rp7,937,000 (Rp22 per share - full amount) for the financial year of 2023. The dividend was paid on 30 September 2024.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 13 Juni 2023, Perusahaan mengumumkan total dividen final sebesar Rp5.759.265 (Rp1.104 per lembar saham - nilai penuh) untuk tahun 2022. Dividen tersebut telah dibayarkan pada tanggal 29 September 2023.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders on 13 June 2023, the Company declared total final dividend of Rp5,759,265 (Rp1,104 per share - full amount) for the financial year of 2022. The dividend was paid on 29 September 2023.

Pembayaran dividen kepada PLN dilakukan dengan cara saling hapus terhadap piutang usaha dari PLN. Lihat Catatan 30a untuk informasi transaksi nonkas.

The dividends payments to PLN were made through offsetting against the trade receivables from PLN. Refer to Note 30a for information of non-cash transactions.

B. Cadangan umum

B. General reserve

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan belum membentuk cadangan umum sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Under Indonesian Limited Liability Company Law, the Company is required to establish a statutory reserve amounting to at least 20% of the Company's subscribed and paid-up capital. There is no time limit on the establishment of this reserve. As at 31 December 2024 and 2023, the Company had not yet established its general reserve in accordance with the Limited Liability Company Law.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/81 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PENJUALAN TENAGA LISTRIK

Akun ini merupakan penjualan tenaga listrik kepada PLN.

Lihat Catatan 27 untuk informasi rincian transaksi dengan pihak berelasi.

21. SALES OF ELECTRICITY

This account represents sales of electricity to PLN.

Refer to Note 27 for information on the details of transactions with related parties.

22. PENDAPATAN JASA

Akun ini merupakan pendapatan jasa pemeliharaan dan lainnya yang diperoleh dari pihak berelasi dan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

22. SERVICE REVENUE

This account represents the operating revenues from maintenance services and others, which were obtained from related parties and third parties, with details as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Jasa operasi dan pemeliharaan	1,022,745	653,081	Operation and maintenance services
Lain-lain	591,203	623,738	Others
Jumlah	<u>1,613,948</u>	<u>1,276,819</u>	Total

Lihat Catatan 27 untuk informasi rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 27 for information on the details of transactions with related parties.

23. BEBAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS

23. FUEL AND LUBRICANTS EXPENSES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Bahan bakar minyak			Fuel
Solar High Speed Diesel	6,246,607	3,745,149	Solar High Speed Diesel
Marine Fuel Oil	443,160	370,734	Marine Fuel Oil
Subjumlah	<u>6,689,767</u>	<u>4,115,883</u>	Subtotal
Bahan bakar nonminyak			Non-oil fuel
Batubara	36,634,833	33,832,319	Coal
Gas alam	21,421,331	19,126,959	Natural gas
Panas bumi	4,328,212	4,167,342	Geothermal
Air	127,774	84,171	Water
Subjumlah	<u>62,512,150</u>	<u>57,210,791</u>	Subtotal
Minyak pelumas dan lain-lain	<u>298,843</u>	<u>231,920</u>	Lubricants and others
Jumlah	<u>69,500,760</u>	<u>61,558,594</u>	Total

Lihat Catatan 27 untuk informasi rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 27 for information on the details of transactions with related parties.

24. PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN

24. REPAIRS AND MAINTENANCE

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Jasa kontraktor	4,047,039	3,525,847	Contractor services
Pemakaian suku cadang	1,110,900	1,041,900	Spare parts used
Jumlah	<u>5,157,939</u>	<u>4,567,747</u>	Total

Lihat Catatan 27 untuk informasi rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 27 for information on the details of transactions with related parties.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/82 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. BEBAN KEPEGAWAIAN

25. EMPLOYEE COSTS

	2024	2023	
Tunjangan karyawan	2,765,360	2,543,727	Employee allowances
Gaji	877,372	772,202	Salaries
Imbalan kerja (Catatan 17)	504,363	558,356	Employee benefits (Note 17)
Tunjangan kesehatan	180,812	153,282	Health care benefits
Jumlah	4,327,907	4,027,567	Total

26. PERPAJAKAN

26. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	2024	2023	
Kelebihan pembayaran atas Pajak Penghasilan Badan ("PPH Badan")			Overpayments of Corporate Income Tax ("CIT")
2024	50,664	-	2024
2023	23,434	135,262	2023
2022	-	217,360	2022
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	344,946	252,077	Value Added Tax ("VAT")
Pembayaran di muka atas Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Catatan 26e)	278,801	362,309	Prepayment of Tax Assessment Letters of Underpayment (Note 26e)
Jumlah	697,845	967,008	Total
Dikurangi: bagian lancar	(329,477)	(246,043)	Less: current portion
Bagian tidak lancar	368,368	720,965	Non-current portion

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	2024	2023	
Pajak penghasilan:			Corporate income tax:
Pasal 25/29	50,425	29,541	Article 25/29
2023	1,470,061	-	2023
Pajak lain-lain:			Other taxes:
PPN	365,839	412,896	VAT
Pasal 21	125,280	363,012	Article 21
Pasal 22	63,539	9,127	Article 22
Pasal 23 dan 26	32,291	61,579	Article 23 and 26
Pasal 4 (2)	6,722	36,272	Article 4 (2)
Pasal 15	4,004	3,757	Article 15
Pajak bumi dan bangunan	13	-	Land and building tax
Subjumlah	597,688	886,643	Subtotal
Jumlah	2,118,174	916,184	Total

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

	2024	2023	
Beban pajak kini:			Current tax expense:
Perusahaan			The Company
Tahun berjalan	489,082	-	Current year
Penyesuaian tahun sebelumnya	1,692,160	218,632	Prior year adjustments
Subjumlah	2,181,242	218,632	Subtotal

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/83 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

26. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

	2024	2023	
Entitas anak			Subsidiaries
Tahun berjalan	89,411	69,662	Current year
Subjumlah	89,411	69,662	Subtotal
Beban pajak tangguhan:			Deferred tax expense:
Perusahaan	1,404,358	2,207,141	The Company
Entitas anak	(7,451)	(3,763)	Subsidiaries
Subjumlah	1,396,907	2,203,378	Subtotal
Beban pajak penghasilan konsolidasian	3,667,560	2,491,672	Consolidated income tax expense

Pada tahun 2024, Grup menerima hasil pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan tahun 2022. Grup menerima restitusi pajak sebesar Rp107.903 dari Rp217.360 yang sebelumnya diklaim, dan telah membukukan selisih atas restitusi tersebut sebagai penyesuaian terkait pajak penghasilan tahun sebelumnya sebesar Rp109.457 di laba rugi.

In 2024, the Group received the results of the Corporate Income Tax audit for period 2022. The Group received a tax refund of Rp107,903 from the Rp217,360 previously claimed, and has charged the difference in the restitution as an adjustment related to the prior year income tax adjustment of Rp109,457 in profit or loss.

Pada tahun 2024, Grup menerima hasil pemeriksaan pajak untuk tahun 2023. Grup menerima sebagian dari temuan pajak dan telah membukukan provisi sebagai penyesuaian terkait pajak penghasilan tahun sebelumnya sebesar Rp1.582.703 di laba rugi.

In 2024, the Group received the results of the Corporate Income Tax audit for period 2023. The Group accepted part of the tax findings and has recorded provision as an adjustment related to the prior year income tax of Rp1,582,703 in profit or loss.

Pada tahun 2023, penyesuaian terkait pajak penghasilan tahun sebelumnya merupakan penghapusan jumlah pajak dibayar di muka Pajak Penghasilan Badan tahun 2021.

In 2023, adjustment in respect of the previous year income tax represents write-off prepaid amount of Corporate Income Tax for period 2021.

Pajak atas laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian berbeda dengan jumlah teoritis yang dihitung menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak yang berlaku atas laba masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

The tax on consolidated profit before income tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits of the consolidated subsidiaries as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan	16,763,426	10,680,986	Profit before income tax
Beban pajak menggunakan tarif pajak yang berlaku 22%	3,687,954	2,349,817	Income tax expense calculated at the prevailing tax rate of 22%
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	(227,759)	(244,836)	Share in net income of associates and joint ventures
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(24,080)	(20,616)	Finance income subject to final tax
Imbalan kerja	28,186	25,694	Employee benefits
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan	279,176	10,499	Other non-deductible expenses
Hasil pajak tahun sebelumnya	1,692,160	218,632	Prior year tax result
Penyesuaian pajak tangguhan tahun sebelumnya	(1,768,077)	-	Prior year deferred tax adjustment
Pajak tangguhan atas rugi pajak ke depan yang belum diakui	-	152,482	Unrecognised deferred tax on tax losses carry forward
Beban pajak penghasilan	3,667,560	2,491,672	Income tax expense

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/84 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

26. TAXATION (continued)

d. Pajak tangguhan

d. Deferred tax

	2024				
	1 Januari/ January 2024	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited/ (charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 2024	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Liabilitas imbalan kerja	8,433	1,779	-	10,212	Employee benefits liabilities
Bonus	6,960	3,979	-	10,939	Bonus
Cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha	2,869	2,059	-	4,928	Allowance for ECL of trade receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	22	(4)	-	18	Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence
Aset tetap	3,794	8,713	-	12,507	Property, plant and equipment
Liabilitas sewa	162	(153)	-	9	Lease liabilities
Aset pajak tangguhan akhir tahun	22,240	16,373	-	38,613	Deferred tax assets at the end of the year
Liabilitas pajak tangguhan					Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja	967,647	54,483	60,453	1,082,583	Employee benefits liabilities
Bonus	98,151	15,580	-	113,731	Bonus
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	75,762	6,415	-	82,177	Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence
Aset tetap	(18,959,452)	(1,501,061)	(6,013,588)	(26,474,101)	Property, plant and equipment
Aset keuangan dari konsesi jasa	(17,075)	(2,485)	-	(19,560)	Financial assets of service concession
Liabilitas sewa	(69,561)	10,207	-	(59,354)	Lease liabilities
Kerugian fiskal yang belum digunakan	-	3,581	-	3,581	Unutilised fiscal losses
Liabilitas pajak tangguhan akhir tahun	(17,904,528)	(1,413,280)	(5,953,135)	(25,270,943)	Deferred tax liabilities at the end of the year
Beban pajak tangguhan		(1,396,907)	(5,953,135)		Deferred tax expense
	2023				
	1 Januari/ January 2023	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited/ (charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 2023	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Liabilitas imbalan kerja	7,558	735	140	8,433	Employee benefits liabilities
Bonus	15,959	(8,999)	-	6,960	Bonus
Cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha	4,350	(1,481)	-	2,869	Allowance for ECL of trade receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	17	5	-	22	Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence
Aset tetap	(5,825)	9,619	-	3,794	Property, plant and equipment
Liabilitas sewa	91	71	-	162	Lease liabilities
Aset pajak tangguhan akhir tahun	22,150	(50)	140	22,240	Deferred tax assets at the end of the year

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/85 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

26. TAXATION (continued)

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax (continued)

	2023				
	1 Januari/ January 2023	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited/ (charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 2023	
Liabilitas pajak tangguhan					Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja	892,140	73,812	1,695	967,647	Employee benefits liabilities
Bonus	97,258	893	-	98,151	Bonus
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	28,629	47,133	-	75,762	Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence
Aset tetap	(16,946,459)	(1,952,669)	(60,324)	(18,959,452)	Property, plant and equipment
Aset keuangan dari konsesi jasa	382,308	(399,383)	-	(17,075)	Financial assets of service concession
Liabilitas sewa	(96,447)	26,886	-	(69,561)	Lease liabilities
Liabilitas pajak tangguhan akhir tahun	(15,642,571)	(2,203,328)	(58,629)	(17,904,528)	Deferred tax liabilities at the end of the year
Beban pajak tangguhan		(2,203,378)	(58,489)		Deferred tax expense
Pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan/(kerugian) komprehensif lain selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:					The income tax relating to other comprehensive income/(loss) during the year was as follows:

	2024			
	Sebelum pajak/ Before tax	Pajak/ Tax	Setelah pajak/ Net of tax	
Pengukuran kembali atas kewajiban manfaat karyawan	(274,786)	60,453	(214,333)	Remeasurements of employee benefits obligations
Revaluasi aset tetap	28,611,768	(6,013,588)	22,598,180	Revaluation of property, plant and equipment
Jumlah	28,336,982	(5,953,135)	22,383,847	Total
	2023			
	Sebelum pajak/ Before tax	Pajak/ Tax	Setelah pajak/ Net of tax	
Pengukuran kembali atas kewajiban manfaat karyawan	(8,342)	1,835	(6,507)	Remeasurements of employee benefits obligations
Revaluasi aset tetap	274,203	(60,324)	213,879	Revaluation of property, plant and equipment
Jumlah	265,861	(58,489)	207,372	Total

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/86 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

26. TAXATION (continued)

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

Manajemen berpendapat jika aset pajak tangguhan dapat dipulihkan sesuai dengan periode realisasi yang diekspektasikan.

Analisis aset/(liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Aset pajak tangguhan yang akan dipulihkan dalam 12 bulan	124,670	105,111
(Liabilitas) pajak tangguhan yang akan diselesaikan setelah 12 bulan	(25,357,000)	(17,987,399)
Jumlah	(25,232,330)	(17,882,288)

d. Deferred tax (continued)

Management believes that the deferred tax assets could be recovered within the expected realisation period

The analysis of deferred tax assets/(liabilities) is as follows:

Deferred tax assets to be recovered within 12 months
Deferred tax (liabilities) to be settled after 12 months

Total

e. Surat ketetapan pajak

Tabel dibawah ini menunjukkan Surat Ketetapan Pajak Grup yang masih dalam proses keberatan dan/atau banding:

e. Tax assessment letters

The below table shows the Group's tax assessment letters which are still in the process of objection and/or appeal:

Jenis pajak/Tax type	Tahun pajak/ Fiscal year	Entitas/ Entity	2024	2023	Status
PPh Badan/CIT	2016	PIPS	16,094	16,094	Banding/Appeal
PPh 23/Income Tax Art 23	2018	PIP	19,925	19,925	Banding/Appeal
PPh 4 ayat (2)/Income Tax Art 4 (2)	2018	PIP	136,071	136,071	Banding/Appeal
PPh 22/Income Tax Art 22	2019	PIP	-	108,289	Selesai/Completed
PPh 22/Income Tax Art 22	2020	PIP	31,808	31,808	Banding/Appeal
PPh Badan/CIT	2020	PIPS	15,863	-	Banding/Appeal
PPh 22/Income Tax Art 22	2021	PIP	50,122	50,122	Keberatan/Objection
PPh Badan/CIT	2022	PIPS	8,918	-	Pemeriksaan/Audit
			278,801	362,309	

Perusahaan

Pada tahun 2024, kantor pajak mengabulkan hasil banding Perusahaan atas kurang bayar PPh 22 untuk tahun fiskal 2019 yang sebelumnya telah dibayarkan oleh Perusahaan sebesar Rp108.289. Perusahaan menerima pengembalian sebesar Rp100.585 dan setuju untuk mengkompensasi sisa hasil banding tersebut sebesar Rp7.704 dengan hasil keputusan keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas PPh 15, 21 dan 22 untuk tahun fiskal 2022. Perusahaan telah membebaskan selisih tersebut sebagai bagian dari beban lain-lain - bersih dan dicatat dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

The Company

In 2024, the tax office granted the Company's appeal regarding the underpayment of Income Tax Article 22 for the fiscal year 2019, which had previously been paid by the Company amounting to Rp108,289. The Company received a refund of Rp100,585 and agreed to offset the remaining appeal amount of Rp7,704 against the decision on the objection letter for the Underpayment Tax Assessment ("SKPKB") concerning Income Tax Articles 15, 21, and 22 for the fiscal year 2022. The Company has charged the difference as part of other expenses - net and recorded it in the profit and loss for the year ended 31 December 2024.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/87 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 ("PMK No. 136/2024")

Pada tanggal 31 Desember 2024, Menteri Keuangan telah mengesahkan PMK No. 136/2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

PMK No. 136/2024 telah diberlakukan di Indonesia, yurisdiksi di mana Perusahaan didirikan, dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Karena PMK No. 136/2024 belum efektif pada tanggal pelaporan, Grup tidak memiliki eksposur pajak terkait saat ini. Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup masih menilai dampak dari peraturan ini.

26. TAXATION (continued)

f. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, each company within the Group which are domiciled in Indonesia calculates and pays tax on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

g. Minister of Finance Regulation Number 136 of 2024 ("PMK No. 136/2024")

On 31 December 2024, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia enacted PMK No. 136/2024 regarding Imposition of Global Minimum Tax Based on International Agreements.

PMK No. 136/2024 was enacted in Indonesia, the jurisdiction in which the Company is incorporated, and will come into effect from 1 January 2025. Since the PMK No. 136/2024 was not effective at the reporting date, the Group has no related current tax exposure. As of 31 December 2024, the Group is still assessing the impact of this regulation.

27. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan berelasi

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat transaksi/ Nature of transaction
PLN	Entitas induk pengendali/ Controlling parent entity	Transaksi penjualan tenaga listrik, jasa pemeliharaan dan pinjaman dari pemegang saham Sales of electricity, operation and maintenance services and loans from a shareholder
YPK PLN	Pemegang saham minoritas/ Minority shareholder	Penyertaan modal/ Paid-in capital
Direktur dan Dewan Komisaris grup/ Board of Directors and Board of Commissioners of the Group	Personil manajemen kunci/ Key management personnel	Pembayaran gaji dan tunjangan/ Payment of salaries and allowances
BNI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek/ Placement of cash and cash equivalents and short-term investment
Bank Mandiri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek/ Placement of cash and cash equivalents and short-term investment
BRI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek/ Placement of cash and cash equivalents and short-term investment
BSI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek/ Placement of cash and cash equivalents and short-term investment

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES
Lampiran 5/88 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**
**27. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**
Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan: (lanjutan)

**27. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**
Nature of related parties (continued)

Below is the list of related parties with which the Company has transactions: (continued)

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat transaksi/ Nature of transaction
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/ Purchase of fuels and lubricants
PT Bukit Asam (Persero) Tbk ("PTBA")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian batubara/ Purchase of coal
PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("PGN")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar/ Purchase of fuels
PT Nusantara Regas ("NR")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar/ Purchase of fuels
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk ("TPI")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi milik Perusahaan/ Insurance services for Company's buildings, installations and power plants, and transmission equipment
Pelindo	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Sewa/ Lease
REP, GCL, IATS, MBE, IATSing, IRT, MCB dan/and PDG	Ventura bersama/ Joint ventures	Investasi, pemberian pinjaman, perdagangan batubara, jasa pemeliharaan dan pengelolaan, sewa/ Investment, issuance of loan, trade of coals, operations and maintenance services, lease
IPB, PLNSC, dan/and TMAI	Entitas asosiasi/ Associates	Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama/ Investment in associates and joint ventures
PNP	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Transaksi pendapatan jasa/ Other services transactions
PT Haleyora Power ("Haleyora")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Transaksi penyediaan tenaga kerja/ Transfer of labour transaction
ICON+	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Transaksi penyedia layanan internet/ Internet service provider transaction
EPI	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Transaksi pembelian bahan bakar/ Purchase of fuels
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("PLNE")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Transaksi jasa profesional/ Professional services transaction
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("BAG")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Transaksi jasa transportasi bahan bakar dan batubara/ Fuels and coal transportation services transaction
PLN EG	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Sewa/ Lease
DP-PLN	Pihak berelasi lainnya/ Other related parties	Pengelola dana pensiun/ Pension fund manager

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/89 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) 27. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

The balances and transactions with related parties

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2024 Rp	%*)	31 Desember/ December 2023 Rp	%*)	
Kas dan setara kas	7					Cash and cash equivalents
BNI		3,981,952	0.93%	3,216,844	0.83%	BNI
Bank Mandiri		341,732	0.08%	195,200	0.05%	Bank Mandiri
BRI		190,233	0.04%	86,021	0.02%	BRI
BSI		34,770	0.01%	27,150	0.01%	BSI
Jumlah		4,548,687	1.06%	3,525,215	0.91%	Total
Piutang usaha	8					Trade receivables
PLN		69,327,519	16.22%	52,062,808	13.48%	PLN
PNP		149	0.00%	9,143	0.00%	PNP
GCL		-	0.00%	55,284	0.01%	GCL
REP		-	0.00%	4,049	0.00%	REP
IPB		-	0.00%	2,144	0.00%	IPB
Lain-lain		34,411	0.01%	2,493	0.00%	Other
Jumlah		69,362,079	16.23%	52,135,921	13.49%	Total
Aset keuangan dari konsesi jasa	10					Financial assets of service concession
PLN		1,028,949	0.24%	1,148,788	0.30%	PLN
Piutang pihak berelasi	11					Receivables from related parties
REP		485,856	0.11%	437,855	0.11%	REP
PLN		469,042	0.11%	240,839	0.06%	PLN
SGPJB		195,167	0.05%	195,167	0.05%	SGPJB
GCL		123,836	0.03%	58,923	0.02%	GCL
PNP		-	0.00%	55,566	0.01%	PNP
PDG		-	0.00%	36,387	0.01%	PDG
IPB		-	0.00%	1,411	0.00%	IPB
Lain-lain		124,544	0.03%	93,857	0.02%	Other
Jumlah		1,398,445	0.33%	1,120,005	0.28%	Total
Utang usaha	15					Trade payables
EPI		3,112,030	5.76%	1,125,171	4.08%	EPI
Pertamina		2,799,025	5.18%	1,249,216	3.07%	Pertamina
PTBA		1,258,061	2.33%	1,307,618	3.21%	PTBA
BAG		116,199	0.21%	583,636	1.43%	BAG
Lain-lain		1,220,110	2.26%	1,484,206	3.65%	Other
Jumlah		8,505,425	15.74%	5,749,847	15.43%	Total
Beban yang masih harus dibayar						Accrued expenses
PLN		106,888	0.20%	354,360	0.42%	PLN
Pinjaman dari pemegang saham	27					Loans from a shareholder
PLN		3,186,415	5.89%	1,759,499	4.32%	PLN
Liabilitas sewa	16					Lease liabilities
Pelindo		1,157,553	2.14%	1,138,102	2.80%	Pelindo
PLN		883,197	1.63%	1,189,674	2.92%	PLN
PDG		850,622	1.57%	990,143	2.43%	PDG
PLN EG		471,881	0.87%	483,141	1.19%	PLN EG
Jumlah		3,363,253	6.21%	3,801,060	9.34%	Total

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan.

*) Percentage of related total assets/liabilities/revenues/expenses.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/90 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**27. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

**27. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

The balances and transactions with related parties
(continued)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2024 Rp	% ^{*)}	31 Desember/ December 2023 Rp	% ^{*)}	
Pendapatan konsesi jasa	10					Revenue of service concession
PLN		256,344	0.23%	268,658	0.26%	PLN
Penjualan tenaga listrik	21					Sales of electricity
PLN		108,706,764	98.31%	101,934,634	98.50%	PLN
Pendapatan jasa	22					Service revenue
PLN		1,042,916	0.94%	923,536	0.89%	PLN
GCL		102,080	0.09%	306,363	0.29%	GCL
PNP		10,344	0.01%	44,616	0.04%	PNP
REP		1,655	0.00%	2,304	0.00%	REP
Jumlah		1,156,995	1.04%	1,276,819	1.22%	Total
Beban usaha						Operating expenses
Pertamina		17,890,518	19.09%	3,004,855	3.55%	Pertamina
EPI		11,115,762	11.86%	3,291,207	3.89%	EPI
PTBA		8,495,375	9.07%	8,744,166	10.34%	PTBA
PGN		2,872,993	3.07%	3,572,641	4.22%	PGN
BAG		2,429,140	2.59%	3,225,060	3.81%	BAG
PLN		1,163,314	1.24%	910,320	0.88%	PLN
NR		499,007	0.53%	594,479	0.70%	NR
TPI		358,357	0.38%	-	0.00%	TPI
PT Hayelora Power		72,647	0.08%	69,317	0.08%	PT Hayelora Power
ICON+		40,661	0.04%	30,729	0.04%	ICON+
PNP		318	0.00%	5,948	0.01%	PNP
PLNE		80	0.00%	17,445	0.02%	PLNE
Lain-lain		944,658	1.01%	222,519	0.24%	Other
Jumlah		45,882,830	48.96%	23,688,686	27.78%	Total

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/ beban yang bersangkutan.

*) Percentage of related total assets/liabilities/revenues/ expenses.

a. Pinjaman dari pemegang saham

Pada tanggal 12 November 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN sebesar US\$213.901.481 dengan tingkat bunga *London Interbank Offered Rate* dengan *margin* 0,70% per tahun. Lalu pada tanggal 30 Desember 2022, terdapat amendemen kontrak untuk merubah referensi angka bunga pinjaman menjadi bunga SOFR dengan *spread adjustment* 0,42826% dengan *margin* 0,70% per tahun. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai proyek PLTGU Tambak Lorok Blok III. Jangka waktu perjanjian efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir pada saat semua kewajiban pokok maupun bunga telah dibayar penuh oleh Perusahaan.

Selama tahun 2024, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman dari pemegang saham sebesar Rp241.013 (2023: Rp618.262) dan melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp276.592 (2023: Rp272.920).

Saldo pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.796.415 (setara US\$111.184.914) (2023: Rp1.759.499 (setara US\$113.964.562).

a. Loans from a shareholder

On 12 November 2018, the Company entered into a loan agreement with PLN amounting to US\$213,901,481 with interest rates of *London Interbank Offered Rate* with a *margin* of 0.70% per annum. On 30 December 2022, there was a contract amendment to change the loan interest rate reference to interest rates of SOFR with a *spread adjustment* of 0.42826% with a *margin* of 0.70% per year. This loan will be used to fund the add-on project of PLTGU Tambak Lorok Blok III. The term of this agreement was effective when the loan was signed and ends when all the outstanding principal and interest has been fully paid by the Company.

During 2024, the Company made drawdown of loans from a shareholder for the amount of Rp241,013 (2023: Rp618,262) and repayment of loan for the amount of Rp276,592 (2023: Rp272,920).

The outstanding balance of these loans as at 31 December 2024 amounting to Rp1,796,415 (equivalent to US\$111,184,914) (2023: Rp1,759,499 (equivalent to US\$113,964,562).

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/91 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

**27. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**27. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

a. Pinjaman dari pemegang saham (lanjutan)

a. Loans from a shareholder (continued)

Pada tanggal 26 Desember 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN sebesar Rp1.390.000, dikenakan bunga tetap sebesar 7,83% per tahun. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendanai investasi di Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("BMPP") Kolaka I - II 120 MV. Jangka waktu perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani dan akan berakhir ketika seluruh pokok pinjaman dan bunga yang terutang telah dilunasi sepenuhnya oleh Perseroan.

On 26 December 2022, the Company entered into a loan agreement with PLN amounting to Rp1,390,000, carries a fixed interest rate of 7.83% per annum. It will be used to fund the investment in the Electricity Supply Barge Mounted Power Plant ("BMPP") Kolaka I - II 120 MV. The term of this agreement became effective upon signing and will end when all the outstanding principal and interest have been fully paid by the Company.

Selama tahun 2024, Perusahaan melakukan penarikan dari pinjaman pemegang saham sebesar Rp1.390.000.

During 2024, the Company made drawdown from the shareholder loans amounting to Rp1,390,000.

Saldo pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.390.000 (2023: nihil).

The outstanding balance of these loans as at 31 December 2024 amounting to Rp1,390,000 (2023: nil).

b. Kompensasi manajemen kunci

b. Key management compensation

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp116.672 dan Rp121.384. Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tersebut merupakan imbalan kerja jangka pendek.

Total remuneration paid to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors in 2024 and 2023 amounting to Rp116,672 and Rp121,384, respectively. All the compensation to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors represents short-term employee benefits.

28. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI

28. SIGNIFICANTS AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

As at 31 December 2024, the Group has significant commitments and contingencies, as follows:

a. PJBTL

a. PPA

Perusahaan memiliki sejumlah PJBTL dengan PLN. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

The Company has various PPAs with PLN. Under those agreements, PLN will pay the Company for the supply of electricity at an amount determined in accordance with the payment formula. Such payment formula includes cost of capacity, energy, as well as operations and maintenance components which depends on the level of energy supplied and other variables stipulated in the agreement.

Berdasarkan Keputusan Direksi PLN No. 0357.K/DIR/2022 tanggal 28 November 2022 tentang tindak lanjut pembentukan subholding PLN Hukum Akhir Periode/Tahap, dan keputusan RUPS sirkuler Perusahaan tanggal 21 September 2022 dan 30 Desember 2022, terdapat perubahan dan pernyataan Kembali atas PJBTL antara Perusahaan dan PLN.

Based on the Decree of the Board of Directors of PLN No. 0357.K/DIR/2022 dated 28 November 2022 regarding the follow-up to the establishment of the Subholding of PLN Legal-End of Period/Phase, and the Company's circular GMS on 21 September 2022 and 30 December 2022, there are amendments and restatements of the PPA between the Company and PLN.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/92 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

28. PERJANJIAN PENTING,
KONTINJENSI (lanjutan)

28. SIGNIFICANTS AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)

a. PJBTL (lanjutan)

Pada tanggal 30 Desember 2022, PLN dan Perusahaan telah menandatangani 24 amendemen dan pernyataan kembali PJBTL yang terdiri dari: 8 PJBTL atas wilayah Jawa-Bali, 7 PJBTL atas wilayah Sumatera, 6 atas PJBTL atas wilayah Kalimantan, dan 3 PJBTL atas wilayah Sulawesi. Amendemen dan pernyataan kembali PJBTL tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dengan periode kontrak dari tahun 2023 sampai dengan 2032.

a. PPA (continued)

On 30 December 2022, PLN and the Company have signed 24 amendments and restatements of the PPA consisting of: 8 PPA for the Java-Bali area, 7 PPA for the Sumatra area, 6 PPA for the Kalimantan area, and 3 PPA for the Sulawesi area. The amendments and restatements of these PPA will become effective on 1 January 2023 with a contract period from 2023 up to 2032.

b. Perjanjian pengadaan bahan bakar

b. Fuel supply agreements

(i) Gas

(i) Gas

Sektor/ Sector	Pemasok/ Suppliers	No. Perjanjian/ Agreement No.	Durasi/ Duration	Satuan/ Unit of measure	Jumlah yang disepakati/ Agreed quantity*)
Priok & Cilegon	PT PLN Energi Primer Indonesia	0422.PJ/DAN.01.03/PLNIP011002/2024	2024 - 2025	MMBTU	11.651.242
	PT PLN Energi Primer Indonesia	0063.PJ/DAN.01.03/PLNIP011002/2025	2024 - 2027	MMBTU	282.469.200
	PT Perusahaan Gas Negara (Gas)	0556.PJ/EPI.01.02/010000/2019	2019- 2030	Standar Kargo LNG/Cargo LNG Standard	Lampiran konfirmasi/ Confirmation Notice
Cilegon	PT PLN Energi Primer Indonesia	0918.PJ/DAN.01.03/PLNIP011002/2024	2024 - 2029	BBTUD	5
Priok, Cilegon, & Bali	BP Berau ("LNG")	Perjanjian Jual dan Beli antara PT PLN (Persero) sebagai pembeli dan Tangguh PSC sebagai penjual/LNG Sale and Purchase Agreement Between PT PLN (Persero) as Buyer and the Tangguh PSC Contract Parties as Sellers	2014 - 2035	Standar Kargo LNG/Cargo LNG Standard	Program pengiriman tahunan/ Annual Delivery Program ("ADP")
	PT Pertamina ("LNG")	MSPA: 1265.PJ/EPI.01.02/DITDAN/2018 Amendemen II: 1275/Amd/DAN.01.01/PLNEPI0100/2023	2017 - 2026	Standar Kargo LNG/Cargo LNG Standard	Lampiran konfirmasi/ Confirmation Notice
	PT Pertamina	112.PJ/061/IP/2023 2242.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0100/2023	2023 - 2024	Standar Kargo LNG/Cargo LNG Standard	Lampiran konfirmasi/ Confirmation Notice
Bali	PT PLN Energi Primer Indonesia	0219.PJ/DAN.01.01/PLNIP011002/2024 0121.PJ/DAN.01.03/PLNIP011002/2025	2024 - 2026	MMBTU	7.927.551 (16 Kargo Kecil)/(16 Small Cargo)
	PT PLN Energi Primer Indonesia	0559.PJ/DAN.01.03/PLNIP011002/2024 0121.PJ/DAN.01.03/PLNIP011002/2025	2024 - 2026	MMBTU	6.021.425 (12 Kargo Kecil)/(12 Small Cargo)
Grati	1. Medco Energi Sampang Pty Ltd 2. Singapore Petroleum Sampang Ltd 3. Cue Sampang Pty.Ltd. (Gas Sampang)	Perjanjian penjualan gas/Gas Sales Agreement Addendum Keenam Perjanjian Jual Beli Gas/Sixth Addendum to the Gas Sales Agreement	2004 - 2027	BBTUD	Notifikasi JHK/JHK Notification (Top 95%)
	Kangean Energy Indonesia Ltd (Gas TSB)	1331-1.PJ/040/DIR/2005 462.AMD.PJ AMD II/040/DIR/2010	2012 - 2028	BBTUD	20 - 50 (TOP 90%)
	PT Inti Alasindo Energy	436.PJ/061/IP/2022 0058.PJ/DAN.01.03/PLNIP011002/2025	2022 - 2026	BBTUD	0 - 40

*) Dalam angka penuh

In full amount *)

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/93 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

28. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN 28. SIGNIFICANTS AGREEMENTS, COMMITMENTS
KONTINJENSI (lanjutan) AND CONTINGENCIES (continued)

b. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

b. Fuel supply agreements (continued)

(i) Gas (lanjutan)

(i) Gas (continued)

Sektor/ Sector	Pemasok/ Suppliers	No. Perjanjian/ Agreement No.	Durasi/ Duration	Satuan/ Unit of measure	Jumlah yang disepakati/ Agreed quantity*)
Semarang	PT Sumber Petrindo Perkasa	97.PJ/061/IP/2007 Amendemen-3	2014 - 2029	BBTUD	40 – 54,5
	PT Pertamina (PGN JTB)	0670.PJ/EPI01.02/DIRUT/2017	2021 - 2035	BBTUD	90 – 100
Sorong	PT Malamoi Olom Wobok	331.PJ/061/IP/2020	2021 - 2025	BBTUD	7,2 – 8,8

*) Dalam angka penuh

In full amount *)

(ii) Batubara

(ii) Coal

Sektor/ Sector	Pemasok/ Supplier	No. Perjanjian/ Agreement No.	Jumlah dalam metrik ton/ Total in metric tons*)	Periode/ Period
Suralaya 1-7	PT Bukit Asam	12.PJ/061/IP/2013	4,200,000	2013 - 2025
Banten 1 Suralaya Banten 2 Labuan Banten 3 Lontar Jabar 2 Pelabuhan Ratu Pangkalan Susu Labuhan Angin Teluk Sirih	PT Bukit Asam	303.PJ/041/DIR/2012	7,012,500	2012 - 2032
Suralaya 1-7	PT Oktasan Baruna Persada	406.PJ/061/IP/2018	2,100,000	2018 - 2026
Suralaya 1-7	PT Berau Coal	84.PJ/061/IP/2008	2,232,000	2009 - 2025
Suralaya 1-7	PT Artha Daya Coalindo	159.PJ/061/IP/2017	2,252,000	2017 - 2027
Suralaya 1-7	PT Multi Harapan Utama	373.PJ/061/IP/2022	1,000,000	2022 - 2026
Banten 1 Suralaya Banten 2 Labuan Banten 3 Lontar Jabar 2 Pelabuhan Ratu Pangkalan Susu Labuhan Angin Teluk Sirih	PT Titan Infra Energy	0017.PJ/EPI.02.02/DIRUT/20 19	2,920,000	2019 - 2033
Banten 1 Suralaya Banten 2 Labuan Banten 3 Lontar Jateng 2 Adipala Teluk Sirih Pangkalan Susu Labuhan Angin	Konsorsium PT Arutmin Indonesia dan PT Dharma Henwa	0020.PJ/EPI.02.02/DIRUT/20 19	5,553,000	2007 - 2027
Banten 1 Suralaya Banten 2 Labuan Banten 3 Lontar Jateng 2 Adipala Teluk Sirih Pangkalan Susu Labuhan Angin	Konsorsium PT Arutmin Indonesia dan PT Dharma Henwa	420.PJ/123/DIRUT/2008 421.PJ/123/DIRUT/2008	2,005,000	2008 - 2028
Banten 1 Suralaya Banten 2 Labuan Banten 3 Lontar Jateng 2 Adipala	Konsorsium PT Eksploitasi Energi Indonesia dan PT Borneo Indobara	0200-3.PJ/EPI.01.01/ C01050000/2022	1,255,000	2022 - 2027

*) Dalam angka penuh

In full amount *)

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/94 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

28. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

(ii) Batubara (lanjutan)

Harga pembelian batubara berkisar Rp995.449 (angka penuh) dan Rp1.029.531 (angka penuh) per ton sebelum penyesuaian spesifikasi batubara (2023: Rp770.062 - Rp1.405.666 (angka penuh)).

(iii) Bahan Bakar Minyak

Pada tahun 2024, pembelian atas volume BBM menggunakan formulasi harga dalam Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak ("Perjanjian Jual Beli BBM") sebagai berikut:

- Perjanjian Jual Beli BBM No. 0007.Pj/DAN.01.01/PLNEPI0100/2024 tanggal 18 Maret 2024 untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2024;
- Perjanjian Jual Beli BBM nomor 0014.Pj/EPI.01.03/PLNEPI0304/2024 tanggal 8 Mei 2024 untuk periode 1 April sampai dengan 30 Juni 2024;
- Perjanjian Jual Beli BBM nomor 0026.Pj/EPI.01.03/PLNEPI0100/2024 tanggal 12 Agustus 2024 untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 September 2024;
- Heads of Agreement No. 0054.Pj/EPI.0102/PLNEPI0100/2024 tanggal 20 Desember 2024 untuk periode 1 Oktober sampai dengan 14 Desember 2024.
- Heads of Agreement No. 0011.Pj/EPI.0103/PLNEPI0100/2025 tanggal 25 Maret 2025 untuk periode 15 Desember sampai dengan 31 Maret 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, saldo utang usaha atas pembelian bahan bakar dari Pertamina adalah masing-masing sebesar Rp2.799.025 dan Rp 1.249.216.

28. SIGNIFICANTS AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Fuel supply agreements (continued)

(ii) Batubara (continued)

The purchase price of coal ranges from Rp995,449 (full amount) to Rp1,029,531 (full amount) per ton, which is adjusted against coal specification (2023: Rp770,062 - Rp1,405,666 (full amount)).

(iii) Fuel

In 2024, the purchase of fuel volume was based on the price formula outlined in the Fuel Purchase Agreement ("Perjanjian Jual Beli BBM") as follows:

- Perjanjian Jual Beli BBM number 0007.Pj/DAN.01.01/PLNEPI0100/2024 dated 18 March 2024, for the period 1 January to 31 March 2024;
- Perjanjian Jual Beli BBM number 0014.Pj/EPI.01.03/PLNEPI0304/2024 dated 8 May 2024, for the period 1 April to 30 June 2024;
- Perjanjian Jual Beli BBM number 0026.Pj/EPI.01.03/PLNEPI0100/2024 dated 12 August 2024, for the period 1 July to 31 September 2024;
- Heads of Agreement number 0054.Pj/EPI.0102/PLNEPI0100/2024 dated 20 December 2024, for the period 1 October to 14 December 2024.
- Heads of Agreement number 0011.Pj/EPI.0103/PLNEPI0100/2025 dated 25 March 2025, for the period 15 December to 31 March 2025.

As at 31 December 2024 and 31 December 2023, the trade payables outstanding for purchase of fuel from Pertamina amounting to Rp2,799,025 and Rp1,249,216 respectively.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/95 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

**28. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

**28. SIGNIFICANTS AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

b. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

b. Fuel supply agreements (continued)

(iv) Uap panas bumi

(iv) Geothermal steam

Melalui PLN, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Pertamina untuk pengadaan uap panas bumi untuk daerah Kamojang selama 30 tahun yang berakhir tahun 2012 dan telah melalui Amendemen I Surat Perjanjian antara Pertamina dan PLN PLTP Unit 1,2,3 di Kamojang. Sampai tahun 2015, perjanjian masih menggunakan Amendemen kelima Perjanjian Interim antara PT Pertamina Geothermal Energy, PLN dan PIP. Pada tanggal 11 Februari 2016, dilakukan amendemen secara keseluruhan dan pernyataan kembali atas perjanjian induk, yang berlaku mulai 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2040. Untuk PLTP Gunung Salak dan Darajat perjanjian berlaku selama 30 tahun sampai tahun 2030.

The Company, through PLN, entered into a geothermal procurement agreement with Pertamina to purchase Geothermal Steam for Kamojang area for 30 years until 2012 and the agreement has been amended under amendment I between Pertamina and PLN PLTP Unit 1,2,3 in Kamojang. Until 2015, the agreement was still using the Fifth amendment of the Interim Agreement between PT Pertamina Geothermal Energy, PLN and PIP. On 11 February 2016, the main agreement was wholly amended and restated, which is valid from 1 August 2012 to 31 December 2040. For PLTP Gunung Salak and Darajat, the agreement is valid for 30 years until 2030.

Perjanjian Jual Beli Uap Panas Bumi PLTP Lahendong Unit 1 berlaku selama 30 tahun telah mengalami Amendemen I pada tahun 2016 berlaku sampai dengan 31 Desember 2031, untuk PLTP Lahendong Unit 2&3 perjanjian berlaku selama 30 tahun telah mengalami Amendemen I pada tahun 2016 berlaku sampai dengan 17 Juni 2037 untuk PLTP Lahendong Unit 2 dan pada 7 April 2039 untuk PLTP Lahendong Unit 3. Untuk PLTP Lahendong Unit 4 perjanjian berlaku selama 30 telah mengalami Amendemen I pada tahun 2016 berlaku sampai dengan 23 Desember 2041.

The Geothermal Steam Sales and Purchase Agreement for PLTP Lahendong Unit 1 is valid for 30 years and has undergone Amendment I in 2016 valid until December 31, 2031, for PLTP Lahendong Unit 2 & 3 the agreement is valid for 30 years and has undergone Amendment I in 2016 valid until 17 June 2037 for PLTP Lahendong Unit 2 and on 7 April 2039 for PLTP Lahendong Unit 3. For PLTP Lahendong Unit 4, the agreement is valid for 30 years and has undergone Amendment I in 2016, valid until 23 December 2041.

Perjanjian Jual Beli Uap Panas Bumi pada PLTP Ulubelu berlaku selama 30 tahun sampai dengan 16 September 2042.

The Geothermal Steam Sales and Purchase Agreement for PLTP Ulubelu is valid for 30 years until 16 September 2042.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/96 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Komitmen

Stand by Letter of Credit ("SBLC")

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki fasilitas *non-cash loan* berupa SBLC dengan BNI yang digunakan untuk jaminan jual beli gas dengan IAE Inti Alasindo Energy dengan nominal US\$4.104.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp66.308 dengan jangka waktu sampai dengan 14 Januari 2026 dan Perusahaan juga memiliki fasilitas *non-cash loan* berupa SBLC dengan BRI yang digunakan sebagai jaminan jual beli gas dengan Medco Energi Sampang Pty. Ltd dengan nominal US\$12.477.205 (nilai penuh) atau setara dengan Rp201.594 dengan jangka waktu sampai dengan 30 Agustus 2025.

28. SIGNIFICANTS AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Commitments

Stand by Letter of Credit ("SBLC")

As at 31 December 2024, the Company has a *non-cash loan* facility of SBLC with BNI, which is used as a gas purchase guarantee from IAE Inti Alasindo Energy amounting to US\$4,104,000 (full amount) or equivalent to Rp66,308 with a maturity date of 14 January 2026 and the Company has also a *non-cash loan* facility of SBLC with BRI, which is used as a gas purchase guarantee from Medco Energi Sampang Pty. Ltd amounting to US\$12,477,205 (full amount) or equivalent to Rp201,594 with a maturity date of 30 August 2025.

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset keuangan dari konsesi jasa sebesar Rp76.704.216 (31 Desember 2023: Rp58.205.951) sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mengklasifikasikan utang usaha, pinjaman dari pemegang saham, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas sewa, sebesar Rp21.002.188 (31 Desember 2023: Rp17.027.053) sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

Dalam pengelolaan risiko, Grup membentuk Bidang *Risk Management and Compliance* ("BID RSC") yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Perusahaan. Bidang ini juga bertugas untuk memfasilitasi penyusunan profil risiko yang bersifat strategis sebagai himbauan awal kepada manajemen Grup. BID RSC bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

29. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT

a. Categories and classes of financial instruments

As at 31 December 2024, the Group classified its cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and financial assets of service concession amounting to Rp76,704,216 (31 December 2023: Rp58,205,951) as financial assets at amortised cost.

As at 31 December 2024, the Group classified its trade payables, loans from a shareholder, accrued expenses and lease liabilities amounting to Rp21,002,188 (31 December 2023: Rp17,027,053) as financial liabilities carried at amortised cost.

b. Financial risk management objectives and policies

The Group's overall financial risk management and policies aim to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of its business, while managing its exposure to financial risk, which is market risk (including foreign currency risk and interest rate risk) credit risk and liquidity risk. The Group operates within defined policies that are approved by the Board of Directors.

In managing those risks, the Group established a *Risk Management and Compliance Division* ("BID RSC") which is responsible for the preparation of the policies, the relevant frameworks, implementation guideline and the necessary risk management infrastructure to ensure the implementation of risk management in the Company's environment. The division is also established to facilitate a strategic risk profile as an early warning to the Group's management. BID RSC is accountable to the Finance and Risk Management Director.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/97 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

29. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)

b. Financial risk management objectives and
policies (continued)

Grup telah menetapkan taksonomi risiko dengan membagi risiko menjadi lima kelompok yaitu risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko proyek, dan risiko kepatuhan. Risiko keuangan diantaranya adalah risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Dalam mengelola risiko, Grup mempertimbangkan skala prioritas yang didasarkan pada tingkat risikonya. Tingkat risiko ditentukan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan skala dampak yang ditimbulkan.

The Group has established a risk taxonomy by dividing risk into five categories, which are strategic risk, financial risk, operational risk, project risk and compliance risk. Financial risk includes market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. In managing those risks, the Group considers prioritisation based on risk level. Risk level is determined by the level of possibility and scale of potential impact.

Dalam kaitannya dengan risiko keuangan, manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Grup menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Grup. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

Related to the financial risk, management evaluates and establishes policies for managing each of these risks. The Group applies the financial risk management policies to minimise the impact of the unpredictability of financial risks on the Group's financial performance. The summary of the financial risk management policies is as follows:

Risiko pasar

Market risk

i. Risiko nilai tukar mata uang asing

i. Foreign exchange risk

Grup melakukan sejumlah transaksi dalam mata uang asing. Akibatnya, timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kebijakan Grup adalah untuk menjaga risiko mata uang asing dalam batas yang dapat diterima. Grup mencadangkan jumlah mata uang asing pada saat nilai tukar rupiah menguat dengan jumlah sesuai kebutuhan.

The Group undertakes many transactions denominated in foreign currencies. Consequently, there are exposures to exchange rate fluctuations. The Group's policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits. The Group reserves the foreign currency amount at times the Rupiah strengthens, with amounts as needed.

Sensitivitas mata uang asing

Foreign currency sensitivity

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Grup untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. 10% kenaikan dan penurunan menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini hanya mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

The following table details the Group's sensitivity to a 10% increase and decrease in the Rupiah against the relevant foreign currencies. 10% increase or decrease represents the management's assessment of the reasonable possible change in foreign exchange rates after considering the current economic conditions. The sensitivity analysis only includes net of tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/98 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)**

**29. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)**

**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)**

**b. Financial risk management objectives and
policies (continued)**

Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

**i. Risiko nilai tukar mata uang asing
(lanjutan)**

i. Foreign exchange risk (continued)

Sensitivitas mata uang asing (lanjutan)

Foreign currency sensitivity (continued)

Dampak terhadap laba setelah pajak/Effect on profit net of tax						
2024						
	US\$		EUR		Other	
	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%
Aset Keuangan						
Kas dan setara kas	15,837	(15,837)	374	(374)	1,468	(1,468)
Piutang lain-lain pihak berelasi	35,443	(35,443)	-	-	-	-
Subjumlah	51,280	(51,280)	374	(374)	1,468	(1,468)
Liabilitas Keuangan						
Utang usaha	130,196	(130,196)	-	-	-	-
Pinjaman pemegang saham	252,199	(252,199)	-	-	-	-
Subjumlah	382,395	(382,395)	-	-	-	-
Jumlah	(331,115)	331,115	374	(374)	1,468	(1,468)
Financial Assets						
Cash and cash equivalent						
Other receivables from related parties						
Subtotal						
Financial Liabilities						
Trade payables						
Loans from shareholders						
Subtotal						
Total						

Dampak terhadap laba setelah pajak/Effect on profit net of tax						
2023						
	US\$		EUR		Other	
	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%
Aset Keuangan						
Kas dan setara kas	8,105	(8,105)	1,139	(1,139)	808	(808)
Piutang lain-lain pihak berelasi	36,647	(36,647)	-	-	-	-
Subjumlah	44,752	(44,752)	1,139	(1,139)	808	(808)
Liabilitas Keuangan						
Utang usaha	36,114	(36,114)	120	(120)	95	(95)
Pinjaman pemegang saham	140,232	(140,232)	-	-	-	-
Subjumlah	176,346	(176,346)	120	(120)	95	(95)
Jumlah	(131,594)	131,594	1,019	(1,019)	713	(713)
Financial Assets						
Cash and cash equivalent						
Other receivables from related parties						
Subtotal						
Financial Liabilities						
Trade payables						
Loans from shareholders						
Subtotal						
Total						

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/99 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)**

**29. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)**

**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)**

**b. Financial risk management objectives and
policies (continued)**

Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

ii. Risiko tingkat suku bunga

ii. Interest rate risk

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen percaya risiko tingkat suku bunga adalah minimal dikarenakan Grup hanya terekspos risiko tingkat suku bunga melalui saldo kas di bank dan pinjaman dari pemegang saham.

As at 31 December 2024 and 2023, management believes that the exposure from interest rate risk is minimal because the Group is exposed interest rate risk only from cash in banks and loans from a shareholder.

Sensitivitas tingkat suku bunga

Interest rate sensitivity

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Grup terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin pada tingkat suku bunga yang relevan dengan variabel lainnya dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat suku bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

The sensitivity analysis below has been determined based on the Group's exposure to interest rates for financial instruments net of tax at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets and liabilities outstanding at the reporting period end date was outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of 50 basis point increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables held constant. 50 basis points increase or decrease represents the management's assessment of reasonably possible change in interest rates after considering the current economic conditions.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jika tingkat suku bunga mengalami kenaikan/penurunan 50 basis poin dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba setelah pajak untuk tahun berjalan lebih tinggi/rendah masing-masing Rp6.984 dan Rp9.181.

As at 31 December 2024 and 2023, if interest rate increased/decreased by 50 basis points, with all other variables constant, the profit net of tax for the current year would increase/decrease by Rp6,984 and Rp9,181, respectively.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/100 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)**

**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)**

Risiko kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Grup. Eksposur risiko kredit Grup timbul terutama atas piutang usaha dari pelanggan. Untuk aset keuangan lainnya seperti kas di bank dan deposito berjangka, Grup mengelola rekening pada beberapa bank dengan reputasi baik dengan tujuan meminimalkan risiko kredit dan untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi. Grup menempatkan dana pada beberapa Bank yang kredibel (Catatan 7).

Jumlah tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian kredit ekspektasian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit. Pada tanggal 31 Desember 2024, total maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp76.704.171 (2023: Rp58.205.905) yang terutama berasal dari kas di bank, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset keuangan dari konsesi jasa.

Semua kas di bank dan deposito berjangka ditempatkan di bank asing dan lokal yang memiliki reputasi.

Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang dapat terjadi karena meningkatnya eksposur risiko kredit.

Pelanggan utama Grup adalah PLN. Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, PLN memberikan kontribusi 99,48% dan 99,65% dari jumlah penjualan bersih. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit terbatas karena risiko kegagalan kredit PLN rendah dimana Grup telah secara legal terikat dalam perjanjian dengan PLN untuk penjualan listrik dan pelaksanaan jasa lainnya.

**29. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)**

**b. Financial risk management objectives and
policies (continued)**

Credit risk

Credit risk arises from the risk that a counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Group. The Group exposures to credit risk mainly arise from receivables from its customers. For other financial assets such as cash in banks and time deposits, in order to minimise the credit risk and to avoid significant concentration of cash with one institution, the Group places the funds in several credible banks (Note 7).

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for ECL, represents the Group's exposure to credit risk. As at 31 December 2024, the total maximum exposure from credit risk was Rp76,704,171 (2023: Rp58,205,905), which consists of cash in banks, time deposits, trade receivables, other receivables and financial assets of service concession.

All the cash in banks and time deposits are placed in reputable foreign and local banks.

The Group's objective is to seek continual revenue growth while minimising losses incurred due to increase of credit risk exposure.

The Group's main customer is PLN. For the years ended 31 December 2024 and 2023, the sales from PLN make up 99.48% and 99.65% of the total net revenues. Management believes that the credit risk is limited because the credit default of PLN is low, since the Group has a legally binding agreement with PLN for electricity sales transactions and other services.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/101 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

**29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)**

**29. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)**

**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)**

**b. Financial risk management objectives and
policies (continued)**

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu.

Certain financial assets are individually assessed for impairment and, if found to be impaired, the impairment loss should be applied individually.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup diharuskan untuk menilai penyisihan ECL untuk semua piutang. Grup telah mencatat penambahan atas penyisihan kerugian kredit sebesar Rp12.001 pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: pengurangan atas penyisihan kerugian kredit sebesar Rp6.260). Tidak ada pergerakan lain dalam penyisihan kerugian kredit.

At the end of each reporting period, the Group is required to assess an allowance for ECLs for all receivables. The Group has recorded addition of credit loss allowance amounting to Rp12,001 as of 31 December 2024 (2023: deduction of credit loss allowance amounting to Rp6,260). There are no other movements within the credit loss allowance.

Seluruh saldo terutang dari piutang usaha dan piutang lainnya di atas terutama berasal dari pelanggan/pihak ketiga/pihak berelasi yang sudah bertransaksi dengan Grup lebih dari 12 bulan dan tidak memiliki sejarah wanprestasi.

The entire outstanding balances from trade receivables and other receivables are mostly derived from customers/third parties/related parties which have transacted with the Group for more than 12 months and do not have any history of default.

Risiko likuiditas

Liquidity risk

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Grup akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Grup. Grup mendapatkan fasilitas *non-cash loan* dari beberapa bank khususnya untuk pembukaan L/C dan Bank Garansi.

Liquidity risk is defined as the risk that the Group will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial assets. The ultimate responsibility for liquidity risk management is in the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group obtained non-cash loan facilities from several banks, in particular for opening L/C and Bank Guarantee.

Selanjutnya Grup juga memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja berkelanjutan dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

Furthermore, the Group maintains sufficient funds to finance its ongoing working capital needs by maintaining adequate amounts of cash and cash equivalents that can be easily converted into cash when experiencing unexpected disruptions from cash collection.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/102 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

29. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)

b. Financial risk management objectives and
policies (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Grup diwajibkan untuk membayar. Untuk arus bunga dengan tingkat suku bunga mengambang, nilai arus kas yang tidak terdiskonto diperoleh dari kurva tingkat suku bunga pada akhir periode. Tanggal jatuh tempo kontraktual berdasarkan pada tanggal paling awal dimana Grup diwajibkan untuk membayar.

The following table details the Group's remaining contractual maturity for its financial liabilities with agreed repayment periods as at 31 December 2024 and 2023. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the earliest date on which the Group is required to pay. To the extent that interest flows are floating rate, the undiscounted cash flow is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan termasuk estimasi pembayaran bunga:

The amounts disclosed in the table represent contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments:

	2024				Jumlah/ Total	
	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/Over one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/Over three years but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/Over five years		
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha	13,092,121	-	-	-	13,092,121	Trade payables
Beban yang masih harus dibayar	318,405	-	-	-	318,405	Accrued expenses
Liabilitas sewa	1,073,100	1,731,503	1,338,704	4,408,703	8,552,010	Lease liabilities
Pinjaman dari pemegang saham	592,046	1,042,920	948,288	1,789,865	4,373,119	Loan from a shareholder
	15,075,672	2,774,423	2,286,992	6,198,568	26,335,655	
	2023				Jumlah/ Total	
	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/Over one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/Over three years but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/Over five years		
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha	9,610,778	-	-	-	9,610,778	Trade payables
Beban yang masih harus dibayar	479,540	-	-	-	479,540	Accrued expenses
Liabilitas sewa	1,103,872	2,042,018	1,439,192	5,000,419	9,585,501	Lease liabilities
Pinjaman dari pemegang saham	325,034	564,805	514,442	877,034	2,281,315	Loan from a shareholder
	11,519,224	2,606,823	1,953,634	5,877,453	21,957,134	

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/103 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

c. Manajemen permodalan

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.

Direksi Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Grup berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Grup dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

d. Estimasi nilai wajar

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajarnya sebagai berikut:

1. Kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain pihak ketiga merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.
2. Nilai tercatat dari piutang lain-lain pihak berelasi mendekati nilai wajarnya karena merupakan bunga pinjaman mengambang yang pada awalnya diakui pada nilai wajar berdasarkan tingkat bunga pasar pada saat tanggal pengakuan awal.
3. Nilai tercatat dari aset keuangan dari konsesi jasa mendekati nilai wajarnya karena dicatat sebesar nilai kini dari penerimaan kas yang dijamin dan didiskontokan dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu.
4. Utang usaha dan beban yang masih harus dibayar merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.
5. Pinjaman dari pemegang saham merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga variabel sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mendekati nilai wajar.

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2024

29. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

c. Capital management

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with covenants of capital adequacy ratio. The Company capital structure consists of equity shareholders that consist of capital stock, additional paid-in capital and retained earnings.

The Board of Directors of the Company periodically reviews capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

The Group seeks to minimise the cost of capital, in order to maximise its value. Therefore, the Group's policy is to seek funding that will always take into account the financial risk that may arise in the future.

d. Fair value estimation

As at 31 December 2024 and 2023, the carrying amounts of the financial assets and liabilities approximate their fair values as follows:

1. Cash and cash equivalents, trade receivables, and other receivables from third parties are due within 12 months, thus the carrying values of the financial assets approximate their fair values.
2. The carrying amount of other receivables from related parties approximates its fair value as they are floating interest receivables which were initially recognised at fair value based in market rates at the initial recognition date.
3. The carrying amount of financial assets of service concession approximates its fair value as they are the present value of future guaranteed cash receipts discounted using a certain interest rate.
4. Trade payables and accrued expenses are due within 12 months, thus the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.
5. Loans from a shareholder comprises liabilities with floating interest rates where the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/104 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)**

**29. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)**

**e. Saling hapus aset keuangan dan liabilitas
keuangan**

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ketika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut, dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Aset dan liabilitas keuangan berikut ini tunduk kepada saling hapus, tunduk pada pengaturan induk untuk penyelesaian secara bersih yang dapat dipaksakan atau perjanjian serupa pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

**e. Offsetting financial assets and financial
liabilities**

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position where the Group currently has a legally enforceable right to offset the recognised amounts, and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The following financial assets and liabilities are subject to offsetting, enforceable master netting arrangements and similar agreements as at 31 December 2024 and 2023:

	Jumlah bruto instrumen keuangan yang diakui/ Gross amounts of recognised financial instruments	Jumlah bruto instrumen keuangan yang diakui disalinghapuskan di laporan posisi keuangan konsolidasian/ Gross amounts of recognised financial instruments offset in the consolidated statement of financial position	Jumlah bersih/ Net amount	
31 Desember 2024				31 December 2024
Aset keuangan				Financial assets
Piutang usaha	72,344,275	(2,829,119)	69,515,156	Trade receivables
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Utang usaha	15,921,240	(2,829,119)	13,092,121	Trade payables
31 Desember 2023				31 December 2023
Aset keuangan				Financial assets
Piutang usaha	53,055,391	(833,804)	52,221,587	Trade receivables
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Utang usaha	10,495,612	(833,804)	9,661,808	Trade payables

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/105 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. INFORMASI ARUS KAS

30. CASH FLOW INFORMATION

a. Transaksi nonkas

a. Non-cash transactions

Tabel di bawah ini menunjukkan transaksi nonkas Grup selama tahun berjalan sebagai berikut:

The table below shows the Group's non-cash transactions during the years as follows:

	31 Desember/ December 2024	31 Desember/ December 2023	
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:			Non-cash activities:
Pengurangan piutang usaha melalui utang usaha	16,862,603	17,486,501	Decrease of trade receivables from deduction trade payables
Pembayaran dividen melalui pengurangan piutang usaha dari pihak berelasi	7,937,000	5,759,265	Dividend payments through deducting trade receivables from related parties
Perolehan aset tetap melalui utang usaha	165,470	247,465	Additions of property, plant and equipment through to trade payables
Perolehan aset hak guna melalui liabilitas sewa	164,323	2,804,918	Additions of right-of-use assets through lease liabilities
Penambahan piutang lain-lain pihak berelasi atas piutang dividen	160,001	54,327	Additions of other receivables from related parties from dividend receivable
Penambahan aset tetap dari aset tidak lancar lain	42,157	-	Additions of property, plant and equipment from other non-current assets
Selisih dari kombinasi bisnis dengan entitas sepengendali sehubungan dengan pengalihan bisnis pembangkit listrik ke Perusahaan melalui penerbitan saham Perusahaan (Catatan 6)	-	175,974,993	Difference from business combination with entities under common control in connection with the transfer of the power generation business to the Company through the issuance of shares (Note 6)
Pengurangan aset keuangan dari konsesi jasa atas pengakhiran konsesi jasa	-	40,511,862	Decrease of financial assets of service concessions due to termination of service concessions
Perolehan aset tetap dari pengakhiran konsesi jasa	-	31,162,141	Additions of property, plant and equipment from termination of service concessions

PT PLN INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/106 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

30. CASH FLOW INFORMATION (continued)

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

The below tables set out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	Saldo awal/ Beginning balance	Penerimaan/ Proceeds	Pembayaran/ Payments	Perubahan transaksi nonkas/ Non-cash changes	Perubahan mata uang asing/ Changes in foreign exchange rate	Jumlah/ Total	
31 Desember 2024							31 December 2024
Pinjaman dari pemegang saham	1,759,499	1,631,013	(276,592)	-	72,495	3,186,415	Loans from a shareholder
Liabilitas sewa	5,126,206	-	(885,285)	164,326	-	4,405,247	Lease liabilities
31 Desember 2023							31 December 2023
Pinjaman dari pemegang saham	1,412,202	618,262	(272,920)	-	1,955	1,759,499	Loans from a shareholder
Liabilitas sewa	3,005,715	-	(684,427)	2,804,918	-	5,126,206	Lease liabilities

*) Termasuk pengukuran kembali yang timbul dari modifikasi kontrak/Include remeasurement arising from contract modification

31. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen, dan laporan tersebut telah disetujui oleh Dewan Direksi untuk diterbitkan pada 16 Mei 2025.

31. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were responsibilities of the management and the statements were approved by the Board of Directors and authorised for issue on 16 May 2025.

2024

Laporan Tahunan
Annual Report



PLN
Indonesia Power

Kantor Pusat **Head Office**
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta Selatan 12950
Indonesia

+62 21 526 7666

+62 21 5251923, 5252623

kontak-ip@plnindonesiapower.co.id

www.plnindonesiapower.co.id